

Transformasi Bisnis Properti Menuju Masa Depan Jakarta Kota Global

Property Business Transformation
Towards the Future of Jakarta as a Global City



DISCLAIMER

DISCLAIMER

Laporan Tahunan ini memuat pernyataan kondisi keuangan, hasil operasi, proyeksi, rencana, strategi, kebijakan, serta tujuan Perusahaan, yang digolongkan sebagai pernyataan ke depan dalam pelaksanaan perundang-undangan yang berlaku, kecuali hal-hal yang bersifat historis. Pernyataan-pernyataan tersebut memiliki prospek risiko, ketidakpastian, serta dapat mengakibatkan perkembangan aktual secara material berbeda dari yang dilaporkan.

Pernyataan-pernyataan prospektif dalam Laporan Tahunan ini dibuat berdasarkan berbagai asumsi mengenai kondisi terkini dan kondisi mendatang serta lingkungan bisnis dimana Perusahaan menjalankan kegiatan usaha. Pernyataan yang terdapat di Laporan Tahunan ini bukan menjadi jaminan kinerja di masa yang akan datang, mengingat kinerja aktual di masa depan dapat berbeda dengan pernyataan pada Laporan Tahunan ini karena dapat dipengaruhi oleh beberapa faktor di luar kendali Perusahaan.

Laporan tahunan ini memuat kata “Sarana Jaya” dan “Perusahaan” yang didefinisikan sebagai Perumda Pembangunan Sarana Jaya yang menjalankan kegiatan usaha di bidang Properti. Penyebutan satuan mata uang “Rupiah”, “Rp” atau IDR merujuk pada mata uang resmi Republik Indonesia, sedangkan “Dolar AS” atau USD merujuk pada mata uang resmi Amerika Serikat. Semua informasi keuangan disajikan dalam mata uang Rupiah.

This annual report contains statements of financial conditions, operational results, projections, plans, strategies, policies, and objectives of the Company, which are classified as forward-looking statements in implementing applicable laws, except historical things. Such statements have a prospect of risks and uncertainties and may cause actual developments to differ materially from those reported.

Prospective statements in this annual report are prepared based on various assumptions concerning the current and future conditions and the business environment in which the Company runs its business activities. Accordingly, the statements in this annual report do not guarantee future performance, given that the actual future performance can be different from the statements in this annual report because it can be influenced by several factors beyond the Company’s control.

This annual report contains the words “Sarana Jaya” and “the Company,” referred to as Perumda Pembangunan Sarana Jaya, which runs business activities in the property sector. In addition, the word “Rupiah”, “Rp”, or “IDR” refer to the official currency of the Republic of Indonesia. In contrast, the “US Dollar” or “USD” refers to the official currency of the United States. Therefore, all financial information is presented in Rupiah.

Transformasi Bisnis Properti Menuju Masa Depan Jakarta Kota Global

Property Business Transformation
Towards the Future of Jakarta as a Global City

2023

Laporan Tahunan & Keberlanjutan
Annual & Sustainability Report



Tahun 2023 memberikan banyak pembelajaran berharga yang membuat Perumda Sarana Jaya (“Perusahaan”) tumbuh semakin kuat dan tangguh dalam menghadapi berbagai tantangan. Dengan penuh kesabaran dan ketekunan, Perusahaan berhasil mengarungi perjalanan panjang selama 4 (empat) dekade beroperasi sebagai BUMD properti terkemuka di wilayah DKI Jakarta. Kemajuan yang diraih Perusahaan sampai hari ini dan keberhasilan dalam mempertahankan rekam jejak positif tentu tidak diraih secara instan. Proses ini melibatkan pengalaman matang yang sudah teruji dari waktu ke waktu dan kemampuan beradaptasi yang tinggi untuk terus meningkatkan kapasitas internal demi tercapainya tujuan dan aspirasi. Pada tahun 2023, Perusahaan menaruh fokus penuh pada strategi transformasi bisnis properti untuk membawa Jakarta menjadi kota global yang berdaya saing tinggi. Didukung oleh pengelolaan praktik bisnis terbaik dengan penuh hati-hati serta komitmen untuk terus berinovasi dan berkolaborasi, Perusahaan semakin mengukuhkan keberadaannya sebagai perusahaan properti yang memberikan dampak positif bagi masyarakat Jakarta serta berkontribusi lebih besar dalam membangun infrastruktur kota yang berkelanjutan.

The year 2023 provides many valuable lessons that make Perumda Sarana Jaya (“the Company”) grow stronger and more resilient in facing various challenges. With patience and perseverance, the Company has successfully navigated a long journey for four decades, operating as a leading BUMD property in the DKI Jakarta area. The progress achieved by the Company to date and the success in maintaining a positive track record were certainly not achieved instantly. The process involves a mature experience tested over time and high adaptability to improve internal capacity to achieve goals and aspirations continuously. In 2023, the Company is fully focused on its property business transformation strategy to transform Jakarta into a highly competitive global city. Supported by prudent management of best business practices and a commitment to continuous innovation and collaboration, the Company will further strengthen its presence as a property company that positively impacts the people of Jakarta and contributes more to building a sustainable city infrastructure.

PENCAPAIAN PENTING 2023

KEY ACHIEVEMENTS IN 2023

► **Aspek Ekonomi**
Economic Aspects

**Ground Breaking Tower II
Menara Ayasa,
Nuansa Cilangkap**



Pendapatan
Revenue

Miliar Rupiah | Billion Rupiah

2023

Rp **211,9**

33,8% ↑



Efisiensi Beban Usaha
Operating Expense Efficiency

Persen | Percent

2023

4,13 %



**Kontribusi Pembayaran Pajak
kepada Negara**

Tax Payment Contribution to the State
Miliar Rupiah | Billion Rupiah

2023

Rp **45,32**

► **Aspek Lingkungan**
Environmental Aspects

Sarana Jaya senantiasa berupaya untuk turut melestarikan lingkungan melalui upaya penanaman pohon termasuk pohon trembesi, pohon ketapang kencana, pohon bungur, dan pohon arumanis di Jakarta Utara dan Jakarta Timur pada tahun 2023.

Sarana Jaya strives to help preserve the environment through tree planting efforts, including Trembesi, Ketapang Kencana, Bungur, and Arumanis trees in North Jakarta and East Jakarta in 2023.



► **Aspek Sosial**
Social Aspects



Beberapa kontribusi Sarana Jaya kepada masyarakat di sekitar di tahun 2023 adalah membangun PAUD SPS Sanusa, di Menara Samawa Nusansa Pondok Kelapa yang sejalan dengan Tujuan Pembangunan Berkelanjutan No. 4 Pendidikan Berkualitas, dan dukungan pengentasan stunting pada anak dengan skema tambahan di Jakarta Timur dan Jakarta Pusat yang sejalan dengan Tujuan Pembangunan Berkelanjutan No. 3 Kehidupan Sehat dan Sejahtera.

Some of Sarana Jaya's contributions to the surrounding community in 2023 are building SPS Sanusa PAUD at the Menara Samawa Nusansa Pondok Kelapa, which is in line with Sustainable Development Goal no. 4, Quality Education, and supporting the reduction of stunting in children with additional schemes in East Jakarta and Central Jakarta, which is in line with Sustainable Development Goal no. 3, Good Health and Well-Being.



DAFTAR ISI

TABLE OF CONTENT

Disclaimer	2
-------------------	----------

Disclaimer

Pencapaian Penting 2023	4
--------------------------------	----------

Key Achievements in 2023

Daftar Isi	6
-------------------	----------

Table of Content

01

Kilas Kinerja

Performance Highlights

Ikhtisar Kinerja Aspek Keberlanjutan	12
---	-----------

Sustainability Aspect Performance Highlights

Informasi Saham	14
------------------------	-----------

Stock Information

Ikhtisar Efek-Efek Lainnya	14
-----------------------------------	-----------

Summary of Other Securities

Aksi Korporasi terkait Permodalan	14
--	-----------

Capital-Related Corporate Actions

Peristiwa Penting	17
--------------------------	-----------

Significant Events

Penghargaan dan Sertifikasi	24
------------------------------------	-----------

Awards and Certifications

02

Laporan Manajemen

Management Report

Laporan Dewan Pengawas	28
-------------------------------	-----------

Supervisory Board's Report

Laporan Direksi	42
------------------------	-----------

Board of Directors' Report

Surat Pernyataan Dewan Pengawas dan Direksi	57
--	-----------

Statement of Supervisory Board and Board of Directors on the Responsibility for the 2023 Annual Report and Laporan Keberlanjutan 2023 Perumda Pembangunan Sarana Jaya

Statement of Supervisory Board and Board of Directors on the Responsibility for the 2023 Annual Report and Sustainability Report of Perumda Pembangunan Sarana Jaya

03

Profil Perusahaan

Company Profile

Identitas Perusahaan	60
-----------------------------	-----------

Corporate Identity

Riwayat Singkat Sarana Jaya	61
------------------------------------	-----------

Brief History of Sarana Jaya

Perubahan Nama	63
-----------------------	-----------

Change of Name

Tonggak Sejarah	64
------------------------	-----------

Milestones

Visi dan Misi	66
----------------------	-----------

Vision and Mission

Bidang Usaha	68
---------------------	-----------

Business Line

Milestones Pengembangan Alat Produksi	70
--	-----------

Production Asset Development Milestones

Wilayah Bisnis	72
-----------------------	-----------

Business Areas

Struktur Organisasi	74
----------------------------	-----------

Organizational Structure

Keanggotaan Organisasi dan Asosiasi Industri	78
---	-----------

Memberships in Organizations and Industrial Associations

Perubahan Komposisi Direksi	79
------------------------------------	-----------

Changes in the Board of Directors Composition

Profil Direksi	81
-----------------------	-----------

Board of Directors' Profile

Perubahan Komposisi Dewan Pengawas	84
---	-----------

Changes in the Supervisory Board Composition

Profil Dewan Pengawas	86
------------------------------	-----------

Supervisory Board Profile

Profil Sumber Daya Manusia	88
-----------------------------------	-----------

Human Resources Profile

Komposisi Pemegang Saham	96
---------------------------------	-----------

Shareholders Composition

Entitas Anak	97
---------------------	-----------

Subsidiary

Entitas Asosiasi	101
-------------------------	------------

Associate Entities

Informasi tentang Kronologis Penerbitan dan Pencatatan Saham	102
---	------------

Information on the Chronology of Issuance and Listing of Shares

Informasi tentang Kronologis Penerbitan dan Pencatatan Efek Lainnya	102
--	------------

Information on the Chronology of Issuance and Listing of Other Securities

Lembaga dan Profesi Penunjang Perusahaan	103
---	------------

Institutions and Professionals Supporting the Company

Penghargaan Tahun 2023	105
-------------------------------	------------

Awards in 2023

Sertifikasi Tahun 2023	106
-------------------------------	------------

Certifications in 2023

Skala Usaha Perusahaan	107
-------------------------------	------------

Business Scale

Rantai Pasokan Perusahaan	108
----------------------------------	------------

Supply Chain

Perubahan Signifikan Tahun 2023	109
--	------------

Significant Changes in 2023

04

Analisis dan Pembahasan Manajemen

Management Discussion and Analysis

Perkembangan Makroekonomi Global dan Nasional	112
--	------------

National and Global Macroeconomic Development

Tinjauan Industri Properti	114
-----------------------------------	------------

Property Industry Review

Tinjauan Operasional Per Segmen Usaha	115
--	------------

Operational Review Per Business Segment

Alat Produksi (Pertanahan, Hunian, Properti dan Infrastruktur) Production Assets (Land-Banking, Housing, Property and Infrastructure)	117	Struktur Modal dan Kebijakan Manajemen Atas Struktur Modal Capital Structure and Management Policy on Capital Structure	142	Informasi Material Mengenai Investasi, Ekspansi, Divestasi, Penggabungan/Peleburan Usaha, Akuisisi, dan Restrukturisasi Utang/Modal Material Information Regarding Investment, Expansion, Divestment, Merger/Consolidation of Businesses, Acquisitions, and Debt/Capital Restructuring	153
Proyek yang sedang Berjalan dan akan Dibangun Ongoing and Future Construction Projects	126	Ikatan Material Investasi Barang Modal Material Commitment for Capital Goods Investment	144	Perubahan Kebijakan Akuntansi Changes in Accounting Policy	154
Proyek Penugasan Assignment Projects	129	Realisasi Investasi atau Belanja Barang Modal Tahun 2023 Realization of Investments or Capital Expenditure in 2023	145	Informasi Kelangsungan Usaha Information on Business Continuity	156
Penyelenggaraan Fasilitas Pengolahan Sampah Antara di Dalam Kota Implementation of Intermediate Garbage Treatment Facility in The City	131	Perbandingan Antara Target & Realisasi Tahun 2023 serta Proyeksi 2024 Comparison of 2023 Targets with the Realization and 2024 Projections	146		
Proyek-Proyek Baru New Projects	131	Informasi dan Fakta Material yang Terjadi Setelah Tanggal Laporan Akuntan Information and Material Facts Subsequent to The Date of Accountant Report	147		
Proyek-Proyek yang akan Datang Future Projects	132	Prospek Usaha Business Outlook	148		
Tinjauan Keuangan Financial Review	133	Aspek Pemasaran Marketing Aspect	149		
Laporan Posisi Keuangan Konsolidasian Consolidated Statements of Financial Position	133	Kebijakan Dividen Dividend Policy	151		
Laporan Laba (Rugi) dan Penghasilan Komprehensif Lain Konsolidasian Consolidated Statement of Profit or Loss and Other Comprehensive Income	136	Realisasi Penggunaan Dana Hasil Penawaran Umum Use of Proceeds From Public Offering	151		
Laporan Arus Kas Konsolidasian Consolidated Statement of Cash Flows	138	Transaksi yang Mengandung Benturan Kepentingan dan Transaksi Afiliasi dengan Pihak-Pihak Berelasi Transactions Containing Conflict of Interest and Transactions with Related Parties	152		
Kemampuan Membayar Utang Solvency	139	Perubahan Peraturan Perundang-Undangan yang Berpengaruh Signifikan terhadap Perusahaan Changes in Laws and Regulations with Significant Impacts to The Company	153		
Tingkat Kolektibilitas Piutang Receivables Collectability Rate	141				

05 Tata Kelola Perusahaan

Corporate Governance

Komitmen Penerapan GCG Commitment to GCG Implementation	160
Prinsip-Prinsip GCG GCG Principles	161
Dasar Penerapan Tata Kelola Perusahaan Basis of Corporate Governance Implementation	164
Perkembangan Implementasi GCG di Sarana Jaya Development of GCG Implementation in Sarana Jaya	165
Asesmen GCG GCG Assessment	167
Struktur dan Mekanisme Tata Kelola Perusahaan Corporate Governance Structure and Mechanism	179

KPM KPM	180	Manajemen Risiko Risk Management	252	Proses Governansi Terkait Isu Teknologi Informasi Governance Process Related to Information Technology Issues	273
Direksi Board of Directors	194	Perkara Hukum Legal Cases	256	Kebijakan Tentang Perdagangan Orang dalam (Insider Trading) dan Transaksi Mandiri yang Bersifat Kekerasan (Abusive Self-Dealing) Policies on Insider Trading and Abusive Self-Dealing	273
Dewan Pengawas Supervisory Board	202	Sanksi Administratif terhadap Perusahaan, Anak Perusahaan, Dewan Pengawas dan Direksi Administrative Sanctions to the Company, Subsidiary, Supervisory Board, and Board of Directors	260	Informasi Pemberian Dana untuk Kegiatan Politik Information on Funding for Political Activities	273
Penilaian Kinerja Direksi dan Dewan Pengawas Board of Directors and Supervisory Board Performance Assessment	214	Kode Etik Code of Conduct	260	Kebijakan Terkait Pengunduran Diri Direksi dan Dewan Pengawas Apabila Terlibat dalam Kejahatan Keuangan Policy on the Resignation of the Board of Directors and Supervisory Board if Involved in Financial Crimes	273
Kebijakan Keberagaman Dewan Pengawas dan Direksi Diversity Policy for the Supervisory Board and Board of Directors	216	Kebijakan Pemberian Kompensasi Jangka Panjang Berbasis Kinerja Long Term Performance-Based Compensation Policy	263	Transparansi Praktik Bad Governance Transparency on Bad Governance Practices	274
Hubungan Afiliasi Dewan Pengawas dan Direksi Affiliations Between the Supervisory Board and Board of Directors	217	Kepemilikan Saham Anggota Direksi dan Anggota Dewan Pengawas Board of Directors and Supervisory Board Members Stock Ownership	263	Kesesuaian Penerapan Corporate Governance Sesuai dengan Asean Corporate Governance Scorecard Corporate Governance Implementation Conformity with Asean Corporate Governance Scorecard	275
Nominasi dan Remunerasi Direksi dan Dewan Pengawas Nomination and Remuneration for the Board of Directors and Supervisory Board	218	Sistem Pelaporan Pelanggaran Whistleblowing System	264	Penerapan atas Pedoman Tata Kelola Perusahaan Sesuai SEOJK No. 16/SEOJK.04/2021 Corporate Governance Guidelines Implementation Per SEOJK No. 16/SEOJK.04/2021	300
Organ Pendukung Dewan Pengawas Supervisory Board Supporting Organs	220	Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara Public Official Asset Declaration	267		
Komite Audit Audit Committee	221	Kebijakan Anti Korupsi Anti-Corruption Policy	268		
Komite Remunerasi dan Nominasi Remuneration and Nomination Committee	227	Kebijakan Komunikasi dengan Pemegang Saham atau Investor Communication Policy with Shareholders or Investors	270		
Komite Pemantau Risiko Risk Monitoring Committee	233	Upaya Pemenuhan Hak-Hak Kreditur Efforts to Fulfill Creditor Rights	270		
Sekretaris Perusahaan Corporate Secretary	238	Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa dan Seleksi Pemasok Goods/Service Procurement Policy and Supplier Selection	271		
Satuan Pengawas Intern (SPI) Internal Audit Unit (IAU)	242				
Sistem Pengendalian Internal Internal Control System	249				

06 Laporan Keberlanjutan

Sustainability Report

Strategi dan Komitmen Environmental, Social and Governance (ESG)	304
Environmental, Social and Governance (ESG) Strategy and Commitment	
Tentang Laporan Keberlanjutan	313
About Sustainability Reports	
Ikhtisar Kinerja Keberlanjutan	319
Sustainability Performance Highlights	
Kinerja Aspek Lingkungan	320
Environmental Performance Achievement	
Kinerja Aspek Sosial	321
Social Performance Achievement	
Kinerja Aspek Tata Kelola	321
Governance Performance Achievement	
Prestasi dan Peristiwa Penting Keberlanjutan Tahun 2023	322
2023 Sustainability Achievements and Event Highlights	
Sambutan Direktur Utama	327
Message from the President Director	
Tata Kelola Keberlanjutan	333
Sustainability Governance	
Mengelola Risiko Keberlanjutan	344
Managing Sustainability Risk	
Whistle Blowing System	347
Whistleblowing System	
Mengelola Kinerja dan Dampak Ekonomi	348
Managing Economic Performance and Impact	

Perbandingan Target dan Realisasi Kinerja Ekonomi	350
Comparison of Economic Performance Target and Realization	
Mengoptimalkan Perolehan dan Pendistribusian Nilai Ekonomi	351
Optimizing Economic Value Acquisition and Distribution	
Mengoptimalkan Dampak Ekonomi Tidak Langsung	353
Optimizing Indirect Economic Impacts	
Memberikan Layanan Terbaik Kepada Pelanggan	354
Providing The Best Customer Service	
Mengelola Kinerja dan Dampak Lingkungan	357
Managing Environmental Performance and Impact	
Mengelola Kinerja dan Dampak Sosial	369
Managing Social Performance and Impact	
Internalisasi Budaya Keberlanjutan	371
Internalization of Sustainability Culture	
Membangun Budaya Inklusif Melalui Penerapan Prinsip Keberagaman dan Kesetaraan	372
Establishing an Inclusive Culture Through the Application of Diversity and Equality Principles	
Optimalisasi Potensi Pegawai	381
Optimizing Employee Potentials	
Penanganan Pengaduan Pegawai	387
Employee Complaint Handling	
Membangun Budaya Keselamatan dan Kesehatan Kerja	387
Building Occupational Health and Safety Culture	

Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat	390
Improving Community Welfare	
Verifikasi Tertulis Dari Pihak Independen	405
Written Verification from an Independent Party	
Tanggapan Terhadap Umpan Balik Laporan Tahun Sebelumnya	405
Response to the Previous Year's Report Feedback	
Lembar Umpan Balik	406
Feedback Sheet	
Referensi Silang Kriteria ARA 2022	407
Cross Reference to the 2022 ARA Criteria	
Indeks POJK 51/ POJK.03/2017	433
POJK 51/POJK.03/2017 Index	
Indeks Isi GRI	436
GRI Content Index - With Reference	

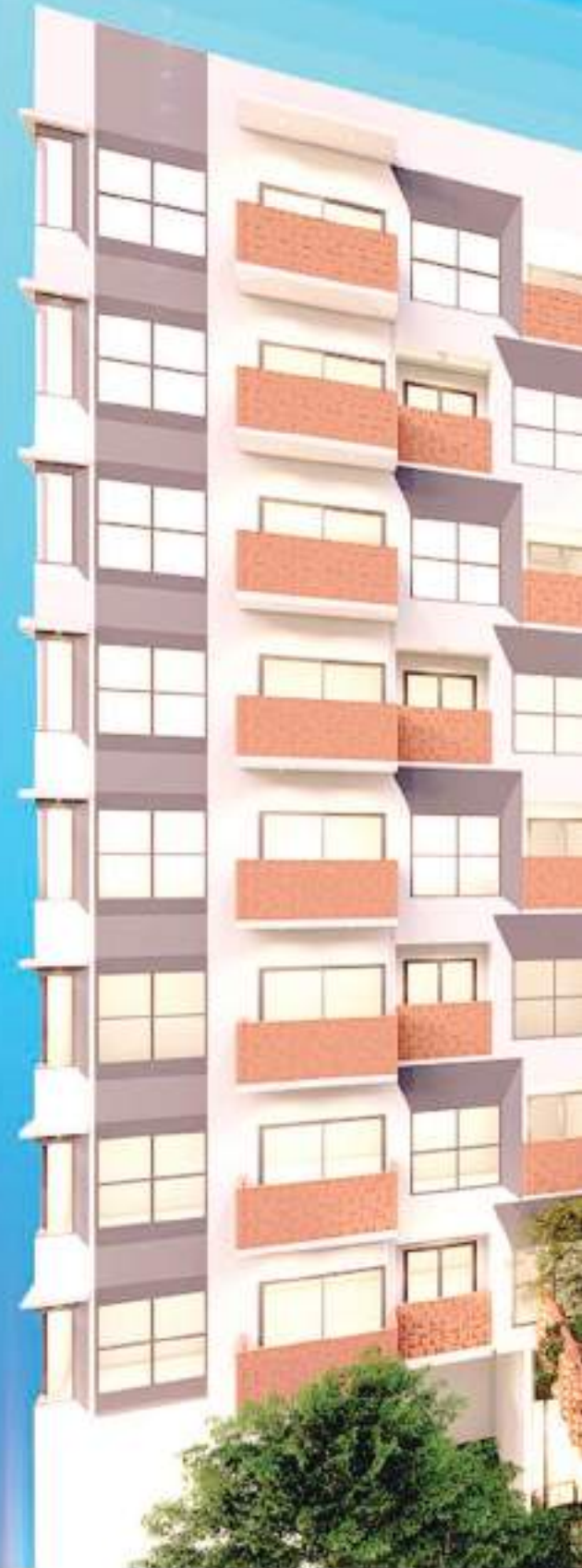
07 Laporan Keuangan

Financial Report

01

Kilas
Kinerja

Performance Highlights





IKHTISAR KINERJA ASPEK KEBERLANJUTAN

SUSTAINABILITY ASPECT PERFORMANCE HIGHLIGHTS

Laporan Laba Rugi dan Penghasilan Komprehensif Lain Konsolidasian

Consolidated Statement of Profit (Loss) and Other Comprehensive Income

(dalam Rp Miliar/in Rp Billion)

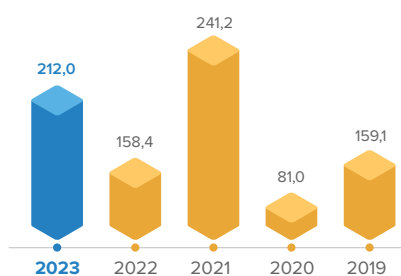
Uraian	2023	2022	2021*	2020	2019	Description
Pendapatan	212,0	158,4	241,2	81,0	159,1	Revenues
Beban Pokok Pendapatan	(184,8)	(151,8)	(98,8)	(57,1)	(51,3)	Cost of Revenues
Laba Kotor	27,1	6,6	142,3	23,9	107,8	Gross Profit
Beban Usaha (Beban Pemasaran dan Beban Administrasi & Umum)	(111,4)	(116,2)	(83,9)	(51,3)	(62,7)	Operating Expenses (Marketing Expenses and Administration & General Expenses)
Rugi Usaha	(84,2)	(109,7)	58,4	(27,5)	45,1	Operating Loss
(Beban)/Pendapatan Lain-Lain	(12,1)	169,9	(272,1)	32,5	24,7	Other Income (Expense)
(Rugi)/Laba Sebelum Pajak Penghasilan	(96,4)	60,3	(213,7)	5,1	69,8	Profit (Loss) Before Income Tax
(Beban)/Manfaat Pajak Penghasilan	(2,5)	18,7	(3,4)	(2,9)	(8,6)	Income Tax
(Rugi)/Laba Tahun Berjalan	(98,9)	79,0	(217,1)	2,2	61,2	Profit (Loss) for the Year
Penghasilan/(Beban) Komprehensif Lain Tahun Berjalan	3,0	(0,4)	0,3	3,7	2,3	Other Comprehensive Income (Loss)
Jumlah (Rugi)/Laba Komprehensif Tahun Berjalan	(95,9)	78,7	(216,8)	5,9	58,8	Total Comprehensive Income (Loss) for the Year
(Rugi)/Laba Tahun Berjalan yang dapat Diatribusikan Kepada:						Profit (Loss) Attributable to:
Pemilik Entitas Induk	(98,5)	79,3	(216,9)	2,2	61,2	Owners of the Parent
Kepentingan Non-Pengendali	(0,4)	(0,3)	(0,2)	(0,3)	(0,2)	Non-Controlling Interest
	(98,9)	79,0	(217,1)	2,1	61,2	
(Rugi)/Laba Komprehensif Lain Tahun Berjalan yang dapat Diatribusikan Kepada:						Total comprehensive income (loss) attributable to:
Pemilik Entitas Induk	(95,5)	79,0	(216,6)	5,9	-	Owners of the Parent
Kepentingan Non-Pengendali	(0,4)	(0,3)	(0,2)	(0,02)	-	Non-Controlling Interest
	(95,9)	78,7	(216,8)	5,9	58,8	

*Disajikan Kembali
Restated

Pendapatan Usaha

Revenues

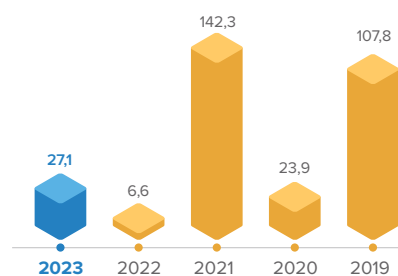
Rp Miliar | Rp Billion



Laba Kotor

Gross Profit

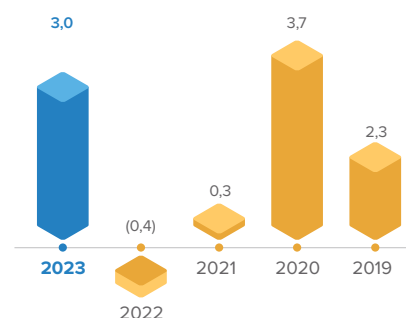
Rp Miliar | Rp Billion



Jumlah Laba (Rugi) Komprehensif Tahun Berjalan

Total Comprehensive Income (Loss) for the Year

Rp Miliar | Rp Billion



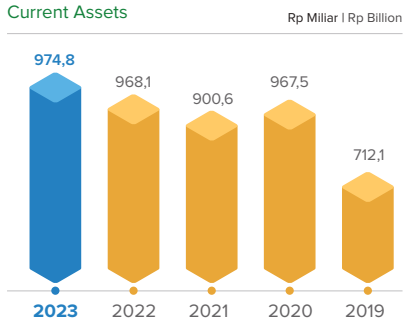
Laporan Posisi Keuangan Konsolidasian Statement of Financial Position

(dalam Rp Miliar/in Rp Billion)

Uraian	2023	2022	2021*	2020*	2019	Description
Aset Lancar	974,8	968,1	900,6	967,5	712,1	Current Assets
Aset Tidak Lancar	5.310,3	5.427,3	5.276,3	5.156,7	4.004,3	Non-Current Assets
Jumlah Aset	6.285,0	6.395,4	6.176,9	6.124,3	4.716,5	Total Assets
Liabilitas Jangka Pendek	270,2	607,1	602,2	486,5	134,7	Current Liabilities
Liabilitas Jangka Panjang	459,2	154,1	158,9	151,5	166,9	Non-Current Liabilities
Jumlah Liabilitas	729,4	761,2	761,1	638,1	302,4	Total Liabilities
Jumlah Ekuitas	5.555,6	5.634,1	5.415,7	5.486,1	4.414,9	Total Equity
Jumlah Liabilitas & Ekuitas	6.285,0	6.395,4	6.176,9	6.124,3	4.716,5	Total Liability & Equity

*Disajikan Kembali
Restated

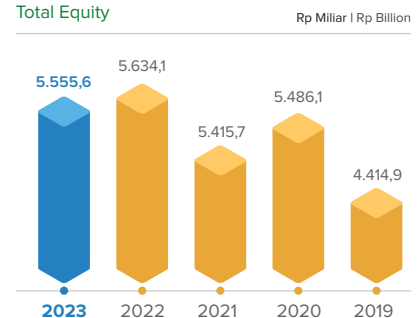
Aset Lancar Current Assets



Jumlah Liabilitas Total Liabilities



Jumlah Ekuitas Total Equity



Rasio Keuangan Financial Ratios

Uraian	2023	2022	2021*	2020*	2019*	Description
Laba Bersih Terhadap Aset	-	1,23%	0%	-	0,21%	Return on Assets (ROA) ratio
Laba Bersih Terhadap Ekuitas	-	1,40%	-	-	0,24%	Return on Equity (ROE) ratio
Laba Bersih Terhadap Pendapatan	-	49,84%	-	-	9,20%	Net Profit Margin
Rasio Lancar	283,6%	139,00%	186,00%	186,00%	417,00%	Current Ratio
Rasio Utang Terhadap Ekuitas	13,13%	13,51%	14,05%	14,05%	11,63%	Debt to Equity Ratio (DER)
Rasio Utang Terhadap Jumlah Aset	11,61%	11,90%	12,32%	12,32%	10,42%	Debt to Assets Ratio (DAR)

*Disajikan Kembali
Restated

INFORMASI SAHAM

STOCK INFORMATION

Sarana Jaya merupakan perusahaan tertutup berstatus Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) yang modalnya berasal dari kekayaan Pemerintah Daerah yang dipisahkan. Hingga akhir tahun 2023, Sarana Jaya tidak melakukan perdagangan saham di Bursa Efek Indonesia (BEI) atau bursa efek manapun, sehingga tidak ada informasi terkait dengan jumlah saham yang beredar, kapitalisasi pasar, harga saham tertinggi, harga saham terendah dan harga saham penutupan serta volume saham yang diperdagangkan.

Sarana Jaya is a closed company with a Region-Owned Enterprise (BUMD) status whose capital comes from separated Regional Government assets. Until the end of 2023, Sarana Jaya did not trade shares on the Indonesia Stock Exchange (IDX) or any stock exchange; therefore, there is no information related to the number of shares outstanding, market capitalization, highest share price, lowest share price, closing share price, and volume of shares traded.

IKHTISAR EFEK-EFEK LAINNYA

SUMMARY OF OTHER SECURITIES

Sampai dengan akhir 2023, Sarana Jaya belum pernah menerbitkan efek-efek berupa surat utang atau sejenisnya baik di Bursa Efek Indonesia (BEI) atau bursa efek manapun. Dengan demikian tidak ada informasi yang dapat diungkapkan sehubungan dengan hal ini.

Until the end of 2023, Sarana Jaya has never issued securities in the form of debt securities or the like on the Indonesia Stock Exchange (IDX) or any stock exchange. Thus, no information can be disclosed in connection with this matter.

AKSI KORPORASI TERKAIT PERMODALAN

CAPITAL-RELATED CORPORATE ACTIONS

Modal Perusahaan adalah merupakan kekayaan daerah yang dipisahkan. Modal dasar Perusahaan pada saat pendirian (20 Maret 1982) adalah sebesar Rp3.286.838.993. Pada tanggal 5 November 1990 dikeluarkan Peraturan Daerah (PERDA) No. 6 Tahun 1990, mengenai perubahan pertama PERDA No. 2 tahun 1982 dan disahkan oleh Menteri Dalam Negeri No. 539-31-129, tanggal 7 Februari 1991.

Company capital is separate regional wealth. The authorized capital of the Company at the time of establishment (March 20, 1982) was Rp3,286,838,993. On November 5, 1990, Regional Regulation (Perda) No. 6 of 1990 was issued regarding the first amendment to Perda No. 2 of 1982 and ratified by Home Minister No. 539-31-129, dated February 7, 1991.

Dalam Perda No. 6 Tahun 1990 tersebut ditetapkan modal dasar Perusahaan sebesar Rp200.000.000.000. Modal disetor sampai dengan 31 Desember 2013 sebesar Rp196.002.770.836 dengan rincian sebagai berikut:

Perda No. 6 of 1990 stipulated that the Company's authorized capital was Rp200,000,000,000. Paid-up capital per December 31, 2013, amounted to Rp196,002,770,836 with the following details:

Uraian		Description
Modal sesuai Perda No. 2 Tahun 1982	Rp3.286.838.993	Capital, according to Regional Regulation No. 2 of 1982
Sampai dengan 1990 (Perda No. 6 Tahun 1990)	Rp43.931.726.243	Until 1990 (Regional Regulation/Perda No. 6 of 1990)
Sub Jumlah	Rp47.218.565.236	Sub Total
Setelah Perda No. 6 Tahun 1990 ada tambahan PMP dari Privilage Pemda DKI atas Pembebasan tanah di segitiga senen. Sesuai dengan Keputusan Gubernur DKI Jakarta No.1333 Tahun 1992 dan Surat Gubernur No. 1598/-1.711 tanggal 23 Mei 1994	Rp18.754.183.000	After Regional Regulation/Perda No. 6 of 1990, there was an additional Government Investment (PMP) from the Privilege of the DKI Regional Government for land acquisition in the Segitiga Senen. According to the Decree of the Governor of DKI Jakarta No.1333 of 1992 and the Governor's Letter No. 1598/-1.711 dated May 23, 1994
Sub Jumlah	Rp65.972.748.236	Sub Total
Kekurangan Pencatatan Aset Tetap Tanah Rawa Bilal	Rp30.022.600	Deficiencies in the Recording of Fixed Assets of Rawa Bilal Land
Sub Jumlah	Rp66.002.770.836	Sub Total
Pemenuhan Modal Disetor (Keputusan Gub. DKI Jakarta No. 1914 Tahun 2013)	Rp130.000.000.000	Fulfillment of Paid-in Capital (Decree of Governor of DKI Jakarta No. 1914 of 2013)
Jumlah Modal Disetor per 31 Desember 2013	Rp196.002.770.836	Total Paid-in Capital as of December 31, 2013

Dalam Perda No. 8 Tahun 2014 tanggal 14 Juli 2014 tersebut ditetapkan modal dasar Perusahaan menjadi sebesar Rp2.000.000.000.000.

In Perda No. 8 of 2014, dated July 14, 2014, it was stipulated that the Company's authorized capital amounted to Rp2,000,000,000,000.

Berdasarkan Perda No. 11 Tahun 2018 tanggal 28 Desember 2018 tentang Perubahan ketiga atas Peraturan Daerah No. 2 Tahun 1982 tentang Perusahaan Daerah Pembangunan Sarana Jaya Daerah Khusus Ibukota Jakarta, ditetapkan bahwa Perusahaan Daerah Khusus Ibukota Jakarta beralih menjadi Perusahaan Umum Daerah Pembangunan Sarana Jaya dan penetapan modal dasar Perusahaan sebelumnya sebesar Rp2.000.000.000.000 (dua triliun rupiah) menjadi Rp10.000.000.000.000 (sepuluh triliun rupiah).

Based on Perda No. 11 of 2018, dated December 28, 2018, on the Third Amendment to Regional Regulation No. 2 of 1982 on Sarana Jaya Regional Development Company of Jakarta Special Capital Region, it is stipulated that the Jakarta Special Capital Region Regional Company is transformed into Sarana Jaya Regional Development Public Company with the determination of the Company's authorized capital previously amounting to Rp2,000,000,000,000 (two trillion rupiah) to Rp10,000,000,000,000 (ten trillion rupiah).

Modal disetor sampai dengan 31 Desember 2018 sebesar Rp2.000.000.000.000 dengan rincian sebagai berikut:

Paid-up capital per December 31, 2018, amounted to Rp2,000,000,000,000 with the following details:

Uraian		Description
Jumlah Modal Disetor per 31 Desember 2013	Rp196.002.770.836	Total Paid-In Capital per December 31, 2013
Pemenuhan Modal Disetor Keputusan Gub. DKI Jakarta No. 1189 Tahun 2014	Rp200.000.000.000	Fulfilment of Paid-In Capital per DKI Jakarta Governor Decree No. 1189 of 2014
Pemenuhan Modal Disetor Keputusan Gub. DKI Jakarta No. 1879 Tahun 2014	Rp543.000.000.000	Fulfilment of Paid-In Capital per DKI Jakarta Governor Decree No. 1879 of 2014
Pemenuhan Modal Disetor Keputusan Gub. DKI Jakarta No. 2312 Tahun 2017	Rp125.000.000.000	Fulfilment of Paid-In Capital per DKI Jakarta Governor Decree No. 2312 of 2017
Pemenuhan Modal Disetor Keputusan Gub. DKI Jakarta No. 1851 Tahun 2018	Rp935.997.229.164	Fulfilment of Paid-In Capital per DKI Jakarta Governor Decree No. 1189 of 2014
Jumlah Modal Disetor Per 31 Desember 2018	Rp2.000.000.000.000	Total Paid-In Capital per December 31, 2018

Modal disetor sampai dengan 31 Desember 2019 sebesar Rp4.250.000.000.000 dengan rincian sebagai berikut:

Paid-up Capital per December 31, 2019, amounted to Rp4,250,000,000,000 with the following details:

Uraian		Description
Jumlah Modal Disetor Per 31 Desember 2018	Rp2.000.000.000.000	Total Paid-In Capital per December 31, 2018
Pemenuhan Modal Disetor Keputusan Gub. DKI Jakarta No. 450 Tahun 2019	Rp1.450.000.000.000	Fulfilment of Paid-In Capital per DKI Jakarta Governor Decree No. 450 of 2019
Jumlah Modal Disetor Per 31 Desember 2019	Rp4.250.000.000.000	Total Paid-In Capital per December 31, 2019

Modal disetor sampai dengan 31 Desember 2020 sebesar Rp5.200.000.000.000 dengan rincian sebagai berikut:

Paid-up Capital per December 31, 2019, amounted to Rp5,200,000,000,000 with the following details:

Uraian		Description
Jumlah Modal Disetor Per 31 Desember 2019	Rp4.250.000.000.000	Total Paid-In Capital per December 31, 2019
Pemenuhan Modal Disetor Keputusan Gub. DKI Jakarta No. 1060 tahun 2020	Rp50.000.000.000	ment of Paid-In Capital per DKI Jakarta Governor Decree No. 1060 of 2020
Pemenuhan Modal Disetor Keputusan Gub. DKI Jakarta No. 1262 tahun 2020	Rp900.000.000.000	ment of Paid-In Capital per DKI Jakarta Governor Decree No. 1262 of 2020
Jumlah Modal Disetor Per 31 Desember 2020	Rp5.200.000.000.000	Total Paid-In Capital per December 31, 2020

Modal Disetor sampai dengan 31 Desember 2021 sebesar Rp5.375.000.000.000 dengan rincian sebagai berikut:

Paid-up Capital per December 31, 2021, amounted to Rp5,375,000,000,000 with the following details:

Uraian		Description
Jumlah Modal Disetor Per 31 Desember 2020	Rp5.200.000.000.000	Total Paid-In Capital per December 31, 2020
Perjanjian Investasi Tahun 2021 No. 2186/-071.242.1511/-072.1	Rp175.000.000.000	Investment Agreement of 2021 No. 2186/-071.242.1511/-072.1
Jumlah Modal Disetor Per 31 Desember 2021	Rp5.375.000.000.000	Total Paid-In Capital per December 31, 2021

Bahwa pada tanggal 18 November 2022 Perusahaan menerima setoran Modal sesuai dengan Perjanjian Investasi No. 535/-071.241, 776/-072.26 sebesar Rp250,000,000,000,- sehingga Modal Disetor sampai dengan 31 Desember 2022 sebesar Rp5.625.000.000.000.

On November 18, 2022, the Company received paid-up capital under Investment Agreement No. 535/-071.241, 776/-072.26 amounting to Rp250,000,000,000. Therefore, the Paid-up Capital per December 31, 2022, amounted to Rp5,625,000,000,000.

Uraian		Description
Jumlah Modal per 31 Desember 2021	Rp5.375.000.000.000	Total Paid-In Capital per December 31, 2021
Perjanjian Investasi Tahun 2022 No. 535/-071.241, 776/-072.26	Rp250.000.000.000	Investment Agreement of 2021 No. 535/-071.241, 776/-072.26
Jumlah Modal Disetor Per 31 Desember 2022	Rp5.625.000.000.000	Total Paid-In Capital per December 31, 2022

Modal disetor sampai dengan 31 Desember 2023 tetap sebesar Rp5.625.000.000.000 dengan rincian sebagai berikut:

Paid-up Capital per December 31, 2023, still amounted to Rp5,625,000,000,000 with the following details:

Uraian		Description
Jumlah Modal per 31 Desember 2021	Rp5.375.000.000.000	Total Paid-In Capital per December 31, 2021
Perjanjian Investasi Tahun 2022 No. 535/-071.241, 776/-072.26	Rp250.000.000.000	Investment Agreement of 2021 No. 535/-071.241, 776/-072.26
Jumlah Modal Disetor Per 31 Desember 2023 dan 2022	Rp5.625.000.000.000	Total Paid-In Capital per December 31, 2023 and 2022

PERISTIWA PENTING

SIGNIFICANT EVENTS

► 16 Februari 2023 | February 16, 2023



Tingkatkan Peran Aktif dalam Pembangunan Berkelanjutan, Sarana Jaya Menerima Kunjungan Indonesia Global Compact Network

Increasing Active Role in Sustainable Development, Sarana Jaya Welcomes Visit from Indonesia Global Compact Network

Indonesia Global Compact Network (IGCN) merupakan jaringan lokal dari United Nations Global Compact yang didedikasikan untuk mempromosikan prinsip-prinsip pembangunan berkelanjutan yang dicanangkan oleh Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) di sektor bisnis. Jakarta. Dalam pertemuan dengan IGCN, Sarana Jaya memperkenalkan berbagai program yang telah dilaksanakan guna mendorong pembangunan berkelanjutan di Jakarta, antara lain program pengembangan hunian terjangkau yang terintegrasi, fasilitas pengolahan sampah, serta penerapan kesepuluh prinsip UNGC yang sejalan dengan visi misi Perusahaan. IGCN memberikan apresiasi atas upaya Sarana Jaya dalam mewujudkan prinsip-prinsip pembangunan berkelanjutan. Kedua pihak sepakat untuk meningkatkan kolaborasi guna mencapai tujuan bersama dalam upaya mengurangi dampak negatif pembangunan pada lingkungan serta meningkatkan kualitas hidup masyarakat Jakarta.

Indonesia Global Compact Network (IGCN) is a local network of the United Nations Global Compact dedicated to promoting the sustainable development principles proclaimed by the United Nations (UN) in the business sector. In a meeting with IGCN, Sarana Jaya introduced various programs that have been implemented to encourage sustainable development in Jakarta, including an integrated, affordable housing development program, waste processing facilities, and the implementation of the ten UNGC principles, which are in line with the Company's vision and mission. IGCN appreciates Sarana Jaya's efforts to realize sustainable development principles. Both parties agreed to increase collaboration to achieve common goals, reduce the negative impact of development on the environment, and improve the quality of life of the Jakartan people.

► 23 Februari 2023 | February 23, 2023



Jalin Kerja Sama, Sarana Jaya dan Waskita Karya Realty Lakukan Penandatanganan Nota Kesepahaman Tentang Pengembangan Lahan

Establishing Cooperation, Sarana Jaya and Waskita Karya Realty Sign a Memorandum of Understanding on Land Development

Sarana Jaya melakukan penandatanganan nota kesepahaman dengan PT Waskita Karya Realty untuk mengembangkan lahan milik Sarana Jaya. Perjanjian kerja sama tersebut merupakan tindak lanjut dari surat Sarana Jaya perihal penyampaian potensi kerja sama terkait pengembangan lahan milik Sarana Jaya.

Sarana Jaya signed a memorandum of understanding with PT Waskita Karya Realty to develop Sarana Jaya's land. The cooperation agreement is a follow-up to Sarana Jaya's letter on the delivery of potential cooperation related to developing Sarana Jaya's land.

► **25 Mei 2023** | May 25, 2023



Peletakan Batu Pertama Menara Ayasa, Hunian Terjangkau di Jakarta untuk Warga DKI Jakarta

Groundbreaking for Menara Ayasa, Affordable Housing in Jakarta for DKI Jakarta Residents

Acara dihadiri langsung oleh Sekretaris Daerah DKI Jakarta, Plt. Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Provinsi DKI Jakarta, Kepala Badan Pembinaan Badan Usaha Milik Daerah DKI Jakarta, Walikota Jakarta Timur, dan tamu undangan pejabat di lingkungan Pemerintahan Provinsi DKI Jakarta serta seluruh jajaran Direksi Sarana Jaya.

The event was attended by the DKI Jakarta Regional Secretary, Acting DKI Jakarta Public Housing and Settlement Areas Agency, Development Agency Head of DKI Jakarta Region-Owned Enterprises, East Jakarta Mayor, officials in the DKI Jakarta Provincial Government, and Sarana Jaya Board of Directors.

Setelah berhasil meresmikan 1.348 unit hunian di Jakarta Timur tahun lalu, pada bulan Mei 2023 ini, Sarana Jaya kembali memperkuat komitmennya dalam mendukung penyediaan Hunian Terjangkau di Jakarta dengan menggelar peletakan batu pertama Menara Ayasa Nuansa Cilangkap. Proyek ini bertujuan untuk memberikan solusi bagi masyarakat Jakarta yang menginginkan hunian terjangkau di lokasi strategis.

After successfully inaugurating 1,348 residential units in East Jakarta last year, in May 2023, Sarana Jaya once again strengthened its commitment to supporting the provision of affordable housing in Jakarta by holding the groundbreaking for the Menara Ayasa Nuansa in Cilangkap. The project aims to provide a solution for Jakarta people who want affordable housing in a strategic location.

Hunian Terjangkau Menara Ayasa berlokasi di kawasan Nuansa Cilangkap dan dibangun di atas luas lahan seluas ± 2,9 hektar, luas bangunan ± 2 hektar dan akan terdiri dari 24 lapis. Adapun Menara Ayasa ini akan memiliki 415 unit dengan 18/19 unit per lapisnya dan memiliki tipe hunian 2 Kamar. Pembangunan Menara Ayasa ini merupakan Menara kedua yang berada di Kawasan Nuansa Cilangkap. Nantinya, Menara Ayasa Nuansa Cilangkap juga akan dilengkapi dengan fasilitas halte mikrotrans yang terintegrasi, ruang terbuka hijau, balai warga, lift, lahan parkir dan klinik kesehatan.

Menara Ayasa Affordable Housing is located in the Nuansa Cilangkap area and is built on a land area of ±2.9 hectares. The building area is ±2 hectares and will consist of 24 layers. Menara Ayasa will have 415 units with 18/19 units per layer and has a two-bedroom residential type. The construction of the Menara Ayasa is the second tower in the Nuansa Cilangkap area. Later, the Menara Ayasa Nuansa Cilangkap will also have integrated microtrans bus stop facilities, green open space, a community hall, elevators, a parking area, and a health clinic.

Pembangunan proyek Menara Ayasa Nuansa Cilangkap merupakan inisiatif Sarana Jaya untuk terus mendukung pembangunan hunian yang layak dan terjangkau di Jakarta. Setelah sukses menyasar Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR) dalam pembangunan hunian terjangkau sebelumnya.

The construction of the Menara Ayasa Nuansa Cilangkap project is Sarana Jaya's initiative to support the development of decent and affordable housing in Jakarta after successfully targeting Low-Income Communities (MBR) in previous affordable housing developments.

► **15 Juni 2023** | June 15, 2023



Penandatanganan Kerja Sama Pengembangan Lahan Jl. TB. Simatupang oleh Sarana Jaya dan PT Jakarta Tourisindo

Land Development Cooperation Signing on Jl. TB. Simatupang by Sarana Jaya and PT Jakarta Tourisindo

Bertempat di Kantor Pusat Sarana Jaya, Perusahaan dan PT Jakarta Tourisindo (Jakarta Experience Board/"JXB") resmi menandatangani perjanjian kerja sama pengembangan lahan TB. Simatupang. Penandatanganan kerja sama ini bertujuan untuk memanfaatkan potensi lahan yang strategis dan mendukung pengembangan sektor properti dan pariwisata di ibu kota. Melalui kerja sama ini, Sarana Jaya dan JXB berkomitmen untuk mengoptimalkan penggunaan lahan tersebut dengan menghadirkan proyek-proyek yang dapat memberikan manfaat bagi masyarakat Jakarta dan para pelaku bisnis.

Located at Sarana Jaya Head Office, the Company and PT Jakarta Tourisindo (Jakarta Experience Board or JXB) officially signed a cooperation agreement on TB. Simatupang land development. The signing of this collaboration aims to utilize strategic land potential and support the development of the property and tourism sectors in the capital city. Through collaboration, Sarana Jaya and JXB are committed to optimizing land use by presenting projects that can benefit the Jakartan people and business actors.

► 27 Juli 2023 | July 27, 2023



Mendukung Pendidikan Anak Usia Dini, Sarana Jaya bersama Kasudin Jakarta Timur Meresmikan PAUD SPS Satu Nusa di Menara Samawa, Nuansa Pondok Kelapa

Supporting Early Childhood Education, Sarana Jaya and the East Jakarta Sub-Dept Head Inaugurated SPS Satu Nusa Early Childhood Education (PAUD) at Menara Samawa, Nuansa Pondok Kelapa

Berlokasi di RW 015 Kelurahan Pondok Kelapa, SPS Satu Nusa Menara Samawa Nuansa Pondok Kelapa diharapkan bisa menjadi sarana pendidikan dan kelompok bermain yang ramah anak dan mampu mewujudkan generasi penerus yang cerdas dan berkualitas sejak dini.

Located in RW 015, Kelurahan Pondok Kelapa, SPS Satu Nusa Menara Samawa Nuansa Pondok Kelapa is expected to be a child-friendly educational facility and play group capable of creating an intelligent and qualified next generation from an early age.

Selamat atas Peresmian PAUD SPS Satu Nusa di Menara Samawa, Nuansa Pondok Kelapa!

Congratulations on the inauguration of SPS Satu Nusa PAUD at Menara Samawa, Nuansa Pondok Kelapa!

► 2 Agustus 2023 | August 2, 2023



Pembangunan Taman ASEAN oleh Sarana Jaya di Kecamatan Kebayoran Baru, Jakarta Selatan Diresmikan dalam Rangkaian Acara MGMAC dan AMF 2023 bersama Delegasi Gubernur dan Walikota se-ASEAN

The construction of the ASEAN Park by Sarana Jaya in Kecamatan Kebayoran Baru, South Jakarta, was inaugurated in a series of MGMAC and AMF 2023 events with a Delegation of Governors and Mayors across ASEAN



Acara dihadiri langsung oleh PJ Gubernur DKI Jakarta, delegasi 22 Negara Perwakilan ASEAN, dan Direktur Utama Perumda Pembangunan Sarana Jaya Bapak Andira Reoputra.

The event was attended by the Acting DKI Jakarta Governor, delegates from 22 ASEAN Representative Countries, and the President Director of Perumda Pembangunan Sarana Jaya Mr. Andira Reoputra.

Sarana Jaya ambil bagian dari persiapan DKI Jakarta menjadi tuan rumah KTT ASEAN Ke-42 yang digelar pada bulan September 2023. Dalam rangka mendukung dan mempercantik sejumlah kawasan, Sarana Jaya bersama Pemprov DKI Jakarta berkolaborasi dalam membangun dan meresmikan Taman ASEAN di Kecamatan Kebayoran Baru, Jakarta Selatan.

Sarana Jaya took part in DKI Jakarta's preparations to host the 42nd ASEAN Summit held in September 2023. To support and beautify several areas, Sarana Jaya and DKI Jakarta Provincial Government collaborated to construct and inaugurate the ASEAN Park in Kecamatan Kebayoran Baru, South Jakarta.

► **16 Agustus 2023** | August 16, 2023



Penandatanganan Perjanjian Novasi atas Perjanjian Kerjasama Pengelolaan Gedung Atrium Senen
The Signing of the Novation Agreement on Cooperation Agreement for Atrium Senen Building Management

Pada tanggal 16 Agustus 2023, telah dilaksanakan kegiatan Penandatanganan Perjanjian Novasi atas Perjanjian Kerjasama Pengelolaan Gedung Atrium Senen antara Perumda Pembangunan Sarana Jaya dan PT Nusa Mandiri Properti. Acara ini berlangsung di Ruang Rapat Lantai 3 Gedung Sarana Jaya.

On August 16, 2023, the signing of the Novation Agreement on the Cooperation Agreement for Atrium Senen Building Management between Perumda Pembangunan Sarana Jaya and PT Nusa Mandiri Properti was held. The event took place in the Third Floor Meeting Room of the Sarana Jaya Building.

Penandatanganan perjanjian ini menandai sebuah langkah penting dalam upaya meningkatkan kualitas pengelolaan Gedung Atrium Senen. Perjanjian novasi ini dilakukan sebagai bentuk komitmen bersama antara kedua belah pihak untuk terus memberikan pelayanan terbaik kepada para penyewa dan pengunjung gedung. Perjanjian ini mendorong terciptanya inovasi serta perbaikan berkelanjutan dalam pengelolaan Gedung Atrium Senen.

The signing of the agreement marks an important step in improving the quality of management of the Atrium Senen Building. The novation agreement is carried out as a form of joint commitment between the two parties to continue to provide the best service to tenants and visitors to the building. The agreement encourages the creation of innovation and continuous improvement in the management of the Atrium Senen Building.

► **26 Oktober 2023** | October 26, 2023



Terus Berkomitmen Perkuat Pengelolaan Arsip, Sarana Jaya Berhasil Raih Predikat “Memuaskan” pada Gerakan Sadar Tertib Arsip Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Provinsi DKI Jakarta

Continuously Committed to Strengthening Archives Management, Sarana Jaya Successfully Achieved the “Satisfactory” Predicate at the Orderly Archives Awareness Movement of the Library and Archives Service of DKI Jakarta Province

Acara dihadiri langsung oleh Asisten Sekretaris Daerah DKI Jakarta, Plt. Kepala ANRI, Kepala Dinas Perpustakaan dan Kearsipan DKI Jakarta, Analis Pertahanan Militer dan Intelijen, Komite Memori Kolektif Bangsa, Asisten Deputi Kelembagaan dan Tata Laksana Pembangunan Manusia dan Kebudayaan KemenPAN-RB, perangkat daerah lainnya dan perwakilan Sarana Jaya Direktur Administrasi dan Keuangan Bapak Irwan Augustuslan. The event was attended by the DKI Jakarta Assistant Regional Secretary, Acting Head of ANRI, Head of DKI Jakarta Library and Archives Office, Military Defense and Intelligence Analyst, National Collective Memory Committee, Assistant Deputy for Governance Systems and Management of Human Development and Culture from the Administrative and Bureaucratic Reform Ministry, other regional apparatus, and Sarana Jaya Director of Administration and Finance representative Mr. Irwan Augustuslan.

Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Provinsi DKI Jakarta kembali mengadakan Gerakan Sadar Tertib Arsip Sarana Jaya dengan tajuk “Membingkai Cerita Penuh Makna, Merajut Memori Kolektif Bangsa, Menuju Jakarta Kota Global”, bertempat di Ruang Gedung Pola Balaikota, Jakarta Pusat. Acara ini dihadiri langsung oleh Asisten Sekretaris Daerah DKI Jakarta, Plt. Kepala ANRI, Kepala Dinas Perpustakaan dan Kearsipan DKI Jakarta, Analis Pertahanan Militer dan Intelijen, Komite Memori Kolektif Bangsa, dan Asisten Deputi Kelembagaan dan Tata Laksana Pembangunan Manusia dan Kebudayaan KemenPAN-RB, perwakilan perangkat aparatur sipil, BUMD DKI Jakarta, dan perangkat daerah lainnya.

The DKI Jakarta Provincial Library and Archives Service held another Orderly Archives Awareness Movement titled “Framing Meaningful Stories, Weaving the Nation’s Collective Memory, Towards Jakarta as a Global City,” in the Pola Building, City Hall, Central Jakarta. The event was attended by the DKI Jakarta Assistant Regional Secretary, Acting ANRI Head, DKI Jakarta Library and Archives Service Head, Military Defense and Intelligence Analyst, National Collective Memory Committee, and Governance Systems and Management for Human Development and Culture Assistant Undersecretary of the Administrative and Bureaucratic Reform Ministry, civil apparatus representatives, DKI Jakarta BUMD, and other regional officials.

Dalam Gerakan Sadar Tertib Arsip 2023, Sarana Jaya, sebagai BUMD DKI Jakarta bidang properti, berhasil meraih predikat Kategori A “Memuaskan” dengan skor 83.18 dalam pengelolaan dan pelestarian arsip. Predikat ini menjadi bukti semangat dan komitmen Sarana Jaya dalam menjaga dan melindungi arsip, yang berkontribusi secara signifikan terhadap proses bisnis dan kegiatan korporasi. Komitmen Sarana Jaya terhadap pengelolaan arsip yang bertanggung jawab sejalan dengan nilai perusahaan dalam menyediakan layanan publik yang unggul dan profesional. Dengan meraih predikat “Memuaskan” dalam Gerakan Sadar Arsip Dispusip DKI Jakarta, Sarana Jaya mengukuhkan kembali komitmennya untuk meningkatkan efisiensi administratif dan memelihara arsip agar tetap terjaga dan berjalan optimal.

In the 2023 Archives Orderly Awareness Movement, as a DKI Jakarta BUMD in the property sector, Sarana Jaya achieved the Category A “Satisfactory” predicate with a score of 83.18 in archive management and preservation. The title is proof of Sarana Jaya’s enthusiasm and commitment to maintaining and protecting archives, which contribute significantly to business processes and corporate activities. Sarana Jaya’s commitment to responsible records management aligns with the company’s values of providing superior and professional public services. By achieving the “Satisfactory” title in the DKI Jakarta Provincial Library and Archives Service’s Archives Awareness Movement, Sarana Jaya reaffirms its commitment to increasing administrative efficiency and maintaining archives so that they are maintained and running optimally.

► **7 November 2023 | November 7, 2023**



Sinergi dengan Mabes Polri, Sarana Jaya Lakukan Penandatanganan Kerja Sama Fasilitas Penyediaan Hunian untuk Anggota Polri dan PNS Polri

Synergizing with National Police Headquarters, Sarana Jaya Signs Cooperation on Housing Provision Facilities for National Police Members and National Police Civil Servants

Acara dihadiri langsung oleh Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Bapak Listyo Sigit Prabowo dan materi dipaparkan langsung oleh Direktur Utama Perumda Pembangunan Sarana Jaya.
The event was attended by the Indonesian National Police Chief Mr. Listyo Sigit Prabowo and the material was presented by Perumda Pembangunan Sarana Jaya President Director.

Sarana Jaya menjalin kerja sama dengan Markas Besar Kepolisian RI terkait penyediaan hunian bagi Anggota Polri dan PNS Polri. Kegiatan ini berlangsung bertepatan dengan kegiatan RAKORBIN SDM – PNS Polri yang diselenggarakan di Hotel Borobudur, Jakarta Pusat. Penandatanganan Nota Kesepahaman (MoU) ini bertujuan untuk memfasilitasi hunian yang nyaman dan prospektif bagi personil Kepolisian Republik Indonesia (Polri) dan Pegawai Negeri Sipil (PNS) Polri. Kesepakatan ini juga mencerminkan komitmen Sarana Jaya bersama Polri dalam meningkatkan sinergitas yang bertujuan untuk memudahkan akses kepemilikan hunian bagi para Anggota Kepolisian Republik Indonesia khususnya di DKI Jakarta.

Sarana Jaya collaborates with the Indonesian Police Headquarters to provide housing for National Police Members and National Police Civil Servants. The activity coincided with the RAKORBIN SDM – PNS Polri activities held at the Borobudur Hotel, Central Jakarta. The signing of the Memorandum of Understanding (MoU) aims to facilitate comfortable and prospective housing for Indonesian Police (Polri) personnel and Polri Civil Servants (PNS). The agreement also reflects Sarana Jaya’s commitment to the National Police in increasing synergy aimed at facilitating access to residential ownership for members of the Indonesian National Police, especially in DKI Jakarta.

Selain memiliki nilai investasi yang baik, hunian yang disediakan oleh Sarana Jaya dari perspektif bisnis tentunya juga sangat potensial karena hunian yang dibangun berada di lokasi-lokasi strategis dan terintegrasi dengan berbagai moda transportasi. Adapun hunian yang ditawarkan berada di 2 (dua) kawasan, yakni Nuansa Pondok Kelapa yang terdiri dari dua menara (Menara Samawa dan Menara Swasana) dan Nuansa Cilangkap yang juga terdiri dari dua menara (Menara Kanaya yang telah siap huni dan Menara Ayasa yang masih dalam tahap proses pembangunan).

Apart from having good investment value, the residences provided by Sarana Jaya also have potential from a business perspective because the residences built are in strategic locations and are integrated with various modes of transportation. The offered housing is in two areas, i.e., Nuansa Pondok Kelapa, which consists of two towers (Menara Samawa and Menara Swasana), and Nuansa Cilangkap which also consists of two towers (Menara Kanaya which is ready for habitation and Menara Ayasa which is still under construction).

► **20 November 2023** | November 20, 2023



Jajaki Potensi Kerja Sama, Direktur Utama Sarana Jaya Sambut Kedatangan Wakil Menteri Perdagangan
Exploring the Potential for Collaboration, Sarana Jaya President Director Welcomes the Arrival of the Deputy Trade Minister

Sarana Jaya menyambut kedatangan Wakil Menteri Perdagangan (Wamendag), Jerry Sambuaga, di kantor Pusat Sarana Jaya di Jl. Budi Kemuliaan I No. Jakarta Pusat. Pada kesempatan ini, Direktur Utama Sarana Jaya, Bapak Andira Reoputra membahas beberapa agenda utama, di antaranya potensi kerja sama dalam pemanfaatan lahan dan pengembangan kawasan, serta pengembangan pusat perbelanjaan dan ritel.

Sarana Jaya welcomed the arrival of the Deputy Trade Minister (Wamendag), Jerry Sambuaga, at Sarana Jaya Head Office on Jl. Budi Kemuliaan I No. 1 Central Jakarta. On this occasion, Sarana Jaya President Director, Mr. Andira Reoputra, discussed several main agendas, including the potential for cooperation in land use and regional development, as well as the development of shopping and retail centers.

► **29 November 2023** | November 29, 2023



Sarana Jaya Peduli Lingkungan: Sarana Jaya Mengikuti Kegiatan Gerakan “Tanam Pohon” pada Program Gerakan BUMD Menanam dan Tanam Pohon Bersama Presiden RI

Sarana Jaya Cares for the Environment: Sarana Jaya Participates in the “Tree-Planting” Movement in the BUMD Planting and Tree Planting Movement Program with the President of the Republic of Indonesia

Sebagai wujud antisipasi terhadap perubahan iklim yang semakin nyata, Pemerintah Indonesia mengajak seluruh masyarakat dan pemerintah kota, mulai dari tenaga Aparatur Sipil Negara (ASN), tenaga kesehatan, tenaga pendidik, dan perusahaan BUMD DKI Jakarta untuk menggalakan program penghijauan dan mendukung “Tanam Pohon Bersama Presiden RI”. Sarana Jaya sebagai BUMD Pemprov DKI Jakarta juga turut mendukung aksi lingkungan tersebut. Pada kegiatan ini, Sarana Jaya berpartisipasi menanam 2 (dua) jenis tanaman, yaitu Pohon Mangga Arumanis dan Pohon Ketapang Kencana di 10 titik tersebar di Nuansa Cilangkap.

To anticipate the increasingly real climate change, the Indonesian Government invited all communities and city governments, starting from State Civil Apparatus (ASN), health workers, educational staff, and DKI Jakarta BUMD companies to promote greening programs and support “Tree Planting with the President of the Republic of Indonesia.” As a DKI Jakarta Provincial Government BUMD, Sarana Jaya supports this environmental action. In this activity, Sarana Jaya planted two types of plants, Arumanis Mango Trees and Ketapang Kencana Trees, at ten points across Nuansa Cilangkap.

Acara dihadiri langsung oleh jajaran Direksi Sarana Jaya dan perwakilan Manajer terkait dalam prosesi penanaman pohon di Nuansa Cilangkap.

The event was attended by Sarana Jaya’s Board of Directors and representatives of related Managers in planting trees at Nuansa Cilangkap.

► **21 Desember 2023** | December 21, 2023



Penandatanganan Berita Acara Serah Terima (BAST) Fasos Fasum oleh Sarana Jaya dan Walikota Kota Administrasi Jakarta Timur

The signing of Minutes of Handover (BAST) of Fasos Fasum by Sarana Jaya and the East Jakarta Administrative City Mayor

Acara dihadiri langsung oleh Walikota Kota Administrasi Jakarta Timur dan Direktur Utama Perumda Pembangunan Sarana Jaya.
The event was attended by the East Jakarta Mayor Perumda Pembangunan Sarana Jaya President Director.

Sarana Jaya bersama Walikota Kota Administrasi Jakarta Timur melakukan Kegiatan Penandatanganan Berita Acara Serah Terima (BAST) Fasilitas Sosial Fasilitas Umum (Fasos Fasum) di wilayah Pondok Kelapa, Jakarta Timur. Acara diselenggarakan di Ruang Rapat Walikota Kota Administrasi Jakarta Timur Lantai 2. Adapun lahan yang diserahkan kepada Sarana Jaya adalah sebagian kewajiban prasarana jalan, lahan taman kota/lingkungan, dan lahan ruang terbuka hijau yang terletak di Jl. H. Naman, Kel. Pondok Kelapa, Kec. Duren Sawit Jakarta Timur. Sarana Jaya berkomitmen untuk melaksanakan prinsip tertib administrasi untuk mencegah timbulnya permasalahan di kemudian hari.

Sarana Jaya and the East Jakarta Administration City Mayor conducted the Signing of Minutes of Handover (BAST) for Public and Social Facilities (Fasos Fasum) in the Pondok Kelapa area, East Jakarta. The event was held at the Second Floor Meeting Room of the East Jakarta Administration City Mayor. The land handed over to Sarana Jaya is part of the obligations of road infrastructure, city/neighborhood parkland, and green open space land located on Jl. H. Naman, Kelurahan Pondok Kelapa, Kecamatan Duren Sawit East Jakarta. Sarana Jaya is committed to implementing the principle of orderly administration to prevent problems in the future.

► **28 Desember 2023** | December 28, 2023



Sarana Jaya Peduli Kesehatan: Sarana Jaya Luncurkan Program Jakarta BERAKSI (Bergerak Atasi Stunting)

Sarana Jaya Cares for Health: Sarana Jaya Launches Jakarta BERAKSI Program (Moving to Overcome Stunting)

Acara dihadiri langsung oleh Walikota Kota Administrasi Jakarta Pusat dan Direktur Utama Perumda Pembangunan Sarana Jaya.
The event was attended directly by the Central Jakarta Mayor and Perumda Pembangunan Sarana Jaya President Director.

Sarana Jaya melaksanakan giat *launching* Jakarta Beraksi (Bergerak Atasi Stunting) di 2 (dua) Kelurahan Pulo Gebang Timur dan Kelurahan Petojo Utara sekaligus pemberian Apresiasi bagi CSR Program Jakarta Beraksi di Kelurahan Petojo, Jakarta Pusat. Acara ini dilangsungkan dengan berkolaborasi bersama Pemrov DKI Jakarta, kader dan orang tua balita *stunting*, *wasting*, dan *underweight*. Sarana Jaya berkomitmen untuk terus memberikan pelayanan yang maksimal bagi masyarakat melalui program CSR dalam menangani *stunting* sehingga dapat menciptakan masa depan yang lebih baik dan sehat bagi generasi penerus bangsa.

Sarana Jaya launched Jakarta Beraksi (Moving to Overcome Stunting) in districts Pulo Gebang Timur and districts Petojo Utara, as well as appreciating the Jakarta Beraksi CSR Program in districts Petojo, Central Jakarta. The event was held with the DKI Jakarta Provincial Government, cadres, and parents of stunting, wasting, and underweight toddlers. Sarana Jaya is committed to providing maximum service to the community through CSR programs dealing with stunting to create a better and healthier future for the nation's next generation.

PENGHARGAAN DAN SERTIFIKASI

AWARDS AND CERTIFICATIONS

► Penghargaan Awards



No.	Ajang Penghargaan Event	Penyelenggara Organizer	Tanggal Penerimaan Recipient Date	Peringkat dan Kategori Rating and Category
1	TOP BUMD AWARDS 2023	Majalah TopBusiness, bekerja sama dengan Institut Otonomi Daerah (I-Otda). TopBusiness Magazine in collaboration with the Regional Autonomy Institute (I-Otda).	5 April 2023 April 5, 2023	#BUMD ANEKA USAHA – BINTANG 4 #BUMD Miscellaneous Business – 4 Stars
2	TOP CEO AWARDS 2023	Majalah TopBusiness, bekerja sama dengan Institut Otonomi Daerah (I-Otda). TopBusiness Magazine in collaboration with the Regional Autonomy Institute (I-Otda).	5 April 2023 April 5, 2023	
3	Gerakan Sadar Tertib Arsip Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Provinsi DKI Jakarta Orderly Archives Awareness Movement of the DKI Jakarta Provincial Library and Archives Service	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Provinsi DKI Jakarta DKI Jakarta Provincial Library and Archives Service	26 Oktober 2023 October 26, 2023	Kategori A “Memuaskan” dengan skor 83,18 dalam pengelolaan dan pelestarian arsip. “Satisfactory” A Category with a score of 83.13 in archive management and preservation.
4	TOP Digital Corporate Brand Award 2023 TOP Digital Corporate Brand Award 2023	InfoEkonomi.ID dan Tras N Co. InfoEkonomi.ID and Tras N Co.	14 September 2023 September 14, 2023	Digital Awareness Aspect, Digital Media & Website Aspect, dan Social Media Aspect.

► **Sertifikasi**
Certifications



No.	Nama Sertifikasi Certification Name	Pemberi Giver	Masa Berlaku Validity period
1	SNI 8615:2018 ISO 31000:2018 - Pedoman tanggal 25 November 2022 SNI 8615:2018 ISO 31000:2018 - Risk Management – Guidelines, November 25, 2022	Center for Risk Management and Sustainability (CRMS) Center for Risk Management and Sustainability (CRMS)	Bersifat <i>Conformity Letter</i> Tidak Memiliki Masa Berlaku Conformity Letter – No Validity Period
2	Sertifikat ISO 9001:2015 tentang Sistem Manajemen Mutu ISO 9001:2015 Certificate on Quality Management Systems	British Standards Institution British Standards Institution	22 Oktober 2021 - 21 Oktober 2024 October 22, 2021, to October 21, 2024
3	Sertifikat ISO 37001:2016 tentang Sistem Manajemen Anti-Penyuapan ISO 37001:2016 Certificate on Anti-Bribery Management System	PT Mutuagung Lestari (MUTU International) PT Mutuagung Lestari (MUTU International)	2 Maret 2022 - 2 Maret 2025 March 2, 2022, to March 2, 2025

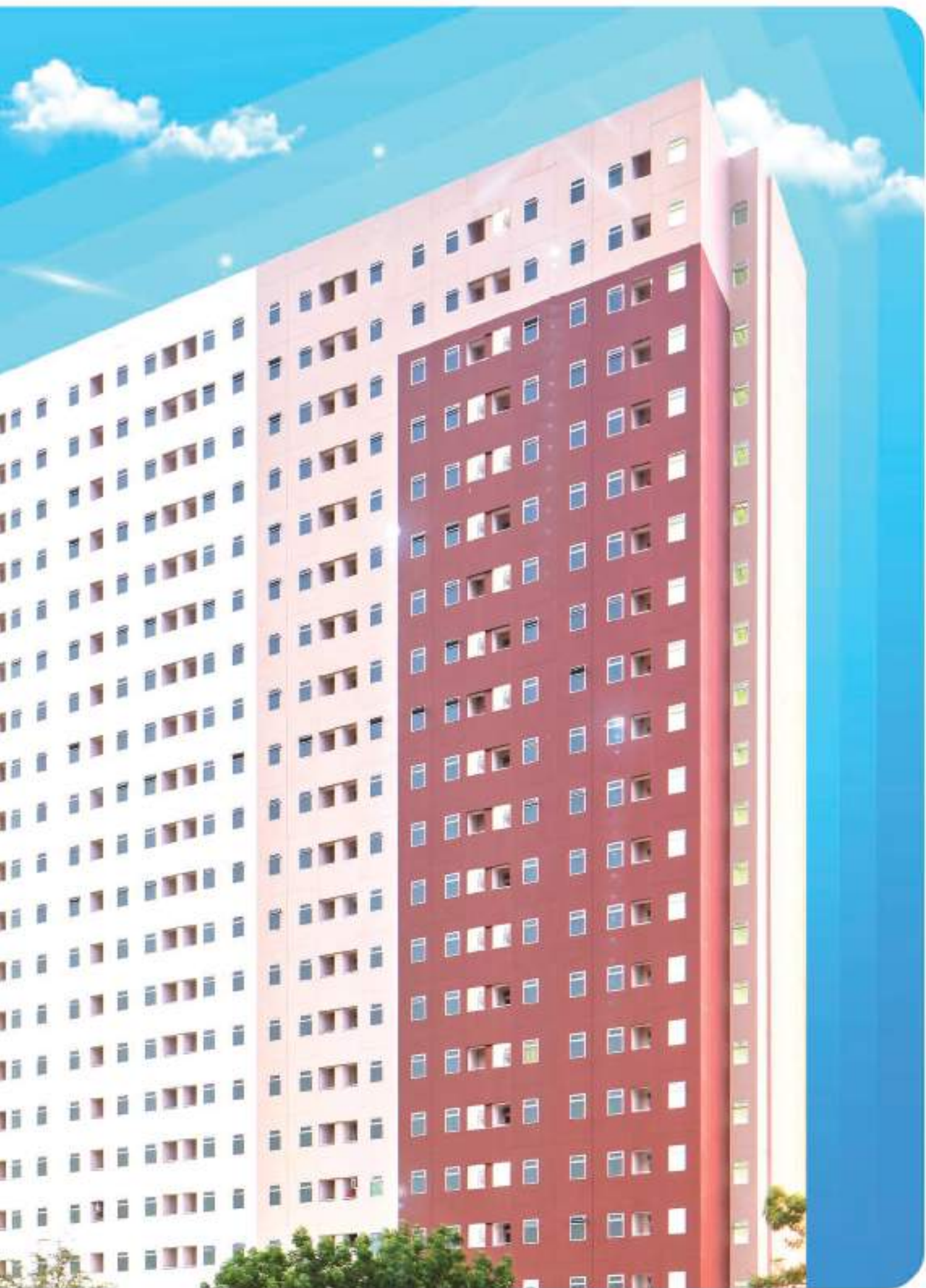


The cover features a vibrant blue background with a white cloud in the upper right. On the right side, there is a photograph of a tall, modern building with a white facade and a prominent red section. The building has many windows and is set against a clear blue sky. On the left side, there are faint, glowing blue lines and dots, suggesting a digital or technological theme.

02

Laporan Manajemen

Manajemen Report



LAPORAN DEWAN PENGAWAS

SUPERVISORY BOARD'S REPORT

Pada tahun 2023, Perusahaan berhasil mencatatkan pertumbuhan *double digit* pada pendapatan usaha yang meningkat 33,8% dibandingkan tahun sebelumnya sehingga dibukukan menjadi Rp211,9 miliar. Meski dari sisi *top line* Perusahaan mampu mencatatkan kinerja yang positif, akan tetapi dari segi *bottom line* terlihat bahwa profitabilitas Perusahaan mengalami tekanan sehingga mencatatkan rugi tahun berjalan sebesar Rp98,9 miliar pada 2023.

In 2023, the Company managed to record double-digit growth in operating revenue, which increased by 33.8% compared to the previous year, which was Rp211.9 billion. Although the Company was able to record a positive performance from a top-line perspective, it is evident that the Company's profitability was under pressure from a bottom-line perspective, resulting in a loss for the year of Rp98.9 billion in 2023.

Pemegang saham yang terhormat,

Dengan penuh rasa syukur kami sampaikan bahwa sepanjang tahun 2023 Dewan Pengawas telah melaksanakan fungsi pengawasan dan pemberian nasihat kepada Direksi terkait pengurusan dan pengelolaan Perumda Pembangunan Sarana Jaya ("Perusahaan"). Bersama ini, izinkan kami menyampaikan hasil penilaian objektif Dewan Pengawas terhadap kinerja Direksi untuk tahun buku yang berakhir pada 31 Desember 2023. Penyampaian laporan ini sekaligus menjadi bagian dari penerapan prinsip Tata Kelola Perusahaan yang Baik, khususnya, prinsip keterbukaan informasi.

EKONOMI NASIONAL TETAP RESILIENT DI TENGAH PERLAMBATAN EKONOMI GLOBAL

Menutup tahun 2023, ketidakpastian global tetap tinggi sehingga membuat proses pemulihan ekonomi dunia di masa pasca pandemi kembali melewati jalan terjal dan berliku yang berujung pada melambatnya perekonomian global dan diikuti dengan divergensi pertumbuhan antar-negara yang kian melebar. Eskalasi dari berbagai faktor risiko pelemahan telah memengaruhi kinerja ekonomi global sepanjang 2023, seperti inflasi inti yang masih

Esteemed shareholders,

We gratefully acknowledge that throughout 2023, the Supervisory Board has carried out its supervisory and advisory functions to the Board of Directors regarding the management and administration of Perumda Pembangunan Sarana Jaya ("the Company"). Herewith, let us submit the results of the Supervisory Board's objective assessment of the performance of the Board of Directors for the fiscal year ending on December 31, 2023. The submission of this report is also part of the implementation of Good Corporate Governance principles, particularly the principle of information disclosure.

NATIONAL ECONOMY REMAINS RESILIENT AMID GLOBAL ECONOMIC SLOWDOWN

Concluding 2023, global uncertainties remain high, making the world economic recovery process in the post-pandemic period again pass through a steep and winding road that led to a slowdown in the global economy and followed by widening growth divergence between countries. The escalation of weakening risk factors has affected global economic performance throughout 2023, such as relatively high core inflation, high benchmark

Andi Muhammad Iqbal Arief

Ketua Dewan Pengawas

Chairman of the Supervisory Board



relatif tinggi, suku bunga acuan yang tinggi, beban utang yang semakin besar, hingga perdagangan dan investasi global yang melambat imbas fragmentasi geopolitik yang meningkat akibat perang Rusia - Ukraina yang telah membuat aturan perdagangan multilateral yang selama hampir 30 tahun mendukung bisnis global kini berada dalam ancaman karena menunjukkan keberpihakan.

Imbas dari kombinasi berbagai dinamika global yang berkembang tersebut, kinerja pertumbuhan ekonomi di negara-negara maju cenderung melambat bahkan berkontraksi akibat inflasi tinggi yang masih mendera sehingga membuat daya beli dan investasi cenderung terpankaskan. Di sisi lain, kebijakan fiskal ekspansif sulit diimplementasikan sebagai bantalan (*buffer*) untuk menyerap shock akibat defisit anggaran dan utang yang sudah terlanjur tinggi. Demikian pula sektor keuangan global juga masih diliputi oleh ketidakpastian dan kerapuhan mengingat The Fed AS masih menunjukkan sikap *hawkish* untuk mempertahankan suku bunga di level tinggi (*higher for longer*) sehingga berakhir di level 5,25-5,50% pada Desember 2023. Posisi *Fed Fund Rate* (FFR) tersebut menjadi suku bunga tertinggi sejak 2007.

interest rates, and growing debt burdens. Global trade and investment also slowed due to increased geopolitical fragmentation due to the Russia-Ukraine war, which has made multilateral trade rules that have supported global businesses for nearly 30 years and are now under threat for showing partiality.

As a result of the combination of various global dynamics, economic growth performance in developed countries tends to slow down and even contract due to the high inflation that still afflicts, making purchasing power and investment tend to be cut. On the other hand, expansionary fiscal policy is difficult to implement as a buffer to absorb the shock due to the already high budget deficit and debt. Similarly, the global financial sector is still overwhelmed by uncertainty and fragility, given that the US Fed still shows a hawkish attitude to keep interest rates higher for longer until they end at 5.25-5.50% in December 2023. The Fed Fund Rate (FFR) position is the highest interest rate since 2007.

Di tengah ketidakpastian global yang terus meningkat, secara kumulatif sepanjang 2023, realisasi pertumbuhan ekonomi Indonesia dibukukan sebesar 5,05% (yoy), melambat dibandingkan pertumbuhan 5,31% (yoy) pada 2022. Hal ini sejalan dengan perkiraan akibat perlambatan ekonomi global dan aktivitas domestik yang terdampak inflasi tinggi. Kendati demikian, capaian tersebut menunjukkan bahwa ekonomi Indonesia berhasil mencatatkan konsistensi tren pertumbuhan yang sangat baik, ditopang oleh aktivitas permintaan domestik yang masih kuat, khususnya aktivitas konsumsi dan investasi.

Keberhasilan Indonesia dalam menjaga fundamental ekonomi yang solid didukung penuh oleh bauran kebijakan Pemerintah dan Bank Indonesia yang tepat sasaran. Pada tahun 2023, APBN yang sehat dan berkinerja *ahead the curve* berhasil menjadi *shock absorber* dalam meredam guncangan global. Sementara dari pasar keuangan nasional, Bank Indonesia juga mengintervensi dengan menerapkan kebijakan suku bunga tinggi selaras dengan arah kebijakan *higher for longer* The Fed AS sehingga *BI rate* berakhir di level tinggi sebesar 6% pada Desember 2023.

Kendati perekonomian nasional mampu menunjukkan konsistensi pertumbuhan yang baik hingga penghujung tahun 2023, sayangnya kinerja sektor properti dalam negeri belum terlalu kuat dan menunjukkan pertumbuhan yang relatif terbatas sebagaimana bisa dilihat dari tren peningkatan harga riil yang terbatas pada properti residensial maupun properti komersial. Namun demikian di tengah keterbatasan kinerja properti selama tahun 2023, beberapa kelompok segmen properti tertentu mengalami kinerja pertumbuhan yang mengesankan.

Dengan mempertimbangkan peluang dan tantangan yang melanda pasar properti nasional, Dewan Pengawas mendorong Direksi agar terus mengantisipasi risiko pelemahan yang dihadapi Perusahaan terutama di era suku bunga tinggi yang berdampak langsung terhadap kenaikan *cost of fund* proyek-proyek properti yang masih berlangsung. Kami melihat bahwa dampak kebijakan BI rate yang agresif selama 18 bulan terakhir hingga penghujung 2023 telah menekan profitabilitas Perusahaan yang apabila tidak dimitigasi secara hati-hati berpotensi mengganggu kelancaran pelaksanaan kegiatan usaha inti Perusahaan sebagai penyedia bank tanah dan pengembang bisnis properti di DKI Jakarta.

Amidst increasing global uncertainty, Indonesia's economic growth realization was recorded at 5.05% (yoy) cumulatively throughout 2023, slowing down compared to 5.31% (yoy) growth in 2022. This aligns with expectations due to the global economic slowdown and domestic activities affected by high inflation. Nevertheless, the achievement shows that the Indonesian economy has maintained an excellent consistency of growth trends, supported by strong domestic demand activities, especially consumption and investment.

Indonesia's success in maintaining solid economic fundamentals is fully supported by the well-targeted policy mix of the Government and Bank Indonesia. In 2023, a healthy state budget (APBN) that performed ahead of the curve successfully became a shock absorber in absorbing global shocks. From the national financial market, Bank Indonesia also intervened by implementing a high-interest rate policy in line with the US Fed's higher-for-longer policy direction so that the BI rate ended at a high level of 6% in December 2023.

Although the national economy was able to show good growth consistency until the end of 2023, the performance of the domestic property sector was not too strong. It showed relatively limited growth, as evidenced by the limited trend of real price increases in residential and commercial properties. However, amidst the limited property performance during 2023, certain property segments experienced impressive growth.

Considering the opportunities and challenges facing the national property market, the Supervisory Board encourages the Board of Directors to continue to anticipate the downside risks faced by the Company, especially in the era of high interest rates, which have a direct impact on the ongoing increase in the cost of funds for property projects. We see that the impact of the aggressive BI rate policy for the last 18 months until the end of 2023 has put pressure on the Company's profitability, which, if not carefully mitigated, has the potential to disrupt the smooth implementation of the Company's core business activities as a land bank provider and property business developer in DKI Jakarta.

PENILAIAN DEWAN PENGAWAS TERHADAP KINERJA DIREKSI TAHUN 2023

Dalam pandangan kami, Direksi telah menunjukkan itikad baik dalam menjalankan tugas dan tanggung jawabnya serta sudah memberikan respons yang tepat dan hati-hati dalam mengelola tantangan dan risiko yang menghambat proses bisnis Perusahaan. Akan tetapi, buah dari konsistensi penerapan strategi yang tepat dan kegigihan untuk terus membawa Perusahaan ke tingkat pertumbuhan yang lebih tinggi mampu membuahkan hasil positif sebagaimana dapat dilihat dari tercapainya sebagian target-target kinerja yang tercantum di dalam RKAP Tahun 2023.

Pada tahun 2023, Perusahaan berhasil mencatatkan pertumbuhan *double digit* pada pendapatan usaha yang meningkat 33,8% dibandingkan tahun sebelumnya sehingga dibukukan menjadi Rp211,9 miliar. Meski dari sisi *top line* Perusahaan mampu mencatatkan kinerja yang positif, akan tetapi dari segi *bottom line* terlihat bahwa profitabilitas Perusahaan mengalami tekanan sehingga mencatatkan rugi tahun berjalan sebesar Rp98,9 miliar pada 2023.

Selain berfokus pada pengukuran kinerja keuangan, kami juga mengawasi keberlangsungan aktivitas bisnis Perusahaan sesuai dengan mandat yang diberikan oleh Pemerintah Provinsi DKI Jakarta. Berdasarkan hasil pengawasan yang telah kami lakukan secara menyeluruh sepanjang tahun 2023, Dewan Pengawas memberikan apresiasi atas upaya-upaya terbaik yang telah dilakukan Direksi sehingga Perusahaan mampu mengeksekusi seluruh target program pembangunan maupun pelaksanaan kegiatan kolaborasi dengan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta.

Dengan mengacu pada tolok ukur penilaian aspek keuangan dan non-keuangan yang sudah disepakati bersama di awal tahun, Dewan Pengawas melihat bahwa Perusahaan mencatatkan hasil akhir bisnis yang beragam pada beberapa indikator utama di akhir 2023. Kendati sejumlah indikator penilaian tidak tercapai sesuai target, kami tetap memberikan penilaian positif terhadap kinerja Direksi yang telah menunjukkan kepiawaian dalam mengelola tantangan menjadi peluang usaha sehingga Perusahaan dapat terus bertumbuh dan berkembang di waktu mendatang.

SUPERVISORY BOARD ASSESSMENT OF THE BOARD OF DIRECTORS' PERFORMANCE IN 2023

In our view, the Board of Directors has shown good faith in carrying out its duties and responsibilities. It has provided appropriate and prudent responses in managing the challenges and risks that hamper the Company's business processes. The fruit of consistent implementation of the right strategy and persistence in bringing the Company to a higher level of growth has produced positive results, as evidenced by the achievement of some of the performance targets listed in the 2023 RKAP.

In 2023, the Company managed to record double-digit growth in operating revenue, which increased by 33.8% compared to the previous year, which was Rp211.9 billion. Although the Company was able to record a positive performance from a top-line perspective, it is evident that the Company's profitability was under pressure from a bottom-line perspective, resulting in a loss for the year of Rp98.9 billion in 2023.

In addition to focusing on measuring financial performance, we also oversee the sustainability of the Company's business activities following the mandate given by the DKI Jakarta Provincial Government. Based on the results of our comprehensive supervision throughout 2023, the Supervisory Board appreciates the best efforts made by the Board of Directors so that the Company can execute all development program targets and the implementation of collaborative activities with the DKI Jakarta Provincial Government.

Referring to the financial and non-financial assessment benchmarks agreed upon at the beginning of the year, the Supervisory Board observed that the Company recorded mixed business results in several key indicators at the end of 2023. Although several assessment indicators were not achieved as targeted, we still give a positive assessment of the performance of the Board of Directors, who have shown expertise in managing challenges into business opportunities so that the Company can continue to grow and develop.

PERAN PENGAWASAN DEWAN PENGAWAS TERHADAP IMPLEMENTASI STRATEGI YANG DITERAPKAN DIREKSI DAN FREKUENSI PEMBERIAN NASIHAT KEPADA DIREKSI

Sesuai dengan batasan yang diatur dalam Anggaran Dasar, Dewan Pengawas memiliki kewenangan untuk mengawasi jalannya pengelolaan Perusahaan yang sepenuhnya dipimpin oleh Direksi. Sebagai wujud dari pelaksanaan fungsi pengawasan dan penasihatian kepada Direksi, sepanjang tahun 2023, kami secara proaktif telah memberikan saran dan masukan strategis selama proses perumusan strategi bisnis dan penetapan target operasional serta memastikan Direksi menjalankan strategi bisnis sesuai dengan visi, misi, dan tujuan Perusahaan.

Setelah melakukan *review* terhadap gagasan strategi yang disampaikan Direksi dengan mempertimbangkan dinamika makroekonomi dan kekuatan internal yang dimiliki, kami memberikan persetujuan dan turut mengesahkan RKAP Tahun 2023 yang selanjutnya digunakan sebagai pijakan bagi Manajemen dalam memimpin arah pengelolaan Perusahaan selama periode pelaporan 2023.

Secara berkala, kami meninjau eksekusi dari seluruh strategi tersebut untuk memastikan bahwa Perusahaan berada di jalur yang tepat untuk mencapai target. Melalui rapat gabungan bersama Direksi yang selama 2023 sudah terselenggara sebanyak 13 (tiga belas) kali, kami menilai implementasi strategi yang dijalankan Direksi telah sesuai dengan RKAP Tahun 2023 maupun rencana jangka panjang Perusahaan. Dalam rapat gabungan tersebut, Dewan Pengawas telah memberikan sejumlah arahan, masukan, dan rekomendasi strategis terkait pelaksanaan Kegiatan Strategis Daerah (KSD) yang menjadi amanat dari Pemerintah Provinsi DKI Jakarta, antara lain meliputi:

1. Dewan Pengawas menyampaikan rekomendasi untuk melakukan pemasaran dan penjualan aset (apartemen) di Nuansa Pondok Kelapa dan Nuansa Cilangkap, sehingga dapat menekan biaya bunga (*cost of fund*) atas pinjaman untuk menyelesaikan pembangunannya.
2. Terkait dengan kasus hukum biaya pra operasional terkait dengan Pelaksanaan *Strategic Bisnis Unit Intermediate Treatment Facility* (SBU ITF) yang terhenti memiliki risiko *impairment* pada tahun buku 2023, Dewan Pengawas menyampaikan rekomendasi agar memastikan tata kelola perusahaan yang baik berjalan sebagaimana mestinya sehingga manajemen dapat menyampaikan laporan realisasi RKAP tepat waktu dan mencerminkan operasional bisnis riil dan wajar sesuai standar.

SUPERVISORY BOARD'S SUPERVISORY ROLE IN THE IMPLEMENTATION OF THE BOARD OF DIRECTORS' STRATEGY AND FREQUENCY OF ADVICE TO THE BOARD OF DIRECTORS

Under the limitations stipulated in the Articles of Association, the Supervisory Board has the authority to oversee the management of the Company, which the Board of Directors fully leads. As a manifestation of the implementation of the supervisory and advisory functions to the Board of Directors, throughout 2023, we have proactively provided strategic advice and input during the process of formulating business strategies, setting operational targets, and ensuring that the Board of Directors implements business strategies following the Company's vision, mission and objectives.

After reviewing the strategic ideas submitted by the Board of Directors and considering the macroeconomic dynamics and internal strengths, we approved and ratified the 2023 RKAP, which will be used as a foothold for Management in leading the direction of the Company's management during the 2023 reporting period.

Periodically, we review the execution of these strategies to ensure that the Company is on track to achieve its targets. Through joint meetings with the Board of Directors, which have been held 13 times in 2023, we assess that the implementation of the strategies carried out by the Board of Directors follows the 2023 RKAP and the Company's long-term plan. In these joint meetings, the Supervisory Board has provided several strategic directives, inputs, and recommendations related to the implementation of Regional Strategic Activities (KSD), which are mandated by the DKI Jakarta Provincial Government, including:

1. The Supervisory Board submitted recommendations to market and sell assets (apartments) in Nuansa Pondok Kelapa and Nuansa Cilangkap to reduce the cost of funds on loans and complete the construction.
2. Regarding the legal case of pre-operational costs related to the implementation of the Strategic Bisnis Unit Intermediate Treatment Facility (SBU ITF), which has stopped having impairment risk in the 2023 fiscal year, the Supervisory Board submitted recommendations to ensure that good corporate governance is running properly so that management can submit the RKAP realization report on time as well as reflect real and reasonable business operations according to standards.

3. Terkait dengan Proyek SJUT, Dewan Pengawas meminta Direksi agar melakukan koordinasi dengan SKPD terkait untuk mempercepat penyelesaian pembahasan Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) tentang Utilitas dan Raperda tentang Barang Milik Daerah (BMD) sehingga pihak mitra kerja sama/investor memiliki kepastian hukum atas investasi yang dilakukan.

Selama menjalankan fungsi pengawasan dan penasihat terhadap Direksi, kami senantiasa mengedepankan sikap saling menghormati antar-kedua organ, dimana terdapat pembagian tanggung jawab dan peran yang dijalankan oleh Dewan Pengawas maupun Direksi. Sikap profesional ini selalu kami junjung tinggi karena sudah menjadi komitmen bagi Dewan Pengawas untuk memberikan penilaian yang objektif dan akuntabel terhadap kinerja Direksi sesuai prinsip tata kelola yang baik.

FOKUS PENGAWASAN STRATEGI DEWAN PENGAWAS DAN REKOMENDASI YANG DIBERIKAN TAHUN 2023

Dewan Pengawas secara cermat mengawasi pelaksanaan seluruh strategi bisnis yang dijalankan Direksi dan memastikan kesesuaiannya dengan yang sudah digagaskan di awal tahun. Menurut pandangan kami, strategi dan langkah-langkah strategis yang ditempuh Direksi sepanjang tahun 2023 telah mencerminkan responsivitas Direksi terhadap kondisi pasar yang dinamis, memastikan keberlanjutan kinerja yang stabil bagi Perusahaan, serta mendukung kelancaran pelaksanaan mandat dari pemegang saham.

Dewan Pengawas memberikan dukungan penuh terhadap langkah-langkah strategis yang telah ditempuh Direksi dalam rangka menyehatkan kembali kinerja keuangan Perusahaan yang merugi di tahun ini. Di bawah kepemimpinan Direksi, kami menilai Perusahaan telah berhasil mengarungi situasi bisnis yang penuh ketidakpastian dengan mencatatkan pertumbuhan pendapatan yang terjaga pada kecenderungan yang positif dan berkelanjutan. Selain berfokus pada pelaksanaan fungsi komersial sebagai BUMD Properti, kami juga memberikan apresiasi yang tinggi atas kegigihan Direksi dan tim yang telah menunjukkan upaya maksimal dalam melaksanakan sejumlah mandat penugasan untuk mendukung program Pemerintah Provinsi DKI Jakarta melalui Kegiatan Strategis Daerah (KSD).

3. Regarding the SJUT Project, the Supervisory Board requested the Board of Directors to coordinate with the relevant SKPD to accelerate the completion of the discussion of the Regional Regulation Draft (Raperda) on Utilities and Regional Regulation on Regional Property Draft (BMD) so that the cooperation partners/investors have legal certainty over the investment made.

In carrying out our supervisory and advisory functions towards the Board of Directors, we always prioritize mutual respect between the two organs, where there is a division of responsibilities and roles carried out by the Supervisory Board and Board of Directors. We always uphold this professional attitude because it is a commitment for the Supervisory Board to provide an objective and accountable assessment of the performance of the Board of Directors under the principles of good governance.

SUPERVISORY BOARD STRATEGY FOCUS AND RECOMMENDATIONS IN 2023

The Supervisory Board carefully oversees the implementation of all business strategies carried out by the Board of Directors and ensures that they align with those initiated at the beginning of the year. In our view, the strategy and strategic measures taken by the Board of Directors throughout 2023 have reflected its responsiveness to dynamic market conditions, ensured the sustainability of stable performance for the Company, and supported the smooth implementation of the shareholders' mandate.

The Supervisory Board fully supports the strategic steps the Board of Directors took to rejuvenate the Company's loss-making financial performance this year. Under the leadership of the Board of Directors, we assess that the Company has successfully navigated an uncertain business situation by recording revenue growth that has maintained a positive and sustainable trend. In addition to focusing on the implementation of commercial functions as a BUMD Property, we highly appreciate the persistence of the Board of Directors and the team, who have shown maximum effort in carrying out several mandate assignments to support the DKI Jakarta Provincial Government program through Regional Strategic Activities (KSD).

Setelah melakukan diskusi aktif bersama Direksi, Dewan Pengawas mengarahkan fokus utama pengawasannya pada pelaksanaan sejumlah inisiatif strategis dalam rangka menjaga keberlangsungan usaha (*going concern*) dan perbaikan performa keuangan di tahun 2023. Dengan pengawasan ketat, kami mendorong Direksi untuk melakukan studi kelayakan yang mendalam sebelum mengambil keputusan investasi, melaksanakan due diligence yang ketat dalam memilih mitra bisnis agar terjalin kerja sama bisnis yang aman, serta memastikan terlaksananya *monitoring progress* terhadap proyek-proyek properti yang sedang dikelola agar senantiasa berjalan secara efektif dan efisien sehingga dapat menghasilkan kinerja bisnis yang maksimal.

Dewan Pengawas berharap hal-hal yang menjadi perhatian utama di tahun ini dapat dijadikan sebagai bahan evaluasi perbaikan bagi Direksi agar kedepannya pengelolaan Perusahaan menjadi lebih baik. Kami juga mendorong Direksi untuk terus berinovasi dan menggali potensi bisnis baru serta berusaha lebih keras untuk mengembalikan kemampuan Perusahaan dalam mencetak laba bersih dengan tetap memperhitungkan setiap risiko yang mungkin muncul.

PANDANGAN ATAS PROSPEK USAHA YANG DISUSUN DIREKSI

Perekonomian dunia diperkirakan mulai memasuki tahap akhir *soft landing* pada 2024 mendatang yang diikuti dengan penurunan inflasi global. Pemulihan ekonomi global diyakini akan berjalan sesuai harapan di mana beberapa negara maju diprediksi akan mengalami tren disinflasi yang lebih cepat dari perkiraan dan efek kenaikan suku bunga acuan tinggi juga diprediksi semakin mereda. Namun demikian, sejumlah turbulensi masih mungkin akan terjadi sehingga perlu diantisipasi secara seksama, seperti peningkatan eskalasi konflik Ukraina - Rusia dan perang di Timur Tengah, terbatasnya kebijakan fiskal secara global, hingga peningkatan risiko krisis utang dunia.

Dengan mempertimbangkan berbagai faktor risiko pelemahan yang berpotensi memengaruhi aktivitas ekonomi global ke depan, IMF memperkirakan negara-negara maju akan mengalami penurunan pertumbuhan di tahun 2024 sebelum kemudian meningkat pada tahun 2025 didukung oleh fase pemulihan di zona euro dan moderasi pertumbuhan di Amerika Serikat. Sedangkan negara-negara *emerging market* dan berkembang diperkirakan akan mengalami pertumbuhan yang stabil hingga tahun 2024 dan 2025, dengan perbedaan di tiap regional.

After active discussions with the Board of Directors, the Supervisory Board directed the main focus of its supervision on the implementation of several strategic initiatives to maintain business continuity and improve financial performance in 2023. Under close supervision, we encourage the Board of Directors to conduct in-depth feasibility studies before making investment decisions, conduct strict due diligence in selecting business partners to establish safe business cooperation and ensure the implementation of progress monitoring of property projects that are being managed so that they always run effectively, efficiently, and produce maximum business performance.

The Supervisory Board hopes that the main concerns this year can be used as evaluation material for improvement for the Board of Directors so that the management of the Company will be better. We also encourage the Board of Directors to continue to innovate, explore the potential of new businesses, and strive harder to restore the Company's ability to make a net profit while considering any risks that may arise.

OUTLOOK ON BUSINESS PROSPECTS PREPARED BY THE BOARD OF DIRECTORS

The world economy is estimated to enter the final stage of soft landing in 2024, followed by a decline in global inflation. The global economic recovery is believed to be going as expected, where several developed countries are predicted to experience a faster-than-expected disinflationary trend, and the effects of high benchmark interest rate hikes are also predicted to subside. However, various turbulences that need to be carefully anticipated are still likely to occur, such as the escalation of the Ukraine-Russia conflict and wars in the Middle East, limited fiscal policy globally, and the increasing risk of a world debt crisis.

Bearing in mind the various downside risk factors that may affect global economic activity going forward, the IMF estimates that developed countries will experience a decline in growth in 2024 before increasing in 2025, supported by the recovery phase in the Eurozone and moderating growth in the United States. Meanwhile, emerging markets and developing countries are expected to experience stable growth until 2024 and 2025, with differences in each region.

Di tengah ketidakpastian global dan prospek perlambatan pertumbuhan ekonomi global, pertumbuhan ekonomi Indonesia untuk tahun 2024 diprediksi masih tetap stabil dikisaran 5%, lebih tinggi dari proyeksi pertumbuhan ekonomi global di atas yang mencapai sebesar 2,9%. Berlanjutnya pemulihan ekonomi nasional ditopang oleh aktivitas permintaan domestik yang masih kuat dan tingginya belanja Pemerintah untuk merampungkan proyek-proyek infrastruktur yang masuk dalam daftar Program Strategis Nasional (PSN).

Dengan mempertimbangkan *outlook* positif terhadap pertumbuhan ekonomi nasional ke depan, Dewan Pengawas menilai asumsi-asumsi dasar yang dibangun Direksi dalam menetapkan target-target kinerja tahun 2024 sebagaimana terangkum dalam RKAP Tahun 2024 cukup realistis dan memungkinkan untuk dicapai serta sudah selaras dengan visi jangka panjang Perusahaan yang tertuang di dalam Rencana Bisnis Perumda Pembangunan Sarana Jaya Berbasis ESG. Kami sepenuhnya mendukung target pertumbuhan pendapatan dan laba bersih yang diproyeksikan masing-masing tumbuh 211% dan 1% pada 2024 mendatang.

Untuk dapat merealisasikan prospek usaha di tahun 2024, Dewan Pengawas berkomitmen akan terus mendukung dan mendampingi serta memberikan arahan dan masukan kepada Direksi agar semakin cakap dalam memimpin jalannya pengurusan Perusahaan di tahun 2024. Beberapa hal yang akan menjadi perhatian Dewan Pengawas dalam menyongsong tahun mendatang, antara lain:

- 1. Inovasi dan Keunggulan Kompetitif**
Kami mendorong Direksi untuk terus mendorong batas-batas inovasi pada semua aspek operasional sebagai salah satu kunci untuk meningkatkan daya saing dan meningkatkan kinerja usaha Perusahaan.
- 2. Peningkatan Efisiensi Operasional**
Memastikan tercapainya efisiensi tinggi agar Perusahaan dapat mengoptimalkan kinerja, meningkatkan profitabilitas, dan mencapai keunggulan kompetitif.
- 3. Pengembangan Sumber Daya Manusia (SDM)**
Memastikan tersedianya program pelatihan dan pengembangan kompetensi SDM yang berkesinambungan untuk membantu karyawan meningkatkan keterampilan, pengetahuan, dan kemampuan mereka dalam melaksanakan tugas-

Amidst global uncertainty and the prospect of slowing global economic growth, Indonesia's economic growth for 2024 is predicted to remain stable at around 5%, higher than the global economic growth projection above at 2.9%. The continued national economic recovery is supported by strong domestic demand activity and high government spending to complete infrastructure projects included in the National Strategic Program (PSN) list.

Reviewing the positive outlook for national economic growth going forward, the Supervisory Board assesses that the basic assumptions built by the Board of Directors in setting performance targets for 2024 as summarized in the 2024 RKAP are quite realistic and possible to achieve and align with the Company's long-term vision as stated in the ESG-Based Perumda Pembangunan Sarana Jaya Business Plan. We fully support the revenue and net profit growth targets, which are projected to grow by 211% and 1%, respectively, by 2024.

To realize the business prospects in 2024, the Supervisory Board is committed to continuing to support and assist, as well as provide direction and input to the Board of Directors so that they are more capable of leading the management of the Company in 2024. Some of the things that will be of concern to the Supervisory Board in welcoming the coming year include:

- 1. Innovation and Competitive Advantage**
We encourage the Board of Directors to continue pushing the boundaries of innovation in all operational aspects as one of the keys to enhancing competitiveness and improving the Company's business performance.
- 2. Improving Operational Efficiency**
Ensure high efficiency so the Company can optimize performance, increase profitability, and achieve competitive advantage.
- 3. Human Resources (HR) Development**
Ensure the availability of continuous HR training and competency development programs to help employees improve their skills, knowledge, and abilities in performing their core duties. Through this program, the Company is expected to produce the

tugas pokoknya. Melalui program ini diharapkan Perusahaan dapat mencetak talenta-talenta terbaik yang tidak hanya memiliki kompetensi tinggi melainkan juga tangguh dalam menghadapi tantangan dan dinamika bisnis.

4. Komitmen Terhadap GCG

Perusahaan harus menunjukkan komitmen tingginya terhadap penerapan prinsip-prinsip GCG semua proses bisnis.

5. Pemberdayaan Komunitas Lokal

Kami mendorong Perusahaan untuk terus memperkuat hubungan dan membangun kolaborasi dengan instansi lokal, seperti antar-BUMD, BUMN, Kementerian, perusahaan swasta nasional dengan melibatkan mereka dalam proses pengembangan dan pemeliharaan infrastruktur.

6. Komitmen Terhadap Pembangunan Berkelanjutan

Kami berharap agar Perusahaan dapat semakin menegaskan komitmennya terhadap pembangunan berkelanjutan dengan memerhatikan dampak lingkungan dan sosial dari setiap kegiatan operasional yang dijalankan. Dewan Pengawas mendorong Perusahaan untuk mengintegrasikan prinsip-prinsip pembangunan berkelanjutan dalam semua keputusan dan tindakan yang diambil.

Dengan berfokus pada hal-hal di atas seraya terus mempersiapkan kapasitas dan kemampuan internal dengan sebaik-baiknya, kami optimis Perusahaan akan dapat memaksimalkan peluang usaha yang terbentang lebar dan memanfaatkan momentum pemulihan ekonomi nasional secara maksimal untuk mengembalikan performa bisnis ke tingkat yang lebih sehat.

PANDANGAN TERHADAP PENERAPAN PRAKTIK TATA KELOLA PERUSAHAAN YANG BAIK

Selain mengawasi aspek keuangan dan operasional, Dewan Pengawas juga memberikan perhatian penuh terhadap komitmen penerapan *Good Corporate Governance* (GCG) yang konsisten di Perusahaan. Hal ini menjadi penting karena kami meyakini penyelenggaraan proses bisnis yang transparan, akuntabel, dan bertanggung jawab sesuai dengan prinsip-prinsip GCG merupakan kunci tercapainya pertumbuhan usaha yang sehat dan berkelanjutan.

best, most competent, and most resilient talents to face business challenges and dynamics.

4. Commitment to GCG

The Company must demonstrate its high commitment to implementing GCG principles in all business processes.

5. Local Community Empowerment

We encourage the Company to continue strengthening relationships and building collaboration with local agencies, such as inter-BUMD, SOEs, Ministries, and national private companies by involving them in infrastructure development and maintenance.

6. Commitment to Sustainable Development

We hope that the Company can further emphasize its commitment to sustainable development by paying attention to the environmental and social impacts of every operational activity carried out. The Supervisory Board encourages the Company to integrate the principles of sustainable development in all decisions and actions taken.

By focusing on the above while continuing to prepare internal capacities and capabilities to the best of our ability, we are optimistic that the Company can maximize the business opportunities that lie ahead and make the most of the momentum of the national economic recovery to restore business performance to a more sound level.

OUTLOOK ON THE IMPLEMENTATION OF GOOD CORPORATE GOVERNANCE PRACTICES

In addition to overseeing the financial and operational aspects, the Supervisory Board gives full attention to the commitment to consistently implementing Good Corporate Governance (GCG) in the Company. This is important because we believe that the implementation of transparent, accountable, and responsible business processes under GCG principles is key to achieving healthy and sustainable business growth.

Sejauh ini, kami berpandangan bahwa Direksi dan seluruh Organ Perusahaan serta segenap karyawan telah menunjukkan konsistensi dan disiplin tinggi dalam mengintegrasikan prinsip-prinsip GCG ke dalam proses operasional maupun bisnis sehari-hari. Di samping itu, kami juga memastikan bahwa setiap aktivitas yang dijalankan Perusahaan sudah sesuai dengan peraturan perundang-undangan di Indonesia dan mematuhi regulasi yang berlaku bagi BUMD Pemerintah Provinsi DKI Jakarta.

Berdasarkan hasil telaah yang sudah dilakukan Dewan Pengawas dengan dibantu Komite Audit, kami menilai bahwa semua elemen Perusahaan telah bersinergi dengan baik untuk membangun *governance process* dan *governance structure* yang efektif demi terwujudnya landasan organisasi yang semakin kuat dan tangkas menghadapi tantangan.

Sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari upaya peningkatan kualitas GCG, pada kesempatan ini, kami sekaligus ingin memberikan apresiasi atas keberhasilan Direksi dalam mengimplementasikan sistem manajemen risiko dan pengendalian internal yang terintegrasi pada seluruh unit-unit kerja sehingga Perusahaan memiliki kemampuan untuk mencegah atau menghindari terjadinya transaksi keuangan ataupun kejadian lain yang memiliki potensi risiko tinggi dapat merugikan perusahaan baik secara materiil maupun immaterial.

Sepanjang tahun 2023, Dewan Pengawas telah menyampaikan berbagai masukan dan arahan kepada Direksi terkait penerapan GCG baik melalui rapat-rapat rutin ataupun melalui surat rekomendasi penyempurnaan terhadap kesenjangan yang ditemukan dalam implementasi GCG di Perusahaan. Secara periodik, kami juga menelaah laporan pelaksanaan GCG dan Manajemen Risiko yang disampaikan oleh Direksi serta memonitor tindak lanjut atas seluruh rekomendasi perbaikan yang telah disampaikan melalui berbagai mekanisme pemberian nasehat ataupun di berbagai kesempatan pertemuan dengan Direksi.

Secara keseluruhan, kami menilai implementasi GCG di Perusahaan sudah berjalan dengan baik dan memenuhi kaidah yang distandarkan bagi BUMD Pemerintah Provinsi DKI Jakarta. Namun begitu, Dewan Pengawas tetap melihat adanya hal-hal yang masih perlu ditingkatkan dalam hal penerapan GCG di waktu mendatang sehingga kami mendorong Direksi untuk terus melakukan perbaikan berkelanjutan terhadap kualitas penerapan GCG agar Perusahaan memiliki pondasi dalam menjawab tantangan bisnis yang semakin beragam di tengah perkembangan kondisi pasar yang berubah sangat dinamis.

So far, we believe that the Board of Directors, all organs of the Company, and all employees have demonstrated high consistency and discipline in integrating GCG principles into daily operational and business processes. We also ensure that every activity carried out by the Company is under Indonesian laws and regulations and complies with regulations applicable to BUMDs of the DKI Jakarta Provincial Government.

Based on the results of the review conducted by the Supervisory Board with the assistance of the Audit Committee, we assess that all elements of the Company have synergized well to build an effective governance process and governance structure for the realization of an organizational foundation that is increasingly strong and agile in facing challenges.

As an integral part of efforts to improve the quality of GCG, we would also like to express our appreciation for the Board of Directors' success in implementing an integrated risk management and internal control system in all work units so that the Company can prevent or avoid the occurrence of financial transactions or other events that have a high-risk potential to harm the company both materially and immaterially.

Throughout 2023, the Supervisory Board has provided various inputs and directives to the Board of Directors on GCG implementation through regular meetings or letters recommending improvements to the gaps found in the implementation of GCG in the Company. Periodically, we also review the GCG and Risk Management implementation reports submitted by the Board of Directors and monitor the follow-up of all recommendations for improvement submitted through various advisory mechanisms or in multiple meetings with the Board of Directors.

Overall, we assess that the implementation of GCG in the Company has been running well and meets the standardized rules for BUMDs of the DKI Jakarta Provincial Government. However, the Supervisory Board still sees things that need improvement in GCG implementation. Therefore, we encourage the Board of Directors to continue to make continuous improvements to the quality of GCG implementation so that the Company has a foundation in answering increasingly diverse business challenges amid the development of market conditions that are changing dynamically.

Dengan dibantu oleh komite-komite pendukung yang ada, Dewan Pengawas berkomitmen akan terus memberikan arahan dan pendampingan yang maksimal kepada Direksi terutama dalam membangun sistem perusahaan yang sehat dan kuat sehingga Perusahaan mampu tumbuh berkesinambungan meski tengah dihadapkan dengan kondisi eksternal yang semakin menantang.

PANDANGAN ATAS PENGELOLAAN WHISTLE BLOWING SYSTEM (WBS)

Dalam rangka mendorong penguatan praktik GCG, Dewan Pengawas memastikan keterlibatan aktifnya dalam mengawasi efektivitas Sistem Pelaporan Pelanggaran (*Whistleblowing System*/"WBS") yang diterapkan di Perusahaan. Sebagai organ pengawas yang menjadi *counterpart* WBS, kami memastikan bahwa seluruh laporan pengaduan yang masuk melalui media WBS senantiasa ditindaklanjuti secara hati-hati dan profesional oleh pihak penanggung jawab, sesuai prosedur internal yang berlaku di Perusahaan.

Sepanjang tahun 2023, Perusahaan tidak menerima laporan pelanggaran melalui WBS. Pencapaian ini menunjukkan bahwa seluruh insan Perusahaan sudah memiliki kesadaran yang tinggi untuk selalu berperilaku sesuai dengan standar etika yang berlaku. Hal tersebut juga tidak terlepas dari upaya sosialisasi rutin WBS guna meningkatkan kesadaran pegawai terhadap kebijakan, mekanisme, dan prosedur WBS.

Berdasarkan hasil telaah dan monitoring yang sudah dilakukan, kami berpandangan Direksi telah menunjukkan komitmen penuh untuk mendukung terwujudnya lingkungan kerja yang sehat, bersih, dan bebas dari praktik tindak pelanggaran melalui pengelolaan WBS yang independen. Secara keseluruhan, kami berpendapat bahwa keberadaan WBS sudah berjalan efektif sebagai sarana pelaporan untuk mendeteksi kecurangan dan pelanggaran atau dugaan pelanggaran terhadap prinsip-prinsip GCG, nilai-nilai etika dan kebijakan atau prosedur internal yang berlaku di Perusahaan.

With the assistance of the existing supporting committees, the Supervisory Board is committed to providing maximum directive and assistance to the Board of Directors, especially in building a sound and strong corporate system so that the Company can grow sustainably despite being faced with increasingly challenging external conditions.

VIEWS ON WHISTLEBLOWING SYSTEM (WBS) MANAGEMENT

To encourage the strengthening of GCG practices, the Supervisory Board ensures its active involvement in overseeing the effectiveness of the Whistleblowing System (WBS) in the Company. As a supervisory organ that is a counterpart to the WBS, we ensure that all reports of complaints submitted through the WBS media are followed up carefully and professionally by the party in charge per the internal procedures applicable in the Company.

The Company did not receive any reports of violations through the WBS in 2023. The achievement shows that all Company personnel are highly aware of always behaving under the applicable ethical standards. This is also inseparable from WBS routine dissemination to increase employee awareness of WBS policies, mechanisms, and procedures.

Based on the results of the review and monitoring that has been carried out, we believe that the Board of Directors has shown full commitment to supporting the realization of a work environment that is healthy, clean, and free from abusive practices through independent WBS management. Overall, we consider the WBS effective as a reporting tool to detect fraud and violations or suspected violations of GCG principles, ethical values, internal policies, or procedures applicable to the Company.

PENILAIAN TERHADAP KINERJA KOMITE-KOMITE DI BAWAH DEWAN PENGAWAS

Dalam melaksanakan tugasnya, Dewan Pengawas senantiasa dibantu oleh Komite Audit, Komite Pemantau Risiko, dan Komite Remunerasi dan Nominasi. Menurut pandangan Dewan Pengawas, ketiga komite tersebut telah terlibat secara aktif dalam menjalankan fungsi pengawasan yang optimal sesuai dengan bidang penugasan atau keahlian masing-masing serta berkontribusi dalam memberikan rekomendasi strategis kepada Dewan Pengawas sebagai hasil dari evaluasi atas kinerja Perusahaan.

Pada tahun 2023, kami memberikan penilaian positif terhadap kinerja komite-komite di bawah Dewan Pengawas dengan mengacu pada ringkasan kinerja berikut ini:

Komite Audit

Dewan Pengawas menilai bahwa Komite Audit telah melakukan tugasnya dengan baik khususnya dalam pengawasan proses penyusunan laporan keuangan dan penerapan sistem pengendalian internal. Pada tahun 2023, Komite Audit telah menyelenggarakan 7 (tujuh) kali rapat dengan tingkat kehadiran rata-rata seluruh anggota adalah 100%.

Komite Pemantau Risiko

Kami memberikan apresiasi positif kepada Komite Pemantau Risiko yang telah membantu Dewan Pengawas dalam mengidentifikasi dan mengevaluasi pengelolaan risiko-risiko yang dihadapi organisasi secara cermat dan hati-hati. Pada tahun 2023, Komite Pemantau Risiko telah menyelenggarakan 8 (delapan) kali rapat dengan tingkat kehadiran rata-rata seluruh anggota adalah 100%.

Komite Remunerasi dan Nominasi

Dewan Pengawas juga memberikan penilaian terhadap kinerja Komite Remunerasi dan Nominasi yang telah berkontribusi dalam memberikan nasihat di bidang pengelolaan dan pengembangan Sumber Daya Manusia (SDM) termasuk proses remunerasi dan nominasi Dewan Pengawas dan Direksi Perusahaan. Pada tahun 2023, Komite Remunerasi dan Nominasi telah menyelenggarakan 7 (tujuh) kali rapat dengan tingkat kehadiran rata-rata seluruh anggota adalah 100%.

ASSESSMENT OF THE PERFORMANCE OF COMMITTEES UNDER THE SUPERVISORY BOARD

In carrying out its duties, the Supervisory Board is continuously assisted by the Audit Committee, the Risk Monitoring Committee, and the Remuneration and Nomination Committee. In the view of the Supervisory Board, the committees have been actively involved in carrying out optimal supervisory functions following their respective areas of assignment or expertise and have contributed to providing strategic recommendations to the Supervisory Board as a result of their evaluation of the Company's performance.

In 2023, we gave a positive assessment of the performance of the committees under the Supervisory Board with reference to the following performance summary:

Audit Committee

The Supervisory Board considers that the Audit Committee has performed its duties well, especially in supervising the process of preparing financial statements and implementing the internal control system. In 2023, the Audit Committee held seven meetings with an average attendance rate of 100% for all members.

Risk Monitoring Committee

We give positive appreciation to the Risk Monitoring Committee, which has assisted the Supervisory Board in carefully and prudently identifying and evaluating the management of risks the organization faces. In 2023, the Risk Monitoring Committee held eight meetings with an average attendance rate of 100% for all members.

Remuneration and Nomination Committee

The Supervisory Board also assessed the performance of the Remuneration and Nomination Committee, which has contributed to advising on Human Resources (HR) management and development, including the remuneration and nomination process of the Supervisory Board and Board of Directors. In 2023, the Remuneration and Nomination Committee held seven meetings with an average attendance rate of 100% for all members.

PERUBAHAN KOMPOSISI ANGGOTA DEWAN PENGAWAS

Pada tahun 2023, komposisi Dewan Pengawas Perusahaan telah beberapa kali mengalami perubahan sehubungan dengan berakhirnya masa jabatan anggota Dewan Pengawas. Dengan adanya perubahan tersebut, maka susunan Dewan Pengawas per 31 Desember 2023 adalah sebagai berikut:

Nama Name	Jabatan Title	Dasar Hukum Legal Basis	Masa Jabatan Term of Office
Andi Muhammad Iqbal Arief	Ketua Dewan Pengawas Chairman of the Supervisory Board	Keputusan Kepala Daerah Yang Mewakili Pemerintah Daerah Dalam Kepemilikan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan (KPM) Pada Perusahaan Umum Daerah Pembangunan Sarana Jaya Tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Ketua Dewan Pengawas Pada Perusahaan Umum Daerah Pembangunan Sarana Jaya tanggal 14 Maret 2023 Decree of the Regional Head Representing the Regional Government in Ownership of Separated Regional Assets (KPM) at Perusahaan Umum Daerah Pembangunan Sarana Jaya on the Dismissal and Appointment of the Chairman of the Supervisory Board at Perusahaan Umum Daerah Pembangunan Sarana Jaya, dated March 14, 2023	14 Maret 2023 – Sekarang March 14, 2023 - Present
Arief Rachman	Sekretaris Dewan Pengawas Secretary to the Supervisory Board	Keputusan Kepala Daerah Yang Mewakili Pemerintah Daerah Dalam Kepemilikan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan (KPM) Pada Perusahaan Umum Daerah Pembangunan Sarana Jaya Tentang Pengangkatan Sekretaris Dewan Pengawas Pada Perusahaan Umum Daerah Pembangunan Sarana Jaya tanggal 7 Oktober 2022 Decree of the Regional Head Representing the Regional Government in Ownership of Separated Regional Assets (KPM) at Perusahaan Umum Daerah Pembangunan Sarana Jaya on the Appointment of the Secretary to the Supervisory Board at Perusahaan Umum Daerah Pembangunan Sarana Jaya, dated October 7, 2022	7 Oktober 2022 – Sekarang October 7, 2022 – Present

Bersamaan dengan ini, perkenankanlah kami mengucapkan terima kasih dan menyampaikan apresiasi kepada jajaran Dewan Pengawas terdahulu atas dedikasi dan kontribusi pengawasan yang telah diberikan selama menjabat. Kami berharap dengan susunan keanggotaan Dewan Pengawas yang baru ini pelaksanaan fungsi pengawasan dan penasihat terhadap Direksi dapat berjalan lebih baik lagi sehingga Perusahaan mampu menciptakan nilai tambah yang berkelanjutan bagi pemegang saham dan pemangku kepentingan di masa mendatang.

APRESIASI DAN PENUTUP

Sebagai penutup, Dewan Pengawas menyampaikan ucapan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada BP-BUMD selaku wakil pemilik modal atas dukungan dan kepercayaan yang telah diberikan kepada Dewan Pengawas sehingga kami memiliki keleluasaan untuk melaksanakan tugas pengawasan dan pemberian nasihat kepada Direksi dengan itikad baik.

CHANGES IN THE COMPOSITION OF THE SUPERVISORY BOARD MEMBERS

In 2023, the composition of the Company's Supervisory Board has changed several times in connection with the expiration of the term of office of the Supervisory Board members.

At the same time, we would like to thank and express our appreciation to the previous members of the Supervisory Board for their dedication and supervisory contributions during their term of office. We hope that with the new Supervisory Board membership, the implementation of supervisory and advisory functions to the Board of Directors can proceed better so that the Company can create sustainable added value for shareholders and stakeholders in the future.

APPRECIATION AND CLOSING

To conclude, the Supervisory Board expresses its deepest gratitude to BP-BUMD as the representative of the capital owners for the support and trust of the Supervisory Board so that we have the flexibility to carry out supervisory and advisory duties to the Board of Directors in good faith.

Apresiasi yang tinggi juga kami berikan kepada Direksi dan seluruh karyawan atas komitmen dan kerja kerasnya dalam mencapai kinerja yang baik di tengah tantangan perekonomian global dan domestik. Tidak lupa, kami juga berterima kasih atas kerja sama yang terjalin solid dan interaksi positif yang telah terbina selama ini baik dengan para mitra bisnis, regulator, konsumen, maupun masyarakat sekitar.

Demikianlah kami sampaikan Laporan Pelaksanaan Tugas Pengawasan Dewan Pengawas atas kinerja dan pelaksanaan usaha Perusahaan untuk tahun 2023. Kami berharap tahun 2023 dapat memberikan pembelajaran berharga bagi seluruh insan Sarana Jaya sehingga kita semua terpacu untuk memberikan kontribusi dan kinerja yang lebih besar bagi kemajuan Perusahaan. Dengan dukungan berkelanjutan dari para pemangku kepentingan dan pengawasan penuh dari kami, Perusahaan pasti dapat semakin mengukuhkan posisinya sebagai BUMD properti yang *profitable* dan mampu membawa perubahan besar bagi pembangunan kota DKI Jakarta. Semoga Tuhan Yang Maha Kuasa senantiasa menyertai semua rencana kita ke depan dan memberikan kekuatan kepada Perusahaan untuk mengarungi perjalanan menuju masa depan yang penuh harapan.

Our high appreciation also goes to the Board of Directors and all employees for their commitment and hard work in achieving good performance amidst the challenges of the global and domestic economy. We are also grateful for the solid cooperation and positive interactions fostered with business partners, regulators, consumers, and the surrounding community.

Thus, we submit the Report on the Implementation of Supervisory Duties of the Supervisory Board on the performance and implementation of the Company's business for 2023. We hope that 2023 can provide valuable learning for all Sarana Jaya personnel so that we are all motivated to make more significant contributions and performance for the progress of the Company. With the continued support of stakeholders and our full supervision, the Company can further strengthen its position as a profitable BUMD property and bring significant changes to the development of the city of DKI Jakarta. May the Almighty God always accompany all our plans going forward and give strength to the Company to navigate the journey towards a hopeful future.

Atas nama Dewan Pengawas,
On behalf of the Supervisory Board,



Andi Muhammad Iqbal Arief
Ketua Dewan Pengawas
Chairman of the Supervisory Board

LAPORAN DIREKSI

BOARD OF DIRECTORS' REPORT

Direksi memastikan bahwa eksekusi keseluruhan strategi dan berbagai inisiatif strategis di atas sudah berjalan selaras dengan Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan (RKAP) Tahun 2023, serta sudah mengakomodir rekomendasi maupun arahan strategis yang disampaikan oleh Dewan Komisaris.

The Board of Directors ensures that the execution of the overall strategy and various strategic initiatives above has aligned with the Company's Work Plan and Budget (RKAP) Year 2023 and accommodated the recommendations and strategic directions submitted by the Supervisory Board.

Para pemegang saham dan pemangku kepentingan yang terhormat,

Puji dan syukur kami panjatkan ke hadirat Tuhan Yang Maha Esa atas limpahan berkah dan segala kemudahan yang telah diberikan kepada Perusahaan sehingga mampu menutup tahun 2023 yang menantang dengan sebaik-baiknya. Pada kesempatan yang baik ini, perkenankanlah saya mewakili jajaran Direksi lainnya menyampaikan dokumentasi perjalanan bisnis dan rangkuman kinerja Perusahaan untuk tahun buku yang berakhir pada 31 Desember 2023. Penyampaian laporan ini sekaligus menjadi bentuk pertanggungjawaban kami kepada para pemegang saham dan seluruh pemangku kepentingan lainnya.

PERKEMBANGAN MAKRO EKONOMI GLOBAL DAN EKONOMI NASIONAL

Meski pandemi sudah berakhir, tahun 2023 masih menjadi tahun yang tidak mudah bagi perekonomian dunia. Pasalnya, aktivitas perekonomian global dan perdagangan internasional yang telah terdisrupsi cukup dalam akibat pandemi ternyata memerlukan waktu yang lebih lama untuk pulih terutama dengan kemunculan sejumlah tantangan baru yang jauh lebih kompleks

Esteemed shareholders and stakeholders,

Praise and gratitude to God Almighty for the abundance of blessings and all the conveniences to Perumda Pembangunan Sarana Jaya (the Company) so that it can close the challenging year 2023 with the best results. On this good occasion, allow me to represent the other Board of Directors members to submit documentation of the business journey and summary of the Company's performance for the fiscal year ending on December 31, 2023. The submission of this report is also a form of our accountability to shareholders and all other stakeholders.

GLOBAL MACROECONOMIC AND NATIONAL ECONOMIC DEVELOPMENTS

Although the pandemic has ended, 2023 is still a challenging year for the world economy. The reason is that global economic activity and international trade, which the pandemic has profoundly disrupted, take longer to recover, especially with the emergence of various new challenges that are much more complex throughout the year. The escalation of the Russia-Ukraine geopolitical

Andira Reoputra

Direktur Utama

President Director



sepanjang tahun ini. Peningkatan tensi geopolitik Rusia-Ukraina dan diperparah dengan perang Israel-Palestina yang semakin eskalatif menjadi salah satu pemicu utama perlambatan ekonomi global di tahun 2023.

Konflik perang yang berkepanjangan telah mengakibatkan perdagangan internasional terfragmentasi menjadi dua blok besar pendukung Rusia dan Ukraina sehingga semakin mengganggu proses pemulihan disrupsi *supply* komoditas pangan dan energi yang sudah terganggu sejak pandemi. Banyak negara yang pada akhirnya membatasi perdagangan komoditas sehingga membuat harganya melonjak tinggi yang memicu kenaikan inflasi global. Selain itu, ketahanan pangan bahkan semakin tertekan akibat dampak cuaca ekstrem.

Sebagai bentuk respons terhadap pengendalian inflasi, The Fed AS dan bank-bank sentral di negara maju lainnya kompak mempertahankan kebijakan suku bunga acuan di level tinggi untuk periode yang lama (*higher for longer*) sehingga *Fed Fund Rate* (FFR) pada periode Desember 2023 berakhir di kisaran 5,25%-5,50%, tertinggi sejak 2007 silam. Sayangnya, kebijakan pengetatan moneter agresif ini memberikan tekanan terhadap perekonomian negara-negara berkembang karena mendorong terjadinya

tension and the escalating Israeli-Palestinian war is one of the primary triggers for the global economic slowdown in 2023.

The prolonged war and conflict have caused international trade to be fragmented into two large blocks supporting Russia and Ukraine, further disrupting the recovery process of food and energy commodity supply disruptions that have been disturbed since the pandemic. Many countries have ended up restricting commodity trade, causing prices to soar and triggering global inflation. In addition, food security is even more stressed due to the impact of extreme weather.

As a response to controlling inflation, the US Fed and central banks in other developed countries compactly maintain the benchmark interest rate policy at higher levels for a longer period so that the Fed Fund Rate (FFR) in the December 2023 period ends in the range of 5.25%-5.50%, the highest since 2007. Unfortunately, the aggressive monetary tightening policy puts pressure on the economies of developing countries as it encourages substantial capital outflows to developed countries,

capital outflow yang cukup besar menuju ke negara-negara maju sehingga melemahkan nilai tukar mata uang lokal terhadap US Dollar dan menimbulkan tekanan berat pada sisi fiskal seiring dengan meningkatnya beban utang luar negeri Pemerintah di banyak negara.

Di tengah eskalasi tensi geopolitik dan volatilitas pasar keuangan global yang masih tinggi, pertumbuhan ekonomi Indonesia diprediksi tidak akan terlalu terdampak. Secara *full-year* selama 2023, ekonomi Indonesia mampu mencatatkan pertumbuhan sebesar 5,05% (yoy) dan inflasi terjaga di level rendah sebesar 2,61%. Angka tersebut merupakan inflasi terendah dalam 20 tahun terakhir, di luar periode pandemi tahun 2020 dan 2021. Ketahanan eksternal Indonesia yang tetap kuat di tengah pelemahan ekonomi global menunjukkan bahwa Indonesia berhasil menavigasi perekonomian dengan cukup baik.

Di tengah perkembangan ekonomi nasional yang tumbuh positif, kinerja sektor properti menunjukkan hasil yang beragam terutama dengan kondisi suku bunga Bank Indonesia (*BI rate*) yang relatif tinggi. Berdasarkan catatan Badan Pusat Statistik, pertumbuhan real estate hanya 2,18% dengan sumbangannya terhadap PDB hanya 2,41% (yoy) pada kuartal IV-2023. Secara agregat sepanjang 2023, industri *real estate* hanya tumbuh 1,43% pada 2023 dengan distribusi 2,42% dalam struktur Produk Domestik Bruto (PDB) nasional. Stagnansi pertumbuhan pasar properti nasional sejalan dengan kondisi sektor properti global yang sepanjang tahun 2023 belum memperlihatkan tanda-tanda pemulihan secara signifikan. Setidaknya, hal tersebut terlihat dari perkembangan harga riil properti global yang tidak mengalami pertumbuhan signifikan dan bahkan masih berada di zona pertumbuhan negatif.

STRATEGI DAN KEBIJAKAN STRATEGIS TAHUN 2023

Kami menyadari bahwa upaya mempertahankan pertumbuhan yang berkelanjutan bukanlah perkara mudah. Dibutuhkan ketekunan, kerja keras, dan komitmen penuh dari seluruh karyawan dalam menerapkan strategi bisnis yang tepat terutama dalam menghadapi perubahan lanskap dinamika bisnis yang begitu cepat dan perlambatan industri properti. Dengan semangat tersebut, selama periode pelaporan 2023, kami mengarahkan fokus dan perhatian untuk mengimplementasikan strategi bisnis yang bertujuan untuk mendorong kemajuan berkelanjutan di tengah kondisi yang tidak pasti serta memastikan kelancaran proyek-proyek yang berjalan di lapangan.

weakening the exchange rate of local currencies against the US Dollar and creating heavy pressure on the fiscal side along with the increasing burden of government foreign debt in many countries.

Amidst the escalation of geopolitical tension and high volatility in global financial markets, Indonesia's economic growth is predicted to be less affected. On a full-year basis throughout 2023, Indonesia's economy recorded growth of 5.05% (yoy), and inflation was maintained at a low level of 2.61%. This is the lowest inflation in the last 20 years, excluding the pandemic period in 2020 and 2021. Indonesia's external resilience, which remains strong amidst the global economic downturn, shows that it has managed to navigate the economy quite well.

Amidst the positive development of the national economy, the property sector's performance showed mixed results, especially with the relatively high Bank Indonesia interest rate (*BI rate*). Based on Statistics Indonesia, real estate growth was only 2.18%, and its contribution to GDP was only 2.41% (yoy) in the fourth quarter of 2023. In aggregate, the real estate industry only grew 1.43% in 2023, with a distribution of 2.42% in the national Gross Domestic Product (GDP) structure. The stagnant growth of the national property market aligns with the condition of the global property sector, which has not shown significant signs of recovery throughout 2023. At least, this is evident from the development of global real property prices, which have not experienced substantial growth and are still in the negative growth zone.

STRATEGIES AND STRATEGIC POLICIES FOR 2023

We realize that maintaining sustainable growth is not easy. It takes perseverance, hard work, and full commitment from all employees to implement the right business strategy, especially in the face of a rapidly changing landscape of business dynamics and a slowdown in the property industry. In that spirit, during the 2023 reporting period, we focused on implementing business strategies to drive sustainable progress amidst uncertain conditions and ensure the smooth running of projects in the field.

Untuk dapat merealisasikan tujuan tersebut, kami telah melakukan pengelolaan risiko secara cermat serta menjalin kerja sama yang erat dengan para pemangku kepentingan lain dan juga mitra bisnis yang memiliki rekam jejak dan reputasi baik sepanjang perjalanan bisnisnya. Tidak hanya itu, kami juga berfokus pada strategi efisiensi beban overhead Perusahaan, terus mengevaluasi kinerja bisnis yang merugi, mengoptimalkan struktur organisasi, dan menekankan upaya peningkatan recurring income dari bisnis properti. Berkat implementasi strategi bisnis yang tepat, kami bersyukur dapat melewati tahun ini dengan baik meskipun hasil akhir kinerja operasional bisnis belum sepenuhnya tercapai sesuai dengan target yang ditetapkan.

Di Bulan Agustus Tahun 2023 ini juga kami melakukan formulasi ulang terhadap fokus strategi bisnis, dimana kami membagi kategori bisnis yang dijalankan menjadi 4 (empat) Lini Bisnis, yaitu Pertanahan, Hunian, Properti dan Infrastruktur.

Hal ini kami lakukan dengan tujuan menjadikan Sarana Jaya sebagai Pengembang Realestat (*Realestate Development*) terkemuka di Kota Jakarta dan juga Nasional.

Direksi memastikan bahwa eksekusi keseluruhan strategi dan berbagai inisiatif strategis di atas sudah berjalan selaras dengan Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan (RKAP) Tahun 2023, serta sudah mengakomodir rekomendasi maupun arahan strategis yang disampaikan oleh Dewan Komisaris.

PERAN DIREKSI DALAM PERUMUSAN DAN UPAYA YANG DILAKUKAN DIREKSI UNTUK MEMASTIKAN STRATEGI BERJALAN DENGAN BAIK

Sebagai pucuk pimpinan tertinggi di dalam struktur organisasi, Direksi bertanggung jawab penuh secara kolegal dalam merumuskan strategi dan arah kebijakan strategis Perusahaan. Selama proses tersebut berlangsung, Direksi turut melibatkan setiap pimpinan unit kerja dan berkonsultasi intensif dengan Dewan Komisaris dalam rangka meminta saran dan masukan untuk memberikan sudut pandang pertimbangan yang lebih luas kepada kami terutama dalam menetapkan dan memimpin jalannya arah Perusahaan selama satu tahun buku 2023.

Untuk memastikan penerapan strategi dan kebijakan strategis Perusahaan terlaksana dengan baik, kami memberikan penjabaran lebih rinci mengenai parameter penilaian kinerja baik di tingkat korporasi maupun di level unit kerja ataupun individual, serta juga menetapkan

To realize these objectives, we have carefully managed risks and worked closely with other stakeholders and business partners with a good track record and reputation throughout the business journey. Not only that, but we also focused on the Company's overhead efficiency strategy, continued to evaluate the performance of loss-making businesses, optimized the organizational structure, and emphasized efforts to increase recurring income from the property business. Thanks to the implementation of the right business strategy, we are grateful to have passed this year well even though the final results of business operational performance have not been fully achieved with the set targets.

In August 2023 we also reformulated our business strategy's focus, dividing the business categories into four Business Lines, i.e., Land-banking, Housing, Property, and Infrastructure.

We do this to make Sarana Jaya a leading Real Estate Developer in the City of Jakarta and at the national level.

The Board of Directors ensures that the execution of the overall strategy and various strategic initiatives above has aligned with the Company's Work Plan and Budget (RKAP) Year 2023 and accommodated the recommendations and strategic directions submitted by the Supervisory Board.

BOARD OF DIRECTORS' ROLE IN COMPANY STRATEGY FORMULATION AND EFFORTS MADE BY THE BOARD OF DIRECTORS TO ENSURE THE STRATEGY IS WELL-EXECUTED

As the highest leader in the organizational structure, the Board of Directors is fully collegially responsible for formulating the Company's strategic strategy and policy direction. During the process, the Board of Directors also involves each work unit leader and consults intensively with the Supervisory Board to seek advice and input to provide a broader perspective of consideration to us, especially in determining and leading the course of the Company's directive for the 2023 fiscal year.

To ensure the Company's strategic strategies and policies are well implemented, we provide a more detailed description of the performance assessment parameters at the corporate and work unit or individual level. We also set short-term targets and objectives to be achieved during

target dan tujuan jangka pendek yang hendak dicapai selama periode pelaporan di dalam RKAP Tahun 2023. Kami memastikan telah menetapkan target-target kinerja yang relevan dengan mempertimbangkan berbagai faktor seperti kondisi makroekonomi.

Sepanjang tahun 2023, Direksi telah mengadakan rapat koordinasi secara berkala dengan unit-unit kerja sebagai bentuk *close monitoring* untuk memastikan seluruh rumusan strategi dan berbagai inisiatif yang sudah disepakati bersama di awal tahun tetap relevan untuk diteruskan dan sudah terlaksana *on the right track*, seperti terkait upaya efisiensi beban *overhead* Perusahaan, evaluasi kinerja bisnis yang merugi, optimalisasi struktur organisasi, dan peningkatan *recurring income* dari bisnis properti. Dalam rapat-rapat tersebut, kami membahas isu-isu dan tantangan utama yang dihadapi Perusahaan di lapangan serta menilik perkembangan terakhir atas realisasi target yang sudah dicanangkan.

Selain melalui rapat, Direksi juga mengevaluasi efektivitas pelaksanaan strategi dan hasil yang dicapai dengan menelaah Laporan Manajemen Triwulanan Perusahaan yang didalamnya sudah terangkum capaian *Key Performance Indicator* (KPI) baik di tingkat *corporate-wide* maupun unit-unit kerja. Berdasarkan laporan tersebut, Direksi memberikan *review* dan mengarahkan unit-unit kerja untuk segera menindaklanjuti hal-hal yang masih perlu ditingkatkan sebagai bentuk perbaikan keberlanjutan.

Keterlibatan Direksi secara aktif serta kerja sama tim yang terjalin solid dalam mengawal realisasi pelaksanaan strategi dan kebijakan strategis Perusahaan menjadi bagian penting yang harus dilakukan bersama-sama untuk agar dapat diperoleh hasil kinerja bisnis yang optimal di akhir tahun.

ANALISIS ATAS KINERJA PERUSAHAAN TAHUN 2023

Perbandingan Antara Hasil yang Dicapai dengan yang Ditargetkan

Melalui penerapan strategi bisnis yang tepat di tengah kondisi eksternal yang berkembang tidak menentu, Direksi menilai kinerja dan pencapaian target bisnis Perusahaan selama tahun 2023 cukup memuaskan. Hal ini tercermin dari capaian target dan sasaran bisnis yang sebagian besar berhasil terealisasi sesuai dengan yang direncanakan di awal tahun meskipun dalam perjalanannya kami harus melakukan beberapa penyesuaian atau revisi terhadap target RKAP Tahun 2023 karena mempertimbangkan perubahan kondisi pasar yang secara langsung maupun tidak langsung memengaruhi kinerja Perusahaan.

the reporting period in the 2023 RKAP. We ensure that we have set relevant performance targets by considering various factors, such as macroeconomic conditions.

Throughout 2023, the Board of Directors held regular coordination meetings with work units as a form of close monitoring to ensure that all strategy formulations and various initiatives that had been agreed upon at the beginning of the year were still relevant to be continued and had been implemented on the right track, such as focusing on the Company's overhead efficiency strategy, evaluating the performance of loss-making businesses, optimizing the organizational structure, and increasing recurring income from the property business. In these meetings, we discuss the main issues and challenges faced by the Company in the field and review the latest developments in realizing the set targets.

In addition to the meetings, the Board of Directors evaluates the effectiveness of strategy implementation and results achieved by reviewing the Company's Quarterly Management Report, which includes Key Performance Indicator (KPI) achievements at the corporate-wide level and work units. Based on the report, the Board of Directors provides a review and directs work units to immediately follow up on matters that still need to be improved as a form of sustainability improvement.

The Board of Directors' active involvement and solid teamwork in overseeing the realization of the implementation of the Company's strategic strategies and policies is an important part that must be done together to obtain optimal business performance results at the end of the year.

ANALYSIS OF COMPANY PERFORMANCE IN 2023

Comparison Between Achieved Results and Set Target

Through the implementation of the right business strategy amid uncertain external conditions, the Board of Directors considers the performance and achievement of the Company's business targets during 2023 to be satisfactory. This is reflected in the achievement of business targets and objectives, which were mostly successfully realized as planned at the beginning of the year. However, along the way, we had to make several adjustments or revisions to the 2023 RKAP target due to changes in market conditions that directly or indirectly affected the Company's performance.

Pada tahun 2023, Perusahaan berhasil mencatatkan kenaikan pendapatan usaha sebesar 33,8% sehingga dibukukan menjadi Rp211,9 miliar atau tercapai 48% dari revisi target RKAP Tahun 2023. Peningkatan terbesar berasal dari jasa *outsourcing*, pendapatan parkir, dan pengelolaan Gedung. Sejalan dengan peningkatan pendapatan tersebut, maka beban pokok pendapatan Perusahaan juga mengalami peningkatan sehingga tercatat sebesar Rp184,8 miliar atau naik 121,9% jika dibandingkan dengan realisasi tahun 2022.

Dengan memperhitungkan pos-pos keuangan di atas, kinerja *middle line* Perusahaan menunjukkan sinyal perbaikan yang tercermin dari. Penurunan beban administrasi dan umum di tahun 2023.

Sementara itu jika ditinjau dalam hal kemampuan mencetak laba, performa profitabilitas Perusahaan mengalami tekanan di tahun ini yang di antaranya tercermin dari realisasi rugi sebelum pajak penghasilan sebesar Rp96,4 miliar, sedangkan pada tahun 2022 Perusahaan membukukan laba sebelum pajak penghasilan sebesar Rp60,3 miliar. Sejalan dengan terkoreksinya perolehan laba sebelum pajak penghasilan, Perusahaan pun mencatatkan rugi tahun berjalan sebesar Rp98,9 miliar pada 2023 atau tidak tercapai sesuai revisi target RKAP Tahun 2023. hal tersebut menunjukkan penurunan kinerja jika dibandingkan dengan tahun 2022 yang berhasil meraup laba tahun berjalan sebesar Rp78,9 miliar.

Dapat kami sampaikan bahwa secara umum hasil kinerja bisnis Perusahaan sepanjang tahun 2023 belum dapat mempersembahkan performa terbaiknya, akan tetapi kami memastikan Perusahaan tetap mampu menjaga keberlangsungan operasinya dan menunjukkan profesionalisme dalam menyelesaikan sejumlah mandat penugasan yang diamanatkan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta selaku pemegang saham, di antaranya Penugasan Proyek Fasilitas Proyek Pengolahan Sampah Antara (FPSA) dan Proyek Sarana Jaringan Utilitas Terpadu (SJUT).

Tantangan dan Upaya Mitigasi Tahun 2023

Keberhasilan Direksi dalam memimpin dan mengelola usaha Perusahaan secara normal di tengah ketidakpastian tinggi yang melanda pasar properti global maupun nasional tentu tidak lepas dari komitmen penuh dan determinasi tinggi yang ditunjukkan oleh seluruh karyawan dalam mengeksekusi langkah-langkah mitigasi yang tepat dalam menghadapi tantangan dan risiko yang dihadapi.

In 2023, the Company recorded an increase in operating revenue of 33.8% to Rp211.9 billion or 48% of the revised 2023 RKAP target. The most considerable increase came from outsourcing services, parking revenue, and building management. In line with the increase in revenue, the Company's cost of revenue also increased, recording Rp184.8 billion or up 121.9% when compared to the realization in 2022.

Considering the abovementioned financial items, the Company's middle-line performance shows improvement, as reflected in the decrease in administrative and general expenses in 2023.

Meanwhile, in terms of profitability, the Company's profitability performance has been under pressure this year, which is reflected in the realization of a loss before income tax of Rp96.4 billion, while in 2022, the Company posted a profit before income tax of Rp60.3 billion. In line with the correction in profit before income tax, the Company also recorded a loss for the year of Rp98.9 billion in 2023 or did not achieve the revised 2023 RKAP target. This shows a decline in performance compared to 2022, which managed to make a profit for the year of Rp78.9 billion.

We can say that, in general, the Company's business performance results throughout 2023 have not been able to present their best performance. However, we ensure that the Company can still maintain the continuity of its operations and demonstrate professionalism in completing several assignment mandates mandated by the DKI Jakarta Provincial Government as a shareholder, including the Assignment of the Intermediate Waste Processing Project Facility (FPSA) Project and the Integrated Utility Network Facility (SJUT) Project.

Challenges and Mitigation Efforts in 2023

The success of the Board of Directors in leading and managing the Company's business normally amidst the high uncertainty that hit the global and national property markets is indeed inseparable from the full commitment and high determination shown by all employees in executing the right mitigation steps in facing the challenges and risks faced.

Dalam mengarungi perjalanan bisnis Perusahaan selama 2023, Direksi dan jajaran Manajemen telah berdiskusi dan menganalisa sejumlah isu dan tantangan eksternal maupun internal organisasi yang secara signifikan memengaruhi kinerja Perusahaan dan mengganggu kelancaran pelaksanaan mandat, antara lain:

Isu dan Tantangan Eksternal

1. Fluktuasi Ekonomi Makro

Kondisi ekonomi global dan nasional yang tidak stabil, termasuk inflasi yang meningkat dan fluktuasi nilai tukar, telah mempengaruhi biaya proyek dan daya beli masyarakat. Selain itu, lanskap properti nasional khususnya terkait sektor perkantoran yang menunjukkan pertumbuhan negatif juga terkonfirmasi melalui Laporan John Lang LaSalle (JLL) Indonesia untuk triwulan keempat tahun 2023. Hal ini berdampak pada penjualan properti dan margin keuntungan Perusahaan.

2. Perubahan Regulasi dan Kebijakan Pemerintah

Perubahan dalam regulasi dan kebijakan pemerintah, khususnya yang terkait dengan perizinan dan pembangunan properti, sering kali menimbulkan ketidakpastian. Hal ini dapat menyebabkan penundaan proyek dan peningkatan biaya operasional.

3. Persaingan di Industri Properti

Industri properti yang semakin kompetitif dengan banyaknya pemain baru yang memasuki pasar menciptakan tekanan tambahan bagi Sarana Jaya. Untuk tetap kompetitif, perusahaan harus terus berinovasi dan meningkatkan kualitas produk serta layanan.

4. Penyelesaian Masalah Hukum

Perusahaan juga menghadapi beberapa masalah hukum yang memerlukan perhatian khusus. Penyelesaian masalah hukum ini adalah prioritas utama untuk memastikan kelancaran operasional dan menjaga reputasi Perusahaan.

Isu dan Tantangan Internal

1. Efisiensi Operasional dan Manajemen Proyek

Pengelolaan proyek yang kompleks dan besar memerlukan koordinasi yang baik dan efisiensi operasional yang tinggi. Tantangan dalam manajemen proyek dapat menyebabkan penundaan, *overbudget*, dan ketidaksesuaian kualitas.

In navigating the Company's business journey during 2023, the Board of Directors and Management have discussed and analyzed several external and internal organizational issues and challenges that significantly affect the Company's performance and disrupt the smooth implementation of the mandate, such as:

External Issues and Challenges

1. Macroeconomic Fluctuations

Unstable global and national economic conditions, including rising inflation and exchange rate fluctuations, have affected project costs and people's purchasing power. In addition, the national property landscape, especially related to the office sector, which shows negative growth, is also confirmed through the John Lang LaSalle (JLL) Indonesia Report for the fourth quarter of 2023. They have impacted property sales and the Company's profit margin.

2. Changes in Government Regulations and Policies

Changes in government regulations and policies, particularly those related to licensing and property development, often create uncertainty. They can lead to project delays and increased operating costs.

3. Competition in the Property Industry

With many new players entering the property industry, it has increasingly become competitive and created additional pressure for Sarana Jaya. To remain competitive, the Company must continue to innovate and improve the quality of products and services.

4. Settlement of Legal Issues

The Company also faced several legal issues that require special attention. Resolving these legal issues is a top priority to ensure smooth operations and maintain the company's reputation.

Internal Issues and Challenges

1. Operational Efficiency and Project Management

Managing complex and large projects requires good coordination and high operational efficiency. Challenges in project management can lead to delays, overbudget, and quality non-conformance.

2. Pengembangan Sumber Daya Manusia

Mempertahankan dan mengembangkan talenta terbaik adalah tantangan yang terus menerus. Dibutuhkan investasi berkelanjutan dalam pelatihan dan pengembangan karyawan untuk memastikan mereka memiliki keterampilan yang diperlukan untuk menghadapi dinamika industri.

3. Teknologi dan Inovasi

Adopsi teknologi baru memerlukan waktu dan investasi yang signifikan. Tantangan dalam integrasi teknologi ke dalam proses bisnis dapat menghambat upaya inovasi dan efisiensi.

4. Tata Kelola Perusahaan

Memastikan tata kelola perusahaan yang baik (*Good Corporate Governance*) merupakan tantangan internal yang penting. Tata kelola yang kurang optimal dapat memengaruhi reputasi Perusahaan dan kepercayaan dari pemangku kepentingan.

Strategi Mengatasi Tantangan

Untuk mengatasi isu dan tantangan lainnya, Perusahaan telah mengimplementasikan berbagai strategi, antara lain:

1. Meningkatkan efisiensi operasional melalui digitalisasi dan otomatisasi proses bisnis.
2. Melakukan diversifikasi portofolio proyek untuk mengurangi risiko dan memperluas pangsa pasar.
3. Mengembangkan program pelatihan yang komprehensif untuk meningkatkan kapasitas dan keterampilan karyawan.
4. Mengadopsi praktik pembangunan berkelanjutan untuk mengurangi dampak lingkungan dan mematuhi regulasi yang ada.
5. Meningkatkan komunikasi dan transparansi dengan pemangku kepentingan untuk membangun kepercayaan dan reputasi yang baik.

Sebagai bentuk respons dalam menghadapi seluruh tantangan yang dihadapi tersebut, Direksi telah mengimplementasikan strategi manajemen risiko yang tepat dan fokus pada strategi bisnis yang dititikberatkan pada upaya diversifikasi portofolio bisnis, meningkatkan efisiensi operasional, dan meningkatkan kolaborasi dengan pihak terkait. Melalui penerapan strategi bisnis yang tepat dan didukung oleh sinergi tim yang solid, kami meyakini Perusahaan tetap berada di jalur pertumbuhan yang tepat dan secara bertahap terus bergerak maju mencapai komitmen keberlanjutan untuk jangka panjang dengan target terukur.

2. Human Resource Development

Retaining and developing top talent is an ongoing challenge. Continuous investment in employee training and development is required to ensure employees have the necessary skills to deal with industry dynamics.

3. Technology and Innovation

Adoption of new technology requires significant time and investment. Challenges in technology integration into business processes can hinder innovation and efficiency efforts.

4. Corporate Governance

Ensuring good corporate governance is an important internal challenge. Suboptimal governance can affect the company's reputation and stakeholder trust.

Strategies to Overcome Challenges

To address other issues and challenges, the Company has implemented various strategies, including:

1. Improving operational efficiency through digitization and automation of business processes.
2. Diversifying the project portfolio to reduce risk and expand market share.
3. Develop a comprehensive training program to improve employee capacity and skills.
4. Adopt sustainable development practices to reduce environmental impact and comply with existing regulations.
5. Improve communication and transparency with stakeholders to build trust and good reputation.

In response to these challenges, the Board of Directors has implemented an appropriate risk management strategy and focused on a business strategy that emphasizes efforts to diversify the business portfolio, improve operational efficiency, and increase collaboration with related parties. Through the implementation of an accurate business strategy and supported by solid team synergy, we believe the Company remains on the right growth path and gradually continues to move forward to achieve sustainability commitments for the long term with measurable targets.

PROSPEK USAHA TAHUN 2024

Tahun 2024 disambut dengan sejumlah kekhawatiran mengingat kondisi perekonomian global yang diproyeksi masih akan bergejolak dan penuh dengan ketidakpastian tinggi. Memasuki bulan April 2024, dinamika ekonomi keuangan global berubah cepat dengan kecenderungan ke arah negatif akibat eskalasi perang di Timur Tengah dan ketegangan geopolitik yang makin tinggi. Selain itu, kebijakan moneter agresif The Fed AS yang cenderung mempertahankan suku bunga tinggi lebih lama dan penundaan pemangkasan suku bunga federal, serta tingginya *yield US Treasury* juga telah menyebabkan terjadinya arus modal portofolio keluar dari negara-negara *emerging* dan pindah ke Amerika Serikat sehingga menyebabkan penguatan mata uang US Dollar dan melemahnya nilai tukar mata uang berbagai negara, termasuk pelemahan Rupiah yang dialami Indonesia.

Dengan mempertimbangkan kemungkinan terjadinya skenario terburuk yang berpotensi terjadi di tahun mendatang, dalam laporan terbaru *World Economic Outlook* April 2024, IMF memproyeksikan ekonomi global akan mengalami pertumbuhan stagnan di level 3,2% (yoy) dengan tren divergensi pertumbuhan antar-negara yang semakin melebar di mana ekonomi Amerika Serikat diproyeksi tumbuh sebesar 2,7% (yoy) pada 2024 ditopang oleh kuatnya permintaan domestik dan aktivitas manufaktur yang masih ekspansif. Di sisi lain, Tiongkok diprakirakan tumbuh melambat ke level 4,6% (yoy) di tahun 2024 karena tertekan oleh krisis properti yang berlarut-larut. Pelemahan ekonomi Tiongkok yang merupakan negara dengan perekonomian terbesar kedua di dunia atau penyumbang 40% dari PDB global menjadi salah satu pemicu utama yang menyebabkan perlambatan ekonomi dunia di tahun 2024.

Di tengah asumsi pertumbuhan ekonomi global yang diprediksi kembali melanjutkan pelemahan, outlook terhadap perekonomian Indonesia pada 2024 mendatang sangat optimis didukung oleh kinerja ekonomi domestik yang resilien dari guncangan global dan situasi politik yang dingin setelah pemilu 2024 usai. Berdasarkan dinamika global dan potensi perekonomian domestik tersebut, perekonomian Indonesia diperkirakan masih tumbuh kuat pada 2024 sebesar 5,2% (yoy). Sejalan dengan hal tersebut, APBN 2024 berperan untuk meredam gejolak eksternal dan diarahkan untuk mempercepat transformasi ekonomi secara inklusif dan berkelanjutan.

BUSINESS OUTLOOK FOR 2024

The year 2024 was greeted with several concerns, with the global economic conditions projected to remain volatile and full of high uncertainty. Entering April 2024, the dynamics of the global financial economy changed rapidly with a negative trend due to the escalation of war in the Middle East and heightened geopolitical tensions. In addition, the US Fed's aggressive monetary policy that tends to keep interest rates high for longer and delay federal funds rate cuts, as well as high US Treasury yields, have also led to portfolio capital outflows from emerging countries and moved to the United States, causing the strengthening of the US Dollar and weakening the exchange rates of various countries, including the weakening of the Rupiah in Indonesia.

Considering the possibility of worst-case scenarios that could potentially occur in the coming year, the IMF projects in the latest *World Economic Outlook* April 2024 report that the global economy will experience stagnant growth at 3.2% (yoy) with a widening trend of growth divergence between countries where the United States economy is projected to grow by 2.7% (yoy) in 2024 supported by strong domestic demand and still expansive manufacturing activity. On the other hand, China is forecasted to grow slower to 4.6% (yoy) in 2024 as a protracted property crisis pressures it. The weakening of the Chinese economy, the second largest economy in the world and contributes 40% of global GDP, is one of the main triggers that will cause a slowdown in the world economy in 2024.

Amid global economic growth assumptions that are predicted to continue to weaken, the outlook for the Indonesian economy in 2024 is very optimistic, supported by a resilient domestic economic performance from global shocks and a calm political situation after the 2024 elections are over. Based on these global dynamics and the potential of the domestic economy, the Indonesian economy is estimated to still grow strongly in 2024 at 5.2% (yoy). In line with this, the 2024 state budget (APBN) plays a role in reducing external turmoil and is directed to accelerate economic transformation inclusively and sustainably.

Sejalan dengan *outlook* positif tersebut, Direksi menyambut optimis prospek bisnis yang lebih baik dan menjanjikan di tahun 2024. Dukungan penuh dari pemegang saham berupa perluasan mandat penugasan tentunya juga akan menjadi diferensiasi yang memberikan keunggulan kompetitif tersendiri bagi Perusahaan untuk dapat kembali memperbaiki dan menyehatkan kembali kinerja keuangannya sehingga pada 2024 mendatang diharapkan dapat melanjutkan pertumbuhan laba bersih yang berbalik positif dan berkelanjutan dengan tetap berhati-hati dan waspada dalam menghadapi ketidakpastian ekonomi global.

Dalam menyambut peluang bisnis yang terbuka lebar di depan mata, Direksi telah mempersiapkan strategi dan perencanaan bisnis yang matang sebagaimana telah dituangkan di dalam RKAP Tahun 2024 yang secara umum dititikberatkan pada fokus berikut ini:

1. Efisiensi
2. Menambah *Reccuring* Bisnis
3. Penjualan Persediaan *Housing & Property*

Selain berfokus pada peningkatan kinerja di semua lini bisnis utama, Perusahaan juga mengarahkan fokus dan perhatiannya pada penguatan peran strategis sebagai Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) Pemerintah Provinsi DKI Jakarta yang selama lebih dari 4 (empat) dekade konsisten mendukung program-program Pemerintah Provinsi DKI Jakarta dalam membangun Ibu Kota Jakarta.

Dengan menerapkan berbagai upaya dan strategi yang telah dicanangkan tersebut, Perusahaan berkeyakinan akan dapat mewujudkan target-target operasional maupun keuangan yang telah ditetapkan untuk tahun 2024. Direksi bersama-sama dengan Dewan Komisaris akan terus mengawal isu-isu eksternal yang berkembang dan mempertimbangkan kapasitas internal yang dimiliki seraya terus meningkatkan kemampuan pengelolaan risiko untuk meminimalkan dampak negatif dari risiko sehingga memaksimalkan peluang yang ada.

KOMITMEN TERHADAP PENERAPAN TATA KELOLA PERUSAHAAN YANG BAIK

Dalam memimpin jalannya pengurusan Perusahaan, Direksi tidak hanya berfokus pada pencapaian kinerja bisnis semata melainkan turut memberikan perhatian penuh terhadap penerapan praktik Tata Kelola Perusahaan yang baik (*Good Corporate Governance*/"GCG") pada seluruh aspek bisnis dan tingkatan organisasi. Direksi

In line with this positive outlook, the Board of Directors is optimistic about better and more promising business prospects in 2024. Full support from shareholders in the form of an expansion of the assignment mandate will also be a differentiation that provides its competitive advantage for the Company to improve and nourish its financial performance so that in 2024, it is expected to continue the growth of net profit which turns positive and sustainable while remaining careful and vigilant in the face of global economic uncertainty.

In welcoming the vast business opportunities, the Board of Directors has prepared a developed business strategy and planning as outlined in the 2024 RKAP, which generally focuses on the following:

1. Efficiency
2. Adding Recurring Business
3. Sale of Housing & Property Inventory

In addition to focusing on improving performance in all main business lines, the Company directs its focus and attention on strengthening its strategic role as a Region-Owned Enterprise (BUMD) of the DKI Jakarta Provincial Government, which has consistently supported the programs of the DKI Jakarta Provincial Government in developing the capital city of Jakarta for more than four decades.

By implementing the various efforts and strategies that have been launched, the Company believes that it will be able to realize the operational and financial targets set for 2024. The Board of Directors and Supervisory Board will continue to monitor external issues that develop and consider the internal capacity while improving risk management capabilities to minimize the negative impact of risks and maximize opportunities.

COMMITMENT TO THE IMPLEMENTATION OF GOOD CORPORATE GOVERNANCE

In leading the management of the Company, the Board of Directors focuses on achieving business performance and pays full attention to implementing Good Corporate Governance (GCG) practices in all business aspects and organizational levels. The Board of Directors ensures that the implementation of all business activities of the

memastikan pelaksanaan seluruh kegiatan usaha Perusahaan telah dilakukan secara profesional dan penuh itikad baik dengan berlandaskan pada prinsip-prinsip GCG serta mematuhi regulasi yang berlaku khususnya bagi BUMD Pemerintah Provinsi DKI Jakarta.

Berbagai upaya telah kami lakukan untuk mewujudkan hadirnya lingkungan kerja yang bebas dari praktik *bad governance* dan tindakan menyimpang lainnya yang berpotensi merugikan Perusahaan. Sepanjang tahun 2023, kami memastikan mekanisme *check and balances* antar-organ utama sudah berjalan dengan baik dan efektif, serta eksistensi pedoman-pedoman internal yang secara khusus mengatur implementasi GCG di lingkungan Perusahaan juga berdampak positif dalam membangun perilaku yang berbudaya di kalangan karyawan.

Upaya lainnya yang juga telah kami lakukan dalam rangka meningkatkan kualitas implementasi governansi di lingkup Perusahaan juga direalisasikan dengan membangun sistem manajemen risiko dan sistem pengendalian internal yang terintegrasi melalui pendekatan *third lines of defense model* serta juga didukung oleh mekanisme pengawasan manajemen yang berkesinambungan. Hadirnya lingkungan pengendalian yang *robust* memungkinkan Perusahaan untuk menata risiko yang dikelola sesuai dengan kondisi yang berlangsung sehingga proses operasional bisnis senantiasa berjalan lancar dan keberlangsungan usaha pada jangka panjang tidak terganggu.

Secara keseluruhan, komitmen Perusahaan terhadap GCG dapat dilihat dari efektivitas *Governance Structure* yang dimiliki dan *Governance Process* yang sudah berjalan selama periode pelaporan 2023. Hal tersebut juga divalidasi melalui laporan asesmen GCG Perusahaan yang sudah disampaikan oleh Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Perwakilan Provinsi DKI Jakarta yang di dalam laporannya terangkum bahwa hasil penilaian implementasi GCG Perusahaan tahun 2023 berhasil mempertahankan predikat “Baik” dengan total perolehan skor sebesar 78,00. Hasil ini menunjukkan bahwa Perusahaan telah menerapkan semua aspek GCG yang diwajibkan dan sudah melakukan pengelolaan risiko secara hati-hati pada semua aspek bisnis.

Company has been carried out professionally and in good faith based on GCG principles and complies with applicable regulations, especially for BUMD of the DKI Jakarta Provincial Government.

We have made various efforts to realize a work environment that is free from bad governance practices and other deviant actions that have the potential to harm the Company. Throughout 2023, we ensured that the check and balances mechanism between the main organs was running well and effectively, and the existence of internal guidelines that specifically regulate the implementation of GCG within the Company also positively impacted building cultured behavior among employees.

Other efforts that we have made to improve the quality of governance implementation within the Company are also realized by building an integrated risk management system and internal control system through the third lines of defense model approach, which is also supported by a continuous management supervision mechanism. The robust control environment allows the Company to manage risks by ongoing conditions so that business operations always run smoothly and long-term business sustainability is not disrupted.

Overall, the Company's commitment to GCG is evident from the effectiveness of its Governance Structure and Governance Process during the 2023 reporting period. This is also validated through the Company's GCG assessment report that has been submitted by the Development Finance Comptroller (BPKP) Representative of DKI Jakarta Province, which in its report summarizes that the results of the assessment of the Company's GCG implementation in 2023 managed to maintain the “Good” predicate with a total score of 78.00. The result shows that the Company has implemented all required GCG aspects and has carried out prudent risk management in all aspects of the business.

KOMITMEN TERHADAP KEBERLANJUTAN BISNIS

Perusahaan berkomitmen penuh untuk memastikan keberlanjutan bisnis melalui berbagai inisiatif strategis yang mencakup aspek ekonomi, sosial, dan lingkungan. Kami memahami bahwa keberlanjutan adalah kunci untuk mencapai pertumbuhan jangka panjang yang berkelanjutan dan memberikan manfaat maksimal bagi seluruh pemangku kepentingan.

1. Pengelolaan Lingkungan yang Bertanggung Jawab

Kami berkomitmen untuk mengurangi dampak lingkungan dari setiap proyek yang kami kerjakan. Upaya ini mencakup penggunaan teknologi ramah lingkungan, pengelolaan limbah yang efektif, dan penerapan praktik pembangunan berkelanjutan. Kami juga aktif dalam penghijauan kawasan sekitar proyek dan memastikan keberlanjutan ekosistem lokal.

2. Inovasi dalam Pengembangan Properti

Inovasi adalah inti dari strategi keberlanjutan kami. Kami terus mencari dan menerapkan teknologi baru yang dapat meningkatkan efisiensi energi, mengurangi jejak karbon, dan memaksimalkan penggunaan sumber daya alam secara bijak. Proyek-proyek kami dirancang dengan mempertimbangkan keberlanjutan jangka panjang, baik dalam hal desain, konstruksi, maupun operasional.

3. Tanggung Jawab Sosial Perusahaan (CSR)

Kami percaya bahwa keberlanjutan tidak hanya tentang lingkungan, tetapi juga tentang memberdayakan masyarakat. Program CSR kami berfokus pada pendidikan, kesehatan, dan pemberdayaan ekonomi komunitas lokal. Kami juga mendukung inisiatif sosial yang bertujuan meningkatkan kualitas hidup masyarakat sekitar proyek kami.

4. Pengembangan Sumber Daya Manusia

Keblanjutan bisnis tidak akan tercapai tanpa dukungan sumber daya manusia yang kompeten dan berkomitmen. Kami menyediakan berbagai program pelatihan dan pengembangan untuk meningkatkan keterampilan dan kapasitas karyawan kami. Dengan demikian, kami memastikan bahwa tim kami siap menghadapi tantangan masa depan dan mampu berinovasi dalam menjalankan setiap proyek.

COMMITMENT TO BUSINESS SUSTAINABILITY

The Company is fully committed to ensuring business sustainability through various strategic initiatives that cover economic, social, and environmental aspects. We understand that sustainability is key to achieving sustainable long-term growth and maximizing benefits for all stakeholders.

1. Responsible Environmental Management

We are committed to reducing the environmental impact of every project we undertake. This includes using environmentally friendly technologies, effective waste management, and implementing sustainable development practices. We are also active in reforesting the area around the project and ensuring the sustainability of the local ecosystem.

2. Innovation in Property Development

Innovation is at the core of our sustainability strategy. We continuously seek and apply new technologies that can improve energy efficiency, reduce our carbon footprint, and maximize the wise use of natural resources. Our projects are designed with long-term sustainability in mind, both in design, construction, and operations.

3. Corporate Social Responsibility (CSR)

We believe that sustainability is not only about the environment but also about empowering communities. Our CSR programs focus on education, health, and economic empowerment of local communities. We also support social initiatives to improve the quality of life of the communities surrounding our projects.

4. Human Resource Development

Business sustainability will not be achieved without the support of competent and committed human resources. We provide various training and development programs to enhance the skills and capacity of our employees. Thus, we ensure that our team is ready to face future challenges and able to innovate in carrying out each project.

5. Kemitraan Strategis

Kami menjalin kemitraan dengan berbagai pihak, termasuk pemerintah, sektor swasta, dan komunitas, untuk menciptakan solusi berkelanjutan. Melalui kolaborasi ini, kami dapat berbagi pengetahuan, sumber daya, dan teknologi untuk mendukung inisiatif keberlanjutan yang lebih luas.

6. Tata Kelola Perusahaan yang Baik

Kami menjunjung tinggi prinsip tata kelola perusahaan yang baik (*Good Corporate Governance*) dalam setiap aspek operasional kami. Transparansi, akuntabilitas, dan integritas adalah nilai-nilai yang kami pegang teguh dalam menjalankan bisnis. Dengan demikian, kami memastikan bahwa seluruh proses bisnis berjalan secara etis dan berkelanjutan.

PERUBAHAN KOMPOSISI DIREKSI

Pada tahun 2023, komposisi Direksi Perusahaan mengalami beberapa kali perubahan sehubungan dengan berakhirnya masa jabatan anggota Direksi dan pengangkatan anggota Direksi yang baru.

Sehubungan dengan perubahan tersebut, maka susunan Direksi Perusahaan yang menjabat pada saat Laporan Tahunan 2023 ini diterbitkan adalah sebagai berikut:

Nama Name	Jabatan Title	Dasar Hukum Legal Basis	Masa Jabatan Term of Office
Andira Reoputra	Direktur Utama President Director	Keputusan Gubernur DKI Jakarta No. 508 Tahun 2023 tanggal 31 Juli 2023 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Direksi Perumda Pembangunan Sarana Jaya DKI Jakarta Governor Decree No. 508 of 2023, dated July 31, 2023, on the Dismissal and Appointment of the Board of Directors of Perumda Pembangunan Sarana Jaya	31 Juli 2023 – Sekarang July 31, 2023 – Present
Indra Sukmono Arharrys	Direktur Pengembangan Director of Development	Keputusan Gubernur DKI Jakarta No. 508 Tahun 2023 tanggal 31 Juli 2023 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Direksi Perumda Pembangunan Sarana Jaya DKI Jakarta Governor Decree No. 508 of 2023, dated July 31, 2023, on the Dismissal and Appointment of the Board of Directors of Perumda Pembangunan Sarana Jaya	8 Juli 2023 – Sekarang July 8, 2023 – Present
Irwan Agustusan	Direktur Administrasi dan Keuangan Director of Administration and Finance	Keputusan Gubernur DKI Jakarta No. 690 Tahun 2023 tanggal 16 Oktober 2023 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Direksi Perumda Pembangunan Sarana Jaya DKI Jakarta Governor Decree No. 690 of 2023, dated October 16, 2023, on the Dismissal and Appointment of the Board of Directors of Perumda Pembangunan Sarana Jaya	13 Oktober 2023 – Sekarang October 13, 2023 – Present

Kepada segenap jajaran Direksi terdahulu, kami berterima kasih atas dedikasi dan sumbangsih yang telah diberikan selama menjabat sebagai Direktur Perusahaan. Dengan disahkannya komposisi Direksi yang baru, kami berharap dapat memberikan kontribusi yang lebih maksimal dan signifikan bagi kemajuan Perusahaan serta mampu memberi semangat baru bagi seluruh insan Perusahaan.

5. Strategic Partnerships

To create sustainable solutions, we establish partnerships with various parties, including the government, private sector, and communities. Through these collaborations, we can share knowledge, resources, and technology to support broader sustainability initiatives.

6. Good Corporate Governance

We uphold the principles of good corporate governance in every aspect of our operations. Transparency, accountability, and integrity are values we hold dear in conducting our business. As such, we ensure that all business processes run ethically and sustainably.

CHANGES IN THE BOARD OF DIRECTORS' COMPOSITION

In 2023, the Board of Directors' composition underwent several changes in connection with the expiration of the term of office of the members of the Board of Directors and the appointment of new members.

In connection with these changes, the Board of Directors' composition at the time this 2023 Annual Report is published is as follows:

We thank the previous Directors for their dedication and contributions during their term of office as Directors of the Company. With the approval of the new Board of Directors' composition, we hope it can significantly contribute to the Company's progress and provide new enthusiasm for all Company personnel.

APRESIASI

Dengan penuh rasa syukur dan hormat, Direksi mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada pemegang saham atas kepercayaan dan dorongan positif yang tiada henti diberikan kepada Perusahaan. Tidak lupa, kami juga berterima kasih kepada Dewan Komisaris atas bimbingan dan nasehatnya yang telah memampukan kami mengambil keputusan yang tepat di tengah berbagai tantangan sehingga kelangsungan usaha Perusahaan tetap terjaga pada koridor yang ditetapkan.

Apresiasi yang tinggi juga kami berikan kepada seluruh karyawan yang telah bekerja keras dan berkontribusi dalam menjaga resiliensi dan fundamental bisnis Perusahaan selama tahun 2023. Ucapan terima kasih juga kami berikan kepada para pelanggan, mitra bisnis dan regulator, serta para pemangku kepentingan lainnya yang tidak mungkin dapat kami sebutkan satu persatu.

Kami berharap hubungan harmonis yang sudah terjalin erat selama ini bersama dengan para pemangku kepentingan dapat terus berlanjut di masa datang sehingga Perusahaan dapat membukukan kinerja yang semakin kokoh dan mencapai aspirasinya menjadi perusahaan pengembang yang terkemuka dan berkelanjutan di Indonesia.

APPRECIATION

With gratitude and respect, the Board of Directors would like to express its most profound appreciation to the shareholders for their continued trust and positive encouragement of the Company. We would also like to thank the Supervisory Board for its guidance and advice, which has enabled us to make the right decisions amidst various challenges so that the Company's business continuity is maintained in the established corridor.

High appreciation also goes to all employees who have worked hard and contributed to maintaining the resilience and fundamentals of the Company's business in 2023. Our gratitude also goes to our customers, business partners, regulators, and other stakeholders that we cannot possibly mention one by one.

We hope the harmonious relationship with our stakeholders will continue so that the Company can deliver more robust performance and achieve its aspiration to become a leading and sustainable development company in Indonesia.

Atas nama Direksi,
On behalf of the Board of Directors,

Andira Reoputra
Direktur Utama
President Director

Irwan Agustusan
Direktur Administrasi
dan Keuangan
Director of Administration
and Finance

Andira Reoputra
Direktur Utama
President Director

**Andi Muhammad
Iqbal Arief**
Ketua Dewan
Pengawas
Chairman of the
Supervisory Board

Arief Rachman
Sekretaris Dewan
Pengawas
Secretary to the
Supervisory Board



SURAT PERNYATAAN DEWAN PENGAWAS DAN DIREKSI TENTANG TANGGUNG JAWAB ATAS LAPORAN TAHUNAN DAN LAPORAN KEBERLANJUTAN 2023 PERUMDA PEMBANGUNAN SARANA JAYA

STATEMENT OF SUPERVISORY BOARD AND BOARD OF DIRECTORS ON THE RESPONSIBILITY FOR THE
2023 ANNUAL REPORT AND SUSTAINABILITY REPORT OF PERUMDA PEMBANGUNAN SARANA JAYA

Kami yang bertanda tangan di bawah ini menyatakan bahwa semua informasi dalam Laporan Tahunan dan Laporan Keberlanjutan Perumda Pembangunan Sarana Jaya tahun 2023 telah dimuat secara lengkap dan bertanggung jawab penuh atas kebenaran isi Laporan Tahunan Perusahaan.

We, the signatories, hereby stated that all information contained in the 2023 Annual Report and Sustainability Report of Perumda Pembangunan Sarana Jaya has been comprehensively presented and that we are fully accountable for the accuracy of the contents of the Company's Annual Report.

Demikian pernyataan ini dibuat dengan sebenarnya.

This statement is made truthfully.

Jakarta, Mei | May 2024

Dewan Pengawas | Supervisory Board



Andi Muhammad Iqbal Arief
Ketua Dewan Pengawas
Chairman of the Supervisory Board



Arief Rachman
Sekretaris Dewan Pengawas
Secretary to the Supervisory Board

Direksi | Board of Directors



Andira Reoputra
Direktur Utama
President Director



Irwan Agustuslan
Direktur Administrasi dan Keuangan
Director of Administration and Finance

03

Profil Perusahaan

Company Profile





IDENTITAS PERUSAHAAN

CORPORATE IDENTITY



Nama Perusahaan

Company Name

[GRI 2-1, 206] [OJK C.2, C.6]

Perumda Pembangunan Sarana Jaya (Sarana Jaya)



Dasar Hukum

Legal Basis

1. Perda No. 2 Tahun 1982 Jo.
Regional Regulation No. 2 of 1982 Jo.
2. Perda No. 6 Tahun 1990 Jo.
Regional Regulation No. 6 of 1990 Jo.
3. Perda No. 8 Tahun 2014 Jo.
Regional Regulation No. 8 of 2014 Jo.
4. Perda No. 11 Tahun 2018.
Regional Regulation No. 11 of 2018.



Status Perusahaan

Company Status

Badan Usaha Milik Daerah
Regional-Owned Enterprise



Tahun Pendirian

Year of Establishment

1982



Modal Ditempatkan dan Disetor (per 31 Desember 2023)

Subscribed and Paid-In Capital (per December 31, 2023)

Rp5.625.000.000.000



Modal Dasar

Authorized Capital

Rp10.000.000.000.000



Bidang Usaha

Business Line

Properti
Property



Jumlah Pegawai (per 31 Desember 2023)

Total Employees
(per December 31, 2023)

[OJK C.3]

133 orang
133 personnel



Pemegang Saham

Shareholder

[GRI 2-1] [OJK C.3]

Pemerintah Provinsi DKI Jakarta
DKI Jakarta Provincial Government



Anak Perusahaan

Subsidiary

[OJK C.3]

PT Saranawisesa
Properindo



Negara Tempat Operasi

Country of Operation

[GRI 2-1]

Indonesia



Telepon

Phone

+62 21 352 2667



Surat Elektronik

Email

info@sarana-jaya.co.id



Faksimile

Fax

+62 21 385 3960



Situs Web

Website

www.sarana-jaya.co.id



Sekretaris Perusahaan

Corporate Secretary

Yadi Robby



Alamat

Address




[GRI 2-1] [OJK C.2]




Gedung Sarana Jaya Lt. 3
Jl. Budi Kemuliaan I No. 1,
Jakarta Pusat 10110
Sarana Jaya Building 3rd Floor
Jl. Budi Kemuliaan I No. 1,
Central Jakarta 10110



Media Sosial

Social Media

 Sarana Jaya
 @perumdasarajaya
 @pemsaranajaya

 Perumda Pembangunan Sarana Jaya
 Perumda Sarana Jaya
 @perumdasarajaya

RIWAYAT SINGKAT SARANA JAYA

BRIEF HISTORY OF SARANA JAYA

Perusahaan Umum Daerah (Perumda) Pembangunan Sarana Jaya (“Sarana Jaya” atau “Perusahaan”) merupakan Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) yang dimiliki oleh Pemerintahan Provinsi Daerah Khusus Ibukota (Pemprov DKI) Jakarta dan bergerak dalam bidang usaha properti.

Sejarah Sarana Jaya berawal dari pendirian Perusahaan Tanah dan Bangunan DKI Jakarta pada tahun 1969. Pendirian ini didasari oleh Surat Keputusan Gubernur No. Da.1/3/16/1969 tanggal 19 Februari 1969, yang kemudian diperbarui dengan Surat Keputusan Gubernur No. Da.11/2/31/1972 tanggal 2 Februari 1972. Tujuan utama pendirian Perusahaan Tanah dan Bangunan ini adalah untuk memenuhi kebutuhan masyarakat Indonesia, khususnya yang berada di wilayah DKI Jakarta dan sekitarnya, akan properti yang memadai secara fisik maupun fungsional.

Lebih dari sekadar memenuhi kebutuhan lokal, pada waktu itu, Pemerintah DKI Jakarta juga memiliki tujuan yang lebih besar, yaitu berkontribusi dalam pembangunan nasional jangka panjang melalui kegiatan usaha Perusahaan Tanah dan Bangunan ini.

Tahun 1982 menjadi tonggak sejarah berikutnya bagi Perusahaan. Di tahun ini Perusahaan Tanah dan Bangunan mengalami perubahan nama menjadi PD Pembangunan Sarana Jaya. Perubahan ini dilakukan setelah diterbitkannya Peraturan Daerah Provinsi DKI Jakarta No. 2 Tahun 1982, yang selanjutnya diperbarui melalui Peraturan Daerah No. 6 Tahun 1990 dan Peraturan Daerah No. 8 Tahun 2014. Pasca perubahan nama, fokus utama kegiatan Perusahaan beralih pada penyediaan kaveling tanah, sehingga menjadikannya dikenal sebagai “Bank Tanah” hingga tahun 1998. Transformasi ini mencerminkan adaptabilitas Perusahaan dalam menyesuaikan diri dengan perubahan regulasi dan kebutuhan masyarakat.

Dalam perkembangan selanjutnya, Sarana Jaya berperan penting sebagai penunjang kebijakan umum Pemerintah Provinsi DKI Jakarta untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat. Perusahaan ini secara aktif terlibat dalam berbagai kegiatan usaha, termasuk penyediaan tanah dan pembangunan properti seperti perumahan, bangunan umum, kawasan industri, serta sarana prasarana umum.

Perusahaan Umum Daerah Pembangunan Sarana Jaya (Region-Owned Enterprise of Pembangunan Sarana Jaya) (“Sarana Jaya” or “the Company”) is a Region-Owned Enterprise (BUMD) owned by the Jakarta Special Capital Region (DKI Jakarta) Provincial Government engaging in property business.

Sarana Jaya’s history began with the establishment of the DKI Jakarta Land and Building Company in 1969. The establishment was based on the Governor’s Decree No. Da.1/3/16/1969, dated February 19, 1969, which was later updated with the Governor’s Decree No. Da.11/2/31/1972, dated February 2, 1972. The main purpose of establishing the Land and Building Company was to fulfill the needs of the Indonesian people, especially those in the DKI Jakarta area and its surroundings, for physically and functionally adequate properties.

More than just meeting local needs, at that time, the DKI Jakarta Government also had a bigger goal, which was to contribute to long-term national development through the business activities of this Land and Building Company.

The year 1982 became the next milestone for the Company. In this year, the Land and Building Company changed its name to PD Pembangunan Sarana Jaya. The change was made after DKI Jakarta Province Regional Regulation No. 2 of 1982 was issued, further updated through Regional Regulation No. 6 of 1990 and Regional Regulation No. 8 of 2014. After the name change, the main focus of the Company’s activities shifted to the provision of land plots, making it known as the “Land Bank” until 1998. The transformation reflects the Company’s adaptability in adjusting to changes in regulations and community needs.

In its further development, Sarana Jaya plays an important role in supporting the DKI Jakarta Provincial Government’s general policies to improve the people’s welfare. The Company was actively involved in various business activities, including land provision and property development such as housing, public buildings, industrial estates, and public infrastructure facilities. These



Seluruh kegiatan ini dilaksanakan dengan mematuhi prinsip ekonomi, mengingat Perusahaan sebagai badan usaha yang harus berorientasi pada pencapaian laba.

Di tahun 2018, Pemerintah Provinsi DKI Jakarta mengeluarkan Peraturan Daerah No. 11 Tahun 2018, yang menjadi dasar hukum untuk perubahan status PD Pembangunan Sarana Jaya menjadi Perusahaan Umum Daerah (Perumda) Pembangunan Sarana Jaya. Keputusan ini mencerminkan langkah strategis dalam mengakomodir perkembangan dan kebutuhan organisasi dalam mendukung pembangunan di wilayah DKI Jakarta.

Dengan status Perumda, Sarana Jaya semakin memperkuat komitmen dan dedikasinya sebagai salah satu agen pembangunan di DKI Jakarta. Perusahaan berhasil menjadi penunjang utama visi dan misi Pemerintah Provinsi DKI Jakarta dalam upaya memajukan kota DKI Jakarta. Transformasi status ini memberikan Sarana Jaya kerangka kerja yang lebih fleksibel dan optimal dalam melaksanakan perannya sebagai entitas yang terlibat dalam pembangunan kota DKI Jakarta.

Seiring dengan peningkatan reputasi dan kredibilitasnya, Sarana Jaya telah diberikan kepercayaan oleh Pemerintah Provinsi DKI Jakarta untuk mengelola sejumlah proyek strategis di wilayah DKI Jakarta. Proyek-proyek ini meliputi penataan kawasan SPTA, pembangunan hunian terjangkau, penyelenggaraan Sarana Jaringan Utilitas

activities comply with economic principles, considering the Company as a business entity that must be oriented towards achieving profits.

In 2018, the DKI Jakarta Provincial Government issued Regional Regulation No. 11/2018, which became the legal basis for changing the status of PD Pembangunan Sarana Jaya into Regional Public Company (Perumda) Pembangunan Sarana Jaya. The decision reflected a strategic step in accommodating the development and needs of the organization in supporting development in the DKI Jakarta area.

With a Perumda status, Sarana Jaya further strengthens its commitment and dedication as one of the development agents in DKI Jakarta. The Company has succeeded in becoming the main support for the vision and mission of the DKI Jakarta Provincial Government to advance the city. The status transformation provides Sarana Jaya with a more flexible and optimal framework for carrying out its role as an entity involved in the development of DKI Jakarta.

Along with improving its reputation and credibility, Sarana Jaya has been trusted by the DKI Jakarta Provincial Government to manage several strategic projects in the DKI Jakarta area. These projects include the arrangement of the SPTA area, the construction of affordable housing, the implementation of the Integrated

Terpadu (SJUT), dan pengelolaan fasilitas pengelolaan sampah di dalam kota. Melalui keterlibatan aktif dalam proyek-proyek tersebut, Sarana Jaya terus memainkan peran sentral dalam mendukung pembangunan dan kemajuan wilayah DKI Jakarta.

Utility Network Facility (SJUT), and the management of waste management facilities in the city. Through active involvement in these projects, Sarana Jaya continues to play a central role in supporting the development and progress of the DKI Jakarta region.

Sarana Jaya menunjukkan komitmen yang kuat untuk menjaga, mengonservasi, dan berkontribusi pada kemajuan Indonesia. Perusahaan secara konsisten berupaya mendukung visi dan misi Pemerintah Provinsi DKI Jakarta dalam pengembangan kawasan perkotaan yang bersifat modern. Selain itu, Sarana Jaya memiliki rencana ekspansi dengan mengusung inovasi dan mengembangkan kreativitas guna menjadi entitas bisnis yang profesional.

Sarana Jaya demonstrates a solid commitment to maintaining, conserving, and contributing to Indonesia's progress. The Company consistently strives to support the vision and mission of the DKI Jakarta Provincial Government in the development of modern urban areas. In addition, Sarana Jaya has an expansion plan to innovate and develop creativity to become a professional business entity.

Dalam upaya mencapai tujuan tersebut, Sarana Jaya berkomitmen untuk beradaptasi dengan cepat terhadap perubahan dinamika masyarakat kota Jakarta. Perusahaan juga bertekad untuk terus menunjukkan kompetensinya dalam mengelola aset Pemerintah Provinsi DKI Jakarta, sejalan dengan tujuan pembangunan ekonomi yang berkelanjutan.

To achieve these goals, Sarana Jaya is committed to adapting quickly to the changing dynamics of Jakarta. The Company is also determined to continue demonstrating its competence in managing the assets of the DKI Jakarta Provincial Government, which aligns with the objectives of sustainable economic development.

PERUBAHAN NAMA

CHANGE OF NAME



1969 ▶ **Perusahaan Tanah dan Bangunan**
 Pendirian Perusahaan Tanah dan Bangunan Awal Mula Sarana Jaya
 Establishment of Perusahaan Tanah dan Bangunan Awal Sarana Jaya

1982 ▶ **PD Pembangunan Sarana Jaya**
 Perubahan tujuan dan usaha Sarana Jaya
 Changes in Sarana Jaya's goals and business

2018 ▶ **Perusahaan Umum Daerah (Perumda) Pembangunan Sarana Jaya**
 Perubahan Modal Dasar Perusahaan menjadi Rp10.000.000.000.000
 Change in Authorized Capital into Rp10,000,000,000,000

TONGGAK SEJARAH

MILESTONES

1969 ▶

Perusahaan didirikan dengan nama Perusahaan Tanah dan Bangunan Daerah Khusus Ibukota Jakarta.
The Company was established under the Land and Building Company of Jakarta Special Capital Region.

1982 ▶

Perusahaan Tanah dan Bangunan mengalami perubahan nama menjadi PD Pembangunan Sarana Jaya.
The Land and Building Company changed its name to PD Pembangunan Sarana Jaya.

2018 ▶

Perubahan status PD Pembangunan Sarana Jaya menjadi Perusahaan Umum Daerah (Perumda) Pembangunan Sarana Jaya sesuai dengan Peraturan Daerah Provinsi DKI Jakarta No. 11 Tahun 2018 dan dipercaya oleh Pemprov DKI Jakarta untuk menangani Pembangunan sejumlah proyek strategis di lingkungan DKI Jakarta.
The status change of PD Pembangunan Sarana Jaya to Regional Public Company (Perumda) Pembangunan Sarana Jaya, following DKI Jakarta Provincial Regulation No. 11/2018 and is trusted by the DKI Jakarta Provincial Government to handle the development of several strategic projects in DKI Jakarta.

2019 ▶

- Sarana Jaya berhasil menyelesaikan pembangunan 780 Unit Hunian Terjangkau dalam Tower Samawa di Nuansa Pondok Kelapa, Jakarta Timur.
Sarana Jaya completed the construction of 780 Affordable Housing Units in Samawa Tower at Nuansa Pondok Kelapa, East Jakarta.
- Sarana Jaya memulai Pembangunan Hunian Terjangkau kedua di Nuansa Cilangkap.
Sarana Jaya started the second Affordable Housing Development at Nuansa Cilangkap.
- Sarana Jaya menambah alat produksi baru yaitu Gedung Graha Mandiri Taspen (sekarang Naya Cikini) yang berlokasi di Cikini, Jakarta Pusat dan melakukan *launching* alat produksi baru Hotel Novotel Cikini.
Sarana Jaya added a new production asset, Graha Mandiri Taspen Building (now Naya Cikini), in Cikini, Central Jakarta, and launched a new production asset, Hotel Novotel Cikini.



2022 ▶

- **Penandatanganan Nota Kesepahaman Kerja Sama Investasi antara Sarana Jaya dengan BPKH.**
Signing a Memorandum of Understanding (MoU) on Investment Cooperation between Sarana Jaya and BPKH.
- **Penandatanganan Memorandum of Understanding (MOU) pengembangan Pasar Blok A Fatmawati antara Sarana Jaya dengan Perumda Pasar Jaya.**
Signing an MoU to develop Fatmawati Block A Market between Sarana Jaya and Perumda Pasar Jaya.
- **Sarana Jaya dan Amarta Karya berkolaborasi untuk mengembangkan lahan di kawasan Halim, Jakarta Timur.**
Sarana Jaya and Amarta Karya collaborated to develop land in the Halim area, East Jakarta.

2023 ▶

- **Penandatanganan nota kesepahaman fasilitas penyediaan hunian untuk anggota Polri dan PNS Polri.**
The Signing Memorandum of understanding on providing residential facilities for members of the National Police and National Police civil servants.
- **Penandatanganan Perjanjian Novasi atas Perjanjian Kerjasama Pengelolaan Gedung Atrium Senen.**
The Signing of the Novation Agreement on Cooperation Agreement for Atrium Senen Building Management.
- **Meresmikan PAUD SPS Satu Nusa di Menara Samawa, Nuansa Pondok Kelapa.**
Inaugurated SPS Satu Nusa PAUD at Menara Samawa, Nuansa Pondok Kelapa.
- **Perumda Pembangunan Sarana Jaya raih TOP Digital Corporate Brand Award 2023.**
Perumda Pembangunan Sarana Jaya won the TOP Digital Corporate Brand Award 2023.
- **Perumda Pembangunan Sarana Jaya raih TOP BUMD Awards 2023 dengan predikat Bintang 4 Aneka Usaha.**
Perumda Pembangunan Sarana Jaya won the TOP BUMD Awards 2023 with a 4 Star Miscellaneous Businesses title.
- **Resmikan pembangunan bank sampah Samawa di Nuansa Pondok Kelapa.**
Inaugurated the construction of Samawa Waste Bank in Nuansa Pondok Kelapa.
- **Peletakkan Batu Pertama di Menara Ayasa, Nuansa Cilangkap.**
Groundbreaking at Menara Ayasa, Nuansa Cilangkap.
- **Raih Predikat “Memuaskan” pada Gerakan Sadar Tertib Arsip Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Provinsi DKI Jakarta.**
Achieved the “Satisfactory” Predicate in the Archives Awareness Movement of the DKI Jakarta Provincial Library and Archives Service.

VISI DAN MISI [GRI 2-23] [OJK C.1]

VISION AND MISSION

Visi dan misi Perusahaan telah ditetapkan oleh Dewan Komisaris dan Direksi, serta secara berkala ditinjau keselarasannya dengan perkembangan bisnis Perusahaan.

The corporate vision and mission have been determined by the Board of Commissioners and Board of Directors and are regularly reviewed for alignment with the Company's business developments.

Visi Vision

Menjadi Perusahaan Pengembang yang terkemuka dan berkelanjutan di Indonesia

To be a prominent and sustainable Developer Company in Indonesia

Misi Mission

- **Mengembangkan bisnis properti yang mendukung strategi dan program kerja Pemprov DKI Jakarta;**
Develop a property business that supports the strategy and work program of the DKI Jakarta Provincial Government.
- **Menjalin kemitraan strategis untuk menciptakan nilai (*value creation*) produk dan jasa yang dapat memberikan manfaat kepada masyarakat luas;**
Establish strategic partnerships to create value for products and services that benefit the community at large;
- **Berperan aktif dalam mendorong pembangunan kawasan di perkotaan;**
Play an active role in encouraging regional development in urban areas;
- **Mewujudkan SDM yang unggul; dan**
Realize excellent HR; and
- **Berkomitmen terhadap lingkungan yang berkelanjutan.**
Commitment to a sustainable environment.

Nilai-Nilai Perusahaan

Corporate Values



Profesional

Professional

Bertindak profesional dan berpikir positif dalam melaksanakan tugas dan menghadapi tantangan.
Act professionally and think positively when carrying out duties and facing challenges.



Setia

Loyal

Setia terhadap Perusahaan (*esprit de corps*) dan fokus pada tujuan.
Be loyal to the Company (*esprit de corps*) and focus on goals.



Jujur

Honest

Taat asas/aturan dan tidak korupsi, serta menjunjung tinggi etika dan tata Kelola Perusahaan yang baik dalam berbisnis.
Comply with the principle/rule, do not corrupt, as well as uphold ethics and good corporate governance in business.

BIDANG USAHA [GRI 2-6] [OJK C.4]

BUSINESS LINE

Kegiatan Usaha Berdasarkan Anggaran Dasar

Menurut Pasal I Peraturan Daerah DKI Jakarta No. 6 Tahun 1990 tentang Perubahan pertama Peraturan Daerah DKI Jakarta No. 2 Tahun 1982 tentang Perusahaan Daerah Pembangunan Sarana Jaya Daerah Khusus Ibukota Jakarta, Perusahaan bertujuan untuk membantu dan menunjang kebijaksanaan umum pemerintah dalam rangka meningkatkan kesejahteraan rakyat dengan mengadakan kegiatan di bidang penyediaan tanah, pembangunan perumahan, bangunan umum, kawasan industri berikut prasarana, sarana utilitas serta fasilitasnya dengan berpegang pada prinsip ekonomi Perusahaan.

Lingkup Usaha

Lingkup usaha Perusahaan mencakup:

1. Pengembangan Lingkungan, meliputi:
 - a. Pelaksanaan pematangan tanah;
 - b. Pemindahan hak atas tanah;
 - c. Pembangunan perumahan/gedung, dilakukan dengan 3 (tiga) cara, yaitu:
 - *Build Operate Transfer (BOT)*;
 - *Build Transfer Operate (BTO)*;
 - *Kerja Sama Operasional (KSO)*.
2. Pengelolaan Aset, meliputi:
 - a. Penyewaan Hunian;
 - b. Penyewaan Ruang Kantor;
 - c. Penyewaan Ruang Usaha.

Sarana Jaya juga mempunyai entitas anak, yaitu PT Saranawisesa Properindo, yang bergerak dalam segmen usaha berikut:

1. Manajemen Properti: Pengelolaan Gedung Hunian, Perkantoran dan Pusat Perbelanjaan di wilayah DKI Jakarta;
2. Manajemen Gedung (*Building Management*);
3. Pengelolaan Parkir (*Sarana Parking*);
4. *Building Facilities Services*, meliputi: Jasa Kebersihan, Penyediaan Tenaga Keamanan, Pengadaan Teknisi atau Engineering, Resepsionis dan Pengemudi.

Business Activities Based on the Articles of Association

According to Article I of the DKI Jakarta Provincial Regulation No. 6 of 1990 on the First Amendment to the DKI Jakarta Provincial Regulation No. 2 of 1982 on Perusahaan Daerah Pembangunan Sarana Jaya Jakarta Special Capital Region, the Company aims to assist and support the government's general policy to improve people's welfare by conducting activities in land provision, development of housing, public buildings, industrial estates and infrastructure, utilities, as well as facilities by adhering to the principles of Company economics.

Business Scope

The Company's business scope includes:

1. Environmental Development, including:
 - a. Implementation of land clearing;
 - b. Transfer of land rights;
 - c. Construction of housing/buildings, which is carried out in three ways, namely:
 - *Build Operate Transfer (BOT)*;
 - *Build Transfer Operate (BTO)*;
 - *Operational Cooperation (KSO)*.
2. Asset Management, including:
 - a. Residence rental;
 - b. Office space rental;
 - c. Business space rental.

Sarana Jaya also has a subsidiary, PT Saranawisesa Properindo, which engages in the following business segments:

1. Property Management: Management of Residential Buildings, Office Buildings, and Shopping Centers in the DKI Jakarta area;
2. Building Management;
3. Parking Management (*Parking Facilities*);
4. Building Facilities Services, including: Cleaning Services, Provision of Security Personnel, Procurement of Technicians or Engineering, Receptionists, and Drivers.





Kegiatan Usaha Tahun 2023

Hingga akhir tahun 2023, Perusahaan masih melaksanakan kegiatan usaha sesuai dengan lingkup usaha yang ditentukan dalam Anggaran Dasar.

Pada bulan Agustus 2023, Perusahaan melakukan formulasi atas fokus strategi bisnis, salah satunya dengan membagi kegiatan operasional bisnis menjadi 4 lini, yaitu Pertanahan (*Land-banking*), Hunian (*Housing*), Properti (*Property*), dan Infrastruktur (*Infrastructure*). Hal ini dilakukan untuk mengukuhkan perusahaan sebagai pengembang Realestat (*Realestate Development*) terkemuka di Jakarta dan Indonesia.

Selama tahun 2023, tidak terdapat produk dan layanan Perusahaan yang dilarang atau ditarik kembali dari pasar.

[OJK C.4, F.29]

Business Activities in 2023

Until the end of 2023, the Company still carries out business activities under the business scope specified in the Articles of Association.

In August 2023, the Company formulated a business strategy focus, which was dividing business operations into four lines, i.e., Land Banking, Housing, Property, and Infrastructure. It was done to establish the Company as a leading real estate developer in Jakarta and Indonesia.

Throughout 2023, no Company products and services were banned or recalled from the market. [OJK C.4, F.29]

MILESTONES PENGEMBANGAN ALAT PRODUKSI

PRODUCTION ASSET DEVELOPMENT MILESTONES

- 1976**
Gedung CIK'S
CIK's Building
- 1989**

 - **Apartemen Palma Citra**
Palma Citra Apartment
 - **Gedung Eks Jaya Gas**
Former Jaya Gas Building
 - **Ruko Antik Segitiga Senen**
Segitiga Senen Antique Shop
- 1992**
Plaza Atrium Senen
Atrium Plaza, Senen
- 1996**
Cibubur Indah Estate
Cibubur Indah Estate
- 1997**

 - **Gedung Sarana Jaya**
Sarana Jaya Building
 - **Apartemen Mitra Oasis**
Mitra Oasis Apartment
- 1998**

 - **Apartemen Executive Menteng**
Executive Menteng Apartment
 - **Sarana Jaya Tebet**
Sarana Jaya Tebet
 - **Mall Ikan Higienis**
Hygienic Fish Market
- 2002**
Jatinegara Indah
Jatinegara Indah
- 2003**

 - **Kondominium Palma Citra**
Palma Citra Condominium
 - **Palma Citra Proyek Pondok Aren**
Palma Citra Project, Pondok Aren
- 2005**
Cibubur Junction
Cibubur Junction
- 2012**
Pondok Kelapa Town Square (POKETS)
Pondok Kelapa Town Square (POKETS)
- 2013**
Gedung Sarana Jaya 3
Gedung Sarana Jaya 3
- 2014**

 - **Wang Residence**
Wang Residence
 - **Pejaten Park Residence**
Pejaten Park Residence
 - **Grand Zam-Zam**
Grand Zam-Zam



2015

Hotel Veranda
Veranda Hotel

2016

Hotel Mercure Cikini
Mercure Hotel, Cikini

2017

CBD Pulo Jahe
Pulo Jahe Central
Business District (CBD)

2018

JPM Tanah Abang
Tanah Abang Multipurpose
Crossing Bridge (JPM)

2019

- **Hotel Novotel Cikini**
Novotel Cikini Hotel

- **Graha Mantap**
Graha Mantap

- **CBD Pulo Jahe**
Pulo Jahe CBD

- **Topping Off Hunian Terjangkau Menara Samawa Nuansa Pondok Kelapa**
Topping Off for Menara Samawa Affordable Housing, Nuansa Pondok Kelapa

2020

- **Kemari Menteng**
Kemari Menteng

- **Sarana Square**
Sarana Square

2022

- **Topping Off Menara Kanaya Nuansa Cilangkap**
Topping Off for Menara Kanaya, Nuansa Cilangkap

- **Topping Off Menara Swasana Nuansa Pondok Kelapa**
Topping Off for Menara Swasana, Nuansa Pondok Kelapa

- **Galeri Huni Jakhabitat**
Jakhabitat Residential Gallery

2023

- **Inisiasi Fokus Bisnis**
Perusahaan menjadi 4 Lini Bisnis, Pertanian (*Land-Banking*), Hunian (*Housing*), Properti (*Property*) dan Infrastruktur (*Infrastructure*)
Initiation of the Company's Business Focus into four Business Lines: Land-Banking, Housing, Property, and Infrastructure.

- **Peletakan Batu Pertama Menara Ayasa, hunian terjangkau di Jakarta untuk warga DKI Jakarta**
Groundbreaking for Menara Ayasa, affordable housing in Jakarta for DKI Jakarta residents

- **Pembangunan Tugu Taman ASEAN**
ASEAN Park Monument construction

- **Pembangunan Warna Situ Gantung (*Landed House*)**
Warna Situ Gantung (*Landed House*) construction



WILAYAH BISNIS [GRI 2-1, 2-6] [OJK C.2, C.3]

BUSINESS AREAS





Bank Tanah Land Banking



1. **Kawasan Tebet (Bank Tanah/Penataan Kawasan)**
Jl. Tebet Barat IV No. 20,
Jakarta Selatan 12810
2. **Kawasan Lebak Bulus (Bank Tanah/Penataan Kawasan)**
Jl. H. Ilyas No. 10, Cilandak,
Jakarta Selatan 12440
3. **Kawasan TB Simatupang (Bank Tanah/Penataan Kawasan)**
Jl. TB Simatupang No. 42, Cilandak,
Jakarta Selatan 12430
4. **Kawasan SPTA (Bank Tanah/Penataan Kawasan)**
Kampung Bali dan Kebon Kacang,
Tanah Abang, Jakarta Pusat
5. **Kawasan Rorotan (Bank Tanah/Penataan Kawasan)**
Rorotan, Cilincing, Jakarta Utara

Hunian Housing



6. **Apartemen Palma Citra (Hunian)**
Jl. Gatot Subroto Kav. 26-27,
Kuningan, Jakarta Selatan
7. **Pejaten Park Residence (Hunian)**
Jl. Warung Buncit Raya No. 21,
Jakarta Selatan
8. **Nuansa Pondok Kelapa (Hunian)**
Jl. H. Naman No. 54,
Pondok Kelapa, Kec. Duren Sawit,
Jakarta Timur 13450
9. **Nuansa Cilangkap (Hunian)**
Jl. Raya Cilangkap, Cipayung,
Jakarta 13870
10. **Warna Situ Gintung (Hunian)**
Jl. Ir. H. Juanda, Ciputat,
Tangerang Selatan, 15411

Properti Property



11. **Gedung Sarana Jaya (Properti)**
Jl. Budi Kemuliaan I No. 1, Gambir,
Jakarta Pusat 10110
12. **Naya Pramuka (Properti)**
Jl. Rawamangun No. 59C,
Kel. Rawa Sari, Kec. Cempaka Putih,
Jakarta Pusat.
13. **Mall Atrium Senen (Properti)**
Jl. Senen Raya No. 135,
Jakarta Pusat 10410
14. **Naya Cikini (Properti)**
Jl. Cikini Raya No. 42,
Menteng, Jakarta 10330
15. **Naya Menteng (Properti)**
No. 84-86, Jl. Cikini Raya No. 14,
Menteng, Jakarta Pusat 10330
16. **Kemari Menteng (Properti)**
Jl. Pegangsaan Barat No. 16,
Jakarta 10310
17. **Hotel Mercure Cikini (Properti)**
Jl. Cikini Raya No. 66-68
Kel. Cikini, Kec. Menteng, Jakarta Pusat
18. **Hotel Novotel Cikini (Properti)**
Jl. Cikini Raya No. 107,
Menteng, Jakarta 10330
19. **Hotel Veranda (Properti)**
Jl. Kyai Maja No. 63,
Kel. Kramat Pela, Kec. Kebayoran Baru,
Jakarta Selatan
20. **Mall Pondok Kelapa Town Square (POKETS) (Properti)**
Jl. Raya Pondok Kelapa, Kel. Pondok Kelapa,
Kec. Duren Sawit, Jakarta Timur
21. **CBD Pulo Jahe (Properti)**
Pemukiman Pulo Jahe (Jatinegara Indah),
Kel. Jatinegara, Kec. Cakung, Jakarta Timur
22. **Mall Cibubur Junction (Properti)**
Jl. Jambore No. 1, Cibubur, 13720

Infrastruktur Infrastructure



23. **JPM Tanah Abang (Infrastruktur)**
Jl. Jatibaru Raya, Tanah Abang,
Jakarta 10250
24. **Fasilitas Pengolahan Sampah Antara (FPSA) (Infrastruktur)**
Wilayah Jakarta Timur
dan Jakarta Selatan
25. **Sarana Jaringan Utilitas Terpadu (SJUT) (Infrastruktur)**
Wilayah Jakarta Pusat dan Jakarta Barat

STRUKTUR ORGANISASI

ORGANIZATIONAL STRUCTURE

Struktur organisasi Perusahaan mengalami perubahan sejak tahun 2021 sehubungan dengan dibentuknya beberapa *Strategic Business Unit* dan unit kerja yang baru, guna mendukung kegiatan bisnis Perusahaan.

Perubahan struktur organisasi Perusahaan tersebut mengacu pada beberapa kebijakan berikut ini:

1. Peraturan Direksi Perusahaan No. 01 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Sekretaris Perusahaan di Perusahaan Umum Daerah Pembangunan Sarana Jaya DKI Jakarta;
2. Peraturan Direksi Perusahaan No. 02 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Manajemen Risiko dan Hukum Perusahaan di Perusahaan Umum Daerah Pembangunan Sarana Jaya DKI Jakarta;
3. Peraturan Direksi Perusahaan No. 19 Tahun 2021 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja *Strategic Business Unit* (SBU) Fasilitas Pengelolaan Sampah Antara (FPSA)/*Intermediate Treatment Facility* (ITF) pada Perusahaan Umum Daerah Pembangunan Sarana Jaya; dan
4. Peraturan Direksi Perusahaan No. 20 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Sarana Jaringan Utilitas Terpadu Perusahaan Umum Daerah Pembangunan Sarana Jaya DKI Jakarta.

Adapun unit kerja yang baru dibentuk tersebut adalah: 1) Sekretaris Perusahaan; 2) Manajemen Risiko dan Hukum; 3) Satuan Pemeriksaan Intern; 4) Divisi Pertanahan dan Hukum; 5) Divisi Usaha; 6) Unit Perencanaan dan Pembangunan; 7) Unit Pemasaran dan Pengelolaan Aset; 8) Unit Layanan Pengadaan; 9) Unit FPSA; 10) Unit SJUT; 11) Unit TIK; 12) Unit Kawasan, Proyek; 13) Divisi Umum dan SDM, dan 14) Divisi Keuangan & Akuntansi.

The Company's organizational structure has changed since 2021 in relation to the formation of new Strategic Business Units and work units to support the Company's business activities.

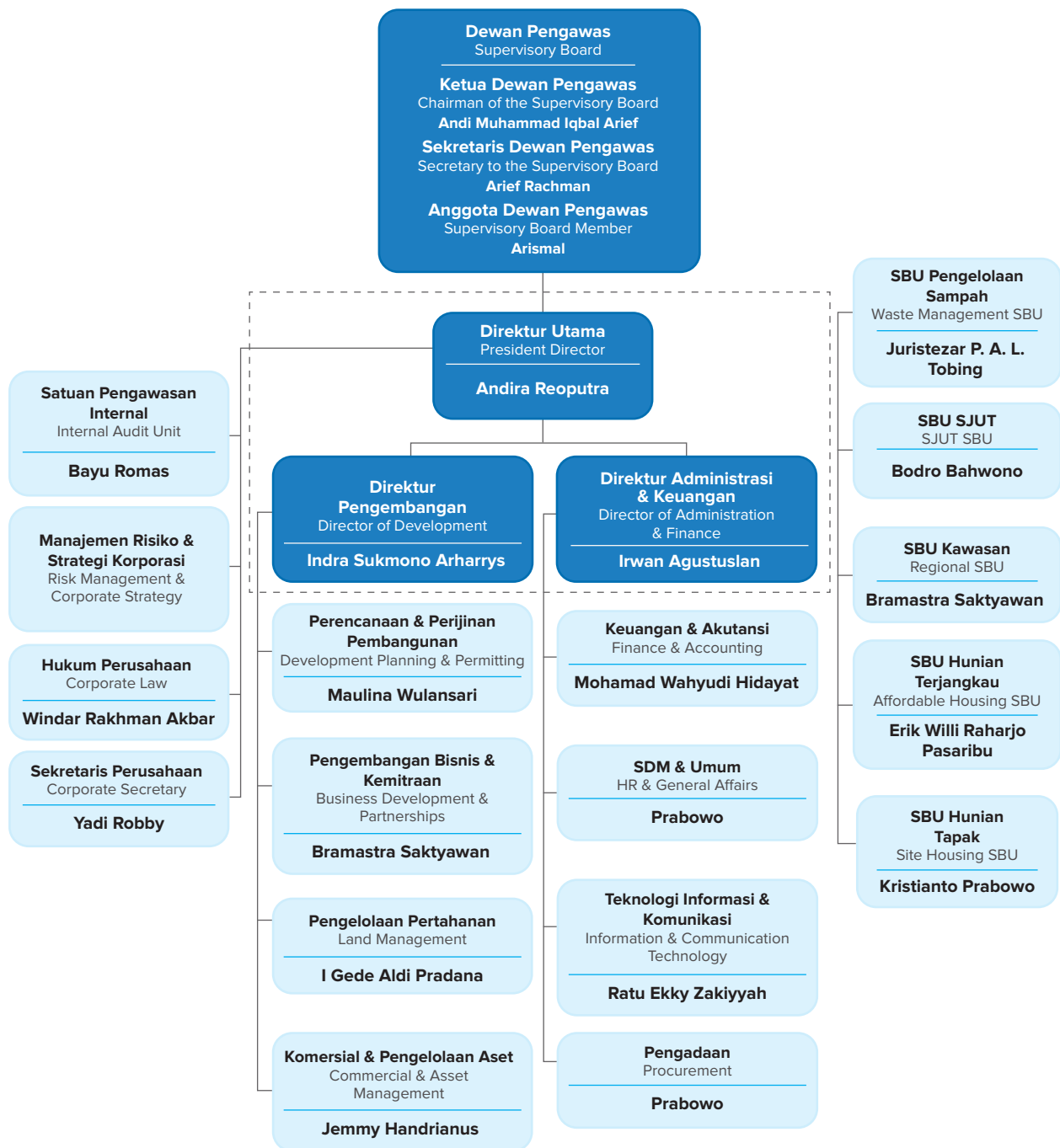
Changes to the Company's organizational structure refer to the following policies:

1. Board of Directors Regulation No. 01 of 2021 on the Organization and Work Procedures of the Corporate Secretary Unit at Perusahaan Umum Daerah Pembangunan Jaya DKI Jakarta;
2. Board of Directors Regulation No. 02 of 2021 on the Organization and Work Procedures of the Risk Management Unit and Company Law at Perusahaan Umum Daerah Pembangunan Jaya DKI Jakarta;
3. Board of Directors Regulation No. 19 of 2021 on the Establishment of Strategic Business Unit (SBU) Organization and Work Procedures of the Intermediate Waste Management Facility (FPSA)/ Intermediate Treatment Facility (ITF) at Perusahaan Umum Daerah Pembangunan Jaya; and
4. Board of Directors Regulation No. 20 of 2021 on the Organization and Work Procedures of the Integrated Utility Network Facility Unit of Perusahaan Umum Daerah Pembangunan Jaya DKI Jakarta.

The newly formed work units are 1) Corporate Secretary; 2) Risk Management and Legal; 3) Internal Audit Unit; 4) Land and Legal Division; 5) Business Division; 6) Planning and Development Unit; 7) Marketing and Asset Management Unit; 8) Procurement Services Unit; 9) FPSA Unit; 10) SJUT Unit; 11) ICT Unit; 12) Area, Project Unit; 13) General Affairs and HR Division; and 14) Finance & Accounting Division.

Pada tahun 2023, Perusahaan mengalami perubahan struktur organisasi dengan berlandaskan pada Peraturan Direksi No. 80 Tahun 2023 tentang Organisasi dan Tata Kerja di Bawah Direksi Perusahaan Umum Daerah Pembangunan Sarana Jaya DKI Jakarta. Struktur organisasi Sarana Jaya yang digunakan sejak 27 November 2023 diuraikan berikut ini:

In 2023, the Company changed its organizational structure based on Board of Directors Regulation No. 80 of 2023 on the Organization and Work Procedures under the Board of Directors of Perusahaan Umum Daerah Pembangunan Sarana Jaya DKI Jakarta. Sarana Jaya's organizational structure used as of November 27, 2023, is as follows:



Keterangan | Note :

- Garis Komando
Site Housing SBU
- - - Garis Koordinasi
Coordination Line

Daftar Nama Dewan Pengawas di Sarana Jaya (27 November 2023 – 29 Februari 2024)
List of Supervisory Board Officials in Sarana Jaya (November 27, 2023 – February 29, 2024)

Nama Jabatan Title	Nama Pejabat Name of Official	Keterangan Description
Ketua Dewan Pengawas Chairman of the Supervisory Board	Andi Muhammad Iqbal Arief	
Sekretaris Dewan Pengawas Secretary to the Supervisory Board	Arief Rachman	
Anggota Dewan Pengawas Supervisory Board Member	Arismal	Selesai masa tugas pada tanggal 12 Oktober 2023 Concluded the service term on October 12, 2023

Daftar Nama Direksi di Sarana Jaya (27 November 2023 – 29 Februari 2024)
List of Board of Directors in Sarana Jaya (November 27, 2023 – February 29, 2024)

Nama Jabatan Title	Nama Pejabat Name of Official	Keterangan Description
Direktur Utama President Director	Andira Reoputra	Mulai bertugas pada tanggal 31 Juli 2023 On duty since July 31, 2023
Direktur Administrasi dan Keuangan Director of Administration and Finance	Irwan Agustuslan	Mulai bertugas pada tanggal 12 Oktober 2023 On duty since October 12, 2023
Direktur Pengembangan Director of Development	Indra Sukmono Arharrys	Sesuai SK Gubernur DKI Jakarta Nomor 690 Tahun 2023 sejak 08 Juli 2023 Per the DKI Jakarta Governor Decree No. 690 of 2023 since July 8, 2023

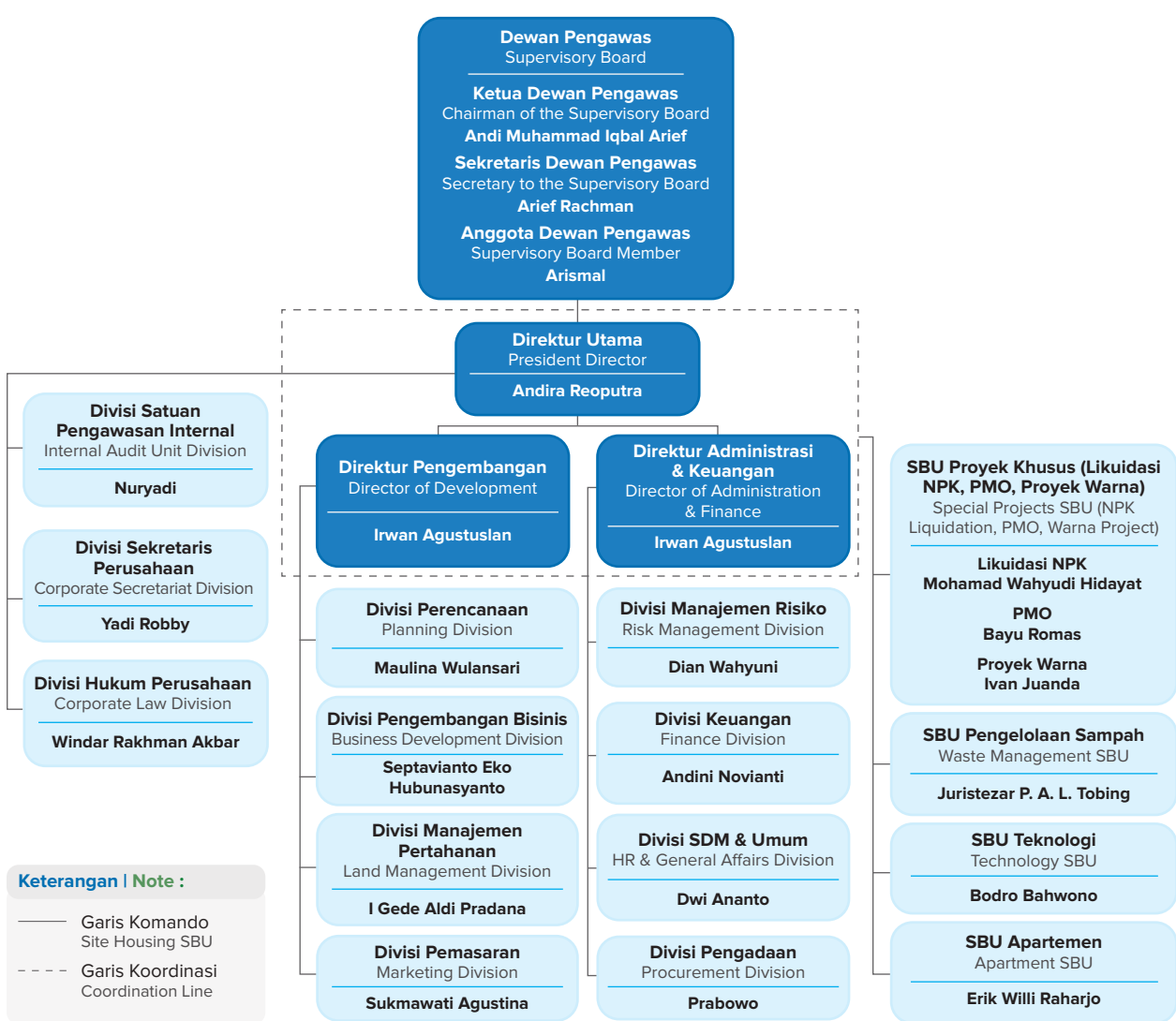
Daftar Nama Pejabat di Sarana Jaya (27 November 2023 – 29 Februari 2024)
List of Officials in Sarana Jaya (November 27, 2023 – February 29, 2024)

Nama Jabatan Title	Nama Pejabat Name of Official
Kepala Satuan Pengawas Intern Head of Internal Audit Unit	Bayu Romas
Manajer Divisi Sekretaris Perusahaan Manager of Corporate Secretariat Division	Yadi Robby
Manajer Divisi Manajemen Risiko dan Strategi Korporasi Manager of Risk Management & Corporate Strategy Division	-
Pt. Manajer Divisi Hukum Perusahaan Acting Manager of Corporate Law Division	Windar Rakhman Akbar
Pt. Manajer Divisi Pengembangan Bisnis dan Kemitraan Acting Manager of Business Development & Partnerships Division	Bramastra Sakyawan
Pt. Manajer Divisi Pengelolaan Pertanahan Acting Manager of Land Management Division	I Gede Aldi Pradana
Pt. Manajer Divisi Perencanaan dan Perijinan Pembangunan Acting Manager of Development Planning & Permitting Division	Maulina Wulansari
Manajer Divisi Komersial dan Pengelolaan Aset Manager of Commercial & Asset Management Division	Jemmy Handrianus
Manajer Divisi Pengadaan Manager of Procurement Division	Prabowo
Pt. Manajer Divisi SDM dan Umum Acting Manager of HR & General Affairs Division	Prabowo
Manajer Divisi Keuangan dan Akuntansi Manager of Finance & Accounting Division	Mohamad Wahyudi Hidayat
Manajer Divisi Teknologi Informasi Manager of Informational Technology Division	Ratu Ekky Zakiiyah

Nama Jabatan Title	Nama Pejabat Name of Official
Manajer SBU Pengolahan Sampah Manager of Waste Management SBU	Juristezar P. A. L. Tobing
Manajer SBU Sarana Jaringan Utilitas Terpadu Manager of Integrated Utility Network Facility SBU	Bodro Bahwono
Manajer SBU Kawasan Manager of Regional SBU	Bramastra Saktyawan
Manajer SBU Hunian Terjangkau Manager of Affordable Housing SBU	Erik Willi Raharjo Pasaribu
Manajer SBU Hunian Tapak Manager of Site Housing SBU	Kristianto Prabowo

Pada 29 Februari 2024, struktur organisasi Perusahaan kembali mengalami perubahan seiring dengan diterbitkannya dengan berlandaskan pada Peraturan Direksi No. 6 Tahun 2024 tentang Organisasi dan Tata Kerja di Bawah Direksi Perusahaan Umum Daerah Pembangunan Sarana Jaya DKI Jakarta. Dengan demikian, struktur organisasi Perusahaan yang saat ini digunakan adalah sebagai berikut:

On February 29, 2024, the Company's organizational structure underwent another change following the issuance of the Board of Directors Regulation No. 6 of 2024 on the Organization and Work Procedures under the Board of Directors of the Perusahaan Umum Daerah Pembangunan Jaya DKI Jakarta. Thus, the current organizational structure currently in the Company is as follows:



Keterangan | Note :
 ——— Garis Komando
Site Housing SBU
 - - - - Garis Koordinasi
Coordination Line

Dalam pelaksanaan tugas sesuai dengan Struktur Organisasi di atas, Dewan Pengawas juga didukung oleh Komite-Komite di bawahnya, yaitu:

1. Komite Audit, dengan komposisi per 31 Desember 2023 adalah sebagai berikut:
 - Ketua: Arief Rachman
 - Anggota: Irwan Saputra
 - Anggota: Nizar Suhendra
2. Komite Remunerasi dan Nominasi, dengan komposisi per 31 Desember 2023 adalah sebagai berikut:
 - Ketua: Arief Rachman
 - Anggota: Dariyah
 - Anggota: Delfi Elius
3. Komite Pemantau Risiko, dengan komposisi per 31 Desember 2023 adalah sebagai berikut:
 - Ketua: Arief Rachman
 - Anggota: Tritoto Harwono
 - Anggota: Delfi Elius

In carrying out its duties following the above Organizational Structure, the Supervisory Board is also supported by its Committees, namely:

1. Audit Committee, whose composition as of December 31, 2023, is as follows:
 - Head: Arief Rachman
 - Member: Irwan Saputra
 - Member: Nizar Suhendra
2. Remuneration and Nomination Committee, with the composition as of December 31, 2023, is as follows:
 - Head: Arief Rachman
 - Member: Dariyah
 - Member: Delfi Elius
3. Risk Monitoring Committee, with the composition as of December 31, 2023, is as follows:
 - Head: Arief Rachman
 - Member: Tritoto Harwono
 - Member: Delfi Elius

KEANGGOTAAN ORGANISASI DAN ASOSIASI INDUSTRI [GRI 2-28] [OJK C.5]

MEMBERSHIPS IN ORGANIZATIONS AND INDUSTRIAL ASSOCIATIONS

Hingga akhir tahun 2023, Perusahaan tergabung dalam beberapa organisasi dan asosiasi industri, sebagaimana diuraikan pada tabel berikut:

Until the end of 2023, the Company is a member of several industry organizations and associations, as described in the following table:

No.	Nama Organisasi dan Asosiasi Organization and Association Name	Posisi Kepesertaan Membership Position	Skala Organisasi Organization Scale	Tujuan Goal
1.	Real Estate Indonesia	Anggota Tahunan Annual Member	Nasional National	Demi mengisi pembangunan serta pengabdian kepada bangsa dan negara dengan senantiasa menjaga keselarasan antara kepentingan usaha dan kepentingan pembangunan bangsa dan negara, menghindarkan diri dari persaingan yang tidak sehat serta memberikan pelayanan pada masyarakat dengan sebaik-baiknya. To fulfill development and serve the nation and country by maintaining harmony between business interests and the interests of nation and state development, avoiding unfair competition, and providing the best service to the community.
2.	Indonesia Global Compact Network	Anggota Tahunan Annual Member	Internasional International	<ul style="list-style-type: none"> • Mendorong upaya-upaya untuk mencapai tujuan pembangunan berkelanjutan. Encourage efforts to achieve sustainable development goals. • Meningkatkan implementasi dan penerapan 10 Prinsip UNGC dan 17 poin SDGs pada lingkungan Sarana Jaya. Improve the implementation and application of the 10 UNGC Principles and 17 SDGs in the Sarana Jaya environment.

PERUBAHAN KOMPOSISI DIREKSI

CHANGES IN THE BOARD OF DIRECTORS COMPOSITION

Pada tahun 2023, komposisi Direksi Perusahaan mengalami beberapa kali perubahan sehubungan dengan berakhirnya masa jabatan anggota Direksi dan pengangkatan anggota Direksi yang baru.

The composition of the Board of Directors underwent several changes in 2023 due to the end of the term of office of Board of Directors members and the appointment of new Board of Directors members.

Dengan demikian kronologis perubahan komposisi Direksi Perusahaan pada tahun 2023 adalah sebagai berikut:

Therefore, the chronology of changes in the Board of Directors composition in 2023 is as follows:

Komposisi Direksi Sarana Jaya Periode 1 Januari 2023 – 31 Juli 2023 Sarana Jaya Board of Directors Composition from January 1, 2023, to July 31, 2023

Nama Name	Jabatan Title	Dasar Hukum Legal Basis	Masa Jabatan Term of Office
Agus Himawan Widiyanto	Direktur Utama President Director	Keputusan Gubernur DKI Jakarta No. 363 Tahun 2021 tanggal 30 Maret 2021 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Direktur Utama Perumda Pembangunan Sarana Jaya DKI Jakarta Governor Decree No. 363 of 2021, dated March 30, 2021, on the Dismissal and Appointment of the President Director of Perumda Pembangunan Sarana Jaya	30 Maret 2021 – 31 Juli 2023 March 30, 2021 – July 31, 2023
Bima Priya Santosa	Direktur Administrasi dan Keuangan Director of Administration and Finance	Keputusan KPM tanggal 31 Agustus 2022 tentang Pengangkatan Ketua Dewan Pengawas dan Direktur Administrasi dan Keuangan pada Perumda Pembangunan Sarana Jaya KPM Decree dated August 31, 2022, on the Appointment of the Chairman of the Supervisory Board and the Director of Administration and Finance at Perumda Pembangunan Sarana Jaya	Tahun 2018 – 12 Juli 2023 2018 – July 12, 2023
Indra Sukmono Arharrys	Direktur Pengembangan Director of Development	Keputusan Gubernur DKI Jakarta No. 1110 Tahun 2019 tanggal 8 Juli 2019 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Ketua Dewan Pengawas dan Direksi pada Perumda Pembangunan Sarana Jaya DKI Jakarta Governor Decree No. 1110 of 2019, dated July 8, 2019, on the Dismissal and Appointment of the Chairman of the Supervisory Board and Board of Directors at Perumda Pembangunan Sarana Jaya	Tahun 2019 – 7 Juli 2023 2019 – July 7, 2023

Komposisi Direksi Sarana Jaya Periode 31 Juli 2023 – 13 Oktober 2023 Sarana Jaya Board of Directors Composition from July 31, 2023, to October 31, 2023

Nama Name	Jabatan Title	Dasar Hukum Legal Basis	Masa Jabatan Term of Office
Andira Reoputra	Direktur Utama President Director	Keputusan Gubernur DKI Jakarta No. 508 Tahun 2023 tanggal 31 Juli 2023 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Direksi Perumda Pembangunan Sarana Jaya DKI Jakarta Governor Decree No. 508 of 2023, dated July 31, 2023, on the Dismissal and Appointment of the Board of Directors of Perumda Pembangunan Sarana Jaya	31 Juli 2023 – Sekarang July 31, 2023 – Present

Nama Name	Jabatan Title	Dasar Hukum Legal Basis	Masa Jabatan Term of Office
Indra Sukmono Arharrys	Direktur Pengembangan Director of Development	Keputusan Gubernur DKI Jakarta No. 508 Tahun 2023 tanggal 31 Juli 2023 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Direksi Perumda Pembangunan Sarana Jaya DKI Jakarta Governor Decree No. 508 of 2023, dated July 31, 2023, on the Dismissal and Appointment of the Board of Directors of Perumda Pembangunan Sarana Jaya	8 Juli 2023 – Sekarang July 8, 2023 – Present
	Plt. Direktur Administrasi dan Keuangan Acting Director of Administration and Finance	Keputusan Gubernur DKI Jakarta No. 508 Tahun 2023 tanggal 31 Juli 2023 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Direksi Perumda Pembangunan Sarana Jaya DKI Jakarta Governor Decree No. 508 of 2023, dated July 31, 2023, on the Dismissal and Appointment of the Board of Directors of Perumda Pembangunan Sarana Jaya	12 Juli 2023 – 13 Oktober 2023 July 12, 2023 – October 13, 2023

Komposisi Direksi Sarana Jaya Periode 13 Oktober 2023 – 31 Desember 2023

Sarana Jaya Board of Directors Composition from October 13, 2023, to December 31, 2023

Nama Name	Jabatan Title	Dasar Hukum Legal Basis	Masa Jabatan Term of Office
Andira Reoputra	Direktur Utama President Director	Keputusan Gubernur DKI Jakarta No. 508 Tahun 2023 tanggal 31 Juli 2023 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Direksi Perumda Pembangunan Sarana Jaya DKI Jakarta Governor Decree No. 508 of 2023, dated July 31, 2023, on the Dismissal and Appointment of the Board of Directors of Perumda Pembangunan Sarana Jaya	31 Juli 2023 – Sekarang July 31, 2023 – Present
Indra Sukmono Arharrys	Direktur Pengembangan Director of Development	Keputusan Gubernur DKI Jakarta No. 508 Tahun 2023 tanggal 31 Juli 2023 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Direksi Perumda Pembangunan Sarana Jaya DKI Jakarta Governor Decree No. 508 of 2023, dated July 31, 2023, on the Dismissal and Appointment of the Board of Directors of Perumda Pembangunan Sarana Jaya	8 Juli 2023 – Sekarang July 8, 2023 – Present
Irwan Agustusan	Direktur Administrasi dan Keuangan Director of Administration and Finance	Keputusan Gubernur DKI Jakarta No. 690 Tahun 2023 tanggal 16 Oktober 2023 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Direksi Perumda Pembangunan Sarana Jaya DKI Jakarta Governor Decree No. 690 of 2023, dated October 16, 2023, on the Dismissal and Appointment of the Board of Directors of Perumda Pembangunan Sarana Jaya	13 Oktober 2023 – Sekarang October 13, 2023 – Present



PROFIL DIREKSI

BOARD OF DIRECTORS' PROFILE



Andira Reoputra

Direktur Utama | President Director

Warga Negara Indonesia, berusia 38 tahun, berdomisili di Jakarta
Indonesian citizen, 38 years old, domiciled in Jakarta

Dasar Pengangkatan

Keputusan Gubernur DKI Jakarta No. 508 Tahun 2023 tanggal 31 Juli 2023 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Direksi Perumda Pembangunan Sarana Jaya.

Masa Jabatan

31 Juli 2023 – Sekarang

Riwayat Pendidikan

- Program Profesi Insinyur dari Universitas Brawijaya (2020)
- Master of Arts in Urban and Regional Planning dari University of the Philippines (2013)
- Diploma Master of Urban and Regional Planning dari University of The Philippines (2012)
- Sarjana Teknik dari Universitas Brawijaya Malang (2008)

Penugasan Khusus (Jabatan Lain)

Di Sarana Jaya:
Tidak ada

Di Perusahaan/Institusi Lain:
Wakil Ketua Umum Real Estate Indonesia (REI) di Bidang Apartemen, Rumah Susun dan Sewa.

Riwayat Karier

- Direktur Keuangan, Umum dan Pengembangan Usaha di PT Jatim Grha Utama (Perseroda) (2021 – 2023)
- Direktur Pengembangan Bisnis di PT Jatim Grha Utama (Perseroda) (2021 – 2023)
- Direktur di PT Bumi Irsa Prakarsa (2016 – 2019)
- Infrastructure Professional di PT Aqeela Bina Abadi (2014 – 2016)
- Infrastructure Professional di PT Shiddiq Sarana Mulya (2014 – 2016)
- Dosen di Universitas Brawijaya (2013)
- Staf di Kedutaan Besar RI Manila, Filipina (2009 – 2011)

Hubungan Afiliasi

Beliau tidak memiliki hubungan afiliasi dengan Dewan Pengawas, anggota Direksi lainnya dan KPM.

Appointment Basis

DKI Jakarta Governor Decree No. 508 of 2023, dated July 31, 2023, on the Dismissal and Appointment of the Board of Directors of Perumda Pembangunan Sarana Jaya.

Term of Serving

July 31, 2023 – Present

Educational Background

- Professional Engineer Program from Brawijaya University (2020)
- Master of Arts in Urban and Regional Planning from the University of the Philippines (2013)
- Master of Urban and Regional Planning Diploma from the University of the Philippines (2012)
- Bachelor of Engineering from Brawijaya University, Malang (2008)

Special Assignment (Other Positions)

In Sarana Jaya:
None

In Other Company/Institution:
Deputy General Chair of Real Estate Indonesia (REI) in the Apartment, Flats, and Rental Sector.

Career History

- Director of Finance, General Affairs, and Business Development at PT Jatim Grha Utama (Perseroda) (2021 – 2023)
- Director of Business Development at PT Jatim Grha Utama (Perseroda) (2021 – 2023)
- Director at PT Bumi Irsa Prakarsa (2016 – 2019)
- Infrastructure Professional at PT Aqeela Bina Abadi (2014 – 2016)
- Infrastructure Professional at PT Shiddiq Sarana Mulya (2014 – 2016)
- Lecturer at Brawijaya University (2013)
- Staff at the Indonesian Embassy in Manila, Philippines (2009 – 2011)

Affiliations

He is not affiliated with the Supervisory Board, other Board of Directors members, or KPM.



Indra Sukmono Arharrys

Direktur Pengembangan | Director of Development

Warga Negara Indonesia, berusia 49 tahun, berdomisili di Bekasi
Indonesian citizen, 49 years old, domiciled in Bekasi

Dasar Pengangkatan

Keputusan Gubernur DKI Jakarta No. 508 Tahun 2023 tanggal 31 Juli 2023 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Direksi Perumda Pembangunan Sarana Jaya.

Masa Jabatan

8 Juli 2023 – 15 Januari 2024

Riwayat Pendidikan

Sarjana Teknik Lingkungan dari Universitas Trisakti (1997)

Penugasan Khusus (Jabatan Lain)

Di Sarana Jaya:
Tidak ada

Di Perusahaan/Institusi Lain:
Tidak ada

Riwayat Karier

- Senior Manajer di Divisi Usaha PD Pembangunan Sarana Jaya (2016 – 2019)
- Asisten Manajer Perencanaan Usaha di Divisi Usaha PD Pembangunan Sarana Jaya (2014 – 2016)
- Asisten Manajer Pengembangan Usaha di Divisi Usaha PD Pembangunan Sarana Jaya (2010 – 2014)
- Asisten Manajer Teknik di Unit Perencanaan dan Pengembangan PD Pembangunan Sarana Jaya (2005 – 2010)
- Staf di Bidang Pemasaran PD Pembangunan Sarana Jaya (2001 – 2005)
- SHE Officer di PT Pou Chen Indonesia (1999 – 2001)
- HSE Staff di PT Pratama Indonesia (1998 – 1999)

Hubungan Afiliasi

Beliau tidak memiliki hubungan afiliasi dengan Dewan Pengawas, anggota Direksi lainnya dan KPM.

Appointment Basis

DKI Jakarta Governor Decree No. 508 of 2023, dated July 31, 2023, on the Dismissal and Appointment of the Board of Directors of Perumda Pembangunan Sarana Jaya.

Term of Serving

July 8, 2023 – January 15, 2024

Educational Background

Bachelor of Environmental Engineering from Trisakti University (1997)

Special Assignment (Other Positions)

In Sarana Jaya:
None

In Other Company/Institution:
None

Career History

- Senior Manager in PD Pembangunan Sarana Jaya Business Division (2016 – 2019)
- Assistant Business Planning Manager in PD Pembangunan Sarana Jaya Business Division (2014 – 2016)
- Assistant Business Development Manager in the Business Division of PD Pembangunan Sarana Jaya (2010 – 2014)
- Assistant Engineering Manager at PD Pembangunan Sarana Jaya Planning and Development Unit (2005 – 2010)
- Marketing Staff at PD Pembangunan Sarana Jaya (2001 – 2005)
- SHE Officer at PT Pou Chen Indonesia (1999 – 2001)
- HSE Staff at PT Pratama Indonesia (1998 – 1999)

Affiliations

He is not affiliated with the Supervisory Board, other Board of Directors members, or KPM.



Irwan Agustulan

Direktur Administrasi dan Keuangan | Director of Administration and Finance

Warga Negara Indonesia, berusia 53 tahun, berdomisili di Tangerang Selatan
Indonesia citizen, 53 years old, domiciled in South Tangerang

Dasar Pengangkatan

Keputusan Gubernur DKI Jakarta No. 508 Tahun 2023 tanggal 31 Juli 2023 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Direksi Perumda Pembangunan Sarana Jaya.

Masa Jabatan

13 Oktober 2023 – Sekarang

Riwayat Pendidikan

- Universitas Persada Indonesia Accounting (1996 – 1998)
- Politeknik Institut Teknologi Bandung Accounting (1991 – 1994)

Sertifikasi

- PPAK – STAN Profesional Internal Audit (2002 – 2003)
- Brevet A, B dan C – Ikatan Akuntan Indonesia (2003)

Penugasan Khusus (Jabatan Lain)

Di Sarana Jaya:
Tidak ada

Di Perusahaan/Institusi Lain:
Tidak ada

Riwayat Karier

- Finance Senior Vice President di PT Pembangunan Jaya Ancol Tbk (2023)
- Direktur di PT Taman Impian Jaya Ancol (2023)
- Finance Vice President di PT Pembangunan Jaya Ancol Tbk (2012 – 2022)

Hubungan Afiliasi

Beliau tidak memiliki hubungan afiliasi dengan Dewan Pengawas, anggota Direksi lainnya dan KPM.

Appointment Basis

DKI Jakarta Governor Decree No. 508 of 2023, dated July 31, 2023, on the Dismissal and Appointment of the Board of Directors of Perumda Pembangunan Sarana Jaya.

Term of Serving

October 13, 2023 – Present

Educational Background

- Accounting at Persada Indonesia University (1996 – 1998)
- Accounting at Bandung Institute of Polytechnic Technology (1991 – 1994)

Certifications

- PPAK – STAN Professional Internal Audit (2002 – 2003)
- Brevet A, B, and C – Institute of Indonesia Chartered Accountants (2003)

Special Assignment (Other Positions)

In Sarana Jaya:
None

In Other Company/Institution:
None

Career History

- Finance Senior Vice President at PT Pembangunan Jaya Ancol Tbk (2023)
- Director at PT Taman Impian Jaya Ancol (2023)
- Finance Vice President at PT Pembangunan Jaya Ancol Tbk (2012 – 2022)

Affiliations

He is not affiliated with the Supervisory Board, other Board of Directors members, or KPM.

PERUBAHAN KOMPOSISI DEWAN PENGAWAS

CHANGES IN THE SUPERVISORY BOARD COMPOSITION

Pada tahun 2023, komposisi Dewan Pengawas Perusahaan mengalami beberapa kali perubahan sehubungan dengan berakhirnya masa jabatan anggota Dewan Pengawas.

The composition of the Supervisory Board underwent several changes in 2023 due to the end of the term of office of Supervisory Board members.

Dengan demikian kronologis perubahan komposisi Dewan Pengawas Perusahaan pada tahun 2023 adalah sebagai berikut:

Therefore, the chronology of changes in the Supervisory Board composition in 2023 is as follows:

Komposisi Dewan Pengawas Sarana Jaya Periode 1 Januari 2023 – 14 Maret 2023 Sarana Jaya Supervisory Board Composition from January 1, 2023, to March 14, 2023

Nama Name	Jabatan Title	Dasar Hukum Legal Basis	Masa Jabatan Term of Office
Hasreiza	Ketua Dewan Pengawas Chairman of the Supervisory Board	Keputusan Gubernur DKI Jakarta No. 1284 Tahun 2019 tanggal 21 Agustus 2019 dan Surat Keputusan Kepala Daerah yang Mewakili Pemerintah Daerah dalam Kepemilikan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan (KPM) pada Perusahaan Umum Daerah Pembangunan Sarana Jaya tentang Pengangkatan Ketua Dewan Pengawas dan Direktur Administrasi dan Keuangan pada Perusahaan Umum Daerah Pembangunan Sarana Jaya pada tanggal 31 Agustus 2022 DKI Jakarta Governor Decree No. 1284 of 2019, dated August 21, 2019, and Decree of the Regional Head Representing the Regional Government in Ownership of Separated Regional Assets (KPM) at Perusahaan Umum Daerah Pembangunan Sarana Jaya on the Appointment of the Chairman of the Supervisory Board and the Director of Administration and Finance at Perusahaan Umum Daerah Pembangunan Sarana Jaya on August 31, 2022	31 Agustus 2022 – 13 Maret 2023 August 31, 2022 – March 13, 2023
Arief Rachman	Sekretaris Dewan Pengawas Secretary to the Supervisory Board	Keputusan Kepala Daerah Yang Mewakili Pemerintah Daerah Dalam Kepemilikan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan (KPM) Pada Perusahaan Umum Daerah Pembangunan Sarana Jaya Tentang Pengangkatan Sekretaris Dewan Pengawas Pada Perusahaan Umum Daerah Pembangunan Sarana Jaya tanggal 7 Oktober 2022 Decree of the Regional Head Representing the Regional Government in Ownership of Separated Regional Assets (KPM) at Perusahaan Umum Daerah Pembangunan Sarana Jaya on the Appointment of the Secretary to the Supervisory Board at Perusahaan Umum Daerah Pembangunan Sarana Jaya on October 7, 2022	7 Oktober 2022 – Sekarang October 7, 2022 – Present
Arismal	Anggota Dewan Pengawas Supervisory Board Member	Keputusan Gubernur Provinsi DKI Jakarta Nomor 1208 Tahun 2021 tanggal 6 Oktober 2021 DKI Jakarta Governor Decree No. 1208 of 2021, dated October 6, 2021	6 Oktober 2021 – Sekarang October 6, 2022 – Present



Komposisi Dewan Pengawas Sarana Jaya Periode 14 Maret 2023 – 13 Oktober 2023

Sarana Jaya Supervisory Board Composition from March 14, 2023, to October 13, 2023

Nama Name	Jabatan Title	Dasar Hukum Legal Basis	Masa Jabatan Term of Office
Andi Muhammad Iqbal Arief	Ketua Dewan Pengawas Chairman of the Supervisory Board	Keputusan Kepala Daerah Yang Mewakili Pemerintah Daerah Dalam Kepemilikan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan (KPM) Pada Perusahaan Umum Daerah Pembangunan Sarana Jaya Tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Ketua Dewan Pengawas Pada Perusahaan Umum Daerah Pembangunan Sarana Jaya tanggal 14 Maret 2023 Decree of the Regional Head Representing the Regional Government in Ownership of Separated Regional Assets (KPM) at Perusahaan Umum Daerah Pembangunan Sarana Jaya on the Dismissal and Appointment of the Chairman of the Supervisory Board and the Director of Administration and Finance at Perusahaan Umum Daerah Pembangunan Sarana Jaya on March 14, 2023	14 Maret 2023 – Sekarang March 14, 2023 – Present
Arief Rachman	Sekretaris Dewan Pengawas Secretary to the Supervisory Board	Keputusan Kepala Daerah Yang Mewakili Pemerintah Daerah Dalam Kepemilikan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan (KPM) Pada Perusahaan Umum Daerah Pembangunan Sarana Jaya Tentang Pengangkatan Sekretaris Dewan Pengawas Pada Perusahaan Umum Daerah Pembangunan Sarana Jaya tanggal 7 Oktober 2022 Decree of the Regional Head Representing the Regional Government in Ownership of Separated Regional Assets (KPM) at Perusahaan Umum Daerah Pembangunan Sarana Jaya on the Appointment of the Secretary to the Supervisory Board at Perusahaan Umum Daerah Pembangunan Sarana Jaya on October 7, 2022	7 Oktober 2022 – Sekarang October 7, 2022 – Present
Arismal	Anggota Dewan Pengawas Supervisory Board Member	Keputusan Gubernur Provinsi DKI Jakarta Nomor 1208 Tahun 2021 tanggal 6 Oktober 2021 DKI Jakarta Governor Decree No. 1208 of 2021, dated October 6, 2021	6 Oktober 2021 – Sekarang October 6, 2022 – Present

Komposisi Dewan Pengawas Sarana Jaya Periode 13 Oktober 2023 – 31 Desember 2023

Sarana Jaya Supervisory Board Composition from October 13, 2023, to December 31, 2023

Nama Name	Jabatan Title	Dasar Hukum Legal Basis	Masa Jabatan Term of Office
Andi Muhammad Iqbal Arief	Ketua Dewan Pengawas Chairman of the Supervisory Board	Keputusan Kepala Daerah Yang Mewakili Pemerintah Daerah Dalam Kepemilikan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan (KPM) Pada Perusahaan Umum Daerah Pembangunan Sarana Jaya Tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Ketua Dewan Pengawas Pada Perusahaan Umum Daerah Pembangunan Sarana Jaya tanggal 14 Maret 2023 Decree of the Regional Head Representing the Regional Government in Ownership of Separated Regional Assets (KPM) at Perusahaan Umum Daerah Pembangunan Sarana Jaya on the Dismissal and Appointment of the Chairman of the Supervisory Board and the Director of Administration and Finance at Perusahaan Umum Daerah Pembangunan Sarana Jaya on March 14, 2023	14 Maret 2023 – Sekarang March 14, 2023 – Present
Arief Rachman	Sekretaris Dewan Pengawas Secretary to the Supervisory Board	Keputusan Kepala Daerah Yang Mewakili Pemerintah Daerah Dalam Kepemilikan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan (KPM) Pada Perusahaan Umum Daerah Pembangunan Sarana Jaya Tentang Pengangkatan Sekretaris Dewan Pengawas Pada Perusahaan Umum Daerah Pembangunan Sarana Jaya tanggal 7 Oktober 2022 Decree of the Regional Head Representing the Regional Government in Ownership of Separated Regional Assets (KPM) at Perusahaan Umum Daerah Pembangunan Sarana Jaya on the Appointment of the Secretary to the Supervisory Board at Perusahaan Umum Daerah Pembangunan Sarana Jaya on October 7, 2022	7 Oktober 2022 – Sekarang October 7, 2022 – Present

PROFIL DEWAN PENGAWAS

SUPERVISORY BOARD PROFILE



Andi Muhammad Iqbal Arief

Ketua Dewan Pengawas | Chairman of the Supervisory Board

Warga Negara Indonesia, berusia 61 tahun, berdomisili di Tangerang
Indonesian citizen, 61 years old, domiciled in Tangerang

Dasar Pengangkatan

Pertama kali diangkat berdasarkan Keputusan Kepala Daerah Yang Mewakili Pemerintah Daerah Dalam Kepemilikan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan (KPM) Pada Perusahaan Umum Daerah Pembangunan Sarana Jaya Tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Ketua Dewan Pengawas Pada Perusahaan Umum Daerah Pembangunan Sarana Jaya tanggal 14 Maret 2023.

Masa Jabatan

14 Maret 2023 – Sekarang

Riwayat Pendidikan

- Magister Ilmu Hukum dari Institute of Business Law and Management (IBLAM) Jakarta (2003)
- Sarjana Hukum dari Universitas Hasanudin (1987)

Penugasan Khusus (Jabatan Lain)

Di Sarana Jaya:

Tidak memiliki rangkap jabatan Perusahaan

Di Perusahaan/Institusi Lain:

Jaksa Fungsional pada Badan Pendidikan dan Pelatihan Kejaksaan RI (2022 – Sekarang)

Riwayat Karier

- Kepala Pusat Diklat Manajemen dan Kepemimpinan di Badan Pendidikan dan Pelatihan Kejaksaan RI (2021 – 2022)
- Kepala Kejaksaan Tinggi Sulawesi Utara di Kejati Sulawesi Utara (2019 – 2020)
- Wakil Kepala Kejaksaan Tinggi Sulawesi Utara di Kejati Sulawesi Utara (2017 – 2019)
- Koordinator Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Umum di Kejaksaan RI (2015 – 2017)

Hubungan Afiliasi

Beliau tidak memiliki hubungan afiliasi dengan anggota Dewan Pengawas Lainnya, Direksi dan KPM.

Appointment Basis

First appointed by Decree of the Regional Head Representing the Regional Government in Ownership of Separated Regional Assets (KPM) at Perusahaan Umum Daerah Pembangunan Sarana Jaya on the Dismissal and Appointment of the Chairman of the Supervisory Board and the Director of Administration and Finance at Perusahaan Umum Daerah Pembangunan Sarana Jaya on March 14, 2023.

Term of Serving

March 14, 2023 – Present

Educational Background

- Master of Law from the Institute of Business Law and Management (IBLAM) Jakarta (2003)
- Bachelor of Law from Hasanudin University (1987)

Special Assignment (Other Positions)

In Sarana Jaya:

No concurrent positions in the Company

In Other Company/Institution:

Functional Prosecutor at the Indonesian Attorney General's Education and Training Agency (2022 – Present)

Career History

- Head of Management and Leadership Training Center at the Indonesian Attorney General's Education and Training Agency (2021 – 2022)
- Head of the North Sulawesi High Prosecutor's Office at the North Sulawesi Prosecutor's Office (2019 – 2020)
- Deputy Head of the North Sulawesi High Prosecutor's Office at the North Sulawesi Prosecutor's Office (2017 – 2019)
- Coordinator of the Deputy Attorney General for General Crimes at the Indonesian Attorney General's Office (2015 – 2017)

Affiliations

He is not affiliated with the other Supervisory Board members, Board of Directors, and KPM.



Arief Rachman

Sekretaris Dewan Pengawas | Secretary to the Supervisory Board

Warga Negara Indonesia, berusia 42 tahun, berdomisili di Jakarta Barat
Indonesian citizen, 42 years old, domiciled in West Jakarta

Dasar Pengangkatan

Pertama kali diangkat berdasarkan Keputusan Kepala Daerah Yang Mewakili Pemerintah Daerah Dalam Kepemilikan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan (KPM) Pada Perusahaan Umum Daerah Pembangunan Sarana Jaya Tentang Pengangkatan Sekretaris Dewan Pengawas Pada Perusahaan Umum Daerah Pembangunan Sarana Jaya tanggal 7 Oktober 2022.

Masa Jabatan

7 Oktober 2022 – Sekarang

Riwayat Pendidikan

- Magister Ilmu Hukum dari Universitas Trisakti Jakarta (2017)
- Sarjana Hukum dari Universitas Bung Karno (2005)

Penugasan Khusus (Jabatan Lain)

Di Sarana Jaya:

Ketua Komite Audit, Ketua Komite Pemantau Risiko, dan Ketua Komite Remunerasi dan Nominasi

Di Perusahaan/Institusi Lain:

- Pendiri ART & Co Law Firm (2019 – Sekarang)
- Direktur Utama PT Sinergi Transformasi Indonesia (2018 – Sekarang)

Riwayat Karier

- Konsultan Hukum pada NYCo Law Firm (2015 – 2018)
- Komisaris PT Cipta Media Permasindo (2014 – 2016)
- Tenaga Ahli Bidang Program dan Perencanaan Kementerian PDT (Kemendes PPDT) (2010 – 2014)

Hubungan Afiliasi

Beliau tidak memiliki hubungan afiliasi dengan anggota Dewan Pengawas Lainnya, Direksi dan KPM.

PERNYATAAN INDEPENDENSI DEWAN PENGAWAS

Seluruh Dewan Pengawas Perusahaan telah menyatakan independensinya kepada KPM.

Appointment Basis

First appointed by Decree of the Regional Head Representing the Regional Government in Ownership of Separated Regional Assets (KPM) at Perusahaan Umum Daerah Pembangunan Sarana Jaya on the Appointment of the Secretary to the Supervisory Board at Perusahaan Umum Daerah Pembangunan Sarana Jaya on October 7, 2022.

Term of Serving

October 7, 2022 – Present

Educational Background

- Master of Law from Trisakti University Jakarta (2017)
- Bachelor of Law from Bung Karno University (2005)

Special Assignment (Other Positions)

In Sarana Jaya:

Head of the Audit Committee, Head of the Risk Monitoring Committee, Head of the Remuneration and Nomination Committee

In Other Company/Institution:

- Founder of ART & Co Law Firm (2019 – Present)
- President Director of PT Sinergi Transformasi Indonesia (2018 – Present)

Work Experience

- Legal Consultant at NYCo Law Firm (2015 – 2018)
- Commissioner of PT Cipta Media Permasindo (2014 – 2016)
- Expert Staff for Programs and Planning at the Villages, Disadvantaged Regions Ministry (Kemendes PPDT) (2010 – 2014)

Affiliations

He is not affiliated with the other Supervisory Board members, Board of Directors, and KPM.

INDEPENDENCE STATEMENT OF THE SUPERVISORY BOARD

All of the Company's Supervisory Board members have declared their independence to the KPM.

PROFIL SUMBER DAYA MANUSIA

HUMAN RESOURCES PROFILE



Perusahaan memiliki kesadaran yang mendalam akan pentingnya Sumber Daya Manusia (SDM) dalam mendukung kelangsungan operasionalnya. Oleh karena itu, Perusahaan menunjukkan komitmennya dengan memberikan perhatian yang besar terhadap pengelolaan SDM. Fokus utama Perusahaan adalah memastikan bahwa pengelolaan SDM berjalan secara efektif untuk mendukung pencapaian tujuan bisnisnya. Dalam upaya mencapai hal tersebut, Perusahaan secara konsisten berupaya meningkatkan kompetensi SDM, sambil menciptakan lingkungan kerja yang kondusif guna menjamin kinerja SDM yang optimal, efisien, dan produktif.

Langkah-langkah pengelolaan SDM yang diterapkan oleh Perusahaan sejalan dengan Misi Perusahaan yang tegas berkomitmen untuk “Mewujudkan SDM yang Unggul”. Sebagai langkah konkret untuk mewujudkan misi ini, Perusahaan memberikan tanggung jawab kepada Divisi SDM dan Umum, khususnya Sub Divisi SDM, untuk mengimplementasikan misi Perusahaan menjadi langkah-langkah konkret dan terukur dalam kurun waktu 2019-2023.

The Company has a profound awareness of the importance of Human Resources (HR) in supporting its operational continuity. Therefore, the Company demonstrates its commitment by paying great attention to HR management. The Company’s main focus is to ensure that HR management runs effectively to support the achievement of its business objectives. To achieve this, the Company consistently strives to improve HR competencies while creating a conducive work environment to ensure optimal, efficient, and productive HR performance.

The HR management measures implemented by the Company align with the Company’s Mission, which is firmly committed to “Realizing Excellent HR.” As a concrete step to realize this mission, the Company gives responsibility to the HR and General Affairs Division, especially the HR Sub-Division, to implement the Company’s mission into concrete and measurable steps within the 2019-2023 period.

Perusahaan telah menetapkan pedoman dan acuan sebagai dasar pelaksanaan berbagai fungsi SDM, di antaranya adalah Kamus Kompetensi, yang mencakup beragam aspek, mulai dari rekrutmen, pelatihan, pengembangan, hingga manajemen kinerja.

The Company has established guidelines and references for implementing various HR functions, including the Competency Dictionary, which covers multiple aspects, from recruitment, training, and development to performance management.

Dalam upaya untuk mendukung efektivitas dan efisiensi dari langkah-langkah yang telah diambil, Perusahaan telah mengimplementasikan *Human Resource Information System* (HRIS) sebagai bagian integral dari sistem manajemen SDM. HRIS berfungsi sebagai *database* kepegawaian yang diorganisir secara lebih sistematis, serta sebagai alat untuk mengelola data administrasi penggajian pegawai. Melalui penerapan HRIS, Perusahaan dapat mengelola informasi kepegawaian dengan lebih efisien dan akurat.

To support the effectiveness and efficiency of the measures taken, the Company has implemented a Human Resource Information System (HRIS) as an integral part of the HR management system. HRIS functions as a personnel database that is organized more systematically and a tool for managing employee payroll administration data. By implementing HRIS, the Company can manage personnel information more efficiently and accurately.

KOMPOSISI PEGAWAI [OJK C.3]

Pada tahun 2023, Perusahaan mencatat jumlah pegawai sebanyak 130 orang (tidak termasuk Dewan Pengawas dan Direksi). Terjadi penurunan sebesar 4,37% jika dibandingkan dengan jumlah pegawai pada tahun 2022, yang mencapai 137 orang (tidak termasuk Dewan Pengawas dan Direksi). Perubahan ini telah disesuaikan dengan kebutuhan organisasi.

EMPLOYEE COMPOSITION [OJK C.3]

In 2023, the Company recorded a total of 130 employees (excluding the Supervisory Board and Board of Directors). There is a 4.37% decrease compared to the number of employees in 2022, which reached 137 people (excluding the Supervisory Board and Board of Directors). These changes have been adapted to organizational needs.

Untuk memberikan gambaran lebih rinci, informasi mengenai komposisi pegawai Perusahaan pada 31 Desember 2023 diuraikan dalam tabel-tabel berikut:

To provide a more detailed picture, information regarding the composition of the Company's employees on December 31, 2023, is described in the following tables:

Komposisi Pegawai Berdasarkan Jenis Kelamin Employee Composition Based on Gender

Jenis kelamin	2023		2022		Gender
	Jumlah Pegawai Total Employee	Persentase Percentage	Jumlah Pegawai Total Employee	Persentase Percentage	
Laki-laki	82	63%	87	63%	Male
Perempuan	48	37%	50	37%	Female
Jumlah	130	100%	137	100%	Total

Pada tahun 2023, komposisi pegawai Perusahaan berdasarkan jenis kelamin, didominasi oleh pegawai laki-laki, mencapai 63% dari jumlah total pegawai. Meskipun demikian, penting untuk menegaskan bahwa kondisi ini tidak muncul sebagai hasil dari kebijakan diskriminatif. Pada tahap rekrutmen, Perusahaan memberikan peluang yang setara kepada semua kandidat, tanpa memandang jenis kelamin. Perusahaan menegaskan komitmennya terhadap prinsip kesetaraan gender.

In 2023, the composition of the Company's employees based on gender was dominated by male employees, reaching 63% of the total number of employees. However, it is important to emphasize that these conditions do not result from discriminatory policies. At the recruitment stage, the Company provides equal opportunities to all candidates, regardless of gender. The Company affirms its commitment to the principles of gender equality.

Komposisi Pegawai Berdasarkan Rentang Usia Employee Composition Based on Age Range

Rentang Usia	2023		2022		Age Range
	Jumlah Pegawai Total Employee	Persentase Percentage	Jumlah Pegawai Total Employee	Persentase Percentage	
20 – 29 tahun	39	30%	51	37%	20 – 29 years old
30 – 39 tahun	41	32%	33	24%	30 – 39 years old
40 – 49 tahun	30	23%	34	25%	40 – 49 years old
>50 tahun	20	15%	19	14%	>50 years old
Jumlah	130	100%	137	100%	Total

Di tahun 2023, komposisi pegawai Perusahaan berdasarkan rentang usia didominasi oleh pegawai berusia 30–39 tahun, mencapai 41% dari total jumlah pegawai. Sebagai perbandingan, pada tahun 2022, dominasi terdapat pada pegawai berusia 20–29 tahun yang mencapai 37% dari total pegawai.

In 2023, the Company's employee composition based on age range was dominated by employees aged 30–39, reaching 41% of the total number of employees. In comparison, in 2022, the dominance was among employees aged 20–29, reaching 37% of the total.

Komposisi Pegawai Berdasarkan Status Kepegawaian Employee Composition Based on Employment Status

Status Kepegawaian	2023		2022		Employment Status
	Jumlah Pegawai Total Employee	Persentase Percentage	Jumlah Pegawai Total Employee	Persentase Percentage	
Tetap	118	90%	108	79%	Permanent
Calon Pegawai	-	-	4	3%	Prospective Employee
Tidak Tetap	12	10%	25	18%	Temporary (Contract)
Jumlah	130	100%	137	100%	Total

Pada tahun 2023, komposisi pegawai Perusahaan berdasarkan status kepegawaian didominasi oleh pegawai tetap, yang mencapai 90% dari total jumlah pegawai. Sebagai perbandingan, pada tahun 2022, dominasi juga terdapat pada pegawai tetap yang mencapai 79% dari total pegawai.

In 2023, the composition of the Company's employees based on employment status was dominated by permanent employees, who reached 90% of the total number of employees. In comparison, in 2022, permanent employees also dominated, reaching 79% of the total employees.

Komposisi Pegawai Berdasarkan Tingkat Pendidikan Employee Composition Based on Educational Level

Tingkat Pendidikan	2023		2022		Educational Level
	Jumlah Pegawai Total Employee	Persentase Percentage	Jumlah Pegawai Total Employee	Persentase Percentage	
Magister	17	13%	20	15%	Master
Sarjana (S1)	91	70%	89	65%	Bachelor's Degree
Diploma 3 (D3)	12	9%	15	11%	Diploma
SMU dan Sederajat	10	8%	13	9%	Senior High School and Equivalent
Jumlah	130	100%	137	100%	Total

Di tahun 2023, komposisi pegawai Perusahaan berdasarkan tingkat pendidikan didominasi oleh pegawai dengan latar belakang pendidikan S1, mencapai 70% dari total jumlah pegawai. Sebagai perbandingan, pada tahun 2022, dominasi tercatat pada pegawai dengan latar belakang pendidikan setingkat Sarjana (S1) yang mencapai 65% dari total pegawai.

In 2023, the composition of the Company's employees based on education level was dominated by employees with a bachelor's degree educational background, reaching 70% of the total number of employees. In comparison, in 2022, the dominance was recorded in employees with a bachelor's level (S1) educational background, which reached 65% of the total employees.

Komposisi Pegawai Berdasarkan Level Jabatan Employee Composition Based on Position Level

Level Jabatan	2023		2022		Position Level
	Jumlah Pegawai Total Employee	Persentase Percentage	Jumlah Pegawai* Total Employee*	Persentase Percentage	
Direktur	3	2%	3	2%	Director
Manajer Senior	16	12%	13	9%	Senior Manager
Manajer Junior	23	17%	20	14%	Junior Manager
Supervisor	14	11%	14	10%	Supervisor
Staf	64	48%	80	57%	Staff
Tenaga Pelaksana	13	10%	10	7%	Implementing Staff
Jumlah	133	100%	140	100%	Total

Pada tahun 2023, komposisi pegawai Perusahaan berdasarkan level jabatan didominasi oleh pegawai dengan level jabatan staf, mencapai 48% dari total jumlah pegawai. Sebagai perbandingan, pada tahun 2022, komposisi pegawai pada saat itu juga didominasi oleh level staf sebanyak 57% dari total jumlah pegawai (termasuk Direksi).

In 2023, the composition of the Company's employees based on position level was dominated by employees at staff level, reaching 48% of the total number of employees. In comparison, in 2022, the employee composition was also dominated by staff level at 57% of the total number of employees (including the Board of Directors).

PENGEMBANGAN KOMPETENSI PEGAWAI

Peningkatan kapabilitas pegawai menjadi faktor kunci yang berdampak pada produktivitas dan kinerja. Perusahaan secara konsisten berupaya meningkatkan kompetensi pegawai dengan memberikan peluang kepada setiap individu yang memenuhi syarat untuk mengikuti berbagai program pengembangan kompetensi. Perusahaan menjadi fasilitator dalam program pengembangan kompetensi yang diselenggarakan secara internal maupun oleh pihak eksternal.

EMPLOYEE COMPETENCY DEVELOPMENT

Increasing employee capabilities is a key factor that has an impact on productivity and performance. The Company consistently strives to improve employee competency by providing opportunities for everyone who meets the requirements to participate in various competency development programs. The Company becomes a facilitator in competency development programs organized internally and by external parties.

Dalam hal program pengembangan kompetensi pegawai, Perusahaan telah menetapkan target minimal pengembangan setiap pegawai sebanyak 16 jam setahun. Selain itu, Perusahaan secara berkelanjutan mengadakan sesi berbagi (*sharing session*) secara berkala setiap hari Jumat pada pekan pertama dan ketiga setiap bulannya. Kegiatan ini dapat dilaksanakan secara tatap muka maupun secara virtual.

In terms of employee competency development programs, the Company has set a minimum target of developing each employee at 16 hours a year. In addition, the Company continuously holds sharing sessions periodically every Friday in the first and third weeks of each month. The activity can be carried out face-to-face or virtually.

Pendidikan dan Pelatihan Karyawan

Pada tahun 2023, aktivitas pelatihan yang diikuti oleh pegawai Perusahaan dijelaskan dalam tabel berikut:

Employee Education and Training

In 2023, the training activities participated in by Company employees are explained in the following table:

No.	Judul Pelatihan Training Title	Tanggal Date	Penyelenggara Organizer
1.	Pelatihan Kesamaptaan & Pembinaan Mental & Fisik (Bintalsik) Ability Training, Mental & Physical Development (Bintalsik)	19-21 Januari 2023 January 19-21, 2023	Rindam Jaya
2.	Sertifikasi <i>Qualified Internal Audit</i> (QIA) Tingkat Dasar Basic Level Qualified Internal Audit (QIA) Certification	13-27 Februari 2023 February 13-27, 2023	YPIA
3.	<i>Certified Procurement Specialist</i> (CPSp) Certified Procurement Specialist (CPSp)	20 Februari – 9 Maret 2023 February 20 – March 9, 2023	PPM
4.	Sertifikat Manajemen Risiko Dasar Basic Risk Management Certificate	20-22 Februari 2023 February 20-22, 2023	WAY Academy
5.	Bimbingan Teknis "Memahami Konsep, Perhitungan dan Verifikasi Tingkat Komponen dalam Negeri (TKDN) pada Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah" Technical Guidance "Understanding the Concept, Calculation and Verification of Domestic Component Level (TKDN) in the Implementation of Government Procurement of Goods/Services"	14-15 Maret 2023 March 14-15, 2023	Pusat Pengkajian Informasi Nasional National Information Assessment Center
6.	<i>Webinar Arbitrator Talks</i> : Kedudukan Hukum Debitur dan Kreditor dalam Penyelesaian Utang Piutang melalui Cessie, Novasi, dan Subrogasi Arbitrator Talks Webinar: Legal Position of Debtors and Creditors in Settlement of Debts and Receivables through Cessie, Novation, and Subrogation	27 Maret 2023 March 27, 2023	LPS SJK
7.	<i>National Webinar "Webinar Risk Based Audit"</i> National Webinar "Risk-Based Audit Webinar"	5 Januari 2023 January 5, 2023	
8.	Hari Bersih Indonesia Indonesian Clean Day	19 Februari 2023 February 19, 2023	-
9.	Diskusi <i>Risk Based Audit</i> dengan Komite Dewan Pengawas Discussion of Risk-Based Audit with the Supervisory Board Committee	8 Februari 2023 February 8, 2023	
10.	Dialog Sinergi BUMD DKI Jakarta: Efektivitas Pengurusan HPL dalam Meningkatkan Produktivitas Aset BUMD DKI Jakarta BUMD Synergy Dialogue: Effectiveness of HPL Management in Increasing BUMD Asset Productivity	27 Januari 2023 January 27, 2023	
11.	<i>Webinar Series "Master of Regional and Urban Planning, Mengapa Konsep TOD Penting untuk Masa Depan Kota Jakarta?"</i> Webinar Series "Master of Regional and Urban Planning, Why is the TOD Concept Important for the Future of the City of Jakarta?"	8 Februari 2023 February 8, 2023	
12.	<i>Webinar Series "Master of Regional and Urban Planning, The Greater Jakarta memasuki Post Suburbanisasi: Peluang atau Ancaman"</i> Webinar Series "Master of Regional and Urban Planning, The Greater Jakarta Entering Post-Suburbanization: Opportunities or Threats"	15 Februari 2023 February 15, 2023	
13.	<i>Webinar Series "Master of Regional and Urban Planning, Jakarta di tengah kota-kota dunia: Tantangan Ekonomi Politik dan Lingkungan"</i> Webinar Series "Master of Regional and Urban Planning, Jakarta amid world cities: Political Economy and Environmental Challenges"	22 Februari 2023 February 22, 2023	
14.	Program <i>Human Resources Manager</i> Human Resources Manager Program	15-30 Maret 2023 March 15-30, 2023	



No.	Judul Pelatihan Training Title	Tanggal Date	Penyelenggara Organizer
15.	Penggunaan Microsoft Project pada Manajemen Proyek Konstruksi Use of Microsoft Project in Construction Project Management	21 Januari 2023 January 21, 2023	
16.	Mengolah Data Vektor pada QGIS untuk Membuat Peta Tutupan Lahan Processing Vector Data in QGIS to Create Land Cover Maps	5 Februari 2023 February 5, 2023	
17.	Studi Kasus dalam Mengolah Data untuk Peta Tematik pada QGIS Case Study in Processing Data for Thematic Maps in QGIS	12 Februari 2023 February 12, 2023	
18.	Webinar Keterbukaan Informasi Publik Series ke-36 Keterbukaan Informasi Publik dengan tema: "Persiapan MONEV 2023 Meningkatkan Komitmen Organisasi dalam Implementasi Keterbukaan Informasi Publik" The 36th Public Information Openness Webinar Series with the theme: "Preparations for 2023 MONEV: Increase Organizational Commitment in Implementing Public Information Openness."	30 Maret 2023 March 30, 2023	
19.	Sosialisasi dalam rangka Peningkatan Pemahaman PPID BUMD Provinsi DKI Jakarta dalam Pelaksanaan Pelayanan Informasi Publik Dissemination to increase understanding of PPID BUMD DKI Jakarta Province in the Implementation of Public Information Services	17 Maret 2023 March 17, 2023	
20.	Dialog Sinergi BUMD DKI Jakarta: Efektivitas Pengurusan HPL dalam Meningkatkan Produktivitas Aset BUMD DKI Jakarta BUMD Synergy Dialogue: Effectiveness of HPL Management in Increasing BUMD Asset Productivity	27 Januari 2023 January 27, 2023	
21.	Key Performance Indicator (KPI) 101: Konsep, Studi Kasus, dan <i>Expert's Tips</i> Key Performance Indicators (KPI) 101: Concepts, Case Studies, and Expert's Tips	Maret 2023 March 2023	
22.	Cepat Cakap Inggris Khusus Presentasi Quickly Speak English, Special for Presentations	8 Maret 2023 March 8, 2023	
23.	Kuliah Umum Media Indonesia bersama Menteri Keuangan Sri Mulyani Media Indonesia Public Lecture with Finance Minister Sri Mulyani	3 Februari 2023 February 3, 2023	Media Indonesia
24.	Webinar Transisi IMB ke PBG DKI Jakarta IMB to PBG DKI Jakarta Transition Webinar	12 Mei 2023 May 12, 2023	Ikatan Arsitek Indonesia Indonesian Institute of Architects
25.	<i>Training and Development</i> Manajemen Diklat Training and Development Education and Training Management	10-11 Mei 2023 May 10-11, 2023	Service Leadership Consulting
26.	Webinar Kita Bisa: "Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH) sebagai Dokumen Rekam Jejak Menjaga Kondisi Lingkungan Hidup Indonesia Tahun 2023" We Can Webinar: "Environmental Quality Index (IKLH) as a Track Record Document for Maintaining Indonesia's Environmental Conditions in 2023"	11 April 2023 April 11, 2023	Direktorat Jenderal Pengendalian Pencemaran Lingkungan Environmental Pollution Control Directorate General
27.	Mekari University - <i>Corporate Internal Control</i> Mekari University - Corporate Internal Control	4 Mei 2023 May 4, 2023	Mekari University
28.	Mekari University - K3 (Keselamatan dan Kesehatan Kerja) Perkantoran Mekari University - OHS (Occupational Health and Safety) Office	3 Mei 2023 May 3, 2023	Mekari University
29.	<i>Business Model Canvas: The Strategic Tool for Business Concept Development</i> Canvas Business Model: The Strategic Tool for Business Concept Development	5 Mei 2023 May 5, 2023	Mekari University

No.	Judul Pelatihan Training Title	Tanggal Date	Penyelenggara Organizer
30.	Webinar Kita Bisa: "Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH) sebagai Dokumen Rekam Jejak Menjaga Kondisi Lingkungan Hidup Indonesia Tahun 2023" We Can Webinar: "Environmental Quality Index (IKLH) as a Track Record Document for Maintaining Indonesia's Environmental Conditions in 2023"	11 April 2023 April 11, 2023	Direktorat Jenderal Pengendalian Pencemaran Lingkungan Environmental Pollution Control Directorate General
31.	Pelatihan dan Sertifikasi <i>Qualified Internal Audit (QIA)</i> Tingkat Dasar Basic Level <i>Qualified Internal Audit (QIA)</i> Training and Certification	8-22 Mei 2023 May 8-22, 2023	YPIA
32.	<i>Certified Contract Management Specialist (CCMs)</i> Certified Contract Management Specialists (CCMs)	15-30 Mei 2023 May 15-30, 2023	PPM
33.	<i>Financial Modelling and Valuation Analyst (FMVA)</i> Financial Modeling and Valuation Analyst (FMVA)	1 Tahun 1 year	CFI
34.	<i>Feasibility Study</i> Feasibility study	13-15 Juni 2023 June 13-15, 2023	PPM
35.	<i>PSAK for Executive</i> PSAK for Executives	15-16 Juni 2023 June 15-16, 2023	IAI
36.	Workshop ISO 26000 CSR ISO 26000 CSR Workshop	28 Juli 2023 July 28, 2023	PT Filantra Keabakan Indonesia
37.	Pelatihan Penataran Kode Etik dan Pengembangan Keprofesian Rancang Kota Code of Conduct Training and City Design Professional Development	18-19 Agustus 2023 August 18-19, 2023	IARKI
38.	Bimbingan Teknis Kearsipan Tingkat Dasar Basic Level Archives Technical Guidance	20 September 2023 September 20, 2023	Dispusip DKI Jakarta DKI Jakarta Provincial Library and Archives Service
39.	Pelatihan Audit ISO 9001 dan ISO 37001 ISO 9001 and ISO 37001 Audit Training	7-9 Juli 2023 July 7-9, 2023	PT BSI Indonesia
40.	<i>Powerful Business Presentation</i> Powerful Business Presentation	22-24 Agustus 2023 August 22-24, 2023	PPM Manajemen Management PPM
41.	Sertifikasi K3 OHS Certification	21 Agustus - 2 September 2023 August 21 - September 2, 2023	Garuda
42.	Sertifikasi QRMA QRMA Certification	10-14 Agustus 2023 August 10-14, 2023	PT Wisma Inti Manajemen (Wimconsult)
43.	Sertifikasi QIA Tingkat Lanjutan Advanced QIA Certification	17-31 Juli 2023 7-21 Agustus 2023 July 17-31, 2023 August 7-21, 2023	YPIA
44.	<i>Leadership: First Time Manager</i> Leadership: First Time Manager	4 Oktober 2023 October 4, 2023	Mekari University
45.	<i>Workshop CSR Class for Corporate</i> CSR Class for Corporate Workshop	7 Desember 2023 December 7, 2023	Rumah Zakat
46.	<i>Workshop Sekolah Semanggi</i> Perencanaan Kota dan Wilayah Semanggi School Workshop on City and Regional Planning	8-25 November 2023 November 8-25, 2023	Ikatan Ahli Perencana (IAP) DKI Jakarta DKI Jakarta Association of Planning Experts (IAP)
47.	Pelatihan dan Sertifikasi Manajemen Risiko bagi Organ Pengelola Risiko Korporasi Risk Management Training and Certification for Corporate Risk Management Organs	13-17 November, 21 November & 1 Desember November 13-17, November 21 & December 1	BPKP
48.	<i>Corporate Performance Management: Balanced Scorecard (BSC)</i> Corporate Performance Management: Balanced Scorecard (BSC)	27 Desember 2023 December 27, 2023	Mekari University



Sesi Berbagi

Kegiatan sesi berbagi (*sharing session*) yang dilaksanakan pada tahun 2023 diuraikan sebagai berikut:

Sharing Session

The sharing session activities held in 2023 are described as follows:

No.	Judul Sharing Session Sharing Session Title	Tanggal Date	Pembicara Speaker
1.	<i>Sharing Session</i> Sosialisasi Asuransi Pegawai dengan PT Asuransi Takaful Keluarga Sharing Session Employee Insurance Dissemination with PT Asuransi Takaful Keluarga	13 Januari 2023 January 13, 2023	PT Takaful Keluarga
2.	<i>Sharing Session</i> Penggunaan Operasional Perusahaan dengan Menggunakan PT Blue Bird Sharing Session for Using Company Operations with PT Blue Bird	3 Februari 2023 February 3, 2023	PT Blue Bird
3.	<i>Sharing Session</i> Penggunaan Operasional Perusahaan dengan Menggunakan Grab Sharing Session for Using Company Operations with Grab	10 Februari 2023 February 10, 2023	Grab Indonesia
4.	Sosialisasi PERKI PPID oleh Komisi Informasi DKI Jakarta PERKI PPID Dissemination by the DKI Jakarta Information Commission	10 Maret 2023 March 10, 2023	Komisi Informasi Information Commission
5.	<i>Sharing Session</i> Manajemen Risiko Risk Management Sharing Session	12 & 17 Oktober 2023 October 12 & 17, 2023	Komite Pemantau Risiko Dewan Pengawas Risk Monitoring Committee of the Supervisory Board
6.	<i>Sharing Session</i> Good Corporate Governance (GCG) Good Corporate Governance (GCG) Sharing Session	23 November 2023 November 23, 2023	Komite Remunerasi dan Nominasi Dewan Pengawas Remuneration and Nomination Committee of the Supervisory Board

KOMPOSISI PEMEGANG SAHAM

SHAREHOLDERS COMPOSITION

Pemerintah Provinsi DKI Jakarta merupakan KPM atau Kepala Daerah yang Mewakili Pemerintah Daerah dalam Kepemilikan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan pada Perusahaan Umum Daerah dari Sarana Jaya.

The DKI Jakarta Provincial Government is the KPM or Regional Head Representing the Regional Government in Ownership of Separated Regional Assets on the Regional Public Company from Sarana Jaya.

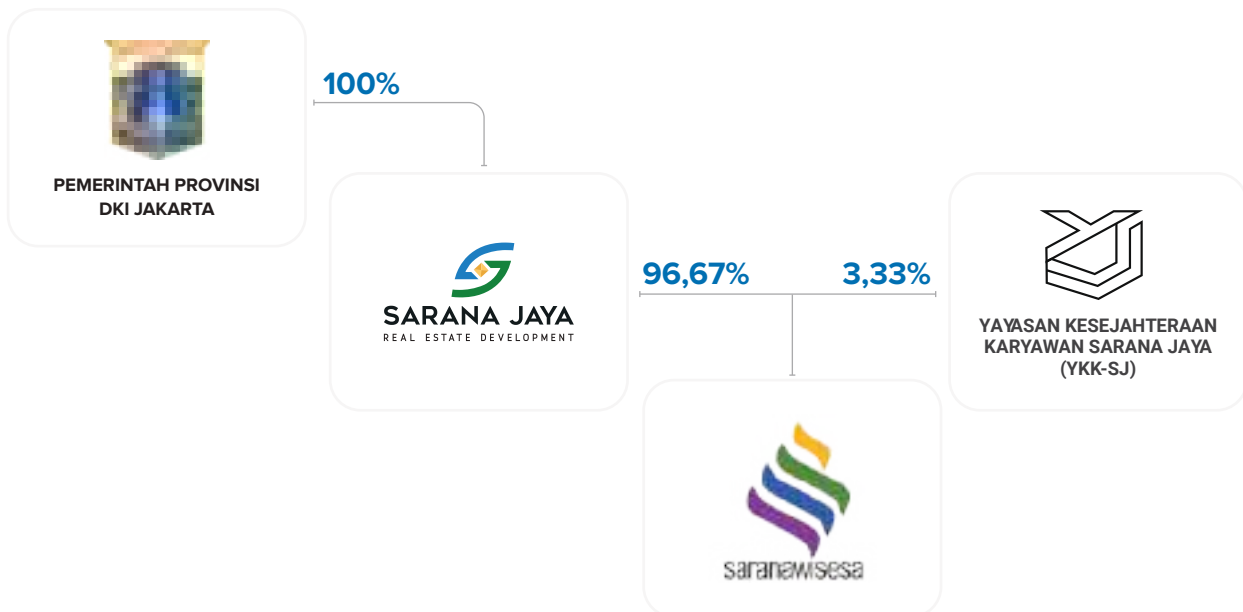
Pada awal hingga akhir tahun 2023 komposisi pemegang saham Sarana Jaya tidak mengalami perubahan, sebagaimana diuraikan pada tabel berikut:

From the beginning to the end of 2023, the composition of Sarana Jaya's shareholders did not change, as described in the following table:

Pemegang Saham	Persentase Kepemilikan Ownership Percentage		Shareholder
	1 Januari 2023 January 1, 2023	31 Desember 2023 December 31, 2023	
Pemerintah Provinsi DKI Jakarta	100%	100%	DKI Jakarta Provincial Government
Jumlah	100%	100%	Total

Struktur pemegang saham Sarana Jaya Grup pada 31 Desember 2023 dijelaskan pada bagan berikut ini:

The shareholder structure of Sarana Jaya Group on December 31, 2023, is explained in the following chart:



KEPEMILIKAN SAHAM PERUSAHAAN OLEH DEWAN PENGAWAS DAN DIREKSI

Hingga 31 Desember 2023, seluruh anggota Dewan Pengawas dan Direksi tidak memiliki saham Perusahaan, baik kepemilikan secara langsung maupun tidak langsung.

COMPANY SHARE OWNERSHIP BY THE SUPERVISORY BOARD AND BOARD OF DIRECTORS

Until December 31, 2023, all members of the Supervisory Board and Directors do not own shares in the Company, either directly or indirectly.



ENTITAS ANAK

SUBSIDIARY



PT Saranawisesa Properindo (SWP)



Bidang Usaha

Business Line

Jasa Fasilitas Properti
Property Facilities Service



Tahun Berdiri dan Operasi Komersial

Date of Establishment and Commercial Operation

1993



Kepemilikan Saham

Shareholding

Sarana Jaya (96,67%)
YKK-SJ (3,33%)



Total Aset

Total Asset

Rp89.937.278.784



Alamat

Address

Sarana Square, Jl. Tebet Barat IV No. 20
Jakarta Selatan 12810, DKI Jakarta, Indonesia
Sarana Square, Jl. Tebet Barat IV No. 20
South Jakarta 12810, DKI Jakarta, Indonesia



Status

Status

Beroperasi
In Operation



Telepon

Phone

+ 62-21 83794770
+ 62-21 83792269



Surat Elektronik

Electronic Mail

saranawisesa.properindo@gmail.com
Info@saranawisesa.co.id



Faksimile

Faximile

+ 62-21 83792269



Situs Web

Website

www.saranawisesa.co.id



Manajemen

Management

Harwin Utama Tenggara

Direktur Utama | President Director

Bernard Yohanes

Direktur Operasional | Director of Operations

Asep Firdaus

Direktur Umum & Keuangan | Director of General Affairs and Finance

PT Saranawisesa Properindo (SWP) merupakan entitas anak dari Sarana Jaya, di mana Perusahaan memiliki kepemilikan saham sebesar 96,67% dari total saham SWP, yang setara dengan 4.768 lembar saham dengan nilai nominal Rp10.000.000 per lembar saham, atau total penyertaan modal sebesar Rp47.680.000.000. Sementara itu, sisanya, yaitu 3,33% saham, dimiliki oleh Yayasan Kesejahteraan Karyawan Sarana Jaya (YKK-SJ), yang setara dengan 164 lembar saham dengan nilai nominal Rp10.000.000 per lembar saham, atau total kepemilikan senilai Rp1.640.000.000.

PT Saranawisesa Properindo (SWP) is a subsidiary of Sarana Jaya, where the Company has share ownership of 96.67% of the total SWP shares, equivalent to 4,768 shares with a nominal value of Rp10,000,000 per share or a total capital participation of Rp47,680,000,000. Meanwhile, the remaining 3.33% of shares are owned by the Sarana Jaya Employee Welfare Foundation (YKK-SJ), which is equivalent to 164 shares with a nominal value of Rp10,000,000 per share, or total ownership worth Rp1,640,000,000.

SWP didirikan pada tanggal 3 Februari 1993 berdasarkan akta yang dibuat oleh Notaris Misahardi Wilamarta, S.H. No. 77 pada tanggal yang sama. Selanjutnya, terjadi perubahan dalam Akta Pendirian Perusahaan yang dicatat dalam Akta No. 246 tanggal 13 Agustus 1993, yang juga dibuat di hadapan Notaris Misahardi Wilamarta, S.H. Akta pendirian dan perubahannya kemudian mendapatkan persetujuan resmi dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia melalui surat keputusan No. C2-10-323 HT.01.01 tanggal 6 Oktober 1993.

SWP, yang bergerak dalam bidang usaha kontraktor dan *real estate*, memulai operasional komersialnya pada tahun 1993. Hingga saat ini, SWP tetap aktif dalam menjalankan kegiatan usaha sesuai bidangnya yang berfokus pada:

1. Manajemen Properti:

SWP khusus dalam pengelolaan gedung dan saat ini telah berhasil mengelola beberapa Gedung Perkantoran dan Mal di wilayah DKI Jakarta.

2. Manajemen Gedung:

Dengan dukungan sumber daya manusia yang andal dan penuh komitmen, SWP melaksanakan pengelolaan gedung secara profesional.

3. Sarana Parking:

SWP memiliki pengalaman di bidang perparkiran, didukung dengan sistem peralatan yang terintegrasi untuk meningkatkan pendapatan parkir di setiap lokasi yang dikelola.

4. Building Facilities Services:

SWP mengembangkan usahanya di sektor jasa kebersihan, keamanan, pengadaan teknisi atau *engineering*, resepsionis, dan pengemudi. SWP selalu berkomitmen untuk menjaga dan meningkatkan mutu layanan, menjadi sumber pendapatan yang andal bagi para mitra usaha.

SWP was founded on February 3, 1993, based on a deed made by Notary Misahardi Wilamarta, S.H. No. 77, on the same date. Furthermore, there was a change in the Deed of Establishment recorded in Deed No. 246 dated August 13, 1993, which was also made before Notary Misahardi Wilamarta, S.H. The deed of establishment and its amendments then received official approval from the Law and Human Rights Minister through Decree No. C2-10-323 HT.01.01 dated October 6, 1993.

SWP, which operates in the contracting and real estate business, started its commercial operations in 1993. SWP remains active in carrying out business activities according to its fields, which focus on:

1. Property Management:

SWP specializes in building management and has successfully managed several offices and malls in the DKI Jakarta area.

2. Building Management:

With the support of reliable and committed human resources, SWP carries out professional building management.

3. Parking Facilities:

SWP has experience in the parking sector, which is supported by an integrated equipment system to increase parking revenue at every managed location.

4. Building Facilities Services:

SWP develops its business in the cleaning services sector, security, procurement of technicians or engineering, receptionists, and drivers. SWP is always committed to maintaining and improving service quality, becoming a reliable source of income for business partners.

► **Alamat Entitas Anak dan Alat Produksi**

Subsidiary Address and Production Asset



PT Saranawisesa Properindo (SWP)

Gedung Sasendo
Jl. Tebet Barat IV No. 20
Jakarta Selatan 12810
DKI Jakarta, Indonesia

✉ saranawisesa.properindo@gmail.com

Info@saranawisesa.co.id

☎ + 62-21 83794770

+ 62-21 83792269

📄 + 62-21 83792269

🌐 www.saranawisesa.co.id

Gedung yang dikelola SWP | Buildings Managed by SWP



Mall Pondok Kelapa Town Square
Pondok Kelapa Town Square Mall

Jalan Raya Pondok Kelapa, Jakarta Timur
Jalan Raya Pondok Kelapa, East Jakarta



Naya Menteng
Naya Menteng

Jalan Cikini Raya, Menteng, Jakarta Pusat
Jalan Cikini Raya, Menteng, Central Jakarta



Sarana Square
Sarana Square

Jalan Tebet Barat IV, Jakarta Selatan
Jalan Tebet Barat IV, South Jakarta



Naya Pramuka
Naya Pramuka

Jalan Rawamangun No. 59C, Jakarta Pusat
Jalan Rawamangun No. 59C, Central Jakarta



Jembatan Penyeberangan Multifungsi (JPM)
Multipurpose Crossing Bridge (JPM)

Jalan Jati Baru, Tanah Abang, Jakarta Pusat
Jalan Jati Baru, Tanah Abang, Central Jakarta

Area Parkir yang dikelola SWP | Parking Areas Managed by SWP



Hotel Mercure
Mercure Hotel

Cikini – Jakarta Pusat
Cikini – Central Jakarta



Hotel Veranda
Veranda Hotel

Kebayoran Baru – Jakarta Selatan
Kebayoran Baru – South Jakarta



Mall Pondok Kelapa Town Square
Pondok Kelapa Town Square Mall

Jalan Raya Pondok Kelapa, Jakarta Timur
Jalan Raya Pondok Kelapa, East Jakarta



Mall Atrium Senen
Atrium Senen Mall

Senen – Jakarta Pusat
Senen – Central Jakarta



Sarana Square
Sarana Square

Jalan Tebet Barat IV, Jakarta Selatan
Jalan Tebet Barat IV, South Jakarta



Universitas Yarsi
Yarsi University

Cempaka Putih – Jakarta Pusat
Cempaka Putih – Central Jakarta



ENTITAS ASOSIASI

ASSOCIATE ENTITIES



PT Yatian Aka Jakarta Hijau



Bidang Usaha

Business Line

Treatment dan pembuangan limbah dan sampah serta pembangkit tenaga Listrik
Treatment and disposal of waste and garbage, as well as electricity generator



Kepemilikan Saham

Shareholding

Sarana Jaya (25,0%)
PT Tian Ying Indonesia (52,7%)
PT Aka Hijau Indonesia (22,3%)



Tahun Berdiri

Year of Establishment

2022



Status

Status

Belum beroperasi secara komersial
Not operating commercially



Total Aset

Total Asset

Rp10.000.000.598



PT Jakarta Hijau Lestari



Bidang Usaha

Business Line

Treatment dan pembuangan limbah dan sampah serta pembangkit tenaga Listrik
Treatment and disposal of waste and garbage, as well as electricity generator



Kepemilikan Saham

Shareholding

Sarana Jaya (28,%)
GCL Intelligent Energy (Singapore) Pte. Ltd. (51,0%)
PT Hidro Energi Perkasa (20,3%)



Tahun Berdiri

Year of Establishment

2022



Status

Status

Belum beroperasi secara komersial
Not operating commercially



Total Aset

Total Asset

Rp13.500.187.170

INFORMASI TENTANG KRONOLOGIS PENERBITAN DAN PENCATATAN SAHAM

INFORMATION ON THE CHRONOLOGY OF ISSUANCE AND LISTING OF SHARES

Sarana Jaya merupakan Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) yang modalnya berasal dari kekayaan Pemerintah Daerah yang dipisahkan. Perusahaan tidak menerbitkan saham untuk dimiliki oleh masyarakat. Dengan demikian, tidak terdapat informasi mengenai kronologis penerbitan dan pencatatan saham di bursa efek mana pun. Sarana Jaya sepenuhnya bergantung pada sumber pendanaan dan kebijakan internal yang ditetapkan oleh Pemerintah Daerah untuk menjalankan operasinya.

Sarana Jaya is a Region-Owned Enterprise (BUMD) whose capital comes from separated Regional Government assets. The Company does not issue shares for the public to own. Therefore, there is no information regarding the chronology of the issuance and listing of shares on any stock exchange. Sarana Jaya is completely dependent on funding sources and internal policies set by the Regional Government to carry out its operations.

INFORMASI TENTANG KRONOLOGIS PENERBITAN DAN PENCATATAN EFEK LAINNYA

INFORMATION ON THE CHRONOLOGY OF ISSUANCE AND LISTING OF OTHER SECURITIES

Sejak awal pendiriannya hingga akhir tahun 2023, Sarana Jaya tidak menerbitkan efek dalam bentuk apa pun. Oleh karena itu, informasi tentang kronologis penerbitan dan pencatatan efek menjadi tidak relevan untuk diungkapkan dalam Laporan Tahunan ini.

Since its establishment until the end of 2023, Sarana Jaya has not issued securities in any form. Therefore, information regarding the chronology of securities issuance and listing is irrelevant to be disclosed in this Annual Report.



LEMBAGA DAN PROFESI PENUNJANG PERUSAHAAN

INSTITUTIONS AND PROFESSIONALS SUPPORTING THE COMPANY

► Akuntan Publik dan Kantor Akuntan Publik

Public Accountants and Public Accounting Firm

Kantor Akuntan Publik (KAP) Public Accounting Firm (KAP)	Heliantono & Rekan (Parker Russell International)	Heliantono & Partners (Parker Russell International)
Akuntan Publik (AP) Public Accountant (AP)	Ade Ikhwan, S.E., CPA	Ade Ikhwan, S.E., CPA
Alamat dan Info Kontak Address and Contact Info	Aminta Plaza, 7 th Floor 704 Jl. T.B. Simatupang Kav. 10 Jakarta Selatan 12310 Telp.: (+62 21) 766-1348-50 Fax.: (+62 21) 766-1351 Email: info@heliantonorekan.com	Aminta Plaza, 7 th Floor 704 Jl. T.B. Simatupang Kav. 10 South Jakarta 12310 Phone: (+62 21) 766-1348-50 Fax: (+62 21) 766-1351 E-mail: info@heliantonorekan.com
Jasa yang Diberikan Provided Service	Jasa Audit: General Audit Laporan Keuangan Konsolidasian, Laporan Pengendalian Intern, Audit Kepatuhan, dan Evaluasi Kinerja Perumda Pembangunan Sarana Jaya Tahun Buku 2023 Jasa Non-Audit: Tidak memberikan jasa non-audit	Audit Services: General Audit of Financial Reports Consolidation, Internal Control Report, Compliance Audit, and Performance Evaluation of Perumda Pembangunan Sarana Jaya for Fiscal Year 2023 Non-Audit Services: Did not provide non-audit services
Periode Penugasan Assignment Period	2023	2023
Biaya Fee	Rp299.344.800	Rp299.344.800



► **Konsultan Hukum**
Legal Consultant

Nama Konsultan Hukum Legal Consultant Name	Alamat dan Info Kontak Address and Contact Info	Jasa yang Diberikan Provided Service
Sidabukke & Partner	<p>Gedung Office 8 Lt. 19 Unit I Lot. 28 Jl. Jendral Sudirman Kav. 52-53, Senayan, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan Telp.: 021 29333 707</p> <p>Office 8 Building Floor 19 Unit I Lot. 28 Jl. Jendral Sudirman Kav. 52-53, Senayan, Kebayoran Baru, South Jakarta Phone: 021 29333 707</p>	<p>1. Jasa Konsultansi Hukum <i>Retainer</i> Litigasi Perumda Pembangunan Sarana Jaya Tahun 2023. Legal Consultancy Services Litigation Retainer Perumda Pembangunan Sarana Jaya in 2023.</p> <p>2. Konsultan Hukum Proses Penyelesaian Kewajiban PT Totalindo Eka Persada, Tbk (Dalam PKPU) Kepada Perumda Pembangunan Sarana Jaya Dalam Proses Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang. Legal Consultant for the Process of Settlement of Obligations of PT Totalindo Eka Persada, Tbk (in PKPU) to Perumda Pembangunan Sarana Jaya in the Delay of Debt Payment Obligation Process.</p>
Hanafiah Ponggawa & Partner	<p>Wisma 46 Kota BNI, 32nd, 41st Floor Kav. 1, Tanahabang, Jl. Jenderal Sudirman, RT.10/RW.11, Karet Tengsin, Jakarta Pusat 10220 Telp.: (021) 5701837</p> <p>Wisma 46 Kota BNI, 32nd, 41st Floor Kav. 1, Tanahabang, Jl. Jenderal Sudirman, RT.10/RW.11, Karet Tengsin, Central Jakarta 10220 Phone: (021) 5701837</p>	<p>Jasa Hukum Akuisisi Saham PT Hotel Batavia Harmony (Novotel Cikini). Legal Services for the Acquisition of Shares of PT Batavia Harmony Hotel (Novotel Cikini).</p>
DHP Law Firm	<p>Jl. RP. Soeroso No. 40, RT. 2/RW. 2, Gondangdia, Kec. Menteng, Jakarta Pusat 10350 Telp.: (021) 3152090</p> <p>Jl. RP. Soeroso No. 40, RT. 2/RW. 2, Gondangdia, Kec. Menteng, Central Jakarta 10350 Phone: (021) 3152090</p>	<p>Konsultan Hukum Dalam Rangka Pendampingan dan Pembuatan Perjanjian Kerjasama Terkait Kerja sama Pengelolaan Mall Cibubur Junction. Legal Consultant in the Framework of Assistance and Preparation of Cooperation Agreement Related to the Management of Cibubur Junction Mall.</p>
Jardin Legal	<p>One Pacific Place Lt. 15 Jalan Jenderal Sudirman Kav. 52-53, Jakarta Selatan 12190</p> <p>One Pacific Place Lt. 15 Jalan Jenderal Sudirman Kav. 52-53, South Jakarta 12190</p>	<p>Konsultan Hukum Retainer dalam rangka Pelaksanaan Pendampingan Pekerjaan di Perumda Pembangunan Sarana Jaya Tahun 2023. Retainer Legal Consultant in the context of Implementation of Work Assistance at Perumda Pembangunan Sarana Jaya in 2023.</p>



PENGHARGAAN TAHUN 2023

AWARDS IN 2023

1. Top BUMD Awards 2023

The 2023 Top BUMD Awards



Pemberi penghargaan:

Awarding body:

Majalah TopBusiness, bekerja sama dengan Institut Otonomi Daerah (I-Otda).

TopBusiness Magazine in collaboration with the Regional Autonomy Institute (I-Otda).

Pada tanggal 5 April 2023, Perusahaan meraih penghargaan Top BUMD Awards 2023. Penghargaan ini memperkuat pencapaian Perusahaan sebagai salah satu Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) unggulan di seluruh Indonesia pada tahun 2023. Prestasi ini mencerminkan keberhasilan Perusahaan yang diakui secara nasional.

On April 5, 2023, the Company won the 2023 Top BUMD Awards. The award strengthens the Company's achievement as one of Indonesia's leading Region-Owned Enterprises (BUMD) in 2023. The achievement reflects the Company's nationally-recognized success.

2. Penghargaan Gerakan Sadar Tertib Arsip

Orderly Archives Awareness Movement



Pemberi penghargaan:

Awarding body:

Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Provinsi DKI Jakarta.
DKI Jakarta Provincial Library and Archives Service.

Dalam Gerakan Sadar Tertib Arsip 2023, Perumda Sarana Jaya, sebagai BUMD DKI Jakarta bidang properti, berhasil meraih predikat Kategori A "Memuaskan" dengan skor 83.18 dalam pengelolaan dan pelestarian arsip. Predikat ini menjadi bukti semangat dan komitmen Sarana Jaya dalam menjaga dan melindungi arsip, yang berkontribusi secara signifikan terhadap proses bisnis dan kegiatan korporasi.

In the 2023 Orderly Archives Awareness Movement, as a DKI Jakarta BUMD in the property sector, Perumda Sarana Jaya succeeded in achieving the Category A "Satisfactory" predicate with a score of 83.18 in archive management and preservation. The title is proof of Sarana Jaya's enthusiasm and commitment to maintaining and protecting archives, which contribute significantly to business processes and corporate activities.

3. Top Digital Corporate Brand Award 2023

The 2023 Top Digital Corporate Brand Award



Pemberi penghargaan:

Awarding body:

InfoEkonomi.ID bersama Tras N Co.
InfoEkonomi.ID with Tras N Co.

Pada 14 September 2023, Perusahaan menerima Top Digital Corporate Brand Award 2023. Penghargaan ini merupakan wujud capaian positif bagi insan Sarana Jaya dalam memanfaatkan penyampaian informasi Perusahaan secara digital serta menjaga reputasi Perusahaan, khususnya meningkatkan citra dan persepsi positif masyarakat.

On September 14, 2023, the Company received the 2023 Top Digital Corporate Brand Award. The award is a positive achievement for Sarana Jaya personnel in utilizing digital delivery of Company information and maintaining reputation, especially in improving the public's positive image and perception.

SERTIFIKASI TAHUN 2023

CERTIFICATIONS IN 2023

1. Pedoman Manajemen Risiko Terintegrasi Integrated Risk Management Guidelines



Pedoman Manajemen Risiko Terintegrasi, yang telah dinilai oleh Center for Risk Management and Sustainability (CRMS) dan dinyatakan sesuai dengan SNI 8615:2018 ISO 31000:2018 pada tanggal 25 November 2022. Penerimaan sertifikasi ini menandai pencapaian yang sangat signifikan bagi Perusahaan dalam penerapan sistem manajemen risiko yang terintegrasi. Dengan memperoleh sertifikasi ini, Perusahaan membuktikan komitmennya terhadap praktik manajemen risiko yang tinggi, memastikan keberlanjutan tata kelola risiko yang efektif, dan memenuhi standar internasional yang diakui.

The Integrated Risk Management Guidelines, assessed by the Center for Risk Management and Sustainability (CRMS) and declared in accordance with SNI 8615:2018 ISO 31000:2018 on November 25, 2022. The recipient of this certification marks a significant achievement for the Company in implementing an integrated risk management system. By obtaining this certification, the Company proves its commitment to high risk management practices, ensuring the continuation of effective risk governance, and meeting recognized international standards.

2. Sertifikat ISO 9001:2015 ISO 9001:2015 Certification

Masa berlaku: 22 Oktober 2021 - 21 Oktober 2024
Validity period: October 22, 2021 – October 21, 2024



Perusahaan telah memperoleh Sertifikat ISO 9001:2015 yang menegaskan komitmennya dalam melaksanakan Sistem Manajemen Mutu ISO 9001:2015. Melalui sertifikasi ini, Perusahaan menegaskan kualitas layanan dan produk yang ditawarkan kepada publik. Dengan mengimplementasikan standar ISO 9001:2015, Perusahaan menjamin bahwa setiap aspek kegiatan korporasi, serta kualitas barang dan jasa yang disediakan, akan terus dipertahankan dan ditingkatkan sesuai dengan standar internasional yang diakui. Langkah ini mencerminkan tekad Perusahaan dalam memberikan layanan dan produk yang berkualitas serta meningkatkan kepuasan pelanggan secara berkelanjutan.

The Company has obtained the ISO 9001:2015 Certificate, which confirms its commitment to implementing the ISO 9001:2015 Quality Management System. Through this certification, the Company confirms the quality of services and products offered to the public. By implementing the ISO 9001:2015 standard, the Company guarantees that every aspect of corporate activity, as well as the quality of goods and services provided, will continue to be maintained and improved following recognized international standards. The step reflects the Company's determination to provide quality services and products and increase customer satisfaction sustainably.

3. Sertifikat ISO 37001:2016 ISO 37001:2016 Certification

Masa berlaku: 2 Maret 2022 – 2 Maret 2025
Validity period: March 2, 2022 – March 2, 2025



Perusahaan terus membangun, mengimplementasikan, dan meningkatkan program kepatuhan setelah berhasil memperoleh Sertifikat SNI ISO 37001:2016 Sistem Manajemen Anti Penyuapan (SMAP). Melalui sertifikasi ini, Perusahaan memastikan adopsi standar internasional yang ketat dalam upaya mengidentifikasi, mencegah, dan mendeteksi kasus penyuapan. Langkah-langkah kepatuhan yang terus diperkuat mencerminkan komitmen Perusahaan untuk menjalankan operasional dengan integritas dan transparansi, serta memberikan keyakinan kepada pemangku kepentingan terkait tata kelola yang baik.

The Company continues to build, implement, and improve its compliance program after obtaining the SNI ISO 37001:2016 Anti-Bribery Management System (SMAP) Certificate. Through this certification, the Company ensures the adoption of strict international standards to identify, prevent, and detect bribery cases. Continuously strengthened compliance measures reflect the Company's commitment to carrying out operations with integrity and transparency, as well as providing confidence to stakeholders regarding good governance.



SKALA USAHA PERUSAHAAN [OJK C.3]

BUSINESS SCALE

Uraian Description	Satuan Unit	2023	2022	2021
Jumlah Pendapatan Total Revenues	Rp Juta	211.954	158.435	241.211
Laba Tahun Berjalan Profit for the Year	Rp Juta	(98.863)	78.961	(217.165)
Jumlah Aset Total Assets	Rp Juta	6.285.033	6.395.397	6.176.972
Jumlah Liabilitas Total Liabilities	Rp Juta	729.416	761.249	761.176
Jumlah Ekuitas Total Equity	Rp Juta	5.555.618	5.634.147	5.415.795
Kepemilikan Saham Stock Ownership				
Pemerintah Provinsi DKI Jakarta DKI Jakarta Provincial Government	%	100	100	100



RANTAI PASOKAN PERUSAHAAN [GRI 2-6]

SUPPLY CHAIN

Sebagai Badan Usaha Milik Daerah yang bergerak di bidang properti. Sarana Jaya seringkali melibatkan beberapa pihak untuk turut bekerja sama berkontribusi melakukan pembangunan proyek/properti. Pelibatan pihak ini dilakukan Sarana Jaya dengan menyesuaikan pada jenis proyek dengan jenis Kerjasama *Joint Venture* (JV), proyek penugasan berupa proyek yang ditugaskan pihak lain seperti Pemerintah Provinsi DKI Jakarta serta proyek Alat Produksi yang merupakan proyek kerja sama dengan mitra baik berupa penambahan penyertaan modal (investasi) pada alat-alat produksi, riset dan atau kajian terhadap lahan-lahan serta aset-aset potensial untuk dikembangkan dan dilakukan pembelian lahan atau aset potensial.

Adapun beberapa mitra/pemasok yang melakukan kerjasama dengan Sarana Jaya pada tahun 2023 adalah sebagai berikut:

As a Region-Owned Enterprise engaging in the property sector, Sarana Jaya often involves other parties to work together and contribute to project/property development. The involvement of other parties is implemented by adjusting to the type of project being carried out. The types of projects that involve other parties include Joint Venture (JV) Cooperation, projects assigned by other parties such as the DKI Jakarta Provincial Government, and Production Equipment projects in the form of additional capital participation (investment) in production tools, research and/or study of potential lands and assets for development as well as purchase of potential land or assets.

The partners/suppliers who were cooperating with Sarana Jaya in 2023 are as follows:

Rantai Pasokan Sarana Jaya tahun 2023 [GRI 2-6]

Sarana Jaya Supply Chain in 2023

No.	Jenis Penyedia Supplier Type	Lokasi Penyedia Supplier Location	Jenis Aktivitas Type	2023		2022		2021	
				Jumlah Penyedia Total Suppliers	Nilai Pengadaan (Rp Juta) Procurement Value (Rp Million)	Jumlah Penyedia Total Suppliers	Nilai Pengadaan (Rp Juta) Procurement Value (Rp Million)	Jumlah Penyedia Total Suppliers	Nilai Pengadaan (Rp Juta) Procurement Value (Rp Million)
1	Pekerjaan Konstruksi Construction Work	Indonesia Indonesia	Pembangunan Construction	4	21.495	6	2.154	4	1.466
2	Barang Goods	Indonesia Indonesia	Pengadaan Barang Goods Procurement	4	502	1	188	7	1.116
3	Jasa Konsultan Consulting Services	Indonesia Indonesia	Konsultan Konstruksi Construction Consultant	8	4.641	3	4.764	2	179
			Konsultan Non Konstruksi Non-Construction Consultant	29	12.618	38	9.533	29	38.493
4	Jasa Lainnya Other Services	Indonesia Indonesia	Jasa Lainnya Other Services	32	36.200	34	19.026	38	20.810
Jumlah Total				77	75.458	82	35.665	80	62.065

PERUBAHAN SIGNIFIKAN TAHUN 2023 [GRI 2-6] [OJK C.6]

SIGNIFICANT CHANGES IN 2023

Pada tahun 2023, tidak terdapat perubahan yang signifikan yang mempengaruhi kelangsungan usaha Perusahaan.

There were no significant changes in 2023 that significantly affected the Company's business continuity.



04

Analisis dan Pembahasan Manajemen

Management Discussion and Analysis



PERKEMBANGAN MAKROEKONOMI GLOBAL DAN NASIONAL

NATIONAL AND GLOBAL MACROECONOMIC DEVELOPMENT



Perkembangan ekonomi global masih belum menunjukkan tanda-tanda perbaikan yang solid hingga penghujung tahun 2023. Di tengah kondisi dunia yang belum sepenuhnya pulih dari *scarring effect* akibat pandemi yang cukup berat, sejumlah tantangan baru yang jauh lebih kompleks justru datang menghampiri sehingga menghambat proses pemulihan di banyak negara. Akibatnya, *gap* divergensi pertumbuhan antar-negara semakin melebar yang kemudian berujung pada pelemahan ekonomi dunia secara agregat.

Beberapa faktor utama yang menjadi pemicu risiko pelemahan global di tahun 2023, antara lain meningkatnya eskalasi tensi geopolitik antara Rusia dan Ukraina serta munculnya konflik baru di Timur Tengah. Konflik perang yang berkepanjangan tersebut telah mengakibatkan rantai pasok energi pada skala global menjadi terganggu sehingga menimbulkan kelangkaan dan memicu terjadinya kenaikan inflasi tajam di sejumlah

Global economic development had not shown solid signs of improvement until the end of 2023. Amid a world that has not fully recovered from the scarring effect of a severe pandemic, several new, far more complex challenges have come to the fore, hampering the recovery process in many countries. As a result, the growth divergence gap between countries is widening, leading to a weakening of the world economy in aggregate.

Some of the main factors that trigger the risk of a global downturn in 2023 include the escalation of geopolitical tension between Russia and Ukraine and the emergence of new conflicts in the Middle East. The prolonged war conflicts have disrupted energy supply chains on a global scale, leading to shortages and triggering a sharp rise in inflation in several countries. Global uncertainty is also heightened when the El Nino phenomenon is



negara. Ketidakpastian global juga semakin tinggi tatkala fenomena El Nino dialami oleh negara-negara penghasil komoditas, seperti Indonesia. Faktor perubahan iklim ini turut berkontribusi meningkatkan gangguan pada rantai produksi pangan sehingga meningkatkan risiko krisis pangan dan menyebabkan ketidakstabilan volatilitas harga komoditas global.

Menyikapi peliknya konstelasi global yang berkembang, Indonesia memberikan respons berupa bauran kebijakan moneter dan fiskal yang tepat di tahun 2023. Hasilnya, fundamental ekonomi nasional tetap resilien dari guncangan global dan mampu mencatatkan pertumbuhan yang kuat sebesar 5,05% (yoy) untuk tahun 2023. Tidak hanya itu, laju inflasi Indonesia secara *full year 2023* juga terjaga dan terkendali di level 2,61%. Capaian inflasi tahun 2023 menjadi yang terendah dalam dua dekade terakhir dan pencapaian tersebut relatif lebih baik dibandingkan inflasi yang dialami negara-negara maju maupun negara tetangga.

Adapun yang menjadi motor penggerak utama perekonomian nasional sepanjang tahun 2023 adalah tingginya permintaan dalam negeri seiring dengan pemulihan daya beli masyarakat di masa pasca pandemi. Kekuatan solid dari dalam negeri berhasil mengimbangi pelemahan kinerja ekspor yang secara langsung terdampak oleh perlambatan ekonomi yang dihadapi oleh negara-negara mitra dagang utama Indonesia.

Dari sisi pasar keuangan, stabilitas nilai tukar Rupiah juga tetap terjaga didukung kebijakan stabilisasi yang ditempuh Bank Indonesia di tengah kuatnya dolar AS. Pada tahun 2023, Bank Indonesia memutuskan untuk mempertahankan kebijakan suku bunga tinggi sehingga *BI rate* berakhir di level 6% pada Desember 2023. Kebijakan moneter ketat ini ditempuh sebagai bentuk respons terhadap kebijakan *higher for longer* The Fed AS.

Dampak positif dari kebijakan Bank Indonesia terefleksi dari pergerakan nilai tukar Rupiah yang tercatat menguat 1,11% (*point to point*) dibandingkan dengan akhir tahun 2022. Perkembangan ini lebih baik dibandingkan dengan apresiasi mata uang Kawasan ASEAN, seperti Baht Thailand dan Peso Filipina masing-masing sebesar 1,03%, dan 0,62%. Stabilitas nilai tukar Rupiah yang terjaga di tengah fenomena *strong US dollar* berdampak positif pada minimalnya *imported inflation* serta mendukung stabilitas perekonomian secara keseluruhan.

experienced by commodity-producing countries, such as Indonesia. The climate change factor contributes to increased disruption in the food production chain, increasing the risk of food crises and destabilizing global commodity price volatility.

In response to the complicated global constellation, Indonesia responded with the correct mix of monetary and fiscal policies in 2023. As a result, the national economic fundamentals remain resilient to global shocks and can record strong growth of 5.05% (yoy) for 2023. Not only that, Indonesia's inflation rate for the full year 2023 was also maintained and controlled at 2.61%. The inflation in 2023 is the lowest in the last two decades, and this achievement is relatively better than the inflation experienced by developed countries and neighboring countries.

The main driving force of the national economy throughout 2023 was the high domestic demand in line with the recovery of people's purchasing power in the post-pandemic period. Solid strength from within the country offset the weakening export performance, which was directly affected by the economic slowdown faced by Indonesia's main trading partner countries.

In terms of the financial market, the stability of the Rupiah exchange rate was also maintained, supported by Bank Indonesia's stabilization policy amidst the strong US dollar. In 2023, Bank Indonesia decided to maintain a high-interest rate policy so that the BI rate ended at 6% in December 2023. The tight monetary policy was pursued in response to the US Fed's higher-for-longer policy.

The positive impact of Bank Indonesia's policies is reflected in the movement of the Rupiah exchange rate, which recorded an appreciation of 1.11% (point to point) compared to the end of 2022. This development is better than the appreciation of ASEAN Region currencies, such as the Thai Baht and Philippine Peso, by 1.03% and 0.62%, respectively. The stability of the Rupiah exchange rate amidst the strong US dollar phenomenon has a positive impact on minimizing imported inflation and supporting overall economic stability.

TINJAUAN INDUSTRI PROPERTI

PROPERTY INDUSTRY REVIEW

Sejalan dengan pertumbuhan ekonomi nasional yang tetap kuat di tengah berbagai tantangan global, demikian juga perekonomian DKI Jakarta pada tahun 2023 berhasil mencatatkan pertumbuhan yang relatif tinggi sebesar 4,96% (yoy). Dari sisi produksi, pertumbuhan tertinggi terjadi pada Lapangan Usaha Transportasi dan Pergudangan sebesar 14,05% (yoy). Sementara dari sisi pengeluaran, Komponen Pengeluaran Konsumsi Lembaga Non-Profit yang Melayani Rumah Tangga (PKLNPRT) mengalami pertumbuhan tertinggi 9,84% (yoy).

Kendati lanskap makro ekonomi nasional maupun ekonomi provinsi menunjukkan fundamental yang solid pada 2023, kinerja sektor properti di Indonesia masih menunjukkan hasil yang terbatas sejalan dengan krisis properti global. Ditambah lagi, sentimen suku bunga tinggi turut memengaruhi pertumbuhan sektor properti.

Berdasarkan Laporan Colliers Market Insights Research, kinerja beberapa subsektor properti nasional di tahun 2023 masih tergerus cukup dalam, seperti perkantoran dan apartemen. Sebaliknya, sektor perumahan tapak, ritel, pusat perbelanjaan, pergudangan dan kawasan industri telah menunjukkan tren pemulihan.

Pasar perumahan tergolong paling stabil dibandingkan dengan subsektor properti lainnya, karena kebutuhan hunian masih sangat tinggi. Tingkat kekurangan (*backlog*) perumahan berdasarkan data Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas) Badan Pusat Statistik tahun 2023 mencapai 12,75 juta unit. Kebutuhan rumah didominasi masyarakat berpenghasilan rendah dan segmen menengah ke bawah.

Kemudian jika ditinjau dari sisi harga, Bank Indonesia melaporkan bahwa Hasil Survei Harga Properti Residensial (SHPR) mengindikasikan adanya perkembangan pada harga properti residensial di pasar primer yang menunjukkan pertumbuhan pada triwulan IV/2023 sebesar 1,74% (yoy), lebih rendah dibandingkan pertumbuhan triwulan III/2023 yang sebesar 1,96% (yoy). Penjualan properti residensial di pasar primer pada triwulan IV/2023 terindikasi meningkat cukup tinggi dibanding triwulan sebelumnya. Hal ini tercermin dari pertumbuhan penjualan sebesar 3,27% (yoy) pada periode tersebut, membaik dari triwulan sebelumnya yang mengalami kontraksi sebesar 6,59% (yoy).

In line with national economic growth that remained strong amidst various global challenges, the DKI Jakarta economy in 2023 recorded a relatively high growth of 4.96% (yoy). Regarding production, the highest growth occurred in the Transportation and Warehousing Field at 14.05% (yoy). Meanwhile, from the expenditure side, the Consumption Expenditure Component of Non-Profit Institutions Serving Households (PKLNPRT) experienced the highest growth of 9.84% (yoy).

While the national and provincial macroeconomic landscape showed solid fundamentals in 2023, Indonesia's property sector's performance still showed limited results in line with the global property crisis. In addition, the sentiment of high interest rates also affected the property sector's growth.

Based on the Colliers Market Insights Research Report, the performance of several national property sub-sectors in 2023 is still eroded quite deeply, such as offices and apartments. In contrast, the landed housing, retail, shopping centers, warehousing, and industrial estate sectors have shown a recovery trend.

The housing market is the most stable compared to other property sub-sectors, as housing demand is still very high. Based on data from the National Socioeconomic Survey (Susenas) of Statistics Indonesia in 2023, the level of housing backlog reached 12.75 million units. Housing needs are dominated by low-income people and the lower middle segment.

Meanwhile, in terms of prices, Bank Indonesia reported that the results of the Residential Property Prices Survey (SHPR) indicated a development in residential property prices in the primary market, which showed growth in the fourth quarter of 2023 of 1.74% (yoy), lower than the growth in the third quarter of 2023 which amounted to 1.96% (yoy). Sales of residential properties in the primary market in Q4/2023 indicated a reasonably high increase compared to the previous quarter. This was reflected in sales growth of 3.27% (yoy) in that period, improving from the previous quarter, which contracted by 6.59% (yoy).



TINJAUAN OPERASIONAL PER SEGMENT USAHA

OPERATIONAL REVIEW PER BUSINESS SEGMENT

Sebagai BUMD milik Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta yang bergerak di bidang properti, Perusahaan terus berusaha meningkatkan skala bisnisnya dengan berekspansi dan memberikan kontribusi maksimal bagi sektor properti, terutama di Provinsi DKI Jakarta. Dalam rangka mendukung keberlanjutan usaha, Perusahaan secara aktif menjalin kerja sama dengan mitra-mitra potensial untuk mengembangkan aset properti yang sudah ada atau yang masih dalam tahap direncanakan untuk dikembangkan. Selain itu, Perusahaan juga menjalin sinergitas dengan Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) Pemprov DKI Jakarta dalam melaksanakan Kegiatan Strategis Daerah (KSD) Tahun 2023. Jalinan kerja sama ini merupakan wujud pelaksanaan mandat Perusahaan sebagai BUMD Pemprov DKI Jakarta untuk mendukung program kebijakan pemerintah.

Pada tahun 2023, Perusahaan melanjutkan pembangunan Hunian Terjangkau, yaitu Pembangunan Menara Ayasa di Nuansa Cilangkap. Di tahun 2023, Sarana Jaya melakukan Peletakan Batu Pertama untuk Pembangunan Menara Ayasa, Nuansa Cilangkap.

As a BUMD owned by the DKI Jakarta Provincial Government engaged in the property sector, the Company strives to increase its business scale by expanding and providing maximum contribution to the property sector, especially in DKI Jakarta Province. To support business sustainability, the Company actively cooperates with potential partners to develop existing property assets or those that are still in the planning stage to be developed. In addition, the Company establishes synergy with the Regional Working Units (SKPD) of the DKI Jakarta Provincial Government in implementing Regional Strategic Activities (KSD) of 2023. The cooperation is an implementation of the Company's mandate as a BUMD of the DKI Jakarta Provincial Government to support government policy programs.

In 2023, the Company continued the construction of Affordable Housing, namely the Menara Ayasa Development at Nuansa Cilangkap. In 2023, Sarana Jaya carried out the First Stone Laying for the Menara Ayasa Development, Nuansa Cilangkap.



Untuk Proyek Pengembangan Kawasan Sentra Primer Tanah Abang (SPTA) dengan konsep *Transit Oriented Development* (TOD) sebagaimana Peraturan Gubernur No. 41/2014, di tahun 2021 masih dalam proses pembebasan lahan. Perusahaan melakukan pekerjaan pemagaran panel beton pada area pembebasan lahan di RW 01, RW 03, RW 04, RW 05 Kelurahan Kampung Bali dan RW 09 Kelurahan Kebon Kacang, Kecamatan Tanah Abang, Jakarta Pusat. Sampai dengan akhir Desember, progres pemagaran telah selesai dilakukan, saat ini sedang dilakukan proses pelunasan pembebasan lahan tersebut.

Sarana Jaya telah mengusulkan konsep pergudangan terintegrasi dengan menggandeng PD Pasar Jaya selaku pengelola Tanah Abang Blok G, sehingga nantinya memiliki pola distribusi barang secara melayang atau *elevated*. Selain itu, akan tersedia jalur layang khusus pejalan kaki yang menghubungkan kawasan SPTA dan Tanah Abang Blok G dengan Museum Tekstil, rusun terdekat, dan stasiun Kereta Rel Listrik (KRL), sebagai implementasi SPTA sebagai area TOD.

Di tahun 2022 Sarana Jaya juga melanjutkan penugasan dari Pemerintah Provinsi DKI Jakarta yang tertuang dalam Peraturan Gubernur (Pergub) No. 70 Tahun 2020 untuk penyelenggaraan Sarana Jaringan Utilitas Terpadu (SJUT) dan penugasan yang tertuang dalam Pergub. No. 71 Tahun 2020 tentang Penyelenggaraan Fasilitas Pengolahan Sampah antara di dalam Kota.

Sepanjang tahun 2023, Perusahaan secara aktif juga melanjutkan penguatan alat produksi untuk meningkatkan kontribusi terhadap pendapatan Perusahaan yaitu dengan cara menjalin kerja sama dengan mitra, penambahan penyertaan modal (investasi) pada alat-alat produksi, melakukan riset dan atau kajian terhadap lahan-lahan dan atau aset-aset potensial untuk dikembangkan oleh Perusahaan, dan melakukan pembelian lahan dan atau aset potensial.

The Tanah Abang Primary Center Area Development Project (SPTA) with the Transit Oriented Development (TOD) concept as per Governor Regulation No. 41/2014 is still in the land acquisition process in 2021. The Company carried out concrete panel fencing work on land acquisition areas in RW 01, RW 03, RW 04, RW 05 Kelurahan Kampung Bali, and RW 09 Kelurahan Kebon Kacang, Kecamatan Tanah Abang, Central Jakarta. Until the end of December, the fencing progress has been completed, and the process of paying off the land acquisition is being carried out.

Sarana Jaya has proposed an integrated warehousing concept by cooperating with PD Pasar Jaya, the manager of Tanah Abang Blok G so that later, it will have a floating or elevated distribution pattern for goods. In addition, there will be a special pedestrian elevated path connecting the SPTA and Tanah Abang Blok G areas with the Textile Museum, nearby flats, and the Commuter Line train (KRL) station as an implementation of SPTA as a TOD area.

In 2022, Sarana Jaya also continued the assignment from the DKI Jakarta Provincial Government as stipulated in Governor Regulation (Pergub) No. 70 of 2020 for implementing Integrated Utility Network Facilities (SJUT) and the assignment stipulated in Pergub. No. 71 of 2020 on the Implementation of Waste Processing Facilities in the City.

Throughout 2023, the Company also actively continued to strengthen production equipment to increase the contribution to the Company's revenue, i.e., by establishing cooperation with partners, additional capital participation (investment) in production equipment, conducting research and or studies on potential lands and or assets to be developed by the Company, and purchasing potential lands and or assets.



ALAT PRODUKSI (PERTANAHAN, HUNIAN, PROPERTI DAN INFRASTRUKTUR)

PRODUCTION ASSETS (LAND-BANKING, HOUSING, PROPERTY AND INFRASTRUCTURE)

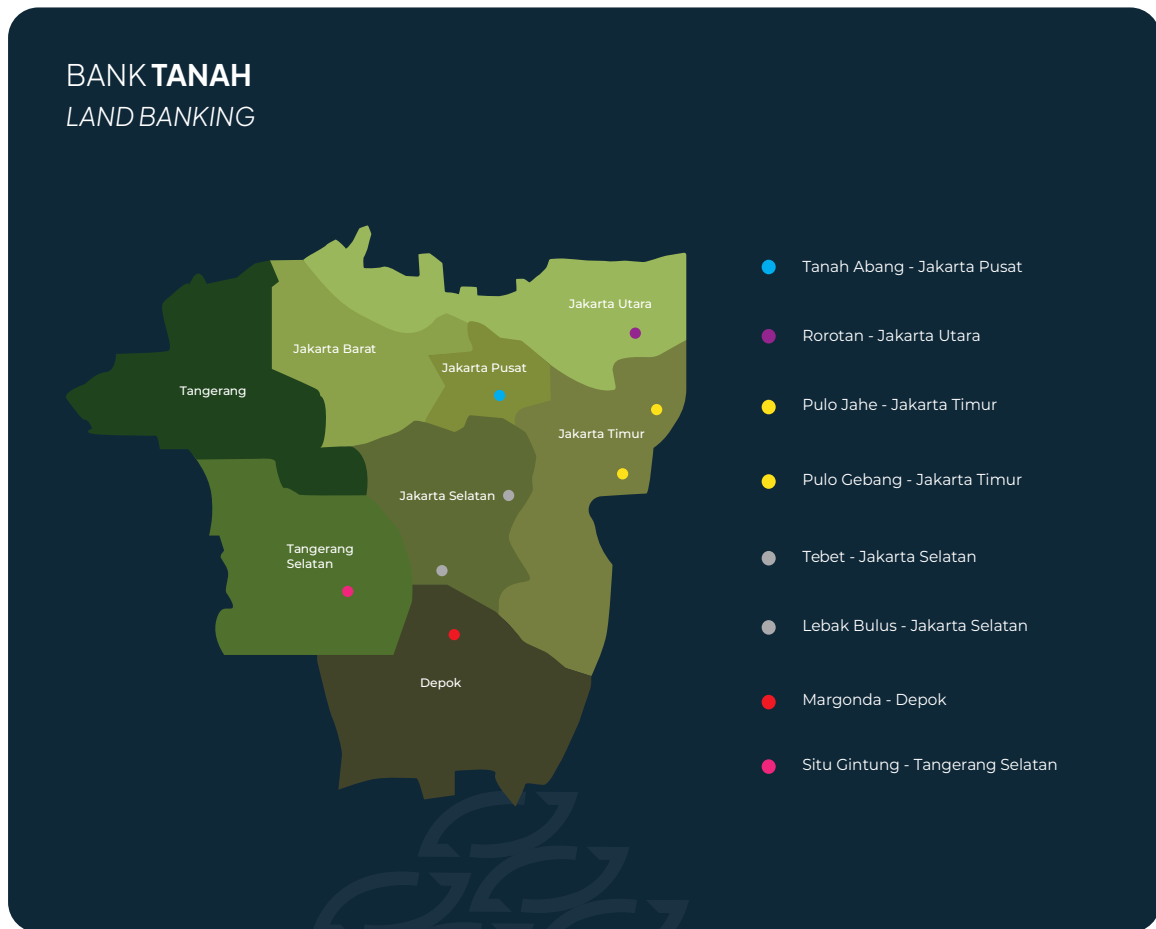
PERTANAHAN | LAND-BANKING

Sarana Jaya memperkuat posisinya sebagai pengembang terdepan di wilayah Jabodetabek dengan mengelola dan mengembangkan total lahan seluas 767.032 meter persegi yang tersebar di wilayah strategis. Lahan-lahan ini berada di Jakarta Pusat (46.529 m²), Jakarta Selatan (39.760 m²), Jakarta Timur (189.244 m²), Jakarta Utara (473.370 m²), Tangerang Selatan (12.435 m²), dan Depok (5.694 m²).

Pengembangan lahan tersebut mencakup berbagai proyek vital seperti pusat bisnis, perumahan, fasilitas publik, zona industri, infrastruktur pelabuhan, dan fasilitas umum yang mendukung urbanisasi dan pertumbuhan ekonomi kota. Dengan langkah ini, Sarana Jaya berkomitmen untuk mendukung pembangunan kota yang berkelanjutan dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Sarana Jaya strengthens its position as a leading developer in Jabodetabek by managing and developing 767,032 square meters of land spread across strategic areas. The areas are in Central Jakarta (46,529 m²), South Jakarta (39,760 m²), East Jakarta (189,244 m²), North Jakarta (473,370 m²), South Tangerang (12,435 m²), and Depok (5,694 m²).

Land development includes various vital projects such as business centers, housing, public facilities, industrial zones, port infrastructure, and public facilities that support urbanization and economic growth. With this step, Sarana Jaya is committed to supporting sustainable urban development and improving the community's welfare.



HUNIAN | HOUSING

1



NUANSA PONDOK KELAPA

(Hunian | Housing)

Jl. H. Naman No. 54, Pondok Kelapa,
Kec. Duren Sawit, Jakarta Timur 13450
Jl. H. Naman No. 54, Pondok Kelapa,
Kec. Duren Sawit, East Jakarta 13450

Pembangunan Nuansa Pondok Kelapa dilakukan secara terencana oleh Perusahaan dengan mengusung konsep hunian yang aman, tentram dan damai bagi semua. Bangunan ini berdiri di atas tanah seluas 2,9 Ha yang rencananya akan terdiri dari 4 (empat) menara, yaitu 2 Menara Hunian Terjangkau (Menara Samawa) dan 2 Menara Komersil (Menara Swasana).

Sebagai program pertama Hunian Terjangkau, pendirian Menara Samawa (Hunian Terjangkau) dibangun di atas luas lahan 6.126 m² dan diperuntukkan khusus bagi warga DKI Jakarta yang belum memiliki rumah tinggal. Menara Samawa terdiri dari 780 unit yang dibagi menjadi 3 tipe hunian, yaitu Tipe Studio 240 unit, Tipe 1 Kamar 180 unit dan Tipe 2 Kamar 360 unit.

Pada akhir Agustus 2019, Menara Samawa Nuansa Pondok Kelapa diresmikan oleh Gubernur DKI Jakarta. Untuk mendukung keberlangsungan program Pemprov DKI Jakarta, Menara Samawa dijual tanpa uang muka dengan skema pembiayaan Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP) melalui Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) yang dibentuk oleh Pemprov DKI Jakarta untuk memudahkan pembayaran angsuran konsumen. Warga DKI Jakarta yang *eligible* untuk dapat mengajukan pendaftaran Hunian Terjangkau melalui Aplikasi "SIRUKIM" melalui *Playstore* adalah warga DKI Jakarta yang belum memiliki rumah.

Dalam pembangunan Hunian Terjangkau Nuansa Pondok Kelapa, Menara Swasana yang merupakan tower kedua berupaya untuk memberikan suasana yang nyaman bagi para penghuninya. Menara Swasana didesain secara eksklusif untuk menjadi hunian terbaik di Jakarta Timur dalam satu bentuk apartemen yang modern. Menara Swasana berdiri di kawasan pemukiman 2.9 hektare dan terdiri dari 21 lantai. Menara Swasana hadir dengan 2 tipe, yaitu Tipe Studio dan Tipe 2 Kamar Tidur.

The development of Nuansa Pondok Kelapa was planned by the Company to promote the concept of safe, calm, and peaceful housing for all. The building stands on 2.9 ha of land and is planned to consist of four towers: two Affordable Residential Towers (Menara Samawa) and two Commercial Towers (Menara Swasana).

As the first Affordable Housing program, Menara Samawa (Affordable Housing) was built on a land area of 6,126 m² and is specifically intended for DKI Jakarta residents who do not yet have a home. Menara Samawa consists of 780 units divided into two residence types: 240 units of Studio Type, 180 units of Type 1 Room, and 360 units of Type 2 Room.

At the end of August 2019, the Menara Samawa Nuansa Pondok Kelapa was inaugurated by the DKI Jakarta Governor. To support the sustainability of the DKI Jakarta Provincial Government program, Menara Samawa is being sold without a down payment using the Housing Financing Liquidity Facility (FLPP) scheme through the Regional Public Service Agency (BLUD), which the DKI Jakarta Provincial Government formed to facilitate consumer installment payments. DKI Jakarta residents eligible to apply for Affordable Housing registration via the "SIRUKIM" App via *Playstore* are DKI Jakarta residents who do not own a house.

In developing the Nuansa Pondok Kelapa Affordable Residential Residence, Menara Swasana, the second tower, strives to provide a comfortable atmosphere for its residents. Menara Swasana was designed exclusively to be the best residence in East Jakarta in one modern apartment form. Swasana Tower stands in a 2.9-hectare residential area and consists of 21 floors. Menara Swasana comes in two types, namely the Studio Type and the 2-bedroom Type.

LUAS TANAH
29.000 m²

JUMLAH LANTAI
21

SURFACE AREA
29,000 m²

TOTAL FLOORS
21



2



NUANSA CILANGKAP

(Hunian | Housing)

Jl. Raya Cilangkap,
Cipayung, Jakarta 13870

Secara keseluruhan luas lahan di Nuansa Cilangkap mencapai $\pm 2,9$ hektar, dan untuk pembangunan Menara Kanaya sendiri dibangun di atas luas lahan ± 6.500 meter persegi, yang terdiri dari 24 lantai, dengan total 868 unit yang terdiri dari tipe studio dan 2 kamar. Selain fasilitas umum Hunian yang tersedia di Menara Kanaya Nuansa Cilangkap bahkan dilengkapi juga dengan Klinik, Area Komersil (*Foodcourt*), Toko, Taman Bermain, Taman Warga dan Sekolah TK.

Overall, the land area in Nuansa Cilangkap reaches ± 2.9 hectares. Menara Kanaya was constructed on a land area of $\pm 6,500$ square meters, consisting of 24 floors, with a total of 868 units consisting of studio and 2-bedroom types. Apart from the public residential facilities at the Menara Kanaya Nuansa Cilangkap, it is also equipped with a clinic, commercial area (food court), shop, playground, community park, and kindergarten school.

LUAS TANAH
29.000 m²

SURFACE AREA
29,000 m²

JUMLAH LANTAI
24

TOTAL FLOORS
24

3



APARTEMEN PALMA CITRA

(Hunian | Housing)

Jl. Gatot Subroto Kav. 26-27,
Kuningan, Jakarta Selatan
Jl. Gatot Subroto Kav. 26-27,
Kuningan, South Jakarta

Apartemen palma citra merupakan apartemen sewa yang berlokasi di jantung ibu kota jakarta, terletak di kawasan strategis Apartemen Palma Citra (Palm Court) dibangun sejak tahun 2004. Memiliki 2 tower dengan luas bangunan 34.620 m² Apartemen Palma Citra (Palm Court) memiliki fasilitas seperti kolam renang (*swimming pool*), area parkir yang luas, dan lain-lain. Apartemen palma citra terbangun atas kerjasama perumda pembangunan sarana jaya dengan PT Bima Sarana Perkasa dengan bentuk kerjasama *build, operation, transfer (bot)*.

Palma Citra Apartment is a rental apartment in the heart of the Capital City of Jakarta, located in the strategic area of Palma Citra Apartments (Palm Court), built in 2004. It has two towers with a building area of 34,620 m². The Palma Citra Apartment (Palm Court) has facilities like a swimming pool, a large parking area, etc. Palma Citra Apartment was built in cooperation with Perumda Pembangunan Sarana Jaya and PT Bima Sarana Perkasa through Build, Operation, and Transfer (BOT) cooperation.

LUAS TANAH
16.300 m²

SURFACE AREA
16,300 m²

JUMLAH LANTAI
17

TOTAL FLOORS
17

4



PEJATEN PARK RESIDENCE

(Hunian | Housing)

Jl. Warung Buncit Raya No. 21,
Jakarta Selatan
Jl. Warung Buncit Raya No. 21,
South Jakarta

Apartemen Pejaten Park Residence merupakan proyek pengembangan lahan untuk pembangunan apartemen di atas tanah HGB (Hak Guna Bangunan) dengan lahan seluas $\pm 7.261 \text{ m}^2$ dan terdiri atas 22 Lantai yang terletak di Jalan Warung Buncit Raya No. 21 Jakarta Selatan. Pembangunan apartemen ini mengacu pada Perjanjian Kerja Sama (PKS) dengan PT Permata Raya Pratama dan PT Kualajaya Realty.

Pejaten Park Residence Apartment is a land development project for constructing apartments on HGB (Right to Build) land with an area of $\pm 7,261 \text{ m}^2$ and consisting of 22 floors on Jl. Warung Buncit Raya No. 21, South Jakarta. The construction of this apartment refers to the Cooperation Agreement (PKS) with PT Permata Raya Pratama and PT Kualajaya Realty.

PROPERTI | PROPERTY

1



GEDUNG SARANA JAYA SARANA JAYA BUILDING

(Properti | Property)

Jl. Budi Kemuliaan I No. 1, Gambir, Jakarta Pusat 10110
Jl. Budi Kemuliaan I No. 1, Gambir, Central Jakarta 10110

Gedung Sarana Jaya merupakan gedung sewa perkantoran yang ditawarkan khusus dengan peruntukan kantor pemerintahan. Aset bangunan ini berdiri di atas lahan seluas 7.640 m^2 dan terdiri dari 17 lantai. Bentuk kerja sama pengelolaan gedung tersebut adalah pengelolaan oleh PT Getraco Utama.

The Sarana Jaya Building is an office rental building specifically for government offices. The building asset stands on an area of $7,640 \text{ m}^2$ and consists of 17 floors. The building management cooperation is managed by PT Getraco Utama.

2



NAYA MENTENG

(Properti | Property)

No. 84-86, Jl. Cikini Raya No. 14, Menteng, Jakarta Pusat 10330
No. 84-86, Jl. Cikini Raya No. 14, Menteng, Central Jakarta 10330

Gedung Naya Menteng merupakan bangunan perkantoran yang terletak di kawasan Pusat Bisnis dan Pemerintahan di daerah Sudirman, Thamrin, Kuningan, Saharjo. Bangunan ini menawarkan kemudahan aksesibilitas ke stasiun kereta api dan mudah dijangkau dari mana saja. Naya Menteng terdiri dari 4 Lantai dan dibangun di atas lahan sebesar 2.449 m^2 .

The Naya Menteng Building is an office building in the Business and Government Center area in the Sudirman, Thamrin, Kuningan, Saharjo area. The building offers easy accessibility to the train station and is easy to reach from anywhere. Naya Menteng consists of four floors and was built on an area of $2,449 \text{ m}^2$.



3



NAYA CIKINI

(Properti | Property)

Jl. Cikini Raya No. 42,
Menteng, Jakarta 10330
Jl. Cikini Raya No. 42,
Menteng, Jakarta 10330

Naya Cikini merupakan salah satu alat produksi yang baru dimiliki oleh perumda pembangunan sarana jaya pada bulan Desember 2019 dalam bentuk bangunan perkantoran 8 lantai dan 1 *basement*. Naya Cikini berdiri di atas lahan seluas 1.450 m² dengan luas bangunan 4.278 m² dan berlokasi di jalan Cikini Raya Jakarta Pusat, dekat dengan stasiun kereta api yang mudah dijangkau dari daerah mana saja.

Lokasinya yang strategis ini, menawarkan kemudahan akses menuju kawasan central bisnis dan pemerintahan di daerah Sudirman, Thamrin, Kuningan, dan Saharjo. Sejak dimiliki oleh Perumda Pembangunan Sarana Jaya sampai dengan saat ini, naya cikini telah disewakan oleh badan restorasi gambut dan Mangrove (BRGM) Republik Indonesia sampai dengan tahun 2023.

Naya Cikini is one of the production equipment newly owned by Perumda Pembangunan Sarana Jaya in December 2019 in the form of an eight-story and one-basement office building. Naya Cikini stands on 1,450 m² of land with a building area of 4,278 m² on Jl. Cikini Raya, Central Jakarta, is close to the train station, which is easy to reach from any location.

The strategic location offers easy access to the central business and government areas in the Sudirman, Thamrin, Kuningan, and Saharjo regions. Since it was owned by Perumda Pembangunan Sarana Jaya, Naya Cikini has been rented by the Republic of Indonesia's Peat and Mangrove Restoration Agency (BRGM) until 2023.

4



NAYA PRAMUKA

(Properti | Property)

Jl. Rawamangun No. 59C, Kel. Rawa Sari,
Kec. Cempaka Putih, Jakarta Pusat.
Jl. Rawamangun No. 59C, Kel. Rawa Sari,
Kec. Cempaka Putih, Central Jakarta.

Dibangun diatas tanah seluas 713 m² naya pramuka merupakan gedung perkantoran yang disiapkan untuk kebutuhan kantor usaha kecil dan menengah. Dengan berlokasi di Jl. Rawamangun No. 59-C Jakarta Pusat yang merupakan salah satu alternatif bagi para penggiat usaha yang menginginkan kantor di daerah jakarta pusat. Dengan luas lantai yang tersedia seluas 2.443 m² yang terdiri dari 7 lantai dengan 1 *basement* dan fasilitas keamanan 24 jam, naya pramuka pegelolaannya dilaksanakan oleh PT Saranwisata Properindo yang merupakan anak perusahaan dari perumda pembangunan sarana jaya.

Built on 713 m² of land, Naya Pramuka is an office building prepared for the office needs of small and medium businesses. It is located on Jl. Rawamangun No. 59-C, Central Jakarta – one of the alternatives for businesses that need an office in the Central Jakarta area. With an available floor area of 2,443 m² consisting of seven floors with one basement and 24-hour security facilities, Naya Pramuka management is implemented by PT Saranwisata Properindo, which is a subsidiary of Perumda Pembangunan Sarana Jaya.

5



CBD PULO JAHE

(Properti | Property)

Pemukiman Pulo Jahe (Jatinegara Indah), Kel. Jatinegara, Kec. Cakung, Jakarta Timur
Pulo Jahe Residence (Jatinegara Indah), Kel. Jatinegara, Kec. Cakung, East Jakarta

CBD Pulo Jahe yang terletak di kelurahan Jatinegara, kecamatan Cakung, Jakarta Timur. Hunian ini perpaduan antara konsep rumah dan ruko selain dijadikan tempat usaha dapat digunakan sebagai tempat tinggal.

CBD Pulo Jahe merupakan fasilitas penunjang bagi hunian perumahan Jatinegara Indah yang berbentuk ruko dan toko, type rumah dibagi menjadi 2 type yaitu type D'arcade dan D'suite.

Pulo Jahe CBD is located in Kelurahan Jatinegara, Kecamatan Cakung, East Jakarta. The housing is a combination of a house and a shophouse concept. Apart from being used as a business premises, it can be used as a residence.

Pulo Jahe CBD is a supporting facility for Jatinegara Indah housing in shophouses and shops. The house type is divided into two types, i.e., D'Arcade and D'Suite.

6



HOTEL NOVOTEL CIKINI

NOVOTEL HOTEL CIKINI

(Properti | Property)

Jl. Cikini Raya No. 107, Menteng, Jakarta 10330
Jl. Cikini Raya No. 107, Menteng, Jakarta 10330

Bangunan Hotel Novotel Cikini merupakan hotel bintang 4 milik Sarana Jaya yang terletak di Jalan Cikini Raya Jakarta Pusat, terdiri atas 13 lantai dan 1 *basement* yang berdiri di atas lahan seluas 3.272 m² dengan luas bangunan 26.967 m².

Hotel Novotel Cikini dibangun dengan akses yang sangat mudah dijangkaudarimanasaja, berdekatan dengan stasiun kereta api Cikini, dan dilengkapi dengan kemudahan akses menuju kawasan pusat bisnis dan pemerintahan di daerah Sudirman, Thamrin, Kuningan, dan Saharjo. Sejak dimiliki oleh Perumda Pembangunan Sarana Jaya pada Oktober tahun 2019, Hotel Novotel Cikini telah memulai beroperasi (*launching*) sampai dengan 2023 di bawah pengelolaan PT Hotel Batavia Harmony.

The Novotel Hotel Cikini building is a four-star hotel owned by Sarana Jaya in Jalan Cikini Raya, Central Jakarta. It consists of 13 floors and one basement, on a 3,272 m² land with a building area of 26,967 m².

The Novotel Hotel Cikini was built with easy access from anywhere. It is near the Cikini railway station and has easy access to the central business and government areas in the Sudirman, Thamrin, Kuningan, and Saharjo regions. Since Perumda Pembangunan Sarana Jaya owns it in October 2019, Novotel Hotel Cikini has begun operations until 2023 under the management of PT Hotel Batavia Harmony.

7



HOTEL MERCURE CIKINI

MERCURE HOTEL CIKINI

(Properti | Property)

Jl. Cikini Raya No. 66-68
Kel. Cikini, Kec. Menteng, Jakarta Pusat
Jl. Cikini Raya No. 66-68
Kel. Cikini, Kec. Menteng, Central Jakarta

Hotel Mercure Jakarta Cikini di Jakarta Pusat dengan 8 lantai dan 197 kamar, dekat dari *Central Business District* (CBD) dan Monumen Nasional. Hotel ini menawarkan akses mudah ke pusat kota dan pusat perbelanjaan terdekat. Semua kamar dirancang secara unik dengan perpaduan tradisi dan modernitas. Mercure cikini dibangun di atas luas tanah 3.503 m².

Mercure Hotel Cikini in Central Jakarta has eight floors and 197 rooms close to the Central Business District (CBD) and the National Monument. The hotel offers easy access to the city center and the nearest shopping center. All rooms are uniquely designed with a blend of tradition and modernity. Mercure Hotel Cikini was built on a land area of 3,503 m².



8



HOTEL VERANDA

VERANDA HOTEL

(Properti | Property)

Jl. Kyai Maja No. 63, Kel. Kramat Pela, Kec. Kebayoran Baru, Jakarta Selatan
Jl. Kyai Maja No. 63, Kel. Kramat Pela, Kec. Kebayoran Baru, South Jakarta

Veranda Hotel merupakan hotel bintang 4 milik Perumda Pembangunan Sarana Jaya yang terletak di lokasi premium yang merupakan proyek kerjasama antara Perumda Pembangunan Sarana Jaya dan PT Graha Pakubuwono Kusuma dengan bentuk kerjasama *build transfer operation* (BTO). Dibangun di atas luas tanah 6.29m² dengan jumlah 9 lantai.

Veranda Hotel is a four-star hotel owned by Perumda Pembangunan Sarana Jaya, located in a premium location. It is a cooperation project between Perumda Pembangunan Sarana Jaya and PT Graha Pakubuwono Kusuma with the Build Transfer Operation (BTO) cooperation. It is built on a 6,029 m² land with nine floors.

9



KEMARI MENTENG

(Properti | Property)

Jl. Pegangsaan Barat No. 16, Jakarta 10310
Jl. Pegangsaan Barat No. 16, Jakarta 10310

Kemari Menteng yang berlokasi di Jl. Pegangsaan Barat No. 2, Cikini Jakarta Pusat dibangun setinggi 8 lantai dan 1 *basement*, dengan memiliki fasilitas parkir vertikal, galeri atm, dan lain-lain. Mengusung konsep pembangunan dengan gaya arsitektur Art Deco Kemari Menteng memiliki 77 unit kamar dengan. Saat ini disewakan kepada *milestone Pacific Hotel Group* (MPHG), Zia-Sanno Menteng Residence.

Kemari Menteng is located on Jl. Pegangsaan Barat No. 2, Cikini, Central Jakarta. It is built with eight floors and one basement, with vertical parking facilities, atm gallery, etc. Using a development concept with an Art Deco architectural style, Kemari Menteng has 77 rooms. It is currently rented to Milestone Pacific Hotel Group (MPHG), ZIA-SANNO Menteng Residence.

10



MALL ATRIUM SENEN

ATRIUM MALL SENEN

(Properti | Property)

Jl. Senen Raya No. 135, Jakarta Pusat 10410
Jl. Senen Raya No. 135, Central Jakarta 10410

Plaza Atrium merupakan salah satu pusat perbelanjaan yang berdiri pada tahun 1992 dan merupakan superblok pertama di Jakarta. Berdiri di kawasan komersial terpadu yang terdiri dari mall, ruko, hotel bintang empat, dan gedung perkantoran. Plaza Atrium sebagai salah satu mall pertama di Jakarta Pusat berusaha memberikan kepuasan kepada pengunjung sehingga menjadi destinasi favorit masyarakat sampai sekarang. Dibangun di atas luas tanah 51.550 m², dengan jumlah lantai 4.

Plaza Atrium is one of the shopping centers established in 1992 and was the first superblok in Jakarta. It is located in an integrated commercial area consisting of a mall, shophouses, a four-star hotel, and office buildings. Atrium Plaza is one of the first malls in Central Jakarta, and it strives to give satisfaction to visitors, so it has become the community's favorite destination until now. It is built on a land area of 51,550 m² with four floors.

11



MALL PONDOK KELAPA TOWN SQUARE (POKETS)

PONDOK KELAPA TOWN SQUARE MALL (POKETS)

(Properti | Property)

Jl. Raya Pondok Kelapa, Kel. Pondok Kelapa,
Kec. Duren Sawit, Jakarta Timur
Jl. Raya pondok kelapa, Kel. Pondok kelapa,
Kec. Duren sawit, East Jakarta

Mall Pondok Kelapa Town Square (Pokets) merupakan salah satu alat produksi Perumda Pembangunan Sarana Jaya yang berdiri diatas lahan seluas 4.266 m² terdiri dari 4 lantai.

Terletak di Jl. Raya Pondok Kelapa, Kelurahan Pondok Kelapa, Kecamatan Duren Sawit Jakarta Timur. Dengan kapasitas parkir 60 unit mobil dan 40 unit Motor Mall Pokets dapat menjadi pilihan terbaik untuk mengembangkan bisnis. Saat ini Mall Pokets Dikelola Oleh PT Saranawisesa Properindo yang merupakan anak perusahaan Perumda Pembangunan Sarana Jaya.

Pondok Kelapa Town Square Mall (POKETS) is one of the production assets of Perumda Pembangunan Sarana Jaya, which is on a land of 4,266 m² consisting of four floors.

It is located on Jl. Raya Pondok Kelapa, Kelurahan Pondok Kelapa, Kecamatan Duren Sawit, East Jakarta. With a parking capacity of 60 cars and 40 motorcycles, POKETS Mall can be the best choice for developing a business. POKETS Mall is managed by PT Saranawisesa Properindo, a Perumda Pembangunan Sarana Jaya subsidiary.

12



MALL CIBUBUR JUNCTION

CIBUBUR JUNCTION MALL

(Properti | Property)

JL. JAMBORE NO. 1
CIBUBUR, 13720
JL. JAMBORE NO. 1
CIBUBUR, 13720

Cibubur Junction merupakan salah satu alat produksi perumda pembangunan sarana jaya. Berlokasi dikawasan Cibubur Jakarta Timur yang berdekatan langsung dengan tol Jagorawi Cibubur Junction menjawab kebutuhan masyarakat akan adanya pusat perbelanjaan yang dapat memenuhi kebutuhan rumah tangga. Dibangun sejak tahun 2005 berdasarkan kerjasama perumda pembangunan Sarana Jaya dengan PT Cibubur utama dalam bentuk kerjasama *build operation transfer (bot)*. Cibubur Junction memiliki tenants yang terbaik diantaranya matahari departement store, bata, batik keris, jco donuts, hoka-hoka bento dan masih banyak lagi.

Cibubur Junction is one of Perumda Pembangunan Sarana Jaya's production assets. It is located in the Cibubur area, East Jakarta, directly adjacent to the Jagorawi Cibubur Junction toll, answering the community's need for a shopping center to meet household needs. It was built in 2005 based on the cooperation of Perumda Pembangunan Sarana Jaya with PT Cibubur Utama in the form of Build Operation Transfer (BOT) cooperation. Cibubur Junction has the best tenants, including Matahari Department Store, Bata, Batik Keris, J.Co Donuts, Hoka-Hoka Bento, etc.



INFRASTRUKTUR | HOUSING

1



JPM Tanah Abang

(Infrastruktur | Infrastructure)

Jl. Jatibaru Raya, Tanah Abang,
Jakarta 10250
Jl. Jatibaru Raya, Tanah Abang,
Jakarta 10250

Jembatan Penyeberangan Multiguna (JPM) Tanah Abang berlokasi di Jl. Jatibaru Tanah Abang, tepat di atas jalan Jatibaru. Infrastruktur jembatan ini dibangun sepanjang 386,4 meter dengan lebar 12,6 meter. Pembangunan JPM ini merupakan bentuk pelaksanaan mandat penugasan dari Pemprov DKI Jakarta untuk mengatasi kemacetan di sekitar Pasar Tanah Abang.

Tanah Abang Multipurpose Crossing Bridge (JPM) is on Jl. Jatibaru Tanah Abang, right on Jalan Jatibaru. The bridge infrastructure was built with a length of 386.4 meters with a width of 12.6 meters. The JPM construction implements the assignment mandate from the DKI Jakarta Provincial Government to overcome traffic jams around Tanah Abang Market.

2



Sarana Jaringan Utilitas Terpadu (SJUT)

Integrated Utility Network Facility (SJUT)

(Infrastruktur | Infrastructure)

Wilayah Jakarta Pusat dan Jakarta Barat
Central Jakarta and West Jakarta Areas



Fasilitas Pengolahan Sampah Antara (FPSA)

Intermediate Garbage Treatment Facility (FPSA)

(Infrastruktur | Infrastructure)

Wilayah Jakarta Timur dan Jakarta Selatan
East Jakarta and South Jakarta Areas

PROYEK YANG SEDANG BERJALAN DAN AKAN DIBANGUN

ONGOING AND FUTURE CONSTRUCTION PROJECTS

► Taman ASEAN | ASEAN Park



Sebagai Tuan Rumah KTT ASEAN 2023 dengan Tema *Asean Matters: Epicentrum of Growth*, Sarana Jaya mengambil bagian penting dari kejadian bersejarah ini. Mendapatkan mandat untuk membangun Taman Asean yang akan menjadi Monumen bersejarah tentang Keketuaan ASEAN di Indonesia khususnya DKI Jakarta.

Instalasi yang megah dan memiliki nilai-nilai tradisi Negara Asean yang kaya akan budaya, diresmikan oleh seluruh Walikota dan Gubernur dari seluruh Negara Asean.

Pembangunan Taman ASEAN ini juga menambah jumlah ruang terbuka hijau bagi masyarakat kota Jakarta. Instalasi yang ada di dalam Taman ASEAN dapat dimanfaatkan sebagai edukasi pola (*pattern*) yang beragam dari sepuluh negara anggota ASEAN. Hal ini juga merefleksikan keunikan dan karakteristik kawasan Asia Tenggara, terutama guna memperkuat esensi semangat '*Unity in Diversity*' di ASEAN.

As host of the 2023 ASEAN Summit with the theme *ASEAN Matters: Epicentrum of Growth*, Sarana Jaya took an important part in this historic event. It was mandated to build an ASEAN Park, which will become a historical monument to Indonesia's ASEAN Chairmanship, especially DKI Jakarta.

The magnificent installation, which has the traditional values of rich-culture ASEAN countries, was inaugurated by all Mayors and Governors from all ASEAN Countries.

The construction of ASEAN Park also increases the amount of green open space for Jakarta people. The installations in the ASEAN Park can be used to educate the various patterns of the ten ASEAN member countries. This also reflects the uniqueness and characteristics of the Southeast Asian region, especially in strengthening the essence of the spirit of '*Unity in Diversity*' in ASEAN.



► Nuansa Pondok Kelapa | Nuansa Pondok Kelapa



Nuansa Pondok Kelapa dikembangkan untuk memenuhi kebutuhan warga Jakarta. Akan dibangun Empat tower di Nuansa Pondok Kelapa. Hal ini dilakukan dengan mendukung program Pemerintah DKI Jakarta dalam penyediaan Hunian Terjangkau untuk mengatasi di DKI Jakarta, Hunian di Nuansa Pondok Kelapa akan dijual dengan skema pembiayaan FLPP melalui Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) yang dibentuk oleh Pemerintah DKI Jakarta dan juga dengan skema komersil guna meringankan pembayaran angsuran atau cicilan konsumen yang membeli/dalam hal ini adalah warga DKI Jakarta yang belum memiliki Hunian.

Saat ini telah berdiri Dua Menara di Nuansa Pondok Kelapa, Menara Samawa yang merupakan Hunian Terjangkau Milik yang dapat dimiliki dengan skema pembayaran tanpa *down payment* dan Menara Swasana yang merupakan Apartemen Terjangkau Komersil di Jakarta Timur dengan fasilitas lengkap dan terintegrasi.

Nuansa Pondok Kelapa was developed to meet the needs of Jakarta residents. Four towers will be built in Nuansa Pondok Kelapa. This is done by supporting the DKI Jakarta Government program in providing Affordable Housing. Therefore, Housing in Nuansa Pondok Kelapa will be sold with the FLPP financing scheme through the Regional Public Service Agency (BLUD) of the DKI Jakarta Government and also with a commercial scheme for ease of installment payments for consumers who buy – in this case, residents of DKI Jakarta who do not own a residence.

Currently, two towers are standing in Nuansa Pondok Kelapa – Menara Samawa, an Affordable Owned Residence, which can be owned with a payment scheme without a down payment, and Menara Swasana, which is an Affordable Commercial Apartment in East Jakarta with complete and integrated facilities.

► **Nuansa Cilangkap** | Nuansa Cilangkap



Nuansa Cilangkap berdiri untuk memberikan Hunian Terjangkau yang asri dan terinspirasi dari kehidupan yang harmonis dan selaras, hadir dengan mewujudkan kemudahan hunian yang terintegrasi dan penataan lingkungan yang mendukung. Dibangun dan dikembangkan oleh Pengembang yang terpercaya Perumda Pembangunan Sarana Jaya.

Di Nuansa Cilangkap sendiri, akan dibangun 4 Tower, yang saat ini telah diresmikan pembangunan Menara Kanaya sebanyak 868 Unit dan pada tahun 2023 dilakukan *Groundbreaking* atau Peletakan Batu Pertama untuk Pembangunan Menara Kedua yaitu Menara Ayasa.

Nuansa Cilangkap was founded to provide beautiful, affordable housing inspired by a harmonious life by creating integrated residential conveniences and a supportive environmental arrangement. It is built and developed by trusted developer Perumda Pembangunan Sarana Jaya.

In Nuansa Cilangkap, four towers will be built, and the construction of Menara Kanaya Tower has been inaugurated with 868 units. In 2023, groundbreaking will be done for the construction of the second tower, namely Menara Ayasa.



PROYEK PENUGASAN

ASSIGNMENT PROJECTS

PENYELENGGARAAN SARANA JARINGAN UTILITAS TERPADU (SJUT) DI DKI JAKARTA

Pelaksanaan Pekerjaan Sarana Jaringan Utilitas Terpadu (SJUT) bertujuan untuk merapikan sekaligus menata ulang infrastruktur Jaringan Utilitas di Provinsi DKI Jakarta, sesuai dengan Peraturan Daerah DKI Jakarta No. 8 Tahun 1999 tentang Jaringan Utilitas; Instruksi Gubernur DKI Jakarta No. 126 tahun 2018 tentang Penataan dan Penertiban Jaringan Utilitas; dan Peraturan Gubernur DKI Jakarta No. 106 tahun 2019 tentang Pedoman Penyelenggaraan Infrastruktur Jaringan Utilitas. Adapun pihak Pemerintah Provinsi DKI Jakarta yang terkait dalam proyek SJUT ini salah satunya adalah Dinas Bina Marga DKI Jakarta.

Perusahaan selaku BUMD DKI Jakarta menerima penugasan untuk pelaksanaan Pekerjaan SJUT berdasarkan Peraturan Gubernur DKI Jakarta No. 70 tahun 2020 tentang Penugasan kepada Perumda Pembangunan Sarana Jaya dalam Penyelenggaraan Sarana Jaringan Utilitas Terpadu; Keputusan Gubernur DKI Jakarta No. 1016 tahun 2020 tentang Penunjukan Lokasi Penyelenggaraan Sarana Jaringan Utilitas Terpadu oleh Perusahaan Terbatas Jakarta Propertindo (Perusahaan Daerah) dan Perusahaan Umum Daerah Pembangunan Sarana Jaya; serta Keputusan Kepala Dinas Bina Marga DKI Jakarta No. 101 tahun 2020. Selain itu terdapat juga Keputusan Gubernur DKI Jakarta No. 645 tahun 2021 tentang perubahan atas Keputusan Gubernur DKI Jakarta No. 1016 tahun 2020 tentang Penunjukan Lokasi Penyelenggaraan Sarana Jaringan Utilitas Terpadu oleh Perusahaan Terbatas Jakarta Propertindo (Perusahaan Daerah) dan Perusahaan Umum Daerah Pembangunan Sarana Jaya. Adapun lokasi penyelenggaraan Pekerjaan SJUT yang ditugaskan kepada Sarana Jaya sesuai dengan Keputusan Gubernur No. 645 tahun 2021 meliputi wilayah Jakarta Pusat dan Jakarta Barat.

INTEGRATED UTILITY NETWORK FACILITY (SJUT) IMPLEMENTATION IN DKI JAKARTA

The implementation of the Integrated Utility Network Facility (SJUT) work aims to tidy up and reorganize the Utility Network infrastructure in DKI Jakarta Province, per DKI Jakarta Regional Regulation No. 8 of 1999 on Utility Networks; DKI Jakarta Governor Instruction No. 126 of 2018 on Structuring and Controlling Utility Networks; and DKI Jakarta Governor Regulation No. 106 of 2019 on Guidelines for Implementing Utility Network Infrastructure. One of the DKI Jakarta Provincial Government parties involved in the SJUT project is the DKI Jakarta Bina Marga Service.

As a DKI Jakarta BUMD, the Company received an assignment to carry out SJUT Work based on DKI Jakarta Governor Regulation No. 70 of 2020 on Assignment to Perumda Pembangunan Sarana Jaya in the Implementation of Integrated Utility Network Facilities; DKI Jakarta Governor Decree No. 1016 of 2020 on Designation of Locations for the Implementation of Integrated Utility Network Facilities by the Limited Liability Company Jakarta Propertindo (Regional Company) and the Regional Public Company Pembangunan Sarana Jaya; and Decree of the DKI Jakarta Highways Service Head No. 101 of 2020. Moreover, there is also the DKI Jakarta Governor Decree No. 645 of 2021 on changes to the DKI Jakarta Governor Decree No. 1016 of 2020 on Designation of Locations for the Implementation of Integrated Utility Network Facilities by the Limited Liability Company Jakarta Propertindo (Regional Company) and the Regional Public Company Pembangunan Sarana Jaya. The location for the SJUT work implementation is assigned to Sarana Jaya following Governor Decree No. 645 of 2021, which covers the Central Jakarta and West Jakarta areas.

► **Jakarta Pusat | Central Jakarta**

No.	Lokasi Penugasan Assignment Locations	No.	Lokasi Penugasan Assignment Locations	No.	Lokasi Penugasan Assignment Locations
1.	Jl. Gunung Sahari	9.	Jl. Pangeran Jayakarta	17.	Jl. Pegangsaan Barat
2.	Jl. K.H. Mas Mansyur	10.	Jl. Usman Harun	18.	Jl. K.H. Wahid Hasyim
3.	Jl. Penataran	11.	Jl. Arief Rahman Hakim	19.	Jl. Abdul Muis
4.	Jl. Proklamasi	12.	Jl. M.I. Ridwan Rais	20.	Tanah Abang I
5.	Jl. Kebon Kacang Raya	13.	Jl. Menteng Raya	21.	Jl. Pecenongan
6.	Jl. Jendral Suprato	14.	Jl. RP Soeroso	22.	Jl. AM. Sangaji
7.	Jl. Bungur Besar	15.	Jl. Cik Ditiro	23.	Jl. Hasyim Ashari
8.	Jl. Sta. Pasar Senen	16.	Jl. P. Diponegoro	24.	Jl. Raden Saleh, Jakarta Pusat

► **Jakarta Barat | West Jakarta**

No.	Lokasi Penugasan Assignment Locations	No.	Lokasi Penugasan Assignment Locations	No.	Lokasi Penugasan Assignment Locations
1.	Jl. Kyai Tapa	5.	Jl. Mangga Besar	9.	Jl. Prof. Dr. Latumenten (Selatan)
2.	Jl. Daan Mogot	6.	Jl. Zainul Arifin	10.	Kawasan Puri (Jl. Puri Wangi)
3.	Jl. S. Parman	7.	Jl. Tubagus Angke	11.	Jl. Dr. Makaliwe Raya
4.	Jl. Tomang Raya	8.	Jl. Prof. Dr. Latumenten (Utara)	12.	Jl. Satria





PENYELENGGARAAN FASILITAS PENGOLAHAN SAMPAH ANTARA DI DALAM KOTA

IMPLEMENTATION OF INTERMEDIATE GARBAGE TREATMENT FACILITY IN THE CITY

Fasilitas Pengolahan Sampah Antara (FPSA) adalah infrastruktur berupa fasilitas pengolahan sampah yang meliputi pengelolaan sampah di tingkat menengah dan pemrosesan akhir dengan menggunakan teknologi hijau terbarukan dan ramah lingkungan. Adapun hasil dari aktivitas ini dapat menghasilkan energi atau bentuk lain yang mempunyai kemanfaatan umum atau nilai tambah.

Dalam hal ini Perusahaan selaku BUMD DKI Jakarta menerima penugasan dari Pemprov DKI Jakarta untuk menyelenggarakan FPSA sebagaimana diamanatkan dalam Peraturan Gubernur Provinsi DKI Jakarta No. 71 Tahun 2021. Hal ini merupakan bentuk dukungan Pemprov DKI Jakarta terhadap Proyek Strategis Nasional khususnya Proyek Infrastruktur Asal Sampah sebagaimana tertuang dalam Peraturan Presiden No. 3 Tahun 2016 tentang Percepatan Pelaksanaan Proyek Strategis Nasional sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Presiden No. 56 Tahun 2018.

Selanjutnya Pemprov DKI Jakarta menerbitkan Keputusan Kepala Dinas Lingkungan Hidup Provinsi DKI Jakarta No. 732 Tahun 2020 yang menetapkan Wilayah Layanan Sampah FPSA yang menjadi penugasan Sarana Jaya, yaitu di Wilayah Layanan Timur dan Wilayah Layanan Selatan.

Intermediate Garbage Treatment Facility (FPSA) is an infrastructure in the form of waste processing facilities that include waste management at the intermediate and final processing levels using renewable and environmentally friendly green technology. The results can produce energy or other general benefits or added value.

In this case, as a DKI Jakarta BUMD, the Company received an assignment from the DKI Jakarta Provincial Government to organize FPSA as mandated in DKI Jakarta Provincial Governor Regulation No. 71 of 2021. This is a form of DKI Jakarta Provincial Government's support for National Strategic Projects, especially Waste Origin Infrastructure Projects, as stated in Presidential Regulation No. 3 of 2016 on the Acceleration of National Strategic Projects Implementation, which has been amended several times, most recently by Presidential Regulation No. 56 of 2018.

Furthermore, the DKI Jakarta Provincial Government issued the DKI Jakarta Provincial Environmental Service Head Decree No. 732 of 2020, determining the FPSA Waste Service Areas assigned to Sarana Jaya, i.e., the Eastern and Southern Service Areas.

PROYEK-PROYEK BARU

NEW PROJECTS

Selain menaruh fokus pada pelaksanaan proyek-proyek yang sedang berjalan, Perusahaan juga sedang mempersiapkan beberapa proyek baru, antara lain:

Apart from focusing on implementing ongoing projects, the Company is also preparing several new projects, including:



WARNA SITU GINTUNG

(Hunian | Housing)

Jl. Ir. H. Juanda, Ciputat, Tangerang Selatan, 15411
Jl. Ir. H. Juanda, Ciputat, South Tangerang, 15411

PROYEK-PROYEK YANG AKAN DATANG

FUTURE PROJECTS

Saat ini, Perusahaan tengah mempersiapkan sejumlah proyek yang akan diluncurkan di waktu mendatang, antara lain:

Currently, the Company is preparing several projects that will be launched in the future, including:

Proyek Tebet Tebet Project

Jl. Tebet Barat IV No. 20, Tebet Barat, Jakarta Selatan
Jl. Tebet Barat IV No. 20, Tebet Barat, South Jakarta



Revitalisasi CBD Pulo Jahe Pulo Jahe CBD Revitalization

Jl. KRT Radjiman Widiodyaningrat, Pulo Jahe, Jakarta Timur
Jl. KRT Radjiman Widiodyaningrat, Pulo Jahe, East Jakarta



Pengembangan Foodhub di SPTA Jakarta Foodhub Development at SPTA Jakarta

Jl. Jatibaru Raya, Kampung Bali, Tanah Abang, Jakarta Pusat
Jl. Jatibaru Raya, Kampung Bali, Tanah Abang, Central Jakarta





TINJAUAN KEUANGAN

FINANCIAL REVIEW

Diskusi dan analisa keuangan berikut ini disusun berdasarkan Laporan Keuangan Perusahaan yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023 dan 31 Desember 2022. Laporan Keuangan telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik (KAP) Heliantono & Rekan - Parker Russel International dan mendapat opini wajar, dalam semua hal yang material, posisi keuangan Perusahaan pada tanggal 31 Desember 2023, serta kinerja keuangan dan arus kas untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia. Laporan Keuangan Tahunan Perusahaan telah diterbitkan pada tanggal 25 Maret 2024.

The following financial discussion and analysis have been prepared based on the Company's Financial Statements as of December 31, 2023, and December 31, 2022. The Financial Statements have been audited by the Public Accounting Firm (KAP) Heliantono & Partners - Parker Russel International with a fair opinion, in all material respects, on the financial position of the Company as of December 31, 2023, as well as its financial performance and cash flows for the year ended on such date, in accordance with Indonesian Financial Accounting Standards. The Company's Annual Financial Statements were issued on March 25, 2024.

LAPORAN POSISI KEUANGAN

KONSOLIDASIAN

CONSOLIDATED STATEMENTS OF FINANCIAL POSITION

(Disajikan dalam ribuan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)
(in thousands of Rupiah, unless stated otherwise)

Uraian Description	2023	2022	Pertumbuhan/(Penurunan) % Increase/(Decrease) %
Aset Lancar Current Assets	974.774.951	968.086.515	1
Aset Tidak Lancar Non-Current Assets	5.310.258.402	5.427.310.029	(2)
Jumlah Aset Total Assets	6.285.033.353	6.395.396.544	(2)
Liabilitas Jangka Pendek Current Liabilities	270.202.189	607.139.670	(55)
Liabilitas Jangka Panjang Non-Current Liabilities	459.213.387	154.109.414	198
Jumlah Liabilitas Total Liabilities	729.415.576	761.249.084	(4)
Jumlah Ekuitas Total Equity	5.555.617.776	5.634.147.460	(1)
Jumlah Liabilitas & Ekuitas Total Liability & Equity	6.285.033.353	6.395.396.544	(2)

ASET

Jumlah aset mengalami penurunan di tahun 2023 sebesar 2% dari Rp6,4 triliun di tahun 2022 menjadi Rp6,3 triliun. Penurunan ini berasal dari penurunan Aset Tidak Lancar.

ASSETS

Total assets decreased by 2% in 2023 from Rp6.4 trillion in 2022 to Rp6.3 trillion. The decrease came from a decrease in Non-Current Assets.

Aset Lancar

Jumlah aset lancar mengalami peningkatan sebesar 1% dari Rp968,1 miliar ditahun 2022 menjadi Rp974,8 miliar ditahun 2023. Peningkatan ini berasal dari meningkatnya aset real estat.

Kas dan Setara Kas

Kas dan Setara Kas Perusahaan terdiri atas kas, bank dan deposito berjangka dengan total keseluruhan sebesar Rp226,7 miliar ditahun 2023 mengalami penurunan sebesar 48% dibandingkan dengan saldo tahun 2022 sebesar Rp439,6 miliar. Penurunan ini disebabkan oleh menurunnya saldo di bank menjadi Rp226,6 miliar di tahun 2023 dari Rp439,6 miliar di tahun 2022, serta adanya pencairan seluruh deposito di tahun 2023.

Aset Tidak Lancar

Jumlah Aset Tidak Lancar menurun sebesar 2% dari Rp5,4 triliun di tahun 2022 menjadi Rp5,3 triliun di tahun 2023. Penurunan ini terutama berasal dari properti investasi.

Investasi Jangka Panjang pada Entitas Asosiasi

Investasi jangka Panjang lainnya terdiri dari penyertaan modal pada PT Yatian Aka Jakarta Hijau dan PT Jakarta Hijau Lestari yang tidak mengalami perubahan nilai dibandingkan dengan tahun sebelumnya karena kedua Perusahaan tersebut masih belum beroperasi secara komersial.

Aset Kerja Sama Operasi

Aset kerja sama operasi pada tanggal 31 Desember 2023 adalah sebesar Rp271,7 miliar, meningkat 9% dibandingkan dengan tahun 2022 sebesar Rp247,1 miliar. Aset Kerja Sama Operasi terdiri dari tanah dan bangunan di Jl. Gatot Subroto (Apartemen Palma Citra), tanah di Jl. Kyai Maja, Kebayoran Baru (Hotel Veranda), tanah di Jl. Penjernihan (Mal Ikan Higienis), tanah dan bangunan di Jl. Jambore (Cibubur Junction), serta tanah dan bangunan di Jl. Cikini Raya 66-68 (Hotel Mercure Cikini).

Aset Real Estate

Aset *real estate* pada tanggal 31 Desember 2023 adalah sebesar Rp3,3 triliun, mengalami kenaikan 2% dibanding tahun 2022 sebesar Rp3,2 triliun. Kenaikan ini terutama berasal dari KSO Nuansa Pondok Kelapa dan Nuansa Cilangkap karena adanya peningkatan persediaan unit.

Current Assets

Total current assets increased by 1% from Rp968.1 billion in 2022 to Rp974.8 billion in 2023. The increase came from increasing real estate assets.

Cash And Cash Equivalents

The Company's cash and cash equivalents consist of cash, banks, and time deposits with a total of Rp226.7 billion in 2023, a 48% decrease compared to the balance in 2022 of Rp439.6 billion. The decrease was caused by a decrease in bank balances to Rp226.6 billion in 2023 from Rp439.6 billion in 2022 and the disbursement of all deposits in 2023.

Non-Current Assets

Total Non-Current Assets decreased by 2% from Rp5.4 trillion in 2022 to Rp5.3 trillion in 2023. The decrease mainly came from investment properties.

Long Term Investment in Associated Entities

Other long-term investments consist of capital participation in PT Yatian Aka Jakarta Hijau and PT Jakarta Hijau Lestari, which did not experience a change in value compared to the previous year because these two companies are still not operating commercially.

Joint Operation Assets

Joint operating assets on December 31, 2023, were Rp271.7 billion, a 9% increase compared to 2022 of Rp247.1 billion. Joint Operation assets consist of land and buildings on Jl. Gatot Subroto (Palma Citra Apartment), land on Jl. Kyai Maja, Kebayoran Baru (Veranda Hotel), land on Jl. Purification (Hygienic Fish Mall), land and buildings on Jl. Jambore (Cibubur Junction), as well as land and buildings on Jl. Cikini Raya 66-68 (Mercure Hotel Cikini).

Real Estate Assets

A real estate assets on December 31, 2023, is Rp3.3 trillion, a 2% increase compared to 2022 of Rp3.2 trillion. The increase mainly came from KSO Nuansa Pondok Kelapa and Nuansa Cilangkap due to increased unit inventory.



Properti Investasi

Properti investasi sebesar Rp642,2 miliar pada tanggal 31 Desember 2023, menurun sebesar 24% dibanding tahun 2022 sebesar Rp840,5 miliar. Penurunan ini terjadi karena adanya reklasifikasi Wang Residence ke aset real restat – lancar.

Aset Tetap

Aset Tetap terdiri dari bangunan, inventaris, kendaraan, mesin dan peralatan, dan peralatan Resto Pasta Kangen.

Aset Tetap pada tanggal 31 Desember 2023 adalah sebesar Rp11,0 miliar naik 4% dari posisi tahun sebelumnya yang sebesar Rp10,6 miliar.

Aset Lain-lain

Aset lain-lain pada tanggal 31 Desember 2023 mengalami peningkatan signifikan sebesar 210%, yaitu dari sebesar Rp76,1 miliar pada tahun 2022 menjadi Rp235,8 miliar. Peningkatan ini terutama berasal dari reklasifikasi Tanah Pondok Rangun/Munjul yang sebelumnya dicatat sebagai uang muka pembelian aset.

LIABILITAS

Jumlah liabilitas Perusahaan di akhir tahun 2023 sebesar Rp724,4 miliar, menurun sebesar 4% dibandingkan dengan tahun 2022 sebesar Rp761,25 miliar. Penurunan terjadi pada liabilitas jangka pendek.

Liabilitas Jangka Pendek

Liabilitas jangka pendek pada akhir tahun 2023 tercatat sebesar Rp270,2 miliar, turun 55% dibandingkan tahun 2022 sebesar Rp607,1 miliar. Penurunan ini disebabkan adanya reklasifikasi pinjaman bank yang akan jatuh tempo lebih dari satu tahun.

Liabilitas Jangka Panjang

Perusahaan membukukan jumlah liabilitas jangka panjang di akhir tahun 2023 sebesar Rp459,2 miliar, meningkat 198% dibandingkan dengan tahun 2022 sebesar Rp154,1 miliar. Kenaikan ini karena adanya restrukturisasi pinjaman bank kredit modal kerja jangka pendek menjadi jangka panjang.

EKUITAS

Jumlah ekuitas Perusahaan menurun sebesar 1,4% atau pada posisi 31 Desember 2023 dan 31 Desember 2022 adalah sebesar Rp5,6 miliar.

Investment Property

Investment property amounted to Rp642.2 billion on December 31, 2023, a 24% decrease compared to 2022 of Rp840.5 billion. The decrease occurred due to the reclassification of Wang Residence to real estate assets – current.

Fixed Assets

Fixed Assets consist of buildings, inventory, vehicles, machinery and equipment, and Resto Pasta Kangen equipment.

Fixed Assets on December 31, 2023, were Rp11.0 billion, a 4% increase from the previous year's position of Rp10.6 billion.

Other Assets

Other assets on December 31, 2023, experienced a significant 210% increase, namely from Rp76.1 billion in 2022 to Rp235.8 billion. The increase mainly came from the reclassification of Pondok Rangun/Munjul Land, previously recorded as a down payment for asset purchases.

LIABILITIES

The Company's total liabilities at the end of 2023 amounted to Rp724.4 billion, a 4% decrease compared to 2022 of Rp761.25 billion. The decrease occurred in short-term liabilities.

Short-Term Liabilities

At the end of 2023, short-term liabilities were recorded at Rp270.2 billion, a 55% decrease compared to 2022 of Rp607.1 billion. The decrease was due to the reclassification of bank loans due in more than one year.

Long-Term Liabilities

The Company posted total long-term liabilities at the end of 2023 of Rp459.2 billion, a 198% increase compared to 2022 of Rp154.1 billion. The increase was due to the restructuring of short-term working capital credit bank loans into long-term ones.

EQUITY

The Company's total equity decreased by 1.4% on December 31, 2023. The equity on December 31, 2022, was Rp5.6 trillion.

LAPORAN LABA (RUGI) DAN PENGHASILAN KOMPREHENSIF LAIN KONSOLIDASIAN

CONSOLIDATED STATEMENT OF PROFIT OR LOSS AND OTHER COMPREHENSIVE INCOME

(Disajikan dalam ribuan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)
(in thousands of Rupiah, unless stated otherwise)

Uraian Description	2023	2022	Pertumbuhan/(Penurunan) % Increase/(Decrease) %
Pendapatan Revenues	211.954.260	158.435.138	33,8
Beban Pokok Pendapatan Cost of Revenues	(184.819.413)	(151.824.162)	21,7
Laba Kotor Gross Profit	27.134.848	6.610.975	310,5
Beban Pemasaran Marketing Expense	(2.988.587)	(4.059.615)	(6,4)
Beban Administrasi dan Umum Administrative and General Affairs Expense	(108.369.971)	(112.226.271)	(3,4)
Rugi Usaha Operating Loss	(84.223.711)	(109.674.910)	(23,2)
Jumlah (Beban)/Pendapatan Lain-Lain Other (Expense)/Income	(12.137.105)	169.978.814	(107,1)
(Rugi)/Laba Sebelum Pajak Penghasilan (Loss)/Profit Before Income Tax	(96.360.815)	60.303.904	(259,8)
(Beban)/Manfaat Pajak Penghasilan Income Tax (Expense)/Benefit			
Pajak Kini Current Tax	(156.375)	(1.171.475)	(86,7)
Pajak Final Final Tax	(1.858.231)	(2.755.400)	(32,6)
Pajak Tangguhan Deferred Tax	(487.819)	22.584.210	(102,2)
Jumlah (Beban)/Manfaat Pajak Penghasilan Total Income Tax (Expense)/Benefit	(2.502.425)	18.657.336	(113,4)
(Rugi)/Laba Tahun Berjalan (Loss)/Profit for the Year	(98.863.240)	78.961.239	(225,2)
Jumlah (Rugi)/Laba Komprehensif Tahun Berjalan Comprehensive (Loss)/Profit for the Year	(95.902.019)	78.656.581	(221,9)

Pendapatan Usaha

Selama tahun 2023, Perusahaan berhasil membukukan pendapatan sebesar Rp211,9 miliar atau meningkat sebesar 33,8% dibandingkan dengan tahun 2022. Peningkatan terbesar berasal dari jasa *outsourcing*, pendapatan parkir dan pengelolaan Gedung.

Beban Pokok Pendapatan

Beban pokok pendapatan Perusahaan tahun 2023 terealisasi sebesar Rp184,8 miliar atau 121,9% dari beban pokok pendapatan tahun 2022. Peningkatan beban pokok pendapatan ini sejalan dengan meningkatnya pendapatan Perusahaan. Beban pokok pendapatan di tahun 2023 diantaranya terdiri dari nilai tanah aset Perusahaan yang

Operating Revenues

In 2023, the Company managed to record revenue of Rp211.9 billion or a 33.8% increase compared to 2022. The most significant increase came from outsourcing services, parking revenue, and building management.

Cost of Revenues

The Company's cost of revenues in 2023 was realized at Rp184.8 billion or 121.9% of the cost of revenues in 2022. The increase in cost of revenues was in line with the increase in the Company's revenues. Cost of revenues in 2023 include the value of the Company's land assets in collaboration with third parties and operational costs for



dikerjasamakan dengan pihak ketiga dan biaya operasional pengelolaan aset. Realisasi beban pokok pendapatan Perusahaan tahun 2023 diantaranya terdiri dari beban pokok pengembangan lingkungan, pengelolaan aset dan operasional lainnya dengan jumlah keseluruhan sebesar Rp184,8 miliar atau 87% dari anggaran tahun 2023.

Laba Kotor

Perusahaan mencatatkan laba kotor sebesar Rp27,1 miliar pada tahun 2023 atau meningkat sebesar 310,5% dari laba kotor tahun 2022 sebesar Rp6,6 miliar.

Rugi Usaha

Pada tahun 2023, Perusahaan membukukan penurunan rugi usaha sebesar 23,2% dengan realisasi rugi usaha pada tahun 2022 sebesar Rp109,7 miliar menjadi Rp84,2 miliar di tahun 2023. Penurunan rugi usaha seiring dengan penurunan beban administrasi dan umum di Tahun 2023.

(Rugi)/Laba Sebelum Pajak Penghasilan

Menurunnya (Rugi)/Laba sebelum pajak penghasilan pada tahun 2023 menyebabkan Perusahaan mencatatkan rugi sebelum pajak penghasilan sebesar Rp96,4 miliar, sedangkan pada tahun 2022 Perusahaan membukukan laba sebelum pajak penghasilan sebesar Rp60,3 miliar.

(Beban)/Manfaat Pajak Penghasilan

Di tahun 2023, Perusahaan membukukan beban pajak penghasilan sebesar Rp2,5 miliar, sedangkan di tahun 2022 Perusahaan membukukan manfaat pajak penghasilan sebesar Rp18,7miliar.

(Rugi)/Laba Tahun Berjalan

Di tahun 2023, Perusahaan membukukan Rugi Tahun Berjalan sebesar Rp98,9 miliar sedangkan di tahun 2022 Perusahaan membukukan Laba Tahun Berjalan sebesar Rp78,9 miliar.

(Rugi)/Laba Komprehensif Tahun Berjalan

Pada tahun 2023, Perusahaan membukukan rugi komprehensif tahun berjalan sebesar Rp95,9 miliar, mengalami penurunan signifikan dibandingkan dengan perolehan laba komprehensif tahun 2022 sebesar Rp78,7 miliar.

Penghasilan/(Beban) Komprehensif Lain Tahun Berjalan

Perusahaan mencatatkan penghasilan komprehensif lain tahun berjalan sebesar Rp3 miliar, mengalami peningkatan dibandingkan dengan tahun 2022 sebesar minus Rp304,7 juta.

asset management. The realization of the Company's cost of revenues in 2023 includes the cost of environmental development, asset management, and other operations with a total amount of Rp184.8 billion or 87% of the 2023 budget.

Gross Profit

The Company recorded a gross profit of Rp27.1 billion in 2023, or a 310.5% increase from gross profit in 2022 of Rp6.6 billion.

Operating Loss

In 2023, the Company recorded a 23.2% decrease in operating loss, with realized operating loss in 2022 amounting to Rp109.7 billion to Rp84.2 billion in 2023. The decrease in operating loss was in line with the decrease in administrative and general expenses in 2023.

(Loss)/Profit Before Income Tax

The decrease of (Loss)/Profit before income tax in 2023 caused the Company to record a loss before income tax of Rp96.4 billion, while in 2022, the Company recorded a profit before income tax of Rp60.3 billion.

Income Tax (Expense)/Benefit

In 2023, the Company recorded an income tax expense of Rp2.5 billion; in 2022, the Company recorded an income tax benefit of Rp18.7 billion.

(Loss)/Profit for the Year

In 2023, the Company recorded a Loss for the Year of Rp98.9 billion, while in 2022, the Company recorded a Profit for the Year of Rp78.9 billion.

Comprehensive (Loss)/Profit for the Year

In 2023, the Company recorded a comprehensive loss for the year of Rp95.9 billion, a significant decrease compared to the comprehensive profit in 2022 of Rp78.7 billion.

Other Comprehensive Income/(Expense) for the Year

The Company recorded other comprehensive income for the current year of Rp3 billion, an increase compared to 2022 of minus Rp304.7 million.

LAPORAN ARUS KAS KONSOLIDASIAN

CONSOLIDATED STATEMENT OF CASH FLOWS

ARUS KAS

Perusahaan memiliki saldo arus kas dan setara kas di awal tahun 2023 sebesar Rp439,6 miliar. Kas tersebut selanjutnya digunakan untuk investasi bank tanah (*land bank*) dalam rangka pemenuhan program kerja daerah untuk memenuhi target hunian di Provinsi DKI Jakarta. Setelah melakukan berbagai transaksi keuangan sepanjang tahun 2023, maka posisi kas dan setara kas Perusahaan di akhir tahun 2023 menjadi sebesar Rp226,7 miliar.

CASH FLOWS

The Company had a cash flow and cash equivalent balance at the beginning of 2023 of Rp439.6 billion. This cash is then used for land bank investment to fulfill regional work programs and meet housing targets in DKI Jakarta Province. After conducting various financial transactions throughout 2023, the Company's cash and cash equivalents position at the end of 2023 is Rp226.7 billion.

Uraian Description	2023	2022	Pertumbuhan/(Penurunan) % Increase/(Decrease) %
Kas Neto Diperoleh Dari/(Digunakan Untuk) Aktivitas Operasi Net Cash from/(for) Operating Activities	48.652.765	(255.823.315)	119,0
Kas Neto Digunakan Untuk Aktivitas Investasi Net Cash for Investing Activities	(147.840.843)	(309.817.607)	(52,3)
Kas Neto (Digunakan Untuk)/Diperoleh dari Aktivitas Pendanaan Net Cash (for)/from Financing Activities	(21.771.351)	472.300.627	(104,6)
Kas dan Setara Kas pada Awal Tahun Cash and Cash Equivalents at the Beginning of the Year	439.613.667	525.219.161	(16,3)
Kas dan Setara Kas pada Akhir Tahun Cash and Cash Equivalents at the End of the Year	226.654.236	439.613.667	(48,4)

Kas Neto Diperoleh Dari/(Digunakan Untuk) Aktivitas Operasi

Perusahaan mencatatkan perolehan kas bersih dari aktivitas operasi sebesar Rp48,7 miliar pada tahun 2023. Sedangkan pada tahun sebelumnya, Perusahaan mencatatkan perolehan dari aktivitas operasi sebesar minus Rp255,8 miliar. Kenaikan Kas Bersih dari aktivitas operasi diantaranya berasal dari penerimaan jasa dan lain-lain serta menurunnya pembauaran untuk biaya operasional.

Net Cash from/(for) Operating Activities

The Company recorded a net cash gain from operating activities of Rp48.7 billion in 2023. Meanwhile, in the previous year, the Company recorded a net cash gain from operating activities of minus Rp255.8 billion. The increase in Net Cash from operating activities came from the receipt of services and others as well as a decrease in payments for operational costs.

Kas Neto Digunakan Untuk Aktivitas Investasi

Penggunaan kas bersih untuk aktivitas investasi di tahun 2023 mengalami penurunan sebesar 52,3%, yakni dari sebesar Rp309,8 miliar di tahun 2022 menjadi Rp147,8 miliar di tahun 2023. Penurunan kas bersih yang digunakan untuk Aktivitas Investasi terutama disebabkan oleh penempatan investasi.

Net Cash for Investing Activities

Net cash used for investment activities in 2023 decreased by 52.3%, i.e., from Rp309.8 billion in 2022 to Rp147.8 billion in 2023. The decrease in net cash used for Investment Activities was mainly due to investment placements.



Kas Neto (Digunakan Untuk)/Diperoleh Dari Aktivitas Pendanaan

Tahun 2023, Perusahaan membukukan penggunaan kas bersih untuk aktivitas pendanaan sebesar Rp21,8 miliar, sementara di tahun 2022 Perusahaan mencatatkan perolehan kas bersih untuk aktivitas pendanaan sebesar Rp472,3 miliar. Penurunan ini terjadi karena tidak adanya penerimaan Modal Daerah di tahun 2023.

Net Cash (for)/from Financing Activities

In 2023, the Company recorded net cash for financing activities of Rp21.8 billion. Meanwhile, in 2022, the Company recorded net cash for financing activities of Rp472.3 billion. The decrease occurred due to the absence of Regional Capital revenues in 2023.

KEMAMPUAN MEMBAYAR UTANG SOLVENCY

Dalam menjalankan pengelolaan kegiatan usahanya, Perusahaan berupaya menjaga tingkat kesehatan keuangan selalu berada di level optimal. Untuk itu, Perusahaan secara hati-hati mengelola risiko likuiditas dengan memonitor profil jatuh tempo utang, menjaga saldo kecukupan kas, dan menyiapkan sumber pendanaan untuk pembayaran utang jatuh tempo. Penguatan aspek likuiditas terus dilakukan agar Perusahaan mampu menjaga kemampuannya dalam memenuhi kewajiban pembayaran utang yang akan jatuh tempo dalam waktu dekat maupun jangka panjang. Hal itu dapat dilihat dari hasil pengukuran rasio-rasio likuiditas dan solvabilitas berikut ini:

The Company strives to maintain optimal financial soundness in managing its business activities. For this reason, the Company carefully manages liquidity risk by monitoring the debt maturity profile, maintaining sufficient cash balances, and preparing funding sources to pay maturing debt. Strengthening the liquidity aspect continues to be carried out so that the Company can maintain its ability to fulfill debt payment obligations that will mature in the short and long term. This is evident from the results of measuring the following liquidity and solvency ratios:

Kemampuan Membayar Utang Jangka Pendek

Kemampuan Perusahaan dalam memenuhi kewajiban utang jangka pendek dapat diukur melalui kualitas rasio likuiditasnya yang meliputi perhitungan Rasio Kas dan Rasio Lancar.

Short-Term Debt Repayment Capacity

The Company's capacity to fulfill short-term debt obligations can be measured through the quality of its liquidity ratios, which include calculating the Cash Ratio and Current Ratio.

Rasio Kas menjelaskan kemampuan Perusahaan dalam melunasi kewajiban utang jangka pendek yang akan jatuh tempo dalam kurun kurang dari satu tahun. Untuk memastikan rasio ini berada di tingkat yang sehat, Perusahaan berusaha menjaga stabilitas nilai kas dan setara kas di posisi yang likuid, sehingga Perusahaan tidak memerlukan pendanaan dari luar untuk melunasi kewajiban lancarnya.

The Cash Ratio explains the Company's ability to pay off short-term debt obligations that will mature in less than one year. To ensure this ratio is at a sound level, the Company strives to maintain the stability of the value of cash and cash equivalents in a liquid position so that the Company does not require external funding to pay off its current liabilities.

Sementara itu, Rasio Lancar digunakan untuk melihat kemampuan Perusahaan dalam membayar utang dengan menggunakan aktiva lancar.

Meanwhile, the Current Ratio is used to see the Company's capacity to pay debts using current assets.

Berikut adalah tabel perhitungan rasio likuiditas tahun 2023 dan 2022:

Uraian	2023	2022	Description
Rasio Kas	84%	72%	Cash Ratio
Rasio Cepat	200%	114%	Quick Ratio
Rasio Lancar	361%	159%	Current Ratio

Dari hasil perhitungan rasio likuiditas di atas dapat disimpulkan bahwa rasio kas Perusahaan memiliki kemampuan untuk melunasi liabilitas jangka pendeknya melalui kas dan setara kas yang dimiliki.

Kemampuan Membayar Utang Jangka Panjang

Selain menaruh perhatian penuh terhadap upaya pemenuhan kewajiban jangka pendek, Perusahaan juga mengukur kemampuannya dalam memenuhi kewajiban jangka panjang melalui perhitungan rasio solvabilitas yang meliputi Rasio Utang terhadap Aset dan Rasio Utang terhadap Ekuitas.

Dalam hal ini, rasio solvabilitas adalah ukuran yang dipergunakan untuk menghitung tingkat kemampuan Perusahaan dalam memenuhi segala liabilitasnya apabila saat ini Perusahaan dan Entitas Anak sudah dilikuidasi.

Berikut ini adalah tabel perhitungan rasio solvabilitas tahun 2023 dan 2022:

Uraian	2023	2022	Description
Utang terhadap Aset	12%	12%	Debt-to-Asset
Utang terhadap Ekuitas	13%	14%	Debt-to-Equity

Dari hasil perhitungan rasio solvabilitas di atas dapat disimpulkan bahwa Perusahaan memiliki kemampuan dalam memenuhi liabilitasnya apabila saat ini Perusahaan dan entitas anak dilikuidasi.

The following is a table for calculating liquidity ratios for 2023 and 2022:

From the results of the liquidity ratio calculation above, it can be concluded that the Company's cash ratio has the capacity to pay off its short-term liabilities through its cash and cash equivalents.

Long-Term Debt Repayment Capacity

Apart from paying full attention to efforts to fulfill short-term obligations, the Company also measures its capacity to fulfill long-term obligations by calculating solvency ratios, which include the Debt-to-Asset Ratio and the Debt-to-Equity Ratio.

In this case, the solvency ratio is used to calculate the Company's capacity to fulfill all its obligations if the Company and its Subsidiaries are currently liquidated.

The following is a table for calculating the solvency ratio for 2023 and 2022:

From the results of the solvency ratio calculation above, it can be concluded that the Company can fulfill its obligations if the Company and its subsidiaries are currently liquidated.



TINGKAT KOLEKTIBILITAS PIUTANG

RECEIVABLES COLLECTABILITY RATE

Secara berkala, Perusahaan melakukan peninjauan atas tingkat kolektibilitas piutang usaha dan piutang lain-lain sebagai bagian dari proses pemantauan kinerja keuangan setiap bulannya. Piutang usaha merupakan jumlah yang terutang dari pelanggan dalam kegiatan usaha rutin.

Periodically, the Company reviews the collectability level of trade receivables and other receivables as part of the monthly financial performance monitoring process. Trade receivables are amounts owed from customers in routine business activities.

Berikut ini adalah rincian piutang usaha berdasarkan umur piutang usaha:

The following is a breakdown of trade receivables based on the age of trade receivables:

(Disajikan dalam ribuan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)
(in thousands of Rupiah, unless stated otherwise)

Uraian	2023	2022	Description
Piutang Usaha – Pihak Ketiga	Rp183.233.883	Rp93.165.896	Trade Receivables – Third Party
Piutang lain-lain – Pihak Ketiga	Rp50.095.190	Rp33.788.950	Other Receivables – Third Party

Pada tahun 2023, tingkat rasio perputaran piutang dan tingkat kolektibilitas piutang terjaga tetap solid jika dibandingkan dengan tahun sebelumnya.

In 2023, the receivables turnover ratio and receivables collectability level remained solid compared to the previous year.

STRUKTUR MODAL DAN KEBIJAKAN MANAJEMEN ATAS STRUKTUR MODAL

CAPITAL STRUCTURE AND MANAGEMENT POLICY ON CAPITAL STRUCTURE

Tujuan utama dari pengelolaan permodalan Perusahaan adalah untuk memastikan bahwa rasio modal selalu dalam kondisi sehat agar dapat mendukung kinerja usaha dan memaksimalkan nilai dari pemegang saham. Perusahaan mengelola struktur modalnya dan membuat penyesuaian penyesuaian sehubungan dengan perubahan kondisi ekonomi dan karakteristik dari risiko usahanya.

The main objective of the Company's capital management is to ensure that the capital ratio is always in a sound condition to support business performance and maximize shareholder value. The Company manages its capital structure and adjusts in connection with changes in economic conditions and the characteristics of its business risks.

RINCIAN STRUKTUR MODAL

Per 31 Desember 2023, komposisi struktur modal Perusahaan dibiayai oleh utang jangka panjang dan utang jangka pendek dengan uraian sebagai berikut:

CAPITAL STRUCTURE DETAILS

As of 31 December 2023, the composition of the Company's capital structure is financed by long-term debt and short-term debt with the following description:

(Disajikan dalam ribuan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)
(in thousands of Rupiah, unless stated otherwise)

Uraian Description	Tahun 2023 In 2023	Tahun 2022 In 2022
Liabilitas Jangka Pendek Current Liabilities	270.202.189	607.139.670
Liabilitas Jangka Panjang Non-Current Liabilities	459.213.387	154.109.414
Jumlah Liabilitas Total Liabilities	729.415.576	761.249.084
Jumlah Ekuitas Total Equity	5.555.617.776	5.634.147.460

KEBIJAKAN MANAJEMEN ATAS STRUKTUR MODAL

Perusahaan Umum Daerah Pembangunan Sarana Jaya (d.h PD Pembangunan Sarana Jaya) ("Group") didirikan berdasarkan Peraturan Daerah (PERDA) No. 2 tahun 1982, tanggal 20 Maret 1982 dan disahkan oleh Menteri Dalam Negeri dengan suratnya No. 532.21-1260, tanggal 30 September 1982, perubahan terakhir berdasarkan Peraturan Daerah (PERDA) No.11 tahun 2018 tentang Perusahaan Daerah Pembangunan Sarana Jaya Daerah Khusus Ibukota Jakarta. Perusahaan merupakan pengalihan Perusahaan Tanah dan Bangunan (PTB) Daerah Khusus Ibukota (DKI) Jakarta, yang didirikan berdasarkan SK Gubernur No. Da.1/3/16/1969, tanggal 19 Februari 1969 jo. SK. Gubernur No. Da.11/2/31/1972, tanggal 2 Februari 1972.

MANAGEMENT POLICY ON CAPITAL STRUCTURE

Perusahaan Umum Daerah Pembangunan Sarana Jaya (a.k.a. PD Pembangunan Sarana Jaya) ("Group") was established based on Regional Regulation (Perda) No. 2 of 1982, dated March 20, 1982, and ratified by the Home Minister with letter No. 532.21-1260, dated September 30, 1982, the latest amendment based on Perda No. 11 of 2018 on Regional Company Pembangunan Sarana Jaya of Jakarta Special Capital Region. The Company is a transfer of the Land and Building Company (PTB) of Jakarta Special Capital Region (DKI Jakarta), which was established based on Governor Decree No. Da.1/3/16/1969, dated February 19, 1969, jo. Governor Decree No. Da.11/2/31/1972, dated February 2, 1972.

Modal Perusahaan adalah merupakan kekayaan Daerah yang dipisahkan, Modal dasar Perusahaan pada saat pendirian (20 Maret 1982) adalah sebesar Rp3.286.838.993. Pada tanggal 5 Nopember 1990 dikeluarkan Peraturan Daerah (PERDA) Nomor 6 Tahun 1990, mengenai perubahan pertama PERDA No. 2 tahun 1982 dan disahkan oleh Menteri Dalam Negeri Nomor 539.31-129, tanggal 7 Pebruari 1991.

The Company's capital is a separate regional asset. The Company's authorized capital at the time of establishment (March 20, 1982) amounted to Rp3,286,838,993. On November 5, 1990, Regional Regulation No. 6 of 1990 was issued, regarding the first amendment to Regional Regulation No. 2 of 1982 and was ratified by the Home Minister No. 539.31-129, dated February 7, 1991.



Dalam Perda Nomor 6 Tahun 1990 tersebut ditetapkan modal dasar Perusahaan sebesar Rp200.000.000.000. Modal disetor sampai dengan 31 Desember 2013 sebesar Rp196.002.770.836 dengan rincian sebagai berikut:

In Perda No. 6 of 1990, the Company's authorized capital was stipulated at Rp200,000,000,000. Paid-up capital on December 31, 2013, amounted to Rp196,002,770,836 with the following details:

Modal sesuai Perda Nomor 2 tahun 1982	Rp3.286.838.993	Capital according to Perda No. 2 of 1982
Sampai dengan 1990 (Perda No. 6 Tahun 1990)	Rp43.931.726.243	Until 1990 (Perda No. 6 of 1990)
Sub Jumlah	Rp47.218.565.236	Sub-Total
Setelah Perda Nomor 6 Tahun 1990 ada tambahan PMP dari Privilege Pemda DKI atas pembebasan tanah di Segitiga Senen. Sesuai dengan Keputusan Gubernur DKI Jakarta No. 1333 Tahun 1992 dan Surat Gubernur Nomor. 1598/-1.711 tanggal 23 Mei 1994	Rp18.754.183.000	After Perda No. 6 of 1990, there was an additional Government Investment Participation (PMP) from the Privilege of the DKI Regional Government for land acquisition in Segitiga Senen, in line with the DKI Jakarta Governor Decree No. 1333 of 1992 and the Governor Letter No. 1598/-1.711 dated May 23, 1994
Sub Jumlah	Rp65.972.748.236	Sub-Total
Kekurangan Pencatatan Aset Tetap Tanah Rawa Bilal	Rp30.022.600	Deficiencies in the Recording of Rawa Bilal Land Fixed Assets
Sub Jumlah	Rp66.002.770.836	Sub-Total
Pemenuhan Modal Disetor (Keputusan Gub. DKI Jakarta No. 1914 Tahun 2013)	Rp130.000.000.000	Fulfillment of Paid-up Capital (DKI Jakarta Governor Decree No. 1914 of 2013)
Jumlah Modal Disetor per 31 Desember 2013	Rp196.002.770.836	Total Paid-Up Capital per December 31, 2013

Dalam Perda Nomor 8 Tahun 2014 tanggal 14 Juli 2014 tersebut ditetapkan modal dasar Perusahaan menjadi sebesar Rp2.000.000.000.000.

In Perda No. 8 of 2014, dated July 14, 2014, it was stipulated that the Company's authorized capital amounted to Rp2,000,000,000,000.

Berdasarkan Perda Nomor 11 Tahun 2018 tanggal 28 Desember 2018 tentang Perubahan ketiga atas Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 1982 tentang Perusahaan Daerah Pembangunan Sarana Jaya Daerah Khusus Ibukota Jakarta, ditetapkan bahwa Perusahaan Daerah Khusus Ibukota Jakarta beralih menjadi Perusahaan Umum Daerah Pembangunan Sarana Jaya dan penetapan modal dasar Perusahaan sebelumnya sebesar Rp2.000.000.000.000 (dua triliun rupiah) menjadi Rp10.000.000.000.000 (sepuluh triliun rupiah).

Based on Perda No. 11 of 2018, dated December 28, 2018, on the Third Amendment to Regional Regulation No. 2 of 1982 on Sarana Jaya Regional Development Company of Jakarta Special Capital Region, it is stipulated that the Jakarta Special Capital Region Regional Company is transformed into Perusahaan Umum Daerah Pembangunan Sarana Jaya with the determination of the Company's authorized capital previously amounting to Rp2,000,000,000,000 (two trillion rupiah) to Rp10,000,000,000,000 (ten trillion rupiah).

► **Modal disetor sampai dengan 31 Desember 2019 sebesar Rp4.250.000.000.000, dengan rincian sebagai berikut:**

Paid-up capital per December 31, 2019, amounted to Rp4,250,000,000, with the following details:

Jumlah Modal per 31 Desember 2018	Rp2.000.000.000.000	Total Capital per December 31, 2018
Pemenuhan Modal disetor (Keputusan Gub. DKI Jakarta No.450 Tahun 2019)	Rp1.450.000.000.000	Fulfillment of Paid-Up Capital (DKI Jakarta Governor Decree No. 450 of 2019)
Pemenuhan Modal disetor (Keputusan Gub. DKI Jakarta No.1684 Tahun 2019)	Rp800.000.000.000	Fulfillment of Paid-Up Capital (DKI Jakarta Governor Decree No. 1684 of 2019)
Jumlah Modal disetor Per 31 Desember 2019	Rp4.250.000.000.000	Total Paid-Up Capital per December 31, 2019

► **Modal disetor sampai dengan 31 Desember 2020 sebesar Rp5.200.000.000.000, dengan rincian sebagai berikut:**

Paid-up capital per December 31, 2020, amounted to Rp5,200,000,000, with the following details:

Jumlah Modal per 31 Desember 2019	Rp4.250.000.000.000	Total Capital per December 31, 2019
Pemenuhan Modal disetor (Keputusan Gub. DKI Jakarta No.1060 Tahun 2020)	Rp50.000.000.000	Fulfilment of Paid-Up Capital (DKI Jakarta Governor Decree No. 1060 of 2020)
Pemenuhan Modal disetor (Keputusan Gub. DKI Jakarta No.1262 Tahun 2020)	Rp900.000.000.000	Fulfilment of Paid-Up Capital (DKI Jakarta Governor Decree No. 1262 of 2020)
Jumlah Modal disetor Per 31 Desember 2020	Rp5.200.000.000.000	Total Paid-Up Capital per December 31, 2020

► **Modal disetor sampai dengan 31 Desember 2021 sebesar Rp5.375.000.000.000, dengan rincian sebagai berikut:**

Paid-up capital per December 31, 2021, amounted to Rp5,375,000,000,000 with the following details:

Jumlah Modal per 31 Desember 2020	Rp5.200.000.000.000	Total Capital per December 31, 2020
Perjanjian Investasi Tahun 2021 Nomor 2186/-071.242,1511/-072.1	Rp175.000.000.000	Investment Agreement of 2021 No. 2186/-071.242.1511/-072.1
Jumlah Modal disetor Per 31 Desember 2021	Rp5.375.000.000.000	Total Paid-Up Capital per December 31, 2021

► **Modal Disetor sampai dengan 31 Desember 2022 sebesar Rp5.625.000.000.000, dengan rincian sebagai berikut:**

Paid-Up Capital per December 31, 2022, amounted to Rp5,625,000,000,000 with the following details:

Jumlah Modal per 31 Desember 2021	Rp5.375.000.000.000	Total Capital per December 31, 2021
Perjanjian Investasi Tahun 2022 Nomor 535/-071.241,776/-072.26	Rp250.000.000.000	Investment Agreement of 2022 No. 535/-071.241,776/-072.26
Jumlah Modal disetor Per 31 Desember 2022	Rp5.625.000.000.000	Total Paid-Up Capital per December 31, 2022

► **Modal Disetor sampai dengan 31 Desember 2023 sebesar Rp5.625.000.000.000, dengan rincian sebagai berikut:**

Paid-Up Capital per December 31, 2023, amounted to Rp5,625,000,000,000 with the following details:

Jumlah Modal per 31 Desember 2022	Rp5.625.000.000.000	Total Capital per December 31, 2022
Jumlah Modal disetor Per 31 Desember 2023	Rp5.625.000.000.000	Total Paid-Up Capital per December 31, 2023

IKATAN MATERIAL INVESTASI BARANG MODAL

MATERIAL COMMITMENT FOR CAPITAL GOODS INVESTMENT

Selama tahun 2023, tidak terdapat ikatan material atas investasi barang modal.

During 2023, there were no material commitments for investment in capital goods.



REALISASI INVESTASI ATAU BELANJA BARANG MODAL TAHUN 2023

REALIZATION OF INVESTMENTS OR CAPITAL EXPENDITURE IN 2023

Realisasi belanja modal Perusahaan dibukukan sebesar Rp2,4 miliar, turun 16% dibandingkan belanja modal tahun sebelumnya sebesar Rp2,9 miliar. Perusahaan melakukan belanja modal untuk mendukung kegiatan operasional sehari-hari dengan menggunakan sumber pendanaan dari kas internal dan menggunakan mata uang Rupiah.

The Company's realization of capital expenditure was recorded at Rp2.4 billion, a 16% decrease compared to the previous year's capital expenditure of Rp2.9 billion. The Company carries out capital expenditure to support daily operational activities using funding sources from internal cash using the Rupiah currency.

Berikut ini adalah rincian informasi investasi belanja barang modal Perusahaan selama dua tahun terakhir:

The following is detailed investment information on the Company's capital expenditure for the last two years:

(Disajikan dalam ribuan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)
(in thousands of Rupiah, unless stated otherwise)

Investasi Barang Modal	2023	2022	Capital Goods Investment
Bangunan	1.201.138	1.197.352	Building
Inventaris	1.239.310	1.584.300	Inventory
Kendaraan	-	23.142	Vehicle
Mesin dan Peralatan	-	89.487	Machinery and Equipment
AUC – Bangunan	2.474	-	AUC – Building
Total Investasi Barang Modal	2.442.923	2.894.282	Total Capital Goods Investment

PERBANDINGAN ANTARA TARGET & REALISASI TAHUN 2023 SERTA PROYEKSI 2024

COMPARISON OF 2023 TARGETS WITH THE REALIZATION AND 2024 PROJECTIONS

Pencapaian kinerja keuangan dan operasional Perusahaan di tahun 2023 digunakan sebagai bahan evaluasi perbaikan bagi Manajemen dan landasan dalam menyusun target-target kinerja yang lebih optimis untuk tahun 2024 mendatang.

The Company's financial and operational performance achievements in 2023 are used as material for evaluating improvements for Management and a basis for developing more optimistic performance targets for 2024.

Secara ringkas, berikut ini adalah uraian perbandingan target dan realisasi tahun 2023, serta proyeksi tahun 2024:

In summary, the following is a comparative description of targets and realizations for 2023, as well as projections for 2024:

Indikator (Rp ribuan) Indicator (Rp thousands)	2023			Proyeksi 2024 2024 Projection
	Target Target	Realisasi Realization	Pencapaian Terhadap Target Tahun 2023 Achievement Against 2023 Target	
Pendapatan Revenues	446.075.961	211.954.260	48%	755.518.262
(Rugi)/Laba Tahun Berjalan (Loss)/Profit for the Year	(3.293.273)	(98.863.240)	3002%	1.338.065
Struktur Modal Capital Structure	5.473.776.923	5.625.000.000	103%	5.473.776.923
Kebijakan Dividen Dividend Policy	-	-	-	-

Semua target dan rencana bisnis untuk 2024 mendatang sudah dituangkan di dalam Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan (RKAP) Tahun 2024 yang penyusunannya telah mempertimbangkan berbagai faktor dan dinamika eksternal yang diproyeksikan masih akan terus berkembang serta juga memperhatikan kapasitas dan sumber daya internal yang dimiliki sebagai fondasi dalam menghadapi tantangan.

All business targets and plans for 2024 have been outlined in the 2024 Company Work Plan and Budget (RKAP), the preparation of which has considered various external factors and dynamics that are projected to continue to develop and also consider the internal capacity and resources that are owned as a foundation in face challenges.



INFORMASI DAN FAKTA MATERIAL YANG TERJADI SETELAH TANGGAL LAPORAN AKUNTAN

INFORMATION AND MATERIAL FACTS SUBSEQUENT TO THE DATE OF ACCOUNTANT REPORT

Berdasarkan Keputusan Dewan Pengawas Perumda Pembangunan Sarana Jaya Nomor 1 dan 4 Tahun 2024 tentang Pengangkatan Ketua dan Anggota Komite Remunerasi dan Nominasi pada tanggal 8 Januari 2024, sehingga mulai tanggal tersebut susunan Komite Remunerasi dan Nominasi menjadi:

Based on Perumda Pembangunan Sarana Jaya Supervisory Board Decree No. 1 and 4 of 2024 on the Appointment of the Head and Members of the Remuneration and Nomination Committee on January 8, 2024, so that starting from that date, the Remuneration and Nomination Committee composition is:

No.	Jabatan Position	Nama Name
1	Ketua Head	Arief Rachman
2	Anggota Member	Dariyah
3	Anggota Member	Erisar Risali Raib

Berdasarkan Keputusan Dewan Pengawas Perumda Pembangunan Sarana Jaya Nomor 2 Tahun 2024 tentang Pengangkatan Ketua Komite Pemantau Risiko pada tanggal 8 Januari 2024, sehingga mulai tanggal tersebut susunan Komite Pemantau Risiko menjadi:

Based on the Perumda Pembangunan Sarana Jaya Supervisory Board Decree No. 2 of 2024 on the Appointment of the Head of the Risk Monitoring Committee on January 8, 2024, so that starting from that date, the Risk Monitoring Committee composition is:

No.	Jabatan Position	Nama Name
1	Ketua Head	Arief Rachman

Berdasarkan Keputusan Dewan Pengawas Perumda Pembangunan Sarana Jaya Nomor 3 Tahun 2024 tentang Pengangkatan Anggota Komite Audit pada tanggal 8 Januari 2024, sehingga mulai tanggal tersebut susunan Komite Audit menjadi:

Based on the Perumda Pembangunan Sarana Jaya Supervisory Board Decree No. 3 of 2024 on the Appointment of the Head of the Risk Monitoring Committee on January 8, 2024, so that starting from that date, the Audit Committee composition is:

No.	Jabatan Position	Nama Name
1	Ketua Head	Arief Rachman
2	Anggota Member	Nizar Suhendra
3	Anggota Member	Nizar Suhendra

PROSPEK USAHA

BUSINESS OUTLOOK

Pelemahan ekonomi global diproyeksi akan terus berlanjut hingga 2024 mendatang diikuti oleh sejumlah tantangan yang semakin rumit, meskipun di sisi lain laju inflasi terus mengalami moderasi. Adapun beberapa faktor yang diperkirakan menjadi sumber utama perlambatan ekonomi global ke depan, antara lain ketidakpastian dalam relasi geopolitik antar negara-negara utama yang berpotensi memicu penurunan ekonomi global melalui konflik, perselisihan perdagangan, atau perubahan dalam dinamika politik internasional.

Selain masih akan tertekan oleh imbas dari perang yang berlarut-larut, fluktuasi nilai tukar mata uang akibat penguatan *USDollar* juga perlu diantisipasi secara serius karena memiliki dampak yang besar terhadap daya saing ekspor dan impor suatu negara. Demikian pula perubahan harga komoditas global juga perlu diantisipasi karena memiliki dampak yang signifikan pada ekonomi dunia, terutama memberikan kerugian pada negara-negara yang sangat bergantung pada ekspor komoditas tertentu, seperti Indonesia.

Dengan mempertimbangkan faktor-faktor tersebut, World Bank dan IMF memproyeksikan laju pertumbuhan ekonomi global tahun 2024 akan kembali melanjutkan penurunan dengan posisi yang masih lemah dan rentan dari berbagai *downside risks*. International Monetary Fund (IMF) memproyeksikan pertumbuhan ekonomi global tahun 2024 akan sebesar 3,1% (yoy), sedangkan World Bank memprediksi perekonomian global hanya tumbuh 2,4% (yoy), lebih rendah dari kinerja perekonomian global 2023.

Dalam menghadapi proyeksi penurunan permintaan global, Indonesia terus berusaha memperkuat fundamental perekonomian dengan bergantung pada faktor-faktor GDP domestik. Proyeksi pertumbuhan ekonomi Indonesia pada 2024 tetap positif dan ditargetkan mampu mempertahankan pertumbuhan di atas 5% (yoy), didorong oleh peningkatan konsumsi rumah tangga dan belanja pemerintah.

Menyambut tahun 2024 dengan berbagai dinamika eksternal yang diproyeksikan berkembang beserta tantangan dan risiko yang mengikutinya, Perusahaan berkomitmen untuk memperbaiki fundamental bisnis sehingga dapat kembali mencetak perolehan laba bersih dan juga mampu melaksanakan seluruh mandat penugasan dari Pemprov DKI secara efektif.

The global economic downturn is projected to continue until 2024, followed by several increasingly complicated challenges, while the inflation rate continues to moderate. Several factors are expected to be the main source of the global economic slowdown going forward, including uncertainty in geopolitical relations between major countries that have the potential to trigger a decline in the global economy through conflicts, trade disputes, or changes in international political dynamics.

In addition to still being pressured by the impact of a protracted war, fluctuations in currency exchange rates due to the strengthening of the US Dollar need to be seriously anticipated because they significantly impact the competitiveness of a country's exports and imports. Similarly, changes in global commodity prices need to be anticipated because they significantly impact the world economy, especially in countries highly dependent on certain commodity exports, such as Indonesia.

By considering these factors, the World Bank and IMF project that the global economic growth rate in 2024 will continue to decline with a position that is still weak and vulnerable to various downside risks. The International Monetary Fund (IMF) projects that global economic growth in 2024 will amount to 3.1% (yoy), while the World Bank predicts that the global economy will only grow by 2.4% (yoy), lower than the 2023 global economic performance.

In the face of projected declining global demand, Indonesia continues to strengthen its economic fundamentals by relying on domestic GDP factors. Indonesia's projected economic growth in 2024 remains positive and is targeted to maintain growth above 5% (yoy), driven by increased household consumption and government spending.

Welcoming 2024 with various external dynamics projected to develop along with the challenges and risks that follow, the Company is committed to improving business fundamentals so that it can return to net profit and effectively carry out all assignment mandates from the DKI Provincial Government.



Dengan mengarahkan fokus pada beberapa prioritas strategi utama di tahun mendatang, Perusahaan cukup optimis memandang peluang usaha yang terbuka lebar di tahun 2024. Perusahaan akan tetap fokus untuk mendukung program Pemerintah Provinsi DKI Jakarta melalui Kegiatan Strategis Daerah (KSD). Selain itu, Perusahaan juga mengincar proyek-proyek komersil untuk mendorong pertumbuhan usaha di tahun 2024.

By focusing on several key strategic priorities in the coming year, the Company is quite optimistic about the vast business opportunities in 2024. The Company will remain focused on supporting the DKI Jakarta Provincial Government's program through Regional Strategic Activities (KSD). In addition, the Company is eyeing commercial projects to drive business growth in 2024.

ASPEK PEMASARAN

MARKETING ASPECT

Sebagai BUMD Pemprov DKI Jakarta, maka lingkup wilayah bisnis Perusahaan hanya mencakup area DKI Jakarta. Dengan kekhususan tersebut, Perusahaan terus berusaha meningkatkan pendapatan usahanya dengan memaksimalkan potensi dan dukungan dari pemegang saham untuk menggali ceruk bisnis baru serta juga mengoptimalkan portofolio bidang usaha yang dijalankan melalui penerapan strategi pemasaran yang efektif.

As a DKI Jakarta Provincial Government BUMD, the Company's business areas only covers the DKI Jakarta area. With this specificity, the Company strives to increase its business income by maximizing the potential and support from shareholders to explore new business niches and optimize the portfolio of business fields carried out through effective marketing strategies.

STRATEGI PEMASARAN

Strategi pemasaran Perusahaan terbagi atas diversifikasi segmen usaha dan diversifikasi target pasar, dengan penjelasan sebagai berikut:

1. Diversifikasi Segmen Usaha

Sepanjang tahun 2023, segmen usaha Perusahaan terdiri dari beberapa kategori utama, antara lain Pertanahan/Pengelolaan Lahan, Pembangunan Hunian, Pengelolaan Properti dan Pengembangan Infrastruktur.

Gedung Perkantoran yang dimiliki Perusahaan berlokasi di pusat bisnis Jakarta, antara lain Naya Pramuka, Naya Cikini, Naya Menteng, dan Gedung Sarana Jaya. Sementara untuk Hunian Terjangkau, Perusahaan mengembangkan Menara Samawa Nuansa di Pondok Kelapa, Jakarta Timur dan Cilangkap.

Kemudian untuk kategori Pusat Perbelanjaan, Perusahaan memiliki 3 (tiga) Mall ternama di Jakarta, yaitu Mall Pondok Kelapa Town Square, Mall Atrium Senen, dan Cibubur Junction. Disamping itu, Perusahaan juga berperan besar pada pengembangan bisnis *hotel chain* di Pusat Jakarta melalui investasi pada Hotel Novotel Cikini, Hotel Mercure Cikini, dan Hotel Veranda.

MARKETING STRATEGY

The Company's marketing strategy is divided into business segment diversification and target market diversification with the following explanation:

1. Business Segment Diversification

Throughout 2023, the Company's business segments consist of several main categories: Land Management, Residential Development, Property Management, and Infrastructure Development.

Office buildings owned by the Company are located in the business center of Jakarta, including Naya Pramuka, Naya Cikini, Naya Menteng, and Sarana Jaya Building. Meanwhile, for affordable housing, the Company is developing Menara Samawa Nuansa in Pondok Kelapa, East Jakarta, and Cilangkap.

Then, for the Shopping Center category, the Company has three well-known malls in Jakarta, i.e., Pondok Kelapa Town Square Mall, Atrium Senen Mall, and Cibubur Junction. The Company also plays a significant role in developing the hotel chain business in Central Jakarta through investments in the Novotel Hotel Cikini, Mercure Hotel Cikini, and Veranda Hotel.

Dalam melaksanakan mandat tugas sebagai perusahaan umum daerah (Perumda) yang seluruh sahamnya dimiliki oleh Pemprov DKI Jakarta, Perusahaan juga bertugas melakukan pembangunan Fasilitas Umum (fasum) untuk kepentingan masyarakat umum. Beberapa fasum di Jakarta yang telah selesai dibangun Perusahaan sampai dengan akhir 2023, antara lain Jembatan Penyeberangan Multifungsi Tanah Abang, Halte Lay-Bay Tanah Abang, serta Galeri Huni yang berlokasi di Taman Literasi Martha Tiahahu.

2. Diversifikasi Target Market

Dalam rangka menyukseskan program Pemprov DKI Jakarta untuk mengatasi tantangan *backlog* perumahan, Perusahaan membantu menyediakan hunian terjangkau bagi masyarakat berpenghasilan rendah melalui pembangunan Menara Samawa Nuansa Pondok Kelapa yang berlokasi di Jakarta Timur. Sebagai salah satu pengembang yang membedakan dengan lainnya, Perusahaan membidik target pasar menengah ke bawah yang belum banyak dilirik oleh pengembang besar lainnya.

Dalam menggarap target pasar untuk Hunian Terjangkau Nuansa Pondok Kelapa, Perusahaan telah melakukan berbagai bentuk kegiatan pemasaran secara *offline* maupun *online* misalnya dengan melakukan sosialisasi, pameran, serta melakukan promosi pada *platform digital*, seperti *website* dan sosial media.

PANGSA PASAR

Pada tahun 2023, mobilitas masyarakat terus menunjukkan peningkatan. Kegiatan pemasaran yang dilakukan semakin masif dilakukan mengingat aktivitas masyarakat sudah kembali normal. Kegiatan pemasaran ini dilakukan untuk memenuhi harapan dan keinginan pelanggan, sehingga keinginan dan kebutuhan pelanggan akan merasa terpuaskan.

In carrying out its mandate as a regional public company (Perumda) whose shares are owned by the DKI Jakarta Provincial Government, the Company is also tasked with constructing public facilities for the general public. The Company has completed several public facilities in Jakarta by the end of 2023, including the Tanah Abang Multipurpose Crossing Bridge, the Tanah Abang Lay-Bay Bus Stop, and the Gallery Huni at Martha Tiahahu Literacy Park.

2. Target Market Diversification

To fulfill DKI Jakarta Provincial Government's program to overcome the housing backlog challenge, the Company is helping to provide affordable housing for low-income communities by constructing the Menara Samawa Nuansa Pondok Kelapa in East Jakarta. As a developer that differentiates itself from others, the Company targets the lower middle market, which has not been looked at by many other large developers.

In working on the target market for Nuansa Pondok Kelapa Affordable Housing, the Company has carried out various offline and online marketing activities, e.g., by conducting outreach, exhibitions, and promotions on digital platforms, i.e., websites and social media.

MARKET SHARE

In 2023, community mobility will continue to show improvement. The marketing activities are becoming more massive, considering community activities have returned to normal. The marketing activity is carried out to fulfill customer expectations and desires.



KEBIJAKAN DIVIDEN

DIVIDEND POLICY

KEBIJAKAN PEMBAGIAN DIVIDEN

Sebagai perusahaan umum daerah (Perumda), Perusahaan tidak memiliki kewajiban untuk menyetorkan dividen kepada pemegang saham. Akan tetapi sebagaimana diatur dalam Peraturan Daerah (Perda), Perusahaan diwajibkan untuk menyetorkan Pendapatan Asli Daerah (PAP).

PEMBAGIAN DIVIDEN DALAM 2 (DUA) TAHUN TERAKHIR

Pada tahun 2023 dan 2022, Perusahaan tidak membagikan dividen sehingga tidak terdapat informasi terkait:

1. Kebijakan dividen, antara lain memuat informasi persentase jumlah dividen yang dibagikan terhadap laba bersih;
2. Tanggal pembayaran dividen kas dan/atau tanggal distribusi dividen non kas;
3. Jumlah dividen per saham (kas dan/atau non kas); dan
4. Jumlah dividen per tahun yang dibayarkan.

DIVIDEND PAYOUT POLICY

As a regional public company (Perumda), the Company is not obligated to pay shareholders dividends. However, as regulated in Regional Regulations (Perda), the Company is required to deposit Regional Original Income (PAP).

DIVIDEND PAYOUT IN THE LAST TWO YEARS

In 2023 and 2022, the Company did not distribute dividends; therefore, there is no information regarding:

1. Dividend policy, including information on the percentage of dividends distributed to net profit;
2. Cash dividend payment date and/or non-cash dividend payout date;
3. Amount of dividends per share (cash and/or non-cash); and
4. Amount of dividends paid per year.

REALISASI PENGGUNAAN DANA HASIL PENAWARAN UMUM

USE OF PROCEEDS FROM PUBLIC OFFERING

Dalam Laporan Tahunan 2023, Perusahaan tidak menyajikan informasi terkait penggunaan dana hasil penawaran umum karena belum pernah melakukan aksi korporasi berupa penerbitan efek bersifat ekuitas maupun utang sampai dengan akhir 2023.

In the 2023 Annual Report, the Company does not present information regarding the use of proceeds from the public offering because it has never carried out corporate actions by issuing equity or debt securities until the end of 2023.

TRANSAKSI YANG MENGANDUNG BENTURAN KEPENTINGAN DAN TRANSAKSI AFILIASI DENGAN PIHAK-PIHAK BERELASI

TRANSACTIONS CONTAINING CONFLICT OF INTEREST AND TRANSACTIONS WITH RELATED PARTIES

TRANSAKSI MATERIAL YANG MENGANDUNG BENTURAN KEPENTINGAN

Sepanjang tahun 2023, Perusahaan tidak melakukan transaksi keuangan yang mengandung benturan kepentingan dengan pihak-pihak berelasi.

TUJUAN TRANSAKSI DENGAN PIHAK AFILIASI ATAU BERELASI

Dalam kegiatan usaha normal, Perusahaan melakukan transaksi dengan pihak-pihak berelasi yang dilakukan pada ketentuan syarat yang disepakati bersama oleh para pihak. Seluruh transaksi keuangan dengan pihak-pihak berelasi yang telah dilakukan Perusahaan di tahun 2023 bertujuan untuk memperoleh pendapatan baik yang sifatnya berulang maupun tidak berulang.

Penjelasan lebih lengkap terkait transaksi material dengan pihak berelasi selama tahun 2023 terdapat pada Catatan Atas Laporan Keuangan (CALK) No. 39 untuk tahun buku yang berakhir pada 31 Desember 2023.

PERNYATAAN DIREKSI ATAS KEWAJARAN TRANSAKSI DENGAN PIHAK-PIHAK BERELASI TAHUN 2023

Direksi berpendapat seluruh transaksi afiliasi yang dilakukan Perusahaan dengan pihak-pihak berelasi sepanjang tahun 2023 sudah dilaksanakan pada nilai yang wajar (*arm's length*) sesuai dengan syarat dan ketentuan yang sama apabila transaksi serupa dilakukan dengan pihak yang tidak terafiliasi serta telah sesuai dengan best practice yang berlaku universal.

PERAN DEWAN KOMISARIS DAN KOMITE AUDIT DALAM MENGAWASI JALANNYA PROSEDUR TRANSAKSI AFILIASI

Dengan dibantu oleh Komite Audit, Dewan Komisaris menjalankan fungsi pengawasan terhadap proses transaksi keuangan yang dilakukan Perusahaan dengan meninjau dan memberikan persetujuan atas transaksi-transaksi keuangan bernilai material pada batas nominal tertentu. Langkah ini dilakukan sebagai salah satu upaya mitigasi risiko untuk mencegah kemungkinan terjadinya transaksi yang mengandung benturan kepentingan yang berpotensi merugikan Perusahaan di kemudian hari.

MATERIAL TRANSACTIONS CONTAINING CONFLICT OF INTEREST

Throughout 2023, the Company did not carry out financial transactions that contained conflicts of interest with related parties.

TRANSACTION PURPOSES WITH AFFILIATED OR RELATED PARTIES

In regular business activities, the Company carries out transactions with related parties, which are carried out on terms and conditions mutually agreed upon by the parties. All financial transactions with related parties carried out by the Company in 2023 are aimed at obtaining income, both recurring and non-recurring.

A more complete explanation regarding material transactions with related parties during 2023 can be found in Notes to the Financial Statements (CALK) No. 39 for the fiscal year ending December 31, 2023.

BOARD OF DIRECTORS' STATEMENT ON THE FAIRNESS OF TRANSACTIONS WITH RELATED PARTIES IN 2023

The Board of Directors is of the opinion that all related party transactions conducted by the Company with related parties throughout 2023 have been carried out at fair value following the same terms and conditions as if similar transactions were carried out with unaffiliated parties and in accordance with universal best practices.

THE BOARD OF COMMISSIONERS AND AUDIT COMMITTEE'S ROLE IN SUPERVISING THE AFFILIATE TRANSACTION PROCEDURES IMPLEMENTATION

With the assistance of the Audit Committee, the Board of Commissioners supervises the financial transaction process carried out by the Company by reviewing and approving financial transactions of material value at a certain nominal limit. This step is taken as one of the risk mitigation efforts to prevent the possibility of transactions containing conflicts of interest that could potentially harm the Company.



KEBIJAKAN PERUSAHAAN TERKAIT MEKANISME REVIEW ATAS TRANSAKSI DAN PEMENUHAN PERATURAN DAN KETENTUAN TERKAIT

Mekanisme *review* yang diterapkan Perusahaan dalam menganalisa dan meninjau transaksi dengan pihak-pihak berelasi dilakukan secara internal dengan melibatkan organ-organ pengawas seperti Komite Audit dan Dewan Komisaris. Selain itu, transaksi-transaksi tersebut juga dianalisa kembali oleh Akuntan Publik yang independen melalui proses audit eksternal. Mekanisme ini tertuang dalam PSAK 7 (revisi 2014) tentang “Pengungkapan Pihak-Pihak Berelasi”.

Uraian lengkap akan hal ini juga telah disajikan dalam Laporan Keuangan Tahunan Perusahaan untuk tahun buku yang berakhir 31 Desember 2023, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Laporan Tahunan dan Laporan Keberlanjutan 2023.

COMPANY POLICY ON THE MECHANISM OF REVIEW ON THE TRANSACTIONS AND THE COMPLIANCE WITH RELEVANT PROVISIONS

The review mechanism applied by the Company in analyzing and reviewing transactions with related parties is carried out internally by involving supervisory organs such as the Audit Committee and the Board of Commissioners. In addition, these transactions are re-analyzed by an independent Public Accountant through an external audit process. This mechanism is set out in PSAK 7 (2014 revision) on Disclosure of Related Parties.

A full description regarding this matter has also been presented in the Company’s Annual Financial Statement for the fiscal year ending on December 31, 2023, which is an integral part of the 2023 Annual Report and Sustainability Report.

PERUBAHAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN YANG BERPENGARUH SIGNIFIKAN TERHADAP PERUSAHAAN CHANGES IN LAWS AND REGULATIONS WITH SIGNIFICANT IMPACTS TO THE COMPANY

Pada tahun 2023, Perusahaan melihat Tidak Ada perubahan pada sejumlah peraturan dan perundang-undangan yang berpengaruh signifikan terhadap kegiatan usaha sehari-hari.

In 2023, the Company regards that there are no changes to several laws and regulations that significantly impact daily business activities.

INFORMASI MATERIAL MENGENAI INVESTASI, EKSPANSI, DIVESTASI, PENGGABUNGAN/PELEBURAN USAHA, AKUISISI, DAN RESTRUKTURISASI UTANG/MODAL

MATERIAL INFORMATION REGARDING INVESTMENT, EXPANSION, DIVESTMENT, MERGER/CONSOLIDATION OF BUSINESSES, ACQUISITIONS, AND DEBT/CAPITAL RESTRUCTURING

Pada tahun 2023, Perusahaan tidak melakukan aksi investasi, ekspansi, divestasi, penggabungan/peleburan usaha, akuisisi, restrukturisasi utang/modal, transaksi material, transaksi afiliasi, dan transaksi benturan kepentingan.

In 2023, the Company did not conduct any investment, expansion, divestment, merger/consolidation, acquisition, debt/capital restructuring, material transactions, affiliated transactions, or conflict of interest transactions.

PERUBAHAN KEBIJAKAN AKUNTANSI

CHANGES IN ACCOUNTING POLICY

Dewan Standar Akuntansi Keuangan Ikatan Akuntan Indonesia (DSAK-IAI) telah menerbitkan amandemen dan interpretasi yang berlaku efektif mulai 1 Januari 2023 sebagai berikut:

The Financial Accounting Standard Board of the Indonesian Institute of Accountant (DSAK-IAI) has issued amendments and interpretations which are effective starting January 1, 2023, as follows:

Amendemen PSAK 1: Penyajian Laporan Keuangan tentang Klasifikasi Liabilitas sebagai Jangka Pendek atau Jangka Panjang

Amendment to PSAK 1: Presentation of Financial Statements on the Classification of Liabilities as Short-Term or Long-Term

Secara umum, amendemen PSAK 1 menjelaskan:

- Apa yang dimaksud dengan hak untuk menangguhkan penyelesaian;
- Bahwa hak entitas untuk menangguhkan penyelesaian liabilitas harus ada pada akhir periode pelaporan;
- Klasifikasi tersebut tidak terpengaruh oleh kemungkinan bahwa entitas akan menggunakan haknya untuk menangguhkan penyelesaian liabilitas; dan
- Hanya jika suatu derivatif melekat dalam liabilitas konvertibel merupakan instrumen ekuitas saja, penggunaan frasa liabilitas tidak akan memengaruhi klasifikasinya.

Amendemen tersebut berlaku efektif untuk periode pelaporan tahunan yang dimulai pada atau setelah 1 Januari 2023 dan harus diterapkan secara retrospektif.

In general, the amendments to PSAK 1 clarify:

- What is meant by the right to defer settlement;
- That the entity's right to defer settlement of liability must exist at the end of the reporting period;
- The classification is not affected by the likelihood that the entity will exercise its right to defer settlement of the liability; and
- Only if a derivative embedded in a convertible liability is an equity instrument will the use of the phrase liability not affect its classification.

The amendments are effective for annual reporting periods beginning on or after January 1, 2023, and should be applied retrospectively.

Amendemen PSAK 16: Aset Tetap – Hasil sebelum Penggunaan yang Diintensikan

Amendment to PSAK 16: Fixed Assets – Proceeds before Intended Use

Amendemen ini tidak memperbolehkan entitas untuk mengurangi suatu hasil penjualan item yang diproduksi saat membawa aset tersebut ke lokasi dan kondisi yang diperlukan supaya aset dapat beroperasi sesuai dengan intensi manajemen dari biaya perolehan suatu aset tetap. Sebaliknya, entitas mengakui hasil dari penjualan item-item tersebut, dan biaya untuk memproduksi item-item tersebut, dalam laba rugi.

Amendemen tersebut berlaku efektif untuk periode pelaporan tahunan yang dimulai pada atau setelah 1 Januari 2023 dan diterapkan secara retrospektif untuk aset tetap yang tersedia untuk digunakan pada atau setelah awal dari periode sajian paling awal di mana entitas pertama kali menerapkan amendemen tersebut.

The amendment does not allow an entity to deduct the proceeds from the sale of an item produced while bringing the asset to the location and condition necessary for the asset to operate in accordance with management's intent from the cost of an item of property and equipment. Instead, an entity recognizes the proceeds from the sale of those items and the cost of producing those items in profit or loss.

The amendments are effective for annual reporting periods beginning on or after January 1, 2023. They are applied retrospectively to property and equipment available for use on or after the beginning of the earliest presentation period in which an entity first applies the amendments.



Amendemen PSAK 25: Kebijakan Akuntansi, Perubahan Estimasi Akuntansi, dan Kesalahan terkait Definisi Estimasi Akuntansi

Accounting Policies, Changes in Accounting Estimates, and Errors related to the Definition of Accounting Estimates

Amendemen tersebut memperkenalkan definisi 'estimasi akuntansi' dan mengklarifikasi perbedaan antara perubahan estimasi akuntansi dan perubahan kebijakan akuntansi dan koreksi kesalahan. Amendemen tersebut juga mengklarifikasi bagaimana entitas menggunakan teknik pengukuran dan input untuk mengembangkan estimasi akuntansi.

The amendment introduces the definition of accounting estimates and clarifies the difference between changes in accounting estimates and changes in accounting policies and correction of errors. The amendment also clarifies how entities use measurement techniques and inputs to develop accounting estimates.

Amendemen tersebut berlaku efektif pada tanggal 1 Januari 2023 dan berlaku untuk perubahan kebijakan akuntansi dan perubahan estimasi akuntansi yang terjadi pada atau setelah awal periode tersebut. Penerapan dini diperkenankan.

The amendments are effective on January 1, 2023, and apply to changes in accounting policies and changes in accounting estimates that occur on or after the beginning of that period. Early adoption is permitted.

Amendemen PSAK 46: Pajak Penghasilan tentang Pajak Tangguhan terkait Aset dan Liabilitas yang timbul dari Transaksi Tunggal

Amendment to PSAK 46: Income Taxes on Deferred Taxes related to Assets and Liabilities from Single Transactions

Amendemen ini mengusulkan agar entitas mengakui aset maupun liabilitas pajak tangguhan pada saat pengakuan awalnya sebagai contoh dari transaksi sewa, untuk mengeliminasi perbedaan praktik saat ini atas transaksi tersebut dan transaksi lain yang serupa.

The amendment proposes that an entity should recognize deferred tax assets and liabilities on initial recognition, e.g., in the case of a lease transaction, to eliminate differences in current practice on this and other similar transactions.

Amendemen tersebut berlaku efektif untuk periode pelaporan tahunan yang dimulai pada atau setelah 1 Januari 2023 dengan penerapan dini diperkenankan.

The amendments are effective for annual reporting periods beginning on or after January 1, 2023, with early adoption permitted.

Dampak Amendemen yang Berlaku Efektif Sejak 1 Januari 2023 terhadap Laporan Keuangan Tahunan untuk Tahun Buku 31 Desember 2023

Impact of Amendments Effective from January 1, 2023, on the Annual Financial Statements for the Fiscal Year Ended on December 31, 2023

Penerapan dari amendemen dan interpretasi di atas tidak menimbulkan perubahan substansial atas kebijakan akuntansi Perusahaan dan tidak memiliki dampak signifikan terhadap Laporan Keuangan pada tahun berjalan atau tahun sebelumnya.

Adopting the above amendments and interpretations did not result in substantial changes to the Company's accounting policies and had no significant impact on the Financial Statements in the current or prior year.

INFORMASI KELANGSUNGAN USAHA

INFORMATION ON BUSINESS CONTINUITY

HAL YANG BERPOTENSI BERPENGARUH SIGNIFIKAN TERHADAP KELANGSUNGAN USAHA

Perusahaan memaknai keberlanjutan sebagai upaya untuk memenuhi kebutuhan masa kini tanpa mengurangi kemampuan generasi masa depan untuk memenuhi kebutuhannya. Oleh karena itu, tanggung jawab terhadap keberlanjutan untuk kehidupan yang lebih baik menjadi kewajiban semua pihak secara bersama-sama. Keberlanjutan sesuai dengan konsep *Triple Bottom Line* atau *the 3P (Profit, Planet, and People)*, didukung oleh pemenuhan keseimbangan pada tiga aspek, yaitu ekonomi, lingkungan, dan sosial. Konsep ini telah mendorong pengelolaan Perusahaan tidak hanya menargetkan pertumbuhan ekonomi/laba, namun juga mempertimbangkan kesejahteraan sosial dan menjaga kualitas lingkungan dengan segala dampak yang ditimbulkan dari proses operasional Perusahaan.

Dalam pengelolaan usaha di berbagai lokasi, Perusahaan menyadari adanya potensi permasalahan sosial dan lingkungan. Potensi permasalahan tersebut telah kami antisipasi melalui pendekatan dengan konsep keuangan berkelanjutan yang mengedepankan keselarasan antara kepentingan ekonomi, sosial dan lingkungan hidup. Pendekatan tersebut bertujuan untuk menghadapi berbagai isu, terutama terkait persoalan sosial kemasyarakatan dan lingkungan di sekitar wilayah bisnis. Dalam merespon isu-isu tersebut, Perusahaan secara berkesinambungan menjalankan berbagai program Tanggung Jawab Sosial Perusahaan/*Corporate Social Responsibility (CSR)*.

Selain itu, Perusahaan juga dihadapkan pada risiko adanya tindakan dari Perusahaan yang berdampak negatif terhadap lingkungan, perubahan iklim dan kondisi tenaga kerja yang tidak baik. Untuk memitigasi risiko tersebut, Perusahaan senantiasa mengedepankan ESG di dalam setiap proyek yang akan dilakukan terutama yang berhubungan dengan lingkungan dan masyarakat sekitar.

MATTERS WITH THE POTENTIAL TO SIGNIFICANTLY AFFECT BUSINESS CONTINUITY

The Company defines sustainability as an effort to meet the needs of the present without compromising the ability of future generations to meet their needs. Therefore, the responsibility for sustainability for a better life is the obligation of all parties. Sustainability is in accordance with the Triple Bottom Line concept or the 3P (Profit, Planet, and People), supported by the fulfillment of balance in three aspects – economic, environmental, and social. The concept has encouraged the Company's management to target economic/profit growth, consider social welfare, and maintain environmental quality with all the impacts caused by the Company's operational processes.

In managing businesses in various locations, the Company realizes the potential for social and environmental problems. We have anticipated these potential problems through an approach with the concept of sustainable finance that prioritizes harmony between economic, social, and environmental interests. This approach deals with various issues, especially social and environmental problems around business areas. In responding to these issues, the Company continuously carries out various Corporate Social Responsibility (CSR) programs.

Apart from that, the Company is also faced with the risk of actions by the Company that have a negative impact on the environment, climate change and poor labor conditions. To mitigate this risk, the Company always prioritizes ESG in every project it undertakes, especially those related to the environment and surrounding communities.



ASSESSMENT MANAJEMEN ATAS HAL YANG BERPOTENSI BERPENGARUH SIGNIFIKAN TERHADAP KELANGSUNGAN USAHA

Kemampuan Perusahaan dalam menjaga keberlangsungan usaha sangat bergantung dari berbagai faktor baik ditinjau dari aspek keuangan maupun kapasitas internal ataupun kekuatan yang dimiliki serta juga mempertimbangkan faktor-faktor eksternal yang relevan. Dengan memperhatikan beberapa indikator utama yang dijadikan sebagai barometer dalam menilai keberlanjutan bisnis Perusahaan, pada tahun 2023, Manajemen berpendapat bahwa Perumda Pembangunan Sarana Jaya telah menunjukkan kinerja yang positif dalam mempertahankan stabilitas finansial, meningkatkan efisiensi operasional, dan memperkuat komitmen terhadap praktik bisnis yang berkelanjutan. Melalui inovasi teknologi, pengembangan hunian berkelanjutan, serta kolaborasi strategis dengan berbagai pihak, perusahaan mampu mengelola risiko dengan baik dan memanfaatkan peluang untuk pertumbuhan di masa depan. Manajemen yakin bahwa strategi-strategi yang diterapkan akan terus mendukung keberlanjutan usaha dan menciptakan nilai tambah bagi semua pemangku kepentingan.

ASUMSI YANG DIGUNAKAN DALAM MELAKUKAN ASSESSMENT

Terkait pengungkapan kinerja keuangan di dalam Laporan Tahunan 2023, Manajemen menyampaikan bahwa analisa mengenai performa keuangan Perusahaan mengacu pada Laporan Keuangan Tahunan Perusahaan untuk tahun buku yang berakhir pada 31 Desember 2023 yang disusun dengan asumsi bahwa Perusahaan akan terus beroperasi secara berkelanjutan. Asumsi kelangsungan usaha terdampak oleh risiko dan ketidakpastian, oleh karenanya ada kemungkinan bahwa perubahan keadaan yang merugikan dapat berdampak pada kelangsungan usaha Perusahaan.

MANAGEMENT ASSESSMENT OF MATTERS WITH THE POTENTIAL TO SIGNIFICANTLY AFFECT BUSINESS CONTINUITY

The Company's ability to maintain business continuity depends on various factors, both in terms of financial aspects and internal capacity or strength, as well as considering relevant external factors. By paying attention to several main indicators that serve as barometers in assessing the Company's business sustainability, in 2023, Management is of the opinion that Perumda Pembangunan Sarana Jaya has demonstrated positive performance in maintaining financial stability, increasing operational efficiency, and strengthening commitment to sustainable business practices. Through technological innovation, sustainable residential development, and strategic collaboration with various parties, the Company can manage risks well and take advantage of opportunities for future growth. Management is confident that the strategies implemented will continue to support business sustainability and create added value for all stakeholders.

ASSUMPTIONS USED IN THE ASSESSMENT

Regarding the disclosure of financial performance in the 2023 Annual Report, Management specified that the analysis of the Company's financial performance refers to the Company's Annual Financial Statement for the fiscal year ending on December 31, 2023, which was prepared with the assumption that the Company will continue to operate sustainably. The assumption of business continuity is affected by risk and uncertainty; therefore, there is a possibility that adverse changes in circumstances could impact the Company's business continuity.

05

Tata Kelola Perusahaan

Corporate Governance





GEDUNG SARANA JAYA

KOMITMEN PENERAPAN GCG

COMMITMENT TO GCG IMPLEMENTATION

Tata Kelola Perusahaan yang Baik (*Good Corporate Governance/GCG*) menjadi suatu aspek fundamental dalam pengelolaan bisnis Perusahaan. Lebih dari sekadar kewajiban, penerapan GCG dianggap sebagai kebutuhan esensial dan fondasi utama dalam menjalankan kegiatan usaha. Tujuan utamanya adalah menjaga transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan dan pengurusan perusahaan, terhadap semua pemangku kepentingan yang terlibat. Melalui praktik Tata Kelola Perusahaan yang Baik, Perusahaan menunjukkan komitmen penuh untuk menjalankan bisnis dengan bertanggung jawab, berintegritas, dan bersikap profesional demi kepentingan pemegang saham dan pemangku kepentingan lainnya.

Penerapan GCG pada seluruh aspek bisnis dan tingkatan organisasi dianggap sebagai upaya nyata dalam meningkatkan kinerja Perusahaan dan menciptakan nilai ekonomi yang berkelanjutan, terutama di tengah dinamika perubahan iklim usaha dan persaingan yang semakin ketat. Prinsip-prinsip penerapan GCG juga diharapkan dapat mendorong terciptanya persaingan yang sehat dan iklim usaha yang kondusif, menjadi landasan penting untuk pertumbuhan dan stabilitas ekonomi yang berkesinambungan.

Dalam konteks pembangunan berkelanjutan (*sustainability development*), GCG memegang peran kunci sebagai salah satu pilar utama yang diharapkan mampu membentuk fondasi iklim investasi yang sehat. Saat ini, prinsip-prinsip penerapan GCG terus berkembang seiring dengan perubahan lingkungan bisnis global. Hal ini mencakup sistem pengawasan dan pengendalian yang mendukung etika kerja, pengambilan keputusan yang bertanggung jawab, integritas dalam pelaporan keuangan, pengelolaan risiko yang layak, serta hubungan dengan pemangku kepentingan yang berlandaskan pada etika.

Good Corporate Governance (GCG) is a fundamental aspect of managing the Company's business. More than an obligation, GCG implementation is an essential requirement and the main foundation for carrying out business activities. The main objective is to maintain transparency and accountability in the company management regarding all stakeholders involved. Through Good Corporate Governance practices, the Company expresses its full commitment to engaging its business responsibly, with integrity, and professionally for the benefit of shareholders and other stakeholders.

The implementation of GCG in all business aspects and organizational levels is considered a tangible effort to improve the Company's performance and create sustainable economic value, especially amidst the changing business climate and increasingly fierce competition. It is also expected that the principles of GCG implementation can encourage the creation of healthy competition and a conducive business climate, becoming an important foundation for sustainable economic growth and stability.

In the context of sustainable development, GCG plays a key role as one of the main pillars expected to form the foundation of a healthy investment climate. Currently, the principles of GCG implementation continue to develop along with changes in the global business environment. This includes a monitoring and control system supporting work ethics, responsible decision-making, integrity in financial reporting, proper risk management, and ethics-based stakeholder engagement.

PRINSIP-PRINSIP GCG

GCG PRINCIPLES

Perusahaan dengan teguh menjunjung tinggi prinsip-prinsip GCG dan mengimplementasikannya secara konsisten dalam operasional Perusahaan. Informasi rinci diuraikan dalam tabel berikut:

The Company firmly upholds GCG principles and implements them consistently in its operations. Its detailed information is outlined in the following table:

Prinsip Dasar | Basic Principles



Prinsip Dasar Basic Principles	Penjelasan Explanation	Penerapan di Perusahaan Implementation in the Company
Keterbukaan Transparency	Keterbukaan dalam melaksanakan proses pengambilan keputusan dan keterbukaan dalam mengemukakan informasi material dan relevan mengenai Perusahaan. Transparency in the decision-making process and transparency in disclosing material and relevant information about the Company.	Perusahaan selalu menekankan prinsip keterbukaan dalam proses pengambilan keputusan dan memastikan transparansi yang konsisten dalam mengungkapkan informasi material yang relevan mengenai Perusahaan, dengan mematuhi kebijakan pengungkapan informasi rahasia Perusahaan. The Company always emphasizes the transparency principle in the decision-making process and ensures consistent transparency in disclosing relevant material information regarding the Company by complying with the Company's confidential information disclosure policy.
Akuntabilitas Accountability	Penyusunan struktur organisasi Perusahaan yang dapat memastikan terlaksananya profesionalisme dengan baik dan benar. Perusahaan telah membentuk rincian yang jelas mengenai tugas dan tanggung jawab masing-masing unit kerja dalam Perusahaan sehingga semua karyawan melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya sejalan dengan visi, misi, nilai dan strategi Perusahaan. Perusahaan menetapkan fungsi, struktur, sistem dan pertanggungjawaban Organ Perusahaan dengan jelas agar pengelolaan Perusahaan terlaksana secara efektif. Formulation of the Company's organizational structure that can ensure the implementation of proper and true professionalism. The Company has established clear details regarding the duties and responsibilities of each work unit within the Company so that all employees carry out their duties and responsibilities in line with the Company's vision, mission, values, and strategy. In addition, the Company clearly defines its Organs' functions, structures, systems, and responsibilities so that the Company management is carried out effectively.	Perusahaan telah menetapkan pembagian peran, fungsi, dan pelaksanaan pertanggungjawaban secara jelas untuk seluruh Organ Perusahaan. Langkah ini bertujuan agar pengelolaan kegiatan usaha sehari-hari dapat berjalan dengan efektif dan efisien dalam mencapai tujuan Perusahaan. The Company has clearly defined the division of roles, functions, and implementation of responsibilities for all Company Organs. This step aims to ensure that the management of daily business activities can run effectively and efficiently to achieve the Company's goals.

Prinsip Dasar Basic Principles	Penjelasan Explanation	Penerapan di Perusahaan Implementation in the Company
Pertanggungjawaban Responsibility	<p>Pengambilan keputusan dan tindakan-tindakan yang dilakukan dengan mematuhi hukum dan peraturan yang berlaku, serta pelaksanaan tanggung jawab sosial sebagai warga korporasi yang baik.</p> <p>Decision-making and actions are taken in compliance with applicable laws, regulations, and the implementation of social responsibility as a good corporate citizen.</p>	<p>Perusahaan memastikan kepatuhan dan kesesuaian antara pelaksanaan kegiatan operasional dan bisnis sehari-hari dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.</p> <p>The Company ensures compliance and conformity when implementing daily operational and business activities with applicable laws and regulations.</p>
Independensi Independence	<p>Pengelolaan Perusahaan yang dilakukan dengan mengedepankan prinsip Independensi, secara profesional tanpa benturan kepentingan dan pengaruh atau tekanan dari pihak mana pun yang tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan prinsip-prinsip korporasi yang sehat.</p> <p>Company management is carried out by prioritizing the Independence principle professionally, ensuring freedom from conflict of interest, influence, or pressure from any party, under applicable laws, regulations, and sound corporate principles.</p>	<p>Perusahaan menegaskan komitmennya dalam memastikan pengelolaan kegiatan usahanya dilaksanakan secara profesional dan independen. Selain itu, Perusahaan juga berkomitmen untuk mengelola dan mencegah potensi benturan kepentingan, dengan menjaga independensinya dari pengaruh atau tekanan pihak mana pun yang tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan.</p> <p>The Company emphasizes its commitment to ensuring that its business activities are managed professionally and independently. In addition, the Company is committed to managing and preventing potential conflicts of interest by maintaining its independence from any influence or pressure that contravenes statutory regulations.</p>
Kewajaran Fairness	<p>Keadilan dan kesetaraan di dalam memenuhi hak-hak para pemangku kepentingan yang timbul berdasarkan perjanjian dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.</p> <p>Justice and equality in fulfilling the rights of stakeholders based on agreements as well as applicable laws and regulations.</p>	<p>Perusahaan memastikan pemenuhan hak-hak seluruh pemangku kepentingan dengan memberikan perlakuan yang adil dan setara, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Hal ini mencerminkan komitmen Perusahaan untuk menjaga keadilan dan kesetaraan dalam memenuhi hak-hak para <i>stakeholder</i>.</p> <p>The Company ensures the fulfillment of all stakeholders' rights by providing fair and equal treatment following the provisions of applicable laws and regulations. It reflects the Company's commitment to maintaining justice and equality in fulfilling the rights of stakeholders.</p>

Selain itu, Perusahaan mengadopsi prinsip GCG yang merujuk pada Pedoman Umum Governansi Korporat Indonesia (PUG-KI) tahun 2021. Prinsip-prinsip dasar GCG mencakup hak-hak pemegang saham, pemangku kepentingan, serta aturan pokok terkait pengelolaan dan pengawasan implementasi GCG di Perusahaan.

Keempat pilar utama GCG, terdiri dari perilaku beretika, akuntabilitas, transparansi, dan keberlanjutan, yang menjadi fondasi bagi penerapan prinsip-prinsip GCG dan kebijakan turunannya di Perusahaan. Upaya penerapan keempat pilar ini diharapkan mampu menciptakan nilai jangka panjang bagi Perusahaan.

In addition, the Company adopts GCG principles, which refer to the 2021 General Guidelines for Indonesian Corporate Governance (PUG-KI). The basic GCG principles include the rights of shareholders and stakeholders, as well as basic rules regarding the management and supervision of GCG implementation in the Company.

The four main pillars of GCG, consisting of ethical behavior, accountability, transparency, and sustainability, are the foundation for implementing GCG principles and derivative policies in the Company. Efforts to implement the four pillars are expected to create long-term value for the Company.

Informasi lebih rinci tentang empat pilar prinsip GCG dan implementasinya di Perusahaan, diuraikan dalam tabel berikut:

More detailed information about the four pillars of GCG principles and their implementation in the Company is outlined in the following table:

Uraian Empat Pilar dalam Prinsip-Prinsip GCG Description of Four Pillars in GCG Principles	Implementasi di Perusahaan Implementation in the Company
<p style="text-align: center;">Prinsip: Perilaku Beretika Principle: Ethical Behavior</p> <p>Dalam menjalankan aktivitasnya, Perusahaan konsisten dalam menjunjung tinggi nilai-nilai kejujuran, menghargai kepentingan semua pihak, pemenuhan regulasi, serta pembangunan dan pemeliharaan nilai-nilai moral. Hal ini bertujuan agar setiap organ perusahaan beroperasi tanpa dominasi satu sama lain dan tidak dapat diintervensi oleh pihak eksternal. In carrying out its activities, the Company consistently upholds the values of honesty, respects the interests of all parties, fulfills regulations, and develops and maintains moral values. It aims to ensure that each corporate organ operates without dominating each other and cannot be intervened by external parties.</p>	<p>Implementasi prinsip Perilaku Beretika di Perusahaan salah satunya diwujudkan dengan penyusunan Pedoman Kode Etik. Selain itu, Perusahaan juga telah melaksanakan <i>Whistleblowing System</i>, sesuai dengan ketentuan regulasi yang berlaku, dan diperkuat dengan adanya kebijakan internal. One way of implementing the Ethical Behavior principle in the Company is by preparing the Code of Conduct Guidelines. Moreover, the Company has also implemented a Whistleblowing System per applicable regulatory provisions, strengthened by internal policies.</p>
<p style="text-align: center;">Prinsip: Akuntabilitas Principle: Accountability</p> <p>Perusahaan berupaya mempertanggungjawabkan kinerjanya secara transparan dan wajar, mengemban tanggung jawab untuk dikelola dengan benar dan terukur sesuai dengan kepentingan bisnisnya, dengan tetap mempertimbangkan kepentingan pemegang saham dan pemangku kepentingan lainnya. Akuntabilitas dianggap sebagai prasyarat esensial yang harus dipenuhi untuk mencapai kinerja yang berkelanjutan. The Company strives to be accountable for its performance transparently and fairly, taking responsibility for being managed properly and measurably following its business interests while considering the interests of shareholders and other stakeholders. Accountability is regarded as an essential prerequisite to achieving sustainable performance.</p>	<p>Implementasi Prinsip Akuntabilitas di Perusahaan salah satunya diwujudkan melalui komitmen tinggi Dewan Pengawas dan Direksi dalam mempertanggungjawabkan seluruh pelaksanaan tugas dan fungsinya kepada Pemegang Saham melalui Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS). One of the ways in which the Accountability Principle implementation in the Company is realized is through the high commitment of the Supervisory Board and Board of Directors to being accountable for all implementation of their duties and functions to Shareholders through the General Meeting of Shareholders (GMS).</p>
<p style="text-align: center;">Prinsip: Transparansi Principle: Transparency</p> <p>Perusahaan mengambil langkah-langkah untuk menjaga objektivitas dalam menjalankan bisnis dengan menyediakan informasi yang material dan relevan secara mudah diakses dan dipahami oleh pemangku kepentingan. Dalam inisiatif transparansi, Perusahaan tidak hanya mengungkapkan informasi yang diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan, tetapi juga hal-hal yang dianggap penting untuk mendukung pengambilan keputusan oleh pemegang saham dan pihak-pihak yang memiliki kepentingan lainnya. The Company takes steps to maintain objectivity in conducting business by providing material and relevant information that is easily accessible and understood by stakeholders. In transparency initiatives, the Company discloses information required by laws and regulations and matters deemed important to support decision-making by shareholders and other interested parties.</p>	<p>Implementasi prinsip transparansi di Perusahaan antara lain diwujudkan melalui ketersediaan informasi penting tentang Perusahaan, seperti Laporan Keuangan, Laporan Tahunan, Laporan Penilaian GCG, Laporan Harta Kekayaan bagi Direksi, Dewan Pengawas dan Pejabat Struktural, yang disampaikan oleh Perusahaan kepada Pemegang Saham, Regulator, dan pemangku kepentingan lainnya. The implementation of the transparency principle in the Company is realized, among other things, through the availability of important information about the Company, such as Financial Statements, Annual Reports, GCG Assessment Reports, Asset Reports for the Board of Directors, Supervisory Board, and Structural Officials, which the Company submits to Shareholders, Regulators, and other stakeholders.</p>
<p style="text-align: center;">Prinsip: Keberlanjutan Principle: Sustainability</p> <p>Dengan mematuhi peraturan perundang-undangan, Perusahaan menegaskan komitmennya untuk melaksanakan tanggung jawab sosial terhadap masyarakat dan lingkungan. Tujuannya adalah berkontribusi pada pembangunan berkelanjutan melalui kerja sama dengan semua pemangku kepentingan terkait. Upaya ini dirancang untuk meningkatkan kualitas hidup dengan cara yang sejalan dengan kepentingan bisnis dan agenda pembangunan berkelanjutan. By complying with statutory regulations, the Company confirms its commitment to social responsibility towards society and the environment. The aim is to contribute to sustainable development by cooperating with relevant stakeholders. These efforts are designed to improve the quality of life consistent with business interests and the sustainable development agenda.</p>	<p>Implementasi prinsip Keberlanjutan di Perusahaan, antara lain diwujudkan dengan komitmen tinggi Perusahaan dalam pelaksanaan program Tanggung Jawab Sosial Lingkungan (TJSL) dan penyusunan Laporan Keberlanjutan. The implementation of Sustainability principles in the Company, among other things, is realized by the Company's high commitment to implementing the Environmental Social Responsibility (TJSL) program and preparing Sustainability Reports.</p>

Pilar governansi mengalami adaptasi terhadap perkembangan ekonomi berkelanjutan dan integritas di tingkat global dengan menerapkan prinsip GCG yang meliputi ETAK (Etika, Transparansi, Akuntabilitas, dan Keberlanjutan), yang merupakan pengembangan dari prinsip GCG yang digunakan sebelumnya, yaitu TARIF (*Transparency, Accountability, Responsibility, Independency, Fairness*). Perubahan ini terjadi karena adanya tuntutan yang semakin kuat dari masyarakat dan pemerintah agar perusahaan menjalankan bisnis secara bertanggung jawab dan berkelanjutan. Namun, kenyataan tanggung jawab korporasi tidak bisa terlaksana tanpa didasari oleh prinsip-prinsip etika yang mendasar, seperti moral dan kejujuran.

The governance pillars are adapting to sustainable economic development and integrity at the global level by applying GCG principles, which include ETAK (Ethics, Transparency, Accountability, and Sustainability), which is a development of the GCG principles previously used, i.e., TARIF (*Transparency, Accountability, Responsibility, Independence, Fairness*). The change occurred because of increasingly strong demands from society and the government for companies to run their businesses responsibly and sustainably. However, the reality is that corporate responsibility cannot be carried out without being based on basic ethical principles, such as morals and honesty.

DASAR PENERAPAN TATA KELOLA PERUSAHAAN

BASIS OF CORPORATE GOVERNANCE IMPLEMENTATION

Penerapan GCG di Sarana Jaya dilakukan dengan mengikuti ketentuan undang-undang dan peraturan terkait. Beberapa di antaranya adalah:

1. Peraturan Pemerintah RI No. 54. Tahun 2017 tentang Badan Usaha Milik Daerah yang ditetapkan pada tanggal 27 Desember 2017;
2. Undang-Undang No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;
3. Peraturan Daerah No. 2 Tahun 1982 tentang Perusahaan Daerah Pembangunan Sarana Jaya Yang Diubah Dengan Peraturan No. 6 Tahun 1990;
4. Peraturan Daerah No. 11 Tahun 2018 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Daerah No. 2 Tahun 1982 Tentang Perusahaan Daerah Pembangunan Sarana Jaya;
5. Peraturan Gubernur Provinsi DKI Jakarta No. 92 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Perusahaan Daerah Pembangunan Sarana Jaya Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta yang ditetapkan di Jakarta pada tanggal 14 Oktober 2008;
6. Peraturan Gubernur Provinsi DKI Jakarta No. 50 Tahun 2019 tentang Pedoman Pengadaan Barang/ Jasa Badan Usaha Milik Daerah; dan
7. Peraturan Gubernur DKI Jakarta No. 131 Tahun 2019 tentang Pembinaan Badan Usaha Milik Daerah.

The GCG implementation in Sarana Jaya is carried out by following the provisions of relevant laws and regulations. Some of them are:

1. Regulation of the Indonesian Government No. 54 of 2017 on Region-Owned Enterprises stipulated on December 27, 2017;
2. Law No. 14 of 2008 on Public Information Disclosure;
3. Regional Regulation No. 2 of 1982 on Perusahaan Daerah Pembangunan Sarana Jaya Amended by Regulation No. 6 of 1990;
4. Regional Regulation No. 11 of 2018 on the Third Amendment to Regional Regulation No. 2 of 1982 on Perusahaan Daerah Pembangunan Sarana Jaya;
5. DKI Jakarta Provincial Governor Regulation No. 92 of 2008 on the Organization and Work Procedures of Perusahaan Daerah Pembangunan Sarana Jaya of DKI Jakarta Province, stipulated in Jakarta on October 14, 2008;
6. DKI Jakarta Provincial Governor Regulation No. 50 of 2019 on the Procurement Guidelines of Goods/ Services of Region-Owned Enterprises; and
7. DKI Jakarta Provincial Governor Regulation No. 131 of 2019 on the Development of Region-Owned Enterprises.

PERKEMBANGAN IMPLEMENTASI GCG DI SARANA JAYA

DEVELOPMENT OF GCG IMPLEMENTATION IN SARANA JAYA

Dalam upaya untuk meningkatkan kualitas penerapan GCG, Perusahaan telah mengembangkan *soft structure* GCG, seperti pedoman dan kebijakan GCG. Fungsi dari pedoman dan kebijakan ini adalah sebagai aturan pendukung yang mendukung pelaksanaan GCG. Tindakan ini mencerminkan komitmen yang kuat dari Organ GCG dan seluruh insan Sarana Jaya dalam memperkuat budaya kerja yang didasarkan pada prinsip-prinsip GCG.

Hingga akhir tahun 2023, Perusahaan telah berhasil menyusun beberapa pedoman, termasuk Pedoman Tata Kelola Perusahaan (*Code of GCG*), Piagam Komite Audit, Piagam Komite Pemantau Risiko, Pedoman Etika Perusahaan (*Code of Conduct*), serta Pedoman Tata Kerja Dewan Pengawas dan Direksi (*Board Manual*). Pedoman tersebut telah ditetapkan oleh Dewan Pengawas dan Direksi sejak 29 Desember 2020.

Sejak tahun 2021, Sarana Jaya telah menerapkan Standar Nasional Indonesia (SNI) ISO 37001:2016, yang merupakan standar dari Organisasi Internasional untuk Standardisasi (ISO), dalam hal penegakan GCG. Penerapan sistem ini bertujuan untuk membantu Perusahaan mencegah dan mendeteksi praktik penyuapan sesuai dengan standar yang berlaku di Indonesia, yaitu SNI ISO 37001:2016. Sebagaimana diatur dalam Keputusan Direksi No. 50 Tahun 2021 tentang Pedoman Sistem Pelaporan Pelanggaran (*Whistleblowing System*), Perusahaan juga telah menerapkan Sistem Pelaporan Pelanggaran atau *Whistleblowing System* (WBS). Langkah ini disertai dengan penerapan Pedoman Etika Perusahaan (*Code of Conduct*).

Perusahaan akan terus menerapkan GCG dengan mengikuti langkah-langkah dan prosedur yang diatur dalam Pedoman Tata Kelola Perusahaan. Berikut adalah proses dan tahapan yang akan dijalankan:

1. Sosialisasi

Melalui kegiatan sosialisasi, Perusahaan melakukan pendekatan terhadap pihak internal dan eksternal. Sosialisasi kepada pihak internal diarahkan pada pembentukan pemahaman mengenai GCG, yang bertujuan menciptakan kesadaran dan kebutuhan

To improve the quality of GCG implementation, the Company has developed a GCG soft structure, such as GCG guidelines and policies. The function of these guidelines and policies is to support rules that support GCG implementation. It reflects the strong commitment of the GCG Organs and all Sarana Jaya personnel to strengthening a work culture based on GCG principles.

By the end of 2023, the Company has succeeded in preparing several guidelines, including the Corporate Governance Guidelines (*Code of GCG*), Audit Committee Charter, Risk Monitoring Committee Charter, Corporate Ethical Guidelines (*Code of Conduct*), and Guidelines for the Work Procedures of the Supervisory Board and Board of Directors (*Board Manual*). These guidelines have been established by the Supervisory Board and Board of Directors since December 29, 2020.

Since 2021, Sarana Jaya has implemented the Indonesian National Standard (SNI) ISO 37001:2016, a standard from the International Organization for Standardization (ISO), for GCG enforcement. Implementing this system aims to help the Company prevent and detect bribery practices following the standards applicable in Indonesia, i.e., SNI ISO 37001:2016. As regulated in the Board of Directors Decree No. 50 of 2021 on the Guidelines for the Whistleblowing System, the Company has also implemented a Whistleblowing System (WBS). The step is accompanied by implementing the Company's Code of Conduct.

The Company will continue implementing GCG by following the steps and procedures stipulated in the Corporate Governance Guidelines. The following are the processes and stages that will be carried out:

1. Dissemination

Through outreach activities, the Company approaches internal and external parties. Dissemination to internal parties is directed at forming a GCG understanding, which aims to create awareness of the need to implement GCG consistently. On the other hand,

untuk menerapkan GCG secara konsisten. Sebaliknya, sosialisasi kepada pihak eksternal difokuskan untuk memberikan pemahaman tentang praktik kerja yang dijalankan oleh Perusahaan, yang telah disesuaikan dengan prinsip-prinsip GCG.

2. Implementasi

Untuk mendukung pelaksanaan *Good Corporate Governance* (GCG), setiap unit kerja secara berkala menyusun laporan mengenai implementasinya. Laporan ini tidak hanya mencerminkan gambaran umum mengenai penerapan GCG, tetapi juga terkait dengan sistem *reward* dan *punishment* yang telah dikembangkan oleh Perusahaan. Sistem tersebut diterapkan baik pada tingkat unit kerja maupun pada tingkat individu Insan Sarana Jaya. Dengan pendekatan ini, Perusahaan mendorong semua anggota Insan Sarana Jaya untuk mematuhi Pedoman GCG.

3. Pengukuran

Pengukuran terhadap penerapan GCG dilaksanakan dalam bentuk:

- a. Penilaian (*assessment*), yaitu program untuk mengidentifikasi pelaksanaan Tata Kelola Perusahaan yang Baik di Perusahaan melalui pengukuran pelaksanaan dan penerapan Tata Kelola Perusahaan yang Baik di Perusahaan.
- b. Evaluasi (*review*), yaitu program untuk mendeskripsikan tindak lanjut pelaksanaan dan penerapan Tata Kelola Perusahaan yang Baik di Perusahaan yang dilakukan pada tahun berikutnya setelah penilaian.

4. Pemantauan

- a. Salah satu anggota Direksi ditunjuk untuk bertanggung jawab memantau dan menjaga penerapan GCG dapat dilaksanakan dengan sebaik-baiknya;
- b. Hasil penilaian (*Assessment*) dan evaluasi dilaporkan dalam Laporan Tahunan; dan
- c. Satuan Pengawasan Intern memastikan ketaatan terhadap kebijakan GCG, melalui penilaian secara berkala terhadap pelaksanaan penerapan GCG baik secara mandiri atau oleh pihak luar yang independen dan secara berkala melaporkannya kepada Direksi dan Dewan Pengawas.

dissemination to external parties is focused on providing an understanding of the Company's work practices, which have been adapted to GCG principles.

2. Implementation

To support Good Corporate Governance (GCG) implementation, every work unit periodically prepares reports regarding its implementation. The report reflects a general overview of GCG implementation as well as the related reward and punishment system developed by the Company. The system is implemented at the work unit and individual level of Sarana Jaya personnel. With this approach, the Company encourages all Sarana Jaya Personnel to comply with the GCG Guidelines.

3. Measurement

Measurement of GCG implementation is carried out via:

- a. Assessment, i.e., a program to identify Good Corporate Governance implementation in the Company by measuring the Good Corporate Governance implementation in the Company.
- b. Review), i.e., a program to describe the follow-up to the Good Corporate Governance implementation in the Company carried out in the following year after the assessment.

4. Monitoring

- a. One member of the Board of Directors is appointed to be responsible for monitoring and ensuring that GCG is implemented in the best possible way;
- b. The assessment and evaluation results are reported in the Annual Report; and
- c. The Internal Monitoring Unit ensures compliance with GCG policies through regular assessments of GCG implementation independently or by independent external parties and periodically reporting it to the Board of Directors and Supervisory Board.

ASESMEN GCG

GCG ASSESSMENT

Perusahaan telah melaksanakan asesmen GCG untuk penerapan di periode tahun buku 2023 dengan metode pengukuran mencakup 6 (enam) aspek pokok, 43 indikator dan 153 parameter pengujian (sub-indikator). Metode pengukuran asesmen GCG merujuk pada ketentuan yang diatur dalam Keputusan Sekretaris Kementerian BUMN No. SK-16/S.MBU/2012. Asesmen GCG dilakukan oleh BPKP.

Berdasarkan laporan No. PE.05.03./LGCG-247/PW/09/4.2/2023 tanggal 14 Juli 2023, Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Perwakilan Provinsi DKI Jakarta menyampaikan hasil asesmen penerapan GCG pada tahun 2022 Perusahaan memperoleh predikat **“Baik”** dengan skor 78,005. Tabel berikut ini menjelaskan lebih rinci capaian skor untuk masing-masing aspek *governance*:

The Company has carried out a GCG assessment for implementation in the 2023 fiscal year with a measurement method covering six main aspects, 43 indicators, and 153 test parameters (sub-indicators). The GCG assessment measurement method refers to the provisions regulated by the Secretary to the SOE Ministry’s Decree No. SK-16/S.MBU/2012. GCG assessment is carried out by BPKP.

Per report No. PE.05.03./LGCG-247/PW/09/4.2/2023 dated July 14, 2023, the DKI Jakarta Provincial Representative of the Development Finance Comptroller (BPKP) presented the results of the GCG assessment for the 2022 implementation. The Company received a **“Good”** predicate with a score of 78.005. The following table explains the score achieved for every governance aspect in detail:

No.	Aspek Pengujian Testing Aspects	Bobot Weight	Capaian Perusahaan Achievement	Persentase (%) Percentage (%)
I	Komitmen Commitment	15,00	12,078	80,520
II	Kebijakan GCG GCG Policies	10,00	8,982	89,820
III	Partisipan GCG GCG Participants	65,00	52,362	80,557
IV	Pengungkapan Informasi Information Disclosure	5,00	4,583	91,660
V	Lainnya Others	5,00	0,000	0,000
Total	Total	100,00	78,005	78,005

Rekomendasi Upaya Perbaikan dan Tindak Lanjut

Recommendation for Improvement and Follow-Up Efforts

No.	Rekomendasi Upaya Perbaikan Improvement Recommendation	Tindak Lanjut Follow-up
I	Aspek Komitmen Commitment Aspects	
1.	<p>Direksi menginstruksikan Sekretaris Perusahaan dan unit yang bertugas untuk mengakomodir jika ada Direksi dan Dewan Pengawas yang baru diangkat untuk segera meminta lembar pakta integritas kepada Badan Pembinaan Badan Usaha Milik Daerah (BP BUMD). The Board of Directors instructs the Corporate Secretary and the unit in charge to accommodate the newly appointed Board of Directors and Supervisory Board members to immediately request an integrity pact sheet from the Region-Owned Enterprise Development Agency (BP BUMD).</p>	<ul style="list-style-type: none"> Menyusun prosedur permintaan dan distribusi lembar pakta integritas dari BP BUMD bagi Direksi dan Dewan Pengawas yang baru diangkat. Develop procedures for requesting and distributing integrity pact sheets from BP BUMD for the newly appointed Board of Directors and Supervisory Board. Menyiapkan sistem dokumentasi untuk memastikan setiap lembar pakta integritas tersimpan dan terdistribusi dengan baik. Prepare a documentation system to store and distribute each integrity pact sheet properly.
2.	<p>Direksi bersama dengan Dewan Pengawas, Pejabat Perusahaan terkait menandatangani pernyataan bahwa pelaksanaan kegiatan telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan praktik tata kelola perusahaan yang baik atas transaksi penting yang ada. The Board of Directors, Supervisory Board, and relevant Company Officials sign a statement that implementing activities follows statutory regulations and good corporate governance practices for existing important transactions.</p>	<p>Menyusun pernyataan resmi yang harus ditandatangani oleh Direksi, Dewan Pengawas, dan Pejabat Perusahaan untuk memastikan kepatuhan terhadap peraturan dan praktik GCG. Prepare official statements that must be signed by the Board of Directors, Supervisory Board, and Company Officials to ensure compliance with GCG regulations and practices.</p>
3.	<p>Direksi menginstruksikan kepada seluruh karyawan untuk menandatangani surat pernyataan kepatuhan terhadap Pedoman Perilaku. The Board of Directors instructs all employees to sign a statement of compliance with the Code of Conduct.</p>	<p>Menginstruksikan seluruh karyawan untuk menandatangani surat pernyataan kepatuhan terhadap Pedoman Perilaku, serta melakukan sosialisasi untuk memastikan pemahaman yang menyeluruh. Instruct all employees to sign a statement of compliance with the Code of Conduct and carry out dissemination to ensure comprehensive understanding.</p>
4.	<p>Direksi menginstruksikan Tim yang berfungsi menangani ketaatan aturan GCG untuk menyusun dan menyampaikan laporan kegiatan secara berkala kepada Direksi. The Board of Directors instructs the Team, whose function is to handle compliance with GCG regulations, to compile and submit regular activity reports to the Board of Directors.</p>	<ul style="list-style-type: none"> Menugaskan Tim GCG untuk menyusun laporan berkala yang mencakup kegiatan, pencapaian, dan temuan terkait kepatuhan GCG. Assign the GCG Team to prepare periodic reports covering activities, achievements, and findings related to GCG compliance. Menentukan jadwal pelaporan yang jelas (misalnya triwulanan) dan memastikan laporan disampaikan tepat waktu kepada Direksi. Determine a clear reporting schedule (e.g., quarterly) and ensure reports are submitted on time to the Board of Directors.
5.	<p>Melakukan sosialisasi Pedoman <i>corporate governance</i> dan Pedoman perilaku kepada seluruh jajaran Perusahaan. Disseminate corporate governance guidelines and code of conduct to all Company levels.</p>	<ul style="list-style-type: none"> Seminar dan <i>workshop</i> untuk seluruh karyawan mengenai Pedoman <i>Corporate Governance</i> dan Pedoman Perilaku. Seminars and workshops regarding Corporate Governance Guidelines and Code of Conduct for all employees. Penyebaran materi sosialisasi melalui email, intranet perusahaan, dan media komunikasi internal lainnya. Dissemination of materials via e-mail, company intranet, and other internal communication media.
6.	<p>Menyusun dan melaksanakan program pemberian penghargaan kepada karyawan terbaik, bukan hanya memberikan penghargaan atas pengabdian masa kerja. Develop and implement an award program for the best employees, not just giving awards for years of service.</p>	<ul style="list-style-type: none"> Mengembangkan kriteria penghargaan karyawan terbaik berdasarkan kinerja, inovasi, dan kontribusi terhadap Perusahaan. Develop criteria for awarding the best employees based on performance, innovation, and contribution to the Company. Mengadakan acara penghargaan tahunan untuk memberikan apresiasi kepada karyawan terbaik. Hold annual award events to appreciate the best employees.
7.	<p>Direksi dan Divisi terkait agar menindaklanjuti temuan dan permasalahan hukum yang belum terselesaikan oleh Perusahaan berupa perkara hukum hotel Novotel. The Board of Directors and related divisions should follow up on findings and legal issues that the Company has not resolved, i.e., the Novotel Hotel legal case.</p>	<p>Menetapkan <i>timeline</i> dan langkah-langkah konkret untuk menyelesaikan perkara hukum hotel Novotel, dengan melibatkan konsultan hukum jika diperlukan. Determine the timeline and concrete steps to resolve the Novotel Hotel legal case, involving legal consultants if necessary.</p>

No.	Rekomendasi Upaya Perbaikan Improvement Recommendation	Tindak Lanjut Follow-up
8.	Direksi agar menyampaikan laporan periodik manajemen secara tepat waktu yaitu 90 hari kerja setelah tahun buku di tutup. The Board of Directors must submit periodic management reports on time, i.e., 90 working days after the fiscal year concludes.	Mengoptimalkan koordinasi antar divisi terkait untuk memastikan semua data dan informasi yang dibutuhkan tersedia tepat waktu. Optimize coordination between related divisions to ensure all required data and information are available on time.
II Aspek Kebijakan GCG GCG Policies Aspect		
Direksi agar menyusun kebijakan umum pengelolaan hubungan induk dengan anak perusahaan yang mengatur : The Board of Directors must formulate a general policy for managing parent-subsidiary relationships that regulates:		
1.	Kebijakan Pemberhentian Direksi dan Dewan Pengawas anak perusahaan; Policy on Dismissal of Board of Directors and Supervisory Board in subsidiaries;	1. Prosedur Evaluasi: Menetapkan kriteria evaluasi kinerja bagi Direksi dan Dewan Pengawas anak perusahaan secara berkala. Evaluation Procedure: Regularly establish performance evaluation criteria for the Board of Directors and Supervisory Board in subsidiaries. 2. Proses Pemberhentian: Menentukan proses formal pemberhentian yang melibatkan penilaian kinerja, konsultasi dengan pemegang saham, dan dokumentasi keputusan. Termination Process: Determine the formal termination process involving performance assessment, shareholder consultation, and resolution documentation. 3. Transparansi: Menjamin transparansi dalam komunikasi mengenai alasan dan proses pemberhentian kepada semua pemangku kepentingan. Transparency: Ensure transparency in communication on the reasons and process for dismissal to all stakeholders.
2.	Kebijakan Keuangan; Financial Policy;	1. Mengatur mekanisme pendanaan, termasuk alokasi dana untuk proyek strategis, pinjaman antar perusahaan, dan investasi induk perusahaan di anak perusahaan. Manage funding mechanisms, including allocation of funds for strategic projects, inter-company loans, and parent-company investment in subsidiaries. 2. Standarisasi pelaporan keuangan untuk memastikan konsistensi dan akurasi dalam penyusunan laporan keuangan konsolidasi. Standardization of financial reporting to ensure consistency and accuracy in the preparation of consolidated financial statements.
3.	Kebijakan SDM; HR Policy;	1. Rekrutmen dan Seleksi: Menetapkan standar dan prosedur rekrutmen untuk memastikan kualitas dan kesesuaian SDM dengan kebutuhan perusahaan. Recruitment and Selection: Establish recruitment standards and procedures to ensure the quality and suitability of human resources to Company needs. 2. Pelatihan dan Pengembangan: Mengembangkan program pelatihan dan pengembangan karier untuk meningkatkan kompetensi karyawan di anak perusahaan. Training and Development: Develop training and career development programs to increase employee competency in subsidiaries. 3. Kompensasi dan Tunjangan Sesuai Kemampuan Perusahaan: Menetapkan kebijakan kompensasi yang adil dan kompetitif untuk menjaga motivasi dan retensi karyawan. Compensation and Benefits Per to Company Capabilities: Establish fair and competitive compensation policies to maintain employee motivation and retention.
4.	Kebijakan lainnya (GCG, CSR). Other policies (GCG, CSR).	Kebijakan GCG GCG Policy Standar Kepatuhan: Menetapkan standar kepatuhan yang harus dipenuhi oleh anak perusahaan dalam menjalankan praktik tata kelola perusahaan yang baik. Compliance Standards: Establish compliance standards that subsidiaries must meet when implementing good corporate governance practices. Audit dan Pengawasan: Mengimplementasikan mekanisme audit dan pengawasan untuk memastikan penerapan GCG secara konsisten. Audit and Supervision: Implement audit and supervision mechanisms to ensure consistent implementation of GCG.

No.	Rekomendasi Upaya Perbaikan Improvement Recommendation	Tindak Lanjut Follow-up
		<p>Kebijakan CSR CSR Policy Program CSR: Merancang program CSR yang sejalan dengan nilai-nilai perusahaan dan memberikan manfaat bagi masyarakat sekitar. CSR Program: Design a CSR program that aligns with corporate values and benefits the surrounding community.</p> <p>Pelaporan CSR: Menyusun laporan kegiatan CSR secara berkala untuk memonitor dampak dan pencapaian program yang dijalankan. CSR Reporting: Prepare regular CSR activity reports to monitor the impact and achievements of the implemented programs.</p>
<p>III Aspek Partisipan GCG GCG Participants Aspect</p>		
<p>A. KPM/Kuasa Pemilik Modal KPM/Capital Owner's Proxy</p>		
<p>1.</p>	<p>Gubernur DKI Jakarta selaku Kepala Daerah yang mewakili Pemerintah Daerah dalam Kepemilikan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan atau sebagai Kuasa Pemilik Modal (KPM) memberikan pengesahan/persetujuan terhadap Rencana Bisnis Berbasis ESG Perumda Pembangunan Sarana Jaya Tahun 2023-2027 secara tepat waktu. The DKI Jakarta Governor, as the Regional Head Representing the Regional Government in Ownership of Separated Regional Assets or the Capital Owner's Proxy (KPM), provides timely ratification/approval to Perumda Pembangunan Sarana Jaya's 2023-2027 ESG-Based Business Plan.</p>	<ul style="list-style-type: none"> Membentuk tim khusus untuk menyusun Rencana Bisnis Berbasis ESG dengan detail yang mencakup strategi, tujuan, dan indikator kinerja ESG. Form a special team to prepare an ESG-Based Business Plan with details that include ESG strategies, goals, and performance indicators. Mengajukan dokumen rencana bisnis untuk pengesahan oleh Gubernur DKI Jakarta sesuai jadwal yang telah ditetapkan, memastikan semua dokumen dan informasi yang diperlukan disiapkan dengan lengkap dan tepat waktu. Submit business plan documents for approval by DKI Jakarta Governor per the predetermined schedule, ensuring all required documents and information are prepared completely and on time.
<p>2.</p>	<p>Melakukan pengesahan RKA Perusahaan selambatnya 1 bulan sebelum tahun berjalan. Ratify the Company's RKA no later than one month before the current year.</p>	<ul style="list-style-type: none"> Menyusun RKA Perusahaan dengan melibatkan seluruh divisi terkait untuk memastikan akurasi dan kelengkapan anggaran dan rencana kerja. Prepare the Company's RKA by involving all relevant divisions to ensure the accuracy and completeness of the budget and work plan. Menyusun <i>timeline</i> penyusunan dan pengesahan RKA, memastikan pengajuan kepada pihak terkait dilakukan paling lambat 2 bulan sebelum tahun berjalan. Prepare a timeline for RKA preparation and ratification, ensuring that submissions to related parties are made no later than two months before the current year. Melakukan koordinasi intensif dengan Kuasa Pemilik Modal (KPM) untuk memastikan pengesahan RKA tepat waktu, termasuk memberikan klarifikasi dan penjelasan yang diperlukan selama proses pengesahan. Carry out intensive coordination with the Capital Owner's Proxy (KPM) to ensure timely RKA ratification, including providing clarifications and explanations required during the ratification process.
<p>3.</p>	<p>Menetapkan sistem penilaian kinerja Direksi secara individu dan melaksanakan penilaiannya. Establish a performance assessment system for individual Board of Directors and carry out the assessment.</p>	<ul style="list-style-type: none"> Mengembangkan sistem penilaian kinerja individu bagi Direksi yang berdasarkan KPI (<i>Key Performance Indicators</i>) yang jelas dan terukur, mencakup aspek keuangan, operasional, ESG, dan kepemimpinan. Develop an individual performance assessment system for the Board of Directors based on clear and measurable KPIs (Key Performance Indicators), covering financial, operational, ESG, and leadership aspects. Menetapkan jadwal penilaian berkala (misalnya, setiap kuartal atau semester) untuk memastikan kinerja Direksi dievaluasi secara konsisten dan objektif. Establish a periodic assessment schedule (e.g., every quarter or semester) to evaluate the Board of Directors' performance consistently and objectively. <i>Feedback</i> dan Pengembangan: Menyediakan umpan balik konstruktif berdasarkan hasil penilaian dan mengidentifikasi area pengembangan bagi setiap Direksi untuk meningkatkan kinerja mereka. Feedback and Development: Provide constructive feedback based on assessment results and identify development areas for every Director to improve their performance.

No.	Rekomendasi Upaya Perbaikan Improvement Recommendation	Tindak Lanjut Follow-up
B. Dewan Pengawas Supervisory Board		
1.	<p>Menyusun program pelatihan Dewan Pengawas yang memuat mengenai jenis materi pelatihan dan dimuat dalam Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) Dewan Pengawas serta melaksanakan pelatihan sesuai yang direncanakan.</p> <p>Prepare a training program for the Supervisory Board that includes the types of training materials in the Work Plan and Budget (RKA) of the Supervisory Board and carry out training as planned.</p>	<p>Menyusun program pelatihan Dewan Pengawas dan melaksanakannya, yaitu pelatihan laporan keuangan dan manajemen risiko.</p> <p>Develop and implement a Supervisory Board training program, i.e., training on financial statements and risk management.</p>
2.	<p>Menyusun RKA Dewan Pengawas dengan memuat sasaran/target yang akan dicapai di tahun yang bersangkutan yang disesuaikan dengan kondisi terkini perusahaan.</p> <p>Prepare RKA for the Supervisory Board by including the goals/targets to be achieved in the year concerned, adjusted to the Company's current conditions.</p>	<p>Menyusun dan melaksanakan RKA Dewan Pengawas sesuai dengan perkembangan Perusahaan yang disampaikan kepada Direksi untuk dimasukkan dalam RKA Perusahaan.</p> <p>Prepare and implement the Supervisory Board's RKA following the Company's developments, which are submitted to the Board of Directors for inclusion in the RKA.</p>
3.	<p>Melakukan pemantauan telaahan secara lebih dalam terhadap perubahan lingkungan bisnis yang memiliki dampak yang signifikan.</p> <p>Monitor deeper studies of changes in the business environment that have a significant impact.</p>	<p>Melakukan pemantauan telaahan serta menyampaikan saran-saran kepada Direksi dalam rapat bulanan Dewan Pengawas bersama Direksi.</p> <p>Monitor studies and convey suggestions to the Board of Directors at monthly Supervisory Board and Board of Directors meetings.</p>
4.	<p>Melakukan telaahan/arahan atas rancangan RKA Perusahaan yang disampaikan oleh Direksi dengan memadai sebelum memberikan persetujuan atas Rancangan RKA Perusahaan tersebut.</p> <p>Conduct an adequate review/directive of the RKA draft submitted by the Board of Directors before approving it.</p>	<p>Melakukan telaahan atas rancangan RKA yang disampaikan Direksi dan menyampaikan saran-saran serta menandatangani RKA bersama-sama dengan Direksi.</p> <p>Review the RKA draft submitted by the Board of Directors, provide suggestions, and sign the RKA with the Board of Directors.</p>
5.	<p>Melakukan telaahan atas Sistem Pengendalian Intern Perusahaan secara menyeluruh meliputi Lingkungan pengendalian; penilaian risiko; aktivitas pengendalian; informasi dan komunikasi serta pemantauan.</p> <p>Conduct a comprehensive review of the Company's Internal Control System, including the control environment, risk assessment, control activities, information and communication, as well as monitoring.</p>	<p>Melakukan telaahan atas sistem pengendalian intern Perusahaan, penilaian risiko, aktivitas pengendalian, informasi dan komunikasi serta pemantauan yang dilakukan melalui rapat antara Komite Dewan Pengawas dengan Divisi Perusahaan, <i>sharing session</i> terkait manajemen risiko dan tata kelola perusahaan, serta rapat bulanan Dewan Pengawas bersama Direksi.</p> <p>Conduct reviews of the Company's internal control system, risk assessments, control activities, information and communication, as well as monitoring through meetings between the Supervisory Board Committee and Company Divisions, sharing sessions related to risk management and corporate governance, as well as monthly Supervisory Board with the Board of Directors meetings.</p>
6.	<p>Memberikan arahan atau telaah dengan memadai (relevan dan tepat waktu) dan terdokumentasikan terkait: 1. sistem teknologi informasi yang digunakan perusahaan 2. kebijakan dan pelaksanaan pengembangan karier 3. kebijakan mutu dan pelayanan serta pelaksanaan kebijakan tersebut.</p> <p>Provide adequate (relevant and timely) and documented direction or review regarding: 1. information technology systems used by the company, 2. career development policies and implementation, 3. quality and service policies and implementation of these policies.</p>	<p>Melakukan telaahan dan saran yang disampaikan dalam rapat antara Komite Dewan Pengawas dengan Divisi Perusahaan serta rapat bulanan Dewan Pengawas bersama Direksi.</p> <p>Conduct studies and suggestions submitted at meetings between the Supervisory Board Committee and Company Division as well as monthly Supervisory Board and Board of Directors meetings.</p>
7.	<p>Membuat pengawasan dan membuat laporan triwulanan kinerja Direksi dalam pengelolaan Perusahaan.</p> <p>Supervise and produce quarterly reports on the Board of Directors' performance in managing the Company.</p>	<p>Melaksanakan tugas pengawasan berdasarkan RKA Dewan Pengawas terhadap pengelolaan Perusahaan oleh Direksi dan membuat Laporan Triwulanan yang disampaikan kepada BP BUMD DKI Jakarta.</p> <p>Carry out supervisory duties based on the RKA of the Supervisory Board on the Company management by the Board of Directors and prepare Quarterly Reports, which are submitted to DKI Jakarta BP BUMD.</p>

No.	Rekomendasi Upaya Perbaikan Improvement Recommendation	Tindak Lanjut Follow-up
8.	Melakukan telaahan atas efektivitas pelaksanaan Audit Internal. Review the effectiveness of the Internal Audit implementation.	Melaksanakan telaahan atas efektivitas pelaksanaan audit internal yang dilaksanakan dalam rapat antara Komite Dewan Pengawas dengan Divisi Perusahaan, rapat bulanan Dewan Pengawas bersama Direksi, dan menyampaikan surat tanggapan atas surat yang disampaikan oleh Satuan Pengawas Internal kepada Dewan Pengawas. Review the effectiveness of internal audit implementation in meetings between the Supervisory Board Committee and the Company Division, monthly Supervisory Board and Board of Directors meetings, and submit a response to the letter submitted by the Internal Audit Unit to the Supervisory Board.
9.	Menilai kinerja Direksi berdasarkan kriteria yang telah ditetapkan secara kolegal per triwulan dan melaporkannya kepada BPBUMD. Assess the Board of Directors' performance based on criteria determined collegially every quarter and report it to BPBUMD.	Menilai Kinerja Direksi berdasarkan KPI Perusahaan dalam Laporan Triwulanan yang disampaikan kepada BP BUMD DKI Jakarta. Assess the Board of Directors' Performance based on the Company's KPI in the Quarterly Report submitted to DKI Jakarta BP BUMD.
10.	Memasukkan kegiatan pemantauan GCG dalam Rencana Kerja Tahunan Dewan Pengawas. Include GCG monitoring activities in the Supervisory Board's Annual Work Plan.	Memasukkan kegiatan pemantauan GCG dalam Rencana Kerja Tahunan Dewan Pengawas, menyampaikan saran sehubungan dengan penerapan GCG dalam rapat antara Komite Dewan Pengawas dengan Divisi Perusahaan dan rapat bulanan Dewan Pengawas bersama Direksi, serta <i>sharing session</i> . Include GCG monitoring activities in the Supervisory Board's Annual Work Plan, providing suggestions regarding GCG implementation in meetings between the Supervisory Board Committee and Company Divisions, monthly Supervisory Board and Board of Directors meetings, as well as sharing sessions.
11.	Melakukan pengukuran dan penilaian secara memadai terhadap kinerja Dewan Pengawas (<i>self assessment</i>). Carry out adequate measurements and assessments of the performance of the Supervisory Board (<i>self-assessment</i>).	Melakukan pengukuran dan penilaian (<i>self assessment</i>) Kinerja Dewan Pengawas dengan cara mengevaluasi melalui pencapaian KPI Komite Dewan Pengawas serta Dewan Pengawas. Carry out measurements and self-assessments of the Supervisory Board's performance by evaluating the KPI achievements of the Supervisory Board Committee and the Supervisory Board.
12.	Memutakhirkan <i>Board Manual</i> dan menambahkan muatan mekanisme persetujuan (validasi) terhadap isi risalah rapat kepada peserta rapat. Update the Board Manual and add validation mechanisms for the contents of meeting minutes to meeting participants.	Meminta pemutakhiran <i>Board Manual</i> dan pedoman lainnya yang ada di Perusahaan yang dilaksanakan dalam rapat antara Komite Dewan Pengawas dengan Divisi Perusahaan dan rapat bulanan Dewan Pengawas bersama Direksi. Request updates to the Board Manual and other Company guidelines in meetings between the Supervisory Board Committee and Company Divisions and monthly Supervisory and Board of Directors meetings.
13.	Melaksanakan rapat sesuai ketentuan yaitu paling sedikit satu kali tiap bulan dan membuat surat kuasa apabila peserta rapat tidak bisa hadir. Carry out meetings according to the provisions, i.e., at least once monthly, and make a power of attorney if meeting participants cannot attend.	Melaksanakan rapat paling sedikit satu kali tiap bulan sesuai dengan rencana kerja Dewan Pengawas, berupa rapat internal Komite Dewan Pengawas, rapat Komite Dewan Pengawas dengan Dewan Pengawas dan rapat bulanan Dewan Pengawas bersama Direksi. Carry out meetings at least once per month following the work plan of the Supervisory Board, in the form of internal Supervisory Board Committee meetings, Supervisory Board Committee and Supervisory Board meetings, and monthly Supervisory Board and Board of Directors meetings.
14.	Memberikan bahan-bahan rapat kepada peserta minimal 3 hari sebelum rapat dilaksanakan dan mendokumentasikan hasil rapat agar lebih memadai. Provide meeting materials to participants at least three days before the meeting is held and document the meeting results to make them more adequate.	Meminta kepada Divisi Perusahaan dan Direksi untuk memberikan bahan-bahan rapat kepada Komite Dewan Pengawas dan Depan Pengawas 3 hari sebelum rapat dilaksanakan. Request the Company Division and Board of Directors to provide meeting materials to the Supervisory Board and Supervisory Board Committees three days before the meeting.
15.	Menginstruksikan Sekretaris Dewan Pengawas untuk mencantumkan monitoring tindak lanjut hasil keputusan sebelumnya dalam risalah rapat. Instruct the Secretary to the Supervisory Board to include follow-up monitoring of the results of previous resolutions in meeting minutes.	Menginstruksikan Sekretaris Dewan Pengawas untuk memasukkan tindak lanjut keputusan atau perkembangan rapat bulanan Dewan Pengawas bersama Direksi dalam agenda rapat bulanan yang akan dilaksanakan, serta membuat risalah rapat dalam setiap rapat-rapat yang dilaksanakan. Instruct the Secretary to the Supervisory Board to include follow-up resolutions or developments at the monthly meetings of the Supervisory Board and the Board of Directors in the monthly meeting agenda, as well as prepare minutes of meetings for each meeting.



No.	Rekomendasi Upaya Perbaikan Improvement Recommendation	Tindak Lanjut Follow-up
C.	Komite Dewan Pengawas Supervisory Board Committee	
1.	Melaporkan kepada Pemilik Modal (Gubernur Provinsi DKI Jakarta u.p. Kepala BP BUMD Pemerintah Provinsi DKI Jakarta) atas pembentukan Komite Audit Dewan Pengawas. Report to the Capital Owner (DKI Jakarta Governor u.p. DKI Jakarta Provincial Government BP BUMD Head) on establishing the Audit Committee of the Supervisory Board.	Melaporkan secara langsung, setiap perubahan anggota Komite Audit kepada BP BUMD, sebagai bagian dari upaya menjaga akuntabilitas Komite Audit Dewan Pengawas. Report every change in Audit Committee members to BP BUMD directly as part of efforts to maintain accountability of the Audit Committee of the Supervisory Board.
2.	Menyusun PKPT Komite Audit terpisah dari PKPT Dewan Pengawas dan memuat telaahan Efektivitas pelaksanaan efektivitas SPI, Efektivitas sistem pengendalian manajemen dan memberikan rekomendasi penyempurnaan sistem pengendalian manajemen beserta pelaksanaannya, prosedur <i>review</i> yang memadai terhadap segala informasi yang dikeluarkan oleh Perusahaan. Prepare a PKPT Audit Committee separate from the Supervisory Board PKPT and include a review of the effectiveness of the implementation of SPI effectiveness, the effectiveness of the management control system and provide recommendations for improving the management control system and its implementation, adequate review procedures for all information released by the Company.	Melakukan <i>review</i> penyusunan dan pelaksanaan Program Kerja Pengawasan Tahunan (PKPT) yang disusun oleh SPI. Review the preparation and implementation of the Annual Supervision Work Program (PKPT) prepared by SPI.
3.	Melaksanakan rapat sesuai dengan yang telah ditetapkan dalam Piagam/ <i>Charter</i> dan membuat risalah rapat dalam setiap pertemuan di mana memuat evaluasi hasil rapat sebelumnya dan <i>dissenting opinion</i> (bila ada). Carry out meetings following what has been stipulated in the Charter and make minutes of meetings at each meeting, which includes an evaluation of the results of the previous meeting and dissenting opinions (if any).	Menerapkan mekanisme rapat yang baku antara lain mencakup penentuan waktu secara berkala, agenda rapat yang disepakati, dan notulen rapat yang didistribusikan kepada seluruh peserta rapat sesuai waktu yang disepakati serta monitoring tindak lanjut hasil rapat. Implement standard meeting mechanisms, including, among other things, determining regular times, agreed meeting agendas, meeting minutes distributed to all meeting participants according to the agreed time, and monitoring follow-up to meeting results.
4.	Komite Audit melaksanakan telaahan terhadap TOR eksternal Auditor untuk tahun ke depannya. The Audit Committee will carry out a review of the external auditor's TOR for next year.	Melakukan <i>review</i> sesuai waktu yang telah ditentukan ToR atas rencana penunjukan Auditor eksternal. Memastikan penunjukan auditor eksternal yang independen, kredibel dan akuntabel. Conduct a review according to the time determined by the ToR on the plan to appoint an external auditor. Ensure the appointment of an independent, credible, and accountable external auditor.
5.	Komite Audit melaksanakan penilaian terhadap efektivitas sistem pengendalian internal. The Audit Committee assesses the effectiveness of the internal control system.	Melakukan evaluasi terhadap keandalan sistem pengendalian internal Perusahaan guna memberikan masukan dan saran perbaikan untuk meningkatkan efektivitas sistem pengendalian internal yang mencakup antara lain; lingkungan pengendalian internal yang dilaksanakan dengan penuh disiplin dan terstruktur, pengkajian terhadap pengelolaan risiko serta aktivitas pengendalian berupa tindakan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Evaluate the reliability of the Company's internal control system to provide improvement input and suggestions to increase the effectiveness of the internal control system, which includes an internal control environment that is implemented in a disciplined and structured manner, assessing risk management and controlling activities in the form of actions per applicable regulations.
6.	Komite Audit melaksanakan penelaahan atas rencana kerja SPI, menilai efektivitas pelaksanaan SPI. The Audit Committee reviews the SPI work plan, assessing the effectiveness of SPI implementation.	Melalui rapat koordinasi berkala antara Komite Audit dan SPI dengan mengkaji tindak lanjut atas pelaksanaan program kerja pengawasan tahunan dan hasil temuan yang telah dibahas pada rapat-rapat terdahulu. Through regular coordination meetings between the Audit Committee and SPI by reviewing the follow-up to the implementation of the annual supervisory work program and the results of findings discussed at previous meetings.

No.	Rekomendasi Upaya Perbaikan Improvement Recommendation	Tindak Lanjut Follow-up
7.	Membuat laporan atas penugasan yang telah diberikan oleh Dewan Pengawas. Report the assignments given by the Supervisory Board.	Menyampaikan laporan secara berkala atas pelaksanaan pengawasan dan pengendalian Perusahaan kepada Dewan Pengawas. Submit regular reports on the implementation of supervision and control of the Company to the Supervisory Board.
8.	Menyusun laporan triwulanan dengan memuat perbandingan realisasi kegiatan dengan program tahunan. Prepare quarterly reports containing comparisons of actual activities with the annual program.	Memastikan seluruh data dan informasi andal dan akurat serta disampaikan sesuai dengan tenggat waktu yang ditetapkan. Ensure all data and information are reliable, accurate, and submitted according to the specified deadlines.
D. Direksi Board of Directors		
1.	Memperbaharui <i>Board Manual</i> dan menambah muatan program pengenalan Direksi. Program pengenalan minimal memuat: pelaksanaan prinsip GCG, gambaran tentang BUMD, pendelegasian wewenang, sistem dan kebijakan pengendalian internal, tugas dan tanggung jawab Direksi. Update the Board Manual and add the Board of Directors induction program. The induction program should at least include the implementation of GCG principles, BUMD description, delegation of authority, internal control systems and policies, as well as duties and responsibilities of the Board of Directors.	<ul style="list-style-type: none"> • Melakukan pembaharuan pada <i>Board Manual</i> untuk memasukkan program pengenalan Direksi yang komprehensif. Update the Board Manual to include a comprehensive Board of Directors' induction program. • Menyusun materi pengenalan yang mencakup pelaksanaan prinsip GCG, gambaran umum tentang BUMD, pendelegasian wewenang, sistem pengendalian internal, dan tugas serta tanggung jawab Direksi. Prepare induction material that includes implementation of GCG principles, general BUMD description, delegation of authority, internal control system, as well as duties and responsibilities of the Board of Directors. • Mengadakan sesi orientasi bagi Direksi baru untuk memastikan pemahaman yang mendalam tentang peran dan tanggung jawabnya. Hold orientation sessions for new Directors to ensure a deep understanding of their roles and responsibilities.
2.	Menyusun program pelatihan dengan tema dan anggaran khusus yang akan dilaksanakan Direksi selama 1 tahun dalam RKA Perusahaan. Prepare a training program with a particular theme and budget that will be implemented by the Board of Directors for a year in the RKA.	<ul style="list-style-type: none"> • Melakukan analisis kebutuhan pelatihan untuk Direksi berdasarkan kebutuhan strategis Perusahaan. Analyze training needs for the Board of Directors based on the Company's strategic necessity. • Menyusun program pelatihan dengan tema khusus seperti kepemimpinan, manajemen risiko, keuangan, dan teknologi. Arrange training programs with particular themes such as leadership, risk management, finance, and technology. • Mengalokasikan anggaran khusus untuk pelatihan Direksi dalam RKA Perusahaan dan memastikan pelatihan dilaksanakan sesuai rencana. Allocate a particular budget for Directors' training in the RKA and ensure that the training is carried out according to plan.
3.	Melaksanakan kebijakan pelatihan Direksi dalam rangka meningkatkan kompetensi anggota Direksi sesuai kebutuhan. Implement the Board of Directors' training policy to increase the competence of the Board of Directors members according to needs.	<ul style="list-style-type: none"> • Melaksanakan program pelatihan yang telah disusun, memastikan setiap anggota Direksi mengikuti pelatihan yang relevan dengan kebutuhan. Implement the prepared training program, ensuring that every Board of Directors member takes part in training relevant to their needs. • Melakukan evaluasi terhadap efektivitas pelatihan untuk memastikan peningkatan kompetensi Direksi. Evaluate the effectiveness of the training to ensure increased competency of the Board of Directors.
4.	Melaksanakan Rapat dengan Dewan Pengawas diwakili oleh Komite Nominasi dan Remunerasi terkait suksesi manajemen sesuai ketentuan yang berlaku dan menuangkannya dalam notulen rapat. Conduct meetings with the Supervisory Board represented by the Nomination and Remuneration Committee on management succession, following applicable regulations and including them in meeting minutes.	<ul style="list-style-type: none"> • Menetapkan jadwal rapat berkala dengan Dewan Pengawas yang diwakili oleh Komite Nominasi dan Remunerasi. Establish a regular meeting schedule with the Supervisory Board represented by the Nomination and Remuneration Committee. • Membahas suksesi manajemen secara mendetail dalam rapat, termasuk identifikasi calon pengganti potensial dan rencana pengembangannya. Discuss management succession in detail in meetings, including identification of potential replacement candidates and development plans. • Mendokumentasikan hasil rapat dalam notulen yang lengkap dan terperinci. Document meeting results in complete and detailed minutes.
5.	Melakukan pengujian sistem pengendalian intern tingkat entitas. Conduct entity-level internal control system testing.	<ul style="list-style-type: none"> • Melakukan evaluasi menyeluruh terhadap sistem pengendalian intern pada tingkat entitas. Conduct a comprehensive evaluation of the internal control system at the entity level. • Menguji efektivitas pengendalian intern melalui audit internal dan eksternal. Test the effectiveness of internal control through internal and external audits. • Menyusun laporan hasil pengujian dan merekomendasikan perbaikan yang diperlukan. Prepare test results reports and recommend necessary improvements.

No.	Rekomendasi Upaya Perbaikan Improvement Recommendation	Tindak Lanjut Follow-up
6.	<p>Memperbaharui dan menambah muatan pada Piagam Pengawasan Intern (<i>Internal Audit Charter</i>) yaitu: Update and add content to the Internal Audit Charter, namely:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) Ketentuan yang berlaku (Peraturan OJK, Peraturan Gubernur dan peraturan pelaksanaannya lainnya); Applicable provisions (OJK Regulations, Governor Regulations, and other implementing regulations); 2) Mempertimbangkan Standar Profesional Audit Intern yang dibuat oleh SPI dan/atau Konsorsium Organisasi Profesi Audit Intern atau <i>International Professional Practices Framework of Internal Auditing</i>. Consider the Professional Standards for Internal Audit created by SPI and/or the International Professional Practices Framework of Internal Auditing. 	<ul style="list-style-type: none"> • Memperbaharui <i>Internal Audit Charter</i> untuk mencakup ketentuan terbaru yang berlaku, termasuk peraturan OJK dan Peraturan Gubernur. Update the Internal Audit Charter to cover the latest applicable provisions, including OJK and Governor Regulations. • Mengintegrasikan standar profesional audit intern yang dibuat oleh SPI dan organisasi profesi audit internasional dalam piagam. Integrate the charter's internal audit professional standards created by SPI and international audit professional organizations. • Melakukan sosialisasi terhadap piagam yang telah diperbaharui kepada seluruh tim audit internal. Disseminate the updated charter to the internal audit team.
7.	<p>Mensosialisasikan kebijakan IT <i>Master Plan</i> kepada seluruh jajaran perusahaan dan memastikan tingkat pemahamannya mempermudah penerapan sistem ke depannya. Disseminate the IT Master Plan policy to all company levels and ensure the level of understanding makes it easier to implement the system in the future.</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Mengadakan sesi sosialisasi dan edukasi kepada seluruh jajaran perusahaan mengenai IT <i>Master Plan</i>. Hold dissemination and education sessions for all company levels regarding the IT Master Plan. • Memantau penerapan IT <i>Master Plan</i> untuk memastikan pemahaman dan kepatuhan yang menyeluruh. Monitor the implementation of the IT Master Plan to ensure comprehensive understanding and compliance.
8.	<p>Melaporkan pelaksanaan sistem Teknologi Informasi kepada Dewan Pengawas. Report the implementation of the Information Technology system to the Supervisory Board.</p>	<p>Telah dilakukan pembahasan bersama dengan Dewan Pengawas tanggal 9 Agustus 2023. Joint discussions were held with the Supervisory Board on August 9, 2023.</p>
9.	<p>Memerintahkan kepada Divisi/Departemen terkait untuk melakukan pengadaan barang dan jasa sesuai ketentuan berlaku. Order the relevant Divisions/Departments to procure goods and services following the applicable regulations.</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Menyusun panduan lengkap mengenai prosedur pengadaan barang dan jasa yang sesuai dengan peraturan yang berlaku, termasuk peraturan pemerintah dan kebijakan internal. Develop complete guidelines for goods and services procurement procedures per applicable regulations, including government and internal policies. • Mengadakan pelatihan dan sosialisasi kepada staf terkait untuk memastikan pemahaman dan kepatuhan terhadap prosedur pengadaan. Conduct training and dissemination to relevant staff to ensure understanding and compliance with procurement procedures. • Melakukan pengawasan dan audit berkala terhadap proses pengadaan untuk memastikan kepatuhan dan transparansi. Conduct regular supervision and audits of the procurement process to ensure compliance and transparency.
10.	<p>Menetapkan dan melaksanakan penilaian KPI Divisi dan KPI Individu. Determine and carry out Division KPI and Individual KPI assessments.</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Menyusun <i>Key Performance Indicators</i> (KPI) yang jelas dan terukur untuk setiap Divisi dan individu berdasarkan tujuan strategis Perusahaan. Develop clear and measurable Key Performance Indicators (KPI) for each Division and individual based on the Company's strategic objectives. • Mengkomunikasikan KPI yang telah ditetapkan kepada seluruh Divisi dan individu untuk memastikan pemahaman yang sama. Communicate the set KPIs to all divisions and individuals to ensure they have the same understanding. • Melakukan penilaian berkala terhadap pencapaian KPI, baik pada level Divisi maupun individu. Conduct regular assessments of KPI achievements at the Division and individual level. • Memberikan <i>feedback</i> yang konstruktif berdasarkan hasil penilaian KPI dan menyusun rencana pengembangan untuk meningkatkan kinerja. Provide constructive feedback based on KPI assessment results and develop development plans to improve performance.
11.	<p>Menyusun dan mengesahkan Kebijakan Sistem manajemen mutu dan Keselamatan, Kesehatan Kerja lingkungan (K3L). Develop and ratify quality management system policies as well as environmental safety and occupational health (OHSE).</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Menyusun kebijakan Sistem Manajemen Mutu dan K3L yang mencakup standar operasional, prosedur keselamatan, kesehatan kerja, dan perlindungan lingkungan. Develop Quality Management System and OHSE policies that cover operational standards, safety procedures, occupational health, and environmental protection.

No.	Rekomendasi Upaya Perbaikan Improvement Recommendation	Tindak Lanjut Follow-up
		<ul style="list-style-type: none"> Melakukan konsultasi dengan semua pemangku kepentingan internal untuk memastikan kebijakan yang disusun sesuai dengan kebutuhan dan regulasi yang berlaku. Consult with all internal stakeholders to ensure policies are prepared per the applicable needs and regulations.
12.	<p>Melakukan evaluasi terhadap pemasok berdasarkan pencapaian <i>quality, cost delivery and service</i>. Evaluate suppliers based on quality, cost delivery, and service achievements.</p>	<p>Penilaian Kinerja Penyedia oleh <i>User</i>. Provider Performance Assessment by Users.</p>
13.	<p>Menambahkan muatan kegiatan pelaksanaan tindak lanjut hasil survei kepuasan vendor dalam uraian tugas Unit terkait dan melaksanakannya. Add the follow-up activities to the vendor satisfaction survey results in the relevant Unit's job description and carry it out.</p>	<p>Melakukan penyesuaian atas poin realisasi muatan kegiatan pelaksanaan pada Lembar Penilaian Kinerja Penyedia oleh <i>User</i>. Adjust the realization points for the implementation activity on the Provider Performance Assessment Sheet by the User.</p>
14.	<p>Menyusun kebijakan mengenai hak-hak dan kewajiban kreditur yang diformalkan minimal memuat: Develop a formalized policy regarding the rights and obligations of creditors that includes at least the following:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) Perencanaan kredit; Credit planning; 2) Penerimaan (kualifikasi dari kreditur); Acceptance (creditors qualification); 3) Penggunaan sesuai dengan peruntukannya; Use according to its intended purpose; 4) Pembayaran kredit tepat waktu. Timely credit payments. 	<ul style="list-style-type: none"> Menetapkan prosedur dan persyaratan yang jelas dalam perencanaan kredit untuk memastikan proses yang transparan dan akuntabel. Establish clear procedures and requirements in credit planning to ensure a transparent and accountable process. Memastikan bahwa dana yang diberikan digunakan sesuai dengan tujuan yang telah disepakati untuk mengurangi risiko penyalahgunaan. Ensure that the funds provided are used according to the agreed-upon purposes to reduce the risk of misuse. Memastikan kreditur membayar kredit tepat waktu untuk menjaga kesehatan keuangan perusahaan dan mengurangi risiko gagal bayar. Ensure creditors pay credit on time to maintain the company's financial soundness and reduce the risk of default.
15.	<p>Meningkatkan tindak lanjut hasil pemeriksaan auditor eksternal. Improve follow-up to external auditor audit results.</p>	<ul style="list-style-type: none"> Memperkuat koordinasi dengan auditor eksternal untuk memastikan pemahaman yang jelas mengenai temuan dan rekomendasi. Strengthen coordination with external auditors to ensure a clear understanding of findings and recommendations. Membentuk tim khusus yang bertanggung jawab untuk menindaklanjuti hasil pemeriksaan auditor eksternal. Form a special team to follow up on the external auditor's examination results. Meningkatkan kompetensi dan kesadaran karyawan terkait pentingnya tindak lanjut hasil audit eksternal, melalui sosialisasi dan pelatihan rutin. Increase employee competency and awareness of the importance of following up on external audit results through regular dissemination and training. Mengembangkan sistem pelaporan dan pemantauan progres yang efisien untuk memastikan temuan audit ditindaklanjuti. Develop an efficient reporting and progress monitoring system to ensure audit findings are followed up.
16.	<p>Memutakhirkan SOP yang sudah tidak relevan. Update SOPs that are no longer relevant.</p>	<ul style="list-style-type: none"> Melakukan sosialisasi menyeluruh tentang perubahan dan pembaruan SOP kepada seluruh Satuan/Divisi di lingkungan Perusahaan. Conduct comprehensive dissemination regarding changes and updates to SOPs for all Units/Divisions within the Company. Melakukan evaluasi berkala (misalnya setiap enam bulan) untuk menilai efektivitas SOP baru dan identifikasi area yang memerlukan penyesuaian lebih lanjut. Conduct periodic evaluations (e.g., every six months) to assess the effectiveness of new SOPs and identify areas that require further adjustments.
17.	<p>Menerapkan kebijakan/SOP secara konsisten. Consistently implement policies/SOPs.</p>	<ul style="list-style-type: none"> Melakukan sosialisasi rutin mengenai pentingnya kebijakan dan SOP. Conduct regular dissemination regarding the importance of policies and SOPs. Melakukan audit internal secara berkala untuk memastikan bahwa kebijakan dan SOP diterapkan dengan konsisten. Conduct regular internal audits to ensure that policies and SOPs are implemented consistently. Membuat laporan kepatuhan secara periodik untuk menilai tingkat penerapan dan mengidentifikasi area yang memerlukan perbaikan. Create periodic compliance reports to assess the level of implementation and identify areas requiring improvement.

No.	Rekomendasi Upaya Perbaikan Improvement Recommendation	Tindak Lanjut Follow-up
18.	<p>Memperbaharui <i>Board Manual</i> dan menambah muatan pedoman/tata tertib Rapat yang minimal mengatur: Update the Board Manual and add to the Meeting guidelines/rules, which at least regulate:</p> <p>1) Etika rapat dan penyusunan risalah rapat, evaluasi tindak lanjut hasil rapat sebelumnya, serta pembahasan atas arahan/usulan dan/atau keputusan Direksi; Meeting ethics and preparation of meeting minutes, evaluation of follow-up to the results of previous meetings, as well as discussion of Board of Directors directives/proposals and/or resolutions;</p> <p>2) Mekanisme persetujuan (validasi) terhadap isi risalah rapat kepada peserta rapat; Mechanism for validating the contents of meeting minutes for meeting participants;</p> <p>3) Jangka waktu penyampaian keberatan atas risalah rapat maksimal 14 hari setelah pengiriman risalah. The maximum period for submitting objections to the meeting minutes is 14 days after sending the minutes.</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Melakukan pembaharuan pada <i>Board Manual</i> terhadap Rapat Dewan Pengawas dan Direksi. Update the Board Manual for Supervisory Board and Directors Meetings. • Melakukan penyesuaian ketentuan rapat pada Pedoman Rapat Perusahaan, baik dari sisi Etika Rapat, Risalah Rapat (Notulen), dan Jangka Waktu pembuatan hingga pengiriman kepada Divisi/Instansi terkait. Adjust meeting provisions in the Company Meeting Guidelines regarding Meeting Ethics, Minutes of Meetings (Minutes), and the period for preparation and delivery to the relevant Divisions/Agencies.
E. Satuan Pengawas Intern		
Internal Audit Unit		
Direksi mendorong SPI untuk: The Board of Directors encourages SPI to:		
1.	<p>Menyusun Program Kerja Pengawasan Tahunan SPI dengan menambah kegiatan konsultasi seperti sosialisasi, bimbingan teknis serta pelaksanaannya; Prepare the Annual SPI Supervision Work Program by adding consultation activities such as dissemination, technical guidance, and implementation;</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Mengembangkan program kerja pengawasan tahunan yang terstruktur dan komprehensif, mencakup kegiatan pengawasan dan konsultansi. Develop a structured and comprehensive annual supervisory work program, including supervision and consultancy activities. • Mengatur prioritas kegiatan pengawasan berdasarkan tingkat risiko dan dampak terhadap Perusahaan. Set priorities for supervisory activities based on the level of risk and impact on the Company. • Mengadakan sesi sosialisasi secara rutin untuk menjelaskan kebijakan dan prosedur yang berlaku, termasuk perubahan terbaru. Hold regular dissemination sessions to explain applicable policies and procedures, including recent changes. • Menyusun rencana konsultasi tahunan yang terintegrasi dengan program pengawasan tahunan, mencakup topik-topik penting dan jadwal kegiatan. Prepare an annual consultation plan integrated with the yearly supervision program, covering important topics and activity schedules. • Menyediakan pelatihan berkelanjutan bagi Tim SPI dalam bidang audit, konsultasi, dan komunikasi efektif. Provide ongoing training for the SPI Team in audit, consultation, and effective communication.
2.	<p>Menyampaikan Laporan kegiatan SPI kepada Dewan Pengawas/Komite Submit SPI activity reports to the Supervisory Board/Committee</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Melakukan pelaporan secara berkala (Triwulan) mengenai Kegiatan SPI yang tertuang pada Laporan Kinerja Perusahaan, baik mengenai program kerja dan permohonan dukungan. Conduct regular (quarterly) reporting regarding SPI activities in the Company Performance Report regarding work programs and requests for support. • Memperkuat mekanisme pengawasan internalnya dan memastikan kepatuhan terhadap prinsip-prinsip GCG. Strengthen its internal monitoring mechanisms and ensure compliance with GCG principles.
3.	<p>Melakukan pengujian sistem pengendalian tingkat aktivitas dan tingkat entitas; Carry out control system testing at activity and entity level;</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Memastikan pengujian sistem pengendalian terfokus pada poin-poin pengendalian yang paling kritis dan berisiko tinggi. Ensure control system testing is focused on the most critical and high-risk control points. • Mengembangkan rencana pengujian yang komprehensif dan terstruktur untuk memastikan semua aspek pengendalian tercakup. Develop comprehensive and structured test plans to cover all control aspects.

No.	Rekomendasi Upaya Perbaikan Improvement Recommendation	Tindak Lanjut Follow-up
4.	Memantau dan menindaklanjuti temuan dan saran. Monitor and follow up on findings and suggestions.	<ul style="list-style-type: none"> Melakukan pengujian secara sistematis dan teliti terhadap sistem pengendalian tingkat aktivitas dan tingkat entitas. Carry out systematic and thorough testing of activity and entity-level control systems. Mengevaluasi hasil pengujian untuk mengidentifikasi kelemahan dalam sistem pengendalian dan merumuskan rekomendasi perbaikan. Evaluate test results to identify control system weaknesses and formulate improvement recommendations. <ul style="list-style-type: none"> Menyampaikan secara rutin temuan dan saran kepada Direksi, Dewan Pengawas, atau Komite Audit dalam sesi informasi yang terjadwal dan/atau tertulis. Routinely convey findings and suggestions to the Board of Directors, Supervisory Board, or Audit Committee in scheduled and/or written information sessions. Memastikan semua departemen terlibat dan mendapatkan informasi terkini mengenai temuan dan saran yang relevan dengan tanggung jawab masing-masing. Ensure all departments are involved and receive the latest information regarding findings and suggestions relevant to their respective responsibilities. Melakukan prioritas tindak lanjut terhadap temuan dan saran yang memiliki dampak terbesar atau risiko tertinggi terhadap Perusahaan. Prioritize follow-up on findings and suggestions with the greatest impact or highest risk to the Company. Melakukan pemantauan berkala terhadap progres tindak lanjut dan menyampaikan laporan berkala kepada pihak yang berwenang. Regularly monitor follow-up progress and submit periodic reports to the competent authorities.
F.	Sekretaris Perusahaan Corporate Secretary	
	Direksi menginstruksikan Sekretaris Perusahaan untuk: The Board of Directors instructs the Corporate Secretary to:	
1.	Menyusun dan mengadministrasikan Risalah Rapat Gabungan Direksi dengan Dewan Pengawas serta menghadiri Rapat Gabungan tersebut. Prepare and administer the Minutes of Joint Meetings of the Board of Directors with the Supervisory Board and attend the Joint Meetings.	Sudah dilakukan pembahasan dan koordinasi pada Tim Sekretaris Perusahaan untuk melakukan notulensi pada rapat gabungan Dewan Pengawas dan Direksi. The Corporate Secretary Team has carried out discussions and coordination to take minutes at joint meetings of the Supervisory Board and Board of Directors.
2.	Menyusun Laporan Triwulanan Pelaksanaan Tugas Sekretaris Perusahaan secara tepat waktu dan memuat penjelasan pelaksanaan tugas yang dilakukan oleh unit kerja (departemen) di bawahnya. Prepare a timely Quarterly Report on the Implementation of the Corporate Secretary's Duties and include an explanation of the implementation of the duties carried out by the work units (departments) under him.	Sudah menyerahkan Laporan Triwulan kepada Direksi. Submitted Quarterly Reports to the Board of Directors.
IV.	Aspek Pengungkapan Informasi Information Disclosure Aspect	
	Tidak terdapat hal-hal yang memerlukan penanganan segera. There are no matters that require immediate treatment.	
V.	Aspek Lainnya Other Aspects	
	Belum dapat dilakukan penilaian karena capaian skor GCG secara keseluruhan belum mencapai 85,00. An assessment cannot be completed because the overall GCG score has not reached 85.00.	

STRUKTUR DAN MEKANISME TATA KELOLA PERUSAHAAN

CORPORATE GOVERNANCE STRUCTURE AND MECHANISM

Penerapan GCG di Perusahaan dijalankan dengan mengacu pada peraturan perundang-undangan yang berlaku dan praktik terbaik dalam industri properti. Dalam upaya mencapai tujuan ini, Perusahaan telah merancang kerangka penerapan GCG yang secara umum dapat dibagi menjadi tiga bagian, yakni:

- 1. Governance Structure:**
Struktur tata kelola yang terdiri dari organ utama dan organ pendukung.
- 2. Governance Process:**
Proses dan mekanisme kerja dari organ tata kelola.
- 3. Governance Outcome:**
Hasil dari penerapan tata kelola dengan tujuan akhir mencapai “*Corporate citizenship*”.

Sebagaimana telah diatur dalam Pedoman Tata Kelola Perusahaan, struktur GCG Sarana Jaya terdiri dari:

- 1. Organ Utama, yaitu:**
 - a. Kuasa Pemilik Modal (KPM),
 - b. Dewan Pengawas, dan
 - c. Direksi.
- 2. Organ Pendukung Dewan Pengawas, yaitu:**
 - a. Komite Audit,
 - b. Komite Remunerasi dan Nominasi,
 - c. Komite Pemantau Risiko, dan
 - d. Sekretariat Dewan Pengawas
- 3. Organ Pendukung Direksi:**
 - a. Sekretaris Perusahaan
 - b. Satuan Pengawas Intern (SPI), dan
 - c. Organ pendukung lainnya yang terdapat dalam struktur organisasi Perusahaan.

Dalam pelaksanaan tugas, fungsi, dan tanggung jawab untuk kepentingan Perusahaan, semua organ GCG Sarana Jaya menjalankan fungsi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, termasuk Peraturan Daerah sebagai Akta Pendirian dan Anggaran Dasar Sarana Jaya, serta berbagai ketentuan lainnya yang relevan.

GCG implementation in the Company refers to applicable laws and regulations and best practices in the property industry. To achieve this goal, the Company has designed a GCG implementation framework which can generally be divided into three parts, namely:

- 1. Governance Structure:**
A governance structure consisting of main organs and supporting organs.
- 2. Governance Process:**
Processes and working mechanisms of governance organs.
- 3. Governance Outcomes:**
The results of implementing governance with the ultimate goal of achieving “*corporate citizenship*.”

As regulated in the Corporate Governance Guidelines, Sarana Jaya’s GCG structure consists of:

- 1. Main Organs, namely:**
 - a. Capital Owner’s Proxy (KPM),
 - b. Supervisory Board, and
 - c. Board of Directors.
- 2. Supporting Organs of the Supervisory Board, namely:**
 - a. Audit Committee,
 - b. Remuneration and Nomination Committee,
 - c. Risk Monitoring Committee, and
 - d. Supervisory Board Secretariat
- 3. Supporting Organs of the Board of Directors:**
 - a. Corporate Secretary
 - b. Internal Audit Unit (SPI), and
 - c. Other supporting organs in the Company’s organizational structure.

In carrying out duties, functions, and responsibilities for the Company, all Sarana Jaya GCG organs carry out functions under the provisions of applicable laws and regulations, including Regional Regulations as the Deed of Establishment and Articles of Association of Sarana Jaya, as well as various other relevant provisions.

KPM

KPM

KPM atau Kepala Daerah yang Mewakili Pemerintah Daerah dalam Kepemilikan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan pada Perusahaan Umum Daerah adalah organ Perusahaan Umum Daerah yang memegang kekuasaan tertinggi dan memegang segala kewenangan yang tidak diserahkan kepada Direksi atau Dewan Pengawas. Untuk Sarana Jaya, yang merupakan Perusahaan Umum Daerah dimiliki oleh Pemerintah Provinsi DKI Jakarta, posisi KPM dipegang langsung oleh Gubernur Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.

HAK KPM

Hak KPM sebagaimana telah ditetapkan dalam Peraturan Daerah pembentukan Perumda Sarana Jaya dan Pedoman Tata Kelola Perusahaan adalah sebagai berikut:

1. Hak untuk menghadiri dan memberikan persetujuan Rencana Kerja Anggaran Perusahaan maupun Rencana Bisnis beserta perubahannya;
2. Hak untuk mengambil keputusan tertinggi;
3. Hak untuk memperoleh informasi secara tepat waktu, terukur, dan teratur mengenai Perusahaan;
4. Hak untuk menerima pembagian dari keuntungan dalam bentuk dividen; dan
5. Hak lainnya berdasarkan ketentuan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

WEWENANG KPM

KPM memiliki kewenangan untuk:

1. Menetapkan dan melaksanakan pedoman pengangkatan dan pemberhentian Dewan Pengawas, dan Direksi sesuai dengan peraturan perundang undangan;
2. Menetapkan pengaturan mengenai rangkap jabatan bagi anggota Dewan Pengawas dan Direksi;
3. Melaksanakan penilaian terhadap calon anggota Dewan Pengawas dan Direksi;
4. Memberikan pengesahan Rencana Bisnis serta Rencana Kerja Anggaran (RKA) Perusahaan;
5. Memberikan persetujuan dan pengesahan Laporan Tahunan serta tugas pengawasan Dewan Pengawas sesuai peraturan perundang-undangan;
6. Memberikan penilaian terhadap kinerja Dewan Pengawas dan kinerja Direksi;
7. Menetapkan gaji/honorarium, tunjangan, fasilitas dan tantien/insentif kinerja untuk Direksi dan Dewan Pengawas;

The KPM, the Regional Head Representing the Regional Government in Ownership of Separated Regional Assets, is the organ of the Regional Public Company, which holds the highest power and all authority not delegated to the Board of Directors or Supervisory Board. For Sarana Jaya, a Regional Public Company owned by the DKI Jakarta Provincial Government, the KPM position is held by the Jakarta Special Capital Region Governor.

KPM RIGHTS

KPM rights, as stipulated in the Regional Regulations establishing Perumda Sarana Jaya and the Corporate Governance Guidelines, are as follows:

1. The right to attend and give approval for the Corporate Work Plan and Budget, along with the Business Plan and its revisions;
2. The right to make the highest decision;
3. The right to obtain timely, measurable, and regular information about the Company;
4. The right to get profits in the form of dividends; and
5. Other rights based on the applicable laws and regulations.

KPM AUTHORITIES

KPM has the authority to:

1. Establish and implement the guidelines to appoint and dismiss the Supervisory Board and Board of Directors according to the laws and regulations;
2. Establish arrangements regarding concurrent positions for members of the Supervisory Board and Board of Directors;
3. Implement the assessment to the candidates of the Supervisory Board and Board of Directors;
4. Ratify the Company's Business Plan and Work Plan and Budget (RKA);
5. Give approval and ratification to the Annual Report and the Supervisory Board's supervisory duties according to the laws and regulations;
6. Assess the performances of the Supervisory Board and Board of Directors;
7. Determine the salaries/honorarium, incentives, allowances, facilities, and annual bonus for the Board of Directors and Supervisory Board;

- | | |
|--|---|
| <ol style="list-style-type: none"> 8. Mengajukan usulan perubahan peraturan daerah; 9. Mengangkat dan/atau memberhentikan Dewan Pengawas dan Direksi; 10. Melaksanakan perubahan jumlah modal dasar; 11. Memberikan persetujuan dalam pemindahtanganan aset; 12. Menetapkan penggunaan laba; 13. Mengesahkan rencana investasi dan pembiayaan jangka panjang; 14. Memberikan persetujuan terhadap perjanjian kerja sama pendayagunaan aset sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku; 15. Memberikan persetujuan terhadap penjaminan aset; 16. Memberikan persetujuan terhadap likuidasi aset; 17. Memberikan persetujuan terhadap pembentukan Anak Perusahaan (mayoritas) dan/atau memiliki saham pada Perusahaan lain; 18. Menerima dan mengesahkan dokumen Rencana Kerja Anggaran Tahunan dan 5 (lima) tahunan, laporan kinerja dan Laporan Keuangan secara berkala termasuk neraca dan perhitungan laba/rugi; dan 19. Penggabungan, peleburan, pengambilalihan dan pembubaran Perusahaan. | <ol style="list-style-type: none"> 8. Propose amendments to regional regulations; 9. Appoint and/or dismiss the Supervisory Board and Board of Directors; 10. Implement the change in the authorized capital; 11. Approve the transfer of assets; 12. Determine profit usage; 13. Ratify the long-term investment and financing plans; 14. Approve the cooperation agreement on asset utilization according to the provisions of the applicable laws and regulations; 15. Approve the underwriting of assets; 16. Approve asset liquidation; 17. Approve the establishment of Subsidiaries (majority) and/or own shares in other companies; 18. Receive and ratify the annual and five-year Corporate Work Plan and Budgets, performance reports, and financial statements periodically, including balance sheets and profit/loss calculations; and 19. Merger, consolidation, acquisition, and dissolution of the Company. |
|--|---|

KEPUTUSAN KPM TAHUN 2023

Sepanjang tahun 2023, terdapat 5 (lima) Keputusan KPM, yakni:

1. Keputusan Gubernur DKI Jakarta selaku Kepala Daerah yang Mewakili Pemerintah Daerah dalam Kepemilikan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan pada Perusahaan Umum Daerah Pembangunan Sarana Jaya Nomor 690 Tahun 2023 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Direksi dan Dewan Pengawas pada Perumda Pembangunan Sarana Jaya sebanyak 7 (tujuh) Orang tanggal 13 Oktober 2023.
2. Keputusan Kepala Daerah yang Mewakili Pemerintah Daerah dalam Kepemilikan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan (KPM) pada Perusahaan Umum Daerah Pembangunan Sarana Jaya tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Direksi pada Perusahaan Umum Daerah Pembangunan Sarana Jaya tanggal 12 Juli 2023.
3. Keputusan Kepala Daerah yang Mewakili Pemerintah Daerah dalam Kepemilikan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan (KPM) pada Perusahaan Umum Daerah Pembangunan Sarana Jaya tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Ketua Dewan Pengawas pada Perusahaan Umum Daerah Pembangunan Sarana Jaya tanggal 14 Maret 2023.

KPM RESOLUTIONS IN 2023

Throughout 2023, there are 5 (five) KPM Resolutions, namely:

1. DKI Jakarta Governor's Decree as the Regional Head Representing the Regional Government in Ownership of Separated Regional Assets in Perusahaan Umum Daerah Pembangunan Sarana Jaya No. 690 of 2023 on the Dismissal and Appointment of the Board of Directors and Supervisory Board at Perumda Pembangunan Sarana Jaya of as many as seven people, dated October 13, 2023.
2. Decree of the Regional Head Representing the Regional Government in Ownership of Separated Regional Assets (KPM) at Perusahaan Umum Daerah Pembangunan Sarana Jaya on the Dismissal and Appointment of the Board of Directors at Perusahaan Umum Daerah Pembangunan Sarana Jaya, dated July 12, 2023.
3. Decree of the Regional Head Representing the Regional Government in Ownership of Separated Regional Assets (KPM) at Perusahaan Umum Daerah Pembangunan Sarana on the Dismissal and Appointment of the Chairman of the Supervisory Board at Perusahaan Umum Daerah Pembangunan Sarana Jaya, dated March 14, 2023.

- | | |
|--|--|
| <p>4. Keputusan Gubernur DKI Jakarta Nomor 409 Tahun 2023 tentang Susunan Organisasi Perusahaan Umum Daerah Pembangunan Sarana Jaya tanggal 12 Juni 2023.</p> <p>5. Peraturan Gubernur DKI Jakarta Nomor 2 Tahun 2023 tentang Pencabutan Peraturan Gubernur Nomor 92 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Perusahaan Umum Daerah Pembangunan Sarana Jaya Provinsi DKI Jakarta.</p> | <p>4. DKI Jakarta Governor's Decree No. 409 of 2023 on the Organizational Structure of Perusahaan Umum Daerah Pembangunan Sarana Jaya, dated June 12, 2023.</p> <p>5. DKI Jakarta Governor Regulation No. 2 of 2023 on the Revocation of Governor Regulation No. 92 of 2008 on the Organization and Work Procedures of Perusahaan Umum Daerah Pembangunan Sarana Jaya of DKI Jakarta Province.</p> |
|--|--|

Keputusan Gubernur Daerah Khusus Ibukota Jakarta Selaku Kepala Daerah yang Mewakili Pemerintah Daerah dalam Kepemilikan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan pada Perusahaan Umum Daerah Pembangunan Sarana Jaya No. 913 Tahun 2023 Tentang Pengesahan Rencana Kerja dan Anggaran Perubahan Perusahaan Umum Daerah Pembangunan Sarana Jaya Tahun Buku 2023

Jakarta Special Capital City Governor Decree as The Regional Head Representing The Regional Government in Ownership of Separated Regional Assets at Perusahaan Umum Daerah Pembangunan Sarana Jaya No. 913 of 2023 on The Approval of Work Plan and Budget Changes of Perusahaan Umum Daerah Pembangunan Sarana Jaya for the 2023 Fiscal Year

No.	Keputusan Resolution	Tindak Lanjut Follow Up
1.	<p>Mengesahkan Rencana Kerja dan Anggaran Perubahan Tahun Buku 2023, dengan ringkasan target keuangan sebagai berikut: Ratified the Work Plan and Budget Changes for the 2023 Fiscal Year, with a summary of the financial targets as follows:</p> <p>a. Target aset sebesar Rp6.251.625.000.000 (enam triliun dua ratus lima puluh satu miliar enam ratus dua puluh lima juta Rupiah); Assets target of Rp6,251,625,000,000 (six trillion two hundred and fifty-one billion six hundred and twenty-five million rupiahs);</p> <p>b. Target liabilitas sebesar Rp750.710.000.000 (tujuh ratus lima puluh miliar tujuh ratus sepuluh juta Rupiah); Liabilities target of Rp750,710,000,000 (seven hundred fifty billion seven hundred and ten million rupiahs);</p> <p>c. Target ekuitas sebesar Rp5.500.916.000.000 (lima triliun lima ratus miliar sembilan ratus enam belas juta Rupiah); Equity target of Rp5,500,916,000,000 (five trillion five hundred billion nine hundred and sixteen million rupiahs);</p> <p>d. Target pendapatan usaha sebesar Rp446.076.000.000 (empat ratus empat puluh enam miliar tujuh puluh enam juta Rupiah); Business revenue target of Rp446,076,000,000 (four hundred forty-six billion seventy-six million rupiahs);</p> <p>e. Target beban pokok sebesar Rp311.595.000.000 (tiga ratus sebelas miliar lima ratus sembilan puluh lima juta Rupiah); Cost of revenue target of Rp311,595,000,000 (three hundred eleven billion five hundred ninety-five million rupiahs);</p> <p>f. Target beban usaha sebesar Rp176.947.000.000 (seratus tujuh puluh enam miliar sembilan ratus empat puluh tujuh juta Rupiah); Operating expenses target of Rp176,947,000,000 (one hundred seventy-six billion nine hundred and forty-seven million rupiahs);</p> <p>g. Target pendapatan lain-lain sebesar Rp87.929.000.000 (delapan puluh tujuh miliar sembilan ratus dua puluh sembilan juta Rupiah); Other income targets of Rp87,929,000,000 (eighty-seven billion nine hundred and twenty-nine million rupiahs);</p> <p>h. Target beban lain-lain sebesar Rp39.909.000.000 (tiga puluh sembilan miliar sembilan ratus sembilan juta Rupiah); Other expenses target of Rp39,909,000,000 (thirty-nine billion nine hundred and nine million rupiahs);</p> <p>i. Target beban pajak sebesar Rp8.749.000.000 (delapan miliar tujuh ratus empat puluh sembilan juta Rupiah); Tax expense target of Rp8,749,000,000 (eight billion seven hundred and forty-nine million rupiahs);</p>	Telah dilaksanakan Implemented



No.	Keputusan Resolution	Tindak Lanjut Follow Up
	<p>j. Target kepentingan non-pengendali sebesar Rp98.000.000 (sembilan puluh delapan juta Rupiah); Non-controlling interest target of Rp98,000,000 (ninety-eight million rupiahs);</p> <p>k. Target laba bersih sebesar Rp3.293.000.000 (tiga miliar dua ratus sembilan puluh tiga juta Rupiah); dan Net profit target of Rp3,293,000,000 (three billion two hundred and ninety-three million rupiahs); and</p> <p>l. Target investasi sebesar Rp307.768.000.000 (tiga ratus tujuh miliar tujuh ratus enam puluh delapan juta Rupiah), Investment target of Rp307,768,000,000 (three hundred seven billion seven hundred and sixty-eight million rupiahs),</p>	
	<p>dengan telah dituangkan dalam dokumen Rencana Kerja dan Anggaran Perubahan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Gubernur selaku Kepala Daerah yang Mewakili Pemerintah Daerah dalam Kepemilikan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan pada Perusahaan Umum Daerah Pembangunan Sarana Jaya ini. which has been stated in the Work Plan and Budget Amendment document, an inseparable part of the Governor's Decree as the Regional Head Representing the Regional Government in Ownership of Separated Regional Assets in Perusahaan Umum Daerah Pembangunan Sarana Jaya.</p>	
2.	<p>Dokumen Rencana Kerja dan Anggaran Perubahan sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU telah ditandatangani bersama antara Direksi dan Dewan Pengawas dan disampaikan melalui surat Direksi tanggal 31 Oktober 2023 No. 2429/-1.713.6 Perihal Penyampaian, Permohonan, Persetujuan dan Pengesahan Rencana Kerja dan Anggaran Perubahan Tahun Buku 2023 dan surat persetujuan Dewan Pengawas melalui surat tanggal 30 Oktober 2023 No. 094/DP-SRT/X/2023 Perihal Persetujuan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) Perubahan Tahun 2023. The Revised Work Plan and Budget documents, as referred to in the FIRST diktum, have been jointly signed by the Board of Directors and the Supervisory Board, submitted via the Board of Directors' letter dated October 31, 2023 No. 2429/-1,713.6 on the Submission, Application, Approval, and Ratification of the Work Plan and Budget Amendments for the 2023 Fiscal Year and the approval letter from the Supervisory Board via letter dated October 30, 2023 No. 094/DP-SRT/X/2023 on Approval of the 2023 Revised Work Plan and Budget (RKA).</p>	Telah dilaksanakan Implemented
3.	<p>Rencana Kerja dan Anggaran Perubahan dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab dan wajib menerapkan prinsip tata kelola perusahaan yang baik sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, dengan ketentuan sebagai berikut: The Revised Work Plan and Budget are carried out with full responsibility and must apply the principles of good corporate governance per the provisions of statutory regulations, with the following provisions:</p> <p>a. pengelolaan keuangan perusahaan dilakukan secara profesional, terbuka dan berdasarkan prinsip kehati-hatian dengan memperhatikan pedoman standar akuntansi keuangan dan ketentuan peraturan perundang-undangan terkait lainnya; Company financial management is carried out professionally, openly, and based on the principle of prudence by paying attention to financial accounting standard guidelines and other relevant statutory provisions;</p> <p>b. melakukan efisiensi belanja pegawai sesuai prinsip kepatutan, kewajaran dan keadilan dengan memedomani Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017 tentang Badan Usaha Milik Daerah dan peraturan perundang-undangan terkait lainnya; Carry out employee spending efficiency under the principles of decency, fairness, and justice by guiding Government Regulation No. 54 of 2017 on Region-Owned Enterprises as well as other related laws and regulations;</p> <p>c. mengoptimalkan pendapatan dengan pengembangan usaha dan meningkatkan <i>recurring income</i> serta meningkatkan efisiensi terhadap biaya; Optimize income by developing business and increasing recurring income as well as increasing cost efficiency;</p> <p>d. pengadaan barang/jasa dilakukan sesuai kebutuhan, manfaat dan skala prioritas baik dalam jumlah, kualitas harga, waktu dan sumber yang tepat, secara efisien dan efektif, persyaratan kontrak yang jelas dan terinci serta dapat dipertanggungjawabkan dengan memperhatikan pedoman pengadaan barang/jasa dan ketentuan peraturan perundang-undangan terkait lainnya; Procurement of goods/services is carried out according to needs, benefits, and priority scale in terms of quantity, quality, price, time and appropriate sources, efficiently and effectively, with clear and detailed contract requirements, and can be accounted for by considering the goods/services procurement guidelines and other related provisions of laws and regulations;</p>	Telah dilaksanakan Implemented

No.	Keputusan Resolution	Tindak Lanjut Follow Up
	<p>e. merealisasikan investasi/proyek strategis yang bersumber dari penyertaan modal daerah untuk memperkuat daya saing perusahaan dan meningkatkan pelayanan masyarakat; Realize strategic investments/projects sourced from regional capital participation to strengthen company competitiveness and improve community services;</p> <p>f. mengoptimalkan pendapatan dan pengamanan aset alat produksi serta pengelolaan manajemen risiko dengan baik, termasuk pemilihan mitra kerja <i>strategic partner</i> yang tepat; Optimize income and safeguarding production equipment assets as well as managing risk management properly, including selecting the right strategic partners;</p> <p>g. mendapat persetujuan tertulis dari Dewan Pengawas dan/ atau Kepala Daerah yang Mewakili Pemerintah Daerah dalam Kepemilikan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan, apabila Direksi melakukan hal-hal antara lain sebagai berikut: Obtain written approval from the Supervisory Board and/or Regional Head Representing the Regional Government in Ownership of Separated Regional Assets if the Board of Directors does the following things:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) melakukan aksi korporasi yang mendukung program Pemerintah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta; Carry out corporate actions that support the Provincial Government of Jakarta Special Capital's programs; 2) mengajukan usulan penyertaan modal daerah dan usulan realokasi penyertaan modal daerah ke Pemerintah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta; Submit a proposal for regional capital participation and a proposal for the reallocation of regional capital participation to the Provincial Government of Jakarta Special Capital; 3) mengagunkan aktiva tetap untuk penarikan kredit jangka pendek, jangka menengah, atau jangka panjang; Collateralize fixed assets for short-term, medium-term, or long-term credit withdrawals; 4) mengadakan kerja sama dengan badan usaha atau pihak; Collaborate with business entities or parties; 5) lain yang berkompeten; Other competent persons; 6) melakukan penyertaan modal pada perusahaan lain; Make capital investments in other companies; 7) melepaskan dan menghapuskan aktiva tetap perusahaan; dan Release and write off the company's fixed assets; and 8) memberikan piutang kepada anak perusahaan. Provide receivables to subsidiaries. 	
4.	<p>Direksi dan Dewan Pengawas bertanggung jawab sepenuhnya atas pelaksanaan Rencana Kerja dan Anggaran Perubahan Tahun Buku 2023 sesuai dengan tugas dan fungsinya masing-masing serta menyampaikan laporan realisasi pelaksanaan Rencana Kerja dan Anggaran Perubahan sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU setiap triwulanan dan tahunan kepada Gubernur selaku Kepala Daerah yang Mewakili Pemerintah Daerah dalam Kepemilikan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan melalui Badan Pembinaan Badan Usaha Milik Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta untuk dilakukan evaluasi. The Board of Directors and the Supervisory Board are fully responsible for the implementation of the Work Plan and Revised Budget for the 2023 Fiscal Year per their respective duties and functions, as well as submitting reports on the realization of the implementation of the Revised Work Plan and Budget as intended in the FIRST diktum every quarter and annually to the Governor as the Regional Head Representing the Regional Government in Ownership of Separated Regional Assets through the Region-Owned Enterprise Development Agency of the Jakarta Special Capital Region for evaluation.</p>	Telah dilaksanakan Implemented
5.	<p>Keputusan Gubernur selaku Kepala Daerah yang Mewakili Pemerintah Daerah dalam Kepemilikan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan pada Perusahaan Umum Daerah Pembangunan Sarana Jaya ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan. This resolution of the Governor as the Regional Head Representing the Regional Government in Ownership of Separated Regional Assets in Perusahaan Umum Daerah Pembangunan Sarana Jaya comes into force on the date of stipulation.</p>	Telah dilaksanakan Implemented



Keputusan Kepala Daerah yang Mewakili Pemerintah Daerah dalam Kepemilikan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan (KPM) Pada Perusahaan Umum Daerah Pembangunan Sarana Jaya Tentang Pengesahan Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan Umum Daerah Pembangunan Sarana Jaya Tahun Buku 2023
Decree of The Regional Head Representing The Regional Government in Ownership of Separated Regional Assets (KPM) at Perusahaan Umum Daerah Pembangunan Sarana Jaya on The Approval of Work Plan and Budget Changes of Perusahaan Umum Daerah Pembangunan Sarana Jaya for The 2023 Fiscal Year

No.	Keputusan Resolution	Tindak Lanjut Follow Up																																										
1.	<p>Mengesahkan Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan Umum Daerah Pembangunan Sarana Jaya Tahun Buku 2023 yang telah ditandatangani Direksi, dengan ringkasan target anggaran sebagai berikut: Ratify the Work Plan and Budget of Perusahaan Umum Daerah Pembangunan Sarana Jaya for the 2023 Fiscal Year, which has been signed by the Board of Directors, with a summary of the budget targets as follows:</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="2">Laba Rugi Profit Loss</th> <th>(dalam Rp Miliar/in Rp Billion)</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Pendapatan Revenue</td> <td></td> <td>1.184,33</td> </tr> <tr> <td>Beban Pokok Cost of Revenue</td> <td></td> <td>(885,05)</td> </tr> <tr> <td>Beban Usaha Operating Expenses</td> <td></td> <td>(200,97)</td> </tr> <tr> <td>Laba Usaha Operating Profit</td> <td></td> <td>(98,30)</td> </tr> <tr> <td>Pendapatan/Beban Lain-Lain Other Income/Expense</td> <td></td> <td>(51,05)</td> </tr> <tr> <td>Pajak (Beban) Tax (Expense)</td> <td></td> <td>(2,38)</td> </tr> <tr> <td>Kepentingan Non-Pengendali Non-Controlling Interest</td> <td></td> <td>2,05</td> </tr> <tr> <td>Laba Bersih Net Profit</td> <td></td> <td>46,93</td> </tr> <tr> <th colspan="2">Laporan Posisi Keuangan Statement of Financial Position</th> <td></td> </tr> <tr> <td>Aset Assets</td> <td></td> <td>6.071,13</td> </tr> <tr> <td>Liabilitas Liabilities</td> <td></td> <td>620,59</td> </tr> <tr> <td>Ekuitas Equity</td> <td></td> <td>5.450,53</td> </tr> <tr> <td>Investasi Investment</td> <td></td> <td>351,00</td> </tr> </tbody> </table>	Laba Rugi Profit Loss		(dalam Rp Miliar/in Rp Billion)	Pendapatan Revenue		1.184,33	Beban Pokok Cost of Revenue		(885,05)	Beban Usaha Operating Expenses		(200,97)	Laba Usaha Operating Profit		(98,30)	Pendapatan/Beban Lain-Lain Other Income/Expense		(51,05)	Pajak (Beban) Tax (Expense)		(2,38)	Kepentingan Non-Pengendali Non-Controlling Interest		2,05	Laba Bersih Net Profit		46,93	Laporan Posisi Keuangan Statement of Financial Position			Aset Assets		6.071,13	Liabilitas Liabilities		620,59	Ekuitas Equity		5.450,53	Investasi Investment		351,00	Telah dilaksanakan Implemented
Laba Rugi Profit Loss		(dalam Rp Miliar/in Rp Billion)																																										
Pendapatan Revenue		1.184,33																																										
Beban Pokok Cost of Revenue		(885,05)																																										
Beban Usaha Operating Expenses		(200,97)																																										
Laba Usaha Operating Profit		(98,30)																																										
Pendapatan/Beban Lain-Lain Other Income/Expense		(51,05)																																										
Pajak (Beban) Tax (Expense)		(2,38)																																										
Kepentingan Non-Pengendali Non-Controlling Interest		2,05																																										
Laba Bersih Net Profit		46,93																																										
Laporan Posisi Keuangan Statement of Financial Position																																												
Aset Assets		6.071,13																																										
Liabilitas Liabilities		620,59																																										
Ekuitas Equity		5.450,53																																										
Investasi Investment		351,00																																										
2.	<p>Berkenaan dengan pemberian persetujuan dan pengesahan Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan Umum Daerah Pembangunan Sarana Jaya Tahun Buku 2023, kepada Direksi dan Dewan Pengawas untuk melakukan beberapa hal sebagai berikut: With regard to granting approval and ratification of the Work Plan and Budget of Perusahaan Umum Daerah Pembangunan Sarana Jaya for the 2023 Fiscal Year, the Board of Directors and Supervisory Board are to do the following:</p> <p>a. Rencana Kerja dan Anggaran yang telah disahkan merupakan pedoman bagi Direksi dalam melaksanakan program kerja dan target tahun 2023 serta sebagai sarana pemantauan dan pengawasan Dewan Pengawas. Dalam melaksanakan anggaran perusahaan, Direksi diminta untuk menaati prosedur dan ketentuan yang berlaku; The approved Work Plan and Budget are guidelines for the Board of Directors in implementing the work program and targets for 2023, as well as a means of monitoring and supervising the Supervisory Board. In implementing the company budget, the Board of Directors is required to comply with applicable procedures and provisions;</p>	Telah dilaksanakan Implemented																																										

No.

Keputusan
Resolution

Tindak Lanjut
Follow Up

- b. target pendapatan dalam Rencana Kerja dan Anggaran Tahun Buku 2023 merupakan target minimal yang harus diupayakan pencapaiannya secara maksimal, sedangkan anggaran biaya merupakan target maksimal yang harus diupayakan secara efisien. Selanjutnya, Direksi diminta agar mengupayakan peningkatan pendapatan dan pengendalian beban di semua lini usaha dengan tetap fokus pada aspek keselamatan dan peningkatan kualitas pelayanan;
The income target in the 2023 Fiscal Year Work Plan and Budget is a minimum target that must be achieved optimally, while the cost budget is a maximum target that must be completed efficiently. Furthermore, the Board of Directors is asked to strive to increase income and control expenses in all business lines while remaining focused on safety aspects and improving service quality;
- c. Direksi dengan pengawasan Dewan Pengawas melakukan manajemen *cash flow* perusahaan secara ketat, dengan konsisten melakukan penagihan piutang, dan meningkatkan *cost awareness* melalui efisiensi biaya dan pengeluaran berdasarkan skala prioritas;
The Board of Directors, under the supervision of the Supervisory Board, carries out strict management of the cash flow, consistently collects receivables, and increases cost awareness through cost and expenditure efficiency based on a priority scale;
- d. pelaksanaan program investasi harus mengedepankan asas manfaat, skala prioritas, dan dilaksanakan dengan perencanaan yang strategis dan berdasarkan atas profil risiko, serta memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan;
Implementation of the investment program must prioritize the principle of benefits, priority scale, and be implemented with strategic planning and based on the risk profile, as well as paying attention to the provisions of laws and regulations;
- e. dalam rangka menciptakan efisiensi, efektivitas dan adaptabilitas proses bisnis internal, Direksi dengan pengawasan Dewan Pengawas perlu menerapkan *business process improvement* secara konsisten dan kontinu, serta dievaluasi secara berkala untuk memastikan setiap proses memberikan *value added* bagi perusahaan;
To create efficiency, effectiveness, and adaptability of internal business processes, the Board of Directors, under the supervision of the Supervisory Board, needs to implement business process improvement consistently and continuously and be evaluated periodically to ensure that each process provides added value for the company;
- f. Direksi dengan pengawasan Dewan Pengawas agar mempersiapkan kebutuhan jumlah dan kompetensi sumber daya manusia sesuai dengan arah pengembangan perusahaan ke depan, serta menyusun *roadmap* sumber daya manusia sehingga dapat terjadi *link and match* antara kebutuhan, ketersediaan, dan pengembangan sumber daya manusia yang diperlukan;
The Board of Directors, under the supervision of the Supervisory Board, must prepare the required number and competency of human resources following the company's future development directive, as well as prepare a human resources roadmap so that there can be a link and match between the need, availability, and development of the required human resources;
- g. Direksi menyampaikan laporan triwulanan dan tahunan pelaksanaan Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan Umum Daerah Pembangunan Sarana Jaya Tahun Buku 2023 yang telah ditelaah oleh Dewan Pengawas kepada Gubernur selaku KPM Perusahaan Umum Daerah Pembangunan Sarana Jaya dengan tembusan Badan Pembinaan Badan Usaha Milik Daerah Provinsi DKI Jakarta untuk dievaluasi;
The Board of Directors submits quarterly and annual reports on the implementation of the Work Plan and Budget of Perusahaan Umum Daerah Pembangunan Sarana Jaya for the 2023 Fiscal Year, which have been reviewed by the Supervisory Board to the Governor as KPM of Perusahaan Umum Daerah Pembangunan Sarana Jaya with a copy to DKI Jakarta Region-Owned Enterprise Development Agency for evaluation;
- h. Dewan Pengawas melakukan pengawasan serta memberikan pendapat dan saran dalam pelaksanaan Rencana Kerja dan Anggaran agar dapat mendukung peningkatan kinerja perusahaan;
The Supervisory Board supervises and provides opinions and suggestions in the implementation of the Work Plan and Budget to support the improvement of company performance;
- i. pengelolaan keuangan perusahaan dilakukan secara profesional, terbuka dan berdasarkan prinsip kehati-hatian dengan memperhatikan Pedoman Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) dan ketentuan peraturan perundang-undangan;
Company financial management is carried out professionally, openly, and based on the principle of prudence by considering the Financial Accounting Standards Guidelines (PSAK) and statutory provisions;



No.	Keputusan Resolution	Tindak Lanjut Follow Up
	<p>j. pengadaan barang/jasa dilakukan sesuai kebutuhan, manfaat dan skala prioritas baik dalam jumlah, kualitas harga, waktu dan sumber yang tepat, secara efisien dan efektif, persyaratan kontrak yang jelas dan terinci serta dapat dipertanggungjawabkan dengan memperhatikan pedoman pengadaan barang/jasa dan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan Procurement of goods/services is carried out according to needs, benefits, and priority scale in terms of quantity, quality, price, time, and appropriate sources, efficiently and effectively, with clear and detailed contract requirements, and can be accounted for by considering the guidelines for procurement of goods/services and the provisions of laws and regulations; and</p> <p>k. mengakselerasikan penugasan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta dalam pelaksanaan proyek-proyek strategis dengan penerapan prinsip-prinsip tata kelola perusahaan yang baik. Accelerate the assignment of the DKI Jakarta Provincial Government in implementing strategic projects by implementing the principles of good corporate governance.</p>	
3.	<p>Temuan, catatan dan saran Dewan Pengawas, auditor internal maupun auditor eksternal atas audit laporan keuangan dan laporan kinerja sebelumnya agar ditindaklanjuti secara tuntas oleh Direksi dalam tahun buku 2023. The findings, notes, and suggestions of the Supervisory Board, internal auditors, and external auditors on the audit of the previous year's financial statements and performance reports should be followed up thoroughly by the Board of Directors in the 2023 fiscal year.</p>	Telah dilaksanakan Implemented
4.	<p>Buku Rencana Kerja dan Anggaran Tahun Buku 2023, arahan pemilik modal dan rekomendasi Dewan Pengawas sesuai surat tanggal 31 Oktober 2022 Nomor 058/DP-SRT/X/2022 Hal Persetujuan Rencana Kerja Anggaran (RKA) Tahun 2023 serta tanggapan Dewan Pengawas sesuai surat tanggal 20 Desember 2022 Nomor 076/DP-SRT/XII/2022 Hal Persetujuan atas Revisi Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) Perumda Pembangunan Sarana Jaya Tahun 2023 serta surat Direktur Utama Perumda Pembangunan Sarana Jaya tanggal 13 April 2023 Nomor 854/-1.713.2 hal Penyampaian Revisi Rencana Kerja dan Anggaran Tahun Buku 2023 adalah bagian yang tidak terpisahkan dari Surat Persetujuan Rencana Kerja dan Anggaran Tahun Buku 2023. Work Plan and Budget Book for the 2023 Fiscal Year, directives from capital owners, and recommendations from the Supervisory Board per the letter dated October 31, 2022, No. 058/DP-SRT/X/2022 on Approval of the 2023 Work Plan and Budget (RKA) as well as the Supervisory Board's response per the letter dated December 20, 2022 No. 076/DP-SRT/XII/2022 on the Approval of the Revised Work Plan and Budget (RKA) of Perumda Pembangunan Sarana Jaya for 2023 as well as the letter from the Perumda Pembangunan Sarana Jaya President Director dated April 13, 2023, No. 854/-1,713.2 on the Submission of the Revision of the Work Plan and Budget for the 2023 Fiscal Year are inseparable from the 2023 Fiscal Year Work Plan and Budget Approval Letter.</p>	Telah dilaksanakan Implemented
5.	<p>Kepala Badan Pembinaan Badan Usaha Milik Daerah Provinsi DKI Jakarta melaporkan hasil evaluasi laporan triwulanan dan laporan tahunan pelaksanaan Rencana Kerja dan Anggaran kepada KPM Perusahaan Umum Daerah Pembangunan Sarana Jaya. The DKI Jakarta Region-Owned Enterprise Development Agency Head reports the results of the quarterly reports and annual reports evaluation on the implementation of the Work Plan and Budget to the KPM of Perusahaan Umum Daerah Pembangunan Sarana Jaya.</p>	Telah dilaksanakan Implemented

Keputusan Kepala Badan Pembinaan Badan Usaha Milik Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta No. 11 Tahun 2023 Tentang Pengesahan Laporan Tahunan Tahun Buku 2022 Perusahaan Umum Daerah Pembangunan Sarana Jaya

Decree of The Region-Owned Business Enterprise Development Agency Head of Jakarta Special Capital Region No. 11 Of 2023 on Approval of The Annual Report For The 2022 Fiscal Year of Perusahaan Umum Daerah Pembangunan Sarana Jaya

No.	Keputusan Resolution	Tindak Lanjut Follow Up
1.	<p>Mengesahkan Laporan Tahunan Perusahaan Umum Daerah (Perumda) Pembangunan Sarana Jaya Tahun Buku 2022, dengan ketentuan: Ratify the Annual Report of Public Region Company (Perumda) Pembangunan Sarana Jaya for the 2022 Fiscal Year with the following provisions:</p> <p>a. Termasuk Laporan Keuangan Tahunan Perusahaan Umum Daerah Pembangunan Sarana Jaya yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022 yang telah diaudit dan disusun serta ditelaah Direksi bersama Dewan Pengawas dan telah ditandatangani bersama sebagai bentuk pertanggungjawaban atas kebenaran isi Laporan Keuangan, sebagaimana disampaikan melalui surat Direktur Utama Nomor 738/-1.713.6 tanggal 31 Maret 2023 hal Penyampaian dan Permohonan Pengesahan Laporan Auditor Independen atas Laporan Keuangan Konsolidasian Tahun Buku 2022 dan rekomendasi Dewan Pengawas Perusahaan Umum Daerah Pembangunan Sarana Jaya melalui surat Nomor 025/DP-SRT/III/2023 tertanggal 31 Maret 2023 dan Nomor 026/DP-SRT/IV/2023 tertanggal 4 April 2023; dan Including the Annual Financial Statement of Perusahaan Umum Daerah Pembangunan Sarana Jaya ending on December 31, 2022, which has been audited, prepared, and reviewed by the Board of Directors with the Supervisory Board and has been jointly signed as a form of accountability for the correctness of the contents of the Financial Statement, as conveyed through the President Director's letter No. 738/ -1,713.6 dated March 31, 2023, on the Submission and Request for Ratification of the Independent Auditor's Report on the Consolidated Financial Statement for the 2022 Fiscal Year and recommendations from the Supervisory Board of Perusahaan Umum Daerah Pembangunan Sarana Jaya via letter No. 025/DP-SRT/III/2023 dated March 31, 2023, and No. 026/DP-SRT/IV/2023 dated April 4, 2023; and</p> <p>b. Memberikan pelunasan dan pembebasan tanggung jawab sepenuhnya (<i>volledig acquit et de charge</i>) kepada seluruh anggota Direksi dan Dewan Pengawas atas tindakan kepengurusan dan pengawasan Perumda Pembangunan Sarana Jaya yang telah dijalankan selama Tahun Buku 2022, sepanjang tindakan tersebut tercermin dalam Laporan Tahunan Perumda Pembangunan Sarana Jaya Tahun Buku 2022 sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Providing full repayment and release of responsibility (<i>volledig acquit et de charge</i>) to all Board of Directors and Supervisory Board members for the management and supervision actions of Perumda Pembangunan Sarana Jaya, which have been carried out during the 2022 Fiscal Year, as long as these actions are reflected in the 2022 Perumda Pembangunan Sarana Jaya Annual Report following statutory provisions.</p>	Telah dilaksanakan Implemented
2.	<p>Menetapkan besaran penghasilan tetap Direksi dan Dewan Pengawas Perumda Pembangunan Sarana Jaya dihitung mulai tanggal 1 Januari 2023 sampai dengan 31 Desember 2023 dengan memperhatikan asas kepatutan, kewajaran dan kemampuan anggaran perusahaan dengan rincian sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Kepala Badan Pembinaan Badan Usaha Milik Daerah ini. Determine the amount of fixed income for the Board of Directors and Supervisory Board of Perumda Pembangunan Sarana Jaya starting from January 1, 2023, to December 31, 2023, considering the principles of decency, reasonableness, and capacity of the company's budget with details as stated in the Attachment which is an inseparable part of this Decree of the Region-Owned Enterprise Development Agency Head.</p>	Telah dilaksanakan Implemented



No.	Keputusan Resolution	Tindak Lanjut Follow Up
3.	<p>Menetapkan penggunaan laba bersih Perumda Pembangunan Sarana Jaya Tahun Buku 2022 sebagai dana cadangan sebesar Rp78.961.239.204,00 (tujuh puluh delapan miliar sembilan ratus enam puluh satu juta dua ratus tiga puluh sembilan ribu dua ratus empat Rupiah), dengan rincian penggunaan sebagai berikut: Determine the use of Perumda Pembangunan Sarana Jaya's net profit for the 2022 Fiscal Year as reserve funds amounting to Rp 78,961,239,204.00 (seventy-eight billion nine hundred sixty-one million two hundred thirty-nine thousand two hundred four rupiahs), with details of use as follows:</p> <p>a. Dana cadangan sebesar Rp67.117.053.323, (enam puluh tujuh miliar seratus tujuh belas juta lima puluh tiga ribu tiga ratus dua puluh tiga Rupiah) yang digunakan untuk investasi dan menutup kerugian Perumda Pembangunan Sarana Jaya pada masa yang akan datang, dan Reserve funds amounting to Rp67,117,053,323 (sixty-seven billion one hundred seventeen million fifty-three thousand three hundred and twenty-three rupiahs) which will be used for investment and to cover future losses of Perumda Pembangunan Sarana Jaya, and</p> <p>b. Dana pensiun, pendidikan, tunjangan hari tua dan sosial bagi pegawai dan Direksi sebesar Rp11.844.185.881 (sebelas miliar delapan ratus empat puluh dua juta seratus delapan puluh lima ribu delapan ratus delapan puluh satu Rupiah), yang dianggarkan dan diperhitungkan sebagai biaya perusahaan serta pelaksanaannya dilakukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Pension funds, education, old age, and social benefits for employees and the Board of Directors amounting to Rp11,844,185,881 (eleven billion eight hundred forty-four million one hundred eighty-five thousand eight hundred eighty-one rupiahs), which is budgeted and calculated as company costs and implementation is carried out per statutory regulations.</p>	Telah dilaksanakan Implemented
4.	<p>Sepanjang pencapaian laba bersih Perumda Pembangunan Sarana Jaya merupakan hasil realisasi piutang yang dikonversi berupa aset tanah dan dinilai wajar berdasarkan hasil penilaian Kantor Jasa Penilai Publik, maka Perumda Pembangunan Sarana Jaya tidak menyetor laba bersih untuk Pemerintah Provinsi DKI Jakarta serta tidak membagikan jasa produksi. As long as the net profit achieved by Perumda Pembangunan Sarana Jaya is the result of the realization of receivables converted into land assets and is assessed as fair based on the assessment results of the Public Appraisal Services Office, then Perumda Pembangunan Sarana Jaya does not deposit net profit to the DKI Jakarta Provincial Government and does not distribute production services.</p>	Telah dilaksanakan Implemented
5.	<p>Memberikan kewenangan kepada Dewan Pengawas Perumda Pembangunan Sarana Jaya untuk menunjuk/menetapkan Kantor Akuntan Publik yang berkompeten dan independen dalam mengaudit Laporan Tahunan Tahun Buku 2023 serta menetapkan biaya pengadaan jasa audit sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan Authorize the Supervisory Board of Perumda Pembangunan Sarana Jaya to appoint/determine a competent and independent Public Accounting Firm to audit the Annual Report for the 2023 Fiscal Year and determine the costs of providing audit services under the provisions of statutory regulations; and</p>	Telah dilaksanakan Implemented
5.	<p>Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan This resolution shall take effect on the date specified.</p>	

KPM Tahun Sebelumnya (2022)

Pada tahun 2022, terdapat 2 (dua) Keputusan KPM, yaitu Keputusan Kepala Daerah Yang Mewakili Pemerintah Daerah Dalam Kepemilikan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan (KPM) Pada Perusahaan Umum Daerah Pembangunan Sarana Jaya Tentang Pengesahan Perencanaan Kerja dan Anggaran Perusahaan Umum Daerah Pembangunan Sarana Jaya Tahun Buku 2022 tanggal 21 Februari 2022 dan Keputusan Kepala Badan Pembinaan Badan Usaha Milik Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 34 Tahun 2022 Tentang Pengesahan Laporan Tahunan Perusahaan Umum Daerah Pembangunan Sarana Jaya Tahun Buku 2021 tanggal 28 September 2022.

Previous Year's KPM (2022)

In 2022, there were two KPM Decrees, i.e., the Decree of the Regional Head Representing the Regional Government in Ownership of Separated Regional Assets (KPM) at Perusahaan Umum Daerah Pembangunan Sarana Jaya on the Approval of the Work Plan and Budget of Perusahaan Umum Daerah Pembangunan Sarana Jaya for the 2022 Fiscal Year, dated February 21, 2022, and Decree of The Region-Owned Business Enterprise Development Agency Head for Jakarta Special Capital Region No. 34 of 2022 on the Ratification of the Annual Report of Perusahaan Umum Daerah Pembangunan Sarana Jaya for the 2021 Fiscal Year, dated September 28, 2022.

Keputusan Kepala Daerah Yang Mewakili Pemerintah Daerah Dalam Kepemilikan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan (Kpm) Pada Perusahaan Umum Daerah Pembangunan Sarana Jaya Tentang Pengesahan Perencanaan Kerja Dan Anggaran Perusahaan Umum Daerah Pembangunan Sarana Jaya Tahun Buku 2022
Decree Of The Regional Head Representing The Regional Government In Ownership Of Separated Regional Assets (Kpm) At Perusahaan Umum Daerah Pembangunan Sarana Jaya On The Approval Of The Work Plan And Budget Of Perusahaan Umum Daerah Pembangunan Sarana Jaya For The 2022 Fiscal Year

No.	Keputusan Resolutions	Tindak Lanjut Follow Up
1.	<p>Mengesahkan RKA Perumda Sarana Jaya Tahun Buku 2022 sebagaimana dokumen terlampir dengan ringkasan target keuangan sebagai berikut: Ratified the Work Plan and Budget (RKA) of Perumda Sarana Jaya for the 2022 Fiscal Year as an attached document with the following summary of financial targets:</p> <p>a. Target aset sebesar Rp6.081.801.000.000,00 (enam triliun delapan puluh satu miliar delapan ratus satu juta rupiah). Assets target of Rp6,081,801,000,000.00 (six trillion eighty-one billion eight hundred and one million rupiahs).</p> <p>b. Target liabilitas sebesar Rp722.137.000.000,00 (tujuh ratus dua puluh dua miliar seratus tiga puluh tujuh juta rupiah). Liabilities target of Rp722,137,000,000.00 (seven hundred twenty-two billion one hundred thirty-seven million rupiahs).</p> <p>c. Target ekuitas sebesar Rp5.359.664.000.000,00 (lima triliun tiga ratus lima puluh Sembilan miliar enam ratus enam puluh empat juta rupiah). Equity target of Rp5,359,664,000,000.00 (five trillion three hundred fifty-nine billion six hundred sixty-four million rupiahs).</p> <p>d. Target pendapatan usaha sebesar Rp34.417.000.000,00 (tiga puluh empat miliar empat ratus tujuh belas juta rupiah). Operating revenues target of Rp34,417,000,000.00 (thirty-four billion four hundred and seventeen million rupiahs).</p> <p>e. Target investasi sebesar Rp989.397.000.000,00 (Sembilan ratus delapan puluh Sembilan miliar tiga ratus Sembilan puluh tujuh juta rupiah). Target Investment of Rp989,397,000,000.00 (nine hundred eighty-nine billion three hundred ninety-seven million rupiahs).</p>	Telah Dilaksanakan Implemented
2.	<p>Dalam melaksanakan RKA sebagaimana dimaksud dalam angka 1, Direksi wajib menerapkan prinsip-prinsip Tata Kelola Perusahaan yang Baik (<i>Good Corporate Governance</i>) pada setiap aspek bisnisnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dengan melakukan Langkah-langkah sebagai berikut: In implementing the RKA as referred to in framework 1, the Board of Directors must apply the Good Corporate Governance principles in every aspect of its business following the provisions of laws and regulations by taking the following steps:</p> <p>a. Pengelolaan keuangan Perusahaan dilakukan secara profesional, terbuka dan berdasarkan prinsip kehati-hatian dengan memperhatikan Pedoman Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) dan ketentuan peraturan perundang-undangan; The Company's financial management was carried out professionally, openly, and based on precautionary principles by taking into account the Indonesian Financial Accounting Standards (IFAS/PSAK) and provisions of laws and regulations;</p> <p>b. Pengadaan barang/jasa dilakukan sesuai kebutuhan, manfaat dan skala prioritas baik dalam jumlah, kualitas harga, waktu dan sumber yang tepat, secara efisien dan efektif, persyaratan kontrak yang jelas dan terinci serta dapat dipertanggungjawabkan dengan memperhatikan pedoman pengadaan barang/jasa dan ketentuan peraturan perundang-undangan; Procurement of goods/services was carried out according to the needs, benefits, and priority scale in quantity, price quality, time, and proper source, efficiently and effectively, in clear and detailed contract requirements that could be accounted for by considering the goods/services procurement guidelines and provisions of laws and regulations;</p> <p>c. Merealisasikan investasi/proyek strategi yang bersumber dari Penyertaan Modal Daerah (PMD) untuk memperkuat daya saing Perusahaan dan meningkatkan pelayanan masyarakat; Realizing strategic investments/projects sourced from Regional Equity Participation (PMD) to strengthen the Company's competitiveness and improve community services;</p> <p>d. Mengakselerasikan pembangunan hunian terjangkau, penyelenggaraan Fasilitas Pengelolaan Sampah Antara (FPSA) di dalam kota untuk wilayah zona timur dan selatan, serta penyelenggaraan Sarana Jaringan Utilitas Terpadu (SJUT) yang merupakan Kegiatan Strategis Daerah (KSD) Pemerintah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta; Accelerating the construction of Zero-Rupiah Down-Payment housing, implementing the Intermediate Garbage Treatment Facility (FPSA) in the city for the eastern and southern zones, as well as implementing the Integrated Utility Network Facility (SJUT), which were Regional Strategic Activities (KSD) of the Jakarta Special Capital Region Provincial Government;</p> <p>e. Dengan mempertimbangkan banyaknya proyek yang dilaksanakan maka Perusahaan agar membuat <i>risk management</i> dan mencermati <i>strategic partner</i> yang tepat; dan Considering the number of projects implemented, the Company should make risk management and pay close attention to the right strategic partners; and</p>	Telah Dilaksanakan Implemented

No.	Keputusan Resolutions	Tindak Lanjut Follow Up
f.	<p>Mendapatkan persetujuan tertulis dari Dewan Pengawas dan/atau KPM, apabila Direksi melakukan hal-hal antara lain sebagai berikut: Obtaining written approval from the Supervisory Board and/or KPM if the Board of Directors did any of the following:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) Melakukan aksi korporasi yang menjadi Kegiatan Strategis Daerah (KSD) Pemerintah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta; Carrying out corporate actions that became Regional Strategic Activities (KSD) of the Jakarta Special Capital Region Provincial Government; 2) Mengajukan Penyertaan Modal Daerah (PMD) ke Pemerintah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta; Submitting Regional Equity Participation (PMD) to the Jakarta Special Capital Region Provincial Government; 3) Mengagunkan Aktiva Tetap untuk penarikan kredit jangka pendek, jangka menengah atau jangka Panjang; Collateralizing Fixed Assets for short-term, medium-term, or long-term credit withdrawals; 4) Mengadakan kerja sama dengan Badan Usaha atau pihak lain; Establishing cooperation with Business Entities or other parties 5) Melakukan penyertaan modal pada Perusahaan lain; Making equity participation in other companies; 6) Melepaskan dan menghapuskan Aktiva Tetap Perusahaan; dan Releasing and writing off the Company's Fixed Assets; and 7) Melakukan tindakan/aksi korporasi yang belum ditetapkan dalam RKA sebagaimana dimaksud dalam angka 1. Carrying out corporate actions not stipulated in the RKA, as mentioned in number 1. 8) Direksi dan Dewan Pengawas bertanggung jawab sepenuhnya atas pelaksanaan RKA sesuai dengan tugas dan fungsinya masing-masing serta menyampaikan laporan realisasi pelaksanaan RKA sebagaimana dimaksud pada angka 1 setiap triwulanan dan tahunan kepada KPM melalui Badan Pembinaan Badan Usaha Milik Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta untuk dilakukan evaluasi. The Board of Directors and the Supervisory Board were fully responsible for the implementation of the RKA according to their respective duties and functions and submitting reports on the realization of the RKA implementation as referred to in number 1 every quarter and year to KPM through the DKI Jakarta Region-Owned Enterprise Development Agency for evaluation. 	

Keputusan Kepala Badan Pembinaan Badan Usaha Milik Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta No. 34 Tahun 2022 Tentang Pengesahan Laporan Tahunan Perusahaan Umum Daerah Pembangunan Sarana Jaya Tahun Buku 2021

Decree of The Region-Owned Business Enterprise Development Agency Head for Jakarta Special Capital Region No. 34 of 2022 on The Ratification of The Annual Report of Perusahaan Umum Daerah Pembangunan Sarana Jaya for The 2021 Fiscal Year

No.	Keputusan Resolutions	Tindak Lanjut Follow Up
Kesatu First	<p>Mengesahkan Laporan Tahunan Perusahaan Umum Daerah Pembangunan Sarana Jaya Tahun Buku 2021, yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Kanaka Puradiredja, Suhartono dengan opini Wajar dalam semua hal yang material dan telah mendapat rekomendasi Dewan Pengawas Perusahaan Umum Daerah Pembangunan Sarana Jaya melalui surat Tanggal 28 Maret 2022 No. 015/DP-SRT/III/2022. Ratified the Annual Report of Perusahaan Umum Daerah Pembangunan Sarana Jaya for the 2021 Fiscal Year, which has been audited by the Public Accounting Firm Kanaka Puradiredja, Suhartono, with a fair opinion in all material respects and has received recommendations from the Supervisory Board of Perusahaan Umum Daerah Pembangunan Sarana Jaya through a letter dated March 28, 2022, No. 015/ DP-SRT/III/2022.</p>	Telah Dilaksanakan Implemented
Kedua Second	<p>Memberikan pelunasan dan pembebasan tanggung jawab sepenuhnya (<i>acquit et de charge</i>) kepada Direksi dan Dewan Pengawas atas tindakan-tindakan pengurusan dan pengawasan Perusahaan Umum Daerah Pembangunan Sarana Jaya yang telah dijalankan selama Tahun Buku 2021, sepanjang tindakan tersebut tercermin dalam perhitungan tahunan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021. Granted full release and discharge of responsibility (<i>acquit et de charge</i>) to the Board of Directors and the Supervisory Board for the management and supervisory actions of Perusahaan Umum Daerah Pembangunan Sarana Jaya that have been carried out during the 2021 Fiscal Year, as long as those actions were reflected in the annual calculations for the fiscal year ended on December 31, 2021.</p>	Telah Dilaksanakan Implemented

No.	Keputusan Resolutions	Tindak Lanjut Follow Up
Ketiga Third	<p>Apabila di kemudian hari atas Laporan Tahunan sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU yang meliputi Laporan Manajemen, Laporan Tugas Pengawas dan Laporan Keuangan, ditemukan adanya indikasi tindak pidana penyalahgunaan jabatan yang menyebabkan kerugian Perusahaan dan patut diduga dilakukan karena kesengajaan, ketidakhati-hatian, ketidakprofesionalan, atau pengambilan keputusan yang tidak proporsional, maka Direksi dan Dewan Pengawas dapat dimintakan tanggung jawab pribadi baik saat ini maupun di masa yang akan datang.</p> <p>If at a later date on the Annual Report, as referred to in the FIRST dictum, which included Management Report, Supervisory Duty Report, and Financial Statements, indications of criminal acts of abuse of position were found that caused losses to the Company and should be suspected to have been committed due to intent, carelessness, unprofessionalism, or taking disproportionate decisions, the Board of Directors and the Supervisory Board might be held personally liable now and in the future.</p>	Telah Dilaksanakan Implemented
Keempat Fourth	<p>Menetapkan besaran penghasilan tetap Direksi dan Dewan Pengawas Perusahaan Umum Daerah Pembangunan Sarana Jaya terhitung mulai 1 Januari 2022 sampai dengan 31 Desember 2022 dengan memperhatikan asas kepatutan, kewajaran serta kemampuan Perusahaan dengan rincian sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Kepala Badan ini.</p> <p>Determined the amount of fixed income for the Board of Directors and the Supervisory Board of Perusahaan Umum Daerah Pembangunan Sarana Jaya starting January 1, 2022, to December 31, 2022, by considering the principles of decency, fairness, and company capability with the details as listed in the Appendix which was an integral part of the Decree of this Agency Head.</p>	Telah Dilaksanakan Implemented
Kelima Fifth	<p>Memberikan kewenangan kepada Dewan Pengawas Perusahaan Umum Daerah Pembangunan Sarana Jaya untuk menetapkan Kantor Akuntan Publik yang akan mengaudit Laporan Tahunan Tahun Buku 2022 serta menetapkan biaya pengadaan jasa Kantor Akuntan Publik dimaksud, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.</p> <p>Granted authority to the Supervisory Board of Perusahaan Umum Daerah Pembangunan Sarana Jaya to appoint a Public Accounting Firm that would audit the Annual Report for the 2022 Fiscal Year and determine the fee of procuring the said Public Accounting Firm's services, according to statutory provisions.</p>	Telah Dilaksanakan Implemented
Keenam Sixth	<p>Manajemen Perusahaan Umum Daerah Pembangunan Sarana Jaya agar segera melakukan hal-hal sebagai berikut: The Management of Perusahaan Umum Daerah Pembangunan Sarana Jaya immediately did the following:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Menindaklanjuti temuan dan/atau rekomendasi auditor Kantor Akuntan Publik sebagaimana termuat dalam laporan hasil audit tahunan Tahun Buku 2021 serta temuan dan/atau rekomendasi Auditor Pemerintah; Followed up on the findings and/or recommendations of the Public Accounting Firm auditors as contained in the annual audit report for the 2021 Fiscal Year, as well as the findings and/or recommendations of the Government Auditors; 2. Menindaklanjuti rekomendasi dari Dewan Pengawas sebagaimana tertuang dalam surat Tanggal 28 Maret 2022 Nomor 015/DP-SRT/III/2022 Perihal Rekomendasi Atas Laporan Auditor terhadap Laporan Keuangan Tahun 2021; Followed up on the recommendations from the Supervisory Board as stated in the letter dated March 28, 2022, No. 015/DP-SRT/III/2022, on Recommendations on the Auditor's Report on the 2021 Financial Statements; 3. Melaksanakan pengamanan aset terutama yang diperoleh dari dana PMD agar aset tersebut tidak berpotensi gagal beralih kepemilikannya dan untuk menghindari potensi kerugian bagi Perusahaan; Carried out security for assets, especially those obtained from PMD funds, so that these assets did not have the potential to fail to transfer their ownership and to avoid potential losses for the Company; 4. Melakukan evaluasi terhadap kesesuaian Permohonan PMD dengan penyerapan PMD agar dana investasi yang diberikan oleh Pemerintah Provinsi DKI Jakarta dapat bermanfaat secara optimal baik untuk Perusahaan maupun untuk Pemerintah Provinsi DKI Jakarta; Evaluated the suitability of the PMD application with PMD absorption so that the investment funds provided by the DKI Jakarta Provincial Government could be optimally beneficial for the Company and the DKI Jakarta Provincial Government; 5. Melakukan penagihan dan penyelesaian piutang Perusahaan kepada mitra kerja sama secara optimal dan jika diperlukan dapat melalui jalur hukum; Performed billing and settlement of the Company receivables to cooperation partners optimally and, if necessary, through legal channels; 	Telah Dilaksanakan Implemented



No.	Keputusan Resolutions	Tindak Lanjut Follow Up
	<p>6. Dalam rangka meningkatkan <i>revenue streaming</i> Perusahaan manajemen Perusahaan Umum Daerah Pembangunan Sarana Jaya agar melakukan hal-hal sebagai berikut: To increase the Company's revenue streaming, the Management of Perusahaan Umum Daerah Pembangunan Sarana Jaya should do the following:</p> <p>a. Meningkatkan kinerja Perusahaan sesuai dengan target yang telah tertuang dalam Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan Umum Daerah Pembangunan Sarana Jaya 2022 dan perubahannya (apabila ada) serta <i>Key Performance Indicator</i> Korporasi; Improving the Company's performance according to the targets set out in the 2022 Work Plan and Budget of Perusahaan Umum Daerah Pembangunan Sarana Jaya and its amendments (if any) as well as the Corporate Key Performance Indicators;</p> <p>b. Melaksanakan Proyek Penugasan yang merupakan Kegiatan Strategis Daerah Provinsi DKI Jakarta secara profesional dengan memperhatikan prinsip <i>Good Corporate Governance</i> dan ketentuan peraturan perundang-undangan; Carrying out the Assignment Projects, which were Regional Strategic Activities for DKI Jakarta Province, professionally and with due observance of the Good Corporate Governance principles and the provisions of laws and regulations;</p> <p>c. Dalam hal Perusahaan akan melakukan kerja sama dengan mitra, agar memperhatikan pemilihan mitra strategis yang kompeten, berkualitas, berintegritas dan dapat meningkatkan kinerja Perusahaan serta menunjang terlaksananya proyek-proyek dengan baik; dan If the Company was going to cooperate with partners, it should pay attention to the selection of strategic partners who were competent, qualified, had integrity, and could improve the Company's performance and support the implementation of projects properly; and</p> <p>d. Melanjutkan pengembangan proyek properti yang telah ada dan melakukan pengembangan proyek properti baru serta mendukung pelaksanaan Kegiatan Strategis Daerah Provinsi DKI Jakarta. Continuing the development of existing property projects, developing new property projects, and supporting the implementation of the Regional Strategic Activities of DKI Jakarta Province.</p> <p>7. Menyampaikan laporan atas pelaksanaan Keputusan ini kepada Gubernur Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta melalui Badan Pembinaan Badan Usaha Milik Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta, dan Submitting a report on the implementation of this Decree to the Jakarta Special Capital Region Governor through the Region-Owned Enterprises Development Agency of the Jakarta Special Capital Region, and</p> <p>8. Melaksanakan seluruh isi Keputusan ini sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan memperhatikan implementasi <i>Good Corporate Governance</i> (GCG) bagi seluruh jajaran Perusahaan antara lain dengan melengkapi perangkat pendukung Dewan Pengawas dalam menjalankan fungsi pengawasan/audit, pengusulan remunerasi dan pemantauan risiko. Carrying out the entire contents of this Decree according to the provisions of laws and regulations and paying attention to the implementation of Good Corporate Governance (GCG) for all levels of the Company, among others, by completing the supporting organs for the Supervisory Board in carrying out the supervisory/audit function, proposing remuneration, and risks monitoring.</p>	
Ketujuh Seventh	Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan This Decree should come into force on the date of stipulation.	Telah Dilaksanakan Implemented

DIREKSI

BOARD OF DIRECTORS

Direksi, sebagai salah satu organ utama Perusahaan, memiliki tugas untuk melaksanakan segala tindakan yang terkait dengan pengurusan Perusahaan, dengan tujuan dan maksud yang sesuai untuk kepentingan Perusahaan. Dalam menjalankan tugasnya, Direksi wajib mematuhi Peraturan Daerah, Keputusan Gubernur, dan peraturan perundang-undangan lain yang berlaku. Selain itu, Direksi juga diwajibkan untuk melaksanakan prinsip-prinsip transparansi, akuntabilitas, pertanggungjawaban, dan kewajaran.

PENGANGKATAN DAN MASA JABATAN DIREKSI

Gubernur Provinsi DKI Jakarta, selaku KPM, mengangkat Direksi Sarana Jaya atas usul Badan Pembinaan Badan Usaha Milik Daerah (BP-BUMD). Pengangkatan Direksi Sarana Jaya ditetapkan melalui Surat Keputusan Gubernur.

Masa jabatan anggota Direksi paling lama 5 (lima) tahun dan berhak mendapat penunjukan kembali untuk satu periode masa jabatan tambahan, kecuali ditentukan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Dalam hal anggota Direksi memiliki keahlian khusus dan/atau prestasi yang sangat baik, dapat diangkat untuk masa jabatan yang ketiga.

TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB DIREKSI

Tugas Direksi yang sesuai dengan Keputusan Gubernur Daerah Khusus Ibukota Jakarta No. 409 Tahun 2023 tentang Susunan Organisasi Perusahaan Umum Daerah Pembangunan Sarana Jaya adalah sebagai berikut:

1. Mengusahakan dan menjamin terlaksananya usaha dan kegiatan Perusahaan Umum Daerah Pembangunan Sarana Jaya sesuai dengan maksud dan tujuan serta kegiatan usahanya;
2. Menyiapkan Rencana Bisnis serta Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan Umum Daerah Pembangunan Sarana Jaya serta perubahannya, dan menyampaikannya kepada Dewan Pengawas dan KPM untuk mendapatkan pengesahan dari KPM;
3. Memberikan penjelasan kepada KPM mengenai Rencana Bisnis Perusahaan Umum Daerah Pembangunan Sarana Jaya;

As one of the main Company organs, the Board of Directors is tasked with carrying out all actions related to the management of the Company for the interests and according to the purpose and objectives of the Company. In carrying out its duties, the Board of Directors must comply with Regional Regulations, Governor Decrees, and other applicable laws and regulations. The Board of Directors must also implement the principles of transparency, accountability, responsibility, and fairness.

BOARD OF DIRECTORS APPOINTMENT AND TERM OF OFFICE

As KPM, the DKI Jakarta Provincial Governor appoints the Sarana Jaya Board of Directors at the recommendations of the Region-Owned Enterprise Development Agency (BP-BUMD). The appointment of Sarana Jaya Board of Directors is stipulated by the Governor's Decree.

The Board of Directors members are appointed for a maximum term of five years and may be reappointed for another term of office unless otherwise stipulated by the provisions of laws and regulations. If the Board of Directors members have particular expertise and/or excellent achievements, they may be appointed for a third term of office.

BOARD OF DIRECTORS DUTIES AND RESPONSIBILITIES

Duties of the Board of Directors per Jakarta Special Capital Region Governor's Decree No. 409 of 2023 on the Organizational Structure of Perusahaan Umum Daerah Pembangunan Sarana Jaya is as follows:

1. Strive for and guarantee the implementation of the business and activities of Perusahaan Umum Daerah Pembangunan Sarana Jaya following the aims and objectives and business activities;
2. Prepare a Business Plan and Work Plan and Budget for Perusahaan Umum Daerah Pembangunan Sarana Jaya, along with any amendments to it, and submit them to the Supervisory Board and KPM to obtain approval from KPM;
3. Provide an explanation to KPM regarding the Business Plan of the Perusahaan Umum Daerah Pembangunan Sarana Jaya;

- | | |
|---|--|
| <ol style="list-style-type: none"> 4. Memberikan penjelasan kepada KPM mengenai Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan Umum Daerah Pembangunan Sarana Jaya dalam hal persetujuan Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan Umum Daerah Pembangunan Sarana Jaya merupakan kewenangan KPM; 5. Memberikan penjelasan kepada Dewan Pengawas mengenai Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan Umum Daerah Pembangunan Sarana Jaya dalam hal persetujuan Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan Umum Daerah Pembangunan Sarana Jaya merupakan kewenangan Dewan Pengawas; 6. Membuat risalah rapat Direksi; 7. Membuat laporan tahunan sebagai wujud pertanggungjawaban pengurusan Perusahaan Umum Daerah Pembangunan Sarana Jaya dan dokumen keuangan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; 8. Menyusun laporan keuangan berdasarkan Standar Akuntansi Keuangan dan menyerahkan kepada akuntan publik untuk diaudit; 9. Menyampaikan dan memberikan penjelasan mengenai laporan bulanan, triwulanan, dan tahunan kepada Dewan Pengawas; 10. Memberikan penjelasan yang berkaitan dengan Pengurusan Perusahaan Umum Daerah Pembangunan Sarana Jaya apabila ditanya atau diminta anggota Dewan Pengawas dan/atau KPM; 11. Menyampaikan laporan tahunan yang telah ditandatangani Direksi dan Dewan Pengawas termasuk laporan keuangan yang telah diaudit kepada KPM untuk disetujui dan disahkan; 12. Memberikan penjelasan kepada KPM mengenai laporan tahunan; 13. Memelihara risalah rapat Direksi, laporan tahunan, dokumen keuangan Perusahaan Umum Daerah Pembangunan Sarana Jaya, dan dokumen lain; 14. Menyimpan risalah rapat Direksi, laporan bulanan, triwulanan, dan tahunan, dokumen keuangan, dan dokumen lain; 15. Menyusun sistem akuntansi sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan dan berdasarkan prinsip pengendalian intern, terutama fungsi pengurusan, pencatatan, penyimpanan, dan pengawasan; 16. Memberikan laporan berkala menurut cara dan waktu sesuai dengan ketentuan, serta laporan khusus dan laporan lainnya setiap kali diminta oleh Dewan Pengawas dan/atau KPM; | <ol style="list-style-type: none"> 4. Provide an explanation to KPM regarding the Work Plan and Budget of Perusahaan Umum Daerah Pembangunan Sarana Jaya in terms of approval of the Work Plan and Budget of Perusahaan Umum Daerah Pembangunan Sarana Jaya under the authority of KPM; 5. Provide an explanation to the Supervisory Board regarding the Work Plan and Budget of Perusahaan Umum Daerah Pembangunan Sarana Jaya in terms of approval of the Work Plan and Budget of Perusahaan Umum Daerah Pembangunan Sarana Jaya within the authority of the Supervisory Board; 6. Prepare minutes of Board of Directors meetings; 7. Prepare an annual report as a form of accountability for the management of Perusahaan Umum Daerah Pembangunan Sarana Jaya and financial documents per the provisions of statutory regulations; 8. Prepare financial statements based on Financial Accounting Standards and submit them to a public accountant for audit; 9. Submit and provide explanations regarding monthly, quarterly, and annual reports to the Supervisory Board; 10. Provide explanations relating to the management of Perusahaan Umum Daerah Pembangunan Sarana Jaya if asked or requested by members of the Supervisory Board and/or KPM; 11. Submit an annual report that has been signed by the Board of Directors and Supervisory Board, including audited financial reports to KPM for approval and ratification; 12. Provide explanations to KPM regarding the annual report; 13. Maintain minutes of Board of Directors meetings, annual reports, financial documents of Perusahaan Umum Daerah Pembangunan Sarana Jaya, and other documents; 14. Keep minutes of Board of Directors meetings, monthly, quarterly, and annual reports, financial documents, and other documents; 15. Develop an accounting system per Financial Accounting Standards and based on internal control principles, especially the functions of management, recording, storage, and supervision; 16. Provide periodic reports according to the method and time following the provisions, as well as special reports and other reports whenever requested by the Supervisory Board and/or KPM; |
|---|--|

- | | |
|--|---|
| <p>17. Menyiapkan susunan organisasi Perusahaan Umum Daerah Pembangunan Sarana Jaya lengkap dengan perincian dan tugasnya;</p> <p>18. Menyusun dan menetapkan cetak biru (<i>blue print</i>) organisasi Perusahaan Umum Daerah Pembangunan Sarana Jaya;</p> <p>19. Menyusun indikator pencapaian kinerja Direksi untuk dimintakan persetujuan KPM; dan</p> <p>20. Menjalankan hal-hal lainnya sebagaimana diatur dalam anggaran dasar, keputusan KPM, dan/atau ketentuan peraturan perundang-undangan.</p> | <p>17. Prepare the organizational structure of Perusahaan Umum Daerah Pembangunan Sarana Jaya, complete with details and duties;</p> <p>18. Prepare and establish a blueprint for the organization of Perusahaan Umum Daerah Pembangunan Sarana Jaya;</p> <p>19. Develop performance achievement indicators for the Board of Directors to request KPM approval; and</p> <p>20. Carry out other matters as regulated in the articles of association, KPM decisions, and/or statutory provisions.</p> |
|--|---|

PEMBAGIAN TUGAS DIREKSI

Selain melaksanakan tanggung jawab secara kolegal, setiap anggota Direksi juga memiliki tugas dan tanggung jawab yang khusus sesuai dengan bidang masing-masing. Informasi terperinci mengenai pembagian tugas di dalam Direksi dijelaskan pada tabel berikut:

DIVISION OF BOARD OF DIRECTORS DUTIES

Apart from carrying out collegial responsibilities, every Board of Directors member also has specific duties and responsibilities per their respective fields. Detailed information regarding the division of duties in the Board of Directors is explained in the following table:

Nama Name	Jabatan Position	Tugas Duty
Andira Reoputra	Direktur Utama President Director	<ol style="list-style-type: none"> Mengendalikan tata kelola perusahaan melalui fungsi pengendalian internal, relasi dan komunikasi Perusahaan, pengelolaan risiko serta hukum Perusahaan; Controlling corporate governance through internal control functions, corporate relations and communications, risk management, and corporate law; Menetapkan arahan strategis serta pengendalian terhadap pengelolaan strategi dan bisnis Perusahaan serta memastikan keselarasan dengan aspirasi KPM; Determine strategic direction and control over the management of the Company's strategy and business and ensure alignment with KPM aspirations; Menetapkan arahan strategis kegiatan pengembangan usaha dan pengelolaan aset demi menjaga kelangsungan bisnis dan pencapaian target Perusahaan; dan Determine strategic direction for business development and asset management activities to maintain business continuity and achieve Company targets; and Menetapkan arahan strategis dan pengendalian kegiatan dukungan bisnis perusahaan (SDM, IT, keuangan, pelayanan umum) demi terjaganya keseimbangan dan efisiensi operasional Perusahaan. Determine strategic direction and control of the company's business support activities (HR, IT, finance, public services) to maintain the balance and efficiency of the Company's operations.
Indra Sukmono Arharrys	Direktur Pengembangan Director of Development	<ol style="list-style-type: none"> Menetapkan arahan strategis dan penyusunan rencana serta <i>monitoring</i> dan evaluasi implementasi strategi Perusahaan, termasuk keselarasan dengan aspirasi pemegang saham; Determine strategic direction and prepare plans, as well as monitor and evaluate the implementation of the Company's strategy, including alignment with shareholder aspirations; Mengendalikan pengelolaan alat produksi Perusahaan baik bisnis baru maupun <i>business as usual</i> demi pencapaian optimal terhadap target bisnis Perusahaan, termasuk pengendalian terhadap kegiatan kemitraan strategis yang dilakukan; Controlling the management of the Company's production equipment, both new business and business as usual, for optimal achievement of the Company's business targets, including controlling strategic partnership activities carried out; Mengendalikan pengelolaan aset pertanahan dimulai dari proses akuisisi hingga proses pengamanan terhadap aset tanah; Controlling the management of land assets, starting from the acquisition process to the process of securing land assets;

Nama Name	Jabatan Position	Tugas Duty
		<p>4. Menetapkan arahan strategis dan pengendalian kegiatan operasional perusahaan meliputi kegiatan pemasaran dan penjualan, pengelolaan aset, pembangunan aset baru; Determine strategic direction and control of company operational activities, including marketing and sales activities, asset management, and development of new assets;</p> <p>5. Menetapkan arahan strategis dan pengendalian kegiatan komersialisasi pada aset <i>existing</i>/alat produksi (<i>recurring income</i>) serta menjaga optimalisasi <i>occupation rate</i>; Determine strategic direction and control of commercialization activities on existing assets/production equipment (<i>recurring income</i>) and maintain the optimization of the occupation rate;</p> <p>6. Mengendalikan proyek pembangunan dan pemeliharaan aset, termasuk terhadap kepemilikan aset untuk memastikan terjaganya kepemilikan aset, serta pengendalian proyek-proyek pembangunan; dan Controlling development projects and asset maintenance, including asset ownership, to ensure that asset ownership is maintained, as well as controlling development projects; and</p> <p>7. Menetapkan arahan strategis dan pengendalian kegiatan dukungan terhadap kegiatan operasional Perusahaan berupa kegiatan pengadaan. Determine strategic direction and control of support activities for the Company's operational activities in the form of procurement activities.</p>
Irwan Agustusan	Direktur Administrasi dan Keuangan Director of Administration and Finance	<p>1. Menetapkan arahan strategis serta pengendalian keuangan korporasi dan pengelolaan pendanaan Perusahaan guna tercapainya pengelolaan Perusahaan yang optimal untuk mendukung berjalannya operasional Perusahaan; Determine strategic direction and control of corporate finances and management of Company funding to achieve optimal Company management to support the Company's operations;</p> <p>2. Menetapkan arahan strategis dan pengendalian kegiatan akuntansi perusahaan dan keuangan untuk memastikan tersedianya laporan keuangan yang tepat dan akurat untuk mendukung manajemen dalam pengambilan keputusan-keputusan penting; Establish strategic direction and control of corporate accounting and financial activities to ensure the availability of appropriate and accurate financial reports to support management in making important decisions;</p> <p>3. Menetapkan arahan strategis dalam perpajakan Perusahaan untuk memastikan ketertiban akuntansi administrasi dan pelaporan perpajakan; dan Establish strategic direction in Company taxation to ensure orderly administrative accounting and tax reporting; and</p> <p>4. Menetapkan arahan strategis dan pengendalian kegiatan teknologi informasi; Establish strategic directives and control of information technology activities;</p> <p>5. Menetapkan arahan strategis dan pengendalian kegiatan dukungan terhadap kegiatan operasional Perusahaan berupa kegiatan pengelolaan SDM dan umum. Determine strategic directives and control of support activities for the Company's operational activities in the form of HR and general management activities.</p>

WEWENANG DIREKSI

Wewenang Direksi secara rinci adalah sebagai berikut:

1. Menetapkan kebijakan pengurusan Perusahaan Umum Daerah Pembangunan Sarana Jaya;
2. Menetapkan kebijakan terkait Pengadaan Barang/Jasa Perusahaan Umum Daerah Pembangunan Sarana Jaya sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
3. Mengatur penyerahan kekuasaan Direksi kepada seorang atau beberapa orang anggota Direksi untuk mengambil keputusan atas nama Direksi atau mewakili Perusahaan Umum Daerah Pembangunan Sarana Jaya di dalam dan di luar pengadilan;

BOARD OF DIRECTORS AUTHORITIES

The Board of Directors' authority in detail is as follows:

1. Establish management policies for Perusahaan Umum Daerah Pembangunan Sarana Jaya;
2. Establish policies regarding the procurement of goods/services for Perusahaan Umum Daerah Pembangunan Sarana Jaya following the provisions of statutory regulations;
3. Regulate the transfer of power of the Board of Directors to one or several members of the Board of Directors to make decisions on behalf of the Board of Directors or represent Perusahaan Umum Daerah Pembangunan Sarana Jaya inside and outside the court;

4. Mengatur penyerahan kekuasaan Direksi kepada seorang atau beberapa orang pekerja baik sendiri-sendiri maupun bersama-sama atau kepada orang lain untuk mewakili Perusahaan Umum Daerah Pembangunan Sarana Jaya di dalam dan di luar pengadilan;
5. Mengatur ketentuan tentang ketenagakerjaan Perusahaan Umum Daerah Pembangunan Sarana Jaya termasuk penetapan gaji, pensiun atau jaminan hari tua, dan penghasilan lain bagi pekerja berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan dan kemampuan Perusahaan;
6. Mengangkat dan memberhentikan pekerja berdasarkan peraturan ketenagakerjaan Perusahaan Umum Daerah Pembangunan Sarana Jaya dan peraturan perundang-undangan;
7. Mengangkat dan memberhentikan Sekretaris Perusahaan, Kepala Satuan Pengawasan Intern, dan jabatan struktural lainnya; dan
8. Melakukan segala tindakan dan perbuatan lainnya mengenai pengurusan dan pemilikan kekayaan Perusahaan Umum Daerah Pembangunan Sarana Jaya, mengikat Perusahaan Umum Daerah Pembangunan Sarana Jaya dengan pihak lain dan/atau pihak lain dengan Perusahaan Umum Daerah Pembangunan Sarana Jaya, serta mewakili Perusahaan Umum Daerah Pembangunan Sarana Jaya di dalam dan di luar pengadilan tentang segala hal dan segala kejadian, dengan pembatasan sebagaimana diatur dalam anggaran dasar dan/atau ketentuan peraturan perundang-undangan.

BOARD MANUAL

Dalam pelaksanaan tugas dan tanggung jawabnya, Direksi mengacu pada Pedoman Tata Kerja (*Board Manual*) Dewan Pengawas dan Direksi Perumda Pembangunan Sarana Jaya. Pedoman ini telah ditetapkan oleh Dewan Pengawas dan Direksi pada tanggal 29 Desember 2020, dan mencakup berbagai ketentuan, termasuk aturan mengenai tugas, wewenang, tanggung jawab, hak, dan kewajiban Direksi Dewan Pengawas dan Direksi.

Penyusunan *Board Manual* merupakan wujud dari komitmen Perusahaan untuk konsisten menerapkan GCG di Perusahaan dengan tingkat akuntabilitas yang tinggi untuk mencapai Visi dan Misi yang telah ditetapkan, serta menerapkan nilai-nilai yang dianut oleh Perusahaan.

BOARD MANUAL

In carrying out their duties and responsibilities, the Board of Directors refers to the Board Manual of the Supervisory Board and Board Directors of Perumda Pembangunan Sarana Jaya. These guidelines were established by the Supervisory Board and Board of Directors on December 29, 2020, and include various provisions, including rules regarding the duties, authority, responsibilities, rights, and obligations of the Board of Directors, Supervisory Board, and Board of Directors.

The Board Manual's preparation manifests the Company's commitment to consistently implement GCG with a high level of accountability to achieve the established Vision and Mission, as well as implementing the values espoused by the Company.

Board Manual secara rutin ditinjau untuk disesuaikan dengan perubahan dalam peraturan perundang-undangan. Segala aspek akan diselaraskan seiring dengan perkembangan tersebut, sehingga tetap relevan dan mematuhi ketentuan hukum yang berlaku.

The Board Manual is regularly reviewed to adapt to changes in statutory regulations. All aspects will be aligned with these developments to remain relevant and comply with applicable legal provisions.

RAPAT DIREKSI Kebijakan Rapat

Perusahaan mewajibkan Direksi untuk menyelenggarakan Rapat Direksi secara berkala. Kebijakan terkait pelaksanaan rapat Direksi telah diatur dalam *Board Manual*.

BOARD OF DIRECTORS MEETINGS Meeting Policy

The Company requires the Board of Directors to hold meetings periodically. Policies related to the implementation of Board of Directors meetings have been regulated in the Board Manual.

Rapat Direksi yang diselenggarakan bertujuan untuk menghasilkan keputusan-keputusan strategis terkait manajemen operasional Perusahaan. Namun, dalam keadaan tertentu, keputusan Direksi dapat diambil di luar rapat asalkan semua anggota Direksi setuju terhadap cara dan materi yang diputuskan. Pada setiap rapat Direksi, dibuat risalah yang mencatat pembahasan dan keputusan yang diambil, termasuk jika ada pernyataan ketidaksetujuan dari anggota Direksi.

The Board of Directors meetings aim to produce strategic decisions related to the Company's operational management. However, in certain circumstances, the Board of Directors' decisions can be taken outside the meeting as long as all members agree to the method and materials decided. At every Board of Directors meeting, minutes are drawn to record the discussions and decisions taken, including any statements of disagreement from the Board of Directors members.

Dalam menjalankan tugasnya, Direksi diwajibkan untuk hadir dalam Rapat Internal Direksi dan Rapat Gabungan Direksi dengan Dewan Pengawas.

In carrying out their duties, the Board of Directors must attend Internal Board of Directors Meetings and Joint Meetings of the Board of Directors and the Supervisory Board.

Frekuensi Rapat dan Tingkat Kehadiran Anggota di Tahun 2023

Pada tahun 2023, Direksi memberikan kebijakan untuk Penyelenggaraan Rapat BOD dilaksanakan setiap minggu pada hari Kamis/Jumat tahun 2023. Rapat Direksi telah diadakan sebanyak 16 kali. Di samping itu, Rapat Gabungan Direksi dengan Dewan Pengawas juga telah diadakan sebanyak 11 (sebelas) kali. Informasi terperinci tentang kehadiran anggota Direksi pada rapat-rapat tersebut diuraikan dalam tabel berikut:

Meeting Frequency and Member Attendance Levels in 2023

In 2023, the Board of Directors adopted a policy of organizing BOD meetings every Thursday/Friday. BOD meetings have been held as many as 16 times. In addition, there were 11 Joint Meetings of the Board of Directors and the Supervisory Board. Detailed information about the attendance of the Board of Directors members at these meetings is described in the following table:

Nama Name	Jabatan Position	Masa Menjabat di Tahun 2023 Term of Office in 2023	Rapat Internal Internal Meetings			Rapat Gabungan dengan Dewan Pengawas Joint Meetings With The Supervisory Board		
			Jumlah Rapat Total Meetings	Jumlah Kehadiran Total Attendance	Tingkat Kehadiran Attendance Level	Jumlah Rapat Total Meetings	Jumlah Kehadiran Total Attendance	Tingkat Kehadiran Attendance Level
Agus Himawan Widiyanto	Direktur Utama President Director	1 Januari 2023 – 31 Juli 2023 January 1, 2023 – July 31, 2023	4	4	100%	6	6	100%
Bima Priya Santosa	Direktur Administrasi dan Keuangan Director of Administration and Finance	1 Januari 2023 – 12 Juli 2023 January 1, 2023 – July 12, 2023	4	4	100%	5	5	100%

Nama Name	Jabatan Position	Masa Menjabat di Tahun 2023 Term of Office in 2023	Rapat Internal Internal Meetings			Rapat Gabungan dengan Dewan Pengawas Joint Meetings With The Supervisory Board		
			Jumlah Rapat Total Meetings	Jumlah Kehadiran Total Attendance	Tingkat Kehadiran Attendance Level	Jumlah Rapat Total Meetings	Jumlah Kehadiran Total Attendance	Tingkat Kehadiran Attendance Level
Indra Sukmono Arharrys	Direktur Pengembangan Director of Development	1 Januari 2023 – 31 Desember 2023 January 1, 2023 – December 31, 2023	16	16	100%	11	11	100%
	Plt. Direktur Administrasi dan Keuangan Acting Director of Administration and Finance	12 Juli 2023 – 13 Oktober 2023 January 1, 2023 – October 13, 2023	8	8	100%	6	6	100%
Andira Reoputra	Direktur Utama President Director	31 Juli 2023 – 31 Desember 2023 July 31, 2023 – December 31, 2023	12	12	100%	4	4	100%
Irwan Agustuslan	Direktur Administrasi dan Keuangan Director of Administration and Finance	13 Oktober 2023 – 31 Desember 2023 October 13, 2023 – December 31, 2023	6	6	100%	3	3	100%

PROGRAM PENINGKATAN KAPABILITAS

ANGGOTA DIREKSI [GRI 2-17]

Kebijakan Peningkatan Kapabilitas

Hingga akhir tahun 2023, Perusahaan belum memiliki kebijakan yang secara khusus mengatur tentang program peningkatan kapabilitas anggota Direksi. Meskipun demikian, dalam praktiknya, Perusahaan selalu memberikan dukungan dan fasilitas kepada anggota Direksi untuk meningkatkan kapabilitas dan pemahamannya terkait perkembangan terkini dalam *core business* Perusahaan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Program peningkatan kapabilitas dapat berupa keikutsertaan dalam seminar, *workshop*, dan kegiatan serupa sesuai dengan kebutuhan yang dapat mendukung pelaksanaan tugas Direksi.

CAPABILITY DEVELOPMENT PROGRAM FOR

BOARD OF DIRECTORS MEMBERS [GRI 2-17]

Capability Development Policy

Until the end of 2023, the Company does not yet have a policy that specifically regulates programs to increase the capabilities of the Board of Directors members. However, in practice, the Company always provides support and facilities to the Board of Directors members to improve their capabilities and understanding regarding the latest developments in the Company's core business and applicable laws and regulations.

Capability improvement programs can take the form of participation in seminars, workshops, and similar activities according to needs that can support the implementation of the Board of Directors' duties.

Pelaksanaan Program Peningkatan Kapabilitas Tahun 2023

Program peningkatan kapabilitas yang diikuti oleh anggota Direksi pada tahun 2023 diuraikan pada tabel berikut:

Nama Direksi Director Name	Tanggal Pelaksanaan Implementation Date	Nama Program Program Name	Penyelenggara Organizer
Agus Himawan Widiyanto	29 Mei 2023 May 29, 2023	Bimbingan Teknis bagi Para Komisaris dan Direksi BUMD beserta Pasangan dalam rangka Mewujudkan Keluarga Berintegritas melalui Penanaman Nilai-Nilai Antikorupsi bersama Komisi Pemberantasan Korupsi	Pemerintah Provinsi DKI Jakarta (Sekretaris Daerah DKI Jakarta)
Bima Priya Santosa		Technical Guidance for BUMD Commissioners and Board of Directors and Their Spouses in Creating Families with Integrity through Instilling Anti-Corruption Values with the Corruption Eradication Commission	DKI Jakarta Provincial Government (DKI Jakarta Regional Secretary)
Indra Sukmono Arharrys			

Capability Development Program Implementation in 2023

The capability improvement program that the Board of Directors members participated in 2023 is described in the following table:

PROGRAM PENGENALAN BAGI ANGGOTA DIREKSI YANG BARU DIANGKAT

Perusahaan menyelenggarakan program pengenalan bagi anggota Direksi yang baru pertama kali diangkat. Program pengenalan dilakukan untuk memberikan gambaran dan informasi yang berkaitan dengan Perusahaan, serta tugas dan tanggung jawab Direksi. Materi yang disampaikan antara lain terkait dengan *company profile* Sarana Jaya, manajemen risiko, Rencana kerja dan Anggaran Perusahaan (RKAP) dan lain sebagainya.

Pada tahun 2023, Perusahaan telah menyelenggarakan program orientasi bagi Direksi yang baru diangkat, yaitu Andira Reoputra dan Irwan Agustuslan, pada tanggal 2 Agustus 2023 dan 18 Oktober 2023.

PENILAIAN DIREKSI TERHADAP KINERJA KOMITE PENDUKUNG DIREKSI

Hingga akhir tahun 2023, Perusahaan belum membentuk komite di bawah Direksi. Dengan demikian informasi tentang penilaian Direksi terhadap kinerja Komite pendukung Direksi tidak relevan untuk disajikan pada Laporan Tahunan 2023.

INDUCTION PROGRAM FOR NEWLY APPOINTED BOARD OF DIRECTORS MEMBERS

The Company organizes an induction program for newly appointed Board of Directors members. The induction program provides an overview and information relating to the Company, as well as the duties and responsibilities of the Board of Directors. The material presented includes, among other things, Sarana Jaya's company profile, risk management, Company Work Plan and Budget (RKAP), etc.

In 2023, the Company held an orientation program for the newly appointed Directors, i.e., Andira Reoputra and Irwan Agustuslan, on August 2, 2023, and October 18, 2023.

BOARD OF DIRECTORS ASSESSMENT ON THE PERFORMANCE OF BOARD OF DIRECTORS' SUPPORTING COMMITTEES

Until the end of 2023, the Company has not established a committee under the Board of Directors. Thus, information regarding the Board of Directors' assessment of the performance of the Board of Directors' supporting committees is irrelevant to be presented in the 2023 Annual Report.

DEWAN PENGAWAS

SUPERVISORY BOARD

Dewan Pengawas merupakan salah satu organ utama Perusahaan yang berperan dalam mendukung struktur GCG. Tugas utama Dewan Pengawas melibatkan pengawasan dan pemberian nasihat kepada Direksi dalam menjalankan kegiatan pengurusan Perusahaan. Fungsi utamanya mencakup pemantauan efektivitas penerapan GCG sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

PENGANGKATAN DAN MASA JABATAN DEWAN PENGAWAS

Gubernur Provinsi DKI Jakarta, selaku KPM, mengangkat Dewan Pengawas atas usul Badan Pembinaan Badan Usaha Milik Daerah (BP-BUMD), dan pengangkatannya ditetapkan melalui Surat Keputusan Gubernur. Dengan demikian, Dewan Pengawas wajib mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugasnya kepada KPM.

Anggota Dewan Pengawas diangkat untuk masa jabatan paling lama 4 (empat) tahun dan setelah masa jabatannya berakhir dapat dipilih kembali untuk satu kali masa jabatan.

TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB DEWAN PENGAWAS

Keputusan Gubernur Daerah Khusus Ibukota Jakarta No. 409 Tahun 2023 tentang Susunan Organisasi Perusahaan Umum Daerah Pembangunan Sarana Jaya telah menetapkan tugas Dewan Pengawas sebagai berikut:

1. Memberi nasihat kepada Direksi dalam melaksanakan pengurusan Perusahaan Umum Daerah Pembangunan Sarana Jaya;
2. Meneliti dan menelaah serta menandatangani Rencana Bisnis serta Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan Umum Daerah Pembangunan Sarana Jaya yang disiapkan Direksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
3. Memberikan pendapat dan saran kepada Gubernur selaku Kepala Daerah yang mewakili Pemerintah Daerah dalam Kepemilikan Kekayaan Daerah yang dipisahkan pada Perusahaan Umum Daerah (KPM) mengenai Rencana Bisnis serta Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan Umum Daerah Pembangunan Sarana Jaya;
4. Mengikuti perkembangan kegiatan Perusahaan Umum Daerah Pembangunan Sarana Jaya, memberikan pendapat dan saran kepada KPM mengenai setiap masalah yang dianggap penting bagi pengurusan Perusahaan Umum Daerah Pembangunan Sarana Jaya;

The Supervisory Board is one of the main Company organs that play a role in supporting the GCG structure. The Supervisory Board's main duties involve supervising and advising the Board of Directors in carrying out the Company's management activities. Its main function includes monitoring the effectiveness of GCG implementation following applicable laws and regulations.

SUPERVISORY BOARD APPOINTMENT AND TERM OF OFFICE

As KPM, the DKI Jakarta Governor appoints the Supervisory Board at the suggestion of the Region-Owned Enterprise Development Agency (BP-BUMD) and the appointment is determined through a Governor's Decree. Thus, the Supervisory Board is obliged to be accountable for implementing its duties to KPM.

The Supervisory Board members are appointed for a maximum term of office of four years, and after their term of office ends, they can be re-elected for one more term.

SUPERVISORY BOARD DUTIES AND RESPONSIBILITIES

Decree of Jakarta Special Capital Region Governor No. 409 of 2023 on the Organizational Structure of Perusahaan Umum Daerah Pembangunan Sarana Jaya has determined the following duties of the Supervisory Board:

1. Provide advice to the Board of Directors in carrying out the management of Perusahaan Umum Daerah Pembangunan Sarana Jaya;
2. Examine, review, and sign the Business Plan, as well as the Work Plan and Budget of Perusahaan Umum Daerah Pembangunan Sarana Jaya, prepared by the Board of Directors following the provisions of statutory regulations;
3. Provide opinions and suggestions to the Governor as the Regional Head Representing the Regional Government in Ownership of Separated Regional Assets (KPM) regarding the Business Plan and Work Plan and Budget of Perusahaan Umum Daerah Pembangunan Sarana Jaya;
4. Follow developments in the activities of Perusahaan Umum Daerah Pembangunan Sarana Jaya, provide opinions and suggestions to KPM regarding any issues deemed important for the management of Perusahaan Umum Daerah Pembangunan Sarana Jaya;

- | | |
|---|---|
| <ol style="list-style-type: none"> 5. Melaporkan dengan segera kepada KPM apabila terjadi gejala menurunnya kinerja Perusahaan Umum Daerah Pembangunan Sarana Jaya; 6. Meneliti dan menelaah laporan berkala dan laporan tahunan yang disiapkan Direksi serta menandatangani laporan tahunan; 7. Memberikan penjelasan, pendapat, dan saran kepada KPM mengenai laporan tahunan, apabila diminta; 8. Menyusun rencana kerja dan anggaran tahunan Badan Pengawas yang dimasukkan dalam Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan Umum Daerah Pembangunan Sarana Jaya; 9. Menyusun indikator pencapaian kinerja Badan Pengawas untuk dimintakan persetujuan KPM; 10. Membentuk Komite Audit; 11. Menunjuk auditor eksternal; 12. Membuat risalah rapat Badan Pengawas dan menyimpan salinannya serta menyampaikan aslinya kepada Direksi; 13. Memberikan laporan tentang tugas pengawasan yang telah dilakukan selama tahun buku yang baru berakhir kepada KPM; dan 14. Melaksanakan kewajiban lainnya dalam rangka tugas pengawasan dan pemberian nasihat, sepanjang tidak bertentangan dengan anggaran dasar, keputusan KPM, dan/atau ketentuan peraturan perundang-undangan. | <ol style="list-style-type: none"> 5. Report immediately to KPM if there are symptoms of declining performance of Perusahaan Umum Daerah Pembangunan Sarana Jaya; 6. Examine and review periodic reports and annual reports prepared by the Board of Directors and sign the annual report; 7. Provide explanations, opinions, and suggestions to KPM regarding the annual report, if requested; 8. Prepare the Supervisory Agency's annual work plan and budget, which is included in the Work Plan and Budget of Perusahaan Umum Daerah Pembangunan Sarana Jaya; 9. Develop performance achievement indicators for the Supervisory Body to request KPM approval; 10. Establish an Audit Committee; 11. Appoint an external auditor; 12. Prepare minutes of Supervisory Board meetings, keep copies of them, and submit the originals to the Board of Directors; 13. Provide a report on the supervisory tasks that have been carried out during the fiscal year that has just ended to KPM; and 14. Carry out other obligations in the context of supervisory duties and providing advice, as long as they do not conflict with the articles of association, KPM resolutions, and/or statutory provisions. |
|---|---|

PEMBAGIAN TUGAS ANGGOTA DEWAN PENGAWAS

Selain memiliki tugas dan tanggung jawab secara kolegal, Dewan Pengawas juga mengemban tugas secara individual sesuai dengan bidangnya masing-masing. Pembagian tugas anggota Dewan Pengawas per 31 Desember 2023 dijelaskan lebih rinci pada tabel berikut:

DIVISION OF SUPERVISORY BOARD MEMBER DUTIES

Apart from having collegial duties and responsibilities, the Supervisory Board also carries out individual duties per their respective fields. The division of Supervisory Board members duties per December 31, 2023, is explained in detail in the following table:

Nama Name	Jabatan Position	Tugas Pengawasan Supervisory Duties
Andi Muhammad Iqbal Arief	Ketua Dewan Pengawas Chairman of the Supervisory Board	Mengkoordinasikan keseluruhan bidang pengawasan, termasuk pelaksanaan Kegiatan Strategis Daerah (KSD), realisasi Penyertaan Modal Daerah (PMD) serta fungsi pembinaan anak Perusahaan. Coordinate all areas of supervision, including the implementation of Regional Strategic Activities (KSD), the realization of Regional Equity Participation (PMD), and the subsidiary development function.
Arief Rachman	Sekretaris Dewan Pengawas Secretary to the Supervisory Board	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pengawasan di bidang dan fungsi satuan pengawas intern, keuangan dan akuntansi, bidang kerja sama dan pengembangan usaha, pengelolaan proyek serta fungsi sistem informasi. Supervise the functions of internal supervisory units, finance and accounting, cooperation and business development, project management, as well as information system functions. 2. Pengawasan di bidang tata kelola perusahaan (<i>Good Corporate Governance/GCG</i>), manajemen risiko, Remunerasi dan Nominasi, bidang pertanahan dan hukum, SDM serta fungsi tanggung jawab sosial Perusahaan. Supervise the corporate governance (<i>Good Corporate Governance/GCG</i>), risk management, Remuneration and Nomination, land and legal, HR, and corporate social responsibility functions.

WEWENANG DEWAN PENGAWAS

Wewenang Dewan Pengawas sesuai dengan Keputusan Gubernur No. 409 Tahun 2023 adalah sebagai berikut:

1. Memberikan peringatan kepada Direksi yang tidak melaksanakan tugas sesuai dengan program kerja yang telah disetujui;
2. Memeriksa Direksi yang diduga merugikan Perusahaan;
3. Memberikan persetujuan dan/atau pertimbangan terhadap Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan Umum Daerah Pembangunan Sarana Jaya untuk ditetapkan/disahkan oleh KPM;
4. Menerima atau menolak pertanggungjawaban keuangan dan program kerja Direksi tahun berjalan;
5. Memeriksa surat-surat, dokumen-dokumen, keadaan kas (untuk keperluan verifikasi), dan kekayaan Perusahaan;
6. Memasuki pekarangan-pekarangan, gedung-gedung, dan kantor-kantor yang dipergunakan oleh Perusahaan;
7. Meminta penjelasan dari Direksi mengenai segala persoalan yang menyangkut pengelolaan Perusahaan;
8. Meminta Direksi dan/atau pejabat lainnya untuk menghadiri rapat yang diadakan oleh Dewan Pengawas;
9. Menghadiri rapat Direksi dan memberikan pandangan mengenai hal-hal yang dibicarakan; dan
10. Melaksanakan kewenangan pengawasan lainnya sepanjang tidak bertentangan dengan anggaran dasar, keputusan KPM, dan/atau ketentuan peraturan perundang-undangan.

BOARD MANUAL

Dalam pelaksanaan tugas dan tanggung jawabnya, Dewan Pengawas mengacu pada Pedoman Tata Kerja (*Board Manual*) Dewan Pengawas dan Direksi Perumda Pembangunan Sarana Jaya. Pedoman ini telah ditetapkan oleh Dewan Pengawas dan Direksi pada tanggal 29 Desember 2020, dan mencakup berbagai ketentuan, termasuk aturan mengenai tugas, wewenang, tanggung jawab, hak, dan kewajiban Direksi Dewan Pengawas dan Direksi.

Penyusunan *Board Manual* merupakan wujud dari komitmen Perusahaan untuk konsisten menerapkan GCG di Perusahaan dengan tingkat akuntabilitas yang tinggi untuk mencapai Visi dan Misi yang telah ditetapkan, serta menerapkan nilai-nilai yang dianut oleh Perusahaan.

SUPERVISORY BOARD AUTHORITIES

The Supervisory Board's authorities per Governor's Decree no. 409 of 2023 are as follows:

1. Warn Board of Directors who do not carry out their duties per the approved work program;
2. Examining Board of Directors who are suspected of harming the Company;
3. Provide approval and/or consideration of the Work Plan and Budget of Perusahaan Umum Daerah Pembangunan Sarana Jaya to be determined/ratified by KPM;
4. Accept or reject the financial accountability and work program of the Board of Directors for the current year;
5. Check letters, documents, cash condition (for verification purposes), and Company assets;
6. Entering yards, buildings and offices used by the Company;
7. Request an explanation from the Board of Directors regarding all issues related to Company management;
8. Ask the Board of Directors and/or other officials to attend meetings held by the Supervisory Board;
9. Attend Board of Directors meetings and provide views on matters discussed; and
10. Carry out other supervisory authority as long as it does not conflict with the articles of association, KPM resolutions, and/or statutory provisions.

BOARD MANUAL

In carrying out their duties and responsibilities, the Supervisory Board refers to the Board Manual of the Supervisory Board and Board Directors of Perumda Pembangunan Sarana Jaya. These guidelines were established by the Supervisory Board and Board of Directors on December 29, 2020, and include various provisions, including rules regarding the duties, authority, responsibilities, rights, and obligations of the Board of Directors, Supervisory Board, and Board of Directors.

The Board Manual's preparation manifests the Company's commitment to consistently implement GCG with a high level of accountability to achieve the established Vision and Mission, as well as implementing the values espoused by the Company.

Board Manual secara rutin ditinjau untuk disesuaikan dengan perubahan dalam peraturan perundang-undangan. Segala aspek akan diselaraskan seiring dengan perkembangan tersebut, sehingga tetap relevan dan mematuhi ketentuan hukum yang berlaku.

The Board Manual is regularly reviewed to adapt to changes in statutory regulations. All aspects will be aligned with these developments to remain relevant and comply with applicable legal provisions.

RAPAT DEWAN PENGAWAS

Kebijakan Rapat

Perusahaan mewajibkan Dewan Pengawas untuk menyelenggarakan Rapat Direksi secara berkala. Kebijakan terkait pelaksanaan rapat Dewan Pengawas telah diatur dalam *Board Manual*.

SUPERVISORY BOARD MEETINGS

Meeting Policy

The Company requires the Supervisory Board to hold meetings periodically. Policies related to the implementation of Supervisory Board meetings have been regulated in the Board Manual.

Rapat Dewan Pengawas yang diselenggarakan bertujuan untuk menghasilkan keputusan Dewan Pengawas. Namun, dalam keadaan tertentu, keputusan Dewan Pengawas dapat diambil di luar rapat asalkan semua anggota Dewan Pengawas setuju terhadap cara dan materi yang diputuskan. Keputusan lebih lanjut mengenai rapat Dewan Pengawas ditetapkan dalam Prosedur Rapat Dewan Pengawas.

The Supervisory Board meeting aims to produce resolutions from the Supervisory Board. However, in certain circumstances, the Supervisory Board's resolution can be taken outside the meeting as long as all members agree to the method and materials decided. Further decisions regarding Supervisory Board meetings are stipulated in the Supervisory Board Meeting Procedures.

Dalam menjalankan tugasnya, Dewan Pengawas mengadakan rapat dengan pokok bahasan yang jelas, fokus dan tepat sasaran sekurang-kurangnya 1 (satu) bulan sekali atau sewaktu-waktu sesuai kebutuhan. Dewan Pengawas juga menghadiri Rapat dengan Komite dan Rapat Gabungan Dewan Pengawas dengan Direksi.

In carrying out its duties, the Supervisory Board holds meetings with clear, focused, and targeted discussion subjects at least once a month or at any time as needed. The Supervisory Board also attends meetings with committees and joint meetings between the Supervisory Board and the Board of Directors.

Frekuensi Rapat dan Tingkat Kehadiran Anggota di Tahun 2023

Pada tahun 2023, Dewan Pengawas telah mengadakan Rapat Internal Dewan Pengawas sebanyak 10 (sepuluh) kali, dan Rapat Dewan Pengawas mengundang Direksi sebanyak 13 (tiga belas) kali. Informasi tentang kehadiran anggota Dewan Pengawas pada rapat-rapat tersebut diuraikan dalam tabel berikut:

Meeting Frequency and Member Attendance Levels in 2023

In 2023, the Supervisory Board has held 10 Internal Supervisory Board Meetings, and 13 Supervisory Board Meetings with the Board of Directors. Information on the attendance of Supervisory Board members at these meetings is described in the following table:

Nama Name	Jabatan Position	Masa Menjabat di Tahun 2023 Term of Office in 2023	Rapat Internal Internal Meetings			Rapat Gabungan dengan Dewan Pengawas Joint Meetings With The Supervisory Board		
			Jumlah Rapat Total Meetings	Jumlah Kehadiran Total Attendance	Tingkat Kehadiran Attendance Level	Jumlah Rapat Total Meetings	Jumlah Kehadiran Total Attendance	Tingkat Kehadiran Attendance Level
Hasreiza	Ketua Dewan Pengawas Chairman of the Supervisory Board	1 Januari 2023 – 13 Maret 2023 January 1, 2023 – March 13, 2023	-	-	-	2	2	100%
Andi Muhammad Iqbal Arief	Ketua Dewan Pengawas Chairman of the Supervisory Board	14 Maret 2023 – 31 Desember 2023 March 14, 2023 – December 31, 2023	10	10	100%	11	11	100%

Nama Name	Jabatan Position	Masa Menjabat di Tahun 2023 Term of Office in 2023	Rapat Internal Internal Meetings			Rapat Gabungan dengan Dewan Pengawas Joint Meetings With The Supervisory Board		
			Jumlah Rapat Total Meetings	Jumlah Kehadiran Total Attendance	Tingkat Kehadiran Attendance Level	Jumlah Rapat Total Meetings	Jumlah Kehadiran Total Attendance	Tingkat Kehadiran Attendance Level
Arief Rachman	Sekretaris Dewan Pengawas Secretary to the Supervisory Board	1 Januari 2023 – 31 Desember 2023 January 1, 2023 – December 31, 2023	10	10	100%	13	13	100%
Arismal	Anggota Dewan Pengawas Supervisory Board Member	1 Januari 2023 – 13 Oktober 2023 January 1, 2023 – October 13, 2023	7	7	100%	13	13	100%

PROGRAM PENINGKATAN KAPABILITAS ANGGOTA DEWAN PENGAWAS

Kebijakan Peningkatan Kapabilitas

Kebijakan terkait dengan pelatihan dan atau peningkatan kompetensi anggota Dewan Pengawas telah diatur dalam *Board Manual*.

Dewan Pengawas melaksanakan program peningkatan kapabilitas agar dapat selalu memperbaharui informasi terkait perkembangan terkini dari *core business* Perusahaan serta peraturan perundang-undangan yang berlaku, dan sesuai dengan kebutuhan. Pelaksanaan pelatihan bagi anggota Dewan Pengawas direalisasikan sesuai dengan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) Dewan Pengawas Tahun 2023.

Program peningkatan kapabilitas Dewan Pengawas dapat berupa keikutsertaan dalam seminar, *workshop*, dan kegiatan serupa lainnya yang menunjang fungsi dan tugas Dewan Pengawas. Program dapat dilaksanakan di dalam maupun luar negeri sesuai anggaran yang tersedia.

Pelaksanaan Program Peningkatan Kapabilitas Tahun 2023

Program peningkatan kapabilitas yang diikuti oleh anggota Dewan Pengawas pada tahun 2023 diuraikan pada tabel berikut:

Nama Name	Tanggal Pelaksanaan Implementation Date	Materi Material	Penyelenggara Organizer
Arief Rachman	30-31 Maret 2023 March 30-31, 2023	<i>Finance For Non Finance</i> Finance for Non-Finance	Lambert Consulting & Training
	7-10 Agustus 2023 August 7-10, 2023	<i>Qualified Risk Management Professional (QRMP)</i> Qualified Risk Management Professional (QRMP)	PPM Manajemen PPM Management

CAPABILITY DEVELOPMENT PROGRAM FOR SUPERVISORY BOARD MEMBERS

Capability Development Policy

Policies related to training and/or improving the competency of Supervisory Board members have been regulated in the Board Manual.

The Supervisory Board carries out a capability improvement program to always update information related to the latest developments in the Company's core business as well as applicable laws and regulations per the Company's needs. The training implementation for Supervisory Board members is realized per the 2023 Supervisory Board Work Plan and Budget (RKA).

The program to increase the Supervisory Board's capabilities can be participating in seminars, workshops, and other similar activities supporting the Supervisory Board's functions and duties. The program can be implemented at home or abroad according to the available budget.

Capability Development Program Implementation in 2023

The capability improvement program that the Supervisory Board members participated in 2023 is outlined in the following table:

Peningkatan kapabilitas Dewan Pengawas juga dilakukan melalui kegiatan kunjungan ke alat produksi Sarana Jaya bersama dengan anggota Komite. Kunjungan ini merupakan kegiatan *sharing knowledge* dari Direksi dan jajaran manajemen untuk memberikan informasi terkait profil ringkas alat produksi yang dimiliki, termasuk perkembangan yang terjadi, tingkat hunian, pendapatan, dan keuntungan yang diperoleh dari alat produksi tersebut. Jadwal kunjungan kerja ke alat produksi Sarana Jaya yang telah dilakukan selama tahun 2023 adalah sebagai berikut:

The Supervisory Board’s capability improvement is also done through visits to Sarana Jaya production equipment with Committee members. The visit is a knowledge-sharing activity from the Board of Directors and management to provide information regarding a brief profile of the production equipment owned, including developments that have occurred, occupancy levels, income, and profits from the production equipment. The schedule for work visits to Sarana Jaya production equipment during 2023 is as follows:

Tanggal Date	Kunjungan Kerja Dewan Pengawas Supervisory Board Work Visits
4 April 2023 April 4, 2023	<ul style="list-style-type: none"> Naya Cikini Mercure Cikini Novotel Cikini Naya Menteng Kemari Menteng
11 April 2023 April 11, 2023	<ul style="list-style-type: none"> Hotel Veranda Veranda Hotel Proyek Lebak Bulus Lebak Bulus Project Lahan TB Simatupang TB Simatupang Land Pejaten Park Residence Proyek Tebet Tebet Project
13 April 2023 April 13, 2023	<ul style="list-style-type: none"> Cibubur Junction
10 Mei 2023 May 10, 2023	<ul style="list-style-type: none"> CBD Pulo Jahe Nuansa Cilangkap Nuansa Pondok Kelapa Mall Pokets Pokets Mall Apartemen Palma Citra Palma Citra Apartment
16 Mei 2023 May 16, 2023	<ul style="list-style-type: none"> Kawasan Rorotan Rorotan Area Plaza Atrium Senen Atrium Senen Plaza Wang Residence

PROGRAM PENGENALAN BAGI ANGGOTA DEWAN PENGAWAS YANG BARU DIANGKAT

Perusahaan menyelenggarakan program pengenalan bagi anggota Dewan Pengawas yang baru pertama kali diangkat. Program pengenalan dilakukan untuk memberikan informasi yang berkaitan dengan Perusahaan serta tugas dan tanggung jawab Dewan Pengawas. Materi yang disampaikan dalam program tersebut mencakup berbagai aspek, seperti *Overview, Vision and Mission, Values, Organizational Structure, Good Corporate Governance, Rights & Responsibilities, Management System, KSD, dan Kinerja Keuangan*.

INDUCTION PROGRAM FOR NEWLY APPOINTED SUPERVISORY BOARD MEMBERS

The Company organizes an induction program for newly appointed Supervisory Board members. The induction program provides an overview and information relating to the Company, as well as the duties and responsibilities of the Supervisory Board. The material presented in the program covers various aspects, such as Overview, Vision and Mission, Values, Organizational Structure, Good Corporate Governance, Rights & Responsibilities, Management System, KSD, and Financial Performance.

Pada tahun 2023, Perusahaan telah menyelenggarakan program orientasi bagi Dewan Pengawas yang baru diangkat, yaitu Andi Muhammad Iqbal Arief pada tanggal 16 Maret 2023.

In 2023, the Company held an orientation program for the newly appointed Supervisory Board, i.e., Andi Muhammad Iqbal Arief, on March 16, 2023.

PELAKSANAAN FUNGSI PENGAWASAN DAN PENASIHATAN TAHUN 2023

Sepanjang tahun 2023, Dewan Pengawas telah melaksanakan tugas pengawasan dan memberikan nasihat kepada Direksi terkait pengelolaan Perusahaan. Dalam hal ini, beberapa aspek yang menjadi perhatian utama antara lain:

1. Kinerja keuangan berdasarkan perjanjian kinerja Direksi dengan BP-BUMD yang terdiri dari:
 - a. Penyerapan *Capital Expenditure*;
 - b. Pencapaian laba bersih;
 - c. Rasio biaya operasional dan pendapatan operasional (BOPO);
 - d. Pencapaian pendapatan usaha.
2. Optimalisasi pengelolaan dan pelayanan alat produksi dalam bentuk *occupancy rate*.
3. Pengembangan usaha.
4. Pelaksanaan program Unggulan dan Strategis.
5. Realisasi PMD.

PERSETUJUAN DAN REKOMENDASI DEWAN PENGAWAS

Selama tahun 2023, Dewan Pengawas telah memberikan rekomendasi dan persetujuan kepada Direksi dalam melaksanakan fungsi pengawasan. Keputusan tersebut disampaikan baik melalui hasil rapat maupun dengan surat keputusan tersendiri. Beberapa hal yang dicakup dalam rekomendasi dan persetujuan tersebut meliputi:

1. Persetujuan Pemberian Pinjaman kepada PT Saranawisesa Properindo (SWP).
2. Persetujuan Perpanjangan Jangka Waktu Kerjasama Proyek Azraya Lebak Bulus.
3. Permohonan Surat Persetujuan Penyerahan Fasos Fasum sesuai SIPPT Nomor 1608/-1.711.534 tanggal 26 Agustus 2009”.
4. Persetujuan Laporan Tinjauan Manajemen Sistem Manajemen Anti Penyuapan (SMAP) Tahun 2022.
5. Persetujuan Manual Mutu Perusahaan.
6. Persetujuan Pelaksanaan Penunjukan Langsung Mitra Kerjasama Infrastruktur Jaringan Fiber Optik Berbasis Teknologi GPON.
7. Permohonan Pengesahan Assessment Penerapan GCG di Perusahaan.
8. Penyampaian Saran Dewan Pengawas atas KPI Korporasi Perusahaan Tahun 2023.
9. Persetujuan Dewan Pengawas atas KPI Korporasi Perusahaan Tahun 2023.
10. Persetujuan Pengadaan Tanah atas nama Zahrudin dan H. Asmawih di Rorotan, Cilincing, Jakarta Utara.

SUPERVISION AND ADVISORY FUNCTION IMPLEMENTATION IN 2023

Throughout 2023, the Supervisory Board has carried out supervisory duties and provided advice to the Board of Directors regarding the management of the Company. In this case, several aspects of the main concern include:

1. Financial performance based on the Board of Directors’ performance agreement with BP-BUMD, which consists of:
 - a. Absorption of Capital Expenditure;
 - b. Achievement of net profit;
 - c. Ratio of operating costs and operating revenue (BOPO);
 - d. Achievement of operating revenue.
2. Optimize the management and service of production equipment in the form of occupancy rate.
3. Business development.
4. Implementation of superior and strategic programs.
5. PMD realization.

SUPERVISORY BOARD APPROVAL AND RECOMMENDATION

Throughout 2023, the Supervisory Board has provided recommendations and approval to the Board of Directors in carrying out the supervisory function. The decision is conveyed through the meeting results or a separate decree. Some of the matters covered in the recommendations and approvals include:

1. Approval of Providing Loans to PT Saranawisesa Properindo (SWP).
2. Approval of the Collaboration Period Extension for the Azraya Lebak Bulus Project.
3. Request for Approval Letter for Handover of Public and Social Facilities per SIPPT No. 1608/-1,711,534 dated August 26, 2009.
4. Approval of the 2022 Anti-Bribery Management System (SMAP) Management Review Report.
5. Approval of the Quality Manual.
6. Approval of the Implementation of Direct Appointment of Fiber Optic Network Infrastructure Cooperation Partners Based on GPON Technology.
7. Application for Ratification of GCG Implementation Assessment in the Company.
8. Submission of the Supervisory Board’s Suggestions on the Company’s Corporate KPIs for 2023.
9. Supervisory Board approval of the Company’s Corporate KPIs for 2023.
10. Land Acquisition Approval in the name of Zahrudin and H. Asmawih in Rorotan, Cilincing, North Jakarta.

11. Permohonan Persetujuan Hibah Aset Galery Huni JAKHABITAT di Taman Martha Tiahahu.
12. Persetujuan SOP Unit Sekretaris Perusahaan.
13. Laporan Hasil Pengawasan Terhadap Pengelolaan BUMD PSJ Triwulan IV Tahun 2022.
14. Persetujuan SOP Pengadaan Tanah SPTA pada SBU Kawasan.
15. Persetujuan Pemberian Modal Kerja Kepada PT Saranawisesa Properindo.
16. Penyampaian Saran Dewan Pengawas terkait Permasalahan Hukum yang dihadapi oleh Perusahaan.
17. Persetujuan Perpanjangan Kerjasama Pengelolaan Fasilitas Terbuka Segitiga Atrium Senen.
18. Rekomendasi Atas Laporan Auditor Terhadap Laporan Keuangan Tahun 2022.
19. Persetujuan Pembelian Kembali (*Buyback*) Porsi PT Totalindo Eka Persada pada Proyek Azraya Lebak Bulus.
20. Perubahan Pengajuan Proposal Penyertaan Modal Daerah (PMD) pada APBD Perubahan 2023 dan APBD 2024.
21. Permohonan Persetujuan 2 SOP di SBU Kawasan.
22. Laporan Hasil Pengawasan Terhadap Pengelolaan BUMD Perusahaan Triwulan I Tahun 2023.
23. Permohonan Persetujuan Pelaksanaan Pengelolaan Mall Cibubur Junction.
24. Laporan Tugas Pengawasan Tahunan Dewan Pengawas Perusahaan Tahun 2022.
25. Persetujuan Perpanjangan Jangka Waktu Kerjasama Nuansa Cilangkap.
26. Persetujuan Addendum Akta Perjanjian Pembelian Kembali (*Buyback*) atas Porsi Penyertaan TEP pada Proyek Azraya Lebak Bulus.
27. Penyampaian Saran dan Rekomendasi Dewan Pengawas terkait Pengangkatan Kepala Satuan Pengawas Internal dan Sekretaris Perusahaan.
28. Permohonan Persetujuan Pelaksanaan Kerja Sama Pengembangan Lahan di Jl. R.A Kartini Nomor 42 Jakarta Selatan (TB. Simatupang).
29. Rekomendasi Atas Fasilitas Kredit Modal Kerja.
30. Permohonan Rekomendasi nama-nama Komisaris dan Direksi PT Saranawisesa Properindo.
31. Rekomendasi atas Pelunasan Fasilitas Kredit Modal Kerja.
32. Persetujuan atas Revisi Rencana Bisnis PSJ Tahun 2023 – 2027.
11. Application for Approval of Asset Grant for Galeri Huni JAKHABITAT in Martha Tiahahu Park.
12. Approval of the Corporate Secretary Unit SOP.
13. Monitoring Results Report on the Management of BUMD PSJ for the Fourth Quarter of 2022.
14. Approval of SOP for SPTA Land Acquisition in Regional SBU.
15. Approval of Providing Working Capital to PT Saranawisesa Properindo.
16. Submitting Suggestions to the Supervisory Board on Legal Issues faced by the Company.
17. Approval of the Extension of Cooperation in Management of the Segitiga Senen Atrium Open Facilities.
18. Recommendations for the Auditor's Report on the 2022 Financial Statement.
19. Approval of the Buyback Portion of PT Totalindo Eka Persada in the Azraya Lebak Bulus Project.
20. Changes in Submitting Proposals for Regional Equity Participation (PMD) in the 2023 Revised APBD and 2024 APBD.
21. Request for Approval of Two SOPs at Regional SBU.
22. Monitoring Results Report on the Management of BUMD Companies for the First Quarter 2023.
23. Request for Approval for the Implementation of Cibubur Junction Mall Management.
24. The 2022 Company Supervisory Board Annual Supervisory Task Report.
25. Approval of the Extension of the Nuansa Cilangkap Cooperation Term.
26. Approval of Addendum to Deed of Buyback Agreement for TEP's Participation Portion in the Azraya Lebak Bulus Project.
27. Submission of Suggestions and Recommendations to the Supervisory Board regarding the Appointment of the Head of the Internal Supervisory Unit and Corporate Secretary.
28. Application for Approval for the Implementation of Land Development Cooperation on Jl. R.A Kartini No. 42 South Jakarta (TB. Simatupang).
29. Recommendations for Working Capital Credit Facilities.
30. Request for Recommendations for the names of Commissioners and Board of Directors of PT Saranawisesa Properindo.
31. Recommendations for Repayment of Working Capital Credit Facilities.
32. Approval of the Revised PSJ Business Plan for 2023 – 2027.

33. Persetujuan Buku Pedoman Pengelolaan Informasi dan Dokumentasi Sarana Jaya.
34. Persetujuan atas Kerjasama Pengelolaan dan Pemanfaatan Lahan Sentra Primer Tanah Abang dengan PT Saranawisesa Properindo.
35. Penyampaian Surat Keputusan Dewan Pengawas Nomor 4 Tahun 2023.
36. Persetujuan Rekomendasi Struktur Organisasi Perusahaan.
37. Persetujuan Perpanjangan Fasilitas Kredit Modal Kerja Sarana Jaya kepada Bank DKI.
38. Permohonan Rekomendasi dan Penyampaian Hasil Kajian Pedoman Kebijakan Akuntansi Perusahaan.
39. Tanggapan BP-BUMD atas Permohonan Penunjukan Perusahaan sebagai Pelaksana Pengembang Kawasan Rorotan.
40. Laporan Hasil Pengawasan Terhadap Pengelolaan BUMD Perusahaan Triwulan II Tahun 2023.
41. Persetujuan Pengalihan Perjanjian Kerjasama Pengelolaan Atrium Senen.
42. Persetujuan SOP Pengadaan Barang dan Jasa (PBJ) Unit Layanan Pengadaan.
43. Persetujuan Penyerahan Fasos Fasum sesuai SIPPT Nomor 1608/-1.71.534 tanggal 26 Agustus 2009.
44. Persetujuan Perpanjangan Fasilitas Kredit Modal Kerja Sarana Jaya kepada Bank DKI.
45. Tanggapan dan Saran Dewan Pengawas atas Laporan Kinerja Perusahaan Periode Juli 2023.
46. Penyampaian Pertimbangan Dewan Pengawas atas Pelaksanaan Kerja Sama Pengelolaan Mall Cibubur Junction.
47. Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran Perubahan Tahun 2023 (RKA-P 2023) dan RKA Tahun 2024.
48. Tindak Lanjut AOI *Assessment* GCG Perusahaan Tahun Buku 2022.
49. Tindak Lanjut Hasil *Monitoring* Proyek Apartemen Pejabat Park Residence dan Apartemen Wang Residence.
50. Permohonan Persetujuan Kembali Rekomendasi Struktur Organisasi Perusahaan.
51. Permohonan Persetujuan dan Rekomendasi mengenai Penggunaan Laba Tahun Berjalan Tahun Buku 2022.
52. Tanggapan dan Saran Dewan Pengawas atas Laporan Kinerja Perusahaan Periode Agustus 2023.
53. Penyampaian Saran Dewan Pengawas atas Penyusunan RKA Perubahan Tahun 2023 dan RKA Tahun 2024.
33. Approval of Sarana Jaya Information and Documentation Management Manual.
34. Approval of Cooperation in Management and Utilization of Tanah Abang Primary Center Land with PT Saranawisesa Properindo.
35. Submission of Supervisory Board Decree No. 4 of 2023.
36. Approval of Recommendations for Company Organizational Structure.
37. Approval of the Sarana Jaya Working Capital Credit Facility Extension to Bank DKI.
38. Request for Recommendations and Submission of Review Results of Company Accounting Policy Guidelines.
39. BP-BUMD's response to the Request for Appointment of the Company as Implementing Developer of the Rorotan Area.
40. Report on the Results of Supervision of the Management of BUMD Companies for the Second Quarter of 2023.
41. Approval of the Transfer of the Senen Atrium Management Cooperation Agreement.
42. Approval of the SOP for Procurement of Goods and Services (PBJ) for the Procurement Service Unit.
43. Approval of the Handover of Social and Community Facilities per SIPPT No. 1608/-1,71,534 dated August 26, 2009.
44. Approval of the Sarana Jaya Working Capital Credit Facility Extension to Bank DKI.
45. Responses and Suggestions from the Supervisory Board on the Company's Performance Report for July 2023.
46. Submission of the Supervisory Board's Considerations on implementing Cibubur Junction Mall Management Cooperation.
47. Preparation of the 2023 Work Plan and Revised Budget (RKA-P 2023) and 2024 RKA.
48. Follow-up to the Company's AOI GCG Assessment for the 2022 Fiscal Year.
49. Follow-up on Monitoring Results of the Pejabat Park Residence Apartment and Wang Residence Apartment Projects.
50. Request for Re-Approval of Company Organizational Structure Recommendations.
51. Request for Approval and Recommendations regarding the Use of Current Year Profits for the 2022 Fiscal Year.
52. Responses and Suggestions from the Supervisory Board on the Company's Performance Report for August 2023.
53. Submission of Suggestions to the Supervisory Board on preparing the 2023 Revised RKA and 2024 RKA.

- | | |
|---|---|
| 54. Pertimbangan Realokasi PMD APBD-P 2014. | 54. Consideration of 2014 APBD-P PMD Reallocation. |
| 55. Tanggapan atas Permohonan Persetujuan Realokasi PMD APBD-P 2019. | 55. Response to the 2019 APBD-P PMD Reallocation Approval Request. |
| 56. Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) Dewan Pengawas dan Komite Tahun 2024. | 56. Work Plan and Budget (RKA) of the Supervisory Board and Committees for 2024. |
| 57. Persetujuan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) Perubahan Tahun 2023. | 57. Approval of the 2023 Revised Work Plan and Budget (RKA). |
| 58. Persetujuan Penunjukan Kantor Akuntan Publik (KAP) Heliantono dan Rekan. | 58. Approval of the Appointment of Public Accounting Firm (KAP) Heliantono and Partners. |
| 59. Persetujuan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) Perubahan Tahun 2024. | 59. Approval of the 2024 Revised Work Plan and Budget (RKA). |
| 60. Laporan Hasil Pengawasan Terhadap Pengelolaan BUMD PSJ Triwulan III Tahun 2023. | 60. Monitoring Results Report on the Management of BUMD PSJ for the Third Quarter of 2023. |
| 61. Persetujuan SOP Pengadaan Barang dan Jasa (PBJ) SBU Kawasan. | 61. Approval of SOP for Regional SBU Procurement of Goods and Services (PBJ). |
| 62. Persetujuan Penjualan Lahan Sarana Jaya di Rorotan. | 62. Approval of the sale of Sarana Jaya land in Rorotan. |
| 63. Permohonan Persetujuan Realisasi Penggunaan Dana Penyertaan Modal Daerah (PMD) serta Saldo Kas dan Bank Perusahaan Periode Juli sampai dengan Oktober 2023. | 63. Request for Approval for the Realization of Use of Regional Capital Participation Funds (PMD) as well as the Company Cash and Bank Balances for July to October 2023. |
| 64. Permohonan Persetujuan Rencana Pengeluaran Uang dengan Talangan Pemakaian Dana Penyertaan Modal Daerah (PMD). | 64. Request for Approval of Money Expenditure Plan with a Bailout for the Use of Regional Equity Participation Funds (PMD). |
| 65. Penyampaian Pertimbangan Dewan Pengawas Terhadap Tindak Lanjut atas Penjualan Lahan Sarana Jaya di Rorotan. | 65. Submission of the Supervisory Board's considerations regarding the follow-up to the sale of Sarana Jaya land in Rorotan. |
| 66. Persetujuan SOP dan Kebijakan Unit TIK. | 66. Approval of SOPs and ICT Unit Policies. |
| 67. Tanggapan dan Saran Dewan Pengawas atas Laporan Kinerja Perusahaan Periode Oktober 2023. | 67. Responses and Suggestions from the Supervisory Board regarding the Company's Performance Report for October 2023. |
| 68. Tanggapan atas Laporan Hasil Putusan Perkara No.638/Pdt.G/2022/PN/Jkt.Pst. (Perkara HBH). | 68. Response to Report on Case Decision Results No.638/Pdt.G/2022/PN/Jkt.Pst. (HBH case). |
| 69. Persetujuan Perpanjangan Sewa Gedung Sarana Jaya Periode 2024-2026. | 69. Approval of the Sarana Jaya Building Lease Extension for the 2024-2026 Period. |
| 70. Persetujuan Fasilitas Kredit Baru PSJ Untuk Pengurangan Dana Talangan PMD Senilai Rp92 Miliar. | 70. Approval of PSJ's New Credit Facility to Reduce PMD Bailout Funds Worth Rp92 Billion. |
| 71. Persetujuan SOP Unit Pemasaran dan Pengelolaan Aset. | 71. Approval of Marketing and Asset Management Unit SOPs. |
| 72. Persetujuan Dewan Pengawas atas KPI Perubahan Perusahaan Tahun 2023. | 72. Supervisory Board approval of KPI Company Changes in 2023. |
| 73. Revisi atas Rencana Kerja dan Anggaran Perubahan Tahun 2023. | 73. Revision of the 2023 Work Plan and Revised Budget. |
| 74. Revisi atas Rencana Kerja dan Anggaran Perubahan Tahun 2024. | 74. Revision of the 2024 Work Plan and Revised Budget. |
| 75. Persetujuan Dewan Pengawas atas Restrukturisasi Fasilitas Kredit Perusahaan Kepada Bank DKI. | 75. Supervisory Board Approval of Restructuring the Company's Credit Facilities to Bank DKI. |
| 76. Tanggapan dan Saran Dewan Pengawas atas Laporan Kinerja Perusahaan Periode November 2023. | 76. Responses and Suggestions from the Supervisory Board on the Company's Performance Report for November 2023. |



PENILAIAN DEWAN PENGAWAS TERHADAP KINERJA KOMITE PENDUKUNG DEWAN PENGAWAS TAHUN 2023

Prosedur dan Kriteria Penilaian

Dalam menjalankan fungsi dan tugasnya, Dewan Pengawas diperkuat oleh 3 (tiga) komite utama, yakni: 1) Komite Audit, 2) Komite Pemantau Risiko, dan 3) Komite Remunerasi dan Nominasi.

Setiap tahun, Dewan Pengawas melaksanakan penilaian terhadap kinerja ketiga komite tersebut. Proses penilaian ini dilakukan dengan memperhitungkan berbagai ketentuan yang telah ditetapkan sebelumnya. Tujuan dari penilaian ini adalah untuk memastikan bahwa setiap komite mendukung efektivitas dan keselarasan dalam pelaksanaan tugas Dewan Pengawas.

Penilaian tersebut mencakup peninjauan terhadap pencapaian tujuan, kepatuhan terhadap ketentuan yang berlaku, serta kemampuan komite dalam mengatasi tantangan dan risiko yang mungkin timbul. Selain itu, tujuan dari penilaian ini adalah untuk memberikan umpan balik konstruktif kepada masing-masing komite agar dapat terus meningkatkan kualitas kinerja komite.

SUPERVISORY BOARD ASSESSMENT ON THE PERFORMANCE SUPERVISORY BOARD'S SUPPORTING COMMITTEES

Assessment Procedure and Criteria

In carrying out its functions and duties, the Supervisory Board is supported by three main committees: 1) Audit Committee, 2) Risk Monitoring Committee, and 3) Remuneration and Nomination Committee.

Every year, the Supervisory Board assesses the performance of these three committees. The assessment process is carried out by considering various conditions that have been previously determined. This assessment aims to ensure that each committee supports effectiveness and harmony in carrying out the duties of the Supervisory Board.

The assessment includes a review of goal achievement, compliance with applicable regulations, and the committee's ability to overcome challenges and risks that may arise. In addition, the purpose of this assessment is to provide constructive feedback to every committee so that it can continue improving the quality of its performance.

Proses penilaian juga menjadi sarana untuk identifikasi dan penanganan perbaikan yang diperlukan dalam rangka meningkatkan efisiensi dan efektivitas kerja komite-komite tersebut. Dengan demikian, melalui penilaian tahunan ini, Dewan Pengawas dapat memastikan bahwa setiap komite beroperasi dengan optimal, memenuhi standar kinerja yang ditetapkan, dan memberikan kontribusi positif terhadap pengawasan dan pengelolaan risiko di Perusahaan.

Hasil Penilaian Kinerja Komite Tahun 2023

Dalam penilaian tahun 2023, Dewan Pengawas melakukan peninjauan terhadap kinerja tiga komite utamanya, yaitu Komite Audit, Komite Pemantau Risiko, dan Komite Remunerasi dan Nominasi. Menurut Dewan Pengawas, komite-komite tersebut dianggap berperan signifikan dalam mendukung fungsi pengawasan dan penasihat. Sepanjang tahun tersebut, setiap komite aktif dalam menjalankan tanggung jawabnya, sesuai dengan bidang tugas yang telah ditetapkan.

Dewan Pengawas menilai bahwa Komite Audit telah melakukan tugasnya dengan baik khususnya dalam pengawasan proses penyusunan laporan keuangan dan penerapan sistem pengendalian internal. Sementara itu, Komite Pemantau Risiko dinilai telah berhasil mengidentifikasi serta mengevaluasi risiko organisasi dengan cermat. Di sisi lain, Komite Remunerasi dan Nominasi dinilai telah berupaya untuk memastikan bahwa kebijakan remunerasi dan proses nominasi berjalan secara efektif dan sesuai dengan standar yang ditetapkan.

Dewan Pengawas memberikan apresiasi positif terhadap kinerja ketiga komite ini atas kontribusi yang sangat berharga, seperti masukan, saran, dan rekomendasi, yang secara signifikan berpengaruh dalam proses pengambilan keputusan. Kolaborasi yang terjalin antara Dewan Pengawas dan ketiga komite bukan hanya sebagai pendukung bagi integritas, transparansi, dan efektivitas dalam menjalankan tugas Dewan Pengawas, tetapi juga memastikan bahwa setiap aspek tanggung jawabnya dijalankan secara efisien dan sesuai dengan standar terbaik.

The assessment process is also a means for identifying and handling improvements needed to increase the efficiency and effectiveness of the work of these committees. Thus, through this annual assessment, the Supervisory Board can ensure that each committee operates optimally, meets the specified performance standards, and contributes positively to the company's supervision and risk management.

Committee Performance Assessment Results in 2023

In the 2023 assessment, the Supervisory Board reviewed the performance of its three main committees, i.e., the Audit Committee, Risk Monitoring Committee, as well as Remuneration and Nomination Committee. According to the Supervisory Board, these committees play a significant role in supporting supervisory and advisory functions. Throughout the year, each committee was active in carrying out its responsibilities per the assigned areas of duty.

The Supervisory Board considers that the Audit Committee has carried out its duties well, especially in supervising the process of preparing financial statements and implementing the internal control system. Meanwhile, the Risk Monitoring Committee has successfully identified and evaluated organizational risks. On the other hand, the Remuneration and Nomination Committee have made efforts to ensure that the remuneration policy and nomination process run effectively and follow the established standards.

The Supervisory Board gives positive appreciation to the performance of these committees for their valuable contributions, such as input, suggestions, and recommendations, which significantly influence the decision-making process. The collaboration between the Supervisory Board and the three committees supports integrity, transparency, and effectiveness in carrying out the Supervisory Board's duties. It ensures that its responsibilities are carried out efficiently and to the best standards.

PENILAIAN KINERJA DIREKSI DAN DEWAN PENGAWAS [GRI 2-18] BOARD OF DIRECTORS AND SUPERVISORY BOARD PERFORMANCE ASSESSMENT

PROSEDUR, KRITERIA PENILAIAN, DAN PIHAK PENILAI KINERJA DIREKSI

Gubernur, melalui BP-BUMD, melakukan penilaian dan evaluasi terhadap kinerja Direksi setiap tahun atau sewaktu-waktu, sesuai dengan kebutuhan Perusahaan dan/atau kebijakan pengelolaan Perusahaan.

Penilaian tersebut dilakukan dengan menggunakan kriteria berikut:

1. Kinerja Perusahaan;
2. Laporan Keuangan Perusahaan;
3. Pencapaian Rencana Bisnis Perusahaan;
4. Pelaksanaan Rencana Kerja Anggaran (RKA) Perusahaan;
5. Dinamika pengurusan Perusahaan;
6. Ketaatan terhadap Peraturan Perusahaan; dan
7. Ketaatan terhadap kebijakan pengelolaan Perusahaan.

Dalam pelaksanaan penilaian kinerja Direksi, BP-BUMD berwenang menunjuk pihak yang memiliki kompetensi untuk melaksanakan penilaian tersebut. Setelah penilaian dilakukan, hasilnya kemudian dilaporkan kepada Gubernur. Hasil penilaian kinerja Direksi merupakan salah satu faktor pertimbangan utama dalam proses pengambilan keputusan terkait pemberhentian Direksi.

PROSEDUR, KRITERIA PENILAIAN, DAN PIHAK PENILAI KINERJA DEWAN PENGAWAS

Prosedur penilaian kinerja Dewan Pengawas secara umum mengacu pada kriteria-kriteria sebagai berikut:

1. Keaktifan Anggota Dewan Pengawas dalam rapat Dewan Pengawas;
2. Kuantitas dan kualitas masukan, saran, pertimbangan dan koreksi Anggota Dewan Pengawas terhadap pengurusan Sarana Jaya oleh Direksi yang disampaikan kepada Gubernur dan/atau Direksi; dan
3. Permasalahan-permasalahan Sarana Jaya yang terkait dengan lemahnya pengawasan.

PROCEDURE, ASSESSMENT CRITERIA, AND ASSESSOR FOR THE BOARD OF DIRECTORS' PERFORMANCE

Through BP-BUMD, the Governor assesses and evaluates the performance of the Board of Directors annually and/or at any time according to the needs of the Company and/or the Company's management policies.

The assessment is carried out using the following criteria:

1. Company Performance;
2. Company Financial Statements;
3. Achievement of the Company's Business Plans;
4. Implementation of the Company's Work Plan and Budget (RKA);
5. Dynamics of Company management;
6. Compliance with Company Regulations; and
7. Compliance with the Company's management policies.

In carrying out the assessment, BP-BUMD may appoint a competent party and report the assessment results to the Governor. The performance assessment result is one of the main considerations in the decision-making process for dismissing the Board of Directors.

PROCEDURE, ASSESSMENT CRITERIA, AND ASSESSOR FOR THE SUPERVISORY BOARD'S PERFORMANCE

The performance assessment of the Supervisory Board generally refers to the following criteria:

1. Supervisory Board members' active participation in Supervisory Board meetings;
2. The quantity and quality of input, recommendations, considerations, and corrections by Supervisory Board members on Sarana Jaya management by the Board of Directors submitted to the Governor and/or Board of Directors; and
3. Problems with Sarana Jaya related to weak supervision.

Dalam konteks penilaian kinerja yang negatif, Gubernur melalui Kepala BP-BUMD akan memberikan teguran tertulis, baik kepada Dewan Pengawas secara institusi maupun perorangan. Hasil penilaian tersebut menjadi salah satu faktor pertimbangan utama dalam proses pemberhentian atau pengangkatan kembali anggota Dewan Pengawas.

Gubernur, melalui BP-BUMD, melakukan penilaian dan evaluasi terhadap kinerja pengawasan yang dilakukan oleh Dewan Pengawas. Evaluasi ini didasarkan pada Perjanjian Kinerja antara Kepala BP-BUMD DKI Jakarta dan Dewan Pengawas, yang menetapkan *Key Performance Indicators* (KPI) Pengawasan sebagai tolok ukur utama.

Penilaian kinerja ini menjadi landasan bagi Gubernur untuk mengambil keputusan terkait tindakan lebih lanjut terhadap Dewan Pengawas, sehingga memastikan bahwa fungsi pengawasan dijalankan sesuai dengan standar yang telah ditetapkan dalam kerangka Perjanjian Kinerja.

Selain itu, Gubernur, melalui BP-BUMD, akan melakukan penilaian dan evaluasi terhadap kinerja pengawasan yang dilakukan oleh Dewan Pengawas. Evaluasi ini merujuk pada Perjanjian Kinerja antara Kepala BP-BUMD DKI Jakarta dan Dewan Pengawas yang menetapkan *Key Performance Indicators* (KPI) Pengawasan. Kerangka kerja ini memberikan landasan yang jelas untuk menilai efektivitas pengawasan yang dilakukan oleh Dewan Pengawas.

Selanjutnya, Gubernur, melalui Kepala BP-BUMD, akan memberikan teguran tertulis terkait penilaian kinerja Dewan Pengawas yang menunjukkan hasil negatif. Teguran ini dapat disampaikan baik secara kolegal kepada seluruh anggota Dewan Pengawas maupun secara langsung kepada individu yang bersangkutan. Hasil dari penilaian ini menjadi faktor utama dalam proses pertimbangan untuk pemberhentian atau pengangkatan kembali anggota Dewan Pengawas. Dengan adanya mekanisme evaluasi dan teguran ini, diharapkan dapat meningkatkan akuntabilitas dan kinerja Dewan Pengawas dalam menjalankan fungsi pengawasan.

In the context of a negative performance assessment, the Governor will give a written warning through the BP-BUMD Head to the Supervisory Board as an institution and individually. Furthermore, the assessment results are one of the important considerations in dismissing or reappointing the Supervisory Board members.

Through BP-BUMD, the Governor assesses and evaluates the supervisory performance carried out by the Supervisory Board. The evaluation is based on the Performance Agreement between the DKI Jakarta BP-BUMD Head and the Supervisory Board, which establishes Supervision Key Performance Indicators (KPI) as the primary benchmark.

The performance assessment is the basis for the Governor to take decisions regarding further action towards the Supervisory Board, thereby ensuring that the supervisory function is carried out per the standards set out in the framework of the Performance Agreement.

In addition, through BP-BUMD, the Governor will assess and evaluate the supervisory performance carried out by the Supervisory Board. The evaluation refers to the Performance Agreement between the DKI Jakarta BP-BUMD Head and the Supervisory Board, which determines Key Performance Indicators (KPI) for Supervision. The framework provides a clear basis for assessing the effectiveness of supervision carried out by the Supervisory Board.

Furthermore, the Governor will provide a written warning to the BP-BUMD Head regarding the Supervisory Board's performance assessment, which shows negative results. The warning can be delivered collegially to all Supervisory Board members or directly to the individual concerned. The results of this assessment are the main factor in the consideration process for dismissal or reappointment of the Supervisory Board members. This evaluation and warning mechanism is expected to increase the accountability and performance of the Supervisory Board in carrying out its supervisory function.

KEBIJAKAN KEBERAGAMAN DEWAN PENGAWAS DAN DIREKSI

DIVERSITY POLICY FOR THE SUPERVISORY BOARD AND BOARD OF DIRECTORS

Keberagaman anggota Direksi dan Dewan Pengawas bertujuan untuk memastikan bahwa keputusan yang diambil mencerminkan berbagai perspektif.

The diversity of the Board of Directors and Supervisory Board members aims to ensure that decisions taken reflect various perspectives.

Meskipun Perusahaan belum memiliki Kebijakan keberagaman anggota Direksi dan Dewan Pengawas secara spesifik, namun dalam praktiknya Perusahaan telah mengimplementasikannya.

Although the Company does not yet have a specific diversity policy for the Board of Directors and Supervisory Board members, the Company has implemented it in practice.

Informasi mengenai keberagaman latar belakang pendidikan, pengalaman kerja, dan usia, dari setiap anggota Direksi dan Dewan Pengawas telah diuraikan secara detail dalam Bab Profil Perusahaan, khususnya dalam subbab Profil Direksi dan Profil Dewan Pengawas pada Laporan Tahunan ini.

Information regarding the diversity of educational backgrounds, work experience, and age of every Board of Directors and Supervisory Board member has been described in detail in the Company Profile Chapter, especially in the Board of Directors' and Supervisory Board Profile subchapters in this Annual Report.

Tabel berikut ini menyajikan data rangkuman dari keberagaman latar belakang Dewan Pengawas dan Direksi:

The following table presents summary data on the diversity of the Supervisory Board and Board Directors' backgrounds:

Nama Name	Jabatan Position	Gender Gender	Usia Age	Gelar Pendidikan Education Degree	Pengalaman Karier Career Experience
Andi Muhammad Iqbal Arief	Ketua Dewan Pengawas Chairman of the Supervisory Board	Laki-Laki Male	61 Tahun 61 years old	Magister Ilmu Hukum Master of Law	Jaksa Fungsional; Pejabat Struktural Kejaksaan RI Functional Prosecutor; Structural Officer at the Indonesian Attorney General
Arief Rachman	Sekretaris Dewan Pengawas Secretary to the Supervisory Board	Laki-Laki Male	42 Tahun 42 years old	Magister Ilmu Hukum Master of Law	Konsultan Hukum; Tenaga Ahli Kementerian PDT Legal Consultant; Expert at Kemendes PPDT
Andira Reoputra	Direktur Utama President Director	Laki-Laki Male	38 Tahun 38 years old	Master of Arts; Profesi Insinyur Master of Arts: Engineering Profession	Direksi BUMD; <i>Infrastructure Professional</i> ; Dosen BUMD Board of Directors; Infrastructure Professional; Lecturer
Indra Sukmono Arharrys	Direktur Pengembangan Director of Development	Laki-Laki Male	49 Tahun 49 years old	Sarjana Teknik Bachelor of Engineering	Berpengalaman di bidang Perencanaan dan Pengembangan Usaha Experience in Business Planning and Development
Irwan Agustusan	Direktur Administrasi dan Keuangan Director of Administration and Finance	Laki-Laki Male	53 Tahun 53 years old	Sarjana Akuntansi Bachelor of Accounting	<i>Finance Senior Vice President</i> di BUMD Finance Senior Vice President in BUMD



HUBUNGAN AFILIASI DEWAN PENGAWAS DAN DIREKSI

AFFILIATIONS BETWEEN THE SUPERVISORY BOARD AND BOARD OF DIRECTORS

Hubungan Keuangan dan Keluarga Dewan Pengawas dan Direksi

Financial and Familial Relationship of the Supervisory Board and Board of Directors

Nama Name	Jabatan Position	Hubungan Keuangan dengan Financial Relationship with						Hubungan Keluarga dengan Familial Relationship with					
		Dewan Pengawas Supervisory Board		Direksi Board of Directors		Pemegang Saham Pengendali Controlling Shareholders		Dewan Pengawas Supervisory Board		Direksi Board of Directors		Pemegang Saham Pengendali Controlling Shareholders	
		Ya Yes	Tidak No	Ya Yes	Tidak No	Ya Yes	Tidak No	Ya Yes	Tidak No	Ya Yes	Tidak No	Ya Yes	Tidak No
Andi Muhammad Iqbal Arief	Ketua Dewan Pengawas Chairman of the Supervisory Board		✓		✓		✓		✓		✓		✓
Arief Rachman	Sekretaris Dewan Pengawas Secretary to the Supervisory Board		✓		✓		✓		✓		✓		✓
Andira Reoputra	Direktur Utama President Director		✓		✓		✓		✓		✓		✓
Indra Sukmono Arharrys	Direktur Pengembangan Director of Development		✓		✓		✓		✓		✓		✓
Irwan Agustusan	Direktur Administrasi dan Keuangan Director of Administration and Finance		✓		✓		✓		✓		✓		✓

NOMINASI DAN REMUNERASI DIREKSI DAN DEWAN PENGAWAS [GRI 2-10, 2-19]

NOMINATION AND REMUNERATION FOR THE BOARD OF DIRECTORS AND SUPERVISORY BOARD

PROSEDUR NOMINASI DIREKSI DAN DEWAN PENGAWAS

Perusahaan telah menetapkan prosedur nominasi untuk Direksi dan Dewan Pengawas, yang dimulai dengan langkah pertama Dewan Pengawas mengusulkan calon Direksi dari internal Sarana Jaya sesuai dengan kebijakan seleksi yang telah ditetapkan. Setelah itu, Dewan Pengawas melakukan telaah dan/atau penelitian terhadap calon Direksi yang memenuhi persyaratan. Hasil telaah tersebut kemudian disampaikan kepada KPM sebagai usulan untuk dipertimbangkan lebih lanjut.

Sedangkan prosedur yang digunakan dalam proses nominasi Dewan Pengawas, sepenuhnya menjadi kewenangan KPM.

KEBIJAKAN SUKSESI DIREKSI

Kebijakan nominasi dan suksesi Direksi sepenuhnya diatur oleh KPM.

PROSEDUR PENETAPAN REMUNERASI DIREKSI DAN DEWAN PENGAWAS [GRI 2-20]

Perusahaan telah menyusun prosedur penetapan remunerasi Direksi dan Dewan Pengawas yang diuraikan berikut ini:

1. Penetapan penghasilan Direksi dan Dewan Pengawas pada Perseroda berdasarkan laporan keuangan hasil audit oleh Kantor Akuntan Publik.
2. Direksi menyampaikan hasil audit kepada Kepala Badan untuk dikaji dan dapat dibantu oleh Perangkat Daerah terkait.
3. Hasil kajian sebagaimana dimaksud pada poin 2 diusulkan oleh Kepala Badan kepada RUPS untuk ditetapkan.
4. Kepala Badan berwenang untuk menghadiri dan mengambil keputusan pada RUPS terkait penetapan Penghasilan Direksi dan Dewan Pengawas.
5. Kewenangan sebagaimana dimaksud pada poin 4 tidak berlaku jika Gubernur menghadiri RUPS.
6. Dalam hal pelaksanaan RUPS sebagaimana dimaksud pada poin 4 oleh Gubernur dikuasakan kepada pejabat lain, Kepala Badan menyampaikan rancangan usulan kepada pejabat yang diberi kuasa terkait penetapan Penghasilan Direksi dan Dewan Pengawas pada Perseroda.

BOARD OF DIRECTORS AND SUPERVISORY BOARD NOMINATION PROCEDURE

The Company has established a nomination procedure for the Board of Directors and Supervisory Board, which begins with proposing the candidates for the Supervisory Board and Board of Directors from Sarana Jaya per the established selection policy. Then, the Supervisory Board reviews and/or researches prospective Directors who meet the requirements. The study results are then submitted to KPM as a proposal for further consideration.

Meanwhile, the Supervisory Board nomination process procedures are under KPM's authority.

BOARD OF DIRECTORS SUCCESSION POLICY

The nomination and succession policy of the Board of Directors is fully governed by KPM.

BOARD OF DIRECTORS AND SUPERVISORY BOARD REMUNERATION DETERMINATION PROCEDURE [GRI 2-20]

The Company has developed procedures for determining the Board of Directors and Supervisory Board remuneration, which are described below:

1. Determination of the Board of Directors and the Supervisory Board's Income at a Region-Owned Enterprise (Perseroda) based on the audited financial statements by the Public Accounting Firm.
2. The Board of Directors submits the audit results to the Agency Head for review and can be assisted by the relevant Regional Apparatus.
3. The review results referred to in point 2 are proposed by the Agency Head to the GMS to be stipulated.
4. The Agency Head is authorized to attend and make resolutions at the GMS to determine the Board of Directors and Supervisory Board's Income.
5. The authority in point 4 does not apply if the Governor attends the GMS.
6. If the GMS implementation, as referred to in point 4 by the Governor, is authorized by other officials, the Agency Head submits a draft proposal to the authorized official regarding the determination of the Board of Directors and Supervisory Board Income at Perseroda.

7. Pejabat lain yang diberi kuasa oleh Gubernur sebagaimana dimaksud pada poin 6 mempunyai kewenangan untuk mengambil keputusan pada RUPS.

7. As referred to in point 6, other officials authorized by the Governor have the authority to make resolutions at the GMS.

STRUKTUR REMUNERASI DIREKSI DAN DEWAN PENGAWAS

Sesuai dengan Surat Keputusan yang berlaku per 31 Desember 2023, anggota Direksi berhak menerima remunerasi yang terdiri atas:

1. Gaji;
2. Tunjangan;
3. Fasilitas; dan/atau
4. Tantiem atau Insentif Pekerjaan.

Sedangkan remunerasi anggota Dewan Pengawas, terdiri dari:

1. Honorarium;
2. Tunjangan;
3. Fasilitas; dan/atau
4. Tantiem atau Insentif Pekerjaan.

BESARAN REMUNERASI DIREKSI DAN DEWAN PENGAWAS [GRI 2-21]

Besaran remunerasi untuk Dewan Pengawas dan Direksi Sarana Jaya ditetapkan oleh KPM. Informasi lebih rinci mengenai besaran remunerasi yang diterima oleh Dewan Pengawas dan Direksi Sarana Jaya pada tahun 2023 diuraikan pada tabel berikut:

BOARD OF DIRECTORS AND SUPERVISORY BOARD REMUNERATION STRUCTURE

Per the Decree valid as of December 31, 2023, BOD members are entitled to receive remuneration consisting of:

1. Salary;
2. Allowance;
3. Facilities; and/or
4. Tantiem or Job Incentive.

Meanwhile, the Supervisory Board members' remuneration consists of:

1. Honorarium;
2. Allowance;
3. Facilities; and/or
4. Tantiem or Job Incentive.

BOARD OF DIRECTORS AND SUPERVISORY BOARD REMUNERATION [GRI 2-21]

The amount of remuneration for the Supervisory Board and Board of Directors of Sarana Jaya is determined by KPM. The detailed information on the amount of remuneration received by the Supervisory Board and Board of Directors of Sarana Jaya in 2023 is described in the following table:

Jumlah Diterima dalam Tahun Buku 2023
Total Amount Received in 2023 Fiscal Year

Jenis Remunerasi dan Fasilitas Remuneration and Facility Type	Direksi Board of Directors		Dewan Pengawas Supervisory Board	
	Jumlah Anggota (Orang) Total Members	Total Remunerasi (Rp-Juta) Total Remuneration (Rp-million)	Jumlah Anggota (Orang) Total Members	Total Remunerasi (Rp-Juta) Total Remuneration (Rp-million)
Gaji, bonus, tunjangan rutin, tantiem, dan fasilitas lainnya dalam bentuk non natura Salary, bonuses, regular allowances, tantiem, and other facilities in in-kind form	3	5.335	2	2.338
Fasilitas lain dalam bentuk natura (fasilitas kendaraan, member club) Other facilities in kind (vehicle, club members)	3	1.091	2	-
Jumlah Remunerasi (Rp-Juta) Total Remuneration (Rp-Million)		6.426		2.338

Tabel di atas telah menjelaskan bahwa pada tahun buku 2023, anggota Direksi yang berjumlah 3 (tiga) orang, secara keseluruhan menerima remunerasi dengan total jumlah Rp6,43 miliar. Sedangkan anggota

The table above explains that in the 2023 fiscal year, the three members of the Board of Directors collectively received remuneration totaling Rp6.43 billion. Meanwhile, the two members of the Supervisory Board collectively

Dewan Pengawas yang berjumlah 2 (dua) orang, secara keseluruhan menerima remunerasi dengan total jumlah Rp2,34 miliar pada tahun buku 2023.

Dari uraian di atas, maka remunerasi yang diterima oleh Direksi dan Dewan Pengawas dalam 1 (satu) tahun dapat dikelompokkan dalam beberapa tingkat penghasilan sebagaimana diuraikan pada tabel berikut:

received remuneration totaling Rp2.34 billion in the 2023 fiscal year.

From the description above, the remuneration received by the Board of Directors and Supervisory Board in one year can be grouped into several income levels as described in the following table:

Jumlah Remunerasi Per Orang dalam 1 (Satu) Tahun Total Remuneration per Person in One Year	Jumlah Dewan Pengawas Total Supervisory Board	Jumlah Direksi Total Board of Directors
Di atas Rp1 miliar sampai dengan Rp2 miliar More than Rp1 billion up to Rp2 billion	2 orang	-
Di atas Rp500 juta sampai dengan Rp1 miliar More than Rp500 million up to Rp1 billion	-	3 orang
Rp500 juta ke bawah Less than Rp500 million	-	-

ORGAN PENDUKUNG DEWAN PENGAWAS

SUPERVISORY BOARD SUPPORTING ORGANS

Dewan Pengawas melaksanakan fungsi dan tugasnya didukung oleh beberapa organ pendukung Dewan Pengawas, yaitu:

1. Komite Audit;
2. Komite Remunerasi dan Nominasi;
3. Komite Pemantau Risiko; dan
4. Sekretariat Dewan Pengawas.

Penjelasan terperinci tentang setiap organ pendukung tersebut akan dibahas pada bagian berikutnya untuk memberikan pemahaman yang lebih lengkap mengenai peran, fungsi, dan tanggung jawab individu dari masing-masing organ pendukung Dewan Pengawas.

The Supervisory Board carries out its functions and duties supported by several supporting organs of the Supervisory Board, namely:

1. Audit Committee;
2. Remuneration and Nomination Committee;
3. Risk Monitoring Committee; and
4. Supervisory Board Secretariat.

A detailed explanation of each supporting organ will be discussed in the next section to provide a more complete understanding of the roles, functions, and individual responsibilities of each supporting organ of the Supervisory Board.

KOMITE AUDIT

AUDIT COMMITTEE

Komite Audit adalah organ pendukung Dewan Pengawas yang bertanggung jawab secara kolektif dalam membantu melaksanakan tugas dan fungsi Dewan Pengawas, khususnya yang berkaitan dengan pengawasan terhadap penerapan Sistem Pengendalian Internal, evaluasi efektivitas audit internal, dan kinerja auditor eksternal.

PIAGAM KOMITE AUDIT

Pelaksanaan tugas Komite Audit didasarkan pada Piagam Komite Audit. Penyusunan Piagam ini merujuk pada ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan telah ditetapkan berdasarkan Keputusan Dewan Pengawas No. 4 tahun 2021 tanggal 29 Oktober 2021. Piagam tersebut mengatur mengenai tugas, tanggung jawab, dan cakupan pekerjaan yang menjadi domain Komite Audit.

TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB KOMITE AUDIT

Tugas Komite Audit secara umum adalah membantu fungsi Dewan Pengawas dalam melakukan fungsi pemantauan dan evaluasi atas perencanaan dan pelaksanaan audit serta pemantauan atas tindak lanjut hasil audit dalam rangka menilai kecukupan pengendalian internal termasuk kecukupan proses pelaporan keuangan.

Keputusan Dewan Pengawas No. 1 Tahun 2019 tentang Pembentukan Komite Audit Perumda Pembangunan Sarana Jaya, telah mengatur dengan rinci tugas dan tanggung jawab Komite Audit sebagaimana diuraikan berikut ini:

1. Membantu Dewan Pengawas dalam memastikan efektivitas sistem pengendalian intern dan efektivitas pelaksanaan tugas auditor eksternal;
2. Menilai pelaksanaan kegiatan serta hasil audit yang dilaksanakan oleh satuan pengawas intern maupun auditor eksternal, serta mengawasi pelaksanaan tindak lanjut oleh Direksi atas temuan auditor internal dan auditor eksternal;
3. Memberikan rekomendasi mengenai penyempurnaan sistem pengendalian manajemen serta pelaksanaannya;

The Audit Committee is a supporting organ of the Supervisory Board, which is collectively responsible for assisting in carrying out the duties and functions of the Supervisory Board, especially those related to monitoring the implementation of the Internal Control System, evaluating the effectiveness of internal audits, and the performance of external auditors.

AUDIT COMMITTEE CHARTER

The implementation of the Audit Committee's duties is based on the Audit Committee Charter. The preparation of the Charter refers to the provisions of applicable laws and regulations stipulated based on Supervisory Board Decree No. 4 of 2021, dated October 29, 2021. The charter regulates the duties, responsibilities, and scope of work of the Audit Committee.

AUDIT COMMITTEE DUTIES AND RESPONSIBILITIES

The Audit Committee's task, in general, is to assist the Supervisory Board's function in carrying out monitoring and evaluation functions over the audit planning and implementation, as well as monitoring follow-up to audit results to assess the adequacy of internal control, including the adequacy of the financial reporting process.

Supervisory Board Decree No. 1 of 2019 on the Establishment of the Perumda Pembangunan Sarana Jaya Audit Committee has regulated the duties and responsibilities of the Audit Committee in detail as described below:

1. Assist the Supervisory Board in ensuring the effectiveness of the internal control system and the external auditor's duties implementation;
2. Assess the implementation of activities and the results of audits carried out by the internal audit unit and external auditors, as well as supervise the implementation of follow-ups by the Board of Directors on the findings of the internal auditors and external auditors;
3. Provide recommendations regarding the improvement of the management control system and its implementation;

- | | |
|--|---|
| <p>4. Memastikan telah terdapat prosedur <i>review</i> yang memuaskan terhadap segala informasi yang dikeluarkan Perusahaan;</p> <p>5. Melakukan identifikasi hal-hal yang memerlukan perhatian Dewan Pengawas; dan</p> <p>6. Melaksanakan tugas lain yang terkait dengan pengawasan yang diberikan oleh Dewan Pengawas.</p> | <p>4. Ensure that there is a satisfactory review procedure for all information issued by the Company;</p> <p>5. Identify matters that require the attention of the Supervisory Board;</p> <p>6. Carry out other supervisory-related duties assigned by the Supervisory Board.</p> |
|--|---|

KOMPOSISI DAN MASA JABATAN

COMPOSITION AND TERM OF OFFICE

Periode Menjabat 1 Januari-15 Januari 2023 January 1 – January 15, 2023, Office Period

Nama Name	Posisi di Komite Committee Position	Dasar Pengangkatan Appointment Basis	Masa Jabatan Term of Office
Arief Rachman	Ketua Komite Audit Head of the Audit Committee	Surat Keputusan Dewan Pengawas Perusahaan Umum Daerah Pembangunan Sarana Jaya No. 5 Tahun 2023 tanggal 27 November 2023 Decree of the Supervisory Board of Perusahaan Umum Daerah Pembangunan Sarana Jaya No. 5 of 2023 dated November 27, 2023	2023 – 2025
Irwan Saputra	Anggota Komite Audit Audit Committee Member	Surat Keputusan Dewan Pengawas Perusahaan Umum Daerah Pembangunan Sarana Jaya No. 1 Tahun 2020 tanggal 13 Januari 2020 Decree of the Supervisory Board of Perusahaan Umum Daerah Pembangunan Sarana Jaya No. 1 of 2020 dated January 13, 2020	2020 – 2023
Wahyudi Pramana	Anggota Komite Audit Audit Committee Member	Surat Keputusan Dewan Pengawas Perusahaan Umum Daerah Pembangunan Sarana Jaya No. 1 Tahun 2020 tanggal 13 Januari 2020 Decree of the Supervisory Board of Perusahaan Umum Daerah Pembangunan Sarana Jaya No. 1 of 2020 dated January 13, 2020	2020 – 2023

Periode Menjabat 15 Januari - 31 Desember 2023 January 15 – December 31, 2023, Office Period

Nama Name	Posisi di Komite Committee Position	Dasar Pengangkatan Appointment Basis	Masa Jabatan Term of Office
Arief Rachman	Ketua Komite Audit Head of the Audit Committee	Surat Keputusan Dewan Pengawas Perusahaan Umum Daerah Pembangunan Sarana Jaya No. 5 Tahun 2023 tanggal 27 November 2023 Decree of the Supervisory Board of Perusahaan Umum Daerah Pembangunan Sarana Jaya No. 5 of 2023 dated November 27, 2023	2023 – 2025
Irwan Saputra	Anggota Komite Audit Audit Committee Member	Surat Keputusan Dewan Pengawas Perusahaan Umum Daerah Pembangunan Sarana Jaya No. 1 Tahun 2020 tanggal 13 Januari 2020 Decree of the Supervisory Board of Perusahaan Umum Daerah Pembangunan Sarana Jaya No. 1 of 2020 dated January 13, 2020	2020 – 2023
Nizar Suhendra	Anggota Komite Audit Audit Committee Member	Surat Keputusan Dewan Pengawas Perusahaan Umum Daerah Pembangunan Sarana Jaya No. 1 Tahun 2023 tanggal 16 Januari 2023 Decree of the Supervisory Board of Perusahaan Umum Daerah Pembangunan Sarana Jaya No. 1 of 2023 dated January 16, 2023	2023 – 2026



► Profil Komite Audit Audit Committee Profile

Arief Rachman

Ketua Komite Audit
Head of the Audit Committee

Warga Negara Indonesia, berusia 42 tahun, berdomisili di Jakarta
Indonesian citizen, 42 years old, domiciled in Jakarta

Dasar Pengangkatan

Surat Keputusan Dewan Pengawas Perusahaan Umum Daerah Pembangunan Sarana Jaya No. 5 Tahun 2023 tanggal 27 November 2023

Appointment Basis

Decree of the Supervisory Board of Perusahaan Umum Daerah Pembangunan Sarana Jaya No. 5 of 2023 dated November 27, 2023

Rangkap Jabatan

Di Sarana Jaya:

Ketua Komite Pemantau Risiko dan Ketua Komite Remunerasi dan Nominasi

Concurrent Positions

In Sarana Jaya:

Head of the Risk Monitoring Committee, Head of the Remuneration and Nomination Committee

Di Perusahaan/Institusi Lain:

- Pendiri ART & Co Law Firm (2019 – Sekarang)
- Direktur Utama PT Sinergi Transformasi Indonesia (2018 – Sekarang)

In Other Company/Institution:

- Founder of ART & Co Law Firm (2019 – Present)
- President Director of PT Sinergi Transformasi Indonesia (2018 – Present)

Informasi tentang riwayat pendidikan dan riwayat karier beliau yang juga menjabat sebagai Dewan Pengawas telah diuraikan dengan rinci pada Bab Profil Perusahaan Subbab Profil Dewan Pengawas.

Detailed information regarding his educational background and career history, including his position as a Supervisory Board member, is available in the Company Profile Chapter, Supervisory Board's Profile Subchapter.

Irwan Saputra

Anggota Komite Audit
Audit Committee Member

Warga Negara Indonesia, berusia 57 tahun, berdomisili di Bekasi
Indonesian citizen, 57 years old, domiciled in Bekasi

Dasar Pengangkatan

Surat Keputusan Dewan Pengawas Perusahaan Umum Daerah Pembangunan Sarana Jaya No. 1 Tahun 2020 tanggal 13 Januari 2020

Appointment Basis

Decree of the Supervisory Board of Perusahaan Umum Daerah Pembangunan Sarana Jaya No. 1 of 2020 dated January 13, 2020

Riwayat Pendidikan

- Diploma 4 dari Sekolah Tinggi Akuntansi Negara (STAN) (1994)
- Diploma 3 dari Sekolah Tinggi Akuntansi Negara (STAN) (1988)

Educational Background

- Diploma 4 from State College of Accountancy (STAN) (1994)
- Diploma 3 from State College of Accountancy (STAN) (1988)

Rangkap Jabatan

Di Sarana Jaya:

Tidak ada

Concurrent Positions

In Sarana Jaya:

None

Di Perusahaan/Institusi Lain:

Tidak ada

In Other Company/Institution:

None

Riwayat Karier

- Direktur di PT Infranet Indonesia (2011 – 2015)
- Wirausaha (2008 – 2011)
- Direktur Operasional di BPR Dana Pos (2003 – 2008)
- Manajer Keuangan dan Akuntansi di PT Pembiayaan Artha Negara (2001 – 2003)
- Kepala Divisi Keuangan di PT Eraska Nofa (Direktorat Properti) (1997 – 2001)
- Akuntan dan Ketua di Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan Pusat yang diperbantukan pada Bank Indonesia (1994 – 1997)
- Ajun Akuntan di Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Perwakilan Pekanbaru, Riau (1988 – 1991)

Career History

- Director at PT Infranet Indonesia (2011 – 2015)
- Entrepreneur (2008 – 2011)
- Director of Operations at BPR Dana Pos (2003 – 2008)
- Finance and Accounting Manager at PT Pembayaran Artha Negara (2001 – 2003)
- Finance Division Head at PT Eraska Nofa (Property Directorate) (1997 – 2001)
- Accountant and Chair of the Central Development Finance Comptroller seconded to Bank Indonesia (1994 – 1997)
- Adjunct Accountant at the Development Finance Comptroller (BPKP) Representative Office in Pekanbaru, Riau (1988 – 1991)

Nizar Suhendra

Anggota Komite Audit
Audit Committee Member

Warga Negara Indonesia, berusia 50 tahun, berdomisili di Jakarta
Indonesian citizen, 50 years old, domiciled in Jakarta

Dasar Pengangkatan

Surat Keputusan Dewan Pengawas Perusahaan Umum Daerah Pembangunan Sarana Jaya No. 1 Tahun 2023 tanggal 16 Januari 2023

Appointment Basis

Decree of the Supervisory Board of Perusahaan Umum Daerah Pembangunan Sarana Jaya No. 1 of 2023 dated January 16, 2023

Riwayat Pendidikan

- Magister Kebijakan Umum dari Lee Kuan Yew School of Public Policy National University of Singapore (2006)
- Sarjana Ekonomi dari Universitas Indonesia (1998)
- Teknik Mesin - Ahli Madya dari Politeknik Universitas Indonesia (1994)

Educational Background

- Master of Public Policy from Lee Kuan Yew School of Public Policy National University of Singapore (2006)
- Bachelor of Economics from the University of Indonesia (1998)
- Mechanical Engineering – Associate Expert from Polytechnic University of Indonesia (1994)

Penghargaan

- Harwin Award for Student Leadership, diberikan oleh National University of Singapore (2005)
- Chevening Award, diberikan oleh British Council (2003)

Award

- Harwin Award for Student Leadership, awarded by the National University of Singapore (2005)
- Chevening Award, awarded by the British Council (2003)

Rangkap Jabatan

Di Sarana Jaya:
Tidak ada

In Sarana Jaya:
None

Di Perusahaan/Institusi Lain:
Tidak ada

In Other Company/Institution:
None

Riwayat Karier

- Komisaris PT Zevenlink Indonesia (2016 – sekarang)
- Direktur Utama PT Naraya Global Corpora (2016 – 2022)
- Ketua Yayasan Pendidikan Harapan Bersama (2021 – 2022)
- Direktur Politeknik Harapan Bersama Tegal (2020 – 2021)
- Komisaris PT Patra Jasa (2015 – 2018)
- Staf Khusus Menteri Energi dan Sumber daya Mineral RI (2014 – 2016)
- Manajer Senior Human Capital and Support pada PT Multi Tambangjaya Utama (anak Perusahaan Indika Energy Group mengelola Tambang Batubara di Kalimantan Tengah) (2010 – 2014)
- Manajer Senior, external relation pada PT Indika Energy Tbk (2010 – 2014)
- Konsultan pada PT TRIDAYA Indonesia, Jakarta (2007 – 2010)
- Analis Media pada program konversi minyak tanah ke LPG PT Pertamina (2007)
- Kepala Program Eksekutif Universitas Paramadina (2006 – 2007)
- Manajer Proyek Penyusunan Perencanaan pada BRR (Badan Rehabilitasi dan Rekonstruksi) Aceh – Nias (2006)
- Deputi Direktur Perkumpulan Membangun Kembali Indonesia (2003 – 2004)
- Direktur Eksekutif Masyarakat Transparansi Indonesia (2001 – 2003)
- Asisten Teknis Menteri Luar Negeri Republik Indonesia (1999 – 2001)

Career History

- Commissioner of PT Zevenlink Indonesia (2016 – present)
- President Director of PT Naraya Global Corpora (2016 – 2022)
- Chairman of Harapan Bersama Education Foundation (2021 – 2022)
- Director of Harapan Bersama Polytechnic Tegal (2020 – 2021)
- Commissioner of PT Patra Jasa (2015 – 2018)
- Special Staff to the Energy and Mineral Resources Minister of the Republic of Indonesia (2014 – 2016)
- Senior Human Capital and Support Manager at PT Multi Tambangjaya Utama (a subsidiary of Indika Energy Group managing Coal Mines in Central Kalimantan) (2010 – 2014)
- External Relations Senior Manager at PT Indika Energy Tbk (2010 – 2014)
- Consultant at PT TRIDAYA Indonesia, Jakarta (2007 – 2010)
- Media Analyst on PT Pertamina's kerosene to LPG conversion program (2007)
- Paramadina University Executive Program Head (2006 – 2007)
- Project Manager for Preparation of Planning at Aceh – Nias BRR (Rehabilitation and Reconstruction Agency) (2006)
- Deputy Director of the Association for Rebuilding Indonesia (2003 – 2004)
- Executive Director of the Indonesian Transparency Society (2001 – 2003)
- Technical Assistant to the Foreign Minister of the Republic of Indonesia (1999 – 2001)

KEDUDUKAN KOMITE AUDIT

Dalam struktur organisasi Perusahaan kedudukan Komite Audit berada di bawah Dewan Pengawas. Dengan demikian Komite Audit mempertanggung jawabkan pelaksanaan tugasnya kepada Dewan Pengawas.

PERNYATAAN INDEPENDENSI KOMITE AUDIT

Piagam Komite Audit telah menetapkan ketentuan terkait independensi Komite Audit. Anggota Komite Audit diwajibkan untuk menjalankan tugas secara independen, serta memberikan penilaian yang adil dan seimbang terhadap semua kondisi yang relevan, tanpa dipengaruhi oleh kepentingan pribadi atau pihak lain saat menyampaikan pendapatnya.

Perusahaan memastikan bahwa semua anggota Komite Audit memenuhi kriteria independensi, termasuk tidak memiliki hubungan keuangan, kepengurusan, kepemilikan saham, atau hubungan keluarga dengan anggota Dewan Pengawas, Direksi, dan/atau Pemegang Saham Pengendali yang dapat memengaruhi kemampuannya untuk bertindak secara independen. Selain itu, anggota Komite Audit tidak diperbolehkan menjabat sebagai anggota dari komite lain.

RAPAT KOMITE AUDIT

Kebijakan Rapat

Rapat Komite Audit dilakukan secara berkala, setidaknya 1 (satu) bulan sekali, dan dapat diadakan di luar jadwal rapat berkala untuk membahas hal-hal yang dianggap perlu dan/atau mendesak. Kebijakan ini telah diatur dalam Piagam Komite Audit.

Frekuensi Rapat dan Tingkat Kehadiran Anggota di Tahun 2023

Selama tahun 2023, Komite Audit telah melaksanakan rapat sebanyak 7 (tujuh) kali sesuai dengan Piagam Komite Audit dengan tingkat kehadiran anggota adalah sebagai berikut:

Nama Name	Posisi dalam Komite Committee Position	Jumlah Rapat Total meeting	Jumlah Kehadiran Total Attendance	Tingkat Kehadiran Attendance Rate
Arief Rachman	Ketua Head	7	7	100%
Irwan Saputra	Anggota Member	7	7	100%
Wahyudi Pramana*	Anggota Member	0	0	-
Nizar Suhendra**	Anggota Member	7	7	100%

*Beliau efektif menjabat sebagai anggota Komite Audit hingga 15 Januari 2023

*He effectively serves as an Audit Committee member until January 15, 2023

**Beliau mulai efektif menjabat sebagai anggota Komite Audit per 16 Januari 2023

**He effectively serves as an Audit Committee member as of January 16, 2023

AUDIT COMMITTEE POSITION

In the Company's organizational structure, the Audit Committee is under the Supervisory Board. Therefore, the Audit Committee is accountable for implementing its duties to the Supervisory Board.

STATEMENT OF AUDIT COMMITTEE INDEPENDENCE

The Audit Committee Charter has established provisions regarding the independence of the Audit Committee. Audit Committee members are required to carry out their duties independently as well as provide a fair and balanced assessment of all relevant conditions without being influenced by personal interests or other parties when expressing their opinions.

The Company ensures that all Audit Committee members meet the independence criteria, including having no financial, management, share ownership, or familial relationships with members of the Supervisory Board, Board of Directors, and/or Controlling Shareholders that could affect their ability to act independently. In addition, the Audit Committee members cannot serve as members of other committees.

AUDIT COMMITTEE MEETINGS

Meeting Policy

Audit Committee meetings are held periodically, at least once a month, and can be held outside the regular meeting schedule to discuss necessary and/or urgent matters. The policy has been regulated in the Audit Committee Charter.

Meeting Frequency and Member Attendance Levels in 2023

In 2023, the Audit Committee held seven meetings per the Audit Committee Charter with the following member attendance level:

PENINGKATAN KAPABILITAS DAN SERTIFIKASI PROFESI KOMITE AUDIT

Selama tahun 2023, Komite Audit tidak mengikuti program pelatihan dan pengembangan secara khusus, termasuk peningkatan sertifikasi profesi. Namun, program peningkatan kapabilitas dilakukan dalam bentuk kunjungan kerja ke alat produksi Sarana Jaya bersama-sama dengan Dewan Pengawas. Program ini dianggap penting agar Komite Audit dapat selalu menerima informasi tentang perkembangan terkini dari *core business* Perusahaan. Anggota Komite Audit juga diharapkan untuk mengikuti perkembangan perubahan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

PELAKSANAAN KEGIATAN KOMITE AUDIT 2023

Komite Audit telah melakukan tugas dan tanggung jawabnya sepanjang tahun 2023, sebagai berikut:

1. Mengevaluasi efektivitas pelaksanaan audit eksternal/jasa yang diberikan Kantor Akuntan Publik (KAP), termasuk menelaah independensi dan objektivitas;
2. Memberikan rekomendasi kepada Dewan Pengawas mengenai penunjukan Akuntan Publik dan KAP untuk audit tahun buku 2023;
3. Melakukan *audit progress meeting* dengan KAP yang ditunjuk dalam melaksanakan *general audit*;
4. Melakukan telaah atas pelaksanaan pemeriksaan oleh auditor internal maupun auditor eksternal, dan mengawasi pelaksanaan tindak lanjut atas hasil temuan auditor;
5. Melakukan kunjungan kerja ke alat produksi Perusahaan; dan
6. Penugasan lainnya yang diberikan oleh Dewan Pengawas.

CAPABILITY DEVELOPMENT AND PROFESSIONAL CERTIFICATION OF THE AUDIT COMMITTEE

In 2023, the Audit Committee did not participate in particular training and development programs, including increasing professional certification. However, the capability improvement was carried out as a working visit to Sarana Jaya's production equipment with the Supervisory Board. The program is important so the Audit Committee can receive information about the latest developments in the Company's core business. Audit Committee members are also expected to follow changes to applicable laws and regulations.

AUDIT COMMITTEE ACTIVITY IMPLEMENTATION IN 2023

The Audit Committee has carried out its duties and responsibilities throughout 2023 as follows:

1. Evaluated the effectiveness of the implementation of external audits/services provided by the Public Accounting Firm (KAP), including reviewing its independence and objectivity;
2. Provided recommendations to the Supervisory Board on the appointment of a Public Accountant and KAP for the 2022 fiscal year audit;
3. Conducted progress meetings with the appointed KAP in carrying out general audits;
4. Reviewed the implementation of audits by internal auditors and external auditors and oversaw follow-up implementation of the auditors' findings;
5. Conducted working visits to the Company's production assets; and
6. Other duties assigned by the Supervisory Board.

KOMITE REMUNERASI DAN NOMINASI

REMUNERATION AND NOMINATION COMMITTEE

Dewan Pengawas membentuk Komite Remunerasi dan Nominasi yang bekerja secara kolektif. Fungsinya adalah membantu Dewan Pengawas dalam memberikan masukan dan rekomendasi terkait dengan aspek struktur organisasi Perusahaan, sistem manajemen talenta, fungsi nominasi calon Direksi dan Dewan Pengawas Perusahaan. Selain itu, komite ini juga bertugas mengusulkan remunerasi untuk Direksi dan Dewan Pengawas Perusahaan, yang selaras dengan prinsip-prinsip GCG dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

PIAGAM KOMITE REMUNERASI DAN NOMINASI

Piagam Komite Remunerasi dan Nominasi, yang ditetapkan berdasarkan Keputusan Dewan Pengawas Tahun 2023, menjadi panduan dalam menjalankan tugas, tanggung jawab, dan lingkup pekerjaan Komite Remunerasi dan Nominasi. Pedoman ini secara jelas mendefinisikan cara Komite melaksanakan tugasnya secara efektif, profesional, dan independen sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

TUGAS KOMITE REMUNERASI DAN NOMINASI

Berdasarkan Keputusan Dewan Pengawas No. 1 Tahun 2022 tentang Pembentukan Komite Remunerasi dan Nominasi Perusahaan Umum Daerah Pembangunan Sarana Jaya, lingkup tugas dan tanggung jawab Komite Remunerasi dan Nominasi adalah sebagai berikut:

1. Komite Remunerasi dan Nominasi berfungsi sebagai pembantu Dewan Pengawas dalam pelaksanaan tugas-tugas pengawasan.
2. Dalam pelaksanaan fungsinya Komite Remunerasi dan Nominasi bertindak secara independen dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya.
3. Dalam menjalankan fungsinya, Komite Remunerasi dan Nominasi memiliki tugas, antara lain:
 - A. Terkait dengan fungsi remunerasi:
 - 1) Memberikan rekomendasi kepada Dewan Pengawas mengenai:
 - a) Sistem dan struktur remunerasi
 - b) Kebijakan atas remunerasi; dan
 - c) Besaran atas remunerasi

The Supervisory Board established a Remuneration and Nomination Committee, which works collectively. Its function is to assist the Supervisory Board in providing input and recommendations related to aspects of the Company's organizational structure, talent management system, and the function of nominating candidates for the Board of Directors and Supervisory Board. This committee is also tasked with proposing remuneration for the Board of Directors and Supervisory Board, which aligns with GCG principles and applicable laws and regulations.

REMUNERATION AND NOMINATION COMMITTEE CHARTER

The Remuneration and Nomination Committee Charter, established based on the 2023 Supervisory Board Decree, is a guide in carrying out the duties, responsibilities, and scope of work of the Remuneration and Nomination Committee. The guideline defines how the Committee carries out its duties effectively, professionally, and independently per the applicable laws and regulations.

REMUNERATION AND NOMINATION COMMITTEE DUTIES

Based on Supervisory Board Decree No. 1 of 2022 on the Establishment of the Remuneration and Nomination Committee for the Regional Public Company Pembangunan Sarana Jaya, the scope of duties and responsibilities of the Remuneration and Nomination Committee are as follows:

1. The Remuneration and Nomination Committee functions as an assistant to the Supervisory Board in carrying out supervisory duties.
2. In carrying out its functions, duties, and responsibilities, the Remuneration and Nomination Committee acts independently.
3. In carrying out its functions, the Remuneration and Nomination Committee has duties, including:
 - A. Related to the remuneration function:
 - 1) Provide recommendations to the Supervisory Board regarding:
 - a) Remuneration system and structure
 - b) Remuneration policies; and
 - c) Remuneration amount

- 2) Membantu Dewan Pengawas melakukan penilaian kinerja dengan kesesuaian remunerasi yang diterima oleh pejabat satu tingkat di bawah Direksi dan pegawai lainnya.
- B. Terkait dengan fungsi nominasi:
- 1) Memberikan rekomendasi kepada Dewan Pengawas mengenai:
 - a) Kebijakan dan kriteria yang dibutuhkan dalam proses nominasi; dan
 - b) Kebijakan evaluasi kinerja bagi anggota Direksi dan/atau Anggota Dewan Pengawas (penilaian mandiri).
 - 2) Membantu Dewan Pengawas melakukan penilaian kinerja anggota Direksi secara kolegal dan individual serta pejabat satu level di bawah Direksi berdasarkan tolak ukur yang telah disusun sebagai bahan evaluasi.
 - 3) Memberikan rekomendasi kepada Dewan Pengawas mengenai program pengembangan kemampuan anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Pengawas dan pejabat satu tingkat di bawah Direksi.
 - 4) Memberikan rekomendasi usulan calon yang memenuhi syarat sebagai anggota Direksi yang berasal dari lingkungan internal perusahaan kepada Dewan Pengawas untuk disampaikan kepada KPM apabila diminta dan diperlukan.
 - 5) Memberikan rekomendasi usulan calon Direksi dan/atau Komisaris Anak Perusahaan kepada Dewan Pengawas sebelum ditetapkan oleh Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS).
4. Komite Remunerasi dan Nominasi memiliki tanggung jawab sebagai berikut:
- A. Memastikan dan memonitor penyusunan sistem dan kebijakan terkait dengan proses nominasi di lingkungan perusahaan dan anak perusahaan khususnya Direksi/Dewan Pengawas/Komisaris dan pejabat satu tingkat di bawah Direksi.
- 2) Assist the Supervisory Board in carrying out performance assessments following the remuneration received by officials one level below the Board of Directors and other employees.
- B. Related to the nomination function:
- 1) Provide recommendations to the Supervisory Board regarding:
 - a) Policies and criteria required in the nomination process; and
 - b) Performance evaluation policy for the Board of Directors and/or Supervisory Board members (self-assessment).
 - 2) Assist the Supervisory Board in assessing the performance of the Board of Directors members collectively and individually as well as officials one level below the Board of Directors based on benchmarks prepared as evaluation material.
 - 3) Provide recommendations to the Supervisory Board regarding capacity development programs for the Board of Directors and/or Supervisory Board members and high-ranking officials under the Board of Directors.
 - 4) Provide recommendations for proposed candidates who meet the requirements as the Board of Directors members from the internal environment to the Supervisory Board to be submitted to KPM if requested and necessary.
 - 5) Provide recommendations for proposed candidates for Directors and/or Commissioners of Subsidiaries to the Supervisory Board before being determined by the General Meeting of Shareholders (GMS).
4. The Remuneration and Nomination Committee has the following responsibilities:
- A. Ensure and monitor the preparation of systems and policies related to the nomination process within the company and its subsidiaries, especially the Board of Directors/Supervisory Board/Commissioners and officials one level below the Board of Directors.

- | | |
|--|--|
| <p>B. Memastikan bahwa pelaksanaan pemilihan calon Direksi atau pejabat satu tingkat di bawah Direksi di lingkungan perusahaan dan anak perusahaan dilakukan sesuai ketentuan dan regulasi yang berlaku.</p> <p>C. Menyampaikan arahan atau rekomendasi terkait kebijakan pengelolaan SDM perusahaan dan anak perusahaan sejalan dengan peraturan perundangan yang berlaku dan perkembangan pasar sesuai industrinya, termasuk namun tidak terbatas pada gaji, tunjangan, dan fasilitas pegawai.</p> <p>D. Memberikan rekomendasi kepada Dewan Pengawas terkait struktur organisasi dan sistem evaluasi kinerja perusahaan.</p> <p>E. Melaksanakan rapat sesuai dengan kebutuhan yang dihadiri anggota komite bersama pihak terkait dari manajemen, unit kerja atau pihak-pihak lainnya.</p> | <p>B. Ensure that the selection of candidates for the Board of Directors or officials one level below the Board of Directors within the company and subsidiaries is carried out per applicable rules and regulations.</p> <p>C. Provide directives or recommendations regarding company and subsidiary HR management policies in line with applicable laws and regulations and market developments according to the industry, including but not limited to employee salaries, benefits, and facilities.</p> <p>D. Provide recommendations to the Supervisory Board regarding the organizational structure and company performance evaluation system.</p> <p>E. Carrying out meetings as needed, which are attended by committee members and related parties from management, work units, or other parties.</p> |
|--|--|

KOMPOSISI DAN MASA JABATAN

Komite Remunerasi dan Nominasi beranggotakan unsur independen dan dipimpin oleh seorang anggota Dewan Pengawas. Tanpa mengurangi hak Dewan Pengawas untuk memberhentikan Komite Remunerasi dan Nominasi sewaktu-waktu, masa jabatan Komite disesuaikan dengan masa jabatan Dewan Pengawas.

Komposisi Komite Remunerasi dan Nominasi per 31 Desember 2023 adalah sebagai berikut:

COMPOSITION AND TERM OF OFFICE

The Remuneration and Nomination Committee consists of independent elements and is led by a Supervisory Board member. Without prejudice to the Supervisory Board's right to dismiss the Remuneration and Nomination Committee at any time, the Committee's term of office is adjusted to the Supervisory Board's term of office.

The composition of the Remuneration and Nomination Committee on December 31, 2023, is as follows:

Nama Name	Posisi di Komite Committee Position	Dasar Pengangkatan Appointment Basis	Masa Jabatan Term of Office
Arief Rachman	Ketua Komite Head of the Committee	Surat Keputusan Dewan Pengawas Perusahaan Umum Daerah Pembangunan Sarana Jaya No. 5 Tahun 2023 tanggal 27 November 2023 Decree of the Supervisory Board of Perusahaan Umum Daerah Pembangunan Sarana Jaya No. 5 of 2023 dated November 27, 2023	2023 – 2025
Dariyah	Anggota Komite Committee Member	Surat Keputusan Dewan Pengawas No. 7 tanggal 17 Oktober 2022. Supervisory Board Decree No. 7, dated October 17, 2022	2022 – 2025
Delfi Elius	Anggota Komite Committee Member	Surat Keputusan Dewan Pengawas No. 7 tanggal 17 Oktober 2022. Supervisory Board Decree No. 7, dated October 17, 2022	2022 – 2025

► **Profil Komite Remunerasi dan Nominasi**
Remuneration and Nomination Committee Profile

Arief Rachman

Ketua Komite Remunerasi dan Nominasi
Head of the Remuneration and Nomination Committee

Warga Negara Indonesia, berusia 42 tahun, berdomisili di Jakarta
Indonesian citizen, 42 years old, domiciled in Jakarta

Dasar Pengangkatan

Surat Keputusan Dewan Pengawas Perusahaan Umum Daerah Pembangunan Sarana Jaya No. 5 Tahun 2023 tanggal 27 November 2023

Appointment Basis

Decree of the Supervisory Board of Perusahaan Umum Daerah Pembangunan Sarana Jaya No. 5 of 2023 dated November 27, 2023

Rangkap Jabatan

Di Sarana Jaya:
Ketua Komite Audit dan Ketua Komite Pemantau Risiko

Concurrent Position

In Sarana Jaya:
Head of the Audit Committee and Head of the Risk Monitoring Committee

Di Perusahaan/Institusi Lain:

- Pendiri ART & Co Law Firm (2019 – Sekarang)
- Direktur Utama PT Sinergi Transformasi Indonesia (2018 – Sekarang)

In Other Company/Institution:

- Founder of ART & Co Law Firm (2019 – Present)
- President Director of PT Sinergi Transformasi Indonesia (2018 – Present)

Informasi tentang riwayat pendidikan dan riwayat karier beliau yang juga menjabat sebagai Dewan Pengawas telah diuraikan dengan rinci pada Bab Profil Perusahaan Subbab Profil Dewan Pengawas.

Detailed information regarding his educational background and career history, including his position as a Supervisory Board member, is available in the Company Profile Chapter, Supervisory Board's Profile Subchapter.

Dariyah

Anggota Komite Remunerasi dan Nominasi
Remuneration and Nomination Committee Member

Warga Negara Indonesia, berusia 43 tahun, berdomisili di Jakarta
Indonesian citizen, 43 years old, domiciled in Jakarta

Dasar Pengangkatan

Surat Keputusan Dewan Pengawas No. 7 tanggal 17 Oktober 2022

Appointment Basis

Supervisory Board Decree No. 7, dated October 17, 2022

Riwayat Pendidikan

- Magister Kenotariatan dari Universitas Indonesia (2019)
- Sarjana Hukum dari Universitas Indonesia (2004)

Educational Background

- Master of Notarial Affairs from the University of Indonesia (2019)
- Bachelor of Law from the University of Indonesia (2004)

Rangkap Jabatan

Di Sarana Jaya:
Tidak ada

Concurrent Position

In Sarana Jaya:
None

Di Perusahaan/Institusi Lain:

Senior Manager GCG PT Multi Utama Indojava (MUC Consulting Group) (2010 – sekarang)

In Other Company/Institution:

GCG Senior Manager at PT Multi Utama Indojava (MUC Consulting Group) (2010 – present)

Riwayat Karier

- Senior Consultant di PT Sinergi Daya Prima (SDP) (2006 – 2010)
- Associate di Firma Sofyan Djalil & Partners (SDP) (2004 – 2006)

Career History

- Senior Consultant at PT Sinergi Daya Prima (SDP) (2006 – 2010)
- Associate at Firma Sofyan Djalil & Partners (SDP) (2004 – 2006)

Delfi Elius

Anggota Komite Remunerasi dan Nominasi
Remuneration and Nomination Committee Member

Warga Negara Indonesia, berusia 50 tahun, berdomisili di Jakarta
Indonesian citizen, 50 years old, domiciled in Jakarta

Dasar Pengangkatan

Surat Keputusan Dewan Pengawas No. 7 tanggal 17 Oktober 2022

Appointment Basis

Supervisory Board Decree No. 7, dated October 17, 2022

Riwayat Pendidikan

Sarjana Ekonomi dari Universitas Andalas (1996)

Educational Background

Bachelor of Economics from Andalas University (1996)

Rangkap Jabatan

Di Sarana Jaya:
Tidak ada

Concurrent Position

In Sarana Jaya:
None

Di Perusahaan/Institusi Lain:

Tidak ada

In Other Company/Institution:

None

Riwayat Karier

- Production Manager di PT Multi Precision Utama (Januari – Juni 2018)
- Konsultan di PT Craze Indonesia (Juli – Desember 2017)
- Berbagai posisi di PT Nihon Seiki Indonesia (1998 – 2012)

Career History

- Production Manager at PT Multi Precision Utama (January – June 2018)
- Consultant at PT Craze Indonesia (July – December 2017)
- Various positions di PT Nihon Seiki Indonesia (1998 – 2012)

KEDUDUKAN KOMITE REMUNERASI DAN NOMINASI

Dalam struktur organisasi Perusahaan kedudukan Komite Remunerasi dan Nominasi berada di bawah Dewan Pengawas. Dengan demikian Komite Remunerasi dan Nominasi mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugasnya kepada Dewan Pengawas.

PERNYATAAN INDEPENDENSI KOMITE REMUNERASI DAN NOMINASI

Piagam Komite Remunerasi dan Nominasi telah menetapkan ketentuan terkait independensi Komite Remunerasi dan Nominasi. Anggota Komite Remunerasi dan Nominasi diwajibkan untuk menjalankan tugas secara independen, serta memberikan penilaian yang adil dan seimbang terhadap semua kondisi yang relevan, tanpa dipengaruhi oleh kepentingan pribadi atau pihak lain saat menyampaikan pendapatnya.

Perusahaan memastikan bahwa semua anggota Komite Remunerasi dan Nominasi memenuhi kriteria independensi, termasuk tidak memiliki hubungan keuangan, kepengurusan, kepemilikan saham, atau hubungan keluarga dengan anggota Dewan Pengawas, Direksi, dan/atau Pemegang Saham Pengendali yang dapat memengaruhi kemampuannya untuk bertindak secara independen.

RAPAT KOMITE REMUNERASI DAN NOMINASI

Kebijakan Rapat

Berdasarkan ketentuan yang tercantum dalam Piagam Komite Remunerasi dan Nominasi, Komite Remunerasi dan Nominasi menyelenggarakan rapat secara rutin, minimal 1 (satu) bulan sekali, dan berhak untuk menyelenggarakan rapat di luar jadwal rutin untuk membahas masalah yang dianggap penting atau mendesak. Komite Remunerasi dan Nominasi ini baru terbentuk pada bulan Oktober 2022.

Frekuensi Rapat dan Tingkat Kehadiran Anggota di Tahun 2023

Selama tahun 2023, komite telah menyelenggarakan rapat sebanyak 5 (lima) kali, dengan tingkat kehadiran anggota sebagai berikut:

Nama Name	Posisi dalam Komite Committee Position	Jumlah Rapat Total meeting	Jumlah Kehadiran Total Attendance	Tingkat Kehadiran (%) Attendance Rate (%)
Arief Rachman	Ketua Komite Head of the Committee	5	5	100%
Dariyah	Anggota Komite Committee Member	5	5	100%
Delfi Elius	Anggota Komite Committee Member	5	5	100%

REMUNERATION AND NOMINATION COMMITTEE POSITION

In the Company's organizational structure, the Remuneration and Nomination Committee is under the Supervisory Board. Therefore, the Remuneration and Nomination Committee is accountable for implementing its duties to the Supervisory Board.

STATEMENT OF REMUNERATION AND NOMINATION COMMITTEE INDEPENDENCE

The Remuneration and Nomination Committee Charter has established provisions regarding the independence of the Remuneration and Nomination Committee. Remuneration and Nomination Committee members are required to carry out their duties independently as well as provide a fair and balanced assessment of all relevant conditions without being influenced by personal interests or other parties when expressing their opinions.

The Company ensures that all Remuneration and Nomination Committee members meet the independence criteria, including having no financial, management, share ownership, or familial relationships with members of the Supervisory Board, Board of Directors, and/or Controlling Shareholders that could affect their ability to act independently.

REMUNERATION AND NOMINATION COMMITTEE MEETING

Meeting Policy

Based on the provisions in the Remuneration and Nomination Committee Charter, Remuneration and Nomination Committee meetings are held periodically, at least once a month, and can be held outside the regular meeting schedule to discuss necessary and/or urgent matters. The Remuneration and Nomination Committee was established in October 2022.

Meeting Frequency and Member Attendance Levels in 2023

In 2023, the Committee held five meetings with the following member attendance level:

PENINGKATAN KAPABILITAS DAN SERTIFIKASI PROFESI KOMITE REMUNERASI DAN NOMINASI

Selama tahun 2023, Komite Remunerasi dan Nominasi tidak mengikuti program pelatihan dan pengembangan secara khusus, termasuk peningkatan sertifikasi profesi. Namun, program peningkatan kapabilitas dilakukan dalam bentuk kunjungan kerja ke alat produksi Sarana Jaya bersama-sama dengan Dewan Pengawas. Program ini dianggap penting agar Komite Remunerasi dan Nominasi dapat selalu menerima informasi tentang perkembangan terkini dari *core business* Perusahaan.

PELAKSANAAN KEGIATAN KOMITE REMUNERASI DAN NOMINASI 2023

Komite Remunerasi dan Nominasi telah melakukan tugas dan tanggung jawabnya selama tahun 2023, adalah sebagai berikut:

1. Menyusun Piagam Komite sebagai pedoman kerjanya;
2. Melakukan rapat koordinasi awal dengan Direktur yang membidangi SDM;
3. Melakukan kunjungan kerja ke alat produksi Perusahaan; dan
4. Penugasan lainnya yang diberikan oleh Dewan Pengawas.

CAPABILITY DEVELOPMENT AND PROFESSIONAL CERTIFICATION OF THE REMUNERATION AND NOMINATION COMMITTEE

In 2023, the Remuneration and Nomination Committee did not participate in particular training and development programs, including increasing professional certification. However, the capability improvement was carried out as a working visit to Sarana Jaya's production equipment with the Supervisory Board. The program is important so the Remuneration and Nomination Committee can receive information about the latest developments in the Company's core business.

REMUNERATION AND NOMINATION COMMITTEE ACTIVITY IMPLEMENTATION IN 2023

The Remuneration and Nomination Committee has carried out the following duties and responsibilities in 2023:

1. Prepare a Committee Charter as a work guide;
2. Conduct an initial coordination meeting with the Director in charge of HR;
3. Conduct work visits to the Company's production equipment; and
4. Other duties assigned by the Supervisory Board.



KOMITE PEMANTAU RISIKO

RISK MONITORING COMMITTEE



Dewan Pengawas telah membentuk Komite Pemantau Risiko sejak tahun 2020. Komite ini bekerja secara kolektif untuk membantu Dewan Pengawas dalam tugas pengawasan terkait tata kelola Perusahaan, kepatuhan, dan manajemen risiko sesuai dengan pedoman kerja yang tercantum dalam Piagam Komite Pemantau Risiko.

PIAGAM KOMITE PEMANTAU RISIKO

Dalam menjalankan fungsi dan tanggung jawabnya, Komite Pemantau Risiko berpedoman pada Piagam Komite Pemantau Risiko yang telah disahkan melalui Keputusan Dewan Pengawas No. 5 tahun 2021 pada tanggal 29 Oktober 2021. Piagam tersebut memberikan pedoman yang jelas terkait tugas, tanggung jawab, dan ruang lingkup pekerjaan Komite Pemantau Risiko, memastikan bahwa pelaksanaan tugasnya dilakukan dengan transparansi, kompetensi, objektivitas, dan independensi sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

TUGAS KOMITE PEMANTAU RISIKO

Lingkup tugas dan tanggung jawab Komite Manajemen Risiko adalah sebagai berikut:

- a. Melakukan *review* dan memberikan rekomendasi atas efektivitas pelaksanaan manajemen risiko Perusahaan.

The Supervisory Board has established a Risk Monitoring Committee in 2020. The committee works collectively to assist the Supervisory Board in its supervisory duties related to corporate governance, compliance, and risk management, following the work guidelines in the Risk Monitoring Committee Charter.

RISK MONITORING COMMITTEE CHARTER

In carrying out its functions and responsibilities, the Risk Monitoring Committee is guided by the Risk Monitoring Committee Charter, ratified through Supervisory Board Decree No. 5 of 2021, dated October 29, 2021. The Charter provides clear guidelines regarding the duties, responsibilities, and scope of work of the Risk Monitoring Committee, ensuring that its duties are implemented with transparency, competence, objectivity, and independence per the prevailing statutory regulations.

RISK MONITORING COMMITTEE DUTIES

The scope of duties and responsibilities of the Risk Management Committee are as follows:

- a. Review and provide recommendations on the effectiveness of the Company's risk management implementation.

- | | |
|--|---|
| <ul style="list-style-type: none"> b. Melakukan <i>review</i> atas penilaian risiko terhadap rencana investasi Perusahaan yang material. c. Melakukan pengawasan atas kegiatan perusahaan dalam memantau pelaksanaan mitigasi risiko oleh unit-unit kerja terkait. d. Melakukan pengawasan atas pelaksanaan rekomendasi Komite Manajemen Risiko. e. Melakukan analisis dan evaluasi atas usulan RKAP dan <i>review</i> tahunan atas RJPP yang diajukan oleh Direksi. f. Melakukan penelaahan atas informasi risiko dan manajemen risiko Perusahaan dalam laporan-laporan yang akan dipublikasikan. g. Melakukan pembahasan atas risiko-risiko penting pada unit-unit di lingkungan Perusahaan, sesuai kebutuhan. h. Dalam hal Direksi menganggap perlu menggunakan konsultan manajemen risiko independen untuk melakukan penelaahan kembali atas proses manajemen risiko yang telah diterapkan Perusahaan, maka tugas Komite Manajemen Risiko adalah: <ul style="list-style-type: none"> 1) Memberikan masukan tentang kriteria dan kompetensi konsultan. 2) Melakukan monitoring pekerjaan konsultan. | <ul style="list-style-type: none"> b. Reviewing the risk assessment of the Company's material investment plans. c. Supervise corporate activities in monitoring the implementation of risk mitigation by related work units. d. Supervise the implementation of the Risk Management Committee recommendations. e. Analyze and evaluate the proposed RKAP and annually review the RJPP submitted by the Board of Directors. f. Reviewing the Company's risk and risk management information in reports that will be published. g. Conduct discussions on important risks in units within the Company, as needed. h. In the event that the Board of Directors deems it necessary to use an independent risk management consultant to review the risk management process that the Company has implemented, the duties of the Risk Monitoring Committee are: <ul style="list-style-type: none"> 1) Provide input regarding consultant criteria and competencies. 2) Monitoring consultant work. |
|--|---|

KOMPOSISI DAN MASA JABATAN

Komite Pemantau Risiko beranggotakan unsur independen yang dipimpin oleh seorang anggota Dewan Pengawas. Masa jabatan Komite Pemantau Risiko sesuai masa jabatan Dewan Pengawas dengan tidak mengurangi hak Dewan Pengawas untuk memberhentikannya sewaktu-waktu.

Komposisi Komite Pemantau Risiko per 31 Desember 2023 adalah sebagai berikut:

COMPOSITION AND TERM OF OFFICE

The Risk Monitoring Committee consists of independent elements and is led by a Supervisory Board member. The Committee's term of office is adjusted to the Supervisory Board's term of office, without prejudice to the Supervisory Board's right to dismiss the Risk Monitoring Committee at any time.

The composition of the Risk Monitoring Committee on December 31, 2023, is as follows:

Nama Name	Posisi di Komite Committee Position	Dasar Pengangkatan Appointment Basis	Masa Jabatan Term of Office
Arismal*	Ketua Komite Head of the Committee	Surat Keputusan Dewan Pengawas No. 8 tanggal 17 Oktober 2022. Supervisory Board Decree No. 8, dated October 17, 2022.	2022 - 2025
Arief Rachman**	Ketua Komite Head of the Committee	Surat Keputusan Dewan Pengawas Perusahaan Umum Daerah Pembangunan Sarana Jaya No. 5 Tahun 2023 tanggal 27 November 2023. Decree of the Supervisory Board of Perusahaan Umum Daerah Pembangunan Sarana Jaya No. 5 of 2023 dated November 27, 2023.	2023 - 2026
Tritoto Harwono	Anggota Komite Committee Member	Surat Keputusan Dewan Pengawas No. 8 tanggal 17 Oktober 2022. Supervisory Board Decree No. 8, dated October 17, 2022.	2022 - 2025
Tezar Yudhistira	Anggota Komite Committee Member	Surat Keputusan Dewan Pengawas No. 8 tanggal 17 Oktober 2022. Supervisory Board Decree No. 8, dated October 17, 2022.	2022 - 2025

* Beliau berhenti menjabat secara efektif pada 13 Oktober 2023

* He effectively ceases to serve on October 13, 2023.

** Beliau efektif menjabat pada 27 November 2023

** He effectively serves on November 27, 2023.



► Profil Komite Pemantau Risiko Risk Monitoring Committee Duties

Arief Rachman

Ketua Komite Pemantau Risiko
Head of the Risk Monitoring Committee

Warga Negara Indonesia, berusia 42 tahun, berdomisili di Jakarta
Indonesian citizen, 42 years old, domiciled in Jakarta

Dasar Pengangkatan

Surat Keputusan Dewan Pengawas Perusahaan Umum Daerah Pembangunan Sarana Jaya No. 5 Tahun 2023 tanggal 27 November 2023

Appointment Basis

Decree of the Supervisory Board of Perusahaan Umum Daerah Pembangunan Sarana Jaya No. 5 of 2023 dated November 27, 2023

Rangkap Jabatan

Di Sarana Jaya:
Ketua Komite Audit dan Komite Remunerasi dan Nominasi

Concurrent Positions

In Sarana Jaya:
Head of the Audit Committee, Head of the Remuneration and Nomination Committee

Di Perusahaan/Institusi Lain:

- Pendiri ART & Co Law Firm (2019 – Sekarang)
- Direktur Utama PT Sinergi Transformasi Indonesia (2018 – Sekarang)

In Other Company/Institution:

- Founder of ART & Co Law Firm (2019 – Present)
- President Director of PT Sinergi Transformasi Indonesia (2018 – Present)

Informasi tentang riwayat pendidikan dan riwayat karier beliau yang juga menjabat sebagai Dewan Pengawas telah diuraikan dengan rinci pada Bab Profil Perusahaan Subbab Profil Dewan Pengawas.

Detailed information regarding his educational background and career history, including his position as a Supervisory Board member, is available in the Company Profile Chapter, Supervisory Board's Profile Subchapter.

Tritoto Harwono

Anggota Komite Pemantau Risiko
Risk Monitoring Committee Member

Warga Negara Indonesia, berusia 64 tahun, berdomisili di Bogor
Indonesian citizen, 64 years old, domiciled in Bogor

Dasar Pengangkatan

Surat Keputusan Dewan Pengawas No. 8 tanggal 17 Oktober 2022

Appointment Basis

Supervisory Board Decree No. 8, dated October 17, 2022

Riwayat Pendidikan

Sarjana Fisika Elektronika dan Instrumentasi dari Universitas Gadjah Mada (1986)

Educational Background

Bachelor of Electronics and Instrumentation Physics from Gadjah Mada University (1986)

Rangkap Jabatan

Di Sarana Jaya:
Tidak ada

Concurrent Positions

In Sarana Jaya:
None

Di Perusahaan/Institusi Lain:

Tidak ada

In Other Company/Institution:

None

Riwayat Karier

- Anggota Komite Pemantau Risiko di PT ASDP Indonesia Ferry (Persero) (2015-2020)
- Penanggung Jawab Perencanaan dan Pemasangan Jaringan Sistem Komputer di pembangunan RSIA Ummi Bogor (2012-2013);
- Kepala Unit Pengembangan dan Tata Kelola di PT Bursa Efek Indonesia (2008-2010)
- Kepala Unit Pengelolaan Perkantoran di PT Bursa Efek Indonesia (2002-2007)
- Kepala Unit IT Operation di PT Bursa Efek Indonesia (1996-2002)

Career History

- Risk Monitoring Committee Member at PT ASDP Indonesia Ferry (Persero) (2015-2020)
- Person in Charge for Planning and Installing Computer System Networks in the construction of RSIA Ummi Bogor (2012-2013)
- Development and Governance Unit Head at PT Bursa Efek Indonesia (2008-2010)
- Office Management Unit Head at PT Bursa Efek Indonesia (2002-2007)
- IT Operations Unit Head at PT Bursa Efek Indonesia (1996-2002)

Tezar Yudhistira

Anggota Komite Pemantau Risiko
Risk Monitoring Committee Member

Warga Negara Indonesia, berusia 43 tahun, berdomisili di Jakarta
Indonesian citizen, 43 years old, domiciled in Jakarta

Dasar Pengangkatan

Surat Keputusan Dewan Pengawas No. 8 tanggal 17 Oktober 2022

Appointment Basis

Supervisory Board Decree No. 8, dated October 17, 2022

Riwayat Pendidikan

- Magister Hukum dari Universitas Trisakti (2017)
- Sarjana Hukum dari Universitas Bung Karno (2004)

Educational Background

- Bachelor of Law from Bung Karno University (2004)
- Master of Law from Trisakti University (2017)

Rangkap Jabatan

Di Sarana Jaya:
Tidak ada

Concurrent Positions

In Sarana Jaya:
None

Di Perusahaan/Institusi Lain:

Managing Partner ART & Co. Law Firm (2020 – sekarang)

In Other Company/Institution:

Managing Partner at ART & Co. Law Firm (2020 – present)

Riwayat Karier

- Managing Partner di ART & Co. Law Firm (2020 – sekarang)
- Legal Consultant di PT Tanahmas Kencana Abadi (2018 – 2019)
- Partner NY & Co. Law Firm (2014 – 2017)
- Tezar Yudhistira & Partners Law Office (2010 – 2013)
- Partner Funds Jet & Partners Law Firm (2007 – 2009)
- HR and Legal di PT Bintang Kencana Artha (2005 – 2006)

Career History

- Managing Partner at ART & Co. Law Firm (2020 – present)
- Legal Consultant at PT Tanahmas Kencana Abadi (2018 – 2019)
- Partner at NY & Co. Law Firm (2014 – 2017)
- Tezar Yudhistira & Partners Law Office (2010 – 2013)
- Partner at Funds Jet & Partners Law Firm (2007 – 2009)
- HR and Legal at PT Bintang Kencana Artha (2005 – 2006)

KEDUDUKAN KOMITE PEMANTAU RISIKO

Dalam struktur organisasi Perusahaan kedudukan Komite Pemantau Risiko berada di bawah Dewan Pengawas. Dengan demikian Komite Pemantau Risiko bertanggungjawabkan pelaksanaan tugasnya kepada Dewan Pengawas.

RISK MONITORING COMMITTEE POSITION

In the Company's organizational structure, the Risk Monitoring Committee is under the Supervisory Board. Therefore, the Risk Monitoring Committee is accountable for implementing its duties to the Supervisory Board.

PERNYATAAN INDEPENDENSI KOMITE PEMANTAU RISIKO

Perusahaan memastikan bahwa semua anggota Komite Pemantau Risiko memenuhi kriteria independensi, termasuk tidak memiliki hubungan keuangan, kepengurusan, kepemilikan saham, atau hubungan keluarga dengan anggota Dewan Pengawas, Direksi, dan/atau Pemegang Saham Pengendali yang dapat memengaruhi kemampuannya untuk bertindak secara independen.

INDEPENDENCE STATEMENT OF THE RISK MONITORING COMMITTEE

The Company ensures that all members of the Risk Monitoring Committee meet the criteria of independence, including having no financial, management, shareholding, or familial relationships with members of the Supervisory Board, Board of Directors, and/or Controlling Shareholders that may affect their ability to act independently.

RAPAT KOMITE PEMANTAU RISIKO

Kebijakan Rapat

Rapat Komite Pemantau Risiko diadakan secara berkala setidaknya sekali dalam sebulan. Rapat juga dapat diselenggarakan sewaktu-waktu di luar jadwal rutin apabila dianggap perlu atau untuk membahas hal-hal tertentu yang mendesak. Kebijakan rapat ini telah sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Piagam Komite Pemantau Risiko.

RISK MONITORING COMMITTEE MEETINGS

Meeting Policy

Risk Monitoring Committee meetings are held periodically, at least once a month. The meetings can also be held outside the regular schedule to discuss necessary and/or urgent matters. The policy aligns with the provisions in the Risk Monitoring Committee Charter.

Frekuensi Rapat dan Tingkat Kehadiran Anggota di Tahun 2023

Komite Pemantau Risiko telah melaksanakan rapat Komite sebanyak 8 (delapan) kali, selama tahun 2023, dengan tingkat kehadiran anggota sebagai berikut:

Nama Name	Posisi dalam Komite Committee Position	Jumlah Rapat Total Meeting	Jumlah Kehadiran Total Attendance	Tingkat Kehadiran (%) Attendance Rate (%)
Arismal*	Ketua Komite Head of the Committee	8	8	100%
Arief Rachman**	Ketua Komite Head of the Committee	1	1	100%
Tritoto Harwono	Anggota Komite Committee Member	8	8	100%
Tezar Yudhistira	Anggota Komite Committee Member	8	8	100%

* Beliau berhenti menjabat secara efektif pada 13 Oktober 2023

* He effectively ceases to serve on October 13, 2023.

** Beliau efektif menjabat pada 27 November 2023

** He effectively serves on November 27, 2023.

Meeting Frequency and Member Attendance Levels in 2023

The Risk Monitoring Committee held eight meetings in 2023 with the following member attendance level:

PENINGKATAN KAPABILITAS DAN SERTIFIKASI PROFESI KOMITE PEMANTAU RISIKO

Selama tahun 2023, Komite Pemantau Risiko mengikuti program pelatihan *Finance For Non Finance* dan *Qualified Risk Management Professional (QRMP)*. Program peningkatan kapabilitas juga dilakukan dalam bentuk kunjungan kerja ke alat produksi Sarana Jaya bersama-sama dengan Dewan Pengawas. Program ini dianggap penting agar Komite Pemantau Risiko dapat selalu menerima informasi tentang perkembangan terkini dari *core business* Perusahaan.

CAPABILITY DEVELOPMENT AND PROFESSIONAL CERTIFICATION OF THE RISK MONITORING COMMITTEE

In 2023, the Risk Monitoring Committee participated in the Finance For Non-Finance and Qualified Risk Management Professional (QRMP) training programs. The capability improvement was also carried out as a working visit to Sarana Jaya's production equipment with the Supervisory Board. The program is important so the Risk Monitoring Committee can receive information about the latest developments in the Company's core business.

PELAKSANAAN KEGIATAN KOMITE PEMANTAU RISIKO 2023

Komite Pemantau Risiko telah melakukan tugas dan tanggung jawabnya selama tahun 2023, adalah sebagai berikut:

1. Mengevaluasi dan memberikan masukan terkait dengan tata kelola Perusahaan dalam hal *review draft SOP Sistem Manajemen Mutu*;
2. Memberikan *review* terhadap Pedoman Manajemen Risiko sesuai SNI ISO 31001:2018;
3. Melakukan telaah dan memberikan rekomendasi terkait dengan aspek kepatuhan dan hukum dalam permasalahan hukum yang dihadapi Sarana Jaya;
4. Melakukan telaah atas pelaksanaan pemeriksaan oleh auditor internal maupun auditor eksternal, dan mengawasi pelaksanaan tindak lanjut atas hasil temuan auditor;
5. Melakukan Kunjungan Kerja ke alat produksi Perusahaan; dan
6. Penugasan lainnya yang diberikan oleh Dewan Pengawas.

RISK MONITORING COMMITTEE ACTIVITY IMPLEMENTATION IN 2023

The Risk Monitoring Committee has carried out the following duties and responsibilities in 2023:

1. Evaluate and provide input related to Company governance in terms of reviewing the draft Quality Management System SOP;
2. Provide a review of the Risk Management Guidelines per SNI ISO 31001:2018;
3. Conduct reviews and provide recommendations related to compliance and legal aspects in legal issues faced by Sarana Jaya;
4. Review the implementation of audits by internal auditors and external auditors, as well as supervise the implementation of follow-up actions on the auditor's findings;
5. Conduct work visits to the Company's production equipment; and
6. Other duties assigned by the Supervisory Board.

SEKRETARIS PERUSAHAAN

CORPORATE SECRETARY

Sekretaris Perusahaan, sebagai elemen penting dalam struktur GCG, memiliki peran utama sebagai penghubung (*liaison officer*) antara Direksi, Dewan Pengawas, dan KPM. Selain itu, Sekretaris Perusahaan juga berfungsi sebagai perwakilan Perusahaan dalam menjalin komunikasi dengan regulator dan lembaga asosiasi terkait. Sebagai bagian integral dari tugasnya, Sekretaris Perusahaan memegang tanggung jawab dalam memastikan kepatuhan terhadap perundang-undangan dan regulasi yang berlaku. Tugas pokoknya mencakup menjaga komunikasi yang efektif dan memastikan terciptanya koordinasi yang lancar di antara semua pihak terkait.

TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB

Sesuai dengan ketentuan yang berlaku, Sekretaris Perusahaan mengemban tugas dan tanggung jawab sebagai berikut:

1. Memastikan bahwa Perusahaan mematuhi peraturan tentang persyaratan keterbukaan sejalan dengan penerapan prinsip-prinsip *Good Corporate Governance*.
2. Memberikan informasi yang dibutuhkan oleh Direksi dan Dewan Pengawas secara berkala dan/atau sewaktu-waktu apabila diminta.
3. Sekretaris Perusahaan mempunyai tugas menata usahakan serta menyimpan dokumen Perusahaan, termasuk tetapi tidak terbatas pada risalah rapat Direksi, serta rapat gabungan antara Direksi dan Dewan Pengawas.
4. Sekretaris Perusahaan bertanggung jawab atas pengelolaan informasi Perusahaan.

As an important element in a GCG structure, the Corporate Secretary has a main role as a liaison officer between the Board of Directors, Supervisory Board, and KPM. The Corporate Secretary is also the Company's representatives in dealing with regulators, and other associated institution. As an integral part of its duties, the Corporate Secretary is responsible in ensuring compliance with applicable laws and regulations. Its main duties include maintaining effective communication and ensuring smooth coordination between all relevant parties.

DUTIES AND RESPONSIBILITIES

Per the applicable regulations, the Corporate Secretary carries out the following duties and responsibilities:

1. Ensure that the Company complies with regulations on disclosure requirements in line with the implementation of Good Corporate Governance principles.
2. Provide information needed by the Board of Directors and the Supervisory Board periodically and/or whenever requested.
3. The Corporate Secretary is responsible for administering and storing Company documents, including but not limited to the minutes of Board of Directors meetings and joint meetings between the Board of Directors and the Supervisory Board.
4. The Corporate Secretary is responsible for managing Company information.





► Profil Sekretaris Perusahaan Corporate Secretary Profile



Yadi Robby

Manajer Divisi Sekretaris Perusahaan | Corporate Secretariat Division Manager

Warga Negara Indonesia, berusia 51 tahun, berdomisili di Jakarta
Indonesian citizen, 51 years old, domiciled in Jakarta

Dasar Pengangkatan

Surat Keputusan Direksi Perusahaan Umum Daerah Pembangunan Sarana Jaya Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta No. 64 Tahun 2021

Riwayat Pendidikan

Sarjana bidang Ilmu Sosial dan Ilmu Politik dari Universitas Azzahra (2007)

Rangkap Jabatan

Di Sarana Jaya:

Senior Manajer Divisi Umum dan SDM
(Januari 2021 – Maret 2023)

Di Perusahaan/Institusi Lain:

Tidak ada

Riwayat Karier

- Manajer Divisi Sekretaris Perusahaan di Perumda Pembangunan Sarana Jaya (2023 – sekarang)
- Manajer Unit Sekretaris Perusahaan di Perumda Pembangunan Sarana Jaya (2021 – 2023)
- Senior Manajer Divisi Pertanahan dan Hukum di Perumda Pembangunan Sarana Jaya (2016 – 2021)
- Junior Manajer Pertanahan di Perumda Pembangunan Sarana Jaya (2015 – 2016)
- Asisten Manajer Umum di Perumda Pembangunan Sarana Jaya (2008 – 2015)
- Asisten Manajer Pengamanan Aset di Perumda Pembangunan Sarana Jaya (2007 – 2008)
- Staf Divisi Perencanaan di Perumda Pembangunan Sarana Jaya (2002 – 2007)
- Staf Bidang Pertanahan di Perumda Pembangunan Sarana Jaya (2000 – 2002)
- Staf Bidang Administrasi di Perumda Pembangunan Sarana Jaya (1999)

Appointment Basis

Decree of the Board of Directors of Perusahaan Umum Daerah Pembangunan Sarana Jaya No. 64 of 2021

Educational Background

Bachelor of Social and Political Science from Azzahra University (2007)

Concurrent Positions

In Sarana Jaya:

Senior Manager of General Affairs and HR Division
(January 2021 – March 2023)

In Other Company/Institution:

None

Career History

- Corporate Secretary Division Manager at Perumda Pembangunan Sarana Jaya (2023 – present)
- Corporate Secretary Unit Manager at Perumda Pembangunan Sarana Jaya (2021 – 2023)
- Senior Manager of Land and Legal Division at Perumda Pembangunan Sarana Jaya (2016 – 2021)
- Junior Land Manager at Perumda Pembangunan Sarana Jaya (2015 – 2016)
- Assistant General Manager at Perumda Pembangunan Sarana Jaya (2008 – 2015)
- Assistant Manager for Asset Security at Perumda Pembangunan Sarana Jaya (2007 – 2008)
- Planning Division Staff at Perumda Pembangunan Sarana Jaya (2002 – 2007)
- Land Staff at Perumda Pembangunan Sarana Jaya (2000 – 2002)
- Administrative Staff at Perumda Pembangunan Sarana Jaya (1999)

PROGRAM PELATIHAN DAN PENGEMBANGAN TAHUN 2023

Pada tahun 2023, Sekretaris Perusahaan telah mengikuti beberapa Program Pelatihan dan Pengembangan sebagaimana diuraikan pada tabel berikut:

No.	Tema Pelatihan Training Theme	Tanggal Pelaksanaan Implementation Date	Penyelenggara Organizer
1.	Kuliah Umum Media Indonesia bersama Menteri Keuangan Sri Mulyani Media Indonesia Public Lecture with Minister of Finance Sri Mulyani	3 Februari 2023 February 3, 2023	Media Indonesia
2.	Diklat Kesamaptaan dan Bintalsik Equity and Bintalsik Training	19 Januari 2023 – 21 Januari 2023 January 19, 2023 – January 21, 2023	Rindam Jaya
3.	Hari Bersih Indonesia Indonesian Clean Day	19 Februari 2023 February 19, 2023	Indonesia Indah Foundation
4.	Sosialisasi dalam rangka Peningkatan Pemahaman PPID BUMD Provinsi DKI Jakarta dalam Pelaksanaan Pelayanan Informasi Publik Dissemination to increase understanding of PPID BUMD DKI Jakarta Province in Implementing Public Information Services	17 Maret 2023 March 17, 2023	-
5.	Workshop Komunikasi Publik Talk "Kopitalk" #1 "Konten Kreatif Kekinian - Tren Video Vertikal" "Kopitalk" Public Communication Workshop #1 'Current Creative Content - Vertical Video Trends'	09 Februari 2023 February 9, 2023	Dinas Komunikasi, Informatika, dan Statistik DKI Jakarta DKI Jakarta Communication, Information, and Statistics Department
6.	Sharing Session - Good Corporate Governance Sharing Session - Good Corporate Governance	23 November 2023 November 23, 2023	Komite Remunerasi Perumda Pembangunan Sarana Jaya Remuneration Committee of Perumda Pembangunan Sarana Jaya

TRAINING AND DEVELOPMENT PROGRAMS IN 2023

In 2023, the Corporate Secretary has participated in several Training and Development Programs as described in the following table:

PELAKSANAAN TUGAS SEKRETARIS PERUSAHAAN 2023

Sepanjang tahun 2023, Sekretaris Perusahaan telah melaksanakan tugas sesuai dengan tanggung jawabnya, yaitu:

1. Menyelenggarakan Kegiatan *Coffee Morning* Awal Tahun 2023.
2. Penambahan SOP Kerja di Unit Sekretaris Perusahaan (SOP PPID dan SOP Surat Rahasia).
3. Melakukan diseminasi 20 Siaran Pers kepada Media Kerja Sama dan Koordinator Wartawan Balai Kota - DPRD DKI Jakarta mengenai kegiatan korporasi Sarana Jaya.
4. Melakukan monitoring pemberitaan Sarana Jaya.
5. Melakukan kegiatan CSR.
6. Melakukan fasilitasi dalam Kegiatan FGD bersama BPBUMD dan BPK RI tentang Penerapan GCG di BUMD.
7. Menyelenggarakan Perayaan HUT ke-41 Tahun Sarana Jaya.
8. Melakukan tindak lanjut Laporan/Komplain pada Aplikasi CSR terhadap Sarana Jaya.
9. Melakukan publikasi pada liputan *Indonesia New Chapter with* Desi Anwar "Optimisme Sarana Jaya untuk Membangun Jakarta" - CNN Indonesia.
10. Kegiatan Hari Bersih Indonesia 2023 dalam Peringatan Hari Peduli Sampah Nasional.

CORPORATE SECRETARY DUTY IMPLEMENTATION IN 2023

Throughout 2023, the Corporate Secretary has carried out duties following its responsibilities, namely:

1. Organized a Coffee Morning Activity in Early 2023.
2. Added of Work SOPs in the Corporate Secretary Unit (PPID SOP and Confidential Letter SOP).
3. Disseminated 20 Press Releases to Collaborative Media and City Hall Journalist Coordinators - DKI Jakarta DPRD on Sarana Jaya corporate activities.
4. Monitored Sarana Jaya's reporting.
5. Carried out CSR activities.
6. Facilitated FGD activities with BPBUMD and BPK RI on GCG Implementation in BUMD.
7. Organized Sarana Jaya's 41st Anniversary Celebration.
8. Followed up on reports/complaints on the CSR application against Sarana Jaya.
9. Publicized the coverage of Indonesia's New Chapter with Desi Anwar "Optimism of Sarana Jaya to Develop Jakarta" – CNN Indonesia.
10. 2023 Indonesian Clean Day activities to commemorate National Waste Awareness Day.

11. Penyelenggaraan *Webinar* “Buka Peluang Sampah Jadi Cuan” bersama STIE Kasih Bangsa.
 12. Melakukan tindak lanjut kegiatan penjurian hingga Perumda Pembangunan Sarana Jaya Meraih Penghargaan *TOP BUMD Awards 2023*.
 13. Melakukan pelaporan Kegiatan Strategis Daerah pada Monev KSD Tahun 2023.
 14. Melakukan Penyelenggaraan Kegiatan Peletakan Batu Pertama Nuansa Cilangkap Tower II - Menara Ayasa.
 15. Melakukan fasilitasi dan menjadi *Host* (Tuan Rumah) dalam Penyelenggaraan Kegiatan Program Akselerasi Inovasi SDG untuk Profesional Muda.
 16. Melakukan partisipasi Pameran Jakarta Tangguh pada tanggal 18 Juni 2023.
 17. Melakukan induksi dan perkenalan Direktur Utama Sarana Jaya, Bapak Andira Reoputra.
 18. Melakukan Kegiatan Peluncuran Jakarta Beraksi (Bergerak Atasi *Stunting*) di Pulogebang bersama Yayasan Rumah Zakat Indonesia.
 19. Melakukan publikasi dan partisipasi atas Pembangunan Taman ASEAN yang berlokasi di Blok M, Jakarta Selatan.
 20. Menyelenggarakan *Corporate Secretary BUMD Gathering 2023* pada Juli 2023 - Merupakan Kegiatan *Corsec Gathering* Pertama yang dilakukan oleh BUMD DKI Jakarta.
 21. Melakukan partisipasi pada Kegiatan BUMD Menanam di sekitar lokasi Jakarta International Stadium.
 22. Melakukan partisipasi dalam Kegiatan *SDGS Innovation Award* Tahun Anggaran 2023.
 23. Mengikuti Ajang *Top Digital Awards* BUMD dan mendapatkan penghargaan *TOP Digital Corporate Brand Award 2023*.
 24. Melakukan asistensi dan mengikuti kegiatan PORSENI BUMD Tahun 2023 dan Perumda Pembangunan Sarana Jaya berhasil memenangkan 2 kategori, yakni Juara III Basket Putri dan Juara III Tenis Meja.
 25. Melakukan Pelaporan Kinerja Perusahaan setiap Triwulan.
 26. Berpartisipasi pada kegiatan lomba berkebaya yang diselenggarakan oleh Dinas Perindustrian dan UMKM Provinsi DKI Jakarta pada tanggal 28 Oktober 2023.
 27. Melakukan sosialisasi HIV AIDS bersama Komisi Penanggulangan AIDS Provinsi DKI Jakarta pada tanggal 1 Desember 2023.
 28. Melakukan dokumentasi dan asistensi dalam Kegiatan Penandatanganan BAST Fasos Fasum oleh Walikota Jakarta Timur dan Direktur Utama Sarana Jaya.
 29. Melakukan Peresmian Bank Sampah di Menara Samawa Nuansa Pondok Kelapa.
 30. Melakukan realisasi pedoman CSR ISO 26000:2010.
 31. Melakukan penerbitan Pedoman Penyelenggaraan Kegiatan Tanggung Jawab Sosial Perusahaan (TJSL)/ CSR Perusahaan.
11. Organized the Webinar “Open Opportunities for Waste to Turn into Profit” with STIE Kasih Bangsa.
 12. Followed up on judging activities until Perumda Pembangunan Sarana Jaya wins the TOP BUMD Awards 2023.
 13. Reported Regional Strategic Activities at the 2023 KSD Monev.
 14. Organized Groundbreaking Activities for Nuansa Cilangkap Tower II - Ayasa Tower.
 15. Facilitated and Hosted the SDG Innovation Acceleration Program Activities for Young Professionals.
 16. Participated in the Jakarta Resilient Exhibition on June 18, 2023.
 17. Inducted and introduced the President Director of Sarana Jaya, Mr. Andira Reoputra.
 18. Launched Jakarta in Action (Moving to Overcome Stunting) in Pulogebang with Rumah Zakat Indonesia Foundation.
 19. Publicized and participated in the Development of the ASEAN Park in Blok M, South Jakarta.
 20. Organized the Corporate Secretary BUMD Gathering 2023 in July 2023 - This is the first Corsec Gathering activity by BUMD DKI Jakarta.
 21. Participated in BUMD Planting Activities around the Jakarta International Stadium location.
 22. Participated in the SDGS Innovation Award for the 2023 Fiscal Year.
 23. Participated in the BUMD Top Digital Awards and received the 2023 TOP Digital Corporate Brand Award.
 24. Assisted and participated in the 2023 BUMD PORSENI. Perumda Pembangunan Sarana Jaya succeeded in winning two categories, i.e., 3rd place in women’s basketball and 3rd place in table tennis.
 25. Reported Company Performance every Quarter.
 26. Participated in the kebaya competition organized by the DKI Jakarta Province Industry and MSMEs Department on October 28, 2023.
 27. Conduct HIV AIDS outreach with the DKI Jakarta Provincial AIDS Commission on December 1, 2023.
 28. Documented and assisted in the Signing of the Public and Social Facilities BAST by the East Jakarta Mayor and Sarana Jaya President Director.
 29. Inaugurated the Waste Bank at the Samawa Nuansa Pondok Kelapa Tower.
 30. Realized the ISO 26000:2010 CSR guidelines.
 31. Issued the Guidelines for Implementing Corporate Social Responsibility (TJSL)/CSR Activities.

SATUAN PENGAWAS INTERN (SPI)

INTERNAL AUDIT UNIT (IAU)

Satuan Pengawas Intern (SPI) merupakan unit kerja yang bertanggung jawab atas pelaksanaan sistem pengendalian internal dan fungsi audit internal di Perusahaan.

Fungsi audit internal memiliki tujuan utama untuk meningkatkan kinerja operasional Perusahaan melalui pendekatan sistematis. Pendekatan ini mencakup evaluasi dan peningkatan efektivitas manajemen risiko, pengendalian internal, dan proses tata kelola perusahaan.

PIAGAM (CHARTER) SPI

Pedoman operasional bagi Satuan Pengawas Intern (SPI) telah ditetapkan oleh Perusahaan dalam bentuk Piagam Pengesahan. Piagam ini secara rinci merinci visi, misi, dan tujuan perusahaan, struktur organisasi SPI, kedudukan, tugas dan tanggung jawab, peran, wewenang, kode etik, independensi, dan pertanggungjawaban. Selain itu, Piagam ini juga mengatur hubungan kerja antara SPI dengan Manajemen.

TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB SPI

SPI mengemban tugas dan tanggung jawab sebagai berikut:

1. Membantu Direktur Utama melaksanakan pengawasan operasional dan keuangan Perusahaan, menilai pengendalian, pengelolaan dan pelaksanaannya serta memberikan saran perbaikan;
2. Mengembangkan dan melaksanakan Program Kerja Pemeriksaan Tahunan (PKPT) Perusahaan;
3. Meninjau, mengevaluasi dan melaporkan pelaksanaan PKPT, sistem manajemen risiko dan Tata Kelola Perusahaan sesuai dengan kebijakan Perusahaan;
4. Melakukan audit dan penilaian atas efisiensi dan efektivitas di bidang keuangan, akuntansi, operasional, manajemen risiko, sumber daya manusia, pemasaran, teknologi informasi dan komunikasi, serta semua fungsi di Perusahaan;
5. Melaporkan hasil kegiatan audit dan menyampaikan laporan kepada Direktur Utama dan Dewan Pengawas; dan
6. Memonitor, menganalisis, dan melaporkan tindak lanjut rekomendasi audit.

The Internal Audit Unit (IAU) is a work unit responsible for implementing the internal control system and internal audit function in the Company.

The main objective of the internal audit function is to improve the Company's operational performance through a systematic approach. The approach includes evaluating and improving the effectiveness of risk management, internal control, and corporate governance processes.

IAU CHARTER

The Company has established operational guidelines for the Internal Audit Unit (IAU) through a Ratification Charter. The charter details the corporate vision, mission, objectives, SPI's organizational structure, position, duties and responsibilities, roles, authority, code of conduct, independence, and accountability. This Charter also regulates the working relationship between SPI and Management.

IAU DUTIES AND RESPONSIBILITIES

IAU has the following duties and responsibilities:

1. Assist the President Director in carrying out operational and financial supervision of the Company, assess control, management, and implementation, and provide suggestions for improvement;
2. Develop and implement the Company's Annual Audit Work Program (PKPT);
3. Review, evaluate, and report on the PKPT implementation, risk management systems, and Corporate governance according to company policies;
4. Conduct audits and assessments of efficiency and effectiveness in finance, accounting, operations, risk management, human resources, marketing, information and communication technology, as well as all functions in the Company;
5. Report the audit results to the President Director and the Supervisory Board; and
6. Monitor, analyze, and report follow-ups on audit recommendations.



KEDUDUKAN SPI

Satuan Pengawas Intern dipimpin oleh Kepala Satuan Pengawas Intern yang dalam pelaksanaan tugasnya didukung oleh Pengawas Umum dan Keuangan, serta Pengawas Pengembangan Usaha. Di dalam struktur organisasi Perusahaan, SPI terletak di bawah Direktur Utama.

Kepala SPI diangkat dan diberhentikan oleh Direktur Utama setelah mendapat pertimbangan dari Dewan Pengawas. Kepala SPI bertanggung jawab langsung kepada Direktur Utama. Dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya SPI juga berkoordinasi dengan Komite Audit.

IAU POSITION

The Internal Audit Unit is led by the Head of the Internal Audit Unit, supported by the General and Financial Supervisor and the Business Development Supervisor in carrying out their duties. In the Company's organizational structure, IAU is under the President Director.

The Head of IAU is appointed and dismissed by the President Director after being considered by the Supervisory Board. The Head of IAU is directly responsible to the President Director. In carrying out its duties and responsibilities, IAU also coordinates with the Audit Committee.

► **Profil Kepala SPI**
Head of SPI Profile



Bayu Romas

Kepala Satuan Pengawas Intern | Head of Internal Audit Unit

Warga Negara Indonesia, berusia 48 tahun, berdomisili di Jawa Barat
Indonesian citizen, 48 years old, domiciled in West Jakarta

Dasar Pengangkatan

Keputusan Direksi Perusahaan Umum Daerah Pembangunan Sarana Jaya Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta No. 17 Tahun 2023

Masa Jabatan

Maret 2023 – sekarang

Riwayat Pendidikan

- Magister Ilmu Lingkungan dari Universitas Indonesia (2011)
- Sarjana Teknik Sipil dari Universitas Pancasila (1999)

Rangkap Jabatan

Di Sarana Jaya:

Tidak ada

Di Perusahaan/Institusi Lain:

Tidak ada

Riwayat Karier

- Kepala Satuan Pengawas Intern Perumda Pembangunan Sarana Jaya (2023 - sekarang)
- Manajer Unit Manajemen Risiko dan Hukum Perusahaan Perumda Pembangunan Sarana Jaya (2021)
- Senior Manajer Divisi Pertanahan dan Hukum Perumda Pembangunan Sarana Jaya (2021)
- Staf Legal Direktorat Jenderal Mineral dan Batubara Kementerian ESDM (2009-2015)
- Management Trainee PT Anugerah Pharmindo Lestari (2009)
- Apprentice Bisnis Sistem Indonesia (2007-2008)

Appointment Basis

Decree of the Board of Directors of Perusahaan Umum Daerah Pembangunan Sarana Jaya No. 17 of 2023

Term of Serving

March 2023 – Present

Educational Background

- Master of Environmental Science from the University of Indonesia (2011)
- Bachelor of Civil Engineering from Pancasila University (1999)

Concurrent Positions

In Sarana Jaya:

None

In Other Company/Institution:

None

Career History

- Head of Internal Audit Unit at Perumda Pembangunan Sarana Jaya (2023 - present)
- Risk Management and Legal Unit Manager at Perusahaan Perumda Pembangunan Sarana Jaya (2021)
- Senior Land and Legal Division Manager (2021)
- Legal Staff at the Minerals and Coal Resources Directorate General at the Energy and Mineral Resources Ministry (2009-2015)
- Management Trainee at PT Anugerah Pharmindo Lestari (2009)
- Apprentice at Bisnis Sistem Indonesia (2007-2008)



Ratu Ekky Zakiyyah

Kepala Satuan Pengawas Intern | Head of Internal Audit Unit

Warga Negara Indonesia, berusia 48 tahun, berdomisili di Jakarta
Indonesian citizen, 48 years old, domiciled in Jakarta

Dasar Pengangkatan

Keputusan Direksi Perusahaan Umum Daerah Pembangunan Sarana Jaya Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta No. 43 Tahun 2021

Masa Jabatan

1 Januari - Maret 2023

Riwayat Pendidikan

- Magister Ilmu Lingkungan dari Universitas Indonesia (2011)
- Sarjana Teknik Sipil dari Universitas Pancasila (1999)

Penugasan Khusus (Jabatan Lain)

Di Sarana Jaya:
Tidak ada

Di Perusahaan/Institusi Lain:
Tidak ada

Riwayat Karier

- Supervisor Satuan Pengawas Intern Perumda Pembangunan Sarana Jaya (2019 – 2020)
- Asisten Manajer Pengadaan Barang Jasa PD Pembangunan Sarana Jaya (2017 – 2019)
- Supervisor SPTA PD Pembangunan Sarana Jaya (2015 – 2017)
- Asisten Manajer SPTA PD Pembangunan Sarana Jaya (2013 – 2015)
- Kepala Sekretariat SPTA PD Pembangunan Sarana Jaya (2009 – 2013)

Appointment Basis

Decree of the Board of Directors of Perusahaan Umum Daerah Pembangunan Sarana Jaya No. 43 of 2021

Term of Serving

January 1 – March 2023

Educational Background

- Master of Environmental Science from the University of Indonesia (2011)
- Bachelor of Civil Engineering from Pancasila University (1999)

Special Assignment (Other Positions)

In Sarana Jaya:
None

In Other Company/Institution:
None

Career History

- Internal Audit Unit Supervisor at Perumda Pembangunan Sarana Jaya (2019 – 2020)
- Assistant Manager for Procurement of Goods and Services at PD Pembangunan Sarana Jaya (2017 – 2019)
- SPTA Supervisor at PD Pembangunan Sarana Jaya (2015 – 2017)
- SPTA Assistant Manager at PD Pembangunan Sarana Jaya (2013 – 2015)
- Head of SPTA Secretariat at PD Pembangunan Sarana Jaya (2009 – 2013)

SERTIFIKASI PROFESI AUDIT INTERNAL

Auditor Internal yang bertugas dalam Satuan Pengawas Intern di Perusahaan, per Tahun 2023 telah memiliki sertifikasi profesi sebagaimana diuraikan pada tabel berikut:

No.	Nama Auditor Auditor Name	Sertifikasi Profesi Professional Certification
1.	Bayu Romas	Qualified Internal Audit (QIA) Lanjutan Advanced Qualified Internal Audit (QIA)
2.	Yulia Afifah Noerjanah	Qualified Internal Audit (QIA) Lanjutan Advanced Qualified Internal Audit (QIA)
3.	Ratu Ekky Zakiyah	Qualified Internal Audit (QIA) Lanjutan Advanced Qualified Internal Audit (QIA)
4.	Nuryadi	Qualified Internal Audit (QIA) Qualified Internal Audit (QIA)
5.	Ichsanudin	Qualified Internal Audit (QIA) Qualified Internal Audit (QIA)
6.	Hary Kresna	Qualified Internal Audit (QIA) Qualified Internal Audit (QIA)

INTERNAL AUDIT PROFESSIONAL CERTIFICATION

Internal Auditors who serve in the Company's Internal Audit Unit have professional certification in 2023 as described in the following table:

PROGRAM PELATIHAN DAN PENGEMBANGAN SPI

Pada tahun 2023, Satuan Pengawas Intern telah mengikuti beberapa program pelatihan dan pengembangan kompetensi sebagaimana diuraikan pada tabel berikut:

IAU TRAINING AND DEVELOPMENT PROGRAM

In 2023, the Internal Audit Unit has participated in several training and competency development programs as described in the following table:

Nama Name	Tanggal Date	Subjek Subject	Penyelenggara Organizer
Qualified Internal Audit (QIA) Lanjutan Advanced Qualified Internal Audit (QIA)	21 Agustus 2023 August 21, 2023	Bayu Romas	Yayasan Pendidikan Internal Audit (YPIA)
Qualified Internal Audit (QIA) Lanjutan Advanced Qualified Internal Audit (QIA)	31 Juli 2023 July 31, 2023	Yulia Afifah Noerjanah	Yayasan Pendidikan Internal Audit (YPIA)
Qualified Internal Audit (QIA) Lanjutan Advanced Qualified Internal Audit (QIA)	13 Desember 2022 December 13, 2022	Ratu Ekky Zakiyah	Yayasan Pendidikan Internal Audit (YPIA)
Qualified Internal Audit (QIA) Qualified Internal Audit (QIA)	4 Agustus 2022 August 4, 2022	Nuryadi	Yayasan Pendidikan Internal Audit (YPIA)
Qualified Internal Audit (QIA) Qualified Internal Audit (QIA)	17 September 2022 September 17, 2022	Ichsanudin	Yayasan Pendidikan Internal Audit (YPIA)
Qualified Internal Audit (QIA) Qualified Internal Audit (QIA)	26 November 2022 November 26, 2022	Hary Kresna	Yayasan Pendidikan Internal Audit (YPIA)



No.	Tema Pelatihan Training Theme	Tanggal Pelaksanaan Implementation Date	Penyelenggara Organizer
1.	Dialog Sinergi BUMD DKI Jakarta: Efektivitas Pengurusan HPL dalam Meningkatkan Produktivitas Aset BUMD DKI Jakarta BUMD Synergy Dialogue: HPL Management Effectiveness in Increasing BUMD Asset Productivity	27 Januari 2023 January 27, 2023	-
2.	Sertifikasi Qualified Internal Audit (QIA) Tingkat Dasar Qualified Internal Audit (QIA) Basic Level Certification	8 Mei 2023 - 22 Mei 2023 May 8, 2023 – May 22, 2023	Yayasan Pendidikan Internal Audit (YPIA)
3.	Workshop dan Pelatihan ISO 26000 CSR ISO 26000 CSR Workshop and Training	28 Juli 2023 July 28, 2023	PT Filantra Keabakan Indonesia
4.	Sertifikasi Qualified Internal Audit (QIA) Tingkat Lanjutan Advanced Qualified Internal Audit (QIA) Certification	7 Agustus 2023 - 21 Agustus 2023 August 7, 2023 – August 21, 2023	Yayasan Pendidikan Internal Audit (YPIA)
5.	Pelatihan Manajemen Risiko (dengan Komite Pemantau Risiko) Risk Management Training (with Risk Monitoring Committee)	12 Oktober 2023 October 12, 2023	Komite Pemantau Risiko Perumda Pembangunan Sarana Jaya Perumda Pembangunan Sarana Jaya Risk Monitoring Committee
6.	Sharing Session – Good Corporate Governance Sharing Session – Good Corporate Governance	23 November 2023 November 23, 2023	Komite Remunerasi Perumda Pembangunan Sarana Jaya Perumda Pembangunan Sarana Jaya Remuneration Committee

PELAKSANAAN KEGIATAN SPI 2023

Kegiatan Pengawasan yang dilaksanakan oleh SPI antara lain mencakup kegiatan audit, *review*, dan *monitoring*.

Pada tahun 2023, hasil dari pelaksanaan tugas pengawasan SPI adalah sebagai berikut:

- Melakukan penerbitan Peraturan Direksi Nomor 15 Tahun 2023 tentang Organisasi dan Tata Kerja di Bawah Satuan Pengawas Intern, Divisi, dan Unit Usaha di Lingkungan Kerja Perumda Pembangunan Sarana Jaya
- Melakukan pengawasan dan *monitoring* terhadap Divisi/Unit serta hal-hal seperti: KPI, Laporan Hasil Pemeriksaan (BPK RI, TL APIP, *Audit Compliance*)
- Melakukan *assessment* GCG dan pemutakhiran Pedoman GCG
- Melakukan pemutakhiran SOP Satuan Pengawas Intern
- Telah dilaksanakannya Asesmen GCG Perumda Pembangunan Sarana Jaya yang dilakukan oleh BPKP dengan skor 78,05 dan jumlah 49 AOI

IAU ACTIVITY IMPLEMENTATION IN 2023

Supervision activities carried out by IAU include audit, review, and monitoring activities.

In 2023, the results of implementing IAU's supervisory duties were as follows:

- Issued Board of Directors Regulation No. 15 of 2023 on the Organization and Work Procedures Under Internal Supervisory Units, Divisions, and Business Units in the Work Environment of Perumda Pembangunan Sarana Jaya
- Supervised and monitored Divisions/Units as well as matters such as KPI and Audit Result Reports (BPK RI, TL APIP, *Audit Compliance*)
- Carried out GCG assessments and updated GCG Guidelines
- Updated the Internal Supervisory Unit SOP
- The GCG Assessment of Perumda Pembangunan Sarana Jaya by BPKP with a score of 78.05 and a total of 49 AOI

- | | |
|--|--|
| <ol style="list-style-type: none"> 6. Adanya penambahan laporan hasil penemuan BPK-Ri sebanyak 47 Rekomendasi 7. Melakukan pengelolaan risiko pada Divisi/Unit di Sarana Jaya 8. Melakukan penyelenggaraan SMAP di lingkungan perusahaan, seperti Sosialisasi SMAP, Internal Audit SMAP, Pengelolaan <i>Whistleblowing System</i>, <i>Due diligence</i>, koordinasi dengan Tim Fungsi Kepatuhan Anti Penyuapan (FKAP), dan lainnya 9. Telah dilaksanakannya <i>Audit Internal Surveillance</i> ISO 9001:2015 pada tanggal 4 September 2023 s.d 12 September 2023 dengan adanya 14 temuan dengan rincian 2 temuan minor dan 12 AOI 10. Melakukan sosialisasi dengan mengirimkan kuis Manajemen Risiko kepada seluruh pegawai Sarana Jaya pada tanggal 25 September 2023 11. Melakukan <i>review</i> laporan keuangan semester I tahun 2023 pada tanggal 20 September 2023 sampai dengan 15 November 2023 yang dilaporkan kepada Direksi Sarana Jaya 12. Meningkatkan kapabilitas SDM di Satuan Pengawas Intern | <ol style="list-style-type: none"> 6. Additional 47 recommendations from the BPK-Ri findings report 7. Carried out risk management in Divisions/Units in Sarana Jaya 8. Carried out ABMS in the Company, such as SMAP Dissemination, SMAP Internal Audit, Whistleblowing System Management, Due Diligence, coordination with the Anti-Bribery Compliance Function Team (FKAP), etc 9. Carried out the ISO 9001:2015 Internal Surveillance Audit from September 4, 2023, to September 12, with 14 findings, consisting of two minor findings and 12 AOI 10. Disseminated a Risk Management quiz to all Sarana Jaya employees on September 25, 2023 11. Review the financial statements for the first semester of 2023 from September 20, 2023, to November 15, 2023, which was reported to Sarana Jaya Board of Directors 12. Increased the capabilities in the Internal Supervisory Unit HR |
|--|--|

SISTEM PENGENDALIAN INTERNAL

INTERNAL CONTROL SYSTEM

Dalam rangka memastikan kepatuhan terhadap regulasi dan kebijakan internal, Perusahaan telah mengimplementasikan Sistem Pengendalian Internal. Implementasi ini bertujuan utama memberikan keyakinan (*assurance*) kepada manajemen bahwa seluruh sistem, prosedur, kaidah, dan norma yang berlaku di Perusahaan telah sesuai dengan standar yang telah ditetapkan

Sistem Pengendalian Internal Perusahaan tersebut merujuk pada kerangka kerja COSO 2013 (*Internal Control – Integrated Framework COSO 2013*), yang terdiri dari 5 (lima) komponen pengendalian, yaitu: 1) lingkungan pengendalian, 2) penilaian risiko, 3) aktivitas pengendalian, 4) komunikasi dan informasi, serta 5) pemantauan aktivitas.

PENGENDALIAN KEUANGAN DAN OPERASIONAL

Sistem pengendalian keuangan dan operasional di Perusahaan merupakan suatu kerangka kerja yang dirancang untuk mengelola dan mengawasi dua aspek penting, yaitu aspek keuangan dan aspek operasional. Fokusnya melibatkan pemantauan dan pengelolaan keuangan, proses operasional, serta pengendalian risiko-risiko yang dihadapi oleh Perusahaan. Melalui implementasi Pengendalian Keuangan dan Operasional yang efektif, Perusahaan dapat menjaga keseimbangan keuangan, meningkatkan efisiensi operasional, dan secara proaktif mengidentifikasi serta mengurangi risiko potensial yang dapat memengaruhi kinerja perusahaan. Langkah ini juga dianggap sebagai strategi kunci untuk mencapai tujuan perusahaan sekaligus memastikan ketaatan terhadap regulasi dan standar yang berlaku.

Dalam aspek keuangan, sistem pengendalian diarahkan untuk mencegah potensi penyimpangan internal dalam pengelolaan keuangan perusahaan dengan menyediakan kebijakan, prosedur, dan petunjuk teknis yang jelas. Hal ini bertujuan untuk memberikan keyakinan terhadap kebenaran informasi keuangan, sekaligus meningkatkan efektivitas dan efisiensi dalam proses pengelolaan Perusahaan.

To ensure compliance with regulations and internal policies, the Company has implemented an Internal Control System. The main aim of the implementation is to assure management that all systems, procedures, rules, and norms in the Company follow established standards.

The Company's Internal Control System refers to the COSO 2013 framework (*Internal Control – Integrated Framework COSO 2013*), which consists of five control components: 1) control environment, 2) risk assessment, 3) control activities, 4) communication and information, as well as 5) activity monitoring.

FINANCIAL AND OPERATIONAL CONTROL

The Company's financial and operational control system is a framework designed to manage and supervise two essential aspects, i.e., financial and operational. The focus involves monitoring and managing finances and operational processes, as well as controlling the risks faced by the Company. By implementing effective Financial and Operational Controls, the Company can maintain financial balance, increase operational efficiency, and proactively identify and reduce potential risks that can affect company performance. This step is also considered an essential strategy for achieving company goals while ensuring compliance with applicable regulations and standards.

In the financial aspect, the control system prevents potential internal irregularities in the Company's financial management by providing clear policies, procedures, and technical instructions. It aims to provide confidence in the accuracy of financial information while increasing effectiveness and efficiency in the Company's management process.

Sementara di sisi operasional, sistem pengendalian bertujuan untuk memastikan bahwa setiap aktivitas bisnis dilaksanakan sesuai dengan kebijakan internal dan perundang-undangan yang berlaku. Upaya ini melibatkan pemeliharaan struktur organisasi yang memadai dengan adanya organ utama dan pendukung, serta pengawasan aktif oleh Dewan Pengawas dan Direksi. Keseluruhan langkah ini diarahkan untuk memastikan kelangsungan operasional yang sesuai dengan standar kepatuhan yang telah ditetapkan, dan dapat dipertanggungjawabkan secara transparan.

KEPATUHAN TERHADAP PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

Dalam manajemen operasional Perusahaan, kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan dianggap sebagai fondasi untuk menjaga integritas, legalitas, dan etika bisnis Perusahaan. Perusahaan menegaskan kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan sebagai salah satu aspek yang sangat relevan dalam implementasi Sistem Pengendalian Internal (SPI). Langkah-langkah konkret terkait hal ini mencakup pemantauan perubahan peraturan, pelaksanaan kebijakan yang sesuai, dan penerapan praktik bisnis yang sejalan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Oleh karena itu, Perusahaan berkomitmen untuk memastikan bahwa setiap aspek operasionalnya sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku, menjunjung tinggi prinsip-prinsip integritas Perusahaan secara menyeluruh.

TINJAUAN ATAS EFEKTIVITAS SISTEM PENGENDALIAN INTERNAL

Melakukan tinjauan terhadap Efektivitas Sistem Pengendalian Internal (SPI) di Perusahaan merupakan langkah penting dalam mengevaluasi efektivitas kinerja sistem tersebut. Dalam proses tinjauan, Perusahaan fokus pada proses perencanaan, implementasi, dan efektivitas SPI. Tinjauan mencakup evaluasi atas kepatuhan terhadap peraturan, keandalan pelaporan keuangan, efisiensi operasional, dan kemampuan dalam mengidentifikasi serta mengelola risiko. Melalui tinjauan ini, Perusahaan dapat mendapatkan gambaran menyeluruh tentang bagaimana SPI telah diintegrasikan ke dalam berbagai aspek operasionalnya. Tinjauan tersebut memungkinkan perusahaan untuk menilai sejauh mana SPI mendukung kelancaran operasional serta mencapai tujuan perusahaan dengan optimal.

On the other hand, on the operational side, the control system aims to ensure that every business activity is carried out per internal policies and applicable laws. The effort involves maintaining an adequate organizational structure with main and supporting organs, as well as active supervision by the Supervisory Board and Board of Directors. These steps ensure operational continuity per the established compliance standards and can be accounted for transparently.

COMPLIANCE WITH LAWS AND REGULATIONS

In the Company's operational management, compliance with laws and regulations is considered the foundation for maintaining the integrity, legality, and ethics of the Company's business. The Company emphasizes compliance with statutory regulations as a highly relevant aspect of implementing the Internal Control System. Concrete steps include monitoring regulatory changes, implementing appropriate policies, and implementing business practices that align with applicable laws and regulations. Therefore, the Company is committed to ensuring that every aspect of its operations complies with applicable legal provisions, upholding the Company's principles of integrity as a whole.

REVIEW OF THE INTERNAL CONTROL SYSTEM'S EFFECTIVENESS

Conducting a review of the effectiveness of the Internal Control System in the Company is an important step in evaluating the effectiveness of the system's performance. In the review process, the Company focuses on the internal control system's planning process, implementation, and effectiveness. The review includes an evaluation of regulatory compliance, reliability of financial reporting, operational efficiency, as well as the ability to identify and manage risks. Through this review, the Company can get a comprehensive picture of how the Internal Control System has been integrated into various aspects of its operations. This review allows companies to assess the extent to which the system supports smooth operations and optimally achieves company goals.



PERNYATAAN DEWAN PENGAWAS DAN DIREKSI ATAS KECUKUPAN PENGENDALIAN INTERNAL TAHUN 2023

Pada tahun 2023, Dewan Pengawas dan Direksi Perusahaan dengan tegas menyatakan keyakinan terhadap kecukupan Pengendalian Internal yang telah diterapkan. Pernyataan ini mencerminkan hasil tinjauan menyeluruh terhadap pelaksanaan Sistem Pengendalian Internal (SPI) sebagai landasan untuk menjaga integritas operasional Perusahaan. Dewan Pengawas dan Direksi menyatakan keyakinan dalam kemampuan SPI untuk memberikan perlindungan yang memadai terhadap aset Perusahaan, menjaga keandalan pelaporan keuangan, serta memastikan kepatuhan terhadap berbagai regulasi yang berlaku.

Pernyataan tersebut menegaskan komitmen Dewan Pengawas dan Direksi untuk terus memprioritaskan dan memperkuat SPI sebagai bagian integral dari tata kelola Perusahaan. Dalam hal ini, perlu adanya upaya yang konsisten dan berkelanjutan dalam meningkatkan dan menyempurnakan SPI agar senantiasa selaras dengan perubahan lingkungan bisnis dan dinamika industri.

SUPERVISORY BOARD AND BOARD OF DIRECTORS STATEMENT ON INTERNAL CONTROL SYSTEM'S ADEQUACY IN 2023

In 2023, the Company's Supervisory Board and Board of Directors firmly expressed confidence in the adequacy of the Internal Control that has been implemented. The statement reflects the results of a comprehensive review of the implementation of the Internal Control System as a basis for maintaining the Company's operational integrity. The Supervisory Board and Board of Directors express confidence in the system's ability to provide adequate protection for the Company's assets, maintain the reliability of financial reporting, and ensure compliance with various applicable regulations.

The statement confirms the commitment of the Supervisory Board and Board of Directors to continue to prioritize and strengthen the Internal Control System as an integral part of corporate governance. In this case, there needs to be consistent and continuous efforts to improve and perfect the system to always align with changes in the business environment and industrial dynamics.

MANAJEMEN RISIKO

RISK MANAGEMENT

GAMBARAN UMUM SISTEM MANAJEMEN RISIKO DI SARANA JAYA

Perusahaan menyadari bahwa risiko telah menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari setiap proses bisnisnya. Risiko-risiko ini melekat pada seluruh aktivitas dan pengambilan keputusan, dengan dampaknya yang signifikan dapat mempengaruhi kestabilan Perusahaan. Seiring dengan perkembangan usahanya, Perusahaan merasa perlu meningkatkan kemampuannya dalam mengelola risiko secara lebih efektif.

Sistem manajemen risiko di Perusahaan telah mengadopsi Standar Nasional Indonesia (SNI) untuk penerapan manajemen risiko, yakni SNI 31000:2018 Manajemen Risiko. Adopsi standar ini menjadi dasar bagi Perusahaan dalam mengidentifikasi, menilai, dan mengelola risiko-risiko yang mungkin timbul. Dengan mengikuti kerangka kerja yang telah ditetapkan oleh standar tersebut, Perusahaan berkomitmen untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas manajemen risiko, menjadikannya bagian integral dari strategi bisnis untuk mencapai tujuan Perusahaan dengan lebih terarah dan aman.

GENERAL OVERVIEW OF SARANA JAYA RISK MANAGEMENT SYSTEM

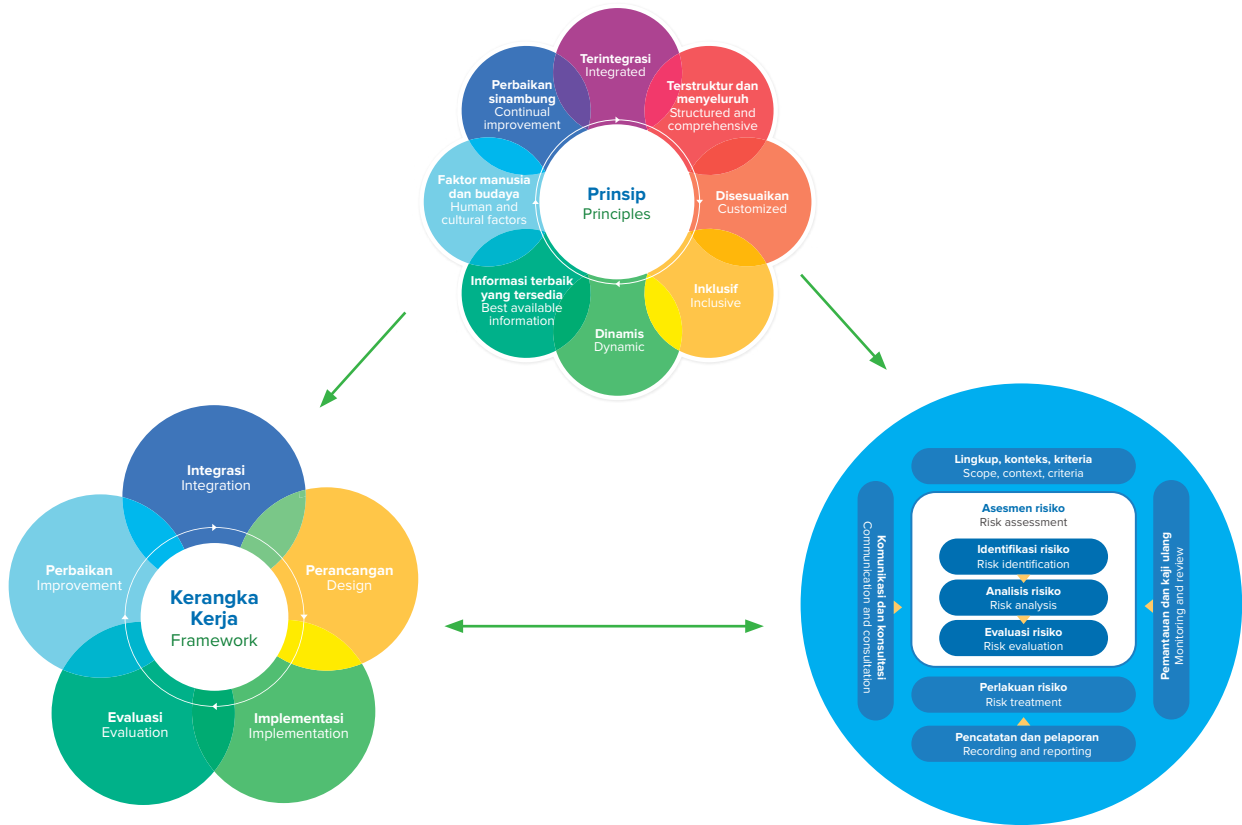
The Company is aware that risks have become integral to every business process. These risks are inherent in all activities and decision-making, and the impacts of these risks can significantly affect the stability of the Company. Along with its business development, the Company feels the need to improve its ability to manage risk more effectively.

The Company's risk management system has adopted the Indonesian National Standards (SNI) for implementing risk management, i.e., SNI 31000:2018 Risk Management. Adopting this standard is the basis for the Company in identifying, assessing, and managing potential risks. By following the framework established by these standards, the Company is committed to improving the efficiency and effectiveness of risk management, making it an integral part of the business strategy to achieve the Company's goals in a more focused and safe manner.



Bagan berikut ini memberikan gambaran tentang pedoman penerapan Sistem Manajemen Risiko di Perusahaan:

The following chart provides an overview of the guidelines for implementing the Risk Management System in the Company:



Profil Risiko dan Upaya Mitigasi tahun 2023
Risk Profile and Mitigation Efforts in 2023

No.	Risiko Risk	Kategori Category	Mitigasi Mitigation
Sekretaris Perusahaan (Sekper) Corporate Secretary (Corsec)			
1.	Notulen Rapat Direksi tidak tepat waktu dan tidak tersusun dengan baik. The minutes of the Board of Directors meetings are not on time and are not well organized.	Risiko Strategis Strategic Risk	Dapat membuat Pedoman Rapat Internal dan melakukan sosialisasi terkait pedoman tersebut. Can create Internal Meeting Guidelines and disseminate them.
2.	Materi Rapat tidak tersusun dengan baik sesuai dengan standar yang diberikan. Meeting materials are not well organized per the provided standards.	Risiko Strategis Strategic Risk	Membuat Pedoman Rapat dengan <i>Stakeholder</i> dan melakukan sosialisasi terkait pedoman tersebut. Create meeting guidelines with stakeholders and disseminate the guidelines.
Unit Manajemen Risiko dan Hukum Perusahaan (UMRHP) Company Risk Management and Legal Unit (UMRHP)			
3.	Pedoman dan peraturan Perusahaan yang ada belum cukup untuk mencegah gratifikasi dan korupsi di lingkungan PSJ. Existing company guidelines and regulations are insufficient to prevent gratuity and corruption within the PSJ environment.	Risiko Strategis Strategic Risk	Menyempurnakan pedoman dan peraturan mengenai SMAP dan mengadakan FGD terkait akar permasalahan SMAP. Refine guidelines and regulations regarding SMAP and hold FGDs related to its root causes.

No.	Risiko Risk	Kategori Category	Mitigasi Mitigation
4.	Laporan audit internal SMAP tidak valid dan tidak dapat dipercaya. SMAP's internal audit report is invalid and cannot be trusted.	Risiko Strategis Strategic Risk	Membuat standar audit internal SMAP, melakukan peningkatan kompetensi auditor melalui program latihan, dan memberikan auditor insentif. Create SMAP internal audit standards, increase auditor competency through training programs, and provide incentives for auditors.
Divisi Umum dan SDM General Affairs and HR Division			
5.	Seleksi calon pegawai tidak sesuai dengan ketentuan. The selection of prospective employees does not follow the provisions.	Risiko Strategis Strategic Risk	Upaya Mitigasi masih dalam proses perumusan. Mitigation efforts are still in the formulation process.
SBU Kawasan Regional SBU			
6.	Profil Calon Mitra Kerja Sama tidak sesuai dengan persyaratan yang diminta SJ. The Prospective Collaboration Partner's profile does not match the requirements requested by SJ.	Risiko Proyek Project Risk	Upaya Mitigasi masih dalam proses perumusan. Mitigation efforts are still in the formulation process.
Sarana Jaringan Utilitas Terpadu (SJUT) Integrated Utility Network Facility (SJUT)			
7.	Pembangunan SJUT tidak tepat waktu, dan tidak sesuai dengan standar teknis. The SJUT construction is not on time and does not comply with technical standards.	Risiko Proyek Project Risk	Upaya Mitigasi masih dalam proses perumusan. Mitigation efforts are still in the formulation process.
8.	Mitra kerja sama terpilih tidak sesuai dengan yang diharapkan dan dibutuhkan. The selected cooperation partners do not match what is expected and needed.	Risiko Proyek Project Risk	Upaya Mitigasi masih dalam proses perumusan. Mitigation efforts are still in the formulation process.
KSO Lebak Bulus Lebak Bulus KSO			
9.	Luas lahan yang diserahkan tidak sesuai dengan Perjanjian Kerja Sama (PKS). The handed-over land area does not comply with the Cooperation Agreement (PKS).	Risiko Proyek Project Risk	Upaya Mitigasi masih dalam proses perumusan. Mitigation efforts are still in the formulation process.
10.	Tidak terlaksananya pembangunan apartemen dan fasilitas penunjangnya sampai dengan selesai. The construction of apartments and supporting facilities was not carried out until completion.	Risiko Proyek Project Risk	Upaya Mitigasi masih dalam proses perumusan. Mitigation efforts are still in the formulation process.
KSO Nuansa Cilangkap Nuansa Cilangkap KSO			
11.	Hasil analisa kuesioner tidak memenuhi persyaratan. The results of the questionnaire analysis do not meet the requirements.	Risiko Operasional Operational Risk	Upaya Mitigasi masih dalam proses perumusan. Mitigation efforts are still in the formulation process.
12.	Tidak sesuai calon mitra dengan kriteria yang ada. The potential partner does not match the existing criteria.	Risiko Operasional Operational Risk	Upaya Mitigasi masih dalam proses perumusan. Mitigation efforts are still in the formulation process.
Unit Pemasaran dan Pengelolaan Aset (UPPA) Marketing and Asset Management Unit			
13.	Hasil analisa kuesioner tidak memenuhi persyaratan. The results of the questionnaire analysis do not meet the requirements.	Risiko Operasional Operational Risk	Upaya Mitigasi masih dalam proses perumusan. Mitigation efforts are still in the formulation process.
14.	Tidak sesuai calon mitra dengan kriteria yang ada. The potential partner does not match the existing criteria.	Risiko Operasional Operational Risk	Upaya Mitigasi masih dalam proses perumusan. Mitigation efforts are still in the formulation process.

TINJAUAN ATAS EFEKTIVITAS SISTEM MANAJEMEN RISIKO

Pada tahun 2023, Perusahaan melakukan Tinjauan Atas Efektivitas Sistem Manajemen Risiko, sebuah analisis mendalam terhadap implementasi sistem manajemen risiko. Tinjauan ini memungkinkan Perusahaan untuk mengetahui apakah sistem manajemen risiko dapat mengidentifikasi, menilai, dan mengelola risiko secara efektif. Proses evaluasi juga mencakup analisis kesesuaian sistem dengan peraturan dan pedoman yang berlaku, serta penilaian efisiensi dan efektivitas metode identifikasi risiko, evaluasi risiko, dan langkah-langkah mitigasi yang diambil.

Melalui tinjauan atas efektivitas Sistem Manajemen Risiko, Perusahaan dapat memastikan bahwa Sistem Manajemen Risiko berjalan dengan baik di tahun 2023. Tinjauan ini menjadi langkah penting dalam memastikan bahwa Perusahaan dapat merespons dan mengelola risiko dengan optimal, membawa dampak positif dalam mencapai keberhasilan jangka panjang.

PERNYATAAN DEWAN PENGAWAS DAN DIREKSI ATAS KECUKUPAN SISTEM MANAJEMEN RISIKO TAHUN 2023

Dewan Pengawas dan Direksi dengan yakin menyatakan bahwa implementasi Sistem Manajemen Risiko di Perusahaan selama tahun 2023 telah berjalan dengan baik dan memenuhi standar kecukupan yang telah ditetapkan. Keberhasilan ini tercermin dari kemampuan Perusahaan dalam mengidentifikasi, menilai, dan mengelola risiko dengan tepat dan efektif.

Implementasi Sistem Manajemen Risiko dinilai berhasil menjaga stabilitas operasional dan mampu mengantisipasi berbagai risiko serta tantangan di lingkungan bisnis. Dalam konteks ini, Sistem Manajemen Risiko terbukti menjadi alat yang efisien dalam menjaga keberlangsungan operasional dan mencapai tujuan jangka panjang Perusahaan.

Dewan Pengawas dan Direksi percaya bahwa implementasi Sistem Manajemen Risiko yang memadai akan terus mendukung pertumbuhan berkelanjutan Perusahaan dan memberikan kepercayaan kepada seluruh pemangku kepentingan.

REVIEW OF RISK MANAGEMENT SYSTEM EFFECTIVENESS

In 2023, the Company conducted a Review of the Risk Management System Effectiveness, an in-depth analysis of the implementation of the risk management system. The review allows the Company to determine whether the risk management system can identify, assess, and manage risks effectively. The evaluation process also includes an analysis of the system's conformity with applicable regulations and guidelines, as well as an assessment of the efficiency and effectiveness of risk identification methods, risk evaluation, and mitigation steps taken.

Through a review of the Risk Management System's effectiveness, the Company can ensure that the Risk Management System is running well in 2023. The review is an important step in ensuring that the Company can respond and manage risks optimally, bringing a positive impact and achieving long-term success.

SUPERVISORY BOARD AND BOARD OF DIRECTORS STATEMENT ON RISK MANAGEMENT SYSTEM'S ADEQUACY IN 2023

The Supervisory Board and Board of Directors confidently state that the implementation of the Risk Management System in the Company throughout 2023 has gone well and meets the adequacy standards that have been set. The success is reflected in the Company's ability to identify, assess, and manage risks appropriately and effectively.

The implementation of the Risk Management System is considered successful in maintaining operational stability and can anticipate various risks and challenges in the business environment. In this context, the Risk Management System has proven to be an efficient tool for maintaining operational continuity and achieving the Company's long-term goals.

The Supervisory Board and Board of Directors believe that implementing an adequate Risk Management System will continue to support the Company's sustainable growth and provide confidence to all stakeholders.

PERKARA HUKUM

LEGAL CASES

Pada tahun 2023, Perusahaan tengah menghadapi beberapa perkara hukum perdata dan pidana yang saat ini masih dalam proses pengadilan. Informasi lebih rinci terkait hal ini diuraikan pada tabel berikut:

In 2023, the Company faced several civil and criminal legal cases which are currently still in court. More detailed information regarding these cases are described in the following table:

No	Nomor Perkara Case Number	Perihal Subject	Penggugat Plaintiff	Tergugat Defendant	Turut Tergugat Co-Defendant
1	No.71/ Pdt.G/2023/ PN.Jkt.Tim	Gugatan Perbuatan Melawan Hukum di mana Penggugat mengklaim sebagai pemilik sah atas tanah yang terletak di Jl. H. Naman RT.002 RW. 002 Kel. Pondok Kelapa, Kec. Duren Sawit, Jakarta Timur, Seluas 13.195 m ² berdasarkan Girik A tort claim in which the Plaintiff claims to be the legal land owner located on Jl. H. Naman RT.002 RW. 002 Kel. Pondok Kelapa, Kec. Duren Sawit, East Jakarta, with an area of 13,195 m ² based on land ownership deed	PT Adonara Propertindo	1. H. Marjan H. Marjan 2. PT Asmawi Agung Corporation, Kurator H. Hendra Roza Putra PT Asmawi Agung Corporation, Kurator H. Hendra Roza Putra 3. Perumda Sarana Jaya Perumda Sarana Jaya 4. Notaris Zaenal Almanar Notary Zaenal Almanar 5. Perumda Sarana Jaya Perumda Sarana Jaya 6. Notaris Zaenal Almanar Notary Zaenal Almanar 7. Notaris Yurisca Lady Notary Yurisca Lady 8. BPN Jakarta Timur East Jakarta BPN	Lurah Pulo Gebang Pulo Gebang Subdistrict Head
2	No.188/ Pdt.G/2023/ PN.Bks	Gugatan Perbuatan Melawan Hukum di mana pihak Tergugat 1-6 telah melakukan penggelapan dana modal usaha milik Penggugat A Tort Lawsuit which Defendants 1-6 have embezzled the Plaintiff's business capital funds	Ir. H. Novalita Namida H, M.T.	1. Vicky Dachy 2. Yenny Hamidy 3. Dicky Dachy 4. Novian Sihmawati 5. Nita Natalia 6. Melly Natalia Dachy	Perumda Sarana Jaya (Turut Tergugat IV) Perumda Sarana Jaya (Co-Defendant IV)
3	No.390/ Pdt.G/2023/ PN.Jkt.Pst	Gugatan Perbuatan Melawan Hukum di mana Penggugat mengklaim sebagai pemilik sah atas tanah yang terletak di Jl. H. Naman RT.002 RW. 002 Kel. Pondok Kelapa, Kec. Duren Sawit, Jakarta Timur, Seluas 13.195 m ² berdasarkan Girik A Tort Lawsuit in which the Plaintiff claims to be the legal land owner at Jl. H. Naman RT.002 RW. 002 Kel. Pondok Kelapa, Kec. Duren Sawit, East Jakarta, with an area of 13,195 m ² based on land ownership deed	Andar M. Situmorang	Perumda Sarana Jaya	Gubernur DKI Jakarta DKI Jakarta Governor



Wilayah Region	PN	PT	Kasasi	PK	Keterangan Description	Proses Process	Selesai Concluded
	Kpts	Kpts	Kpts	Kpts			
Jakarta Timur East Jakarta	Menang Win	–	–	–	Berdasarkan Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Timur, Gugatan Penggugat tidak dapat diterima, dikarenakan sudah ada Putusan yang <i>Inkracht</i> atas objek, sehingga tidak dapat dilakukan Gugatan kembali terhadap objek yang sama (merujuk Perkara Perdata No.410/Pdt.G/2019/PN.Jkt.Tim) Oleh karena itu Transaksi Jual Beli berdasarkan AJB No.38,39,40,41,42,43 dengan pihak Penggugat pada tanggal 20 Desember 2019 sudah SHGB atas nama Perumda Sarana Jaya dinyatakan tidak sah dan tidak mempunyai kekuatan hukum terhadap SHGB No.04663,04662,04646,06465,04844,04644. Based on the Resolution of the East Jakarta District Court, the Plaintiff's Lawsuit cannot be accepted because there has been an <i>Inkracht</i> Decision on the object, so that it cannot be sued again against the same object (referring to Civil Case No. 410/Pdt.G/2019/PN.Jkt.Tim) Therefore, the Sale and Purchase Transaction based on AJB No. 38,39,40,41,42,43 with the Plaintiff on December 20, 2019, the SHGB on behalf of Perumda Sarana Jaya has been declared invalid and has no legal force against SHGB No. 04663, 04662, 04646, 06465, 04844, 04644.	–	✓
Bekasi	–	–	–	–	Sampai saat ini proses sidang masih terus berlanjut dan perkara ini tidak ada kaitannya/ dampak hukumnya ke Perumda Sarana Jaya. Until now, the trial process still continues and this case has no relation/legal impact to Perumda Sarana Jaya.	–	✓
Jakarta Pusat Central Jakarta	Menang Win	–	–	–		–	✓

No	Nomor Perkara Case Number	Perihal Subject	Penggugat Plaintiff	Tergugat Defendant	Turut Tergugat Co-Defendant
4	No.450/ Pdt.G/2023/ PN.Jkt.Pst	Gugatan Perbuatan Melawan Hukum Penggugat (PT Hidro Energi Persada) mengklaim pihak Sarana Jaya (Tergugat) melakukan pemberhentian secara sepihak kerja sama pekerjaan penyelenggaraan fasilitas pengelolaan sampah antara (FPSA) di dalam kota DKI Jakarta Wilayah Kec. Tebet A Tort Lawsuit where the plaintiff (PT Hidro Energi Persada) claims that Sarana Jaya (Defendant) unilaterally terminated the cooperation agreement for the implementation of an intermediate garbage treatment facility (FPSA) in DKI Jakarta, Tebet Subdistrict area.	PT Hidro Energi Persada	Perumda Sarana Jaya	
5	3039/ PDT.G/2023/ PA.JS	Gugatan Waris atas sebidang tanah seluas 4.086 m ² terletak di Jl. Stadion Lebak Bulus RT 009 RW 007, Lebak Bulus, Jakarta Selatan dan 2.248 m ² terletak di Jl. H. Ilyas RT 009 RW 007, Lebak Bulus, Jakarta Selatan Inheritance Lawsuit on a 4,086 m ² plot of land at Jl. Stadion Lebak Bulus RT 009 RW 007, Lebak Bulus, South Jakarta and a 2,248 m ² land at Jl. H. Ilyas RT 009 RW 007, Lebak Bulus, South Jakarta	Murtini binti H. Mukar, Dkk	Hj. Aswanih binti H. Hasbih Budi Cahya Gunawan binti H. Abdillah	<ol style="list-style-type: none"> 1. Kepala Kelurahan Lebak Bulus Lebak Bulus Subdistrict Head 2. BPN Jakarta Selatan South Jakarta BPN 3. Notaris Aslina Perangin Angin, S.H. Notary Aslina Perangin Angin, S.H. 4. Perumda Sarana Jaya Perumda Sarana Jaya
6	No.945/ PDT/2023/ PT.DKI Jo.No.422/ PDT.G/2017/ PN.Jak.Tim	Gugatan Perbuatan Melawan Hukum atas obyek tanah dengan Girik C.422 Persil 150 Blok S III Luas 1.000 m ² Jl. Naga Raya RT 005 RW 003, Kel. Duren Sawit, Kec. Duren Sawit, Jakarta Timur A Tort Lawsuit for a 1,000 m ² land with land ownership deed C.422 Persil 150 Blok S III at Jl. Naga Raya RT 005 RW 003, Kel. Duren Sawit, Kec. Duren Sawit, East Jakarta	Dra. Lasmian Nainggolan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Perumda Sarana Jaya 2. Para Ahli Waris H. Moh. Rosjid (Alm) (sebagai Tergugat II-IX) 3. Para Ahli Waris Rohaja Pr. Binti H. Umar (sebagai Tergugat X-XXII) 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Kepala Kantor Kecamatan Duren Sawit Kecamatan Duren Sawit Office Chief 2. Kepala Kantor Kelurahan Duren Sawit Kelurahan Duren Sawit Office Chief
7	287/ Pdt.G/2023/ PN.Jkt.Pst	Gugatan Perbuatan Melawan Hukum di mana Penggugat mengklaim sebagai pemilik sah atas tanah yang terletak di Jl. H. Naman RT 002 RW 002 Kel. Pondok Kelapa, Kec. Duren Sawit, Jakarta Timur, Seluas 13.195 m ² berdasarkan Girik A Tort Lawsuit in which the Plaintiff claims to be the legal land owner located at Jl. H. Naman RT 002 RW 002 Kel. Pondok Kelapa, Kec. Duren Sawit, East Jakarta, with an area of 13,195 m ² based on land ownership deed	PT Golden Twins Sotarduga	Perumda Sarana Jaya	

PENGARUH BAGI KONDISI PERUSAHAAN

Perkara hukum yang dihadapi saat ini tidak membawa pengaruh yang signifikan terhadap kondisi Perusahaan.

IMPACT TO THE COMPANY

The current legal cases do not significantly impact the Company's condition.



Wilayah Region	PN	PT	Kasasi	PK	Keterangan Description	Proses Process	Selesai Concluded
	Kpts	Kpts	Kpts	Kpts			
Jakarta Pusat Central Jakarta	Menang Win	–	–	–			✓
Pengadilan Agama Jakarta Selatan South Jakarta Religious Courts	–	–	–	–	Perumda Sarana Jaya Menang di Putusan Sela 9 Januari 2024 Pengadilan Agama Perumda Sarana Jaya won in the Interim Religious Court Resolution of January 9, 2024.		✓
Jakarta Timur East Jakarta	Kalah Lose	Kalah Lose	Proses Process	–	Perumda Sarana Jaya mengajukan Akta Permohonan Kasasi Jumat 1 Desember 2023 dan Penyerahan Memori Kasasi Selasa 5 Desember 2023 Perumda Sarana Jaya filed a Deed of Cassation Application on Friday, December 1, 2023, and Cassation Memorandum Submission on Tuesday, December 5, 2023.	✓	
Jakarta Pusat Central Jakarta	Menang Win	–	–	–			✓

SANKSI ADMINISTRATIF TERHADAP PERUSAHAAN, ANAK PERUSAHAAN, DEWAN PENGAWAS DAN DIREKSI

ADMINISTRATIVE SANCTIONS TO THE COMPANY, SUBSIDIARY, SUPERVISORY BOARD, AND BOARD OF DIRECTORS

Pada tahun 2023, Perusahaan dan anak perusahaan, termasuk Dewan Pengawas dan Direksi tidak menerima sanksi administratif apa pun dari regulator.

In 2023, the Company and its subsidiaries, including the Supervisory Board and Board of Directors, did not receive any administrative sanction from the regulator.

KODE ETIK

CODE OF CONDUCT

Pedoman Etika Perusahaan (*Code of Conduct* atau “CoC”) ini merupakan kumpulan komitmen yang mencakup etika bisnis Perusahaan dan etika kerja Dewan serta Pegawai Perusahaan. Tujuannya adalah membentuk, mengatur, dan memastikan kesesuaian tingkah laku, sehingga dapat mencapai keluaran yang konsisten dengan budaya Perusahaan dalam mencapai visi dan misinya. Pedoman ini menjadi landasan untuk menciptakan lingkungan kerja yang etis dan sesuai dengan nilai-nilai yang dianut oleh Perusahaan. Dewan Pengawas dan Direksi Sarana Jaya telah menetapkan Pedoman Etika Perusahaan sejak 29 Desember 2020.

The Code of Conduct (CoC) is a collection of commitments that cover the Company’s business ethics and the work ethics of the Company’s Board and Employees. The aim is to shape, regulate, and ensure conformity of behavior so that it can achieve output consistent with the Company’s culture in achieving its vision and mission. The guideline is the basis for creating an ethical work environment that aligns with the values adhered to by the Company. Sarana Jaya’s Supervisory Board and Board of Directors have established the Conduct Guidelines since December 29, 2020.

POKOK-POKOK KODE ETIK

Pedoman Etika Perusahaan berisi pokok-pokok ketentuan sebagai berikut:

Bab I. Pendahuluan

- Latar Belakang;
- Landasan Penyusunan Pedoman Etika Perusahaan;
- Daftar istilah;
- Nilai-Nilai Perusahaan;
- Maksud, Tujuan dan Manfaat Pedoman Etika Perusahaan;
- Sasaran Pedoman Etika Perusahaan;
- Tanggung Jawab Insan Sarana Jaya;
- Tanggung Jawab Para Pemimpin Perusahaan.

Bab II. Etika Bisnis Perusahaan

- Kepatuhan terhadap Peraturan Perundang undangan;
- Pemberian dan Penerimaan Hadiah dan Lainnya;
- Kepedulian terhadap Keselamatan dan Kesehatan Kerja serta Lingkungan (K3L);

CODE OF CONDUCT PRINCIPALS

The Company’s Code of Conduct contains the following main provisions:

Chapter I. Introduction

- Background;
- The Foundation for the Code of Conduct preparation;
- Glossary;
- Corporate Values;
- Purposes, Objectives, and Benefits of the Code of Conduct;
- Objectives of the Code of Conduct;
- Responsibilities of Sarana Jaya Personnel;
- Responsibilities of the Leaders.

Chapter II. Company’s Business Ethics

- Compliance with Prevailing Laws and Regulations;
- Gifting and Receiving Gifts etc.;
- Concern for Occupational Health and Safety and Environment (K3L);

- d. Pemberian Kesempatan yang Sama kepada Pegawai untuk Mendapatkan Pekerjaan, Promosi dan Pemberhentian Kerja;
- e. Standar Etika dalam Berhubungan dengan *Stakeholders*;
- f. Standar Etika Jajaran Manajemen dan Karyawan;
- g. Hak atas Kekayaan Intelektual (*Intellectual Property Rights*).

Bab III. Etika Perilaku

- a. Komitmen;
- b. Menjaga Nama Baik Perusahaan;
- c. Menjaga Hubungan Baik Antar Pegawai;
- d. Menjaga Kerahasiaan Perusahaan;
- e. Menjaga dan Menggunakan Aset Perusahaan;
- f. Menjaga Keselamatan dan Kesehatan Kerja serta Pelestarian Lingkungan;
- g. Perilaku Asusila, Narkotika, Obat Terlarang, Perjudian dan Merokok;
- h. Melakukan Pencatatan Data Perusahaan dan Penyusunan Laporan;
- i. Pemberian dan Penerimaan Hadiah, Suap dan Lainnya;
- j. Benturan Kepentingan;
- k. Aktivitas Politik;
- l. Integritas Laporan Keuangan.

Bab IV. Penegakan dan Pelaporan

- a. Komitmen Pedoman Etika Perusahaan;
- b. Sosialisasi dan Internalisasi;
- c. Pelanggaran;
- d. Mekanisme Pelaporan Pelanggaran;
- e. Sanksi atas Pelanggaran;
- f. Penghargaan (*Reward*) atas Kepatuhan terhadap Pedoman Etika Perusahaan.

SOSIALISASI KODE ETIK

Sosialisasi Pedoman Kode Etik kepada karyawan dilaksanakan melalui penandatanganan Pernyataan Kepatuhan terhadap Pedoman Etika Perusahaan. Pada 09 Juni 2023, seluruh pegawai telah menandatangani pakta integritas.

- d. Provision of Equal Opportunities for Employees to get Jobs, Promotion, and Termination of Work;
- e. Ethical Standards in Stakeholders Engagement;
- f. Ethical Standards for Management and Employees;
- g. Intellectual Property Rights.

Chapter III. Ethics of Behavior

- a. Commitment;
- b. Maintain the Company's Good Reputation;
- c. Maintain Good Inter-Employee Relations;
- d. Maintain the Company's Confidentiality;
- e. Maintain and Use the Company's Assets;
- f. Maintain Occupational Health and Safety and Environmental Preservation;
- g. Immoral Behavior, Narcotics, Drugs, Gambling, and Smoking;
- h. Record Company Data and Prepare Reports;
- i. Gifting and Receive Gifts, Bribes, etc.;
- j. Conflicts of Interest;
- k. Political Activities;
- l. Financial Statements Integrity;

Chapter IV. Enforcement and Reporting

- a. Commitment to the Code of Conduct;
- b. Dissemination and Internalization;
- c. Violation;
- d. Whistleblowing Mechanism;
- e. Sanctions for Violations;
- f. Reward for Compliance with the Code of Conduct.

CODE OF CONDUCT DISSEMINATION

The Code of Conduct is disseminated to employees by signing a Compliance Statement with the Code of Conduct. On June 9, 2023, all employees have signed an integrity pact.



Langkah ini merupakan bagian dari komitmen Perusahaan untuk memastikan pemahaman dan kesesuaian dengan nilai-nilai etika yang telah ditetapkan oleh Perusahaan. Dengan demikian, penandatanganan Pernyataan Kepatuhan menjadi langkah penting dalam memperkuat budaya organisasi yang didasarkan pada prinsip-prinsip etis dan integritas dalam setiap aktivitas dan interaksi yang dilakukan oleh para insan Perusahaan.

PERNYATAAN PEMBERLAKUAN PEDOMAN ETIKA PERUSAHAAN BAGI SELURUH INSAN PERUSAHAAN

Perusahaan menegaskan bahwa Pedoman Etika Perusahaan berlaku secara universal bagi seluruh insan Perusahaan, tanpa terkecuali. Mulai dari karyawan hingga Direksi dan Dewan Pengawas, semua pihak diharapkan untuk mematuhi dan mengikuti pedoman ini sebagai landasan dalam menjalankan tugas dan tanggung jawab masing-masing.

Pernyataan ini mencerminkan komitmen Perusahaan untuk menciptakan lingkungan kerja yang etis dan sesuai dengan nilai-nilai yang telah diakui oleh seluruh jajaran organisasi. Dengan demikian, Pedoman Etika Perusahaan menjadi acuan bersama yang mendukung terwujudnya praktik GCG di Perusahaan.

SANKSI ATAS PELANGGARAN

Perusahaan telah menetapkan sanksi atas pelanggaran kode etik, dengan ketentuan sebagai berikut:

1. Setiap insan Perusahaan yang terbukti melakukan pelanggaran terhadap Pedoman Etika Perusahaan ini akan diberikan sanksi sesuai dengan kebijakan dan peraturan perundang undangan yang berlaku.
2. Sanksi bagi insan Perusahaan yang melakukan pelanggaran ditetapkan oleh Direksi setelah mendapat laporan dari Atasan Langsung Pegawai yang bersangkutan.
3. Direksi memutuskan pemberian tindakan pembinaan, sanksi disiplin dan/atau tindakan lainnya serta pencegahan yang harus dilaksanakan oleh Atasan Langsung di lingkungan masing-masing.
4. Sanksi bagi Direksi yang melakukan pelanggaran diputuskan oleh Dewan Pengawas.

Jika terjadi pelanggaran oleh Mitra Kerja atau *Stakeholders* lain, maka akan dikenakan sanksi sesuai ketentuan yang diatur dalam kontrak akan diterapkan. Dalam kasus pelanggaran yang terkait dengan tindak pidana, tindakan lebih lanjut dapat diteruskan kepada pihak yang berwajib.

This step is part of the Company's commitment to ensure understanding and conformity with the ethical values set by the Company. Thus, signing the Compliance Statement is an important step in strengthening an organizational culture based on ethical principles and integrity in every activity and interaction by Company personnel.

STATEMENT ON THE CODE OF CONDUCT APPLICATION TO ALL COMPANY PERSONNEL

The Company emphasizes that the Code of Conduct applies universally to all Company personnel without exception. From employees to the Board of Directors and Supervisory Board, all parties are expected to comply and follow these guidelines to carry out their respective duties and responsibilities.

The statement reflects the Company's commitment to creating an ethical work environment and follows the values recognized by all organizational levels. In this way, the Code of Conduct becomes a standard reference that supports the realization of GCG practices in the Company.

SANCTIONS FOR VIOLATIONS

The Company has established sanctions for Code of Conduct violations, with the following provisions:

1. Every Company personnel proven to violate the Code of Conduct will be subject to sanction according to the applicable policies, laws, and regulations.
2. The Board of Directors determines sanctions for Company personnel who commit violations after receiving a report from the employee's direct supervisor.
3. The Board of Directors decides to provide coaching, disciplinary sanctions, and/or other actions as well as prevention that must be carried out by the Direct Supervisor in their respective environment.
4. The Supervisory Board decides sanctions for the Board of Directors who commit violations.

If the Work Partners or other Stakeholders commit the violations, the sanction will be imposed as stated in the provision in the contract. In cases of violations related to criminal acts, further action can be forwarded to the authorities.



KEBIJAKAN PEMBERIAN KOMPENSASI JANGKA PANJANG BERBASIS KINERJA

LONG TERM PERFORMANCE-BASED COMPENSATION POLICY

Hingga akhir 2023, Perusahaan tidak menerapkan program kompensasi jangka panjang berbasis kinerja dalam bentuk program kepemilikan saham oleh manajemen (*Management Stock Ownership Program/MSOP*) dan program kepemilikan saham oleh karyawan (*Employee Stock Ownership Program/ESOP*).

Until the end of 2023, the Company has not implemented a long-term performance-based compensation program in the form of a management stock ownership program (MSOP) or an employee stock ownership program (ESOP).

KEPEMILIKAN PENGUNGKAPAN INFORMASI MENGENAI KEPEMILIKAN SAHAM ANGGOTA DIREKSI DAN ANGGOTA DEWAN PENGAWAS

POLICY FOR DISCLOSURE OF INFORMATION REGARDING SHARE OWNERSHIP OF MEMBERS OF THE BOARD OF DIRECTORS AND MEMBERS OF THE SUPERVISORY BOARD

Sebagai Badan Usaha Milik Daerah (BUMD), Sarana Jaya mematuhi regulasi yang berlaku yang secara tegas menyatakan bahwa anggota Direksi dan anggota Dewan Pengawas tidak diperkenankan memiliki saham Perusahaan. Ketentuan ini bertujuan untuk menjamin independensi serta mencegah potensi konflik kepentingan yang dapat mempengaruhi keputusan dan tindakan yang diambil oleh anggota Direksi dan Dewan Pengawas.

As a Region-Owned Enterprise (BUMD), Sarana Jaya complies with applicable regulations which explicitly state that members of the Board of Directors and Supervisory Board are not allowed to own Company shares. The provision aims to guarantee independence and prevent potential conflicts of interest that could influence decisions and actions taken by the Board of Directors and Supervisory Board members.

SISTEM PELAPORAN PELANGGARAN

WHISTLEBLOWING SYSTEM

Sebagai salah satu upaya peningkatan efektivitas penerapan sistem pengendalian internal dan penerapan prinsip GCG, maka Perusahaan telah memiliki suatu sistem pelaporan pelanggaran yang melibatkan peran aktif pegawai dan pihak eksternal organisasi untuk menyampaikan pengaduan atas tindakan dan dugaan pelanggaran dan yang dilakukan oleh pegawai Perusahaan dalam bentuk *Whistleblowing System (WBS)*. WBS digunakan apabila pengaduan dianggap tidak efektif untuk disalurkan melalui jalur formal, contohnya melalui atasan langsung.

Sarana Jaya mengeluarkan Pedoman Sistem Pelaporan Pelanggaran, dalam upaya menanggapi dan memenuhi kebutuhan pengembangan etika, Direksi dan Dewan Pengawas. Pedoman ini diatur dalam Keputusan Direksi Perusahaan Umum Daerah Pembangunan Sarana Jaya DKI Jakarta No. 22 Tahun 2022 tentang Pedoman Investigatif atas Pelaporan Melalui Sistem Pelaporan Pelanggaran (*Whistleblowing System*) di Lingkungan Perusahaan Umum Daerah Pembangunan Sarana Jaya.

CARA PENYAMPAIAN LAPORAN PELANGGARAN

Sesuai dengan ketentuan yang berlaku, Perusahaan telah menetapkan mekanisme cara penyampaian laporan pelanggaran, sebagai berikut:

1. Apabila terjadi pelanggaran atau penyimpangan maka insan Perusahaan wajib melaporkan pelanggaran tersebut melalui:
 - a. Atasan Langsung;
 - b. Pihak yang secara khusus ditunjuk oleh Perusahaan;
2. Pengungkapan harus dilakukan dengan itikad baik dan bukan merupakan suatu keluhan pribadi ataupun didasari kehendak buruk/fitnah.
3. Segenap insan Perusahaan dan pihak eksternal Perusahaan (Pelanggan, Mitra Usaha dan Masyarakat) dapat melaporkan kesalahan pelanggaran Pedoman Etika Perusahaan dan Perusahaan wajib menindaklanjuti pelaporan yang berpotensi merugikan secara materiil dan/atau dapat merusak citra Perusahaan yang antara lain disebabkan oleh penyimpangan, manipulasi dan lain sebagainya.
4. Pelapor wajib mencantumkan identitasnya dengan jelas pada laporan yang dibuat, disertai dengan bukti pendukung yang relevan.

To increase the effectiveness of the implementation of the internal control system and the application of GCG principles, the Company has a violation reporting system that involves the active role of employees and parties external to the organization to submit complaints regarding acts and alleged violations committed by Company employees in the form of a Whistleblowing System (WBS). WBS is used if complaints are deemed ineffective to be channeled through formal channels, e.g., through direct supervisors.

Sarana Jaya issued Guidelines for the Whistleblowing System to respond to and fulfill the ethical development needs of the Board of Directors and Supervisory Board. These guidelines are regulated in the Decree of the Board of Directors of Perusahaan Umum Daerah Pembangunan Sarana Jaya DKI Jakarta No. 22 of 2022 on the Investigative Guidelines for Reporting Through the Whistleblowing System within Perusahaan Umum Daerah Pembangunan Sarana Jaya.

VIOLATION REPORTING MECHANISM

Following the applicable regulations, the Company has established the following mechanism for submitting violation reports:

1. In the event of a violation or irregularity, Sarana Jaya personnel are required to report the violation via the following:
 - a. Direct supervisor;
 - b. A party appointed explicitly by the Company;
2. Disclosures must be made in good faith and not be a personal complaint or based on ill will/slander.
3. All Sarana Jaya personnel and external parties of the Company (Customers, Business Partners, and Communities) can report violations of the Code of Conduct. The Company is required to follow up on reports that have the potential to cause material harm and/or damage the image of the Company, which, among others, are caused by irregularities, manipulation, etc.
4. The whistleblower must state their identity clearly in the report, accompanied by relevant supporting evidence.

5. Penerima laporan wajib merahasiakan identitas pelapor.
 6. Perusahaan wajib menindaklanjuti setiap laporan yang diterima sesuai prosedur dan mekanisme yang berlaku.
 7. Jika diperlukan, Perusahaan akan menyediakan perlindungan hukum sebagaimana ketentuan peraturan perundangan yang berlaku.
5. The report recipient must keep the whistleblower's identity confidential.
 6. The Company must follow up on every report received according to the procedures and mechanisms in force.
 7. If necessary, the Company will provide legal protection according to the provisions of the applicable laws and regulations.

Laporan pengaduan pelanggaran dapat disampaikan melalui situs web resmi <https://pengaduansaranajaya.id/>. Media ini disediakan sebagai platform untuk mempermudah proses pelaporan secara *online*. Dengan menggunakan platform ini, Perusahaan memastikan bahwa setiap laporan dapat diakses dan ditindaklanjuti secara efisien oleh tim yang bertanggung jawab. Keberadaan situs web tersebut juga merupakan bentuk komitmen Perusahaan untuk menciptakan saluran komunikasi yang terbuka dan dapat diakses oleh seluruh pihak yang ingin menyampaikan pengaduan terkait pelanggaran.

Violation complaint reports can be submitted via the official website <https://pengaduansaranajaya.id/>. This media is provided as a platform to simplify the online reporting process. By using this platform, the Company ensures that each report can be accessed and followed up efficiently by the responsible team. This website is also a form of the Company's commitment to creating open and accessible communication channels for all parties who wish to submit complaints regarding violations.

PERLINDUNGAN BAGI PELAPOR

Dalam setiap proses pelaporan pengaduan, Perusahaan menjamin kerahasiaan dan perlindungan bagi pelapor. Prinsip-prinsip kerahasiaan dan asas praduga tidak bersalah senantiasa diutamakan dengan pendekatan yang profesional.

WHISTLEBLOWER PROTECTION

In every violation reporting process, the Company guarantees confidentiality and protection for the whistleblower. Confidentiality and the presumption of innocence are always prioritized with a professional approach.

Perusahaan menjamin kerahasiaan identitas Pelapor dan memberikan perlindungan dari segala bentuk ancaman, intimidasi, atau tindakan tidak menyenangkan yang mungkin dilakukan oleh pihak mana pun. Jaminan perlindungan ini berlaku selama Pelapor mampu menjaga kerahasiaan kasus yang diadukan atau dilaporkan.

The Company guarantees the confidentiality of the identity of the Whistleblower and protects from all forms of threats, intimidation, or unpleasant actions from any party. The protection guarantee is valid as long as the Whistleblower can maintain the confidentiality of the complaint or reported case.

PENANGANAN PENGADUAN

Laporan pengaduan yang diterima akan segera dievaluasi oleh Tim Audit Investigatif. Setelah evaluasi, laporan tersebut akan menjalani proses investigasi oleh tim tersebut. Jika dalam investigasi terbukti bahwa pejabat yang dilaporkan melakukan pelanggaran, tindakan hukuman akan diambil sesuai dengan ketentuan yang telah diatur oleh Perusahaan.

COMPLAINT HANDLING

Complaint reports received will immediately be evaluated by the Investigative Audit Team. After evaluation, the report will undergo an investigation process by the team. If it is proven that the reported official committed a violation during the investigation, punitive action will be taken in accordance with the provisions regulated by the Company.

PIHAK YANG MENGELOLA PENGADUAN

Penanganan pengaduan dikelola oleh pihak ketiga, yaitu PT Sinergitas Tata Kelola. Dengan melibatkan pihak ketiga, Perusahaan menegaskan komitmennya untuk menjaga independensi dan objektivitas dalam penanganan pengaduan. PT Sinergitas Tata Kelola bertanggung jawab untuk melakukan evaluasi dan investigasi terhadap pengaduan yang diterima, serta

WHISTLEBLOWING REPORTING TEAM

Complaint handling is managed by a third party, i.e., PT Sinergitas Tata Kelola. By involving third parties, the Company confirms its commitment to maintaining independence and objectivity in handling complaints. PT Sinergitas Tata Kelola is responsible for evaluating and investigating complaints received, as well as providing recommendations for appropriate action. By involving

memberikan rekomendasi tindakan yang sesuai. Dengan melibatkan pihak ketiga, Perusahaan berupaya menciptakan mekanisme yang transparan dan adil dalam menanggapi setiap pengaduan demi menjaga integritas dan Tata Kelola Perusahaan yang Baik.

JUMLAH PENGADUAN YANG MASUK

Pada tahun 2023, Perusahaan menerima 6 (enam) laporan yang disampaikan melalui mekanisme *Whistleblowing System*. Pengaduan tersebut memiliki status yang dinyatakan selesai penanganan sebanyak 1 (satu) laporan, status pengaduan diterima sebanyak 2 (dua) laporan, dan status tahap penelaahan sebanyak 3 (tiga) laporan. Terhadap seluruh laporan WBS di tahun 2023 tersebut, Perusahaan telah melakukan tindak lanjut. Perusahaan berkomitmen untuk menanggapi setiap laporan dengan serius dan menjalankan proses evaluasi serta investigasi sesuai dengan mekanisme yang telah ditetapkan.

third parties, the Company strives to create a transparent and fair mechanism in responding to every complaint to maintain integrity and Good Corporate Governance.

TOTAL INCOMING COMPLAINTS

In 2023, the Company received six reports submitted through the Whistleblowing System mechanism. These complaints have a status of one report as complete, two reports received, and three reports under review. Regarding all WBS reports in 2023, the Company has carried out follow-up actions. The Company is committed to responding to every report thoughtfully and conducting the evaluation and investigation process per the established mechanisms.

Status Laporan Report Status	Jumlah Laporan Total Report
Selesai Penanganan Completed	1
Diterima Received	2
Tahap Penelaahan Review Process	3
Total Laporan WBS Tahun 2023 Total WBS Report in 2023	6

LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA

PUBLIC OFFICIAL ASSET DECLARATION

Menindaklanjuti surat Komisi Pemberantasan Korupsi Republik Indonesia dengan No. B/422/LHK.00/01-12/01/2024 perihal Penyampaian LHKPN Tahun Pelaporan 2023, Perumda Pembangunan Sarana Jaya dan entitas anak telah melakukan pelaporan LHKPN 2023 13 (tiga belas) orang pejabat dengan tepat waktu. Hal ini merujuk pada Pasal 2 angka 7 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme Penyelenggara Negara (Direksi, Komisaris, dan Pejabat Struktural Badan Usaha Milik Daerah) dan sesuai pasal 5 ayat (2) Peraturan KPK No. 07 Tahun 2016 di mana Penyelenggara Negara wajib menyampaikan Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara paling lambat pada tanggal 31 Maret.

Mengacu pada regulasi yang berlaku, berikut ini adalah daftar pejabat di lingkungan Perusahaan yang diwajibkan untuk melaporkan LHKPN per 31 Maret 2023:

Following up on the Corruption Eradication Commission letter No. B/422/LHK.00/01-12/01/2024 on the Submission of LHKPN for the 2023 Reporting Year, Perumda Pembangunan Sarana Jaya and its subsidiaries have reported the 2023 LHKPN of 13 officials on time. It refers to Article 2 point 7 of the Law of the Republic of Indonesia No. 28 of 1999 on the Implementation of a State that is Clean and Free from Corruption, Collusion, and Nepotism of Public Officials (Board of Directors, Commissioners, and Structural Officials of Region-Owned Enterprises) and per article 5 paragraph (2) of KPK Regulation No. 07 of 2016 where Public Officials are required to submit the Public Official Asset Declaration no later than March 31.

Referring to the applicable regulations, the following is a list of Company officials who are required to report LHKPN on March 31, 2023:

Level Pejabat Official Level	Jumlah Wajib Lapo Total Mandatory Reporter	Jumlah yang Sudah Melaporkan Total Reporter	Persentase Percentage
Dewan Pengawas Supervisory Board	2 orang 2 personnel	2 orang 2 personnel	100%
Direksi Board of Directors	3 orang 3 personnel	3 orang 3 personnel	100%
Pejabat Struktural Structural Officials	8 orang 8 personnel	8 orang 8 personnel	100%
Jumlah Total	13 orang 13 personnel	13 orang 13 personnel	100%

Pada tahun 2023, seluruh pejabat di atas telah menyampaikan LHKPN secara tepat waktu sesuai ketentuan yang berlaku.

PENGELOLA LHKPN

Pengelolaan LHKPN di lingkungan Perusahaan berada di bawah tanggung jawab Sekretaris Perusahaan.

In 2023, all of the above officials have submitted the LHKPN on time per the applicable regulations.

LHKPN MANAGER

The Company's LHKPN management is the responsibility of the Corporate Secretary.

KEBIJAKAN ANTI KORUPSI

ANTI-CORRUPTION POLICY

PROGRAM DAN PROSEDUR ANTI KORUPSI

Kebijakan anti korupsi di Perusahaan diimplementasikan berdasarkan Surat Keputusan (SK) Direksi No. 51 Tahun 2021 yang diperbarui dengan SK Direksi No. 87 Tahun 2022 perihal Pedoman Penerapan Sistem Manajemen Anti Penyuapan (SMAP) di Perumda Sarana Jaya sesuai dengan ISO 37001:2016.

SNI ISO 37001:2016 tentang Sistem Manajemen Anti Penyuapan (SMAP) merupakan standar yang merinci persyaratan dan menyediakan panduan untuk membantu Perusahaan dalam mencegah, mendeteksi, dan menangani penyuapan di Perusahaan.

Dengan berpedoman pada standar ISO 37001:2016, Perusahaan telah menyusun beberapa kebijakan dan sarana pendukung implementasi SMAP, yaitu:

- *Bribery Risk Assessment (BRA)*
- Pakta Integritas
- *Due Diligence*
- Klausul *Right to Audit*
- Fungsi Kepatuhan Anti Penyuapan (FKAP)
- Pedoman *Whistleblowing System (WBS)*
- Pedoman Pengendalian Gratifikasi (UPG)
- Sosialisasi SMAP
- Audit SMAP

ANTI-CORRUPTION PROGRAM AND PROCEDURE

The anti-corruption policy in the Company is implemented based on Board of Directors Decree No. 51 of 2021, which was updated with Board of Directors Decree No. 87 of 2022 on the Guidelines for Implementing the Anti-Bribery Management System (SMAP) at Perumda Sarana Jaya per ISO 37001:2016.

SNI ISO 37001:2016 on Anti-Bribery Management Systems (SMAP) is a standard that details requirements and provides guidance to assist the Company in preventing, detecting, and handling bribery.

Guided by the ISO 37001:2016 standard, the Company has prepared several policies and means to support SMAP implementation, namely:

- Bribery Risk Assessment (BRA)
- Integrity Pact
- Due Diligence
- Right to Audit Clause
- Anti-Bribery Compliance Function (FKAP)
- Whistleblowing System (WBS) Guidelines
- Gratuity Control Guidelines (UPG)
- SMAP Dissemination
- SMAP Audits





PELATIHAN DAN SOSIALISASI ANTI KORUPSI

Sepanjang tahun 2023, Perusahaan telah memfasilitasi insan Perusahaan untuk berpartisipasi dalam pelatihan dan sosialisasi anti korupsi sebagaimana diuraikan pada tabel berikut:

ANTI-CORRUPTION TRAINING AND DISSEMINATION

Throughout 2023, the Company has facilitated Company personnel to participate in anti-corruption training and dissemination as described in the following table:

No.	Judul Pelatihan dan Sosialisasi Training and Dissemination Theme	Tanggal Pelaksanaan Implementation Date	Penyelenggara/ Pembicara Organizer/Speaker
1.	Sertifikat Manajemen Risiko Dasar Basic Risk Management Certificate	20-22 Februari 2023 February 20-22, 2023	WAY Academy
2.	Webinar Nasional dengan tema " <i>Risk-Based Audit</i> " National Webinar with the theme " <i>Risk-Based Audit</i> "	5 Januari 2023 January 5, 2023	
3.	Diskusi <i>Risk Based Audit</i> dengan Komite Dewan Pengawas Risk-Based Audit Discussion with the Supervisory Board Committee	8 Februari 2023 February 8, 2023	
4.	Pelatihan Audit ISO 9001 dan ISO 37001 ISO 9001 and ISO 37001 Audit Training	7 -9 Juli 2023 July 7-9, 2023	PT BSI Indonesia
5.	Sertifikasi QRMA QRMA Certification	10-14 Agustus 2023 August 10-14, 2023	PT Wisma Inti Manajemen (Wimconsult)
6.	Pelatihan dan Sertifikasi Manajemen Risiko bagi Organ Pengelola Risiko Korporasi Risk Management Training and Certification for Corporate Risk Management Organs	13-17 November, 21 November, dan 1 Desember November 13-17, November 21, and December 1	BPKP
7.	<i>Sharing Session</i> Manajemen Risiko Risk Management Sharing Session	12 dan 17 Oktober 2023 October 12 and 17, 2023	Komite Pemantau Risiko Dewan Pengawas Supervisory Board's Risk Management Committee



KEBIJAKAN KOMUNIKASI DENGAN PEMEGANG SAHAM ATAU INVESTOR

COMMUNICATION POLICY WITH SHAREHOLDERS OR INVESTORS

Sebagai sebuah Perusahaan Umum Milik Daerah (Perumda) yang dimiliki 100% oleh pemerintah Provinsi DKI Jakarta, Perusahaan melaksanakan komunikasi dengan pemegang saham dan investor sesuai dengan regulasi yang ditetapkan oleh Pemerintah Provinsi DKI Jakarta.

As a Region-Owned Public Company (Perumda) 100% owned by the DKI Jakarta Provincial Government, the Company communicates with shareholders and investors following the regulations set by the DKI Jakarta Provincial Government.

UPAYA PEMENUHAN HAK-HAK KREDITUR

EFFORTS TO FULFILL CREDITOR RIGHTS

Perusahaan senantiasa berupaya untuk memenuhi hak-hak kreditur dengan tujuan untuk menjaga kepercayaan Kreditur sehingga Perusahaan dapat terus tumbuh dan berkembang secara berkelanjutan.

The Company strives to fulfill creditors' rights and maintain creditors' trust so that the Company can continue to grow and develop sustainably.

Upaya Pemenuhan Hak-Hak Kreditur yang dilakukan Perusahaan memenuhi prinsip-prinsip dasar sebagai berikut:

Efforts to Fulfill Creditor Rights by the Company comply with the following basic principles:

1. Mempertimbangkan dan mengukur kemampuan Perusahaan sebelum melakukan pinjaman kepada kreditur untuk menjaga terpenuhinya hak-hak dan menjaga kepercayaan kreditur.
2. Menerima pinjaman yang diikat melalui perjanjian yang sah dengan klausul perjanjian yang mengedepankan prinsip kewajaran.
3. Memastikan bahwa pembayaran hutang pokok, bunga dan pokok pinjaman dilakukan tepat waktu sesuai dengan perjanjian yang telah disepakati sebelumnya.
4. Perusahaan memastikan penyampaian informasi laporan keuangan kepada kreditur dilakukan secara tepat waktu, transparan, akurat, dan dapat dipercaya.
5. Menjaga rasio keuangan sesuai dengan rasio yang disepakati dengan kreditur.
6. Menggunakan pinjaman sesuai dengan tujuan penggunaan kredit yang telah disepakati.
7. Memastikan bahwa perjanjian yang dilakukan dengan pihak kreditur dilakukan secara adil, transparan dan memenuhi persyaratan yang ditetapkan.
8. Memberikan informasi secara transparan dan terbuka tentang penggunaan dana.

1. Consider and measure the Company's capabilities before making loans to creditors to ensure the fulfillment of rights and maintain creditors' trust.
2. Receive a loan bound by a valid agreement with agreement clauses prioritizing the principle of fairness.
3. Ensure that principal, interest, and loan principal payments are made on time per previously agreed agreements.
4. The Company ensures that financial statement information is submitted to creditors promptly, transparently, accurately, and reliably.
5. Maintain financial ratios following the ratios agreed with creditors.
6. Use loans per the agreed credit use purposes.
7. Ensure that agreements with creditors are carried out fairly, transparently, and meet the specified requirements.
8. Provide transparent and open information about the use of funds.

KEBIJAKAN PENGADAAN BARANG/JASA DAN SELEKSI PEMASOK

GOODS/SERVICE PROCUREMENT POLICY AND SUPPLIER SELECTION

Pengadaan barang/jasa di lingkungan Perusahaan merupakan kegiatan untuk memperoleh barang/jasa oleh Perusahaan yang prosesnya dimulai dari perencanaan sampai dengan serah terima barang/jasa.

Procurement of goods/services within the Company is a motion to obtain goods/services by the Company, starting from planning to handover of goods/services.

Prosedur pengadaan barang/jasa di Perusahaan dilaksanakan sesuai dengan Peraturan Direksi No. 71 Tahun 2022 tentang Pedoman Pengadaan Barang/Jasa.

Procedures for procurement of goods/services in the Company are carried out per the Board of Directors Regulation No. 71 of 2022 on the Goods/Services Procurement Guidelines.

Pedoman tersebut telah mengatur bahwa pengadaan barang/jasa menerapkan prinsip-prinsip berikut ini:

These guidelines stipulate that the procurement of goods/services applies the following principles:

1. Efisien, berarti Pengadaan Barang/Jasa harus memperhatikan fungsi, manfaat, dan kegunaan yang setara atau lebih baik dibandingkan dengan anggaran yang dikeluarkan dan menghindari pemborosan, serta diusahakan untuk mendapatkan hasil yang optimal dan terbaik dalam waktu yang cepat dengan menggunakan sumber daya sehemat mungkin secara wajar, namun bukan semata didasarkan pada harga terendah.
2. Efektif, berarti Pengadaan Barang/Jasa harus sesuai dengan kebutuhan dan tujuan pengadaan yang ditetapkan dengan cara sebaik-baiknya.
3. Transparan, berarti semua ketentuan, tata cara, syarat dan kriteria Pengadaan Barang/Jasa yang ditetapkan bersifat terbuka dan tidak ada yang ditutupi atau disembunyikan, termasuk syarat teknis, administrasi, tata cara evaluasi, hasil evaluasi, penetapan calon Penyedia Barang/Jasa, dan sifatnya terbuka bagi peserta yang berminat.
4. Terbuka, berarti proses Pengadaan Barang/Jasa dapat diikuti oleh penyedia barang/jasa manapun tanpa pembatasan yang menyebabkan hilangnya kesempatan untuk berpartisipasi.
5. Bersaing, berarti Pengadaan Barang/Jasa harus dilakukan dengan membuka ruang terjadinya persaingan sehat dan menghindari persekongkolan.
6. Adil/tidak diskriminatif, berarti Pengadaan Barang/Jasa dilakukan dengan cara yang adil dengan memperlakukan semua penyedia barang/jasa dengan cara yang sama dan setara; dan
7. Akuntabel, berarti Pengadaan Barang/Jasa harus mencapai target dan sasaran yang telah ditetapkan dan dapat dipertanggungjawabkan sehingga dapat menghindari potensi penyalahgunaan dan penyimpangan.

1. Efficient, meaning that the procurement of goods/services must pay attention to functions, benefits, and uses that are equivalent or better than the budget spent and avoid waste, as well as strive to get optimal and best results in the quickest time by using resources as economically as possible reasonably, but not solely based on the lowest price.
2. Effective, meaning that the procurement of goods/services must follow the determined procurement needs and objectives in the best possible way.
3. Transparent, meaning that all provisions, procedures, conditions, and criteria for the procurement of goods/services determined are open and nothing is covered or hidden, including technical requirements, administration, evaluation procedures, evaluation results, determination of prospective providers of goods/services, and is open to interested participants.
4. Open, meaning that any provider of goods/services can follow the Goods/Services Procurement process without restrictions that cause loss of opportunity to participate.
5. Competitive, meaning that the procurement of goods/services must be carried out by opening up space for healthy competition and avoiding collusion.
6. Fair/non-discriminatory, meaning that the goods/services procurement is carried out fairly by treating all providers of goods/services in the same and equal manner; and
7. Accountable, meaning that the procurement of goods/services must achieve the set targets and objectives and can be accounted for to avoid potential misuse and deviation.

Setiap Pelaksana Pengadaan Barang/Jasa wajib menandatangani Pakta Integritas. Penandatanganan Pakta Integritas dilaksanakan ketika Pelaksana Pengadaan Barang/Jasa ditetapkan menjadi pelaksana dan menjadi satu kesatuan dengan Surat Keputusan penetapan sebagai Pelaksana Pengadaan Barang/Jasa. Penandatanganan Pakta Integritas untuk Penyedia Barang/Jasa dilaksanakan ketika mendaftar pada *Vendor Management System* (VMS) atau untuk manual disampaikan bersamaan dengan pemasukan persyaratan kualifikasi atau dokumen penawaran.

Penyedia Barang/Jasa dalam pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa wajib memenuhi persyaratan sebagai berikut:

- a. memenuhi ketentuan peraturan perundang-undangan untuk menjalankan kegiatan/usaha;
- b. memiliki keahlian, pengalaman, kemampuan teknis dan manajerial untuk menyediakan Barang/Jasa;
- c. memperoleh paling kurang 1 (satu) pekerjaan sebagai Penyedia Barang/Jasa dalam kurun waktu 4 (empat) tahun terakhir baik di lingkungan pemerintah maupun swasta, termasuk pengalaman subkontrak;
- d. ketentuan sebagaimana dimaksud pada huruf c. dikecualikan bagi Penyedia Barang/Jasa yang baru berdiri kurang dari 3 (tiga) tahun;
- e. memiliki sumber daya manusia, modal, peralatan dan fasilitas lain yang diperlukan dalam Pengadaan Barang/Jasa;
- f. dalam hal Penyedia Barang/Jasa akan melakukan kemitraan, Penyedia Barang/Jasa harus mempunyai perjanjian kerja sama operasi/kemitraan yang memuat persentase kemitraan dan perusahaan yang mewakili kemitraan tersebut;
- g. memiliki kemampuan pada bidang pekerjaan yang sesuai untuk Usaha Mikro, Usaha Kecil dan koperasi kecil serta kemampuan pada subbidang pekerjaan yang sesuai untuk usaha non-kecil;
- h. tidak dalam pengawasan pengadilan, tidak pailit, kegiatan usahanya tidak sedang dihentikan dan/atau direksi yang bertindak untuk dan atas nama perusahaan tidak sedang dalam menjalani sanksi pidana, yang dibuktikan dengan surat pernyataan yang ditandatangani Penyedia Barang/Jasa;
- i. memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) telah memenuhi kewajiban perpajakan tahun terakhir;
- j. secara hukum mempunyai kapasitas untuk mengikatkan diri pada Kontrak;
- k. tidak masuk dalam Daftar Hitam;
- l. memiliki alamat tetap dan jelas serta dapat dijangkau dengan jasa pengiriman; dan
- m. menandatangani Pakta Integritas.

Every Goods/Services Procurement Implementer is required to sign an Integrity Pact. The Integrity Pact is signed when the Goods/Services Procurement Executor is determined to be the executor and becomes one unit with the Decree determining them as the Goods/Services Procurement Executor. The Integrity Pact signing for Goods/Services Providers is carried out when registering on the Vendor Management System (VMS), or the manual is submitted simultaneously with submitting qualification requirements or bidding documents.

Goods/Services Providers in the implementation of Goods/Services Procurement are required to fulfill the following requirements:

- a. fulfill the provisions of laws and regulations to carry out activities/business;
- b. have the expertise, experience, technical, and managerial abilities to provide Goods/Services;
- c. obtained at least one job as a Goods/Services Provider within the last four years in government and private environments, including subcontracting experience;
- d. provisions as intended in letter c. excluded for Goods/Services Providers that have only been established for less than three years;
- e. have human resources, capital, equipment, and other facilities required in goods/services procurement;
- f. in the event that the Goods/Services Provider will enter into a partnership, the Goods/Services Provider must have an operational cooperation/partnership agreement that contains the percentage of the partnership and the company representing the partnership;
- g. have abilities in work fields that are suitable for Micro Enterprises, Small Businesses, and small cooperatives, as well as abilities in work subfields that are suitable for non-small businesses;
- h. not under court supervision, not bankrupt, their business activities are not being stopped, and/or the board of directors acting for and on behalf of the company are not undergoing criminal sanctions, as evidenced by a statement signed by the Goods/Services Provider;
- i. have a Taxpayer Identification Number (NPWP) and have fulfilled the tax obligations for the last year;
- j. legally can bind themselves to the Contract;
- k. not on the Black List;
- l. have a permanent and precise address and can be reached by delivery service; and
- m. sign the Integrity Pact.



PROSES GOVERNANSI TERKAIT ISU TEKNOLOGI INFORMASI

GOVERNANCE PROCESS RELATED TO INFORMATION TECHNOLOGY ISSUES

Perusahaan telah melakukan proses governansi terkait isu teknologi, yang meliputi gangguan (*disruption*), keamanan dunia maya (*cyber security*), dan pemulihan bencana (*disaster recovery*).

The Company has conducted a governance process related to technology issues, which includes disruption, cyber security, and disaster recovery.

KEBIJAKAN TENTANG PERDAGANGAN ORANG DALAM (*INSIDER TRADING*) DAN TRANSAKSI MANDIRI YANG BERSIFAT KEKERASAN (*ABUSIVE SELF-DEALING*)

POLICIES ON INSIDER TRADING AND ABUSIVE SELF-DEALING

Perdagangan orang dalam (*insider trading*) dan transaksi mandiri yang bersifat kekerasan (*abusive self-dealing*) tidak relevan untuk diterapkan oleh Perusahaan karena Perusahaan merupakan Perumda yang 100% dimiliki oleh Pemerintah Provinsi DKI Jakarta, dan Perusahaan tidak melakukan transaksi jual beli saham kepada pihak mana pun.

Insider trading and abusive self-dealing are irrelevant for the Company to implement because the Company is a Perumda, which is 100% owned by the DKI Jakarta Provincial Government, and the Company does not carry out share buying and selling transactions with any other party.

INFORMASI PEMBERIAN DANA UNTUK KEGIATAN POLITIK

INFORMATION ON FUNDING FOR POLITICAL ACTIVITIES

Sepanjang tahun 2023, Perusahaan tidak pernah mengikuti aktivitas perpolitikan dan tidak pernah memberikan dana untuk kegiatan politik.

Throughout 2023, the Company has never participated in political activities or provided funds for political activities.

KEBIJAKAN TERKAIT PENGUNDURAN DIRI DIREKSI DAN DEWAN PENGAWAS APABILA TERLIBAT DALAM KEJAHATAN KEUANGAN

POLICY ON THE RESIGNATION OF THE BOARD OF DIRECTORS AND SUPERVISORY BOARD IF INVOLVED IN FINANCIAL CRIMES

Kebijakan pengunduran diri maupun pemberhentian Direksi dan Dewan Pengawas Perusahaan telah diatur secara jelas di dalam Anggaran Dasar Perusahaan dan *Board Manual* Perusahaan Tahun 2023 yang telah disetujui dan ditandatangani bersama oleh Dewan Pengawas dan Direksi.

The policy for resignation and dismissal of the Board of Directors and Supervisory Board has been explicitly regulated in the Articles of Association and the 2023 Board Manual, which have been approved and jointly signed by the Supervisory Board and Board of Directors.

TRANSPARANSI PRAKTIK *BAD* GOVERNANCE

TRANSPARENCY ON *BAD* GOVERNANCE PRACTICES

LAPORAN ATAS AKTIVITAS PERUSAHAAN YANG MENCEMARI LINGKUNGAN

Sepanjang tahun 2023, Perusahaan tidak mendapat laporan terkait aktivitas Perusahaan yang mencemari lingkungan.

PENGUNGKAPAN PEMENUHAN KEWAJIBAN PERPAJAKAN [GRI 207-1]

Sepanjang tahun 2023, Perusahaan tidak memiliki kasus yang berkaitan dengan perpajakan. Perusahaan senantiasa berupaya memenuhi kewajiban sebagai wajib pajak. Informasi mengenai pengungkapan pemenuhan kewajiban perpajakan telah disampaikan di Bab Analisis dan Pembahasan Manajemen atas Kinerja Perusahaan, Laporan Tahunan ini.

KETIDAKSESUAIAN PENYAJIAN LAPORAN TAHUNAN DAN LAPORAN KEUANGAN DENGAN PERATURAN YANG BERLAKU DAN STANDAR AKUNTANSI KEUANGAN (SAK)

Informasi, analisis, dan pembahasan kinerja pada laporan tahunan ini mengacu pada Laporan Keuangan Perusahaan periode 2023 dan 2022 yang masing-masing telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik (KAP) Heliantono & Rekan (Parker Russell International). Laporan Keuangan Perusahaan disusun dan disajikan sesuai Standar Akuntansi Keuangan (SAK) di Indonesia, yaitu Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK), yang mencakup Pernyataan dan Interpretasi yang dikeluarkan oleh Dewan Standar Akuntansi Keuangan (“DSAK”) Ikatan Akuntan Indonesia dan Peraturan Pasar Modal yang berlaku antara lain Peraturan Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan (Bapepam-LK) No. VIII.G.7 tentang Pedoman Penyajian Laporan Keuangan, Keputusan Ketua Bapepam-LK No. KEP-347/BL/2012 tentang Penyajian dan Pengungkapan Laporan Keuangan Emiten atau Perusahaan Publik.

PENGUNGKAPAN SEGMENT OPERASI PADA LAPORAN KEUANGAN

Perusahaan belum melakukan pengungkapan segmen operasi sesuai PSAK No. 5 (Penyesuaian 2015), di dalam Laporan Keuangan Tahunan 2023.

REPORT ON COMPANY ACTIVITIES THAT POLLUTE THE ENVIRONMENT

Throughout 2023, the Company received no reports regarding the Company’s activities that pollute the environment.

DISCLOSURE OF FULFILLMENT OF TAX OBLIGATIONS [GRI 207-1]

Throughout 2023, the Company has no cases related to taxation. The Company strives to fulfill its obligations as a taxpayer. Information regarding the disclosure of fulfillment of tax obligations has been presented in the Management Analysis and Discussion Chapter on Company Performance in this Annual Report.

INCONSISTENCY IN THE PRESENTATION OF ANNUAL REPORTS AND FINANCIAL STATEMENTS WITH APPLICABLE REGULATIONS AND FINANCIAL ACCOUNTING STANDARDS (SAK)

Information, analysis, and discussion of performance in this annual report refer to the Company’s Financial Statement for the 2023 and 2022 periods, each of which has been audited by the Public Accounting Firm (KAP) Heliantono & Partners (Parker Russell International). The Company’s Financial Statements are prepared and presented per the Financial Accounting Standards (SAK) in Indonesia, i.e., the Statement of Financial Accounting Standards (PSAK), which includes Statements and Interpretations issued by the Financial Accounting Standard Board (DSAK) of the Indonesian Institute of Accountant and Capital Market Regulations that apply, among other things, Regulation of the Capital Market and Financial Institutions Supervisory Agency (Bapepam-LK) No. VIII.G.7 on Guidelines for Presenting Financial Statements, Bapepam-LK Chairman Decree No. KEP-347/BL/2012 on Presentation and Disclosure of Financial Statements of Issuers or Public Companies.

DISCLOSURE OF OPERATING SEGMENTS IN FINANCIAL STATEMENTS

The Company has not disclosed operating segments per PSAK No. 5 (2015 Adjustments) in the 2023 Annual Financial Statement.

KESESUAIAN BUKU LAPORAN TAHUNAN DAN LAPORAN TAHUNAN DIGITAL

Laporan Tahunan Perusahaan baik yang disampaikan kepada pemegang saham, investor, pemangku kepentingan, maupun yang telah diunggah pada situs web resmi Perusahaan telah sesuai dengan buku Laporan Tahunan yang dicetak dan diterbitkan oleh Perusahaan.

COMPATIBILITY OF ANNUAL REPORT BOOKS AND DIGITAL ANNUAL REPORTS

The Company's Annual Report, whether submitted to shareholders, investors, stakeholders, or uploaded on the Company's official website, is in accordance with the Annual Report book printed and published by the Company.

KESESUAIAN PENERAPAN CORPORATE GOVERNANCE SESUAI DENGAN ASEAN CORPORATE GOVERNANCE SCORECARD
 CORPORATE GOVERNANCE IMPLEMENTATION CONFORMITY WITH ASEAN CORPORATE GOVERNANCE SCORECARD

Perusahaan secara konsisten menjalankan prinsip-prinsip GCG pada semua aspek bisnis dan tingkat organisasi, serta menjamin peningkatan kualitas dalam penerapan GCG. Peningkatan ini tercermin dalam hasil tata kelola Perusahaan yang semakin baik dari tahun ke tahun, baik dalam hal kinerja operasional maupun keuangan. Salah satu indikator evaluasi implementasi GCG di Perusahaan adalah ASEAN Corporate Governance Scorecard (ASEAN CGS), yang merupakan standar pengukuran praktik tata kelola yang disepakati oleh ASEAN Capital Market Forum (ACMF). Komponen-komponen yang digunakan sebagai dasar penilaian ASEAN CGS adalah sebagai berikut:

1. Hak-Hak Pemegang Saham.
2. Perlakuan yang Setara terhadap Pemegang Saham.
3. Peran Pemangku Kepentingan.
4. Pengungkapan dan Transparansi.
5. Tanggung Jawab Dewan.

The Company consistently implements GCG principles in all aspects of business and organizational levels as well as ensures quality improvement in GCG implementation. The improvement is reflected in the Company's governance results which are getting better from year to year in terms of operational and financial performance. One of the indicators for evaluating GCG implementation in companies is the ASEAN Corporate Governance Scorecard (ASEAN CGS), which is a standard for measuring governance practices agreed upon by the ASEAN Capital Market Forum (ACMF). The components used as the basis for the ASEAN CGS assessment are as follows:

1. Rights of Shareholders.
2. Equal Treatment of Shareholders.
3. Role of Stakeholders.
4. Disclosure and Transparency.
5. Responsibilities of the Board.

Level 1
Level 1

No.	Parameter Parameter	Implementasi Implementation
A	Hak dan Perlakuan Adil terhadap Pemegang Saham Rights and Equitable Treatment of Shareholders	
A.1	Hak Dasar Pemegang Saham Basic Shareholder Rights	
A.1.1	<p>Perusahaan membayar dividen (interim dan final/tahunan) secara adil dan tepat waktu; artinya, semua pemegang saham diperlakukan sama dan dibayar dalam waktu 30 hari setelah (i) diumumkan untuk dividen interim dan (ii) disetujui oleh rapat umum pemegang saham untuk dividen final. Dalam hal Perusahaan telah menawarkan dividen <i>Scrip</i>, Perusahaan membayar dividen tersebut dalam waktu 60 hari.</p> <p>The Company pays (interim and final/annual) dividends in an equitable and timely manner; that is, all shareholders are treated equally and paid within 30 days after being (i) declared for interim dividends and (ii) approved by shareholders at general meetings for final dividends. In case the company offers a Scrip dividend, the Company pays the dividend within 60 days.</p>	<p>Sebagai perusahaan umum daerah (Perumda), Sarana Jaya tidak memiliki dividen. Melainkan dalam Peraturan Daerah (Perda) menyebutkan Pendapatan Asli Daerah (PAP).</p> <p>As a regional public company (Perumda), Sarana Jaya does not have dividends. However, the Regional Regulation (Perda) mentions Regional Original Income (PAP).</p>

No.	Parameter Parameter	Implementasi Implementation
A.2	Hak untuk berpartisipasi secara efektif dan memberikan suara dalam rapat umum pemegang saham dan harus mengetahui peraturan, termasuk prosedur pemungutan suara, yang mengatur RUPS.	
	Right to participate effectively in and vote in general shareholder meetings and should be informed of the rules, including voting procedures, that govern general shareholder meetings.	
A.2.1	Pemegang saham mempunyai kesempatan, dalam mata acara RUPS, untuk menyetujui remunerasi (<i>fee</i> , tunjangan, <i>benefit</i> natura, dan honorarium lainnya) atau kenaikan remunerasi bagi Dewan Pengawas, Direktur, dan karyawan non-eksekutif. Shareholders can approve remuneration (fees, allowances, benefit-in-kind, and other emoluments) or any increases in remuneration for the Supervisory Board, Director, and non-executive employees.	Pemegang saham (KPM atau Kepala Daerah yang Mewakili Pemerintah Daerah) dapat menyampaikan pandangannya, termasuk melalui pemungutan suara pada pengesahan Pemegang Saham dalam keputusan tentang remunerasi anggota Dewan Pengawas dan/atau Direksi, sebagaimana berlaku. Struktur dan besaran remunerasi untuk anggota Dewan Pengawas dan Direksi, serta karyawan harus sesuai dengan persetujuan pemegang saham. Shareholders (KPM or Regional Heads Representing Regional Governments) can express their views, including voting on Shareholder approval in resolutions regarding remuneration for members of the Supervisory Board and/or Board of Directors, as applicable. The structure and amount of remuneration for members of the Supervisory Board and Board of Directors, as well as employees, must be in accordance with shareholder approval.
A.2.2	Perusahaan memberikan hak kepada pemegang saham non-pengendali untuk mencalonkan calon Direksi dan Dewan Pengawas. The Company provides non-controlling shareholders a right to nominate candidates for the Board of Directors and Supervisory Board.	Perusahaan sebagai salah satu Perumda Pemerintah Provinsi DKI Jakarta tidak memiliki pemegang saham non-pengendali. As one of DKI Jakarta Provincial Government Perumda, The Company does not have non-controlling shareholders.
A.2.3	Perusahaan memperbolehkan pemegang saham memilih Direksi dan Dewan Pengawas secara individual. The Company allows shareholders to elect the Board of Directors Supervisory Board individually.	Pengangkatan Dewan Pengawas dan Direksi harus mengikuti prosedur yang telah ditetapkan dalam Peraturan Gubernur. The appointment of the Supervisory Board and Board of Directors must follow the procedures stipulated in the Governor Regulation.
A.2.4	Perusahaan mengungkapkan prosedur pemungutan suara yang digunakan sebelum RUPS dimulai. The Company discloses the voting procedures used before the start of the meeting.	Pemegang saham (KPM atau Kepala Daerah yang Mewakili Pemerintah Daerah) mempunyai kesempatan untuk berpartisipasi secara efektif dan memberikan suara. Shareholders (KPM or Regional Heads Representing Regional Governments) can participate effectively and vote.
A.2.5	Risalah RUPS terakhir mencatat bahwa pemegang saham diberi kesempatan untuk mengajukan pertanyaan dan pertanyaan yang diajukan pemegang saham serta jawaban yang diberikan dicatat. The most recent AGM minutes record that the shareholders were allowed to ask questions, and the questions raised by shareholders and answers given were recorded.	Pemegang saham (KPM atau Kepala Daerah yang Mewakili Pemerintah Daerah) mempunyai kesempatan untuk mengajukan pertanyaan kepada Dewan Pengawas dan Direksi, termasuk mengenai audit eksternal tahunan dengan batasan yang wajar. Shareholders (KPM or Regional Heads Representing Regional Governments) can ask questions to the Supervisory Board and Board of Directors, including regarding the annual external audit within reasonable limits.
A.2.6	Perusahaan mengungkapkan hasil pemungutan suara termasuk suara setuju, tidak setuju, dan abstain untuk seluruh keputusan/setiap mata acara RUPS terakhir. The Company discloses the voting results, including approving, dissenting, and abstaining votes for all resolutions/each agenda item for the most recent AGM.	
A.2.7	Perusahaan mengungkapkan daftar anggota Dewan Pengawas yang menghadiri RUPS terakhir. The Company discloses the list of Supervisory Board who attended the most recent AGM.	Ketentuan tentang hal ini tidak sesuai untuk diterapkan oleh Perusahaan yang merupakan sebuah Perumda milik Pemerintah Provinsi DKI Jakarta. The provisions regarding this matter are not suitable to be implemented by the Company, a Perumda belonging to the DKI Jakarta Provincial Government.
A.2.8	Perusahaan mengungkapkan bahwa seluruh anggota Direksi menghadiri RUPS terakhir. The Company discloses that all Board of Directors attended the most recent AGM.	
A.2.9	Perusahaan memperbolehkan pemungutan suara secara <i>in-absentia</i> . The Company allows voting in absentia.	
A.2.10	Perusahaan memberikan hak suara melalui pemungutan suara (<i>voting</i>) untuk semua pemegang saham dalam pengambilan keputusan RUPS. The Company votes by poll for all shareholders in AGM resolutions.	

No.	Parameter Parameter	Implementasi Implementation
A.2.11	Perusahaan mengungkapkan telah menunjuk pihak independen untuk menghitung dan/atau memvalidasi suara dalam RUPST. The Company discloses that it has appointed an independent party (scrutineers/inspectors) to count and/or validate the votes at the AGM.	Ketentuan tentang hal ini tidak sesuai untuk diterapkan oleh Perusahaan yang merupakan sebuah Perumda milik Pemerintah Provinsi DKI Jakarta. The provisions regarding this matter are not suitable to be implemented by the Company, a Perumda belonging to the DKI Jakarta Provincial Government.
A.2.12	Perusahaan mengumumkan kepada pemangku kepentingan hasil pemungutan suara pada RUPS/ RUPSLB terkini untuk semua keputusan, pada hari kerja berikutnya. The Company makes publicly available by the next working day the result of the votes taken during the most recent AGM/EGM for all resolutions to all shareholders.	Ketentuan tentang hal ini tidak sesuai untuk diterapkan oleh Perusahaan yang merupakan sebuah Perumda milik Pemerintah Provinsi DKI Jakarta. The provisions regarding this matter are not suitable to be implemented by the Company, a Perumda belonging to the DKI Jakarta Provincial Government.
A.2.13	Perusahaan memberikan pemberitahuan setidaknya 21 hari sebelumnya untuk semua RUPS dan RUPSLB. The Company provides at least 21 days' notice for all AGMs and EGMs.	
A.2.14	Dalam pemanggilan RUPS/surat edaran dan/ atau pernyataan yang menyertainya, Perusahaan memberikan alasan dan penjelasan atas setiap mata acara yang memerlukan persetujuan pemegang saham. The Company provides the rationale and explanation for each agenda item that requires shareholders' approval in the notice of AGM/circulars and/or the accompanying statement.	
A.2.15	Perusahaan memberikan kesempatan kepada pemegang saham untuk memasukkan mata acara RUPS dan/atau meminta diadakan RUPS. The Company allows shareholders to place item/s on the agenda of general meetings and/or to request general meetings.	Pemegang saham (KPM atau Kepala Daerah yang Mewakili Pemerintah Daerah) mempunyai kesempatan untuk mengajukan pertanyaan kepada Dewan Pengawas dan Direksi, termasuk mengenai audit eksternal tahunan, untuk Rapat Pengesahan, dan untuk mengusulkan resolusi, dengan batasan yang wajar. Shareholders (KPM or Regional Heads Representing Regional Governments) can ask questions to the Supervisory Board and Board of Directors regarding the annual external audit and the Ratification Meeting and propose resolutions with reasonable limits.
A.3	Pasar untuk pengendalian Perusahaan harus dibiarkan berfungsi secara efisien dan transparan. Markets for corporate control should be allowed to function efficiently and transparently.	
A.3.1	Dalam hal merger, akuisisi, dan/atau pengambilalihan memerlukan persetujuan pemegang saham, Direksi dan Dewan Pengawas Perusahaan menunjuk pihak independen untuk menilai kewajaran harga transaksi. In mergers, acquisitions, and/or takeovers requiring shareholders' approval, the Board of Directors and Supervisory Board of the Company appoint an independent party to evaluate the fairness of the transaction price.	Transaksi luar biasa seperti <i>merger</i> dan penjualan sebagian besar aset Perusahaan telah dijelaskan secara terperinci dan transparan agar para investor dapat memahami hak-hak dan opsi yang tersedia. Selain itu, transaksi tersebut harus dilakukan dengan harga yang transparan dan dalam kondisi yang adil. Extraordinary transactions such as mergers and sales of a substantial portion of the Company's assets have been explained in detail and transparently so that investors can understand the rights and options available. In addition, these transactions must be carried out at transparent prices and under fair conditions.
A.4	Pelaksanaan hak kepemilikan oleh seluruh pemegang saham, termasuk investor institusi, harus difasilitasi. All shareholders, including institutional investors, should be facilitated to exercise ownership rights.	
A.4.1	Perusahaan mengungkapkan praktik bisnisnya untuk mendorong pemegang saham agar memiliki keterlibatan dengan perusahaan di luar RUPS. The Company discloses its practices to encourage shareholders to engage with the company beyond general meetings.	Hak-hak dasar pemegang saham (KPM atau Kepala Daerah yang Mewakili Pemerintah Daerah) telah diatur dalam Peraturan Pemerintah Provinsi. The basic rights of shareholders (KPM or Regional Heads Representing the Regional Government) have been regulated in Provincial Government Regulations.
A.5	Saham dan hak suara. Shares and voting rights.	
A.5.1	Perusahaan mempublikasikan hak suara yang melekat pada masing-masing kelas saham tersebut (misalnya melalui situs web perusahaan dan/atau situs web regulator). The Company publicizes the voting rights attached to each class of shares (e.g., through the company website and/or the regulator's website).	Sebagai sebuah Perumda, Perusahaan dimiliki 100% oleh Pemerintah Provinsi DKI Jakarta, dan tidak terdapat pemegang saham lainnya. Dengan demikian Perusahaan tidak mempublikasikan aturan tentang saham dan hak suara. As a Perumda, the Company is 100% owned by the DKI Jakarta Provincial Government, and no other shareholders exist. Thus, the Company does not publish rules regarding shares and voting rights.

No.	Parameter Parameter	Implementasi Implementation
A.6	Pemanggilan RUPS Notice of AGM	
A.6.1	Setiap keputusan yang diambil pada RUPST terakhir hanya membahas satu hal saja dan tidak ada penggabungan beberapa hal menjadi satu keputusan yang sama. Each resolution tabled at the most recent annual general meeting deals with only one item, i.e., there is no bundling of several items into the exact resolution.	Pemegang saham (KPM atau Kepala Daerah yang Mewakili Pemerintah Daerah) mempunyai kesempatan untuk berpartisipasi secara efektif dan memberikan suara dalam rapat pemegang saham, dan harus mengetahui peraturan, termasuk prosedur pemungutan suara. Shareholders (KPM or Regional Heads Representing Regional Governments) have the opportunity to participate effectively and vote at shareholder meetings, and they must know the regulations, including voting procedures.
A.6.2	Pemberitahuan RUPS/surat edaran terbaru Perusahaan sepenuhnya diterjemahkan ke dalam bahasa Inggris dan diterbitkan pada tanggal yang sama dengan versi bahasa Indonesia. The Company's notice of the most recent AGM/circulars fully translated into English and published on the same date as the Indonesian version.	Pemberitahuan surat edaran KPM disampaikan hanya dalam bahasa Indonesia saja. Hal ini dilakukan karena Perusahaan bukan sebuah perusahaan terbuka yang sahamnya dimiliki oleh publik. KPM circular notifications are delivered only in Indonesian. This is because the Company is not a public company whose shares are owned by the public.
	Pemanggilan RUPS/ surat edaran memuat rincian sebagai berikut: The notice of AGM/circulars has the following details:	
A.6.3	Profil Direksi dan Dewan Pengawas yang ingin dipilih atau sudah terpilih harus diungkapkan secara transparan. Informasi yang harus diungkapkan secara minimal mencakup usia, kualifikasi akademis, tanggal penunjukan pertama, pengalaman terkait, serta jabatan Direktur di perusahaan lain yang pernah diemban. The profiles of the Board of Directors and Supervisory Board seeking election/re-election must be disclosed transparently. The disclosed information must contain at least age, academic qualification, date of first appointment, experience, and directorships in other listed companies.	KPM atau Kepala Daerah yang Mewakili Pemerintah Daerah menerbitkan surat pemanggilan rapat dengan mencantumkan materi pembahasan, termasuk tentang profil Direksi dan Dewan Pengawas yang dipilih, serta Auditor yang akan ditugaskan. The KPM or Regional Head representing the Regional Government issues a letter calling for a meeting including discussion material, including the profile of the Board of Directors and Supervisory Board selected, as well as the Auditor who will be assigned.
A.6.4	Auditor yang ingin diangkat atau diangkat kembali harus diidentifikasi secara jelas. The auditors seeking appointment/re-appointment clearly identified.	
A.6.5	Dokumen proksi tersedia dengan mudah. The proxy documents are made easily available.	
A.7	Perdagangan orang dalam (insider trading) dan transaksi mandiri yang bersifat kekerasan (abusive self-dealing) harus dilarang. Insider trading and abusive self-dealing should be prohibited.	
A.7.1	Direksi dan Dewan Pengawas wajib melaporkan transaksi saham Perusahaan dalam waktu 3 hari kerja The Board of Directors and Supervisory Board must report their dealings in company shares within three business days.	Ketentuan tentang <i>insider trading</i> tidak relevan bagi Perusahaan yang tidak menjual saham kepada publik. Provisions regarding insider trading are irrelevant for companies that do not sell shares to the public.
A.8	Transaksi Pihak Berelasi (TPB) yang dilakukan oleh Dewan Pengawas, Direksi dan Tim Manajemen Eksekutif Kunci. Related Party Transactions (RPT) by Supervisory Board, Board of Directors, and Key Executives.	
A.8.1	Perusahaan memiliki kebijakan yang mewajibkan komite yang terdiri dari Direktur dan Dewan Pengawas Independen untuk meninjau materi TPB untuk menentukan apakah TPB tersebut merupakan yang terbaik bagi kepentingan Perusahaan dan pemegang saham. The Company has a policy requiring a committee of independent Directors and a Supervisory Board to review material RPTs to determine whether they are in the best interests of the Company and shareholders.	Transaksi dengan pihak berelasi harus disetujui dan dilakukan dengan memastikan pengelolaan konflik kepentingan yang tepat dan perlindungan terhadap kepentingan Perusahaan serta Pemegang saham (KPM atau Kepala Daerah yang Mewakili Pemerintah Daerah). Dengan demikian, proses transaksi tersebut dapat dilaksanakan secara transparan dan menjaga integritas serta kesejahteraan Perusahaan serta Pemegang saham (KPM). Transactions with related parties must be approved and carried out by ensuring proper management of conflicts of interest and protection of the interests of the Company and shareholders (KPM or Regional Heads Representing the Regional Government). In this way, the transaction process can be carried out transparently and maintain the integrity and welfare of the Company and its shareholders (KPM).

No.	Parameter	Implementasi
	Parameter	Implementation
A.8.2	<p>Perusahaan memiliki kebijakan yang mewajibkan anggota Dewan Pengawas dan Direktur untuk tidak terlibat dalam pengambilan keputusan terkait agenda tertentu jika berpotensi memiliki benturan kepentingan. The Company has a policy requiring board members (Supervisory Board and Board of Directors) to abstain from participating in the board discussion on a particular agenda when they are conflicted.</p>	<p>Dewan Pengawas telah memastikan bahwa kebijakan dan prosedur terkait konflik kepentingan telah ditetapkan, dipahami, dan diterapkan oleh para Direktur, manajemen, pegawai, serta pemangku kepentingan lainnya. Hal ini bertujuan untuk memastikan kesadaran dan kepatuhan terhadap standar etika yang tinggi dalam menjalankan aktivitas Perusahaan, serta untuk meminimalkan risiko terjadinya konflik kepentingan yang dapat merugikan Perusahaan dan pemangku kepentingan. The Supervisory Board has ensured that policies and procedures regarding conflicts of interest have been established, understood, and implemented by the Board of Directors, management, employees, and other stakeholders. It aims to ensure awareness and compliance with high ethical standards in carrying out Company activities, as well as to minimize the risk of conflicts of interest that could harm the Company and its stakeholders.</p>
A.8.3	<p>Perusahaan mempunyai kebijakan yang melarang praktik pinjaman kepada Direksi dan Dewan Pengawas atau memastikan bahwa hal tersebut dilakukan secara wajar dan dengan harga pasar. The Company has policies to forbid loans to the Board of Directors and Supervisory Board or ensure they are being conducted at arm's length basis and market rates.</p>	<p>Dewan Pengawas dan Direksi mengadopsi serta mengungkapkan kebijakan terkait transaksi dengan pihak berelasi, dan juga memiliki prosedur untuk menyetujui, meninjau, dan memantau transaksi tersebut serta setiap konflik kepentingan yang mungkin timbul. Hal ini bertujuan untuk memastikan transparansi, integritas, dan perlindungan terhadap kepentingan Perusahaan serta Pemegang saham (KPM) dalam setiap interaksi dengan pihak berelasi. The Supervisory Board and Board of Directors adopt and disclose policies regarding transactions with related parties and have procedures to approve, review, and monitor such transactions and any conflicts of interest. This aims to ensure transparency, integrity, and protection of the Company and Shareholders' (KPM) interests in every interaction with related parties.</p>
A.9	Melindungi pemegang saham minoritas dari tindakan sewenang-wenang.	
	Protecting minority shareholders from abusive actions.	
A.9.1	<p>Perusahaan mengungkapkan bahwa TPB dilakukan sedemikian rupa untuk memastikan bahwa TPB tersebut adil dan wajar. The Company discloses that RPTs are conducted in such a way as to ensure that they are fair and at arm's length.</p>	<p>Transaksi pihak berelasi harus disetujui dan dilakukan dengan menghindari konflik kepentingan dan melindungi kepentingan Perusahaan dan Pemegang saham (KPM). Related party transactions must be approved and carried out by avoiding conflicts of interest and protecting the interests of the Company and Shareholders (KPM).</p>
A.9.2	<p>Dalam hal transaksi dengan pihak berelasi harus mendapatkan persetujuan dari pemegang saham, keputusan diambil oleh pemegang saham yang tidak memiliki kepentingan dalam transaksi tersebut. In the case of related party transactions requiring shareholders' approval, the decision is made by disinterested shareholders.</p>	
C	Keberlanjutan dan Ketahanan	
	Sustainability and Resilience	
C.1.	Pengungkapan terkait keberlanjutan harus konsisten, dapat dibandingkan, dan dapat diandalkan, serta mencakup informasi material yang bersifat retrospektif dan berwawasan ke depan yang akan dianggap penting oleh investor yang masuk akal dalam membuat keputusan investasi atau pemungutan suara.	
	Sustainability-related disclosure should be consistent, comparable, and reliable, as well as include retrospective and forward-looking material information that a reasonable investor would consider important in making an investment or voting decision.	
C.1.1.	<p>Perusahaan mengidentifikasi dan melaporkan ESG sebagai salah satu topik yang penting bagi strategi organisasi. The Company identifies and reports ESG topics material to the organization's strategy.</p>	<p>Perusahaan dalam tahapan penyusunan Rencana Bisnis Tahun 2024-2027 yang saat ini masih dalam tahap review dan persetujuan Pemegang saham (KPM). The Company is preparing the 2024-2027 Business Plan, which is currently in the review and shareholder approval (KPM) stage.</p>
C.1.2.	<p>Perusahaan mengidentifikasi perubahan iklim sebagai sebuah isu. The Company identifies climate change as an issue.</p>	<p>Perusahaan telah mengidentifikasi perubahan iklim sebagai bagian dari risiko dan mitigasi risiko Perusahaan terkait ESG. Sebagai sektor konstruksi, Sarana Jaya berupaya mengambil langkah-langkah strategis yang berfokus pada SDGs, salah satunya itu SDGs Nomor 13 terkait Penanganan Perubahan Iklim. The Company has identified climate change as part of the Company's ESG-related risks and risk mitigation. As a company engaging in the construction sector, Sarana Jaya seeks to take strategic steps focusing on SDGs, e.g., SDG 13 related to Handling Climate Change.</p>

No.	Parameter Parameter	Implementasi Implementation
C.1.3.	<p>Perusahaan mengadopsi kerangka atau standar pelaporan keberlanjutan yang diakui secara internasional (yaitu GRI, Pelaporan Terintegrasi, SASB, Standar Pengungkapan Keberlanjutan IFRS). The Company adopts an internationally recognized reporting framework or standard for sustainability (i.e., GRI, Integrated Reporting, SASB, and IFRS Sustainability Disclosure Standards).</p>	<p>Salah satu pedoman penyusunan laporan berkelanjutan Perusahaan mengacu pada GRI <i>Standards</i> "with reference" yang diakui secara global. One of the guidelines for preparing the Company's sustainability report is the globally recognized GRI Standards "with reference".</p>
C.1.4.	<p>Perusahaan mengungkapkan target keberlanjutan kuantitatif. The Company discloses quantitative sustainability targets.</p>	<p>Perusahaan telah mengungkapkan target kinerja keuangan dan pelatihan pengembangan setiap pegawai secara kuantitatif. The Company has disclosed each employee's financial performance targets and quantitative development training.</p>
C.1.5.	<p>Perusahaan mengungkapkan kemajuan kinerja terkait keberlanjutan sehubungan dengan target yang telah ditetapkan sebelumnya. The Company discloses sustainability-related performance progress concerning its previously set targets.</p>	<p>Perusahaan telah mengungkapkan kemajuan kinerja terkait aspek ekonomi dan sosial dalam hal ini pengembangan pegawai sehubungan dengan target yang telah ditetapkan. The Company has disclosed performance progress related to economic and social aspects, i.e., employee development concerning predetermined targets.</p>
C.1.6.	<p>Perusahaan memastikan bahwa Laporan Keberlanjutan dan Pelaporannya telah ditinjau dan/atau disetujui oleh Dewan Pengawas atau Komite di bawah Dewan Pengawas. The Company confirms that its Sustainability Report and Reporting is reviewed and/or approved by the Supervisory Board or Board Committee.</p>	<p>Sebagai salah satu langkah penyusunan laporan keberlanjutan, Perusahaan melakukan proses <i>review</i> dan evaluasi internal yaitu oleh Direksi, Dewan Pengawas dan Divisi terkait. As one of the steps in preparing a sustainability report, the Company carries out an internal review and evaluation process, i.e., by the Board of Directors, Supervisory Board, and related Divisions.</p>
C.2.	<p>Kerangka tata kelola perusahaan harus memungkinkan terjadinya dialog antara perusahaan, pemegang saham, dan pemangku kepentingan untuk bertukar pandangan mengenai masalah keberlanjutan. Corporate governance frameworks should allow dialogue between a company, its shareholders, and stakeholders to exchange views on sustainability matters.</p>	
C.2.1.	<p>Perusahaan melibatkan pemangku kepentingan internal untuk bertukar pandangan dan mengumpulkan umpan balik mengenai permasalahan keberlanjutan yang penting bagi bisnis Perusahaan. The Company engages internal stakeholders to exchange views and gather feedback on sustainability matters that are material to the Company's business.</p>	<p>Kerangka tata kelola perusahaan harus memungkinkan terjadinya dialog antara Perusahaan, pemegang saham, dan pemangku kepentingan untuk bertukar pandangan mengenai permasalahan keberlanjutan yang relevan dengan strategi bisnis Perusahaan dan penilaiannya mengenai hal-hal yang dianggap penting. The corporate governance framework must enable dialogue between the Company, shareholders, and stakeholders to exchange views on sustainability issues relevant to the Company's business strategy and its assessment of matters deemed important.</p>
C.2.2.	<p>Perusahaan melibatkan pemangku kepentingan eksternal untuk bertukar pandangan dan mengumpulkan umpan balik mengenai permasalahan keberlanjutan yang penting bagi bisnis Perusahaan. The Company engages external stakeholders to exchange views and gather feedback on sustainability matters that are material to the Company's business.</p>	
C.3.	<p>Kerangka tata kelola perusahaan harus memastikan bahwa Dewan Pengawas dan Direksi secara memadai mempertimbangkan risiko dan peluang keberlanjutan yang material ketika memenuhi tugas dan fungsi utama dalam meninjau, memantau dan memandu praktik tata kelola, pengungkapan, strategi, manajemen risiko dan sistem pengendalian internal, termasuk yang berkaitan dengan sistem terkait perubahan iklim. The corporate governance framework should ensure that the Supervisory Board and Board of Directors adequately consider material sustainability risks and opportunities when fulfilling their key functions in reviewing, monitoring and guiding governance practices, disclosure, strategy, risk management and internal control systems, including with respect to climate-related physical and transition risks.</p>	
	<p>Dewan Pengawas dan Direksi harus menilai apakah struktur permodalan Perusahaan sesuai dengan tujuan strategis dan selera risiko yang terkait untuk memastikan ketahanannya terhadap berbagai skenario. The Supervisory Board and Board of Directors should assess whether the Company's capital structure is compatible with its strategic goals and associated risk appetite to ensure it is resilient to different scenarios.</p>	
C.3.1	<p>Perusahaan mengungkapkan bahwa Dewan Pengawas dan Direksi meninjau secara tahunan bahwa struktur modal dan utang Perusahaan sesuai dengan tujuan strategis dan selera risiko yang terkait. The Company discloses that the board reviews annually that the Company's capital and debt structure is compatible with its strategic goals and associated risk appetite.</p>	<p>Dewan Pengawas dan Direksi telah meninjau struktur permodalan Perusahaan sesuai dengan tujuan strategisnya dan selera risiko yang terkait untuk memastikan ketahanannya terhadap berbagai skenario. The Supervisory Board and Board of Directors have reviewed the Company's capital structure in line with its strategic objectives and associated risk appetite to ensure its resilience to various scenarios.</p>

No.	Parameter Parameter	Implementasi Implementation
C.4.	<p>Kerangka tata kelola perusahaan harus mengakui hak-hak pemangku kepentingan yang ditetapkan berdasarkan undang-undang atau melalui kesepakatan bersama dan mendorong kerja sama aktif antara Perusahaan dan pemangku kepentingan dalam menciptakan kekayaan, lapangan kerja, dan keberlanjutan Perusahaan yang sehat secara finansial.</p> <p>The corporate governance framework should recognize the rights of stakeholders established by law or through mutual agreements and encourage active cooperation between corporations and stakeholders in creating wealth, jobs, and the sustainability of financially sound enterprises.</p>	
	<p>Perusahaan mengungkapkan kebijakan dan praktik yang membahas tentang: The Company discloses policies and practices that address:</p>	
C.4.1.	<p>Keberadaan dan ruang lingkup paya Perusahaan untuk mengatasi kesejahteraan pelanggan. The existence and scope of the Company's efforts to address customers' welfare.</p>	<p>Perusahaan telah memiliki program peningkatan layanan melalui CRM <i>Dashboard</i> (JAKI) sebagai sistem terintegrasi berbentuk aplikasi <i>mobile</i> dan web yang digunakan oleh Pemerintah Provinsi DKI Jakarta untuk menindaklanjuti laporan warga, serta pusat informasi pelanggan yang dapat diakses oleh seluruh pemangku kepentingan. The Company has a service improvement program through the CRM Dashboard (JAKI) as an integrated system in the form of mobile and web apps used by the DKI Jakarta Provincial Government to follow up on citizen reports and a customer information center that all stakeholders can access.</p>
C.4.2.	<p>Prosedur pemilihan pemasok. Supplier/contractor selection procedures.</p>	<p>Perusahaan telah memiliki prosedur pemilihan pemasok yang diatur dalam Peraturan Direksi No. 71 Tahun 2022 tentang Pedoman Pengadaan Barang/Jasa. Pembahasan terkait hal ini telah diungkapkan pada Laporan Tahunan 2023 Bab Tata Kelola Perusahaan Subbab Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa dan Seleksi Pemasok. The Company has a supplier selection procedure regulated in Board of Directors Regulation No. 71 of 2022 on Goods/ Services Procurement Guidelines. Discussion regarding this matter has been disclosed in the 2023 Annual Report, Corporate Governance Chapter, Goods/Services Procurement Policy, and Supplier Selection Subchapter.</p>
C.4.3.	<p>Upaya Perusahaan untuk memastikan rantai nilainya ramah lingkungan atau konsisten dengan mendorong pembangunan berkelanjutan. The Company's efforts to ensure that its value chain is environmentally friendly or is consistent with promoting sustainable development.</p>	<p>Sebagai bagian dari strategi keberlanjutannya, Perusahaan melakukan perubahan dan perluasan fungsi dan peranannya dengan membuat Rencana Bisnis Tahun 2024-2027 Berbasis <i>Environmental, Social dan Governance</i> (ESG) yang saat ini masih dalam tahap <i>review</i> dan persetujuan Pemegang saham (KPM). As part of its sustainability strategy, the Company is making changes and expanding its functions and roles by creating a 2024-2027 Business Plan based on Environmental, Social, and Governance (ESG), currently in the review and shareholder approval (KPM) stage.</p>
C.4.4.	<p>Upaya Perusahaan untuk berinteraksi dengan masyarakat di sekitar wilayah bisnis. The Company's efforts to interact with the communities in which they business areas.</p>	<p>Perusahaan senantiasa berupaya untuk berinteraksi dengan masyarakat di sekitar wilayah bisnis, antara lain melalui kegiatan TJSL (CSR) yang dilaksanakan oleh Perusahaan, serta pada forum warga. Di samping itu Perusahaan juga membuka saluran pengaduan bagi masyarakat. The Company strives to interact with communities around its business areas, including through TJSL (CSR) activities and at community forums. In addition, the Company has opened a complaint channel for the public.</p>
C.4.5.	<p>Program dan prosedur anti-korupsi Perusahaan. The Company's anti-corruption programs and procedures.</p>	<p>Perusahaan telah memiliki prosedur anti-korupsi dengan mengadopsi SNI ISO 37001:2016 tentang Sistem Manajemen Anti Penyuapan (SMAP) yang ditetapkan dalam Surat Keputusan (SK) Direksi No. 51 Tahun 2021 yang diperbarui dengan SK Direksi No. 87 Tahun 2022 perihal Pedoman Penerapan Sistem Manajemen Anti Penyuapan (SMAP) di Perumda Sarana Jaya sesuai dengan ISO 37001:2016. The Company has anti-corruption procedures by adopting SNI ISO 37001:2016 on Anti-Bribery Management Systems (SMAP) as stipulated in Board of Directors Decree No. 51 of 2021, which was updated with Board of Directors Decree No. 87 of 2022 on Guidelines for Implementing the Anti-Bribery Management System (SMAP) at Perumda Sarana Jaya per ISO 37001:2016.</p>

No.	Parameter Parameter	Implementasi Implementation
C.4.6.	Perlindungan hak-hak kreditur. Safeguarding creditors' rights.	Perusahaan senantiasa berupaya untuk memenuhi hak-hak kreditur. Pembahasan tentang hal ini telah diungkapkan pada Laporan Tahunan 2023 Bab Tata Kelola Perusahaan Subbab Upaya Pemenuhan Hak-Hak Kreditur. The Company strives to fulfill creditor rights. This matter has been discussed in the 2023 Annual Report, Corporate Governance Chapter, Efforts to Fulfill Creditor Rights Subchapter.
C.4.7.	Perusahaan mempunyai laporan atau bagian terpisah yang membahas upaya dalam mengurangi isu lingkungan, ekonomi dan sosial. The Company has a separate report/section that discusses its efforts to address environmental, economic, and social issues.	Perusahaan telah menyusun Laporan Tahunan dan Laporan Keberlanjutan Tahun 2023. The Company has prepared an Annual Report and Sustainability Report for 2023.
C.5	Apabila kepentingan pemangku kepentingan dilindungi oleh undang-undang, maka pemangku kepentingan harus mempunyai kesempatan untuk mendapatkan kompensasi atas pelanggaran hak-haknya. If stakeholder interests are protected by law, stakeholders should have the opportunity to obtain effective redress for violation of their rights.	
C.5.1	Perusahaan memberikan informasi rinci tentang kontak Perusahaan melalui situs web resmi atau Laporan Tahunan yang dapat digunakan oleh pemangku kepentingan (misalnya pelanggan, pemasok, masyarakat umum, dan sebagainya) untuk menyampaikan laporan dan/atau keluhan atas kemungkinan pelanggaran hak-haknya. The Company provides detailed contact details via the Company's website or Annual Report, which stakeholders (e.g., customers, suppliers, the general public, etc.) can use to voice their concerns and/or complaints for possible violation of their rights.	Perusahaan telah memberikan informasi rinci tentang kontak Perusahaan melalui situs web resmi Perusahaan atau Laporan Tahunan yang dapat digunakan oleh pemangku kepentingan. The Company has provided detailed information about Company contacts through the Company's official website or Annual Report, which stakeholders can use.
C.6.	Mekanisme partisipasi karyawan harus dibiarkan berkembang. Mechanisms for employee participation should be permitted to develop.	
C.6.1	Perusahaan secara eksplisit mengungkapkan kebijakan dan praktik mengenai kesehatan, keselamatan, dan kesejahteraan karyawannya. The Company explicitly discloses the policies and practices on its employees' health, safety, and welfare.	Perusahaan telah mengungkapkan kebijakan dan praktik mengenai kesehatan, keselamatan, dan kesejahteraan karyawan pada Laporan Tahunan dan Laporan Keberlanjutan Tahun 2023. The Company has disclosed policies and practices regarding employee health, safety, and welfare in the 2023 Annual Report and Sustainability Report.
C.6.2	Perusahaan secara eksplisit mengungkapkan kebijakan dan praktik program pelatihan dan pengembangan kompetensi bagi karyawannya. The Company explicitly discloses the policies and practices of employee training and development programs.	Perusahaan telah mengungkapkan kebijakan dan praktik program pelatihan dan pengembangan kompetensi bagi karyawannya, pada Laporan Tahunan 2023. The Company has disclosed the policies and practices of training and competency development programs for its employees in the 2023 Annual Report.
C.6.3	Perusahaan memiliki kebijakan penghargaan dan kompensasi jangka panjang yang memperhitungkan kinerja keuangan Perusahaan. The Company has a long-term reward/compensation policy that accounts for the financial performance of the Company.	Sebagai sebuah Perumda, Perusahaan tidak menerapkan program kompensasi jangka panjang berbasis kinerja dalam bentuk program kepemilikan saham oleh manajemen (<i>Management Stock Ownership Program/MSOP</i>) dan program kepemilikan saham oleh karyawan (<i>Employee Stock Ownership Program/ESOP</i>). As a Perumda, the Company does not implement a long-term performance-based compensation program in the form of a management stock ownership program (MSOP) or an employee stock ownership program (ESOP).
C.7	Pemangku kepentingan termasuk karyawan secara individu dan organisasi tenaga kerja (Serikat Pekerja) yang mewakilinya, harus dapat dengan bebas mengomunikasikan kekhawatiran tentang praktik ilegal atau tidak etis kepada Dewan Pengawas dan Direksi. Perusahaan harus memperhatikan hak-hak pemangku kepentingan. Stakeholders, including individual employee and their representative bodies (Labor Union), should be able to freely communicate their concerns about illegal or unethical practices to the Supervisory Board and Board of Directors. The Company must pay attention to stakeholders' rights.	

No.	Parameter Parameter	Implementasi Implementation
C.71	Perusahaan memiliki kebijakan <i>whistleblowing</i> yang mencakup tata cara pengaduan karyawan dan pemangku kepentingan lainnya mengenai dugaan perilaku ilegal dan tidak etis serta memberikan rincian kontak melalui situs web Perusahaan atau laporan tahunan. The Company has a whistleblowing policy, which includes procedures for employee and stakeholder complaints concerning alleged illegal and unethical behavior. It also provides contact details via the Company's website or annual report.	Perusahaan memiliki Pedoman Sistem Pelaporan Pelanggaran, dalam upaya menanggapi dan memenuhi kebutuhan pengembangan etika, Direksi dan Dewan Pengawas. Pedoman ini diatur dalam Keputusan Direksi Perusahaan Umum Daerah Pembangunan Sarana Jaya DKI Jakarta No. 22 Tahun 2022 tentang Pedoman Investigatif atas Pelaporan Melalui Sistem Pelaporan Pelanggaran (<i>Whistleblowing System</i>) di Lingkungan Perusahaan Umum Daerah Pembangunan Sarana Jaya. The Company has Guidelines for the Whistleblowing System to respond to and fulfill the ethical development needs of the Board of Directors and Supervisory Board. The guidelines are regulated in the Decree of the Board of Directors of Perusahaan Umum Daerah Pembangunan Sarana Jaya DKI Jakarta No. 22 of 2022 on the Investigative Guidelines for Reporting Through the Whistleblowing System within Perusahaan Umum Daerah Pembangunan Sarana Jaya.
C.72	Perusahaan memiliki kebijakan atau prosedur untuk melindungi karyawan atau orang yang mengungkap dugaan perilaku ilegal dan tidak etis dari tindakan pembalasan. The Company has a policy or procedures to protect an employee/person who reveals alleged illegal/unethical behavior from retaliation.	
D	Pengungkapan dan Transparansi Disclosure and Transparency	
D.1	Transparansi tentang Struktur Kepemilikan Transparent ownership structure	
D.1.1	Informasi kepemilikan saham memperlihatkan identitas <i>beneficial owner</i> , memiliki 5% atau lebih saham Perusahaan. The information on shareholdings reveals the identity of beneficial owners, holding 5% shareholding or more.	Perusahaan 100% dimiliki oleh Pemerintah Provinsi DKI Jakarta. The Company is 100% owned by the DKI Jakarta Provincial Government.
D.1.2	Perusahaan mengungkapkan saham utama/pengendali baik secara langsung maupun tidak langsung. The Company discloses the direct and indirect (deemed) shareholdings of major and/or substantial shareholders,	Perusahaan telah mengungkapkan tentang hal ini pada Laporan Tahunan Perusahaan Tahun 2023, Bab Profil Perusahaan. The Company has disclosed this in the Company's 2023 Annual Report, Company Profile Chapter.
D.1.3	Perusahaan mengungkapkan kepemilikan saham Dewan Pengawas dan Direksi baik secara langsung maupun tidak langsung. The Company discloses the direct and indirect (deemed) shareholdings of the Supervisory Board and Board of Directors.	
D.1.4	Perusahaan mengungkapkan kepemilikan saham oleh manajemen senior baik secara langsung maupun tidak langsung. The Company discloses senior management's direct and indirect (deemed) shareholdings.	Saham perusahaan tidak dimiliki oleh manajemen senior. Senior management does not own company shares.
D.1.5	Perusahaan mengungkapkan struktur grup korporasi, termasuk entitas induk, entitas anak, entitas asosiasi, SPV dan lainnya. The Company discloses corporate group structure, including the parent/holding company, subsidiaries, associates, SPVs, etc.	Perusahaan telah mengungkapkan tentang hal ini pada Laporan Tahunan Perusahaan Tahun 2023, Bab Profil Perusahaan. The Company has disclosed this in the Company's 2023 Annual Report, Company Profile Chapter.
D.2	Kualitas Laporan Tahunan Quality of Annual Report	
	Laporan tahunan perusahaan mengungkapkan hal-hal berikut: The Company's annual report discloses the following items:	
D.2.1	Tujuan Perusahaan Corporate objectives	Laporan Tahunan Perusahaan Tahun 2023, Bab Profil Perusahaan Subbab Visi dan Misi. The 2023 Annual Report, Company Profile Chapter, Vision and Mision Subchapter.

No.	Parameter Parameter	Implementasi Implementation
D.2.2	Indikator kinerja keuangan. Financial performance indicators	Laporan Tahunan Perusahaan Tahun 2023, Bab Analisis dan Pembahasan Manajemen. The 2023 Annual Report, Management Analysis and Discussion Chapter.
D.2.3	Indikator kinerja non keuangan. Non-financial performance indicators.	Laporan Tahunan Perusahaan Tahun 2023, Bab Profil Perusahaan dan Bab Tata Kelola Perusahaan. The 2023 Annual Report, Company Profile Chapter and Corporate Governance Chapter.
D.2.4	Kebijakan dividen Dividend policy	Laporan Tahunan Perusahaan Tahun 2023 Bab Analisis dan Pembahasan Manajemen. The 2023 Annual Report, Management Analysis and Discussion Chapter.
D.2.5	Perusahaan mengungkapkan biografi lengkap (paling tidak umur, kualifikasi, tanggal pengangkatan pertama kali, pengalaman dan rangkap jabatan) Dewan Pengawas dan Direksi. The Company discloses biographical details (at least age, academic qualifications, date of first appointment, relevant experience, and any other directorships of listed companies) of the Supervisory Board and Board of Directors.	Laporan Tahunan Perusahaan Tahun 2023, Bab Profil Perusahaan, Subbab Profil Dewan Pengawas dan Subbab Profil Direksi. The 2023 Annual Report, Company Profile Chapter, Supervisory Board's Profile Subchapter, and Board of Directors' Profile Subchapter.
	Pernyataan Konfirmasi Tata Kelola Perusahaan Corporate Governance Confirmation Statement	
D.2.6	Perusahaan mengungkapkan kepatuhannya pada pedoman <i>corporate governance</i> , dan jika tidak mematuhi memberikan penjelasan. The Company discloses its full compliance with the corporate governance code; where there is noncompliance, identify and explain reasons for each such issue.	Laporan Tahunan Perusahaan Tahun 2023, Bab Tata Kelola Perusahaan, Subbab Kesesuaian Penerapan Corporate Governance Sesuai Dengan Asean Corporate Governance Scorecard dan Subbab Penerapan atas Pedoman Tata Kelola Perusahaan Sesuai SEOJK NO. 16/SEOJK.04/2021. The 2023 Annual Report, Corporate Governance Chapter, Subchapter on Corporate Governance Implementation Conformity with ASEAN Corporate Governance Scorecard and Subchapter on Corporate Governance Guidelines Implementation Per SEOJK NO. 16/SEOJK.04/2021.
D.3	Remunerasi Anggota Dewan Pengawas dan Direksi Remuneration of Members of the Supervisory Board and Board of Directors	
D.3.1	Perusahaan mengungkapkan struktur remunerasi untuk Dewan Pengawas dan Direksi. The Company discloses the fee structure for the Supervisory Board and Board of Directors.	Laporan Tahunan Perusahaan Tahun 2023, Bab Tata Kelola Perusahaan. The 2023 Annual Report, Corporate Governance Chapter.
D.3.2	Perusahaan mengungkapkan secara publik (yaitu laporan tahunan atau dokumen lain yang diungkapkan kepada publik) rincian remunerasi masing-masing Dewan Pengawas dan Direksi. The Company publicly discloses [i.e., annual report or other publicly disclosed documents] remuneration details of each Supervisory Board and Board of Directors.	Laporan Tahunan Perusahaan Tahun 2023, Bab Tata Kelola Perusahaan. The 2023 Annual Report, Corporate Governance Chapter.
D.3.3	Perusahaan mengungkapkan kebijakan dan struktur remunerasi (gaji, tunjangan, tunjangan dan imbalan lainnya), serta insentif dan imbal jasa kinerja jangka pendek dan jangka panjang untuk Direktur Eksekutif. The Company discloses its remuneration (fees, allowances, benefit-in-kind, and other emoluments) policy/practices, including the use of short- and long-term incentives and performance measures) for its Executive Directors.	Laporan Tahunan Perusahaan Tahun 2023, Bab Tata Kelola Perusahaan. The 2023 Annual Report, Corporate Governance Chapter.
D.3.4	Perusahaan mengungkapkan secara publik (yaitu laporan tahunan atau dokumen lain yang diungkapkan secara publik) rincian remunerasi masing-masing Direktur Eksekutif dan CEO (jika bukan anggota Dewan). The Company publicly discloses [i.e., annual report or other publicly disclosed documents] the details of the remuneration of each of the Executive Directors and CEO [if they are not a member of the Board].	Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara. Public Official Asset Declaration.

No.	Parameter Parameter	Implementasi Implementation
D.4	Pengungkapan Transaksi Pihak Berelasi (TPB) Disclosure of Related Party Transactions (RPT)	
D.4.1	Perusahaan mengungkapkan kebijakan terkait dengan mekanisme peninjauan dan persetujuan akan transaksi dengan pihak berelasi yang material. The Company discloses its policy covering reviewing and approving material-related party transactions.	Laporan Tahunan Perusahaan Tahun 2023, Bab Analisis dan Pembahasan Manajemen. The 2023 Annual Report, Management Analysis and Discussion Chapter.
D.4.2	Perusahaan mengungkapkan nama-nama pihak dan jenis hubungan, sifat dan nilai transaksi dengan pihak berelasi. The Company discloses the name, relationship, nature, and value of related party transactions.	Laporan Tahunan Perusahaan Tahun 2023, Bab Analisis dan Pembahasan Manajemen. The 2023 Annual Report, Management Analysis and Discussion Chapter.
D.5	Direksi dan Dewan Pengawas terkait dengan saham Perusahaan Board of Directors and Supervisory Board dealings in shares of the Company	
D.5.1	Perusahaan mengungkapkan perdagangan saham Perusahaan yang dilakukan oleh orang dalam. The Company discloses insiders trading in the Company's shares.	Laporan Tahunan Perusahaan Tahun 2023, Bab Tata Kelola Perusahaan. The 2023 Annual Report, Corporate Governance Chapter.
D.6	Auditor Eksternal dan Laporan Auditor External auditor and Auditor Report	
D.6.1	Perusahaan mengungkapkan biaya audit dan non audit. The Company discloses the audit and non-audit fees.	Laporan Tahunan Perusahaan Tahun 2023, Bab profil Perusahaan, Subbab Lembaga Dan Profesi Penunjang Perusahaan. The 2023 Annual Report, Company Profile Chapter, Institutions and Professionals Supporting the Company Subchapter.
D.6.2	Biaya non audit tidak melebihi biaya audit. The non-audit fee does not exceed the audit fees.	Tidak terdapat biaya non audit. There are no non-audit fees.
D.7	Media Komunikasi Medium of communications	
D.7.1	Perusahaan memiliki media komunikasi pelaporan kuartalan. The Company has a quarterly reporting communication media.	Perusahaan memiliki Laporan Triwulan tetapi tidak terdapat regulasi yang mewajibkan Perusahaan untuk mempublikasikan laporan tersebut. The Company has a Quarterly Report, but no regulations require the Company to publish the report.
D.7.2	Perusahaan memiliki situs web. The Company has a website.	Perusahaan memiliki situs web resmi dan telah diungkap dalam Laporan Tahunan Perusahaan Tahun 2023, Bab Profil Perusahaan, Subbab Informasi Pada Situs Web Perusahaan. The Company has an official website and has disclosed this in the 2023 Annual Report, Company Profile Chapter, Information on the Company Website Subchapter.
D.7.3	Perusahaan menyelenggarakan <i>analyst briefing</i> . The Company holds analyst briefings.	Perusahaan tidak menyelenggarakan <i>analyst briefing</i> karena Perusahaan bukan perusahaan terbuka yang menjual sahamnya kepada publik. The Company does not hold analyst briefings because it is not a public company that sells its shares to the public.
D.7.4	Perusahaan menyelenggarakan <i>press conferences</i> . The Company holds press conferences.	Perusahaan menyelenggarakan <i>press conferences</i> dan telah diungkapkan pada Laporan Tahunan Tahun 2023. The Company held press conferences, which were disclosed in the 2023 Annual Report.
D.8	Penyampaian Laporan Tahunan yang tepat waktu Timely filing/release of annual/financial reports	
D.8.1	Laporan Keuangan yang telah diaudit diterbitkan dalam waktu 120 hari dari tahun buku. The audited annual financial report/statement is released within 120 days from the financial year-end.	Laporan Keuangan Perusahaan telah diterbitkan dalam waktu 120 hari dari tahun buku. The Company's Financial Statement has been published within 120 days of the fiscal year.
D.8.2	Laporan tahunan diterbitkan dalam waktu 120 hari sejak akhir tahun keuangan. The annual report is released within 120 days from the financial year's end.	Laporan tahunan telah diterbitkan dalam waktu 120 hari sejak akhir tahun keuangan. The annual report has been published within 120 days of the end of the fiscal year.

No.	Parameter Parameter	Implementasi Implementation
D.8.3	Laporan tahunan dan laporan keuangan dipertanggungjawabkan secara benar dan wajar oleh Direksi dan Dewan Pengawas. The true and fairness/fair representation of the annual financial statement/reports affirmed by the Board of Directors and Supervisory Board.	Laporan tahunan dan laporan keuangan telah ditandatangani dan dipertanggungjawabkan secara benar dan wajar oleh Direksi dan Dewan Pengawas. The annual report and financial statements have been signed and accounted for correctly and fairly by the Board of Directors and Supervisory Board.
D.9	Situs Web Perusahaan Company website	
	Perusahaan memiliki situs web yang mengungkapkan informasi terkini mengenai hal-hal berikut: The Company has a website disclosing up-to-date information on the following:	
D.9.1	Laporan/laporan keuangan (triwulanan terbaru). Financial statements/reports (latest quarterly).	Perusahaan memiliki Laporan Triwulan tetapi tidak terdapat regulasi yang mewajibkan Perusahaan untuk mempublikasikan laporan tersebut. The Company has a Quarterly Report, but no regulations require the Company to publish the report.
D.9.2	Materi diberikan dalam <i>briefing</i> kepada analis dan media. Materials were provided in briefings to analysts and the media.	Perusahaan melaksanakan <i>press conference</i> dan mempublikasikannya pada situs web Perusahaan. The Company holds press conferences and publishes them on the Company's website.
D.9.3	Laporan tahunan yang dapat diunduh. Downloadable annual report.	Laporan Tahunan dan Laporan Keberlanjutan Perusahaan selama tiga tahun terakhir dapat diunduh pada situs web resmi Perusahaan yang dapat diakses pada <i>link</i> berikut ini https://www.sarana-jaya.co.id/corporate . The Company's Annual Report and Sustainability Report for the last three years can be downloaded on the Company's official website, which can be accessed at the following link: https://www.sarana-jaya.co.id/corporate .
D.9.4	Pemanggilan RUPS dan/atau RUPSLB. Notice of AGM and/or EGM.	Sebagai Perumda milik Pemerintah Provinsi DKI Jakarta, tidak terdapat regulasi yang mewajibkan Perusahaan untuk mempublikasi hal-hal tersebut.
D.9.5	Risalah RUPS dan/atau RUPSLB. Minutes of AGM and/or EGM.	As a Perumda belonging to the DKI Jakarta Provincial Government, no regulations require the Company to publish these matters.
D.9.6	Anggaran Dasar Perusahaan. Company's articles of association.	
D.10	Hubungan Investor Investor relations	
D.10.1	Perusahaan mengungkapkan informasi rinci tentang kontak Perusahaan (telepon, faksimile, dan <i>email</i>) dari bagian/pejabat yang bertanggung jawab terhadap kegiatan hubungan investor. The Company discloses the contact details (e.g., telephone, fax, and email) of the officer/office responsible for investor relations.	Laporan Tahunan Perusahaan Tahun 2023 dan situs web resmi. The 2023 Annual Report and official website.
E	Tanggung Jawab Dewan Pengawas dan Direksi Responsibilities of the Supervisory Board and Board of Directors	
E.1	Tugas dan Tanggung Jawab Dewan Pengawas dan Direksi Supervisory Board and Board of Directors Duties and Responsibilities	
	Perusahaan memiliki aturan tentang tanggung jawab dewan dan kebijakan tata kelola perusahaan yang jelas: The Company has clearly defined board responsibilities and corporate governance policy:	
E.1.1	Perusahaan mengungkapkan kebijakan tata kelola perusahaan termasuk <i>Board Charter</i> . The Company discloses its corporate governance policy, including the Board Charter.	Perusahaan telah mengungkapkan hal ini pada Laporan Tahunan 2023 Bab Tata Kelola Perusahaan. The Company has disclosed this in the 2023 Annual Report, Corporate Governance Chapter.
E.1.2	Perusahaan mengungkapkan jenis-jenis keputusan yang perlu mendapat persetujuan Dewan Pengawas. The Company discloses the types of decisions requiring the Supervisory Board's approval.	Perusahaan telah mengungkapkan hal ini pada Laporan Tahunan 2023 Bab Tata Kelola Perusahaan. The Company has disclosed this in the 2023 Annual Report, Corporate Governance Chapter.
E.1.3	Perusahaan mengungkapkan peran dan tanggung jawab Dewan Pengawas dan Direksi. The Company discloses the roles and responsibilities of the Supervisory Board and Board of Directors.	Perusahaan telah mengungkapkan peran dan tanggung jawab Dewan Pengawas dan Direksi pada Laporan Tahunan Perusahaan Tahun 2023, Bab Tata Kelola Perusahaan. The Company has disclosed the roles and responsibilities of the Supervisory Board and Board of Directors in the 2023 Annual Report, Corporate Governance Chapter.

No.	Parameter Parameter	Implementasi Implementation
Visi/Misi Perusahaan Corporate Vision/Mission		
E.1.4	Perusahaan mengungkapkan pernyataan tentang visi dan misi terbaru. The Company has an updated vision and mission statement.	Perusahaan telah mengungkapkan pernyataan tentang visi dan misi terbaru pada Laporan Tahunan Perusahaan Tahun 2023, Bab Profil Perusahaan. The Company has disclosed a statement regarding its latest vision and mission in the 2023 Annual Report, Company Profile Chapter.
E.1.5	Direksi berperan utama dalam proses pengembangan dan peninjauan strategi Perusahaan setiap tahun. The Board of Directors has a leading role in developing and reviewing the Company's strategy annually.	Direksi memiliki tugas dan tanggung jawab dalam proses pengembangan dan peninjauan strategi Perusahaan setiap tahun. The Board of Directors has duties and responsibilities in developing and reviewing the Company's strategy every year.
E.1.6	Direksi memiliki prosedur untuk meninjau, memantau dan mengawasi penerapan strategi Perusahaan. The Board of Directors has a process to review, monitor, and oversee the implementation of the corporate strategy.	Direksi memiliki prosedur untuk meninjau, memantau dan mengawasi penerapan strategi Perusahaan. The Board of Directors has procedures to review, monitor, and supervise the implementation of the Company's strategy.
E.2 Struktur Dewan Pengawas dan Direksi Supervisory Board and Board of Directors Structure		
Kode Etik dan Perilaku Code of Ethics or Conduct		
E.2.1	Perusahaan mengungkapkan tentang Kode Etik dan Perilaku. The Company discloses the code of ethics or conduct.	Perusahaan memiliki aturan tentang Kode Etik dan Perilaku dan telah diungkapkan pada Laporan Tahunan 2023 Bab Tata Kelola Perusahaan. The Company has rules regarding a Code of Conduct, which have been disclosed in the 2023 Annual Report, Corporate Governance Chapter.
E.2.2	Perusahaan mengharuskan seluruh Dewan Pengawas, Direksi dan Pejabat Eksekutif dan karyawan untuk mematuhi Kode Etik dan Perilaku. The Company requires all Supervisory Board, Board of Directors, Executive Officers, and employees to comply with the code/s of ethics or conduct.	Perusahaan telah mengharuskan seluruh Dewan Pengawas, Direksi dan Pejabat Eksekutif dan karyawan untuk mematuhi Kode Etik. Hal ini telah diungkapkan pada Laporan Tahunan Perusahaan Tahun 2022, Bab Tata Kelola Perusahaan. The Company has required all Supervisory Board, Board of Directors, Executive Officers, and employees to comply with the Code of Conduct. This has been disclosed in the 2022 Annual Report, Corporate Governance Chapter.
E.2.3	Perusahaan memiliki kebijakan dan prosedur untuk menerapkan dan memantau kepatuhan terhadap kode etik. The Company has a process to implement and monitor compliance with the code/s of ethics or conduct.	Perusahaan memiliki kebijakan dan prosedur untuk menerapkan dan memantau kepatuhan terhadap kode etik. Hal ini telah diungkapkan pada Laporan Tahunan Perusahaan Tahun 2022, Bab Tata Kelola Perusahaan. The Company has policies and procedures to implement and monitor compliance with the code of ethics. This has been disclosed in the 2022 Annual Report, Corporate Governance Chapter.
Struktur dan Komposisi Dewan Pengawas dan Direksi Supervisory Board and Board of Directors Structure and Composition		
E.2.4	Jumlah Direktur/Dewan Pengawas Independen minimal 50% dari jumlah seluruh anggota Dewan Pengawas dan Direksi. Independent Directors/Supervisory Board members make up at least 50% of the Supervisory Board and Board of Directors.	Sesuai dengan aturan berlaku, Perusahaan tidak memiliki Dewan Pengawas Independen. Per applicable regulations, the Company does not have Independent Supervisory Board members.
E.2.5	Perusahaan mempunyai batasan masa jabatan sembilan tahun atau kurang atau dua kali masa jabatan masing-masing lima tahun untuk Direktur/Dewan Pengawas Independen. The Company has a term limit of nine years or less or two terms of five years each for its Independent Director/Supervisory Board member.	Sesuai dengan regulasi yang berlaku, Perusahaan mempunyai batasan masa jabatan untuk Direktur/Dewan Pengawas Independen. The Company has term limits for Independent Directors/Supervisory Board members per applicable regulations.
E.2.6	Perusahaan telah menetapkan batasan rangkap jabatan paling banyak 5 jabatan yang bisa dirangkap oleh Dewan Pengawas dan Direksi. The Company sets a limit of five board seats that an Independent Director/Supervisory Board member may hold simultaneously.	Batasan jabatan rangkap Dewan Pengawas dan Direksi telah diatur dalam regulasi Pemerintah Provinsi DKI Jakarta. The limits on the dual positions of the Supervisory Board and Board of Directors have been regulated in DKI Jakarta Provincial Government regulations.

No.	Parameter Parameter	Implementasi Implementation
E.2.7	Perusahaan tidak memiliki anggota Direksi yang merangkap jabatan di lebih dari 2 perusahaan di kelompok usaha Perusahaan. The Company has any Board of Directors member serve on more than two boards of listed companies outside the group.	Perusahaan tidak memiliki anggota Direksi yang merangkap jabatan di lebih dari 2 perusahaan di kelompok usaha Perusahaan. The Company does not have Board of Directors members who hold concurrent positions in more than two companies in the Company's business group.
Komite Nominasi Nominating Committee		
E.2.8	Perusahaan mempunyai Komite Nominasi. The Company has a Nominating Committee.	Perusahaan mempunyai Komite Nominasi dan Remunerasi. Informasi rinci terkait komite ini telah diungkapkan pada Laporan Tahunan Tahun 2022, Bab Tata Kelola Perusahaan, Subbab Komite Nominasi, Remunerasi.
E.2.9	Komite Nominasi terdiri dari mayoritas Dewan Pengawas Independen. The Nominating Committee is comprised of a majority of Independent Supervisory Board members.	The Company has a Nomination and Remuneration Committee. Detailed information regarding this committee has been disclosed in the 2022 Annual Report, Corporate Governance Chapter, Nomination, Remuneration Committee Subchapter.
E.2.10	Ketua Komite Nominasi adalah Dewan Pengawas Independen. The chairman of the Nominating Committee is an Independent Supervisory Board member.	
E.2.11	Perusahaan mengungkapkan kerangka acuan/struktur tata kelola/piagam Komite Nominasi. The Company discloses the terms of reference/governance structure/charter of the Nominating Committee.	
E.2.12	Perusahaan mengungkapkan jumlah rapat Komite Nominasi dalam Laporan Tahunan. Komite Nominasi menyelenggarakan rapat minimum 2 kali dalam 1 tahun. The Company discloses the meeting attendance of the Nominating Committee in the Annual Report. The Committee meets at least twice during the year.	
Komite Remunerasi Remuneration Committee/Compensation Committee		
E.2.13	Perusahaan mempunyai Komite Remunerasi. The Company has a Remuneration Committee.	Perusahaan mempunyai Komite Nominasi dan Remunerasi. Informasi rinci terkait komite ini telah diungkapkan pada Laporan Tahunan Tahun 2022, Bab Tata Kelola Perusahaan, Subbab Komite Nominasi, Remunerasi.
E.2.14	Komite Remunerasi terdiri dari mayoritas Dewan Pengawas Independen. The Remuneration Committee is comprised of a majority of Independent Supervisory Board members.	The Company has a Nomination and Remuneration Committee. Detailed information regarding this committee has been disclosed in the 2022 Annual Report, Corporate Governance Chapter, Nomination, Remuneration Committee Subchapter.
E.2.15	Ketua Komite Remunerasi adalah Dewan Pengawas Independen. The chairman of the Remuneration Committee is an Independent Supervisory Board member.	
E.2.16	Perusahaan mengungkapkan kerangka acuan/struktur tata kelola/piagam Komite Remunerasi. The Company discloses the terms of reference/governance structure/charter of the Remuneration Committee.	
E.2.17	Perusahaan mengungkapkan jumlah rapat Komite Nominasi dalam Laporan Tahunan. Komite Nominasi menyelenggarakan rapat minimum 2 kali dalam 1 tahun. The Company discloses the meeting attendance of the Remuneration Committee in the Annual Report. The Committee meets at least twice during the year.	
Komite Audit Audit Committee		

No.	Parameter Parameter	Implementasi Implementation
E.2.18	Perusahaan mempunyai Komite Audit. The Company has an Audit Committee.	Perusahaan mempunyai Komite Audit. Informasi rinci terkait komite ini telah diungkapkan pada Laporan Tahunan Tahun 2022, Bab Tata Kelola Perusahaan, Subbab Komite Nominasi, Remunerasi.
E.2.19	Komite Audit terdiri dari mayoritas Dewan Pengawas Independen. The Audit Committee is comprised of a majority of Independent Supervisory Board members.	The Company has an Audit Committee. Detailed information regarding this committee has been disclosed in the 2022 Annual Report, Corporate Governance Chapter, Audit Committee Subchapter.
E.2.20	Ketua Komite Audit adalah Dewan Pengawas Independen. The chairman of the Audit Committee is an Independent Supervisory Board member.	
E.2.21	Perusahaan mengungkapkan kerangka acuan/struktur tata kelola/piagam Komite Audit. The Company discloses the terms of reference/governance structure/charter of the Audit Committee.	
E.2.22	Paling tidak salah satu dari anggota Komite Audit yang juga merangkap sebagai Direktur/Dewan Pengawas Independen) memiliki keahlian dan pengalaman di bidang Akuntansi. At least one of the Audit Committee members, an Independent Director/Supervisory Board member, has accounting qualifications or experience.	
E.2.23	Perusahaan mengungkapkan kehadiran anggota dalam rapat Komite Audit. Komite Audit menyelenggarakan rapat paling tidak sebanyak 4 kali dalam 1 tahun. The Company discloses the attendance at the Audit Committee meeting. The Committee meets at least four times during the year.	
E.2.24	Komite Audit mempunyai tanggung jawab utama untuk memberikan rekomendasi mengenai penunjukan dan pemberhentian auditor eksternal. The Audit Committee is primarily responsible for recommending the appointment and removal of the external auditor.	
E.3	Prosedur Kerja Dewan Pengawas dan Direksi Supervisory Board and Board of Directors Processes	
	Rapat Dewan Pengawas dan Direksi serta kehadiran Supervisory Board and Board of Directors meetings and attendance	
E.3.1	Rapat Dewan Pengawas dan Direksi dijadwalkan sebelum awal tahun keuangan. The Supervisory Board and Board of Directors meetings are scheduled before the start of the financial year.	Rapat Dewan Pengawas dan Direksi dijadwalkan sebelum awal tahun keuangan. Supervisory Board and Board of Directors meetings are scheduled before the start of the fiscal year.
E.3.2	Dewan Pengawas dan Direksi mengadakan pertemuan minimal enam kali dalam setahun. The Supervisory Board and Board of Directors meet at least six times yearly.	Dewan Pengawas dan Direksi mengadakan pertemuan lebih dari enam kali pada tahun 2023. The Supervisory Board and Board of Directors had over six meetings in 2023.
E.3.3	Setiap anggota Dewan Pengawas dan Direksi paling sedikit menghadiri 75% dari seluruh rapat Dewan Pengawas dan Direksi yang diadakan sepanjang tahun. Each Supervisory Board and Board of Directors member attended at least 75% of all the meetings held during the year.	Seluruh anggota Dewan Pengawas dan Direksi menghadiri 100% dari rapat yang diadakan pada tahun 2023. All members of the Supervisory Board and Board of Directors attended 100% of meetings held in 2023.
E.3.4	Perusahaan memiliki kebijakan kuorum minimum minimal 2/3 untuk pengambilan keputusan dalam rapat Dewan Pengawas dan Direksi. The Company requires a minimum quorum of at least 2/3 for decision-making in Supervisory Board and Board of Directors meetings.	Perusahaan memiliki kebijakan kuorum minimum minimal 2/3 untuk pengambilan keputusan dalam rapat Dewan Pengawas dan Direksi. The Company has a minimum quorum policy of at least 2/3 for decision-making at Supervisory Board and Board of Directors meetings.
E.3.5	Dewan Pengawas menyelenggarakan rapat paling tidak 1 kali dalam setahun. The Supervisory Board meets at least once during the year.	Dewan Pengawas menyelenggarakan rapat lebih dari 1 kali pada tahun 2023. The Supervisory Board held more than one meeting in 2023.

No.	Parameter Parameter	Implementasi Implementation
E.3.6	Materi untuk agenda rapat Dewan Pengawas dan Direksi diberikan kepada setiap anggota setidaknya lima hari kerja sebelum rapat diselenggarakan. Meeting agenda materials for Supervisory Board and Board of Directors meetings are provided to the board at least five business days before the meeting.	Materi untuk agenda rapat Dewan Pengawas dan Direksi telah diberikan kepada setiap anggota lima hari kerja sebelum rapat diselenggarakan. Materials for the agenda for the Supervisory Board and Board of Directors meetings have been given to each member five working days before.
E.3.7	Sekretaris Perusahaan berperan penting dalam mendukung Dewan Pengawas dan Direksi dalam melaksanakan tanggung jawabnya. The Corporate Secretary plays a significant role in supporting the Supervisory Board and Board of Directors in their responsibilities.	Sekretaris Perusahaan berperan penting dalam mendukung Dewan Pengawas dan Direksi dalam melaksanakan tanggung jawabnya. Hal ini telah diungkap pada Laporan Tahunan 2023 Bab Tata Kelola Perusahaan Subbab Sekretaris Perusahaan. The Corporate Secretary plays an important role in supporting the Supervisory Board and Board of Directors in their responsibilities. This has been disclosed in the 2023 Annual Report, Corporate Governance Chapter, Corporate Secretary Subchapter.
E.3.8	Sekretaris Perusahaan terlatih dalam bidang hukum, akuntansi, atau praktik kesekretariatan perusahaan dan selalu mengikuti perkembangan yang relevan. The Corporate Secretary is trained in legal, accountancy, or company secretarial practices and has kept up-to-date on relevant developments.	Sekretaris Perusahaan secara berkala mengikuti pelatihan peningkatan kompetensi yang sesuai dengan tugas dan tanggung jawabnya serta perkembangan regulasi yang relevan. The Corporate Secretary periodically participates in competency enhancement training following their duties and responsibilities as well as developments in relevant regulations.
E.3.9	Perusahaan mengungkapkan kriteria yang digunakan dalam memilih Dewan Pengawas dan Direksi baru. The Company discloses the criteria for selecting a new Supervisory Board and Board of Directors.	Sesuai dengan regulasi yang berlaku, kriteria dan prosedur nominasi Dewan Pengawas dan Direksi baru sepenuhnya menjadi kewenangan KPM. In accordance with applicable regulations, the criteria and procedures for nomination of the new Supervisory Board and Board of Directors are fully under the authority of KPM.
E.3.10	Perusahaan menjelaskan prosedur nominasi Dewan Pengawas dan Direksi baru. The Company describes the process of appointing a new Supervisory Board and Board of Directors.	
E.3.11	Anggota Dewan Pengawas dan Direksi dapat diangkat kembali untuk masa jabatan berikutnya sesuai dengan ketentuan yang berlaku, All Supervisory Board and Board of Directors are subject to re-election for another term per the prevailing provisions.	Sesuai dengan regulasi yang berlaku, Dewan Pengawas dan Direksi dapat diangkat kembali untuk masa jabatan berikutnya sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Per applicable regulations, the Supervisory Board and Board of Directors can be reappointed for the next term of office.
E.3.12	Pemegang saham menyetujui penetapan besaran remunerasi bagi Dewan Pengawas dan Direksi. The shareholders or the Board of Directors approve the remuneration of the Supervisory Board and Board of Directors.	Penetapan besaran remunerasi bagi Dewan Pengawas dan Direksi merupakan kewenangan KPM sebagai pemegang saham. Determining the amount of remuneration for the Supervisory Board and Board of Directors is the authority of KPM as a shareholder.
E.3.13	Perusahaan memiliki kebijakan penghargaan dan kompensasi berbasis kinerja jangka panjang yang memperhitungkan kinerja keuangan Perusahaan. The Company has a long-term performance-based reward and compensation policy that considers the Company's financial performance.	Sebagai Perumda, Perusahaan tidak memiliki kebijakan penghargaan dan kompensasi berbasis kinerja jangka panjang yang memperhitungkan kinerja keuangan Perusahaan. As a Perumda, the Company does not have a long-term performance-based reward and compensation policy that considers the Company's financial performance.
Audit internal Internal Audit		
E.3.14	Perusahaan memiliki fungsi Internal Audit yang independen. The Company has a separate internal audit function.	Perusahaan memiliki fungsi Internal Audit. Hal ini telah diuraikan pada Laporan Tahunan 2023 Bab Tata Kelola Perusahaan Subbab Satuan Pengawas Intern. The Company has an Internal Audit function. This has been explained in the 2023 Annual Report, Corporate Governance Chapter, Internal Audit Unit Subchapter.
E.3.15	Perusahaan mengungkapkan profil Pimpinan Internal Audit. The Company discloses the profile of the Head of Internal Audit.	
E.3.16	Pengangkatan dan pemberhentian auditor internal memerlukan persetujuan Komite Audit. The appointment and removal of the internal auditor require the approval of the Audit Committee.	
Pengawasan Risiko Risk Oversight		

No.	Parameter Parameter	Implementasi Implementation
E.3.17	Perusahaan menetapkan prosedur pengendalian internal dan/atau kerangka manajemen risiko yang baik dan secara berkala meninjau efektivitas kerangka tersebut. The Company establishes a sound internal control procedures/risk management framework and periodically reviews its effectiveness.	Perusahaan memiliki kerangka pengendalian internal dan kerangka manajemen risiko yang baik dan secara berkala meninjau efektivitas kerangka tersebut. Hal ini telah diuraikan pada Laporan Tahunan 2023 Bab Tata Kelola Perusahaan Sub Bab Sistem Pengendalian Internal dan Sub Bab Manajemen Risiko. The Company has a good internal control framework and risk management framework and regularly reviews the effectiveness of these frameworks. This has been explained in the 2023 Annual Report, Corporate Governance Chapter, Internal Control System Subchapter, and Risk Management Subchapter.
E.3.18	Laporan Tahunan dan/atau Laporan GCG Tahunan mengungkapkan bahwa Dewan Pengawas dan Direksi telah melakukan peninjauan terhadap Sistem Pengendalian Internal Perusahaan (termasuk pengendalian operasional, keuangan dan kepatuhan) dan sistem manajemen risiko. The Annual Report/CG Report discloses that the Supervisory Board and Board of Directors have reviewed the Company's material controls (including operational, financial, and compliance controls) and risk management systems.	
E.3.19	Perusahaan mengungkapkan risiko-risiko utama yang secara material dihadapi oleh Perusahaan (seperti risiko keuangan, operasional termasuk TI, lingkungan hidup, sosial, ekonomi). The Company discloses the key risks to which the Company is materially exposed (i.e., financial and operational, including IT, environmental, social, and economic).	
E.3.20	Laporan Tahunan dan/atau Laporan GCG Tahunan memuat pernyataan Dewan Pengawas dan/atau Direksi atau Komite Audit yang menyatakan kecukupan sistem pengendalian internal dan sistem manajemen risiko Perusahaan. The Annual Report/CG Report contains a statement from the Supervisory Board and/or Board of Directors or Audit Committee commenting on the adequacy of the Company's internal controls/risk management systems.	
E.4	Profil Dewan Pengawas dan Direksi People on the Supervisory Board and Board of Directors	
	Ketua Dewan Pengawas Supervisory Board Chairman	
E.4.1	Ketua Dewan Pengawas tidak merangkap jabatan sebagai Direktur Utama. The Supervisory Board Chairman does not have a concurrent position as the President Director.	Ketua Dewan Pengawas merupakan pihak independen, yang tidak merangkap jabatan sebagai Direktur Utama dan bukan mantan Direktur Utama periode sebelumnya. The Supervisory Board Chairman is an independent party that does not hold the same position as the President Director and is not a former President Director from the previous term.
E.4.2	Ketua Dewan Pengawas adalah Dewan Pengawas Independen. The Supervisory Board Chairman is an Independent Supervisory Board member.	Pembahasan tentang tugas dan tanggung jawab Dewan Pengawas telah diuraikan pada Laporan Tahunan 2023 Bab Tata Kelola Perusahaan Subbab Dewan Pengawas. A description of the duties and responsibilities of the Supervisory Board has been described in the 2023 Annual Report, Corporate Governance Chapter, Supervisory Board Subchapter.
E.4.3	Ketua Dewan Pengawas bukan mantan Direktur Utama periode sebelumnya. The Supervisory Board Chairman was not a President Director in the previous term.	
E.4.4	Perusahaan mengungkapkan peran dan tugas Ketua Dewan Pengawas. The Company discloses the roles and responsibilities of the Supervisory Board Chairman.	
	Direktur Independen Independent Director	

No.	Parameter Parameter	Implementasi Implementation
E.4.5	Jika Ketua Dewan pengawas tidak independen, Dewan Pengawas telah menunjuk Direktur Independen dan Perusahaan telah menetapkan peran dan tanggung jawabnya. If the Supervisory Board Chairman is not independent, the Board has appointed an Independent Director, and the Company has defined its roles and responsibilities.	Tugas dan tanggung jawab Direktur telah diatur sesuai dengan regulasi yang berlaku. Hal ini juga telah diuraikan pada Laporan Tahunan 2023 Bab Tata Kelola Perusahaan Subbab Direksi. The duties and responsibilities of the Board of Directors have been regulated by applicable regulations. It has also been described in the 2023 Annual Report Corporate Governance Chapter, Board of Directors Subchapter.
Keterampilan dan Kompetensi Skills and Competencies		
E.4.6	Perusahaan paling tidak memiliki 1 anggota Dewan Pengawas yang memiliki pengalaman sebelumnya di industri yang sama. The Company has at least one Supervisory Board member with prior working experience in the industry in which the Company is operating.	Perusahaan memiliki anggota Dewan Pengawas yang memiliki pengalaman sebelumnya di industri yang sama. The Company has Supervisory Board members who have prior experience in the same industry.
E.5 Kinerja Dewan Pengawas dan Direksi Supervisory Board and Board of Directors Performance		
Pengembangan Kompetensi Dewan Pengawas dan Direksi Supervisory Board and Board of Directors Development		
E.5.1	Perusahaan memiliki program orientasi untuk Dewan Pengawas dan Direksi baru. The Company has orientation programs for the new Supervisory Board and Board of Directors.	Perusahaan memiliki program orientasi untuk Dewan Pengawas dan Direksi baru. Perusahaan juga memiliki kebijakan terkait peningkatan kompetensi Dewan Pengawas dan Direksi. Hal ini telah diuraikan pada Laporan Tahunan 2023 Bab Tata Kelola Perusahaan Subbab Direksi dan Subbab Dewan Pengawas.
E.5.2	Perusahaan mempunyai kebijakan dan praktik serta program aktual yang mendorong Dewan Pengawas dan Direksi untuk mengikuti program pendidikan profesi berkelanjutan. The Company has a policy, actual practice, and programs encouraging the Supervisory Board and Board of Directors to attend ongoing or continuous professional education programs.	The Company has an orientation program for the new Supervisory Board and Board of Directors. The Company also has policies related to increasing the competence of the Supervisory Board and Board of Directors. This has been explained in the 2023 Annual Report, Corporate Governance Chapter, Board of Directors Subchapter, and Supervisory Board Subchapter.
Pengangkatan dan Kinerja Direksi Board of Directors Appointments and Performance		
E.5.3	Perusahaan mengungkapkan proses bagaimana Dewan Pengawas dan Direksi merencanakan suksesi Direktur Utama dan manajemen kunci. The Company discloses the process of how the Supervisory Board and Board of Directors plan for the succession of the President Director and key management.	Hal ini telah diuraikan pada Laporan Tahunan 2023 Bab Tata Kelola Perusahaan. This has been described in the 2023 Annual Report, Corporate Governance Chapter.
E.5.4	Dewan Pengawas melakukan penilaian kinerja tahunan terhadap Direktur Utama. The Supervisory Board conducts an annual performance assessment of the President Director.	
Penilaian Kinerja Dewan Pengawas dan Direksi Supervisory Board and Board of Directors Appraisal		
E.5.5	Perusahaan melakukan penilaian kinerja tahunan terhadap Dewan Pengawas dan Direksi, mengungkapkan kriteria serta proses yang dilakukan untuk penilaian tersebut. The Company conducts an annual performance assessment of the Supervisory Board and Board of Directors and discloses the criteria and process followed for the assessment.	Hal ini telah diuraikan pada Laporan Tahunan 2023 Bab Tata Kelola Perusahaan. This has been described in the 2023 Annual Report, Corporate Governance Chapter.
Penilaian Direktur Board of Directors Appraisal		
E.5.6	Perusahaan melakukan penilaian kinerja tahunan terhadap masing-masing Direktur dan mengungkapkan kriteria dan prosedur penilaian tersebut. The Company conducts an annual performance assessment for every Director and discloses the criteria and process for the assessment.	Hal ini telah diuraikan pada Laporan Tahunan 2023 Bab Tata Kelola Perusahaan. This has been described in the 2023 Annual Report, Corporate Governance Chapter.



No.	Parameter Parameter	Implementasi Implementation
	Penilaian Komite Committee Appraisal	
E.5.7	Perusahaan melakukan penilaian kinerja tahunan terhadap komite-komite Dewan Pengawas dan mengungkapkan kriteria serta proses yang diikuti untuk penilaian tersebut. The Company conducts an annual performance assessment of the Supervisory Board Committees and discloses the criteria and process followed for the assessment.	Hal ini telah diuraikan pada Laporan Tahunan 2023 Bab Tata Kelola Perusahaan. This has been described in the 2023 Annual Report, Corporate Governance Chapter.

Level 2 – Bonus
Level 2 – Bonus

No.	Parameter Parameter	Implementasi Implementation
B (A)	Hak Pemegang Saham Rights of Shareholders	
(B)A.1	Hak untuk berpartisipasi secara efektif dalam RUPS dan mendapatkan informasi dan prosedur RUPS. Right to participate effectively in general shareholders meetings and should be informed of the rules.	
(B)A.1.1	Perusahaan menerapkan pemungutan suara elektronik yang aman dan <i>real-time</i> secara <i>in-absentia</i> di RUPS. The Company practices real-time secure electronic voting in absentia at general meetings of shareholders.	Perusahaan tidak menerapkan pemungutan suara elektronik karena Perusahaan bukan perusahaan terbuka. The Company does not practice electronic voting because it is not a public company.
(B)B	Perlakuan yang Adil kepada Pemegang Saham Equitable Treatment of Shareholders	
(B)B.1	Pemanggilan RUPS Notice of AGM	
(B)B.1.1	Perusahaan mengumumkan undangan RUPS ke Bursa Saham paling lambat 28 hari sebelum RUPS. The Company releases its notice of AGM (with detailed agendas and explanatory circulars), as announced to the Exchange, at least 28 days before the meeting date.	Perusahaan tidak mengumumkan undangan RUPS ke Bursa Saham. Perusahaan bukan perusahaan terbuka. The Company does not announce the GMS invitation to the Stock Exchange. The Company is not a public company.
(B) C	Keberlanjutan dan Ketahanan Sustainability and Resilience	
(B) C.1		
(B) C.1.1	Perusahaan mengungkapkan cara mengelola risiko dan peluang terkait perubahan iklim. The Company discloses how it manages climate-related risks and opportunities.	Perusahaan mengungkapkan cara mengelola risiko dan peluang terkait perubahan iklim pada Laporan Keberlanjutan 2023. The Company disclosed how it manages risks and opportunities related to climate change in the 2023 Sustainability Report.
(B) C.1.2	Perusahaan mengungkapkan bahwa Laporan Keberlanjutan dan laporan tersebut mendapat jaminan dari pihak eksternal. The Company discloses that its Sustainability Report/ Sustainability Reporting is externally assured.	Perusahaan mengungkapkan Laporan Keberlanjutan Tahun 2023. The Company discloses the 2023 Sustainability Report.
(B) C.1.3	Perusahaan mengungkapkan saluran keterlibatan dengan kelompok pemangku kepentingan dan bagaimana Perusahaan menanggapi kekhawatiran pemangku kepentingan. The Company discloses the engagement channel with stakeholder groups and how the Company responds to stakeholders' ESG concerns.	Perusahaan telah mengungkapkan hal ini pada Laporan Tahunan 2023. The Company has disclosed this in the 2023 Annual Report.
(B) C.1.4	Perusahaan mempunyai unit/divisi/komite yang secara khusus bertanggung jawab mengelola kegiatan keberlanjutan. The Company has a unit/division/committee responsible for managing sustainability matters.	Perusahaan memberikan tanggung jawab pengelolaan keberlanjutan kepada Divisi Sekretaris Perusahaan yang dituangkan dalam Surat Keputusan Direksi Nomor 1 Tahun 2021. The Company assigns responsibility for sustainability management to the Corporate Secretariat Division as outlined in the Board of Directors Decree No. 1 of 2021.

No.	Parameter Parameter	Implementasi Implementation
(B) C.1.5	Perusahaan mengungkapkan pengawasan Dewan Pengawas dan Direksi terhadap risiko dan peluang terkait keberlanjutan. The Company discloses the Supervisory Board and Board of Directors' oversight of sustainability-related risks and opportunities,	Perusahaan telah mengungkapkan hal ini pada Laporan Keberlanjutan Tahun 2023. The Company has disclosed this in the 2023 Sustainability Report.
(B) C.1.6	Perusahaan mengungkapkan hubungan antara remunerasi Direktur Eksekutif dan Manajemen Senior dan kinerja keberlanjutan pada tahun sebelumnya. The Company discloses the link between Executive Directors and Senior Management remuneration and sustainability performance for the previous year.	Perusahaan telah mengungkapkan hubungan antara remunerasi Direktur Eksekutif dan Manajemen Senior dan kinerja keberlanjutan pada tahun sebelumnya. The Company has disclosed the relationship between the remuneration of Executive Directors and Senior Management and sustainability performance in the previous year.
(B) C.1.7	<i>Whistleblowing System</i> Perusahaan dikelola oleh pihak independen/institusi lain. The Company's Whistleblowing System is managed by independent parties/institutions.	Penanganan pengaduan dikelola oleh pihak ketiga, yaitu PT Sinergitas Tata Kelola. Complaint handling is managed by a third party, i.e., PT Sinergitas Tata Kelola.
(B) D	Pengungkapan dan Transparansi Disclosure and Transparency	
(B) D.1	Kualitas Laporan Tahunan Quality of Annual Report	
(B) D.1.1	Laporan Keuangan Tahunan yang telah diaudit diterbitkan dalam waktu 60 hari sejak akhir tahun buku. The audited annual financial report/statement is released within 60 days from the financial year's end.	Laporan Keuangan Tahunan yang telah diaudit diterbitkan pada tanggal 31 Maret 2023. The audited Annual Financial Statement was published on March 31, 2023.
(B) E	Tanggung Jawab Dewan Pengawas dan Direksi Responsibilities of the Supervisory Board and Board of Directors	
(B) E.1	Kompetensi dan Keberagaman Dewan Pengawas dan Direksi Supervisory Board and Board of Directors Competencies and Diversity	
(B)E.1.1	Perusahaan memiliki paling tidak 1 anggota Dewan Pengawas/Direksi perempuan. The Company has at least one female Supervisory Board/Board of Directors.	Perusahaan pernah memiliki anggota Dewan Pengawas/Direksi perempuan sesuai dengan Surat Keputusan Gubernur No. 1742 Tahun 2016. The Company had female Supervisory Board/Board of Directors members per Governor Decree No. 1742 of 2016.
(B)E.1.2	Perusahaan memiliki kebijakan keberagaman Dewan Pengawas dan Direksi melaporkan progres pencapaian tujuan. The Company has a Supervisory Board and Board of Directors diversity policy and reports on the progress in achieving its objectives.	Hal ini telah diuraikan pada Laporan Tahunan 2023 Bab Tata Kelola Perusahaan. This has been described in the 2023 Annual Report, Corporate Governance Chapter.
(B)E.2	Struktur Dewan Pengawas dan Direksi Supervisory Board and Board of Directors Structure	
(B)E.2.1	Seluruh anggota Komite Nominasi merupakan anggota Dewan Pengawas Independen. The Nominating Committee is comprised entirely of independent Supervisory Board members.	Pada Laporan Tahunan 2023 telah diungkapkan bahwa sebanyak dua orang Dewan Pengawas Independen termasuk dalam keanggotaan Komite Nominasi dan Remunerasi Perusahaan. In the 2023 Annual Report, it was disclosed that two members of the Independent Supervisory Board members were included in the Company's Nomination and Remuneration Committee.
(B)E.2.2	Komite Nominasi melakukan proses identifikasi kualitas direksi selaras dengan arah strategis Perusahaan. The Nominating Committee identifies the quality of the Board of Directors, aligned with the Company's strategic directions.	Perusahaan telah memastikan proses nominasi Dewan Pengawas dan Direksi dilaksanakan secara transparan. Hal ini telah dijelaskan dengan rinci pada Laporan Tahunan 2023 Bab Tata Kelola Perusahaan Sub Bab Nominasi dan Remunerasi Dewan Pengawas dan Direksi. The Company has ensured that the nomination process for the Supervisory Board and Board of Directors is carried out transparently. This has been described in detail in the 2023 Annual Report, Corporate Governance Chapter, Nomination and Remuneration for the Board of Directors and Supervisory Board Subchapter.

No.	Parameter Parameter	Implementasi Implementation
(B) E.3	Pengangkatan dan Pemilihan Kembali Dewan Pengawas dan Direksi. Supervisory Board and Board of Directors Appointments and Re-Election.	
(B)E.3.1	Perusahaan menggunakan pihak eksternal dalam pencarian sumber daya manusia profesional atau kandidat eksternal lainnya (seperti <i>database</i> yang dibentuk oleh Direktur atau pemegang saham) pada saat pencarian kandidat untuk Direksi dan Dewan Pengawas. The Company uses external parties in searching for professional human resources or other external candidates (e.g., Director databases set up by the Director or shareholder bodies) when searching for candidates for the Supervisory Board and Board of Directors.	Prosedur nominasi anggota Dewan Pengawas dan Direksi Perusahaan mengikuti Peraturan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta. The procedure for nominating members of the Company's Supervisory Board and Board of Directors follows the DKI Jakarta Provincial Government Regulations.
(B)E.4	Struktur dan Komposisi Dewan Pengawas dan Direksi. Supervisory Board and Board of Directors Structure and Composition	
(B) E.4.1	Jumlah Dewan Pengawas Independen lebih dari 50% anggota Dewan Pengawas. The Independent Supervisory Board makes up more than 50% of the Supervisory Board.	Hingga Laporan Tahunan ini diterbitkan, Perusahaan memiliki dua orang Dewan Pengawas Independen yang jumlahnya mencapai 100% dari total seluruh anggota Dewan Pengawas. On the publication of this Annual Report, the Company has two Independent Supervisory Board members, which constitute 100% of the total members of the Supervisory Board.
(B)E.5	Pengawasan Risiko Risk Oversight	
(B)E.5.1	Perusahaan mengungkapkan bahwa Dewan Pengawas dan Direksi mengidentifikasi risiko utama terkait dengan teknologi informasi termasuk gangguan (<i>disruption</i>), keamanan dunia maya (<i>cyber security</i>), dan pemulihan bencana (<i>disaster recovery</i>) untuk memastikan bahwa risiko tersebut dikelola dan diintegrasikan ke dalam kerangka manajemen risiko secara keseluruhan. The Company discloses that its Board identified key risks concerning information technology, including disruption, cyber security, and disaster recovery, to ensure that such risks are managed and integrated into the overall risk management framework.	Perusahaan telah mengungkapkan hal ini pada Laporan Tahunan 2023 Bab Tata Kelola Perusahaan Sub Bab Proses Governansi Terkait Isu Teknologi Informasi. The Company has disclosed this in the 2023 Annual Report, Corporate Governance Chapter, Governance Process Related to Information Technology Issues Subchapter.
(B)E.6	Kinerja Dewan Pengawas Supervisory Board Performance	
(B)E.6.1	Perusahaan memiliki Komite Risiko yang berada di bawah Dewan Pengawas. The Company has a Risk Committee under the Supervisory Board.	Perusahaan telah memiliki Komite Pemantau Risiko yang berada di bawah Dewan Pengawas. Hal ini telah dijelaskan dengan rinci pada Laporan Tahunan 2023 Bab Tata Kelola Perusahaan. The Company has a Risk Monitoring Committee under the Supervisory Board. This has been explained in detail in the 2023 Annual Report, Corporate Governance Chapter.

Level 2 – Penalti
Level 2 – Penalty

No.	Parameter Parameter	Implementasi Implementation
(P) A	Hak Pemegang Saham Rights of Shareholders	
(P)A.1	Hak Dasar Pemegang Saham Basic Shareholder Rights	
(P)A.1.1	Perusahaan tidak memberikan perlakuan yang adil kepada pemegang saham terkait dengan pembelian kembali saham. The Company does not offer equal treatment for share repurchases to all shareholders.	Ketentuan tentang hal ini tidak sesuai untuk diterapkan oleh Perusahaan yang merupakan sebuah Perumda milik Pemerintah Provinsi DKI Jakarta. The provision regarding this matter is not suitable to be implemented by the Company, a Perumda belonging to the DKI Jakarta Provincial Government.
(P)A.2	Pemegang saham termasuk pemegang saham institusi diperbolehkan untuk saling berkonsultasi terkait dengan pemenuhan hak-hak pemegang saham. Shareholders, including institutional shareholders, should be allowed to consult with each other on issues concerning their basic shareholder rights.	
(P)A.2.1	Terdapat batasan yang mencegah adanya komunikasi antar pemegang saham. There is evidence of barriers that prevent shareholders from communicating or consulting with other shareholders.	Ketentuan tentang hal ini tidak sesuai untuk diterapkan oleh Perusahaan yang merupakan sebuah Perumda milik Pemerintah Provinsi DKI Jakarta. The provision regarding this matter is not suitable to be implemented by the Company, a Perumda belonging to the DKI Jakarta Provincial Government.
(P)A.3	Hak untuk berpartisipasi secara efektif dalam RUPS dan mendapatkan informasi terkait prosedur RUPS. Right to participate effectively in and vote in general shareholders meetings and should be informed of the rules.	
(P)A.3.1	Perusahaan mencantumkan mata acara tambahan yang tidak diumumkan sebelumnya dalam pemanggilan RUPST dan/atau RUPSLB. The Company includes any additional and unannounced agenda item in the notice of AGM/EGM.	Ketentuan tentang hal ini tidak sesuai untuk diterapkan oleh Perusahaan yang merupakan sebuah Perumda milik Pemerintah Provinsi DKI Jakarta. The provision regarding this matter is not suitable to be implemented by the Company, a Perumda belonging to the DKI Jakarta Provincial Government.
(P)A.3.2	Ketua Dewan dan Ketua seluruh Komite Dewan serta Direksi tidak hadir pada RUPS terakhir. The Chairman of the Board, the Chairmen of all Board Committees, and the President Director are absent from the most recent AGM.	Ketua Dewan dan Ketua seluruh Komite Dewan serta Direksi menghadiri rapat dengan KPM. The Chairman of the Board, the Chairmen of all Board Committees, and the President Director attend the meeting with KPM.
(P)A.4	Struktur modal yang memungkinkan adanya pengendalian yang tidak proporsional harus diungkapkan. Capital structures that allow disproportionate control must be disclosed.	
(P)A.4.1	Perusahaan tidak mengungkapkan <i>shareholders agreement</i> . The Company does not disclose the shareholders' agreement.	Ketentuan tentang hal ini tidak sesuai untuk diterapkan oleh Perusahaan yang merupakan sebuah Perumda milik Pemerintah Provinsi DKI Jakarta.
(P)A.4.2	Perusahaan tidak mengungkapkan <i>voting cap</i> . The Company does not disclose the voting cap.	The provision regarding this matter is not suitable to be implemented by the Company, a Perumda belonging to the DKI Jakarta Provincial Government.
(P)A.4.3	Perusahaan tidak mengungkapkan <i>multiple voting rights</i> . The Company does not disclose multiple voting rights.	The provision regarding this matter is not suitable to be implemented by the Company, a Perumda belonging to the DKI Jakarta Provincial Government.
(P)A.5	Struktur modal yang memungkinkan adanya pengendalian yang tidak proporsional harus diungkapkan. Capital structures and arrangements that enable certain control disproportionate to their equity ownership should be disclosed.	
(P)A.5.1	Adanya struktur kepemilikan piramida/ <i>cross holding</i> . There is a pyramid/cross-holding ownership structure.	Perusahaan tidak memiliki struktur kepemilikan piramida dan/atau struktur kepemilikan silang. The Company does not have a pyramid/cross-holding ownership structure.
(P) B.	Perlakuan yang adil bagi pemegang saham Equitable Treatment of Shareholders	
(P) B.1	Perdagangan orang dalam (<i>insider trading</i>) dan transaksi mandiri yang bersifat kekerasan (<i>abusive self-dealing</i>) harus dilarang. Insider trading and abusive self-dealing should be prohibited	
(P) B.1.1	Pernah terjadi kasus <i>insider trading</i> yang melibatkan Dewan Pengawas dan Direksi, manajemen dan karyawan dalam tiga tahun terakhir. There has been a conviction of insider trading involving the Board of Directors, Supervisory Board, management, and employees in the past three years.	Ketentuan tentang hal ini tidak sesuai untuk diterapkan oleh Perusahaan yang merupakan sebuah Perumda milik Pemerintah Provinsi DKI Jakarta. The provision regarding this matter is not suitable to be implemented by the Company, a Perumda belonging to the DKI Jakarta Provincial Government.



No.	Parameter Parameter	Implementasi Implementation
(P) B.2 Perlindungan pemegang saham minoritas dan tindakan sewenang-wenang. Protecting minority shareholders from abusive actions.		
(P) B.2.1	Pernah terjadi kasus ketidakpatuhan terhadap peraturan perundang-undangan berkaitan dengan transaksi pihak berelasi yang material dalam tiga tahun terakhir. There has been a case of non-compliance with the laws, rules, and regulations on material-related party transactions in the past three years.	Pernah terjadi kasus ketidakpatuhan terhadap peraturan perundang-undangan pada tahun 2021, pada saat ini telah diselesaikan oleh pihak terkait. There was a case of non-compliance with laws and regulations in 2021, which the relevant parties have resolved.
(P) B.2.2	Terdapat TPB yang dapat diklasifikasikan sebagai bantuan keuangan (yaitu tidak dilakukan secara wajar) kepada entitas selain anak perusahaan yang dimiliki sepenuhnya. Some RPTs can be classified as financial assistance (i.e., not conducted at arm's length) to entities other than wholly-owned subsidiary companies.	Perusahaan tidak melakukan TPB yang dapat diklasifikasikan sebagai bantuan keuangan (yaitu tidak dilakukan secara wajar) kepada entitas selain anak perusahaan yang dimiliki sepenuhnya. The Company does not conduct RPT classified as financial assistance (i.e., not conducted at arm's length) to entities other than wholly-owned subsidiary companies.
(P) C Peran pemangku kepentingan Role of stakeholders		
(P) C.1 Hak-hak pemangku kepentingan yang ditetapkan berdasarkan undang-undang atau melalui kesepakatan bersama harus dihormati. The rights of stakeholders established by law or through mutual agreements are to be respected.		
(P) C.1.1	Terdapat pelanggaran terhadap undang-undang yang berkaitan dengan masalah ketenagakerjaan, konsumen, <i>insolvency</i> , komersial, kompetisi atau lingkungan hidup. There is any violation of any laws on employment, consumer, <i>insolvency</i> , commercial, competition, or environmental issues.	Perusahaan tidak melakukan pelanggaran terhadap undang-undang yang berkaitan dengan masalah ketenagakerjaan, konsumen, <i>insolvency</i> , komersial, kompetisi atau lingkungan hidup. The Company does not violate any laws on employment, consumer, <i>insolvency</i> , commercial, competition, or environmental issues.
(P) C.2 Dalam menjalankan perannya dalam penerapan <i>corporate governance</i>, pemangku kepentingan harus memiliki akses informasi yang relevan secara tepat waktu dan teratur. When stakeholders participate in the corporate governance process, they should have access to relevant, sufficient, and reliable information on a timely and regular basis.		
(P) C.2.1	Perusahaan mendapatkan sanksi dari regulator terkait keterlambatan penyampaian laporan dan informasi peristiwa penting. The Company faces any sanction by regulators for failure to make announcements within the requisite period for material events.	Perusahaan tidak mendapatkan sanksi dari regulator terkait keterlambatan penyampaian laporan dan informasi peristiwa penting. The Company does not receive any sanction by regulators for failure to make announcements within the requisite period for material events.
(P) C.2.2	Terdapat bukti bahwa perusahaan melakukan kegiatan <i>greenwashing</i> . There is evidence that The Company is engaging in <i>greenwashing</i> activities.	Perusahaan tidak melakukan kegiatan <i>greenwashing</i> . The Company does not engage in <i>greenwashing</i> .
(P) D Pengungkapan dan Transparansi Disclosure and Transparency		
(P) D.1 Sanksi dari regulator terhadap penyampaian Laporan Keuangan. Sanctions from regulators on financial reports.		
(P) D.1.1	Perusahaan menerima "opini wajar dengan pengecualian" dalam laporan audit eksternal. The Company receives a "qualified opinion" in its external audit report.	Ya, Perusahaan menerima "opini wajar dengan pengecualian" dalam laporan audit eksternal. Yes, the Company receives a "qualified opinion" in its external audit report.
(P) D.1.2	Perusahaan menerima <i>adverse opinion</i> dari auditor eksternal. The Company receives an "adverse opinion" in its external audit report.	Perusahaan tidak menerima <i>adverse opinion</i> dari auditor eksternal. The Company did not receive an "adverse opinion" in its external audit report.
(P) D.1.3	Perusahaan menerima <i>disclaimer opinion</i> dari auditor eksternal. The Company receives a "disclaimer opinion" in its external audit report.	Perusahaan tidak menerima <i>disclaimer opinion</i> dari auditor eksternal. The Company did not receive a "disclaimer opinion" in its external audit report.
(P) D.1.4	Perusahaan merevisi Laporan Keuangan periode sebelumnya selain karena adanya perubahan kebijakan akuntansi. The Company revised its financial statements for reasons other than changes in accounting policies.	Perusahaan tidak merevisi Laporan Keuangan periode sebelumnya selain karena adanya perubahan kebijakan akuntansi. The Company did not revise its financial statements for reasons other than changes in accounting policies.

No.	Parameter Parameter	Implementasi Implementation
(P) E	Tanggung Jawab Dewan Pengawas dan Direksi Responsibilities of the Supervisory Board and Board of Directors	
(P) E.1	Kepatuhan terhadap aturan pencatatan, peraturan, dan hukum yang berlaku Compliance with listing rules, regulations, and applicable laws	
(P) E.1.1	Terdapat bukti bahwa Perusahaan tidak mematuhi peraturan dan ketentuan pencatatan selain peraturan pengungkapan informasi selama setahun terakhir. There is evidence that the Company has not complied with any listing rules and regulations apart from disclosure rules in the past year.	Selama setahun terakhir, Perusahaan telah konsisten mematuhi aturan dan regulasi yang berlaku. Dengan demikian, tidak terdapat bukti pelanggaran terkait dengan hal ini selama periode tersebut. Over the past year, the Company has consistently complied with applicable rules and regulations. Thus, there is no evidence of violations during that period.
(P) E.1.2	Terdapat kejadian di mana Direktur dan Dewan Pengawas telah mengundurkan diri dan mengangkat isu-isu yang berkaitan dengan <i>governance</i> . There is an instance where the Board of Directors and Supervisory Board have resigned and raised any governance-related concerns.	Tidak terdapat anggota Direksi dan Dewan Pengawas Perusahaan yang mengundurkan diri dan mengemukakan masalah terkait <i>governance</i> . There were no members of the Board of Directors and Supervisory Board who resigned and raised issues related to governance.
(P) E.2	Struktur Dewan Pengawas dan Direksi Supervisory Board and Board of Directors Structure	
(P) E.2.1	Perusahaan memiliki Dewan Pengawas Independen yang telah menjabat lebih dari 9 tahun atau dua periode masing-masing lima tahun (mana yang lebih tinggi) dalam kapasitas yang sama. The Company has an independent Supervisory Board member who has served for more than nine years or two terms of five years each (whichever is higher) in the same capacity.	Tidak terdapat Dewan Pengawas Independen Perusahaan yang menjabat lebih dari sembilan tahun atau dua periode masing-masing lima tahun. Hal ini telah diuraikan dalam Laporan Tahunan 2023. No Independent Supervisory Board member has served more than nine years or two terms of five years each. This has been outlined in the 2023 Annual Report.
(P) E.2.2	Perusahaan tidak dapat mengidentifikasi dengan tepat gambaran seluruh Dewan Pengawas dan Direksi sebagai independen, non-eksekutif, dan eksekutif. The Company fails to correctly identify the description of all their Supervisory Board and Board of Directors as independent, non-executive, and executive.	Perusahaan dapat mengidentifikasi dengan tepat kriteria independensi Dewan Pengawas dan Direksi. Hal ini telah diungkap pada Laporan Tahunan 2023. The Company can correctly identify the criteria for the independence of the Supervisory Board and Board of Directors. This has been disclosed in the 2023 Annual Report.
(P) E.2.3	Perusahaan mempunyai Direktur dan Dewan Pengawas Independen yang menjabat sebagai anggota Dewan Pengawas dan Direksi di lebih dari lima perusahaan. The Company has an independent Supervisory Board and Board of Directors who serve on more than five boards of publicly listed companies.	Tidak terdapat anggota Direksi dan Dewan Pengawas yang menjabat di lebih dari lima perusahaan. Hal ini telah diungkapkan pada Laporan Tahunan Perusahaan Tahun 2023. No members of the Board of Directors and Supervisory Board serve in more than five companies. This has been disclosed in the 2023 Annual Report.
(P) E.3	Audit Eksternal External Audit	
(P) E.3.1	Terdapat Direktur atau Manajemen Senior yang merupakan mantan karyawan atau mitra auditor eksternal (dalam 2 tahun terakhir). A Director or Senior Management is a former employee or partner of the current external auditor (in the past two years).	Perusahaan tidak memiliki Direktur atau Manajemen Senior yang merupakan mantan karyawan atau mitra auditor eksternal saat ini (dalam 2 tahun terakhir). The Company does not have a Director or Senior Management, a former employee, or a partner of the current external auditor (in the past two years).
(P) E.4	Struktur dan Komposisi Dewan Pengawas dan Direksi Supervisory Board and Board of Directors Structure and Composition	
(P) E.4.1	Ketua Dewan Pengawas pernah menjadi Direktur Utama Perusahaan dalam tiga tahun terakhir. The Supervisory Board Chairman has been the President Director for the last three years.	Ketua Dewan Pengawas Perusahaan tidak pernah menjadi Direktur Utama Perusahaan dalam tiga tahun terakhir. The Supervisory Board Chairman has never been the President Director in the last three years.
(P) E.4.2	Dewan Pengawas dan Direktur independen menerima opsi, saham kinerja, atau bonus. The independent Supervisory Board and Director receive options, performance shares, or bonuses.	Dewan Pengawas dan Direktur menerima Tantiem atau Insentif Pekerjaan. The independent Supervisory Board and Director receive Tantiem or Performance Incentive.



Lampiran Appendix

No.	Parameter Parameter	Implementasi Implementation
Pemegang saham mempunyai hak untuk ikut serta dalam Shareholders have the right to participate in:		
A.2.1	Perubahan konstitusi Perusahaan. Amendments to The Company's constitution.	KPM berhak ikut serta dalam perubahan konstitusi Perusahaan. KPM has the right to participate in changes to the Company's constitution.
A.2.2	Otorisasi penambahan saham. The authorization of additional shares.	KPM berhak ikut serta dalam otorisasi penambahan saham. KPM has the right to authorize additional shares.
A.2.3	Pengalihan seluruh atau sebagian besar aset, yang mempengaruhi penjualan Perusahaan. The transfer of all or substantially all assets, which in effect results in the sale of the Company.	KPM berhak ikut serta dalam Pengalihan seluruh atau sebagian besar aset, yang mempengaruhi penjualan Perusahaan. KPM has the right to participate in the transfer of all or most of the assets, which affects the sale of the Company.
B.1.1	Saham biasa atau saham biasa perusahaan memiliki satu suara untuk satu saham. The Company's ordinary or common shares have one vote for one share.	Ketentuan tentang hal ini tidak sesuai untuk diterapkan oleh Perusahaan yang merupakan sebuah Perumda milik Pemerintah Provinsi DKI Jakarta. The provision regarding this matter is not suitable to be implemented by the Company, a Perumda belonging to the DKI Jakarta Provincial Government.
B.3.1	Perusahaan mempunyai kebijakan dan/atau peraturan yang melarang Direksi, Dewan Pengawas dan karyawan mengambil manfaat dari pengetahuan yang umumnya tidak tersedia di pasar. The Company has policies and/or rules prohibiting the Board of Directors, Supervisory Board, and employees from benefiting from knowledge not generally available to the market.	Ketentuan tentang hal ini tidak sesuai untuk diterapkan oleh Perusahaan yang merupakan sebuah Perumda milik Pemerintah Provinsi DKI Jakarta. The provision regarding this matter is not suitable to be implemented by the Company, a Perumda belonging to the DKI Jakarta Provincial Government.
B.4.1	Perusahaan mempunyai kebijakan yang mewajibkan Direksi dan Dewan Pengawas untuk mengungkapkan kepentingannya dalam transaksi dan benturan kepentingan lainnya. The Company have a policy requiring the Board of Directors and Supervisory Board to disclose their interest in transactions and any other conflicts of interest.	Direksi dan Dewan Pengawas wajib mengungkapkan kepentingannya dalam transaksi dan benturan kepentingan lainnya. The Board of Directors and Supervisory Board must disclose their interests in transactions and other conflicts of interest.
D.2.6	Rincian kehadiran masing-masing Direktur/Dewan Pengawas dalam seluruh rapat direksi/Dewan Pengawas yang diselenggarakan sepanjang tahun. Attendance details of each Board of Directors/Supervisory Board in all Board of Directors/Supervisory Board meetings held during the year.	Perusahaan mengungkapkan rincian kehadiran masing-masing Direktur dan Dewan Pengawas dalam seluruh rapat yang diselenggarakan di tahun 2023 pada Laporan Tahunan 2023. The Company discloses details of the attendance of each Director and Supervisory Board at all meetings held in 2023 in the 2023 Annual Report.

PENERAPAN ATAS PEDOMAN TATA KELOLA PERUSAHAAN SESUAI SEOJK NO. 16/SEOJK.04/2021

CORPORATE GOVERNANCE GUIDELINES IMPLEMENTATION PER SEOJK NO. 16/SEOJK.04/2021

Perusahaan memiliki komitmen tinggi untuk meningkatkan penerapan GCG sesuai dengan rekomendasi Pedoman Tata Kelola Perusahaan yang tertuang dalam Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan (SEOJK) No. 32/SEOJK.04/2015 tentang Pedoman Tata Kelola Perusahaan Terbuka.

The Company has a high commitment to improving GCG implementation per the recommendations of the Corporate Governance Guidelines in the Financial Services Authority Circular Letter (SEOJK) No. 32/SEOJK.04/2015 on Public Company Governance Guidelines.

No.	Rekomendasi Recommendation	Penerapan di Perusahaan Implementation in The Company
1.	Meningkatkan Nilai Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS). Increasing the value of holding a General Meeting of Shareholders (GMS).	
1.1.	Perusahaan memiliki cara atau prosedur teknis pengumpulan suara (<i>voting</i>) baik secara terbuka maupun tertutup yang mengedepankan independensi, dan kepentingan pemegang saham. The Company has technical methods or procedures for collecting votes openly and privately that prioritize independence and the interests of shareholders.	Ya Yes
1.2.	Seluruh anggota Direksi dan anggota Dewan Pengawas Perusahaan hadir dalam RUPS Tahunan. All Board of Directors and Supervisory Board members present at the Annual GMS.	Ya Yes
1.3.	Ringkasan risalah RUPS tersedia dalam Situs Web Perusahaan paling sedikit selama 1 (satu) tahun. A summary of the GMS minutes is available on the Company Website for at least one year.	Ya Yes
2.	Meningkatkan Kualitas Komunikasi antara Perusahaan dengan Pemegang Saham atau Investor. Improving the Quality of Communication between the Company and Shareholders or Investors.	
2.1.	Perusahaan memiliki suatu kebijakan komunikasi dengan pemegang saham atau investor. The Company has a communication policy with shareholders or investors.	Ya Yes
2.2.	Perusahaan mengungkapkan kebijakan komunikasi Perusahaan dengan pemegang saham atau investor dalam Situs Web. The Company discloses the Company's communication policy with shareholders or investors on the Website.	Ya Yes
3.	Memperkuat Keanggotaan dan Komposisi Dewan Pengawas. Strengthening the Supervisory Board Membership and Composition.	
3.1.	Penentuan jumlah anggota Dewan Pengawas mempertimbangkan kondisi Perusahaan. Determining the number of members of the Supervisory Board considers the Company's conditions.	Ya Yes
3.2.	Penentuan komposisi anggota Dewan Pengawas memperhatikan keberagaman keahlian, pengetahuan, dan pengalaman yang dibutuhkan. Determining the composition of members of the Supervisory Board considers the diversity of skills, knowledge and experience required.	Ya Yes
4.	Meningkatkan Kualitas Pelaksanaan Tugas dan Tanggung Jawab Dewan Pengawas. Improving the Quality of the Supervisory Board's Duties and Responsibilities Implementation.	
4.1.	Dewan Pengawas mempunyai kebijakan penilaian sendiri (<i>self-assessment</i>) untuk menilai kinerja Dewan Pengawas. The Supervisory Board has a self-assessment policy to assess the performance of the Supervisory Board.	Ya Yes
4.2.	Kebijakan penilaian sendiri (<i>self-assessment</i>) untuk menilai kinerja Dewan Pengawas, diungkapkan melalui Laporan Tahunan Perusahaan. The self-assessment policy for assessing the performance of the Supervisory Board is disclosed in the Annual Report.	Ya Yes
4.3.	Dewan Pengawas mempunyai kebijakan terkait pengunduran diri anggota Dewan Pengawas apabila terlibat dalam kejahatan keuangan. The Supervisory Board has a policy regarding the resignation of Supervisory Board members if they are involved in financial crimes.	Ya Yes
4.4.	Dewan Pengawas atau Komite yang menjalankan fungsi Nominasi dan Remunerasi menyusun kebijakan suksesi dalam proses Nominasi anggota Direksi. The Supervisory Board or Committee that carries out the Nomination and Remuneration function prepares a succession policy in the Nomination process for the Board of Directors members.	Ya Yes



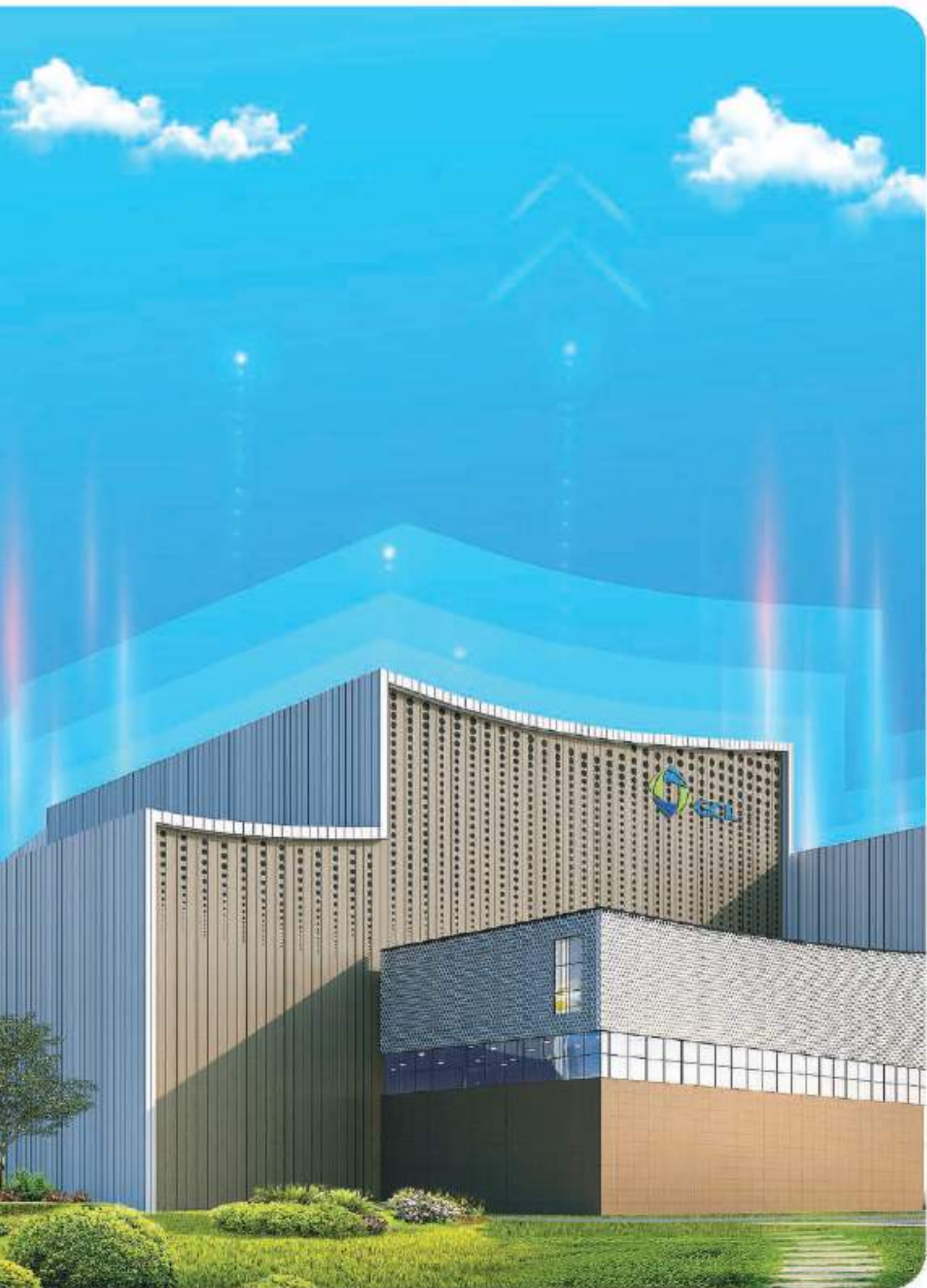
No.	Rekomendasi Recommendation	Penerapan di Perusahaan Implementation in The Company
5.	Memperkuat Keanggotaan dan Komposisi Direksi. Strengthening the Board of Directors Membership and Composition.	
5.1.	Penentuan jumlah anggota Direksi mempertimbangkan kondisi Perusahaan serta efektivitas dalam pengambilan keputusan. Determining the number of members of the Board of Directors considers the Company's condition and effectiveness in decision-making.	Ya Yes
5.2.	Penentuan komposisi anggota Direksi memperhatikan, keberagaman keahlian, pengetahuan, dan pengalaman yang dibutuhkan. Determining the composition of members of the Board of Directors considers the required diversity of skills, knowledge, and experience.	Ya Yes
5.3.	Anggota Direksi yang membawahi bidang akuntansi atau keuangan memiliki keahlian dan/atau pengetahuan di bidang akuntansi. Board of Directors members in charge of accounting or finance have expertise and/or knowledge in accounting.	Ya Yes
6.	Meningkatkan Kualitas Pelaksanaan Tugas dan Tanggung Jawab Direksi. Improving the Quality of the Board of Directors' Duties and Responsibilities Implementation.	
6.1.	Direksi mempunyai kebijakan penilaian sendiri (<i>self-assessment</i>) untuk menilai kinerja Direksi. The Board of Directors has a self-assessment policy to assess the performance of the Board of Directors.	Ya Yes
6.2.	Kebijakan penilaian sendiri (<i>self-assessment</i>) untuk menilai kinerja Direksi diungkapkan melalui laporan tahunan Perusahaan. The self-assessment policy for assessing the performance of the Board of Directors is disclosed in the Annual Report.	Ya Yes
6.3.	Direksi mempunyai kebijakan terkait pengunduran diri anggota Direksi apabila terlibat dalam kejahatan keuangan. The Board of Directors has a policy regarding the resignation of Board of Directors members if they are involved in financial crimes.	Ya Yes
7.	Meningkatkan Aspek Tata Kelola Perusahaan melalui Partisipasi Pemangku Kepentingan. Improving Corporate Governance Aspects through Stakeholder Participation.	
7.1.	Perusahaan memiliki kebijakan untuk mencegah terjadinya <i>insider trading</i> . The Company has a policy to prevent insider trading.	Ya Yes
7.2.	Perusahaan memiliki kebijakan anti korupsi dan <i>anti-fraud</i> . The Company has an anti-corruption and anti-fraud policy.	Ya Yes
7.3.	Perusahaan memiliki kebijakan tentang seleksi dan peningkatan kemampuan pemasok atau vendor. The Company has a policy regarding selecting and improving supplier or vendor capabilities.	Ya Yes
7.4.	Perusahaan memiliki kebijakan tentang pemenuhan hak-hak kreditur. The Company has a policy regarding fulfilling creditor rights.	Tidak No
7.5.	Perusahaan memiliki kebijakan sistem <i>whistleblowing</i> . The Company has a whistleblowing system policy.	Ya Yes
7.6.	Perusahaan memiliki kebijakan pemberian insentif jangka panjang kepada Direksi dan karyawan. The Company has a policy of providing long-term incentives to the Board of Directors and employees.	Tidak No
8.	Meningkatkan Pelaksanaan Keterbukaan Informasi. Improving the Implementation of Information Disclosure.	
8.1.	Perusahaan memanfaatkan penggunaan teknologi informasi secara lebih luas selain Situs Web sebagai media keterbukaan informasi. The Company makes more comprehensive use of information technology besides the Website as a medium for information disclosure.	Ya Yes
8.2.	Laporan Tahunan Perusahaan mengungkapkan pemilik manfaat akhir dalam kepemilikan saham Perusahaan paling sedikit 5% (lima persen), selain pengungkapan pemilik manfaat akhir dalam kepemilikan saham Perusahaan melalui pemegang saham utama dan pengendali. The Annual Report discloses the ultimate beneficial owner in the Company's share ownership of at least 5%, in addition to the disclosure of the ultimate beneficial owner in the Company's share ownership through the main and controlling shareholders.	Ya Yes

06

Laporan
Keberlanjutan

Sustainability Report





STRATEGI DAN KOMITMEN ENVIRONMENTAL, SOCIAL AND GOVERNANCE (ESG) [OJK A.1] [GRI 2-22, 2-24]

ENVIRONMENTAL, SOCIAL AND GOVERNANCE (ESG) STRATEGY AND COMMITMENT

Merespon Tantangan Keberlanjutan [OJK E.5]

Sarana Jaya dihadapkan pada tantangan yaitu kondisi sektor bisnis properti dan pembangunan infrastruktur yang dipengaruhi oleh pertumbuhan ekonomi nasional maupun global seiring pemulihan yang terus berlanjut pasca pandemi. Sisi lain, isu-isu universal terkait bisnis properti juga menjadi tantangan bagi Sarana Jaya, diantaranya yaitu upaya mewujudkan transisi energi menuju karbon netral atau *Net Zero Emission (NZE)* di tahun 2060. Setelah Konferensi Perubahan Iklim Perserikatan Bangsa-Bangsa (COP26) tahun 2021 lalu, target *Net Zero Carbon (NZC)* menjadi menjadi isu penting dan bahkan kebutuhan bagi bisnis properti ke depan. Dalam hal ini, properti hijau atau pembangunan properti dengan konsep berkelanjutan perlu menjadi bagian yang tidak bisa terpisahkan dari bisnis ini. Bukan saja akan memberikan penghematan-penghematan di masa depan, tetapi juga menghadirkan peluang-peluang investasi yang lebih berkelanjutan.

Atas berbagai tantangan tersebut, Sarana Jaya perlu melakukan perubahan dan perluasan fungsi dan peranannya dengan membuat Rencana Bisnis Perumda Pembangunan Sarana Jaya Berbasis *Environmental, Social dan Governance (ESG)* yang disusun untuk menjawab berbagai tantangan tersebut dengan memetakan rencana, strategi dan kebijakan yang tepat beserta program-programnya dalam mencapai target dan sasaran ke depan.

Sarana Jaya juga berkomitmen untuk senantiasa memperkuat penerapan Sepuluh Prinsip UN Global Compact (UNGC) ke dalam strategi, kebijakan, prosedur, serta membangun budaya keberlanjutan, sebagai bagian dari upaya Perusahaan dalam merespon tantangan keberlanjutan. Sepuluh Prinsip UNGC diambil dari Deklarasi Universal HAM, Deklarasi Labour Organization (ILO) tentang Prinsip Dasar dan Hak di Tempat Kerja, Deklarasi Rio tentang Lingkungan dan Pembangunan, serta Konvensi PBB Melawan Korupsi.

Responding to Sustainability Challenges [OJK E.5]

Sarana Jaya is faced with challenges, i.e., the condition of the property business sector and infrastructure development influenced by national and global economic growth as recovery continues post-pandemic. Universal issues related to the property business are also challenges for Sarana Jaya, including efforts to realize the energy transition towards carbon neutral or *Net Zero Emission (NZE)* in 2060. After the United Nations Climate Change Conference (COP26) in 2021, the *Net Zero Carbon (NZC)* target became an important issue and even a necessity for the property business in the future. In this case, green property or property development with a sustainable concept needs to be an inseparable part of this business. Not only will it provide future savings, but it will also present more sustainable investment opportunities.

Due to these challenges, Sarana Jaya needs to make changes and expand its functions and roles by creating a Business Plan for Perumda Pembangunan Sarana Jaya Based on Environmental, Social, and Governance (ESG), which is prepared to answer these various challenges by mapping out appropriate plans, strategies, and policies along with programs to achieve future targets and objectives.

Sarana Jaya is also committed to continuously strengthening the implementation of the Ten Principles of the UN Global Compact (UNGC) in strategies, policies, and procedures and building a culture of sustainability as part of the Company's efforts to respond to sustainability challenges. The Ten UNGC Principles are taken from the Universal Declaration of Human Rights of the International Labor Organization (ILO) Declaration on Basic Principles and Rights at Work, the Rio Declaration on Environment and Development, and the UN Convention Against Corruption.

Sarana Jaya sebagai anggota Indonesia Global Compact Network (IGCN) sejak 13 November 2019 yang merupakan jaringan lokal UNGC di Indonesia, juga terus terlibat dengan para pemangku kepentingannya secara berkala atas kemajuan yang telah dibuat dan hasil yang telah dicapai dalam melaksanakan Sepuluh prinsip dan tujuan berkelanjutan PBB, melalui *Communication on Progress* (COP). Selain menunjukkan komitmen Perusahaan dalam bergabung dengan Global Compact, COP juga merupakan instrumen berharga untuk mengembangkan perencanaan, mendorong dialog dan mendorong langkah-langkah praktis untuk memfasilitasi pertukaran informasi di antara para peserta. Di tahun 2023, Sarana Jaya tetap berkomitmen untuk menjalankan bisnis sehari-hari sesuai dengan Sepuluh Prinsip UNGC.

Peta Jalan atau *Roadmap* Tanggung Jawab Sosial Perusahaan Tahun 2023-2027

Perencanaan strategis dalam kegiatan Tanggung Jawab Sosial Perusahaan atau *Corporate Social Responsibility* (CSR) merupakan komponen penting bagi Perusahaan karena menyediakan arah dan tujuan yang terukur sehingga dapat dipantau kemajuan dan perkembangannya serta dapat dievaluasi hasilnya.

Sebagai strategi keberlanjutan ke depan, Sarana Jaya telah membuat *Roadmap* CSR Tahun 2023-2027. *Strategic CSR* dipilih karena Sarana Jaya melihat keberlanjutan dan tanggung jawab perusahaan sebagai peluang untuk meningkatkan kualitas manajemen risiko Perusahaan. Dalam model ini maka fokus program CSR adalah membangun akuntabilitas program, yaitu menunjukkan bahwa pengelolaan Perusahaan diarahkan untuk mencapai tujuan nasional yang lebih luas dengan tingkatan efisiensi, efektivitas, kejujuran dan kebijaksanaan tertinggi.

As a member of the Indonesia Global Compact Network (IGCN), the local network of the UNGC in Indonesia, since November 13, 2019, Sarana Jaya continues to engage with its stakeholders regularly on the progress that has been made and the results that have been achieved in implementing the UN Ten Principles and Sustainable Goals through *Communication on Progress* (COP). In addition to demonstrating the Company's commitment to joining the Global Compact, the COP is a valuable instrument for developing planning, encouraging dialogue, and encouraging practical steps to facilitate the exchange of information among participants. In 2023, Sarana Jaya remains committed to running its daily business following the UNGC Ten Principles.

Corporate Social Responsibility Roadmap for 2023-2027

Strategic planning in Corporate Social Responsibility (CSR) is an important component for the Company because it provides measurable direction and goals so that progress and development can be monitored and the results can be evaluated.

As a future sustainability strategy, Sarana Jaya has created a CSR Roadmap for 2023-2027. Strategic CSR was chosen because Sarana Jaya sees sustainability and corporate responsibility as an opportunity to improve the Company's risk management quality. In this model, the CSR program focuses on building program accountability, i.e., showing that company management is directed at achieving broader national goals with the highest levels of efficiency, effectiveness, honesty, and wisdom.

Strategi, Kebijakan dan Roadmap (2023)

Strategy, Policy and Roadmap

Operasionalisasi

Operationalization

Pelaporan dan Pengungkapan

Reporting and Disclosure

Fokus Program

Program Focus

Visi & Ambisi

Vision & Ambition

Upaya & Prioritisasi

Measures & Prioritization

Inisiatif Unggulan

Flagship Initiatives

Organisasi, Kebijakan & Matriks

Organization, Policy & Metrics

Pelaporan & Pengelolaan Ekosistem

Reporting & Ecosystem Management



Review
ISO 26000:2010 SR

Self assessment
(desktop review,
interview, and FGD)

SR ISO 26000:2010
Review

Self-assessment
(desktop review,
interview, and FGD)

- Penetapan target dampak 2027
Setting impact targets for 2027
- *Level target: comply, compete, champion*
Target level: comply, compete, champion
- Penyusunan KPI
KPI Preparation
- Pembuatan program unggulan untuk mencapai dampak 2027
Creation of superior programs to achieve impact by 2027
- Pemberian target dalam program jangka menengah dan tahunan
Providing targets in medium term and annual programs

- Benchmarking
- KPI Departemen
Department KPIs
- Panduan dan SDP
Guidelines and SDP
- Pemetaan RASCI dalam struktur organisasi eksisting
RASCIP mapping in existing organizational structure

- Integrasi dalam AR dan SR
AR and SR integration
- Pengembangan model pelaporan internal
Internal reporting model development
- Topik material dalam laporan
Material topics in the report

Mengintegrasikan Capaian Program Keberlanjutan Sesuai Prinsip UNGC dengan SDGs

Agenda 2030 untuk Pembangunan Berkelanjutan (*the 2030 Agenda for Sustainable Development* atau SDGs) adalah kesepakatan pembangunan baru yang mendorong perubahan-perubahan yang bergeser ke arah pembangunan berkelanjutan yang berdasarkan hak asasi manusia dan kesetaraan untuk mendorong pembangunan sosial, ekonomi dan lingkungan hidup. Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB) atau *Sustainable Development Goals* (SDGs) diberlakukan dengan prinsip-prinsip universal, integrasi dan inklusif untuk meyakinkan bahwa tidak akan ada seorang pun yang terlewatkan atau “*No-one Left Behind*”. SDGs terdiri dari 17 Tujuan dan 169 target dalam rangka melanjutkan upaya dan pencapaian *Millennium Development Goals* (MDGs) yang berakhir akhir pada tahun 2015 lalu.

Sarana Jaya berkomitmen untuk senantiasa menjalankan bisnis dengan mengedepankan prinsip 3P (*People, Planet, Profit*) sebagai bentuk kontribusi Perusahaan dalam menciptakan nilai/manfaat bagi seluruh pemangku kepentingan dalam mewujudkan pencapaian SDGs. Sebagai sektor konstruksi, Sarana Jaya berupaya mengambil langkah-langkah strategis yang berfokus pada SDGs Nomor 8 Pekerjaan Layak dan Pertumbuhan Ekonomi,

Integrating Sustainability Program Achievements per UNGC Principles with SDGs




The 2030 Agenda for Sustainable Development is a new development agreement that encourages changes towards sustainable development based on human rights and equality to encourage social, economic, and environmental development. The Sustainable Development Goals (SDGs) are implemented with universal, integrated, and inclusive principles to ensure no one will be left behind. SDGs consist of 17 goals and 169 targets to continue the efforts and achievements of the Millennium Development Goals (MDGs), which ended in 2015.

Sarana Jaya is committed to always running its business by prioritizing the 3P principles (People, Planet, Profit) as a form of the Company’s contribution to creating value/benefits for all stakeholders in realizing the achievement of the SDGs. As a company engaging in the construction sector, Sarana Jaya seeks to take strategic steps that focus on SDG 8 (Decent Work and Economic Growth), SDG 9 (Industry, Innovation, and Infrastructure), SDG 11

Nomor 9 Industri, Inovasi dan Infrastruktur, Nomor 11 Kota dan Permukiman yang Berkelanjutan, Nomor 12 Konsumsi dan Produksi yang Bertanggung Jawab dan Nomor 13 Penanganan Perubahan Iklim. Namun, melalui berbagai program keberlanjutan yang telah diterapkan, Sarana Jaya juga berkomitmen mendukung pencapaian SDGs lainnya. Identifikasi Capaian Program Keberlanjutan Sarana Jaya Sesuai Prinsip UNGC terhadap SDGs adalah sebagai berikut:



(Sustainable Cities and Settlements), SDG 12 (Responsible Consumption and Production), and SDG 13 (Climate Action). However, through the various sustainability programs implemented, Sarana Jaya is also committed to supporting the achievement of other SDGs. Identification of the accomplishments of the Sarana Jaya Sustainability Program per the UNGC Principles for the SDGs is as follows:

Integrasi Capaian Program Keberlanjutan Sarana Jaya Sesuai Prinsip UNGC terhadap SDGs [OJK F.25]
Integrating the Achievements of the UNGC Principles Sustainability Program with the SDGs









Komitmen Keberlanjutan dan Sepuluh Prinsip UNGC UNGC Sustainability Commitment and Ten Principles	Capaian Program Keberlanjutan Tahun 2023 Sustainability Program Achievements in 2023	GRI Standards dan SEOJK Nomor 16 GRI Standards and SEOJK No. 16	SDGs SDG
<p>Hak Asasi Manusia Human Rights</p> <p>Prinsip 1: Principle 1: Bisnis harus mendukung dan menghormati perlindungan hak asasi manusia yang diakui secara internasional Businesses should support and respect the protection of internationally proclaimed human rights</p> <p>Prinsip 2: Principle 2: Memastikan bahwa mereka tidak terlibat dalam pelanggaran hak asasi manusia Make sure that they are not complicit in human rights abuses</p>	<ul style="list-style-type: none"> Menerapkan sistem remunerasi yang baik dan adil kepada pegawai Implement a good and fair remuneration system for employees Menerapkan kesetaraan gender dalam kesempatan penerimaan dan promosi pegawai. Pada tahun 2023, tingkat rekrutmen sebesar 2% dan sebanyak 9,7% pegawai mendapatkan pengembangan karir melalui promosi Implement gender equality in employee recruitment and promotion opportunities. In 2023, the recruitment rate was at 2%, and 9.7% of employees received career development through promotion Menerapkan prinsip keberagaman dalam komposisi pegawai Apply the principle of diversity in employee composition Memastikan fasilitas kerja yang aman, layak, bersih dan nyaman Ensure the availability of safe, decent, clean, and comfortable work facilities Melindungi pegawai dari pelecehan di tempat kerja, baik pelecehan dalam bentuk ancaman fisik, verbal, seksual maupun psikologis Protect employees from harassment in the form of physical, verbal, sexual, or psychological threats in the workplace Memastikan penyediaan tempat beribadah yang memungkinkan seluruh pegawai beribadah sesuai dengan keyakinannya Ensure the provision of places of worship that allow all employees to worship according to their beliefs 	<p>OJK F.18 OJK F.21 GRI 401-1 GRI 404-3 GRI 405-1 GRI 405-2</p>	  

Komitmen Keberlanjutan dan Sepuluh Prinsip UNGC UNGC Sustainability Commitment and Ten Principles	Capaian Program Keberlanjutan Tahun 2023 Sustainability Program Achievements in 2023	GRI Standards dan SEOJK Nomor 16 GRI Standards and SEOJK No. 16	SDGs SDG
<p>Tenaga Kerja Labor</p> <p>Prinsip 3: Principle 3: Bisnis harus menjunjung tinggi kebebasan berserikat dan pengakuan efektif atas hak untuk berunding bersama Businesses should uphold the freedom of association and the effective recognition of the right to collective bargaining</p> <p>Prinsip 4: Principle 4: Penghapusan segala bentuk kerja paksa dan kerja wajib The elimination of all forms of forced and compulsory labor</p> <p>Prinsip 5: Principle 5: Penghapusan pekerja anak secara efektif The effective abolition of child labor</p> <p>Prinsip 6: Principle 6: Penghapusan diskriminasi dalam pekerjaan dan jabatan The elimination of discrimination in respect of employment and occupation</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Memastikan bahwa perusahaan tidak berpartisipasi dalam segala bentuk kerja paksa Ensure that the Company does not participate in any form of forced labor • Tidak mempekerjakan tenaga anak dengan menetapkan batas usia minimal calon pegawai adalah 18 tahun Do not employ child labor by setting a minimum age for prospective employees of 18 years old • Mengatur agar semua pegawai bekerja sesuai jam kerja masing-masing tanpa ada paksaan Arrange for all employees to work according to their respective working hours without any coercion • Mematuhi standar upah minimum dan tunjangan-tunjangan sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku dengan rata-rata rasio gaji pegawai <i>entry level</i> dibandingkan UMR sebesar Rp7.451.798 dimana UMR per tahun 2023 sebesar Rp4.901.798 (rasio 1,5:1) Comply with minimum wage and allowance standards per applicable legal provisions, with the average salary ratio for entry-level employees compared to the UMR being Rp7,451,798, whereas the UMR for 2023 is Rp. 4,901,798 (1.5:1 ratio) • Mematuhi peraturan Kementerian Tenaga Kerja dan Kementerian Perdagangan dalam melaksanakan pelatihan bagi pegawai dengan rata-rata jam pelatihan per pegawai pada tahun 2023 mencapai 45 jam/orang dengan tercapainya 83 Orang Pegawai yang memenuhi target jam pelatihan. Comply with the regulations of the Manpower Ministry and the Trade Ministry in conducting training for employees with an average training hour per employee in 2023, reaching 45 hours/person and 83 personnel fulfilling the training hour target. 	<p>OJK F.19 OJK F.20 OJK F.22 GRI 202-1 GRI 404-1 GRI 404-2</p>	   

Komitmen Keberlanjutan dan Sepuluh Prinsip UNGC UNGC Sustainability Commitment and Ten Principles	Capaian Program Keberlanjutan Tahun 2023 Sustainability Program Achievements in 2023	GRI Standards dan SEOJK Nomor 16 GRI Standards and SEOJK No. 16	SDGs SDG
<p>Lingkungan Environment</p> <p>Prinsip 7: Principle 7: Bisnis harus mendukung pendekatan kehati-hatian terhadap tantangan lingkungan Businesses should support a precautionary approach to environmental challenges</p> <p>Prinsip 8: Principle 8: Melakukan prakarsa untuk mempromosikan tanggung jawab lingkungan yang lebih besar undertake initiatives to promote greater environmental responsibility</p> <p>Prinsip 9: Principle 9: Mendorong pengembangan dan difusi teknologi ramah lingkungan encourage the development and diffusion of environmentally friendly technologies</p>	<ul style="list-style-type: none"> Menerapkan konsep bangunan yang berkelanjutan pada proyek Perusahaan: Apply the sustainable building concept to the Company's projects: <ul style="list-style-type: none"> Penyediaan area bukaan pada ruangan serta penggunaan jendela untuk sirkulasi udara sebagai upaya pengurangan penggunaan lampu dan pendingin udara Provide openings in rooms and use windows for air circulation to reduce the use of lights and air conditioning Menyediakan ruang terbuka, RPTRA dan terintegrasi dengan Transjakarta ke dalam area sebagai upaya mengurangi penggunaan kendaraan pribadi untuk meminimalisir pencemaran udara Provide open spaces and RPTRA, which integrate Transjakarta into the project area as an effort to reduce the use of private vehicles and minimize air pollution Menghimbau setiap penghuni di kawasan proyek untuk menggunakan energi dan air secara hemat Urge every personnel in the project area to use energy and water wisely Menyediakan infiltrasi untuk menampung air hujan langsung ke dalam tangki, meningkatkan infiltrasi air tanah, meningkatkan infiltrasi agar air tidak menggenang di area dan memanfaatkan air hujan untuk kegiatan penyiraman Collect rainwater directly into the tank, increase groundwater infiltration to prevent water from stagnating in the area, and utilize rainwater for watering Mengendalikan setiap proses konstruksi agar tidak terjadi limbah (<i>waste</i>) berlebihan Control every construction process to prevent excessive waste Menyediakan tempat pengolahan sampah dan memastikan agar pengelolaan limbah di seluruh daerah operasi Perusahaan memiliki perencanaan yang baik dan termonitor secara berkala, tepat waktu serta terus dievaluasi Provide a place for waste processing and ensure that waste management in all areas of the Company's operations is well-planned, regularly monitored, and continuously evaluated Penambahan ruang terbuka hijau untuk area resapan Addition of green open space for absorption area Urban farming dengan menanam tanaman kebun produktif Urban farming by planting productive garden plants 	<p>OJK F.4 OJK F.5 OJK F.6 OJK F.7 OJK F.8 OJK F.9 OJK F.10 OJK F.11 OJK F.12 OJK F.13 OJK F.14 OJK F.16 GRI 302-1 GRI 303-5 GRI 306-3</p>	

Komitmen Keberlanjutan dan Sepuluh Prinsip UNGC UNGC Sustainability Commitment and Ten Principles	Capaian Program Keberlanjutan Tahun 2023 Sustainability Program Achievements in 2023	GRI Standards dan SEOJK Nomor 16 GRI Standards and SEOJK No. 16	SDGs SDG
	<ul style="list-style-type: none"> • Melakukan upaya pengelolaan dan pelestarian lingkungan lingkungan di Kantor Sarana Jaya Carry out efforts to manage and preserve the environment at Sarana Jaya Office <ul style="list-style-type: none"> - Menyelenggarakan Webinar <i>Circular Economy</i> "Sampah jadi Cuan" Organizing a Circular Economy Webinar "Trash to Profit" - Berpartisipasi dalam peringatan Hari Bersih Indonesia & Hari Peduli Sampah Nasional 2023 Participate in the commemoration of Indonesian Clean Day & National Waste Awareness Day 2023 - Melakukan penggantian lampu TL menjadi lampu LED Replace TL lamps with LED lamps - Pada tahun 2023, jumlah penggunaan energi (listrik dan BBM) kantor sebesar 643.582 gigajoule serta jumlah penggunaan air sebanyak 8.065 m³ In 2023, the total energy use (electricity and fuel) for offices is 643,582 gigajoules, and total water use is 8,065 m³ - Merealisasikan biaya pengelolaan dan pelestarian lingkungan tahun 2023 sebesar Rp266,13 juta Spend Rp266.13 million for environmental management and preservation • Mengambil bagian dalam festival Udara Bersih untuk Jakarta dalam rangka memperingati Hari Lingkungan Hidup Sedunia 2023 pada 5 Juni 2023 Take part in the Clean Air for Jakarta festival in commemoration of World Environment Day 2023 on June 5, 2023 • Mematuhi semua peraturan terkait lingkungan Comply with all regulations related to the environment 		
Anti Korupsi Anti-Corruption	<p>Prinsip 10: Principle 10: Bisnis harus melawan korupsi dalam segala bentuknya, termasuk pemerasan dan penyuapan Businesses should work against corruption in all its forms, including extortion and bribery</p> <ul style="list-style-type: none"> • Menerapkan ISO SNI 37001:2016 tentang Sistem Manajemen Anti Penyuapan (SMAP) Apply ISO SNI 37001:2016 on Anti-Bribery Management System (SMAP) • Melakukan identifikasi risiko penyuapan, penilaian risiko, menentukan jenis dan tingkat pengendalian risiko penyuapan Conduct bribery risk identification, risk assessment, determine the type and level of bribery risk control • Melakukan komunikasi program anti korupsi dan pengendalian gratifikasi kepada pihak internal dan eksternal Communicate anti-corruption and gratuity control programs to internal and external parties • Membekali para pegawai dengan program pelatihan anti korupsi yang dilakukan secara berkala Involve employees in regular anti-corruption training programs 	GRI 205-1 GRI 205-2 GRI 205-3	

Komitmen Keberlanjutan dan Sepuluh Prinsip UNGC UNGC Sustainability Commitment and Ten Principles	Capaian Program Keberlanjutan Tahun 2023 Sustainability Program Achievements in 2023	GRI Standards dan SEOJK Nomor 16 GRI Standards and SEOJK No. 16	SDGs SDG
	<ul style="list-style-type: none"> Melakukan edukasi mengenai larangan melakukan suap dan gratifikasi kepada mitra usaha Conduct education regarding the prohibition of bribery and gratuities to business partners Tidak terjadi insiden korupsi yang melibatkan Manajemen, pegawai Perusahaan maupun mitra kerja Perusahaan pada tahun 2023 Zero incidents of corruption involving the Company's management, employees, or partners in 2023 		
Menciptakan Manfaat dan Dampak Ekonomi Creating Benefits and Economic Impacts	Mendukung upaya Pemerintah dalam menjalankan program pembangunan nasional dan menciptakan pemerataan ekonomi di Masyarakat Support the Government's efforts in carrying out national development programs and creating economic equality in society	<ul style="list-style-type: none"> Distribusi nilai ekonomi kepada pemangku kepentingan sebesar Rp298.323 juta pada tahun 2023 Distribution of economic value to Stakeholders of Rp298,323 million Kontribusi pembayaran pajak kepada negara sebesar Rp45.323 juta pada tahun 2023 Tax payments to the country of Rp45,323 million in 2023 Kontribusi penyediaan hunian yang terjangkau, strategis dan layak huni bagi masyarakat Jakarta yakni Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR) melalui Menara Kanaya Nuansa Cilangkap, Menara Swasana Nuansa Pondok Kelapa dalam Program Subsidi Hunian Terjangkau Milik yang diatur dalam Pergub No. 51 Tahun 2019 tentang Penugasan Kepada Badan Usaha Milik Daerah Terkait Untuk Penyediaan Dan Pembiayaan Perolehan Rumah Bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah Contribute to the development of equitable infrastructure by providing affordable, strategic, and livable housing for the Low-Income Communities (MBR) of Jakarta through Menara Kanaya Nuansa Cilangkap, Menara Swasana Nuansa Pondok Kelapa in Affordable Owned Housing Subsidy Program regulated in Governor Regulation No. 51 of 2019 on Assignments to Relevant Region-Owned Enterprises for Providing and Financing the Acquisition of Homes for Low-Income Communities 	GRI 201-1 GRI 203-1
Memberikan Layanan Terbaik Kepada Pelanggan Providing the Best Service to Customers	Menciptakan program peningkatan layanan dan program pengelolaan keselamatan dan kesehatan pelanggan Create service-improving programs as well as customer health and safety management programs	<ul style="list-style-type: none"> Melayani Komplain melalui Cepat Respon Masyarakat (CRM) dalam <i>Dashboard</i> (JAKI) Provide Rapid Community Response (CRM) via Dashboard (JAKI) Menyediakan Kanal PPID Provide the PPID Channel Menyediakan informasi produk Provide product information Melakukan survei kepuasan pelanggan dengan skor 77% di tahun 2023 Conduct a customer satisfaction survey with a score of 77% in 2023 Menjaga keselamatan dan kesehatan pelanggan melalui sosialisasi keselamatan kebakaran gedung dan penyediaan Alat Pemadam Api Ringan (APAR) Maintain customer health and safety through dissemination of building fire safety and provision of Light Fire Extinguishers (APAR) 	OJK F. 26 OJK F. 27 OJK F.28 OJK F.29 OJK F.30 GRI 416-2

Komitmen Keberlanjutan dan Sepuluh Prinsip UNGC UNGC Sustainability Commitment and Ten Principles		Capaian Program Keberlanjutan Tahun 2023 Sustainability Program Achievements in 2023	GRI Standards dan SEOJK Nomor 16 GRI Standards and SEOJK No. 16	SDGs SDG
Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat Improving Community Welfare	Pelaksanaan Program Tanggung Jawab Sosial Perusahaan atau <i>Corporate Social Responsibility (CSR)</i> Implementation of Corporate Social Responsibility (CSR)	<ul style="list-style-type: none"> Beberapa program CSR di tahun 2023 seperti: Several CSR programs in 2023 are: <ul style="list-style-type: none"> Program beasiswa Sarana Juara Sarana Juara scholarship program <i>Urban Farming</i> Nuansa Pondok Kelapa Urban Farming Program Jakarta Beraksi (Bergerak atasi <i>Stunting</i>) Jakarta Beraksi Program (Overcoming Stunting) Realisasi dana pelaksanaan program CSR Perusahaan tahun 2023 sebesar Rp2.145 juta. The realization of funds for implementing CSR programs in 2023 amounted to Rp2.145 billion. 	OJK F.23 OJK F.24 OJK F.25 GRI 413-1	       

TENTANG LAPORAN KEBERLANJUTAN [OJK A.1]

ABOUT SUSTAINABILITY REPORTS

Sarana Jaya berkomitmen untuk menerbitkan Laporan Keberlanjutan setiap tahun bersamaan dengan diterbitkannya Laporan Tahunan. Laporan Keberlanjutan ini sebagai bentuk keterbukaan atas pengelolaan dampak keberlanjutan dan capaian kinerja keberlanjutan Perusahaan kepada pemangku kepentingan atas informasi selama periode 1 Januari 2023 hingga 31 Desember 2023, 2 (dua) tahun sebelumnya dan juga strategi keberlanjutan di masa mendatang. [GRI 2-3]

PEDOMAN PENYUSUNAN LAPORAN INI [GRI 1]

Pedoman penyusunan Laporan ini mengacu pada peraturan dan standar pelaporan keberlanjutan sebagai berikut:

- GRI Standards, dimana Sarana Jaya telah melaporkan informasi yang dikutip dalam indeks konten GRI Standards untuk periode 1 Januari – 31 Desember 2023 dengan merujuk (*with reference*) kepada GRI Standards;
- Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) No. 51/POJK.03/2017 tentang Penerapan Keuangan Berkelanjutan bagi Lembaga Jasa Keuangan, Emiten, dan Perusahaan Publik; serta
- Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan Republik Indonesia (SEOJK) No. 16/SEOJK.04/2021 Tentang Bentuk dan Isi Laporan Tahunan Emiten atau Perusahaan Publik.

Sarana Jaya is committed to publishing a Sustainability Report every year at the same time as the Annual Report. The Sustainability Report is a form of disclosure regarding the management of sustainability impacts and the Company's sustainability performance achievements to stakeholders regarding information from January 1, 2023, to December 31, 2023, the previous two years, and future sustainability strategies. [GRI 2-3]

REPORT PREPARATION GUIDELINES [GRI 1]

Guidelines for preparing this report refer to the following sustainability reporting regulations and standards:

- GRI Standards, where Sarana Jaya has reported the information quoted in the GRI Standards content index for the January 1 to December 31, 2023 period, with reference to GRI Standards;
- Financial Services Authority Regulation (POJK) No. 51/POJK.03/2017 on the Implementation of Sustainable Finance for Financial Services Institutions, Issuers, and Public Companies; as well as
- Financial Services Authority Circular Letter (SEOJK) No. 16/SEOJK.04/2021 on the Form and Content of Issuers or Public Companies Annual Reports.

PRINSIP DAN PROSES PENYUSUNAN LAPORAN INI [GRI 3-1]

Untuk mencapai pelaporan keberlanjutan yang berkualitas, Sarana Jaya telah menerapkan prinsip pelaporan sesuai GRI Standards sebagai berikut:

REPORT PREPARATION PRINCIPLES AND PROCESS [GRI 3-1]

To achieve quality sustainability reporting, Sarana Jaya has implemented the following reporting principles according to the GRI Standards:

Akurasi Accuracy



Laporan ini telah mengungkapkan informasi yang benar dan cukup terperinci yang telah melalui proses verifikasi internal untuk memastikan akurasi informasi
This report has disclosed correct and sufficiently detailed information which has passed an internal verification process to ensure the accuracy of the information

Keseimbangan Balance



Laporan ini telah mengungkapkan informasi yang berimbang tentang dampak positif maupun negatif dari kegiatan bisnis dan operasional Perusahaan
This report has disclosed balanced information about the positive and negative impacts of the Company's business and operational activities

Kejelasan Clarity



Laporan ini telah menyajikan informasi dengan jelas dalam 2 (dua) bahasa yang dapat diakses dan dapat dipahami pemangku kepentingan
This report has presented information clearly in two languages that are accessible and understandable to stakeholders

Keterbandingan Comparability



Laporan ini telah menyajikan informasi untuk periode pelaporan saat ini (2023) dan 2 (dua) periode sebelumnya (2021 dan 2022), sehingga dapat menggambarkan perubahan dalam pengelolaan dampak kegiatan Perusahaan
This report has presented information for the current reporting period (2022) and two previous periods (2020 and 2021) so as to describe changes in the Company's impact management

Kelengkapan Completeness



Laporan ini telah menyediakan informasi yang memadai sesuai pedoman acuan yang digunakan, sehingga dapat menggambarkan pengelolaan dampak Perusahaan
This report has provided adequate information in accordance with the reference guidelines so as to describe the Company's impact management

Konteks Keberlanjutan Sustainability Context



Laporan ini telah mengungkapkan informasi tentang dampak Perusahaan bagi pembangunan berkelanjutan dengan melakukan *materiality assessment* yang melibatkan pemangku kepentingan
This report has disclosed information about the Company's impact on sustainable development by conducting a materiality assessment involving stakeholders

Ketepatan Waktu Timeliness



Sarana Jaya telah melaporkan Laporan ini secara rutin dan tepat waktu bagi pengguna informasi untuk mengambil keputusan
Sarana Jaya has reported this Report regularly and in a timely manner for information users to make decisions

Keterverifikasian Verifiability



Sarana Jaya telah mengumpulkan, mencatat, menyusun dan menganalisis informasi Laporan ini dengan benar sehingga informasi tersebut dapat diteliti untuk menentukan kualitasnya
Sarana Jaya has collected, recorded, compiled and analyzed the information in this Report correctly so that the information can be examined to determine its quality

Prinsip pelaporan keberlanjutan tersebut diterapkan melalui 5 (lima) langkah penyusunan laporan keberlanjutan sebagai berikut:

These principles are implemented through the following five steps in preparing a sustainability report:

Roadmap CSR Sarana Jaya Tahun 2023-2027 | Sarana Jaya CSR Roadmap for 2023-2027

1

Menetapkan Prioritas dan Mengembangkan Strategi Set Priorities and Develop Strategy

Melakukan *benchmark* dan membuat konsep rencana aksi (*action plan*) dengan melakukan *Kick off Meeting* yang telah dilaksanakan pada tanggal 12 Februari 2024.

Benchmarking and drafting an action plan by conducting a Kickoff Meeting, which was held on February 12, 2024.

2

Membangun Struktur dan Mengumpulkan Data Build the Structure and Gather Data

- Melakukan penilaian kesenjangan (*gap analysis*) terhadap standar dan kerangka keberlanjutan (*sustainability framework*) dengan laporan keberlanjutan sebelumnya;
- Menentukan topik GRI yang penting bagi Perusahaan maupun Pemangku Kepentingan Perusahaan dari hasil penilaian internal atas hasil Penilaian Materialitas tahun sebelumnya mengingat topik-topik dianggap masih relevan dengan tahun buku pelaporan;
- Mengembangkan *outline*/kerangka laporan.

- Conducting a gap analysis of sustainability standards and frameworks with previous sustainability reports;
- Determining important GRI topics for the Company and Stakeholders based on the results of the Materiality Assessment, considering the topics are still relevant with the current reporting period;
- Developing a report outline/framework.

3

Mengembangkan dan Merevisi Konten Develop and Revise Content

Melakukan pengumpulan data/informasi berdasarkan pemenuhan *disclosures* dari topik material yang dipilih dan menyusun draft laporan hingga mendapatkan persetujuan akhir. Untuk laporan tahun 2023 ini, Sarana Jaya belum melakukan proses verifikasi pihak eksternal, namun seluruh informasi yang dipaparkan dalam laporan ini telah melalui proses *review* dan evaluasi internal yaitu oleh Direksi, Dewan Pengawas dan Divisi terkait sehingga kebenaran isi Laporan ini dapat diandalkan. [GRI 2-5] [OJK G.1]

Collecting data/information based on the fulfillment of disclosures on the selected material topics, compiling a draft report, and obtaining final approval. For the 2023 report, Sarana Jaya has not yet carried out an external party verification, but all the information presented has passed internal review and evaluation by the Board of Directors, Supervisory Board, and related Divisions so that the truth of the contents can be relied upon. [GRI 2-5] [OJK G.1]

4

Melakukan Finalisasi dan Mengkomunikasikan kepada Pemangku Kepentingan Perusahaan Finalize and Communicate to the Company's Stakeholders

Melakukan finalisasi laporan, yang selanjutnya mempublikasikan dan mengkomunikasikan kepada Pemangku Kepentingan Perusahaan dan memberikan lembar umpan balik kepada Pemangku Kepentingan Perusahaan sebagai masukan untuk perbaikan Laporan Keberlanjutan di tahun selanjutnya.

Finalizing, publishing, and communicating the report to the Company's Stakeholders and providing a feedback sheet as input for improving the Sustainability Report in the following year.

5

Melakukan Review Pembelajaran dan Pengulangan Review Learnings and Iterate

Melakukan peninjauan/*review* atas proses pelaporan yang telah dilakukan untuk semakin meningkatkan isi dan kualitas laporan selanjutnya. Selain itu, mengikutsertakan laporan ini dalam ajang penghargaan pelaporan untuk mendapatkan input perbaikan.

Review the reporting process further to improve the content and quality of future reports. In addition, this report will be included in the reporting award event to get input for improvement.

TOPIK MATERIAL DAN BOUNDARY LAPORAN INI

Dari hasil penilaian internal atas topik material pada tahun sebelumnya yang dianggap masih relevan, terdapat 12 topik material yang diungkapkan pada Laporan Keberlanjutan Sarana Jaya tahun 2023. Jumlah topik ini sama dibandingkan laporan sebelumnya. Dalam laporan ini tidak terdapat penyajian ulang informasi (*restatement*). Boundary Laporan ini adalah Kantor Pusat, Proyek dan khusus untuk data keuangan berasal dari laporan keuangan konsolidasi dengan Anak Perusahaan yang telah diaudit secara independen. [GRI 2-2, 2-4]

MATERIAL TOPICS AND REPORTING BOUNDARIES

From the results of the internal assessment of material topics in the previous year that were considered relevant, there were 12 material topics disclosed in the 2023 Sarana Jaya Sustainability Report. The total topics were the same as those in the previous report. There is no restatement of information in this report. The Boundary of this Report includes Head Office, Project, and financial data from consolidated financial statements with Subsidiaries that have been audited independently. [GRI 2-2, 2-4]

Daftar Topik Material dan *Boundary* Laporan [GRI 2-2, 3-2, 3-3]

List of Material Topics and Boundary of this Report

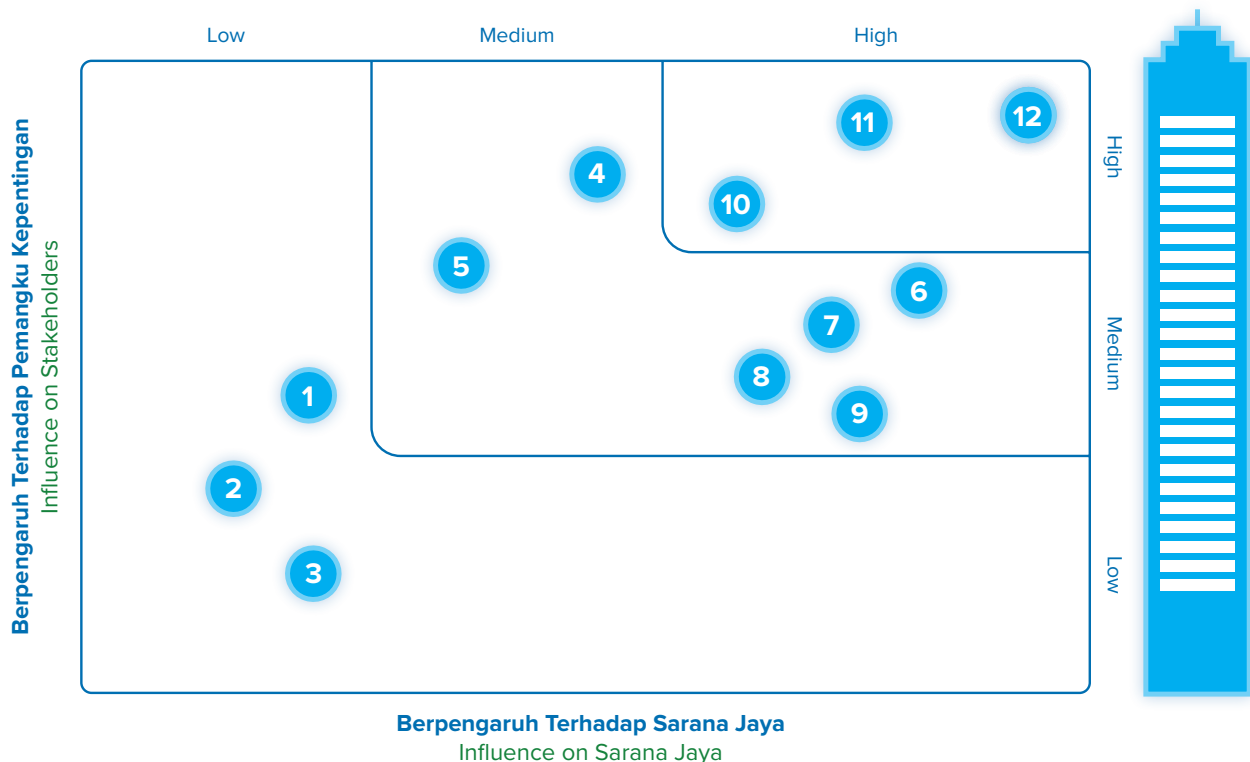
Topik Material Material Topic	Disclosure	Mengapa Topik Ini Material Reason for being Material Topic	Boundary		
			Kantor Pusat Head Office	Proyek Project	Anak Perusahaan Subsidiary
Ekonomi Economy					
Kinerja Ekonomi Economic Performance	GRI 201-1	Berdampak signifikan bagi pemangku kepentingan Significant impact to stakeholders	v	v	v
Keberadaan Pasar Market Presence	GRI 202-1	Berdampak signifikan bagi pegawai Significant impact to employees	v	-	-
Dampak Ekonomi Tidak Langsung Indirect Economic Impact	GRI 203-1, 203-2	Berdampak signifikan bagi pemangku kepentingan Significant impact to stakeholders	v	v	-
Anti Korupsi Anti-Corruption	GRI 205-1, 205-2, 205-3	Berdampak signifikan bagi keberlangsungan bisnis Perusahaan Significant impact to business continuity	v	-	-
Lingkungan Environment					
Pengelolaan Energi Energy Management	GRI 302-1	Berdampak signifikan bagi keberlanjutan lingkungan dan Kesehatan masyarakat Significant impact to environmental sustainability and public health	v	v	-
Pengelolaan Air Water Management	GR 303-5	Berdampak signifikan bagi keberlanjutan lingkungan dan Kesehatan masyarakat Significant impact to environmental sustainability and public health	v	v	-
Pengelolaan Limbah Waste Management	GRO 306-3	Berdampak signifikan bagi keberlanjutan lingkungan dan Kesehatan masyarakat Significant impact to environmental sustainability and public health	v	v	-

Topik Material Material Topic	Disclosure	Mengapa Topik Ini Material Reason for being Material Topic	Boundary		
			Kantor Pusat Head Office	Proyek Project	Anak Perusahaan Subsidiary
Sosial Social					
Kepegawaian Employment	GRI 401-1, 401-2, 401-3	Berdampak signifikan bagi pegawai Significant impact to employees	v	-	-
Pengembangan Kompetensi dan Keahlian Pegawai Employee Competency and Skill Development	GRI 404-1, 404-2, 404-3	Berdampak signifikan bagi pegawai Significant impact to employees	v	-	-
Keanekaragaman dan Peluang Setara dan Perlindungan Hak Asasi Manusia Diversity, Equal Opportunity, and Protection of Human Rights	GRI 405-1, 405-2	Berdampak signifikan bagi pegawai Significant impact to employees	v	-	-
Pengembangan Masyarakat Community Development	GRI 413-1	Berdampak signifikan bagi masyarakat Significant impact to communities	v	-	-
Kesehatan dan Keselamatan Pelanggan Customer Health and Safety	GRI 416-2	Berdampak signifikan bagi masyarakat Significant impact to communities	v	-	-

Selanjutnya, topik-topik material tersebut diprioritaskan menjadi 3 (tiga) tingkatan, yaitu *High*, *Medium* dan *Low* yang dapat dilihat pada grafik berikut ini.

Next, the material topics are prioritized into three levels, i.e., High, Medium, and Low, in the following graph.

Grafik Materialitas Sarana Jaya
Sarana Jaya's Materiality Graph



- | | |
|---|---|
| 1 Pengelolaan Limbah
Waste Management | 7 Pengembangan Kompetensi dan Keahlian Karyawan
Employee Competency and Skills Development |
| 2 Pengelolaan Energi
Energy Management | 8 Kepegawaian
Staffing |
| 3 Pengelolaan Air
Water Management | 9 Pengembangan Masyarakat
Community Development |
| 4 Kesehatan dan Keselamatan Pelanggan
Customer Health and Safety | 10 Keanekaragaman dan Peluang Setara dan Perlindungan Hak Asasi Manusia
Diversity and Equal Opportunity and Protection of Human Rights |
| 5 Dampak Ekonomi Tidak Langsung
Indirect Economic Impact | 11 Kinerja Ekonomi
Economic Performance |
| 6 Keberadaan Pasar
Market Existence | 12 Anti Korupsi
Anti-Corruption |

TITIK KONTAK LAPORAN INI

Pemangku kepentingan Perusahaan dapat menyampaikan pertanyaan, saran, ide, kritik dan tanggapan atas Laporan ini melalui Lembar Umpan Balik yang dapat ditemukan pada bagian akhir Laporan ini atau dengan menghubungi:

[GRI 2-3]

CONTACT POINT FOR THE REPORT

Company stakeholders can submit questions, suggestions, ideas, criticisms, and responses to this Report via the Feedback Sheet, which is available at the end of this Report, or by contacting: [GRI 2-3]



Kantor Pusat Perumda Pembangunan Sarana Jaya
Head Office of Perumda Pembangunan Sarana Jaya

 info@Sarana-jaya.co.id
 +62 21 352 2667
  +62 21 385 3960
  www.sarana-jaya.co.id

IKHTISAR KINERJA KEBERLANJUTAN

SUSTAINABILITY PERFORMANCE HIGHLIGHTS

► Kinerja Aspek Ekonomi [OJK B.1]

Economic Performance



Uraian Description	Satuan Unit	2023	2022	2021
Pendapatan Revenues	Rp Juta Million	211.954	158.435	241.211
Laba Tahun Berjalan Income for the Year		(98.863)	78.961	(217.165)
Distribusi Nilai Ekonomi kepada Pemangku Kepentingan Distribution of Economic Value to Stakeholders		298.323	306.602	258.181
Jumlah Proyek Number of Projects	Proyek Project	19	17	17
Jumlah Pemasok Lokal Number of Local Suppliers	Pemasok Supplier	57	64	67
Nilai Pengadaan Barang dan jasa Pemasok Lokal Goods and Services Procurement Value of Local Suppliers	Rp Juta Million	50.710	29.173	33.110

PRODUK RAMAH LINGKUNGAN

Sarana Jaya telah menggunakan teknologi ramah lingkungan untuk 2 (dua) Fasilitas Pengelolaan Sampah Antara (FPSA) atau *Intermediate Treatment Facility* (ITF) yakni dengan menggunakan *thermal hydrodrive* untuk pemusnahan sampah yang tidak bisa dimanfaatkan secara ekonomi atau organik. Teknologi ini memanfaatkan *superheated steam* (*synthetic gas*) untuk menjadi katalisator untuk meningkatkan suhu pada *furnace boiler* (ruang bakar) sekaligus bahan bakar. *Superheated steam* tersebut juga dimanfaatkan sebagai sumber panas untuk proses pengeringan sampah agar terjadi pembakaran sempurna.

Selain itu, untuk menjaga emisi yang dihasilkan, suhu dari perangkat tersebut dijaga pada suhu 850 derajat celsius, dan dilengkapi dengan filter asap menggunakan *cyclone wet scrubber* yang akan menyaring asap pembakaran dengan *cyclone* dan semburan air untuk menurunkan emisi pada ambang batas yang diizinkan.

ENVIRONMENTALLY FRIENDLY PRODUCTS

Sarana Jaya has used environmentally friendly technology for 2 (two) Intermediate Treatment Facility (ITF), by using thermal hydrodrive for the destruction of waste that cannot be utilized economically or organically. This technology utilizes superheated steam (synthetic gas) to become a catalyst to increase the temperature in the furnace boiler as well as fuel. The superheated steam is also utilized as a heat source for the waste drying process to ensure complete combustion.

In addition, to maintain the emissions produced, the temperature of the device is maintained at 850 degrees Celsius, and is equipped with a smoke filter using a cyclone wet scrubber that will filter the combustion smoke with a cyclone and water jet to reduce emissions to the permitted threshold.

► **Kinerja Aspek Lingkungan** [OJK B.2]
Environmental Performance

Biaya Pengelolaan dan Pelestarian Lingkungan untuk Perbaikan Sarana dan Lingkungan Berkelanjutan
Environmental Management and Preservation Costs for Sustainable Improvement of Facilities and Environment

Rp **266,13**
Juta Rupiah | Million Rupiah

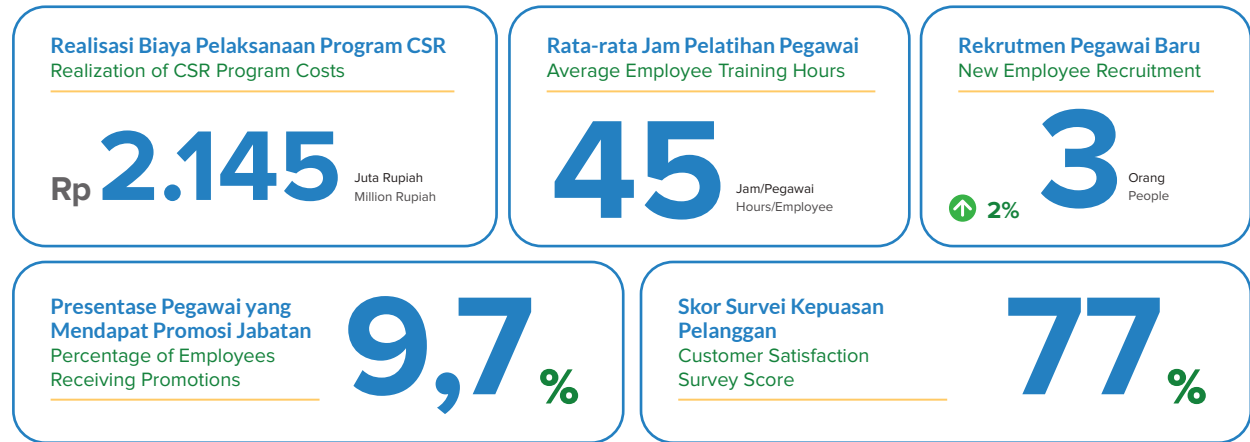
Penurunan Penggunaan Energi
Energy Use Reduction

↑ **38.80%**

Uraian Description	Satuan Unit	2023	2022	2021
Penggunaan Air Water Use	m ³	8.065	7.333	6.744
Penggunaan BBM Fuel Use	Gigajoule	643.242	393.494	361.899
Penggunaan Listrik Electricity Use		340	320	330
Penggunaan Energi Energy Use		643.582	393.814	362.229
Emisi GRK yang Dihasilkan Generated Scope 1 GHG Emission	TCO2-e	44.432,76	27.166,55	24.985,58
Emisi GRK yang Dihasilkan Generated Scope 2 GHG Emission		82,20	77,37	79,65
Jumlah Limbah yang Dihasilkan Total Generated Waste	Ton	30	Belum melakukan penghitungan No calculation	Belum melakukan penghitungan No calculation
Pelestarian Keanekaragaman Hayati* Biodiversity Preservation*	Rp Juta Million	266,13	213,87	Belum melakukan penghitungan No calculation

* Upaya pelestarian keanekaragaman hayati yang dilakukan Sarana Jaya mencakup upaya pengelolaan dan pelestarian lingkungan untuk perbaikan sarana dan lingkungan secara berkelanjutan.
Biodiversity conservation efforts carried out by Sarana Jaya include environmental management and conservation efforts to improve facilities and the environment in a sustainable manner.

► **Kinerja Aspek Sosial** [OJK B.3]
Social Performance Achievement



Uraian Description	Satuan Unit	2023	2022	2021
Jumlah Pegawai Number of Employees	Orang People	133	134	126
Rekrutmen Pegawai Baru New Employee Recruitment		3	19	15
Rata-rata Jam Pelatihan per Pegawai Average Employee Training Hours	Jam/Pegawai Hours/Employee	45	52,55	10,48
Presentase Pegawai yang Mendapat Promosi Jabatan Percentage of Employees Receiving Promotions	%	9,7%	17	-
Realisasi Biaya Pelaksanaan Program CSR Realization of CSR Program Costs	Rp Juta Million	2.145	3.493	2.524

► **Kinerja Aspek Tata Kelola**
Governance Performance Achievement



PRESTASI DAN PERISTIWA PENTING KEBERLANJUTAN TAHUN 2023

2023 SUSTAINABILITY ACHIEVEMENTS AND EVENT HIGHLIGHTS

► **16 Februari 2023** | February 16, 2023

Tingkatkan Peran Aktif dalam Pembangunan Berkelanjutan, Sarana Jaya Menerima Kunjungan Indonesia Global Compact Network

Increasing Active Role in Sustainable Development, Sarana Jaya Welcomes Visit from Indonesia Global Compact Network

Indonesia Global Compact Network (IGCN) merupakan jaringan lokal dari United Nations Global Compact yang didedikasikan untuk mempromosikan prinsip-prinsip pembangunan berkelanjutan yang dicanangkan oleh Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) di sektor bisnis. Jakarta. Dalam pertemuan dengan IGCN, Sarana Jaya memperkenalkan berbagai program yang telah dilaksanakan guna mendorong pembangunan berkelanjutan di Jakarta, antara lain program pengembangan hunian terjangkau yang terintegrasi, fasilitas pengolahan sampah, serta penerapan kesepuluh prinsip UNGC yang sejalan dengan visi misi Perusahaan. IGCN memberikan apresiasi atas upaya Sarana Jaya dalam mewujudkan prinsip-prinsip pembangunan berkelanjutan. Kedua pihak sepakat untuk meningkatkan kolaborasi guna mencapai tujuan bersama dalam upaya mengurangi dampak negatif pembangunan pada lingkungan serta meningkatkan kualitas hidup masyarakat Jakarta.

Indonesia Global Compact Network (IGCN) is a local network of the United Nations Global Compact dedicated to promoting the sustainable development principles proclaimed by the United Nations (UN) in the business sector. In a meeting with IGCN, Sarana Jaya introduced various programs that have been implemented to encourage sustainable development in Jakarta, including an integrated, affordable housing development program, waste processing facilities, and the implementation of the ten UNGC principles, which are in line with the Company's vision and mission. IGCN appreciates Sarana Jaya's efforts to realize sustainable development principles. Both parties agreed to increase collaboration to achieve common goals, reduce the negative impact of development on the environment, and improve the quality of life of the Jakartan people.

► **28 Februari 2023** | February 28, 2023

Sarana Jaya dan BPKP Fasilitasi Kegiatan FGD Penerapan Tata Kelola Perusahaan yang Baik pada BUMD

Sarana Jaya and BPKP Facilitate FGD Activities on the Good Corporate Governance Implementation in BUMD

Sarana Jaya dan Badan Pembinaan Badan Usaha Milik Daerah (BP BUMD) melaksanakan kegiatan *Focus Group Discussion* (FGD) terkait Penerapan Tata Kelola Perusahaan Yang Baik (*Good Corporate Governance*) pada BUMD. Acara ini mengusung tema "Evaluasi atau *Assessment Good Corporate Governance* (GCG) serta manajemen risiko pada Badan Usaha Milik Daerah", serta diselenggarakan di Hotel Novotel Cikini, Jakarta Pusat.

Sarana Jaya and the Region-Owned Enterprise Development Agency (BP BUMD) conducted a Focus Group Discussion (FGD) on Good Corporate Governance Implementation in BUMD. The event was themed "Evaluation or Assessment of Good Corporate Governance (GCG) and Risk Management in Region-Owned Enterprises" in Novotel Hotel Cikini, Central Jakarta.

► **20 April 2023** | April 20, 2023

Sarana Jaya dan Rumah Zakat Indonesia Bekerja Sama dalam Kegiatan Sosial berupa Penyaluran Bantuan pada bulan Ramadhan 1444 H

Sarana Jaya and Rumah Zakat Indonesia Collaborate in Social Activities in Aid Distribution in the month of Ramadhan 1444 H

Sarana Jaya dan Rumah Zakat Indonesia bekerja sama menyelenggarakan kegiatan sosial berupa penyaluran bantuan pada bulan Ramadhan 1444 H. Dengan tema "Ramadan Kejar Pahala #bergeraknyata untuk Indonesia", kegiatan ini bertujuan untuk membantu para penerima manfaat agar dapat merayakan hari raya Idul Fitri dengan lebih bahagia. Pelaksanaan kegiatan ini mencakup berbagi iftar, berbagi sembako, wakaf Al-Qur'an, Sumbangan Sajadah dan bantuan program Ramadhan Bebas Hutang.

Sarana Jaya and Rumah Zakat Indonesia worked together to organize aid distribution in the month of Ramadhan 1444 H. The theme "Pursue Ramadan Rewards #gorealforIndonesia" aims to help the beneficiaries celebrate Eid al-Fitr more happily. Implementation of this event includes sharing iftar, basic necessities, Al-Qur'an waqf, prayer mat donations, and assistance with the Debt Free Ramadhan program.

▶ 25 Mei 2023 | May 25, 2023

Peletakan Batu Pertama Menara Ayasa, Hunian Terjangkau di Jakarta untuk Warga DKI Jakarta

Groundbreaking for Menara Ayasa, Affordable Housing in Jakarta for DKI Jakarta Residents

Setelah berhasil meresmikan 1.348 unit hunian di Jakarta Timur tahun lalu, pada bulan Mei 2023 ini, Sarana Jaya kembali memperkuat komitmennya dalam mendukung penyediaan Hunian Terjangkau di Jakarta dengan menggelar peletakan batu pertama Menara Ayasa Nuansa Cilangkap. Proyek ini bertujuan untuk memberikan solusi bagi masyarakat Jakarta yang menginginkan hunian terjangkau di lokasi strategis.

Hunian Terjangkau Menara Ayasa berlokasi di kawasan Nuansa Cilangkap dan dibangun di atas luas lahan seluas ± 2,9 hektar, luas bangunan ± 2 hektar dan akan terdiri dari 24 lapis. Adapun Menara Ayasa ini akan memiliki 415 unit dengan 18/19 unit per lapisnya dan memiliki tipe hunian 2 Kamar. Pembangunan Menara Ayasa ini merupakan Menara kedua yang berada di Kawasan Nuansa Cilangkap. Nantinya, Menara Ayasa Nuansa Cilangkap juga akan dilengkapi dengan fasilitas halte mikrotrans yang terintegrasi, ruang terbuka hijau, balai warga, lift, lahan parkir dan klinik kesehatan.

Pembangunan proyek Menara Ayasa Nuansa Cilangkap merupakan inisiatif Sarana Jaya untuk terus mendukung pembangunan hunian yang layak dan terjangkau di Jakarta. Setelah sukses menyasar Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR) dalam pembangunan hunian terjangkau sebelumnya.

After successfully inaugurating 1,348 residential units in East Jakarta last year, in May 2023, Sarana Jaya once again strengthened its commitment to supporting the provision of affordable housing in Jakarta by holding the groundbreaking for the Menara Ayasa Nuansa in Cilangkap. The project aims to provide a solution for Jakarta people who want affordable housing in a strategic location.

Menara Ayasa Affordable Housing is located in the Nuansa Cilangkap area and is built on a land area of ±2.9 hectares. The building area is ±2 hectares and will consist of 24 layers. Menara Ayasa will have 415 units with 18/19 units per layer and has a two-bedroom residential type. The construction of the Menara Ayasa is the second tower in the Nuansa Cilangkap area. Later, the Menara Ayasa Nuansa Cilangkap will also have integrated microtrans bus stop facilities, green open space, a community hall, elevators, a parking area, and a health clinic.

The construction of the Menara Ayasa Nuansa Cilangkap project is Sarana Jaya's initiative to support the development of decent and affordable housing in Jakarta after successfully targeting Low-Income Communities (MBR) in previous affordable housing developments

▶ 29 Mei 2023 | May 29, 2023

Sarana Jaya Mengikuti Kegiatan Bimbingan Teknis yang Diselenggarakan oleh Pemprov DKI Jakarta bersama Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK)

Sarana Jaya Participates in Technical Guidance Organized by the DKI Jakarta Provincial Government with the Corruption Eradication Commission (KPK)

Dalam rangka mewujudkan lingkungan Pemprov DKI Jakarta yang bersih dan berintegritas, jajaran Dewan Komisaris dan Direksi Sarana Jaya mengikuti kegiatan bimbingan teknis yang diselenggarakan oleh Pemprov DKI Jakarta bersama Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Selanjutnya, nilai-nilai integritas ini diharapkan langsung diterapkan di lingkungan kerja profesional hingga ke lingkungan terkecil yaitu keluarga masing-masing.

To create a clean and integrity environment for the DKI Jakarta Provincial Government, Sarana Jaya's Supervisory Board and Board of Directors participated in technical guidance organized by the DKI Jakarta Provincial Government with the Corruption Eradication Commission (KPK). These integrity values are expected to be directly applied in the professional work environment and the smallest environment, i.e., each family.

▶ 30 Juni 2023 | June 30, 2023

Sarana Jaya Turut Serta Sebagai Mitra Kegiatan Jakarta Berkurban

Sarana Jaya Participates as a Partner in Jakarta Berkurban

Dalam rangka memperingati Hari Raya Idul Adha 1444 H, Sarana Jaya turut serta berkontribusi bersama Baznas (Bazis) DKI Jakarta melalui program Dapur Qurban di Kp. Lodan, Ancol, Jakarta Utara dalam bentuk kemasan kaleng. Partisipasi aktif Sarana Jaya dalam program Jakarta Berkurban menandai komitmen perusahaan dalam mendukung nilai-nilai sosial dan keagamaan.

In commemorating Eid al-Adha 1444 H, Sarana Jaya contributes to the DKI Jakarta Baznas (Bazis) through the Qurban Kitchen program at Kp. Lodan, Ancol, North Jakarta in canned packaging. Sarana Jaya's active participation in the Jakarta Berkurban program marks the company's commitment to supporting social and religious values.

► **27 Juli 2023** | July 27, 2023

Mendukung Pendidikan Anak Usia Dini, Sarana Jaya bersama Kasudin Jakarta Timur Meresmikan PAUD SPS Satu Nusa di Menara Samawa, Nuansa Pondok Kelapa

Supporting Early Childhood Education, Sarana Jaya and the East Jakarta Sub-Dept Head Inaugurated SPS Satu Nusa Early Childhood Education (PAUD) at Menara Samawa, Nuansa Pondok Kelapa

Berlokasi di RW 015 Kelurahan Pondok Kelapa, SPS Satu Nusa Menara Samawa Nuansa Pondok Kelapa diharapkan bisa menjadi sarana pendidikan dan kelompok bermain yang ramah anak dan mampu mewujudkan generasi penerus yang cerdas dan berkualitas sejak dini.

Located in RW 015, Kelurahan Pondok Kelapa, SPS Satu Nusa Menara Samawa Nuansa Pondok Kelapa is expected to be a child-friendly educational facility and play group capable of creating an intelligent and qualified next generation from an early age.

Selamat atas Peresmian PAUD SPS Satu Nusa di Menara Samawa, Nuansa Pondok Kelapa!

Congratulations on the inauguration of SPS Satu Nusa PAUD at Menara Samawa, Nuansa Pondok Kelapa!

► **2 Agustus 2023** | August 2, 2023

Sarana Jaya Hadiri Rangkaian Acara MGMAC dan AMF 2023 dan Peresmian Taman ASEAN di Kecamatan Kebayoran Baru, Jakarta Selatan

Sarana Jaya Attends Series of MGMAC and AMF 2023 Events and Inauguration of ASEAN Park in Kecamatan Kebayoran Baru, South Jakarta

DKI Jakarta bersiap menjadi tuan rumah KTT ASEAN Ke-42 yang digelar pada bulan September 2023. Dalam rangka mendukung dan mempercantik sejumlah kawasan, Sarana Jaya bersama Pemprov DKI Jakarta berkolaborasi dalam peresmian Taman ASEAN di Kecamatan Kebayoran Baru, Jakarta Selatan.

DKI Jakarta is preparing to host the 42nd ASEAN Summit, which will be held in September 2023. To support and beautify several areas, Sarana Jaya and the DKI Jakarta Provincial Government collaborated to inaugurate the ASEAN Park in Kecamatan Kebayoran Baru, South Jakarta.

Selain sebagai monumen histori dalam keketuaan DKI Jakarta sebagai Tuan Rumah ASEAN, pembangunan ini juga terkait dengan upaya penambahan Ruang Terbuka Hijau (RTH) di Kota Jakarta.

Apart from being a historical monument in DKI Jakarta's chairmanship as ASEAN Host, the construction is also related to efforts to add Green Open Space (RTH) in Jakarta.

► **29 Agustus 2023** | August 29, 2023

Sarana Jaya Menyelenggarakan Seremonial Sarana Jaya Peduli Jakarta Beraksi di Pulo Gebang

Sarana Jaya Holds the Sarana Jaya Peduli Jakarta Beraksi Ceremonial in Pulo Gebang

Sarana Jaya dengan bangga menyelenggarakan seremonial "Sarana Jaya Peduli Jakarta Beraksi" di Aula Kelurahan Pulo Gebang. Acara ini dihadiri oleh jajaran Dinas Kesehatan Provinsi DKI Jakarta, Suku Dinas Kesehatan Jakarta Timur, Lurah Pulo Gebang, Kepala Puskesmas Setempat, Kader Posyandu dan TP PKK Kecamatan Cakung Timur. Kehadiran para partisipan menunjukkan tekad penuh seluruh pihak untuk mengatasi persoalan *stunting* demi terciptanya masa depan yang lebih cerah.

Sarana Jaya is proud to hold the "Sarana Jaya Peduli Jakarta Beraksi" ceremony at the Pulo Gebang Village Hall. The event was attended by the ranks of the DKI Jakarta Provincial Health Service, the East Jakarta Health Subdepartment, the Pulo Gebang Subdistrict Head, the Head of the Local Health Center, Posyandu Cadres, and TP PKK Kecamatan Cakung Timur. The presence of the participants shows the full determination of all parties to overcome the problem of stunting to create a brighter future.

► **26 September 2023** | September 26, 2023

Sarana Jaya Laksanakan Giat Gerakan BUMD Menanam di Wilayah Sunter, Jakarta Utara

Sarana Jaya Actively Implements the BUMD Planting Movement in the Sunter Area, North Jakarta

Dalam rangkaian kegiatan BUMD Menanam, Sarana Jaya secara simbolis telah menyelesaikan penanaman sebanyak 50 pohon yang terdiri dari 4 pohon Trembesi dan 46 pohon Bungur. Seluruh pohon tersebut ditanam di sisi barat Jakarta International Stadium (JIS), di Jalan Danau Sunter Barat, Jakarta Utara. Partisipasi Sarana Jaya dalam aksi penanaman pohon tersebut menunjukkan kontribusi Perusahaan dalam menjaga keberlangsungan lingkungan hidup yang pada gilirannya diharapkan juga dapat menjadikan kawasan tersebut menjadi lebih teduh, asri, dan sejuk dengan keberadaan pohon-pohon tersebut.

In the series of BUMD Planting activities, Sarana Jaya has symbolically completed planting 50 trees consisting of four Trembesi trees and 46 Bungur trees. All the trees were planted on the west side of the Jakarta International Stadium (JIS), on Jalan Danau Sunter Barat, North Jakarta. Sarana Jaya's participation in the tree planting action shows the Company's contribution to maintaining environmental sustainability, which is also expected to make the area more sheltered, beautiful, and cool with these trees.

► **19 November 2023** | November 19, 2023

Siap Siaga Menghadapi Musim Hujan, Sarana Jaya Turut Ambil Bagian dalam Kegiatan Bakti Kita untuk Jakarta

Ready to Face the Rainy Season, Sarana Jaya Takes Part in Kita Untuk Jakarta Community Service

Menyambut musim penghujan, Pemprov DKI Jakarta, bersama Dinas Sumber Daya Air (SDA) DKI Jakarta, Aparatur Sipil Negara (ASN), Penyedia Jasa Lainnya Perorangan (PJLP), Tenaga Ahli (TA), serta seluruh BUMD DKI Jakarta, dan warga DKI Jakarta melaksanakan giat gotong royong Bakti Kita untuk Jakarta serentak di seluruh wilayah di DKI Jakarta. Kegiatan Bakti Kita untuk Jakarta dilaksanakan serentak di 8 Kecamatan di Jakarta Pusat, 10 Kecamatan di Jakarta Timur, 8 Kecamatan di Jakarta Barat, 6 Kecamatan di Jakarta Utara, 10 Kecamatan di Jakarta Selatan, dan 2 Kecamatan di Kepulauan Seribu. Pada giat kerja bakti ini, Sarana Jaya turut berkontribusi melakukan pembersihan lingkungan di 2 (dua) titik lokasi di Kawasan Jakarta Barat, yakni Kelurahan Glodok dan Kelurahan Pinangasia.

To welcome the rainy season, the DKI Jakarta Provincial Government, the DKI Jakarta Water Resources (SDA) Department, State Civil Apparatus (ASN), Other Individual Service Providers (PJLP), Expert Staff (TA), all DKI Jakarta BUMDs, and DKI Jakarta residents carry out the cooperation activities of Bakti Kita for Jakarta simultaneously in all DKI Jakarta areas. Bakti Kita for Jakarta is carried out in eight subdistricts in Central Jakarta, ten subdistricts in East Jakarta, eight subdistricts in West Jakarta, six subdistricts in North Jakarta, ten subdistricts in South Jakarta, and two subdistricts in Seribu Islands. In this community service activity, Sarana Jaya contributed to environmental cleaning at two locations in the West Jakarta area, i.e., Kelurahan Glodok dan Kelurahan Pinangasia.

► **23 November 2023** | November 23, 2023

Optimalisasi Tata Kelola, Sarana Jaya Gelar *Sharing Session* mengenai Tata Kelola yang Baik di Lingkungan Perusahaan

Optimizing Governance, Sarana Jaya Holds *Sharing Session* on Good Governance in the Company

Sarana Jaya melaksanakan acara diskusi interaktif di lingkungan internal dalam upaya mempertegas komitmen implementasi GCG, bertempat di Gedung Sarana Jaya Lt. 4 Ruang Eks Arsip. Kegiatan *Sharing Session* dibuka langsung oleh Kepala Satuan Pengawas Intern - Bapak Bayu Romas dan dilanjutkan dengan pemaparan materi mengenai GCG oleh Komite Remunerasi dan Nominasi-Ibu Daryah, dengan tema bertajuk "*Lesson Learned: Dari Kita, Oleh Kita, dan Untuk Perumda Pembangunan Sarana Jaya*".

Sarana Jaya held an interactive discussion in the internal environment to strengthen its commitment to implementing GCG at the Sarana Jaya Building, Fl. 4 Former-Archive Rooms. The *Sharing Session* began with the Head of the Internal Supervisory Unit - Mr. Bayu Romas, and continued with the material presentation on GCG by the Remuneration and Nomination Committee - Mrs. Daryah, themed "*Lesson Learned: From Us, By Us, and For Perumda Pembangunan Sarana Jaya*."

Melalui diskusi ini, diharapkan seluruh Insan Sarana Jaya dapat menjadikan GCG sebagai budaya perusahaan dalam melaksanakan kegiatan korporasi dan menggerakkan bisnis sehingga terwujud perusahaan yang unggul, sehat, dan mendapat kepercayaan di kancah publik.

Through this discussion, it is expected that all Sarana Jaya personnel can make GCG a company culture by carrying out corporate activities and driving business so that the company can be superior, sound, and trusted in the public arena.

► **29 November 2023** | November 29, 2023

Aksi Peduli Lingkungan: Sarana Jaya Mengikuti Kegiatan Gerakan "Tanam Bersama Presiden RI" di Nuansa Cilangkap

Sarana Jaya Cares for the Environment: Sarana Jaya Participates in the "Tree-Planting" Movement in the BUMD Planting and Tree Planting Movement Program with the President of the Republic of Indonesia

Sebagai wujud antisipasi terhadap perubahan iklim yang semakin nyata, Pemerintah Indonesia mengajak seluruh masyarakat dan pemerintah kota, mulai dari tenaga Aparatur Sipil Negara (ASN), tenaga kesehatan, tenaga pendidik, dan perusahaan BUMD DKI Jakarta untuk menggalakan program penghijauan dan mendukung "Tanam Pohon Bersama Presiden RI". Sarana Jaya sebagai BUMD Pemprov DKI Jakarta juga turut mendukung aksi lingkungan tersebut. Pada kegiatan ini, Sarana Jaya berpartisipasi menanam 2 (dua) jenis tanaman, yaitu Pohon Mangga Arumanis dan Pohon Ketapang Kencana di 10 titik tersebar di Nuansa Cilangkap.

To anticipate the increasingly real climate change, the Indonesian Government invited all communities and city governments, starting from State Civil Apparatus (ASN), health workers, educational staff, and DKI Jakarta BUMD companies to promote greening programs and support "Tree Planting with the President of the Republic of Indonesia." As a DKI Jakarta Provincial Government BUMD, Sarana Jaya supports this environmental action. In this activity, Sarana Jaya planted two types of plants, Arumanis Mango Trees and Ketapang Kencana Trees, at ten points across Nuansa Cilangkap.

► 1 Desember 2023 | December 1, 2023

Bersama Lawan Stigma, Bangun Kesadaran: Sarana Jaya dan Dharma Wanita Sarana Jaya Gelar *Sharing Session* dan Sosialisasi Penanggulangan HIV/AIDS di Hari AIDS Sedunia

Fighting Stigma, Build Awareness: Sarana Jaya and Dharma Wanita Sarana Jaya Hold *Sharing Session* and Dissemination on HIV/AIDS Prevention on World AIDS Day

Dalam rangka memperingati Hari AIDS sedunia, Sarana Jaya dan Dharma Wanita Sarana Jaya menggelar *sharing session* yang mengusung tema “Bersama Lawan Stigma, Bangun Kesadaran Aksi Bersama untuk Penanggulangan HIV/AIDS”. Melalui acara ini, diharapkan dapat memberikan pemahaman yang lebih mendalam kepada para peserta mengenai HIV/AIDS, mendorong dialog terbuka, dan menciptakan lingkungan yang mendukung bagi individu yang hidup dengan kondisi tersebut. Para peserta *sharing session* juga diberikan wawasan tentang langkah-langkah preventif, pentingnya pengujian, serta dukungan yang dapat diberikan kepada mereka yang terkena dampak.

In commemoration of World AIDS Day, Sarana Jaya and Dharma Wanita Sarana Jaya held a *sharing session* with the theme “Fighting Stigma, Build Awareness to Overcome HIV/AIDS.” Through this event, it is expected to provide a deeper understanding to the participants regarding HIV/AIDS, encouraging open dialogue and creating a supportive environment for individuals living with the condition. *Sharing session* participants were also given insight into preventive measures, the importance of testing, and the support that can be provided to those affected.

Peran aktif Sarana Jaya dan Dharma Wanita Sarana Jaya dalam kegiatan ini diharapkan dapat menginspirasi tindakan kolektif, mendorong partisipasi masyarakat dan membangun kesadaran bahwa penganggulangan HIV/AIDS merupakan tanggung jawab bersama. Dengan kolaborasi ini, diharapkan tercipta lingkungan yang lebih inklusif dan mendukung bagi mereka yang terlibat dalam perjuangan melawan HIV/AIDS.

It is hoped that Sarana Jaya and Dharma Wanita Sarana Jaya’s active role in this activity can inspire collective action, encourage community participation, and build awareness that ending HIV/AIDS is a shared responsibility. With this collaboration, it is hoped that a more inclusive and supportive environment will be created for those involved in the fight against HIV/AIDS.

► 5 Desember 2023 | December 5, 2023

Usung Semangat Pengelolaan Sampah yang Baik, Sarana Jaya Resmikan Pembangunan Bank Sampah Samawa di Nuansa Pondok Kelapa

Carrying the Spirit of Good Waste Management, Sarana Jaya Inaugurates the Construction of the Samawa Waste Bank in Nuansa Pondok Kelapa

Menara Samawa Nuansa Pondok Kelapa meresmikan Bank Sampah sebagai wadah pengelolaan sampah warga Menara Samawa dan lingkungan sekitarnya. Acara peresmian ini dihadiri langsung oleh Suku Dinas Lingkungan Hidup Kec. Duren Sawit, Kepala Seksi Ekonomi dan Pembangunan Kelurahan Pondok Kelapa, perwakilan Perumda Sarana Jaya, Tim Penggerak Bank Sampah, Pengurus RW 015, LMK Menara Samawa dan Jajaran pengurus RT setempat.

Menara Samawa Nuansa Pondok Kelapa inaugurated the Waste Bank as a forum for managing waste for the residents of Menara Samawa and the surrounding environment. The inauguration was attended by the Environmental Service of Kecamatan Duren Sawit, Head of the Economic and Development Section of Kelurahan Pondok Kelapa, representatives of Perumda Sarana Jaya, Waste Bank Mobilization Team, RW 015 administrators, LMK Menara Samawa and local RT administrators.

► 28 Desember 2023 | December 28, 2023

Sarana Jaya Laksanakan *Launching Program* Jakarta Beraksi bersama Pemerintah Kota Administrasi Jakarta Pusat dan Baznas (Bazis) DKI Jakarta

Sarana Jaya Cares for Health: Sarana Jaya Launches Jakarta BERAKSI Program (Moving to Overcome Stunting) with Central Jakarta Administration Government and DKI Jakarta Baznas (Bazis)

Sarana Jaya bersama Walikota Jakarta Pusat dan Baznas (Bazis) Provinsi DKI Jakarta melaksanakan giat *launching* Jakarta Beraksi (Bergerak Atasi *Stunting*) sekaligus pemberian Apresiasi bagi CSR Program Jakarta Beraksi di Kelurahan Petojo, Jakarta Pusat. Acara ini dilaksanakan di RPTRA Kejora, Jl. Pembangunan II No.12, RT 9/ RW 2 Kelurahan Petojo Utara, Kecamatan Gambir. Turut hadir dalam kegiatan, Walikota Kota Administrasi Jakarta Pusat – Bapak Dhany Sukma beserta jajarannya. Direktur Utama Sarana Jaya – Bapak Andira Reoputra dan Perwakilan dari Baznas (Bazis) DKI Jakarta serta para kader dan orang tua balita *stunting*, *wasting*, dan *underweight*. Sarana Jaya berkomitmen untuk terus memberikan pelayanan yang maksimal bagi masyarakat melalui program CSR dalam menangani *stunting* sehingga dapat menciptakan masa depan yang lebih baik dan sehat bagi generasi penerus bangsa.

With the Central Jakarta Mayor and DKI Jakarta Baznas (Bazis), Sarana Jaya launched Jakarta Beraksi (Overcoming Stunting) as well as appreciating the Jakarta Beraksi CSR Program in Kelurahan Petojo, Central Jakarta. The event was held at RPTRA Kejora, Jl. Pembangunan II No.12, RT 9/RW 2 Kelurahan Petojo Utara, Kecamatan Gambir. Also attending the activity was the Central Jakarta Mayor Mr. Dhany Sukma, and his staff, Sarana Jaya President Director Mr. Andira Reoputra, DKI Jakarta Baznas (Bazis) Representatives, as well as cadres and parents of stunted, wasted, and underweight toddlers. Sarana Jaya is committed to providing maximum service to the community through CSR programs dealing with stunting to create a better and healthier future for the nation’s next generation.

SAMBUTAN DIREKTUR UTAMA [OJK D.1] MESSAGE FROM THE PRESIDENT DIRECTOR



Para Pemangku Kepentingan yang terhormat,

Puji dan syukur kami panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa berkat rahmat dan karunia-Nya sehingga Perumda Pembangunan Sarana Jaya (“Kami” atau “Sarana Jaya”) dapat melalui tahun 2023 dengan baik. Dalam laporan ini, kami ingin menyampaikan komitmen dalam menghadapi berbagai tantangan dan memajukan kinerja keberlanjutan di semua aspek operasional kami.

KEBIJAKAN MERESPON TANTANGAN

Tahun 2023 merupakan tahun yang penuh dengan dinamika dan tantangan, baik dari aspek lingkungan, sosial, maupun ekonomi. Potensialnya perubahan regulasi terkait lingkungan, percepatan urbanisasi, dan ketidakpastian ekonomi menjadi isu-isu utama yang memengaruhi bisnis Perusahaan. Untuk mengatasi tantangan-tantangan ini, Sarana Jaya telah berfokus pada inovasi, efisiensi operasional, dan kolaborasi yang lebih baik.

Kami merespons isu-isu ini dengan mengimplementasikan praktik-praktik bisnis berkelanjutan yang kuat, seperti investasi dalam teknologi hijau dan pengembangan solusi inovatif yang ramah lingkungan. Selain itu, kami juga berkolaborasi dengan pemerintah dan berbagai pihak lain untuk menciptakan solusi yang berkelanjutan, yang tidak hanya menguntungkan perusahaan tetapi juga masyarakat luas.

Esteemed Stakeholders,

Praise and gratitude to God Almighty for His mercy and grace so that Perumda Pembangunan Sarana Jaya (“We” or “Sarana Jaya”) can go through 2023 well. In this report, we would like to express our commitment to facing various challenges and advancing sustainability performance in all aspects of our operations.

POLICY TO RESPOND TO CHALLENGES

The year 2023 is a year full of dynamics and challenges from the environmental, social, and economic aspects. Potential changes in environmental regulations, accelerated urbanization, and economic uncertainty are key issues affecting the Company’s business. To address these challenges, Sarana Jaya has focused on innovation, operational efficiency, and better collaboration.

We respond to these issues by implementing strong and sustainable business practices, such as investing in green technology and developing innovative, environmentally friendly solutions. In addition, we collaborate with the government and various parties to create sustainable solutions that benefit the company and society at large.

Komitmen manajemen terhadap keberlanjutan terlihat jelas dalam setiap keputusan bisnis yang kami buat. Kami memprioritaskan praktik-praktik berkelanjutan dan memastikan akuntabilitas dalam pencapaian target-target keberlanjutan kami. Langkah ini sejalan dengan visi kami untuk menjadi pemimpin dalam pembangunan yang berkelanjutan di Daerah Khusus Ibukota Jakarta.

Kami menyadari bahwa keberlanjutan adalah perjalanan yang panjang dan memerlukan komitmen serta kerja keras dari seluruh pemangku kepentingan. Oleh karena itu, kami terus meningkatkan kesadaran dan komitmen internal, serta memastikan bahwa semua anggota organisasi kami berperan aktif dalam mencapai tujuan keberlanjutan kami.

PENERAPAN STRATEGI KEBERLANJUTAN

Strategi keberlanjutan kami mencakup peningkatan efisiensi energi, pengurangan limbah, peningkatan tanggung jawab sosial, penguatan tata kelola perusahaan, proses bisnis yang efektif, efisien dan adaptif, peningkatan penerapan teknologi ramah lingkungan dalam setiap bisnis. Namun, dalam penerapannya, kami menghadapi berbagai tantangan internal.

Membangun dan menjaga kesadaran serta komitmen terhadap keberlanjutan di seluruh tingkatan organisasi adalah tantangan yang memerlukan pendekatan berkelanjutan. Selain itu, tantangan lainnya yaitu memastikan bahwa setiap keputusan bisnis mencerminkan komitmen kami terhadap keberlanjutan memerlukan integrasi yang mendalam dan konsisten. Menyediakan data yang akurat dan relevan untuk mengukur dan melaporkan kinerja keberlanjutan adalah kunci untuk transparansi dan akuntabilitas yang efisien dan efektif membutuhkan waktu dan sosialisasi kepada seluruh unit kerja. Membangun kapasitas internal yang cukup untuk mendukung inisiatif keberlanjutan adalah langkah penting dalam penerapan strategi kami, sehingga diperlukan upaya yang berkesinambungan. Merubah budaya organisasi untuk mendukung praktik-praktik berkelanjutan memerlukan waktu dan upaya yang signifikan. Tantangan lainnya, mengelola risiko yang terkait dengan aspek lingkungan dan sosial dalam operasional kami memerlukan pendekatan yang holistik dan proaktif. Di samping itu, membangun dan memelihara kemitraan yang kuat dengan berbagai pemangku kepentingan adalah hal yang esensial untuk keberhasilan strategi keberlanjutan kami.

Management's commitment to sustainability is evident in every business decision we make. We prioritize sustainable practices and ensure accountability in achieving our sustainability targets. This measure aligns with our vision to be a leader in sustainable development in Jakarta Special Capital Region.

We recognize that sustainability is a long journey and requires commitment and hard work from all stakeholders. Therefore, we continue to raise internal awareness and commitment, as well as ensure that all members of our organization play an active role in achieving our sustainability goals.

SUSTAINABILITY STRATEGY IMPLEMENTATION

Our sustainability strategy includes improving energy efficiency, reducing waste, enhancing social responsibility, strengthening of corporate governance, effective, efficient, and adaptive business processes, and increased application of environmentally friendly technology in every business. However, during its implementation, we faced various internal challenges.

Building and maintaining awareness and commitment to sustainability at all levels of the organization is a challenge that requires a continuous approach. Another challenge is ensuring that every business decision reflects our commitment to sustainability, which requires deep and consistent integration. Providing accurate and relevant data to measure and report sustainability performance is key to transparency and efficient and effective accountability, which requires time and dissemination to all work units. Building sufficient internal capacity to support sustainability initiatives is critical in implementing our strategy, which requires continuous effort. Changing the organizational culture to support sustainable practices requires significant time and effort. Managing environmental and social risks in our operations is another challenge that requires a holistic and proactive approach. In addition, building and maintaining solid partnerships with various stakeholders is essential to the success of our sustainability strategy.

Untuk mengatasi tantangan-tantangan tersebut, kami telah mengembangkan strategi yang komprehensif yang didukung oleh manajemen kepemimpinan dari setiap level struktur yang kuat komitmen untuk terus meningkatkan kinerja keberlanjutan. Kami juga terus meningkatkan komunikasi dan keterlibatan seluruh anggota organisasi, serta membangun kemitraan yang lebih baik dengan berbagai pihak terkait.

KINERJA KEBERLANJUTAN

Aspek Ekonomi

Pada tahun 2023, Sarana Jaya berhasil mencatat pertumbuhan laba yang berkelanjutan, sejalan dengan target keuangan yang telah kami tetapkan. Pendapatan perusahaan meningkat berkat efisiensi operasional dan pengembangan produk serta layanan yang berkelanjutan secara finansial. Pencapaian ini tidak hanya mencerminkan kinerja ekonomi yang baik, tetapi juga memberikan nilai tambah ekonomi yang signifikan bagi para pemangku kepentingan kami.

Aspek Lingkungan

Dalam upaya mengurangi dampak lingkungan, kami telah berhasil menurunkan emisi karbon dan menambah ruang terbuka hijau di tengah masyarakat secara signifikan. Inisiatif penanaman pohon di Jakarta, efisiensi penggunaan sumber daya alam, penggunaan energi terbarukan, serta pengelolaan limbah dan air secara berkelanjutan, merupakan bagian dari strategi kami untuk menjaga dan melindungi ekosistem lokal.

Aspek Sosial

Kami telah terlibat aktif dalam berbagai program CSR yang bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat sekitar. Peningkatan kesejahteraan dan keselamatan karyawan, pemberdayaan masyarakat lokal, kontribusi terhadap pengentasan kemiskinan, serta dukungan terhadap pendidikan dan kesehatan masyarakat, merupakan komitmen kami untuk menciptakan dampak sosial yang positif dan berkelanjutan.

Aspek Tata Kelola

Dalam hal tata kelola perusahaan, kami terus meningkatkan transparansi dan akuntabilitas. Praktik tata kelola yang baik, penghindaran konflik kepentingan, perlindungan hak asasi manusia, dan kepatuhan terhadap peraturan dan standar hukum yang berlaku adalah fondasi utama dalam menjalankan operasional kami. Kami percaya bahwa tata kelola yang baik adalah landasan untuk membangun kepercayaan dan keberlanjutan.

To address these challenges, we have developed a comprehensive strategy supported by strong management leadership from every structure level and a commitment to continuously improving our sustainability performance. We also continue to improve communication and engagement across the organization and build better partnerships with various stakeholders.

SUSTAINABILITY PERFORMANCE

Economic Aspects

In 2023, Sarana Jaya recorded sustainable profit growth in line with our set financial targets. The Company's revenue increased due to operational efficiency and the development of financially sustainable products and services. The achievement reflects good economic performance and provides significant added value for our stakeholders.

Environmental Aspects

We have significantly reduced carbon emissions and increased green open space in the community to reduce our environmental impact. Tree planting initiatives in Jakarta, efficient use of natural resources, use of renewable energy, and sustainable waste and water management are part of our strategy to maintain and protect local ecosystems.

Social Aspects

We have been actively involved in various CSR programs to improve the surrounding community's welfare. Improving employee welfare and safety, empowering local communities, contributing to poverty alleviation, as well as supporting education and public health are part of our commitment to creating positive and sustainable social impact.

Governance Aspects

In corporate governance, we continue to improve transparency and accountability. Good governance practices, avoidance of conflicts of interest, protection of human rights, and compliance with applicable regulations and legal standards are the main foundations of our operations. We believe that good governance is the foundation for building trust and sustainability.

STRATEGI PENCAPAIAN TARGET DAN PERBAIKAN BERKELANJUTAN

Kesuksesan pencapaian kinerja keberlanjutan kami diukur dengan membandingkan pencapaian aktual dengan target yang telah ditetapkan, serta memperhatikan tanggapan dan kepuasan pemangku kepentingan. Kami melakukan evaluasi reguler terhadap kinerja di berbagai bidang dan membandingkannya dengan tahun-tahun sebelumnya untuk mendapatkan wawasan yang berharga tentang kemajuan yang telah dicapai.

Meskipun kami telah mencapai banyak hal, kami menyadari bahwa masih ada ruang untuk perbaikan. Tantangan spesifik yang dihadapi akan diidentifikasi dan diatasi melalui perbaikan proses dan sistem yang ada, peningkatan pelatihan dan pengembangan karyawan, serta peningkatan komunikasi internal tentang pentingnya kinerja keberlanjutan. Kami juga akan menjalin kolaborasi dan kemitraan dengan pihak terkait untuk mencapai tujuan ini.

PENGELOLAAN RISIKO DAN PROSPEK MENDATANG

Sesuai dengan Rencana Bisnis Perusahaan yang berbasis ESG (*Environmental, Social, and Governance*), Sarana Jaya telah mengintegrasikan aspek lingkungan dan sosial ke dalam sistem manajemen risiko. Langkah-langkah yang telah kami ambil meliputi identifikasi, evaluasi, dan pengelolaan risiko-risiko yang terkait dengan dampak lingkungan dan sosial dari aktivitas operasional kami. Ini mencakup pengembangan kebijakan dan praktik yang mempromosikan keberlanjutan, pemantauan teratur, serta pelaporan kinerja kepada pemangku kepentingan. Integrasi ini mencerminkan komitmen kami terhadap praktik bisnis yang bertanggung jawab dan berkelanjutan.

Manajemen Risiko

Risiko utama yang telah kami identifikasi meliputi perubahan regulasi, perubahan preferensi konsumen, dan kekurangan sumber daya alam. Untuk mengelola risiko ini, kami telah melakukan langkah-langkah sebagai berikut:

- **Perubahan Regulasi**
Kami secara proaktif memantau perubahan regulasi terkait lingkungan dan sosial, serta menyesuaikan kebijakan dan praktik kami agar tetap mematuhi peraturan yang berlaku. Kami juga terlibat dalam dialog regulatif untuk berkontribusi pada pengembangan kebijakan yang mendukung keberlanjutan.

TARGET ACHIEVEMENT STRATEGY AND CONTINUOUS IMPROVEMENT

The success of our sustainability performance is measured by comparing actual achievements with set targets and considering stakeholder feedback and satisfaction. We conduct regular evaluations of performance in various areas and compare them with previous years to gain valuable insights into the progress that has been made.

While we have achieved many things, we recognize that there is still room for improvement. Specific challenges will be identified and addressed through improvements to existing processes and systems, enhanced employee training and development, and improved internal communication on the importance of sustainability performance. We will also establish collaborations and partnerships with relevant parties to achieve this goal.

RISK MANAGEMENT AND FUTURE PROSPECTS

In accordance with the Company's ESG (Environmental, Social, and Governance) Business Plan, Sarana Jaya has integrated environmental and social aspects into the risk management system. The steps we have taken include identifying, evaluating, and managing risks associated with our operational activities' environmental and social impacts. It includes the development of policies and practices that promote sustainability, regular monitoring, as well as performance reporting to stakeholders. The integration reflects our commitment to responsible and sustainable business practices.

Risk Management

Key risks we have identified include regulatory changes, changing consumer preferences, and natural resource shortages. To manage these risks, we have taken the following steps:

- **Regulatory Changes**
We proactively monitor changes in environmental and social regulations and adjust our policies and practices to remain compliant. We also engage in regulatory dialog to contribute to developing policies that support sustainability.

- **Perubahan Preferensi Konsumen**

Dengan meningkatnya kesadaran konsumen terhadap isu-isu keberlanjutan, kami terus mengembangkan produk dan layanan yang memenuhi kebutuhan pasar akan solusi berkelanjutan. Kami juga meningkatkan komunikasi kami untuk mengedukasi konsumen tentang manfaat dari produk dan layanan kami dengan fasilitas yang mendukung praktik keberlanjutan seperti pengelolaan limbah yang baik, upaya pengurangan emisi, dan lainnya.

- **Kekurangan Sumber Daya Alam**

Untuk mengurangi ketergantungan pada sumber daya alam yang terbatas, kami berinvestasi dalam teknologi efisiensi sumber daya dan penggunaan material ramah lingkungan. Kami juga mengembangkan inisiatif daur ulang dan pengelolaan limbah yang lebih efektif.

Prospek Mendatang

Kami melihat beberapa potensi atau peluang di masa mendatang yang dapat membantu meningkatkan kinerja keberlanjutan kami:

- **Inovasi Teknologi**

Pemanfaatan teknologi baru atau inovasi dalam proses konstruksi dan pengelolaan infrastruktur dapat membantu meningkatkan efisiensi operasional dan mengurangi dampak lingkungan. Misalnya, penggunaan material ramah lingkungan, pengembangan bangunan berkelanjutan, atau implementasi solusi *smart city* untuk pengelolaan sumber daya.

- **Pengembangan Energi Terbarukan**

Investasi dalam pengembangan dan pemanfaatan energi terbarukan, seperti energi surya atau biomassa, dapat membantu mengurangi ketergantungan pada sumber energi fosil dan mengurangi emisi gas rumah kaca.

- **Pengembangan Kawasan Hijau**

Memperluas ruang terbuka hijau di dalam kota atau mengembangkan taman-taman kota dapat memberikan manfaat bagi lingkungan dan kesejahteraan masyarakat, sambil menyediakan habitat bagi flora dan fauna.

- **Kemitraan dan Kolaborasi**

Bermitra dengan pemerintah, organisasi non-profit, dan sektor swasta untuk mewujudkan proyek-proyek berkelanjutan dapat memperluas sumber daya, pengetahuan, dan jangkauan, sambil meningkatkan dampak positif.

- **Changing Consumer Preferences**

As consumer awareness of sustainability issues increases, we continue to develop products and services that meet market needs for sustainable solutions. We also enhance our communication to educate consumers on the benefits of our products and services with facilities supporting sustainability practices such as good waste management, emission reduction efforts, etc.

- **Natural Resource Shortage**

To reduce dependence on finite natural resources, we invest in resource efficiency technologies and the use of environmentally friendly materials. We also develop more effective recycling and waste management initiatives.

Future Prospects

We see several potential or future opportunities that could help improve our sustainability performance:

- **Technology Innovation**

Using new technologies or innovations in the construction process and infrastructure management can help improve operational efficiency and reduce environmental impacts, such as using environmentally friendly materials, sustainable building development, or implementing smart city solutions for resource management.

- **Renewable Energy Development**

Investments in the development and use of renewable energy, such as solar energy or biomass, can help reduce dependence on fossil energy sources and greenhouse gas emissions.

- **Green Area Development**

Expanding green open spaces within the city or developing urban parks can benefit the environment and community's well-being while providing habitats for flora and fauna.

- **Partnership and Collaboration**

Partnering with governments, non-profit organizations, and the private sector to realize sustainable projects can expand resources, knowledge, and reach while increasing positive impact.

- **Peningkatan Kesadaran dan Pendidikan**

Meningkatkan kesadaran dan pemahaman masyarakat tentang isu-isu lingkungan dan sosial dapat membantu mendukung adopsi praktik-praktik berkelanjutan dan menciptakan permintaan untuk produk dan layanan yang ramah lingkungan.

- **Pengembangan Hunian Berkelanjutan**

Memperluas pengembangan hunian terjangkau dan berkelanjutan dapat membantu memenuhi kebutuhan perumahan masyarakat sambil meminimalkan dampak lingkungan.

Dengan mengidentifikasi dan memanfaatkan peluang-peluang tersebut, serta terus berkomitmen untuk meningkatkan kinerja keberlanjutan, Sarana Jaya dapat memperkuat posisinya sebagai pemimpin dalam pembangunan berkelanjutan di Daerah Khusus Ibukota Jakarta.

APRESIASI

Dalam kesempatan ini, kami atas nama Direksi ingin menyampaikan apresiasi yang tulus kepada seluruh pihak yang telah berkontribusi dalam pencapaian kinerja keberlanjutan Sarana Jaya sepanjang tahun 2023. Keberhasilan yang kami raih tidak lepas dari kerja keras, dedikasi, dan komitmen seluruh karyawan, Dewan Pengawas, pemegang saham, mitra bisnis, serta dukungan para pemangku kepentingan lainnya. Kami berharap sinergi ini dapat terus berjalan menuju masa depan yang lebih berkelanjutan dan sejahtera.

- **Awareness Raising and Education**

Increasing public awareness and understanding of environmental and social issues can help support the adoption of sustainable practices and create demand for environmentally friendly products and services.

- **Sustainable Residential Development**

Expanding the development of affordable and sustainable housing can help meet the housing needs of communities while minimizing environmental impacts.

By identifying and capitalizing on these opportunities and continuing to commit to improving sustainability performance, Sarana Jaya can strengthen its position as a leader in sustainable development in the Jakarta Special Capital Region.

APPRECIATION

In this instance, we, on behalf of the Board of Directors, would like to express our sincere appreciation to all parties who have contributed to the achievement of Sarana Jaya's sustainability performance throughout 2023. Our success is inseparable from the hard work, dedication, and commitment of all employees, the Board of Supervisors, shareholders, business partners, and the support of other stakeholders. We hope this synergy can continue towards a more sustainable and prosperous future.

Jakarta, Mei | May 2024

Atas nama Direksi,

On behalf of the Board of Directors



Andira Reoputra
Direktur Utama
President Director

TATA KELOLA KEBERLANJUTAN

SUSTAINABILITY GOVERNANCE

MENGELOLA TATA KELOLA (GOVERNANSI) BERKELANJUTAN

Sarana Jaya menyadari bahwa kualitas tata kelola suatu perusahaan mampu mempengaruhi sisi fundamental yang merupakan aspek dasar bagi perusahaan untuk menjalankan setiap kepentingan operasional usahanya dengan baik. Atas dasar kesadaran tersebut, dilakukan upaya memaksimalkan untuk menerapkan tata kelola yang baik (*Good Corporate Governance*) serta menempatkan ESG (*Environment, Social and Governance*) sebagai bagian penting dari pengambilan keputusan di lingkungan Perusahaan dan akan selalu dimaksimalkan sesuai dengan pedoman pengelolaan *Good Corporate Governance* yang memperhatikan prinsip transparansi, akuntabilitas, pertanggung jawaban, kemandirian dan kewajaran.

Struktur Organ Tata Kelola Perusahaan [GRI 2-9]

Dalam upaya meningkatkan kualitas penerapan tata kelola perusahaan yang baik (*Good Corporate Governance/GCG*) di lingkungan Perusahaan, Sarana Jaya telah memiliki pedoman pengelolaan GCG yang disesuaikan dengan peraturan perundang-undangan dan ketentuan hukum yang berlaku, serta dilandasi oleh 5 (lima) prinsip penerapan GCG yaitu transparansi, akuntabilitas, pertanggung jawaban, kemandirian dan kewajaran. Pedoman tata kelola ini disahkan melalui Surat Keputusan Direksi Nomor 82 tahun 2020 tentang Pedoman Tata Kelola Perusahaan Perusahaan Umum Daerah Pembangunan Sarana Jaya.

Dalam Pedoman Tata Kelola Perusahaan mengatur bahwa organ utama struktur tata kelola Sarana Jaya terdiri dari Kuasa Pemilik Modal (KPM), Dewan Pengawas dan Direksi. Disamping itu, Sarana Jaya juga telah membentuk Komite Audit, Komite Manajemen Risiko, dan Sekretariat Dewan Pengawas sebagai organ pendukung yang membantu pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Dewan Pengawas. Sedangkan Direksi dibantu oleh Organ Pendukung Direksi, yaitu fungsi/unit di bawah Direksi sebagaimana struktur organisasi Perusahaan, termasuk Satuan Pengawas Intern (SPI).

MANAGING SUSTAINABLE GOVERNANCE

Sarana Jaya is aware that the quality of governance affects the fundamental aspects of a company to run its business operations well. Based on such awareness, maximizing efforts to implement Good Corporate Governance (GCG) and assigning ESG (Environment, Social, and Governance) as an important part of decision-making in the Company will always be pursued following the guidelines for GCG management, which pay attention to the principles of transparency, accountability, responsibility, independence, and fairness.

Corporate Governance Structure [GRI 2-9]

To improve the quality of good corporate governance (GCG) implementation in the Company, Sarana Jaya has GCG management guidelines that are adjusted to the applicable laws and regulations and based on five principles of GCG implementation, i.e., transparency, accountability, responsibility, independence, and fairness. The guidelines were ratified through the Board of Directors Decree No. 82 of 2020 on Guidelines for Corporate Governance of Perusahaan Umum Daerah Pembangunan Sarana Jaya.

The Guidelines stipulate that the main organs of Sarana Jaya's governance consist of the Capital Owner's Proxy (KPM), Supervisory Board, and Board of Directors. The Company has also formed the Audit Committee, Risk Management Committee, and Secretariat of the Supervisory Board as supporting organs that assist the Supervisory Board's implementation duties and responsibilities. Meanwhile, the Supporting Organs of the Board of Directors include functions/units under the Board of Directors as per the Company's organizational structure, including the Internal Audit Unit (SPI).

Seluruh organ tata kelola tersebut menjalankan fungsi, tugas dan tanggung jawab untuk kepentingan Perusahaan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, Peraturan Daerah sebagai Akta Pendirian dan Anggaran Dasar Sarana Jaya.

Pada struktur tata kelola perusahaan, KPM (Kuasa Pemilik Modal) adalah Kepala Daerah yang mewakili Pemerintah Daerah dalam kepemilikan kekayaan daerah yang dipisahkan dan merupakan organ Perusahaan yang memegang kekuasaan tertinggi dan segala wewenang yang tidak diserahkan kepada Direksi atau Dewan Pengawas. Sebagai Perumda milik Pemerintah Provinsi DKI Jakarta, maka kedudukan KPM pada Sarana Jaya diduduki oleh Gubernur Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta. [GRI 2-11]

Dewan Pengawas adalah organ Perusahaan yang bertugas melakukan pengawasan dan memberikan nasihat kepada Direksi dalam menjalankan kegiatan pengurusan perusahaan, termasuk memantau efektivitas penerapan GCG sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Secara umum, hubungan kerja antara Dewan Pengawas dengan Direksi diarahkan untuk dapat menjalankan tugas dan fungsi masing-masing sebagai organ Perusahaan.

Direksi merupakan organ badan tata kelola yang melakukan segala pengaturan yang berkaitan dengan Perusahaan termasuk dalam memperhatikan isu keberlanjutan terkait aspek *Environmental, Social and Governance* (ESG). Direksi secara kolegal bertanggung jawab atas penerapan aspek keberlanjutan di Perusahaan. Namun, dalam pelaksanaannya Direksi dapat mendelegasikan wewenang terkait pelaksanaan dan pengambilan keputusan atas aspek operasional di bidang ekonomi, lingkungan dan sosial kepada Eksekutif Senior yang kemudian dapat dilakukan pendelegasian kembali oleh Eksekutif Senior kepada subordinasi di bawahnya sehingga unit-unit dan fungsi-fungsi organ yang dimaksud dapat turut berpartisipasi bertanggung jawab secara langsung atas isu keberlanjutan selinier dengan tugas dan bidang yang dikerjakan. Demikian juga terkait dengan pelaporan keberlanjutan yang diterbitkan Sarana Jaya setiap tahunnya, Direksi bertanggung jawab dalam meninjau dan menyetujui informasi yang dilaporkan termasuk topik-topik material dalam organisasi. Proses yang dilakukan untuk meninjau dan menyetujui informasi dilakukan melalui metode pelaporan berkala kepada Direksi. [GRI 2-12, 2-13, 2-14][OJK E.1]

These governance organs carry out their functions, duties, and responsibilities for the Company's benefit per applicable laws and regulations, Regional Regulations as the Deed of Establishment, and the Articles of Association of Sarana Jaya.

In the corporate governance structure, KPM (Capital Owner's Proxy) is the Regional Head representing the Regional Government in ownership of separated regional assets and is the Company organ that holds the supreme authority and other authority not delegated to the Board of Directors or the Supervisory Board. The Regional Head represents the Region as a shareholder. Since the DKI Jakarta Provincial Government owns Perumda, the KPM at Sarana Jaya is occupied by the DKI Jakarta Governor. [GRI 2-11]

The Supervisory Board is the Company's organ responsible for supervising and advising the Board of Directors on company management activities, including monitoring the effectiveness of GCG implementation per applicable laws and regulations. In general, the working relationship between the Supervisory Board and the Board of Directors is directed to be able to carry out their respective duties and functions as the Company's organs.

The Board of Directors is an organ of the governance body that makes all arrangements related to the Company, including paying attention to sustainability issues related to Environmental, Social, and Governance (ESG) aspects. The Board of Directors is collegially responsible for implementing sustainability aspects in the Company. However, in practice, the Board of Directors can delegate authority regarding the implementation and decision-making of operational aspects in the economic, environmental, and social areas to Senior Executives, who can then delegate the authority to their subordinates. Thus, the units and functions of the organ can participate and be directly responsible for sustainability issues in line with the tasks being carried out. Likewise, in terms of the sustainability report annually published by Sarana Jaya, the Board of Directors is responsible for reviewing and approving the reported information, including material topics within the organization. Reviewing and approving information is carried out through periodic reporting to the Board of Directors. [GRI 2-12, 2-13, 2-14][OJK E.1]



Untuk penjelasan lebih lengkap mengenai struktur tata kelola Perusahaan beserta tugas dan tanggung jawabnya dijelaskan lebih lengkap pada Laporan Tahunan Perusahaan tahun 2023 pada bab Tata Kelola Perusahaan.

Benturan Kepentingan [GRI 2-15]

Sarana Jaya mengedepankan prinsip Independensi secara profesional termasuk pengaturan terkait benturan kepentingan yang tercantum dalam Pedoman Tata Kelola Perusahaan. Pada pedoman tersebut, Insan Sarana Jaya diminta untuk menghindari adanya benturan kepentingan dengan cara:

1. Menjalankan tugas dan kewajiban dengan mendahulukan kepentingan ekonomi Perusahaan diatas kepentingan ekonomi pribadi atau keluarga, maupun pihak lainnya;
2. Tidak menyalahgunakan jabatan untuk kepentingan atau keuntungan pribadi, keluarga dan pihak-pihak lain;
3. Dalam hal pembahasan dan pengambilan keputusan yang mengandung unsur benturan kepentingan, pihak yang bersangkutan tidak diperkenankan ikut serta;
4. Membuat pernyataan tidak memiliki benturan kepentingan atas setiap keputusan yang telah dibuat olehnya dan telah melaksanakan pedoman perilaku yang ditetapkan oleh Perusahaan setiap akhir tahun, bagi Insan Sarana Jaya yang memiliki wewenang pengambilan keputusan diharuskan setiap tahun;
5. Tidak memiliki usaha yang berhubungan langsung dengan kegiatan Perusahaan;
6. Tidak memanfaatkan informasikan rahasia dan data bisnis Perusahaan untuk kepentingan di luar Perusahaan;
7. Tidak memegang jabatan apapun pada perusahaan/institusi lain yang ingin dan/atau sedang melakukan hubungan bisnis dengan Perusahaan maupun yang ingin dan/atau sedang berkompetisi dengan Perusahaan;
8. Tidak melakukan pekerjaan atau profesi di luar Perusahaan pada jam kerja dan selalu mengungkapkan serta melaporkan setiap kepentingan dan/atau kegiatan-kegiatan di luar Perusahaan pada jam kerja kepada atasannya secara berjenjang untuk mendapatkan izin;
9. Mencegah pengambilan keuntungan pribadi Direksi dan pejabat struktural Perusahaan yang disebabkan benturan kepentingan;
10. Pengaturan lebih lanjut terkait benturan kepentingan diatur dalam kebijakan tersendiri yang merupakan dokumen tidak terpisahkan dari Pedoman GCG.

The Company's governance structure, along with its duties and responsibilities, are explained in more detail in the Corporate Governance Chapter of the Company's 2023 Annual Report.

Conflict of Interest [GRI 2-15]

Sarana Jaya prioritizes the independence principle professionally, including arrangements regarding conflicts of interest as stated in the GCG Guidelines. According to the guidelines, Sarana Jaya personnel are required to avoid conflicts of interest by:

1. Carrying out duties and obligations by prioritizing the economic interests of the Company above personal, family, or other parties' economic interests;
2. Not abusing position for personal, family, or other parties' interests or benefits;
3. In the case of discussions and decision-making that contain elements of a conflict of interest, the party concerned is not allowed to participate;
4. Making a statement that there is no conflict of interest for any decisions made and they have implemented the code of conduct set by the Company at the end of each year. For Sarana Jaya's personnel who have decision-making authority, the statement is made every year;
5. Not having a business that is directly related to the Company's activities;
6. Not making use of confidential information and business data of the Company for interests outside the Company;
7. Not holding any position in other companies/institutions that wish to and/or are conducting business relations with the Company or who wish and/or are currently competing with the Company;
8. Not carrying out work or profession outside the Company during working hours, and regularly disclosing and reporting any interests and/or activities outside the Company during working hours to their superiors to obtain permission;
9. Preventing the taking of personal benefits of the Directors and structural officials of the Company due to conflicts of interest;
10. Further arrangements concerning conflicts of interest are regulated in a separate policy, which is an integral document of the GCG Guidelines.

Menjaga Etika dan Integritas [GRI 2-23, 2-24, 2-27]

Sarana Jaya memiliki pedoman etika perusahaan (*Code of Conduct*) yang berisikan komitmen atas etika bisnis Perusahaan dan etika kerja Insan Sarana Jaya yang dibuat dengan tujuan untuk membentuk, mengatur dan melakukan kesesuaian tingkah laku sehingga terciptanya output konsisten dan sesuai dengan nilai-nilai Perusahaan dalam upaya mencapai visi dan misi. Adapun isi dari *code of conduct* yang dimiliki Sarana Jaya adalah:

a. Etika berusaha

- Seluruh organ Perusahaan mematuhi peraturan Perusahaan yang berlaku, memegang teguh komitmen dan memberikan kontribusi kepada Perusahaan;
- Dewan pengawas dan Direksi memastikan bahwa Perusahaan dikelola dengan menganut prinsip-prinsip GCG tanpa adanya benturan kepentingan;
- Bagi pegawai, memastikan bahwa Perusahaan telah menanamkan nilai-nilai dan budaya Perusahaan kepada seluruh pegawai, mendorong kedua belah pihak (pegawai dan Perusahaan) untuk mematuhi ketentuan kerja bersama serta memberikan perlakuan yang setara berdasarkan kompetensi dan kinerja;
- Untuk keperluan masyarakat/pelanggan dan mitra usaha, memastikan bahwa Perusahaan menjunjung tinggi komitmen yang telah disetujui bersama;
- Memastikan bahwa Perusahaan menjunjung tinggi persaingan usaha yang sehat dengan melarang praktik KKN.

b. Hubungan yang Sehat dan Harmonis

Perusahaan wajib mengatur pola hubungan yang sehat dan harmonis diantara seluruh Insan Sarana Jaya maupun dengan pihak-pihak yang berkepentingan dengan Perusahaan.

c. Kepatuhan terhadap Peraturan Perundang-undangan

- Organ Perusahaan dan pegawai harus mematuhi peraturan perundang-undangan dan peraturan Perusahaan;
- Dewan Pengawas harus memastikan bahwa anggota Dewan Pengawas, Direksi dan pegawai Perusahaan melakukan kegiatan sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan peraturan Perusahaan;
- Perusahaan harus melakukan pencatatan atas harta, utang dan modal secara benar sesuai dengan prinsip akuntansi yang berlaku umum.

Maintaining Ethics and Integrity [GRI 2-23, 2-24, 2-27]

Sarana Jaya has a Code of Conduct that contains a commitment to the Company's business and employees' work ethics, which are made to shape, regulate, and conform behavior to create consistent output that aligns with corporate values to achieve the vision and mission. Sarana Jaya's code of conduct contains:

a. Business ethics

- All company organs comply with applicable company regulations, adhere to commitments, and contribute to the Company;
- The Supervisory Board and the Board of Directors ensure that the Company is managed by adhering to GCG principles without any conflict of interest;
- For employees, the Company ensures that corporate values and culture have been instilled in all employees, encourages both parties (employees and the Company) to comply with the terms of collective work, and provides equal treatment based on competency and performance;
- For the purposes of society/customers and business partners, the Company ensures that the commitments that have been mutually agreed upon are upheld;
- The Company ensures that fair business competition is promoted by prohibiting KKN practices.

b. Healthy and Harmonious Relationships

The Company is obliged to regulate healthy and harmonious relations among all Sarana Jaya personnel and with parties who have an interest in the Company.

c. Compliance with Laws and Regulations

- Company organs and employees must comply with laws and regulations and Company regulations;
- The Supervisory Board must ensure that its members, Board of Directors, and employees carry out activities under laws and regulations and Company regulations;
- The Company must properly record assets, liabilities, and equity per generally accepted accounting principles.

Dalam rangka menegakkan Pedoman Etika Perusahaan ini maka seluruh pimpinan dari setiap tingkatan dalam Perusahaan dan Pihak yang ditetapkan oleh Direksi dalam menangani GCG di Perusahaan bertanggung jawab untuk memastikan Pedoman Etika Perusahaan telah tersosialisasikan dengan baik dan menyeluruh. Selain itu, buku Pedoman Etika Perusahaan ini juga dapat diunduh pada situs web resmi Perusahaan sebagai bahan sosialisasi kepada stakeholders internal dan eksternal.

Pelanggaran atas Pedoman Etika Perusahaan merupakan tindakan indiscipliner yang dapat diberikan sanksi sesuai dengan peraturan Perusahaan dan ketentuan Perundang-undangan yang berlaku. Setiap Insan Sarana Jaya yang mengetahui adanya pelanggaran terhadap Pedoman Etika Perusahaan dapat melaporkan kepada pihak yang ditetapkan Direksi atau kepada atasan langsung dan identitasnya akan dirahasiakan.

Pada tahun 2023, Sarana Jaya tidak menerima laporan dan kasus terkait pelanggaran terhadap Kode Etik yang dilakukan oleh Insan Perusahaan sehingga tidak ada sanksi yang dijatuhkan kepada Insan Perusahaan akibat pelanggaran Kode Etik tersebut.

MEMPERKUAT KOMITMEN ANTI KORUPSI DAN PENGENDALIAN GRATIFIKASI

Pendekatan Manajemen Topik Anti Korupsi

Topik Anti Korupsi dan Pengendalian Gratifikasi menjadi aspek keberlanjutan yang penting untuk diungkapkan karena Sarana Jaya berkomitmen untuk menerapkan pengelolaan bisnis yang amanah, transparan dan akuntabel, salah satunya dengan menindak tegas praktik korupsi dan gratifikasi yang melibatkan Insan Sarana Jaya. Hal ini penting untuk menjadi budaya di lingkungan Perusahaan sebagai suatu proses pembelajaran bagi Insan Sarana Jaya yang mempunyai harkat, martabat dan citra yang tinggi dalam hubungan bisnis dengan pemangku kepentingan. **[GRI 3-2]**

Pengelolaan dampak terkait topik anti korupsi dan pengendalian gratifikasi dilakukan Sarana Jaya dengan mengeluarkan pedoman Pengendalian Gratifikasi yang telah disahkan oleh Direksi Perusahaan sebagai salah satu bentuk penerapan GCG secara konsisten dan berkelanjutan. Selain itu, Perusahaan juga telah memiliki Pedoman Pelaksanaan Sistem Manajemen Anti Penyuapan yang sesuai dengan SNI ISO 37001:2016. Atas penerapan pedoman tersebut, Sarana Jaya berkomitmen untuk memberikan sanksi tegas apabila ditemukan tindak kecurangan di lingkungan Perusahaan sehingga dampak negatif potensial seperti kerugian finansial maupun penurunan kualitas SDM Perusahaan yang berpengaruh pada integritas Perusahaan dimata pemangku kepentingan dapat terhindari.

To enforce the Code of Conduct, all leaders at every level of the Company and Parties designated by the Board of Directors in handling GCG in the Company are responsible for ensuring that the Code of Conduct has been disseminated properly and thoroughly. In addition, the Code of Conduct can also be downloaded on the Company's official website as dissemination material to internal and external stakeholders.

Violating the Code of Conduct is a disciplinary action that can be sanctioned under Company regulations and applicable laws and regulations. Sarana Jaya's personnel who are aware of a violation of the Code of Conduct can report it to a party designated by the Board of Directors or their direct supervisor, and their identity will be kept confidential.

In 2023, Sarana Jaya did not receive reports or cases related to violations of the Code of Conduct by Company Personnel; thus, no sanctions were imposed.

STRENGTHENING ANTI-CORRUPTION COMMITMENT AND GRATUITY CONTROL

Management Approach to Anti-Corruption **[GRI 3-3]**

Anti-corruption and Gratuity Control are important sustainability aspects to be disclosed because Sarana Jaya is committed to implementing trustworthy, transparent, and accountable business management, e.g., by taking firm action against corruption and gratuity practices involving its personnel. Anti-corruption and Gratuity control are essential within the Company as a learning process for personnel with high dignity and image in business relations with stakeholders. **[GRI 3-2]**

The impact management related to anti-corruption and gratuity control is carried out by issuing Gratuity Control guidelines, which have been approved by the Board of Directors as a form of consistent and sustainable GCG implementation. In addition, the Company has Guidelines for Implementing the Anti-Bribery Management System per SNI ISO 37001:2016. Sarana Jaya is committed to imposing strict sanctions on fraud found within the Company so that potential adverse impacts, such as financial loss or a decrease in HR quality, which affects the integrity of the Company in the eyes of stakeholders, can be avoided.

KEBIJAKAN KHUSUS

Kebijakan Sarana Jaya

- Surat Keputusan Direksi Nomor 82 Tahun 2020 tentang Pedoman Tata Kelola Perusahaan Perumda Pembangunan Sarana Jaya
- Pedoman Etika Perusahaan (*Code of Conduct*) Perumda Pembangunan Sarana Jaya Tahun 2020
- Pedoman Pengendalian Gratifikasi Perumda Pembangunan Sarana Jaya
- Pedoman Pelaksanaan Sistem Manajemen Anti Penyuapan (SMAP) Perumda Pembangunan Sarana Jaya

Ketentuan Umum diantaranya mengacu pada:

- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 54 Tahun 2017 tentang Badan Usaha Milik Daerah
- Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 1982 tentang Perusahaan Daerah Pembangunan Sarana Jaya Daerah Khusus Ibukota Jakarta yang telah mengalami perubahan beberapa kali dan terakhir ditetapkan berdasarkan Peraturan Daerah Nomor II Tahun 2018 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 1982 tentang Perusahaan Umum Daerah Pembangunan Sarana Jaya Daerah Khusus Ibukota Jakarta
- Peraturan Gubernur Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 180 Tahun 2015 tentang Perubahan Keempat atas Peraturan Gubernur Nomor 109 Tahun 2011 tentang Kepengurusan Badan Usaha Milik Daerah
- Keputusan Gubernur Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 94 Tahun 2004 tentang Penerapan praktik *Good Corporate Governance* pada Badan usaha Milik Daerah (BUMD) di lingkungan Pemerintah Daerah Khusus Ibukota Jakarta
- SNI ISO 37001:2016 tentang Sistem Manajemen Anti Penyuapan

KEBIJAKAN KHUSUS | SPECIFIC POLICIES

Sarana Jaya Policies

- Board of Directors' Decree No. 82 of 2020 on Guidelines for Corporate Governance of Perumda Pembangunan Sarana Jaya
- The 2020 Code of Conduct of Perumda Pembangunan Sarana Jaya
- Guidelines for Controlling Gratuity in Perumda Pembangunan Sarana Jaya
- Guidelines for Implementing Anti-Bribery Management System (SMAP) of Perumda Pembangunan Sarana Jaya

General Provisions, among others, refer to:

- Law of the Republic of Indonesia No. 28 of 1999 on State Administration that is Clean and Free from Corruption, Collusion, and Nepotism
- Law of the Republic of Indonesia No 31 of 1999 on Eradication of Corruption Crimes as amended by Law of the Republic of Indonesia No. 20 of 2001
- Law of the Republic of Indonesia No. 30 of 2002 on the Corruption Eradication Commission
- Law of the Republic of Indonesia No. 8 of 2010 on the Corruption Eradication Commission
- Government Regulation of the Republic of Indonesia No. 54 of 2017 on Regional Owned Enterprises
- Regional Regulation No. 2 of 1982 on Perusahaan Daerah Pembangunan Sarana Jaya of Jakarta Special Capital Region, which has been amended several times and most recently stipulated based on Regional Regulation No. II of 2018 on the Third Amendment to Regional Regulation No. 2 of 1982 on Perusahaan Daerah Pembangunan Sarana Jaya of Jakarta Special Capital Region
- Regulation of the Jakarta Special Capital Region Governor No. 180 of 2015 on the Fourth Amendment to Governor Regulation No. 109 of 2011 on Management of Region-Owned Enterprises
- Decree of the Jakarta Special Capital Region Governor No. 94 of 2004 on the Implementation of Good Corporate Governance Practices in Region-Owned Enterprises (BUMD) in Jakarta Special Capital Government Region
- SNI ISO 37001:2016 on Anti-Bribery Management System

KOMITMEN

- Melarang dan tidak memberikan toleransi penyuapan secara aktif maupun pasif di setiap aktivitas penyelenggaraan Perusahaan serta menetapkan, memelihara dan melakukan tinjauan risiko terhadap potensi penyuapan dalam kerangka SMAP
- Mematuhi peraturan perundang-undangan yang berlaku terkait dengan anti korupsi dan pencegahan penyuapan
- Menerapkan prinsip 4 No's (*No Bribery, No Kickback, No Gift, No Luxurious Hospitality*) untuk seluruh Dewan Pengawas, Direksi, seluruh Pegawai Perusahaan dan Perangkat Dewan Pengawas, Anak Perusahaan Perumda Pembangunan Sarana Jaya serta seluruh *stakeholders* termasuk mitra usaha yang bekerja sama dengan Perusahaan
- Melakukan upaya-upaya pencegahan penyuapan dan menerapkan pengendalian anti penyuapan di lingkungan Perusahaan dalam rangka mendukung pelaksanaan SMAP
- Memastikan SMAP diterapkan secara penuh, efektif dan konsisten meningkatkan secara berkelanjutan untuk mencapai sasaran anti penyuapan sesuai dengan tujuan Perusahaan
- Membentuk Tim Fungsi Kepatuhan Anti Penyuapan (FKAP) yang memiliki kewenangan, tanggung jawab, kemandirian dan sumber daya pendukung yang memadai untuk mengawasi dan memastikan penerapan dan peningkatan berkelanjutan SMA
- Mendorong kesadaran (*awareness*) seluruh Insan Sarana Jaya serta *stakeholders* dengan dasar pemahaman dan itikad yang baik dengan melaksanakan program-program sosialisasi dan kampanye dalam rangka internalisasi SMAP
- Menjamin kerahasiaan, keselamatan dan perlindungan hukum bagi pelapor yang telah memberikan informasi atau laporan atas dugaan pelanggaran SMAP
- Memberikan sanksi terhadap pelanggaran SMAP kepada pihak-pihak di bawah wewenang Perusahaan yang terbukti terlibat dalam penyuapan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Republik Indonesia

TUJUAN/TARGET

- Diberlakukan Pelatihan SMAP dan Anti Penyuapan setiap tahun sekali kepada seluruh Insan Sarana Jaya
- Dilakukan Pelatihan SMAP dan Anti Penyuapan kepada pegawai baru (*induction training*)

COMMITMENT

- Prohibiting and not tolerating active or passive bribery in every activity of the Company's operations, as well as determining, maintaining, and conducting a risk review of potential bribery within the SMAP framework
- Complying with applicable laws and regulations related to anti-corruption and prevention of bribery
- Implementing the 4 Nos (*No Bribery, No Kickback, No Gift, No Luxurious Hospitality*) for the Supervisory Board, Board of Directors, Employees, Supervisory Board Organs, Subsidiaries of Perumda Pembangunan Sarana Jaya, and all stakeholders, including business partners who work with the Company
- Making efforts to prevent bribery and implement anti-bribery controls within the Company to support SMAP implementation
- Ensuring that SMAP is fully and effectively implemented and consistently improving it to achieve anti-bribery goals per the Company's objectives
- Establishing an Anti-Bribery Compliance Function Team (FKAP) that has sufficient authority, responsibility, independence, and supporting resources to oversee and ensure the implementation and continuous improvement of SMAP
- Encouraging awareness of all Sarana Jaya's personnel and stakeholders on the basis of understanding and good faith by implementing dissemination and campaign programs for SMAP internalization
- Providing guarantee for the confidentiality, safety, and legal protection of whistleblowers who provided information or reports on suspected SMAP violations
- Imposing sanctions on SMAP violations to parties under the Company's authority who are proven to be involved in bribery under the laws and regulations in the Republic of Indonesia

GOALS/TARGETS

- Conducting SMAP and Anti-Bribery Training once a year for all Sarana Jaya's employees
- Conducting SMAP and Anti-Bribery training for new employees (*induction training*)

- Dilakukan komunikasi SMAP dan Anti Penyuapan kepada *stakeholders* minimal 6 bulan sekali
- Dilakukan *monitoring* penerapan mitigasi risiko
- Memberlakukan kebijakan anti penyuapan Sarana Jaya di KSO, Anak Perusahaan dan afiliasinya

EVALUASI

- Pemantauan, pengukuran, Analisis dan Evaluasi serta perbaikan yang diperlukan terkait kepatuhan, kesesuaian terhadap kinerja dan persyaratan SMAP serta perbaikan efektivitas secara terus-menerus
- Pelaksanaan Audit Internal
- Tinjauan Manajemen minimal 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun untuk mengkaji ulang penerapan program
- Tinjauan Tim FKAP secara berkala

PENANGGUNG JAWAB

- Dewan Pengawas, Direksi, Tim Fungsi Kepatuhan Anti Penyuapan (Tim FKAP) dan Satuan Pengawas Intern

ALOKASI ANGGARAN

Sepanjang tahun 2023, Perusahaan Sarana Jaya mengalokasikan anggaran sebesar Rp367.000.000,- untuk kegiatan anti korupsi dan gratifikasi pada tahun anggaran 2023 dengan dana yang berhasil teralisasi sebesar Rp159.534.750,-.

KETERLIBATAN PEMANGKU KEPENTINGAN Pemerintah Pusat dan Provinsi DKI Jakarta / Regulator (KPK)

- Membuat peraturan perundang-undangan terkait topik anti korupsi dan pengendalian gratifikasi yang kemudian dijadikan pedoman oleh Sarana Jaya untuk menjalankan kegiatan operasional
- Melakukan pengawasan kepada Sarana Jaya terkait penanggulangan dan bentuk penanganan jika didapatkan adanya praktik korupsi dalam wilayah kerja Perusahaan

Badan Tata Kelola Tertinggi Perusahaan

- Menyusun Pedoman Tata Kelola Perusahaan dan budaya anti korupsi dan gratifikasi dengan membentuk kebijakan terkait topik tersebut
- Memberikan pengawasan dan melakukan tindakan secara tegas pada hal-hal/kegiatan yang dicurigai dapat memicu tindakan kecurangan, korupsi dan gratifikasi

- Conduct SMAP and Anti-Bribery dissemination to stakeholders at least once every six months
- Monitor the implementation of risk mitigation
- Implement Sarana Jaya's anti-bribery policy in KSO, Subsidiaries, and their affiliates

EVALUATION

- Monitoring, measurement, analysis, and evaluation, as well as necessary improvements related to compliance, conformity with SMAP performance and requirements, as well as continuous improvement of effectiveness
- Internal Audit Implementation
- Management Review at least once a year to review program implementation
- Regular review of the FKAP Team

PERSON IN CHARGE

- Supervisory Board, Board of Directors, Anti-Bribery Compliance Function Team (FKAP Team), and Internal Audit Unit

BUDGET ALLOCATION

Throughout 2023, Sarana Jaya has allocated Rp367,000,000 for anti-corruption and gratuity control with a total fund realization of Rp159,534,750.

STAKEHOLDER ENGAGEMENT Central and DKI Jakarta Provincial Government/ Regulator (KPK)

- Make laws and regulations related to anti-corruption and gratuity control, which are then used as guidelines by Sarana Jaya to carry out operational activities
- Supervise Sarana Jaya regarding countermeasures and handling if corrupt practices are found in the Company's work area

The Company's Supreme Governance Body

- Develop Corporate Governance Guidelines and anti-corruption and gratuity culture by establishing policies related to these topics
- Provide oversight and take strict action on matters/ activities suspected of fraud, corruption, and gratuity

Pegawai

- Secara bertanggung Jawab melakukan aktivitas dengan menerapkan pedoman Anti korupsi dan Pengendalian Gratifikasi
- Melaporkan apabila terdapat indikasi terjadinya praktik kecurangan atau korupsi di lingkungan Sarana Jaya

Penyedia Barang dan Jasa

- Melaksanakan hubungan kerja sama sesuai yang diperjanjikan dan menjamin bahwa tidak ada penyuapan/korupsi yang mempengaruhi hubungan bisnis yang merusak reputasi Perusahaan

Asosiasi Industri

- Mematuhi rekomendasi Asosiasi Industri terkait dengan anti penyuapan/korupsi yang dapat mempengaruhi reputasi sektor industri

Masyarakat/LSM

- Melaksanakan pekerjaan dengan baik dan menunjukkan cara-cara kredibel untuk mencegah dan merespon penyuapan/ korupsi dengan tepat

Media

- Menyediakan informasi yang sesuai dengan fakta dan jelas serta memberikan reputasi positif bagi awak media

Dalam rangka penerapan pencegahan tindak pidana korupsi dan menunjukkan komitmen kepada pemangku kepentingan bahwa Sarana Jaya telah menjalankan praktik bisnis yang bersih, transparan dan dapat dipertanggungjawabkan, Perusahaan menerapkan ISO SNI 37001:2016 tentang Sistem Manajemen Anti Penyuapan (SMAP). Hal ini diharapkan dapat membantu Perusahaan untuk menghindari atau mengurangi biaya, risiko dan kerugian yang disebabkan Penyuapan, mempromosikan kepercayaan dan keyakinan dalam penanganan bisnis dan meningkatkan reputasi Perusahaan.

Pesatnya perkembangan lingkungan eksternal dan internal menyebabkan semakin kompleksnya risiko terjadinya kecurangan dan penyuapan dalam kegiatan operasional dan kerja sama. Oleh karena itu, agar Sarana Jaya dapat mencapai visi, misi dan tujuan anti korupsi dan gratifikasi serta mampu beradaptasi dan bertahan dalam kondisi yang penuh dengan ketidakpastian, Sarana Jaya berupaya meningkatkan kemampuannya untuk meningkatkan kinerja dan juga fokus dalam mengelola dan menangani berbagai isu-isu strategis dengan meminimalkan ancaman dan memaksimalkan upaya-upaya dan program-program serta kebijakan Perusahaan yang ada secara terus-menerus.

Employees

- Responsibly carry out activities by implementing Anti-Corruption and Gratuity Control guidelines
- Report any indication of fraudulent or corrupt practices within Sarana Jaya

Goods and Services Provider

- Carry out cooperative relations according to the agreement and guarantee that there is no bribery/corruption affecting business relationships that damage the reputation of the Company

Industry Association

- Comply with Industry Association recommendations on anti-bribery/corruption, which may affect the reputation of the industrial sector

Society/NGO

- Carry out a good job and demonstrate credible ways to prevent and respond appropriately to bribery/corruption

Media

- Provide factual and clear information and give media members a positive reputation

To prevent corruption and show the stakeholders that Sarana Jaya has carried out clean, transparent, and accountable business practices, the Company implements ISO SNI 37001:2016 on Anti-Bribery Management System (SMAP). It is expected to help the Company avoid or reduce costs, risks, and losses caused by bribery, promote trust and confidence in handling business, and enhance the Company's reputation.

The rapid development of the external and internal environment has made the risks of fraud and bribery more complex in operational activities and cooperations. Therefore, to achieve the vision, mission, and goals of anti-corruption and gratuity and to be able to adapt and survive in conditions full of uncertainty, Sarana Jaya seeks to improve performance and focus on managing and addressing various strategic issues by continuously minimizing threats while maximizing existing efforts and programs and policies of the Company.

Setiap proses dan unit kerja terkait diharapkan dapat melakukan identifikasi risiko penyuapan, penilaian risiko dan menentukan jenis dan tingkat pengendalian risiko penyuapan yang diterapkan pada setiap kategori risiko untuk menilai apakah kendali yang ada telah mencukupi. Atas dasar tersebut, Sarana Jaya menetapkan memberikan perhatian penuh terhadap operasi-operasi yang dinilai memiliki risiko terkait korupsi seperti pada proses pengelolaan transaksi keuangan, aktivitas pengadaan, operasional, penjualan, komersial, sumber daya manusia, hukum dan regulasi. Terhadap aktivitas-aktivitas tersebut, Perusahaan telah menyusun program mitigasi melalui pelaksanaan uji kelayakan dan sistem pengendalian baik keuangan dan non keuangan hingga penilaian melalui proses *bribery risk assessment*. Melalui upaya-upaya tersebut diharapkan risiko penyuapan dan korupsi dan diminimalkan bahkan dihilangkan pada aktivitas-aktivitas operasi tersebut. [GRI 205-1]

Secara umum, Sarana Jaya telah melakukan komunikasi program anti korupsi dan pengendalian gratifikasi melalui berbagai media antara lain rapat manajemen, telepon, korespondensi, pengumuman dan media teknologi informasi yang ada (*e-mail*/media sosial) kepada pihak internal dan eksternal. Komunikasi internal meliputi komunikasi kepada manajemen dan pegawai terkait kinerja dan keefektifan sistem pengendalian anti penyuapan dan informasi yang relevan terkait dengan hal tersebut. Komunikasi eksternal meliputi komunikasi dengan pihak luar yang terkait seperti mitra usaha dan pemangku kepentingan yang lain dengan substansi ketaatan terhadap kebijakan anti penyuapan, aturan dan prinsip serta perilaku anti penyuapan dan berbagai peraturan perundangan terkait.

Penetapan proses komunikasi ini diharapkan dapat memperhitungkan kewajiban untuk menaati dan memastikan informasi anti penyuapan yang dikomunikasikan konsisten dengan informasi yang dihasilkan oleh Perusahaan dan dapat diandalkan.

Selain melalui komunikasi secara langsung dan tidak langsung, Sarana Jaya juga membekali para pegawai dengan program pelatihan yang dilakukan secara berkala setiap tahunnya. Pada tahun 2023, Perusahaan menyelenggarakan program anti korupsi kepada seluruh pegawai.

Each process and related work unit is expected to be able to carry out bribery risk identification, risk assessment, and determine the type and level of bribery risk controls applied to each risk category to assess whether the existing controls are sufficient. On this basis, Sarana Jaya is determined to pay full attention to operations considered vulnerable to corruption, such as financial transaction management, procurement, operational, sales, commercial, human resources, legal, and regulatory activities. For these operations, the Company has developed mitigation programs through due diligence and control systems on both financial and non-financial aspects, as well as a bribery risk assessment. Through these efforts, the Company hopes that bribery and corruption risks can be minimized or even eliminated in these operating activities. [GRI 205-1]

In general, Sarana Jaya has disseminated anti-corruption and gratuity control programs through various media, including management meetings, telephone, correspondence, announcements, and available information technology media (*email*/social media) to internal and external parties. Internal communication includes dissemination to management and employees regarding the performance and effectiveness of the anti-bribery control system and relevant information regarding this matter. External communication includes dissemination to related external parties, such as business partners and other stakeholders, regarding adherence to anti-bribery policies, rules, principles, anti-bribery behavior, and various related laws and regulations.

It is hoped that such communication will consider the obligation to comply and ensure that the anti-bribery information communicated is reliable and consistent with the information given by the Company.

Apart from direct and indirect communication, Sarana Jaya also engages employees in training programs held regularly every year. In 2023, the Company organized an anti-corruption program for all employees.

Program Anti Korupsi Tahun 2023 [GRI 205-2]
Anti-Corruption Program in 2023

Tanggal Pelaksanaan Implementation Date	Kegiatan Activity
20-22 Februari 2023 February 20-22, 2023	Sertifikat Manajemen Risiko Dasar Basic Risk Management Certificate
5 Januari 2023 January 5, 2023	National Webinar "Webinar Risk Based Audit" National "Risk-Based Audit Webinar"
8 Februari 2023 February 8, 2023	Diskusi Risk Based Audit dengan Komite Dewan Pengawas Risk-Based Audit Discussion with the Supervisory Board Committee
7-9 Juli 2023 July 7-9, 2023	Pelatihan Audit ISO 9001 dan ISO 37001 ISO 9001 and ISO 37001 Audit Training
10-14 Agustus 2023 August 10-14, 2023	Sertifikasi QRMA QRMA Certification
13-17 November, 21 November & 1 Desember November 13-17, November 21 & December 1	Pelatihan dan Sertifikasi Manajemen Risiko bagi Organ Pengelola Risiko Korporasi Risk Management Training and Certification for Corporate Risk Management Organs
12 & 17 Oktober 2023 October 12 & 17, 2023	Sharing Session Manajemen Risiko Risk Management Sharing Session

Pada tahun 2023, Sarana Jaya juga melaksanakan program pelatihan anti korupsi kepada 97 orang pegawai jumlah ini mewakili sebanyak 69,26% dari total pegawai Sarana Jaya yang berjumlah 137 Orang. Adapun program pelatihan anti korupsi yang diberikan kepada pegawai Sarana Jaya pada tahun 2023 adalah sebagai berikut:

In 2023, Sarana Jaya also conducted an anti-corruption training program for 97 employees, which accounted for 69.26% of the total workforce of 137 employees at Sarana Jaya. The anti-corruption training program provided to Sarana Jaya employees in 2023 encompassed the following:

Pelatihan Program Anti Korupsi Tahun 2023 [GRI 205-2] [OJK E.2]
Anti-Corruption Training Program in 2023

Jumlah Badan Tata Kelola dan Pegawai
Total Governance Bodies and Employees

Wilayah Kerja Work Area	Direktur	Senior Manajer	Junior Manajer	Supervisor	Staf	Tenaga Pelaksana	Jumlah Total
	Director	Senior Manager	Junior Manager	Supervisor	Staff	Implementing Staff	
DKI Jakarta	3	15	23	14	63	13	137

Jumlah Peserta Pelatihan
Total Training Participants

Wilayah Kerja Work Area	Direktur	Senior Manajer	Junior Manajer	Supervisor	Staf	Tenaga Pelaksana	Jumlah Total
	Director	Senior Manager	Junior Manager	Supervisor	Staff	Implementing Staff	
DKI Jakarta	1	10	17	12	54	1	97

Jumlah Peserta Pelatihan dibandingkan jumlah Pegawai
Total Training Participants

Wilayah Kerja Work Area	Direktur	Senior Manajer	Junior Manajer	Supervisor	Staf	Tenaga Pelaksana	Jumlah Total
	Director	Senior Manager	Junior Manager	Supervisor	Staff	Implementing Staff	
DKI Jakarta	0,73%	7,3%	12,4%	8,7%	39,4%	0,73%	69,26%

Selain menekankan pembekalan kepada pegawai, Sarana Jaya juga turut menerapkan ketentuan yang ditujukan pada kepedulian dan pelatihan anti korupsi penyusunan pada mitra usaha Perusahaan. Kepedulian, sosialisasi maupun persyaratan pelatihan untuk mitra usaha ini juga dapat dikomunikasikan melalui kontrak pengadaan kerja sama atau media lainnya sesuai kebutuhan. Pada tahun 2023, Sarana Jaya telah melaksanakan sosialisasi/ pelatihan anti korupsi kepada *stakeholder* eksternal sebagai berikut:

In addition to emphasizing employee training, Sarana Jaya also implements provisions aimed at anti-bribery awareness and training for the Company's business partners. Awareness, dissemination, and training requirements for business partners are also communicated through cooperation procurement contracts or other media as needed. In 2023, Sarana Jaya carried out the following anti-corruption dissemination/ training to external stakeholders:

Mitra/Pemasok yang Mengikuti Sosialisasi dan Pelatihan Anti-Korupsi Tahun 2023 [GRI 205-2]
Suppliers Participating in Anti-Corruption Dissemination and Training in 2023

Penerima Informasi Information Recipient	Pelaksanaan Kegiatan Implementation		Saluran Komunikasi yang digunakan Communication Channel Used
	Jenis Materi Sosialisasi Dissemination Material	Tanggal Pelaksanaan Implementation Date	
Masyarakat Umum General Public	Unggahan tentang Buku Saku SMAP Sarana Jaya Upload about Sarana Jaya SMAP Pocket Book	31 Maret 2023 March 31, 2023	Sosial media Instagram Sarana Jaya Sarana Jaya's Instagram
Masyarakat Umum General Public	Unggahan Hari Anti Korupsi Sedunia World Anti-Corruption Day Post	9 Desember 2023 December 9, 2023	Sosial media Instagram Sarana Jaya Sarana Jaya's Instagram

Pada tahun 2023, Sarana Jaya tidak menemukan adanya insiden korupsi yang melibatkan manajemen, pegawai Perusahaan maupun mitra kerja Perusahaan. Sehingga dapat dikatakan bahwa segala upaya dan program yang diterapkan telah mampu bekerja secara efektif untuk menekan dan menghilangkan risiko insiden korupsi dan penyusunan yang terjadi di lingkungan Perusahaan. [GRI 205-3]

In 2023, Sarana Jaya did not find any incidents of corruption involving company management, employees, or partners. Therefore, it can be concluded that all the efforts and programs implemented have worked effectively to suppress and eliminate the risks of corruption and bribery within the Company. [GRI 205-3]

MENGELOLA RISIKO KEBERLANJUTAN

MANAGING SUSTAINABILITY RISK

Dalam menjalankan manajemen risiko di lingkungan Perusahaan, Sarana Jaya mengadopsi Standar Nasional Indonesia (SNI) untuk penerapan manajemen risiko, yaitu SNI ISO 31000:2018, Perusahaan berkomitmen untuk menerapkan manajemen risiko yang proaktif dan antisipatif secara konsekuen, relevan serta memastikan bahwa praktik pengelolaan risiko dijalankan dalam suatu sistematis dan mekanisme kerja yang terintegrasi, serta tidak terpisahkan dari tata kelola perusahaan yang baik dan berbagai sistem manajemen yang diadopsi oleh Sarana Jaya.

In carrying out risk management in the Company, Sarana Jaya adopts the Indonesian National Standards (SNI) for risk management implementation, i.e., SNI ISO 31000:2018. The Company is committed to implementing proactive and anticipatory risk management consistently and relevantly. It ensures that risk management practices are carried out in an integrated system and work mechanism and are inseparable from good corporate governance as well as various management systems adopted by the Company.

Sebagai upaya untuk pengembangan bisnis secara korporasi yang berbasis kepada standar risiko dan agar dapat membentengi segala risiko yang mungkin timbul yang dapat merugikan perusahaan dan dapat mengakibatkan arus kas perusahaan menjadi negatif, Sarana Jaya telah membuat profil risiko Perusahaan dan memasukan aspek ESG kedalamnya. Berikut profil risiko Perusahaan yang terkait dengan ESG beserta mitigasinya:

As an effort to develop a risk-based corporate business and mitigate risks that may be detrimental to the Company and result in a negative company cash flow, Sarana Jaya has created a company risk profile which includes ESG aspects. The following is the Company's ESG-related risk profile and risk mitigation:

Risiko dan Mitigasi Risiko Perusahaan terkait ESG [GRI 2-25][OJK E.3]
 ESG-Related Risk and Mitigation

Risiko Risk	Penyebab Risiko Cause of Risk	Mitigasi Risiko Risk Mitigation
Risiko Reputasi Reputational Risk		
<i>Environment, Social, Governance (ESG)</i>	Adanya tindakan dari perusahaan yang berdampak negatif terhadap lingkungan, perubahan iklim dan kondisi tenaga kerja yang tidak baik. Corporate actions that have a negative impact on the environment, climate change, and unfavorable labor conditions.	Perusahaan harus selalu mengedepankan ESG didalam setiap proyek yang akan dilakukan terutama yang berhubungan dengan lingkungan dan masyarakat sekitar. The Company must always prioritize ESG in future projects, especially those related to the environment and surrounding communities.
	Berita negatif yang dapat terekspos ke media di level lokal dan nasional sehingga menjadi viral. Negative news that is exposed to the local and national media and becomes viral.	Perusahaan harus selalu menjaga dan memantau reputasi perusahaan secara proaktif. The Company must always maintain and monitor its reputation.
	Penurunan kepercayaan terhadap <i>stakeholder</i> dikarenakan persepsi negatif terhadap perusahaan yang dapat menurunkan pendapatan Perusahaan. Decreased stakeholders trust due to negative perceptions of the Company which can reduce the Company's revenue.	Perusahaan menjunjung tinggi transparansi dalam hubungan dengan para pihak dan menghindari investasi pada proyek yang tidak mempertimbangkan aspek <i>sustainability, social</i> dan <i>environmental</i> . The Company upholds transparency in relations with parties and avoids investing in projects that do not consider sustainability, social, and environmental aspects.

MELIBATKAN PEMANGKU KEPENTINGAN

Dalam membangun aspek Keberlanjutan di lingkungan Perusahaan, Sarana Jaya turut melibatkan partisipasi pemangku kepentingan untuk memberikan masukan kepada Perusahaan sehingga Perusahaan dapat mengetahui harapan dari para pemangku kepentingan yang kemudian akan diselaraskan dengan strategi dan program kerja Perusahaan. Melalui pelibatan pemangku kepentingan ini, Perusahaan melakukan identifikasi atas dampak aktual dan potensial terhadap aktivitas bisnis yang mempengaruhi aspek ekonomi, lingkungan dan sosial untuk menentukan tindakan pencegahan dan mitigasi akan potensi dampak negatif. Adapun keterlibatan pemangku kepentingan Sarana Jaya pada tahun 2023 adalah sebagai berikut:

ENGAGING STAKEHOLDERS

In building sustainability within the Company's environment, Sarana Jaya also involves the stakeholders in providing input so that the Company knows their expectations, which will then be aligned with corporate strategies and work programs. Through stakeholder engagement, the Company identifies actual and potential impacts on business activities that affect economic, environmental, and social aspects to determine preventive actions and mitigation for potential negative impacts. Sarana Jaya's stakeholder engagement in 2023 is as follows:

Pendekatan Keterlibatan Pemangku Kepentingan [GRI 2-29] [OJK E.4]
Approach to Stakeholder Engagement

Kategori Pemangku Kepentingan Stakeholder Category	Metode Pelibatan Engagement Method	Frekuensi Frequency	Tujuan Pendekatan Objective
Pemegang Saham/Pemerintah Provinsi DKI Jakarta Shareholders/DKI Jakarta Provincial Government	Keputusan BPBUMD berupa pengesahan BPBUMD resolution in the form of ratification	<ul style="list-style-type: none"> Keputusan BPBUMD berupa pengesahan satu kali setiap tahun BPBUMD resolution in the form of ratification once every year Keputusan BPBUMD berupa pengesahan sesuai kebutuhan BPBUMD resolution in the form of ratification as needed 	Memberikan keterbukaan informasi dan pertanggungjawaban kinerja Perusahaan Providing information disclosure and accountability for the Company's performance.
	Laporan kinerja Performance report	Satu kali dalam setahun atau tiga bulan Sekali Once a year or once every three months	
Pemerintah/ Regulator Government/Regulator	Kepatuhan terhadap Peraturan Regulatory Compliance	Minimal satu kali dalam setahun At least once a year	Mematuhi setiap ketentuan dan peraturan yang berlaku agar tidak menimbulkan dampak <i>negative</i> Complying with all applicable rules and regulations so as not to cause negative impacts.
	Kontribusi ekonomi kepada Pemerintah (Pajak dan Subsidi) Economic Contribution to the Government (Taxes and Subsidies)		
Pegawai Employees	Pertemuan periodic Periodic meetings	Setiap saat apabila dibutuhkan Any time necessary	Meningkatkan kepuasan, keterikatan dan kesejahteraan pegawai Increasing employee satisfaction, engagement, and welfare.
	<i>Employee dan Family Gathering</i> Employee and Family Gathering	Satu kali dalam setahun Once a year	
	Perayaan Hari Ulang Tahun Perusahaan The Company's Anniversary Celebration	Satu kali dalam setahun Once a year	
	Survei Keterikatan Pegawai Employee Engagement Survey	Satu kali dalam setahun Once a year	
Pelanggan Customers	<i>Customer Gathering</i> Customer Gathering	Satu kali dalam setahun Once a year	Memahami dan memenuhi kebutuhan pelanggan agar meningkatkan kepuasan pelanggan yang berujung pada loyalitas. Understanding and fulfilling customer needs to increase customer satisfaction, which leads to loyalty.
	Survei kepuasan pelanggan Customer satisfaction survey	Satu kali dalam setahun Once a year	
Mitra Usaha Business Partners	<i>Vendor Gathering</i> Vendor Gathering	Satu kali dalam setahun Once a year	Meningkatkan kerja sama dengan mengutamakan prinsip transparansi, akuntabel dan kewajaran. Increasing cooperation by prioritizing the principles of transparency, accountability, and fairness.
Masyarakat/LSM Community/NGO	Kegiatan CSR (<i>Charity</i>) CSR Activities (Charity)	Minimal sekali dalam setahun atau setiap saat apabila diperlukan At least once a year or any time necessary	Meningkatkan kerjasama <i>project</i> dan melibatkan masyarakat dalam pemanfaatan atau pengelolaan sampah (3R sampah) dan penanaman pohon serta pelaksanaan program CSR. Increasing project collaboration and involving the community in waste utilization or management (3R waste), tree planting, and CSR program implementation.
	Forum Warga Citizen Forum	Setiap saat apabila diperlukan Any time necessary	
Media Media	<i>Press Release dan Press Conference</i> Press Release and Press Conference	Saat diperlukan When necessary	Menjalin hubungan dan komunikasi yang efektif untuk membangun citra positif Perusahaan. Establishing effective relationships and communication to build a positive Company image.

WHISTLE BLOWING SYSTEM [GRI 2-16, 2-25, 2-26]

WHISTLEBLOWING SYSTEM

Whistle Blowing System (WBS) Sarana Jaya merupakan sistem pelaporan pelanggaran yang dikelola oleh *Synergy Strategic Advisory* (SSA) selaku pihak independen untuk Sarana Jaya. WBS digunakan untuk menampung, mengelola dan menindaklanjuti serta membuat pelaporan dari seluruh Insan Sarana Jaya mengenai dugaan tindakan pelanggaran yang terjadi di lingkungan Perusahaan. Adapun jenis-jenis tindak pelanggaran yang dapat dilaporkan melalui WBS berupa perbuatan pelanggaran hukum dan peraturan perundang-undangan, pelanggaran peraturan internal Perusahaan serta pelanggaran norma dan etika.

Sarana Jaya's Whistleblowing System (WBS) is a violation reporting system managed by an independent party, i.e., Synergy Strategic Advisory (SSA). The WBS is used to accommodate, manage, and follow up reports from all Sarana Jaya's personnel on alleged violations within the Company. The types of violations that can be reported through the WBS are violations of laws and regulations, violations of the Company's internal regulations, as well as violations of norms and ethics.

Laporkan pelanggaran disiplin Perusahaan melalui:
Report violations in the Company through:



wbssaranajaya@sarana-jaya.co.id



<https://pengaduansaranajaya.id/>

Surat Resmi yang ditujukan kepada Direktur Utama atau Ketua Dewan Pengawas dalam hal tindak pelanggaran yang melibatkan Direksi Perusahaan
Official letter addressed to the President Director or Chairman of the Supervisory Board in the event of a violation involving the Company's Board of Directors

Mekanisme Pelaporan melalui WBS [GRI 2-26]

WBS Reporting Mechanism

- 1 **Penerimaan laporan tindak pelanggaran dari pelapor**
Receipt of reports of violations from whistleblower
- 2 **Penelaahan atas laporan tindak pelanggaran sekaligus penelaahan perlindungan yang diperlukan oleh Pelapor terkait dengan laporan yang diterima**
Review of violation reports and review of whistleblower protection in relation to the reports received
- 3 **Pemeriksaan terhadap tindak pelanggaran yang dilaporkan sekaligus pemberian perlindungan yang diperlukan oleh Pelapor dan pihak-pihak yang terkait dengan penanganan tindak pelanggaran**
Examination of reported violations while providing the protection needed by the whistleblower and parties related to the handling of violations
- 4 **Penyelesaian penanganan laporan tindak pelanggaran**
Completion of violation report handling

Sarana Jaya berkomitmen untuk menjaga kerahasiaan data pelapor (*whistleblowers*) dari pihak-pihak yang tidak berkepentingan dengan memberikan perlindungan berupa jaminan atas kerahasiaan identitas *whistleblowers* serta jaminan atas kerahasiaan isi laporan. Dengan adanya jaminan yang diberikan ini diharapkan Perusahaan mampu mendorong pelapor untuk melaporkan tindak laku kecurangan sehingga ancaman kerugian bagi Perusahaan dapat terhindari.

Sarana Jaya is committed to maintaining the confidentiality of whistleblower data from unauthorized parties by providing guarantees for the whistleblower's identity confidentiality and report contents. The Company hopes that the guarantees provided will be able to encourage whistleblowers to report fraudulent behavior to avoid the threat of loss to the Company.

Selama tahun 2023, jumlah laporan yang masuk pada WBS Sarana Jaya adalah sebanyak 6 (Enam) pengaduan dimana status dinyatakan selesai penanganan sebanyak 1 (Satu) laporan, pengaduan diterima sebanyak 2 (Dua) laporan, dan tahap penelaahan sebanyak 3 (Tiga) laporan.

In 2023, the Company received six reports submitted through the WBS mechanism. These complaints have a status of one report as complete, two reports received, and three reports under review.

MENGELOLA KINERJA DAN DAMPAK EKONOMI

MANAGING ECONOMIC PERFORMANCE AND IMPACT

“Sarana Jaya berkomitmen memberikan dampak ekonomi positif melalui berbagai kegiatan dan proyek yang dijalankan dengan menciptakan peluang kerja bagi masyarakat, memperkuat rantai pasok lokal dan mendukung pertumbuhan ekonomi melalui pembayaran pajak kepada Negara. Melalui pembangunan infrastruktur yang berkualitas, Sarana memberikan memberikan efek pengganda (*multiplier effect*) bagi perekonomian dengan membuka akses baru pada aspek perdagangan, pariwisata serta investasi yang mendukung keberlanjutan ekonomi berkelanjutan.”

“Sarana Jaya is committed to providing a positive economic impact through various activities and projects by creating job opportunities for the community, strengthening local supply chains, and supporting economic growth through tax payments to the Country. By developing quality infrastructure, the Company provides a multiplier effect for the economy by opening new access to trade, tourism, and investment that support sustainable economic sustainability.”



Pendekatan Manajemen Topik Kinerja Ekonomi dan Dampak Ekonomi Tidak Langsung [GRI 3-3]

Management Approach to Economic Performance and Indirect Economic Impact

► Pengelolaan Dampak | Impact Management

Pengelolaan dampak terkait kinerja ekonomi dan ekonomi tidak langsung dilakukan Sarana Jaya dengan melakukan pengelolaan kinerja keuangan dan operasional untuk menciptakan pendapatan yang dapat memberikan dampak positif yakni menjaga keberlangsungan usaha yang berkontribusi bagi pertumbuhan ekonomi. Sarana Jaya juga menjalin sinergi berkelanjutan yang bermanfaat dengan seluruh pemangku kepentingan yang terkait yakni mitra mitra potensial dalam mengembangkan aset-aset properti, Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) Pemerintah Provinsi DKI Jakarta dalam melaksanakan Kegiatan Strategis Daerah (KSD), mitra pemasok dan masyarakat yang dapat memberikan dampak positif yakni menciptakan peluang kerja bagi masyarakat, memperkuat rantai pasok lokal dan mendukung pertumbuhan ekonomi melalui pembayaran pajak kepada Negara dan memberikan efek pengganda (*multiplier effect*) bagi industri lain. [GRI 2-27, 3-2, 3-3, 207-2]

The management of economic performance and indirect economic impact is carried out by managing financial and operational performance to create revenue that positively impacts maintaining business continuity and contributes to economic growth. The Company also establishes beneficial, sustainable synergies with all relevant stakeholders, including potential partners in developing property assets, DKI Jakarta Provincial Government Work Units (SKPD) in implementing Regional Strategic Activities (KSD), supply partners, and the community, which can create job opportunities for the community, strengthen local supply chains, support economic growth through tax payments to the Country, and provide a multiplier effect for other industries. [GRI 2-27][GRI 3-2, 3-3, 207-2]

► Kebijakan Khusus | Specially Policies

Kebijakan Sarana Jaya terkait Kinerja Ekonomi dan Dampak Ekonomi Tidak Langsung:

- Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan (RKAP) tahun 2023
- *Key Performance Indicator*
- Rencana Kerja CSR Tahun Anggaran 2023

Kebijakan Sarana Jaya terkait Ekonomi dan Ekonomi Tidak Langsung Mengacu pada Ketentuan Umum:

- Perundang-Undangan dan Peraturan yang berhubungan dengan Keuangan yang berlaku
- United Nations Global Compact (UNGC)
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 54 Tahun 2017 tentang Badan Usaha Milik Daerah
- Peraturan Gubernur Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 112 Tahun 2013 tentang Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Dunia Usaha

Sarana Jaya's Policies on Economic Performance and Indirect Economic Impact:

- 2023 Company Work Plan & Budget (RKAP)
- Key Performance Indicators
- CSR Work Plan for the 2023 Fiscal Year

Sarana Jaya's Policies on Economy and Indirect Economics Refer to the Following General Provisions:

- Applicable laws and regulations related to finance
- United Nations Global Compact (UNGC)
- Indonesian Government Regulation No. 54 of 2017 on Region-Owned Enterprises
- Regulation of DKI Jakarta Governor No. 112 of 2013 on Social and Environmental Responsibility of the Business Realm

► Komitmen | Commitment

- Menciptakan kinerja ekonomi positif yang berkelanjutan yang berkontribusi pada pembangunan ekonomi
- Memberikan kontribusi maksimal pada sektor properti
- Menyediakan hunian yang terjangkau, strategis, dan layak huni bagi masyarakat Jakarta
- Menyelesaikan proyek-proyek yang berkualitas, tepat waktu dan dalam batas anggaran yang ditetapkan
- Mendorong partisipasi dan keterlibatan masyarakat lokal dalam proyek-proyek yang dijalankan sebagai upaya pemberdayaan ekonomi lokal dan peningkatan kemakmuran Bersama

- Creating sustainable positive economic performance that contributes to economic development
- Giving maximum contribution to the property sector
- Providing affordable, strategic, and livable housing for the people of Jakarta
- Completing quality projects on time and within the budget limit
- Encouraging the participation and involvement of local communities in projects to empower the local economy and increase shared prosperity

► Tujuan/Target | Goals/Targets

- Target pendapatan Rp446.076 juta, terealisasi Rp211.954 juta (48%)
- Target rugi tahun berjalan Rp3.293 juta terealisasi rugi Rp98.863 juta (3.002%)

- Revenue target of Rp446,076 million, realized by Rp211,954 million (48%)
- Loss for the Year target of Rp3,293 million and realized loss of Rp98,863 million (3,002%)

► Evaluasi | Evaluation

- Analisa Keuangan yang meliputi pengukuran dan pemantauan indikator keuangan seperti pendapatan, laba, dan arus kas. Dengan melihat data keuangan secara terperinci, Sarana Jaya dapat melakukan identifikasi tren, kinerja yang kurang optimal dan memiliki peluang melakukan perbaikan dalam aspek ekonomi.
- Evaluasi Proyek: meliputi analisis biaya dan manfaat, estimasi pendapatan, risiko keuangan dan estimasi dampak ekonomi. Hal ini membantu Perusahaan memastikan proyek yang dilaksanakan mampu memberikan efek pengganda (*multiplier effect*).

- Financial Analysis includes measuring and monitoring financial indicators, i.e., revenue, profit, and cash flow. By looking at financial data in detail, Sarana Jaya can identify trends, suboptimal performance, and opportunities for improvement in the economic aspect.
- Project Evaluation includes cost and benefit analysis, income estimation, financial risk, and economic impact estimation. This helps the Company ensure that the projects implemented provide a multiplier effect.

► **Penanggung Jawab | Responsible Person**

- Senior Manajer Divisi Keuangan dan Akuntansi
Senior Manager of Finance & Accounting Division
- Senior Manajer Divisi Usaha
Senior Manager of Business Division

► **Alokasi Anggaran | Budget Allocation**

Sepanjang tahun 2023, Sarana Jaya telah mendistribusikan nilai/manfaat ekonomi kepada pemangku kepentingan Perusahaan sebesar Rp298.323 juta.
Throughout 2023, Sarana Jaya has distributed Rp298,323 million in economic value/benefits to Company stakeholders.

► **Keterlibatan Pemangku Kepentingan | Stakeholder Engagement**

Pemerintah Provinsi DKI Jakarta

- Memberikan keputusan serta dukungan terhadap kelancaran bisnis Perusahaan

DKI Jakarta Provincial Government

- Provide decisions and support for the smooth running of the Company's business

Direksi Perusahaan

- Proses pengambilan keputusan strategis dan operasional Direksi dapat mempengaruhi rencana, kebijakan, dan arah strategis organisasi

Board of Directors

- The Board of Directors' strategic and operational decision-making processes can influence the organization's plans, policies, and strategic direction

Pegawai Perusahaan

- Membantu Perusahaan dalam pencapaian target ekonomi yang telah ditetapkan untuk menjaga keberlanjutan usaha

Company Employees

- Assist the Company in achieving the set economic targets to maintain business continuity

PERBANDINGAN TARGET DAN REALISASI KINERJA EKONOMI

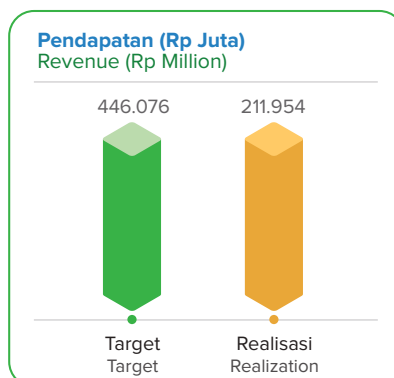
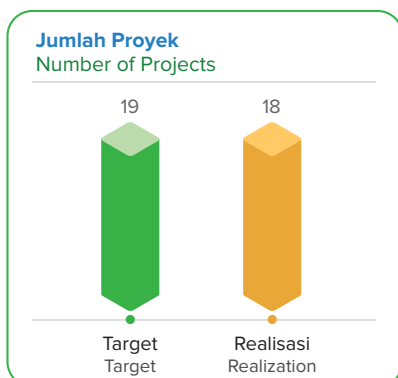
COMPARISON OF ECONOMIC PERFORMANCE TARGET AND REALIZATION

Pada tahun 2023, Sarana Jaya berhasil menciptakan kinerja ekonomi yang positif yang menunjukkan kestabilan dan keberhasilan dalam menjalankan berbagai proyek yang dijalankan. Sarana Jaya berhasil membukukan pendapatan pada tahun 2023 sebesar Rp211.954 juta yang meningkat signifikan dibandingkan tahun 2022 dengan pendapatan sebesar Rp158.435 juta. Adapun pencapaian ekonomi Perusahaan adalah sebagai berikut:

In 2023, Sarana Jaya achieved a positive economic performance, showing its stability and success in various projects. The Company managed to record revenue of Rp211,954 million in 2023, which increased significantly compared to 2022, with revenue of Rp158,435 million. The Company's economic achievements are as follows:

► **Ikhtisar Pencapaian Kinerja Ekonomi Sarana Jaya Tahun 2023**

Sarana Jaya's Economic Performance Highlights in 2023



Perbandingan Target dan Kinerja Produksi dan Keuangan [OJK F.2]
Comparison of Production and Financial Targets and Performance

Indikator Indicator	2023			2022			2021		
	Target Target	Realisasi Realization	Pencapaian Achievement	Target Target	Realisasi Realization	Pencapaian Achievement	Target Target	Realisasi Realization	Pencapaian Achievement
Pendapatan (Rp Juta) Revenue (Rp Million)	446.076	211.954	48%	388.613	158.435	41%	159.334	241.211	151%
Laba Tahun Berjalan (Rp Juta) Profit for the Year (Rp Million)	(3.293)	(98.863)	3.002%	33.028	78.961	239%	363.478	(217.165)	60%
Jumlah Proyek Total Projects	19	18	95%	18	17	94%	17	17	100%

MENGOPTIMALKAN PEROLEHAN DAN PENDISTRIBUSIAN NILAI EKONOMI [OJK F.3]

OPTIMIZING ECONOMIC VALUE ACQUISITION AND DISTRIBUTION

Pengoptimalan perolehan dan pendistribusian nilai ekonomi dilakukan Sarana Jaya pada berbagai aspek kegiatan usaha. Pada sisi pengoptimalan perolehan nilai ekonomi, Sarana Jaya melakukan penciptaan pendapatan, peningkatan efisiensi operasional, melakukan ekspansi dan pengembangan strategi pemasaran yang efektif. Pada sisi pendistribusian nilai ekonomi, Sarana Jaya mengalokasikan nilai ekonomi kepada berbagai pemangku kepentingan melalui pembayaran pajak kepada negara, pemberian remunerasi yang adil kepada pegawai dan melakukan investasi dalam program tanggung jawab sosial dan lingkungan. Selama tahun 2023, Sarana Jaya mencatatkan perolehan nilai ekonomi langsung yang dihasilkan sebesar Rp209.603 juta dengan nilai ekonomi yang didistribusikan kepada pemangku kepentingan Perusahaan sebesar Rp298.323 juta.

Sarana Jaya optimizes the acquisition and distribution of economic value in various aspects of business. In optimizing economic value acquisition, the Company generates income, increases operational efficiency, expands, and develops effective marketing strategies. Meanwhile, in terms of economic value distribution, the Company allocates economic value to various stakeholders by paying taxes to the country, providing fair remuneration to employees, as well as investing in social and environmental responsibility programs. Throughout 2023, Sarana Jaya generated a direct economic value of Rp209,603 million, with economic value distributed to the Company's stakeholders amounting to Rp298,323 million.

Nilai Ekonomi Sarana Jaya (Rp Juta) [GRI 201-1]
Sarana Jaya Economic Value (Rp Million)

Nilai Ekonomi	Tahun Year			Economic Value
	2023	2022	2021	
Nilai Ekonomi Langsung yang Dihasilkan	209.603	328.414	241.211	Direct Economic Value Generated
Land Bank	10.785	1.619	-	Land Bank
Pengembangan Lingkungan	25.580	21.314	19.077	Environmental Development

Nilai Ekonomi Sarana Jaya (Rp Juta) [GRI 201-1]
Sarana Jaya Economic Value (Rp Million)

Nilai Ekonomi	Tahun Year			Economic Value
	2023	2022	2021	
Pengelolaan Aset	92.546	102.884	185.166	Asset Management
Pendapatan Operasional Lainnya	92.829	34.237	36.968	Other Operational Revenue
Pendapatan Lain-lain	(12.137)	169.979	-	Other Revenue
Nilai Ekonomi yang Didistribusikan	298.323	306.602	258.181	Distributed Economic Value
Beban Pokok Pendapatan	184.819	151.824	98.866	Cost of Revenue
Beban Pemasaran	2.989	4.060	1.160	Marketing Expenses
Beban Pegawai	66.007	57.088	53.155	Employee Expenses
Beban Administrasi dan Umum*	42.363	55.138	29.588	Administration and General Expenses*
Pembayaran Pajak kepada Negara	45.323	34.999	72.888	Tax Payments
Pembayaran Dividen kepada Pemegang Saham	-	-	-	Dividend Payments to Shareholders
Pengeluaran untuk Program TJSL	2.145	3.493	2.524	CSR Program Expenses
Nilai Ekonomi yang Ditahan	(88.720)	21.812	(16.970)	Economic Value Retained

Catatan | Note :

Perhitungan tabel nilai ekonomi ini didasarkan pada pemenuhan GRI Standards dengan menggunakan data laporan keuangan audited.
The calculation of this economic value table complies with GRI Standards using audited financial statement data.

* Beban Administrasi dan Umum di luar Beban Pegawai

* Administration and General Expenses do not include Employee Expenses

KONTRIBUSI PAJAK KEPADA NEGARA [GRI 207-3, 207-4]

Sarana Jaya memiliki kontribusi yang signifikan kepada negara melalui pembayaran pajak yang dilakukan secara rutin sesuai dengan peraturan dan ketentuan yang berlaku. Melalui pembayaran pajak ini, Sarana Jaya turut memberikan kontribusi kepada pembangunan negara, pembiayaan program dan proyek pemerintah, serta penyediaan fasilitas dan layanan publik yang bermanfaat bagi masyarakat secara keseluruhan. Adapun kontribusi pajak yang dibayarkan Sarana Jaya adalah sebagai berikut:

TAX CONTRIBUTION TO THE COUNTRY [GRI 207-3, 207-4]

Sarana Jaya has significantly contributed to the country through regular tax payments under applicable rules and regulations. By paying taxes, Sarana Jaya is contributing to the country's development, financing government programs and projects, as well as providing public facilities and services that benefit society as a whole. The tax contribution paid by Sarana Jaya is as follows:

Nilai Ekonomi Sarana Jaya (Rp Juta) [GRI 201-1]
Sarana Jaya Tax Contribution (Rp Million)

Keterangan	2023	2022	2021	Description
Pajak Pusat				Central Tax
PPh Pasal 21	5.236	2.791	5.559	Income Tax Article 21
PPh Pasal 23	841	1.077	686	Income Tax Article 23
PPh Pasal 4 ayat 2	2.553	1.413	20.447	Income Tax Article 4 Paragraph 2
PPh Pasal 25	107	211	541	Income Tax Article 25
PPh Badan	914	4	36	Corporate Income Tax
PPN	36.586	17.991	10.765	Value Added Tax (VAT)
Pajak Daerah				Regional Tax
PBB	10.486	5.504	7.367	Land and Building Tax
BPHTB	6.079	4.505	27.002	Property Transfer Fees
Retribusi (SPS Pertanahan)	1.648	1.408	-	Land Fees (Land Registration Fee)
Reklame	89	94	485	Advertisements
Total Pajak	64.539	34.999	72.888	Total Tax

MENGOPTIMALKAN DAMPAK EKONOMI TIDAK LANGSUNG

OPTIMIZING INDIRECT ECONOMIC IMPACTS

Melalui proyek-proyek yang dijalankan, Sarana Jaya melakukan pembangunan infrastruktur berkelanjutan yang turut berperan dalam memajukan Indonesia menuju masa depan yang lebih baik dan berkelanjutan. Pembangunan infrastruktur beserta dampaknya yang dilakukan Sarana Jaya selama tahun 2023 adalah sebagai berikut:

Through the implemented projects, Sarana Jaya carries out sustainable infrastructure development which plays a role in advancing Indonesia towards a better and sustainable future. Infrastructure development carried out by Sarana Jaya in 2023 and its impact are as follows:

Pembangunan Infrastruktur Sarana Jaya 2023 [GRI 203-1] Sarana Jaya's Infrastructure Development in 2023

No.	Program Program	Lokasi Location	Nilai Investasi (Rp Juta) Investment Value (Rp Million)	Sifat Nature	Dampak Impact
1.	Pembangunan Taman PUTL ASEAN ASEAN PUTL Park Construction	Jl. Pattimura, Kel. Selong, Kec. Kebayoran Baru, Kota Adm. Jakarta Selatan Jl. Pattimura, Kel. Selong, Kec. Kebayoran Baru, South Jakarta	Rp5.279.716.311,-	Bantuan Aid	Memfasilitasi ruang terbuka hijau bagi masyarakat Facilitate green open space for the community
2.	Penataan Kawasan Kelurahan Pegangsaan Dua Kelurahan Pegangsaan Dua Area Arrangement	Jl. Pelangi Raya, Pegangsaan Dua, Kelapa Gading, Kota Adm. Jakarta Utara Jl. Pelangi Raya, Pegangsaan Dua, Kelapa Gading, North Jakarta	Rp20.000.000,-	Bantuan Aid	Memfasilitasi infrastruktur masyarakat Facilitating community infrastructure

Dalam rangka memperkuat rantai pasok lokal, Sarana Jaya senantiasa melibatkan pemasok lokal yaitu pemasok yang berada di DKI Jakarta dan pemasok nasional yaitu pemasok dalam negeri untuk bekerjasama dalam mendukung kegiatan bisnis Perusahaan. Selama tahun 2023, Sarana Jaya bekerjasama dengan 57 pemasok lokal (74% dari total pemasok) dengan nilai pengadaan sebesar Rp50.710 juta dan bekerjasama dengan 18 pemasok nasional (23% dari total pemasok) dengan nilai pengadaan sebesar Rp23.899 juta, serta bekerjasama dengan 2 pemasok internasional (3% dari total pemasok) dengan nilai pengadaan sebesar Rp849 juta. [GRI 203-2]

Sarana Jaya involves local suppliers in DKI Jakarta and national or domestic suppliers to strengthen the local supply chain and support the Company's business activities. Throughout 2023, Sarana Jaya has cooperated with 57 local suppliers (74% of total suppliers) with a procurement value of Rp50,710 million, cooperated with 18 national suppliers (23% of total suppliers) with a procurement value of Rp23,899 million, and two international suppliers (3% of total suppliers) with a procurement value of Rp849 million. [GRI 203-2]

Persentase Pemasok Lokal Sarana Jaya [GRI 204-1]
Sarana Jaya Local Supplier Percentage

Jenis Pemasok	2023		2022		2021		Supplier Type
	Jumlah Pemasok Total Supplier	Nilai (Rp Juta) Value (Rp Million)	Jumlah Pemasok Total Supplier	Nilai (Rp Juta) Value (Rp Million)	Jumlah Pemasok Total Supplier	Nilai (Rp Juta) Value (Rp Million)	
Pemasok Lokal	57	50.710	64	29.173	67	33.110	Local Supplier
Pemasok Nasional	18	23.899	15	5.769	12	2.633	National Supplier
Pemasok Internasional	2	849	3	723	1	26.322	International Supplier
Jumlah	77	75.458	82	35.665	80	62.065	Total
Persentase Pemasok Lokal	74%		78%		83%		Local Supplier Percentage

MEMBERIKAN LAYANAN TERBAIK KEPADA PELANGGAN [OJK F.17, F.28]

PROVIDING THE BEST CUSTOMER SERVICE

Sarana Jaya menyadari bahwa kepuasan dan loyalitas pelanggan merupakan suatu hal penting dalam keberlangsungan usaha Perusahaan. Sebagai wujud tanggung jawab Perusahaan kepada pelanggan, Sarana Jaya berkomitmen untuk memberikan layanan terbaik kepada pelanggan.

PROGRAM PENINGKATAN LAYANAN CRM Dashboard (JAKI) [GRI 3-3] [OJK F.26]

Cepat Respon Masyarakat (CRM) adalah sistem terintegrasi berbentuk aplikasi mobile dan web yang digunakan Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta untuk menindaklanjuti laporan warga secara lebih efisien. CRM akan secara otomatis membagikan disposisi kepada OPD/SKPD terkait sesuai dengan komplain masuk dari Masyarakat. Di dalam CRM sendiri telah ditentukan tenggat penyelesaian komplain berdasarkan tingkat kesulitannya. Tenggat penyelesaiannya akan berbanding lurus terhadap TKD Perusahaan dalam hal ini Sarana Jaya.

Selama tahun 2023, terdapat 8 pengaduan dari masyarakat dengan seluruhnya telah Sarana Jaya tindak lanjuti dan sudah dalam status selesai. Dengan integrasi sistem pelayanan komplain masyarakat tersebut, menjadikan Sarana Jaya dapat menyelesaikan komplain yang masuk dengan efisien dan tepat sasaran.

Sarana Jaya is aware that customer satisfaction and loyalty are vital for the continuity of the Company's business. As a manifestation of its responsibility to customers, Sarana Jaya is committed to providing the best customer service.

SERVICE IMPROVEMENT PROGRAM CRM Dashboard (JAKI) [GRI 3-3] [OJK F.26]

Rapid Community Response (CRM) is an integrated system in the form of a mobile and web app used by the DKI Jakarta Provincial Government to follow up on citizen reports more efficiently. CRM will automatically submit dispositions to related OPD/SKPD according to incoming complaints from the community. The CRM system has determined a settlement deadline for complaints based on their difficulty level. The settlement deadline is directly proportional to the Company's TKD, in this case, Sarana Jaya.

Throughout 2023, there were eight complaints from the public, all of which had been followed up and settled by Sarana Jaya. With the integration of the CRM system, Sarana Jaya can resolve incoming complaints efficiently and on target.

Kanal PPID

Informasi merupakan kebutuhan pokok setiap orang bagi pengembangan pribadi dan lingkungan sosialnya. Oleh karena itu, hak memperoleh informasi merupakan hak asasi manusia dan keterbukaan informasi publik. Salah satu elemen penting dalam mewujudkan hak publik untuk memperoleh informasi telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (UU KIP), Sarana Jaya selaku Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) Provinsi DKI Jakarta telah membentuk Pejabat Pengelola Informasi & Dokumentasi (PPID) melalui Surat Keputusan Direksi Nomor 30 Tahun 2018 tentang Pejabat Pengelola Informasi & Dokumentasi PD. Pembangunan Sarana Jaya Daerah Khusus Ibukota Jakarta.

Untuk meningkatkan pelayanan permohonan Informasi, Sarana Jaya mengintegrasikan *Micro-Site* (Laman Mikro) PPID di Laman Resmi Sarana Jaya. Dalam laman mikro tersebut, masyarakat dapat mengisi form untuk permintaan informasi yang dibutuhkan. Informasi tersebut akan diberikan kepada Pemohon sesuai dengan ketentuan SK Direksi Sarana Jaya Nomor 93 tentang Informasi Dikecualikan dan SK Direksi Nomor 92 tentang Informasi Publik. [GRI 3-3]

Pusat Informasi Pelanggan

Sarana Jaya menyediakan informasi produk melalui beberapa kanal yang dapat diakses oleh seluruh pemangku kepentingan, yaitu di:

Perumda Pembangunan Sarana Jaya

Gedung Sarana Jaya Lt. 3
 Jl. Budi Kemuliaan I No. 1,
 Jakarta Pusat 10110
 Sarana Jaya Building 3rd Floor
 Jl. Budi Kemuliaan I No. 1,
 Central Jakarta 10110

✉ info@sarana-jaya.co.id
 ☎ +62 21 352 2667

📘 Sarana Jaya
 📷 @perumdasaranjaya
 📺 @pembasaranajaya

☎ +62 21 385 3960
 🌐 www.sarana-jaya.co.id

📘 Perumda Pembangunan Sarana Jaya
 📺 Perumda Sarana Jaya
 📺 @perumdasaranjaya

Survei Kepuasan Pelanggan [OJK F.30]

Pada tahun 2023, Sarana Jaya telah melakukan survei kepuasan pelanggan di wilayah bisnis Perusahaan dimana terdapat masyarakat sebagai penerima manfaat. Survei ini dilakukan dengan tujuan untuk mengukur dan memahami tingkat kepuasan pelanggan terhadap produk dan layanan Perusahaan. Melalui survei ini, Sarana Jaya mendapatkan umpan balik langsung dari pelanggan sehingga Perusahaan dapat mengidentifikasi area-area perbaikan dan mengambil langkah-langkah untuk meningkatkan kepuasan pelanggan.

PPID Channel

Information is a basic human need for personal development and social environment. Therefore, the right to obtain information is a human right and part of public information disclosure. One of the important elements in realizing the public right to information has been regulated in Law No. 14 of 2008 on Public Information Disclosure (UU KIP). As a Region-Owned Enterprise (BUMD) of DKI Jakarta Province, Sarana Jaya has formed an Information Management & Documentation Officer (PPID) through the Board of Directors Decree No. 30 of 2018 on Information Management & Documentation Officer of Pembangunan Sarana Jaya of DKI Jakarta.

To improve information request services, Sarana Jaya integrates the PPID Micro-Site on the Sarana Jaya Official Website. The public can fill out a form to request the required information on the microsite. The information will be provided to the Applicant per the provisions of the Board of Directors Decree No. 93 on Excluded Information and Decree No. 92 on Public Information. [GRI 3-3]

Customer Information Center

Sarana Jaya provides product information through several channels that all stakeholders can access:

Customer Satisfaction Survey [OJK F.30]

In 2023, Sarana Jaya conducted a customer satisfaction survey in the Company's business areas where the community is the beneficiary. The survey was conducted to measure and understand customer satisfaction with the Company's products and services. Through this survey, Sarana Jaya obtained direct customer feedback, which can be used to identify areas of improvement and take steps to increase customer satisfaction. In addition, the survey also served as a performance evaluation tool for

Selain itu, survei kepuasan pelanggan juga berfungsi sebagai alat evaluasi kinerja Sarana Jaya dalam memenuhi harapan dan kebutuhan pelanggan. Pada survei di tahun 2023, nilai kepuasan pelanggan didapatkan sebesar 77%.

Pengelolaan Keselamatan dan Kesehatan Pelanggan [OJK F.27]

Sarana Jaya menyadari bahwa perlindungan keselamatan dan kesehatan pelanggan merupakan suatu hal penting dalam keberlangsungan usaha Perusahaan. Pelanggan mengharapkan layanan Perusahaan tidak memberi risiko bagi keselamatan dan kesehatan. Untuk itu, Sarana Jaya senantiasa melakukan pengelolaan keselamatan dan kesehatan pelanggan sebagai komitmen Perusahaan memberikan layanan terbaik kepada pelanggan dan juga untuk menghindari dampak negatif potensial seperti ganti rugi atas ketidakpuasan pelanggan yang dapat mempengaruhi citra dan keberlangsungan usaha Perusahaan. [GRI 3-3]

Dalam setiap perizinan, Proyek Sarana Jaya selalu berusaha mematuhi ketentuan yang berlaku. Seperti dalam Prosedur Evakuasi Kebakaran yang merupakan regulasi Peraturan Menteri nomor 26/PRT/M/2008 tentang Proteksi Kebakaran terhadap Bangunan, dimana hal tersebut akan disidangkan di Dinas Cipta Karya, Tata Ruang dan Pertanahan DKI Jakarta untuk menerbitkan IMB.

Adapun divisi dan unit yang bertanggung jawab melakukan pengelolaan keselamatan dan kesehatan pelanggan adalah Divisi Umum dan SDM serta Unit Perencanaan dan Pembangunan.

Untuk menjaga keselamatan dan kesehatan pelanggan, Sarana Jaya telah melaksanakan berbagai upaya sebagai berikut: [GRI 416-2]

- **Sosialisasi Keselamatan Kebakaran Gedung:** Kegiatan sosialisasi keselamatan kebakaran Gedung untuk meningkatkan kesadaran dan pengetahuan tentang tindakan pencegahan dan respon dalam situasi kebakaran. Dalam kegiatan ini, partisipan diberikan informasi mengenai pentingnya pemahaman terhadap tanda-tanda bahaya kebakaran, cara penggunaan peralatan pemadam kebakaran, jalur evakuasi, titik kumpul serta tindakan yang harus dilakukan dalam situasi darurat.
- **Penyediaan Alat Pemadam Api Ringan (APAR):** Menyediakan APAR pada proyek Perusahaan untuk menjaga kesiapsiagaan dalam memadamkan api pada awal kebakaran.

Sarana Jaya to meet customer expectations and needs. In the 2023 survey, the customer satisfaction score was 77%.

Customer Health and Safety Management [OJK F.27]

Sarana Jaya is aware that protecting customer health and safety is essential for the continuity of the Company's business. Customers expect the Company's services that do not pose a risk to health and safety. Therefore, Sarana Jaya always manages customer health and safety as its commitment to providing the best service and avoiding potential negative impacts such as compensation for customer dissatisfaction, which can affect the Company's image and business sustainability. [GRI 3-3]

For every project permit, Sarana Jaya always tries to comply with the applicable regulations. For example, the Fire Evacuation Procedure, as contained in the Ministerial Regulation No. 26/PRT/M/2008 on Fire Protection of Buildings, will be heard at the Copyrights, Spatial Planning and Land Office of DKI Jakarta to issue an IMB.

The divisions and units responsible for managing customer health and safety are the General Affairs & HR Division and the Planning & Development Unit.

To maintain customer health and safety, Sarana Jaya has made the following efforts: [GRI 416-2]

- **Dissemination of Building Fire Safety:** Building fire safety dissemination was carried out to increase awareness and knowledge about prevention and response measures in fire situations. In this activity, participants were given information about the importance of understanding fire hazard signs, how to use firefighting equipment, evacuation routes, assembly points, and actions to be taken in an emergency.
- **Provision of Light Fire Extinguishers (APAR):** APAR was provided in office buildings and project sites to maintain readiness in extinguishing fires at the start of a fire.

- **Penggunaan Alat Pelindung Diri pada seluruh pekerja proyek Sarana Jaya**

Dengan penerapan komitmen yang baik, selama tahun 2023 tidak terdapat insiden ketidakpatuhan Perusahaan terhadap regulasi atau peraturan terkait keselamatan dan kesehatan pelanggan sehingga Sarana Jaya tidak menerima sanksi ataupun denda.

[GRI 2-27, 416-2]

- **Use of Personal Protective Equipment for all Sarana Jaya project workers**

Due to the Company's good commitments, there were no incidents of non-compliance with regulations related to customer health and safety in 2023, and Sarana Jaya did not receive sanctions or fines.

[GRI 2-27, 416-2]

MENGELOLA KINERJA DAN DAMPAK LINGKUNGAN

MANAGING ENVIRONMENTAL PERFORMANCE AND IMPACT

“Sarana Jaya selalu berkomitmen untuk menerapkan praktik-praktik pengelolaan lingkungan yang berkelanjutan. Sejalan dengan komitmen tersebut, Perusahaan telah mengembangkan rencana pengelolaan lingkungan yang komprehensif yang bertujuan untuk meminimalkan dampak lingkungan dari kegiatan operasinya. Sarana Jaya telah mengambil beberapa langkah proaktif untuk mengurangi jejak karbon dan mendorong pelestarian lingkungan. Sistem pengelolaan limbah telah dioptimalkan untuk mengurangi jumlah limbah yang dikirim ke tempat pembuangan akhir melalui program daur ulang dan pengomposan. Selain itu, strategi pengurangan energi telah diterapkan untuk meminimalkan konsumsi energi secara keseluruhan dari seluruh proyeknya. Hal ini mencakup pemasangan lampu hemat energi dan penerapan protokol hemat daya untuk peralatan. Sarana Jaya juga berfokus pada pengembangan dan pemeliharaan area hijau di sekitar area proyek. Area hijau tersebut tidak hanya berkontribusi pada lingkungan yang lebih sehat tetapi juga memberikan suasana yang damai dan alami bagi para pegawai, penghuni, pengunjung, maupun masyarakat umum. Selain itu, Perusahaan secara berkala menilai kinerja lingkungannya untuk mengidentifikasi area-area yang perlu ditingkatkan. Sarana Jaya berkomitmen untuk menjunjung tinggi praktik-praktik tersebut karena Perusahaan percaya bahwa hal ini merupakan tanggung jawab kita semua untuk berkontribusi pada lingkungan yang lebih sehat dan berkelanjutan bagi generasi mendatang.”

“Sarana Jaya has always been committed to implementing sustainable environmental management practices. In line with this commitment, the Company has developed a comprehensive environmental management plan that aims to minimize the environmental impact of its operations. Sarana Jaya has taken several proactive steps to reduce its carbon footprint and encourage environmental conservation. The waste management system has been optimized to reduce the amount of waste sent to landfills through recycling and composting programs. In addition, energy reduction strategies have been implemented to minimize the overall energy consumption of all its projects. This includes the installation of energy-efficient lighting and the implementation of power-saving protocols for equipment. Sarana Jaya also focuses on developing and maintaining green areas around the project area. These green areas contribute to a healthier environment and provide a peaceful and natural atmosphere for employees, residents, visitors, and the general public. In addition, the Company regularly assesses its environmental performance to identify areas for improvement. Sarana Jaya is committed to upholding these practices as the Company believes that it is the responsibility of all of us to contribute to a healthier and more sustainable environment for future generations.”



PENDEKATAN MANAJEMEN TOPIK LINGKUNGAN [GRI 3-3] MANAGEMENT APPROACH TO ENVIRONMENT

► Pengelolaan Dampak | Impact Management

Pengelolaan dampak terhadap lingkungan dilakukan Sarana Jaya melalui pelaksanaan kegiatan analisis lingkungan secara komprehensif sebelum memulai proyek konstruksi, dan pengidentifikasian potensi dampak negatif serta mengembangkan berbagai strategi dan upaya untuk meminimalkan dampak lingkungan. Selain itu, Sarana Jaya juga melakukan pemantauan secara kontinyu selama proyek berlangsung untuk memastikan kepatuhan terhadap praktik ramah lingkungan dan melakukan perbaikan untuk meminimalisir dampak negatif potensial seperti kerusakan lingkungan akibat pembangunan diminimalkan melalui penghijauan area sekitar proyek. Selain itu, dari sisi operasional kantor, Sarana Jaya juga melakukan program operasional kantor ramah lingkungan sebagai kontribusi dan aksi untuk menciptakan dampak positif bagi pelestarian lingkungan. [GRI 2-27, 3-2, 3-3]

Sarana Jaya carries out environmental impact management through a comprehensive environmental analysis before starting a construction project, identifying potential negative impacts, as well as developing various strategies and efforts to minimize environmental impacts. In addition, Sarana Jaya conducts continuous monitoring throughout the project to ensure compliance with environmentally friendly practices and make improvements to minimize potential environmental damage by greening the area around the project. In terms of office operations, the Company also carries out a green office program as a contribution and action to positively impact environmental preservation. [GRI 2-27] [GRI 3-2, 3-3]

► Kebijakan Khusus | Specially Policies

Ketentuan Umum

- United Nations Global Compact (UNGC)
- Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup serta Perubahannya Peraturan Pemerintah Pengganti Undang Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2022
- Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2012 tentang Izin Lingkungan

General Provisions

- United Nations Global Compact (UNGC)
- Government Regulation No. 22 of 2021 on Implementation of Environmental Protection and Management
- Law of the Republic of Indonesia No. 32 of 2009 on Environmental Protection and Management and Amendments Government Regulation to replace Law of the Republic of Indonesia No. 2 of 2022
- Government Regulation No. 27 of 2012 on Environmental Permits

► Komitmen | Commitment

- Mengutamakan penggunaan bahan-bahan yang memiliki dampak minimal terhadap lingkungan seperti penggunaan material yang lebih ramah lingkungan dan fitur-fitur lain yang meningkatkan nilai ekologis bangunan serta meningkatkan kemampuan penghematan dari operasional.
- Memaksimalkan praktik pemisahan limbah pada aktivitas kantor.
- Mengurangi konsumsi energi secara efisien di setiap proyek pengerjaan maupun aktivitas kantor melalui penerapan program efisien energi.
- Melakukan pelestarian lingkungan di sekitar proyek-proyek pengerjaan seperti pembuatan area hijau, penanaman pohon, dan pemulihan ekosistem yang terkena dampak konstruksi.

- Prioritizing using more environmentally friendly materials that have minimal impact on the environment and other features that increase the ecological value of buildings and the ability to make operational savings.
- Maximizing waste separation practices in office activities.
- Reducing energy consumption efficiently in every project or office activity by implementing energy-efficient programs.
- Protecting the environment around project sites by creating green areas, planting trees, and restoring ecosystems affected by construction.

Tujuan/Target | Goals/Targets

- Mengurangi jejak karbon Perusahaan dengan menggunakan teknologi dan strategi yang lebih efisien secara energi.
 - Efisiensi penggunaan listrik dan air pada aktivitas proyek dan Kantor.
 - Melaksanakan kegiatan monitoring dan pemantauan terhadap kegiatan konstruksi dan dampaknya terhadap lingkungan untuk memastikan Perusahaan telah memenuhi ketentuan dan/atau peraturan terkait lingkungan hidup.
- Reducing the Company's carbon footprint by using more energy-efficient technology and strategies.
 - Efficient use of electricity and water in project and office activities.
 - Carry out monitoring and surveillance of construction activities and their impact on the environment to ensure that the Company has complied with environmental provisions and/or regulations.

Evaluasi | Evaluation

Melaksanakan kegiatan *monitoring* dan pemantauan terhadap kegiatan konstruksi dan dampaknya terhadap lingkungan untuk memastikan Perusahaan telah memenuhi ketentuan dan/atau peraturan terkait lingkungan hidup.

Carry out monitoring of construction activities and their impact on the environment to ensure that the Company has complied with the provisions and/or regulations related to the environment.

Penanggung Jawab | Responsible Person

- Manajer Divisi SDM dan Umum
Senior Manager of General Affairs & HR Division
- Manajer Divisi Sekretaris Perusahaan
Manager of Corporate Secretary Division

Alokasi Anggaran | Budget Allocation

Sepanjang tahun 2023, Sarana Jaya mengalokasikan anggaran sebesar Rp266,13 juta yang digunakan untuk perbaikan sarana dan lingkungan berkelanjutan.

Throughout 2023, Sarana Jaya has allocated a budget of Rp266.13 million for sustainable improvements of facilities and the environment.

Keterlibatan Pemangku Kepentingan | Stakeholder Engagement

Pegawai Perusahaan

- Mendukung Perusahaan dengan menerapkan praktik pemilahan sampah serta penggunaan alat makan pribadi untuk mengurangi limbah plastik.

Company Employees

- Support the Company by separating waste and using personal cutlery to reduce plastic waste.

BIAYA PENGELOLAAN DAMPAK LINGKUNGAN

[OJK F.4]

Dalam mengoptimalkan pengelolaan dan pemantauan dampak lingkungan, Sarana Jaya telah membuat anggaran biaya terkait pengelolaan dan pelestarian lingkungan setiap tahunnya. Selama tahun 2023, total biaya pengelolaan dan pelestarian lingkungan yang direalisasikan Sarana Jaya sebesar Rp266,13 juta yang digunakan untuk perbaikan sarana dan lingkungan berkelanjutan.

ENVIRONMENTAL IMPACT MANAGEMENT COST

[OJK F.4]

Sarana Jaya has allocated a budget for environmental management and preservation every year to optimize the management and monitoring of environmental impacts. In 2023, the total environmental management and preservation costs amounted to Rp266.13 million, which was used for sustainable improvements of facilities and the environment.

MENGELOLA DAN MEMANTAU DAMPAK LINGKUNGAN

Sarana Jaya secara aktif mengelola dan memantau dampak lingkungan yang dihasilkan oleh kegiatan usaha melalui Divisi Umum dan SDM serta Unit Sekretaris Perusahaan yang didelegasikan Perusahaan untuk melakukan perencanaan strategi lingkungan, mengimplementasikan kebijakan ramah lingkungan dan melakukan pemantauan terus-menerus terhadap kegiatan operasional sesuai dengan misi Perusahaan yaitu berkomitmen terhadap lingkungan yang berkelanjutan. Komitmen terhadap lingkungan berkelanjutan ini dioptimalkan Perusahaan dengan menerapkan 10 Prinsip UN Global Compact (UNGC) dimana 3 (tiga) diantaranya mencakup prinsip terkait lingkungan yaitu mendukung pendekatan kehati-hatian terhadap tantangan lingkungan, melakukan inisiatif untuk mempromosikan tanggung jawab lingkungan yang lebih besar serta mendorong pengembangan dan difusi teknologi ramah lingkungan. Untuk itu, Sarana Jaya selalu memastikan pengelolaan dampak lingkungan dalam setiap aktivitas operasionalnya yang diwujudkan dengan cara:

1. Mengendalikan setiap proses konstruksi agar tidak terjadi limbah (*waste*) berlebihan dengan melakukan penghematan penggunaan sumber daya material dan memastikan pengelolaan limbah di seluruh daerah operasi Perusahaan memiliki perencanaan yang baik dan termonitor secara berkala, tepat waktu serta terus dievaluasi;
2. Penggunaan teknologi dan material ramah lingkungan dalam proses konstruksi serta mengatur penggunaan air dengan cara mengatur pengeluaran debit air;
3. Mencegah pencemaran lingkungan melalui kegiatan perbaikan secara berkelanjutan; serta
4. Melakukan kampanye pada pegawai untuk hemat energi baik di lingkungan kantor maupun rumah seperti dalam penggunaan air, kertas dan listrik dengan mematikan alat-alat elektronik yang tidak dipergunakan.

MANAGING AND MONITORING ENVIRONMENTAL IMPACT

Sarana Jaya actively manages and monitors the environmental impact generated by its business activities through the General Affairs and HR Division and Corporate Secretary Unit delegated by the Company to carry out environmental strategic planning, implement green policies, and continuously monitor operational activities per the Company's mission, which is a commitment to a sustainable environment. The commitment is optimized by implementing the 10 Principles of the UN Global Compact (UNGC), three of which are related to the environment, i.e., supporting a precautionary approach to environmental challenges, carrying out initiatives to promote greater environmental responsibility, and encouraging development and the diffusion of environmentally friendly technology. Therefore, Sarana Jaya always ensures environmental impact management in each of its operational activities, which is realized through:

1. Controlling every construction process to prevent excessive waste by saving the use of material resources and ensuring that waste management in all areas of the Company's operations is well planned, regularly monitored, and continuously evaluated;
2. Using green technology and materials in the construction process and saving water consumption by regulating water discharges;
3. Preventing environmental pollution through continuous improvement activities; and
4. Conducting campaigns for energy savings to employees both at the office and at home, such as in the use of water, paper, and electricity by turning off electronic devices that are not used.

► **Upaya Pengelolaan dan Pelestarian Lingkungan di Kawasan Proyek Sarana Jaya**
Environmental Management and Preservation Efforts in Sarana Jaya Project Area

	<p>Menyediakan infiltrasi untuk menampung air hujan langsung ke dalam tangki, meningkatkan infiltrasi air tanah, meningkatkan infiltrasi agar air tidak menggenang di area, dan memanfaatkan air hujan untuk kegiatan penyiraman. Collect rainwater onto a tank, increase groundwater infiltration to prevent water from stagnating, and utilize rainwater for watering activities.</p>
	<p>Penyediaan area bukaan pada ruangan serta penggunaan jendela untuk sirkulasi udara sebagai upaya pengurangan penggunaan lampu dan pendingin udara. Provide openings in rooms and use windows for air circulation to reduce the use of lights and air conditioning.</p>
	<p>Mengendalikan setiap proses konstruksi agar tidak terjadi limbah (waste) berlebihan, menyediakan tempat pengolahan sampah dan memastikan agar pengelolaan limbah di seluruh daerah operasi Perusahaan memiliki perencanaan yang baik dan termonitor secara berkala, tepat waktu serta terus dievaluasi. Control every construction process to prevent excessive waste, provide waste treatment sites, and ensure that waste management in all areas of the Company's operations is well planned, regularly monitored, and continuously evaluated.</p>
	<p>Mengurangi penggunaan material yang berdampak pada efek rumah kaca/heat island. Reduce the use of materials that impact the greenhouse/heat island effect.</p>
	<p>Konservasi terumbu karang. Coral reef conservation.</p>
	<p>Mengurangi pengerasan (pavement) jalan dan penambahan ruang terbuka hijau untuk area resapan, urban farming, kebun produktif. Reduce road pavement and add green open space for infiltration areas, urban farming, and productive gardens</p>

UPAYA PENGELOLAAN DAN PELESTARIAN LINGKUNGAN DI KAWASAN PROYEK DAN KANTOR SARANA JAYA

Upaya pengelolaan dan pelestarian lingkungan di kawasan proyek Sarana Jaya adalah berupa ajakan kepada seluruh Pegawai Perusahaan untuk berkontribusi melakukan pelestarian lingkungan dengan menginisiasi 3R *Group Chat* untuk saling berbagi dan memotivasi dalam menjaga lingkungan kerja tetap lestari dengan menggunakan lebih sedikit kertas dan membedakan sampah di kantor.

ENVIRONMENTAL MANAGEMENT AND PRESERVATION EFFORTS AT SARANA JAYA PROJECT AREAS AND OFFICE

Efforts to manage and preserve the environment in Sarana Jaya project areas are encouraging all employees to contribute to environmental preservation by initiating the 3R *Group Chat* to share and motivate each other to maintain a sustainable work environment by using less paper and separating office waste.

Penggunaan Material [OJK F.5]

Dalam menjalankan usahanya Sarana Jaya berupaya untuk menggunakan material dengan efisien dan mengupayakan penggunaan kembali material sehingga lebih ramah lingkungan. Hal ini merupakan upaya Sarana Jaya untuk mencapai tujuan pembangunan berkelanjutan pada tujuan Nomor 13 yaitu mengambil aksi untuk memerangi perubahan iklim dan dampaknya. Penerapan komitmen ini diwujudkan dengan berbagai upaya sebagai berikut:

Material Use [OJK F.5]

In running its business, Sarana Jaya strives to use materials efficiently and reuse them to be more environmentally friendly. This is Sarana Jaya's effort to achieve sustainable development goals in goal Number 13, i.e., taking action to combat climate change and its impacts. Implementation of this commitment is realized through the following efforts:

► Program Penggunaan Material dengan Efisien | Efficient Material Use Program



- Penggunaan material yang lebih efisien dan ramah lingkungan di proyek.
- Penggunaan kertas dalam kegiatan operasional secara efisien dan penggunaan kembali seperti mencetak dokumen di kertas bekas, meminimalkan kesalahan sebelum mencetak dokumen, dan lainnya.
- Memanfaatkan penggunaan teknologi digital seperti email dan media komunikasi lainnya untuk mengurangi penggunaan kertas.
- Use of more efficient and environmentally friendly materials in projects.
- Efficient use of paper in operational activities and reuse, such as printing documents on used paper, minimizing errors before printing documents, etc.
- Utilize digital technology such as email and other communication media to reduce paper use.

► Penggunaan Kertas | Paper Usage

Uraian Description	2023		2022		2021	
	Jumlah Quantity (Rim)	Nominal (Rp)	Jumlah Quantity (Rim)	Nominal (Rp)	Jumlah Quantity (Rim)	Nominal (Rp)
Pemakaian Kertas Use of Paper	480	27.259	Belum melakukan penghitungan No calculation yet		Belum melakukan penghitungan No calculation yet	

Penggunaan dan Efisiensi Energi [OJK F.7]

Dalam menggunakan energi berupa listrik dan Bahan Bakar Minyak (BBM), Sarana Jaya menerapkan prinsip efisiensi dan efektivitas. Hal ini sebagai bentuk kontribusi Sarana Jaya dalam mencapai tujuan pembangunan berkelanjutan pada tujuan Nomor 7 yaitu memastikan akses terhadap energi yang berkelanjutan dan Tujuan Nomor 13 yaitu mengambil aksi untuk memerangi perubahan iklim dan dampaknya. Penerapan komitmen ini diwujudkan dengan berbagai upaya sebagai berikut:

Energy Use And Efficiency [OJK F.7]

Sarana Jaya applies energy efficiency and effectiveness principles in using electricity and fuel oil (BBM). This is a form of the Company's contribution to achieving Sustainable Development Goals, particularly Goal Number 7, i.e., ensuring access to sustainable energy, and Goal Number 13, i.e., taking action to combat climate change and its impacts. The implementation of this commitment is realized through the following efforts:



Program Efisiensi Energi di Kawasan Proyek | Energy Efficiency Program in Project Areas

- Menghimbau setiap penghuni di kawasan proyek untuk menggunakan energi secara hemat dan bijaksana dengan mematikan alat-alat elektronik yang tidak dipergunakan.
- Menghimbau setiap penghuni di kawasan proyek untuk menggunakan energi secara hemat dan bijaksana dengan mematikan alat-alat elektronik yang tidak dipergunakan.
- Membuat sirkulasi udara antar ruangan, hunian dan koridor dengan baik.
- Menyediakan banyaknya bukaan pada ruangan serta penggunaan jendela untuk sirkulasi udara untuk mengurangi penggunaan lampu dan pendingin udara.
- Menyediakan ruang terbuka, RPTRA dan terintegrasi dengan Transjakarta ke dalam area sebagai upaya mengurangi penggunaan kendaraan pribadi.
- Pengkondisi lampu serta pengembangan atap (*green roof, roof garden*) yang memiliki nilai ekologis tinggi.
- Urge every personnel in project areas to use energy efficiently and wisely by turning off unused electronic devices.
- Urge every resident in the project area to use energy economically and wisely by turning off electronic equipment that is not in use.
- Create good air circulation between rooms, housings, and corridors.
- Provide openings in rooms and use windows for air circulation to reduce the use of lights and air conditioning.
- Provide open spaces and RPTRA, which integrate Transjakarta into the project area to reduce the use of private vehicles.
- Conditioning of lights and development of roofs (*green roofs, roof gardens*), which have high ecological value

Program Efisiensi Energi di Kantor | Energy Efficiency Program at the Office

- Melakukan kampanye pada pegawai untuk hemat energi (listrik) di lingkungan kantor dengan mematikan alat-alat elektronik yang tidak dipergunakan.
- Melakukan penggantian lampu TL menjadi lampu LED.
- Conduct campaigns for energy (electricity) saving to employees in the office by turning off unused electronic devices.
- Replace TL lamps with LED lamps.

Adapun penggunaan energi Sarana Jaya adalah sebagai berikut:

Sarana Jaya's energy use is as follows:

Konsumsi Energi | Energy Consumption [GRI 302-1][OJK F.6]

Jenis Energi Energy Type	Satuan Unit	Tahun Year			Tahun (Gigajoule) Year (Gigajoule)		
		2023	2022	2021	2023	2022	2021
Listrik Electricity	kWh	94.475	88.931	91.549	340	320	330
BBM Fuel	Liter	16.002	9.789	9.003	643.242	393.494	361.899
		Jumlah Total			643.582	393.814	362.229

Catatan | Note:

Pengukuran penggunaan energi dilakukan dengan menghitung jumlah konsumsi listrik dalam satuan kWh dan BBM dalam satuan liter kemudian dikonversikan ke satuan energy GigaJoule (GJ) menggunakan General Converter for Energy dari International Energy Agency (IEA), dengan faktor konversi:

- 1 kwh = 0,0036 gigajoule
- 1 liter = 0,001 kiloliter
- 1 kiloliter = 40,1976 gigajoule

Energy use is measured by calculating the amount of electricity consumption in kWh and fuel in liters, then converted to Gigajoule (GJ) using the General Converter for Energy from the International Energy Agency (IEA), with the following conversion factors:

- 1 kwh = 0.0036 gigajoule
- 1 liter = 0.001 kiloliter
- 1 kiloliter = 40.1976 gigajoule

PENGGUNAAN DAN PENGHEMATAN AIR [OJK F.8]

Dalam menggunakan sumber daya air, Sarana Jaya berkomitmen untuk melakukan pengelolaan air secara berkelanjutan melalui penerapan penghematan penggunaan air dan konservasi air. Hal ini sebagai bentuk kontribusi Sarana Jaya dalam mencapai tujuan pembangunan berkelanjutan pada tujuan Nomor 6 yaitu memastikan ketersediaan dan pengelolaan air dan sanitasi yang berkelanjutan untuk semua orang. Penerapan komitmen ini diwujudkan dengan berbagai upaya sebagai berikut:

WATER USE AND SAVING [OJK F.8]

Sarana Jaya is committed to implementing sustainable water management through water saving and water conservation in using water resources. This is a form of the Company's contribution to achieving Sustainable Development Goals, particularly Goal Number 6, i.e., ensuring water availability and management as well as sustainable sanitation for all people. The implementation of this commitment is realized through the following efforts:



Program Efisiensi Air di Kawasan Proyek Water Efficiency Program in Project Areas

- Menghimbau setiap penghuni di kawasan proyek untuk menggunakan air secara hemat dan bijaksana.
- Menyediakan infiltrasi untuk menampung air hujan langsung ke dalam tangki, meningkatkan infiltrasi agar air tidak menggenang di area dan memanfaatkan air hujan untuk kegiatan penyiraman.
- Meningkatkan infiltrasi air tanah.
- Urge every personnel in project areas to use water efficiently and wisely.
- Collect rainwater directly into the tank, increase infiltration to prevent water from idling in the area, and utilize rainwater for watering.
- Increase groundwater infiltration.

Program Efisiensi Air di Kantor Water Efficiency Program at the Office

Melakukan kampanye pada pegawai untuk hemat air di lingkungan kantor dengan mematikan alat-alat elektronik yang tidak dipergunakan dan mengatur pengeluaran debit air.
Conduct water-saving campaigns for employees in the office by turning off unused electronic devices and regulating water discharges.

Adapun air yang digunakan Sarana Jaya bersumber dari air PDAM/Tanah dengan jumlah penggunaan air sebagai berikut:

The water used by Sarana Jaya comes from PDAM/ground water with the amount of water used as follows:

Penggunaan Air | Water Consumption [GRI 303-5][OJK F.8]

Sumber Source	Satuan Unit	Tahun Year			Tahun (megaliter) Year (megaliter)		
		2023	2022	2021	2023	2022	2021
Air PDAM/Tanah PDAM PDAM/Ground water	m ³	8.065	7.333	6.744	8,06	7,33	6,74

Catatan | Note:

Pengukuran penggunaan air dilakukan dengan menggunakan alat pengukur aliran air dari meteran PDAM menyesuaikan dengan tagihan.
Water use is measured by a PDAM flowmeter and adjusted to the bill.

Pelestarian Keanekaragaman Hayati [OJK F.9, F.10]

Lokasi operasional Perusahaan tidak berada di dalam maupun di dekat kawasan yang memiliki keanekaragaman hayati yang tinggi. Meskipun demikian, Sarana Jaya berkomitmen untuk senantiasa melakukan berbagai upaya pelestarian keanekaragaman hayati sebagai bentuk kontribusi Sarana Jaya dalam mencapai tujuan pembangunan berkelanjutan pada tujuan Nomor 14 yaitu mengkonservasi secara berkelanjutan sumber daya laut dan tujuan Nomor 15 yaitu melindungi, memulihkan dan mendukung penggunaan yang berkelanjutan terhadap ekosistem daratan.

Biodiversity Conservation [OJK F.9, F.10]

The Company's operational areas are not in or near areas with high biodiversity. Nevertheless, Sarana Jaya always makes various efforts to conserve biodiversity as a form of its contribution to achieving Sustainable Development Goals, particularly Goal Number 14, i.e., sustainable conservation of marine resources, and Goal Number 15, i.e., protecting, restoring, and supporting the sustainable use of land ecosystems.



Program Pelestarian Lingkungan di Kawasan Proyek
Environmental Preservation Program in Project Areas

- Menerapkan konsep pembangunan dan pengelolaan yang lebih efisien dan hijau dengan cara penggunaan material yang lebih ramah lingkungan dan konsep arsitektur hijau
 - Menyediakan ruang untuk urban farming untuk menyediakan lahan bagi warga sekitar untuk bercocok tanam sayur-mayur atau buah-buahan
 - Konservasi terumbu karang
 - Kebun produktif
 - Mengurangi perkerasan (pavement) jalan
 - Menambah ruang terbuka hijau
- Apply more efficient, green development and management concepts using more environmentally friendly materials and green architectural concepts .
 - Provide urban farming space for local residents to grow vegetables or fruits.
 - Coral reef conservation.
 - Productive garden.
 - Reduce road pavement.
 - Add green open space.

Program Pelestarian Lingkungan di Kantor
Environmental Preservation Program at the Office

Melakukan kampanye pada pegawai untuk melakukan aksi peduli lingkungan di kantor Sarana Jaya
Conduct environmental action campaigns for employees at the Sarana Jaya office .

PENGENDALIAN EMISI GAS RUMAH KACA [OJK F.12]

Sarana Jaya berkomitmen untuk senantiasa menjaga kualitas udara dengan melakukan Upaya pengendalian emisi Gas Rumah Kaca (GRK) sebagai bentuk kontribusi Sarana Jaya dalam mendukung komitmen Pemerintah menuju karbon netral (*Net Zero Emission/NZE*) di tahun 2060 dan mencapai Tujuan Pembangunan Berkelanjutan pada Tujuan Nomor 13 yaitu mengambil aksi untuk memerangi perubahan iklim dan dampaknya. Penerapan komitmen ini diwujudkan dengan berbagai upaya sebagai berikut:

GREENHOUSE GAS EMISSION CONTROL [OJK F.12]

Sarana Jaya is committed to consistently maintaining air quality by controlling Greenhouse Gas (GHG) emissions as a form of its contribution to supporting the Government's commitment to achieving net zero emission (NZE) in 2060 and Sustainable Development Goals, particularly Goal Number 13, i.e., taking action to combat climate change and its impacts. The implementation of this commitment is realized through the following efforts:



Program Pengendalian Emisi GRK di Kawasan Proyek
GHG Emission Control Program in Project Areas

- Penggunaan teknologi dan material ramah lingkungan dalam proses konstruksi dan mengurangi penggunaan material yang berdampak pada efek rumah kaca/*heat island*
 - Menyediakan banyaknya bukaan pada ruangan serta penggunaan jendela untuk sirkulasi udara untuk mengurangi penggunaan lampu dan pendingin udara
 - Menyediakan ruang terbuka dan terintegrasi dengan Transjakarta ke dalam area sebagai upaya mengurangi penggunaan kendaraan pribadi untuk meminimalisir pencemaran udara
 - Pengkondisi lampu serta pengembangan atap (*green roof, roof garden*) yang memiliki nilai ekologis tinggi
- Use green technology and materials in the construction process and reduce the use of materials that impact the greenhouse/heat island effect.
 - Provide openings in rooms and use windows for air circulation to reduce the use of lights and air conditioning.
 - Provide open spaces and RPTRA, which integrate Transjakarta into the project area to reduce the use of private vehicles and minimize air pollution.
 - Conditioning of lights and development of roofs (green roofs, roof gardens), which have high ecological value.

Program Pengendalian Emisi GRK di Kantor
GHG Emission Control Program at the Office

- Melakukan kampanye pada pegawai untuk hemat energi (listrik) di lingkungan kantor dengan mematikan alat-alat elektronik yang tidak dipergunakan
 - Melakukan penggantian lampu TL menjadi lampu LED
- Conduct energy (electricity) saving campaigns for employees in the office by turning off unused electronic devices.
 - Replace TL lamps with LED lamps.

Pada tahun 2023, Perusahaan mulai melakukan inventarisasi emisi GRK cakupan 1 dari pemakaian bahan bakar dan emisi GRK cakupan 2 dari pemakaian listrik.

In 2023, the Company started recording scope 1 GHG emissions from fuel use and scope 2 GHG emissions from electricity use.

► **Emisi yang Dihasilkan | Emissions Produced** [GRI 305-1, 305-2][OJK F.11]

Uraian Description	Satuan Unit	2023	2022	2021
Emisi GRK Cakupan 1 Scope 1 GHG Emission	TonCO ₂ eq	44.432,76	27.166,55	24.985,58
Emisi GRK Cakupan 2 Scope 2 GHG Emission	TonCO ₂ eq	82,20	77,37	79,65
Total	TonCO₂eq	44.514,96	27.243,92	25.065,23

Catatan | Note:

Cakupan 1: Pemakaian BBM

- Dihitung berdasarkan 2006 IPCC Guidelines for National Greenhouse Gas Inventories. Menggunakan referensi Pertamina Ron 92 dari Laporan Nilai Faktor Emisi CO₂ Nasional Bahan Bakar Minyak (Badan Penelitian dan Pengembangan Energi dan Sumber Daya Mineral Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral 2021)
- Nilai Faktor Emisi Gasoline (Ton CO₂/TJ) = 69,04
- Faktor konversi 1 TJ = 1.000 GJ

Cakupan 2: Pemakaian Listrik

- Dihitung berdasarkan Faktor Emisi GRK Sistem Ketenagalistrikan Tahun 2019, Kementerian ESDM. Untuk kemudahan perhitungan menggunakan metode ex-post dengan menggunakan faktor emisi Jamali (Wilayah Operasi Jawa, Madura dan Bali) dengan asumsi aset Perusahaan yang paling signifikan ada di Pulau Jawa.
- Nilai Faktor Emisi Listrik (Ton CO₂e/mWh) ex-post= 0,87
- Faktor konversi 1 mWh = 1.000 kWh

Scope 1: Fuel consumption

- Calculated based on the 2006 IPCC Guidelines for National Greenhouse Gas Inventories. Using the Pertamina Ron 92 reference from the National Fuel Oil CO₂ Emission Factor Value Report (Research and Development Agency, Energy and Mineral Resources Ministry, 2021)
- Gasoline Emission Factor Value (Ton CO₂/TJ) = 69.04
- Conversion factor 1 TJ = 1,000 GJ

Scope 2: Electricity Consumption

- Calculated based on 2019 Electricity System GHG Emission Factors, Energy and Mineral Resources Ministry. For ease of calculation, we use the ex-post method using the Jamali emission factor (Java, Madura, and Bali Operating Area), assuming that the Company's most significant assets are in Java.
- Ex-post Electricity Emission Factor Value (Ton CO₂e/mWh) = 0.87
- Conversion factor 1 mWh = 1,000 kWh

Pengelolaan Limbah [GRI 306-2, 306-3] [OJK F.13, F.14, F.15]

Sarana Jaya berkomitmen untuk melakukan pengelolaan limbah yang dihasilkan dari kegiatan bisnis Perusahaan dan aktivitas kantor sebagai bentuk kontribusi Sarana Jaya dalam mencapai Tujuan Pembangunan Berkelanjutan pada Tujuan Nomor 12 yaitu menjamin pola produksi dan konsumsi yang berkelanjutan. Penerapan komitmen ini diwujudkan dengan berbagai upaya sebagai berikut:

Waste Management [GRI 306-2, 306-3] [OJK F.13, F.14, F.15]

Sarana Jaya is committed to managing waste from its business and office activities to demonstrate its contribution to achieving the Sustainable Development Goals, particularly Goal Number 12, i.e., ensuring sustainable production and consumption patterns. The implementation of this commitment is realized through various efforts as follows:



Program Pengelolaan Limbah di Kawasan Proyek
Waste Management Program in Project Areas

- Mengendalikan setiap proses konstruksi agar tidak terjadi limbah (*waste*) berlebihan
- Memastikan agar pengelolaan limbah di seluruh daerah operasi Perusahaan memiliki perencanaan yang baik dan termonitor secara berkala, tepat waktu serta terus dievaluasi
- Control every construction process to prevent excessive waste.
- Ensure that waste management in all areas of the Company's operations is well-planned, regularly monitored, and continuously evaluated.

Program Pengelolaan Limbah di Kantor
Waste Management Program at the Office

- Memastikan agar pengelolaan limbah domestik di kantor memiliki perencanaan yang baik, termonitor secara berkala, tepat waktu serta terus dievaluasi
- Melaksanakan *Sharing Session* dengan topik pembahasan mengenai pengelolaan sampah yang bertanggung jawab dan Konsep 3R (*Reduce, Reuse, Recycle*)
- Ensure that domestic waste management at the office is well-planned, regularly monitored, and continuously evaluated.
- Conducting a Sharing Session on responsible waste management and the 3R (Reduce, Reuse, Recycle) concept

Dalam rangka mewujudkan Jakarta hijau, Sarana Jaya mengadakan kegiatan workshop pengelolaan sampah non organik untuk meningkatkan pengetahuan dan kapasitas masyarakat dalam mengelola sampah, khususnya pengolahan sampah skala rumah tangga. Kegiatan ini telah dilaksanakan di Apartemen Nuansa Pondok Kelapa, Jakarta Timur dengan materi Ecobrick oleh Komunitas Jakarta Eco Project dan materi Pengelolaan Sampah Elektronik oleh Perwakilan Komunitas EWASTERJ.

To realize a green Jakarta, Sarana Jaya held a non-organic waste management workshop to increase community knowledge and capacity in managing waste, especially household-scale waste processing. This was carried out at the Nuansa Pondok Kelapa Apartment, East Jakarta, in the form of an Ecobricks presentation by the Jakarta Eco Project Community and Electronic Waste Management by EWASTERJ Community Representatives.

Ecobrick merupakan botol plastik yang diisi dengan limbah non biologis untuk membuat blok bangunan yang nantinya bisa dipakai kembali. *Ecobrick* merupakan cara terbaik mengolah limbah plastik agar tidak berujung pada tempat pembuangan akhir dengan bisa dimanfaatkan untuk membuat *furniture modular*, perabotan *indoor*, dinding struktur dan lain-lain.

Ecobricks are plastic bottles filled with non-biological waste used to make building blocks that can be reused later. Ecobricks are the best way to process plastic waste so it doesn't end up in landfills. They can be used to make modular furniture, indoor furniture, structural walls, etc.

Limbah elektronik (*e-Waste*) adalah sampah atau limbah yang berasal dari peralatan elektronik seperti telepon genggam, komputer, televisi, mesin cuci dan sebagainya. Limbah elektronik mengandung bahan yang berbahaya dan beracun, seperti logam berat, *PVC*, *PCB*, dan lain-lain yang dapat merusak kesehatan dan lingkungan. Oleh karena itu, sampah elektronik harus dikelola agar terpisah dari jenis sampah lain dan tidak mencemari lingkungan sekitar.

Electronic waste (*e-waste*) is from electronic equipment, e.g., mobile phones, computers, televisions, washing machines, etc. Electronic waste contains hazardous and toxic materials, such as heavy metals, PVC, PCB, etc., that can damage health and the environment. Therefore, electronic waste must be managed so that it is separated from other types of waste and does not pollute the surrounding environment.

Perusahaan melakukan pendataan jumlah limbah yang dihasilkan dari kegiatan usahanya dengan mengkategorikan limbah sesuai dengan jenisnya yaitu limbah cair dan padat, serta limbah bahan berbahaya dan beracun (*B3*) dan non-*B3*. Dalam pengelolaan limbah tersebut, selain melakukan pengolahan dan pemanfaatan limbah sesuai dengan prinsip green construction, Perusahaan juga menggandeng pihak ketiga yang telah memiliki izin sesuai dengan jenis limbah yang dihasilkan Perusahaan.

The Company collects data on the amount of waste generated from its business activities by categorizing waste according to its type, i.e., liquid and solid waste, as well as hazardous and toxic waste (*B3*) and non-*B3*. In managing this waste, apart from processing and utilizing waste per green construction principles, the Company also collaborates with third parties who have permits according to the type of waste produced by the Company.

Jenis Limbah Waste Type	Upaya Pengelolaan Limbah Waste Management
Limbah Cair Liquid Waste	
Oli Bekas Used Oil	Limbah dipisahkan menjadi sampah organik dan anorganik terlebih dahulu, selanjutnya diberikan kepada pihak ketiga untuk dikelola lebih lanjut dan dapat dimanfaatkan kembali. Waste is separated into organic and inorganic waste first, then given to third parties for further management and can be reused.
Limbah Padat Solid Waste	
Kertas Bekas	Limbah dipisahkan menjadi sampah organik dan anorganik terlebih dahulu, selanjutnya diberikan kepada bank sampah di daerah sekitar. Waste is separated into organic and inorganic waste first, then given to waste banks in surrounding areas.

► **Limbah yang Dihasilkan | Waste Generated**

Jenis Limbah Waste Type	Satuan Unit	2023	2022	2021
Limbah Organik Organic Waste	Ton	12	Belum melakukan penghitungan No calculation yet	Belum melakukan penghitungan No calculation yet
Limbah Anorganik Non-Organic Waste	Ton	18	Belum melakukan penghitungan No calculation yet	Belum melakukan penghitungan No calculation yet
Limbah B3 Toxic and Hazardous Waste	Ton	-	Belum melakukan penghitungan No calculation yet	Belum melakukan penghitungan No calculation yet

Dengan penanganan limbah yang tepat, pada tahun 2023, Perusahaan tidak mencatatkan adanya tumpahan limbah yang terjadi.

With proper waste handling, the Company did not record any waste spills in 2023.

PENGADUAN LINGKUNGAN [OJK F.16]

Guna meminimalkan dampak terhadap lingkungan dalam menjalankan usaha, Perusahaan menyediakan sarana pengaduan apabila masyarakat atau pemangku kepentingan lainnya mengalami dampak negatif atas keberadaan operasional Perusahaan. Pengaduan dapat dilakukan melalui layanan penanganan pengaduan masyarakat.

ENVIRONMENTAL COMPLAINTS [OJK F.16]

To minimize the environmental impact of running its business, the Company provides a means of complaint if the public or other stakeholders experience a negative impact on the Company's operational existence. Complaints can be made through the public complaint handling service.

Pada tahun 2023, Perusahaan menerima/tidak menerima pengaduan terkait lingkungan.

In 2023, the Company did not receive environment-related complaints.

MENGELOLA KINERJA DAN DAMPAK SOSIAL

MANAGING SOCIAL PERFORMANCE AND IMPACT

“Mengelola Kinerja Perusahaan bertumpu pada aspek sosial terlihat pada hubungan kerja antara Perusahaan dengan pegawai dan hubungan antara Perusahaan dengan masyarakat. Hubungan kerja antara Perusahaan dengan pegawai dilakukan melalui program pengelolaan SDM dan K3, sedangkan hubungan Perusahaan dengan masyarakat dilakukan melalui pelaksanaan program CSR.”

“The Company’s social performance is evident in the working relationship between the Company and its employees and in the Company’s relationship with the community. The working relationship between the Company and employees is carried out through the HR and OHS management program, while the Company’s relationship with the community is carried out through CSR program implementations.”

MEMBANGUN SUMBER DAYA MANUSIA UNGGUL UNTUK TUMBUH BERKELANJUTAN

Sarana Jaya menyadari bahwa Sumber Daya Manusia (SDM) menjadi kunci utama yang berkontribusi besar dalam kemajuan usaha Perusahaan untuk tumbuh berkelanjutan. Untuk itu, Sarana Jaya senantiasa memperhatikan hak-hak pegawai agar terpenuhi serta memastikan prinsip keberagaman, kesetaraan dan perlindungan Hak Asasi Manusia bagi seluruh pegawai Perusahaan untuk Mewujudkan SDM yang Unggul.

ORGANIZE SUPERIOR HUMAN RESOURCES FOR SUSTAINABLE GROWTH

Sarana Jaya recognizes Human Resources (HR) as the main key that contributes greatly to the sustainable growth of the Company’s business. Therefore, Sarana Jaya always pays attention to the fulfillment of employee rights and ensures the implementation of diversity, equality, and protection of human rights for all employees to create superior human resources.



Pendekatan Manajemen Topik Pengelolaan Sumber Daya Manusia

Management Approach to Economic Performance and Indirect Economic Impact

► Pengelolaan Dampak | Impact Management [GRI 3-3]

Pengelolaan dampak terkait pengelolaan Sumber Daya Manusia (SDM) terkait kepegawaian, pengembangan kompetensi dan keahlian pegawai, keanekaragaman dan peluang setara serta perlindungan Hak Asasi Manusia (HAM) dilakukan Sarana Jaya dengan memastikan bahwa hak setiap pegawai telah terpenuhi serta senantiasa menerapkan praktik ketenagakerjaan yang adil, layak, dan menerapkan prinsip-prinsip keberagaman dan kesetaraan yang taat dengan Undang-Undang dan berbagai peraturan terkait ketenagakerjaan yang berlaku. Dengan menerapkan komitmen pengelolaan ini, Sarana Jaya meyakini bahwa setiap dampak negatif potensial seperti diskriminasi, beban kerja berlebih, kesenjangan yang berpotensi dialami pegawai dapat dihindari sehingga akan membangun kualitas SDM yang profesional, handal dan berintegritas yang mampu memberikan kinerja optimal, efisien dan produktif yang berperan besar dalam mendukung kesuksesan Perusahaan. [GRI 2-27, 3-2, 3-3]

Impact management related to Human Resource (HR) management, which covers Employment, Employee Competency and Expertise Development, Diversity and Equal Opportunities, and Protection of Human Rights, is carried out by Sarana Jaya by ensuring that the rights of every employee have been fulfilled, implementing fair and decent employment practices, and applying the principles of diversity and equality in compliance with applicable laws and regulations related to employment. By doing so, the Company believes that any potential negative impacts such as discrimination, excessive workload, and gaps among employees can be avoided and that the Company will eventually build professional, reliable, and loyal human resources who can provide optimal, efficient, and productive performance that plays a great role in supporting the success of the Company. [GRI 2-27, 3-2, 3-3]

► Kebijakan Khusus | Specially Policies

Kebijakan Sarana Jaya

- Kode Etik Perusahaan
- Peraturan Direksi Perumda Pembangunan Sarana Jaya DKI Jakarta Nomor 48 Tahun 2023

Ketentuan Umum

- Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu) Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja
- United Nations Global Compact (UNGC)

Sarana Jaya Policy

- Company Code of Conduct
- Board of Directors Regulation of Perumda Pembangunan Sarana Jaya DKI Jakarta No. 48 of 2023

General Provisions

- Government Regulation in Lieu of Law (Perppu) No. 2 of 2022 on Job Creation
- United Nations Global Compact (UNGC)

► Komitmen | Commitment

Mengelola praktik ketenagakerjaan yang menghormati Hak Asasi Manusia (HAM) dengan:

- Memastikan tersedianya fasilitas kerja yang aman, layak, bersih dan nyaman
- Melindungi pegawai dari pelecehan di tempat kerja baik berupa ancaman fisik, verbal, seksual maupun psikologis
- Memastikan bahwa Perusahaan tidak berpartisipasi dalam segala bentuk kerja paksa
- Memastikan bahwa Perusahaan tidak mempekerjakan tenaga anak
- Menerapkan sistem remunerasi yang baik untuk mendukung sasaran strategi Perusahaan
- Menerapkan kesetaraan *gender* dalam kesempatan penerimaan, pelatihan dan pendidikan serta promosi pegawai
- Memastikan penyediaan tempat beribadah yang memungkinkan seluruh pegawai beribadah sesuai dengan keyakinannya

Manage employment practices that respect Human Rights (HAM) by:

- Ensuring the availability of safe, decent, clean, and comfortable work facilities.
- Protecting employees from harassment in the form of physical, verbal, sexual, or psychological threats in the workplace.
- Ensuring that the Company does not participate in any form of forced labor.
- Ensuring that the Company does not employ child labor.
- Implementing a good remuneration system to support the Company's strategic goals.
- Implementing gender equality in employee recruitment, training, education, and promotion opportunities.
- Ensuring the provision of places of worship that allow all employees to worship according to their beliefs.

► Tujuan/Target | Goals/Targets

- Memberikan program pelatihan minimal pengembangan setiap pegawai adalah 16 jam setahun
- Tidak adanya diskriminasi

- Providing a minimum development training program for each employee at 40 hours a year
- No discrimination

► Evaluasi | Evaluation

- Melakukan survei kepuasan pegawai secara rutin
- Melakukan evaluasi penilaian kinerja
- Melakukan evaluasi pelatihan pegawai

- Conduct regular employee satisfaction surveys
- Conduct performance appraisals
- Conduct employee training evaluation

► Penanggung Jawab | Responsible Person

- Senior Manajer Divisi Umum & SDM di bawah Direktur Administrasi & Keuangan
Senior Manager of General Affairs & HR Division under the Director of Administration & Finance

► Alokasi Anggaran | Budget Allocation

Sepanjang tahun 2023, Sarana Jaya mengalokasikan anggaran sebesar Rp64.061.610.178,- yang dipergunakan untuk keperluan pengelolaan topik SDM dengan alokasi anggaran atau dana yang berhasil teralisasi sebesar Rp52.303.708.858,-.

In 2023, Sarana Jaya allocated Rp64,061,610,178 for HR management, which was realized at Rp52,303,708,858.

► Keterlibatan Pemangku Kepentingan | Stakeholder Engagement

Pemerintah Provinsi DKI Jakarta

- Menerbitkan Undang-Undang dan Peraturan terkait ketenagakerjaan untuk dipatuhi Sarana Jaya

Pegawai Perusahaan

- Mematuhi seluruh Undang-Undang dan peraturan terkait ketenagakerjaan
- Menerapkan budaya inklusif
- Memelihara dan menjaga tata tertib Perusahaan

DKI Jakarta Provincial Government

- Issues laws and regulations related to employment to be complied with by Sarana Jaya

Company Employees

- Comply with all employment-related laws and regulations
- Implement an inclusive culture
- Maintain company rules

INTERNALISASI BUDAYA KEBERLANJUTAN [OJK F.1]

INTERNALIZATION OF SUSTAINABILITY CULTURE

Dalam rangka memperkuat budaya Keberlanjutan (*sustainability culture*) pada setiap aktivitas bisnis Perusahaan, Sarana Jaya berkomitmen melakukan internalisasi nilai-nilai keberlanjutan pada seluruh Insan Perusahaan sebagai bagian dari penerapan prinsip strategi dan praktik bisnis berkelanjutan. Adapun bentuk budaya keberlanjutan yang ada di lingkungan Perusahaan meliputi:

- Mendorong Insan Perusahaan untuk melakukan mitigasi risiko dalam menghadapi lingkungan bisnis yang dinamis dan mengoptimalkan berbagai peluang bisnis berkelanjutan;
- Melakukan inisiatif untuk mempromosikan tanggung jawab lingkungan yang lebih besar seperti melalui *3R Group Chat* untuk saling berbagi dan memotivasi dalam menjaga lingkungan kerja tetap lestari, menggunakan lebih sedikit kertas dan melakukan pembedaan pembuangan sampah;
- Menerapkan budaya saling menghargai antar Insan Perusahaan;
- Menghimbau seluruh Insan Perusahaan untuk melaksanakan *Good Corporate Governance (GCG)*;
- Gerakan program pemukiman manusia inklusif, aman, tangguh dan berkelanjutan;

To strengthen the sustainability culture in every business activity of the Company, Sarana Jaya is committed to internalizing sustainability values for all Company personnel as part of implementing sustainable business strategies and practices. The forms of sustainability culture within the Company include:

- Encouraging Company personnel to mitigate risks in facing a dynamic business environment and optimizing various sustainable business opportunities;
- Taking initiatives to promote greater environmental responsibility, such as using *3R Group Chat* to share and motivate one another in maintaining a sustainable work environment, using less paper, and sorting waste;
- Implementing a culture of mutual respect among the Company's personnel;
- Encouraging all Company personnel to implement *Good Corporate Governance (GCG)*;
- A movement for inclusive, safe, resilient, and sustainable human settlement programs;

MEMBANGUN BUDAYA INKLUSIF MELALUI PENERAPAN PRINSIP KEBERAGAMAN DAN KESETARAAN [GRI F.18, F.19]

ESTABLISHING AN INCLUSIVE CULTURE THROUGH THE APPLICATION OF DIVERSITY AND EQUALITY PRINCIPLES

Membangun budaya inklusif melalui penerapan prinsip keberagaman dan kesetaraan dilakukan Sarana Jaya melalui penghapusan diskriminasi pada seluruh aspek pengelolaan SDM sejalan dengan kepatuhan Perusahaan dalam menjunjung Hak Asasi Manusia (HAM). Bentuk upaya penerapan ini dapat terlihat dari bagaimana Perusahaan tidak memandang unsur SARA (Suku Ras Agama dan Antar golongan) dengan tidak membedakan jenis kelamin, usia, suku, agama, ras, golongan dan faktor keberagaman lainnya terkait komposisi pegawai, proses rekrutmen, pengembangan kompetensi, penilaian kinerja, kesempatan penerimaan dan promosi pegawai, pengembangan karir hingga pada pemenuhan remunerasi/ kesejahteraan dan hak-hak pegawai lainnya.

Untuk mengoptimalkan penerapan budaya inklusif ini, setiap Pegawai Perusahaan mendapatkan fasilitas kerja yang aman, layak dan aman serta terlindungi dari bentuk pelecehan di tempat kerja, baik pelecehan dalam bentuk ancaman fisik, verbal, seksual maupun psikologis. Sarana Jaya juga menerapkan budaya saling menghargai antar insan Perusahaan sesuai dengan nilai-nilai Perusahaan yaitu profesional, loyal dan jujur.

Sebagai perwujudan kepatuhan terhadap Undang-Undang dan peraturan terkait ketenagakerjaan. Sarana Jaya memiliki perjanjian kolektif berupa Peraturan Perusahaan yang mencakup aspirasi 100% pegawai. Peraturan Perusahaan tentang pedoman pengelolaan sumber daya manusia menjadi pedoman hak dan kewajiban Sarana Jaya dan pegawai yang diantaranya mengatur tentang sistem-sistem dan komponen upah, fasilitas dan tunjangan, kesehatan dan keselamatan kerja, jaminan sosial ketenagakerjaan, waktu kerja, pendidikan dan pelatihan, penilaian kinerja, sanksi atas pelanggaran serta pemutusan hubungan kerja. Peraturan ini telah disesuaikan dengan standar Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi dan standar terkait ketenagakerjaan nasional dan internasional seperti *UN Guiding Principles on Business and Human Rights and Children's Rights and Business Principles dan International Labour Standards*.

[GRI 2-30]

Establishing an inclusive culture through the application of diversity and equality principles is carried out by Sarana Jaya by eliminating discrimination in all aspects of HR management in line with the Company's compliance with upholding Human Rights (HAM). In practice, the Company does not discriminate against gender, age, ethnicity, religion, race, class (SARA), or other diversity factors in determining employee composition, recruitment process, competency development, performance appraisal, hiring and promotion opportunities, career development, fulfillment of remuneration/welfare, and other employee rights.

To optimize the implementation of the inclusive culture, every Company employee gets safe, decent, and secure work facilities and is protected from any form of harassment in the workplace, such as physical, verbal, sexual, or psychological threats. Sarana Jaya also implements a culture of mutual respect among the Company's personnel by following corporate values, i.e., being professional, loyal, and honest.

As a manifestation of compliance with all employment-related laws and regulations, Sarana Jaya has an individual agreement in the form of a Company Regulation covering the aspirations of 100% of employees. Company regulations regarding human resource management serve as guidelines for the rights and obligations of Sarana Jaya and its employees, which, among other things, regulate systems and components of salaries, facilities and benefits, occupational health and safety, employment social security, working time, education and training, performance appraisal, sanctions for violations, and termination of employment. This regulation has been adjusted with standards under Government regulations, i.e., the Manpower and Transmigration Ministry, and other standards related to national and international employment, e.g., the UN Guiding Principles on Business and Human Rights, Children's Rights and Business Principles, and International Labor Standards. [GRI 2-30]

KEBERAGAMAN DALAM KOMPOSISI PEGAWAI

Hingga akhir periode tahun 2023, Sarana Jaya didukung oleh 130 orang pegawai (tidak termasuk Dewan Pengawas dan Direksi) yang seluruhnya berlokasi di Jakarta dengan status pegawai Perusahaan mencakup pegawai tetap, pegawai tidak tetap dan calon pegawai dengan berbagai keberagaman pada sisi usia, jenis kelamin (*gender*) dan tingkat pendidikan. [GRI 2-7, 2-8, 405-1]

DIVERSITY IN EMPLOYEE COMPOSITION

Until the end of 2023, Sarana Jaya had 130 employees (excluding the Supervisory Board and Board of Directors) in Jakarta, with the employment status of permanent employees, temporary employees, and prospective employees that were diverse in age, gender, and education level. [GRI 2-7, 2-8, 405-1]

Jumlah Pegawai Berdasarkan Status Kepegawaian dan Jenis Kelamin

Total Employees by Employment Status and Gender

Status Kepegawaian Employment Status	2023			2022			2021		
	Laki-laki Male	Perempuan Female	Jumlah Total	Laki-laki Male	Perempuan Female	Jumlah Total	Laki-laki Male	Perempuan Female	Jumlah Total
Pegawai Tetap Permanent Employees	72	45	117	69	41	110	65	42	107
Pegawai Tidak Tetap Non-Permanent Employees	10	3	13	14	7	21	15	4	19
Calon Pegawai Prospective Employees	-	-	-	3	-	3	-	-	-
Jumlah Total	82	48	130	86	48	134	80	46	126

Jumlah Pegawai Berdasarkan Level Jabatan dan Jenis Kelamin

Total Employees by Position Level and Gender

Tingkat Pendidikan Position level	2023			2022			2021		
	Laki-laki Male	Perempuan Female	Jumlah Total	Laki-laki Male	Perempuan Female	Jumlah Total	Laki-laki Male	Perempuan Female	Jumlah Total
Senior Manajer Senior Manager	13	3	16	12	1	13	13	-	13
Junior Manajer Junior Manager	10	10	20	12	9	21	11	8	19
Supervisor Supervisor	8	9	17	10	8	18	7	6	13
Staff Staff	42	24	66	43	29	72	42	32	74
Tenaga Pelaksana Implementing Staff	9	2	11	9	1	10	7	-	7
Jumlah Total	82	48	130	86	48	134	80	46	126

Jumlah Pegawai Berdasarkan Tingkat Pendidikan dan Jenis Kelamin
Total Employees by Education Level and Gender

Tingkat Pendidikan Education Level	2023			2022			2021		
	Laki-laki Male	Perempuan Female	Jumlah Total	Laki-laki Male	Perempuan Female	Jumlah Total	Laki-laki Male	Perempuan Female	Jumlah Total
Magister (S2) Master	11	6	17	10	7	17	11	6	17
Sarjana (S1) Bachelor's Degree	54	36	91	61	30	89	54	30	84
Diploma 3 Diploma	7	5	12	6	7	15	4	6	10
SMU dan sederajat Senior High School and equivalent	10	1	10	9	4	13	11	4	15
Jumlah Total	82	48	130	86	48	134	80	46	126

Jumlah Pegawai Berdasarkan Kelompok Usia dan Jenis Kelamin
Total Employees by Age Range Level and Gender

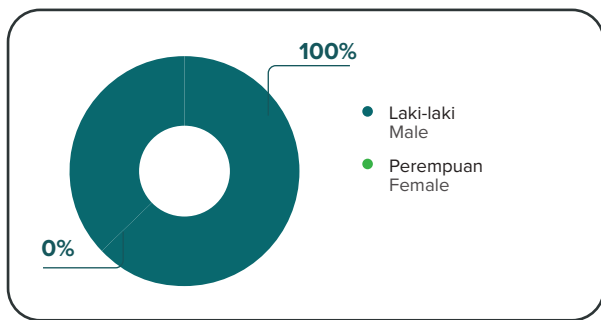
Usia Age	2023			2022			2021		
	Laki-laki Male	Perempuan Female	Jumlah Total	Laki-laki Male	Perempuan Female	Jumlah Total	Laki-laki Male	Perempuan Female	Jumlah Total
< 30 Tahun years old	17	18	35	16	25	41	16	25	41
30 – 50 Tahun years old	54	29	83	48	21	69	47	19	66
> 50 Tahun years old	11	1	12	22	2	24	17	2	19
Jumlah Total	82	48	130	86	48	134	80	46	126

Jumlah Pegawai Berdasarkan Level Jabatan dan Usia
Total Employees by Position Level and Age

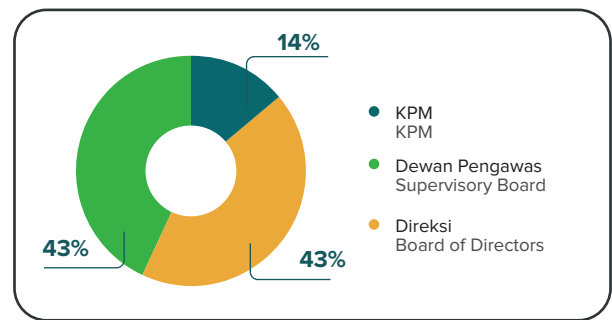
Level Jabatan Position level	2023				2022				2021			
	< 30 Tahun years old	30 – 50 Tahun years old	> 50 Tahun years old	Jumlah Total	< 30 Tahun years old	30 – 50 Tahun years old	> 50 Tahun years old	Jumlah Total	< 30 Tahun years old	30 – 50 Tahun years old	> 50 Tahun years old	Jumlah Total
Senior Manajer Senior Manager	-	12	4	16	-	7	6	13	-	6	8	14
Junior Manajer Junior Manager	3	15	2	20	2	17	2	21	4	12	1	17
Supervisor Supervisor	3	14	-	17	5	12	1	18	4	7	2	13
Staf Staff	29	33	4	66	35	34	3	72	33	35	7	75

Level Jabatan Position level	2023				2022				2021			
	< 30 Tahun years old	30 – 50 Tahun years old	> 50 Tahun years old	Jumlah Total	< 30 Tahun years old	30 – 50 Tahun years old	> 50 Tahun years old	Jumlah Total	< 30 Tahun years old	30 – 50 Tahun years old	> 50 Tahun years old	Jumlah Total
Tenaga Pelaksana Implementing Staff	-	9	2	11	-	1	9	10	-	5	2	7
Jumlah Total	35	83	12	130	42	71	21	134	41	65	20	126

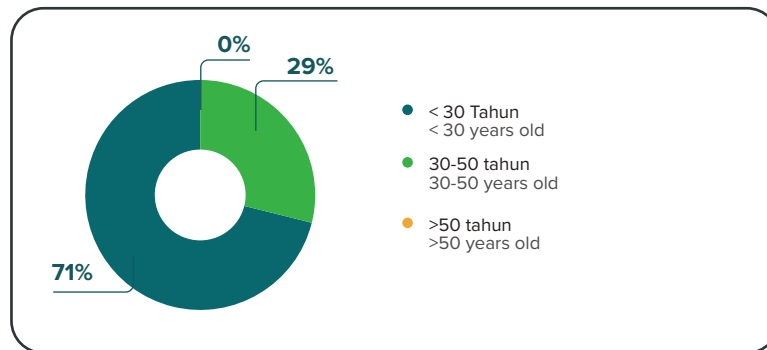
► **Persentase Badan Tata Kelola Berdasarkan Jenis Kelamin Tahun 2023**
Governance Body Composition by Gender in 2023



► **Persentase Badan Tata Kelola Berdasarkan Organ Tata Kelola Tahun 2023**
Governance Body Composition by Governance Organs in 2023



► **Persentase Badan Tata Kelola Berdasarkan Organ Tata Kelola Tahun 2023**
Governance Body Composition by Age in 2023



Jumlah Badan Tata Kelola Berdasarkan Level Jabatan dan Jenis Kelamin [GRI 405-1]
Total Governance Body Members by Position Level and Gender

Badan Tata Kelola Governance Body	2023			2022			2021		
	Laki-laki Male	Perempuan Female	Jumlah Total	Laki-laki Male	Perempuan Female	Jumlah Total	Laki-laki Male	Perempuan Female	Jumlah Total
Kuasa Pemilik Modal (KPM) Capital Owner's Proxy (KPM)	1	-	1	1	-	1	1	-	1
Dewan Pengawas Supervisory Board	3	-	3	3	-	3	3	-	3
Direksi Board of Directors	3	-	3	3	-	3	3	-	3
Jumlah Total	7	-	7	7	-	7	7	-	7

Jumlah Badan Tata Kelola Berdasarkan Level Jabatan dan Usia [GRI 405-1]
Total Governance Bodies by Position Level and Age

Badan Tata Kelola Governance Body	2023				2022				2021			
	< 30 Tahun years old	30 – 50 Tahun years old	> 50 Tahun years old	Jumlah Total	< 30 Tahun years old	30 – 50 Tahun years old	> 50 Tahun years old	Jumlah Total	< 30 Tahun years old	30 – 50 Tahun years old	> 50 Tahun years old	Jumlah Total
Kuasa Pemilik Modal (KPM) Capital Owner's Proxy (KPM)	-	-	1	1	-	-	1	1	-	-	1	1
Dewan Pengawas Supervisory Board	-	1	2	3	-	1	2	3	-	1	2	3
Direksi Board of Directors	-	1	2	3	-	1	2	3	-	1	2	3
Jumlah Total	-	2	5	7	-	2	5	7	-	2	5	7

KEBERAGAMAN DAN KESETARAAN DALAM REKRUTMEN DAN TURNOVER PEGAWAI

Dalam proses rekrutmen atau penerimaan pegawai, Sarana Jaya menerapkan praktik anti diskriminasi dengan tidak memandang unsur SARA. Sarana Jaya juga tidak mempekerjakan pegawai yang berusia di bawah 18 tahun sehingga sampai akhir tahun 2023 tercatat tidak adanya insiden terkait pekerja anak pada operasi maupun pemasok Perusahaan. [OJK F:19]

Untuk memastikan efektivitas dan optimalisasi jumlah pegawai yang dipekerjakan terhadap jumlah penerimaan pegawai dalam kegiatan rekrutmen, Sarana Jaya melalui Direksi akan menetapkan formasi untuk jangka waktu tertentu berdasarkan jenis, sifat dan beban kerja yang dibutuhkan untuk setiap tahun anggaran. Formasi pegawai juga turut ditetapkan oleh Direksi dengan didasarkan pada pendidikan formal yang menjadi penentu suatu jabatan dalam Perusahaan. Persyaratan pendidikan untuk formasi kepegawaian ini mengacu kepada analisa jabatan yang berlaku serta disesuaikan pada kebutuhan Perusahaan. [GRI 401-1]

DIVERSITY AND EQUALITY IN EMPLOYEE RECRUITMENT AND TURNOVER

In the recruitment or hiring process, Sarana Jaya applies anti-discrimination practices by not regarding SARA. The Company also does not hire employees under the age of 18. Thus, until the end of 2023, there have been no incidents related to child labor in the Company's operations or suppliers. [OJK F:19]

To ensure effectiveness and optimize the number of employees against the number of recruits, Sarana Jaya determines an employee formation for a certain period based on the type, nature, and workload required for each fiscal year through the Board of Directors. Employee formation is also established based on formal education, which determines employees' positions in the Company. The educational requirement for employee formation refers to the applicable position analysis and is adjusted to the needs of the Company. [GRI 401-1]

Selama tahun 2023, Sarana Jaya telah melakukan rekrutmen pegawai baru sebanyak 3 orang pegawai dengan tingkat rekrutmen sebesar 2%. [GRI 401-1]

In 2023, the number of employee turnover was three people, with a turnover rate of 2%. [GRI 401-1]

Jumlah dan Tingkat Rekrutmen Pegawai [GRI 401-1]
Total New Employee and Recruitment Rate

Keterangan Description	2023		2022		2021	
	Jumlah Total	Tingkat Rekrutmen Recruitment Level (%)	Jumlah Total	Tingkat Rekrutmen Recruitment Level (%)	Jumlah Total	Tingkat Rekrutmen Recruitment Level (%)
Jenis Kelamin Gender						
Laki-laki Male	2	1%	11	13%	11	14%
Perempuan Female	1	1%	8	17%	4	9%
Jumlah Total	3	2%	19	14%	15	12%
Usia Age						
< 30 tahun years old			13	32%	6	15%
30 – 50 tahun years old			5	7%	6	9%
> 50 tahun years old	3	2%	1	4%	3	16%
Jumlah Total	3	2%	19	14%	15	12%
Wilayah Operasi Operational Area						
DKI Jakarta	3	2%	19	14%	15	12%
Jumlah Total	3	2%	19	14%	15	12%

Selama tahun 2023, jumlah pergantian/*turnover* Pegawai Perusahaan sebanyak 3 orang dengan tingkat turnover sebesar 2%.

In 2023, the number of employee turnover was three people with a turnover rate of 2%.

Jumlah dan Tingkat Pergantian/Turnover Pegawai [GRI 401-1]
Total Employee Turnover and Rate

Keterangan Description	2023		2022		2021	
	Jumlah Total	Tingkat Turnover Turnover Rate (%)	Jumlah Total	Tingkat Turnover Turnover Rate (%)	Jumlah Total	Tingkat Turnover Turnover Rate (%)
Jenis Kelamin Gender						
Laki-laki Male	1	1%	10	12%	9	11%
Perempuan Female	2	1%	5	10%	2	4%
Jumlah Total	3	2%	15	11%	11	9%

Keterangan Description	2023		2022		2021	
	Jumlah Total	Tingkat Turnover Turnover Rate (%)	Jumlah Total	Tingkat Turnover Turnover Rate (%)	Jumlah Total	Tingkat Turnover Turnover Rate (%)
Usia Age						
< 30 tahun years old	2	1%	1	2%	1	2%
30 – 50 tahun years old	1	1%	5	7%	5	8%
> 50 tahun years old			9	38%	5	26%
Jumlah Total	3	2%	15	11%	11	9%
Wilayah Operasi Operational Area						
DKI Jakarta	3	2%	15	11%	11	9%
Jumlah Total	3	2%	15	11%	11	9%

KESETERAAN DALAM PROGRAM KESEJAHTERAAN PEGAWAI

Remunerasi Pegawai

Sebagai Perusahaan yang memiliki kepedulian tinggi akan kesejahteraan pegawai, Sarana Jaya memastikan untuk senantiasa berkomitmen memberikan remunerasi pegawai secara adil. Aspek yang dipertimbangkan dalam pemberian remunerasi berfokus pada kompetensi, kinerja, golongan jabatan, masa kerja dan beban kerja. Dengan demikian, rasio *basic salary* Sarana Jaya didapati sebesar 1:1 karena seluruh pegawai baik pria maupun wanita pada setiap kategori memiliki besaran remunerasi yang sama. [GRI 405-2]

Sarana Jaya juga berkomitmen untuk mematuhi peraturan terkait pengupahan pegawai sesuai ketentuan hukum yang berlaku dengan memberikan gaji melebihi Upah Minimum Regional (UMR) pada pegawai pemula/*entry level*. Rata-rata rasio gaji pegawai *entry level* dibandingkan UMR didapatkan sebesar Rp7.451.798,- dimana UMR per tahun 2023 sebesar Rp4.901.798 (rasio 1,5:1). [GRI 202-1][OJK F.20]

Terkait komponen remunerasi yang didapatkan pegawai tetap, tidak tetap dan calon pegawai, terdapat komponen yang berbeda, namun Sarana Jaya memastikan bahwa hak pegawai diberikan secara adil dan layak dan patuh terhadap peraturan yang berlaku. [GRI 401-2]

EQUALITY IN EMPLOYEE WELFARE PROGRAM

Employee Remuneration

As a company with a deep concern for employee welfare, Sarana Jaya is always committed to providing fair employee remuneration. Aspects considered in remuneration include competence, performance, position group, length of service, and workload. The basic salary ratio is 1:1 because male and female employees in each category have the same remuneration. [GRI 405-2]

The Company is also committed to complying with regulations on employee remuneration under applicable laws by providing salaries exceeding the Regional Minimum Wage (UMR) for entry-level employees. The average salary ratio for entry-level employees compared to the UMR is Rp7,451,798 where the UMR for 2023 is Rp4,901,798 (1.5:1 ratio). [GRI 202-1][OJK F.20]

Remuneration components for permanent, temporary, and prospective employees differ, but the Company ensures that employee rights are given fairly and properly and comply with applicable regulations. [GRI 401-2]

Perbedaan Komponen Remunerasi Berdasarkan Status Kepegawaian [GRI 401-2]
Remuneration Component Differences by Employment Status

Kebijakan Policy	Benefit	Status Kepegawaian Employment Status		
		Pegawai Tetap Permanent Employees	Pegawai Tidak Tetap Temporary Employees	Calon Pegawai Prospective Employees
Remunerasi Remuneration	Gaji/Imbalan Salary	✓	✓	✓
	Kompensasi Lembur Overtime Pay	✓	✓	✓
	Tunjangan Hari Tua Pension	✓	x	x
	Asuransi Insurance	✓	✓	✓
Pemeliharaan Kesehatan Healthcare	Jaminan Kesehatan Health Insurance	✓	✓	✓
	Tunjangan Kecelakaan Kerja Work Accident Benefit	✓	✓	✓
Pendidikan/ Pelatihan Education/Training	Pendidikan Formal Formal Education	✓	x	x
	Pelatihan Training	✓	✓	✓
	Bantuan Pemakaman dan Dukacita Funeral and Grief Assistance	✓	✓	✓
	Bantuan Bencana Alam Natural Disaster Assistance	✓	✓	✓

Cuti Melahirkan

Cuti melahirkan diberikan Sarana Jaya Kepada seluruh Pegawai Wanita yang akan memasuki masa melahirkan dengan lamanya waktu cuti adalah selama 3 (tiga) bulan dengan aturan waktu pengambilan cuti yaitu 1,5 bulan untuk masa sebelum melahirkan serta 1,5 bulan setelah melahirkan. Adapun data pegawai Perusahaan yang menggunakan cuti melahirkan pada tahun 2023 adalah sebagai berikut:

Maternity Leave

Sarana Jaya gives maternity leave to all female employees who will enter the maternity period with a length of leave of three months, which can be taken 1.5 months prior to giving birth and 1.5 months after giving birth. The number of employees who used maternity leave in 2023 is as follows:

Realisasi Maternity dan Paternity Leave tahun 2023 [GRI 401-3]
Maternity and Paternity Leave Realization in 2023

Keterangan Description	Pegawai Employee	
	Wanita Female (Maternity Leave)	Pria Male (Paternity Leave)
Jumlah pegawai yang berhak mendapatkan hak cuti Total employees entitled to leave rights	27	-
Jumlah pegawai yang menggunakan hak cuti Total employees using the leave rights	3	-
Jumlah pegawai yang kembali bekerja setelah masa cuti berakhir Total employees returning to work after the leave period ended	3	-

Keterangan Description	Pegawai Employee	
	Wanita Female (Maternity Leave)	Pria Male (Paternity leave)
Jumlah pegawai yang kembali bekerja setelah masa cuti berakhir, yang masih dipekerjakan kembali 12 bulan setelah kembali bekerja Total employees returning to work after the leave period ended, reinstated 12 months after returning to work	3	-
Tingkat pegawai yang menggunakan hak cuti yang kembali bekerja (%) Rate of employees using leave rights and return to work (%)	100%	-
Tingkat pegawai yang kembali setelah masa cuti berakhir, yang masih dipekerjakan kembali 12 bulan setelah kembali bekerja Rate of employees returning to work after the leave period ended, reinstated 12 months after returning to work	100%	-

Program Pensiun

Sarana Jaya mengikutsertakan seluruh pegawai ke dalam berbagai program pensiun seperti Program Jaminan Hari Tua (JHT) dan Program Jaminan Pensiun (JP) kepada Badan Penyelenggara Jaminan sosial (BPJS) Ketenagakerjaan. Selain itu Sarana Jaya juga menyelenggarakan program pensiun yang dikelola oleh Dana Pensiun Lembaga Keuangan (DPLK). Hal ini sebagai bentuk kepedulian Perusahaan akan kesejahteraan pegawai di masa purnabakti dan bentuk kepatuhan Perusahaan akan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Terdapat beberapa kategori tunjangan pensiun yang akan didapatkan oleh pegawai dengan dasar pertimbangan dan jenis kategori tersebut mencakup:

1. Tunjangan Hari Tua adalah tunjangan yang diberikan oleh Perusahaan kepada pegawai yang telah memasuki usia pensiun yang diberikan dalam bentuk asuransi jaminan hari tua dan/atau dalam bentuk deposito dan/atau tunai dan/atau dalam bentuk lainnya yang dananya berasal dari dana tunjangan hari tua dan dana pensiun yang dikelola oleh Yayasan Kesejahteraan Karyawan Sarana Jaya atau lembaga pengelola dana pensiun yang ditunjuk Perusahaan;
2. Uang Pesangon adalah penghasilan yang dibayarkan oleh pemberi kerja kepada pegawai dengan nama dan dalam bentuk apapun, sehubungan dengan berakhirnya masa kerja atau terjadi pemutusan hubungan kerja termasuk uang penghargaan masa kerja dan uang penggantian hak; serta
3. Uang Penghargaan Masa Kerja adalah uang jasa sebagai penghargaan dari Perusahaan kepada pegawai yang diberhentikan yang dikaitkan dengan lamanya masa kerja.

Pension Plan

Sarana Jaya provides an Old Age Security (JHT) Program and a Pension Security (JP) Program managed by the Workers Social Security Agency (BPJS Ketenagakerjaan). In addition, the Company organizes a pension plan managed by the Financial Institution Pension Fund (DPLK). This is a form of the Company's concern for the welfare of employees in the retirement period and compliance with the applicable laws and regulations. There are several categories of pension benefits that employees will receive based on considerations and the types of categories, such as:

1. Old-Age Benefit is an allowance provided by the Company to employees who have reached retirement age in the form of old age security insurance and/or deposits and/or cash and/or other forms of which funds come from old-age allowance and pension funds managed by the Sarana Jaya Employee Welfare Foundation or a pension fund management institution appointed by the Company;
2. Severance Pay is income paid by an employer to an employee in whatever name and form in connection with the end of the working period or termination of employment, including long service pay and compensation; and
3. Long Service Pay is a gift of money from the Company to dismissed employees related to the length of service.

OPTIMALISASI POTENSI PEGAWAI

OPTIMIZING EMPLOYEE POTENTIALS

OPTIMALISASI PROGRAM PENINGKATAN KOMPETENSI DAN KEAHLIAN PEGAWAI

Berbagai program pelatihan, peningkatan kompetensi dan pengembangan keahlian selalu diupayakan Perusahaan secara optimal dalam rangka meningkatkan kompetensi dan kualitas kerja pegawai. Adapun program peningkatan kompetensi dan keahlian yang diberikan Sarana Jaya kepada pegawai selama tahun 2023 adalah sebagai berikut:

OPTIMIZING EMPLOYEE COMPETENCY AND EXPERTISE DEVELOPMENT PROGRAMS

Various training programs, competency improvement, and skill development are always optimally pursued by the Company to improve employee competence and quality of work. The competence and expertise development programs provided by Sarana Jaya to employees in 2023 are as follows:

Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Tahun 2023 [GRI 404-2] Employee Education and Training in 2023

No.	Judul Pelatihan Training Theme	Tanggal Date	Penyelenggara Organizer
1.	Pelatihan Kesamaptan & Pembinaan Mental & Fisik (Bintalsik) Ability Training, Mental & Physical Development (Bintalsik)	19-21 Januari 2023 January 19-21, 2023	Rindam Jaya
2.	Sertifikasi <i>Qualified Internal Audit</i> (QIA) Tingkat Dasar Basic Level Qualified Internal Audit (QIA) Certification	13-27 Februari 2023 February 13-27, 2023	YPIA
3.	<i>Certified Procurement Specialist</i> (CPSp) Certified Procurement Specialist (CPSp)	20 Februari – 9 Maret 2023 February 20 – March 9, 2023	PPM
4.	Sertifikat Manajemen Risiko Dasar Basic Risk Management Certificate	20-22 Februari 2023 February 20-22, 2023	WAY Academy
5.	Bimbingan Teknis "Memahami Konsep, Perhitungan dan Verifikasi Tingkat Komponen dalam Negeri (TKDN) pada Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah" Technical Guidance "Understanding the Concept, Calculation and Verification of Domestic Component Level (TKDN) in the Implementation of Government Procurement of Goods/Services"	14-15 Maret 2023 March 14-15, 2023	Pusat Pengkajian Informasi Nasional National Information Assessment Center
6.	<i>Webinar Arbitrator Talks</i> : Kedudukan Hukum Debitur dan Kreditor dalam Penyelesaian Utang Piutang melalui Cessie, Novasi, dan Subrogasi Arbitrator Talks Webinar: Legal Position of Debtors and Creditors in Settlement of Debts and Receivables through Cessie, Novation, and Subrogation	27 Maret 2023 March 27, 2023	LPS SJK
7.	National Webinar "Webinar Risk Based Audit" National "Risk-Based Audit Webinar"	5 Januari 2023 January 5, 2023	
8.	Hari Bersih Indonesia Indonesian Clean Day	19 Februari 2023 February 19, 2023	
9.	Diskusi <i>Risk Based Audit</i> dengan Komite Dewan Pengawas Risk-Based Audit Discussion with the Supervisory Board Committee	8 Februari 2023 February 8, 2023	
10.	Dialog Sinergi BUMD DKI Jakarta: Efektivitas Pengurusan HPL dalam Meningkatkan Produktivitas Aset BUMD DKI Jakarta BUMD Synergy Dialogue: Effectiveness of HPL Management in Increasing BUMD Asset Productivity	27 Januari 2023 January 27, 2023	

No.	Judul Pelatihan Training Theme	Tanggal Date	Penyelenggara Organizer
11.	<i>Webinar Series "Master of Regional and Urban Planning, Mengapa Konsep TOD Penting untuk Masa Depan Kota Jakarta?"</i> "Master of Regional and Urban Planning, Why is the TOD Concept Important for the Future of the City of Jakarta?" Webinar Series	8 Februari 2023 February 8, 2023	
12.	<i>Webinar Series "Master of Regional and Urban Planning, The Greater Jakarta memasuki Post Suburnisasi: Peluang atau Ancaman"</i> "Master of Regional and Urban Planning, The Greater Jakarta Entering Post-Suburbanization: Opportunities or Threats" Webinar Series	15 Februari 2023 February 15, 2023	
13.	<i>Webinar Series "Master of Regional and Urban Planning, Jakarta di tengah kota-kota dunia: Tantangan Ekonomi Politik dan Lingkungan"</i> "Master of Regional and Urban Planning, Jakarta amid World Cities: Political Economy and Environmental Challenges" Webinar Series	22 Februari 2023 February 22, 2023	
14.	Program <i>Human Resources Manager</i> Human Resources Manager Program	15-30 Maret 2023 March 15-30, 2023	
15.	Penggunaan Microsoft Project pada Manajemen Proyek Konstruksi; Use of Microsoft Project in Construction Project Management	21 Januari 2023 January 21, 2023	
16.	Mengolah Data Vektor pada QGIS untuk Membuat Peta Tutupan Lahan Processing Vector Data in QGIS to Create Land Cover Maps	5 Februari 2023 February 5, 2023	
17.	Studi Kasus dalam Mengolah Data untuk Peta Tematik pada QGIS Case Study in Processing Data for Thematic Maps in QGIS	12 Februari 2023 February 12, 2023	
18.	<i>Webinar Keterbukaan Informasi Publik Series ke-36 Keterbukaan Informasi Publik dengan tema: "Persiapan MONEV 2023 Meningkatkan Komitmen Organisasi dalam Implementasi Keterbukaan Informasi Publik"</i> The 36 th Public Information Openness Webinar Series with the theme: "Preparations for 2023 MONEV: Increase Organizational Commitment in Implementing Public Information Openness."	30 Maret 2023 March 30, 2023	
19.	Sosialisasi dalam rangka Peningkatan Pemahaman PPID BUMD Provinsi DKI Jakarta dalam Pelaksanaan Pelayanan Informasi Publik Dissemination to increase understanding of PPID BUMD DKI Jakarta Province in the Implementation of Public Information Services	17 Maret 2023 March 17, 2023	
20.	Dialog Sinergi BUMD DKI Jakarta: Efektivitas Pengurusan HPL dalam Meningkatkan Produktivitas Aset BUMD DKI Jakarta BUMD Synergy Dialogue: Effectiveness of HPL Management in Increasing BUMD Asset Productivity	27 Januari 2023 January 27, 2023	
21.	<i>Key Performance Indicator (KPI) 101: Konsep, Studi Kasus, dan Expert's Tips</i> Key Performance Indicators (KPI) 101: Concepts, Case Studies, and Expert's Tips	Maret 2023 March 2023	
22.	Cepat Cakap Inggris Khusus Presentasi Quickly Speak English, Special for Presentations	8 Maret 2023 March 8, 2023	
23.	Kuliah Umum Media Indonesia bersama Menteri Keuangan Sri Mulyani Media Indonesia Public Lecture with Finance Minister Sri Mulyani	3 Februari 2023 February 3, 2023	
24.	<i>Webinar Transisi IMB ke PBG DKI Jakarta</i> IMB to PBG DKI Jakarta Transition Webinar	12 Mei 2023 May 12, 2023	Ikatan Arsitek Indonesia Indonesian Institute of Architects
25.	<i>Training and Development Manajemen Diklat</i> Training and Development Education and Training Management	10-11 Mei 2023 May 10-11, 2023	Service Leadership Consulting
26.	<i>Webinar Kita Bisa: "Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH) sebagai Dokumen Rekam Jejak Menjaga Kondisi Lingkungan Hidup Indonesia Tahun 2023"</i> Kita Bisa Webinar: "Environmental Quality Index (IKLH) as a Track Record Document for Maintaining Indonesia's Environmental Conditions in 2023"	11 April 2023 April 11, 2023	Direktorat Jenderal Pengendalian Pencemaran Lingkungan Environmental Pollution Control Directorate General
27.	Mekari University - <i>Corporate Internal Control</i> Mekari University - Corporate Internal Control	4 Mei 2023 May 4, 2023	Mekari University

No.	Judul Pelatihan Training Theme	Tanggal Date	Penyelenggara Organizer
28.	Mekari University - K3 (Keselamatan dan Kesehatan Kerja) Perkantoran Mekari University – OHS (Occupational Health and Safety) Office	3 Mei 2023 May 3, 2023	Mekari University
29.	Business Model Canvas: <i>The Strategic Tool for Business Concept Development</i> Canvas Business Model: The Strategic Tool for Business Concept Development	5 Mei 2023 May 5, 2023	Mekari University
30.	Pelatihan dan Sertifikasi <i>Qualified Internal Audit (QIA)</i> Tingkat Dasar Basic Level Qualified Internal Audit (QIA) Training and Certification	8-22 Mei 2023 May 8-22, 2023	YPIA
31.	<i>Certified Contract Management Specialist (CCMs)</i> Certified Contract Management Specialists (CCMs)	15-30 Mei 2023 May 15-30, 2023	PPM
32.	<i>Financial Modelling and Valuation Analyst (FMVA)</i> Financial Modeling and Valuation Analyst (FMVA)	1 Tahun 1 year	CFI
33.	<i>Feasibility Study</i> Feasibility Study	13-15 Juni 2023 June 13-15, 2023	PPM
34.	<i>PSAK for Executive</i> PSAK for Executives	15-16 Juni 2023 June 15-16, 2023	IAI
35.	<i>Workshop ISO 26000 CSR</i> ISO 26000 CSR Workshop	28 Juli 2023 July 28, 2023	PT. Filantra Kebaikan Indonesia
36.	Pelatihan Penataran Kode Etik dan Pengembangan Keprofesian Rancang Kota Code of Conduct Training and City Design Professional Development	18-19 Agustus 2023 August 18-19, 2023	IARKI
37.	Bimbingan Teknis Kearsipan Tingkat Dasar Basic Level Archives Technical Guidance	20 September 2023 September 20, 2023	Dispusip DKI Jakarta DKI Jakarta Provincial Library and Archives Service
38.	Pelatihan Audit ISO 9001 dan ISO 37001 ISO 9001 and ISO 37001 Audit Training	7-9 Juli 2023 July 7-9, 2023	PT BSI Indonesia
39.	<i>Powerful Business Presentation</i> Powerful Business Presentation	22-24 Agustus 2023 August 22-24, 2023	PPM Manajemen Management PPM
40.	Sertifikasi K3 OHS Certification	21 Agustus - 2 September 2023 August 21 - September 2, 2023	Garuda
41.	Sertifikasi QRMA QRMA Certification	10-14 Agustus 2023 August 10-14, 2023	PT Wisma Inti Manajemen (Wimconsult)
42.	Sertifikasi QIA Tingkat Lanjutan Advanced QIA Certification	17-31 Juli 2023 July 17-31, 2023	YPIA
43.	<i>Leadership: First Time Manager</i> Leadership: First Time Manager	7-21 Agustus 2023 August 7-21, 2023	
43.	<i>Leadership: First Time Manager</i> Leadership: First Time Manager	4 Oktober 2023 October 4, 2023	Mekari University
44.	<i>Workshop CSR Class for Corporate</i> CSR Class for Corporate Workshop	7 Desember 2023 December 7, 2023	Rumah Zakat
45.	<i>Workshop Sekolah Semanggi Perencanaan Kota dan Wilayah</i> Semanggi School Workshop on City and Regional Planning	8-25 November 2023 November 8-25, 2023	Ikatan Ahli Perencana (IAP) DKI Jakarta DKI Jakarta Association of Planning Experts (IAP)
46.	Pelatihan dan Sertifikasi Manajemen Risiko bagi Organ Pengelola Risiko Korporasi Risk Management Training and Certification for Corporate Risk Management Organs	13-17 November, 21 November & 1 Desember November 13-17, November 21 & December 1	BPKP
47.	<i>Corporate Performance Management: Balanced Scorecard (BSC)</i> Corporate Performance Management: Balanced Scorecard (BSC)	27 Desember 2023 December 27, 2023	Mekari University

Selama tahun 2023, Sarana Jaya telah menginvestasikan dana sebesar Rp589.690.620,- untuk pelaksanaan pelatihan dan pengembangan pegawai dengan rata-rata jam pelatihan per pegawai mencapai 40 jam/orang.

[GRI 404-1, 404-2][OJK F.22]

In 2023, Sarana Jaya invested Rp589,690,620 million for employee training and development, with an average total training hour of 40 hours/personnel. [GRI 404-1, 404-2][OJK F.22]

Rata-rata Jam Pelatihan Berdasarkan Kategori Pegawai [GRI 404-1]
Average Training Hours by Employee Category

2023			
Keterangan Description	Jumlah Pegawai Total Employee	Jumlah Jam Pelatihan/ Pendidikan Total Training/ Education Hours	Rata-rata Jam Pelatihan per Pegawai (Jam/Orang) Average Training/ Education Hours per Employee (Hour/Personnel)
Jenis Kelamin Gender			
Laki-laki Male	82	3.200	40
Perempuan Female	42	1.680	40
Jumlah Total	130	4.880	38
Kategori Pegawai/ Level Jabatan Employee Category/Position Level			
Senior Manajer Senior Manager	16	640	40
Junior Manajer Junior Manager	20	800	40
Supervisor Supervisor	17	680	40
Staf Staff	66	2.640	40
Tenaga Pelaksana Implementing Staff	11	440	40
Jumlah Total	130	5.200	40

2022			2021		
Jumlah Pegawai Total Employee	Jumlah Jam Pelatihan/ Pendidikan Total Training/ Education Hours	Rata-rata Jam Pelatihan per Pegawai (Jam/Orang) Average Training/ Education Hours per Employee (Hour/Personnel)	Jumlah Pegawai Total Employee	Jumlah Jam Pelatihan/ Pendidikan Total Training/ Education Hours	Rata-rata Jam Pelatihan per Pegawai (Jam/Orang) Average Training/ Education Hours per Employee (Hour/Personnel)
86	4.181	48.62	80	850	10.63
48	2.861	59.60	46	470	10.22
134	7.042	52.55	126	1320	10.48
13	784	60.31	13	80	6.15
21	1.430	68.10	19	512	26.95
18	1.046	58.11	13	40	3.08
72	3.782	52.53	74	688	9.30
10	-	-	7	-	-
134	7.042	52.55	126	1320	10.48

OPTIMALISASI PROGRAM PENILAIAN KINERJA DAN PENGEMBANGAN KARIR

Sepanjang tahun 2023, seluruh Pegawai Sarana Jaya (100%) pada seluruh level jabatan organisasi telah mendapatkan penilaian kinerja baik untuk pegawai pria maupun wanita. Hasil penilaian kinerja ini dijadikan Perusahaan sebagai pertimbangan untuk pengembangan karir pegawai. Pengangkatan pegawai tertentu ke dalam jabatan struktural/fungsional maupun jabatan lainnya dilakukan dengan pertimbangan/usulan Tim Penilai Pegawai sesuai persyaratan analisa jabatan yang berlaku dengan aspek penilaian berupa kondite dan loyalitas, kemampuan dan keterampilan, prestasi serta ketersediaan formasi jabatan. Adapun data terkait pegawai yang menerima pengembangan karir melalui kegiatan rotasi dan promosi dapat dilihat pada tabel berikut: [GRI 404-3]

OPTIMIZING PERFORMANCE APPRAISAL AND CAREER DEVELOPMENT PROGRAMS

Throughout 2023, all Sarana Jaya employees (100%) at all levels of organizational positions have received performance appraisals for both male and female employees. The Company uses the performance appraisal results to consider employee career development. The appointment of certain employees to structural/functional positions or other positions is carried out with the consideration/proposal of the Employee Assessment Team following the applicable job analysis requirements with assessment aspects of conduct and loyalty, ability and skills, achievements, and availability of position formations. Information on employees receiving career development through rotation and promotion is available in the following table: [GRI 404-3]

Persentase Pegawai yang Menerima Pengembangan Karir [GRI 404-3] Percentage of Employees Receiving Career Development

Keterangan Description	Jumlah Pegawai Total Employee	Pegawai yang Mendapat Pengembangan Karir Employees Receiving Career Development		
		Rotasi Rotation	Promosi Promotion	Jumlah Total
Jenis Kelamin Gender				
Laki-laki Male	82	8	7	15
Perempuan Female	48	6	6	12
Jumlah Total	130	14	13	27
Kategori Pegawai/Level Jabatan Employee Category/Position Level				
Senior Manajer Senior Manager	16	-	1	17
Junior Manajer Junior Manager	20	2	4	26
Supervisor Supervisor	17	1	-	18
Staf Staff	77	11	7	18
Jumlah Total	130	14	12	26

PENANGANAN PENGADUAN PEGAWAI [GRI 2-27, 3-3]

EMPLOYEE COMPLAINT HANDLING

Untuk menjadikan pengelolaan terhadap SDM berjalan dengan optimal di lingkungan Perusahaan, Sarana Jaya menerapkan prinsip keterbukaan kepada seluruh pegawai Perusahaan untuk memberikan masukan, kritik maupun pengaduan terhadap hal yang dinilai tidak sesuai dengan peraturan yang berlaku maupun hal lainnya. Pengaduan tersebut dapat disampaikan pegawai melalui atasan langsung atau dapat melalui Divisi Umum & SDM selaku pihak yang dipercayakan Perusahaan untuk melakukan penanganan akan pengaduan yang masuk ke Perusahaan.

Dengan pengelolaan SDM yang baik, sepanjang tahun 2023, Sarana Jaya tidak menerima pengaduan dari pegawai terkait pelanggaran terhadap praktik ketenagakerjaan maupun pelanggaran HAM seperti praktik diskriminasi maupun kerja paksa yang terjadi di lingkungan Perusahaan.

To ensure that HR management runs optimally in the Company's environment, Sarana Jaya applies the transparency principle to all employees to provide input, criticism, and complaints on matters deemed inappropriate with applicable regulations or other provisions. Employees can submit complaints through their direct superiors or the General Affairs & HR Division as the party entrusted by the Company to handle complaints addressed to the Company.

With well-implemented HR management, Sarana Jaya did not receive employee complaints regarding labor practices or human rights violations, such as discriminatory practices or forced labor that occurred within the Company throughout 2023.

MEMBANGUN BUDAYA KESELAMATAN DAN KESEHATAN KERJA [GRI 3-3][OJK F.21]

BUILDING OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY CULTURE

Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) menjadi salah satu prioritas bagi Sarana Jaya dalam setiap aspek operasional karena Sarana Jaya menyadari bahwa pengelolaan K3 merupakan kewajiban di bidang ketenagakerjaan dan Hak Asasi Manusia (HAM) untuk senantiasa menciptakan pekerjaan yang aman dan layak. Oleh karena itu, Sarana Jaya berkomitmen untuk membangun budaya K3 secara konsisten dengan menerapkan standar dan prosedur K3 sehingga memberikan perlindungan K3 kepada pegawai, pekerja proyek, mitra kerja dan masyarakat sekitar.

Sarana Jaya memiliki komitmen terkait K3 yang selalu dijaga dalam menjalankan kegiatan operasional baik pada kawasan proyek maupun pada kawasan perkantoran Perusahaan. Komitmen pengelolaan terkait aspek K3 dilakukan Sarana Jaya dengan menjalankan kebijakan, prosedur dan Sistem Manajemen K3 (SMK3) untuk memastikan lingkungan kerja Perusahaan aman, selamat dan sehat bagi seluruh pegawai dan mitra kerja. Sarana Jaya secara aktif turut mempromosikan

Occupational health and safety (OHS) is one of Sarana Jaya's priorities in every operational aspect because the Company recognizes OHS management as an obligation in employment and human rights (HAM) to create safe and decent jobs. Therefore, the Company is committed to establishing a consistent OHS culture by applying OHS standards and procedures to protect employees, project workers, work partners, and the surrounding community.

Sarana Jaya always maintains OHS's commitment to its operations in the Company's projects and office area. The commitment is realized by implementing OHS policies, Procedures, and Management Systems (SMK3) to ensure that the Company's work environment is safe, secure, and healthy for all employees and work partners. Sarana Jaya actively promotes a work culture that emphasizes the importance of OHS in achieving zero accidents, identifying

budaya kerja yang sadar akan pentingnya K3 dalam mencapai *zero accident*, mengidentifikasi dan mengurangi risiko potensial serta memastikan kepatuhan terhadap regulasi dan standar keselamatan yang berlaku. Melalui pengelolaan K3 yang efektif, Sarana Jaya mampu meminimalkan risiko cedera dan penyakit akibat kerja serta memberikan lingkungan kerja yang optimal bagi keselamatan semua pihak yang terlibat dalam kegiatan operasional Perusahaan. [GRI 2-27]

Pengelolaan terkait K3 dilakukan oleh Unit Perencanaan dan Pembangunan dalam menjalankan pembangunan proyek dan juga untuk diterapkan bersama-sama seluruh Insan Perusahaan. Untuk memastikan komitmen tersebut senantiasa terimplementasi dengan baik, seluruh aktivitas Perusahaan dievaluasi secara berkesinambungan. Atas penerapan budaya K3 dengan baik, selama tahun 2023 Sarana Jaya mencatatkan tidak adanya insiden kecelakaan kerja (*zero accident*) serta tidak terdapat pegawai yang mengalami kematian ataupun kasus kesehatan buruk yang diakibatkan oleh pekerjaan (Penyakit Akibat Kerja/PAK).

SISTEM MANAJEMEN KESELAMATAN DAN KESEHATAN KERJA [GRI 403-1]

Didasari atas kesadaran Perusahaan akan pentingnya pengelolaan K3 untuk keberhasilan aktivitas usaha, Sarana Jaya telah memiliki panduan pelaksanaan K3 di lingkungan Perusahaan yang mengacu pada Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2012 tentang Penerapan Sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja. Panduan pelaksanaan K3 ini diterapkan bagi seluruh pegawai Perusahaan, kontraktor dan semua tamu yang berada di wilayah kerja Perusahaan. Hal ini sebagai upaya perlindungan bagi semua orang di wilayah kerja Perusahaan agar dalam setiap aktivitas di seluruh wilayah kerja Perusahaan tidak menimbulkan potensi bahaya yang dapat mengakibatkan kecelakaan kerja dan penyakit akibat kerja.

PROGRAM KESELAMATAN DAN KESEHATAN KERJA

Selama tahun 2023, Sarana Jaya telah melaksanakan program K3 sebagai berikut:

Program K3 Sarana Jaya Tahun 2023 Sarana Jaya OHS Program in 2023

Promosi/Penyuluhan K3 OHS Dissemination/Education

Melaksanakan program penyuluhan K3 kepada seluruh pegawai untuk meningkatkan kesadaran tentang praktik K3 yang aman. Penyuluhan ini mencakup penggunaan peralatan pelindung diri (APD) dan tindakan pencegahan kecelakaan. An OHS education program was conducted for all employees to raise awareness about safe OHS practices. The program covered personal protective equipment (PPE) and accident prevention measures.

and reducing potential risks, and ensuring compliance with applicable safety regulations and standards. Through effective OHS management, the Company can minimize the risk of occupational injuries and diseases as well as provide an optimal work environment for the safety of all parties involved in the Company's operations. [GRI 2-27]

OHS Management is carried out by the Planning and Development Unit in project development and will be implemented jointly by all the Company's personnel. To ensure this commitment is always properly implemented, all Company activities are evaluated continuously. Due to the Company's good implementation of OHS culture, no accidents were recorded (zero accidents), and no employees experienced occupational fatalities or diseases (PAK) throughout 2023.

OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY MANAGEMENT SYSTEM [GRI 403-1]

Based on the awareness of the importance of OHS management for the success of business activities, Sarana Jaya has a guideline for OHS implementation within the Company that refers to Government Regulation No. 50 of 2012 on Implementation of Occupational Health and Safety Management Systems. The guideline applies to all employees, contractors, and guests in the Company's work area. It is necessary to protect everyone in the Company's work area and prevent potential hazards that can result in occupational accidents and diseases.

OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY PROGRAM

Sarana Jaya implemented the following OHS program in 2023:

Sosialisasi Keselamatan Kebakaran Gedung

Building Fire Safety Dissemination

Kegiatan sosialisasi keselamatan kebakaran Gedung untuk meningkatkan kesadaran dan pengetahuan tentang tindakan pencegahan dan respon dalam situasi kebakaran. Dalam kegiatan ini, partisipan diberikan informasi mengenai pentingnya pemahaman terhadap tanda-tanda bahaya kebakaran, cara penggunaan peralatan pemadam kebakaran, jalur evakuasi, titik kumpul serta tindakan yang harus dilakukan dalam situasi darurat.

Building fire safety dissemination was carried out to increase awareness and knowledge about prevention and response measures in fire situations. In this activity, participants were given information about the importance of understanding fire hazard signs, how to use firefighting equipment, evacuation routes, assembly points, and actions to be taken in an emergency.

Penyediaan Alat Pemadam Api Ringan (APAR)

Provision of Light Fire Extinguishers (APAR)

Menyediakan APAR pada gedung kantor dan proyek Perusahaan untuk menjaga kesiapsiagaan dalam memadamkan api pada awal kebakaran.

APAR were provided in office buildings and project sites to maintain readiness in extinguishing fires at the start of a fire

Medical Check Up

Medical Check Up

Memberikan fasilitas *reimbursement* untuk pemeriksaan atau pengecekan kesehatan secara berkala (*Medical Check Up*) kepada seluruh pegawai Perusahaan untuk mengetahui status kesehatan pegawai secara menyeluruh dan mengantisipasi masalah kesehatan yang dapat berkembang.

Periodic medical check-ups for all Company employees were conducted to examine the overall health status of employees and anticipate health problems that may develop.

Pemberian Manfaat Kesehatan

Health Benefits Provision

Memberikan manfaat kesehatan bagi semua pegawai beserta anggota keluarga dalam bentuk asuransi kesehatan serta asuransi kecelakaan di luar jam kerja sesuai dengan tingkatan (*grade*) masing-masing pegawai.

Health benefits for all employees and their family members were provided through health insurance and insurance for accidents after working hours according to the employee grade.

Memberikan Jaminan K3

OHS Guarantee Provision

Mendaftarkan seluruh pegawai pada BPJS Ketenagakerjaan untuk mengantisipasi kejadian tak terduga yang dialami pegawai Perusahaan pada saat melaksanakan pekerjaannya.

The Company registered all employees at BPJS Ketenagakerjaan to anticipate unexpected events experienced by employees while working.

IDENTIFIKASI JENIS PEKERJAAN BERISIKO

TINGGI [GRI 403-2]

Sarana Jaya secara aktif melakukan identifikasi jenis pekerjaan berisiko tinggi dalam lingkup kegiatan usaha terutama pada kawasan Proyek yang dijalankan. Proses identifikasi ini melibatkan analisis mendalam terhadap setiap pekerjaan yang dilakukan dengan mempertimbangkan faktor-faktor seperti ketinggian, lingkungan terbatas, penggunaan alat berat, paparan bahan berbahaya dan risiko lainnya. Dengan melakukan identifikasi ini, Sarana Jaya dapat mengambil tindakan yang sesuai termasuk menyusun rencana pengendalian risiko, penyediaan pelatihan khusus, dan penerapan prosedur kerja yang aman untuk melindungi dan meminimalkan potensi kecelakaan atau bahaya dalam pekerjaan berisiko tinggi.

IDENTIFICATION OF HIGH-RISK WORK [GRI 403-2]

Sarana Jaya actively identifies high-risk work within its business activities, especially in project areas. The identification process involves an in-depth analysis of each work performed, considering factors such as altitude, confined environment, use of heavy equipment, exposure to hazardous materials, and other risks. By doing so, Sarana Jaya can take appropriate actions, including developing a risk control plan, providing special training, and implementing safe work procedures to protect and minimize potential accidents or hazards in high-risk jobs.

MENINGKATKAN KESEJAHTERAAN MASYARAKAT

IMPROVING COMMUNITY WELFARE

Sarana Jaya menyadari bahwa keberadaan Perusahaan di tengah masyarakat mampu memberikan dampak bagi peningkatan kesejahteraan dan kualitas hidup masyarakat. Oleh karena itu, membangun sinergi bersama melalui pelaksanaan program tanggung jawab sosial senantiasa dioptimalkan Perusahaan sebagai bentuk refleksi atas kesadaran Perusahaan sebagai entitas usaha yang memiliki perhatian besar terhadap pertumbuhan bisnis yang berkelanjutan.

Sarana Jaya is aware that the Company's presence in the community has an impact on improving the welfare and quality of life of the community. Therefore, building synergies through the implementation of social responsibility programs is always optimized as a manifestation of the Company's awareness as a business entity with great concern for sustainable business growth.



Pendekatan Manajemen Topik Masyarakat Lokal [GRI 3-3] Management Approach to Local Community

► **Pengelolaan Dampak** | Impact Management [GRI 3-3]

Untuk mengelola dampak terhadap masyarakat atas kegiatan program tanggung jawab sosial, Sarana Jaya telah membentuk tim Pengelola CSR yang diketuai oleh Manajer Unit Sekretaris Perusahaan. Dimana tim tersebut memiliki tugas untuk membuat program Rencana Tahunan CSR, melakukan proses, menyalurkan, melaporkan hingga melakukan monitoring dan evaluasi yang hasilnya dilaporkan secara berkala kepada Direksi. Sarana Jaya juga melakukan identifikasi kebutuhan masyarakat akan program yang dapat meningkatkan produktivitas dan kreativitas dengan turut serta memperhatikan potensi dampak yang ditimbulkan dari kegiatan operasional usaha maupun program tanggung jawab sosial. Dengan demikian, setiap program yang diberikan Perusahaan akan memiliki nilai keberlanjutan dan kemandirian sehingga dapat mengoptimalkan dampak positif dan nilai tambah yang lebih besar. [GRI 2-27, 3-2, 3-3]

To manage the impact of social responsibility programs on society, Sarana Jaya has formed a CSR Management team chaired by the Corporate Secretary Unit Manager. The team is responsible for making a CSR Annual Plan, implementing, distributing, monitoring, evaluating, and regularly reporting the results of CSR programs to the Board of Directors. The Company also identifies community needs for programs that can increase productivity and creativity by considering the potential impacts arising from business operations and CSR programs. Thus, every program provided by the Company will have a sustainable and independent value so as to optimize the positive impact and greater added value.

[GRI 2-27] [GRI 3-2, 3-3]

► Kebijakan Khusus | Specially Policies

Kebijakan Sarana Jaya

- Pedoman Pengelolaan Kegiatan Tanggung Jawab Sosial Perusahaan (*Corporate Social Responsibility*) yang disahkan oleh Direksi pada 17 November 2021.

Ketentuan Umum

- Peraturan Pemerintah Daerah Indonesia Nomor 54 Tahun 2017 Tentang Badan Usaha Milik Daerah.
- Peraturan Daerah No. 2 Tahun 1982 tentang Perusahaan Daerah Pembangunan Sarana Jaya Daerah Khusus Ibukota Jakarta yang telah mengalami perubahan beberapa kali dan terakhir ditetapkan berdasarkan Peraturan Daerah Nomor II tahun 2018 tentang Perubahan ketiga atas Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 1982 tentang Perusahaan Umum Daerah Pembangunan Sarana Jaya Daerah Khusus Ibukota Jakarta.
- Peraturan Gubernur Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 112 tahun 2013 Tentang Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Dunia Usaha.

Sarana Jaya Policy

- Guidelines for Managing Corporate Social Responsibility Activities approved by the Board of Directors on November 17, 2021.

General Provisions

- Government Regulation of the Republic of Indonesia No. 54 of 2017 on Region-Owned Enterprises.
- Regional Regulation No. 2 of 1982 on Perusahaan Daerah Pembangunan Sarana Jaya of Jakarta Special Capital Region, which has been amended several times and most recently stipulated based on Regional Regulation No. II of 2018 on the Third Amendment to Regional Regulation No. 2 of 1982 on Perusahaan Daerah Pembangunan Sarana Jaya of Jakarta Special Capital Region.
- Regulation of DKI Jakarta Governor No. 112 of 2013 on Social and Environmental Responsibility of the Business World.

► Komitmen | Commitment

Komitmen Sarana Jaya dalam berbagai kegiatan Pengelolaan Kegiatan Tanggung Jawab Sosial Perusahaan (*Corporate Social Responsibility*) meliputi pelaksanaan program Bina Sosial dan Budaya, Bina Ekonomi, Bina Fisik Lingkungan dan Penanggulangan Bencana. Kegiatan ini dapat dilaksanakan langsung kepada masyarakat atau melalui keikutsertaan dalam program Pemerintah Daerah.

Sarana Jaya's commitment to CSR activities includes implementing Social and Cultural Development, Economic Development, Environmental Physical Development, and Disaster Management programs. The activity is carried out directly by the community or through participation in local government programs.

► Tujuan/Target | Goals/Targets

- Menjalin hubungan sinergi erat dengan para pemangku kepentingan.
- Mengurangi kerusakan fasilitas umum, sarana, sumber daya alam dan lingkungan yang dapat meminimalisir konflik terhadap masyarakat.
- Mereduksi risiko bisnis.
- Adanya transparansi Perusahaan terhadap publik sehingga menumbuhkan rasa kepercayaan pada Perusahaan.
- Menghasilkan publikasi dan citra positif Perusahaan.

- Establish a strong synergy with stakeholders.
- Reduce damage to public facilities, natural resources, and the environment to minimize conflicts with the community.
- Reduce business risk.
- Promote transparency to the public to foster a sense of trust in the Company.
- Build positive publicity and image of the Company.

► Evaluasi | Evaluation

Evaluasi dilakukan secara berkala melalui laporan monitoring dan evaluasi pada setiap program-program yang dijalankan.

Evaluation is carried out periodically through monitoring and evaluation reports on each implemented program.

► Penanggung Jawab | Responsible Person

Tim Pengelola CSR yang diketuai oleh Manajer Unit Sekretaris Perusahaan dan Sekretaris yakni Asisten Manajer Hubungan Masyarakat dengan Anggota Staf Divisi/Unit/Satuan terkait atas arahan Direksi Perusahaan.

The CSR Management Team is chaired by the Corporate Secretary Unit Manager, the Assistant Manager of Public Relations as the Secretary, and related Divisions/Units as Members under the directives of the Board of Directors.

► Alokasi Anggaran | Budget Allocation

Sepanjang tahun 2023, Sarana Jaya mengalokasikan anggaran sebesar Rp3.410 juta untuk kegiatan CSR, dengan realisasi sebesar Rp2.145 juta.

In 2023, Sarana Jaya allocated Rp3,410 million for CSR activities, which was realized at Rp2,145 million.

► Keterlibatan Pemangku Kepentingan | Stakeholder Engagement

Masyarakat

- Berpartisipasi dalam pelaksanaan program CSR Sarana Jaya.

Pemerintah

- Melakukan pengawasan terhadap kegiatan operasional Sarana Jaya yang berkaitan dengan dampak terhadap masyarakat.
- Mengeluarkan kebijakan dan perundang-undangan yang kemudian dijadikan pedoman oleh Sarana Jaya.

Pegawai

- Melakukan perencanaan, pelaksanaan, pelaporan dan monitoring dan evaluasi atas pengelolaan kegiatan CSR.

Community

- Participate in the implementation of the Company's CSR programs.

Government

- Supervise the Company's operational activities that affect the community.
- Issue policies and regulations, which are then used as guidelines by Sarana Jaya.

Employees

- Plan, implement, monitor, evaluate, and report the management of CSR activities.

Visi dan Misi CSR Perusahaan

CSR Vision and Mission

Visi | Vision

Terwujudnya sinergi perusahaan dan pemangku kepentingan dengan berperan aktif mendukung keberlangsungan bisnis dengan melaksanakan kegiatan CSR yang berkelanjutan di bidang ekonomi, sosial kemasyarakatan, lingkungan dan pendidikan dengan menjalin kerja sama dengan Pemprov DKI Jakarta, Badan Usaha Milik Daerah (BUMD), Organisasi/Asosiasi dan Masyarakat. Create corporate and stakeholder synergy by playing an active role in supporting business continuity through sustainable CSR activities in the economic, social, environmental, and educational aspects by collaborating with the DKI Jakarta Provincial Government, Region-Owned Enterprises (BUMD), Organizations/Associations, and the Community.

Misi | Mission

1. Menjalinkan Sinergi berkelanjutan yang bermanfaat dengan seluruh pemangku kepentingan yang terkait untuk keberlanjutan operasional perusahaan;
Establish beneficial, sustainable synergy with all relevant stakeholders for the sustainability of the Company's operations;
2. Mewujudkan lingkungan yang berkelanjutan baik dalam aspek lingkungan, sosial, dan ekonomi;
Create a sustainable environment in environmental, social, and economic aspects;
3. Memberdayakan potensi sumber daya menuju peningkatan kualitas hidup, lingkungan, dan kemandirian masyarakat;
Empower potential resources towards improving the quality of life, the environment, and community self-sufficiency;
4. Meningkatkan citra positif Perusahaan di kalangan pemangku kepentingan.
Build the Company's positive image among stakeholders.

PERENCANAAN DAN PELAKSANAAN PROGRAM CSR [GRI 413-1][OJK F.23]

Pengelolaan program CSR Perusahaan ditangani oleh Tim CSR yang diketuai oleh Unit Sekretaris Perusahaan dibantu oleh Unit/Divisi terkait dengan tugas pokok merencanakan, melaksanakan, melaporkan dan membuat *monitoring* dan evaluasi atas kegiatan CSR yang dilakukan. Untuk mengawasi pelaksanaan program CSR, Sarana Jaya melakukan perencanaan program kegiatan guna menghasilkan program pemberdayaan yang optimal dan sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Kegiatan perencanaan ini dilakukan oleh Tim CSR yang bertugas melakukan *survey* dan berkoordinasi dengan pemangku kepentingan seperti masyarakat maupun pemerintah setempat.

Pelaksanaan program CSR dilakukan Sarana Jaya dengan turut melibatkan beberapa pihak seperti masyarakat, pemerintah daerah setempat serta PT Sarana Wisesa Propertindo selaku anak perusahaan. Pelibatan pemangku kepentingan ini dilakukan Sarana Jaya dalam bentuk penyusunan proposal program CSR secara bersama untuk menentukan jenis program, tujuan, dan manfaat kegiatan yang kemudian akan disesuaikan dengan kebutuhan masyarakat dan dilanjutkan dengan dilakukan analisa kelayakan oleh tim CSR Sarana Jaya sebagai finalisasi keputusan pelaksanaan.

Dalam rencana kerja, CSR Sarana Jaya dibagi dalam 6 (enam) kategori berdasarkan jenis-jenis bantuan yang diberikan sesuai preseden pelaksanaan Program CSR sebelumnya. Di tahun 2023 sendiri, kategori tersebut adalah Bidang Bencana Alam, Bidang Kesehatan, Bidang Pendidikan, Bidang Pembangunan, Bidang Sosial Kemasyarakatan dan Bidang Keagamaan. Kegiatan-kegiatan ini dilakukan Sarana Jaya baik secara langsung kepada masyarakat dan atau melalui keikutsertaan Perusahaan dalam program Pemerintah Daerah.

RUANG LINGKUP DAN KATEGORI BANTUAN PADA PROGRAM CSR

Kategori Bantuan dalam Program CSR Tahun 2023

Bidang Bencana Alam Natural Disaster Aid	Bidang Kesehatan Health	Bidang Pembangunan Development
Penyediaan bantuan untuk penanggulangan Bencana Alam Assistance provision for natural disaster management	Program dukungan <i>stunting</i> Stunting prevention support programs	Perbaikan Sarana dan Lingkungan (bantuan pembangunan rumah ibadah, fasilitas sosial umum lainnya dan lingkungan berkelanjutan) Facilities and Environment Improvement (assistance for the construction of worship facilities, other public & social facilities, and a sustainable environment)

CSR PROGRAM PLANNING AND IMPLEMENTATION [GRI 413-1][OJK F.23]

The Company's CSR program is managed by the CSR Team and chaired by the Corporate Secretary Unit Manager, assisted by related Units/Divisions responsible for planning, implementing, monitoring, evaluating, and reporting the CSR activities. To initiate the implementation of the CSR program, Sarana Jaya prepares an activity plan to produce an optimal empowerment program that meets the community's needs. The CSR Team plans by conducting surveys and coordinating with stakeholders such as the community and local government.

Sarana Jaya's CSR program involves several parties, such as the community, the local regional government, and PT Sarana Wisesa Propertindo as its subsidiary. The stakeholder engagement is carried out by jointly preparing a CSR program proposal to determine the type of program, objectives, and benefits, which will then be adjusted to the community's needs and followed by a feasibility analysis by the Company's CSR team to obtain a final decision.

Sarana Jaya's CSR work plan is divided into 6 (six) categories based on the types of assistance provided according to the precedents of the previous CSR Program implementation. For 202e, these categories are Natural Disaster, Health, Education, Development, Social Community, and Religious Affairs. CSR activities are carried out by Sarana Jaya directly to the community and or through its participation in Local Government programs.

CSR PROGRAM ASSISTANCE SCOPE AND CATEGORY

Assistance Category in 2023 CSR Program

Bidang Pendidikan
Education

Pelatihan keterampilan, seminar dan beasiswa/bantuan di bidang Pendidikan
Skills training, seminars, and scholarships/assistance in Education

Bidang Keagamaan
Religious Affairs












Bantuan/sumbangan Hewan Qurban, Hari Besar/Acara Keagamaan
Assistance/donations for Sacrificial Animals, Holidays/Religious Events

Bidang Sosial Masyarakat
Social Community

Dukungan acara Sosial, Pendidikan dan Masyarakat
Support for Social, Educational, and Community events

PROGRAM CSR SARANA JAYA TAHUN 2023 [GRI 413-1]
Realisasi Pelaksanaan Program CSR Perusahaan Tahun 2023 [OJK F.25]

SARANA JAYA CSR PROGRAMS IN 2023 [GRI 413-1]
CSR Program Implementation in 2023 [OJK F.25]

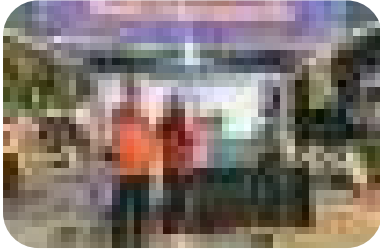
No.	Kategori Program Program Category	Nama Program Program Name	Keterkaitan dengan SDGs Link to SDGs	Alokasi Dana Budget Allocation
1	Bidang Bencana Alam Natural Disaster Aid	Penyediaan bantuan untuk penanggulangan Bencana Alam Assistance provision for natural disaster management	  	Rp74.773.500,-
2	Bidang Kesehatan Health	Program dukungan <i>stunting</i> Stunting prevention support programs		Rp299.471.000,-
3	Bidang Pendidikan Education	Pelatihan keterampilan, seminar dan beasiswa/bantuan di bidang pendidikan Skills training, seminars, and scholarships/assistance in education		Rp107.901.750,-
4	Bidang Pembangunan Development	Perbaikan sarana dan lingkungan (bantuan pembangunan rumah ibadah, fasilitas sosial umum lainnya dan lingkungan berkelanjutan) Facilities and environment improvement (assistance for the construction of worship facilities, other public & social facilities, and a sustainable environment)		Rp441.604.715,-
5	Bidang Sosial Masyarakat Social Community	Dukungan terhadap acara Sosial, Pendidikan dan Masyarakat Support for Social, Educational, and Community events	  	Rp576.599.894,-
6	Bidang Keagamaan Religious Affairs	Bantuan/sumbangan Hewan Qurban, Hari Besar/Acara Keagamaan Assistance/donations for Sacrificial Animals, Holidays/Religious Events	 	Rp644.608.000,-



Program CSR Unggulan Tahun 2023

CSR Flagship Programs in 2023

► CSR – BIDANG BENCANA ALAM | CSR – NATURAL DISASTER AID



Sebagai bentuk aksi kepedulian terhadap masyarakat, Sarana Jaya melalui Program *Corporate Social Responsibility* menyalurkan bantuan berupa barang pangan dan kebutuhan pokok kepada para penyintas kebakaran.

Selama tahun 2023, penyaluran bantuan bencana alam diberikan kepada penyintas kebakaran, meliputi:

- Peristiwa Kebakaran Depo Pertamina di Plumpang Koja, Jakarta Utara (03 Maret 2023);
- Peristiwa Kebakaran di Daerah Pemukiman Warga RW 08 di Petojo Selatan, Gambir, Jakarta Pusat (24 Agustus 2023).

Melalui implementasi kegiatan ini, Sarana Jaya telah menerapkan Poin SDGs No. 2 dan 3.

Dalam kegiatan ini Sarana Jaya ikut berpartisipasi dalam kepedulian terhadap masyarakat melalui Program *Corporate Social Responsibility* dengan menyalurkan bantuan kepada korban kebakaran yang terjadi di depo Pertamina di Plumpang Koja Jakarta Utara pada tanggal 3 Maret 2023 dan kebakaran di daerah pemukiman warga RW 08 di Petojo Selatan, Gambir Jakarta Pusat pada tanggal 24 Agustus 2023.

As an embodiment of community care, Sarana Jaya distributed food and basic necessities aid to fire survivors through the Corporate Social Responsibility Program.

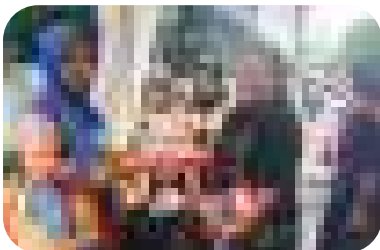
Distribution of natural disaster aid was provided to fire survivors throughout 2023, including:

- Pertamina Depot Fire Incident in Plumpang Koja, North Jakarta (March 3, 2023);
- Fire incident in the Residential Area of RW 08 in Petojo Selatan, Gambir, Central Jakarta (August 24, 2023).

Through this program's implementation, Sarana Jaya has implemented SDGs Point No. 2 and 3.

Sarana Jaya participated in caring for the community through the Corporate Social Responsibility Program by distributing aid to victims of the fire that occurred at the Pertamina depot in Plumpang Koja, North Jakarta, on March 3, 2023, and the fire in the residential area of RW 08 in Petojo Selatan, Gambir, Central Jakarta on August 24, 2023.

► CSR – BIDANG KESEHATAN | CSR – HEALTH



Sejalan dengan program nasional, Pemerintah Provinsi DKI Jakarta menyatakan bahwa Stunting menjadi hal yang perlu untuk diperhatikan bagi para pemangku kepentingan di lingkungan DKI Jakarta dan masyarakat sebagai upaya peningkatan kualitas SDM.

Tidak terkecuali Sarana Jaya, Program Stunting juga menjadi program CSR utama dalam Bidang Kesehatan untuk dilaksanakan kepada masyarakat. Hal ini tentu menjadi komitmen dan dukungan Sarana Jaya menjadi bagian menuju Indonesia Emas 2045. Dengan hal ini, Sarana Jaya melakukan intervensi turut serta mengentaskan kemiskinan dan peningkatan kualitas SDM, khususnya di wilayah DKI Jakarta.

In line with the national program, the DKI Jakarta Provincial Government specified that Stunting is critical to heed by stakeholders in DKI Jakarta and the community to improve the quality of human resources.

Sarana Jaya is no exception – the Stunting Program is also the main CSR program in the Health Sector to be implemented in the community. This is Sarana Jaya's commitment and support to the path to Indonesia Emas 2045. With this, Sarana Jaya is intervening and participating in alleviating poverty and improving the quality of human resources, especially in the DKI Jakarta area.

► **Sasaran RPJPN (2025-2045) – Indonesia Emas**
 RPJPN Target (2025-2045) – Indonesia Emas

Sasaran Visi 1: Pendapatan per Kapita Setara Negara Maju
 Vision Target 1: Per Capita Income Equivalent to Developed Countries

Sasaran Visi 2: Kemiskinan menuju 0% dan Ketimpangan Berkurang
 Vision Target 2: Poverty reaches 0% and Reduced Inequality

Sasaran Visi 3: Kepemimpinan dan Pengaruh di Dunia Internasional Meningkatkan
 Vision Goal 3: Increased Leadership and Influence in the International World

Sasaran Visi 4: Daya Saing Sumber Daya Manusia Meningkatkan
 Vision Target 4: Increased Competitiveness of Human Resources

Sasaran Visi 5: Intensitas Emisi GRK Menurun menuju *Net Zero Emission*
 Vision Target 5: Decreased GHG Emission Intensity towards Net Zero Emissions

► **Kegiatan CSR Bidang Kesehatan | CSR Activities in the Health Sector**

Intervensi Penanganan *Stunting* kepada 50 Anak Balita di DKI Jakarta
Stunting Intervention for 50 Toddlers in DKI Jakarta



Wilayah Pulo Gebang

Sarana Jaya melakukan intervensi pertama kali dalam hal penanganan *Stunting* bagi anak balita di Wilayah Pulo Gebang. Program ini merupakan kolaborasi Sarana Jaya dengan Yayasan Rumah Zakat Indonesia selaku aggregator pelaksanaan CSR dan Sofia Care Foundation selaku organisasi sosial yang mendukung pelayanan kepada warga Jakarta Timur. Fasilitas yang diberikan adalah pemberian PMT (Paket Makan Tambahan) kepada 15 anak dan pemberian edukasi intensif kepada orang tua.

Sarana Jaya intervened for the first time in handling stunting for children under five in the Pulo Gebang area. The program is a collaboration between Sarana Jaya, Rumah Zakat Indonesia Foundation as the CSR implementation aggregator, and Sofia Care Foundation as a social organization that supports services to East Jakarta residents. The facilities provided include providing PMT (Additional Meal Packages) to 15 children and providing intensive education to parents.



Wilayah Petojo Utara & Gambir

Tidak hanya itu, Sarana Jaya juga turut melaksanakan upaya dalam penanganan *Stunting* di Wilayah Jakarta Pusat. Terdapat dua lokasi yang dibidik, yakni Petojo Utara dan Gambir. Pada lokasi Petojo Utara, Sarana Jaya bekerja sama dengan Walikota Jakarta Pusat dan Baznas Basis DKI dengan menjangkau 31 anak selama 3 bulan. Selanjutnya, Sarana Jaya lakukan kegiatan penanganan *Stunting* dengan Pihak Kelurahan Gambir untuk menjangkau 4 orang dengan kategori Gizi Buruk dan *Stunting*.

Sarana Jaya is also carrying out efforts to handle stunting in the Central Jakarta area. There are two locations targeted, i.e., Petojo Utara and Gambir. At the Petojo Utara location, Sarana Jaya collaborated with the Central Jakarta Mayor and Baznas Basis DKI by aiding 31 children in 3 months. Next, Sarana Jaya carried out stunting handling aid with Kelurahan Gambir to reach four people in the Malnutrition and Stunting categories.

Melalui implementasi kegiatan ini, Sarana Jaya telah menerapkan Poin SDGs No. 2 dan 3.
 Through this program's implementation, Sarana Jaya has implemented SDGs Point No. 2 and 3.



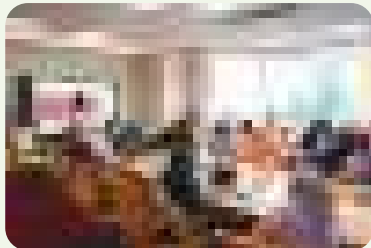
► Kegiatan CSR Bidang Kesehatan | CSR Activities in the Health Sector

Sharing Session Penanganan HIV/AIDS
Sharing Session on Handling HIV/AIDS



Dalam rangka memperingati Hari AIDS Sedunia, Sarana Jaya dan Dharma Wanita Sarana Jaya menggelar *sharing session* dan sosialisasi untuk lawan stigma serta membangun kesadaran aksi bersama dalam upaya penanggulangan HIV/AIDS.

In commemorating World AIDS Day, Sarana Jaya and Dharma Wanita Sarana Jaya held sharing sessions and outreach to fight stigma and build awareness of joint action to overcome HIV/AIDS.



Dengan mengusung tema “Bersama Lawan Stigma, Bangun Kesadaran Aksi Bersama untuk Penanggulangan HIV/AIDS”.

With the theme “Fighting Stigma, Build Awareness to Overcome HIV/AIDS”.

Kegiatan ini bertujuan untuk memberikan pemahaman yang lebih mendalam mengenai HIV/AIDS, mendorong dialog terbuka, dan menciptakan lingkungan yang mendukung bagi individu yang hidup dengan kondisi tersebut.

The event aims to provide a deeper understanding of HIV/AIDS, encourage open dialogue, and create a supportive environment for individuals living with this condition.

Melalui implementasi kegiatan ini, Sarana Jaya telah menerapkan Poin SDGs No. 3.
Through this program's implementation, Sarana Jaya has implemented SDGs Point No. 3.



► CSR – BIDANG PENDIDIKAN | CSR – EDUCATION



Pada Perumda Pembangunan Sarana Jaya, CSR dalam bidang pendidikan dapat diartikan sebagai komitmen untuk memberikan dampak positif kepada dunia pendidikan dan masyarakat sekitarnya. Program yang dilaksanakan pada tahun 2023 meliputi Perencanaan Program Beasiswa Sarana Juara, Pelatihan dan Pengembangan, serta Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendidikan, dan program pendukung pendidikan lainnya.

At Perumda Pembangunan Sarana Jaya, CSR in the education sector can be interpreted as a commitment to positively impacting the world of education and the surrounding community. Programs implemented in 2023 include Planning for the Sarana Jaya Scholarship Program, Training and Development, Procurement of Educational Facilities and Infrastructure, and other educational support programs.

Melalui implementasi kegiatan ini, Sarana Jaya telah menerapkan Poin SDGs No. 4.

Through this program's implementation, Sarana Jaya has implemented SDGs Point No. 4.

► **Kegiatan CSR Bidang Pendidikan | CSR Activities in the Education Sector**

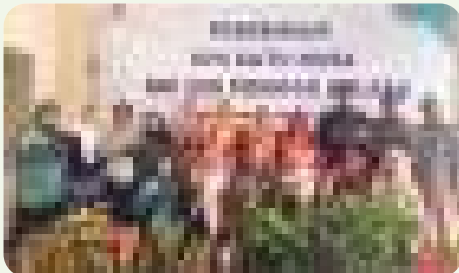
**Penyaluran Beasiswa Sarana Juara
Sarana Juara Scholarship Distribution**



Pada tahun 2023, Sarana Jaya memiliki inisiasi untuk menjalankan Kegiatan Tanggung Jawab Sosial dalam Bidang Pendidikan, yakni Program Beasiswa Sarana Juara dengan melakukan kolaborasi dan kerja sama bersama Yayasan Rumah Zakat Indonesia untuk mekanisme pelaksanaannya. In 2023, Sarana Jaya had the initiative to carry out Social Responsibility Activities in the Education Sector, i.e., the Sarana Juara Scholarship Program, by collaborating with Rumah Zakat Indonesia Foundation for the implementation mechanism.

Saat ini, seleksi kandidat penerima beasiswa sedang dalam tahap sortir dan seleksi dari Dinas Sosial DKI Jakarta pada panti asuhan binaan dan Sekolah Rakyat Ancol. The selection of scholarship recipient candidates is in the sorting and selection stage from the DKI Jakarta Social Service at the assisted orphanages and Sekolah Rakyat Ancol.

**Peresmian PAUD SPS Satu Nusa di Menara Samawa
SPS Satu Nusa PAUD Inauguration at Menara Samawa**



Mendukung Pendidikan Anak Usia Dini, Sarana Jaya bersama Kasudin Jakarta Timur Meresmikan PAUD SPS Satu Nusa di Menara Samawa, Nuansa Pondok Kelapa.

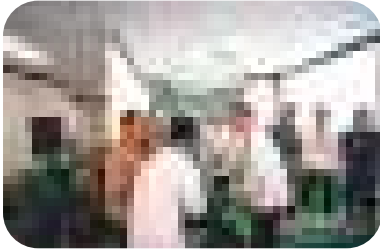
Supporting Early Childhood Education, Sarana Jaya and the East Jakarta Sub-Dept Head Inaugurated SPS Satu Nusa Early Childhood Education (PAUD) at Menara Samawa, Nuansa Pondok Kelapa.

**Penyaluran Bantuan Pembangunan Sekolah
School Construction Assistance Distribution**

Sarana Jaya juga aktif mendukung dalam menyalurkan dana bantuan dalam pembangunan sarana pendidikan, yakni sekolah dan taman baca.

Sarana Jaya also actively supports the distribution of aid funds for constructing educational facilities, i.e., schools and reading parks.

► CSR – BIDANG SOSIAL KEMASYARAKATAN | CSR – SOCIAL COMMUNITY



Perumda Pembangunan Sarana Jaya, sebagai perusahaan yang berperan dalam pembangunan, dapat melibatkan diri dalam berbagai inisiatif CSR untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Dalam implementasi Bidang Sosial Kemasyarakatan, kegiatan dan program yang dilaksanakan adalah pemberdayaan masyarakat, dukungan untuk pembangunan fasilitas kesehatan, kemitraan dengan organisasi sosial, dan masih banyak lagi.

Melalui implementasi kegiatan ini, Sarana Jaya telah menerapkan Poin SDGs No. 1 dan 2.

As a company that plays a role in development, Perumda Pembangunan Sarana Jaya can involve itself in various CSR initiatives to improve community welfare.

In implementing the Social Community Sector, the activities and programs include community empowerment, support for constructing health facilities, partnerships with social organizations, and many more.

Through this program's implementation, Sarana Jaya has implemented SDGs Point No. 1 and 2.

► Kegiatan CSR Bidang Sosial Kemasyarakatan | CSR Activities in the Social Community Sector

**Kegiatan Pembagian Sembako kepada ITMI (Ikatan Tunanetra Muslim Indonesia)
Food Distribution to ITMI (Indonesian Blind Muslim Association)**



Dalam rangka aksi kepedulian, CSR Sarana Jaya berkolaborasi dengan Bapinroh (Badan Pembinaan Rohani) Sarana Jaya dalam melaksanakan Pengajian Rutin Bulanan dan Pembagian Sembako kepada Ikatan Tunanetra Muslim Indonesia (ITMI).

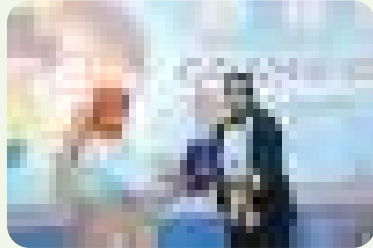
Dalam kesempatan ini, penerima manfaat dari ITMI melakukan ibadah bersama dengan Sarana Jaya dan pemberian paket sembako dan santunan. Hal ini merupakan dukungan Sarana Jaya atas perkembangan masyarakat dalam bidang sosial ekonomi untuk turut menyejahterakan masyarakat.

In one of its caring actions, CSR Sarana Jaya collaborates with Bapinroh (Spiritual Development Agency) Sarana Jaya to carry out routine monthly recitations and distribute basic necessities to the Indonesian Blind Muslim Association (ITMI).

On this occasion, beneficiaries from ITMI performed worship with Sarana Jaya and were given basic food packages and compensation. This is Sarana Jaya's support for community development in the socio-economic sector to contribute to community prosperity.

► Kegiatan CSR Bidang Kesehatan | CSR Activities in the Health Sector

Pembangunan Yayasan Onkologi Anak Indonesia (YOAI)
Development of the Indonesian Pediatric Oncology Foundation (YOAI)



Graha YOAI merupakan pusat kegiatan bagi pasien dan penyintas kanker anak serta keluarga mereka. Selain menjadi areal singgah, yaitu tempat menginap yang dekat dengan rumah sakit untuk memudahkan pengobatan bagi pasien kanker anak dan pendampingnya, terutama yang berasal dari luar kota. Graha YOAI juga dapat menjadi tempat bertemu para pasien dan penyintas kanker anak beserta orang tua mereka dengan dokter, psikolog maupun penyintas lainnya melalui Parents Club (PC), Cancer Buster Community (CBC) dan Family Supporting Group (FSG).

Graha YOAI is a center for childhood cancer patients, survivors, and their families. Apart from being a layover area, it is a place to stay close to the hospital to facilitate treatment for child cancer patients and their companions, especially those from outside the city. Graha YOAI can also be a meeting place for childhood cancer patients and survivors and their parents with doctors, psychologists, and other survivors through the Parents Club (PC), Cancer Buster Community (CBC), and Family Supporting Group (FSG).

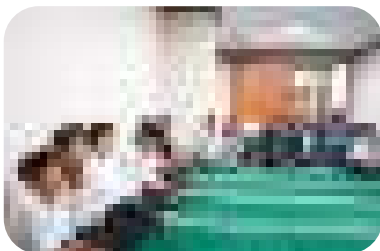
Nama Sarana Jaya sendiri diabadikan menjadi salah satu areal singgah di Graha YOAI yang akan memfasilitasi pasien kanker anak yang sedang menjalankan pengobatannya agar mobilisasinya lebih cepat dan efisien.

Sarana Jaya has also been immortalized as one of the layover areas at Graha YOAI, which will facilitate pediatric cancer patients undergoing treatment so that their mobilization is faster and more efficient.

Melalui implementasi kegiatan ini, Sarana Jaya telah menerapkan Poin SDGs No. 9. Through this program's implementation, Sarana Jaya has implemented SDGs Point No. 9.



► CSR – BIDANG KEAGAMAAN | CSR – RELIGIOUS AFFAIRS



Corporate Social Responsibility (CSR) di bidang keagamaan mencakup berbagai inisiatif yang dilakukan oleh perusahaan atau organisasi untuk mendukung atau berkontribusi pada keberagaman agama dan memahami nilai-nilai keagamaan dalam masyarakat.

Corporate Social Responsibility (CSR) in the religious affairs sector includes various initiatives by companies or organizations to support or contribute to religious diversity and understanding of religious values in society.

Inisiatif CSR di bidang keagamaan sering kali mencakup beberapa aspek Dukungan terhadap Praktik Keagamaan Karyawan, Pendanaan Program Keagamaan, Program Sosial Berbasis Keagamaan, Dialog Antarkeagamaan, dan program lainnya.

CSR initiatives in the religious sector often include Support for Employee Religious Practices, Funding for Religious Programs, Religious-Based Social Programs, Inter-Religious Dialogue, and other programs.



Melalui program ini, Sarana Jaya turut mengimplementasikan Poin SDGs No. 1 dan 2.

Through this program's implementation, Sarana Jaya has implemented SDGs Point No. 1 and 2.

► **Kegiatan CSR Keagamaan | CSR Activities in the Religious Affairs Sector**

Sarana Jaya Turut Serta Sebagai Mitra Kegiatan Jakarta Berkurban
Sarana Jaya Participates as a Partner in Jakarta Sacrificial Activities



Dalam rangka memperingati Hari Raya Idul Adha 1444 H, Perumda Pembangunan Sarana Jaya turut serta berkontribusi bersama Baznas (Bazis) DKI Jakarta melalui program Dapur Qurban di Kp. Lodan, Ancol, Jakarta Utara dalam bentuk kemasan kaleng, (30/06). Dalam semangat berbagi dan kepedulian terhadap sesama, Sarana Jaya turut menyediakan dukungan serta fasilitas yang diperlukan untuk menyukseskan pelaksanaan kegiatan kurban ini.

In commemorating Idul Adha 1444 H, Perumda Pembangunan Sarana Jaya and the DKI Jakarta Baznas (Bazis) contributed through the Dapur Qurban program at Kp. Lodan, Ancol, North Jakarta, in canned packaging, (30/06). In the spirit of sharing and caring for others, Sarana Jaya also provides the support and facilities needed to successfully carry out the sacrificial activity.

Sarana Jaya Turut Hadir dalam Acara Aktualisasi Nilai-Nilai Natal Pemprov DKI Jakarta
Sarana Jaya Attended the DKI Jakarta Provincial Government's Christmas Values Actualization



Dalam rangka aktualisasi nilai-nilai Natal di lingkungan Pemprov DKI Jakarta, Insan Sarana Jaya, dalam hal ini umat kristiani dan katolik, menghadiri Ibadah dan Perayaan Natal di Ecovention, Ancol pada Jumat (12/1). Melalui kegiatan ini telah dilaksanakan Bakti Sosial yang disalurkan kepada panti asuhan sebagai bukti kepedulian kita terhadap manusia dan sesama kita. Selanjutnya, telah terkumpul kurang lebih 1.500 pohon buah dan pohon pelindung untuk menjaga Jakarta dan menjaga keberlangsungan semesta.

To actualize Christmas values in DKI Jakarta Provincial Government, Christians and Catholics Sarana Jaya personnel attended the Christmas Service and Celebration at Ecovention, Ancol on Friday (12/1). Through this activity, social service has been carried out and distributed to orphanages to prove our concern for humans and each other. Furthermore, approximately 1,500 fruit trees and protective trees have been collected to protect Jakarta and maintain the sustainability of the universe.

Sarana Jaya Selenggarakan Program Pengajian Rutin Bulanan
Sarana Jaya Holds a Routine Monthly Recitation Program

Dalam rangka meningkatkan nilai-nilai spiritual dan bentuk kepedulian terhadap sesama, Perumda Pembangunan Sarana Jaya di bawah naungan Badan Pembinaan Rohani (Bapinroh) Sarana Jaya melaksanakan secara rutin Ibadah Pengajian di lingkungan Sarana Jaya setiap awal bulan. Pada kesempatan ini, tidak hanya melaksanakan ibadah, tetapi juga diisi dengan kegiatan Pemberian Santunan kepada anak yatim piatu, penyandang disabilitas, dan lain sebagainya. Pada tahun 2023, Sarana Jaya telah mengundang Panti Asuhan Pondok Dhuafa, Organisasi ITMI (Ikatan Tunanetra Muslim Indonesia), dan instansi lainnya untuk beribadah Bersama dan memberikan santunan serta kebutuhan lainnya.

To increase spiritual values and forms of caring for others, under the auspices of the Sarana Jaya Spiritual Development Agency (Bapinroh), Perumda Pembangunan Sarana Jaya regularly carries out Islamic Recitation Services in the Sarana Jaya environment at the beginning of every month. On this occasion, we carry out worship and provide compensation activities to orphans, people with disabilities, etc. In 2023, Sarana Jaya invited the Pondok Dhuafa Orphanage, the ITMI Organization (Indonesian Blind Muslim Association), and other agencies to worship, provide compensation, and other needs.

► **CSR – BIDANG PEMBANGUNAN | CSR – DEVELOPMENT**



Sebagai perusahaan BUMD DKI Jakarta yang menangani pembangunan dan properti, Sarana Jaya juga melakukan terobosan dan ikut andil dalam kegiatan Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan (TJSL) kepada masyarakat DKI Jakarta. Dalam melakukan implementasi bidang CSR ini, selama tahun 2023 Sarana Jaya mengikuti program Perbaikan Sarana dan Lingkungan (bantuan pembangunan rumah ibadah, fasilitas sosial umum lainnya dan lingkungan berkelanjutan).

Melalui implementasi kegiatan ini, Sarana Jaya telah menerapkan Poin SDGs No. 13 dan 15.

As a DKI Jakarta BUMD company that handles development and property, Sarana Jaya also makes breakthroughs and participates in Social and Environmental Responsibility (TJSL) activities for the people of DKI Jakarta. In implementing this CSR sector, throughout 2023, Sarana Jaya participated in the Facilities and Environmental Improvement Program (assistance in building places of worship, other public social facilities, and a sustainable environment).

Through this program's implementation, Sarana Jaya has implemented SDGs Points No. 13 and 15.

► **Kegiatan CSR Pembangunan | CSR Activities in the Development Sector**

Kontribusi Sarana Jaya dalam Penanaman Pohon di DKI Jakarta
Sarana Jaya's Contribution to Tree Planting in DKI Jakarta

Sepanjang tahun 2023, Sarana Jaya telah berkontribusi menanam pohon sebanyak 60 pohon. Hal ini menjadi dukungan Sarana Jaya dan tindakan upaya mengajak masyarakat DKI Jakarta untuk terus melestarikan lingkungan.

Throughout 2023, Sarana Jaya has contributed to planting 60 trees. This is Sarana Jaya's support and an effort to encourage the people of DKI Jakarta to continue preserving the environment.



4 **Pohon Trembesi**
Trembesi Trees

Jl. Danau Sunter Barat,
Jakarta Utara | North Jakarta



5 **Pohon Ketapang Kencana**
Ketapang Kencana Trees

Menara Kanaya Nuansa Cilangkap



46 **Pohon Bungur**
Bungur Trees

Jl. Danau Sunter Barat,
Jakarta Utara | North Jakarta



5 **Pohon Mangga Arumanis**
Arumanis Mango Trees

Menara Kanaya Nuansa Cilangkap

Implementasi Bank Sampah di Alat Produksi Sarana Jaya
Waste Bank Implementation in Sarana Jaya Production Equipment

Terletak di salah satu alat produksi Sarana Jaya, Menara Samawa melakukan pembangunan Bank Sampah. Hal ini merupakan bentuk pengembangan masyarakat atas pola keberlangsungan lingkungan dalam pengelolaan, pemilahan sampah, dan mengubah sampah menjadi cuan.

Located in one of Sarana Jaya's production facilities, Menara Samawa is building a Waste Bank. This is a form of community development of environmental sustainability patterns in managing, sorting, and turning waste into profit.

Melalui program ini, diharapkan warga Menara Samawa terus berkomitmen melaksanakan giat pengelolaan dan pengolahan sampah untuk menjaga keberlanjutan lingkungan yang bersih dan sehat.

Through this program, it is expected that Menara Samawa residents will continue to be committed to actively managing and processing waste to maintain a clean and healthy environment.

► Kegiatan CSR Pembangunan | CSR Activities in the Development Sector

Hunian Terjangkau Milik
Owned Affordable Housing

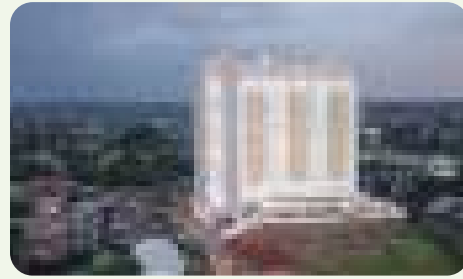
Secara keseluruhan selaras dengan lini bisnis yang dilaksanakan, Sarana Jaya turut melaksanakan implementasi Pembangunan infrastruktur yang tangguh, industri inklusif dan berkelanjutan, serta mendorong inovasi sesuai dengan SDGs Poin 9 dan Menjadikan Kota & Permukiman Inklusif, Aman, Tangguh, dan Berkelanjutan selaras dengan SDGs Poin 11.

Overall, in line with the business lines implemented, Sarana Jaya is also implementing the development of a resilient, inclusive, and sustainable infrastructure industry, as well as encouraging innovation following SDGs Point 9 and Making Cities & Settlements Inclusive, Safe, Resilient, and Sustainable in line with SDGs Point 11.



Nuansa Pondok Kelapa
Menara Samawa

Menara Samawa (Hunian Terjangkau) dibangun di atas luas lahan 6.126 m² diperuntukkan bagi warga DKI Jakarta yang belum memiliki rumah di DKI Jakarta. Terdapat 780 unit dalam Menara Samawa yang terdiri dari 3 Tipe yaitu Tipe Studio 240 unit, Tipe 1 Kamar 180 unit dan Tipe 2 Kamar 360 unit. Menara Samawa (Affordable Housing) was built on a land area of 6,126 m², intended for DKI Jakarta residents who do not have a house yet in DKI Jakarta. There are 780 units in Menara Samawa consisting of three types, i.e., 240 Studio Type units, 180 Type 1 Room units, and 360 Type 2 Room units.



Nuansa Cilangkap
Menara Kanaya

Secara keseluruhan luas lahan di Nuansa Cilangkap mencapai ± 2,9 hektar, dan untuk pembangunan Menara Kanaya sendiri dibangun di atas luas lahan ± 6.500 meter persegi, yang terdiri dari 24 lantai, dengan total 868 unit yang terdiri dari tipe studio dan 2 kamar. The land area in Nuansa Cilangkap reaches ±2.9 hectares, and the construction of the Menara Kanaya was built on a land area of ± 6,500 square meters, consisting of 24 floors, with a total of 868 units consisting of studio and 2-bedroom types.

Evaluasi atas Kinerja CSR Perusahaan [GRI 413-1]

Untuk memastikan bahwa kegiatan CSR yang dilakukan Perusahaan kepada Masyarakat telah tepat sasaran dan sesuai dengan perencanaan yang ditetapkan pada saat awal penyusunan program, Sarana Jaya melakukan kegiatan evaluasi dalam bentuk pelaporan *monitoring* dan evaluasi berkala sebagai laporan pertanggung jawaban atas kegiatan CSR yang kemudian akan dilaporkan kepada Direksi Perusahaan. Kegiatan evaluasi ini merupakan kegiatan *mandatory* yang akan selalu dilaksanakan perusahaan setiap kegiatan CSR telah selesai dilaksanakan. Adapun hasil dari kegiatan evaluasi ini kemudian akan dipergunakan perusahaan untuk membuat program CSR selanjutnya sehingga setiap program CSR yang dilakukan mengandung progress baik berupa skala program maupun sasaran manfaat dan bentuk program.

Realisasi Anggaran CSR Tahun 2023



Pada tahun 2023, Sarana Jaya mengalokasikan anggaran sebesar Rp3.410 juta untuk kegiatan CSR, dengan realisasi sebesar Rp2.145 juta.




Penanganan Pengaduan Masyarakat [GRI 2-27, 3-3, 413-1] [OJK F.24]



Untuk penanganan pengaduan masyarakat, Sarana Jaya menyediakan beberapa saluran pengaduan yang dapat diakses oleh masyarakat yakni:




Perumda Pembangunan Sarana Jaya

Gedung Sarana Jaya Lt. 3
Jl. Budi Kemuliaan I No. 1,
Jakarta Pusat 10110
Sarana Jaya Building 3rd Floor
Jl. Budi Kemuliaan I No. 1,
Central Jakarta 10110

 info@sarana-jaya.co.id
 +62 21 352 2667

 Sarana Jaya
 @perumdasaranjaya
 @pembasaranajaya

 +62 21 385 3960
 www.sarana-jaya.co.id

 Perumda Pembangunan Sarana Jaya
 Perumda Sarana Jaya
 @perumdasaranjaya

CSR Performance Evaluation [GRI 413-1]

To ensure that the CSR activities carried out by the Company for the Community are on target and follow the plan established during the program preparation, Sarana Jaya evaluates the form of periodic monitoring and evaluation reporting as an accountability report on CSR activities which will then be reported to the Board of Directors. Evaluation is a mandatory activity carried out by the Company every time CSR activities are completed. The Company will use the evaluation results to create future CSR programs so that each CSR program contains progress in the form of program scale or target benefits and program form.

CSR Budget Realization in 2023

In 2023, Sarana Jaya allocated Rp3,410 million for CSR activities with a total fund realization of Rp2,145 million.

Public Complaint Handling [GRI 2-27, 3-3, 413-1][OJK F.24]

Sarana Jaya provides several channels to handle complaints that can be accessed by the public, namely:

Sepanjang tahun 2023, Sarana Jaya mendapatkan 8 pengaduan dari masyarakat dimana keseluruhan pengaduan tersebut telah selesai ditangani. Adapun detail informasi pengaduan tersebut mencakup:

Throughout 2023, Sarana Jaya received eight complaints from the public and all of them had been resolved. The details of the complaints include:

No.	Keluhan/Aduan Manajemen Hubungan Pelanggan (CRM) Complaints to Customer Relationship Management	Tanggal Masuk Aduan Complaint Date	Tanggal Tindak Lanjut Follow-Up Date	Status Status
1.	Pelayanan Perhubungan Transportation Services	31 Januari 2023 January 31, 2023	31 Januari 2023 January 31, 2023	Sudah Ditindaklanjuti Resolved
2.	Keluhan Fasilitas Gedung Pemda (Sekolah, Kantor) Complaints about Regional Government Building Facilities (Schools, Offices)	6 Februari 2023 February 6, 2023	7 Februari 2023 February 7, 2023	Sudah Ditindaklanjuti Resolved
3.	Gangguan dan Kebisingan Distractions and Noise	8 Maret 2023 March 8, 2023	9 Maret 2023 March 9, 2023	Sudah Ditindaklanjuti Resolved
4.	Pekerja Penanganan Prasarana dan Sarana Umum Kelurahan (PPSU) Village Infrastructure and Public Facilities Handling Workers (PPSU)	30 Mei 2023 May 30, 2023	1 Juni 2023 June 1, 2023	Sudah Ditindaklanjuti Resolved
5.	Perizinan Licensing	1 Juli 2023 July 1, 2023	18 Juli 2023 July 18, 2023	Sudah Ditindaklanjuti Resolved
6.	Tata Ruang dan Bangunan Spatial Planning and Building	3 Juli 2023 July 3, 2023	17 Juli 2023 July 17, 2023	Sudah Ditindaklanjuti Resolved
7.	Keluhan Fasilitas Gedung Pemda (Sekolah, Kantor) Complaints about Regional Government Building Facilities (Schools, Offices)	2 Oktober 2023 October 2, 2023	17 Oktober 2023 October 17, 2023	Sudah Ditindaklanjuti Resolved
8.	Jalan - Pagar Pemisah Road - Separation Fence	10 November 2023 November 10, 2023	17 November 2023 November 17, 2023	Sudah Ditindaklanjuti Resolved

VERIFIKASI TERTULIS DARI PIHAK INDEPENDEN [0JK G.1]

WRITTEN VERIFICATION FROM AN INDEPENDENT PARTY

Laporan Keberlanjutan ini belum diverifikasi oleh Penyedia Jasa Assurance (*Assurance Services Provider*) yang independen. Namun demikian, Perumda Pembangunan Sarana Jaya (menjamin bahwa seluruh informasi yang diungkapkan dalam laporan ini adalah benar, akurat, dan faktual.

This Sustainability Report has not been verified by an independent Assurance Services Provider. However, Perumda Pembangunan Sarana Jaya assures that all information disclosed in this report is true, accurate and factual.

TANGGAPAN TERHADAP UMPAN BALIK LAPORAN TAHUN SEBELUMNYA [0JK G.3]

RESPONSE TO THE PREVIOUS YEAR'S REPORT FEEDBACK

Selama tahun 2023, Perumda Pembangunan Sarana Jaya tidak mendapat tanggapan dari para pemangku kepentingan berkaitan dengan Laporan Keberlanjutan 2022. Namun demikian, Perusahaan senantiasa berupaya untuk menyempurnakan isi laporan agar memenuhi panduan penulisan yaitu POJK No. 51/POJK.03/2017.

Throughout 2023, Perumda Pembangunan Sarana Jaya did not receive any feedback from stakeholders regarding the 2022 Sustainability Report. Nevertheless, the Company remains committed to improving the contents of the report to ensure compliance with the writing guidelines outlined in POJK No. 51/POJK.03/2017.

LEMBAR UMPAN BALIK [0]K G.2]

FEEDBACK SHEET

Terima kasih kepada Bapak/Ibu/Saudara yang telah membaca Laporan Keberlanjutan Perumda Pembangunan Sarana Jaya Tahun 2023. Untuk meningkatkan kualitas isi Laporan Keberlanjutan pada tahun-tahun mendatang, kami berharap Bapak/Ibu/Saudara bersedia untuk mengisi Lembar Umpan Balik ini dengan melingkari salah satu jawaban dan mengisi titik-titik yang tersedia, kemudian mengirimkannya kepada kami.

Thank you for reading the 2023 Sustainability Report of Perumda Pembangunan Sarana Jaya. To improve the quality of the contents of the Sustainability Report in the coming years, it is our hope that you will fill out this Feedback Sheet by circling any one answer and fill in the blanks provided, then send it to us.

- Laporan Keberlanjutan ini sudah memberikan informasi yang jelas mengenai kinerja ekonomi, sosial dan lingkungan yang dilakukan oleh Bank:
This Sustainability Report has provided clear information regarding the economic, social and environmental performance carried out by the Bank:
 Setuju *Agree* Tidak setuju *Don't agree* Tidak tahu *Don't know*
- Laporan Keberlanjutan ini sudah memberikan informasi yang jelas mengenai pemenuhan tanggung jawab sosial dan lingkungan Bank:
This Sustainability Report has provided clear information regarding the fulfillment of the Bank's social and environmental responsibilities:
 Setuju *Agree* Tidak setuju *Don't agree* Tidak tahu *Don't know*
- Materi dan data dalam Laporan Keberlanjutan ini mudah dimengerti dan dipahami.
The material and data in this Sustainability Report are easy to understand.
 Setuju *Agree* Tidak setuju *Don't agree* Tidak tahu *Don't know*
- Materi dan data dalam Laporan Keberlanjutan ini sudah cukup lengkap.
The material and data in this Sustainability Report are quite comprehensive.
 Setuju *Agree* Tidak setuju *Don't agree* Tidak tahu *Don't know*
- Apakah desain, tata letak, grafis dan foto-foto dalam Laporan Keberlanjutan ini sudah bagus?
Are the designs, layout, graphics and photos in this Sustainability Report good?
 Sudah bagus *Good* Belum bagus *Not Good* Tidak tahu *Don't know*
- Informasi apa yang paling bermanfaat dari Laporan Keberlanjutan ini?
What is the most useful information from this Sustainability Report?
.....
- Informasi apa yang dinilai kurang bermanfaat dari Laporan Keberlanjutan ini?
What information is considered less useful in this Sustainability Report?
.....
- Informasi apa yang dinilai masih kurang dari Laporan Keberlanjutan ini dan perlu ditambahkan pada Laporan Keberlanjutan mendatang?
What information is considered lacking in this Sustainability Report and needs to be added to the next Sustainability Report?
.....

Identitas Pengirim:

Sender Identity

Nama:

Name:

.....

Email:

Email:

.....

Identifikasi menurut kategori pemangku kepentingan (beri tanda ✓ yang sesuai):

Identification by stakeholder category (mark ✓ as appropriate):

Nasabah dan klien

Customer and client

Investor

Investor

Regulator

Regulator

Masyarakat

Society

Lainnya

Other

Mohon Lembar Umpan Balik ini dikirimkan ke:

Please send this Feedback Sheet to:

Sekretaris Perusahaan

Corporate Secretary

Perumda Pembangunan Sarana Jaya

Gedung Sarana Jaya Lt. 3

Jl. Budi Kemuliaan I No. 1 Kel. Gambir

Kec. Gambir, Jakarta Pusat 10110

Indonesia

Telepon: +62 21 352 2667

Email: Info@Sarana-jaya.co.id

Website: www.sarana-jaya.co.id

REFERENSI SILANG KRITERIA ARA 2023

CROSS REFERENCE TO THE 2023 ARA CRITERIA

No.	Isi Laporan Tahunan Annual Report Content	Halaman Page
1	Uraian Isi Laporan Tahunan Description of Annual Report Contents	
1	Laporan keuangan tahunan yang telah diaudit Audited annual financial reports	438
2	Surat pernyataan anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris tentang tanggung jawab atas Laporan Tahunan Statements from members of the Board of Directors and members of the Board of Commissioners regarding their responsibilities for the Annual Report	57
2	Ikhtisar Data Keuangan Penting Important Financial Data Highlights	
Informasi keuangan yang disajikan dalam bentuk perbandingan selama 3 (tiga) tahun buku atau sejak memulai usahanya jika Perusahaan tersebut menjalankan kegiatan usahanya kurang dari 3 (tiga) tahun Financial information presented in comparative form for 3 (three) financial years or since starting its business if the company has been running its business activities for less than 3 (three) years		
1	Rasio laba (rugi) terhadap jumlah aset Profit (loss) to total assets ratio	13
2	Rasio laba (rugi) terhadap ekuitas Profit (loss) to equity ratio	13
3	Rasio laba (rugi) terhadap pendapatan/penjualan Profit (loss) to revenue/sales ratio	13
4	Rasio lancar Current ratio	13
5	Rasio liabilitas terhadap ekuitas Liability to equity ratio	13
6	Rasio liabilitas terhadap jumlah aset Ratio of liabilities to total assets	13
7	Informasi dan rasio keuangan lainnya yang relevan dengan Perusahaan dan jenis industrinya Information and other financial ratios that are relevant to the Company and the type of industry	13
3	Informasi Saham (Jika Ada) Stock Information (If Available)	
1	Saham yang telah diterbitkan untuk setiap masa triwulan yang disajikan dalam bentuk perbandingan selama 2 (dua) tahun buku terakhir Shares issued for each quarter are presented in comparative form for the last 2 (two) fiscal years	14
a)	Jumlah saham yang beredar Number of outstanding shares	
b)	Kapitalisasi pasar berdasarkan harga pada bursa efek tempat saham dicatitkan Market capitalization is based on the price on the stock exchange where the shares are listed	
c)	Harga saham tertinggi, terendah, dan penutupan berdasarkan harga pada bursa efek tempat saham dicatitkan The highest, lowest and closing share prices are based on the price on the stock exchange where the shares are listed	
d)	Volume perdagangan pada bursa efek tempat saham dicatitkan Trading volume on the stock exchange where the shares are listed	
2	Dalam hal terjadi aksi korporasi yang menyebabkan terjadinya perubahan pada saham, seperti pemecahan saham, penggabungan saham, dividen saham, saham bonus, perubahan nilai nominal saham, penerbitan efek konversi, serta penambahan dan pengurangan modal In the event of a corporate action that results in changes to shares, such as stock splits, share mergers, stock dividends, bonus shares, changes in the nominal value of shares, issuance of convertible securities, as well as additions and reductions in capital	14

No.	Isi Laporan Tahunan Annual Report Content	Halaman Page
	a) Tanggal pelaksanaan aksi korporasi The implementation date of the corporate action	
	b) Rasio pemecahan saham (<i>stock split</i>), penggabungan saham (<i>reverse stock</i>), dividen saham, saham bonus, jumlah efek konversi yang diterbitkan, dan perubahan nilai nominal saham Stock split ratios, reverse stock ratios, stock dividends, bonus shares, number of convertible securities issued, and changes in share nominal value	
	c) Jumlah saham beredar sebelum dan sesudah aksi korporasi The number of outstanding shares before and after the corporate action	
	d) Jumlah efek konversi yang dilaksanakan (jika ada) Number of effect conversions executed (if any)	
	e) Harga saham sebelum dan sesudah aksi korporasi Stock price before and after corporate action	
3	Dalam hal terjadi penghentian sementara perdagangan saham (<i>suspension</i>) dan/atau pembatalan pencatatan saham (<i>delisting</i>) dalam tahun buku, dijelaskan alasan penghentian sementara perdagangan saham (<i>suspension</i>) dan/atau pembatalan pencatatan saham (<i>delisting</i>) tersebut In the event of a temporary suspension of share trading (<i>suspension</i>) and/or delisting of shares during the financial year, the reasons for the temporary suspension of share trading (<i>suspension</i>) and/or delisting of shares (<i>delisting</i>) are explained	14
4	Dalam hal penghentian sementara perdagangan saham (<i>suspension</i>) sebagaimana dimaksud pada angka 3) dan/atau proses pembatalan pencatatan saham (<i>delisting</i>) masih berlangsung hingga akhir periode Laporan Tahunan, dijelaskan tindakan yang dilakukan untuk menyelesaikan penghentian sementara perdagangan saham (<i>suspension</i>) dan/atau pembatalan pencatatan saham (<i>delisting</i>) tersebut In the event that the temporary suspension of share trading (<i>suspension</i>) as referred to in number 3) and/or the process of canceling the listing of shares (<i>delisting</i>) is still ongoing until the end of the Annual Report period, explained the actions taken to resolve the temporary suspension of share trading (<i>suspension</i>) and/or delisting of said shares	14
4 Laporan Direksi Board of Directors Report		
1	Kinerja Perusahaan Company performance	
	a) Strategi dan kebijakan strategis Perusahaan Strategy and strategic policies of the Company	44-45
	b) Peranan Direksi dalam perumusan strategi dan kebijakan strategis Perusahaan The role of the Board of Directors in the formulation of the Company's strategy and strategic policies	45-46
	c) Proses yang dilakukan Direksi untuk memastikan implementasi strategi Process carried out by the Board of Directors to ensure strategy implementation	45-46
	d) Perbandingan antara hasil yang dicapai dengan yang ditargetkan Perusahaan Comparison between the results achieved with the Company's target	46-47
	e) Kendala yang dihadapi Faced obstacles	47-49
2	Gambaran tentang prospek usaha Perusahaan An overview of the Company's business prospects	50-51
3	Penerapan governansi Perusahaan Implementation of corporate governance	51-52
5 Laporan Dewan Komisaris Board of Commissioners Report		
1	Penilaian terhadap kinerja direksi mengenai pengelolaan Perusahaan, termasuk pengawasan Dewan Komisaris dalam perumusan dan implementasi strategi Perusahaan Assessment of the performance of the directors regarding the management of the Company, including the supervision of the Board of Commissioners in the formulation and implementation of the Company's strategy	31-34
2	Pandangan atas prospek usaha Perusahaan yang disusun oleh Direksi Views on the Company's business prospects compiled by the Board of Directors	34-36
3	Pandangan atas penerapan governansi Perusahaan Views on the implementation of corporate governance	36-38

No.	Isi Laporan Tahunan Annual Report Content	Halaman Page
6 Profil Perusahaan Company Profile		
1	Akses terhadap Perusahaan termasuk kantor cabang atau kantor perwakilan yang memungkinkan masyarakat dapat memperoleh informasi mengenai Perusahaan Access to the Company, including branch offices or representative offices that enable the public to obtain information about the Company	60
	a) Alamat Address	
	b) Nomor telepon Phone number	
	c) Alamat surat elektronik E-mail address	
	d) Alamat situs web Website address	
2	Riwayat singkat Perusahaan Company brief history	61
3	Visi dan misi Perusahaan serta budaya perusahaan (<i>corporate culture</i>) atau nilai-nilai perusahaan; Company vision and mission as well as corporate culture or corporate values;	66
4	Kegiatan usaha menurut anggaran dasar terakhir, kegiatan usaha yang dijalankan pada tahun buku, serta jenis barang dan/atau jasa yang dihasilkan Business activities according to the latest articles of association, business activities carried out in the financial year, and types of goods and/or services produced	68-69
5	Wilayah operasional Perusahaan; wilayah operasional merupakan wilayah atau daerah pelaksanaan kegiatan operasional atau jangkauan dari kegiatan operasional Perusahaan Company operational area; operational area is the area or area of implementation of operational activities or the scope of the company's operational activities	72-73
6	Struktur organisasi Perusahaan dalam bentuk bagan, paling sedikit sampai dengan struktur 1 (satu) tingkat di bawah Direksi termasuk komite di bawah Direksi (jika ada) dan komite di bawah Dewan Komisaris, disertai dengan nama dan jabatan Company organizational structure in the form of a chart, at least until a structure of 1 (one) level below the Board of Directors including committees under the Board of Directors (if any) and committees under the Board of Commissioners, accompanied by names and positions	74-78
7	Daftar keanggotaan asosiasi industri baik dalam skala nasional maupun internasional yang berkaitan dengan penerapan keuangan berkelanjutan List of industry association memberships both on a national and international scale related to the implementation of sustainable finance	78
8	Jumlah karyawan menurut jenis kelamin, jabatan, usia, tingkat pendidikan, dan status ketenagakerjaan (tetap/kontrak) dalam tahun buku; Pengungkapan informasi dapat disajikan dalam bentuk tabel Number of employees by gender, position, age, educational level, and employment status (permanent/contract) in the financial year; Disclosure of information can be presented in tabular form	88-91
9	Informasi penggunaan jasa akuntan publik (AP) dan kantor akuntan publik (KAP) beserta jaringan/asosiasi/aliansinya meliputi: Information on the use of public accounting services (AP) and public accounting firms (KAP) and its networks/associations/alliances include:	103
	a) Nama dan alamat Name and address	
	b) Periode penugasan Assignment period	
	c) Informasi jasa audit yang diberikan; Non-audit service information provided;	
	d) Biaya jasa (<i>fee</i>) audit untuk masing-masing penugasan yang diberikan selama tahun buku; dan Audit fee (<i>fee</i>) for each assignment given during the financial year; and	
	e) Informasi jasa non audit yang diberikan; Audit service information provided;	

No.	Isi Laporan Tahunan Annual Report Content	Halaman Page
	f) Biaya jasa (<i>fee</i>) non audit untuk masing-masing penugasan yang diberikan selama tahun buku; dan Non-audit service fee (<i>fee</i>) for each assignment given during the financial year; and	
	g) Catatan: dalam hal AP dan KAP beserta jaringan/asosiasi/aliansinya, yang ditunjuk tidak memberikan jasa non audit, maka diungkapkan mengenai informasi tersebut (atas poin 6.9.e dan f) Note: in the event that the designated AP and KAP and their network/association/alliance do not provide non-audit services, the information shall be disclosed (on point 6.9.e and f)	
10	Nama dan alamat lembaga dan/atau profesi penunjang pasar modal selain AP dan KAP Names and addresses of institutions and/or other capital market supporting professions beside AP and KAP	104
7	Profil Direksi Board of Directors Profile	
1	Nama dan jabatan yang sesuai dengan tugas dan tanggung jawab Name and position in accordance with the duties and responsibilities	81-83
2	Usia Age	81-83
3	Kewarganegaraan Citizenship	81-83
4	Riwayat pendidikan dan/atau sertifikasi Educational history and/or certification	81-83
5	Riwayat jabatan, meliputi informasi Position history, including information	81-83
	a) Dasar hukum pengangkatan sebagai anggota Direksi pada Perusahaan yang bersangkutan Legal basis for appointment as a member of the Board of Directors of the concerned Company	
	b) Rangkap jabatan, baik sebagai anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris, dan/atau anggota komite serta jabatan lainnya baik di dalam maupun di luar Perusahaan. Concurrent positions, both as members of the Board of Directors, members of the Board of Commissioners, and/or committee members as well as other positions both inside and outside the Company.	
	c) Catatan: Dalam hal anggota Direksi tidak memiliki rangkap jabatan, maka diungkapkan mengenai hal tersebut (atas poin 7.5.b) Note: In the event that members of the Board of Directors do not have concurrent positions, then disclosed regarding this matter (on point 7.5.b)	
	d) Pengalaman kerja beserta periode waktunya baik di dalam maupun di luar Perusahaan Work experience and time period both inside and outside Company	
6	Hubungan afiliasi dengan anggota Direksi lainnya, anggota Dewan Komisaris, pemegang saham utama, dan pengendali baik langsung maupun tidak langsung sampai kepada pemilik individu, meliputi nama pihak yang terafiliasi. Affiliation with other members of the Board of Directors, members of the Board of Commissioners, major shareholders and controllers, either directly or indirectly to individual owners, including names of affiliated parties.	81-83
Catatan: Dalam hal anggota Direksi tidak memiliki hubungan afiliasi, maka Perusahaan mengungkapkan hal tersebut (atas poin 7.6) Note: In the event that members of the Board of Directors have no affiliation, then the company discloses regarding this matter (on point 7.6)		
7	Perubahan komposisi anggota Direksi dan alasan perubahannya. Changes in the composition of members of the Board of Directors and reasons for the changes.	79-80
	Catatan: (atas poin 7.7) Note: (to point 7.7)	
	1. Dalam hal tidak terdapat perubahan komposisi anggota Direksi, maka diungkapkan mengenai hal tersebut In the event that there is no change in the composition of the members of the Board of Directors, then this is disclosed	
	2. Dalam hal perubahan komposisi anggota Direksi terjadi setelah tahun buku berakhir sampai dengan batas waktu penyampaian Laporan Tahunan, susunan yang dicantumkan dalam Laporan Tahunan adalah susunan anggota Direksi yang terakhir dan sebelumnya; In the event that changes in the composition of the members of the Board of Directors occur after the end of the financial year until the deadline for submission of the Annual Report, the composition included in the Annual Report is the composition of the last and previous members of the Board of Directors;	

No.	Isi Laporan Tahunan Annual Report Content	Halaman Page
8	Profil Dewan Komisaris Board of Commissioners Profile	
1	Nama dan jabatan Name and position	86-87
2	Usia Age	86-87
3	Kewarganegaraan Citizenship	86-87
4	Riwayat pendidikan dan/atau sertifikasi Educational history and/or certification	86-87
5	Riwayat jabatan, meliputi informasi Position history, including information	86-87
	a) Dasar hukum pengangkatan sebagai anggota Dewan Komisaris Legal basis for appointment as a member of the Board of Commissioners	
	b) Dasar hukum pengangkatan pertama kali sebagai anggota Dewan Komisaris yang merupakan komisaris independen pada Perusahaan yang bersangkutan The legal basis for the first appointment as a member of the Board of Commissioners who is an independent commissioner in the concerned company	
	c) Rangkap jabatan, baik sebagai anggota Dewan Komisaris, anggota Direksi, dan/atau anggota komite serta jabatan lainnya baik di dalam maupun di luar Perusahaan Concurrent positions, both as members of the Board of Commissioners, members of the Board of Directors, and/or committee members as well as other positions both inside and outside the Company	
	Catatan: Dalam hal anggota Dewan Komisaris tidak memiliki rangkap jabatan, maka diungkapkan mengenai hal tersebut (atas poin 8.5.c) Note: In the event that members of the Board of Commissioners do not have concurrent position, then it is disclosed regarding this matter (on point 8.5.c)	
	d) Pengalaman kerja beserta periode waktunya baik di dalam maupun di luar Perusahaan Work experience and time period both inside and outside Company	
6	Hubungan afiliasi dengan anggota Dewan Komisaris lainnya, pemegang saham utama, dan pengendali baik langsung maupun tidak langsung sampai kepada pemilik individu, meliputi nama pihak yang terafiliasi; Affiliation with other members of the Board of Commissioners, major shareholders and controllers, either directly or indirectly to individual owners, including names of affiliated parties;	86-87
	Catatan: Dalam hal anggota Dewan Komisaris tidak memiliki hubungan afiliasi, maka Perusahaan mengungkapkan hal tersebut (atas poin 8.6) Note: In the event that members of the Board of Commissioners have no affiliated relationship, then the Company discloses regarding this matter (on point 8.6)	
7	Pernyataan independensi komisaris independen dalam hal komisaris independen telah menjabat lebih dari 2 (dua) periode Declaration of independence of the independent commissioner in the event that the independent commissioner has served more than 2 (two) terms	87
8	Perubahan komposisi anggota Dewan Komisaris dan alasan perubahannya Changes in the composition of the members of the Board of Commissioners and the reasons for the changes	84-85
Catatan: (atas poin 8.8) Note: (to point 8.8)		
1. Dalam hal tidak terdapat perubahan komposisi anggota Dewan Komisaris, maka diungkapkan mengenai hal tersebut In the event that there is no change in the composition of the members of the Board of Commissioners, this will be disclosed		
2. Dalam hal perubahan komposisi anggota Direksi terjadi setelah tahun buku berakhir sampai dengan batas waktu penyampaian Laporan Tahunan, susunan yang dicantumkan dalam Laporan Tahunan adalah susunan anggota Dewan Komisaris yang terakhir dan sebelumnya; In the event that changes in the composition of the members of the Board of Directors occur after the end of the financial year until the deadline for submitting the Annual Report, the composition included in the Annual Report is the composition of the last and previous members of the Board of Commissioners;		

No.	Isi Laporan Tahunan Annual Report Content	Halaman Page
9	Informasi pemegang saham Shareholder information	
1	<p>Nama pemegang saham dan persentase kepemilikan pada awal dan akhir tahun buku, yang terdiri dari informasi mengenai: Name of shareholder and percentage of ownership at beginning and end of financial year, which consists of information regarding:</p> <p>a) Pemegang saham yang memiliki 5% (lima persen) atau lebih saham Perusahaan Shareholders who own 5% (five percent) or more of the Company's shares</p> <p>b) Anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris yang memiliki saham Perusahaan. Members of the Board of Directors and members of the Board of Commissioners who own Company's shares</p> <p>Catatan: Dalam hal seluruh anggota Direksi dan/atau seluruh anggota Dewan Komisaris tidak memiliki saham, maka diungkapkan mengenai hal tersebut (atas poin 9.1.b) Note: In the case of all members of the Board of Directors and/or all members of the Board of Commissioners do not own shares, this will be disclosed (on point 9.1.b)</p> <p>c) Kelompok pemegang saham masyarakat, yaitu kelompok pemegang saham yang masing-masing memiliki kurang dari 5% (lima persen) saham Emiten atau Perusahaan Publik Group of public shareholders, namely groups of shareholders who each own less than 5% (five percent) of the shares of the Issuer or Public Company</p>	96
2	<p>Persentase kepemilikan tidak langsung atas saham Perusahaan oleh anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris pada awal dan akhir tahun buku, termasuk informasi mengenai pemegang saham yang terdaftar dalam daftar pemegang saham untuk kepentingan kepemilikan tidak langsung anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris; Percentage of indirect ownership of the Company's shares by members of the Board of Directors and members of the Board of Commissioners at the beginning and end of the financial year, including information regarding shareholders registered in the register of shareholders for the benefit of indirect ownership by members of the Board of Directors and members of the Board of Commissioners;</p> <p>Catatan: Dalam hal seluruh anggota Direksi dan/atau seluruh anggota Dewan Komisaris tidak memiliki kepemilikan tidak langsung atas saham Perusahaan, maka diungkapkan mengenai hal tersebut (atas poin 9.2) Note: In the case of all members of the Board of Directors and/or all members of Board of Commissioners does not have indirect ownership of Company shares, then disclose regarding this matter (on point 9.2)</p>	96
3	<p>Jumlah pemegang saham dan persentase kepemilikan, berdasarkan klasifikasi Number of shareholders and percentage of ownership, based on classification</p> <p>a) Kepemilikan institusi lokal Local institutional ownership</p> <p>b) Kepemilikan institusi asing Foreign institutional ownership</p> <p>c) Kepemilikan individu lokal Local individual ownership</p> <p>d) Kepemilikan individu asing Foreign individual ownership</p>	96
4	<p>Informasi mengenai pemegang saham utama dan pengendali Perusahaan, baik langsung maupun tidak langsung, sampai kepada pemilik individu, yang disajikan dalam bentuk skema atau bagan; Information regarding the major and controlling shareholders of the Company, either directly or indirectly, to the individual owners, presented in the form of a schematic or chart;</p>	96
5	<p>Nama entitas anak, perusahaan asosiasi, perusahaan ventura bersama dimana Perusahaan memiliki pengendalian bersama entitas (jika ada), beserta persentase kepemilikan saham, bidang usaha, total aset, dan status operasi entitas anak, perusahaan asosiasi, perusahaan ventura bersama. Untuk entitas anak, ditambahkan informasi mengenai alamat entitas anak tersebut Names of subsidiaries, associated companies, joint venture companies where the Company has joint control (if any), along with the percentage of share ownership, line of business, total assets, and operating status of subsidiaries, associated companies, joint venture companies. For subsidiaries, information regarding the address of the subsidiary is added</p>	97-101

No.	Isi Laporan Tahunan Annual Report Content	Halaman Page
6	<p>Kronologis pencatatan saham, jumlah saham, nilai nominal, dan harga penawaran dari awal pencatatan hingga akhir tahun buku serta nama bursa efek dimana saham Emiten atau Perusahaan Publik dicatatkan, termasuk pemecahan saham (<i>stock split</i>), penggabungan saham (<i>reverse stock</i>), dividen saham, saham bonus, dan perubahan nilai nominal saham, pelaksanaan efek konversi, pelaksanaan penambahan dan pengurangan modal (jika ada)</p> <p>Chronology of listing of shares, number of shares, nominal value, and offering price from the beginning of listing to the end of the financial year as well as the name of the stock exchange where the Issuer's or Public Company's shares are listed, including stock splits, reverse stock, stock dividends, bonus shares, and changes in the nominal value of shares, exercise conversion effect, increase and decrease capital (if any)</p>	102
7	<p>Informasi pencatatan efek lainnya selain efek sebagaimana dimaksud sebelumnya, yang belum jatuh tempo pada tahun buku paling sedikit memuat nama efek, tahun penerbitan, tingkat suku bunga/imal hasil, tanggal jatuh tempo, nilai penawaran, dan peringkat efek (jika ada)</p> <p>Information on the listing of other securities other than the securities referred to previously, which are not yet due in the financial year, at least contains the name of the securities, year of issuance, interest rate/yield, maturity date, offering value, and rating of the securities (if any).</p>	102
10	Analisa dan Pembahasan Manajemen Management Discussion and Analysis	
1	<p>Tinjauan operasi per segmen usaha sesuai dengan jenis industri Perusahaan</p> <p>Operational review per business segment according to the type of the Company's industry</p>	115-132
	a) Produksi, yang meliputi proses, kapasitas, dan perkembangannya Production, which includes process, capacity, and development	
	b) Pendapatan/penjualan Revenue/sales	
	c) Profitabilitas Profitability	
2	<p>Kinerja keuangan komprehensif yang mencakup perbandingan kinerja keuangan dalam 2 (dua) tahun buku terakhir, penjelasan tentang penyebab adanya perubahan dan dampak perubahan tersebut</p> <p>Comprehensive financial performance which includes a comparison of financial performance in the last 2 (two) financial years, an explanation of the causes of the changes and the impact of these changes</p>	
	a) Aset lancar, aset tidak lancar, dan total aset Current assets, non-current assets, and total assets	133-135
	b) Liabilitas jangka pendek, liabilitas jangka panjang, dan total liabilitas Short term liabilities, long term liabilities and total liabilities	135
	c) Ekuitas Equity	135
	d) Pendapatan/penjualan, beban, laba (rugi), penghasilan komprehensif lain, dan total laba (rugi), komprehensif; dan Revenue/sales, expenses, profit (loss), other comprehensive income, and total profit (loss), comprehensive; and	136-137
	e) Arus kas Cash flow	138-139
3	<p>Kemampuan membayar utang atau kewajiban dengan menyajikan perhitungan rasio yang relevan</p> <p>Ability to pay debts or obligations by presenting the calculation of the relevant ratio</p>	139-140
4	<p>Tingkat kolektibilitas piutang Perusahaan dengan menyajikan perhitungan rasio yang relevan</p> <p>The level of collectibility of the company's receivables by presenting the calculation of the relevant ratio</p>	141
5	<p>Struktur modal (<i>capital structure</i>) dan kebijakan manajemen atas struktur modal disertai dasar penentuan kebijakan dimaksud</p> <p>The capital structure and management policies on the capital structure are accompanied by the basis for determining the said policies</p>	142-144
6	<p>Bahasan mengenai ikatan yang material untuk investasi barang modal dengan penjelasan</p> <p>Discussion regarding material commitments for investment in capital goods with explanations</p>	144
	a) Tujuan dari ikatan tersebut The purpose of the bon	
	b) Sumber dana yang diharapkan untuk memenuhi ikatan tersebut Source of funds expected to fulfill the bond	

No.	Isi Laporan Tahunan Annual Report Content	Halaman Page
	c) Mata uang yang menjadi denominasi The currency to be denominated	
	d) Langkah yang direncanakan Perusahaan untuk melindungi risiko dari posisi mata uang asing yang terkait Changes planned steps to protect the risks from related foreign currency positions	
7	Bahasan mengenai investasi barang modal yang yang direalisasikan dalam tahun buku terakhir: Discussion on investment in capital goods realized in the last financial year:	145
	a) Jenis investasi barang modal Types of investment in capital goods	
	b) Tujuan investasi barang modal The purpose of investing in capital goods	
	c) Nilai investasi barang modal yang dikeluarkan The investment value of capital goods issued	
8	Prospek usaha dari Perusahaan dikaitkan dengan kondisi industri, ekonomi secara umum dan pasar internasional disertai data pendukung kuantitatif dari sumber data yang layak dipercaya The business prospects of the Company are related to industrial conditions, the general economy and international markets accompanied by quantitative supporting data from reliable data sources	148-149
9	Perbandingan antara target/proyeksi pada awal tahun buku dengan hasil yang dicapai (realisasi) Comparison between targets/projections at the beginning of the financial year with the results achieved (realization)	146
	a) Pendapatan/penjualan Revenue/sales	
	b) Laba (rugi) Profit and loss	
	c) Struktur modal (<i>capital structure</i>) Capital structure	
	d) Hal lainnya yang dianggap penting bagi Perusahaan Other things that are considered important for the Company	
10	Target/proyeksi yang ingin dicapai Perusahaan untuk 1 (satu) tahun mendatang, Targets/projections to be achieved by the Company for the next 1 (one) year	146
	a) Pendapatan/penjualan Revenue/sales	
	b) Laba (rugi) Profit and loss	
	c) Struktur modal (<i>capital structure</i>) Capital structure	
	d) Kebijakan dividen Dividend policy	
	e) Hal lainnya yang dianggap penting bagi Perusahaan Other things that are considered important for the Company	
11	Aspek pemasaran atas barang dan/atau jasa Perusahaan, paling sedikit mengenai Strategi pemasaran dan Pangsa pasar Marketing aspects of the Company's goods and/or services, at least regarding marketing strategy and market share	149-150
12	Uraian mengenai dividen selama 2 (dua) tahun buku terakhir Description of dividends for the last 2 (two) financial years	151
	a) Kebijakan dividen, antara lain memuat informasi persentase jumlah dividen yang dibagikan terhadap laba bersih; The dividend policy, among other things, contains information on the percentage of the dividend amount distributed against net profit;	
	b) Tanggal pembayaran dividen kas dan/atau tanggal distribusi dividen non kas; The date of cash dividend payment and/or non- cash dividend distribution date;	
	c) Jumlah dividen per saham (kas dan/atau non kas); dan Total dividend per share (cash and/or non-cash); And	

No.	Isi Laporan Tahunan Annual Report Content	Halaman Page
	d) Jumlah dividen per tahun yang dibayar; The amount of paid dividends per year;	
	Catatan: Dalam hal Emiten atau Perusahaan Publik tidak membagikan dividen dalam 2 (dua) tahun terakhir, maka diungkapkan mengenai hal tersebut Note: If an Issuer or Public Company has not distributed dividends in the last 2 (two) years, then this will be disclosed	
13	Realisasi penggunaan dana hasil penawaran umum, dengan ketentuan Realization of the use of proceeds from the public offering, with conditions	151
	a) Dalam hal selama tahun buku, Emiten memiliki kewajiban menyampaikan laporan realisasi penggunaan dana, maka diungkapkan realisasi penggunaan dana hasil penawaran umum secara kumulatif sampai dengan akhir tahun buku In the event that during the financial year, the Issuer has an obligation to submit a report on the realization of the use of funds, then the cumulative realization of the use of proceeds from a public offering until the end of the financial year is disclosed	
	b) Dalam hal terdapat perubahan penggunaan dana sebagaimana diatur dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan mengenai laporan realisasi penggunaan dana hasil penawaran umum, maka Emiten menjelaskan perubahan tersebut In the event that there is a change in the use of funds as stipulated in the Financial Services Authority Regulation regarding the report on the realization of the use of funds from a public offering, the Issuer will explain the change	
14	Informasi material (jika ada), antara lain mengenai investasi, ekspansi, divestasi, penggabungan/peleburan usaha, akuisisi, restrukturisasi utang/modal, transaksi material, transaksi afiliasi, dan transaksi benturan kepentingan, yang terjadi pada tahun buku Material information (if any), including investment, expansion, divestiture, business merger/consolidation, acquisition, debt/capital restructuring, material transactions, affiliate transactions, and conflict of interest transactions, which occurred in the financial year	152-153
	a) Tanggal, nilai, dan objek transaksi Date, value, and transaction object	
	b) Nama pihak yang melakukan transaksi; The name of the party making the transaction;	
	c) Sifat hubungan afiliasi (jika ada); Nature of affiliate relationship (if any);	
	d) Penjelasan mengenai kewajaran transaksi; Explanation regarding the fairness of the transaction;	
	e) Pemenuhan ketentuan terkait; dan Fulfillment of related provisions; And	
	f) Dalam hal terdapat hubungan afiliasi, selain mengungkapkan informasi sebagaimana dimaksud dalam huruf a) sampai dengan huruf e), Perusahaan juga mengungkapkan informasi: In the event that there is an affiliation relationship, in addition to disclosing the information referred to in letters a) through e), the Company also discloses information:	
	f1) Pernyataan Direksi bahwa transaksi afiliasi telah melalui prosedur yang memadai untuk memastikan bahwa transaksi afiliasi dilaksanakan sesuai dengan praktik bisnis yang berlaku umum antara lain dilakukan dengan memenuhi prinsip transaksi yang wajar (<i>arms-length principle</i>); Statement of the Board of Directors that affiliated transactions have gone through adequate procedures to ensure that affiliated transactions are carried out in accordance with generally accepted business practices, among others, carried out by fulfilling the arm's-length principle;	
	f2) Peran Dewan Komisaris dan Komite Audit dalam melakukan prosedur yang memadai untuk memastikan bahwa transaksi afiliasi dilaksanakan sesuai dengan praktik bisnis yang berlaku umum antara lain dilakukan dengan memenuhi prinsip transaksi yang wajar (<i>arms-length principle</i>); The role of the Board of Commissioners and the audit committee in carrying out adequate procedures to ensure that affiliated transactions are carried out in accordance with generally accepted business practices, among others, are carried out by fulfilling the arm's-length principle;	
	g) Usaha yang dijalankan dalam rangka menghasilkan pendapatan usaha dan dijalankan secara rutin, berulang, dan/atau berkelanjutan, ditambahkan penjelasan bahwa transaksi afiliasi atau transaksi material tersebut merupakan kegiatan usaha yang dijalankan dalam rangka menghasilkan pendapatan usaha dan dijalankan secara rutin, berulang, dan/atau berkelanjutan; business that is carried out in order to generate business income and is carried out routinely, repeatedly and/or continuously, an explanation is added that the affiliated transaction or material transaction is a business activity carried out in order to generate business income and is carried out routinely, repeatedly and/or continuously;	

No.	Isi Laporan Tahunan Annual Report Content	Halaman Page
	<p>h) Catatan: Dalam hal transaksi afiliasi atau transaksi material dimaksud telah diungkapkan dalam laporan keuangan tahunan, ditambahkan informasi mengenai rujukan pengungkapan dalam laporan keuangan tahunan tersebut (atas point A.1.10.14.g) Note: In the case of affiliated transactions or material transactions referred to have been disclosed in the annual financial statements, information is added regarding references to disclosure in the said annual financial statements (above point A.1.10.14.g)</p>	152
	<p>i) Untuk pengungkapan transaksi afiliasi dan/atau transaksi benturan kepentingan yang merupakan hasil pelaksanaan transaksi afiliasi dan/atau transaksi benturan kepentingan yang telah disetujui pemegang saham independen, ditambahkan informasi mengenai tanggal pelaksanaan RUPS yang menyetujui transaksi tersebut For disclosure of affiliated transactions and/or conflict of interest transactions which are the result of the implementation of affiliated transactions and/or conflict of interest transactions that have been approved by independent shareholders, information is added regarding the date of the GMS that approved the transaction</p>	
	<p>j) Catatan: dalam hal tidak terdapat transaksi afiliasi dan/atau transaksi benturan kepentingan, maka diungkapkan mengenai hal tersebut; (atas point A.1.10.14.i) Note: in the event that there is no affiliated transaction and/or conflict of interest transaction, then this matter shall be disclosed; (on point A.1.10.14.i)</p>	152
15	<p>Perubahan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berpengaruh signifikan terhadap Perusahaan dan dampaknya terhadap laporan keuangan (jika ada); Changes in the provisions of laws and regulations that have a significant effect on the Company and the impact on the financial statements (if any);</p>	153
11 Governansi Perusahaan Corporate Governance		
1	<p>Pengungkapan terkait RUPS: Disclosure related to GMS:</p>	180-193
	<p>a) Informasi mengenai keputusan RUPS pada tahun buku dan 1 (satu) tahun sebelum tahun buku Information regarding GMS resolutions in the financial year and 1 (one) year prior to the financial year</p>	181-193
	<p>a1) Keputusan RUPS pada tahun buku dan 1 (satu) tahun sebelum tahun buku yang direalisasikan pada tahun buku GMS resolutions in the financial year and 1 (one) year prior to the financial year realized in the financial year</p>	
	<p>a2) Keputusan RUPS pada tahun buku dan 1 (satu) tahun sebelum tahun buku yang belum direalisasikan beserta alasan belum direalisasikan GMS resolutions in the financial year and 1 (one) year before the financial year that have not been realized along with the reasons for not being realized</p>	
	<p>b) Dalam hal Perusahaan menggunakan pihak independen dalam pelaksanaan RUPS untuk melakukan perhitungan suara, maka diungkapkan mengenai hal tersebut; In the event that the Company uses an independent party in the implementation of the GMS to carry out the vote count, it shall be disclosed regarding this matter;</p>	
2	<p>Pengungkapan terkait Direksi Disclosures related to the Board of Directors</p>	194-201
	<p>a) Tugas dan tanggung jawab masing-masing anggota Direksi; Duties and responsibilities of each member of the Board of Directors;</p>	196-197
	<p>b) Pernyataan bahwa Direksi memiliki pedoman atau piagam (<i>charter</i>) Direksi Statement that the Board of Directors has a guideline or charter (<i>charter</i>) of the Board of Directors</p>	198-199
	<p>c) Kebijakan dan pelaksanaan frekuensi rapat Direksi, rapat Direksi bersama Dewan Komisaris, dan tingkat kehadiran anggota Direksi dalam rapat tersebut termasuk kehadiran dalam RUPS; Informasi tingkat kehadiran direksi dalam rapat Direksi dan rapat Direksi bersama Dewan Komisaris, dan dalam RUPS (dapat disajikan dalam bentuk tabel). Policy and implementation of the frequency of meetings of the Board of Directors, meetings of the Board of Directors with the Board of Commissioners, and the level of attendance of members of the Board of Directors at these meetings including attendance at the GMS; Information on the level of attendance of the directors at the meetings of the Board of Directors and meetings of the Board of Directors with the Board of Commissioners, and at the GMS (can be presented in tabular form).</p>	199-200
	<p>c1) Kebijakan terkait frekuensi rapat Direksi dan rapat Direksi bersama Dewan Komisaris Policies related to the frequency of the Board of Directors meetings and the Board of Directors meetings with the Board of Commissioners</p>	
	<p>c2) Frekuensi pelaksanaan rapat Direksi dan rapat Direksi bersama Dewan Komisaris The frequency of the Board of Directors meetings and the Board of Directors meetings with the Board of Commissioners</p>	

No.	Isi Laporan Tahunan Annual Report Content	Halaman Page
c3)	Informasi tingkat kehadiran Direksi dalam rapat Direksi, rapat Direksi Dekom, RUPS Information on the level of attendance of directors at board of directors meetings, board of directors meetings, GMS	200-201
d)	Pelatihan dan/atau peningkatan kompetensi anggota Direksi Training and/or competency improvement for members of the Board of Directors	200-201
d1)	Kebijakan pelatihan dan/atau peningkatan kompetensi anggota Direksi, termasuk program orientasi bagi anggota Direksi yang baru diangkat (jika ada); Policies on training and/or competency improvement for members of the Board of Directors, including an orientation program for newly appointed members of the Board of Directors (if any);	200-201
d2)	Pelatihan dan/atau peningkatan kompetensi yang diikuti anggota Direksi dalam tahun buku (jika ada) Training and/or competency improvement attended by members of the Board of Directors in the financial year (if any)	200-201
e)	Penilaian Direksi terhadap kinerja komite yang mendukung pelaksanaan tugas Direksi pada tahun buku The Board of Directors' assessment of the performance of the committees that support the implementation of the Board of Directors' duties in the financial year	201
e1)	Prosedur penilaian kinerja Performance appraisal procedures	200-201
e2)	Kriteria yang digunakan seperti capaian kinerja selama tahun buku, kompetensi dan kehadiran dalam rapat The criteria used include performance achievements during the financial year, competence and attendance at meetings	200-201
f)	Catatan: Dalam hal Perusahaan tidak memiliki komite yang mendukung pelaksanaan tugas Direksi, maka diungkapkan mengenai hal tersebut (atas point 2.e1 & e2) Note: In the event that the Company does not have a committee that supports the implementation of the duties of the Board of Directors, then disclosed regarding this matter (on points 2.e1 & e2)	200-201
3	Pengungkapan terkait Dewan Komisaris Disclosures related to the Board of Commissioners	202-213
a)	Tugas dan tanggung jawab Dewan Komisaris; Duties and responsibilities of the Board of Commissioners;	202-203
b)	Pernyataan bahwa Dewan Komisaris memiliki pedoman atau piagam (<i>charter</i>) Dewan Komisaris Statement that the Board of Commissioners has guidelines or charter of the Board of Commissioners	204-205
c)	Kebijakan dan pelaksanaan frekuensi rapat Dewan Komisaris, rapat Dewan Komisaris bersama Direksi dan tingkat kehadiran anggota Dewan Komisaris dalam rapat tersebut termasuk kehadiran dalam RUPS; Policy and implementation of the frequency of meetings of the Board of Commissioners, meetings of the Board of Commissioners with the Board of Directors and the level of attendance of members of the Board of Commissioners at these meetings including attendance at the GMS;	205-206
d)	Pelatihan dan/atau peningkatan kompetensi anggota Dewan Komisaris Training and/or competency improvement for members of the Board of Commissioners	206-207
d1)	Kebijakan pelatihan dan/atau peningkatan kompetensi anggota Dewan Komisaris, termasuk program orientasi bagi anggota Dewan Komisaris yang baru diangkat Policy on training and/or competency improvement for members of the Board of Commissioners, including an orientation program for newly appointed members of the Board of Commissioners	206-207
d2)	Pelatihan dan/atau peningkatan kompetensi yang diikuti anggota Dewan Komisaris dalam tahun buku (jika ada) Training and/or competency improvement attended by members of the Board of Commissioners in the financial year (if any)	206-207
e)	Penilaian kinerja Direksi dan Dewan Komisaris serta masing-masing anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris Assessment of the performance of the Board of Directors and the Board of Commissioners as well as each member of the Board of Directors and members of the Board of Commissioners	214-215
e1)	Prosedur pelaksanaan penilaian kinerja; Procedure for implementing performance appraisal;	206-207
e2)	Kriteria yang digunakan seperti capaian kinerja selama tahun buku, kompetensi dan kehadiran dalam rapat; dan The criteria used are performance achievements during the financial year, competence and attendance at meetings; And	206-207

No.	Isi Laporan Tahunan Annual Report Content	Halaman Page
	e3) Pihak yang melakukan penilaian; The party conducting the assessment;	
	f) Penilaian Dewan komisaris terhadap kinerja Komite Dewan Komisaris terhadap kinerja komite yang mendukung pelaksanaan tugas Dewan Komisaris pada tahun buku, meliputi The Board of Commissioners' assessment of the performance of the Committees of the Board of Commissioners on the performance of committees that support the implementation of the duties of the Board of Commissioners in the financial year, includes	212-213
	f1) Prosedur penilaian kinerja; dan Performance appraisal procedures; And	
	f2) Kriteria yang digunakan seperti capaian kinerja selama tahun buku, kompetensi dan kehadiran dalam rapat; The criteria used are performance achievements during the financial year, competence and attendance at meetings;	
4	Pengungkapan terkait Nominasi dan remunerasi Direksi dan Dewan Komisaris Disclosure regarding the nomination and remuneration of the Board of Directors and the Board of Commissioners	218-220
	a) Prosedur nominasi, meliputi uraian singkat mengenai kebijakan dan proses nominasi anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris; Nomination procedures, including a brief description of the policies and nomination process for members of the Board of Directors and/or members of the Board of Commissioners;	218
	b) Prosedur dan pelaksanaan remunerasi Direksi dan Dewan Komisaris, antara lain: Procedures and implementation of remuneration for the Board of Directors and Board of Commissioners, including:	218-220
	b1) Prosedur penetapan remunerasi Direksi dan Dewan Komisaris; Procedure for determining remuneration for the Board of Directors and Board of Commissioners;	
	b2) Struktur remunerasi Direksi dan Dewan Komisaris seperti, gaji, tunjangan, tantiem/bonus dan lainnya; dan The remuneration structure for the Board of Directors and the Board of Commissioners such as salaries, allowances, bonuses/bonuses and others; And	
	b3) Besarnya remunerasi masing-masing anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris; The amount of remuneration for each member of the Board of Directors and members of the Board of Commissioners;	
5	Pengungkapan terkait Dewan pengawas syariah, bagi Perusahaan yang menjalankan kegiatan usaha berdasarkan prinsip syariah sebagaimana tertuang dalam anggaran dasar Disclosures related to the sharia supervisory board, for companies that carry out business activities based on sharia principles as stated in the articles of association	
	a) Nama Name	
	b) Dasar hukum pengangkatan dewan pengawas syariah Legal basis for the appointment of the sharia supervisory board	
	c) Periode penugasan dewan pengawas syariah The assignment period of the sharia supervisory board	
	d) Tugas dan tanggung jawab dewan pengawas syariah; The duties and responsibilities of the sharia supervisory board;	
	e) Frekuensi dan cara pemberian nasihat dan saran serta pengawasan pemenuhan prinsip syariah di pasar modal terhadap Perusahaan Frequency and method of providing advice and suggestions as well as supervising compliance with sharia principles in the capital market to the Company	
6	Pengungkapan terkait Komite audit Disclosures related to the audit committee	221-226
	a) Nama dan jabatannya dalam keanggotaan komite Name and position in the membership of the committee	
	b) Usia Age	
	c) Kewarganegaraan Citizenship	
	d) Riwayat pendidikan Educational background	

No.	Isi Laporan Tahunan Annual Report Content	Halaman Page
e)	Riwayat jabatan Position history	
e1)	Dasar hukum penunjukan sebagai anggota komite Legal basis for appointment as committee member	
e2)	Rangkap jabatan, baik sebagai anggota Dewan Komisaris, anggota Direksi, dan/atau anggota komite serta jabatan lainnya (jika ada); Concurrent positions, both as members of the Board of Commissioners, members of the Board of Directors, and/or committee members and other positions (if any);	
e2)	Catatan: Dalam tidak ada rangkap jabatan, maka diungkapkan mengenai hal tersebut (atas point A.1.11.6.e2) Note: In the absence of concurrent positions, this is disclosed (on point A.1.11.6.e2)	
e3)	Pengalaman kerja beserta periode waktunya baik di dalam maupun di luar Perusahaan; Work experience along with the period of time both inside and outside the Company;	
f)	Periode dan masa jabatan anggota komite audit Period and tenure of audit committee members	
g)	Pernyataan independensi komite audit Audit committee independence statement	
h)	Pelatihan dan/atau peningkatan kompetensi yang telah diikuti dalam tahun buku (jika ada) Training and/or competency improvement that has been attended in the financial year (if any)	
i)	Kebijakan dan pelaksanaan frekuensi rapat komite audit dan tingkat kehadiran anggota komite audit dalam rapat tersebut; Policy and implementation of the frequency of audit committee meetings and the level of attendance of audit committee members in these meetings;	
j)	Pelaksanaan kegiatan komite audit pada tahun buku Implementation of audit committee activities in the financial year	
7a	Pengungkapan terkait Komite atau fungsi nominasi dan remunerasi Perusahaan Disclosures related to the nomination and remuneration Committee or function of the Company	227-232
a)	Nama dan jabatannya dalam keanggotaan komite Name and position in the membership of the committee	
b)	Usia Age	
c)	Kewarganegaraan Citizenship	
d)	Riwayat pendidikan Educational background	
e)	Riwayat jabatan Position history	
e1)	Dasar hukum penunjukan sebagai anggota komite Legal basis for appointment as committee member	
e2)	Rangkap jabatan, baik sebagai anggota Dewan Komisaris, anggota Direksi, dan/atau anggota komite serta jabatan lainnya (jika ada); Concurrent positions, both as members of the Board of Commissioners, members of the Board of Directors, and/or committee members and other positions (if any);	
e2)	Catatan: Dalam tidak ada rangkap jabatan, maka diungkapkan mengenai hal tersebut; (A.1.11.7a.e2) Note: In the absence of concurrent positions, it is disclosed regarding that matter; (A.1.11.7a.e2)	
e3)	Pengalaman kerja beserta periode waktunya baik di dalam maupun di luar Perusahaan Work experience along with the period of time both inside and outside the Company	
f)	Periode dan masa jabatan anggota komite audit Period and term of office of audit committee members	
g)	Pernyataan independensi komite; Committee independence statement;	
h)	Pelatihan dan/atau peningkatan kompetensi yang telah diikuti dalam tahun buku (jika ada) Training and/or competency improvement that has been attended in the financial year (if any)	
i)	Uraian tugas dan tanggung jawab Description of duties and responsibilities	
j)	Pernyataan bahwa telah memiliki pedoman atau piagam (<i>charter</i>) Statement that it has guidelines or charter	

No.	Isi Laporan Tahunan Annual Report Content	Halaman Page
	k) Kebijakan dan pelaksanaan frekuensi rapat dan tingkat kehadiran anggota dalam rapat tersebut; Policy and implementation of the frequency of meetings and the level of attendance of members at the meeting;	
	l) Uraian singkat pelaksanaan kegiatan pada tahun buku; A brief description of the implementation of activities in the financial year;	
	m) Catatan: Dalam hal tidak dibentuk komite: Note: In the event that a committee is not formed:	
	m1) Alasan tidak dibentuknya komite The reasons for not forming the committee	
	m2) Pihak yang melaksanakan fungsi nominasi dan remunerasi Parties carrying out nomination and remuneration functions	
7b	Pengungkapan terkait Komite atau fungsi nominasi dan remunerasi Perusahaan Disclosures related to the nomination and remuneration Committee or function of the Company	227-232
	a) Nama dan jabatannya dalam keanggotaan komite Name and position in the membership of the committee	
	b) Usia Age	
	c) Kewarganegaraan Citizenship	
	d) Riwayat pendidikan Educational background	
	e) Riwayat jabatan Position history	
	e1) Dasar hukum penunjukan sebagai anggota komite Legal basis for appointment as committee member	
	e2) Rangkap jabatan, baik sebagai anggota Dewan Komisaris, anggota Direksi, dan/atau anggota komite serta jabatan lainnya (jika ada); Concurrent positions, both as members of the Board of Commissioners, members of the Board of Directors, and/or committee members and other positions (if any);	
	e2) Catatan: Dalam tidak ada rangkap jabatan, maka diungkapkan mengenai hal tersebut; (A.111.7b.e2) Note: In the absence of concurrent positions, it is disclosed regarding that matter; (A.111.7b.e2)	
	e3) Pengalaman kerja beserta periode waktunya baik di dalam maupun di luar Perusahaan Work experience and time period both inside and outside of the Company	
	f) Periode dan masa jabatan anggota komite audit Period and term of office of audit committee members	
	g) Pernyataan independensi komite; Committee independence statement;	
	h) Pelatihan dan/atau peningkatan kompetensi yang telah diikuti dalam tahun buku (jika ada) Training and/or competency improvement that has been attended in the year book (if any)	
	i) Uraian tugas dan tanggung jawab Description of duties and responsibilities	
	j) Pernyataan bahwa telah memiliki pedoman atau piagam (<i>charter</i>) Statement that already had guidelines or charter	
	k) Kebijakan dan pelaksanaan frekuensi rapat dan tingkat kehadiran anggota dalam rapat tersebut; Policy and implementation of the frequency of meetings and the level of attendance of members at the meeting;	
	l) Uraian singkat pelaksanaan kegiatan pada tahun buku; A brief description of the implementation of activities in the financial year;	
	m) Catatan: Dalam hal tidak dibentuk komite: Note: In the event that a committee is not formed:	
	m1) Alasan tidak dibentuknya komite The reasons for not forming the committee	
	m2) Pihak yang melaksanakan fungsi nominasi dan remunerasi Parties carrying out nomination and remuneration functions	

No.	Isi Laporan Tahunan Annual Report Content	Halaman Page
8a	Pengungkapan terkait Komite Manajemen Risiko Disclosures related to the Risk Management Committee	233-237
a)	Nama dan jabatannya dalam keanggotaan komite Name and position in the membership of the committee	
b)	Usia Age	
c)	Kewarganegaraan Citizenship	
d)	Riwayat pendidikan educational background	
e)	Riwayat jabatan Position history	
e1)	Dasar hukum penunjukan sebagai anggota komite Legal basis for appointment as committee member	
e2)	Rangkap jabatan, baik sebagai anggota Dewan Komisaris, anggota Direksi, dan/atau anggota komite serta jabatan lainnya (jika ada); Concurrent positions, both as members of the Board of Commissioners, members of the Board of Directors, and/or committee members and other positions (if any);	
e2)	Catatan: Dalam tidak ada rangkap jabatan, maka diungkapkan mengenai hal tersebut; (A.111.8a.e2) Note: In the absence of concurrent positions, it is disclosed regarding that matter; (A.111.8a.e2)	
e3)	Pengalaman kerja beserta periode waktunya baik di dalam maupun di luar Perusahaan Work experience and time period both inside and outside of the Company	
f)	Periode dan masa jabatan anggota komite manajemen risiko Period and term of office of the members of the risk management committee	
g)	Pernyataan independensi komite; Committee independence statement;	
h)	Pelatihan dan/atau peningkatan kompetensi yang telah diikuti dalam tahun buku (jika ada) Training and/or competency improvement that has been attended in the year book (if any)	
i)	Uraian tugas dan tanggung jawab Description of duties and responsibilities	
j)	Pernyataan bahwa telah memiliki pedoman atau piagam (<i>charter</i>) Statement that already had guidelines or charter	
k)	Kebijakan dan pelaksanaan frekuensi rapat dan tingkat kehadiran anggota dalam rapat tersebut; Policy and implementation of the frequency of meetings and the level of attendance of members at the meeting;	
l)	Uraian singkat pelaksanaan kegiatan pada tahun buku; A brief description of the implementation of activities in the financial year;	
m)	Catatan: Dalam hal tidak dibentuk komite: Note: In the event that a committee is not formed:	
m1)	Alasan tidak dibentuknya komite The reasons for not forming the committee	
m2)	Pihak yang melaksanakan fungsi nominasi dan remunerasi Parties carrying out nomination and remuneration functions	
8b	Pengungkapan terkait Komite lain yang dimiliki Perusahaan dalam rangka mendukung fungsi dan tugas Direksi (jika ada) dan/atau Komite yang mendukung fungsi dan tugas Dewan Komisaris: Disclosures regarding other Committees owned by the Company in order to support the functions and duties of the Board of Directors (if any) and/or Committees that support the functions and duties of the Board of Commissioners:	
a)	Nama dan jabatannya dalam keanggotaan komite Name and position in the membership of the committee	
b)	Usia Age	
c)	Kewarganegaraan Citizenship	

No.	Isi Laporan Tahunan Annual Report Content	Halaman Page
	d) Riwayat pendidikan educational background	
	e) Riwayat jabatan Position history	
	e1) Dasar hukum penunjukan sebagai anggota komite Legal basis for appointment as committee member	
	e2) Rangkap jabatan, baik sebagai anggota Dewan Komisaris, anggota Direksi, dan/atau anggota komite serta jabatan lainnya (jika ada); Concurrent positions, both as members of the Board of Commissioners, members of the Board of Directors, and/or committee members and other positions (if any);	
	e2) Catatan: Dalam tidak ada rangkap jabatan, maka diungkapkan mengenai hal tersebut; Note: In the absence of concurrent positions, it is disclosed regarding that matter;	
	e3) Pengalaman kerja beserta periode waktunya baik di dalam maupun di luar Perusahaan Work experience and time period both inside and outside of the Company	
	f) Periode dan masa jabatan anggota komite lain Period and term of office of other committee members	
	g) Pernyataan independensi komite; Committee independence statement;	
	h) Pelatihan dan/atau peningkatan kompetensi yang telah diikuti dalam tahun buku (jika ada) Training and/or competency improvement that has been attended in the year book (if any)	
	i) Uraian tugas dan tanggung jawab Description of duties and responsibilities	
	j) Pernyataan bahwa telah memiliki pedoman atau piagam (<i>charter</i>) Statement that already had guidelines or charter	
	k) Kebijakan dan pelaksanaan frekuensi rapat dan tingkat kehadiran anggota dalam rapat tersebut; Policy and implementation of the frequency of meetings and the level of attendance of members at the meeting;	
	l) Uraian singkat pelaksanaan kegiatan pada tahun buku; A brief description of the implementation of activities in the financial year;	
9	Pengungkapan terkait Sekretaris Perusahaan Disclosures related to the Corporate Secretary	238-241
	a) Nama Name	
	b) Domisili Domicile	
	c) Riwayat Jabatan Position History	
	c1) Dasar hukum penunjukan sebagai Sekretaris Perusahaan Legal basis for appointment as company secretary	
	c2) Pengalaman kerja beserta periode waktunya baik di dalam maupun di luar Perusahaan Work experience and time period both inside and outside Company	
	d) Riwayat pendidikan Educational background	
	e) Pelatihan dan/atau peningkatan kompetensi yang diikuti dalam tahun buku Participated in training and/or competency improvement in fiscal year	
	f) Uraian singkat pelaksanaan kegiatan pada tahun buku A brief description of the implementation of activities in the financial year	
10	Pengungkapan terkait Unit audit internal, paling sedikit memuat Disclosures related to the internal audit unit, at least contain	242-248
	a) Nama kepala unit audit internal Name of the head of the internal audit unit	
	b) Riwayat jabatan Position history	

No.	Isi Laporan Tahunan Annual Report Content	Halaman Page
	b1) Dasar hukum penunjukan sebagai kepala unit audit internal Legal basis for appointment as head of the internal audit unit	
	b2) Pengalaman kerja beserta periode waktunya baik di dalam maupun di luar Perusahaan Work experience and time period both inside and outside of the Company	
	c) Kualifikasi atau sertifikasi sebagai profesi audit internal Qualification or certification as an internal audit profession	
	d) Pelatihan dan/atau peningkatan kompetensi yang diikuti dalam tahun buku Training and/or competency improvement attended in the financial year	
	e) Struktur dan kedudukan unit audit internal; The structure and position of the internal audit unit;	
	f) Uraian tugas dan tanggung jawab; Description of duties and responsibilities;	
	g) Pernyataan bahwa telah memiliki pedoman atau piagam (<i>charter</i>) unit audit internal Statement that already had guidelines or charter for the internal audit unit	
	h) Uraian singkat pelaksanaan tugas unit audit internal pada tahun buku termasuk kebijakan dan pelaksanaan frekuensi rapat dengan Direksi, Dewan Komisaris, dan/atau Komite Audit; A brief description of the implementation of the duties of the internal audit unit in the financial year including the policy and implementation of the frequency of meetings with the Board of Directors, Board of Commissioners and/or the Audit Committee;	
11	Uraian mengenai sistem pengendalian internal (<i>internal control</i>) yang diterapkan oleh Perusahaan Description of the internal control system (internal control) implemented by the Company	249-251
	a) Pengendalian keuangan dan operasional, serta kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan lainnya; Financial and operational control, as well as compliance with other laws and regulations;	
	b) Tinjauan atas efektivitas sistem pengendalian internal Review of the effectiveness of the internal control system	
	c) Pernyataan Direksi dan/atau Dewan Komisaris atas kecukupan sistem pengendalian internal; Statement of the Board of Directors and/or Board of Commissioners regarding the adequacy of the internal control system;	
12	Uraian mengenai Sistem manajemen risiko yang diterapkan oleh Perusahaan Description of the risk management system implemented by Company	252-255
	a) Gambaran umum mengenai sistem manajemen risiko Perusahaan; General description of the Company's risk management system;	
	b) Jenis risiko dan cara pengelolaannya; Types of risks and how to manage them;	
	c) Tinjauan atas efektivitas sistem manajemen risiko Perusahaan Review of the effectiveness of the Company's risk management system	
	d) Pernyataan Direksi dan/atau Dewan Komisaris atau komite audit atas kecukupan sistem manajemen risiko; Statement of the Board of Directors and/or Board of Commissioners or the audit committee on the adequacy of the risk management system;	
14	Informasi tentang sanksi administratif/sanksi yang dikenakan kepada Perusahaan, anggota Dewan Komisaris dan anggota Direksi, oleh Otoritas Jasa Keuangan dan otoritas lainnya pada tahun buku information on administrative sanctions/sanctions imposed on the Company, members of the Board of Commissioners and members of the Board of Directors, by the Financial Services Authority and other authorities in the financial year	260
15	Informasi mengenai kode etik Perusahaan Information regarding the Company's code of ethics	260-262
	a) Pokok-pokok kode etik Principles of the code of ethics	
	b) Bentuk sosialisasi kode etik dan upaya penegakannya Forms of dissemination of the code of ethics and enforcement efforts	
	c) Pernyataan bahwa kode etik berlaku bagi anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris, dan karyawan Perusahaan A statement that the code of ethics applies to members of the Board of Directors, members of the Board of Commissioners and employees of the Company	

No.	Isi Laporan Tahunan Annual Report Content	Halaman Page
16	<p>Uraian singkat mengenai kebijakan pemberian kompensasi jangka panjang berbasis kinerja kepada manajemen dan/atau karyawan yang dimiliki oleh Perusahaan (jika ada), antara lain berupa program kepemilikan saham oleh manajemen (<i>management stock ownership program/MSOP</i>) dan/atau program kepemilikan saham oleh karyawan (<i>employee stock ownership program/ESOP</i>) A brief description of the policy of providing performance-based long-term compensation to management and/or employees owned by the Company (if any), including in the form of a management stock ownership program (MSOP) and/or an employee share ownership program (employee stock ownership program/ESOP)</p>	263
<p>Dalam hal terdapat pemberian kompensasi berupa program kepemilikan saham oleh manajemen (<i>management stock ownership program/MSOP</i>) dan/atau program kepemilikan saham oleh karyawan (<i>employee stock ownership program/ESOP</i>), informasi yang diungkapkan paling sedikit memuat: (atas point A.1.11.16) In the event that there is compensation in the form of a management stock ownership program (MSOP) and/or an employee stock ownership program (ESOP), the information disclosed shall contain at least: (on point A.1.11. 16)</p>		
	<p>a) Jumlah saham dan/atau opsi Number of shares and/or options</p>	
	<p>b) Jangka waktu pelaksanaan Implementation period</p>	
	<p>c) Persyaratan karyawan dan/atau manajemen yang berhak Requirements of eligible employees and/or management</p>	
	<p>d) Harga pelaksanaan atau penentuan harga pelaksanaan Exercise price or determination of exercise price</p>	
17	<p>Uraian singkat mengenai kebijakan pengungkapan informasi mengenai A brief description of the information disclosure policy regarding</p>	263
	<p>a) Kepemilikan saham anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris paling lambat 3 (tiga) hari kerja setelah terjadinya kepemilikan atau setiap perubahan kepemilikan atas saham Perusahaan Terbuka; Share ownership of members of the Board of Directors and members of the Board of Commissioners no later than 3 (three) working days after ownership or any change in ownership of shares in the Public Company;</p>	
	<p>b) Pelaksanaan atas kebijakan dimaksud Implementation of the intended policy</p>	
18	<p>Uraian mengenai sistem pelaporan pelanggaran (<i>whistleblowing system</i>) di Perusahaan: Description of the violation reporting system (<i>whistleblowing system</i>) at Company:</p>	264-266
	<p>a) Cara penyampaian laporan pelanggaran; Method of submission of violation reports;</p>	
	<p>b) Perlindungan bagi pelapor; Protection for reporters;</p>	
	<p>c) Penanganan pengaduan; The handling of complaints;</p>	
	<p>d) Pihak yang mengelola pengaduan; Parties who manage complaints;</p>	
	<p>e) Hasil dari penanganan pengaduan; Results of complaint handling;</p>	
	<p>e1) Jumlah pengaduan yang masuk dan diproses dalam tahun buku Number of complaints received and processed in the financial year</p>	
	<p>e2) Tindak lanjut pengaduan; Complaint follow-up;</p>	
<p>Catatan: Dalam hal Perusahaan tidak memiliki sistem pelaporan pelanggaran (<i>whistleblowing system</i>), maka diungkapkan mengenai hal tersebut. (atas point A.1.11.18) Note: In the event that the Company does not have a whistleblowing system, then this is disclosed. (on point A.1.11.18)</p>		
19	<p>Uraian mengenai kebijakan anti korupsi Perusahaan Description of the Company's anti-corruption policy</p>	
	<p>a) Program dan prosedur yang dilakukan Programs and procedures performed</p>	

No.	Isi Laporan Tahunan Annual Report Content	Halaman Page
	b) Pelatihan/sosialisasi anti korupsi kepada karyawan Perusahaan; Anti-corruption training/socialization for Company employees;	
	Catatan: Dalam hal Perusahaan tidak memiliki kebijakan anti korupsi, maka dijelaskan alasan tidak dimilikinya kebijakan dimaksud (atas point A.1.11.19) Note: In the event that the Company does not have an anti-corruption policy, then explained the reasons for not having the said policy (on point A.1.11.19)	
20a	Penerapan atas pedoman governansi Perusahaan Terbuka bagi Emiten yang menerbitkan efek bersifat ekuitas atau Perusahaan Publik, meliputi: Implementation of Public Company governance guidelines for Issuers companies that issue equity securities or public companies, including:	300-301
	a) Pernyataan mengenai rekomendasi yang telah dilaksanakan Statement regarding recommendations that have been implemented	
	b) Bukti/penjelasan yang menunjukkan bahwa Perusahaan telah menerapkan rekomendasi tersebut Evidence/explanation showing that the Company has implemented the recommendations	
	c) Penjelasan atas rekomendasi yang belum dilaksanakan, disertai alasan dan alternatif Explanation of recommendations that have not been implemented, accompanied by reasons and alternatives	
20b	Pengungkapan terkait penerapan atas pedoman governansi Perusahaan dengan pendekatan "comply or explain" atau "apply or explain", meliputi: Disclosures related to the implementation of the Company's governance guidelines with a "comply or explain" or "apply or explain" approach, including:	
	a) Pernyataan mengenai rekomendasi yang telah dilaksanakan; dan/atau Statement regarding recommendations that have been implemented; and/or	
	b) Bukti/penjelasan yang menunjukkan bahwa Perusahaan telah menerapkan rekomendasi tersebut Evidence/explanation showing that the Company has implemented the recommendations	
	c) Penjelasan atas rekomendasi yang belum dilaksanakan, disertai alasan dan alternatif Explanation of recommendations that have not been implemented, accompanied by reasons and alternatives	
Isi Laporan Keberlanjutan		
Contents of The Sustainability Report		
1 Strategi Keberlanjutan		
Sustainability Strategy		
1	Penjelasan Strategi Keberlanjutan Sustainability Strategy Explanation	304
2 Ikhtisar Kinerja Aspek Keberlanjutan		
Sustainability Aspect Performance Highlights		
1	Aspek Ekonomi, paling sedikit memuat: Economic Aspect, at least contains:	319
	a) Kuantitas produksi atau jasa yang dijual; Quantity of production or services sold;	319
	b) Produk ramah lingkungan; Environmentally friendly products;	319
	c) Pelibatan pihak lokal yang berkaitan dengan proses bisnis Keuangan Berkelanjutan Involvement of local parties related to processes of Sustainable financial business	319
2	Aspek Lingkungan Hidup, paling sedikit memuat: Environmental Aspect, at least contains:	320
	a) Penggunaan energi; Energy use;	320
	b) Pengurangan emisi yang dihasilkan; The resulting reduction in emissions;	320
	c) Pengurangan limbah dan efluen; dan Waste and effluent reduction; And	320

No.	Isi Laporan Tahunan Annual Report Content	Halaman Page
	d) Pelestarian keanekaragaman hayati. Biodiversity preservation.	320
3	Aspek Sosial Social Aspect	321
3	Profil Perusahaan Company Profile	
1	Visi, Misi, dan Nilai Keberlanjutan Vision, Mission and Values of Sustainability	66
2	Produk, Layanan, dan Kegiatan Usaha yang Dijalankan Products, Services, and Running Business Activities	68
3	Perubahan Perusahaan yang Bersifat Signifikan Significant Company Changes	109
4	Penjelasan Direksi Explanation of the Board of Directors	
1	Kebijakan untuk merespon tantangan dalam pemenuhan strategi keberlanjutan Policies to respond to challenges in fulfilling the sustainability strategy	327
2	Penerapan Keuangan Berkelanjutan Implementation of Sustainable Finance	328
3	Strategi pencapaian target Target achievement strategy	329
5	Governansi Berkelanjutan Sustainable Governance	
1	Penanggung Jawab Penerapan Keuangan Berkelanjutan Responsible for Implementing Sustainable Finance	334
2	Pengembangan Kompetensi Terkait Keuangan Berkelanjutan Competency Development Related to Sustainable Finance	343
3	Penilaian Risiko Atas Penerapan Keuangan Berkelanjutan Risk Assessment of the Implementation of Sustainable Finance	345
4	Hubungan dengan Pemangku Kepentingan Relations with Stakeholders	346
5	Permasalahan Terhadap Penerapan Keuangan Berkelanjutan Problems Against the Implementation of Sustainable Finance	304
6	Kinerja Keberlanjutan Sustainability Performance	
1	Kegiatan Membangun Budaya Keberlanjutan Activities to Build a Culture of Sustainability	371
a)	Kegiatan Membangun Budaya Keberlanjutan Activities to Build a Culture of Sustainability	371
2	Kinerja Ekonomi Economic Performance	348
a)	Perbandingan Target dan Kinerja Produksi, Portofolio, Target Pembiayaan, atau Investasi, Pendapatan dan Laba Rugi Comparison of Production Targets and Performance, Portfolio, Financing Targets, or Investment, Income and Profit and Loss	351
b)	Perbandingan Target dan Kinerja Portofolio, Target Pembiayaan, atau Investasi pada Instrumen Keuangan atau Proyek yang Sejalan dengan Keuangan Berkelanjutan Comparison of Portfolio Targets and Performance, Financing Targets, or Investments in Financial Instruments or Projects in Line with Sustainable Finance	351
3	Kinerja Lingkungan Hidup Environmental Performance	357
a)	Aspek Umum General Aspect	357
a1)	Biaya Lingkungan Hidup Environmental Costs	359

No.	Isi Laporan Tahunan Annual Report Content	Halaman Page
	b) Aspek Material Material Aspect	362
	b1) Penggunaan Material yang Ramah Lingkungan Use of Environmentally Friendly Materials	362
	c) Aspek Energi Energy Aspect	363
	c1) Jumlah dan Intensitas Energi yang Digunakan Amount and Intensity of Energy Used	363
	c2) Upaya dan Pencapaian Efisiensi Energi dan Penggunaan Energi Terbarukan Efforts and Achievements of Energy Efficiency and Use of Renewable Energy	362
	d) Aspek Air Water Aspect	364
	d1) Penggunaan air Water usage	364
	e) Aspek Keragaman Hayati Aspects of Biodiversity	364
	e1) Dampak dari Wilayah Operasional yang Dekat atau Berada di Daerah Konservasi atau Keanekaragaman Hayati Impacts from Operational Areas that are Near or Located in the Area Conservation or Biodiversity	364
	e2) Usaha Konservasi Keanekaragaman Hayati Biodiversity Conservation Efforts	364
	f) Aspek Emisi Emission Aspect	366
	f1) Jumlah dan Intensitas Emisi yang Dihasilkan Berdasarkan Jenisnya Total and Intensity of Emissions Generated by Type	366
	f2) Upaya dan Pencapaian Pengurangan Emisi yang Dilakukan Efforts and Achievements of Emission Reduction Made	365
	g) Aspek Limbah dan Efluen Waste and Effluent Aspects	366
	g1) Jumlah Limbah dan Efluen yang Dihasilkan Berdasarkan Jenis Amount of Waste and Effluent Generated by Type	366
	g2) Mekanisme Pengelolaan Limbah dan Efluen Waste and Effluent Management Mechanism	366
	h) Aspek Pengaduan Terkait Lingkungan Hidup Complaint Aspects Related to the Environment	368
	h1) Jumlah dan Materi Pengaduan Lingkungan Hidup yang Diterima dan Diselesaikan Number and Material of Environmental Complaints Received and Resolved	368
4	Kinerja Sosial Social Performance	369
	a) Komitmen untuk Memberikan Layanan atas Produk dan/atau Jasa yang Setara kepada Konsumen Commitment to Provide Services on Equal Products and/or Services to Consumers	354
	b) Aspek Ketenagakerjaan Employment Aspect	372
	b1) Kesetaraan Kesempatan Bekerja Equal Employment Opportunity	372
	b2) Tenaga Kerja Anak dan Tenaga Kerja Paksa Child Labor and Forced Labor	372
	b3) Upah Minimum Regional Regional minimum wage	378
	b4) Lingkungan Bekerja yang Layak dan Aman Decent and Safe Work Environment	387
	b5) Pelatihan dan Pengembangan Kemampuan Pegawai Employee Capability Training and Development	384

No.	Isi Laporan Tahunan Annual Report Content	Halaman Page
c)	Aspek Masyarakat Community Aspect	390
c1)	Dampak Operasi Terhadap Masyarakat Sekitar Impact of Operations on Surrounding Communities	393
c2)	Pengaduan Masyarakat Community Complaints	404
c3)	Kegiatan Tanggung Jawab Sosial Lingkungan (TJSL) Environmental Social Responsibility Activities (CSR)	307
d)	Tanggung Jawab Pengembangan Produk/Jasa Berkelanjutan Responsibility for Sustainable Product/Service Development	354
d1)	Inovasi dan Pengembangan Produk/Jasa Keuangan Berkelanjutan Innovation and Development of Sustainable Financial Products/Services	354
d2)	Produk/Jasa yang sudah Dievaluasi Keamanannya bagi Pelanggan Products/Services That Have Been Evaluated for Safety for Customers	356
d3)	Dampak Produk/Jasa Product/Service Impact	354
d4)	Jumlah Produk yang Ditarik Kembali Number of Product Recalls	69
e)	Survei Kepuasan Pelanggan Terhadap Produk dan/atau Jasa Keuangan Berkelanjutan Customer Satisfaction Survey on Sustainable Financial Products and/or Services	355
7 Lain-lain Others		
1	Verifikasi Tertulis dari Pihak Independen Written Verification from Independent Party	315
2	Lembar Umpan Balik (<i>Feedback</i>) untuk Pembaca, jika ada Feedback Sheet for Readers, if any	406
3	Tanggapan Terhadap Umpan Balik Laporan Keberlanjutan Tahun Sebelum Responses to Previous Year's Sustainability Report Feedback	405
4	Daftar Pengungkapan Sesuai Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 51/POJK.03/2017 tentang Penerapan Keuangan Berkelanjutan bagi Lembaga Jasa Keuangan, Emiten, dan Perusahaan Publik. List of Disclosures According to the Financial Services Authority Regulation Number 51/POJK.03/2017 concerning the Implementation of Sustainable Finance for Financial Services Institutions, Issuers and Public Companies.	433

Daftar Pertanyaan Bonus dan Penalti
Bonus and Penalty Checklist

A	1	Pertanyaan Bonus dan Penalti dari SE OJK No. 16/SEOJK.04/2021 tentang Bentuk dan Isi Laporan Tahunan Emiten atau Perusahaan Publik Question for Bonus and Penalties from SE OJK No. 16/SEOJK.04/2021 concerning Form and Content of Annual Reports of Issuers or Public Companies	Halaman Page
A	1	3 Informasi Saham (Jika Ada) Stock Information (If Available)	
	3	Dalam hal terjadi penghentian sementara perdagangan saham (<i>suspension</i>) dan/atau pembatalan pencatatan saham (<i>delisting</i>) dalam tahun buku, dijelaskan alasan penghentian sementara perdagangan saham (<i>suspension</i>) dan/atau pembatalan pencatatan saham (<i>delisting</i>) tersebut In the event of a temporary suspension of share trading (<i>suspension</i>) and/or delisting of shares during the financial year, the reasons for the temporary suspension of share trading (<i>suspension</i>) and/or delisting of shares (<i>delisting</i>) occur.	14
	4	Dalam hal penghentian sementara perdagangan saham (<i>suspension</i>) sebagaimana dimaksud pada angka 3) dan/atau proses pembatalan pencatatan saham (<i>delisting</i>) masih berlangsung hingga akhir periode Laporan Tahunan, dijelaskan tindakan yang dilakukan untuk menyelesaikan penghentian sementara perdagangan saham (<i>suspension</i>) dan/atau pembatalan pencatatan saham (<i>delisting</i>) tersebut In the event that the temporary suspension of share trading (<i>suspension</i>) as referred to in number 3) and/or the process of canceling the listing of shares (<i>delisting</i>) is still ongoing until the end of the Annual Report period, the actions taken to resolve the temporary suspension of share trading (<i>suspension</i>) and/or cancellation are explained. listing of shares (<i>delisting</i>).	14
A	1	10 Analisa dan Pembahasan Manajemen Management Discussion and Analysis	
	9	Perbandingan antara target/proyeksi pada awal tahun buku dengan hasil yang dicapai (realisasi) Comparison between targets/projections at the beginning of the financial year with the results achieved (realization)	146
	d	Hal lainnya yang dianggap penting bagi Perusahaan Other things that are considered important for the Company	
	10	Target/proyeksi yang ingin dicapai Perusahaan untuk 1 (satu) tahun mendatang Targets/projections to be achieved by the Company for the next 1 (one) year	146
	e	Hal lainnya yang dianggap penting bagi Perusahaan Other things that are considered important for the Company	
A	1	11 Governansi Perusahaan Corporate Governance	
	14	Informasi tentang sanksi administratif/sanksi yang dikenakan kepada Perusahaan, anggota Dewan Komisaris dan anggota Direksi, oleh Otoritas Jasa Keuangan dan otoritas lainnya pada tahun buku Information on administrative sanctions/sanctions imposed on the Company, members of the Board of Commissioners and members of the Board of Directors, by the Financial Services Authority and other authorities in the financial year	260
	20b	Pengungkapan terkait penerapan atas pedoman governansi Perusahaan dengan pendekatan " <i>comply or explain</i> " atau " <i>apply or explain</i> ", meliputi: (Khusus untuk perusahaan bukan perusahaan terbuka) Disclosure related to the implementation of the Company's governance guidelines with the approach " <i>comply or explain</i> " or " <i>apply or explain</i> ", includes: (Especially for non-listed companies)	300-301
	a	Pernyataan mengenai rekomendasi yang telah dilaksanakan; dan/atau Statement regarding recommendations that have been implemented; and/or	
	b	Bukti/penjelasan yang menunjukkan bahwa perusahaan telah menerapkan rekomendasi tersebut Evidence/explanation showing that the company has implemented the recommendations	
	c	Penjelasan atas rekomendasi yang belum dilaksanakan, disertai alasan dan alternatif Explanation of recommendations that have not been implemented, accompanied by reasons and alternatives	

Tambahan Pertanyaan Di Luar SE OJK No. 16/SEOJK.04/2021
tentang Bentuk dan Isi Laporan Tahunan Emiten atau Perusahaan Publik
 Additional Questions Beyond SE OJK No. 16/SEOJK.04/2021 concerning Form and
 Content of Annual Reports of Issuers or Public Companies

Halaman
Page

B	1	Pertanyaan dari PUGKI 2021	
		Question from PUGKI 2021	
		Pengungkapan dalam Laporan Tahunan atas item-item berikut ini: Disclosure in the Annual Report of the following items:	
	1	Jenis keputusan yang memerlukan persetujuan Dewan Komisaris (PUGKI 1.3.2) Types of decisions that require approval from the Board of Commissioners (PUGKI 1.3.2)	208-211
	2	Rincian tugas Komisaris Utama (PUKGI 1.3.13.1) Details of the duties of President Commissioner (PUKGI 1.3.13.1)	203
	3	Kebijakan untuk mencegah terjadinya <i>insider trading</i> . (Aturan yang jelas mengenai perdagangan apa pun dalam saham korporasi yang dilakukan oleh direktur, komisaris dan orang dalam untuk memastikan bahwa siapapun tidak boleh mendapatkan keuntungan secara langsung atau tidak langsung dari informasi yang tidak/belum tersedia di pasar) (PUKGI 7.2.3) Policy to prevent insider trading. (Clear rules regarding any trading in corporate shares carried out by directors, commissioners and insiders to ensure that no one may benefit directly or indirectly from information that is not/not yet available on the market) (PUKGI 7.2.3)	273
	4	Apakah korporasi menerbitkan laporan tahunan secara terintegrasi yang menempatkan kinerja historis ke dalam konteks dan menggambarkan risiko, peluang, dan prospek korporasi di masa depan, sehingga membantu pemegang saham dan pemangku kepentingan memahami tujuan strategis korporasi dan kemajuannya dalam menciptakan nilai yang berkelanjutan? Uraikan dengan singkat (PUKGI 6.2.4) Does the corporation issue an integrated annual report that puts historical performance into context and describes the risks, opportunities and future prospects of the corporation, thereby helping shareholders and stakeholders understand the corporation's strategic objectives and its progress in creating sustainable value? Briefly describe (PUKGI 6.2.4)	Ya. Laporan Tahunan Perusahaan telah secara terintegrasi menyajikan kinerja historis ke dalam konteks dan menggambarkan risiko, peluang, dan prospek korporasi di masa depan, sehingga membantu pemegang saham dan pemangku kepentingan memahami tujuan strategis korporasi dan kemajuannya dalam menciptakan nilai yang berkelanjutan. Yes. The Company's Annual Report has integrated historical performance into context and describes the corporation's risks, opportunities and future prospects, thereby helping shareholders and stakeholders understand the corporation's strategic objectives and its progress in creating sustainable value.
B	2	Pertanyaan dari Asean CG Scorecard	
		Questions from The Asean CG Scorecard	
B	2	1	
		Pertanyaan Bonus	
		Bonus Questions	
	1	Tanggung jawab Komite Audit dalam pemberian rekomendasi atas penunjukan dan pemberhentian auditor eksternal (ASEAN CG ScoreCard E.2.24) Responsibilities of the Audit Committee in providing recommendations on the appointment and dismissal of external auditors (ASEAN CG ScoreCard E.2.24)	221-222
	2	Deskripsi proses governansi terkait isu IT termasuk <i>disruption</i> (gangguan), <i>cyber security</i> (keamanan dunia maya), dan <i>disaster recovery</i> (pemulihan bencana) untuk memastikan semua risiko utama telah diidentifikasi, dikelola, dan dilaporkan pada Direksi (ASEAN CG Score Card B.E.5.1) Description of governance processes related to IT issues including disruption, cyber security, and disaster recovery to ensure all major risks have been identified, managed, and reported to the Board of Directors (ASEAN CG Score Card B.E.5.1)	273
	3	Kebijakan penghargaan/kompensasi yang memperhitungkan kinerja perusahaan jangka panjang (ASEAN CG Score Card C.3.3) Reward/compensation policy that takes into account long-term company performance (ASEAN CG Score Card C.3.3)	263

Daftar Pertanyaan Bonus dan Penalti
Bonus and Penalty Checklist

Tambahan Pertanyaan Di Luar SE OJK No. 16/SEOJK.04/2021		
B	tentang Bentuk dan Isi Laporan Tahunan Emiten atau Perusahaan Publik Additional Questions Beyond SE OJK No. 16/SEOJK.04/2021 concerning Form and Content of Annual Reports of Issuers or Public Companies	Halaman Page
4	Kebijakan untuk melakukan penelaahan dan persetujuan transaksi dengan pihak berelasi yang material/signifikan (ASEAN CG Score Card D.3.1) Policy for reviewing and approving transactions with related parties that are material/significant (ASEAN CG Score Card D.3.1)	152
5	Kebijakan terkait perencanaan atas suksesi anggota Direksi dan manajemen kunci (ASEAN CG Score Card E.5.3) Policy related to planning for the succession of members of the Board of Directors and key management (ASEAN CG Score Card E.5.3)	218
6	Kerangka pelaporan berkelanjutan yang diakui secara internasional (contoh: GRI, Integrated Reporting, SASB) yang diadopsi oleh Perusahaan (ASEAN CG Score Card B.C.1.1) Internationally recognized sustainability reporting framework (example: GRI, Integrated Reporting, SASB) adopted by Companies (ASEAN CG Score Card B.C.1.1)	436-438
B 2 2	Pertanyaan Penalti Penalty Question	
	Ketepatan waktu publikasi Laporan Keuangan & Laporan tahunan Timely publication of Financial Reports & Annual Reports	
1	Tanggal penerbitan Laporan Keuangan Tahunan (ASEAN CG Score Card B.D.1.1) Annual Financial Report issuance date (ASEAN CG Score Card B.D.1.1)	133
2	Tanggal penerbitan Laporan Tahunan (ASEAN CG Score Card B.D.1.1) Annual Report issuance date (ASEAN CG Score Card B.D.1.1)	
3	Opini auditor independen atas laporan keuangan perusahaan (ASEAN CG ScoreCard) Independent auditor's opinion on the company's financial statements (ASEAN CG ScoreCard)	133
a)	Perusahaan memperoleh opini " <i>qualified opinion</i> " dari auditor independen atas laporan keuangan The company obtained a "qualified opinion" from an independent auditor on the financial statements	
b)	Perusahaan memperoleh opini " <i>disclaimer opinion</i> " dari auditor independen atas laporan keuangan The company obtained a "disclaimer opinion" from an independent auditor on the financial statements	
c)	Perusahaan memperoleh opini " <i>adverse opinion</i> " dari auditor independen atas laporan keuangan The company obtained an "adverse opinion" from an independent auditor on the financial statements	
4	Apakah terjadi perdagangan orang dalam yang melibatkan direksi/komisaris, manajemen dan karyawan dalam tiga tahun terakhir? (ASEAN CG Score Card P.B.1.1) Is there insider trading involving directors/commissioners, management and employees in the last three years? (ASEAN CG Score Card P.B.1.1)	
5	Apakah ada kasus ketidakpatuhan terhadap hukum, aturan dan peraturan yang berkaitan dengan transaksi pihak berelasi yang signifikan atau material dalam tiga tahun terakhir? (ASEAN CG Score Card P.B.2.1) Were there any cases of non-compliance with laws, rules and regulations related to related party transactions that were significant or material in the last three years? (ASEAN CG Score Card P.B.2.1)	
6	Apakah telah terjadi pelanggaran hukum apa pun yang berkaitan dengan masalah perburuhan/ketenagakerjaan/konsumen/kepailitan/komersial/persaingan atau lingkungan (P.C.1.1) Whether there has been any violation of law relating to labor/employment/consumer/bankruptcy/commercial/competition or environmental issues (P.C.1.1)	

B	Tambahan Pertanyaan Di Luar SE OJK No. 16/SEOJK.04/2021 tentang Bentuk dan Isi Laporan Tahunan Emiten atau Perusahaan Publik Additional Questions Beyond SE OJK No. 16/SEOJK.04/2021 concerning Form and Content of Annual Reports of Issuers or Public Companies	Halaman Page
	7 Apakah perusahaan menghadapi sanksi dari regulator karena tidak membuat pengumuman dalam jangka waktu yang ditentukan untuk peristiwa penting (<i>material event</i>)? (ASEAN CG Score Card P.C.2.1) Does the company face sanctions from regulators for not making an announcement within the stipulated time frame for a material event? (ASEAN CG Score Card P.C.2.1)	
	8 Apakah ada bukti bahwa perusahaan tidak mematuhi aturan dan peraturan pencatatan apa pun selama setahun terakhir selain dari aturan pengungkapan? (ASEAN CG Score Card P.E.1.1) Is there any evidence that the company has not complied with any listing rules and regulations over the last year apart from the disclosure rules? (ASEAN CG Score Card P.E.1.1)	
B	3 Pertanyaan dari Sumber Lainnya Questions from Other Sources	
B	3 1 Pertanyaan Bonus Bonus Questions	
	1 Sertifikasi profesi (misalnya dalam bidang Risiko, Akuntansi, Perpajakan, IT, Hukum) yang dimiliki oleh (Kriteria ARA 2018) Professional certification (for example in the fields of Risk, Accounting, Taxation, IT, Law) owned by (2018 ARA Criteria)	
	a) Komite Audit Audit Committee	226
	b) Komite Nominasi dan Remunerasi Nomination and Remuneration Committee	232
	c) Komite Manajemen Risiko Risk Management Committee	237
	d) Komite Lainnya Other Committees	
	2 Pengungkapan kerangka governansi, pengelolaan dan pengendalian aspek perpajakan di perusahaan (GRI) Disclosure of the framework of governance, management and control of taxation aspects in companies (GRI)	436-438
B	3 2 Pertanyaan Penalti Penalty Question	
	Apakah perusahaan memperoleh putusan bersalah dari pengadilan pajak tertinggi terkait masalah perpajakan apapun selama tiga tahun terakhir (sumber lainnya) Has the company obtained a guilty verdict from the highest tax court regarding any taxation issues in the last three years (other sources)	256-259

INDEKS POJK 51/POJK.03/2017 [0JK G.4]

POJK 51/POJK.03/2017 INDEX

No Indeks Index No.	Nama Indeks Index Description	Halaman Page
Strategi Keberlanjutan Sustainability Strategy		
A.1	Penjelasan Strategi Keberlanjutan Sustainability Strategy Statement	304
Ikhtisar Kinerja Aspek Keberlanjutan Sustainability Performance Highlight		
B.1	Aspek Ekonomi Economic Aspect	319
B.2	Aspek Lingkungan Hidup Environmental Aspect	320
B.3	Aspek Sosial Social Aspect	321
Profil Perusahaan Company Profile		
C.1	Visi, Misi, dan Nilai Keberlanjutan Vision, Mission, and Sustainability Values	66
C.2	Alamat Perusahaan Company Address	72
C.3	Skala Usaha Scale of Organization	72
C.4	Produk, Layanan, dan Kegiatan Usaha yang Dijalankan Products, Services, and Business Activities Undertaken	68
C.5	Keanggotaan pada Asosiasi Membership in the Association	78
C.6	Perubahan Emiten dan Perusahaan Publik yang Bersifat Signifikan Significant Change in Issuers and Public Companies	109
Penjelasan Direksi Report of the Board of Directors		
D.1	Penjelasan Direksi Report of the Board of Directors	327
Tata Kelola Keberlanjutan Sustainability Governance		
E.1	Penanggungjawab Penerapan Keuangan berkelanjutan Person in Charge of Sustainable Finance Implementation	334
E.2	Pengembangan Kompetensi Terkait Keuangan berkelanjutan Competency Development Related to Sustainable	343
E.3	Penilaian Risiko Atas Penerapan Keuangan berkelanjutan Risk Assessment on the Sustainable Finance Implementation	345
E.4	Hubungan dengan Pemangku Kepentingan Relations with Stakeholders	346
E.5	Permasalahan terhadap Penerapan Keuangan Berkelanjutan Issues Against the Sustainable Finance Implementation	304
Kinerja Keberlanjutan Sustainability Performance		
F.1	Kegiatan Membangun Budaya Keberlanjutan Activities to Build a Culture of Sustainability	371

No Indeks Index No.	Nama Indeks Index Description	Halaman Page
Kinerja Ekonomi Economic Performance		
F.2	Perbandingan Target dan Kinerja Produksi, Portofolio, Target Pembiayaan, atau Investasi, Pendapatan dan Laba Rugi Comparison of Production Targets and Performance, Portfolios, Financing Targets, or Investments, Income and Profit and Loss	351
F.3	Perbandingan Target dan Kinerja Portofolio, Target Pembiayaan, atau Investasi Pada Instrumen Keuangan atau Proyek yang Sejalan dengan Penerapan Keuangan Berkelanjutan Comparison of Portfolio Targets and Performance, Financing Targets, or Investments in Financial Instruments or Projects that are in Line with Sustainable Finance Implementation	351
Kinerja Lingkungan Hidup Environmental Performance		
Aspek Umum General Affairs Aspect		
F.4	Biaya Lingkungan Environmental Costs	359
Aspek Material Material Aspect		
F.5	Penggunaan Material Yang Ramah Lingkungan Use of Environmentally Friendly Materials	362
Aspek Energi Energy Aspect		
F.6	Jumlah dan Intensitas Energi yang Digunakan Amount and Intensity of Used Energy	363
F.7	Upaya dan Pencapaian Efisiensi Energi dan Penggunaan Energi Terbarukan Attempts and Achievement of Energy Efficiency and Use of Renewable Energy	362
Aspek Air Water Aspect		
F.8	Penggunaan Air Water Usage	364
Aspek Keanekaragaman Hayati Biodiversity Aspect		
F.9	Dampak dari Wilayah Operasional yang Dekat atau Berada di Daerah Konservasi atau Memiliki Keanekaragaman Hayati Impact of Operational Areas Nearby or Located in Conservation Areas or Those Having Biodiversity	364
F.10	Usaha Konservasi Keanekaragaman Hayati Attempts of Biodiversity Conservation	364
Aspek Emisi Emission Aspect		
F.11	Jumlah dan Intensitas Emisi yang Dihasilkan Berdasarkan Jenisnya Amount and Intensity of Produced Emissions by Type	366
F.12	Upaya dan Pencapaian Pengurangan Emisi yang Dilakukan Amount and Intensity of Resulting Emissions by Type of Emission Reduction Efforts and Achievements Conducted	365
Aspek Limbah dan Efluen Waste and Effluent Aspect		
F.13	Jumlah Limbah dan Efluen yang Dihasilkan Berdasarkan Jenis The Amount of Waste and Effluent Generated by Type	366
F.14	Mekanisme Pengelolaan Limbah dan Efluen Waste and Effluent Management Mechanisms	366
F.15	Tumpahan yang Terjadi (Jika Ada) Leakage, if any	366
Aspek Pengaduan Terkait Lingkungan Hidup Complaint Aspect Related to the Environment		
F.16	Jumlah dan Materi Pengaduan Lingkungan Hidup yang Diterima dan Diselesaikan Number and Material of Environmental Complaints Received and Resolved	368

No Indeks Index No.	Nama Indeks Index Description	Halaman Page
Kinerja Sosial Social performance		
F.17	Komitmen LJK, Emiten, atau Perusahaan Publik untuk Memberikan Layanan atas Produk dan/atau Jasa yang Setara Kepada Konsumen Commitment of Financial Services Institutions, Issuers, or Public Companies to Provide Equal Services for Products and/or Services to Customers	354
Aspek Ketenagakerjaan Employment Aspect		
F.18	Kesetaraan Kesempatan Bekerja Equal Opportunity to Work	372
F.19	Tenaga Kerja Anak dan Tenaga Kerja Paksa Child Labor and Forced Labor	372
F.20	Upah Minimum Regional Regional Minimum Wage	378
F.21	Lingkungan Bekerja yang Layak dan Aman Decent and Safe Work Environment	387
F.22	Pelatihan dan Pengembangan Kemampuan Pegawai Training and Capacity Building for Employees	384
Aspek Masyarakat Community Aspect		
F.23	Dampak Operasi Terhadap Masyarakat Sekitar Impact of Operations on the Surrounding Communities	393
F.24	Pengaduan Masyarakat Public Complaints	404
F.25	Kegiatan Tanggung Jawab Sosial Lingkungan (TJSL) Environmental Social Responsibility (TJSL) Activities	307
Tanggung Jawab Pengembangan Produk/Jasa Berkelanjutan Responsibility for Sustainable Product/Service Development		
F.26	Inovasi dan Pengembangan Produk/Jasa Keuangan Berkelanjutan Sustainable Financial Product/Service Innovation and Development	354
F.27	Produk/Jasa yang sudah Dievaluasi Keamanannya Bagi Pelanggan Products/Services Safety that Have Been Evaluated for Customers	356
F.28	Dampak Produk/Jasa Impacts of Product/Service	354
F.29	Jumlah Produk yang Ditarik Kembali Number of Recalled Products	69
F.30	Survei Kepuasan Pelanggan terhadap Produk dan/atau Jasa Keuangan Berkelanjutan Customer Satisfaction Survey of Sustainable Financial Products and/or Services	355
Lain-lain Others		
G.1	Verifikasi Tertulis dari Pihak Independen (jika Ada) Written Verification by the Independent, if any	315
G.2	Lembar Umpan Balik Feedback Sheet	406
G.3	Tanggapan Terhadap Umpan Balik Laporan Keberlanjutan Tahun Sebelumnya Responses to the Preceding Year's Report Feedback	405
G.4	Daftar Pengungkapan Sesuai POJK 51/2017 tentang Penerapan Keuangan Berkelanjutan bagi Lembaga Jasa Keuangan, Emiten dan Perusahaan Publik List of Disclosures in Accordance with POJK 51/2017 regarding Sustainable Finance Implementation for Financial Services Institutions, Issuers and Public Companies	433

INDEKS ISI GRI

GRI CONTENT INDEX - WITH REFERENCE

Pernyataan Penggunaan Statement of use	Perumda Sarana Jaya telah melaporkan informasi yang dikutip dalam indeks konten GRI ini untuk periode 1 Januari - 31 Desember 2023 dengan mengacu pada Standar GRI. Perumda Sarana Jaya has reported the information cited in this GRI content index for the period January 1 - December 31, 2023 with reference to the GRI Standards.
GRI 1 digunakan GRI 1 used	GRI 1: Landasan 2021 GRI 1: Foundation 2021

Standar GRI GRI Standard	Pengungkapan Disclosure	Halaman Page
GRI 2: Pengungkapan Umum 2021 GRI 2: General Disclosures 2021	2-1 Rincian Organisasi Organizational details	60
	2-2 Entitas yang dicantumkan dalam pelaporan keberlanjutan organisasi Entities included in the organization's sustainability reporting	316
	2-3 Periode, frekuensi, dan titik kontak pelaporan Reporting period, frequency and contact point	318
	2-4 Penyajian kembali informasi Restatements of information	316
	2-5 Penjaminan eksternal External assurance	315
	2-6 Kegiatan, rantai nilai dan hubungan bisnis lain Activities, value chain and other business relationships	68
	2-7 Karyawan Employees	373
	2-8 Pekerja yang bukan karyawan Workers who are not employees	373
	2-9 Struktur dan komposisi tata kelola Governance structure and composition	333
	2-10 Nominasi dan pemilihan badan tata kelola tertinggi Nomination and selection of the highest governance body	218
	2-11 Kepada badan tata kelola tertinggi Chair of the highest governance body	334
	2-12 Peran badan tata kelola tertinggi dalam mengawasi pengelolaan dampak Role of the highest governance body in overseeing the management of impacts	334
	2-13 Pembagian tanggung jawab untuk mengelola dampak Delegation of responsibility for managing impacts	334
	2-14 Peran badan tata kelola tertinggi dalam pelaporan keberlanjutan Role of the highest governance body in sustainability reporting	334
	2-15 Benturan kepentingan Conflicts of interest	335
	2-16 Komunikasi yang menjadi perhatian penting Communication of critical concerns	347
	2-17 Pengetahuan kolektif dari badan tata kelola tertinggi Collective knowledge of the highest governance body	200
	2-18 Evaluasi kinerja badan tata kelola tertinggi Evaluation of the performance of the highest governance body	214
	2-19 Kebijakan remunerasi Remuneration policies	218

	2-20	Proses untuk menentukan remunerasi Process to determine remuneration	218
	2-21	Rasio jumlah kompensasi tahunan Annual total compensation ratio	219
	2-22	Pernyataan strategi pengembangan berkelanjutan Statement on sustainable development strategy	304
	2-23	Komitmen kebijakan Policy commitments	66
	2-24	Menanamkan komitmen kebijakan Embedding policy commitments	304
	2-25	Proses untuk memulihkan dampak negatif Processes to remediate negative impacts	347
	2-26	Mekanisme untuk meminta saran dan menyampaikan kekhawatiran Mechanisms for seeking advice and raising concerns	347
	2-27	Kepatuhan terhadap hukum dan peraturan Compliance with laws and regulations	336
	2-28	Keanggotaan asosiasi Membership associations	78
	2-29	Pendekatan terhadap pelibatan pemangku kepentingan Approach to stakeholder engagement	346
	2-30	Perjanjian kerja bersama Collective bargaining agreements	372
GRI 3: Topik Material 2021 GRI 3: Material Topics 2021	3-1	Proses untuk menentukan topik material Process to determine material topics	314
	3-2	Daftar topik material List of material topics	316
	3-3	3-3 Pengelolaan topik material Management of material topics	316
GRI 201: Kinerja Ekonomi 2016 GRI 201: Economic Performance 2016	201-1	Nilai ekonomi langsung yang dihasilkan dan didistribusikan Direct economic value generated and distributed	351
GRI 202: Keberadaan Pasar 2016 GRI 202: Market Presence 2016	202-1	Rasio upah standar tingkat pemula berdasarkan jenis kelamin dibandingkan dengan upah minimum setempat Ratios of standard entry level wage by gender compared to local minimum wage	378
GRI 203: Dampak Ekonomi Tidak Langsung 2016 GRI 203: Indirect Economic Impacts 2016	203-1	Investasi infrastruktur dan dukungan layanan Infrastructure investments and services supported	353
	203-2	Dampak signifikan ekonomi tidak langsung Significant indirect economic impacts	353
GRI 204: Procurement Practices 2016	204-1	Proporsi pengeluaran untuk pemasok lokal Proportion of spending on local suppliers	354
GRI 205: Anti-korupsi 2016 GRI 205: Anti-corruption 2016	205-1	Operasional dinilai untuk risiko berkaitan dengan korupsi Operations assessed for risks related to corruption	342
	205-2	Komunikasi dan pelatihan tentang kebijakan dan prosedur antikorupsi Communication and training about anti-corruption policies and procedures	343
	205-3	Insiden korupsi yang terkonfirmasi dan tindakan yang diambil Confirmed incidents of corruption and actions taken	344
GRI 207: Pajak 2019 GRI 207: Tax 2019	207-1	Pendekatan terhadap pajak Approach to tax	274
	207-2	Tata kelola pajak, kontrol dan manajemen risiko Tax governance, control, and risk management	348
	207-3	Pelibatan pemangku kepentingan dan manajemen perhatian terkait pajak Stakeholder engagement and management of concerns related to tax	352
	207-4	Pelaporan per negara Country-by-country reporting	352

GRI 302: Energi 2016 GRI 302: Energy 2016	302-1	Konsumsi energi di dalam organisasi Energy consumption within the organization	363
GRI 303: Air dan Efluen 2018 GRI 303: Water and Effluents 2018	303-5	Konsumsi Air Water consumption	364
GRI 305: Emisi 2016 GRI 305: Emissions 2016	305-1	Emisi GRK Langsung (Cakupan 1) Direct (Scope 1) GHG emissions	366
	305-2	Emisi GRK Energi Tidak Langsung (Cakupan 2) Energy indirect (Scope 2) GHG emissions	366
GRI 306: Limbah 2020 GRI 306: Waste 2020	306-2	Pengelolaan dampak terkait limbah signifikan Management of significant waste-related impacts	366
	306-3	Limbah yang dihasilkan Waste generated	366
GRI 401: Ketenagakerjaan 2016 GRI 401: Employment 2016	401-1	Karyawan baru yang direkrut dan perputaran karyawan New employee hires and employee turnover	376
	401-2	Manfaat yang diberikan kepada karyawan penuh waktu yang tidak diberikan kepada karyawan sementara atau paruh waktu Benefits provided to full-time employees that are not provided to temporary or part-time employees	378
	401-3	Cuti orang tua Parental leave	379
GRI 403: Kesehatan dan Keselamatan Kerja 2018 GRI 403: Occupational Health and Safety 2018	403-1	Sistem manajemen kesehatan dan keselamatan kerja Occupational health and safety management system	388
	403-2	Identifikasi bahaya, penilaian risiko, dan investigasi insiden Hazard identification, risk assessment, and incident investigation	389
GRI 404: Pelatihan dan Pendidikan 2016 GRI 404: Training and Education 2016	404-1	Rata-rata jam pelatihan per tahun per karyawan Average hours of training per year per employee	384
	404-2	Program untuk meningkatkan keterampilan karyawan dan program dukungan transisi Programs for upgrading employee skills and transition assistance programs	384
	404-3	Persentase karyawan yang menerima tinjauan kinerja dan pengembangan karier secara berkala Percentage of employees receiving regular performance and career development reviews	386
GRI 405: Keberagaman dan Kesempatan yang Sama 2016 GRI 405: Diversity and Equal Opportunity 2016	405-1	Keberagaman badan tata kelola dan karyawan Diversity of governance bodies and employees	373
	405-2	Rasio gaji dasar dan remunerasi wanita terhadap pria Ratio of basic salary and remuneration of women to men	378
GRI 413: Masyarakat Lokal 2016 GRI 413: Local Communities 2016	413-1	Operasi dengan pelibatan masyarakat sekitar, penilaian dampak, dan program pengembangan Operations with local community engagement, impact assessments, and development programs	393
GRI 416: Kesehatan dan Keselamatan Pelanggan 2016 GRI 416: Customer Health and Safety 2016	416-2	Insiden ketidakpatuhan terkait dampak kesehatan dan keselamatan dari produk dan layanan Incidents of non-compliance concerning the health and safety impacts of products and services	356

Halaman ini sengaja dikosongkan
This page has intentionally left blank

The image shows the cover of a financial report. The background is a vibrant blue sky with a few white clouds. On the right side, there is a tall, modern building with many windows. In the foreground, there are lush green trees. The text is positioned on the left side of the cover.

07

Laporan Keuangan

Financial Report



PERUSAHAAN UMUM DAERAH PEMBANGUNAN SARANA JAYA DAN ENTITAS ANAK

LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN TANGGAL 31 DESEMBER 2023
DAN UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR PADA TANGGAL TERSEBUT
BESERTA LAPORAN AUDITOR INDEPENDEN



**PERUSAHAAN UMUM DAERAH PEMBANGUNAN SARANA JAYA DAN ENTITAS ANAK
LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN TANGGAL 31 DESEMBER 2023 DAN 2022
DAN UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR PADA TANGGAL TERSEBUT
BESERTA LAPORAN AUDITOR INDEPENDEN**

Daftar Isi

	Halaman
Surat Pernyataan Direksi	
Laporan Auditor Independen	
Laporan Posisi Keuangan Konsolidasian	1 - 2
Laporan Laba Rugi dan Penghasilan Komprehensif Lain Konsolidasian	3
Laporan Perubahan Ekuitas Konsolidasian	4
Laporan Arus Kas Konsolidasian	5
Catatan atas Laporan Keuangan Konsolidasian	6 - 65

SURAT PERNYATAAN DIREKSI

TENTANG

**TANGGUNG JAWAB ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN
TANGGAL 31 DESEMBER 2023
DAN UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR PADA TANGGAL TERSEBUT
PERUMDA PEMBANGUNAN SARANA JAYA DAN ENTITAS ANAK**

Kami yang bertanda tangan di bawah ini:

1. Nama : Andira Reoputra
Alamat kantor : Gedung Sarana Jaya Lantai 3
Jalan Budi Kemuliaan I No. I Jakarta Pusat 10110
Nomor Telepon : (021) 3522667
Jabatan : Direktur Utama
2. Nama : Irwan Agustusan
Alamat Kantor : Gedung Sarana Jaya Lantai 3
Jalan Budi Kemuliaan I No. I Jakarta Pusat 10110
Nomor Telepon : (021) 3522667
Jabatan : Direktur Administrasi dan Keuangan

Menyatakan bahwa:

1. Direksi bertanggung jawab atas penyusunan dan penyajian Laporan Keuangan Konsolidasian Perumda Pembangunan Sarana Jaya dan Entitas Anak;
2. Laporan Keuangan Konsolidasian Perusahaan dan Entitas Anak telah disusun dan disajikan sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia;
 - a. Semua informasi dalam Laporan Keuangan Konsolidasian Perusahaan dan Entitas Anak telah dimuat secara lengkap dan benar;
 - b. Laporan Keuangan Konsolidasian Perusahaan dan Entitas Anak tidak mengandung informasi atau fakta material yang tidak benar dan tidak menghilangkan informasi atau fakta material;
3. Direksi bertanggung jawab atas sistem pengendalian internal Perusahaan dan Entitas Anak.

Demikian pernyataan ini dibuat dengan sebenarnya. Atas nama dan mewakili Direksi.

Jakarta, 25 Maret 2024


Andira Reoputra
Direktur Utama


Irwan Agustusan
Direktur Administrasi dan Keuangan



LAPORAN AUDITOR INDEPENDEN

No. 00362/2.0459/AU.1/03/0916-2/1/III/2024

Dewan Pengawas dan Direksi

Perusahaan Umum Daerah Pembangunan Sarana Jaya dan Entitas Anak

Opini

Kami telah mengaudit laporan keuangan konsolidasian Perusahaan Umum Daerah Pembangunan Sarana Jaya dan Entitas Anak ("Grup") yang terdiri dari laporan posisi keuangan konsolidasian tanggal 31 Desember 2023, serta laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain, laporan perubahan ekuitas, dan laporan arus kas konsolidasian untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut, serta catatan atas laporan keuangan konsolidasian, termasuk informasi kebijakan akuntansi material.

Menurut opini kami, laporan keuangan konsolidasian terlampir menyajikan secara wajar, dalam semua hal yang material, posisi keuangan konsolidasian Grup tanggal 31 Desember 2023, serta kinerja keuangan dan arus kas konsolidasian untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut, sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia.

Basis Opini

Kami melaksanakan audit kami berdasarkan Standar Audit yang ditetapkan oleh Institut Akuntan Publik Indonesia. Tanggung jawab kami menurut standar tersebut diuraikan lebih lanjut dalam paragraf Tanggung Jawab Auditor terhadap Audit atas Laporan Keuangan Konsolidasian pada laporan kami. Kami independen terhadap Grup berdasarkan ketentuan etika yang relevan dalam audit kami atas laporan keuangan di Indonesia, dan kami telah memenuhi tanggung jawab etika lainnya berdasarkan ketentuan tersebut. Kami yakin bahwa bukti audit yang telah kami peroleh adalah cukup dan tepat untuk menyediakan suatu basis bagi opini audit kami.

Tanggung Jawab Manajemen dan Pihak yang Bertanggung Jawab atas Tata Kelola terhadap Laporan Keuangan Konsolidasian

Manajemen bertanggung jawab atas penyusunan dan penyajian wajar laporan keuangan konsolidasian tersebut sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia, dan atas pengendalian internal yang dianggap perlu oleh manajemen untuk memungkinkan penyusunan laporan keuangan konsolidasian yang bebas dari kesalahan penyajian material, baik yang disebabkan oleh kecurangan maupun kesalahan.

Dalam penyusunan laporan keuangan konsolidasian, manajemen bertanggung jawab untuk menilai kemampuan Grup dalam mempertahankan kelangsungan usahanya, mengungkapkan, sesuai dengan kondisinya, hal-hal yang berkaitan dengan kelangsungan usaha, dan menggunakan basis akuntansi kelangsungan usaha, kecuali manajemen memiliki intensi untuk melikuidasi Grup atau menghentikan operasi, atau tidak memiliki alternatif yang realistis selain melaksanakannya.

Pihak yang bertanggung jawab atas tata kelola bertanggung jawab untuk mengawasi proses pelaporan keuangan Grup.

Tanggung Jawab Auditor terhadap Audit atas Laporan Keuangan Konsolidasian

Tujuan kami adalah untuk memperoleh keyakinan memadai tentang apakah laporan keuangan konsolidasian secara keseluruhan bebas dari kesalahan penyajian material, baik yang disebabkan oleh kecurangan maupun kesalahan, dan untuk menerbitkan laporan auditor yang mencakup opini kami. Keyakinan memadai merupakan suatu tingkat keyakinan tinggi, namun bukan merupakan suatu jaminan bahwa audit yang dilaksanakan berdasarkan Standar Audit akan selalu mendeteksi kesalahan penyajian material ketika hal tersebut ada. Kesalahan penyajian dapat disebabkan oleh kecurangan maupun kesalahan dan dianggap material jika, baik secara individual maupun secara agregat, dapat diekspektasikan secara wajar akan memengaruhi keputusan ekonomi yang diambil oleh pengguna berdasarkan laporan keuangan konsolidasian tersebut.



HELIANTONO & REKAN

Parker Russell International

Registered Public Accountants

Sebagai bagian dari suatu audit berdasarkan Standar Audit, kami menerapkan pertimbangan profesional dan mempertahankan skeptisisme profesional selama audit. Kami juga:

1. Mengidentifikasi dan menilai risiko kesalahan penyajian material dalam laporan keuangan konsolidasian, baik yang disebabkan oleh kecurangan maupun kesalahan, mendesain dan melaksanakan prosedur audit yang responsif terhadap risiko tersebut, serta memperoleh bukti audit yang cukup dan tepat untuk menyediakan basis bagi opini kami. Risiko tidak terdeteksinya kesalahan penyajian material yang disebabkan oleh kecurangan lebih tinggi dari yang disebabkan oleh kesalahan, karena kecurangan dapat melibatkan kolusi, pemalsuan, penghilangan secara sengaja, pernyataan salah, atau pengabaian pengendalian internal.
2. Memperoleh suatu pemahaman tentang pengendalian internal yang relevan dengan audit untuk mendesain prosedur audit yang tepat sesuai dengan kondisinya, tetapi bukan untuk tujuan menyatakan opini atas keefektifitasan pengendalian internal Grup.
3. Mengevaluasi ketepatan kebijakan akuntansi yang digunakan serta kewajaran estimasi akuntansi dan pengungkapan terkait yang dibuat oleh manajemen.
4. Menyimpulkan ketepatan penggunaan basis akuntansi kelangsungan usaha oleh manajemen dan, berdasarkan bukti audit yang diperoleh, apakah terdapat suatu ketidakpastian material yang terkait dengan peristiwa atau kondisi yang dapat menyebabkan keraguan signifikan atas kemampuan Grup untuk mempertahankan kelangsungan usahanya. Ketika kami menyimpulkan bahwa terdapat suatu ketidakpastian material, kami diharuskan untuk menarik perhatian dalam laporan auditor kami ke pengungkapan terkait dalam laporan keuangan konsolidasian atau, jika pengungkapan tersebut tidak memadai, harus menentukan apakah perlu untuk memodifikasi opini kami. Kesimpulan kami didasarkan pada bukti audit yang diperoleh hingga tanggal laporan auditor kami. Namun, peristiwa atau kondisi masa depan dapat menyebabkan Grup tidak dapat mempertahankan kelangsungan usaha.
5. Mengevaluasi penyajian, struktur, dan isi laporan keuangan konsolidasian secara keseluruhan, termasuk pengungkapannya, dan apakah laporan keuangan konsolidasian mencerminkan transaksi dan peristiwa yang mendasarinya dengan suatu cara yang mencapai penyajian wajar.
6. Memperoleh bukti audit yang cukup dan tepat terkait informasi keuangan entitas atau aktivitas bisnis dalam Grup untuk menyatakan opini atas laporan keuangan konsolidasian. Kami bertanggung jawab atas arahan, supervisi, dan pelaksanaan audit Grup. Kami tetap bertanggung jawab sepenuhnya atas opini audit kami.

Kami mengomunikasikan kepada pihak yang bertanggung jawab atas tata kelola mengenai, antara lain, ruang lingkup dan saat yang direncanakan atas audit, serta temuan audit signifikan, termasuk setiap defisiensi signifikan dalam pengendalian internal yang teridentifikasi oleh kami selama audit.

Kantor Akuntan Publik/ Registered Public Accountant

Heliantonono & Rekan

Ade Ikhwan, S.E., CPA

Partner

Ijin Akuntan Publik/ Licence of Public Accountant No. AP. 0916

Jakarta, 25 Maret 2024/ March 25, 2024



PERUSAHAAN UMUM DAERAH PEMBANGUNAN SARANA JAYA DAN ENTITAS ANAK
LAPORAN POSISI KEUANGAN KONSOLIDASIAN
TANGGAL 31 DESEMBER 2023 DAN 2022
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

	<u>Catatan</u>	<u>2023</u>	<u>2022</u>
ASET			
ASET LANCAR			
Kas dan setara kas	2f, 2l, 4, 37	226.654.238.993	439.613.667.328
Piutang usaha – pihak ketiga	2g, 2l, 5a, 37	158.345.628.979	19.063.882.056
Piutang lain-lain – pihak ketiga	2g, 2l, 6, 37	50.095.190.684	33.788.950.652
Uang muka dan biaya dibayar dimuka	2n, 7	2.590.400.367	598.043.714
Pajak dibayar dimuka	2r, 21a	103.291.805.557	201.407.780.840
Aset real estat	2h, 10	433.797.686.369	273.614.190.376
JUMLAH ASET LANCAR		974.774.950.949	968.086.514.966
ASET TIDAK LANCAR			
Piutang usaha – pihak ketiga	2g, 2l, 5b, 37	24.888.255.597	74.102.014.577
Uang muka investasi	16	56.145.700.000	102.923.700.000
Investasi jangka panjang lainnya	2l, 8, 37	4.025.141.075	4.025.404.843
Aset kerja sama operasi – tanah	2p, 9	29.352.981.278	29.352.981.278
Aset kerja sama operasi – bangunan	2p, 9	271.701.342.826	247.142.706.286
Aset real estat	2h, 10	3.261.894.089.954	3.208.920.714.340
Properti investasi – neto	2i, 11	642.182.155.412	840.464.945.616
Aset tetap – neto	2j, 13	11.029.240.763	10.617.074.161
Aset hak guna – neto	2t, 15	220.464.213	103.294.265
Aset takberwujud – neto	2k, 14	136.921.667	387.631.963
Beban ditangguhkan	12	9.683.306.955	9.314.532.464
Uang muka pembelian aset	17	649.217.900.000	800.440.976.600
Aset pajak tangguhan	2r, 21d	21.967.653.341	23.290.688.988
Kas yang dibatasi penggunaannya	22	92.000.000.000	74.901.049
Aset lain-lain	18	235.813.248.918	76.148.462.896
JUMLAH ASET TIDAK LANCAR		5.310.258.401.999	5.427.310.029.326
JUMLAH ASET		6.285.033.352.948	6.395.396.544.292

PERUSAHAAN UMUM DAERAH PEMBANGUNAN SARANA JAYA DAN ENTITAS ANAK
LAPORAN POSISI KEUANGAN KONSOLIDASIAN
TANGGAL 31 DESEMBER 2023 DAN 2022
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

	Catatan	2023	2022
LIABILITAS DAN EKUITAS			
LIABILITAS			
LIABILITAS JANGKA PENDEK			
Utang usaha – pihak ketiga	2l, 2m, 19, 37	70.895.153.151	65.229.175.535
Utang lain-lain – pihak ketiga	2l, 2m, 20, 37	17.386.292.635	14.718.682.044
Beban akrual	2l, 23, 37	6.245.849.453	4.911.912.981
Utang pajak	2r, 21b	22.768.779.219	46.537.043.602
Liabilitas sewa	2t	-	6.792.648
Pendapatan diterima dimuka yang direalisasi dalam satu tahun:			
Sewa	24a	29.248.422.912	70.543.548.465
Penjualan dan kerja sama	24b	721.769.321	1.600.848.467
Aset kerja sama operasi	24c	91.666.674	91.666.667
Pendapatan ditangguhkan		3.500.000.000	3.500.000.000
Utang jangka panjang yang jatuh tempo dalam satu tahun:			
Pinjaman bank	2l, 25, 37	119.344.256.000	400.000.000.000
JUMLAH LIABILITAS JANGKA PENDEK		270.202.189.365	607.139.670.409
LIABILITAS JANGKA PANJANG			
Pendapatan diterima dimuka setelah dikurangi bagian yang direalisasi dalam satu tahun:			
Penjualan dan kerja sama	24b	9.445.875.929	5.531.538.082
Aset kerja sama operasi	24c	86.972.047.882	83.882.137.233
Liabilitas sewa	2t	209.733.333	1.004.290.583
Pinjaman bank	2l, 25, 37	266.730.110.880	-
Pendapatan ditangguhkan	27	78.780.584.889	40.833.333.315
Liabilitas imbalan pasca kerja	2s, 26	8.198.733.559	14.118.815.321
Provisi litigasi	2v, 28	8.001.488.000	8.001.488.000
Utang lain-lain	2l, 2m, 37	874.812.613	737.811.409
JUMLAH LIABILITAS JANGKA PANJANG		459.213.387.085	154.109.413.943
JUMLAH LIABILITAS		729.415.576.450	761.249.084.352
EKUITAS			
Modal dasar sebesar Rp10.000.000.000.000 – modal ditempatkan dan disetor	29	5.625.000.000.000	5.625.000.000.000
Saldo laba/(rugi)	30		
Telah ditentukan penggunaannya		81.939.862.696	81.939.862.696
Belum ditentukan penggunaannya		(145.289.258.780)	(64.175.492.912)
Penghasilan komprehensif lain		(6.722.099.852)	(9.674.040.777)
Jumlah ekuitas yang dapat diatribusikan kepada pemilik entitas induk		5.554.928.504.064	5.633.090.329.007
Kepentingan non-pengendali	31	689.272.434	1.057.130.933
JUMLAH EKUITAS		5.555.617.776.498	5.634.147.459.940
JUMLAH LIABILITAS DAN EKUITAS		6.285.033.352.948	6.395.396.544.292

PERUSAHAAN UMUM DAERAH PEMBANGUNAN SARANA JAYA DAN ENTITAS ANAK
LAPORAN LABA RUGI DAN PENGHASILAN KOMPREHENSIF LAIN KONSOLIDASIAN
UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR PADA TANGGAL 31 DESEMBER 2023 DAN 2022
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

	Catatan	2023	2022
Pendapatan	2q, 32	211.954.260.361	158.435.137.711
Beban pokok pendapatan	2q, 33	(184.819.412.836)	(151.824.162.492)
LABA KOTOR		27.134.847.525	6.610.975.219
Beban pemasaran	2q, 34	(2.988.587.406)	(4.059.615.121)
Beban administrasi dan umum	2q, 35	(108.369.970.984)	(112.226.270.583)
RUGI USAHA		(84.223.710.865)	(109.674.910.485)
PENDAPATAN/(BEBAN) LAIN-LAIN	2q, 36		
Pendapatan bunga		2.874.523.862	2.706.015.821
Jasa giro		2.428.772.064	2.416.854.250
(Rugi)/laba atas operasi bersama		(1.308.920.895)	63.842.710
Cadangan kerugian piutang		-	(104.610.780.209)
Lain-lain		(16.131.479.547)	269.402.881.549
JUMLAH (BEBAN)/PENDAPATAN LAIN-LAIN		(12.137.104.516)	169.978.814.121
(RUGI)/LABA SEBELUM PAJAK PENGHASILAN		(96.360.815.381)	60.303.903.636
MANFAAT/(BEBAN) PAJAK PENGHASILAN			
Pajak kini	2r, 21c	(156.374.680)	(1.171.475.251)
Pajak final	2r, 21c	(1.858.230.808)	(2.755.399.653)
Pajak tangguhan	2r, 21c	(487.819.490)	22.584.210.472
JUMLAH (BEBAN)/MANFAAT PAJAK PENGHASILAN		(2.502.424.978)	18.657.335.568
(RUGI)/LABA TAHUN BERJALAN		(98.863.240.359)	78.961.239.204
PENGHASILAN/(RUGI) KOMPREHENSIF LAIN			
Pos-pos yang tidak akan direklasifikasi ke laba rugi			
Pengukuran kembali atas kewajiban imbalan pasti		3.796.437.075	(390.586.990)
Pajak tangguhan		(835.216.156)	85.929.138
PENGHASILAN/(BEBAN) KOMPREHENSIF LAIN TAHUN BERJALAN		2.961.220.919	(304.657.852)
JUMLAH (RUGI)/LABA KOMPREHENSIF TAHUN BERJALAN		(95.902.019.440)	78.656.581.352
(RUGI)/LABA TAHUN BERJALAN YANG DAPAT DIATRIBUSIKAN KEPADA:			
Pemilik entitas induk		(98.486.101.866)	79.284.588.948
Kepentingan non-pengendali		(377.138.493)	(323.349.744)
		(98.863.240.359)	78.961.239.204
(RUGI)/LABA KOMPREHENSIF LAIN TAHUN BERJALAN YANG DAPAT DIATRIBUSIKAN KEPADA:			
Pemilik entitas induk		(95.534.160.941)	78.983.353.367
Kepentingan non-pengendali		(367.858.499)	(326.772.015)
		(95.902.019.440)	78.656.581.352

PERUSAHAAN UMUM DAERAH PEMBANGUNAN SARANA JAYA DAN ENTITAS ANAK
LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS KONSOLIDASIAN
UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR PADA TANGGAL 31 DESEMBER 2023 DAN 2022
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

	Saldo Laba/(Rugi)						Jumlah Ekuitas
	Modal Ditempatkan dan Disetor	Telah Ditetapkan Penggunaannya	Belum Ditetapkan Penggunaannya	Penghasilan Komprehensif Lain	Jumlah	Keperntingan Non-Pengendali	
Saldo per 31 Desember 2021	5.375.000.000.000	81.939.862.696	(33.166.504.228)	(9.362.113.220)	5.414.411.245.248	1.383.902.948	5.415.795.148.196
Penambahan modal	250.000.000.000	-	-	-	250.000.000.000	-	250.000.000.000
Laba tahun berjalan	-	-	79.284.588.948	-	79.284.588.948	(323.349.744)	78.961.239.204
Beban komprehensif lain	-	-	-	(301.235.581)	(301.235.581)	(3.422.271)	(304.657.852)
Penyajian kembali	-	-	(110.293.577.632)	(10.691.976)	(110.304.269.608)	-	(110.304.269.608)
Saldo per 31 Desember 2022	5.625.000.000.000	81.939.862.696	(64.175.492.912)	(9.674.040.777)	5.633.090.329.007	1.057.130.933	5.634.147.459.940
Rugi tahun berjalan	-	-	(98.486.101.866)	-	(98.486.101.866)	(377.138.493)	(98.863.240.359)
Penghasilan komprehensif lain	-	-	-	2.951.940.925	2.951.940.925	9.279.994	2.961.220.919
Penyesuaian (Catatan 30)	-	-	31.852.438.273	-	31.852.438.273	-	31.852.438.273
Dampak pelepasan Tower A KSO NPK (Catatan 30)	-	-	(14.480.102.275)	-	(14.480.102.275)	-	(14.480.102.275)
Saldo per 31 Desember 2023	5.625.000.000.000	81.939.862.696	(145.289.258.780)	(6.722.099.852)	5.554.928.504.064	689.272.434	5.555.617.776.498

Catatan atas laporan keuangan konsolidasian terlampir merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari laporan keuangan konsolidasian secara keseluruhan

PERUSAHAAN UMUM DAERAH PEMBANGUNAN SARANA JAYA DAN ENTITAS ANAK
LAPORAN ARUS KAS KONSOLIDASIAN
UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR PADA TANGGAL 31 DESEMBER 2023 DAN 2022
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

	<u>2023</u>	<u>2022</u>
ARUS KAS DARI AKTIVITAS OPERASI		
Penerimaan dari pengembangan lingkungan	34.144.632.147	91.984.800.347
Penerimaan dari pengelolaan aktiva	40.148.987.879	36.590.631.033
Penerimaan dari jasa	114.472.789.677	49.916.487.285
Penerimaan lain-lain	107.891.558.353	(50.573.289.264)
Pembayaran biaya operasional	(119.689.586.279)	(306.525.464.903)
Pembayaran biaya pemasaran, kantor, dan umum	(40.728.755.307)	(34.787.684.617)
Pembayaran kepada pegawai	(64.899.531.019)	(51.920.976.824)
Pendapatan bunga	4.332.416.673	12.724.039.251
Titipan biaya dan utilitas	27.598.838.236	5.460.933.411
Pembayaran pajak	(13.875.871.559)	(8.164.576.441)
Pembayaran lain-lain	(40.742.713.511)	(528.214.020)
KAS NETO DIPEROLEH DARI/(DIGUNAKAN UNTUK) AKTIVITAS OPERASI	48.652.765.290	(255.823.314.742)
ARUS KAS DARI AKTIVITAS INVESTASI		
Penempatan investasi	(50.111.580.190)	(233.098.649.831)
Penempatan properti investasi	(242.377.325)	(9.764.765.031)
Penambahan aset real estat	(88.382.408.750)	(40.836.737.461)
Penambahan aset tetap	(1.295.702.276)	(1.370.114.831)
Penyelesaian kerja sama	(7.808.774.274)	-
Pengembangan ITF, SJUT, IT	-	(24.660.279.551)
Perolehan aset lain-lain	-	(87.059.847)
KAS NETO DIGUNAKAN UNTUK AKTIVITAS INVESTASI	(147.840.842.815)	(309.817.606.552)
ARUS KAS DARI AKTIVITAS PENDANAAN		
Pinjaman Bank DKI	91.908.000.000	-
Piutang Entitas Anak dan KSO	32.893.011.849	-
Penerimaan kas Entitas Anak dari pemegang saham	15.000.000.000	-
Pinjaman bank	(110.605.506.723)	280.148.598.289
Pengurangan modal tanah KSO NPK	(50.966.855.936)	-
Penyertaan Modal Daerah	-	386.477.777.316
Kas yang dibatasi penggunaannya	-	(74.901.049)
Pengembalian investasi	-	(37.956.995.583)
Pemberian pinjaman	-	(156.293.851.863)
KAS NETO (DIGUNAKAN UNTUK)/DIPEROLEH DARI AKTIVITAS PENDANAAN	(21.771.350.810)	472.300.627.110
PENURUNAN NETO KAS DAN SETARA KAS	(120.959.428.335)	(93.340.294.184)
KAS DAN SETARA KAS PADA AWAL TAHUN	439.613.667.328	525.219.160.722
PENYESUAIAN ARUS KAS AKIBAT PENYAJIAN KEMBALI	-	7.734.800.790
KAS DAN SETARA KAS PADA AKHIR TAHUN	318.654.238.993	439.613.667.328
KAS DAN SETARA KAS TERDIRI DARI:		
Kas yang Dibatasi Penggunaannya	92.000.000.000	-
KAS DAN SETARA KAS PADA AKHIR TAHUN	226.654.238.993	439.613.667.328

PERUSAHAAN UMUM DAERAH PEMBANGUNAN SARANA JAYA DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN
UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR PADA TANGGAL 31 DESEMBER 2023 DAN 2022
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

1. UMUM

a. Pendirian dan Informasi Umum

Perusahaan Umum Daerah Pembangunan Sarana Jaya (d.h PD Pembangunan Sarana Jaya) ("Perusahaan") didirikan berdasarkan Peraturan Daerah (PERDA) No. 2 tahun 1982, tanggal 20 Maret 1982 dan disahkan oleh Menteri Dalam Negeri dengan suratnya No. 532.21-1260, tanggal 30 September 1982. Peraturan terkait pendirian Perusahaan telah beberapa kali mengalami perubahan, perubahan terakhir berdasarkan Peraturan Daerah (PERDA) No. 11 tahun 2018 tentang Perusahaan Daerah Pembangunan Sarana Jaya Daerah Khusus Ibukota Jakarta. Perusahaan merupakan pengalihan Perusahaan Tanah dan Bangunan (PTB) Daerah Khusus Ibukota (DKI) Jakarta, yang didirikan berdasarkan SK Gubernur No. Da.1/3/16/1969, tanggal 19 Februari 1969 No. SK. Gubernur No. Da.11/2/31/1972, tanggal 2 Februari 1972.

Modal Perusahaan adalah merupakan kekayaan daerah yang dipisahkan. Modal dasar Perusahaan pada saat pendirian (20 Maret 1982) adalah sebesar Rp3.286.838.993. Pada tanggal 5 November 1990 dikeluarkan Peraturan Daerah (PERDA) Nomor 6 Tahun 1990, mengenai perubahan pertama PERDA No. 2 tahun 1982 dan disahkan oleh Menteri Dalam Negeri Nomor 539.31-129, tanggal 7 Februari 1991.

Dalam Perda Nomor 6 Tahun 1990 tersebut ditetapkan modal dasar Perusahaan sebesar Rp200.000.000.000. Modal disetor sampai dengan 31 Desember 2013 sebesar Rp196.002.770.836 dengan rincian sebagai berikut:

Modal sesuai Perda Nomor 2 tahun 1982	3.286.838.993
Sampai dengan 1990 (Perda No. 6 Tahun 1990)	43.931.726.243
Sub Jumlah	47.218.565.236

Setelah Perda Nomor 6 Tahun 1990 ada tambahan PMP dari Privilege Pemda DKI atas pembebasan tanah di Segitiga Senen. Sesuai dengan Keputusan Gubernur DKI Jakarta No. 1333 Tahun 1992 dan Surat Gubernur Nomor 1598/-1.711 tanggal 23 Mei 1994	18.754.183.000
Sub Jumlah	65.972.748.236

Kekurangan Pencatatan Aset Tetap Tanah Rawa Bilal	30.022.600
Sub Jumlah	66.002.770.836

Pemenuhan Modal Disetor (Keputusan Gub. DKI Jakarta No. 1914 Tahun 2013)	130.000.000.000
Jumlah Modal Disetor per 31 Desember 2013	196.002.770.836

Dalam Perda Nomor 8 Tahun 2014 tanggal 14 Juli 2014 tersebut ditetapkan modal dasar Perusahaan menjadi sebesar Rp2.000.000.000.000.

Berdasarkan Perda Nomor 11 Tahun 2018 tanggal 28 Desember 2018 tentang Perubahan ketiga atas Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 1982 tentang Perusahaan Daerah Pembangunan Sarana Jaya Daerah Khusus Ibukota Jakarta, ditetapkan bahwa Perusahaan Daerah Khusus Ibukota Jakarta beralih menjadi Perusahaan Umum Daerah Pembangunan Sarana Jaya dan penetapan modal dasar Perusahaan sebelumnya sebesar Rp2.000.000.000.000 (dua triliun rupiah) menjadi Rp10.000.000.000.000 (sepuluh triliun rupiah).

Modal disetor sampai dengan 31 Desember 2018 sebesar Rp2.000.000.000.000 dengan rincian sebagai berikut:

Jumlah Modal per 31 Desember 2013	196.002.770.836
Pemenuhan Modal Disetor (Keputusan Gub. DKI Jakarta No. 1189 Tahun 2014)	200.000.000.000
Pemenuhan Modal Disetor (Keputusan Gub. DKI Jakarta No. 1879 Tahun 2014)	543.000.000.000
Pemenuhan Modal Disetor (Keputusan Gub. DKI Jakarta No. 2312 Tahun 2017)	125.000.000.000
Pemenuhan Modal Disetor (Keputusan Gub. DKI Jakarta No. 1851 Tahun 2018)	935.997.229.164
Jumlah Modal Disetor Per 31 Desember 2018	2.000.000.000.000

Modal Disetor sampai dengan 31 Desember 2019 sebesar Rp4.250.000.000.000 dengan rincian sebagai berikut:

Jumlah Modal per 31 Desember 2018	2.000.000.000.000
Pemenuhan Modal Disetor (Keputusan Gub. DKI Jakarta No. 405 Tahun 2019)	1.450.000.000.000
Pemenuhan Modal Disetor (Keputusan Gub. DKI Jakarta No. 1684 Tahun 2019)	800.000.000.000
Jumlah Modal Disetor Per 31 Desember 2019	4.250.000.000.000

PERUSAHAAN UMUM DAERAH PEMBANGUNAN SARANA JAYA DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN
UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR PADA TANGGAL 31 DESEMBER 2023 DAN 2022
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

1. UMUM (lanjutan)

a. Pendirian dan Informasi Umum (lanjutan)

Modal disetor sampai dengan 31 Desember 2020 sebesar Rp5.200.000.000.000 dengan rincian sebagai berikut:

Jumlah Modal per 31 Desember 2019	4.250.000.000.000
Pemenuhan Modal Disetor (Keputusan Gub. DKI Jakarta No. 1060 tahun 2020)	50.000.000.000
Pemenuhan Modal Disetor (Keputusan Gub. DKI Jakarta No. 1262 tahun 2020)	900.000.000.000
Jumlah Modal Disetor Per 31 Desember 2020	5.200.000.000.000

Modal Disetor sampai dengan 31 Desember 2021 sebesar Rp5.375.000.000.000

Jumlah Modal per 31 Desember 2020	5.200.000.000.000
Perjanjian Investasi Tahun 2021 Nomor 2186/-071.242, 1511/-072.1	175.000.000.000
Jumlah Modal Disetor Per 31 Desember 2021	5.375.000.000.000

Modal Disetor sampai dengan 31 Desember 2022 sebesar Rp5.625.000.000.000

Jumlah Modal per 31 Desember 2021	5.375.000.000.000
Perjanjian Investasi Tahun 2022 Nomor 535/-071.241, 776/-072.26	250.000.000.000
Jumlah Modal Disetor Per 31 Desember 2023 dan 2022	5.625.000.000.000

Perusahaan berdomisili di Jakarta. Kantor Pusat Perusahaan beralamat di Gedung Sarana Jaya lantai 3/4 Jl. Budi Kemuliaan I No. 1, Kelurahan Gambir, Kecamatan Gambir, Jakarta Pusat.

Sesuai dengan pasal I Peraturan Daerah Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 6 Tahun 1990 tentang Perubahan Pertama Peraturan Daerah Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 2 Tahun 1982 tentang Perusahaan Daerah Pembangunan Sarana Jaya Daerah Khusus Ibukota Jakarta, Perusahaan bertujuan untuk membantu dan menunjang kebijaksanaan umum pemerintah dalam rangka meningkatkan kesejahteraan rakyat dengan mengadakan kegiatan di bidang penyediaan tanah, pembangunan perumahan, bangunan umum, kawasan industri berikut prasarana, sarana utilitas serta fasilitasnya dengan berpegang pada prinsip ekonomi perusahaan. Lingkup usaha Perusahaan meliputi:

- 1) Pengembangan Lingkungan
Pengembangan Lingkungan antara lain meliputi:
 - Pelaksanaan pematangan tanah
 - Pemindahan hak atas tanah
 - Pembangunan perumahan/gedung, dilakukan dengan 2 (dua) cara, yaitu:
 - a. Dilaksanakan sendiri
 - b. Bekerja sama dengan pihak lain
- 2) Pengelolaan Aset
Pengelolaan Aset meliputi:
 - Penyewaan tempat tinggal
 - Penyewaan ruang kantor
 - Penyewaan ruang usaha

Kegiatan Perusahaan Umum Daerah Pembangunan Sarana Jaya berupa penugasan langsung dari Pemerintah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta adalah sebagai berikut:

- a. Peraturan Gubernur Nomor 104 Tahun 2018 tentang Fasilitas Pembiayaan Perolehan Rumah Bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah;
- b. Peraturan Gubernur Nomor 71 Tahun 2020 tentang Penugasan Kepada Perusahaan Umum Daerah Pembangunan Sarana Jaya dalam Penyelenggaraan Fasilitas Pengolahan Sampah Antara Di Dalam Kota;
- c. Peraturan Gubernur Nomor 70 Tahun 2020 tentang Penugasan kepada Perumda Pembangunan Sarana Jaya dalam Penyelenggaraan Sarana Jaringan Utilitas Terpadu (SJUT);
- d. Keputusan Gubernur Nomor 134 Tahun 2019 tentang Penugasan Kepada Perusahaan Umum Daerah Pembangunan Sarana Jaya dalam Pengelolaan Alat Produksi PT Jaktour.

Jumlah karyawan Perusahaan dan Entitas Anak per 31 Desember 2023 dan 2022 masing-masing adalah 121 dan 115 orang.

Susunan organisasi per 31 Desember 2023 sesuai dengan Peraturan Direksi Perusahaan Umum Daerah Pembangunan Sarana Jaya Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 15 Tahun 2023, tanggal 27 Maret 2023 adalah sebagai berikut:

**PERUSAHAAN UMUM DAERAH PEMBANGUNAN SARANA JAYA DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN
UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR PADA TANGGAL 31 DESEMBER 2023 DAN 2022**
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

1. UMUM (lanjutan)

a. Pendirian dan Informasi Umum (lanjutan)

- 1) Dewan pengawas : Ketua
: Sekretaris
: Anggota
- 2) Unsur Pimpinan : Direktur Utama
: Direktur Administrasi dan Keuangan
: Direktur Pengembangan
- 3) Organ dibawah Direksi : Satuan Pengawasan Intern
: Divisi Sekretaris Perusahaan
: Divisi Manajemen Risiko & Strategi Korporasi
: Divisi Hukum Perusahaan
: Divisi Pengembangan Bisnis dan Kemitraan
- 4) Unsur Pelaksana : Divisi Pengelolaan Pertanahan
: Divisi Perencanaan Pembangunan
: Divisi Komersial dan Pengelolaan Aset
: Divisi Pengadaan
: Divisi SDM dan Umum
: Divisi Akuntansi dan Perpajakan
: Divisi Teknologi Informasi
: SBU Pengolahan Sampah
: SBU Sarana Jaringan Utilitas Terpadu
: SBU Kawasan
: SBU Hunian Terjangkau
: SBU Hunian Tapak

Susunan Dewan Pengawas per 31 Desember 2023 dan 2022, sesuai dengan Keputusan Gubernur DKI Jakarta selaku Kepala Daerah Yang Mewakili Pemerintah Daerah Dalam Kepemilikan Kekayaan Daerah Dipisahkan pada Perusahaan Umum Daerah yang dipisahkan Pada Perumda Pembangunan Sarana Jaya Nomor 690 Tahun 2023 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Direksi dan Dewan Pengawas Pada Perusahaan Umum Daerah Pembangunan Sarana Jaya sebanyak 7 (Tujuh) Orang dan Keputusan Kepala Daerah yang Mewakili Pemerintah Daerah dalam Kepemilikan Kekayaan Daerah yang dipisahkan (KKM) pada Perusahaan Umum Daerah Pembangunan Sarana Jaya tanggal 13 Oktober 2023 tentang Pengangkatan Sekretaris Dewan Pengawas pada Perusahaan Umum Daerah Pembangunan Sarana Jaya adalah sebagai berikut:

	<u>2023</u>	<u>2022</u>
Ketua Dewan Pengawas	Andi Muh Iqbal Arief	Hasreiza
Sekretaris Dewan Pengawas	Arief Rachman	Arief Rachman
Anggota Dewan Pengawas	Arismal	Arismal

Susunan Direksi per 31 Desember 2023 dan 2022, sesuai dengan Keputusan Gubernur DKI Jakarta selaku Kepala Daerah Yang Mewakili Pemerintah Daerah Dalam Kepemilikan Kekayaan Daerah Dipisahkan pada Perusahaan Umum Daerah yang dipisahkan Pada Perumda Pembangunan Sarana Jaya Nomor 508 tahun 2023 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Direksi pada Perusahaan Umum Daerah Pembangunan Sarana Jaya sebanyak 7 (Tujuh) Orang dan Keputusan Kepala Daerah yang Mewakili Pemerintah Daerah dalam Kepemilikan Kekayaan Daerah yang dipisahkan (KKM) pada Perusahaan Umum Daerah Pembangunan Sarana Jaya tanggal 31 Juli 2023 mengenai pengangkatan Ketua Dewan Pengawas dan Direktur Administrasi dan Keuangan adalah sebagai berikut:

	<u>2023</u>	<u>2022</u>
Direktur Utama	Andira Reoputra	Agus Himawan Widiyanto
Direktur Pengembangan	Indra Sukmono Arharrys	Indra Sukmono Arharrys
Direktur Administrasi dan Keuangan	Irwan Agustuslan	Bima Priya Santosa

PERUSAHAAN UMUM DAERAH PEMBANGUNAN SARANA JAYA DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN
UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR PADA TANGGAL 31 DESEMBER 2023 DAN 2022
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

1. UMUM (lanjutan)

a. Pendirian dan Informasi Umum (lanjutan)

Susunan Komite Audit berdasarkan Keputusan Dewan Pengawas Perusahaan Umum Daerah Pembangunan Sarana Jaya Nomor 1 Tahun 2023 tanggal 16 Januari 2023 dan Nomor 5 Tahun 2022 tanggal 17 Oktober 2022 adalah sebagai berikut:

	<u>2023</u>	<u>2022</u>
Ketua	Arief Rachman	Arief Rachman
Anggota	Irwan Saputra	Irwan Saputra
Anggota	Nizar Suhendra	Wahyudi Pramana

Susunan Komite Pemantau Risiko berdasarkan Surat Keputusan Dewan Pengawas Perusahaan Umum Daerah Pembangunan Sarana Jaya Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pengangkatan Anggota Komite Pemantau Risiko Perumda Pembangunan Sarana Jaya tanggal 17 Oktober 2022, adalah sebagai berikut:

	<u>2023</u>	<u>2022</u>
Ketua	-	Arismal
Anggota	Tritoto Harwono	Tritoto Harwono
Anggota	Tezar Yudhistira	Tezar Yudhistira

Susunan Komite Remunerasi dan Nominasi berdasarkan Keputusan Dewan Pengawas No. 1 Tahun 2022 tentang Pembentukan Komite Remunerasi dan Nominasi Perusahaan Umum Daerah Pembangunan Sarana Jaya, Keputusan Dewan Pengawas No. 4 Tahun 2022 tentang Pengangkatan Ketua Komite Remunerasi dan Nominasi Perusahaan Umum Daerah Pembangunan Sarana Jaya dan Keputusan Dewan Pengawas No. 6 Tahun 2022 tentang Pengangkatan Anggota Komite, Ketua Komite Remunerasi, dan Nominasi Perusahaan Umum Daerah Pembangunan Sarana Jaya, adalah sebagai berikut:

	<u>2023</u>	<u>2022</u>
Ketua	-	Arismal
Anggota	Dariyah	Delfi Elius
Anggota	Erisar Risali Raib	Dariyah

b. Kepemilikan Saham pada Entitas Anak

Perusahaan memiliki langsung lebih dari 50% saham entitas anak dan/atau mempunyai kendali atas manajemen entitas anak yang dikonsolidasi sebagai berikut:

Entitas Anak	Domisili	Jenis Usaha	Tahun Operasi Komersial	Persentase Kepemilikan		Jumlah Aset Sebelum Eliminasi	
				2023	2022	2023	2022
PT Saranawisesa Properindo	Jakarta	Kontraktor dan Real Estat	1993	95,47%	96,67%	102.188.879.932	89.937.278.784

PT Saranawisesa Properindo

PT Saranawisesa Properindo ("PT SWP") didirikan berdasarkan akta notaris Misahardi Wilamarta, S.H. No. 77 tanggal 3 Februari 1993, yang kemudian diubah dengan Akta No. 246 tanggal 13 Agustus 1993 dari Notaris yang sama. Akta pendirian dan perubahannya tersebut disahkan oleh MENKUMHAM dengan surat keputusan No. C2-10-323 HT.01.01 tanggal 6 Oktober 1993.

Sesuai dengan Anggaran Dasar PT SWP sebagaimana diaktakan dengan Akta No. 35 tanggal 24 September 1998 oleh Notaris Imas Fatimah, S.H. dan telah mendapat pengesahan dari Menteri Kehakiman Republik Indonesia dengan Surat Keputusan No. C-918.HT.01.04.Th.99 tanggal 11 Januari 1999 dan telah dicatat dalam tambahan Berita Negara Republik Indonesia tanggal 13 Juli 2001, ruang lingkup kegiatan PT SWP adalah berusaha dalam bidang pembangunan perumahan, serta mengembangkan tanah dengan cara mendirikan, membangun, mengurus, dan mengusahakan bangunan perumahan berikut sarana, prasarana, dan segala fasilitasnya.

Berdasarkan akta tersebut diatas, komposisi kepemilikan saham PT SWP terdiri dari Perumda Pembangunan Sarana Jaya memiliki 600 lembar saham dengan nilai nominal Rp10.000.000 atau total sebesar Rp6.000.000.000 dan PT Kreasibumi Properindo memiliki 900 lembar saham dengan nilai nominal Rp10.000.000 atau total sebesar Rp9.000.000.000.

**PERUSAHAAN UMUM DAERAH PEMBANGUNAN SARANA JAYA DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN
UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR PADA TANGGAL 31 DESEMBER 2023 DAN 2022**
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

1. UMUM (lanjutan)

b. Kepemilikan Saham pada Entitas Anak (lanjutan)

PT Saranawisesa Properindo (lanjutan)

Berdasarkan Akta No. 35, tanggal 24 September 1998, oleh Notaris Imas Fatimah, S.H., pemegang saham menyetujui penambahan modal disetor sehingga komposisi kepemilikan saham PT SWP terdiri dari Perumda Pembangunan Sarana Jaya sebesar 2.143 lembar saham total sebesar Rp21.430.000.000 dan Yayasan Sarana Jaya memiliki 113 lembar saham atau total sebesar Rp1.130.000.000. Oleh karena itu kepemilikan Perusahaan di PT SWP menjadi 94,99%.

Berdasarkan Akta No. 42, tanggal 24 Desember 2014, oleh Notaris Aslina Perangin Angin, S.H., pemegang saham menyetujui penambahan modal disetor sehingga komposisi kepemilikan saham PT SWP terdiri dari Perumda Pembangunan Sarana Jaya sebesar 2.936 lembar saham atau total sebesar Rp29.360.000.000 dan Yayasan Sarana Jaya memiliki 164 lembar saham atau total sebesar Rp1.640.000.000. Oleh karena itu kepemilikan Perusahaan di PT SWP menjadi 94,71%.

Sesuai Akta Notaris Aslina Perangin Angin S.H., M.Kn., Nomor 5 tanggal 9 Mei 2016, Perusahaan dan Yayasan Kesejahteraan Karyawan Perusahaan Umum Daerah Pembangunan Sarana Jaya ("YKK") sepakat melakukan penggabungan PT Karya Cipta Karsa dengan PT Saranawisesa Properindo menjadi PT Saranawisesa Properindo dengan komposisi penyertaan modal Perusahaan menjadi sebesar 94,71% atau sebesar Rp29.360.000.000 dan Yayasan Kesejahteraan Karyawan (YKK) Perusahaan Umum Daerah Pembangunan Sarana Jaya sebesar 5,29% atau sebesar Rp1.640.000.000.

Berdasarkan hasil RUPS Luar Biasa PT SWP No. 8 tanggal 23 Februari 2017 yang telah dikuatkan pengesahannya dengan Akta Notaris Aslina Perangin-Angin S.H. No. 10 tanggal 13 Maret 2017 dan telah mendapat pengesahan dari Menteri Kehakiman Republik Indonesia dengan Surat Keputusan No. AHU-0006392.AH.01.02 Tahun 2017 tanggal 15 Maret 2017, para pemegang saham menyetujui pemenuhan kecukupan dan penambahan modal pada PT SWP menjadi Rp36.220.000.000 serta penambahan maksud dan tujuan yaitu penambahan jasa pengelolaan gedung/lingkungan, jasa pengelolaan parkir, jasa interior, jasa *landscape*, jasa keamanan, jasa *cleaning service*, jasa agen properti, dan jasa penyedia sumber daya manusia.

Dengan penambahan tersebut komposisi kepemilikan saham PT SWP terdiri dari Perumda Pembangunan Sarana Jaya sebesar 3.458 lembar saham dengan nilai nominal Rp10.000.000 atau total sebesar Rp34.580.000.000 dan Yayasan Sarana Jaya memiliki 164 lembar saham dengan nilai nominal Rp10.000.000 atau total sebesar Rp1.640.000.000. Oleh karena itu kepemilikan Perusahaan di PT SWP menjadi 95,47%.

Berdasarkan hasil RUPS Luar Biasa PT SWP tanggal 20 Desember 2018 yang telah dikuatkan pengesahannya dengan Akta Notaris Mellia SH., M.Kn., No. 5 tanggal 10 Januari 2019 yang penerimaan pemberitahuan perubahannya telah diterima dan dicatat di dalam sistem administrasi badan hukum Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia dengan Surat nomor AHU-AH.01.03-0057351 tanggal 31 Januari 2020, para pemegang saham menyetujui pemenuhan kecukupan dan penambahan modal pada PT SWP menjadi Rp49.320.000.000, sehingga komposisi pemegang saham PT SWP terdiri dari Perumda Pembangunan Sarana Jaya sebesar 4.768 lembar saham dengan nilai nominal Rp10.000.000 atau total sebesar Rp47.680.000.000 dan Yayasan Sarana Jaya memiliki 164 lembar saham dengan nilai nominal Rp10.000.000 atau total sebesar Rp1.640.000.000. Oleh karena itu kepemilikan Perusahaan di PT SWP menjadi 96,67%.

Pada tanggal 1 November 2021 Perusahaan mengajukan permohonan persetujuan penambahan modal disetor pada PT SWP kepada Gubernur Provinsi DKI Jakarta melalui surat No. 1419/-072.26. Surat tersebut menerangkan bahwa pinjaman Perusahaan kepada PT SWP sebesar Rp49.592.131.992 untuk pembangunan Gedung Sarana Square, akan dikonversi menjadi tambahan modal disetor. Apabila permohonan ini disetujui maka komposisi persentase kepemilikan saham menjadi Perusahaan Umum Daerah Pembangunan Sarana Jaya sebesar 98,34% dan Yayasan Kesejahteraan Karyawan Sarana Jaya sebesar 1,66%. Sampai dengan tanggal laporan keuangan, belum memperoleh persetujuan dari KPM.

Berdasarkan hasil RUPS PT SWP tanggal 28 November 2023 yang telah dikuatkan pengesahannya dengan Akta Notaris Mellia SH., M.Kn., para pemegang saham menyetujui pemenuhan kecukupan dan pengurangan modal pada PT SWP menjadi Rp36.220.000.000, sehingga komposisi pemegang saham PT SWP terdiri dari Perumda Pembangunan Sarana Jaya sebesar 3.458 lembar saham dengan nilai nominal Rp10.000.000 atau total sebesar Rp34.580.000.000 dan Yayasan Sarana Jaya memiliki 164 lembar saham dengan nilai nominal Rp10.000.000 atau total sebesar Rp1.640.000.000. Oleh karena itu kepemilikan Perusahaan di PT SWP menjadi 95,47%.

**PERUSAHAAN UMUM DAERAH PEMBANGUNAN SARANA JAYA DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN
UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR PADA TANGGAL 31 DESEMBER 2023 DAN 2022**
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

1. UMUM (lanjutan)

b. Kepemilikan Saham pada Entitas Anak (lanjutan)

PT Saranawisesa Properindo (lanjutan)

PT SWP mengelola Gedung Sarana Jaya Tebet, perparkiran, jasa kebersihan, jasa keamanan, jasa resepsionis, dan jasa pengemudi.

Laporan keuangan PT SWP per 31 Desember 2023 diaudit oleh Kantor Akuntan Asvriwangi dan Rekan, dan per 31 Desember 2022 diaudit oleh Kantor Akuntan Heliantono dan Rekan.

Pengaturan Operasi Bersama

Pengakuan atas laporan keuangan KSO didasarkan atas Kerja Sama Operasi Bersama (*Join Operation*), yakni pengaturan bersama yang mengatur bahwa para pihak yang memiliki pengendalian bersama memiliki hak atas aset dan kewajiban terhadap liabilitas, sesuai dengan porsi kepemilikannya.

Pada tahun 2023 dan 2022, porsi kepemilikan Perusahaan Umum Daerah Pembangunan Sarana Jaya ("PSJ") pada masing-masing KSO didasarkan dari persentase modal pengembangan dan modal tanah yang disetor bukan berdasarkan Perjanjian Kerja Sama (PKS), sehingga porsi kepemilikan Perumda Pembangunan Sarana Jaya pada masing-masing KSO yang digunakan sebagai dasar untuk pengakuan bagian Perusahaan atas laporan keuangan KSO adalah sebagai berikut:

	<u>2023</u>	<u>2022</u>
KSO Lebak Bulus	84,34%	84,34%
KSO Nuansa Pondok Kelapa	89,97%	73,11%
KSO Nuansa Cilangkap	91,67%	91,02%

Laporan keuangan konsolidasi pada 31 Desember 2023 dan 2022 sudah mencerminkan laporan keuangan PT Saranawisesa Properindo dan KSO.

2. INFORMASI KEBIJAKAN AKUNTANSI MATERIAL

Kebijakan akuntansi utama yang diterapkan dalam penyusunan laporan keuangan konsolidasi Perusahaan dan Entitas Anaknya ("Grup") adalah seperti dijabarkan di bawah ini:

Pernyataan Kepatuhan

Laporan keuangan konsolidasi Grup telah disajikan sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan ("SAK"), yang terdiri dari Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan ("PSAK") dan Interpretasi Standar Akuntansi Keuangan ("ISAK") yang dikeluarkan oleh Dewan Standar Akuntansi Keuangan Ikatan Akuntan Indonesia.

a. Dasar Penyajian Laporan Keuangan Konsolidasi

Laporan keuangan konsolidasi disusun berdasarkan konsep akuntansi akrual, dan dasar pengukuran dengan menggunakan konsep biaya historis, kecuali untuk akun tertentu yang disajikan dengan menggunakan dasar seperti yang disebutkan dalam Catatan yang relevan.

Laporan arus kas konsolidasi menyajikan penerimaan dan pengeluaran kas dan setara kas, yang diklasifikasikan ke dalam aktivitas operasi, investasi dan pendanaan yang disajikan dengan menggunakan metode langsung.

Mata uang penyajian yang digunakan dalam penyusunan laporan keuangan konsolidasi adalah mata uang Rupiah (Rp), yang merupakan mata uang fungsional dan penyajian Grup.

Periode pelaporan keuangan Grup adalah 1 Januari - 31 Desember.

PERUSAHAAN UMUM DAERAH PEMBANGUNAN SARANA JAYA DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN
UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR PADA TANGGAL 31 DESEMBER 2023 DAN 2022
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

2. INFORMASI KEBIJAKAN AKUNTANSI MATERIAL (lanjutan)

b. Prinsip-prinsip Konsolidasian

Laporan keuangan konsolidasian meliputi laporan keuangan Perusahaan dan entitas anaknya seperti yang disebutkan pada Catatan 1b di mana Grup, baik secara langsung atau tidak langsung memiliki lebih dari 50% kepemilikan saham. Laporan keuangan (konsolidasian) entitas-entitas anak disusun untuk tahun pelaporan yang sama dengan Grup, menggunakan kebijakan akuntansi yang konsisten.

Semua akun dan transaksi antar perusahaan yang material, termasuk keuntungan atau kerugian yang belum di realisasi, jika ada di eliminasi untuk mencerminkan posisi keuangan dan hasil operasi Grup sebagai satu kesatuan usaha.

Entitas-entitas anak dikonsolidasi secara penuh sejak tanggal akuisisi yaitu tanggal Perusahaan memperoleh pengendalian, sampai dengan tanggal entitas induk kehilangan pengendalian.

Pengendalian dianggap ada ketika Perusahaan memiliki secara langsung atau tidak langsung melalui entitas anak, lebih dari setengah kekuasaan suara suatu entitas.

Pengendalian didapat ketika Grup terekspos atau memiliki hal atas imbal hasil variabel dari keterlibatannya dengan *investee* dan memiliki kemampuan untuk mempengaruhi imbal hasil tersebut melalui kekuasaannya atas *investee*.

Secara spesifik, Grup mengendalikan *investee* jika dan hanya jika Grup memiliki seluruh hal berikut ini:

- Kekuasaan atas *investee* (misal, hak yang ada memberi kemampuan kini untuk mengarahkan aktivitas relevan *investee*);
- Eksposur atau hak atas imbal hasil variabel dari keterlibatannya dengan *investee* dan;
- Kemampuan untuk menggunakan kekuasaannya atas *investee* untuk mempengaruhi jumlah imbal hasil investor.

Ketika Grup memiliki kurang dari hak suara mayoritas, Grup dapat mempertimbangkan semua fakta dan keadaan yang relevan dalam menilai apakah memiliki kekuasaan atas *investee*, termasuk:

- Pengaturan kontraktual dengan pemilik hak suara yang lain.
- Hak timbul dari pengaturan kontraktual lain.
- Hak suara dan hak suara potensial Grup.

Grup menilai kembali apakah investor mengendalikan *investee*, jika fakta dan keadaan mengindikasikan adanya perubahan terhadap satu atau lebih dari tiga elemen pengendalian. Konsolidasi atas anak perusahaan dimulai ketika Grup memiliki pengendalian atas anak perusahaan dan berhenti ketika Grup kehilangan pengendalian atas anak perusahaan.

Aset, liabilitas, penghasilan, dan beban atas anak perusahaan diakuisisi atau dilepas selama tahun tertentu termasuk dalam laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain konsolidasian dari tanggal Grup memperoleh pengendalian sampai tanggal Grup menghentikan pengendalian atas anak perusahaan.

Laba atau rugi dari setiap komponen atas penghasilan komprehensif lain diatribusikan pada pemegang saham entitas induk Grup pada Kepentingan Non-Pengendali ("KNP"), walaupun hasil di KNP mempunyai saldo defisit. Bila diperlukan, penyesuaian dilakukan pada laporan keuangan anak perusahaan agar kebijakan akuntansinya sesuai dengan kebijakan akuntansi Perusahaan.

Semua aset dan liabilitas, ekuitas, penghasilan, beban, dan arus kas berkaitan dengan transaksi antar anggota Grup akan dieliminasi secara penuh dalam proses konsolidasi.

Perubahan kepemilikan di anak perusahaan, tanpa kehilangan pengendalian, dihitung sebagai transaksi ekuitas. Jika Grup kehilangan pengendalian atas anak perusahaan, maka:

PERUSAHAAN UMUM DAERAH PEMBANGUNAN SARANA JAYA DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN
UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR PADA TANGGAL 31 DESEMBER 2023 DAN 2022
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

2. INFORMASI KEBIJAKAN AKUNTANSI MATERIAL (lanjutan)

b. Prinsip-prinsip Konsolidasian (lanjutan)

- Menghentikan pengakuan aset (termasuk setiap *goodwill*) dan liabilitas entitas anak;
- Menghentikan pengakuan jumlah tercatat KNP;
- Menghentikan pengakuan akumulasi selisih penjabaran yang dicatat di ekuitas, bila ada;
- Mengakui nilai wajar pembayaran yang diterima;
- Mengakui setiap sisa investasi pada nilai wajarnya;
- Mengakui setiap perbedaan yang dihasilkan sebagai keuntungan atau kerugian sebagai laba rugi; dan
- Mereklasifikasikan ke laba rugi proporsi keuntungan dan kerugian yang telah diakui sebelumnya dalam penghasilan komprehensif lain atau saldo laba, begitu pula menjadi persyaratan jika Grup akan melepas secara langsung aset atau liabilitas terkait.

KNP mencerminkan bagian atas laba atau rugi dan aset neto dari entitas-entitas anak yang tidak dapat diatribusikan secara langsung maupun tidak langsung pada entitas induk yang masing-masing disajikan di laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain konsolidasian dan dalam ekuitas pada laporan posisi keuangan konsolidasian, terpisah dari bagian yang dapat diatribusikan kepada pemilik entitas induk.

Goodwill merupakan selisih lebih yang tidak teridentifikasi antara jumlah harga perolehan investigasi dengan proporsi nilai wajar aset bersih entitas anak pada tanggal akuisisi. *Goodwill* tidak diamortisasi dan dilakukan uji penurunan nilai setiap tahun.

c. Perubahan pada Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan dan Interpretasi Standar Akuntansi Keuangan

Dewan Standar Akuntansi Keuangan Ikatan Akuntan Indonesia (DSAK-IAI) telah menerbitkan amendemen dan interpretasi yang berlaku efektif mulai 1 Januari 2023 sebagai berikut:

Amendemen PSAK 1: Penyajian Laporan Keuangan tentang Klasifikasi Liabilitas sebagai Jangka Pendek atau Jangka Panjang

Amendemen menentukan persyaratan untuk mengklasifikasikan liabilitas sebagai jangka pendek atau jangka panjang. Amendemen tersebut menjelaskan:

- Apa yang dimaksud dengan hak untuk menagguhkan penyelesaian;
- Bahwa hak entitas untuk menagguhkan penyelesaian liabilitas harus ada pada akhir periode pelaporan;
- Klasifikasi tersebut tidak terpengaruh oleh kemungkinan bahwa entitas akan menggunakan haknya untuk menagguhkan penyelesaian liabilitas; dan
- Hanya jika suatu derivatif melekat dalam liabilitas konvertibel merupakan instrumen ekuitas saja, penggunaan frasa liabilitas tidak akan memengaruhi klasifikasinya.

Amendemen tersebut berlaku efektif untuk periode pelaporan tahunan yang dimulai pada atau setelah 1 Januari 2023 dan harus diterapkan secara retrospektif.

Amendemen PSAK 16: Aset Tetap – Hasil sebelum Penggunaan yang Diintensikan

Amendemen ini tidak memperbolehkan entitas untuk mengurangi suatu hasil penjualan *item* yang diproduksi saat membawa aset tersebut ke lokasi dan kondisi yang diperlukan supaya aset dapat beroperasi sesuai dengan intensi manajemen dari biaya perolehan suatu aset tetap. Sebaliknya, entitas mengakui hasil dari penjualan *item-item* tersebut, dan biaya untuk memproduksi *item-item* tersebut, dalam laba rugi.

Amendemen tersebut berlaku efektif untuk periode pelaporan tahunan yang dimulai pada atau setelah 1 Januari 2023 dan diterapkan secara retrospektif untuk aset tetap yang tersedia untuk digunakan pada atau setelah awal dari periode sajian paling awal di mana entitas pertama kali menerapkan amendemen tersebut.

Amendemen PSAK 25: Kebijakan Akuntansi, Perubahan Estimasi Akuntansi, dan Kesalahan terkait Definisi Estimasi Akuntansi

Amendemen tersebut memperkenalkan definisi 'estimasi akuntansi' dan mengklarifikasi perbedaan antara perubahan estimasi akuntansi dan perubahan kebijakan akuntansi dan koreksi kesalahan. Amendemen tersebut juga mengklarifikasi bagaimana entitas menggunakan teknik pengukuran dan *input* untuk mengembangkan estimasi akuntansi.

PERUSAHAAN UMUM DAERAH PEMBANGUNAN SARANA JAYA DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN
UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR PADA TANGGAL 31 DESEMBER 2023 DAN 2022
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

2. INFORMASI KEBIJAKAN AKUNTANSI MATERIAL (lanjutan)

c. Perubahan pada Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan dan Interpretasi Standar Akuntansi Keuangan (lanjutan)

Amendemen tersebut berlaku efektif pada tanggal 1 Januari 2023 dan berlaku untuk perubahan kebijakan akuntansi dan perubahan estimasi akuntansi yang terjadi pada atau setelah awal periode tersebut. Penerapan ini diperkenankan.

Amendemen PSAK 46: Pajak Penghasilan tentang Pajak Tangguhan terkait Aset dan Liabilitas yang timbul dari Transaksi Tunggal

Amendemen ini mengusulkan agar entitas mengakui aset maupun liabilitas pajak tangguhan pada saat pengakuan awalnya sebagai contoh dari transaksi sewa, untuk mengeliminasi perbedaan praktik saat ini atas transaksi tersebut dan transaksi lain yang serupa.

Amendemen tersebut berlaku efektif untuk periode pelaporan tahunan yang dimulai pada atau setelah 1 Januari 2023 dengan penerapan ini diperkenankan.

Penerapan dari amendemen dan interpretasi di atas tidak menimbulkan perubahan substansial atas kebijakan akuntansi Grup dan tidak memiliki dampak signifikan terhadap Laporan Keuangan pada tahun berjalan atau tahun sebelumnya

d. Transaksi dan Saldo Mata Uang Asing

Mata uang fungsional Grup adalah Rupiah dan Grup menyelenggarakan pembukuannya dalam mata uang Rupiah. Transaksi-transaksi dalam mata uang selain Rupiah dibukukan dengan nilai tukar yang berlaku pada tanggal transaksi.

Transaksi dalam mata uang selain Rupiah dicatat berdasarkan kurs yang berlaku pada saat terjadinya transaksi. Pada akhir periode pelaporan, aset dan liabilitas moneter dalam mata uang selain Rupiah dijabarkan ke Rupiah dengan menggunakan kurs yang berlaku pada tanggal tersebut. Laba atau rugi nilai tukar yang diakibatkan oleh penjabaran tersebut diakui dalam laporan laba atau rugi dan penghasilan komprehensif lain konsolidasian tahun berjalan.

Perbedaan nilai tukar yang timbul atas aset atau liabilitas moneter intragrup, baik jangka pendek maupun jangka panjang, yang tidak dapat dieliminasi satu sama lainnya, diakui sebagai pendapatan atau beban dalam laporan laba atau rugi dan penghasilan komprehensif lain konsolidasian.

Nilai tukar kurs mata uang asing yang digunakan adalah sebagai berikut:

	<u>31 Desember 2023</u>	<u>31 Desember 2022</u>
1 USD	15.416	15.731

e. Transaksi dengan Pihak Berelasi

Pihak-pihak berelasi adalah orang atau entitas yang terkait dengan Grup (entitas pelapor):

- a) Orang atau anggota keluarga terdekat yang mempunyai relasi dengan entitas pelapor jika orang tersebut (i) mengendalikan, atau dikendalikan oleh, atau berada di bawah pengendalian bersama dengan entitas pelapor; (ii) memiliki kepentingan dalam entitas pelapor yang memberikan pengaruh signifikan atas entitas pelapor; atau (iii) merupakan personel manajemen entitas pelapor.
- b) Suatu entitas berelasi dengan entitas pelapor jika memenuhi salah satu hal berikut: (1) entitas dan entitas pelapor adalah anggota dari kelompok usaha yang sama; (2) satu entitas adalah entitas asosiasi atau operasi bersama dari entitas lain; (3) kedua entitas tersebut adalah operasi bersama dari pihak ketiga yang sama; (4) satu entitas adalah operasi bersama dari entitas ketiga dan entitas yang lain adalah entitas asosiasi dari entitas ketiga; (5) entitas tersebut adalah suatu program imbalan pasca kerja untuk imbalan kerja dari salah satu entitas pelapor atau entitas yang terkait dengan entitas pelapor. Jika entitas pelapor adalah entitas penyelenggara program tersebut, maka entitas sponsor juga berelasi dengan entitas pelapor; (6) entitas yang dikendalikan atau dikendalikan bersama oleh orang yang diidentifikasi dalam huruf a); (7) orang yang diidentifikasi dalam huruf a) (1) memiliki pengaruh signifikan atas entitas atau personel manajemen kunci entitas.

Transaksi ini dilakukan berdasarkan persyaratan yang disetujui oleh kedua belah pihak. Di mana persyaratan tersebut mungkin tidak sama dengan transaksi lain yang dilakukan dengan pihak-pihak yang tidak berelasi.

Seluruh transaksi dengan pihak-pihak berelasi yang signifikan diungkapkan dalam Catatan 39 atas laporan keuangan konsolidasian.

PERUSAHAAN UMUM DAERAH PEMBANGUNAN SARANA JAYA DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN
UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR PADA TANGGAL 31 DESEMBER 2023 DAN 2022
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

2. INFORMASI KEBIJAKAN AKUNTANSI MATERIAL (lanjutan)

f. Kas dan Setara Kas

Kas dan setara kas terdiri dari kas dan bank serta deposito berjangka dengan jatuh tempo kurang dari tiga (3) bulan dan tidak digunakan sebagai jaminan atas pinjaman dan tidak dibatasi penggunaannya. Untuk kepentingan laporan arus kas konsolidasian, kas dan setara kas terdiri dari kas dan bank dan deposito berjangka sebagaimana didefinisikan di atas.

g. Piutang Usaha dan Lain-lain

Piutang usaha dan piutang lain-lain pada awalnya diakui sebesar nilai wajar dan selanjutnya diukur pada biaya perolehan diamortisasi dengan menggunakan metode suku bunga efektif, kecuali jika efek diskontonya tidak material, setelah dikurangi penyisihan penurunan nilai yang dibentuk berdasarkan bukti objektif bahwa saldo piutang mengalami penurunan nilai.

Penyisihan penurunan nilai dihapuskan dalam tahun di mana piutang tersebut dipastikan tidak tertagih.

h. Aset Real Estat

Aset real estat terdiri dari tanah kosong, tanah hasil pengembangan, bangunan siap dijual, tanah belum dikembangkan, tanah yang sedang dikembangkan dan bangunan yang sedang dikonstruksi, rumah tinggal dinyatakan sebesar nilai yang lebih rendah antara biaya perolehan atau nilai realisasi bersih.

Tanah belum dikembangkan merupakan tanah mentah yang belum dikembangkan dan dinyatakan sebesar biaya perolehan atau nilai realisasi bersih mana yang lebih rendah. Biaya perolehan tanah yang belum dikembangkan meliputi biaya pra-perolehan dan perolehan tanah. Biaya perolehan akan dipindahkan ke tanah yang sedang dikembangkan pada saat pengembangan tanah akan dimulai atau dipindahkan ke bangunan yang sedang dikonstruksi pada saat tanah tersebut siap dibangun.

Biaya perolehan tanah yang sedang dikembangkan meliputi biaya perolehan tanah yang belum dikembangkan ditambah dengan biaya pengembangan langsung dan tidak langsung yang dapat diatribusikan pada aset pengembangan real estat serta biaya pinjaman. Tanah yang sedang dikembangkan akan dipindahkan ke bangunan yang sedang dikonstruksi pada saat tanah tersebut selesai dikembangkan.

Biaya perolehan bangunan yang sedang dikonstruksi meliputi biaya perolehan tanah yang telah selesai dikembangkan ditambah dengan biaya konstruksi, biaya lainnya yang dapat diatribusikan pada aktivitas pengembangan real estat dan biaya pinjaman, serta dipindahkan ke bangunan yang siap dijual pada saat selesai dibangun dan siap dijual.

Biaya aktivitas pengembangan real estat yang dikapitalisasi ke proyek pengembangan real estat adalah:

- a. Biaya praperolehan tanah;
- b. Biaya perolehan tanah;
- c. Biaya yang secara langsung berhubungan dengan proyek;
- d. Biaya yang dapat diatribusikan pada aktivitas pengembangan real estat; dan
- e. Biaya pinjaman.

Biaya pinjaman yang secara langsung dapat diatribusikan dengan kegiatan pengembangan dikapitalisasi ke proyek pengembangan. Kapitalisasi dihentikan pada saat proyek pengembangan tersebut ditangguhkan/ditunda pelaksanaannya atau secara substansial siap untuk digunakan sesuai tujuannya.

Biaya yang dialokasikan sebagai beban proyek adalah:

- a. Biaya praperolehan tanah atas tanah yang tidak berhasil diperoleh.
- b. Kelebihan biaya dari hasil yang diperoleh atas pembangunan sarana umum yang dikomersialkan, yang dijual atau dialihkan, sehubungan dengan penjualan unit.

Biaya yang telah dikapitalisasi ke proyek pengembangan real estat dialokasikan ke setiap unit real estat dengan metode identifikasi khusus. Pengkajian atas estimasi dan alokasi biaya dilakukan pada setiap akhir periode pelaporan sampai proyek selesai secara substansial, jika terjadi perubahan mendasar Grup akan melakukan revisi dan realokasi biaya. Biaya yang tidak jelas hubungannya dengan suatu proyek real estat, seperti biaya umum dan administrasi diakui sebagai beban pada saat terjadinya.

PERUSAHAAN UMUM DAERAH PEMBANGUNAN SARANA JAYA DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN
UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR PADA TANGGAL 31 DESEMBER 2023 DAN 2022
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

2. INFORMASI KEBIJAKAN AKUNTANSI MATERIAL (lanjutan)

i. Properti Investasi

Properti investasi adalah properti (tanah atau bangunan atau bagian dari suatu bangunan atau kedua-duanya) yang dikuasai untuk menghasilkan sewa atau untuk kenaikan nilai atau kedua-duanya, dan tidak untuk digunakan dalam produksi atau penyediaan barang atau jasa atau untuk tujuan administratif; atau dijual dalam kegiatan usaha sehari-hari.

Properti investasi diakui sebagai aset jika dan hanya jika besar kemungkinan manfaat ekonomik masa depan yang terkait dengan properti investasi akan mengalir ke entitas; dan biaya perolehan properti investasi dapat diukur dengan andal.

Properti investasi pada awalnya diukur sebesar biaya perolehan, meliputi harga pembelian dan setiap pengeluaran yang dapat diatribusikan secara langsung (biaya jasa hukum, pajak pengalihan properti, dan biaya transaksi lain). Biaya transaksi termasuk dalam pengukuran awal tersebut.

Setelah pengakuan awal, Grup memilih menggunakan model biaya dalam mengukur properti investasi, yakni dicatat pada biaya perolehan dikurangi akumulasi depresiasi dan akumulasi penurunan nilai.

Properti investasi kecuali tanah, disusutkan dengan menggunakan metode garis lurus berdasarkan taksiran masa manfaat ekonomis dari properti investasi sebagai berikut:

	Masa Manfaat
Bangunan dan prasarana	10 - 20 Tahun

Tanah dinyatakan berdasarkan biaya perolehan dan tidak disusutkan.

Grup mengalihkan properti ke, atau dari, properti investasi jika, dan hanya jika, terdapat perubahan penggunaan yang terjadi ketika properti memenuhi, atau berhenti memenuhi, definisi properti investasi dan terdapat bukti atas perubahan penggunaan, mencakup:

- a. Dimulainya penggunaan oleh pemilik, atau pengembangan untuk penggunaan oleh pemilik, untuk dialihkan dari properti investasi menjadi properti yang digunakan pemilik;
- b. Dimulainya pengembangan untuk dijual, untuk pengalihan dari properti investasi menjadi persediaan;
- c. Berakhirnya pemakaian oleh pemilik, untuk dialihkan dari properti yang digunakan pemilik menjadi properti investasi; dan
- d. Dimulainya sewa operasi kepada pihak lain, untuk dialihkan dari persediaan menjadi properti investasi.

Properti investasi dihentikan pengakuannya pada saat dilepaskan atau ketika tidak digunakan lagi secara permanen dan tidak ada manfaat ekonomi masa depan yang diharapkan dari pelepasannya. Keuntungan atau kerugian yang timbul dari penghentian atau pelepasan ditentukan dari selisih antara hasil neto pelepasan dan jumlah tercatat aset, dan diakui dalam laba rugi pada periode terjadinya penghentian atau pelepasan.

j. Aset Tetap

Aset tetap, kecuali tanah, dinyatakan sebesar harga perolehan dikurangi akumulasi penyusutan dan rugi penurunan nilai, jika ada. Biaya perolehan termasuk biaya penggantian bagian aset tetap saat biaya tersebut terjadi, jika memenuhi syarat pengakuan.

Selanjutnya, pada saat inspeksi yang signifikan dilakukan, biaya inspeksi itu diakui ke dalam jumlah tercatat ("*carrying amount*") aset tetap sebagai suatu penggantian jika memenuhi kriteria pengakuan. Biaya inspeksi signifikan yang dikapitalisasi tersebut diamortisasi selama periode sampai dengan saat inspeksi signifikan berikutnya. Semua biaya pemeliharaan dan perbaikan yang tidak memenuhi kriteria pengakuan diakui dalam laporan laba rugi pada saat terjadinya.

PERUSAHAAN UMUM DAERAH PEMBANGUNAN SARANA JAYA DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN
UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR PADA TANGGAL 31 DESEMBER 2023 DAN 2022
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

2. INFORMASI KEBIJAKAN AKUNTANSI MATERIAL (lanjutan)

j. Aset Tetap (lanjutan)

Kebijakan dalam menentukan besaran biaya yang dapat dikapitalisasi menjadi aset tetap sebagai berikut:

Jenis aset	Nilai perolehan	Kapitalisasi
Inventaris, mesin, dan peralatan	> Rp2.500.000	Aset tetap
Kendaraan	>Rp10.000.000	Aset tetap
Bangunan	>Rp75.000.000	Aset tetap
Biaya perbaikan	>50% nilai perolehan peralatan, kendaraan, dan bangunan	Menambah nilai perolehan masing-masing

Peralatan yang mempunyai nilai perolehan/unit/satuan kurang dari atau sama dengan Rp2.500.000 diakui sebagai biaya.

Penyusutan dihitung dengan menggunakan metode garis lurus kecuali peralatan dan kendaraan yang dihitung dengan menggunakan metode saldo menurun ganda selama umur manfaat aset tetap yang diestimasi sebagai berikut:

	Tahun
Bangunan permanen	20
Bangunan tidak permanen	10
Peralatan, mesin, dan kendaraan roda dua	4
Kendaraan roda empat/lebih	8

Nilai tercatat aset tetap ditelaah kembali dan dilakukan penurunan nilai apabila terdapat peristiwa atau perubahan kondisi tertentu yang mengindikasikan nilai tercatat tersebut tidak dapat dipulihkan sepenuhnya.

Jumlah tercatat aset tetap dihentikan pengakuannya pada saat dilepaskan atau tidak ada manfaat ekonomis masa depan yang diharapkan dari penggunaan atau pelepasannya. Keuntungan atau kerugian yang timbul dari penghentian pengakuan aset tetap diakui dalam laba rugi pada tahun terjadinya penghentian pengakuan.

Nilai residu, umur manfaat, serta metode penyusutan dan amortisasi ditelaah setiap akhir tahun dan dilakukan penyesuaian apabila hasil telaah berbeda dengan estimasi sebelumnya.

Aset dalam Penyelesaian

Aset dalam penyelesaian dinyatakan sebesar biaya perolehan dan disajikan sebagai bagian dari aset tetap. Biaya pinjaman, termasuk selisih kurs yang timbul dari pinjaman dalam mata uang asing sejauh bahwa selisih kurs adalah penyesuaian terhadap biaya bunga yang dikeluarkan khusus untuk mendanai pembangunan, dikapitalisasi selama periode pembangunan sampai selesai. Setelah pembangunan selesai, biaya yang dikapitalisasi tersebut dipindahkan ke aset tetap.

k. Aset Takberwujud

Aset takberwujud diukur pada pengakuan awal sebesar biaya perolehan. Setelah pengakuan awal, aset takberwujud dicatat sebesar biaya perolehan dikurangi akumulasi amortisasi dan akumulasi kerugian penurunan nilai.

Masa manfaat aset takberwujud dinilai baik terbatas atau tidak terbatas. Aset takberwujud dengan masa manfaat terbatas diamortisasi selama masa manfaat ekonomis dan dinilai untuk penurunan nilai setiap ada indikasi bahwa aset takberwujud tersebut mungkin mengalami penurunan nilai. Periode amortisasi dan metode amortisasi dikaji paling lambat pada setiap akhir periode pelaporan.

Keuntungan atau kerugian yang timbul dari penghentian pengakuan suatu aset takberwujud diukur sebagai perbedaan antara jumlah neto hasil pelepasan dan jumlah tercatat dari aset dan diakui dalam laba rugi ketika aset dihentikan pengakuannya.

Aset takberwujud diamortisasi dengan metode garis lurus selama masa manfaat sebagai berikut:

	Tahun
Perangkat lunak	5

PERUSAHAAN UMUM DAERAH PEMBANGUNAN SARANA JAYA DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN
UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR PADA TANGGAL 31 DESEMBER 2023 DAN 2022
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

2. INFORMASI KEBIJAKAN AKUNTANSI MATERIAL (lanjutan)

I. Instrumen Keuangan

Aset Keuangan

Aset keuangan diakui ketika Grup memiliki hak kontraktual untuk menerima kas atau aset keuangan lain dari entitas lain. Pembelian atau penjualan aset keuangan diakui pada basis akuntansi reguler.

Tanggal perdagangan adalah tanggal di mana Grup berkomitmen untuk membeli atau menjual aset keuangan.

Pengukuran Awal

Pada saat pengakuan awal, aset keuangan diukur pada nilai wajar ditambah biaya transaksi yang dapat diatribusikan secara langsung, kecuali aset keuangan yang dinyatakan pada nilai wajar melalui laporan laba rugi.

Biaya transaksi termasuk biaya dan komisi yang dibayarkan kepada agen, konsultan, broker/ *dealer* sekuritas, biaya wajib dari regulator serta pajak dan bea yang dikenakan.

Aset keuangan yang dinyatakan pada nilai wajar melalui laporan laba rugi pada pengakuan awal juga akan diukur pada nilai wajar tetapi biaya transaksinya langsung dibebankan ke laporan laba rugi.

Pengukuran Aset Keuangan Selanjutnya

- 1) Aset keuangan diukur pada biaya perolehan diamortisasi, jika kondisi berikut ini terpenuhi: (1) tujuan model bisnis Grup untuk memiliki aset keuangan hanya untuk mengumpulkan arus kas kontraktual; dan (2) persyaratan kontraktual dari aset keuangan memberikan hak pada tanggal tertentu atas arus kas hanya dari pembayaran pokok dan bunga ("SPPI") atas jumlah pokok terutang.

Aset keuangan diukur pada jumlah yang diakui pada pengakuan awal dikurangi pembayaran pokok, ditambah atau dikurangi amortisasi kumulatif dari setiap perbedaan antara jumlah awal dan jumlah jatuh tempo dan setiap penyisihan kerugian.

Pendapatan bunga dihitung dengan menggunakan metode bunga efektif dan diakui dalam laporan laba rugi. Perubahan nilai wajar diakui dalam laporan laba rugi pada saat aset tersebut dihentikan pengakuannya atau direklasifikasi.

Pada tanggal 31 Desember 2023 dan 2022, aset keuangan Grup yang diklasifikasikan dalam kategori ini adalah kas dan setara kas, piutang usaha, dan piutang lain-lain.

- 2) Aset keuangan diukur pada nilai wajar melalui Pendapatan Komprehensif Lain ("FVTOCI"), jika kondisi berikut ini terpenuhi: (1) tujuan model bisnis Grup untuk memiliki aset keuangan adalah untuk mengumpulkan arus kas kontraktual dan menjual aset; dan (2) persyaratan kontraktual dari aset keuangan memberikan hak pada tanggal tertentu atas arus kas hanya dari pembayaran pokok dan bunga ("SPPI") atas jumlah pokok terutang.

Aset keuangan diukur pada nilai wajar. Perubahan nilai wajar pada awalnya diakui dalam pendapatan komprehensif lain (OCI), kecuali kerugian penurunan nilai, dan sebagian dari keuntungan atau kerugian selisih kurs diakui dalam laba rugi. Ketika aset dihentikan pengakuannya atau direklasifikasi, perubahan nilai wajar sebelumnya yang diakui dalam pendapatan komprehensif lain dan diakumulasi dalam ekuitas direklasifikasi dari ekuitas ke laba rugi sebagai penyesuaian reklasifikasi.

Pada tanggal 31 Desember 2023 dan 2022, Aset keuangan Grup yang diklasifikasikan dalam kategori ini adalah Investasi Jangka Panjang Lainnya.

- 3) Aset keuangan diukur pada nilai wajar melalui Laba atau Rugi ("FVTPL") adalah aset yang tidak memenuhi kedua kriteria biaya perolehan diamortisasi maupun FVTOCI. Setelah pengakuan awal, aset keuangan FVTPL diukur pada nilai wajar. Perubahan nilai wajar diakui dalam laporan laba rugi.

Aset keuangan diukur pada nilai wajar. Perubahan nilai wajar pada awalnya diakui dalam pendapatan komprehensif lain (OCI), kecuali kerugian penurunan nilai, dan sebagian dari keuntungan atau kerugian selisih kurs diakui dalam laba rugi. Ketika aset dihentikan pengakuannya atau direklasifikasi, perubahan nilai wajar sebelumnya yang diakui dalam pendapatan komprehensif lain dan diakumulasi dalam ekuitas direklasifikasi dari ekuitas ke laba rugi sebagai penyesuaian reklasifikasi.

PERUSAHAAN UMUM DAERAH PEMBANGUNAN SARANA JAYA DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN
UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR PADA TANGGAL 31 DESEMBER 2023 DAN 2022
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

2. INFORMASI KEBIJAKAN AKUNTANSI MATERIAL (lanjutan)

I. Instrumen Keuangan (lanjutan)

Aset Keuangan (lanjutan)

Pengukuran Aset Keuangan Selanjutnya (lanjutan)

Aset keuangan dalam bentuk derivatif dan investasi pada instrumen ekuitas tidak memenuhi kriteria biaya perolehan diamortisasi maupun nilai wajar melalui pendapatan komprehensif lain (FVTOCI). Oleh karena itu, hal tersebut diukur pada nilai wajar melalui laporan laba rugi (FVTPL).

Meskipun demikian, Grup dapat secara tidak dapat ditarik kembali menetapkan investasi dalam instrumen ekuitas yang tidak dimiliki untuk diperdagangkan dalam waktu dekat sebagai FVTOCI.

Penetapan ini mengakibatkan keuntungan dan kerugian disajikan pada pendapatan komprehensif lain, kecuali pendapatan dividen dari investasi tertentu yang diakui dalam laba rugi. Keuntungan atau kerugian kumulatif yang sebelumnya diakui dalam pendapatan komprehensif direklasifikasi ke saldo laba, bukan ke laba rugi.

Pada tanggal 31 Desember 2023 dan 2022, Aset keuangan Grup yang diklasifikasikan dalam kategori ini adalah Investasi Jangka Panjang Lainnya.

Penghentian Pengakuan Aset Keuangan

Aset keuangan (atau, jika berlaku, bagian dari aset keuangan atau bagian dari kelompok aset keuangan serupa) terutama dihentikan pengakuannya (yaitu, dihapus dari laporan posisi keuangan Grup) ketika:

- i. Hak untuk menerima arus kas dari aset telah kedaluwarsa; atau
- ii. Grup telah mengalihkan haknya untuk menerima arus kas dari aset atau telah mengasumsikan kewajiban untuk membayar arus kas yang diterima secara penuh tanpa penundaan material kepada pihak ketiga berdasarkan pengaturan '*pass-through*'; dan salah satu (a) Grup telah mengalihkan secara substansial semua risiko dan manfaat aset, atau (b) Grup tidak mengalihkan atau memiliki secara substansial seluruh risiko dan manfaat aset, tetapi telah mengalihkan pengendalian aset.

Ketika Grup telah mengalihkan haknya untuk menerima arus kas dari aset atau telah menandatangani perjanjian *pass-through*, Grup mengevaluasi apakah, dan sejauh mana, telah mempertahankan risiko dan manfaat kepemilikan. Ketika Grup tidak mengalihkan atau mempertahankan secara substansial seluruh risiko dan manfaat dari aset, atau mengalihkan pengendalian atas aset, Grup terus mengakui aset yang ditransfer tersebut sejauh keterlibatannya secara berkelanjutan. Dalam kasus tersebut, Grup juga mengakui liabilitas terkait. Aset alihan dan liabilitas terkait diukur atas dasar yang mencerminkan hak dan kewajiban yang dimiliki Grup.

Keterlibatan berkelanjutan dalam bentuk jaminan atas aset yang ditransfer diukur pada nilai yang lebih rendah dari nilai tercatat asli aset dan jumlah maksimum imbalan yang mungkin diminta untuk dibayar kembali oleh Grup.

Penurunan Nilai Aset Keuangan

Grup mengakui penyisihan kerugian kredit ekspektasian (ECL) untuk semua instrumen utang yang tidak dimiliki pada nilai wajar melalui laba rugi. ECL didasarkan pada perbedaan antara arus kas kontraktual yang jatuh tempo sesuai dengan kontrak dan semua arus kas yang diharapkan akan diterima Grup, didiskontokan dengan perkiraan suku bunga efektif awal. Arus kas yang diharapkan akan mencakup arus kas dari penjualan agunan yang dimiliki atau peningkatan kredit lainnya yang merupakan bagian integral dari persyaratan kontraktual.

ECL dikenali dalam 2 (dua) tahap. Untuk eksposur kredit yang belum ada peningkatan risiko kredit yang signifikan sejak pengakuan awal, ECL disediakan untuk kerugian kredit yang diakibatkan oleh peristiwa gagal bayar yang mungkin terjadi dalam 12 bulan ke depan (ECL 12 bulan).

Untuk eksposur kredit yang telah terjadi peningkatan risiko kredit yang signifikan sejak pengakuan awal, penyisihan kerugian diperlukan untuk kerugian kredit yang diperkirakan selama sisa umur eksposur, terlepas dari waktu default (ECL seumur hidup).

Untuk piutang usaha, Grup menerapkan pendekatan yang disederhanakan dalam menghitung ECL. Oleh karena itu, Grup tidak melacak perubahan dalam risiko kredit, tetapi mengakui penyisihan kerugian berdasarkan ECL seumur hidup pada setiap tanggal pelaporan.

**PERUSAHAAN UMUM DAERAH PEMBANGUNAN SARANA JAYA DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN
UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR PADA TANGGAL 31 DESEMBER 2023 DAN 2022**
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

2. INFORMASI KEBIJAKAN AKUNTANSI MATERIAL (lanjutan)

I. Instrumen Keuangan (lanjutan)

Aset Keuangan (lanjutan)

Penurunan Nilai Aset Keuangan (lanjutan)

Grup menganggap aset keuangan gagal bayar ketika pembayaran kontraktual telah lewat 120 hari. Namun, dalam kasus tertentu, Grup juga dapat mempertimbangkan aset keuangan mengalami gagal bayar ketika informasi internal atau eksternal menunjukkan bahwa Grup tidak mungkin menerima jumlah kontraktual yang terutang secara penuh sebelum memperhitungkan setiap peningkatan kredit yang dimiliki oleh Perusahaan. Aset keuangan dihapuskan jika tidak ada ekspektasi yang wajar untuk memulihkan arus kas kontraktual.

Liabilitas Keuangan

Grup mengklasifikasikan liabilitas keuangannya dalam kategori (a) liabilitas keuangan yang diukur pada nilai wajar melalui laba rugi dan (b) liabilitas keuangan yang diukur pada biaya perolehan diamortisasi.

- 1) Liabilitas keuangan pada nilai wajar melalui laporan laba rugi (FVTPL). Kategori ini terdiri dari liabilitas keuangan yang diklasifikasikan sebagai kelompok diperdagangkan dan liabilitas keuangan yang ditetapkan pada pengakuan awal pada nilai wajar melalui laporan laba rugi.

Liabilitas keuangan diklasifikasikan sebagai liabilitas keuangan yang dimiliki untuk diperdagangkan jika diperoleh untuk tujuan dijual atau dibeli kembali dalam jangka pendek dan terdapat bukti adanya tren pengambilan keuntungan.

Kewajiban derivatif juga diklasifikasikan sebagai kelompok diperdagangkan kecuali mereka ditetapkan sebagai instrumen lindung nilai yang efektif. Perubahan nilai wajar liabilitas keuangan diakui dalam laporan laba rugi komprehensif.

Pada tanggal 31 Desember 2023 dan 2022 Grup tidak memiliki liabilitas keuangan dalam kategori ini.

- 2) Kewajiban keuangan lainnya. Liabilitas keuangan yang tidak diklasifikasikan sebagai liabilitas keuangan yang diukur pada nilai wajar melalui laporan laba rugi diklasifikasikan dalam kategori ini dan dicatat pada biaya perolehan diamortisasi. Setelah pengakuan awal, Grup mengukur semua liabilitas keuangan yang dicatat pada biaya perolehan diamortisasi dengan menggunakan metode suku bunga efektif.

Pada tanggal 31 Desember 2023 dan 2022, liabilitas keuangan Grup yang diklasifikasikan dalam kategori ini terdiri dari utang usaha, utang lain-lain, beban akrual, dan pinjaman bank.

Penghentian Pengakuan Liabilitas Keuangan

Liabilitas keuangan dihentikan pengakuannya ketika liabilitas tersebut dilepaskan atau dibatalkan atau kedaluwarsa. Ketika kewajiban keuangan yang ada digantikan oleh yang lain dari pemberi pinjaman yang sama dengan persyaratan yang secara substansial berbeda, atau persyaratan dari kewajiban yang ada secara substansial dimodifikasi, pertukaran atau modifikasi tersebut diperlakukan sebagai penghentian pengakuan kewajiban awal dan pengakuan kewajiban baru. Selisih nilai tercatat masing-masing diakui pada laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain.

Saling Hapus Instrumen Keuangan

Aset keuangan dan liabilitas keuangan saling hapus dan jumlah neto dilaporkan dalam laporan posisi keuangan jika terdapat hak yang memiliki kekuatan hukum untuk saling hapus jumlah yang diakui dan ada niat untuk menyelesaikan secara neto, atau merealisasikan aset dan menyelesaikan tanggung jawab secara bersamaan.

Nilai Wajar Instrumen Keuangan

Nilai wajar adalah harga yang akan diterima untuk menjual aset atau harga yang akan dibayarkan untuk mengalihkan liabilitas dalam transaksi yang teratur antara pelaku pasar pada tanggal pengukuran.

Jika tersedia, Grup mengukur nilai wajar suatu instrumen menggunakan harga kuotasian di pasar aktif untuk instrumen tersebut. Jika pasar untuk instrumen keuangan tidak aktif, Grup menetapkan nilai wajar menggunakan teknik penilaian.

**PERUSAHAAN UMUM DAERAH PEMBANGUNAN SARANA JAYA DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN
UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR PADA TANGGAL 31 DESEMBER 2023 DAN 2022**
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

2. INFORMASI KEBIJAKAN AKUNTANSI MATERIAL (lanjutan)

i. Instrumen Keuangan (lanjutan)

Nilai Wajar Instrumen Keuangan (lanjutan)

Teknik penilaian mencakup penggunaan transaksi wajar terkini antara pihak yang berpengetahuan dan berkeinginan, dan jika tersedia, referensi ke nilai wajar terkini dari instrumen lain yang secara substansial sama, analisis arus kas yang didiskontokan dan model penetapan harga opsi.

Teknik penilaian yang dipilih memanfaatkan *input* pasar secara maksimal, sesedikit mungkin bergantung pada perkiraan yang spesifik untuk Grup, menggabungkan semua faktor yang akan dipertimbangkan oleh pelaku pasar dalam menetapkan harga, dan konsisten dengan metodologi ekonomi yang diterima untuk menentukan harga instrumen keuangan.

m. Utang Usaha dan Utang Lain-lain

Utang usaha dan utang lain-lain pada awalnya diakui sebesar nilai wajar dan selanjutnya diukur pada biaya perolehan diamortisasi dengan menggunakan metode suku bunga efektif, kecuali jika efek diskontonya tidak material.

n. Biaya Dibayar Dimuka

Biaya dibayar dimuka merupakan biaya yang telah dibayar namun pembebanannya baru akan dilakukan pada periode yang akan datang, seperti premi asuransi dibayar dimuka dan bunga dibayar dimuka. Biaya dibayar dimuka diamortisasi sesuai dengan masa manfaatnya dengan menggunakan metode garis lurus.

o. Akuntansi Operasi Bersama

Pengaturan Bersama

Pengaturan bersama adalah pengaturan atas dua atau lebih pihak yang memiliki pengendalian bersama, yaitu persetujuan kontraktual untuk berbagi pengendalian atas suatu pengaturan, yang hanya ada ketika keputusan mengenai aktivitas relevan mensyaratkan persetujuan dengan suara bulat dari seluruh pihak yang berbagi pengendalian.

Grup mengklasifikasikan pengaturan bersama sebagai Operasi bersama.

Operasi Bersama (*Joint Operation*) merupakan pengaturan bersama yang mengatur bahwa para pihak yang memiliki pengendalian bersama atas pengaturan memiliki hak atas aset dan kewajiban terhadap liabilitas, terkait dengan pengaturan tersebut. Para pihak tersebut disebut operator bersama.

Operator bersama mengakui hal berikut terkait dengan kepentingannya dalam operasi bersama:

- (a) Aset, mencakup bagiannya atas setiap aset yang dimiliki bersama;
- (b) Liabilitas, mencakup bagiannya atas liabilitas yang terjadi bersama;
- (c) Pendapatan dari penjualan bagiannya atas *output* yang dihasilkan dari operasi bersama;
- (d) Bagian atas pendapatan dari penjualan *output* oleh operasi bersama; dan
- (e) Beban, mencakup bagiannya atas setiap beban yang terjadi secara bersama-sama.

Porsi masing-masing entitas pada Operasi Bersama berdasarkan realisasi penyeteroran modal adalah sebagai berikut:

	<u>2023</u>	<u>2022</u>
KSO Lebak Bulus	84,34%	84,34%
KSO Nuansa Pondok Kelapa	89,97%	73,11%
KSO Nuansa Cilangkap	91,67%	91,02%

p. Aset Kerja Sama Operasi/KSO

Dalam melaksanakan operasinya Grup melakukan kerja sama dengan berbagai pihak sebagaimana tersebut pada masing-masing perjanjian. Kerja sama yang dilakukan Grup yaitu sebagai berikut:

PERUSAHAAN UMUM DAERAH PEMBANGUNAN SARANA JAYA DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN
UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR PADA TANGGAL 31 DESEMBER 2023 DAN 2022
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

2. INFORMASI KEBIJAKAN AKUNTANSI MATERIAL (lanjutan)

p. Aset Kerja Sama Operasi/KSO (lanjutan)

1) *Build-Operate-Transfer* (BOT)

Kerja sama Operasi (KSO) dengan pola BOT merupakan KSO dengan pihak ketiga untuk membangun, mengoperasikan dan menyerahkan aset KSO. Aset KSO dikelola oleh investor yang mendanai pembangunannya sampai akhir masa konsesi. Selama masa konsesi, Grup menerima kompensasi yang telah disepakati dengan investor. Diakhir masa konsesi, investor akan menyerahkan aset KSO beserta hak pengelolannya kepada pemilik aset. Jangka waktu masa konsesi adalah berkisar antara 20 sampai 25 tahun. Jika nilai kompensasi merupakan harga sewa wajar, aset yang diserahkan merupakan hibah serta dicatat sebagai pendapatan.

Aset BOT merupakan aset tanah Grup dalam perjanjian kerja sama yang digunakan oleh investor untuk membangun dan mengoperasikan aset tersebut. Tanah tersebut tidak dapat digunakan atau dialihkan kepemilikannya oleh Grup selama masa konsesi dan diserahkan kembali oleh investor kepada Grup pada akhir masa konsesi.

2) *Build-Transfer-Operate* (BTO)

Kerja sama Operasi (KSO) dengan pola BTO merupakan KSO dengan pihak ketiga untuk membangun, menyerahkan dan mengoperasikan aset KSO. Aset KSO diserahkan oleh investor kepada Grup setelah pembangunan selesai atau sesuai dengan kemajuan pekerjaan. Selama masa konsesi, investor mengelola aset KSO tersebut dan Grup memperoleh kompensasi sebesar yang telah disepakati untuk setiap pendapatan yang diperoleh.

Aset KSO merupakan aset tanah Grup dalam perjanjian KSO yang digunakan oleh investor untuk membangun aset KSO atas biaya investor untuk kemudian disewakan kepada penyewa. Aset KSO tersebut dibukukan dalam akun Aset kerja sama operasi.

q. Pengakuan Pendapatan dan Beban

Pada 1 Januari 2020, Grup menerapkan PSAK 72, "Pendapatan dari Kontrak dengan Pelanggan", yang mensyaratkan pengakuan pendapatan untuk memenuhi 5 (lima) langkah analisis sebagai berikut:

- Identifikasi kontrak dengan pelanggan.
- Identifikasi kewajiban pelaksanaan dalam kontrak. Kewajiban pelaksanaan merupakan janji-janji dalam kontrak untuk menyerahkan barang atau jasa yang memiliki karakteristik berbeda ke pelanggan.
- Menetapkan harga transaksi, setelah dikurangi diskon, retur, insentif penjualan dan pajak pertambahan nilai, yang berhak diperoleh suatu entitas sebagai kompensasi atas diteruskannya barang atau jasa yang dijanjikan di kontrak.
- Alokasi harga transaksi ke setiap kewajiban pelaksanaan dengan menggunakan dasar harga jual berdiri sendiri relatif dari setiap barang atau jasa berbeda yang dijanjikan di kontrak. Ketika tidak dapat diamati secara langsung, harga jual berdiri sendiri relatif diperkirakan berdasarkan biaya yang diharapkan ditambah margin.
- Pengakuan pendapatan ketika kewajiban pelaksanaan telah dipenuhi dengan menyerahkan barang atau jasa yang dijanjikan ke pelanggan (ketika pelanggan telah memiliki kendali atas barang atau jasa tersebut).

Aset kontrak adalah hak untuk mendapatkan imbalan dalam pertukaran barang atau jasa yang dialihkan ke pelanggan. Jika Grup melaksanakan transfer barang atau jasa kepada pelanggan sebelum pelanggan membayar imbalan atau sebelum pembayaran jatuh tempo, aset kontrak diakui untuk imbalan yang diperoleh yang bersyarat.

Piutang merupakan hak Grup atas sejumlah imbalan yang tidak bersyarat (yaitu, hanya berlakunya waktu yang diperlukan sebelum pembayaran imbalan jatuh tempo). Mengacu pada kebijakan akuntansi aset keuangan dalam bagian 2m Instrumen keuangan – pengukuran aset keuangan selanjutnya.

Liabilitas kontrak adalah kewajiban untuk mentransfer barang atau jasa kepada pelanggan di mana Grup telah menerima imbalan (atau jumlah imbalan yang jatuh tempo) dari pelanggan. Jika pelanggan membayar imbalan sebelum Grup mentransfer barang atau jasa kepada pelanggan, liabilitas kontrak diakui pada saat pembayaran dilakukan atau pembayaran jatuh tempo (mana yang lebih awal). Liabilitas kontrak diakui sebagai pendapatan pada saat Grup melaksanakan berdasarkan kontrak.

PERUSAHAAN UMUM DAERAH PEMBANGUNAN SARANA JAYA DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN
UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR PADA TANGGAL 31 DESEMBER 2023 DAN 2022
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

2. INFORMASI KEBIJAKAN AKUNTANSI MATERIAL (lanjutan)

q. Pengakuan Pendapatan dan Beban (lanjutan)

Grup mengakui pendapatan dari penjualan real estat pada saat semua kondisi berikut terpenuhi:

- Grup telah mengalihkan risiko dan manfaat yang signifikan dari kepemilikan real estat kepada pembeli;
- Grup tidak lagi melanjutkan keterlibatan manajerial atau kendali efektif atas real estat yang dijual;
- Jumlah pendapatan dapat diukur dengan andal;
- Kemungkinan besar manfaat ekonomi yang terkait dengan transaksi tersebut akan mengalir ke Grup; dan
- Biaya yang terjadi atau yang akan terjadi sehubungan dengan transaksi penjualan dapat diukur dengan andal.

Penjualan diakui pada saat serah terima aset yang dibuktikan dengan surat serah terima.

Pendapatan Sewa

Pendapatan sewa dari sewa operasi diakui sebagai pendapatan dengan dasar garis lurus selama masa sewa. Biaya langsung awal yang terjadi dalam proses negosiasi dan pengaturan sewa ditambahkan ke jumlah tercatat dari aset sewaan dan diakui dengan dasar garis lurus selama masa sewa. Uang muka sewa yang diterima dari penyewa dicatat ke dalam akun pendapatan yang diterima dimuka dan akan diakui sebagai pendapatan secara berkala sesuai dengan kontrak sewa yang berlaku.

Pendapatan Bunga

Pendapatan bunga diakui berdasarkan waktu terjadinya dengan acuan jumlah pokok terutang dan tingkat bunga yang berlaku. Pendapatan atas penjualan jasa mengacu pada tingkat penyelesaian dari suatu transaksi (metode persentase penyelesaian) di mana pendapatan diakui dalam periode akuntansi pada saat jasa diberikan. Pendapatan dari penjualan aset diluar barang dagangan diakui pada saat penjualan.

Pendapatan dari kerja sama operasi - bangun, kelola, serah diakui sebanding/proporsional dengan waktu penggunaannya.

Pengakuan Beban

Beban pokok proyek diakui dengan metode akrual dengan terlebih dahulu ditampung dalam akun dalam proses (proyek dalam pelaksanaan) dengan menggunakan metode biaya sesungguhnya (*actual cost*). Pembebanan harga pokok penjualan sesuai dengan metode pengakuan pendapatan atas penjualan produk.

Beban usaha dibukukan atas dasar basis akrual dengan melakukan pisah batas sesuai dengan periode akuntansi.

r. Perpajakan

Pajak Final

Peraturan perpajakan di Indonesia mengatur beberapa jenis penghasilan dikenakan pajak yang bersifat final. Pajak final yang dikenakan atas nilai bruto transaksi tetap dikenakan walaupun atas transaksi tersebut pelaku transaksi mengalami kerugian.

Mengacu pada PSAK No. 46 (Revisi 2014) pajak final tersebut tidak termasuk dalam lingkup yang diatur oleh PSAK No. 46.

Beban pajak kini ditentukan berdasarkan taksiran laba kena pajak dalam tahun yang berjalan. Penghasilan kena pajak berbeda dengan laba yang dilaporkan dalam laporan laba atau rugi dan penghasilan/(rugi) komprehensif lain konsolidasian karena penghasilan kena pajak tidak termasuk pos-pos pendapatan atau beban yang dikenakan pajak atau dikurangkan di tahun-tahun lainnya dan tidak termasuk *item-item* yang tidak pernah dikenakan pajak atau dikurangkan.

Pajak penghasilan badan kini yang terutang dihitung dengan menggunakan tarif pajak berdasarkan peraturan perpajakan yang telah ditetapkan atau secara substansial ditetapkan pada akhir periode pelaporan.

Pajak Kini

Aset dan liabilitas pajak kini untuk tahun berjalan diukur sebesar jumlah yang diharapkan dapat direstitusi dari atau dibayarkan kepada otoritas perpajakan.

PERUSAHAAN UMUM DAERAH PEMBANGUNAN SARANA JAYA DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN
UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR PADA TANGGAL 31 DESEMBER 2023 DAN 2022
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

2. INFORMASI KEBIJAKAN AKUNTANSI MATERIAL (lanjutan)

r. Perpajakan (lanjutan)

Pajak Kini (lanjutan)

Beban pajak kini ditentukan berdasarkan laba kena pajak tahun berjalan yang dihitung berdasarkan tarif pajak yang berlaku.

Kekurangan/kelebihan pembayaran pajak penghasilan dicatat sebagai bagian dari "Beban Pajak Kini" dalam laporan laba atau rugi dan penghasilan/(rugi) komprehensif lain konsolidasian. Grup juga menyajikan bunga/denda, jika ada, sebagai bagian dari "Beban Pajak Kini".

Koreksi terhadap kewajiban perpajakan dicatat pada saat surat ketetapan pajak diterima atau, jika Grup mengajukan banding, apabila:

- (1) pada saat hasil dari banding tersebut ditetapkan, kecuali bila terdapat ketidakpastian yang signifikan atas hasil banding tersebut, maka koreksi berdasarkan surat ketetapan pajak terhadap kewajiban perpajakan tersebut dicatat pada saat pengajuan banding dibuat, atau koreksi terhadap kewajiban perpajakan dicatat pada saat surat ketetapan pajak diterima atau,
- (2) pada saat di mana berdasarkan pengetahuan dari perkembangan atas kasus lain yang serupa dengan kasus yang sedang dalam proses banding, berdasarkan ketentuan dari Pengadilan Pajak atau Mahkamah Agung, di mana hasil yang diharapkan dari proses banding secara signifikan tidak pasti, maka pada saat tersebut perubahan kewajiban perpajakan berdasarkan ketetapan pajak diakui.

Grup menyajikan penyesuaian pajak penghasilan dari tahun-tahun sebelumnya, jika ada, sebagai bagian dari "Pajak Kini (Beban)/Manfaat" dalam laporan laba rugi dan penghasilan/(rugi) komprehensif lain konsolidasian.

Pajak Tangguhan

Aset pajak tangguhan diakui untuk semua perbedaan temporer yang dapat dikurangkan dan rugi fiskal belum dikompensasi, sejauh terdapat kemungkinan besar bahwa laba kena pajak akan tersedia untuk dimanfaatkan dengan perbedaan temporer yang dapat dikurangkan dan rugi fiskal belum dikompensasi.

Nilai tercatat dari aset pajak tangguhan ditelaah pada setiap akhir periode pelaporan dan diturunkan ketika tidak lagi terdapat kemungkinan bahwa akan terdapat laba kena pajak yang memungkinkan semua atau sebagian dari aset pajak tangguhan untuk direalisasi.

Aset dan liabilitas pajak tangguhan diukur berdasarkan tarif pajak yang akan berlaku pada tahun saat aset direalisasikan atau liabilitas diselesaikan berdasarkan peraturan perpajakan yang berlaku atau yang telah secara substantif telah diberlakukan pada tanggal laporan posisi keuangan konsolidasian.

Pengaruh pajak terkait dengan penyisihan untuk dan/atau pembalikan seluruh perbedaan temporer selama tahun berjalan, termasuk pengaruh perubahan tarif pajak, diakui sebagai "Manfaat/(Beban) Pajak Penghasilan Tangguhan" dan termasuk dalam laba atau rugi neto tahun berjalan, kecuali untuk transaksi-transaksi yang sebelumnya telah langsung dibebankan atau dikreditkan ke ekuitas.

Aset pajak tangguhan dan liabilitas pajak tangguhan dapat saling menghapuskan jika secara legal dapat saling menghapuskan antara aset pajak kini terhadap liabilitas pajak kini dan aset pajak tangguhan terhadap liabilitas pajak tangguhan atau Grup bermaksud untuk menyelesaikan aset dan liabilitas lancar berdasarkan jumlah neto.

s. Liabilitas Imbalan Kerja

Grup menyelenggarakan program imbalan pasca kerja berupa Tunjangan Hari Tua (THT) dalam bentuk imbalan pasti bagi seluruh karyawan tetap serta uang pesangon, penghargaan dan uang duka bagi direksi yang rumusan pembayarannya masing-masing ditetapkan berdasarkan SK (Surat Keputusan) Direksi. Penyediaan imbalan pasca kerja tersebut tidak didanai (*unfunded*), tetapi melalui Perda DKI Jakarta No. 2 tanggal 20 Maret 1982 dan telah diubah dengan Perda DKI Jakarta No. 6 tanggal 5 November 1990 yang disahkan oleh Menteri Dalam Negeri Nomor 539.31-129 tanggal 7 Februari 1991. Grup diharuskan untuk menyisihkan 15% dari laba bersih setiap tahunnya untuk suatu dana sosial dan pensiun. Dana tersebut oleh Grup dicatat sebagai kewajiban dana sosial dan pensiun.

PERUSAHAAN UMUM DAERAH PEMBANGUNAN SARANA JAYA DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN
UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR PADA TANGGAL 31 DESEMBER 2023 DAN 2022
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

2. INFORMASI KEBIJAKAN AKUNTANSI MATERIAL (lanjutan)

s. Liabilitas Imbalan Kerja (lanjutan)

Imbalan pascakerja seperti pensiun, uang pisah dan uang penghargaan masa kerja dihitung berdasarkan Undang-Undang Cipta Kerja No.11/2020 ("UUCK 11/2020").

Grup mengakui jumlah liabilitas imbalan pasti neto sebesar nilai kini kewajiban imbalan pasti pada akhir periode pelaporan dikurangi nilai wajar aset program yang dihitung oleh aktuaris independen dengan menggunakan metode *Projected Unit Credit*. Nilai kini kewajiban imbalan pasti ditentukan dengan mendiskontokan imbalan tersebut.

Grup mencatat tidak hanya kewajiban hukum berdasarkan persyaratan formal program imbalan pasti, tetapi juga kewajiban konstruktif yang timbul dari praktik informal entitas. Biaya jasa kini, biaya jasa lalu dan keuntungan atau kerugian atas konstruksi, serta bunga neto atas liabilitas/aset imbalan pasti neto diakui dalam laba rugi.

Pengukuran kembali atas liabilitas/aset imbalan pasti neto yang terdiri dari keuntungan dan kerugian aktuarial, imbal hasil atas aset program dan setiap perubahan dampak batas atas aset diakui sebagai penghasilan komprehensif lain.

Pesangon

Grup mengakui pesangon sebagai liabilitas dan beban pada tanggal yang lebih awal di antara:

- a. Ketika Grup tidak dapat lagi menarik tawaran atas imbalan tersebut; dan
- b. Ketika Grup mengakui biaya untuk restrukturisasi yang berada dalam ruang lingkup PSAK 57 dan melibatkan pembayaran pesangon.

Grup mengukur pesangon pada saat pengakuan awal, dan mengukur dan mengakui perubahan selanjutnya, sesuai dengan sifat imbalan kerja.

t. Sewa

Grup menerapkan PSAK 73 yang mensyaratkan pengakuan liabilitas sewa sehubungan dengan sewa yang sebelumnya diklasifikasikan sebagai 'sewa operasi'. Kebijakan ini berlaku untuk kontrak yang disepakati atau berubah, pada atau, setelah 1 Januari 2020.

Grup sebagai penyewa

Pada tanggal permulaan kontrak, Grup menilai apakah kontrak merupakan, atau mengandung sewa.

Suatu kontrak merupakan atau mengandung sewa jika kontrak tersebut memberikan hak untuk mengendalikan penggunaan aset identifikasian selama suatu jangka waktu untuk dipertukarkan dengan imbalan.

Pada tanggal permulaan sewa, Grup mengakui aset hak-guna dan liabilitas sewa. Aset hak-guna diukur pada biaya perolehan, di mana meliputi:

- Jumlah pengukuran awal liabilitas sewa;
- Pembayaran sewa yang dilakukan pada atau sebelum tanggal permulaan, dikurangi dengan insentif sewa;
- Biaya langsung awal yang dikeluarkan; dan
- Estimasi biaya yang akan dikeluarkan untuk membongkar dan memindahkan aset pendasar atau untuk merestorasi aset pendasar ke kondisi yang disyaratkan oleh syarat dan ketentuan sewa.

Aset hak guna kemudian disusutkan menggunakan metode garis lurus dari tanggal permulaan hingga tanggal yang lebih awal antara akhir umur manfaat aset hak guna atau akhir masa sewa.

Liabilitas sewa diukur pada nilai kini pembayaran sewa yang belum dibayar pada tanggal permulaan, didiskontokan dengan menggunakan suku bunga implisit dalam sewa atau jika suku bunga tersebut tidak dapat ditentukan, maka menggunakan suku bunga pinjaman inkremental. Pada umumnya, Grup menggunakan suku bunga pinjaman inkremental sebagai tingkat bunga diskonto.

**PERUSAHAAN UMUM DAERAH PEMBANGUNAN SARANA JAYA DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN
UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR PADA TANGGAL 31 DESEMBER 2023 DAN 2022**
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

2. INFORMASI KEBIJAKAN AKUNTANSI MATERIAL (lanjutan)

t. Sewa (lanjutan)

Sewa jangka-pendek dan sewa yang aset dasarnya bernilai rendah

Grup memutuskan untuk tidak mengakui aset hak-guna dan liabilitas sewa untuk sewa jangka pendek yang memiliki masa sewa 12 bulan atau kurang dan sewa yang aset dasarnya bernilai rendah. Grup mengakui pembayaran sewa atas sewa tersebut sebagai beban dengan dasar garis lurus selama masa sewa.

Liabilitas sewa

Pada tanggal dimulainya sewa, Grup mengakui liabilitas sewa yang diukur pada nilai kini pembayaran sewa yang harus dilakukan selama masa sewa.

Pembayaran sewa mencakup pembayaran tetap (termasuk pembayaran tetap secara substansi) dikurangi piutang insentif sewa, pembayaran sewa variabel yang bergantung pada indeks atau tarif, dan jumlah yang diharapkan akan dibayar dibawah jaminan nilai residu.

Pembayaran sewa juga mencakup harga pelaksanaan dari opsi beli yang cukup pasti akan dilaksanakan oleh Grup, dan pembayaran denda untuk penghentian sewa, jika masa sewa merefleksikan Grup melaksanakan opsi untuk menghentikan sewa. Pembayaran sewa variabel yang tidak bergantung pada indeks atau tarif diakui sebagai beban (kecuali terjadi untuk menghasilkan persediaan) pada periode di mana peristiwa atau kondisi yang memicu terjadinya pembayaran.

Dalam menghitung nilai kini pembayaran sewa, Grup menggunakan suku bunga pinjaman tambahan pada tanggal dimulainya sewa karena tingkat bunga implisit dalam sewa tidak dapat segera ditentukan. Setelah tanggal permulaan, jumlah liabilitas sewa ditingkatkan untuk merefleksikan penambahan bunga dan mengurangi pembayaran sewa yang dilakukan. Selain itu, nilai tercatat liabilitas sewa diukur kembali jika ada modifikasi, perubahan masa sewa, perubahan pembayaran sewa (misalnya, perubahan pembayaran masa depan akibat perubahan indeks atau kurs yang digunakan untuk pembayaran sewa) atau perubahan penilaian opsi untuk membeli aset dasar.

u. Kontinjensi

Liabilitas kontinjensi diungkapkan, kecuali jika arus keluar sumber daya yang mengandung manfaat ekonomi kemungkinannya kecil (*remote*). Aset kontinjensi tidak diakui dalam Laporan keuangan konsolidasi tetapi diungkapkan jika terdapat kemungkinan besar arus masuk manfaat ekonomi (*probable*).

v. Provisi

Provisi diakui jika Grup memiliki kewajiban kini (baik bersifat hukum maupun bersifat konstruktif) jika, sebagai akibat peristiwa masa lalu, besar kemungkinan penyelesaian kewajiban tersebut mengakibatkan arus keluar sumber daya yang mengandung manfaat ekonomi dan estimasi yang andal mengenai jumlah kewajiban tersebut dapat dibuat.

Provisi ditelaah pada setiap tanggal pelaporan dan disesuaikan untuk mencerminkan estimasi terbaik yang paling kini. Jika kemungkinan besar tidak terjadi arus keluar sumber daya yang mengandung manfaat ekonomi untuk menyelesaikan liabilitas tersebut, maka provisi dibatalkan. Provisi atas litigasi diestimasi berdasarkan keputusan pengadilan dan disajikan pada nilai wajar.

3. PENGGUNAAN PERTIMBANGAN, ESTIMASI, DAN ASUMSI SIGNIFIKAN OLEH MANAJEMEN

Penyusunan laporan keuangan konsolidasian Grup mengharuskan manajemen untuk membuat pertimbangan, estimasi dan asumsi yang mempengaruhi jumlah pendapatan, beban, aset dan liabilitas yang dilaporkan, dan pengungkapan atas liabilitas kontinjensi pada tanggal pelaporan.

Ketidakpastian mengenai estimasi dan asumsi tersebut dapat mengakibatkan penyesuaian material terhadap nilai tercatat dari aset dan liabilitas di masa yang akan datang.

Pertimbangan

Pertimbangan berikut ini dibuat oleh manajemen dalam rangka penerapan kebijakan akuntansi Grup yang memiliki pengaruh paling signifikan atas jumlah yang diakui dalam laporan keuangan:

**PERUSAHAAN UMUM DAERAH PEMBANGUNAN SARANA JAYA DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN
UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR PADA TANGGAL 31 DESEMBER 2023 DAN 2022**
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

3. PENGGUNAAN PERTIMBANGAN, ESTIMASI, DAN ASUMSI SIGNIFIKAN OLEH MANAJEMEN (lanjutan)

Pertimbangan (lanjutan)

Penentuan mata uang fungsional

Mata uang fungsional Grup adalah mata uang lingkungan ekonomi utama di mana Grup beroperasi. Mata uang tersebut adalah yang paling mempengaruhi harga jual barang dan jasa, dan mata uang dari negara yang kekuatan persaingan dan peraturannya sebagian besar menentukan harga jual barang dan jasa entitas, dan merupakan mata uang yang mana dan dari aktivitas pendanaan dihasilkan.

Klasifikasi aset dan liabilitas keuangan

Grup menetapkan klasifikasi atas aset dan liabilitas tertentu sebagai aset keuangan dan liabilitas keuangan dengan mempertimbangkan bila definisi yang ditetapkan PSAK No. 71 terpenuhi. Dengan demikian, aset keuangan dan liabilitas keuangan diakui sesuai dengan kebijakan akuntansi Grup seperti diungkapkan pada Catatan 2.

Uji penurunan nilai dilakukan apabila terdapat indikasi penurunan nilai. Manajemen harus menggunakan pertimbangan dalam menaksir nilai terpulihkan dan menentukan apakah ada indikasi jumlah penurunan nilai.

Pajak Penghasilan

Pertimbangan signifikan dilakukan dalam menentukan provisi atas pajak penghasilan badan. Terdapat transaksi dan perhitungan tertentu yang penentuan pajak akhirnya tidak dapat ditentukan secara pasti dalam kegiatan usaha normal. Grup mengakui liabilitas atas pajak penghasilan badan berdasarkan estimasi apakah akan terdapat tambahan pajak penghasilan badan yang akan terutang.

Penyisihan Kerugian Penurunan Nilai atas Piutang Usaha

Grup mengevaluasi akun tertentu jika terdapat informasi bahwa pelanggan yang bersangkutan tidak dapat memenuhi kewajiban keuangannya. Dalam hal tersebut, Grup mempertimbangkan berdasarkan fakta dan situasi yang tersedia termasuk namun tidak terbatas pada jangka waktu hubungan dengan pelanggan dan status kredit dari pelanggan berdasarkan catatan kredit dari pihak ketiga dan faktor pasar yang telah diketahui untuk mencatat provisi spesifik atas jumlah piutang pelanggan guna mengurangi jumlah piutang yang diharapkan dapat diterima oleh Grup.

Provisi spesifik ini dievaluasi kembali dan disesuaikan jika tambahan informasi yang diterima mempengaruhi jumlah penyisihan kerugian penurunan nilai atas piutang dagang. Penjelasan lebih lanjut diungkapkan dalam Catatan 5.

Estimasi dan Asumsi

Asumsi utama masa depan dan ketidakpastian sumber utama estimasi lain pada tanggal pelaporan yang memiliki risiko signifikan bagi penyesuaian yang material terhadap nilai tercatat aset dan liabilitas untuk tahun berikutnya diungkapkan di bawah ini. Grup mendasarkan asumsi dan estimasi pada parameter yang tersedia pada saat laporan keuangan disusun. Asumsi dan situasi mengenai perkembangan masa depan mungkin berubah akibat perubahan pasar atau situasi di luar kendali Grup. Perubahan tersebut dicerminkan dalam asumsi terkait pada saat terjadinya.

Estimasi masa manfaat aset tetap

Grup mengestimasi masa manfaat ekonomis aset tetap berdasarkan utilisasi dari aset yang diharapkan dan didukung dengan rencana dan strategi usaha dan perilaku pasar. Estimasi dari masa manfaat aset tetap adalah berdasarkan penelaahan Grup terhadap praktik industri, evaluasi teknis internal dan pengalaman untuk aset yang setara. Estimasi masa manfaat ditelaah minimum setiap akhir tahun pelaporan dan diperbarui jika ekspektasi berbeda dari estimasi sebelumnya dikarenakan pemakaian dan kerusakan fisik, keusangan secara teknis atau komersial dan hukum atau pembatasan lain atas penggunaan dari aset. Tetapi, adalah mungkin, hasil di masa depan dari operasi dapat dipengaruhi secara material oleh perubahan-perubahan dalam estimasi yang diakibatkan oleh perubahan faktor-faktor yang disebutkan di atas.

Grup mengestimasi masa manfaat ekonomis aset tetap antara 4 sampai dengan 20 tahun. Ini adalah umur yang secara umum diharapkan dalam industri di mana Grup menjalankan bisnisnya. Perubahan tingkat pemakaian dan perkembangan teknologi dapat mempengaruhi masa manfaat ekonomis dan nilai sisa aset, dan karenanya biaya penyusutan masa depan mungkin direvisi.

Pajak penghasilan

Pertimbangan signifikan dilakukan dalam menentukan provisi atas pajak penghasilan badan. Terdapat transaksi dan perhitungan tertentu yang penentuan pajak akhirnya adalah tidak pasti dalam kegiatan usaha normal. Grup mengakui liabilitas atas pajak penghasilan badan berdasarkan estimasi apakah akan terdapat tambahan pajak penghasilan badan.

PERUSAHAAN UMUM DAERAH PEMBANGUNAN SARANA JAYA DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN
UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR PADA TANGGAL 31 DESEMBER 2023 DAN 2022
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

3. PENGGUNAAN PERTIMBANGAN, ESTIMASI, DAN ASUMSI SIGNIFIKAN OLEH MANAJEMEN (lanjutan)

Estimasi dan Asumsi (lanjutan)

Aset Pajak Tangguhan

Estimasi signifikan oleh manajemen diperlukan dalam menentukan jumlah aset pajak tangguhan yang dapat diakui, berdasarkan saat penggunaan dan tingkat penghasilan kena pajak disertai dengan strategi perencanaan pajak masa depan. Penjelasan lebih rinci diungkapkan dalam Catatan 22d.

Pensiun dan Imbalan Kerja

Penentuan kewajiban dan biaya pensiun dan liabilitas imbalan kerja Grup bergantung pada pemilihan asumsi yang digunakan oleh aktuaris independen dalam menghitung jumlah-jumlah tersebut. Asumsi tersebut termasuk antara lain tingkat diskonto, tingkat kenaikan gaji tahunan, tingkat pengunduran diri karyawan tahunan, tingkat kecacatan, umur pensiun dan tingkat kematian. Hasil aktual yang berbeda dari asumsi yang ditetapkan Grup langsung diakui dalam laba atau rugi pada saat terjadinya.

Sementara Grup berkeyakinan bahwa asumsi tersebut adalah wajar dan sesuai, perbedaan signifikan dengan hasil aktual atau perubahan signifikan dalam asumsi yang digunakan dapat mempengaruhi secara material liabilitas imbalan kerja dan beban imbalan kerja bersih. Penjelasan lebih lanjut diungkapkan dalam Catatan 26.

4. KAS DAN SETARA KAS

	<u>2023</u>	<u>2022</u>
Kas	221.845.377	363.904.943
Bank - Rupiah		
PT Bank DKI	202.023.044.525	304.808.465.987
PT Bank Mandiri (Persero) Tbk	14.262.813.663	3.114.499.547
PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk	8.829.603.296	4.375.771.490
PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk	1.301.361.918	1.934.739.636
PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk	12.179.871	12.395.367
PT Bank Bukopin Tbk	3.390.343	3.825.343
PT Bank Muamalat Indonesia Tbk	-	65.015
Sub jumlah	<u>226.654.238.993</u>	<u>314.613.667.328</u>
Deposito - Rupiah		
PT Bank DKI	-	125.000.000.000
Jumlah	<u>226.654.238.993</u>	<u>439.613.667.328</u>
Tingkat bunga deposito berjangka per tahun	-	4% - 6,5%

5. PIUTANG USAHA – PIHAK KETIGA

a. Jangka Pendek

	<u>2023</u>	<u>2022</u>
PT Kuala Jaya Realty (Pejaten Park)	68.560.261.390	-
PT Kalma Indocorpora	51.261.940.882	4.483.940.882
Piutang jasa <i>outsourcing</i>	12.140.314.108	-
Piutang Dana Pengembangan Tower B, C, D (Sarana Jaya)	10.486.932.353	-
PT Reka Cipta Propertindo	8.811.368.225	8.811.368.225
PT Totalindo Eka Persada	5.044.234.751	4.570.298.358
KSO Nuansa Ponsok Kelapa (Bunga KSO)	3.679.220.391	-
KSO Nuansa Pondok Kelapa (Tim Transisi)	2.650.310.666	4.312.695.985
KSO Lebak Bulus	2.288.671.582	1.904.294.932
PD Pasar Jaya	-	813.366.043
PT Jakarta Tourisindo	-	635.040.000
PT Niaga Indoguna Yasa	-	653.220.000
Komipo Pembangkitan Jawa Bali	-	552.278.432
Lain-lain (masing-masing di bawah 500juta)	2.367.300.634	1.282.305.201
Sub jumlah	<u>167.290.554.982</u>	<u>28.018.808.058</u>
Cadangan kerugian kredit ekspektasian	(8.944.926.003)	(8.954.926.002)
Jumlah	<u>158.345.628.979</u>	<u>19.063.882.056</u>

PERUSAHAAN UMUM DAERAH PEMBANGUNAN SARANA JAYA DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN
UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR PADA TANGGAL 31 DESEMBER 2023 DAN 2022
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

5. PIUTANG USAHA – PIHAK KETIGA (lanjutan)

b. Jangka Panjang

	2023	2022
KSO Nuansa Pondok Kelapa (Porsi PT Totalindo Eka Persada)	24.888.255.597	74.102.014.577
Jumlah	24.888.255.597	74.102.014.577

Piutang PT Kuala Jaya Realty sebesar Rp68.560.261.390 merupakan kekurangan pembayaran atas pengakhiran Perjanjian Kerja Sama yang dimuat dalam Berita Acara Nomor 2748/-0721 tertanggal 9 November 2022 perihal Penyelesaian Atas Pengakhiran Kerja Sama Pengembangan Tanah untuk Pembangunan Apartemen Pejabat Park Residence. Atas jumlah tersebut terdiri dari pembagian hasil keuntungan sebesar Rp7.110.780.209, pengembalian dana investasi sebesar Rp60.000.000.000 dan denda sebesar Rp1.449.481.181.

Piutang PT Reka Cipta Propertindo sebesar Rp8.811.368.225 merupakan kekurangan pembayaran kompensasi bagi hasil penjualan dan denda keterlambatan atas pengakhiran kerja sama pembangunan dan pengembangan bangunan komersial di areal komersial (CBD) berupa Rumah Toko (Ruko) dan/atau Rumah Kantor (Rukan) berikut fasilitas beserta sarana dan prasarananya di lingkungan pemukiman Pulo Jahe, Kel. Jatinegara, Kec. Cakung, Kota Administrasi Jakarta Timur.

Piutang PT Totalindo Eka Persada Tbk tahun 2023 dan 2022 sebesar Rp5.044.234.751 dan Rp4.570.298.358 merupakan dana talangan bagian atau porsi pihak PT Totalindo Eka Persada Tbk terhadap penjualan unit hunian DP 0 (nol) Rupiah, di mana sesuai dengan Akta Notaris Yurisca Lady Enggrani No. 27 tanggal 29 November 2019 Adendum III Perjanjian Operasional Pondok Kelapa pada pasal 1B ayat (2) disebutkan bahwa Perusahaan Umum Daerah Pembangunan Sarana Jaya selaku pihak yang mendapatkan penugasan dari Pemprov DKI Jakarta dalam pengadaan hunian DP 0 (nol) Rupiah, dapat menalangi bagian atau porsi pihak PT Totalindo Eka Persada, Tbk. Nilai dana talangan sebesar Rp36.804.997.164 disepakati dalam Berita Acara Perhitungan Harga atas Satuan Rumah Susun (SARUSUN) pada Bangunan Menara Samawa (*Tower A*) Nuansa Pondok Kelapa, Jakarta Timur tanggal 18 Desember 2019, nilai tersebut berdasarkan nilai pendapatan bersih Menara Samawa (*Tower A*) Nuansa Pondok Kelapa sebesar Rp75.112.239.111 dibagi berdasarkan porsi penyertaan PT Totalindo Eka Persada, Tbk sebesar 49%, yang pembayarannya berdasarkan bagi hasil atas penjualan unit DP 0 (nol) Rupiah pada Badan KSO Nuansa Pondok Kelapa.

Piutang PT Kalma Indocopora terdiri dari piutang penyelesaian proyek Bintaro sebesar Rp46.778.000.000 dimana berdasarkan Akta No 60 tanggal 29 Juli 2022 tentang Perjanjian Pembatalan Investasi atas Porsi Penyertaan Kerja Sama, isi dari perjanjian ini adalah pengajuan pembatalan kerja sama PSJ terhadap investasi proyek Bintaro dan sudah mendapatkan persetujuan dari Dewan Pengawas melalui Surat No 009/DP-SRT/XI/2021 tanggal 6 November 2021. Pembatalan tersebut telah disepakati oleh kedua belah pihak (PSJ dan PT Kalma Indocorpora), dimana PT Kalma harus mengembalikan investasi PSJ sebesar 17,71% atau setara dengan Rp46.760.000.000. Pengembalian investasi seharusnya dilakukan selambat-lambatnya 3 (tiga) hari kerja setelah penandatanganan perjanjian ini, namun sampai dengan akhir tahun 2023 belum ada kompensasi yang diterima oleh PSJ atas pengembalian uang muka investasi tersebut. Selain itu sebesar Rp4.483.940.882 merupakan kewajiban atas kekurangan pembayaran penyertaan tanah di Proyek Lebak Bulus kepada Perusahaan Umum Daerah Pembangunan Sarana Jaya.

Mutasi cadangan kerugian kredit ekspektasian untuk piutang usaha jangka pendek adalah sebagai berikut:

	2023	2022
Saldo awal	8.954.926.002	25.657.164.046
Penyisihan selama tahun berjalan	-	33.610.780.213
Pemulihan piutang	(9.999.999)	(50.313.018.257)
Saldo akhir	8.944.926.003	8.954.926.002

Mutasi cadangan kerugian kredit ekspektasian untuk piutang usaha jangka panjang adalah sebagai berikut:

	2023	2022
Saldo awal	-	175.209.101.199
Pemulihan piutang	-	(175.209.101.199)
Saldo akhir	-	-

Manajemen berpendapat bahwa seluruh piutang usaha atas penjualan tanah dan bangunan dapat ditagih dan tidak ada risiko yang terkonsentrasi secara signifikan atas piutang dari pihak ketiga tersebut.

Tidak terdapat piutang yang dijadikan jaminan pinjaman.

PERUSAHAAN UMUM DAERAH PEMBANGUNAN SARANA JAYA DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN
UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR PADA TANGGAL 31 DESEMBER 2023 DAN 2022
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

6. PIUTANG LAIN-LAIN – PIHAK KETIGA

	2023	2022
Fiandy	71.000.000.000	71.000.000.000
PT Totalindo Eka Persada Tbk	29.708.718.854	26.554.458.300
Menara Swasana	20.332.896.998	7.041.859.520
PT Multan Ekadharna - Sawangan	6.905.481.568	6.905.481.568
YKK Bank DKI	1.157.442.606	1.157.442.606
Lain-lain (dibawah 500juta)	<u>53.574.832</u>	<u>192.632.832</u>
Sub jumlah	129.158.114.858	112.851.874.826
Cadangan kerugian penurunan nilai	<u>(79.062.924.174)</u>	<u>(79.062.924.174)</u>
Jumlah	<u>50.095.190.684</u>	<u>33.788.950.652</u>

Piutang Fiandy merupakan piutang atas pembatalan pembelian tanah oleh Perusahaan kepada Fiandy berdasarkan Berita Acara pengembalian Dana Tahap I atas pembatalan Akta Pengikatan Jual Beli Nomor 605.606.607 Tanggal 11 November 2020 oleh Notaris Dwikora Aron, S.H, atas tanah yang terletak di Kp. Malaka Kelurahan Rorotan, Kecamatan Cilincing, Jakarta Utara. Sampai dengan akhir November 2022, Perusahaan belum menerima pengembalian dana sebagaimana yang ditentukan dalam akta pembatalan tersebut, sehingga Perusahaan melaporkan Fiandy ke Bareskrim dengan laporan No. LP/0752/XII/2022/SPKT/BBARESKRIM POLRI tanggal 22 Desember 2022 atas dugaan tindak pidana memasukkan keterangan palsu ke dalam Akta autentik dan atau penipuan. Sampai dengan tanggal laporan ini, Perusahaan masih belum menunggu pemberitahuan perkembangan hasil penyelidikan.

Atas piutang ini, Perusahaan telah membentuk cadangan kerugian penghapusan piutang. Pada tahun 2022 terdapat pembayaran Rp1.000.000.000 sehingga saldo per 31 Desember 2023 dan 2022 sebesar Rp71.000.000.000.

Piutang Lain - Proyek Sawangan sebesar Rp6.905.481.568 terdiri dari Rp6.322.517.500 yang merupakan penyerahan dana untuk pembebasan tanah dari Perusahaan kepada partner kerja sama, Rp107.510.000 merupakan biaya operasional, dan Rp475.454.068 merupakan biaya bunga yang ditanggung oleh Perusahaan atas pinjaman dari PT Bank DKI untuk pembiayaan proyek tersebut. Perusahaan memutuskan perjanjian kerja sama Proyek Sawangan tersebut, karena partner kerja (PT Multan Ekadharna) tidak memenuhi janji menyediakan lahan tanah sesuai dengan perjanjian dalam akta notaris Imas Fatimah, S.H., No. 85 tanggal 27 Januari 1994 dan telah melakukan wanprestasi, antara lain yaitu:

- Bahwa pada saat PT Multan Ekadharna akan mengajukan perpanjangan izin lokasi di Pemda Kabupaten Dati II Bogor pada bulan Januari 1995, ternyata SPH (Surat Penyerahan Hak) yang sudah dilegalisir oleh Kepala Desa dan Camat Sawangan telah dipalsukan.
- Bahwa fisik tanah tidak sesuai dengan data administrasi yang diserahkan oleh PT Multan Ekadharna.
- Bahwa yang menerima pembayaran bukanlah pemilik tanah yang sebenarnya.
- Gambar situasi yang diserahkan oleh PT Multan Ekadharna tidak sesuai dengan gambar yang dibuat oleh petugas Badan Pertanahan Nasional (palsu).

Perusahaan telah mengajukan perkara tersebut melalui jalur hukum dan gugatan perkara perdata telah dimenangkan oleh Perusahaan.

Proses penyelesaian gugatan perdata sebagai berikut:

Pengajuan gugatan perkara Perdata Perusahaan kepada PT Multan Ekadharna di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat dalam perkara perdata No. 55/Pdt.G/1997/PN.JKT.PST tanggal 6 Februari 1997 telah diputuskan oleh Majelis Hakim dengan amar putusan yang menyatakan:

- PT Multan Ekadharna telah melakukan perbuatan melanggar hukum dan wanprestasi.
- Menyatakan sah dan berharga penetapan sita jaminan No. 55/Pdt.G/1997/PN.JKT.PST tanggal 11 April 1997, berupa:
 - Tanah dan bangunan terletak di Jalan Kemanggisan V No. 17 RT 03 RW 07 Kelurahan Kemanggisan, Jakarta Barat.
 - Tanah dan bangunan terletak di Komplek Villa Indo Alam Blok F No. 34, Desa Sindang Laya, Kecamatan Pacet, Kabupaten Cianjur, Jawa Barat.
 - Satu unit ruko berlantai empat, terletak di Komplek Pertokoan Jalan Majapahit Blok B No. 108 Jakarta Pusat.
 - Satu gedung bertingkat delapan terletak di Jalan Veteran Raya No. 4 Jakarta Pusat.
 - Tanah dan bangunan terletak di Jalan Bandang No. 29 A Ujung Pandang, Sulawesi Selatan.
 - Tanah dan bangunan terletak di Jalan Rajawali No. 15 A dan B Ujung Pandang, Sulawesi Selatan.
 - Tanah seluas 30 Ha, proyek kawasan perumahan dan rekreasi pantai Marina Makasar, Sulawesi Selatan.
 - Tanah dan bangunan terletak di Jl. Hang Tuah IX No. 10 Jakarta Selatan.

**PERUSAHAAN UMUM DAERAH PEMBANGUNAN SARANA JAYA DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN
UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR PADA TANGGAL 31 DESEMBER 2023 DAN 2022**
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

6. PIUTANG LAIN-LAIN – PIHAK KETIGA (lanjutan)

- c. Menghukum PT Multan Ekadharna membayar ganti rugi kepada Perusahaan DKI Jakarta atas kerugian yang diderita dengan perhitungan sebagai berikut:
- Kerugian materiil sebesar Rp8.031.916.171
 - Kerugian materiil sebesar Rp5.000.000.000
- d. Menghukum PT Multan Ekadharna untuk membayar uang paksa (*dwangsom*) sebesar Rp400.000 untuk setiap hari keterlambatan dalam melaksanakan putusan pengadilan setelah perkara diputuskan oleh Majelis Hakim.

Pengajuan gugatan yang diajukan oleh Perusahaan adalah hanya sebatas pada kepentingan dan kerugian yang diderita oleh Perusahaan sendiri.

Atas putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat (butir a) PT Multan Ekadharna mengajukan banding kepada Pengadilan Tinggi DKI Jakarta dalam perkara perdata No. 17/PDT/1998/PT.DKI tanggal 16 Februari 1998, yang diputuskan pada tanggal 2 April 1998 dengan amar putusan menyatakan gugatan Perusahaan tidak dapat diterima dan memerintahkan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat untuk mengangkat sita jaminan yang telah ditetapkan oleh Pengadilan Negeri Jakarta Pusat.

Atas putusan Pengadilan Tinggi DKI Jakarta (butir b) Perusahaan mengajukan kasasi kepada Mahkamah Agung Republik Indonesia dalam perkara kasasi No. 1079 k/Pdt/1999 dan telah putus tanggal 25 Oktober 1999 dengan membatalkan putusan Pengadilan Tinggi DKI Jakarta No. 17/PDT/1998/PT.DKI tanggal 16 Februari 1998 dan mengadili sendiri perkara tersebut, dengan amar putusan sebagai berikut:

- Mengabulkan gugatan penggugat (Perusahaan) untuk sebagian.
- Menyatakan sah dan berharga penetapan sita jaminan No. 55/Pdt.G/1997/PN.Jkt.Pst tanggal 11 April 1997.
- Menyatakan tergugat (PT Multan Ekadharna) telah melakukan perbuatan melanggar hukum dan wanprestasi.
- Menghukum PT Multan Ekadharna membayar ganti rugi kepada Perusahaan Umum Daerah Pembangunan Sarana Jaya DKI Jakarta atas kerugian materiil kepada penggugat sebesar Rp 8.031.916.171,48 (Delapan milyar tiga puluh satu juta sembilan ratus enam belas ribu seratus tujuh puluh satu rupiah empat puluh delapan sen).

Atas putusan Kasasi Mahkamah Agung Republik Indonesia (MA-RI) sebagaimana butir c di atas, PT Multan Ekadharna mengajukan peninjauan kembali kepada Mahkamah Agung Republik Indonesia dalam perkara No. 215PK/pdt/2001 dan telah diputuskan pada tanggal 5 Januari 2005 yang dimenangkan oleh Perusahaan dengan Amar Putus Menolak Permohonan PK dari PT Multa Ekadharna.

Atas permohonan peninjauan kembali tersebut di atas, Perusahaan telah mengajukan kontra memori peninjauan kepada Mahkamah Agung Republik Indonesia pada tanggal 24 Oktober 2000, (berkas perkara peninjauan kembali tersebut telah diterima oleh Mahkamah Agung Republik Indonesia dari Pengadilan Negeri Jakarta Pusat tanggal 19 Maret 2001 dan terdaftar dalam perkara No. 215PK/PDT/2001). Permohonan ini baru diputuskan pada tanggal 5 Januari 2005.

Untuk menyelesaikan kasus tanah Sawangan ini, pada tanggal 16 November 2005 Perusahaan telah memberi kuasa kepada Konsultan Hukum Nita, Diah & Patuan dengan surat kuasa khusus dari No. 874/-1.87 tanggal 16 November 2005 untuk menjalankan Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat No. 55/PDt.G/1997/PN.Jkt.Pst tanggal 10 September 1997 juncto Putusan Pengadilan Tinggi Jakarta No. 17/PDT/1998/PT DKI tanggal 2 April 1998 juncto Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia No. 1079 K/PDT/1999 tanggal 25 Oktober 1999 juncto Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia No. 215PK/PDT/2001 tanggal 5 Januari 2005 juncto Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Pusat No. 049/2000 Eks tanggal 7 Februari 2002.

Pada tanggal 6 Februari dan 5 April 2006, berdasarkan surat kuasa khusus dari Perusahaan (Pemohon Eksekusi) No. 874/-1.87 tanggal 16 November 2005 kepada Konsultan Hukum Nita, Diah & Patuan untuk menjalankan Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat No. 55/PDt.G/1997/PN.Jkt.Pst tanggal 10 September 1997 juncto Putusan Pengadilan Tinggi Jakarta No. 17/PDT/1998/PT DKI tanggal 2 April 1998 juncto Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia no. 1079 K/PDT/1999 tanggal 25 Oktober 1999 juncto Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia No. 215PK/PDT/2001 tanggal 5 Januari 2005 juncto Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Pusat No. 049/2000 Eks tanggal 7 Februari 2002, Konsultan Hukum Nita, Diah & Patuan telah mengajukan permohonan kepada Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Pusat untuk melaksanakan lelang eksekusi *a quo* terhadap harta kekayaan PT Multan Ekadharna (Termohon Eksekusi). Sampai saat ini kasus hukum tanah Sawangan tersebut masih dalam proses eksekusi. Perusahaan telah membentuk cadangan kerugian atas seluruh piutang tersebut karena kemungkinan tertagihnya diragukan.

Piutang Yayasan Kesejahteraan Karyawan (YKK) PT Bank DKI sebesar Rp1.157.442.606 merupakan piutang dalam rangka pendanaan bersama untuk Proyek Sawangan. Perusahaan telah membentuk cadangan kerugian atas seluruh piutang karena kemungkinan tertagihnya diragukan.

Piutang lain-lain kepada PT Totalindo Eka Persada Tbk merupakan dana stimulus untuk mempercepat pelaksanaan pembangunan *Tower A Nuansa Cilangkap*.

PERUSAHAAN UMUM DAERAH PEMBANGUNAN SARANA JAYA DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN
UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR PADA TANGGAL 31 DESEMBER 2023 DAN 2022
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

6. PIUTANG LAIN-LAIN – PIHAK KETIGA (lanjutan)

Mutasi cadangan kerugian kredit ekspektasian untuk piutang usaha jangka panjang adalah sebagai berikut:

	<u>2023</u>	<u>2022</u>
Saldo awal	79.062.924.174	86.077.009.106
Penyisihan selama tahun berjalan	-	71.000.000.000
Pemulihan piutang	-	(78.014.084.932)
Saldo akhir	<u>79.062.924.174</u>	<u>79.062.924.174</u>

Manajemen yakin bahwa besarnya cadangan penurunan nilai yang terbentuk sudah mencukupi untuk menutup kemungkinan timbulnya dari kerugian piutang lain-lain yang tidak tertagih.

7. UANG MUKA DAN BIAYA DIBAYAR DIMUKA

	<u>2023</u>	<u>2022</u>
Uang Muka		
Dana talangan operasional	2.353.368.477	-
Uang muka kerja	115.234.220	-
Uang muka lainnya	20.005.684	-
Biaya Dibayar Dimuka		
Asuransi	66.277.337	555.705.230
Beban reklame	26.373.499	33.197.334
Biaya konsultan	9.141.150	9.141.150
Jumlah	<u>2.590.400.367</u>	<u>598.043.714</u>

8. INVESTASI JANGKA PANJANG LAINNYA

	<u>2023</u>	<u>2022</u>
PT Yatian Aka Jakarta Hijau	1.500.001.200	1.500.001.200
PT Jakarta Hijau Lestari	2.525.139.875	2.525.403.643
Jumlah	<u>4.025.141.075</u>	<u>4.025.404.843</u>

PT Yatian Aka Jakarta Hijau

Investasi pada PT Yatian Aka Jakarta Hijau yang berdomisili di Jakarta dan bergerak di bidang *treatment* dan pembuangan limbah dan sampah serta pembangkit tenaga listrik, berdasarkan Akta No. 9 tanggal 4 Juli 2022 oleh Andalia Farida, S.H., MN., Notaris di Jakarta. Perusahaan memiliki 2.500.002 lembar saham seri B dengan nilai nominal Rp600 per lembar atau total sebesar Rp1.500.001.200, dengan persentase kepemilikan sebesar 15%. Sampai dengan 31 Desember 2023, perusahaan ini masih belum beroperasi.

PT Jakarta Hijau Lestari

Investasi pada PT Jakarta Hijau Lestari yang berdomisili di Jakarta dan bergerak di bidang *treatment* dan pembuangan limbah dan sampah serta pembangkit tenaga listrik, berdasarkan Akta No. 120 tanggal 17 Juni 2022 oleh Jimmy Tanal, S.H., M.Kn., Notaris di Jakarta. Perusahaan memiliki 3.875 lembar saham seri C dengan nilai nominal Rp651.649 per lembar atau total sebesar Rp2.525.139.875, dengan persentase kepemilikan sebesar 19%. Pada tahun 2023, terdapat pengurangan saldo investasi Perusahaan ke PT Jakarta Hijau Lestasi sebesar Rp263.768, hal tersebut dikarenakan terdapat pengembalian kelebihan dana injeksi setoran modal dari Perusahaan. Sampai dengan 31 Desember 2023, perusahaan ini masih dalam tahap persiapan dan belum beroperasi secara komersial.

9. ASET KERJA SAMA OPERASI

Terdiri dari tanah dan bangunan dengan rincian sebagai berikut:

	<u>2023</u>	<u>2022</u>
Tanah		
Tanah di Jl. Gatot Subroto (Apartemen Palma Citra)	23.335.000.000	23.335.000.000
Tanah di Jl. Kyai Maja, Kebayoran Baru (Hotel Veranda)	2.213.322.228	2.213.322.228
Tanah di Jl. Penjernihan (Mal Ikan Higienis)	1.580.867.779	1.580.867.779
Tanah di Jl. Jambore (Cibubur Junction)	1.522.089.092	1.522.089.092
Tanah di Jl. Cikini Raya 66-68 (Hotel Mercure Cikini)	701.702.179	701.702.179
Jumlah	<u>29.352.981.278</u>	<u>29.352.981.278</u>

PERUSAHAAN UMUM DAERAH PEMBANGUNAN SARANA JAYA DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN
UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR PADA TANGGAL 31 DESEMBER 2023 DAN 2022
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

9. ASET KERJA SAMA OPERASI (lanjutan)

	2023	2022
Bangunan		
Cibubur Junction	176.756.345.564	160.497.907.532
Apartemen Palma Citra – Gatot Subroto	75.357.017.324	68.769.222.068
Hotel Mercure - Cikini	19.587.979.938	17.875.576.686
Jumlah	271.701.342.826	247.142.706.286

Tanah di Jl. Gatot Subroto merupakan nilai tanah HPL milik Perusahaan seluas 16.300 m², yang HGB diterbitkan atas nama PT Bima Sarana Perkasa (BSP) sampai dengan 2019, dan di atasnya dibangun apartemen oleh BSP sesuai akta Notaris Kartono, S.H., No. 191 tanggal 17 November 2003. Kerja sama dilakukan dengan PT Inti Persada Mulia, yang telah menjadi pemilik dari BSP. Tanah yang dikerja samakan sempat mengalami tuntutan hukum dari Ny. Susuna Dewi yang meminta kompensasi sebesar Rp21 miliar. Pada tanggal 21 Desember 2011 telah ditandatangani akta perdamaian No. 117 dihadapan Notaris Martin Agustinus Wilamarta, S.H. antara Perusahaan dengan Ny. Susuna Dewi, di mana Perusahaan bersedia menanggung biaya tersebut sebesar Rp16 miliar dan sisanya oleh BSP. Biaya perdamaian sebesar Rp16 miliar telah dikapitalisasi pada tahun 2011.

Atas tanah seluas 16.300 m² tersebut, seluas 10.300 m² telah berdiri 2 apartemen yang dikelola oleh BSP (Zona 1). Atas tanah seluas 6.000 m² akan dibangun hotel dan apartemen (Zona 2), dan Perusahaan akan melepaskan hak pengelolaannya untuk diterbitkan HGB dan atau HMSSR atas setiap apartemen yang dibangunnya. Untuk Zona 1, pengelolaan Apartemen selama 20 tahun dan berakhir pada tanggal 14 Januari 2024 dengan opsi perpanjangan 10 tahun dan untuk Zona 2, khusus bangunan rumah susun (hunian atau non-hunian) masa pengelolaan selama 20 tahun sejak bangunan beroperasi atau 50 bulan sejak diterbitkan izin pembangunan dengan opsi perpanjangan 10 tahun. Dalam kerja sama tersebut juga dinyatakan bahwa ketika HGB atas nama BSP berakhir, yang bersamaan dengan berakhirnya jangka waktu kerja sama maka Perusahaan akan menerima kembali tanah beserta bangunan yang ada di atasnya.

Akta kerja sama telah mengalami beberapa kali adendum yakni Adendum 1 sesuai Akta No. 395 tanggal 30 Juni 2004 oleh Notaris Kartono, S.H., Adendum 2 sesuai Akta No. 02 tanggal 2 Mei 2012 oleh Notaris Kartono, S.H., Perjanjian penyerahan penggunaan tanah diatas HPL atas tanah terletak di Jl. Gatot Subroto sesuai Akta No. 02 tanggal 2 Mei 2012 oleh Notaris Kartono, S.H., Adendum 3 sesuai Akta No. 38 tanggal 29 September 2013 oleh Notaris Siswadji, S.H., Akta Adendum 4 sesuai Akta No. 02 tanggal 5 Februari 2016 oleh Notaris Herlina Pakpahan, S.H., Adendum 5 sesuai Akta No. 5 Tanggal 12 Juli 2019 oleh Notaris Yurisca Lady Enggrani, S.H., M.Kn.

Tanah di Jl. Kyai Maja, Kebayoran Baru, Jakarta merupakan tanah milik Perusahaan seluas 6.029 m² yang di atasnya dibangun Hotel Veranda yang merupakan kerja sama antara Perusahaan dengna PT Graha Pakubuwono Kusuma sesuai Akta No. 1 oleh Notaris Wenda Taurusita Amidjaja S.H., tanggal 1 Februari 2012. Pola Kerja sama Bangun, Serah, Kelola (BTO) dengan jangka waktu kerja sama selama 20 tahun sampai dengan 31 Desember 2035.

Tanah di Jl. Penjernihan (Mall Ikan Higienis-Pejompongan) merupakan tanah milik Perusahaan seluas 4.158 m² yang di atasnya seluas 2.424 m² dibangun Mall Ikan Higienis yang merupakan kerja sama antara Perusahaan dengan Departemen Perikanan & Kelautan sesuai dengan perjanjian kerja sama No. 083/DJ-PK2P/HK.213/VII/2003 tanggal 28 Juli 2003, dengan sistem BOT untuk jangka waktu 20 tahun sampai dengan tanggal 27 Juli 2024. Atas aset yang dikerja samakan, Perusahaan juga melakukan kerja sama pengelolaan sesuai dengan Akta Penyimpanan No. 177 oleh Notaris Arry Supratno, S.H. tanggal 23 Juli 2009 tentang Perjanjian Kerja sama Pengelolaan Pasar Ikan Higienis Mina Pejompongan dengan PT Putra Kirana Sentosa. Akta Penyimpanan telah mengalami perubahan sesuai Adendum 1 No. 19 oleh Notaris Ilyas Zaini, S.H., M.Kn., tanggal 19 Februari 2014 tentang besaran dan jangka waktu pembayaran kompensasi. Tanah seluas 1.734 m² dipinjam pakai oleh Polda Metro Jaya yang digunakan untuk Kantor Polsek Tanah Abang.

Tanah di Jl. Jambore (Cibubur Junction) merupakan tanah milik Perusahaan seluas 31.987 m² yang di atasnya dibangun Gedung Pusat Perbelanjaan Cibubur Junction yang merupakan kerja sama antara Perusahaan dengan PT Cibubur Utama sesuai dengan Akta Notaris Imas Fatimah, S.H., No. 68 tanggal 28 Juli 2003, dengan sistem BOT untuk jangka waktu 20 tahun sampai dengan 28 Juli 2025. Pada tanggal 6 Juni 2018 dilakukan penjualan atas tanah seluas 570 m² kepada Kementerian PU Republik Indonesia, dikarenakan tanah dimaksud menjadi zona lintasan LRT JABODEBEK, sehingga sisa tanah menjadi 31.417 m².

PERUSAHAAN UMUM DAERAH PEMBANGUNAN SARANA JAYA DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN
UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR PADA TANGGAL 31 DESEMBER 2023 DAN 2022
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

9. ASET KERJA SAMA OPERASI (lanjutan)

Tanah di Jl. Cikini Raya 66-68 merupakan nilai tanah milik Perusahaan seluas 3.503 m² yang dikerja samakan dengan PT Imesco Sejahtera Utama (Imesco) untuk pembangunan Hotel Bintang 4 dengan nama Hotel Mercure Cikini. Kerja sama dengan sistem Bangun, Kelola dan Serah (BOT) selama 20 Tahun atau sampai dengan 21 Februari 2036, sesuai dengan akta Notaris Jimmi Tanal S.H., sebagai notaris pengganti Hasbullah Abdul Rasyid S.H. M.kn. No. 55 tanggal 20 Desember 2010. Atas kerja sama ini, Imesco wajib membayar biaya kompensasi dan memberikan bangunan beserta fasilitasnya kepada Perusahaan pada akhir masa kerja sama. Adendum Perjanjian Kerja sama berdasarkan Akta No. 112 tanggal 28 Oktober 2011, Akta Perjanjian Kerja sama Pengalihan Kerja sama No. 150 tanggal 22 Desember 2011, Berita Acara Penyerahan tanah dan bangunan dari Perusahaan ke PT Imesco Sejahtera Utama tanggal 7 Maret 2012 yang semuanya diaktakan oleh notaris yang sama. Adendum 2 Perjanjian Kerja sama Akta Penyimpanan (Akta Van Depot) Nomor 11 tanggal 25 Agustus 2016 oleh Notaris Aslina Perangin-Angin, S.H., M.Kn. Berita Acara Penyelesaian Pekerjaan Tahap I pembangunan hotel bintang 4 tanggal 19 Februari 2016, dan Berita Acara dimulainya jangka waktu pengelolaan bangunan hotel bintang 4 tanggal 22 Februari 2016 oleh notaris yang sama.

Perusahaan mengakui bangunan aset kerja sama operasi dengan sistem BOT atas bangunan yang akan diterima oleh Perusahaan pada akhir masa kerja sama. Nilai bangunan ditentukan dengan menghitung nilai sekarang dari nilai wajar aset tersebut pada saat akan diserahterimakan, yakni pada akhir masa kerja sama, dengan menggunakan *discount rate* sebesar 10,13% untuk Cibubur Junction dan sebesar 9,58% untuk Apartemen Palma Citra dan Hotel Mercure.

Nilai wajar Cibubur Junction ditentukan berdasarkan hasil penilaian KJPP Rengganis, Hamid dan Rekan berdasarkan laporannya No. 00064/2.0012-00/JP/03/0330/1/X/2021 tanggal 18 Oktober 2021. Sedangkan nilai wajar apartemen Palma Citra dan Hotel Mercure ditentukan berdasarkan Nilai Jual Obyek Pajak (NJOP) bangunan tersebut saat ini.

10. ASET REAL ESTAT

	<u>2023</u>	<u>2022</u>
Aset Real Estat Lancar		
Hunian dan Ruko Cilangkap	232.428.508.279	219.956.822.810
Wang Residence (Catatan 11)	174.040.000.000	-
Tanah Jl. Haji Naman (Nuansa Pondok Kelapa)	50.448.106.479	50.448.106.479
Tanah Pulo Jahe DPRD	656.661.045	656.661.045
L'Avenue Apartemen	-	2.552.600.042
Tanah Lebak Bulus	-	2.234.400.322
Sub jumlah	<u>457.573.275.803</u>	<u>275.848.590.698</u>
Cadangan kerugian penurunan nilai	(23.775.589.434)	(2.234.400.322)
Sub jumlah	<u>433.797.686.369</u>	<u>273.614.190.376</u>
Aset Real Estat Tidak Lancar		
Tanah Kawasan Rorotan	1.549.204.499.046	1.529.579.333.843
Tanah Lebak Bulus	357.327.985.278	318.525.749.261
NPK Tower B	319.914.465.210	264.299.274.748
Tanah Jalan Margonda	268.699.701.390	262.156.577.396
Tanah Proyek Pulo Gebang	267.165.502.076	267.165.502.076
Tanah Kawasan SPTA (Tanah Abang)	198.585.552.144	198.585.552.144
Tanah Cilangkap	115.891.694.004	111.627.308.604
Tanah Ir H. Djuanda Ciputat (Proyek Situ Gintung)	102.640.388.545	97.824.573.545
TOD Lebak Bulus	32.725.261.933	31.295.841.247
Tanah Nuansa Cilangkap	32.310.316.845	37.048.249.053
Ruko CBD	15.074.036.923	15.074.036.924
NPK Tower A	2.354.686.560	6.759.730.679
Pejaten Park Residence	-	68.978.984.820
Sub jumlah	<u>3.261.894.089.954</u>	<u>3.208.920.714.340</u>
Jumlah	<u>3.695.691.776.323</u>	<u>3.482.534.904.716</u>

Mutasi cadangan kerugian penurunan nilai untuk aset real estat adalah sebagai berikut:

	<u>2023</u>	<u>2022</u>
Saldo awal	2.234.400.322	2.234.400.322
Penyisihan selama tahun berjalan	21.541.189.112	-
Saldo akhir	<u>23.775.589.434</u>	<u>2.234.400.322</u>

**PERUSAHAAN UMUM DAERAH PEMBANGUNAN SARANA JAYA DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN
UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR PADA TANGGAL 31 DESEMBER 2023 DAN 2022**
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

10. ASET REAL ESTAT (lanjutan)

Hunian dan ruko cilangkap ditentukan berdasarkan biaya-biaya langsung yang berkaitan dengan pembangunan Tower DP 0 (nol) Rupiah KSO Nuansa Cilangkap. Persediaan terdiri dari 26 unit ruko dan kios dengan luas 599,72 m² dan 836 unit hunian dengan luas 23.306,2 m².

Tanah Jl. H. Naman Nuansa Pondok Kelapa merupakan tanah atas proyek kerja sama operasi di Nuansa Pondok Kelapa yang merupakan kerja sama antara Perusahaan dengan PT Totalindo Eka Persada Tbk.

Tanah Pulo Jahe CBD seluas 790 m² merupakan tanah yang telah dibangun ruko atau rukan sebanyak 5 (lima) unit diserahkan pada tanggal 28 Desember 2018 oleh PT Reka Cipta Propertindo sedangkan 5 (lima) Unit lainnya dikonversi dalam bentuk nilai uang.

Tanah Pulo Jahe DPRD seluas 1.458 m² merupakan tanah untuk kavling tanah matang sesuai dengan Keputusan Gubernur No. 182 tahun 1997 tentang Penunjukkan dan Penetapan Bagi Pimpinan/Eksekutif/Pejabat/Pegawai DPRD, Pemda DKI Jakarta dan Keputusan Gubernur No. 684 Tahun 1997 tentang Penetapan Bagi Pimpinan/Eksekutif/Pejabat Pemda DKI Jakarta.

Tanah Kampung Bali seluas 9.793 m² yang terletak di Kampung Bali, Tanah Abang merupakan nilai pembayaran tanah dan pengeluaran biaya-biaya yang berkaitan dengan kegiatan proyek Sentra Primer Tanah Abang (SPTA).

Persediaan tanah Lebak Bulus (SWP) Jakarta Selatan seluas 4.632 m² sesuai Akta Perjanjian/Pengalihan hak atas tanah No. 43 tanggal 27 Agustus 2002, yang dibuat oleh Notaris PPAT Imas Fatimah, S.H.

L' Avenue merupakan pembelian 2 unit apartemen pada PT Bintang Rajawali Perkasa.

Tanah di Jl Ir H. Djuanda (Proyek Situ Gintung) Ciputat seluas 10.346 m² berdasarkan pembebasan tanah atas nama Budi Soebroto, Ny Ratna Purwaningsih Hadisoebroto dan AJB atas nama Teng Tjiu Lian dan Suryadi Lazuardi, Windi dan Sri Agam.

Tanah Rorotan merupakan tanah milik Perusahaan yang terletak di Kelurahan Rorotan, Kecamatan Cilincing, Kota Administrasi Jakarta Utara seluas ±466.314 m².

Tanah Pulo Gebang merupakan tanah milik Perusahaan yang terletak di jalan Seजार Tol Sisi Timur RT 013 RW 006, Kelurahan Pulo Gebang, Kecamatan Cakung, Jakarta Timur seluas ±41.876 m².

Tanah Cilangkap merupakan tanah milik Perusahaan yang terletak di jalan Cilangkap Raya, Kelurahan Cilangkap, Kecamatan Cipayung, Jakarta Timur seluas ±29.582,5 m².

Tanah Margonda merupakan tanah yang terletak di Jalan Margonda Raya, Kota Depok, Jawa Barat seluas 20.496 m², merupakan hasil serah terima tanah dengan Perjanjian Pengikatan Jual Beli atas konversi pengembalian investasi Perusahaan pada kerja sama pengembangan tanah untuk Pembangunan Apartemen dan Bangunan Komersial lainnya beserta fasilitasnya antara Perusahaan dengan PT Griya Sarana Akbar seluas 14.802 m², serta sebagian Pelunasan Pembayaran Kewajiban PT Laguna Alamabadi kepada Perusahaan atas Akta Pembatalan Perjanjian Pengikatan Jual Beli Tanah di Ujung Menteng 5.694 m². PT Laguna Alamabadi menyerahkan fisik dan hak penguasaan tanah atas sebagian tanah seluas 14.802 m² dengan rincian seluas 2.311 m² dan 10.491 m² berdasarkan sertifikat Hak Guna Bangunan No.7185 sisa/Depok atas nama PT Griya Sarana Akbar, bidang tanah seluas 2.000 m² berdasarkan SHGB 07349/Depok atas nama PT Griya Sarana Akbar (Catatan 5).

PT Griya Sarana Akbar menyerahkan fisik dan penguasaan tanah atas sebagian tanah seluas ±5.694 m² dari luas keseluruhan 27.661 m² berdasarkan Sertifikat Hak Guna Bangunan No.7185 sisa/Depok atas nama PT Griya Sarana Akbar dengan NIB 10.27.04.06.14960 surat ukur tanggal 07-09-2015 No. 00408/Depok/2015.

Tanah dan Bangunan Apartemen Pejaten Park Residence yang terletak di Jalan Warung Buncit Raya No. 21, Kota Administrasi Jakarta Selatan, Provinsi DKI Jakarta sebanyak 55 unit Apartemen merupakan hasil serah terima unit-unit Apartemen dengan Perjanjian Pengikatan Jual Beli atas konversi pengembalian daripada investasi Perusahaan pada Perjanjian Kerja sama Pengembangan Tanah untuk Pembangunan Apartemen Pejaten Park Residence antara PT Permata Raya Pratama dengan PT Kuala Jaya Realty dengan Perusahaan Umum Daerah Pembangunan Sarana Jaya (Catatan 5). PT Kuala Jaya Realty menyerahkan fisik dan hak penguasaan atas 55 unit Apartemen Pejaten Park Residence pada tanggal 27-12-2022 kepada Perusahaan sepenuhnya yang tidak dapat ditarik kembali.

PERUSAHAAN UMUM DAERAH PEMBANGUNAN SARANA JAYA DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN
UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR PADA TANGGAL 31 DESEMBER 2023 DAN 2022
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

10. ASET REAL ESTAT (lanjutan)

Tanah dan Bangunan Apartemen Wang Residence yang terletak di Jalan Panjang No. 5, Kebon Jeruk, Jakarta Barat berupa tanah dan 34 unit Apartemen merupakan hasil serah terima unit-unit apartemen dengan akta hibah atas konversi pengembalian investasi perusahaan pada Perjanjian Kerja sama Pengembangan Tanah untuk Pembangunan Apartemen Wang Residence Berikut Fasilitas Pendukung dan Bangunan Komersial Lainnya antara PT Citicon Properti dengan Perusahaan.

Perusahaan telah menandatangani Akta Hibah di hadapan Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) Martina, S.H. tanggal 22 Agustus 2022. Objek Hibah adalah 34 unit Hak Milik Satuan Rumah Susun yang beralamat di Rumah Susun Komersial Hunian Apartemen Wang Residence, Jalan Panjang – Kavling 18, RT005, RW 011, hibah ini meliputi pula bumi bersama, benda bersama dan bangunan bersama dengan nilai perbandingan proporsional sebesar 0,31645%. Objek hibah menjadi milik Perusahaan dan karenanya segala keuntungan yang didapat dari, dan segala kerugian/beban atas objek hibah tersebut menjadi hak dan beban perusahaan.

Tanah dan Bangunan CBD Pulo Jahe yang terletak di Lingkungan Pemukiman Pulo Jahe, Kelurahan Jatinegara, Kecamatan Cakung, Kota Administrasi Jakarta Timur sebanyak 27 kavling atau seluas 2.180 m² merupakan hasil serah terima tanah dan sertifikat Hak Guna Bangunan atas Pengakhiran Perjanjian Kerja sama Pembangunan dan Pengembangan Bangunan Komersial di Area Komersial (CBD) Berupa Rumah Toko (Ruko) dan atau Rumah Kantor (Rukan) berikut fasilitas beserta Sarana Prasarannya di Lingkungan Pemukiman Pulo Jahe, Kelurahan Jatinegara, Kecamatan Cakung, Kota Administrasi Jakarta Timur.

Perusahaan mencatat penerimaan aset atas pengembalian investasi sebagai Aset Real estat/Persediaan yang diperuntukan untuk dijual atau dibangun rumah, ruko atau bangunan lainnya untuk dijual.

Berdasarkan hasil penelaahan atas kondisi fisik, manajemen berpendapat bahwa nilai neto persediaan tersebut diatas dapat direalisasikan sepenuhnya, sehingga tidak diperlukan penyisihan penurunan nilai persediaan pada tanggal 31 Desember 2023.

11. PROPERTI INVESTASI – NETO

	2023				Saldo Akhir
	Saldo awal	Penambahan	Pengurangan	Reklasifikasi	
Nilai Perolehan					
Tanah					
Jl. Senen Raya-Segitiga Senen	14.581.160.000	-	-	-	14.581.160.000
Jl. Cikini Raya 84-86	490.570.550	-	-	-	490.570.550
Jl. Pegangsaan Barat No.2	913.580.340	-	-	-	913.580.340
Jl. Rawamangun Muka No.59C	37.426.240.079	-	-	-	37.426.240.079
Jl. Tebet Barat IV No. 20	36.327.346	-	-	-	36.327.346
Jl. Raya Pondok Kelapa	5.091.438.124	-	-	-	5.091.438.124
Jl. Cikini Raya No 42	166.261.362.100	-	-	-	166.261.362.100
Jl. Budi Kemuliaan No 1	1.283.332.902	-	-	-	1.283.332.902
Jl. Perumahan Jatinegara Indah	220.850.180	-	-	-	220.850.180
Tanah	3.994.982.700	-	-	-	3.994.982.700
Wang Residence	174.040.000.000	-	-	174.040.000.000	-
Tanah sisa	1.482.020.381	-	-	-	1.482.020.381
Sub jumlah	405.821.864.702	-	-	174.040.000.000	231.781.864.702
Bangunan					
Ex Jaya Gas	86.107.058	-	-	-	86.107.058
Gedung Sarana Jaya	127.408.717.279	-	-	-	127.408.717.279
Gedung Mal Atrium Senen	122.598.554.712	-	-	-	122.598.554.712
Naya Pramuka	37.323.433.054	-	-	-	37.323.433.054
Naya Menteng	21.957.284.998	-	-	-	21.957.284.998
Kemari Menteng	49.918.677.732	1.605.405.691	-	-	51.524.083.423
Hotel Veranda	70.000.000.000	-	-	-	70.000.000.000
Pondok Kelapa Town Square	82.539.113.440	-	-	-	82.539.113.440
Naya Cikini	37.893.681.818	-	-	-	37.893.681.818
Ruko CBD Pulo Jahe	3.745.500.000	-	-	-	3.745.500.000
JPM Tanah Abang	40.366.394.844	-	-	-	40.366.394.844
Sarana Square	75.470.705.505	-	-	-	75.470.705.505
Sarana dan Peralatan Parkir	2.778.448.863	1.689.581.001	-	-	4.468.029.864
Sarana Square	423.847.707	-	-	-	423.847.707
L'Avenue	-	2.552.600.042	-	-	2.552.600.042
Sub jumlah	672.510.467.010	5.847.586.734	-	-	678.358.053.744
Aset Dalam Pembangunan					
Sarana dan Peralatan Parkir	373.147.000	-	(373.147.000)	-	-
Sub jumlah	373.147.000	-	(373.147.000)	-	-
Jumlah Harga Perolehan	1.078.705.478.712	5.847.586.734	(373.147.000)	174.040.000.000	910.139.918.446

PERUSAHAAN UMUM DAERAH PEMBANGUNAN SARANA JAYA DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN
UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR PADA TANGGAL 31 DESEMBER 2023 DAN 2022
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

11. PROPERTI INVESTASI – NETO (lanjutan)

	2022				Saldo Akhir
	Saldo awal	Penambahan	Pengurangan	Reklasifikasi	
Akumulasi Penyusutan Bangunan					
Mal Atrium Senen	(118.511.936.206)	(4.086.618.488)	-	-	(122.598.554.694)
Naya Menteng	(7.039.685.053)	(980.832.444)	-	-	(8.020.517.497)
Kemari Menteng	(1.767.706.656)	(2.392.271.273)	-	-	(4.159.977.929)
Naya Pramuka	(12.507.898.585)	(1.866.171.648)	-	-	(14.374.070.233)
Hotel Veranda	(22.166.666.679)	(3.500.000.004)	-	-	(25.666.666.683)
Pondok Kelapa Town Square	(26.636.711.147)	(4.120.970.676)	-	-	(30.757.681.823)
Naya Cikini	(5.865.733.601)	(2.932.438.678)	-	-	(8.798.172.279)
JPM Tanah Abang	(4.036.639.488)	(2.018.319.744)	-	-	(6.054.959.232)
Gedung Sarana Jaya	(3.561.863.430)	(6.370.435.864)	376.645.494	-	(9.555.653.800)
Ruko CBD Pulo Jahe	(99.880.000)	(168.547.500)	-	-	(268.427.500)
Sarana Square	(1.257.845.092)	(3.773.535.275)	-	-	(5.031.380.367)
Sarana dan Peralatan Parkir	(1.699.405.425)	(401.700.938)	-	-	(2.101.106.363)
Sarana Square	-	(14.128.247)	-	-	(14.128.247)
Jumlah Akumulasi Penyusutan	(205.151.971.362)	(32.625.970.779)	376.645.494	-	(237.401.296.647)
Rugi Penurunan Nilai					
Tanah sisa	-	(839.236.449)	-	-	(839.236.449)
Nilai Tercatat Neto	709.102.321.121				840.464.945.616

Beban penyusutan untuk tahun yang berakhir pada 31 Desember 2023 dan 2022 masing-masing sebesar Rp29.717.229.938 dan Rp32.625.970.779 dibebankan pada beban pokok pendapatan dan beban administrasi dan umum.

Pada 31 Desember 2023 terdapat reklasifikasi saldo aset properti investasi Wang Residence sebesar Rp174.040.000.000 ke akun aset real estat, hal tersebut dikarenakan 33 unit apartemen Wang Residence diperuntukan untuk dijual bukan untuk disewakan (Catatan 10).

Tanah di Segitiga Senen merupakan tanah milik Perusahaan yang di atasnya dibangun pertokoan Atrium Segitiga Senen bekerja sama dengan PT Indokisar Jaya sesuai dengan akta Notaris Imas Fatimah, S.H., No. 165, tanggal 23 November 1989 selama 10 tahun. Pada tanggal 16 Oktober 1992, dengan akta Notaris R.N Sinulingga, S.H., No. 416 tanggal 16 Oktober 1992 diatur mengenai perpanjangan hak pengelolaan sampai dengan 20 Agustus 2002 dan PT Indokisar Jaya mengalihkan hak dan kewajibannya kepada PT Segitiga Atrium. Jangka waktu pengelolaan mengalami beberapa kali perpanjangan, terakhir berdasarkan akta Notaris Jimmy Tanal S.H., No. 42 tanggal 8 Oktober 2010 dan No. 37 tanggal 12 Agustus 2011 mengenai jangka waktu pengelolaan pertokoan Atrium Segitiga Senen dan Atrium Extention selama 20 tahun dari tanggal 2017 sampai dengan 2037.

Realisasi penyerahan fisik dan pengelolaan Gedung Plaza Atrium Senen oleh PT Segitiga Atrium kepada Perusahaan dilaksanakan tanggal 20 Agustus 2002.

Tanah dan Bangunan di Jalan Cikini Raya No. 84 - 86 dan Jalan Pegangsaan Barat No. 2 adalah alat produksi milik perusahaan yang saat ini untuk hunian Kemari Menteng (Ciks Mansion).

Tanah Bangunan di Jalan Tebet Barat IV adalah alat produksi milik perusahaan untuk persewaan hunian dan kios bunga yang dikelola oleh PT Saranawisesa Properindo.

Hotel Veranda di Jl. Kyai Maja, Kebayoran Baru, Jakarta merupakan pencatatan Aset Bangun Serah Kelola (BTO) diatas tanah milik Perusahaan yang di atasnya dibangun hotel yang merupakan kerja sama antara Perusahaan dengan PT Graha Pakubuwono Kusuma sesuai Akta Notaris Wenda Taurusita Amidjaja, S.H., No. 1 Tanggal 1 Februari 2012.

Berita Acara Kemajuan Pekerjaan Pembangunan Hotel Pakubuwono per 31 Desember 2014 beserta lampirannya sebagai dasar pencatatan telah ditandatangani oleh kedua belah pihak pada tanggal 5 Januari 2015.

Gedung Naya Cikini yang terletak di Jalan Cikini Raya Nomor 42 Kelurahan Cikini, Kecamatan Menteng, Kota Administrasi Jakarta Pusat, merupakan pembelian tanah dan bangunan dan mesin-mesin berdasarkan AJB No. 26/2019 tanggal 30 Desember 2019 sesuai dengan Akta Notaris Siauw Henry Leoprasyogo, S.H., Sp. N.

Beban penyusutan untuk tahun yang berakhir pada 31 Desember 2023 dan 2022 dibebankan pada beban pokok pendapatan dan beban administrasi dan umum (Catatan 33 dan 35).

PERUSAHAAN UMUM DAERAH PEMBANGUNAN SARANA JAYA DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN
UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR PADA TANGGAL 31 DESEMBER 2023 DAN 2022
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

11. PROPERTI INVESTASI – NETO (lanjutan)

Aset gedung Perusahaan Umum Daerah Pembangunan Sarana Jaya senilai Rp142.474.537.279 (termasuk PPN) Merupakan penerimaan gedung dari PT Getraco Utama berdasarkan berita acara Nomor 685/-1.712 Tanggal 2 Juli 2021 terkait dengan berakhirnya perjanjian kerja sama BOT perusahaan dengan PT Getraco Utama. Dari nilai tersebut, sebesar Rp10.150.000.000 merupakan aset *tax amnesty*.

Nilai wajar properti investasi sebesar Rp2.331.904.595.000 terdiri dari Rp901.876.000.000 yang dihitung berdasarkan penilaian KJPP dan sebesar Rp1.430.028.595.000 yang dihitung berdasarkan observasi nilai jual objek pajak dari objek sejenis.

Pada tanggal 31 Desember 2023 dan 2022, Perusahaan telah mengasuransikan properti investasinya kepada PT Asuransi Jasaraharja Putera dan PT Asuransi Sinar Mas terhadap risiko pencurian dan bencana alam dengan nilai pertanggungan masing-masing sebesar Rp763.865.138.098 dan Rp435.058.937.351. Manajemen berpendapat bahwa nilai pertanggungan asuransi tersebut cukup untuk menutupi kemungkinan kerugian yang timbul dari risiko-risiko tersebut.

12. BEBAN DITANGGUHKAN

	2023	2022
Beban tangguhan - pajak final	48.896.055.036	45.204.907.239
Amortisasi beban tangguhan - pajak final	(39.212.748.081)	(35.890.374.775)
Jumlah	9.683.306.955	9.314.532.464

Beban tangguhan merupakan beban atas pajak final sewa bangunan yang akan diamortisasi sesuai umur sewa tersebut.

13. ASET TETAP – NETO

	2023				
	Saldo Awal	Penambahan	Pengurangan	Reklasifikasi	
Nilai Perolehan					
Bangunan	9.764.378.484	1.201.138.415	-	-	10.965.516.899
Inventaris	10.376.234.976	1.239.309.895	-	-	11.615.544.871
Kendaraan	1.731.516.229	-	-	-	1.731.516.229
Mesin dan Peralatan	471.950.532	-	-	-	471.950.532
Peralatan Resto Pasta			-	-	
Kangen	215.083.660	-	-	-	215.083.660
Sub jumlah	22.559.163.881	2.440.448.310	-	-	24.999.612.191
AUC - Bangunan	-	2.474.337	-	-	2.474.337
Jumlah Nilai Perolehan	22.559.163.881	2.442.922.647	-	-	25.002.086.528
Akumulasi Penyusutan					
Bangunan	(2.183.041.538)	(599.894.097)	-	-	(2.782.935.635)
Inventaris	(7.802.793.572)	(1.090.539.708)	-	-	(8.893.333.280)
Kendaraan	(1.413.775.783)	(81.233.478)	-	-	(1.495.009.261)
Mesin dan peralatan	(339.426.415)	(186.418.431)	-	-	(525.844.846)
Peralatan Resto Pasta			-	-	
Kangen	(203.052.412)	(72.670.331)	-	-	(275.722.743)
Jumlah	(11.942.089.720)	(2.030.756.044)	-	-	(13.972.845.765)
Nilai Buku Neto	10.617.074.161				11.029.240.763

	2022				
	Saldo Awal	Penambahan	Pengurangan	Reklasifikasi	
Nilai Perolehan					
Bangunan	8.567.026.539	1.197.351.945	-	-	9.764.378.484
Inventaris	8.750.823.631	1.584.300.251	-	41.111.094	10.376.234.976
Kendaraan	2.513.999.206	23.142.000	(805.514.177)	(110.800)	1.731.516.229
Mesin dan Peralatan	383.564.092	89.487.345	-	(1.100.905)	471.950.532
Peralatan Resto Pasta			-	-	
Kangen	215.083.660	-	-	-	215.083.660
Jumlah Nilai Perolehan	20.430.497.128	2.894.281.541	(805.514.177)	39.899.389	22.559.163.881

PERUSAHAAN UMUM DAERAH PEMBANGUNAN SARANA JAYA DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN
UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR PADA TANGGAL 31 DESEMBER 2023 DAN 2022
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

13. ASET TETAP – NETO (lanjutan)

	2022				Saldo Akhir
	Saldo Awal	Penambahan	Pengurangan	Reklasifikasi	
Akumulasi Penyusutan					
Bangunan	(1.701.759.678)	(497.812.441)	-	16.530.581	(2.183.041.538)
Inventaris	(6.772.192.077)	(1.019.978.057)	-	(10.623.438)	(7.802.793.572)
Kendaraan	(2.098.561.213)	(107.450.998)	805.514.177	(13.277.749)	(1.413.775.783)
Mesin dan peralatan	(228.496.349)	(110.930.066)	-	-	(339.426.415)
Peralatan Resto Pasta Kangen	(160.977.975)	(42.074.437)	-	-	(203.052.412)
Jumlah	(10.961.987.292)	(1.778.245.999)	805.514.177	(7.370.606)	(11.942.089.720)
Nilai Buku Neto	9.468.509.836				10.617.074.161

Beban penyusutan untuk tahun yang berakhir pada 31 Desember 2023 dan 2022 dibebankan pada beban pokok pendapatan dan beban administrasi dan umum (Catatan 33 dan 35).

Dalam nilai perolehan aset tetap tanah Perusahaan belum termasuk hak atas tanah di jalan Matraman Raya No. 39 - 41 dengan luas ±2.030 m², karena statusnya dalam sengketa dan dikuasai oleh Bank Indonesia Raya (Bira). Menurut SK DPRD GR-DCI No. 15/P/DPRD-GR/1969, tanggal 10 September 1969, SK Gubernur KDCI No. Bd.2/12/1/1969, tanggal 10 September 1969, tanah tersebut diserahkan ke Perusahaan Tanah dan Bangunan (PTB) dan termasuk tanah yang tidak boleh dijual sesuai dengan SK Gubernur KDCI No. BD.3/14/54/96, tanggal 10 September 1969.

Pada saat Bank Bira dilikuidasi, tanah tersebut telah diambil alih oleh BPPN dan akan dilelang oleh panitia lelang BPPN pada tanggal 15 September 2000.

Sehubungan dengan hal tersebut di atas, Perusahaan telah mengambil tindakan dengan membuat surat permohonan kepada Kepala Badan Penyehatan Perbankan Nasional untuk membatalkan pelaksanaan lelang properti tersebut diatas sesuai surat Perusahaan No. 0518/-1.712.34 tanggal 7 September 2000, dengan tembusan kepada Gubernur dan wakil Gubernur Propinsi DKI Jakarta, Kepala Kejaksaan Tinggi DKI Jakarta, Kepala Kejaksaan Negeri Jakarta Timur dan PT Balindo. Karena belum mendapatkan tanggapan, sampai saat ini status tanah tersebut masih dalam sengketa (belum ada penyelesaian).

Pada tanggal 31 Desember 2023 dan 2022, Perusahaan telah mengasuransikan aset kendaraan kepada PT Asuransi Bangun Askrida terhadap risiko kecelakaan, pencurian dan huru-hara dengan nilai pertanggungan masing-masing sebesar Rp653.670.000 dan Rp675.000.000. Manajemen berpendapat bahwa nilai pertanggungan asuransi tersebut cukup untuk menutupi kemungkinan kerugian yang timbul dari risiko-risiko tersebut.

Berdasarkan hasil penelaahan manajemen Perusahaan, pada tanggal 31 Desember 2023 dan 2022, tidak terdapat kejadian atau perubahan keadaan yang mengindikasikan adanya penurunan nilai aset tetap.

Pada tanggal 31 Desember 2023 dan 2022, tidak ada aset tetap milik Perusahaan yang dijadikan sebagai jaminan.

14. ASET TAKBERWUJUD – NETO

	2023	2022
Merk Dagang "Pasta Kangen"	129.800.000	129.800.000
Akumulasi Merk Dagang "Pasta Kangen"	(129.800.000)	(110.330.000)
Sistem	136.921.667	355.556.667
Beban Pra Op - Proyek NPK Tower C	-	12.605.296
Jumlah	136.921.667	387.631.963

Mutas aset takberwujud adalah sebagai berikut:

	2023			Saldo Akhir
	Saldo awal	Penambahan	Pengurangan	
Harga Perolehan				
Sistem	858.760.000	-	(5.260.000)	853.500.000
Merk dagang "Pasta Kangen"	129.800.000	-	-	129.800.000
Beban pra op-Proyek NPK Tower C	12.605.296	-	(12.605.296)	-
Akumulasi amortisasi				
Sistem	(503.203.333)	(213.375.000)	-	(716.578.333)
Merk dagang "Pasta Kangen"	(110.330.000)	(19.470.000)	-	(129.800.000)
Nilai buku	387.631.963			136.921.667

PERUSAHAAN UMUM DAERAH PEMBANGUNAN SARANA JAYA DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN
UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR PADA TANGGAL 31 DESEMBER 2023 DAN 2022
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

14. ASET TAKBERWUJUD – NETO (lanjutan)

	2022			Saldo Akhir
	Saldo awal	Penambahan	Pengurangan	
Harga Perolehan				
Sistem	-	858.760.000	-	858.760.000
Merk dagang "Pasta Kangen"	129.800.000	-	-	129.800.000
Beban pra op-Proyek NPK Tower C	-	12.605.296	-	12.605.296
Aset dalam penyelesaian	4.118.836.793	-	(4.118.836.793)	-
Akumulasi amortisasi				
Sistem	-	(503.203.333)	-	(503.203.333)
Merk dagang "Pasta Kangen"	(84.370.000)	(25.960.000)	-	(110.330.000)
Nilai buku	4.164.266.793			387.631.963

15. ASET HAK GUNA – NETO

	2023			Saldo Akhir
	Saldo Awal	Penambahan	Pengurangan	
Harga Perolehan				
Kendaraan	347.031.160	231.978.544	-	579.009.704
Bangunan	-	330.696.314	-	330.696.314
Jumlah	347.031.160	562.674.858	-	909.706.018
Akumulasi Penyusutan				
Kendaraan	(243.736.895)	(335.272.805)	-	(579.009.700)
Bangunan	-	(110.232.105)	-	(110.232.105)
Jumlah	(243.736.895)	(445.504.910)	-	(689.241.805)
Nilai Buku	103.294.265			220.464.213

	2022			Saldo Akhir
	Saldo Awal	Penambahan	Pengurangan	
Harga Perolehan				
Kendaraan	153.423.913	193.607.247	-	347.031.160
Jumlah	153.423.913	193.607.247	-	347.031.160
Akumulasi Penyusutan				
Kendaraan	(68.044.075)	(175.692.820)	-	(243.736.895)
Jumlah	(68.044.075)	(175.692.820)	-	(243.736.895)
Nilai Buku	85.379.838			103.294.265

Beban penyusutan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023 dan 2022 masing-masing sebesar Rp445.504.910 dan Rp175.692.820 dicatat sebagai beban umum dan administrasi (Catatan 35).

16. UANG MUKA INVESTASI

	2023	2022
Proyek dengan PT Jakarta Tourisindo	56.145.700.000	56.145.700.000
Proyek Bintaro	-	46.778.000.000
Jumlah	56.145.700.000	102.923.700.000

Investasi pada Proyek Bintaro merupakan perjanjian kerja sama operasional antara PT Kalma Indocorpora dengan Perusahaan tentang pelaksanaan pembangunan gedung apartemen beserta sarana dan prasarannya di atas tanah Bintaro yang terletak di Kelurahan Bintaro Kecamatan Pesanggrahan, Jakarta Selatan seluas ±12.015 m², sesuai akta Notaris Yurisca Lady Enggrani S.H., No. 18 Tanggal 19 Desember 2018, di mana nilai investasi porsi Perusahaan sebesar Rp89.778.000.000. Berdasarkan perjanjian perubahan dan pernyataan kembali perjanjian kerja sama operasional Bintaro antara Perusahaan dengan PT Totalindo Eka Persada Tbk dan PT Kalma Indocorpora porsi Perusahaan menjadi sebesar Rp46.778.000.000.

Berdasarkan Akta No 60 tanggal 29 Juli 2022 oleh Notaris RA. Mahyasari A. Notonagoro S.H., tentang Perjanjian Pembatalan Investasi atas Porsi Penyertaan Kerja Sama Perusahaan pada Proyek Bintaro, dimana isi dari perjanjian ini adalah pengajuan pembatalan kerja sama PSJ terhadap investasi proyek Bintaro. Pembatalan tersebut telah disepakati oleh kedua belah pihak, dimana PT Kalma harus mengembalikan investasi Perusahaan sebesar 17,71% atau setara dengan Rp46.760.000.000. Sehingga atas adanya Perjanjian Pembatalan Investasi tersebut, atas saldo uang muka investasi direklasifikasi ke piutang usaha (Catatan 5)

PERUSAHAAN UMUM DAERAH PEMBANGUNAN SARANA JAYA DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN
UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR PADA TANGGAL 31 DESEMBER 2023 DAN 2022
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

16. UANG MUKA INVESTASI (lanjutan)

Uang muka kerja sama - PT Jakarta Tourisindo dengan nilai awal sebesar Rp56.000.000.000 berdasarkan Perjanjian Pendahuluan Kerja sama Pengembangan Lahan nomor 58/-1.712 tanggal 29 Januari 2020 di Jl. TB Simatupang/Jl. R.A Kartini No. 42 Kelurahan Cilandak Barat, Kecamatan Cilandak Jakarta Selatan dan Adendum Nomor 851/072 dan Nomor 930/-1.712 atas Perjanjian Pendahuluan Kerja sama Pengembangan Lahan nomor 58/-1.712 tanggal 29 Januari 2020 di Jl. TB Simatupang/Jl. R.A Kartini No. 42 Kelurahan Cilandak Barat, Kecamatan Cilandak Jakarta Selatan.

Pada tahun 2021 terdapat pembayaran 100% kajian realokasi PMD lahan TB Simatupang Cilandak Jakarta Selatan sebesar Rp145.700.000, sehingga saldo uang muka investasi PT Jaktour berjumlah Rp56.145.700.000.

Pada tahun 2023, diterbitkan Akta No 21 tanggal 15 Juni 2023 perihal Akta Perjanjian Kerjasama Induk, dimana maksud dari Perjanjian ini di antaranya:

- a. Menyepakati pemberian HGB kepada Perumda Pembangunan Sarana Jaya setelah diterbitkannya HPL kepada PT Jaktour.
- b. Melakukan pemanfaatan dan melaksanakan proyek diatas tanah kerjasama dengan memebrikan hak pemanfaatan selama jangka waktu perjanjian kerjasama antara para pihak dan mitra sehubungan dengan pelaksanaan hak pemanfaatan dalam kerjasama.

Berdasarkan SK BPN No 184/HPL/KEM-ATR/BPN/XII/2023 tanggal 14 Desember 2023, terdapat beberapa poin putusan diantaranya:

Keputusan poin 3 : Pemberiaan Hak Pengelolaan Tanah kepada PT JakTour

Keputusan poin 5 : PT Jaktour memiliki kewajiban untuk membayar BPHTB atas tanah tersebut.

Keputusan poin 7 :Untuk memperoleh tanda bukti hak berupa Sertifikat Hak Pengelolaan, penerima hak wajib mendaftarkan Keputusan ini pada kantor Pertanahan paling lambat 6 bulan terhitung tanggal keputusan ini.

Sampai dengan 31 Desember 2023 proyek tersebut masih belum terselesaikan.

17. UANG MUKA PEMBELIAN ASET

	2023	2022
Tanah dan bangunan hotel (Novotel)	646.845.700.000	646.845.700.000
Kampung Bali Tanah Abang	2.372.200.000	2.372.200.000
Pondok Rangon/ Munjul	-	151.223.076.600
Jumlah	649.217.900.000	800.440.976.600

Uang muka pembelian tanah dan bangunan PT Hotel Batavia Harmoni (Novotel) sebesar Rp646.845.700.000 berdasarkan Akta Notaris Yurisca Lady Enggrani, S.H., M.Kn No. 27 dan No. 28 tanggal 27 Maret 2019 tentang Akta Perjanjian Pengikatan Jual Beli Tanah dan Bangunan yang terletak di Jalan Cikini Raya Nomor 107-109, Kelurahan Cikini, Kecamatan Menteng, Jakarta Pusat atas nama PT Hotel Batavia Harmoni "Hotel Novotel Cikini".

Sesuai dengan Putusan Perkara Hotel Batavia Harmoni dari PN Jakarta Pusat No 638/pdt.G/2022/PM Jkt.Pst tanggal 15 November 2023, memutuskan bahwa Perusahaan diwajibkan untuk memenuhi sisa pembayaran sesuai dengan PPJB No 27 dan 28 tanggal 27 Maret 2019 yang seharusnya Nilai Jual Beli Aset sebesar Rp645.000.000.000 namun baru dibayarkan Rp634.000.000.000 sehingga sisa yang belum dibayar Rp11.000.000.000.

Pada tanggal 14 Maret 2024, Perumda Pembangunan Sarana Jaya telah membayarkan sisa nilai jual beli aset atas Hotel Batavia Harmoni sebesar Rp11.000.000.000 melalui rekening Bank DKI.

Uang muka pembelian tanah Pondok Rangon merupakan pembelian bidang tanah yang terletak di Jalan Asri I RT 002 RW 03 Kelurahan Pondok Rangon, Kecamatan Cipayung, Jakarta Timur seluas ±41.921 m². Per 31 Desember 2021 belum terjadi pembatalan pembelian, dan dalam proses pengadilan Tindak Pidana Korupsi dalam kasus korupsi pengadaan tanah di Munjul, Pondok Rangon, Jakarta Timur. KPK menjerat mantan Direktur Utama (Dirut) Perusahaan yakni Yoory Corneles Pinontoan (YRC), Wakil Direktur PT Adonara Propertindo Anja Runtunewe, Direktur PT Adonara Propertindo yakni Tommy Adrian (TA) dan juga menetapkan PT Adonara Propertindo sebagai tersangka korporasi. Perlakuan atas nilai pembelian tanah Munjul tersebut akan ditentukan setelah adanya putusan Pengadilan.

Uang muka tanah Kampung Bali merupakan pembelian bidang tanah yang terletak di Kampung Bali, Tanah Abang yang berkaitan dengan kegiatan proyek Sentra Primer Tanah Abang (SPTA).

Sampai dengan 31 Desember 2023 aset tersebut masih belum menjadi hak Perusahaan.

PERUSAHAAN UMUM DAERAH PEMBANGUNAN SARANA JAYA DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN
UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR PADA TANGGAL 31 DESEMBER 2023 DAN 2022
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

18. ASET LAIN-LAIN

	2023	2022
Tanah Pondok Rangon/ Munjul	151.223.076.600	-
SBU ITF	38.812.607.168	31.635.548.216
Perumda Pembangunan Sarana Jaya	13.838.065.519	11.246.354.146
Proyek dalam Pelaksanaan - Cilangkap	15.138.190.256	9.447.061.143
Dana Stimulus	4.948.627.810	2.584.644.212
Proyek Situ Gintung	3.218.346.096	-
Gedung Sarana Jaya Tebet	3.023.606.464	3.023.606.464
Piutang PT Totalindo Eka Persada Tbk	1.537.562.835	13.681.400.392
Tanah Abang	1.212.526.606	1.212.526.606
Pejaten Park	509.790.097	-
Proyek NPK Tower C	344.671.102	487.560.098
Lebak Bulus	244.969.000	244.969.000
Dana talangan	-	597.768.257
Proyek TMII	-	225.815.000
Studi kelayakan	-	184.158.963
Lain-lain	1.761.209.365	1.577.050.399
Sub jumlah	235.813.248.918	76.148.462.896
Cadangan kerugian penurunan nilai	-	-
Jumlah	235.813.248.918	76.148.462.896

Tanah Pondok Rangon/ Munjul ini sebelumnya dicatat sebagai uang muka pembelian aset tetap (Catatan 17). Kasus korupsi pengadaan tanah Munjul ini telah selesai berdasarkan putusan MA No. 7092 K/Pid.Sus/2022 tanggal 8 Desember 2022 jo Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi DKI Jakarta No. 20/Pid. Sus-TPK/2022/PT.DKI tanggal 14 Juli 2022 jo. Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat No. 26/Pid.Sus-TPK/2021/PN.Jkt.Pst tanggal 25 April 2022, dan KPK juga telah melaksanakan putusan pengadilan tersebut dengan melakukan perampasan aset terpidana korupsi yang berupa uang, kendaraan dan tanah.

Pada tanggal 5 April 2023, Perusahaan mengirimkan surat kepada KPK dengan No. 782/-1.871 untuk mendapatkan informasi dan penjelasan dari KPK mengenai pemulihan atas uang yang telah dikeluarkan Perusahaan berkaitan dengan sejumlah uang dan aset/benda tidak bergerak yang dirampas dari para terpidana korupsi terkait kasus tanah Munjul ini. Pada tanggal 22 Mei 2023, KPK mengirimkan surat balasan kepada Perusahaan melalui surat No. B-2863//Eks.01/08/26/05/2023 yang menyatakan bahwa aset-aset tersebut dirampas untuk negara dan tidak ada uang atau aset yang diserahkan ke Perusahaan.

Pada tanggal 16 Mei 2023, Perusahaan melaksanakan audiensi dengan Direktorat Labuksi KPK untuk menyampaikan maksud Perusahaan agar uang atau aset/benda tak bergerak yang dirampas dari para tersangka, untuk dapat diberikan kepada Pemprov DKI Jakarta. Dari audiensi tersebut, KPK menyaran agar Kepala Daerah mengajukan surat kepada KPK terkait permohonan Penetapan Status Penggunaan (PSP) atas aset tanah yang dirampas dan Perusahaan akan mengajukan permohonan kepada Kementerian Keuangan agar uang yang dirampas dapat disetorkan kepada Pemprov DKI.

Pada tanggal 30 Mei 2023, Perusahaan mengirimkan surat kepada Pemprov DKI Jakarta melalui surat No. 1212/-871.3 yang memohon Pemprov DKI untuk membantu proses permohonan Penetapan Status Penggunaan (PSP) atas aset tanah yang dirampas. Pada tanggal 25 Oktober 2023, melalui surat No. 631/UD.09, Pemprov DKI Jakarta mengirimkan surat kepada KPK sebagai permohonan untuk memproses pemindahtanganan barang rampasan melalui pengajuan usul penetapan status penggunaan atau pemindahtanganan dari dari Pemerintah Pusat ke Pemerintah Provinsi DKI Jakarta agar aset tersebut dapat dimanfaatkan oleh Pemprov DKI dalam rangka pemulihan kerugian daerah dan penatausahaan aset.

Sampai dengan tanggal laporan keuangan ini, belum ada tanggapan lagi yang diterima dari KPK.

PERUSAHAAN UMUM DAERAH PEMBANGUNAN SARANA JAYA DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN
UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR PADA TANGGAL 31 DESEMBER 2023 DAN 2022
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

18. ASET LAIN-LAIN (lanjutan)

Berdasarkan Surat Klarifikasi Hukum Terkait Tanah Munjul yang ditandatangani oleh Direktur Utama Perusahaan menyatakan bahwa:

- a. Pemulihan terhadap keuangan yang diakibatkan oleh Kasus Transaksi Lahan Munjul akan diselesaikan dengan pemindahtanganan/ hibah aset tanah terletak di Jalan Margonda, Depok, Jawa Barat dari KPK ke Pemprov DKI.
- b. Pemindahtanganan tersebut saat ini sedang diproses antara KPK RI dengan Pemprov DKI Jakarta, yang mana setelah tanah tersebut diserahkan maka Pemprov DKI Jakarta akan melakukan divestasi terhadap penyeteroran modal daerah yang telah dilakukan.

Berdasarkan surat pernyataan diatas, Perusahaan meyakini bahwa aset lain-lain atas Tanah Munjul tersebut akan dikembalikan kepada Perusahaan melalui Pemprov DKI, baik dalam bentuk pengurangan PMD atau dalam bentuk aset lainnya, sehingga tidak ada biaya yang akan diakui dari pelepasan uang muka tersebut.

Aset lain-lain berupa SBU ITF merupakan pengeluaran biaya proyek FPSA (Unit Fasilitas Pengolahan Sampah Antara) antara lain untuk pembayaran konsultan teknis dan bisnis pendampingan mitra FPSA, pembayaran jasa konsultasi teknis dan bisnis proyek FPSA, pembayaran penelitian sampling area Jakarta Zona Timur dan Selatan – FPSA.

Aset lain-lain Perumda Pembangunan Sarana Jaya tahun 2023 dan 2022 sebesar Rp 13.838.065.519 dan Rp11.246.354.145 merupakan aset real estat *Tower C, D* dan Bangunan *Marketing Galery* milik KSO Nuansa Pondok Kelapa yang menjadi porsi kepemilikan PSJ, di mana porsi kepemilikan sebesar 90%.

Di dalam lain-lain antara lain terdapat:

KTM Pondok Aren merupakan Tanah Kantong yang berada di beberapa lokasi di Pondok Aren seluas ±3.024,58 m² pada Tahun 2016 terjadi penjualan tanah kantong seluas 701 m² kepada PT Saranawisesa Properindo sesuai PPJB tanggal 23 Desember 2016.

Tanah Kantong - Pondok Kelapa merupakan tanah sisa yang masih bisa dimanfaatkan seluas 23.092 m² atau senilai Rp578.160.196, sebagian besar fisiknya dikuasai oleh masyarakat sedangkan bukti kepemilikan dikuasai oleh Perusahaan. Tahun 2022 tanah ini direklas ke akun properti investasi.

Beban Pra Operasi Naya Menteng, Sarana Square, dan Bundaran HI merupakan beban praoperasi atas proyek dan calon proyek tersebut.

19. UTANG USAHA – PIHAK KETIGA

	2023	2022
Utang milik KSO Nuansa Pondok Kelapa	20.593.394.287	15.055.962.461
PT Totalindo Eka Persada	16.185.289.350	16.069.722.551
PT Hotel Batavia Harmoni	11.000.000.000	11.000.000.000
PT. Pratama Widya	6.226.479.750	-
Utang milik KSO Lebak Bulus	3.268.951.706	6.993.561.945
Tanah Abang	3.228.000.000	3.678.000.000
PT Lesindo Bersinar	2.494.970.959	6.611.831.905
PT Easy Manajemen System (Gaji Gesa)	1.696.566.452	-
PT Plaza Adika Lestari	1.376.994.751	-
PT Integrasi Transit Jakarta	147.101.268	1.492.823.623
KSO Nuansa Pondok Kelapa (Porsi PT Totalindo Eka Persada)	-	1.197.430.076
Lain-lain (masing-masing di bawah Rp1 Miliar)	4.677.404.628	3.129.842.974
Jumlah	70.895.153.151	65.229.175.535

PERUSAHAAN UMUM DAERAH PEMBANGUNAN SARANA JAYA DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN
UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR PADA TANGGAL 31 DESEMBER 2023 DAN 2022
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

20. UTANG LAIN-LAIN – PIHAK KETIGA

	<u>2023</u>	<u>2022</u>
Dana Sosial & Pensiun (Dana pensiun, pendidikan, tunjangan hari tua dan sosial)	7.667.915.451	7.667.915.451
Titipan Nuansa Pondok Kelapa KTA	2.789.206.719	3.453.185.719
Deposit sewa dan <i>service charge</i>	1.411.196.285	1.389.626.285
Titipan KSO Cilangkap	934.762.442	-
Titipan Menara Samawa	851.391.278	-
Titipan dari Legalisasi & Rekomendasi	635.247.703	-
Titipan SPTA PPh Final	511.525.000	489.025.000
Jasa Produksi	286.465.860	362.701.086
Menara Swasana	223.235.398	-
Titipan PPh 4(2) Lebak Bulus	166.474.359	166.474.359
Titipan SPTA Notaris	167.334.000	160.584.000
Titipan Bendungan Hilir	119.541.000	119.541.000
Utang konstruksi	-	185.126.522
Lain-lain (Di bawah Rp100 juta)	1.621.997.140	724.502.622
Jumlah	<u>17.386.292.635</u>	<u>14.718.682.044</u>

Dana pensiun, pendidikan, tunjangan hari tua dan sosial merupakan kewajiban perusahaan bagi pegawai dan Direksi, nilai tersebut adalah sebesar 15% dari laba bersih sesuai dengan Perda DKI No. 2 Tahun 1982 dan Perda No. 6 Tahun 1990.

Deposit sewa dan *service charge* merupakan deposit persewaan Gedung Sarana Jaya 3 dan Mall Pondok Kelapa.

Titipan merupakan jumlah yang telah diterima perusahaan antara lain berupa biaya operasional pelaksanaan administrasi tanah, pajak dan kelebihan pembayaran kewajiban pihak lain.

Jasa produksi bagi pegawai, Direksi, Badan Pengawas dan Pembina Perusahaan dihitung sebesar 3,5% dari laba bersih perusahaan.

21. PERPAJAKAN

a. Pajak Dibayar Dimuka

	<u>2023</u>	<u>2022</u>
Pajak Pertambahan Nilai		
Perusahaan	56.121.214.678	159.795.796.459
Entitas anak dan asosiasi	47.122.558.232	41.417.861.364
Pajak penghasilan		
Perusahaan:	-	-
Entitas anak:		
Pasal 4 (2)	48.032.647	-
Pasal 28 2021	-	194.123.017
Jumlah	<u>103.291.805.557</u>	<u>201.407.780.840</u>

Pada tanggal 18 April 2022, Perusahaan menerima Surat Ketetapan Pajak Lebih bayar (SKPLB) atas pajak pertambahan nilai untuk tahun 2021 sebesar Rp110.679.060.982 dari sebesar Rp110.799.291.317 yang telah diajukan. Seluruh kelebihan ini telah diterima pada Juli 2023.

Pada tanggal 18 April 2022, Perusahaan menerima Surat Ketetapan Pajak untuk tahun 2020 yang terdiri dari Surat Ketetapan Pajak Lebih Bayar (SKPLB) atas pajak penghasilan badan sebesar Rp492.227.031, Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar (SKPKB) atas PPh 21 sebesar Rp259.840.605, SKPKB atas PPN sebesar Rp229.509.127 dan SKPKB atas pajak penghasilan pasal 4 ayat 2 dan pasal 23 serta STP atas PPN sebesar Rp9.496.365. Seluruh kekurangan ini telah dibayarkan pada Mei 2022.

Berdasarkan SPT PPN Masa Desember 2023, Perusahaan saat ini dalam tahap pengajuan restitusi atas nilai PPN Masukan, namun menunggu surat perintah pemeriksaan dari KPP Madya Jakarta Pusat.

PERUSAHAAN UMUM DAERAH PEMBANGUNAN SARANA JAYA DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN
UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR PADA TANGGAL 31 DESEMBER 2023 DAN 2022
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

21. PERPAJAKAN (lanjutan)

b. Utang Pajak

	<u>2023</u>	<u>2022</u>
Perusahaan		
Pajak Penghasilan:		
Pasal 21	729.522.173	811.315.198
Pasal 4 (2) Final	130.301.029	137.230.728
Pasal 23	31.615.095	112.681.006
Pasal 25	7.420.312	9.396.382
Pasal 29 (Catatan 21c)	1.431.517	914.020.633
Pajak pertambahan nilai - keluaran	-	28.837.223.513
Entitas anak dan asosiasi		
Pasal 4 (2) Final	313.174.854	1.090.820.518
Pasal 21	227.674.652	25.744.480
Pasal 23	65.803.491	60.187.460
Pasal 29	-	8.292.219
Pajak pertambahan nilai - keluaran	21.110.796.065	14.476.154.465
Pajak parkir	150.009.568	53.977.000
PBB dan BPHTB	1.030.463	-
Jumlah	<u>22.768.779.219</u>	<u>46.537.043.602</u>

c. Manfaat/(Beban) Pajak Penghasilan – Neto

	<u>2023</u>	<u>2022</u>
Kini		
Perusahaan	(156.374.680)	(1.162.451.840)
Entitas anak dan KSO	-	(9.023.411)
Final		
Perusahaan	(1.858.230.808)	(2.657.102.043)
Entitas anak dan KSO	-	(98.297.610)
Tanggungan		
Perusahaan	(479.111.434)	22.595.447.948
Entitas anak dan KSO	(8.708.056)	(11.237.476)
Jumlah	<u>(2.502.424.978)</u>	<u>18.657.335.568</u>

Rekonsiliasi antara laba sebelum pajak penghasilan menurut laba rugi dan penghasilan komprehensif lain dengan taksiran laba fiskal yang dihitung oleh Perusahaan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023 dan 2022 adalah sebagai berikut:

	<u>2023</u>	<u>2022</u>
(Rugi)/ laba konsolidasian sebelum pajak penghasilan	(96.360.815.381)	60.303.903.635
Dikurangi:		
(Rugi)/ laba entitas anak dan asosiasi sebelum pajak penghasilan	(16.513.875.042)	20.331.371.241
Penyesuaian akibat penyajian kembali entitas anak dan asosiasi	-	(9.026.078.243)
(Rugi)/ laba sebelum pajak perusahaan	<u>(79.846.940.339)</u>	<u>71.609.196.633</u>
Dikurangi:		
Penghasilan bersih yang telah dikenakan PPh Final	(43.755.303.823)	(54.962.864.277)
Beban pokok dan beban usaha penghasilan terkait	77.063.295.487	62.696.404.732
Jumlah	<u>(46.538.948.675)</u>	<u>79.342.737.088</u>
Beda Tetap		
Penghasilan bukan objek pajak	(26.032.333.636)	(274.677.835.960)
Beban usaha yang tidak dibiayakan	71.417.923.856	(11.052.200.676)
Bagian laba entitas anak	-	9.336.959.600
Sub jumlah	<u>45.385.590.220</u>	<u>(276.393.077.036)</u>
Beda Temporer		
Cadangan kerugian penurunan nilai	9.999.999	198.925.424.175
Imbalan pasca kerja	1.898.287.510	3.419.468.368
Penyusutan aset hak guna	592.740.187	96.501.617
Beban sewa	(636.874.747)	(107.181.818)
Sub jumlah	<u>1.864.152.949</u>	<u>202.334.212.342</u>

PERUSAHAAN UMUM DAERAH PEMBANGUNAN SARANA JAYA DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN
UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR PADA TANGGAL 31 DESEMBER 2023 DAN 2022
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

21. PERPAJAKAN (lanjutan)

c. Manfaat/(Beban) Pajak Penghasilan – Neto (lanjutan)

	<u>2023</u>	<u>2022</u>
Penghasilan kena pajak	710.794.494	5.283.872.394
Penghasilan kena pajak yang dibulatkan	710.794.000	5.283.872.000
Beban pajak kini	156.374.680	1.162.451.840
Dikurangi:		
Pajak penghasilan Pasal 23	(59.971.212)	(28.289.962)
Pajak penghasilan Pasal 25	(94.971.951)	(220.141.245)
Kurang/(lebih) bayar	<u>1.431.517</u>	<u>914.020.633</u>

d. Aset pajak tangguhan

	<u>2023</u>				
	<u>Saldo awal</u>	<u>Dikreditkan ke laporan laba rugi</u>	<u>Dikreditkan ke pendapatan komprehensif lainnya</u>	<u>Penyesuaian</u>	<u>Saldo akhir</u>
Perusahaan					
Cadangan kerugian penurunan nilai	19.548.559.057	(2.200.000)	-	-	19.546.359.057
Imbalan pasca kerja	3.106.139.371	(465.482.591)	(835.216.157)	(1.719.241)	1.803.721.382
Aset ROU	(2.349.644)	(9.709.602)	-	-	(12.059.246)
Aset pajak tangguhan – neto Perusahaan	22.652.348.784	(477.392.193)	(835.216.157)	(1.719.241)	21.338.021.193
Entitas anak					
Cadangan kerugian penurunan nilai	491.568.070	-	-	-	491.568.070
Imbalan pasca kerja	148.106.524	(8.708.056)	-	-	139.398.468
Realisasi imbalan kerja	(1.334.390)	-	-	-	(1.334.390)
Aset pajak tangguhan – neto entitas anak	638.340.204	(8.708.056)	-	-	629.632.148
Jumlah	<u>23.290.688.988</u>	<u>(486.100.249)</u>	<u>(835.216.157)</u>	<u>(1.719.241)</u>	<u>21.967.653.341</u>

	<u>2022</u>				
	<u>Saldo awal</u>	<u>Dikreditkan ke laporan laba rugi</u>	<u>Dikreditkan ke pendapatan komprehensif lainnya</u>	<u>Penyesuaian saldo awal</u>	<u>Saldo akhir</u>
Perusahaan					
Cadangan kerugian penurunan nilai	-	(43.763.593.319)	-	63.312.152.376	19.548.559.057
Imbalan pasca kerja	-	752.283.041	56.900.836	2.296.955.494	3.106.139.371
Aset ROU	-	(2.349.644)	-	-	(2.349.644)
Aset pajak tangguhan – neto Perusahaan	-	(43.013.659.922)	56.900.836	65.609.107.870	22.652.348.784
Entitas anak					
Cadangan kerugian penurunan nilai	491.568.070	-	-	-	491.568.070
Imbalan pasca kerja	128.981.307	(9.903.085)	29.028.302	-	148.106.524
Realisasi imbalan kerja	-	(1.334.390)	-	-	(1.334.390)
Aset pajak tangguhan – neto entitas anak	620.549.377	(11.237.475)	29.028.302	-	638.340.204
Jumlah	<u>620.549.377</u>	<u>(43.024.897.397)</u>	<u>85.929.138</u>	<u>65.609.107.870</u>	<u>23.290.688.988</u>

PERUSAHAAN UMUM DAERAH PEMBANGUNAN SARANA JAYA DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN
UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR PADA TANGGAL 31 DESEMBER 2023 DAN 2022
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

21. PERPAJAKAN (lanjutan)

Pada tanggal 31 Maret 2020, Pemerintah mengeluarkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 ("Perpu No.1 2020") tentang kebijakan keuangan negara dan stabilitas sistem keuangan untuk menangani pandemi *Coronavirus disease 2019* ("COVID-19"). Melalui peraturan ini, Pemerintah memutuskan beberapa kebijakan baru dan salah satunya terkait dengan penyesuaian tarif pajak penghasilan wajib pajak badan dalam negeri dan bentuk usaha tetap sebagai berikut:

- tarif pajak penghasilan sebesar 20% yang berlaku pada tahun pajak 2020 dan 2021, dan
- tarif pajak penghasilan sebesar 22% yang mulai berlaku pada tahun pajak 2022.

22. KAS YANG DIBATASI PENGGUNAANNYA

Saldo kas yang dibatasi penggunaannya pada 31 Desember 2023 sebesar Rp92.000.000.000 merupakan saldo Bank DKI yang dibatasi penggunaannya karena digunakan sebagai jaminan untuk fasilitas kredit *cash collateral*. Sedangkan saldo kas yang dibatasi penggunaannya untuk tahun 2022 sebesar Rp74.901.049 merupakan penempatan kas milik entitas anak (PT Sarana Wisesa Properindo) yang digunakan untuk dana operasional Samawa dan jaminan pelaksanaan pekerjaan.

23. BEBAN AKRUAL

	2023	2022
Beban yang masih harus dibayar	4.811.793.427	2.508.479.987
Gedung Sarana Jaya Pusat	515.437.482	277.899.676
Proyek	465.001.231	1.474.265.510
JPM	179.005.883	54.034.047
Pondok Kelapa Town Square	145.374.250	155.690.093
Naya Menteng	100.400.542	52.559.219
Naya Pramuka	28.836.638	65.137.251
Pajak pertambahan nilai	-	76.325.940
Beban audit	-	215.000.000
Kemari Menteng	-	23.240.707
Dana cadangan Menara Kanaya	-	9.280.551
Jumlah	6.245.849.453	4.911.912.981

24. PENDAPATAN DITERIMA DIMUKA

	2023	2022
a. Sewa		
KSO – Palma Citra	12.181.685.383	12.181.685.383
Gedung Naya Cikini	8.524.111.926	8.133.064.500
Kemari Menteng	3.408.333.331	4.090.000.000
PT Gowa Modern Moto	1.600.000.002	-
Mall Pondok Kelapa Town Square	835.638.074	915.770.182
Ruko CBD Pulo Jahe Blok B 2-5	792.000.000	1.170.000.000
Gedung Sarana Jaya Pusat	558.749.996	1.357.142.851
Eks. Jaya Gas	540.000.000	540.000.000
Naya Pramuka	495.472.501	539.467.302
Ruko CBD Pulo Jahe Blok BI No. 1	99.166.673	169.166.669
KSO – Cibubur Junction	-	31.122.430.653
KSO – Hotel Mercure Cikini	-	10.324.820.925
Lainnya	213.265.026	-
Jumlah	29.248.422.912	70.543.548.465
b. Penjualan dan kerja sama		
Titipan Tanda Jadi	7.025.772.929	1.124.933.178
Uang Muka Penjualan	1.450.585.163	3.437.087.067
Bendungan Hilir	926.170.250	926.170.250
Sarana Square	466.743.693	1.600.848.467
Pulo Jahe DPRD	43.347.587	43.347.587
Uang muka penjualan lainnya	255.025.628	-
Jumlah	10.167.645.250	7.132.386.549
Bagian jangka pendek	721.769.321	1.600.848.467
Bagian jangka panjang	9.445.875.929	5.531.538.082

PERUSAHAAN UMUM DAERAH PEMBANGUNAN SARANA JAYA DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN
UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR PADA TANGGAL 31 DESEMBER 2023 DAN 2022
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

24. PENDAPATAN DITERIMA DIMUKA (lanjutan)

	<u>2023</u>	<u>2022</u>
c. Aset kerja sama operasi		
Atrium Segitiga Senen	71.723.131.745	77.004.703.242
Gedung Sarana Jaya	13.377.220.331	4.573.920.000
Mall Atrium Senen	1.357.529.148	1.789.347.330
Hotel Veranda	380.000.009	380.000.009
Mal Ikan Higienis	134.166.649	134.166.652
Mercure Cikini	91.666.674	91.666.667
Jumlah	<u>87.063.714.556</u>	<u>83.973.803.900</u>
Bagian jangka pendek	<u>91.666.674</u>	<u>91.666.667</u>
Bagian jangka panjang	<u>86.972.047.882</u>	<u>83.882.137.233</u>

Bangunan Plaza Atrium merupakan nilai penyerahan aset KSO kepada pemilik aset di akhir masa konsesi, Perusahaan mencatat penyerahan tersebut pada bulan Agustus tahun 2002 sebesar Rp122.598.554.712.

Uang muka penjualan rumah susun Bendungan Hilir (Benhil) merupakan titipan sesuai dengan Keputusan Gubernur DKI Jakarta No. 1353 tahun 1995 dan surat kuasa Gubernur DKI Jakarta kepada Perusahaan No. 660/1995, tanggal 28 Februari 1995 diantaranya disebutkan bahwa Perusahaan diberikan kuasa untuk menerima dan menyertorkan hasil penjualan satuan rumah susun kepada Pemerintah DKI Jakarta, setelah dikurangi biaya-biaya yang timbul dari pelaksanaan surat kuasa ini.

Uang muka penjualan KTM Pulo Jahe DPRD merupakan penerimaan dari penjualan KTM kepada para eksekutif Pemda DKI dengan nama-nama yang ditetapkan dengan SK Gubernur DKI Jakarta nomor 182, tanggal 5 Februari 1997 dan nomor 684 tanggal 2 Mei 1997.

25. PINJAMAN BANK

Merupakan utang kepada PT Bank DKI dengan rincian sebagai berikut:

	<u>2023</u>	<u>2022</u>
<u>Jangka pendek</u>		
Kredit <i>cash collateral</i>	92.000.000.000	-
KMK 1	13.672.128.000	150.000.000.000
KMK 2	13.672.128.000	150.000.000.000
KMK No. 32	-	100.000.000.000
Jumlah	<u>119.344.256.000</u>	<u>400.000.000.000</u>
<u>Jangka panjang</u>		
KMK 1	147.037.183.440	-
KMK 2	147.037.183.440	-
Jumlah	<u>294.074.366.880</u>	<u>-</u>
Dikurangi bagian yang jatuh tempo dalam waktu satu tahun	(27.344.256.000)	-
Bagian jangka panjang	<u>266.730.110.880</u>	<u>-</u>

Kredit cash collateral

Berdasarkan Perjanjian kredit *cash collateral* No. 10/KKM/XII/2023 tanggal 29 Desember 2023, Perusahaan menandatangani perjanjian pemberian fasilitas Kredit dengan *plafond* maksimal sebesar Rp92.000.000.000. Fasilitas kredit berbentuk kredit berjaminan tunai (*cash collateral*) yang diberikan dengan tujuan sebagai tambahan modal kerja Perusahaan. Fasilitas kredit harus dilunasi paling lambat 3 (tiga) bulan setelah tanggal perjanjian serta dibebankan bunga pinjaman sebesar 0,70% per tahun.

KMK 1

Berdasarkan Akta Notaris Dr. Agung Iriantoro S.H., M.H., No. 13 tanggal 30 September 2022, Perusahaan menandatangani perjanjian pemberian fasilitas Kredit Modal Kerja dengan *plafond* kredit sebesar Rp150.000.000.000. Fasilitas kredit bersifat *revolving* dan diberikan dengan tujuan sebagai tambahan modal kerja untuk operasional Perusahaan, serta dibebankan bunga pinjaman sebesar 8,50% per tahun. Fasilitas pinjaman berlaku sampai dengan 30 September 2023 dan perjanjian pinjaman berlaku sampai dengan jumlah yang terutang telah dibayar lunas kepada bank berdasarkan perjanjian ini. Atas fasilitas kredit ini Perusahaan telah memperoleh persetujuan perpanjangan jangka waktu fasilitas kredit berdasarkan surat Pemberitahuan Persetujuan Perpanjangan Kredit Sementara No. 1548/SPPK/925/IX/2023, yang memperpanjang jangka waktu kredit sampai dengan 30 Desember 2023.

PERUSAHAAN UMUM DAERAH PEMBANGUNAN SARANA JAYA DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN
UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR PADA TANGGAL 31 DESEMBER 2023 DAN 2022
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

25. PINJAMAN BANK (lanjutan)

KMK 2

Berdasarkan Akta Notaris Dr. Agung Iriantoro S.H., M.H., No. 02 tanggal 3 Desember 2021, Perusahaan menandatangani perjanjian pemberian fasilitas Kredit Modal Kerja dengan *plafond* kredit sebesar Rp150.000.000.000. Fasilitas kredit bersifat *revolving* dan diberikan dengan tujuan sebagai *project financing* khusus untuk membiayai proyek penugasan dari Pemprov DKI Jakarta yang tercantum dalam Penyertaan Modal Daerah Pemprov DKI Jakarta, serta dibebankan bunga pinjaman sebesar 8,50% per tahun. Fasilitas pinjaman berlaku sampai dengan 3 Desember 2022 dan perjanjian pinjaman berlaku sampai dengan jumlah yang terutang telah dibayar lunas kepada bank berdasarkan perjanjian ini.

Perjanjian ini telah diperbaharui dengan Akta Notaris Dr. Agung Iriantoro S.H., M.H., No. 18 tanggal 26 Desember 2022. Fasilitas kredit bersifat *revolving* dan diberikan dengan tujuan sebagai tambahan modal kerja untuk operasional Perusahaan, serta dibebankan bunga pinjaman sebesar 8,50% per tahun. Fasilitas pinjaman berlaku sampai dengan 26 Desember 2023 dan perjanjian pinjaman berlaku sampai dengan jumlah yang terutang telah dibayar lunas kepada bank berdasarkan perjanjian ini.

Restrukturisasi kredit

Berdasarkan Akta Notaris Aristiawan Dwi Putranto S.H., M.Kn. No. 36 tanggal 22 Desember 2023 tentang adendum perjanjian kredit KMK pinjaman tetap berjangka 1 dan KMK pinjaman tetap berjangka 2, Perusahaan menandatangani perjanjian restrukturisasi kredit atas KMK 1 dan KMK 2 dengan perubahan sebagai berikut:

1. Fasilitas kredit dengan limit sebesar Rp294.477.975.221 yang terdiri dari:
 - a. Fasilitas KMK 1, maksimal sebesar Rp147.238.987.611
 - b. Fasilitas KMK 1, maksimal sebesar Rp147.238.987.611
2. Fasilitas kredit bersifat *non-revolving*
3. Tujuan fasilitas untuk kredit modal kerja restrukturisasi
4. bunga pinjaman sebesar 8,5% per tahun
5. Jangka waktu fasilitas kredit sampai dengan 28 Februari 2028 dan jangka waktu perjanjian sampai dengan jumlah yang terutang telah dibayar lunas kepada bank berdasarkan perjanjian ini.
6. Fasilitas ini dijaminkan dengan:
 - Sertifikat HGB No. 901/Rawasari
 - Sertifikat HGB No. 1022/ Cikini
 - Sertifikat HGB No. 01005/Rorotan
 - Sertifikat HGB No. 01011/Rorotan
 - Sertifikat HGB No. 03103/Rorotan
 - Sertifikat hak milik atas satuan rumah susun (SHMSRS) No. 1133, 1226, 1210, 1200, 1182, 1180, 1211, 1183, 1171, 1164, 1163, 1158, 1157, 1201, 1145, 1146, 1152, 112, 1110, 1090, 1072, 1078, 1079, 1080, 1085, 985, 978, 992, 971, 998, 1021, 1212, Kedoya Utara.
7. Memelihara rasio keuangan sebagai berikut:
 - *Current ratio* minimal 1x
 - *Debt to equity ratio* maksimal sebesar 3x
 - *Debt service coverage ratio* minimal sebesar 100%

Berdasarkan Akta Notaris Dr. Agung Iriantoro S.H., M.H., No. 32 tanggal 29 Juni 2022, Perusahaan menandatangani perjanjian pemberian fasilitas Kredit Modal Kerja dengan *plafond* kredit sebesar Rp100.000.000.000. Fasilitas kredit bersifat *revolving* dan diberikan dengan tujuan sebagai tambahan modal kerja untuk operasional Perusahaan, serta dibebankan bunga pinjaman sebesar 8,50% per tahun. Fasilitas pinjaman berlaku sampai dengan 29 Juni 2023 dan perjanjian pinjaman berlaku sampai dengan jumlah yang terutang telah dibayar lunas kepada bank berdasarkan perjanjian ini.

Pembatasan penting mengenai perjanjian kredit ini adalah:

- Debitur tidak diperkenankan membayar/melunasi hutang pemegang saham.
- Mengikatkan diri sebagai penjamin hutang atau menjaminkan harta kekayaan perusahaan atau menjaminkan harta kekayaan perusahaan kepada pihak lain.
- Memperoleh fasilitas kredit atau pinjaman dari bank atau lembaga lain.
- Mengalihkan/menyerahkan kepada pihak lain, sebagian atau seluruhnya atas hak dan kewajiban yang timbul berkaitan dengan fasilitas kredit Perusahaan Umum Daerah Pembangunan Sarana Jaya.
- Debitur wajib memberitahukan perubahan pengurus dan pemegang saham dan melakukan perubahan struktur permodalan membagi dividen dan melakukan penyertaan modal pada perusahaan lain.

PERUSAHAAN UMUM DAERAH PEMBANGUNAN SARANA JAYA DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN
UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR PADA TANGGAL 31 DESEMBER 2023 DAN 2022
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

26. IMBALAN PASCA KERJA

Dana Pesangon

Perusahaan menyelenggarakan Program Pengelolaan Dana Pesangon (PPDP) untuk semua karyawan yang memenuhi syarat yang dikelola oleh Dana Pensiun Lembaga Keuangan (DPLK) Bank Rakyat Indonesia.

Liabilitas Imbalan Kerja

Liabilitas imbalan kerja karyawan pada tanggal 31 Desember 2023 dan 2022 yang diakui dalam laporan posisi keuangan konsolidasian ditentukan melalui perhitungan aktuaria independen KKA Arya Bagiastra berdasarkan laporannya masing-masing tanggal 13 Maret 2024 dan 6 Februari 2023.

Asumsi-asumsi utama yang digunakan dalam menghitung liabilitas imbalan kerja karyawan pada tanggal 31 Desember 2023 dan 2022 adalah sebagai berikut:

	<u>2023</u>	<u>2022</u>
Tingkat diskonto	6,72%	6,98%
Tingkat kenaikan gaji rata-rata pertahun	5,00%	5,00%
Tabel mortalita	TMI 2019	TMI 2019
Usia pensiun normal	56 tahun	56 tahun
Tingkat cacat	10% dari TMI IV (2019)	10% dari TMI IV (2019)

Metode valuasi aktuaria sesuai dengan aturan pada PSAK No. 24 (REVISI 2015), dalam perhitungan kewajiban kini, biaya jasa kini serta biaya jasa lalu (*past service cost*) menggunakan metode *projected unit credit method* (PUC). Berdasarkan metode ini, manfaat imbalan kerja diakui secara prorata sesuai jasa atau dengan kata lain manfaat/imbalan dibagi tahun jasa, menganggap setiap periode jasa akan menghasilkan satu unit tambahan manfaat/imbalan dan mengukur setiap unit secara terpisah untuk menghasilkan kewajiban final.

a. Beban imbalan kerja bersih

Rincian beban imbalan kerja Perusahaan untuk tahun yang berakhir pada 31 Desember 2023 dan 2022 adalah sebagai berikut:

	<u>2023</u>	<u>2023</u>
Perusahaan		
Biaya jasa kini	1.101.692.492	2.041.926.300
Biaya bunga	962.466.778	374.841.788
Harapan dari Hasil Investasi	(165.871.760)	-
Pengakuan segera biaya jasa lalu yang <i>vested</i>	-	(774.948.824)
Dampak Kurtailmen/Penyelesaian	-	1.777.649.104
Jumlah	<u>1.898.287.510</u>	<u>3.419.468.368</u>

Jumlah beban imbalan kerja dari KSO Cilangkap yang menjadi bagian Perusahaan untuk tahun yang berakhir pada 31 Desember 2023 dan 2022 adalah sebagai berikut:

	<u>2023</u>	<u>2022</u>
Biaya jasa kini	-	137.568.488
Jumlah	<u>-</u>	<u>137.568.488</u>

b. Mutasi kewajiban imbalan kerja

Mutasi kewajiban imbalan kerja Perusahaan pada 31 Desember 2023 dan 2022 adalah sebagai berikut:

	<u>2023</u>	<u>2022</u>
Perusahaan		
Kewajiban imbalan kerja - awal tahun	13.779.856.494	5.780.420.086
Beban imbalan kerja yang diakui pada tahun berjalan	1.898.287.510	3.419.468.368
Iuran Perusahaan	(4.101.906.156)	-
Realisasi pembayaran manfaat	-	(2.074.177.997)
Perubahan program manfaat	-	6.395.505.875
Pendapatan komprehensif lain	(4.057.240.746)	258.640.162
Kewajiban imbalan kerja - akhir tahun	<u>7.518.997.102</u>	<u>13.779.856.494</u>
Saldo iuran DPLK	-	(465.755.718)
Jumlah kewajiban imbalan kerja Perusahaan	<u>7.518.997.102</u>	<u>13.314.100.776</u>
Jumlah kewajiban imbalan kerja entitas anak dan KSO		
Cilangkap	679.736.457	804.714.545
Jumlah	<u>8.198.733.559</u>	<u>14.118.815.321</u>

PERUSAHAAN UMUM DAERAH PEMBANGUNAN SARANA JAYA DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN
UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR PADA TANGGAL 31 DESEMBER 2023 DAN 2022
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

26. IMBALAN PASCA KERJA (lanjutan)

b. Mutasi kewajiban imbalan kerja (lanjutan)

Pada 2022, Perusahaan mengubah kebijakan terkait manfaat program di mana pada tahun 2021, manfaat yang diterima karyawan terkait imbalan kerja mengacu pada Undang-Undang Ketenagakerjaan No. 13/2003 sedangkan pada tahun 2022 kebijakan terkait manfaat yang diterima oleh karyawan mengacu pada Undang-Undang Cipta Kerja No. 11/2020. Perubahan manfaat ini, dihitung ulang oleh aktuaria dari tahun-tahun sebelumnya sehingga terdapat perubahan saldo awal kewajiban yang dibebankan pada saldo laba ditahan.

Jumlah kewajiban imbalan kerja dari entitas anak dan KSO Cilangkap yang menjadi bagian Perusahaan pada 31 Desember 2023 dan 2022 adalah sebagai berikut:

	<u>2023</u>	<u>2022</u>
KSO Cilangkap	-	137.568.488
PT Sarana Wisesa Properindo	679.736.457	667.146.057
Jumlah	<u>679.736.457</u>	<u>804.714.545</u>

c. Pendapatan komprehensif lain

Mutasi pendapatan komprehensif lain untuk tahun yang berakhir pada 31 Desember 2023 dan 2022 adalah sebagai berikut:

	<u>2023</u>	<u>2022</u>
Perusahaan		
Saldo awal	9.631.445.358	9.372.805.196
Keuntungan/kerugian aktuarial	(4.057.240.746)	258.640.162
Saldo akhir	<u>5.574.204.612</u>	<u>9.631.445.358</u>

27. PENDAPATAN DITANGGUHKAN

	<u>2023</u>	<u>2022</u>
Cibubur Junction	31.122.430.653	-
Hotel Mercure Cikini	10.324.820.925	-
Hotel Veranda	40.833.333.311	44.333.333.315
Bagian jangka pendek	<u>(3.500.000.000)</u>	<u>(3.500.000.000)</u>
Bagian jangka panjang	<u>78.780.584.889</u>	<u>40.833.333.315</u>

Bangunan Hotel Veranda di Jl. Kyai Maja No. 63, Kebayoran Baru, Jakarta merupakan pencatatan Aktiva Bangun serah Kelola (BTO) diatas tanah milik Perusahaan yang di atasnya dibangun hotel yang merupakan kerja sama antara Perusahaan dan PT Graha Pakubuwono Kusuma sesuai Akta Notaris Wenda Taurusita Amidjaja, SH No. 1 Tanggal 1 Februari 2012.

Pendapatan Ditangguhkan atas Bangunan Cibubur Junction, Hotel Mercure merupakan hasil perhitungan atas aset kerjasama operasi dengan sistem BOT atas bangunan yang akan diterima oleh Perusahaan pada akhir masa kerja sama. Nilai bangunan ditentukan dengan menghitung nilai sekarang dari nilai wajar aset tersebut pada saat akan diserahterimakan, yakni pada akhir masa kerja sama (Catatan 9).

28. PROVISI LITIGASI

Perusahaan menerima gugatan wanprestasi (Ingkar Janji) atas penjualan tanah yang terletak di Jl. Pondok Kelapa Kel. Pondok Kelapa, Kec. Duren Sawit, Jakarta Timur, Seluas 1.936 m² berdasarkan Nomor Perkara 296/Pdt.G/2017/PN. Jkt.Pst, dengan penggugat ahli waris dari Hj. Fatmah Abdullah Hariz. Perusahaan sebagai tergugat, dinyatakan menang pada tingkat Pengadilan Negeri sebagaimana putusan pada tanggal 27 Maret 2018. Selanjutnya gugatan dilanjutkan melalui banding pada Pengadilan Tinggi DKI Jakarta berdasarkan Nomor Perkara 434/PDT/2018/PT.DKI. Melalui putusan tanggal 4 September 2018, Perusahaan dinyatakan menang. Pihak lawan selanjutnya mengajukan peninjauan kembali melalui Mahkamah Agung berdasarkan Nomor Perkara 69/PK/Pdt/2022. Dari putusan Mahkamah Agung pada tanggal 23 Februari 2022, Mahkamah Agung mengabulkan permohonan peninjauan kembali dari pihak penggugat, membatalkan putusan Pengadilan Tinggi yang menguatkan putusan Pengadilan Negeri dan menyatakan Perusahaan telah melakukan wan prestasi atas penjualan tanah serta menghukum Perusahaan untuk melakukan pembayaran ganti kerugian sebesar Rp8.001.488.000 ditambah bunga 6% per tahun sejak diajukan gugatan. Saat ini Perusahaan masih dalam proses melakukan *Aanmaning*. Atas putusan ini, Perusahaan telah membentuk provisi litigasi sebesar Rp8.001.488.000 yang disajikan dalam laporan posisi keuangan konsolidasian per 31 Desember 2023 dan 2022.

PERUSAHAAN UMUM DAERAH PEMBANGUNAN SARANA JAYA DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN
UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR PADA TANGGAL 31 DESEMBER 2023 DAN 2022
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

29. MODAL

	<u>2023</u>	<u>2022</u>
PENYERTAAN MODAL DAERAH (PMD)		
Modal Dasar (Perda No. 11 Tahun 2018 dan No. 8 Tahun 2014)	10.000.000.000.000	10.000.000.000.000
Modal belum disetor	<u>(4.375.000.000.000)</u>	<u>(4.375.000.000.000)</u>
Modal telah disetor	<u>5.625.000.000.000</u>	<u>5.625.000.000.000</u>
Modal telah disetor terdiri atas:		
PMP Perda No. 2/1982 Jo. No. 6/1990	47.218.565.236	47.218.565.236
PMP <i>Privilege</i> Pemda DKI atas pembebasan tanah di Segitiga Senen	18.754.183.000	18.754.183.000
Keputusan Gubernur DKI Jakarta No. 1914 Tahun 2013 tentang Pemenuhan Penyertaan Modal Pemerintah Tahun 2013	130.000.000.000	130.000.000.000
Aset Tetap Tanah Rawa Bilal	30.022.600	30.022.600
Keputusan Gubernur DKI Jakarta No. 1189 Tahun 2014	200.000.000.000	200.000.000.000
Keputusan Gubernur DKI Jakarta No. 1879 Tahun 2014	543.000.000.000	543.000.000.000
Keputusan Gubernur DKI Jakarta No. 2312 Tahun 2017	125.000.000.000	125.000.000.000
Keputusan Gubernur DKI Jakarta No. 1851 Tahun 2018	935.997.229.164	935.997.229.164
Keputusan Gubernur DKI Jakarta No. 405 Tahun 2019	1.450.000.000.000	1.450.000.000.000
Keputusan Gubernur DKI Jakarta No. 1684 Tahun 2019	800.000.000.000	800.000.000.000
Keputusan Gubernur DKI Jakarta No. 1060 tahun 2020	450.000.000.000	450.000.000.000
Keputusan Gubernur DKI Jakarta No. 1062 tahun 2020	500.000.000.000	500.000.000.000
Perjanjian Investasi Tahun 2021 Nomor 2186/-071.242, 1511/-072.1	175.000.000.000	175.000.000.000
Perjanjian Investasi Tahun 2022 Nomor 535/-071.241, 776/-072.26	250.000.000.000	250.000.000.000
Jumlah Modal	<u>5.625.000.000.000</u>	<u>5.625.000.000.000</u>

30. SALDO LABA

	<u>2023</u>	<u>2022</u>
Saldo awal	17.764.369.784	48.773.358.468
Laba/(rugi) tahun berjalan	<u>(98.486.101.866)</u>	<u>79.284.588.948</u>
Sub jumlah	<u>(80.721.732.082)</u>	<u>128.057.947.416</u>
Penyesuaian	31.852.438.273	-
Dampak pelepasan tower A KSO NPK	(14.480.102.275)	-
Penyajian kembali	-	(110.293.577.631)
Saldo akhir	<u>(63.349.396.084)</u>	<u>17.764.369.785</u>

Penyesuaian saldo laba sebesar Rp31.852.438.273 terdiri dari :

- Penyesuaian sebesar Rp49.951.111.579 merupakan penyesuaian atas pengakuan investasi PT Totalindo Eka Persada Tbk (PT TEP) di Tower A KSO Nuansa Pondok Kelapa (KSO NPK). Merujuk pada Berita Acara Perhitungan Harga Satuan Rumah Susun pada Bangunan Menara Samawa (Tower A) Perusahaan telah memberikan dana talangan atas bagian porsi keuntungan kepada PT Totalindo Eka Persada, sehingga dengan adanya dana talangan tersebut seluruh kerugian dan keuntungan yang terjadi untuk tower A akan ditanggung seluruhnya oleh Perusahaan, oleh karena itu atas porsi modal PT TEP menjadi milik Perusahaan.
- Penyesuaian sebesar minus Rp17.002.103.845 merupakan reklasifikasi atas pengakuan saldo awal piutang Perusahaan kepada KSO NPK. Sedangkan untuk penyesuaian Rp374.724.066 merupakan penyesuaian bawaan dari tahun sebelumnya.
- Penyesuaian sebesar minus Rp1.471.293.526 merupakan penyesuaian yang terjadi pada KSO Cilangkap atas transaksi buybak atas unit subsidi DP Rp0.

Saldo dampak pelepasan Tower A merupakan hasil perhitungan atas porsi kepemilikan Perusahaan yang sebelumnya telah mengakui 73,12% dari akumulasi rugi atas Tower A, sehingga dampak pelepasan Tower A tercermin dalam laporan perubahan ekuitas sebesar Rp14.480.102.275.

Dasar pembagian laba adalah Perda DKI Jakarta No. 2 tanggal 20 Maret 1982 dan perubahannya Perda nomor 6 tanggal 5 November 1990 yang telah disahkan oleh Menteri Dalam Negeri No. 539.31-129 tanggal 7 Februari 1991:

Setoran PAD	:	40% dari laba bersih
Cadangan umum	:	30% dari laba bersih
Jasa produksi	:	15% dari laba bersih
Dana sosial dan pensiun	:	15% dari laba bersih

Dengan terbitnya Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 54 Tahun 2017 tentang Badan Usaha Milik Daerah terdapat perubahan penggunaan laba BUMD sebagaimana tercantum dalam Bab VIII tentang Penggunaan Laba BUMD.

PERUSAHAAN UMUM DAERAH PEMBANGUNAN SARANA JAYA DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN
UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR PADA TANGGAL 31 DESEMBER 2023 DAN 2022
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

31. KEPENTINGAN NON-PENGENDALI

	<u>2023</u>	<u>2022</u>
YKK Sarana Jaya	689.272.434	1.057.130.933
Jumlah	<u>689.272.434</u>	<u>1.057.130.933</u>

32. PENDAPATAN

	<u>2023</u>	<u>2022</u>
Land Bank		
Legalisasi dan Rekomendasi	10.345.046.543	1.618.978.923
Sewa Lahan di Rorotan	439.999.998	-
Pengembangan Lingkungan		
Pendapatan Mall Atrium Senen	5.602.229.275	9.680.113.070
Pendapatan Hotel Veranda	4.130.000.004	4.130.000.004
Pendapatan JPM	2.707.423.664	2.607.226.330
Mercure Cikini	2.322.403.248	609.999.996
Pendapatan STS - Fasilitas Lingkungan	584.588.004	607.364.160
Pendapatan Pulo Jahe - CBD	447.999.996	2.060.283.330
Sub jumlah	<u>26.579.690.732</u>	<u>21.313.965.813</u>
Pengelolaan Aset		
Menara Swasana	27.628.334.582	53.973.048.328
Cibubur Junction	18.112.983.488	1.854.545.456
Menara Kanaya	12.182.629.500	9.829.761.014
Gedung Sarana Jaya	10.539.399.381	9.549.423.149
Naya Cikini	8.967.356.842	8.872.434.000
Palma Citra	7.416.644.422	807.899.188
Pondok Kelapa Town Square (POKETS)	3.386.358.040	3.644.233.185
Naya Pramuka	2.597.150.849	8.102.137.659
Kemari Menteng	681.666.669	-
Eks. Jaya Gas	540.000.000	-
Mall Ikan	230.000.004	230.000.004
Wang Residence	212.477.477	-
Naya Menteng	51.004.231	6.020.228.200
Sub jumlah	<u>92.546.005.485</u>	<u>102.883.710.183</u>
Pendapatan Operasional Lainnya		
Jasa Outsourcing	72.300.513.682	25.356.528.552
Pendapatan Parkir	10.419.465.984	4.489.751.939
Pengelolaan Gedung	9.144.790.223	759.937.678
Kuliner	183.851.733	304.078.290
L'Avenue	222.522.522	3.327.165.256
Pengembangan IT	557.420.000	-
Sub jumlah	<u>92.828.564.144</u>	<u>34.237.461.715</u>
JUMLAH	<u>211.954.260.361</u>	<u>158.435.137.711</u>

Pendapatan Sisa Kavling Pulo Jahe adalah penerimaan penjualan tanah di Pulo Jahe berdasarkan PPJB dengan H. Jan Siregar, Mufid Rosidin dan Sapto Wardoyo.

Penjualan Apartemen Menara Kanaya Nuansa Cilangkap sebanyak 33 unit apartemen, pendapatan dan beban pokok penjualan tersebut diakui pada laporan keuangan KSO Nuansa Cilangkap.

Penjualan Apartemen Menara Samawa Nuansa Pondok Kelapa tahun 2023 dan 2022 masing-masing sebanyak 29 dan 52 unit. Penjualan Apartemen Menara Swasana Nuansa Pondok Kelapa tahun 2023 dan 2022 masing-masing sebanyak 40 dan 101 unit. Pendapatan dan beban pokok penjualan tersebut diakui pada laporan keuangan KSO Nuansa Pondok Kelapa.

Penerimaan Palma Citra merupakan penerimaan rutin dari PT Bima Sarana Perkasa atas kompensasi kerja sama pengelolaan Apartemen Palma Citra di Jalan Gatot Subroto Jakarta Selatan.

Pendapatan Pulo Jahe CBD merupakan pendapatan persewaan hunian berupa ruko di Pulo Jahe.

PERUSAHAAN UMUM DAERAH PEMBANGUNAN SARANA JAYA DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN
UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR PADA TANGGAL 31 DESEMBER 2023 DAN 2022
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

32. PENDAPATAN (lanjutan)

Pendapatan Hotel Veranda merupakan pengakuan pendapatan kerja sama pengelolaan berdasarkan pola Bangun Serah Guna dengan PT Graha Pakubuwono Kusuma. Nilai pendapatan adalah nilai penyerahan bangunan yang diakui secara proporsional selama 20 tahun dan pembayaran kompensasi masa pengelolaan selama 20 tahun.

Pendapatan Hotel Mercure Cikini merupakan pengakuan pendapatan kerja sama berdasarkan pola Bangun Guna Serah dengan PT Imesco Sejahtera Utama dimana nilai pendapatan adalah nilai kompensasi pengelolaan selama 20 tahun.

Pendapatan Gedung Sarana Jaya merupakan pengakuan atas penyerahan Gedung Sarana Jaya di Jalan Budi Kemuliaan I No 1 dengan nilai penyerahan sebesar Rp127.408.717.279 yang diakui proporsional selama 3 (tiga) tahun sejak berakhirnya masa kerja sama Bangun Guna Serah dengan PT Getraco Utama. Pada saat yang sama perusahaan menyewakan kembali gedung Sarana Jaya yang telah diterima perusahaan kepada PT Getraco Utama selama 3 (tiga) tahun.

Pendapatan Naya Pramuka merupakan pendapatan dari persewaan gedung yang diperuntukan untuk perkantoran di Jalan Rawamangun No.59, Jakarta Pusat.

Pendapatan Naya Cikini merupakan pendapatan dari persewaan gedung yang diperuntukan untuk perkantoran di Jalan Cikini Raya No. 42, Jakarta Pusat.

Pendapatan Naya Menteng merupakan pendapatan dari persewaan gedung yang diperuntukan untuk perkantoran di Jalan Cikini Raya No. 84-86, Jakarta Pusat.

Pendapatan Fasilitas STS merupakan pendapatan atas perjanjian Perusahaan dengan PT Plaza Adika Lestari, sesuai dengan perjanjian nomor 0094/PAL/LGL/LT-KSTS/IV/2020 dan 333/-1.712 tanggal 14 April 2020 tentang Perjanjian Pengelolaan Fasilitas Lingkungan Terbuka Komplek Segitiga Senen.

Pendapatan Jembatan Penyeberangan Multiguna Tanah Abang adalah penerimaan sewa sebanyak 446 unit kios pada area penghubung antar moda transportasi Transjakarta dengan Stasiun Kereta Api dan Pusat Perdagangan Tanah Abang di Jalan Jatibaru Raya, Tanah Abang, Jakarta Pusat dan merupakan dalam area pengembangan Sentra Primer Tanah Abang (SPTA).

Pendapatan Mall Atrium Senen merupakan pendapatan yang dihitung secara proporsional atas sewa jangka panjang Mall Atrium Senen Jalan Senen Raya, Jakarta Pusat yang telah diterima dimuka dan diakui pendapatan dimulai tahun 2017 sampai dengan 2037, dan pengakuan penyerahan Gedung Mall Atrium Senen dengan nilai penyerahan sebesar Rp122.598.554.712 diakui proporsional selama 20 tahun sejak berakhirnya masa kerja sama Bangun Guna Serah dengan PT Plaza Adika Lestari pada tahun 2002 sampai dengan tahun 2022.

Pendapatan Pondok Kelapa Town Square (POKETS) merupakan pendapatan sewa bangunan oleh tenant pusat perbelanjaan pada di Mall Pondok Kelapa Town Square Jalan Pondok Kelapa Raya, Jakarta Timur.

Pendapatan Cibubur Junction merupakan pengakuan pendapatan atas kerja sama berdasarkan pola Bangun Guna Serah dengan PT Cibubur Utama di Mall Cibubur Junction di Jalan Jambore, Jakarta Timur, pendapatan adalah nilai kompensasi pengelolaan selama 20 tahun dan pengakuan proporsi atas nilai uang muka yang telah diterima.

Pendapatan Mall Ikan Higienis merupakan pengakuan pendapatan atas kerja sama berdasarkan pola Bangun Guna Serah dengan PT Putra Kirana Sentosa di Tanah Milik Perusahaan yang dibangun bangunan Pusat Ikan Higienis di Jalan Penjernihan, Jakarta Pusat, pendapatan adalah nilai kompensasi pengelolaan selama 20 tahun.

Pendapatan Jasa Rekomendasi dan Legalisasi merupakan pendapatan atas penerbitan Surat Keterangan/Rekomendasi dan pemohon dikenakan biaya administrasi berdasarkan Keputusan Direksi Perusahaan Daerah Pembangunan Sarana Jaya Nomor 31 Tahun 2015 tanggal 26 Juni 2015 tentang Prosedur Pemberian dan Persyaratan Administrasi Penerbitan Surat Keterangan/Rekomendasi atas tanah diatas bidang tanah sertifikat hak pengelolaan atas nama PD Pembangunan Sarana Jaya, Surat Izin Penunjukan Penggunaan Tanah (SIPPT) dan Bukti Kepemilikan atas tanah dan atau bangunan lainnya yang dikeluarkan oleh PD Pembangunan Sarana Jaya untuk keperluan Peralihan Hak, Perpanjangan Hak dan Pembebanan Hak Tanggungan.

Pendapatan Jasa Pengawasan dan Jasa Manajemen adalah pendapatan diluar kompensasi masa pengelolaan yang merupakan bagian dari perjanjian kerja sama pengelolaan dengan pola bangun kelola serah dalam Perjanjian Hotel Veranda, Mall Cibubur Junction, Mall Atrium Senen, Hotel Mercure Cikini.

PERUSAHAAN UMUM DAERAH PEMBANGUNAN SARANA JAYA DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN
UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR PADA TANGGAL 31 DESEMBER 2023 DAN 2022
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

33. BEBAN POKOK PENDAPATAN

	2023	2022
Land Bank		
Sewa Lahan di Rorotan	43.999.998	-
Pengembangan Lingkungan		
BPP Menara Swasana	36.500.357.370	55.913.264.354
BPP Menara Kanaya dan <i>Tower A</i>	14.694.096.937	10.207.951.314
BPP JPM	6.905.969.755	2.745.764.284
BPP Hotel Veranda	3.500.000.004	3.500.000.004
BPP Pulo Jahe - CBD	346.892.206	212.856.689
BPP Apartemen Wang Residence	94.197.884	182.668.040
BPP Mall Atrium Senen	-	4.086.618.488
BPP Sarana Square	-	14.128.257
Sub jumlah	62.041.514.156	76.863.251.430
Pengelolaan Aset		
Pondok Kelapa Town Square (POKETS)	9.441.981.003	9.139.961.227
Gedung Sarana Jaya	8.594.490.401	1.544.800.000
Naya Cikini	6.861.618.986	6.783.821.099
Naya Pramuka	4.403.553.350	5.676.544.624
Naya Menteng	3.033.761.350	4.378.258.441
Kemari Menteng	2.696.578.676	3.600.764.109
Sarana Jaya Tebet	241.570.186	246.408.907
Eks. Jaya Gas	174.331.412	125.078.683
Sub jumlah	35.447.885.364	31.495.637.090
Beban Pokok Operasional Lainnya		
Beban pokok jasa <i>outsourcing</i>	65.475.976.447	27.774.944.308
Beban pokok pengelolaan gedung	11.067.679.879	11.399.522.846
Beban pokok parkir	10.209.988.333	3.988.586.236
Pengembangan IT	286.901.743	-
Kuliner	146.207.564	232.723.013
L'Avenue	86.874.440	69.497.569
Diklat	12.384.912	-
Sub jumlah	87.286.013.318	43.465.273.972
Jumlah	184.819.412.836	151.824.162.492

34. BEBAN PEMASARAN

	2023	2022
Beban <i>marketing</i>	2.442.719.542	4.758.670.030
Beban <i>entertainment</i>	302.356.364	64.821.237
Komisi Penjualan	243.511.500	-
Beban operasional	-	7.660.695
Beban tangguhan	-	(771.536.841)
Jumlah	2.988.587.406	4.059.615.121

35. BEBAN ADMINISTRASI DAN UMUM

	2023	2022
Beban pegawai	66.007.380.181	57.087.656.552
Beban umum	27.039.808.482	39.319.717.047
Beban pajak	6.763.804.904	1.116.226.891
Beban kantor	4.551.239.889	3.617.250.496
Beban penyusutan dan amortisasi	2.387.416.924	8.574.903.423
Beban pemeliharaan dan perbaikan	1.252.288.033	2.196.353.474
Beban lain-lain	368.032.571	314.162.700
Jumlah	108.369.970.984	112.226.270.583

PERUSAHAAN UMUM DAERAH PEMBANGUNAN SARANA JAYA DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN
UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR PADA TANGGAL 31 DESEMBER 2023 DAN 2022
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

36. PENDAPATAN/(BEBAN) LAIN-LAIN

	2023	2022
Pendapatan bunga	2.874.523.862	2.706.015.821
Jasa giro	2.428.772.064	2.416.854.250
(Rugi)/laba atas operasi bersama	(1.308.920.895)	63.842.710
Cadangan kerugian piutang	-	(104.610.780.209)
Lain-lain	(16.131.479.547)	269.402.881.549
Jumlah	(12.137.104.516)	169.978.814.121

Rugi atas operasi bersama sebesar Rp1.308.920.895 merupakan pengakuan kerugian atas pelepasan tower A atas KSO Nuansa Pondok Kelapa. Merujuk pada Berita Acara Perhitungan Harga Satuan Rumah Susun pada Bangunan Menara Samawa (Tower A) Perusahaan telah memberikan dana talangan atas bagian porsi keuntungan kepada PT Totalindo Eka Persada, sehingga dengan adanya dana talangan tersebut seluruh kerugian dan keuntungan yang terjadi untuk tower A akan ditanggung seluruhnya oleh Perusahaan. Hal tersebut mengakibatkan Perusahaan mengakui akumulasi rugi laba atas penjualan tower A di tahun 2023 sebesar Rp54.473.778.170 dimana ada bagian yang dicatat ke saldo laba rugi (*Retained Earnings*) sebesar Rp51.164.857.275 dan dicatat ke saldo rugi tahun berjalan sebesar Rp1.308.920.895.

Cadangan kerugian piutang untuk tahun yang berakhir pada 31 Desember 2022 merupakan pencadangan atas piutang pembatalan pembelian tanah Rorotan atas nama Fiandy sebesar Rp71.000.000.000 dan penyisihan piutang PT Kualajaya Lestari sebesar Rp33.610.780.209.

Pendapatan lain-lain tahun 2022 antara lain merupakan nilai atas pengembalian piutang atas penyisihan piutang PT Kualajaya Realty pada Proyek Apartemen Pejaten Park Residence sebesar Rp42.110.780.209, Piutang PT Griya Sarana Akbar pada Proyek Apartemen Grand Zam-Zam Margonda sebesar Rp72.830.348.292, Piutang PT Laguna Alamabadi pada Pengakhiran Jual Beli Tanah Ujung Menteng sebesar Rp120.397.629.104, dan Piutang PT Reka Cipta Propertindo pada Proyek CBD Pulo Jahe sebesar Rp15.074.036.923, biaya manfaat pelaksanaan kerja sama pada proyek ITF/FPSA dengan PT Hidro Energi Persada dan *cost of money* atas perjanjian KSO Cilangkap dengan PT Cipta Multi Sarana dan pendapatan lain-lain.

37. INSTRUMEN KEUANGAN

Berikut ini adalah nilai tercatat dan estimasi nilai wajar atas aset dan liabilitas keuangan Grup pada tanggal 31 Desember 2023 dan 2022:

	31 Desember 2023	
	Nilai tercatat	Nilai Wajar
<u>Aset Keuangan</u>		
Kas dan setara kas	226.654.238.993	226.654.238.993
Piutang usaha – pihak ketiga	183.233.884.576	183.233.884.576
Piutang lain-lain – pihak ketiga	50.095.190.684	50.095.190.684
Investasi jangka panjang lainnya	4.025.141.075	4.025.141.075
Jumlah	464.008.455.328	464.008.455.328
<u>Liabilitas Keuangan</u>		
Utang usaha – pihak ketiga	70.895.153.151	70.895.153.151
Utang lain-lain – pihak ketiga	18.261.105.248	18.261.105.248
Beban akrual	6.245.849.453	6.245.849.453
Pinjaman bank	386.074.366.880	386.074.366.880
Jumlah	481.476.474.732	481.476.474.732

PERUSAHAAN UMUM DAERAH PEMBANGUNAN SARANA JAYA DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN
UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR PADA TANGGAL 31 DESEMBER 2023 DAN 2022
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

37. INSTRUMEN KEUANGAN (lanjutan)

	31 Desember 2022	
	Nilai tercatat	Nilai Wajar
Aset Keuangan		
Kas dan setara kas	439.613.667.328	439.613.667.328
Piutang usaha – pihak ketiga	93.165.896.633	93.165.896.633
Piutang lain-lain – pihak ketiga	33.788.950.652	33.788.950.652
Investasi jangka panjang lainnya	4.025.404.843	4.025.404.843
Jumlah	570.593.919.456	570.593.919.456
Liabilitas Keuangan		
Utang usaha – pihak ketiga	65.229.175.535	65.229.175.535
Utang lain-lain – pihak ketiga	15.456.493.453	15.456.493.453
Beban akrual	4.911.912.981	4.911.912.981
Pinjaman bank	400.000.000.000	400.000.000.000
Jumlah	485.597.581.969	485.597.581.969

38. PENGESAHAN LAPORAN KEUANGAN DAN PAD

Peraturan Gubernur Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 131 Tahun 2019 tentang Pembinaan Badan Usaha Milik Daerah Pasal 39 dan Pasal 46 menyatakan bahwa Direksi dan Badan Pengawas menyampaikan laporan tahunan yang telah diaudit dan laporan manajemen yang ditandatangani bersama Direksi dan Dewan Pengawas kepada Kepala Badan paling lambat 90 (sembilan puluh) hari kerja setelah tahun buku BUMD ditutup.

Jadwal pembayaran PAD dan tata caranya berdasarkan atau setelah diterimanya pengesahan Laporan Keuangan oleh Kepala BPBUMD Provinsi DKI Jakarta.

39. SIFAT DAN TRANSAKSI PIHAK-PIHAK BERELASI

Dalam kegiatan usaha normal, Grup melakukan transaksi dengan pihak berelasi yang dilakukan dengan syarat yang disepakati oleh para pihak. Entitas dianggap sebagai pihak berelasi dari Grup berkaitan dengan kesamaan partisipan dan manajemen.

Sifat Hubungan dengan Pihak-Pihak Berelasi

Sifat Relasi	Nama Pihak Berelasi	Jenis Transaksi
Entitas anak Operasi Bersama	PT Saranawisesa	Pengelolaan Gedung Pengelolaan Gedung
	Properindo	
Operasi Bersama Operasi Bersama	KSO Lebak Bulus	Pengelolaan Gedung Pengelolaan Gedung
	KSO Nuansa Pondok Kelapa	
	KSO Nuansa Cilangkap	

40. IKATAN PERJANJIAN

Dalam kegiatan usahanya, Perusahaan dan Entitas Anak melakukan transaksi tertentu dengan pihak-pihak yang mempunyai hubungan relasi, meliputi antara lain:

a. Nuansa Pondok Kelapa

Investasi pada proyek Nuansa Pondok Kelapa sesuai Akta Notaris Yurisca Lady Enggrani No. 7 Tanggal 15 Januari 2018 tentang Kerja sama Operasional, Perusahaan bekerja sama dengan PT Totalindo Eka Persada Tbk (Totalindo) untuk melaksanakan pembangunan hunian berserta fasilitasnya berupa 1 (satu) tower yang diperuntukan untuk menunjang dan mendukung program pemerintah dalam program hunian DP 0 diatas tanah seluas 14.381 m², di mana porsi penyertaan Totalindo sebesar 25%. Penyertaan tanah Totalindo sebesar Rp14.740.525.000 atau seluas ±3.595 m². Pada Tanggal 26 September 2018 dilakukan adendum PKS dengan mengubah luas kerja sama yang sebelumnya 14.381 m² menjadi 29.758 m² atau terdapat penambahan seluas 15.377 m², di mana penyertaan modal Totalindo menjadi sebesar Rp59.783.822.000 atau 14.581 m² atau sebesar 49%.

Berdasarkan Akta Notaris Yurisca Lady Enggrani S.H., No.27 tanggal 29 November 2019 tentang Adendum 3 Akta Perjanjian Kerja sama Operasional Pondok Kelapa, diantaranya dilakukan kesepakatan tentang dana talangan atas bagi hasil penjualan kepada Totalindo.

PERUSAHAAN UMUM DAERAH PEMBANGUNAN SARANA JAYA DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN
UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR PADA TANGGAL 31 DESEMBER 2023 DAN 2022
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

40. IKATAN PERJANJIAN (lanjutan)

a. Nuansa Pondok Kelapa (lanjutan)

Berdasarkan Akta Notaris Aslina Perangin-Angin, S.H., M.Kn No. 10 Tanggal 26 Agustus 2021 tentang Adendum 4 Perjanjian Kerja Sama Operasional Pondok Kelapa, diatur ruang lingkup kerja sama dengan menghentikan kerja sama pembangunan *Tower C* dan *Tower D* diatas tanah seluas 12.682 m² (tanah 10.540 m² fasum fasos 2.142, m²), di mana besaran porsi Totalindo sebesar 49% dibeli kembali oleh Perusahaan dengan harga Rp4.100.000 per m² atau senilai Rp28.025.781.670.

Berdasarkan Akta Notaris Aslina Perangin-Angin, S.H., M.Kn., No. 10 Tanggal 26 Agustus 2021 tentang Adendum 5 Perjanjian Kerja Sama Operasional Pondok Kelapa, diatur ruang lingkup kerja sama dengan *plotting* untuk hunian DP 0 sebanyak 480 unit pada lantai 13 sampai dengan lantai 21 di Menara Swasana (*Tower B*). Perubahan porsi masing-masing pihak pada kerja sama Menara Swasana (*Tower B*) yakni Perusahaan menjadi 90% dan Totalindo menjadi 10%. Porsi Totalindo sebesar 39% atas tanah pada Tower B seluas 10.123 m² (tanah seluas 8.414 m², fasum dan fasos seluas 1.709 m²) telah dibeli kembali oleh Perusahaan dengan harga Rp4.100.000 per m² atau senilai Rp17.806.893.374 termasuk PPN 10%.

Berdasarkan Akta Notaris Irma Bonita, S.H., No. 52 tanggal 26 Juli 2022 terkait Adendum 6 Perjanjian Kerja sama Operasional Pondok Kelapa antara Perusahaan dengan Totalindo ditentukan jangka waktu perjanjian KSO Pondok Kelapa sampai dengan 18 Agustus 2022.

Pada tanggal 19 Agustus 2022 dilaksanakan penandatanganan Berita Acara Pengakhiran Perjanjian Kerja sama Operasi Proyek Nuansa Pondok Kelapa. Dari pengakhiran tersebut terdapat beberapa kewajiban yang harus diselesaikan diantaranya penyelesaian *defect list*, penjualan yang tersendat dan penyelesaian administrasi lainnya, sehingga Perusahaan membentuk tim likuidasi. Terdapat beberapa surat tugas tentang penunjukan tim likuidasi, yang terakhir berdasarkan surat tugas No. 453/-071.2 tentang perpanjangan masa kerja tim likuidasi sampai dengan 31 Desember 2023.

Pada tahun 2023, terdapat pelepasan tower A atas KSO Nuansa Pondok Kelapa, merujuk pada Berita Acara Perhitungan Harga Satuan Rumah Susun pada Bangunan Menara Samawa (*Tower A*) Perusahaan telah memberikan dana talangan atas bagian porsi keuntungan kepada PT Totalindo Eka Persada, sehingga dengan adanya dana talangan tersebut seluruh kerugian dan keuntungan yang terjadi untuk tower A akan ditanggung seluruhnya oleh Perusahaan. Hal tersebut mengakibatkan Perusahaan mengakui akumulasi rugi laba atas penjualan tower A di tahun 2023 sebesar Rp54.473.778.170.

b. Lebak Bulus

Investasi pada Proyek Lebak Bulus merupakan Perjanjian kerja sama antara Totalindo dengan Perusahaan tentang kerja sama pengembangan lahan untuk pembangunan bangunan komersial dan hunian berikut fasilitas pendukungnya yang terletak di Jalan H. Ilyas, Lebak Bulus, Cilandak Jakarta Selatan dengan luas 18.854 m², sesuai dengan Berita Acara tanggal 22 November 2017. Pada tanggal 19 Desember 2018 dilakukan adendum 1 perjanjian yang didalamnya terdapat penambahan partner proyek yaitu PT Kalma Indocorpora (Kalma) dengan penyertaan sebesar 29% dan perubahan porsi penyertaan Totalindo menjadi 20%. Kalma juga menyerahkan tanah dalam proyek tersebut sebesar Rp44.673.300.000 yang dibayarkan langsung kepada Perusahaan sebagai pemilik tanah. Pada adendum 1 juga terdapat perubahan luas tanah yang diperjanjikan menjadi seluas 19.960 m². Pada tanggal 29 November 2019 dilakukan adendum 2 perjanjian mengenai perubahan porsi penyertaan, yaitu Totalindo sebesar 5% dan Kalma sebesar 44%.

Berdasarkan Adendum 3 Perjanjian Kerja sama Operasional No. 03 tanggal 29 Desember 2020 oleh Notaris Julius Bilal Tadjoeidin, S.H., M. Kn., Notaris di Tangerang, telah dilakukan beberapa perubahan lebih lanjut terhadap syarat dan ketentuan dalam Perjanjian KSO, antara lain tentang perubahan porsi penyertaan para pihak yakni 51% untuk Perusahaan, 10% untuk Totalindo dan 39% untuk Kalma.

Akta Perjanjian Perubahan dan Pernyataan Kembali Perjanjian Kerja sama Operasional Lebak Bulus No. 04 yang dibuat di hadapan Ati Mulyati, S.H., M.Kn., Notaris di Jakarta, di mana para pihak sepakat mengatur perubahan modal kerja sama pengembangan dan pembangunan menjadi Rp50.000.000.000. Kewajiban Perusahaan untuk menerbitkan sertifikat HGB atas tanah yang menjadi objek kerja sama, dan terdapat perubahan luasan yang semula seluas 19.510 m² menjadi 18.240 m², karena belum selesainya proses pembebasan tanah yang dilakukan oleh Perusahaan.

Berita Acara tanggal 25 Oktober 2021 tentang Kesepakatan Perubahan Serta Pengembalian Kelebihan dan kekurangan porsi penyertaan modal tanah terhadap kelebihan luas tanah pada Proyek Lebak Bulus, Jakarta Selatan, disepakati bahwa terhadap perubahan luasan objek kerja sama menyebabkan adanya kelebihan bayar yang dilakukan oleh Totalindo sebesar Rp18.167.205.494 dan kekurangan bayar yang belum dilaksanakan oleh Kalma sebesar Rp4.483.940.883.

**PERUSAHAAN UMUM DAERAH PEMBANGUNAN SARANA JAYA DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN
UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR PADA TANGGAL 31 DESEMBER 2023 DAN 2022**
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

40. IKATAN PERJANJIAN (lanjutan)

b. Lebak Bulus (lanjutan)

Pada tahun 2023 terdapat Perjanjian Pembelian Kembali (Buyback) atas Porsi Penyertaan Kerjasama PT Totalindo Eka Persada Tbk (PT TEP) Pada Proyek Azraya TOD Lebak Bulus yang dicantumkan pada Akta No 46 tanggal 18 April 2023 oleh Notaris Irma Bonita, S.H., dimana pada pasal 1 dijelaskan Perusahaan membeli kembali porsi penyertaan kerjasama PT TEP sebesar 7,0595% atas Tanah seluas 18.175 m² di Proyek Azraya dengan harga Rp38.491.923.750, atas saldo *buy back* tersebut dicatat sebagai aset real estate.

c. Nuansa Cilangkap

Investasi pada Proyek Cilangkap merupakan perjanjian kerja sama operasi antara Perusahaan, Totalindo dan Kalma tentang pelaksanaan pengembangan dan pembangunan hunian beserta fasilitasnya di mana sebagian diperuntukan untuk menunjang atau mendukung program Pemerintah Provinsi DKI Jakarta dalam rangka menyediakan hunian bagi masyarakat DKI Jakarta dengan DP Rp0 yang terletak di Kelurahan Cilangkap, Kecamatan Cipayung, Jakarta Timur seluas ±29.582 m² sesuai akta Notaris Yurisca Lady Enggrani S.H., No. 19 Tanggal 19 Desember 2018 dengan porsi Perusahaan sebesar 55%.

Berdasarkan Akta Notaris Yurisca Lady Enggrani, S.H., M.Kn., No. 01 Tanggal 16 April 2020 tentang Addendum 2 Akta Perjanjian Kerja sama Operasional diatur tentang perubahan porsi para pihak terutama pada *tower* DP 0 di mana Perusahaan sebesar 90% dan Totalindo menjadi sebesar 10%. Tidak ada perubahan untuk porsi kerja sama pada *tower* komersial yakni Perusahaan sebesar 55% dan Totalindo sebesar 45%.

Berdasarkan Akta Notaris Aslina Perangin-Angin, S.H., M.Kn., No. 4 Tanggal 12 Juli 2021 tentang Addendum 3 Perjanjian Kerja Sama Operasional, diatur ruang lingkup kerja sama yang sebelumnya seluas ±29.582 m² menjadi seluas ±7.395,5 m² dari sisa tanah seluas ±22.186,5 m² di mana porsi Totalindo sebesar 45% pada *tower* komersial dibeli kembali oleh Perusahaan dengan harga Rp5.400.000 per m² atau senilai Rp53.913.195.000.

Berdasarkan Addendum 4 Nomor 1456/-072.tanggal 26 Juni 2023 Perjanjian Kerjasama Operasional Antra Perumda Pembangunan Sarana Jaya dengan PT Totalindo Eka Persada Tbk (PT TEP) tentang Perubahan Akta Perjanjian Kerjasama Nomor 19 tanggal 19 Desember 2018 tentang Kerjasama Pengembangan dan Pembangunan Proyek Rumah Susun DP 0 Rupiah dan Apartemen milik berikut fasilitasnya. Para pihak sepakat untuk mengubah klausul dan menandatangani Addendum 4 yang berisikan:

1. Terdapat perubahan luasan lahan Tower A yang sebelumnya 7.395,5 m² menjadi 6.408 m².
2. Terdapat perubahan porsi kepemilikan atas tanah dan bangunan tower hunian DP Rp0 dimana sebelumnya porsi PSJ 90% dan PT TEP 10%, menjadi porsi PSJ 91,84% dan PT TEP 8,16%.
3. Terdapat perubahan jangka waktu perjanjian KSO Cilangkap yang awalnya 4 tahun 6 bulan, terhitung 19 Desember 2018 sampai dengan 16 Juni 2024, menjadi sampai dengan 31 Desember 2024.
4. Terdapat perubahan modal kerjasama dimana modal kerjasama pengadaan tanah Tower A seluas 6.408 m² beserta fasilitas sarana prasarana dan/atau infrastruktur kawasan proyek KSO Cilangkap yang diperuntukan pada tower A seluas 3.108,84 m² adalah sebesar Rp52.793.984.908 yang menjadi kewajiban para pihak berdasarkan porsi penyertaan masing-masing.
5. Terdapat perubahan modal pengembangan dan pembangunan yang diperkirakan sebesar Rp301.747.594.640 yang disetor seluruhnya dan ditanggung secara proporsional sesuai porsi masing-masing pihak.
6. Modal Kerjasama Pengembangan dan Pembangunan yang telah terealisasi adalah Rp292.660.932.392 berdasarkan Laporan Keuangan Badan KSO per tanggal 18 Juni 2023.

d. Perusahaan melaksanakan kerja sama dengan PT Plaza Adika Lestari untuk pengelolaan bangunan Gedung Plaza Atrium Segitiga Senen untuk Periode Tahun 2017 Hingga Tahun 2037, sebagaimana Akta Notaris Jimmy Tanal, SH. Perjanjian Kerjasama Pengelolaan No. 42 tanggal 8 Oktober 2010. Akta Notaris Jimmy Tanal, SH. Addendum I Perjanjian Kerjasama Pengelolaan No. 137 tanggal 12 Agustus 2011 jo. Akta Notaris A. Wahono P., SH. Addendum II Perjanjian Kerjasama Pengelolaan No. 29 tanggal 13 Desember 2016. Sehubungan dengan status dalam pailit (*going concert*) PT Plaza Adika Lestari, telah ditandatangani Akta Notaris Ny. Trie Sulistiowarni, SH., Perjanjian Novasi atas Perjanjian Kerjasama Pengelolaan Gedung Atrium Senen tanggal 16 Agustus 2023, di mana hak, kewajiban dan tanggung jawab PT Plaza Adika Lestari dialihkan kepada PT Euro Tanada selaku pemegang.

e. Perusahaan mengadakan perjanjian kerja sama dengan PT Graha Pakubuwono Kusuma untuk kerja sama pembangunan dan pengelolaan bangunan apartemen/perkantoran/hotel terletak di atas tanah milik PD Pembangunan Sarana Jaya di Jl. Kyai Maja no. 63, Jakarta Selatan.

f. Perusahaan mengadakan perjanjian kerja sama dengan PT Cibubur Utama untuk kerja sama pendayagunaan, pembangunan dan pengembangan gedung pusat perbelanjaan beserta fasilitasnya di atas tanah milik Perusahaan yang terletak di Jl. Jambore, Cibubur, Jakarta Timur.

**PERUSAHAAN UMUM DAERAH PEMBANGUNAN SARANA JAYA DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN
UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR PADA TANGGAL 31 DESEMBER 2023 DAN 2022**
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

40. IKATAN PERJANJIAN (lanjutan)

- g. Perusahaan mengadakan perjanjian kerja sama dengan Direktorat Jenderal Peningkatan Kapasitas Kelembagaan dan Pemasaran Departemen Kelautan dan Perikanan serta PT Putra Kirana Sentosa untuk kerja sama melaksanakan pendayagunaan lahan untuk meningkatkan pemasaran hasil laut dan ikan melalui pembangunan dan pengembangan pasar (mal) ikan higienis beserta fasilitasnya di atas tanah milik Perusahaan yang terletak di Jl. Penjernihan, Jakarta Pusat.
- h. Perusahaan mengadakan perjanjian kerja sama dengan PT Bima Sarana Perkasa untuk kerja sama pendayagunaan lahan pembangunan Apartemen diatas tanah milik Perusahaan yang terletak di Jl. Gatot Subroto, Jakarta Selatan, dengan perjanjian kerja sama No. 191 tanggal 17 November 2003 sebagaimana telah diubah dengan addendum V Akta Perjanjian Kerja sama Operasional No. 5 tanggal 12 Juli 2019.
- i. Perusahaan mengadakan perjanjian kerja sama dengan PT Reka Cipta Propertindo untuk kerja sama melaksanakan pembangunan dan pengembangan lingkungan perumahan dengan sarana dan prasarananya serta fasilitas lainnya sesuai peruntukannya di atas lahan milik Perusahaan di Pulo Jahe Jakarta Timur. Berita acara pengakhiran PKS No. 5 Tanggal 28 November 2017 dan Berita Acara Penyelesaian Kewajiban Proyek tanggal 21 Desember 2022.
- j. Perusahaan mengadakan perjanjian dengan Kepolisian Republik Indonesia Daerah Metro Jaya untuk pinjam pakai penggunaan lahan Sarana Jaya untuk digunakan Markas Polisi Sektor Metro Tanah Abang dan Rumah Dinas, kesepakatan Bersama No. 119/-1.711.11 No: BA/23/11/2020/R0109.
- k. Perusahaan mengadakan perjanjian dengan PT Imesco Sejahtera Utama untuk melaksanakan pembangunan dan pengelolaan bangunan hotel bintang 4 beserta fasilitas dan utilitasnya di atas lahan milik Perusahaan di Jl. Cikini Raya No. 66-68, Jakarta Pusat.
- l. Perusahaan mengadakan perjanjian dengan PT Citicon Propertindo untuk melaksanakan pengembangan lahan untuk pembangunan apartemen, fasilitas pendukung dan bangunan komersial lainnya di Jl. Panjang, Kebon Jeruk, addendum II No.05 Tanggal 02 Oktober 2019, Kesepakatan Bersama Penyelesaian tertanggal 15 Agustus 2022.
- m. PT Saranawisesa Properindo, Entitas Anak, menandatangani perjanjian pembiayaan pembangunan Perumahan Puri Bintaro Ciputat, Tangerang Selatan, Banten dengan PT Laguna Alamabadi, yang bergerak dibidang pengembangan lahan perumahan. Sesuai dengan perjanjian tersebut, Perusahaan menyediakan dana sebesar Rp6.000.000.000, dengan bagi hasil keuntungan sebesar Rp3.000.000.000. Pengembalian dana pembiayaan dan bagi hasil keuntungan dilakukan secara bertahap dengan besaran jumlah sebagaimana telah disepakati dalam perjanjian. Perjanjian kerja sama ini untuk jangka waktu 8 September 2015 dan berakhir tanggal 8 Agustus 2017.
- n. Perusahaan mengadakan perjanjian dengan PT Kualajaya Realty untuk melaksanakan pengembangan lahan untuk pembangunan apartemen, fasilitas pendukung dan bangunan komersial lainnya, di Jakarta Selatan. Berita acara pengakhiran PKS dibuat Tanggal 30 Desember 2020. Berita Acara Penyelesaian Kewajiban tertanggal 9 November 2022.
- o. Perusahaan mengadakan perjanjian dengan PT Griya Sarana Akbar untuk melaksanakan pengembangan lahan untuk pembangunan apartemen, fasilitas pendukung dan bangunan komersial lainnya, di Jl. Margonda, Depok. Berita acara percepatan pengakhiran PKS dibuat tanggal 26 Desember 2018. Penandatanganan berita acara Penyelesaian Atas Percepatan Pengakhiran Perjanjian Kerja sama Pengembangan Tanah Untuk Pembangunan Apartemen dan Bangunan Komersial Lainnya Beserta Fasilitasnya Terletak di Jalan Margonda Raya, Kota Depok, Jawa Barat tanggal 26 Desember 2022.
- p. Perusahaan mengadakan perjanjian kerja sama dengan PT Totalindo Eka Persada dan PT Kalma Indocorpora tentang kerja sama pengembangan lahan untuk pembangunan bangunan komersial dan hunian berikut fasilitas pendukungnya yang terletak di Jalan H. Ilyas, Lebak Bulus, Cilandak Jakarta Selatan. Akta Perjanjian Kerja sama Operasional No. 19 tanggal 19 Desember 2018 sebagaimana telah diubah dalam addendum II Akta Perjanjian Kerja sama Operasional tanggal 29 November 2019, dan addendum III No.03 Tanggal 29 Desember 2020.
- q. Perusahaan mengadakan perjanjian kerja sama dengan PT Kalma Indocorpora tentang kerja sama pelaksanaan pembangunan gedung apartemen beserta sarana dan prasarananya yang terletak di Kelurahan Bintaro, Kecamatan Pesanggrahan Jakarta Selatan.
- r. Perusahaan mengadakan perjanjian dengan PT Totalindo Eka Persada Tbk untuk melaksanakan pengembangan dan pembangunan hunian beserta fasilitasnya di mana salah satu menara akan diperuntukan untuk menunjang atau mendukung program Pemerintah Provinsi DKI Jakarta dalam rangka menyediakan hunian bagi masyarakat DKI Jakarta dengan DP Rp0 yang terletak di Jl. H. Naman, Kelurahan Pondok Kelapa, Kecamatan Duren Sawit, Jakarta Timur, dengan Akta Perjanjian Kerja sama Operasional No. 7 tanggal 15t Januari 2018, sebagaimana telah dibuat adendum terakhir pada Akta Perjanjian Kerja sama Pondok Kelapa No. 27 tanggal 29 November 2019.
- s. Perusahaan mengadakan perjanjian dengan PT Abid Gaga Mantika tentang Kerja sama operasional penataan dan penertiban utilitas (Kabel Udara) No. 01 tanggal 3 Oktober 2019 dan No.05 tanggal 29 Desember 2020.
- t. Penandatanganan Kesepakatan Bersama Penyelesaian Terhadap Serah Terima Unit Apartemen Wang Residence tanggal 15 Agustus 2022.
- u. Penandatanganan Berita Acara Penyelesaian Atas Pengakhiran Perjanjian Kerja sama Pengembangan Tanah Untuk Pembangunan Apartemen Pejabat Park Residence tanggal 9 November 2022.

**PERUSAHAAN UMUM DAERAH PEMBANGUNAN SARANA JAYA DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN
UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR PADA TANGGAL 31 DESEMBER 2023 DAN 2022**
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

40. IKATAN PERJANJIAN (lanjutan)

- v. Penandatanganan Berita Acara Penyelesaian Atas Pengakhiran Perjanjian Kerja sama Pembangunan dan Pengembangan Bangunan Komersial di Area Komersial (CBD) Berupa Ruma Toko (Ruko) dan atau Rumah Kantor (Rukan) Berikut Fasilitas Beserta Sarana dan Prasarananya di Lingkungan Pemukiman Pulo Jahe, Kelurahan Jatinegara, Kecamatan Cakung, Kota Administrasi Jakarta Timur tanggal 21 Desember 2022.
- w. Penandatanganan berita acara Penyelesaian Atas Percepatan Pengakhiran Perjanjian Kerja sama Pengembangan Tanah Untuk Pembangunan Apartemen dan Bangunan Komersial Lainnya Beserta Fasilitasnya Terletak di Jalan Margonda Raya, Kota Depok, Jawa Barat tanggal 26 Desember 2022.
- x. Akta perjanjian pengikatan jual beli nomor 05 tanggal 26 Desember 2022 Notaris Linda Eviyanti, S.H., M.Kn., Tanah Margonda untuk penyelesaian Ujung Menteng.
- y. Akta perjanjian pengikatan jual beli nomor 06 tanggal 26 Desember 2022 Notaris Linda Eviyanti, S.H., M.Kn., Tanah Margonda untuk penyelesaian Ujung Menteng.
- z. Akta pernyataan lunas nomor 08 tanggal 26 Desember 2022 Notaris Linda Eviyanti, SH., M.Kn., Penyelesaian Tanah Ujung Menteng.
- aa. Berita acara serah terima unit Apartemen Pejabat Park Residence tanggal 27 Desember 2022.
- bb. Akta perjanjian pengikat jual beli nomor 09 tanggal 28 Desember 2022 Notaris Linda Eviyanti, S.H., MH., Tanah Margonda untuk penyelesaian Kerja sama pengembangan Apartemen Grand Zam Zam Margonda.
- cc. Berita acara pelunasan pembayaran kewajiban PT. Laguna Alamabadi tanggal 28 Desember 2022 – Penyelesaian Tanah Ujung Menteng.
- dd. Berita acara serah terima tanah Margonda untuk penyelesaian tanah Ujung Menteng 28 Desember 2022.
- ee. Berita acara serah terima tanah Margonda untuk penyelesaian Kerja sama pengembangan Apartemen Grand Zam Zam Margonda tanggal 28 Desember 2022.
- ff. Akta Perjanjian Pengelolaan Fasilitas Terbuka Senen dengan PT Plaza Adika Lestari tertanggal 21 Juni 2023. Akta Perjanjian Kerja sama Induk Pengembangan dan Pembangunan Lahan TB Simatupang dengan PT Jakarta Tourisindo tanggal 15 Juni 2023.

41. PERKARA HUKUM

- 1. Nomor perkara 638/Pdt.G/2022/ PN.Jkt.Pst perihal Gugatan Wanprestasi (Ingkar Janji) atas lahan yang terletak di Jl. Cikini Raya No. 107-109, RT. 010, RW. 004, Kel. Cikini, Kec. Menteng, Jakarta Pusat, Seluas 3.588 m². Sesuai dengan Putusan Perkara Hotel Batavia Harmoni dari PN Jakarta Pusat No 638/pdt.G/2022/PM Jkt.Pst tanggal 15 November 2023, memutuskan bahwa Perusahaan diwajibkan untuk memenuhi sisa pembayaran sesuai dengan PPJB No 27 dan 28 tanggal 27 Maret 2019 yang seharusnya Nilai Jual Beli Aset sebesar Rp645.000.000.000 namun baru dibayarkan Rp634.000.000.000 sehingga sisa yang belum dibayar Rp11.000.000.000.
- 2. Nomor perkara 296/Pdt.G/2017/ PN. Jkt.Pst perihal Gugatan Wanprestasi (Ingkar Janji) atas tanah yang terletak di Jl. Pondok Kelapa Kel. Pondok Kelapa, Kec. Duren Sawit, Jakarta Timur, Seluas 1.936 M², Penggugat Umar Saleh-Fauzi-Fuad Umar-Mansyur Umar Saleh-Fathiyah-Fajriah Umar-Saleh Umar-Abdullah Umar Saleh selaku Ahli Waris dari Hj Fatmah Abdullah Hariz, Perusahaan Umum Daerah Pembangunan Sarana Jaya sebagai tergugat, Kalah dalam proses Peninjauan Kembali di Mahkamah Agung, saat ini masih dalam proses Aanmaning. (Catatan 28)
- 3. Nomor perkara 71/Pdt.G/2023/PN. Jkt.Tim perihal Gugatan Perbuatan Melawan Hukum dimana Penggugat mengklaim sebagai pemilik sah atas tanah yang terletak di Jl. H. Naman RT. 002 RW. 002 Kelurahan Pondok Kelapa, Kecamatan Duren Sawit Jakarta Timur Seluas 13.195 m² berdasarkan Girik. Perkara perdata No.71 masih dalam tahapan persidangan dengan agenda kesimpulan dan bukti tambahan Penggugat tanggal 6 Februari 2024 dan tanggal 20 Februari 2024 sidang dengan agenda kesimpulan, sehingga untuk putusan dari Pengadilan belum ada.
- 4. Nomor perkara 188/Pdt.G/2023/PN.Bks perihal Gugatan Perbuatan Melawan Hukum dimana Pihak Tergugat 1-6 telah melakukan penggelapan dana modal usaha milik Penggugat. Sidang di PN. Bekasi dengan No. Perkara 188 tidak ada kaitannya/dampak hukumnya ke Perumda Pembangunan Sarana Jaya sebagai Turut Tergugat IV, hingga saat ini proses sidang tetap masih berjalan.
- 5. Nomor perkara 390/Pdt.G/2023/PN.Jkt.Pst perihal Gugatan Perbuatan Melawan Hukum dimana Penggugat mengklaim sebagai pemilik sah atas tanah yang terletak di Jl. H. Naman RT. 002 RW. 002 Kelurahan Pondok Kelapa, Kecamatan Duren Sawit Jakarta Timur Seluas 13.195 m² berdasarkan Girik. Perkara perdata No. 390 masih dalam tahapan persidangan dengan agenda putusan tanggal 21 Februari 2024 sehingga untuk putusan dari Pengadilan belum ada.
- 6. Nomor perkara 734/PDT.G/2021/PN.Jak.Pst perihal Gugatan perbuatan melawan hukum atas tanah di Jalan Tanah Rendah II Nomor 21, RT 011 RW 005 Kelurahan Kampung Bali Kecamatan Tanah Abang, Jakarta Pusat penggugat Musliha Rahasan dkk., Perusahaan Umum Daerah Pembangunan Sarana Jaya sebagai turut tergugat IV, Kontra memori kasasi : tanggal 28 Agustus 2023 dan saat ini masih menunggu putusan kasasi.

**PERUSAHAAN UMUM DAERAH PEMBANGUNAN SARANA JAYA DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN
UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR PADA TANGGAL 31 DESEMBER 2023 DAN 2022
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)**

41. PERKARA HUKUM (lanjutan)

7. Nomor perkara 450/Pdt.G/2023/PN.Jkt.Pst perihal Gugatan Perbuatan Melawan Hukum Penggugat (PT. Hidro Energi Persada) mengklaim Pihak Sarana Jaya (Tergugat) melakukan pemberhentian secara sepihak kerja sama pekerjaan penyelenggaraan fasilitas pengolahan sampah antara (FPSA) di dalam kota DKI Jakarta Wilayah Kecamatan Tebet. Perkara perdata No. 450 masih dalam tahapan persidangan dengan agenda saksi dari Penggugat tanggal 6 Februari 2024. dan agendakan selanjutnya saksi dari Tergugat tanggal 21 Februari 2024, sehingga untuk putusan dari Pengadilan belum ada.
8. Nomor perkara 3039/PDT.G/2023/PA.JS perihal Gugatan Waris atas sebidang tanah seluas 4.086 m² (empat ribu delapan puluh enam meter persegi) terletak di Jalan Stadion Lebak Bulus Rt.009, Rw.007 Lebak Bulus Jakarta Selatan dan seluas 2.248 m² (dua ribu dua ratus empat puluh delapan meter persegi) terletak di Jalan H. Ilyas Rt.009 Rw.007 Lebak Bulus Jakarta Selatan (Penggugat (Murtini binti H. Mukar, Dkk) Turut Tergugat IV (Sarana Jaya). Dalam putusan dijelaskan bahwa mengabulkan Eksepsi para tergugat dan menyatakan gugatan penggugat tidak diterima.
9. Nomor perkara 945/PDT/2023/PT.DKI Jo. 422/PDT.G/2017/PN.JKT.TIM perihal Gugatan perbuatan melawan hukum atas obyek tanah dengan girik C.422 Persil 150 Blok S III luas 1.000 m² Jl.naga raya Rt. 005 Rw.003 Kel.Duren Sawit Kec.Duren Sawit, Jakarta timur, Sarana Jaya sebagai tergugat mengajukan akta permohonan kasasi tanggal 1 Desember 2023.
10. Nomor perkara 287/Pdt.G/2023/PN.Jkt.Pst perihal Gugatan Perbuatan Melawan Hukum dimana Penggugat mengklaim sebagai pemilik sah atas tanah yang terletak di Jl. H. Naman RT. 002 RW. 002 Kelurahan Pondok Kelapa, Kecamatan Duren Sawit Jakarta Timur Seluas 13.195 m² berdasarkan Girik, Penggugat PT. Golden Twins Sotarduga.
11. Nomor perkara 260/Pdt.Bth/2022/PN. Jkt.Tim perihal Gugatan Perlawanan objek sengketa atas tanah yang terletak di Ujung Krawang RT. 0015, RW. 05, Kel. Pulo Gebang, Kec. Cakung, Jakarta Timur, Seluas 36.800 m².
12. Nomor perkara 410/PDT.G/2019/PN.Jak.Tim perihal Gugatan perbuatan melawan hukum atas tanah yang terletak di Ujung Krawang, Pulo Gebang, Jakarta Timur, penggugat H. Marjan, Perusahaan Umum Daerah Pembangunan Sarana Jaya sebagai tergugat III, putusan kalah PN perkara ditangani oleh PD Pembangunan Sarana Jaya. Sarana Jaya selaku pembeli yang beritikad baik memiliki keyakinan yang kuat dapat memenangkan perkara ini, Pembebasan Sarana Jaya telah mengikuti semua ketentuan yang berlaku mulai dari melakukan pengecekan fisik tanah hingga melakukan penelitian terhadap dokumen legalitas tanah yang telah berupa Sertipikat Hak Guna Bangunan (SHGB) a.n penjual (PT Adonara Propertindo).
13. Nomor perkara 155/Pdt.G/2020/PN.Jak.Tim perihal Gugatan perbuatan melawan hukum atas tanah di Pondok Kelapa RT 012 RW 004 Kelurahan Pondok Kelapa, Kecamatan Duren Sawit, Jakarta Timur seluas 3.300 m², penggugat Puadi, Perusahaan Umum Daerah Pembangunan Sarana Jaya sebagai turut tergugat I, putusan Perusahaan Umum Daerah Pembangunan Sarana Jaya menang di PN Jakarta Timur.
14. Nomor perkara 199/Pdt.G/2020/PN.Jak.Tim perihal Gugatan perbuatan melawan hukum atas tanah di Perumahan Jatinegara Indah Blok F RT. 09 RW. 05 Kelurahan Jatinegara, Kecamatan Cakung, Jakarta Timur, penggugat M Nurhasan, Perusahaan Umum Daerah Pembangunan Sarana Jaya sebagai turut tergugat III, Putusan Perusahaan Umum Daerah Pembangunan Sarana Jaya Menang di PN Jakarta Timur.
15. Nomor perkara 463/Pdt.G/2020/PN.Jak.Tim perihal Gugatan perbuatan melawan hukum atas tanah di Jalan Cilangkap Raya Jakarta Timur, penggugat H Suardi, Perusahaan Umum Daerah Pembangunan Sarana Jaya sebagai turut tergugat IV, perkara tersebut sudah dicabut gugatannya oleh penggugat.
16. Nomor perkara 478/Pdt.G/2020/PN.Jak.Tim perihal Gugatan perbuatan melawan hukum atas tanah di Jalan H Naman No. 85 Kelurahan Pondok Kelapa Kecamatan Duren Sawit Jakarta Timur, penggugat Bintang Simanjuntak, Perusahaan Umum Daerah Pembangunan Sarana Jaya sebagai turut tergugat II, Putusan Perusahaan Umum Daerah Pembangunan Sarana Jaya menang PN Jakarta Timur.
17. Nomor perkara 663/Pdt.G/2020/PN.Jak.Pus perihal Gugatan perbuatan melawan hukum atas tanah di Jalan Tanah Rendah II Nomor 21 Jakarta Pusat, penggugat Marianne Agnes Komariah, Perusahaan Umum Daerah Pembangunan Sarana Jaya sebagai turut tergugat IV, Putusan Perusahaan Umum Daerah Pembangunan Sarana Jaya Menang di PN Jakarta Pusat.
18. Nomor perkara 349/Pdt.G/2020/PN.Jak.Pus perihal Gugatan perbuatan melawan hukum atas tanah di Jalan Tanah Rendah II, Jakarta Pusat, penggugat Ida Farida, Perusahaan Umum Daerah Pembangunan Sarana Jaya sebagai turut tergugat I, Perusahaan Umum Daerah Pembangunan Sarana Jaya sudah menang di tingkat PN, karena tidak ada upaya hukum banding maka putusannya sudah mempunyai kekuatan hukum tetap.
19. Nomor perkara 745/Pdt.G/2021/PN.Jak.Barat perihal Gugatan perbuatan melawan hukum atas tanah di Jalan Bulak Teko RT 006 RW 08 Kelurahan Kalideres Kecamatan Kalideres, Jakarta Barat, penggugat Ny Tan Ai Lie dkk, Perusahaan Umum Daerah Pembangunan Sarana Jaya sebagai turut tergugat II, Kalah di PN Jakarta Barat. Perumda Pembangunan Sarana Jaya mengetahui perkara tersebut telah diputus tanggal 22 September 2023.
20. Nomor Perkara 55/pdt.G/2022/PN.Jkt.Pst perihal Gugatan Perbuatan Melawan Hukum atas tanah yang terletak di Jl. Tanah Rendah II No. 18-A, RT. 011, RW. 05, Kel. Kampung Bali, Kec. Tanah Abang, Jakarta Pusat, Seluas 298 M², Penggugat Tutty Marliska S, Tedjaningsih, Ida Tartini, Chairvanty, Sopiah, Erlika, Hikmat Carnelly, Yus Kustiwa, dan Imam Mulyana, Perusahaan Umum Daerah Pembangunan Sarana Jaya sebagai Turut Tergugat 2, Menang di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat.

**PERUSAHAAN UMUM DAERAH PEMBANGUNAN SARANA JAYA DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN
UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR PADA TANGGAL 31 DESEMBER 2023 DAN 2022
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)**

41. PERKARA HUKUM (lanjutan)

21. Nomor Perkara 410/Pdt.G/2019/PN.Jkt. Tim perihal Gugatan Perbuatan Melawan Hukum atas tanah yang terletak di Ujung Krawang RT. 0015, RW. 05, Kel. Pulo Gebang, Kec. Cakung, Jakarta Timur, Seluas 36.800 M², penggugat H. Marjan, Perusahaan Umum Daerah Pembangunan Sarana Jaya sebagai tergugat 3, kasasi kalah pada 10 November 2022 dan telah dilakukan eksekusi 2 November, dan masih dalam proses Peninjauan Kembali.
22. Nomor Perkara 332/pdt.G/2022/PN.Jkt.Pst perihal Gugatan Perbuatan Melawan Hukum atas tanah yang terletak di Jl. Tanah Rendah II No. 18-A, RT. 011, RW. 05, Kel. Kampung Bali, Kec. Tanah Abang, Jakarta Pusat, Seluas 298 M², Penggugat Tutty Marlika S, Tedjaningsih, Ida Tartini, Chairvanty, Sopiah, Erlika, Hikmat Carnelly, Yus Kustiwa, dan Imam Mulyana, Perusahaan Umum Daerah Pembangunan Sarana Jaya sebagai Turut Tergugat 2, Proses Duplik di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat.
23. Nomor Perkara 482/Pdt.G/2022/PN.Jkt.Pst perihal Gugatan Wanprestasi (Ingkar Janji) atas lahan yang terletak di Jl. Cikini Raya No. 107-109, RT. 010, RW. 004, Kel. Cikini, Kec. Menteng, Jakarta Pusat, Seluas 3.588 M², Penggugat PT Hotel Batavia Harmoni, Perusahaan Umum Daerah Pembangunan Sarana Jaya sebagai tergugat, Gugatan dicabut di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat 4 Oktober 2022.
24. Perkara 260/Pdt.Bth/2022/PN. Jkt.Tim Perihal Gugatan Perlawanan objek sengketa atas tanah yang terletak di Ujung Krawang RT. 0015, RW. 05, Kel. Pulo Gebang, Kec. Cakung, Jakarta Timur, Seluas 36.800 M², Perusahaan Umum Daerah Pembangunan Sarana Jaya sebagai Pelawan, Muhammad Mahfuz, Hj. Masamah, Marijati, Maulana Hasanuddin, Munawaroh, Marwiyah, Rifatul Mahmudah, Miftahul Janah, Muhamad Iqbal sebagai Terlawan 1, PT Adonara Propertindo sebagai Terlawan 2, PT Asmawi Agung sebagai terlawan 3. BPN Timur sebagai turut terlawan, saat ini masih dalam Proses acara Pembuktian Surat dari Para Pihak di PN Jakarta Timur

42. PERISTIWA SETELAH TANGGAL PELAPORAN

Berdasarkan Keputusan Dewan Pengawas Perumda Pembangunan Sarana Jaya Nomor 1 dan 4 Tahun 2024 tentang Pengangkatan Ketua dan Anggota Komite Remunerasi dan Nominasi pada tanggal 8 Januari 2024, sehingga mulai tanggal tersebut susunan Komite Remunerasi dan Nominasi menjadi:

	2024
Ketua	Arief Rachman
Anggota	Dariyah
Anggota	Erisar Risali Raib

Berdasarkan Keputusan Dewan Pengawas Perumda Pembangunan Sarana Jaya Nomor 2 Tahun 2024 tentang Pengangkatan Ketua Komite Pemantau Risiko pada tanggal 8 Januari 2024, sehingga mulai tanggal tersebut susunan Komite Pemantau Risiko menjadi:

	2024
Ketua	Arief Rachman

Berdasarkan Keputusan Dewan Pengawas Perumda Pembangunan Sarana Jaya Nomor 3 Tahun 2024 tentang Pengangkatan Anggota Komite Audit pada tanggal 8 Januari 2024, sehingga mulai tanggal tersebut susunan Komite Audit menjadi:

	2024
Ketua	Arief Rachman
Anggota	Nizar Suhendra
Anggota	Udin Saepudin

43. STANDAR AKUNTANSI YANG TELAH DITERBITKAN NAMUN BELUM BERLAKU EFEKTIF

Standar akuntansi yang telah diterbitkan sampai tanggal penerbitan laporan keuangan Grup, namun belum berlaku efektif diungkapkan berikut ini. Manajemen bermaksud untuk menerapkan standar yang dipertimbangkan relevan terhadap Grup pada saat standar tersebut berlaku efektif, dan dampak penerapan standar tersebut terhadap posisi dan kinerja keuangan Grup masih diestimasi pada tanggal selesainya laporan keuangan. Kecuali disebutkan lain, Grup tidak mengharapkan adopsi pernyataan tersebut di masa depan memiliki dampak signifikan terhadap laporan keuangan.

Mulai efektif pada atau setelah 1 Januari 2024

Amendemen PSAK 1: Liabilitas Jangka Panjang dengan Kovenan

Amendemen ini mengklarifikasi bahwa hanya kovenan yang harus dipatuhi entitas pada atau sebelum tanggal pelaporan yang akan memengaruhi klasifikasi liabilitas sebagai jangka pendek atau jangka panjang.

PERUSAHAAN UMUM DAERAH PEMBANGUNAN SARANA JAYA DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN
UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR PADA TANGGAL 31 DESEMBER 2023 DAN 2022
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

43. STANDAR AKUNTANSI YANG TELAH DITERBITKAN NAMUN BELUM BERLAKU EFEKTIF (lanjutan)

Mulai efektif pada atau setelah 1 Januari 2024 (lanjutan)

Amendemen PSAK 1: Liabilitas Jangka Panjang dengan Kovenan (lanjutan)

Amendemen tersebut berlaku efektif untuk periode pelaporan tahunan yang dimulai pada atau setelah 1 Januari 2024 dengan penerapan dini diperkenankan. Entitas menerapkan amendemen PSAK 1 (Oktober 2020) tentang klasifikasi liabilitas sebagai jangka pendek atau jangka panjang pada periode pelaporan tahunan yang dimulai pada atau setelah 1 Januari 2024 secara retrospektif sesuai dengan PSAK 25. Jika entitas menerapkan amendemen PSAK 1 (Oktober 2020) pada periode yang lebih awal setelah terbitnya amendemen PSAK 1 (Desember 2022) tentang liabilitas jangka panjang dengan kovenan, maka entitas juga menerapkan amendemen PSAK 1 (Desember 2022) pada periode tersebut. Jika entitas menerapkan amendemen PSAK 1 (Oktober 2020) untuk periode sebelumnya, maka entitas mengungkapkan fakta tersebut.

Amendemen PSAK 73: Liabilitas Sewa dalam Jual Beli dan Sewa-balik

Amendemen PSAK 73 Sewa menetapkan persyaratan yang digunakan penjual-penyewa dalam mengukur kewajiban sewa yang timbul dalam transaksi jual beli dan sewa-balik, untuk memastikan penjual-penyewa tidak mengakui jumlah setiap keuntungan atau kerugian yang terkait dengan hak guna yang dipertahankan.

Amendemen berlaku secara retrospektif untuk periode pelaporan tahunan yang dimulai pada atau setelah 1 Januari 2024. Penerapan dini diperkenankan.

44. TANGGUNG JAWAB MANAJEMEN DAN PERSETUJUAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Manajemen Perusahaan bertanggung jawab atas penyusunan laporan keuangan ini yang diselesaikan pada tanggal 25 Maret 2024.

45. INFORMASI TAMBAHAN

Per 31 Desember 2023 Perusahaan mencatat piutang PT Saranawisesa Properindo sebesar Rp 79.954.099.080, terdiri atas:

1. Pada tahun 2019, Perusahaan mencatat transaksi pengeluaran kepada PT SWP sebesar Rp10.564.871.571 yang terdiri dari Pinjaman dana investasi proyek Sarana Square sebesar Rp10.000.960.160 dan Rp563.911.411 yang merupakan setoran Modal untuk Pemenuhan Modal dasar menjadi Rp 34.580.000.000.
2. Pada Tahun 2020 dan 2021, Perusahaan memberikan Pinjaman dana investasi proyek Sarana Square kepada PT SWP sebesar Rp39.591.171.685 dan pinjaman untuk kegiatan operasional sebesar Rp2.259.967.235. Sehingga total pinjaman menjadi sebesar Rp41.851.138.920.
3. Berdasarkan Perjanjian pinjaman No.736/-072.1 dan 004/PKS/SWP-DIR/III/2023 tanggal 31 Maret 2023 Perusahaan memberikan modal kerja kepada PT SWP sebesar Rp15.000.000.000, dana ini diperuntukan sebagai modal kerja guna mendukung kegiatan usaha PT SWP.
2. Berdasarkan Akta Notaris Mellia, SH.,M.Kn. No.8 tanggal 29 November 2023 yang telah mendapat persetujuan dari Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia dengan Surat Keputusan No. AHU-AH.01.09-0130550 tanggal 21 Juni 2023. Terdapat penurunan modal PT SWP sebesar Rp13.100.000.000 sehingga modal pada PT SWP sebesar Rp36.220.000.000, penyertaan Perusahaan di PT SWP menjadi sebesar 94,47% atau sebesar Rp34.580.000.000. Atas penurunan modal tersebut belum disetorkan ke Perusahaan.

Dalam laporan keuangan konsolidasi per 31 Desember 2023, atas piutang tersebut sudah dilakukan eliminasi karena PT Saranawisesa Properindo merupakan entitas anak Perusahaan.



SARANA JAYA
REAL ESTATE DEVELOPMENT

Perumda Pembangunan Sarana Jaya

Gedung Sarana Jaya Lt. 3
Jl. Budi Kemuliaan I No. 1
Jakarta Pusat 10110

T. +62 21 352 2667
F. +62 21 385 3960
E. Info@sarana-jaya.co.id

www.sarana-jaya.co.id